



Menavigasi Perubahan dalam Jalan Hijrah

Navigating Change within 'Hijrah' Path

Laporan Tahunan **2024** Annual Report
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Laporan tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Bank, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi Bank pada masa mendatang serta lingkungan bisnis di mana Bank menjalankan kegiatan usaha. Bank tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya ini akan memberikan hasil yang diharapkan.

Laporan tahunan ini memuat kata "Bank," "Bank Muamalat," dan "Bank Muamalat Indonesia (BMI)" yang didefinisikan sebagai PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perbankan syariah. Adakalanya kata "Perusahaan" dan "Perseroan" juga digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Bank Muamalat Indonesia Tbk secara umum.

Laporan ini disajikan dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Angka pada tabel dan grafik dalam laporan ini menggunakan notasi dalam bahasa Indonesia. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di situs resmi Bank Muamalat Indonesia yaitu www.bankmuamalat.co.id.

Disclaimer and Limitation of Liability

This annual report discloses the financial statements, results of operations, projections, plans, strategies, policies, and objectives of the Bank, which are classified as forward-looking statements in the implementation of the prevailing regulations, except for historical matters. These statements involve potential risks, uncertainties, and may materially differ in their actual developments from those reported here in.

The prospective statements in this annual report are prepared on the basis of various assumptions regarding the current and future conditions of the Bank as well as the business environment in which the Bank conducts its business. The Bank does not guarantee that these documents whose validity have been ascertained will bring expected results.

The annual report contains the words "the Bank," "Bank Muamalat," and "Bank Muamalat Indonesia (BMI)" which are defined as PT Bank Muamalat Indonesia Tbk engaged in sharia banking activities. Oftentimes, the word "Company" is also used for ease of reference to address PT Bank Muamalat Indonesia Tbk in general.

The report is presented in two languages, Bahasa Indonesia and English, using the easily readable font type and size and with good quality prints. Figures in tables and graphs in this report use Indonesian notation. The Annual Report is available and downloadable from Bank Muamalat Indonesia's official website www.bankmuamalat.co.id.



Menavigasi Perubahan dalam Jalan Hijrah

Navigating Change within 'Hijrah' Path

Sebagai bank pertama murni syariah, Bank Muamalat secara aktif sejak tahun 2018 kembali menggaungkan semangat hijrah dengan tagar #ayohijrah di sosial media. Hijrah bukan hanya sebagai konsep, tetapi sebagai dorongan nyata untuk menjadi penggerak ekonomi syariah yang menghadirkan kebaikan dan keberkahan. Semangat ini menjadi landasan dalam menciptakan perbaikan menyeluruh, baik di tingkat individu dalam organisasi maupun dalam layanan kepada masyarakat.

Dalam perjalanan hijrah, perubahan adalah keniscayaan yang patut direspons dengan ketangkasan operasional dan strategi yang tepat, ditunjang sinergi internal serta dukungan strategis dari pemegang saham guna menjaga arah transformasi yang berkelanjutan. Dengan tetap memelihara nilai-nilai dasar syariah dan menyesuaikan diri dengan dinamika zaman, kami berkomitmen tidak hanya untuk beradaptasi, tetapi juga secara aktif membentuk masa depan perbankan syariah yang membawa keberkahan yang kaffah.

As the first purely sharia bank, Bank Muamalat has since 2018 echoed the spirit of hijrah, not only as a concept, but as a real drive towards becoming the sharia economy that brings goodness and blessings. This spirit serves as the foundation for creating overall improvements at the individual level, both within the organization and in public services.

In the journey of hijrah, change is something no one can escape, making it appropriate to respond with operational agility and the right strategy, supported by internal synergy and strategic support from shareholders, to keep the course of transformation toward sustainability. It is by living the sharia basic values and adapting to the dynamics of the times that we deliver on our commitment to not only adapting but also shaping the future of sharia banking that brings blessings in totality.

Keberlanjutan Tema

Theme Continuity



2022

Memperkuat Kapabilitas dan Sinergi untuk Mendorong Ekspansi Bisnis

Strengthening Capabilities and Synergy to Accelerate Business Expansion

Pada tahun 2022, pertumbuhan bisnis Bank Muamalat mulai menemukan momentumnya kembali, menyusul rampungnya proses peningkatan modal melalui PMHMETD dan penerbitan sukuk. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pemegang saham pengendali memperkuat permodalan Bank melalui *rights issue* dan penerbitan sukuk subordinasi, total senilai Rp3 triliun. Sampai dengan akhir tahun 2022, Bank Muamalat terus memperkuat kapabilitas dan sinergi, memperluas ekspansi bisnis dengan menggencarkan layanan perbankan ke ekosistem haji dan umroh serta berbagai sektor di ekosistem halal/Syariah, dan berhasil membukukan peningkatan kinerja yang signifikan dari tahun sebelumnya.

In 2022, Bank Muamalat's business growth have begun to regain its momentum, following the completion of the capital increase process through PMHMETD and sukuk issuance. The Hajj Financial Management Agency (BPKH) as the controlling shareholder also strengthened the Bank's capital through a rights issue and issuance of subordinated sukuk, totaling Rp3 trillion. Until the end of 2022, Bank Muamalat continues to strengthen its capabilities and synergies, expanding its business by intensifying banking services to the Hajj and Umrah ecosystems as well as various sectors in the halal/Sharia ecosystem, and succeeded to book a significant improvement in performance from the previous year.



2023

Membuka Cakrawala Pertumbuhan Baru untuk Profitabilitas Berkelanjutan

Creating New Growth Landscape for Sustainable Profitability

Sepanjang tahun 2023, Bank Muamalat terus mendorong momentum pertumbuhan yang telah mulai bergulir dari tahun sebelumnya, melalui percepatan pertumbuhan bisnis yang sehat dan peningkatan produktivitas. Penerapan strategi *business refocusing* menempatkan fokus pada segmen ritel, terutama layanan perbankan konsumen untuk nasabah individu, melalui segmen *enterprise banking* (ekosistem haji, institusi Islam dan Syariah) sebagai *entry gate*. Selanjutnya, layanan perbankan konsumen juga didukung oleh pengembangan digital banking untuk meningkatkan keterikatan nasabah individu dengan Bank Muamalat.

Berbagai inisiatif strategis tersebut mencerminkan upaya-upaya Bank Muamalat dalam membuka cakrawala pertumbuhan baru guna memastikan pertumbuhan dan profitabilitas yang berkelanjutan ke depan.

Throughout 2023, Bank Muamalat continued to drive the growth momentum that has started rolling from the previous year, through accelerating healthy business growth and increasing productivity. The implementation of a business refocusing strategy places focus on the retail segment, especially consumer banking services for individuals, through the enterprise banking segment (hajj ecosystem, Islamic and Sharia institutions) as the entry gate. Furthermore, consumer banking services are also supported by digital banking development to increase individual customer engagement with Bank Muamalat.

These various strategic initiatives reflect Bank Muamalat's efforts to open new growth horizons to ensure sustainable growth and profitability in the future.

2024

Menavigasi Perubahan, dalam Jalan Hijrah

Navigating Change within 'Hijrah' Path



Sebagai bank pertama murni syariah, sejak 2018 Bank Muamalat senantiasa menggaungkan semangat hijrah, bukan hanya sebagai konsep, tetapi sebagai dorongan nyata untuk menjadi penggerak ekonomi syariah yang menghadirkan kebaikan dan keberkahan. Semangat ini menjadi landasan dalam menciptakan perbaikan menyeluruh, baik di tingkat individu dalam organisasi maupun dalam layanan kepada masyarakat.

Dalam perjalanan hijrah, perubahan adalah keniscayaan yang patut direspons dengan ketangkasan operasional dan strategi yang tepat, ditunjang sinergi internal serta dukungan strategis dari pemegang saham guna menjaga arah transformasi yang berkelanjutan. Dengan tetap memelihara nilai-nilai dasar syariah dan menyesuaikan diri dengan dinamika zaman, kami berkomitmen tidak hanya untuk beradaptasi, tetapi juga secara aktif membentuk masa depan perbankan syariah yang membawa keberkahan yang kaffah.

As the first purely sharia bank, Bank Muamalat has since 2018 echoed the spirit of hijrah, not only as a concept, but as a real drive towards becoming the sharia economy that brings goodness and blessings. This spirit serves as the foundation for creating overall improvements at the individual level, both within the organization and in public services.

In the journey of hijrah, change is something no one can escape, making it appropriate to respond with operational agility and the right strategy, supported by internal synergy and strategic support from shareholders, to keep the course of transformation toward sustainability. It is by living the sharia basic values and adapting to the dynamics of the times that we deliver on our commitment to not only adapting but also shaping the future of sharia banking that brings blessings in totality.

Daftar Isi

Table of Contents

Keberlanjutan Tema Theme Continuity	2
Daftar Isi Table of Contents	4

6

Ikhtisar Kinerja 2024 **2024 Performance Highlights**

Ikhtisar Keuangan Financial Highlights	8
Ikhtisar Saham Stock Highlights	11
Informasi Penghentian Saham Sementara Information on the Temporary Stock Suspension	12
Aksi Korporasi Corporate Action	12
Ikhtisar Obligasi dan Sukuk Overview of Bonds and Sukuk	12
Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications	13
Peristiwa Penting Events Highlights	17

24

Laporan Manajemen **Management Report**

Laporan Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board Report	26
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	31
Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioner's Report	32
Dewan Komisaris Board of Commissioner	41
Laporan Direksi Board of Director's Report	42
Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior Board of Directors and Senior Executive Vice President	60
Surat Pernyataan Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Statement of the Board of Commissioners regarding Responsibility for the 2024 Annual Report of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	62
Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Statement of the Board of Directors regarding Responsibility for the 2024 Annual Report of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	63

64

Profil Perusahaan **Company Profile**

Identitas Perusahaan Company Identity	66
Riwayat Singkat Brief History	68
Logo Perusahaan The Company's Logo	71
Jejak Langkah Milestones	72
Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Value	74
Bidang Usaha Line of Business	78
Produk dan Layanan Products and Services	81
Wilayah Operasional Operational Area	95
Peta Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi Map of Business Network and Operating Areas	108
Struktur Organisasi Organization Structure	110
Komite Level Komisaris Board of Commissioners Level Committees	112
Komite Level Direksi Board of Directors Level Committees	113
Profil Dewan Pengawas Syariah Profile of the Sharia Supervisory Board	114
Profil Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners	120
Profil Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior Profile of the Board of Directors and Senior Executive Officers	126
Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Change in the Composition of the Board of Commissioners	131
Perubahan Komposisi Direksi Change in the Composition of the Board of Directors	131
Profil Pejabat Eksekutif Profile of Executive Officers	132
Statistik Karyawan Employee Statistics	137
Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali Information on Major and Controlling Shareholders	139
Kronologi Pencatatan Saham Share Listing Chronology	143
Kronologi Pencatatan Efek Lainnya Other Securities Listing Chronology	144
Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure	145
Profil Entitas Anak dan Entitas Asosiasi Profile of Subsidiaries and Associates	146

Daftar Entitas Anak dan Asosiasi List of Subsidiaries and Associates	149
Kantor Akuntan Publik Public Accounting Office	150
Nama dan Alamat Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal Name and Address of Capital Market Supporting Institutions and Professionals	150
Keanggotaan Asosiasi Membership in Associations	153
Informasi pada Website Perusahaan Information on the Company's Website	154

156

Analisis dan Pembahasan Manajemen **Management Discussion and Analysis**

Tinjauan Ekonomi Economic Overview	158
Tinjauan Industri Perbankan Banking Industry Overview	161
Tinjauan Posisi Bank Muamalat Indonesia di Industri Perbankan Overview of Bank Muamalat Indonesia in the Banking Industry	162
Tinjauan Kinerja Per Segmen Usaha Performance Overview by Business Segment	164
Tinjauan Kinerja Keuangan Financial Performance Overview	178

216

Fungsi Penunjang Bisnis **Business Support Function**

Sumber Daya Manusia Human Capital	218
Teknologi Informasi Information Technology	236
Manajemen Risiko Risk Management	248



330

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance	332
Komitmen dan Kebijakan Penerapan Commitment and Implementation Policy	334
Peningkatan Kualitas GCG Tahun 2025 GCG Quality Improvement in 2025	342
Penilaian Penerapan GCG Assessment of GCG Implementation	344
Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Companies	350
Struktur dan Mekanisme GCG GCG Structure and Mechanisms	368
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	371
Informasi Pemegang Saham Utama/ Pengendali Information on Main/Controlling Shareholders	398
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	399
Dewan Komisaris Board of Commissioners	416
Komisaris Independen Independent Commissioners	434
Direksi Board of Directors	438
Hubungan Afiliasi antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Affiliated Relationships between Members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Majority and/or Controlling Shareholders	459
Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Share Ownership Information Disclosure Policy	461
Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi Diversity Policy of the Board of Commissioners and Directors	462
Penilaian Dewan Komisaris dan Direksi Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors	465
Nominasi dan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi Nomination and Remuneration of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners, and the Board of Directors	475
Rapat Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi Meeting of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners, and the Board of Directors	480

Komite Audit Audit Committee	506
Komite Remunerasi dan Nominasi Nomination and Remuneration Committee	518
Komite Pemantau Risiko Risk Oversight Committee	530
Komite Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Committee	543
Komite di Bawah Direksi Committees Under the Board of Directors	550
Komite Pengarah Teknologi Informasi Information Technology Steering Committee	551
Asset & Liability Committee (ALCO) Asset & Liability Committee (ALCO)	558
Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	575
Komite Kebijakan Pembiayaan Financing Policy Committee	582
Komite Pembiayaan Financing Committee	587
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	594
Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Internal Audit Work Unit (IAU)	599
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	605
Audit Eksternal External Audit	611
Sistem Manajemen Risiko Risk Management System	612
Satuan Kerja Kepatuhan Compliance Unit	613
Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT & PPPSPM) Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Prevention of Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (APU, PPT & PPPSPM)	618
Perkara Penting Important Cases	621
Sanksi Administratif Administrative Sanction	622
Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Company Data and Information	623
Kode Etik Perusahaan Corporate Code of Conduct	629
Penerapan Kebijakan Anti Korupsi dan Strategi Anti <i>Fraud</i> Anti-Corruption/Fraud Policy and Its Socialization	631
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Perusahaan Transparency of the Company's Financial and Non-Financial Conditions	635
Pembelian Kembali Saham dan Obligasi Bank Muamalat Indonesia Buy Back of Bank Muamalat Indonesia Shares and Bonds	636

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik Buy Back of Bank Muamalat Indonesia Shares and Bonds	636
Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) Legal Lending Limit (LLL)	638
Kebijakan Perlindungan Nasabah Customers' Protection Policy	637
Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System	638
Kebijakan Pencegahan <i>Insider Trading</i> Insider Trading Prevention Policy	640
Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya Non-Halal Income and Its Use	640



642

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility

Ikhtisar Keberlanjutan Sustainability Performance Highlights	642



646

Laporan Keuangan Financial Statement

Referensi Silang Laporan Tahunan 2024 Annual Report Cross Reference 2024	825
Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Attachment Financial Services Authority Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2020 concerning Transparency and Publication of Reports for Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units	825
Referensi SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik SEOJK Reference No. 16/SEOJK.04/2021: Annual Report of Public Company	834

Ikhtisar Kinerja 2024

2024 Performance Highlights

Ikhtisar Keuangan Financial Highlights	8
Ikhtisar Saham Stock Highlights	11
Informasi Penghentian Saham Sementara Information on the Temporary Stock Suspension	12
Aksi Korporasi Corporate Action	12
Ikhtisar Obligasi dan Sukuk Overview of Bonds and Sukuk	12
Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications	13
Peristiwa Penting Events Highlights	17





Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

IKHTISAR POSISI KEUANGAN

Financial Position Highlights

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion, except otherwise stated)

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020	Description
Total Aset	60.023	66.953	61.364	58.899	51.241	Total Assets
Investasi pada Surat Berharga	31.127	30.525	27.855	26.936	12.185	Investments in Marketable Securities
Pembiayaan	16.763	22.465	18.822	18.041	29.077	Financing
Giro	5.660	6.096	4.878	6.148	4.106	Demand Deposits
Tabungan	16.770	16.642	16.122	16.033	14.543	Savings
Deposito	19.280	24.822	25.143	24.689	22.776	Time Deposits
Dana Pihak Ketiga	41.710	47.559	46.143	46.871	41.425	Third-party Funds
Total Liabilitas	54.804	61.737	56.162	54.913	47.275	Total Liabilities
Total Ekuitas	5.219	5.216	5.202	3.986	3.967	Total Equity
Investasi pada Entitas Asosiasi-Neto	322	322	347	347	408	Investments in Associates-Net

IKHTISAR LABA-RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

Summary of Comprehensive Profit-Loss and Income

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion, except otherwise stated)

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020	Description
Jumlah Pendapatan Bank sebagai Mudharib	2.134	2.153	1.764	2.140	2.432	Revenue From Fund Management by Bank as Mudharib
Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(1.954)	(1.949)	(1.435)	(1.387)	(1.610)	Share on Return of Temporary Syirkah Funds
Hak Bagi Hasil Milik Bank	180	205	330	753	822	Bank's Share in Profit Sharing
Pendapatan Operasional Lainnya	845	905	1.098	584	575	Other Operating Revenue
Beban Operasional Lainnya	(1.267)	(1.208)	(1.230)	(1.326)	(1.345)	Other Operating Expenses
Pembalikan (Beban) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Non Produktif	213	94	(130)	(16)	(64)	Provision for (Reversal of) Impairment Losses of Earning and Non Earning Assets
Laba (Rugi) Usaha	30	18	98	19	16	Income (Loss) Operations
Pendapatan (Beban) Non Operasional-Neto	(9)	(4)	(46)	(7)	(1)	Non-Operating (Expense)- Net
Laba sebelum Beban Pajak	20	14	52	13	15	Income Before Tax
Laba Bersih	18	13	27	9	10	Net Income
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Lain Bersih Setelah Pajak	(16)	6	0,12	10	19	Total Other Comprehensive Income (Loss) Net of Tax
Total Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	2	19	27	20	30	Total Comprehensive Income (Loss) for the Year

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion, except otherwise stated)

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020	Description
Laba (Rugi) Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:						Income (Loss) for the Year Attributable to
Pemilik Entitas Induk	2	19	27	9	10	Parent Entity Owner
Kepentingan Non Pengendali	-	-	-	-	-	Non-Controlling Interests
Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:						Comprehensive Income (Loss) for the Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk	2	19	27	19	10	Parent Entity Owner
Kepentingan Non Pengendali	-	-	-	-	-	Non-Controlling Interests
Laba per Saham Dasar (Rp dalam nilai penuh)	0,55	0,40	0,80	0,87	0,98	Basic Earnings per Share (Rp In full amount)

RASIO KEUANGAN PENTING

Important Financial Ratios

(dalam %, kecuali dinyatakan lain)

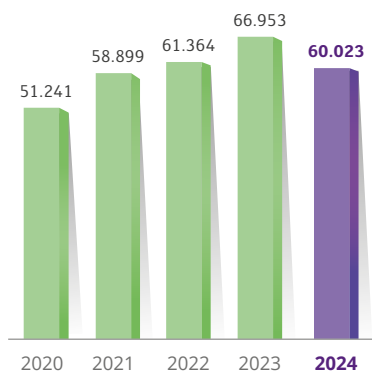
(in %, except otherwise stated)

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020	Description
Return on Assets (ROA)	0,03	0,02	0,09	0,02	0,03	Return on Assets (ROA)
Return on Equity (ROE)	0,42	0,28	0,53	0,20	0,29	Return on Equity (ROE)
Laba (Rugi) Usaha terhadap Pendapatan	0,62	0,84	5,55	0,35	0,33	Profit (Loss) toward Income
Laba (Rugi) terhadap Aset	0,03	0,02	0,04	0,02	0,02	Profit (Loss) to Assets
Laba (Rugi) terhadap Ekuitas	0,35	0,25	0,51	0,22	0,25	Profit (Loss) to Equity
Margin Pendapatan Bersih	0,33	0,37	0,66	1,59	1,94	Net Income Margin
Pembiayaan Bermasalah Bersih	2,74	0,66	0,86	0,08	3,95	Non Performing Financing Net
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM)	28,48	29,42	32,70	23,76	15,21	Capital Adequacy Ratio (CAR)
Financing to Deposits Ratio	40,08	47,14	40,63	38,33	69,84	Financing to Deposits Ratio
Rasio Dana Murah (CASA)	53,19	47,14	45,20	45,20	45,02	Current Account Saving Account
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	1.050,18	1.183,51	1.079,63	1.377,52	1.191,79	Liabilities to Equity Ratio
Rasio Liabilitas terhadap Aset	91,31	92,21	91,52	97,23	92,26	Liabilities to Assets Ratio
Rasio Lancar	9,11	13,26	17,31	15,67	8,97	Current Ratio
Aset Lancar terhadap Total Aset	7,18	10,75	13,78	12,99	7,93	Current Assets toward Total Assets
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	99,04	99,41	96,62	99,29	99,45	Operating Expenses to Operating Revenue
Cost to Income Ratio (CIR)	96,73	97,31	92,36	96,91	98,27	Cost to Income Ratio (CIR)
Giro Wajib Minimum (GWM)	2,69	7,50	7,50	3,00	3,24	Statutory Reserves
Posisi Devisa Netto	1,13	0,23	0,46	0,15	0,15	Net Open Position
Persentase Pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)						Percentage of Exceeding the Maximum Limit for Distribution of Funds (MLDF)
Pihak Terkait	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Related Parties
Pihak Tidak Terkait	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Non-related Parties



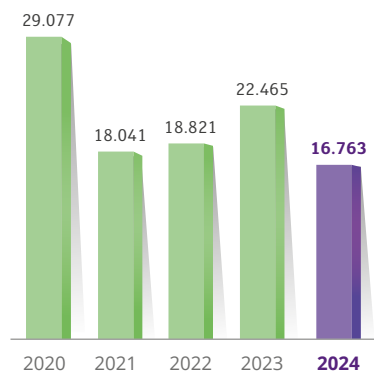
Total Aset Total Assets

dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah



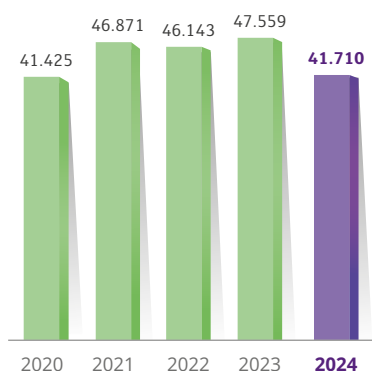
Pembiayaan Financing

dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah



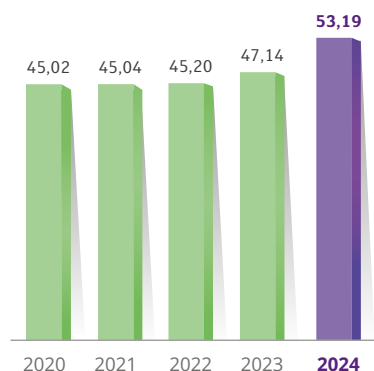
Total Dana Pihak Ketiga Total Third-Party Funds

dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah



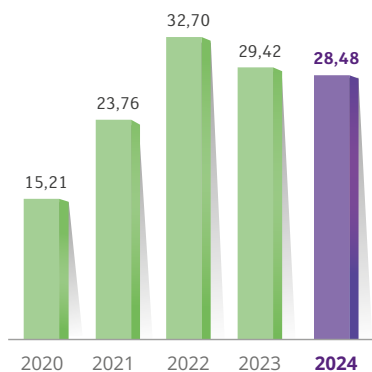
Rasio Dana Murah (CASA) Current Account Saving Account

dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah



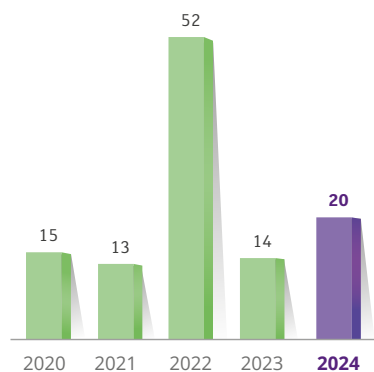
Rasio Kecukupan Modal Capital Adequacy Ratio

persentase (%) | percentage (%)



Laba Sebelum Beban Pajak Profit/Income Before Tax

dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah



Ikhtisar Saham

Stock Highlights

Bank Muamalat Indonesia merupakan perusahaan terbuka yang sahamnya hingga saat ini belum tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian, bukti kepemilikan saham Bank hingga saat ini masih dalam bentuk sertifikat saham atau warkat saham, yang disebut juga dengan Surat Kolektif Saham (SKS) dan Daftar Pemegang Saham (DPS) yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom.

Bank Muamalat Indonesia is a public company whose shares are not currently listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Thus, proof of ownership of the Bank's shares is currently in the form of share certificates or stock certificates, also known as collective Share Certificates (SKS) and Register of Shareholders (DPS), issued by the Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom.

Hingga diterbitkannya laporan ini, struktur saham PT Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

As of the publication of this report, the share structure of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk is as follows:

Keterangan	Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan Ownership		Description
		Jumlah Nominal Total Amount (Rp)	Persentase Percentage (%)	
Saham Seri A (nilai nominal Rp300)	551.099.450	165.329.835.000	1,0	A Series Shares (nominal value of Rp300)
Saham Seri B (nilai nominal Rp150)	28.231.134.434	4.234.670.165.100	50,9	B Series Shares (nominal value of Rp150)
Saham Seri C (nilai nominal Rp45)	26.666.666.667	1.200.000.000.015	48,1	C Series Shares (nominal value of Rp45)
Jumlah	55.448.900.551	5.600.000.000.115	100,0	Total
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-Up Capital				
Jumlah Saham Seri A	551.099.450	165.329.835.000	1,7	Total A Series Shares
Jumlah Saham Seri B	6.254.035.440	938.105.316.000	18,7	Total B Series Shares
Jumlah Saham Seri C	26.540.026.072	1.194.301.173.240	79,6	Total C Series Shares
Jumlah	33.345.160.962	2.297.736.324.240	100,0	Total
Saham dalam Portepel Shares in Portfolio				
Saham Seri A (nilai nominal Rp300)	-	-	-	A Series Shares (nominal value of Rp300)
Saham Seri B (nilai nominal Rp150)	21.977.098.994	3.296.564.849.100	99,4	B Series Shares (nominal value of Rp150)
Saham Seri C (nilai nominal Rp45)	126.640.595	5.698.826.775	0,6	C Series Shares (nominal value of Rp45)
Jumlah	22.103.739.589	3.302.263.675.875	100,0	Total

Bank telah melakukan upaya untuk memenuhi Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, terkait kewajiban pencatatan efek bersifat ekuitas di Bursa Efek, di antaranya dengan upaya pemenuhan syarat pencatatan saham sesuai dengan Peraturan Bursa I-A.

The Bank has taken steps to comply with Article 63 of Financial Services Authority Regulation No. 3 of Year 2021 on the Implementation of Activities in the Capital Market, related to the obligation to register equity securities on the Stock Exchange, including efforts to fulfill the requirements for registering shares in accordance with Stock Exchange Regulation I-A.

Hingga disampaikan laporan ini, Bank terus melanjutkan komitmen untuk pemenuhan syarat pencatatan saham tersebut dengan perkembangan yang senantiasa dikoordinasikan dengan Pemegang Saham Pengendali serta regulator, baik pengawasan pasar modal maupun pengawasan bank syariah.

As of the submission of this report, the Bank continues with the commitment to fulfill the requirements for registering the concerned shares with developments that are always coordinated with Controlling Shareholders and regulators, both capital market supervision and Islamic bank supervision.



Informasi Penghentian Saham Sementara

Information on the Temporary Stock Suspension

Mengingat saham Bank Muamalat Indonesia belum diperdagangkan di bursa saham mana pun, sehingga Bank tidak mengalami penghentian perdagangan saham.

Given that Bank Muamalat Indonesia has not been traded on any stock exchange, the Bank has not experienced a stock trade suspension.

Aksi Korporasi

Corporate Action

Sepanjang tahun 2024 Bank Muamalat Indonesia tidak melakukan kegiatan Aksi Korporasi.

Throughout the year 2024, Bank Muamalat Indonesia did not perform any Corporate Action activity.

Ikhtisar Obligasi dan Sukuk

Overview of Bonds and Sukuk

Hingga akhir tahun 2024, sukuk Bank Muamalat Indonesia yang belum jatuh tempo disampaikan dalam tabel di bawah ini:

As of the end of the year 2024, the sukuk of Bank Muamalat Indonesia has not matured, as shown in the table below:

Nama Efek Name of Securities	Tahun Penerbitan Efek Year of Issuance	Nilai Pokok (Rp) Principal Value (Rp)	Nisbah Pemegang Efek (%) Shareholder Ratio (%)	Jatuh Tempo Maturity Date	Peringkat Efek Securities Rating
Sukuk Subordinasi Mudharabah 2022 Mudharabah Subordinated Sukuk 2022	2022	2.000.000.000.000	58,64	15 Maret 2032 March 15, 2032	<i>Non-rated</i>
Sukuk Mudharabah 2018 Sukuk Mudharabah 2018	2018	1.600.000.000.000	-	29 Juni 2038 June 29, 2038	<i>Non-rated</i>
Sukuk Mudharabah Bank Muamalat Indonesia 2021 Sukuk Mudharabah Bank Muamalat Indonesia 2021	2021	2.440.856.000.000	50,72	15 November 2041 November 15, 2041	idA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) idA+ from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

Penghargaan Awards

1 Februari | February



Infobank 7th Satisfaction Loyalty Engagement MRI 2024 Infobank

Predikat | Predicate

1. The 2nd Best Sharia Bank in Brand Interactivity
2. The Most Satisfying Sharia Bank in Services

2



29 Februari | February



Baznas Award Baznas

Predikat | Predicate

Bank Penyedia Layanan Pembayaran Zakat
Terbaik 2024
2024 Best Zakat Payment Service Provider
Banks

7 Maret | March



Indonesia Branding Campaign of the Year MarkPlus.Inc & Marketeers

Predikat | Predicate

Bronze Winner
Campaign : Ekosistem Haji
Category : Digital Marketing

7 Maret | March



Indonesia WOW Brand 2024 MarkPlus.Inc & Marketeers

Predikat | Predicate

Bronze Champion
Category : Sharia Bank

30 Maret | March



Corporate Secretary Champion 2024 Media SWA

Predikat | Predicate

Winner of Corporate Secretary Champion
2024, Predikat: Good



2 Juli | July



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

Indonesian Best Bank in Service Excellence 2024 Infobank MRI

Predikat | Predicate

1. The Best Branch ATM;
2. The Best Conventional Sharia Bank in Service Excellence;
3. The Best Overall Walk-In Channel;
4. The Best Security Officer;
5. The Best Teller Service;
6. The 2nd Best Call Center;
7. The 2nd Best Chatbot;
8. The 2nd Best Email Service;
9. The 2nd Best Internet Banking;
10. The 2nd Best Live Chat;
11. The 2nd Best Mobile Banking;
12. The 2nd Best Opening Account Via Mobile Application/Mobile Browser;
13. Trophy: 10 Consecutive Years in Service Excellence

29 Agustus | August



Indonesia Public Relations Top Leader Awards 2024
Warta Ekonomi

Predikat | Predicate
Hayunaji as Top Public Relations Leader 2024 for Strengthening Innovation and Adaptability to Realize Business Strategy, Category: Sharia Bank

3 September | September



7 Most Popular Brand of the Year 2024
Jawa Pos

Predikat | Predicate
Kategori: Keuangan-Perbankan Syariah
Category: Finance-Sharia Banking

9 Oktober | October



Indonesia Customer Service Quality Award 2024
Media SWA

Predikat | Predicate
Very Good in Indonesia Customer Service Quality Award 2024, Kategori Bank Syariah

11 Oktober | October



Indonesia Annual Report Award III 2024
Economic Review

Predikat | Predicate
The Best Indonesian Annual Report Award Kategori Perusahaan Publik sektor Bank Syariah
Category Sharia Public Sector Company and Bank

16 Oktober | October



ATM Bersama Awards 2024
PT Artajasa Pembayaran Elektronik

Predikat | Predicate
The Best Marketing Program

14 November | November



Indonesia Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2024
Corporate Forum for CSR Development (CFCD)

Predikat | Predicate
Beasiswa Sarjana Indonesia & Beasiswa Cikal Indonesia,
Predikat: Gold, Kategori: SDGs 4.1 Social Pillar Best
Indonesia Bachelor Degree Scholarship & Cikal Indonesia Scholarship Title: Gold,
Category: SDGs 4.1 of Social Pillar

26 November | November



Visa Indonesia Client Appreciation Night 2024
VISA Indonesia

Predikat | Predicate
Outstanding Approval Rate for Syariah Debit Card



13 Desember | December



BPKH Banking Awards **BPKH RI**

Predikat | Predicate
BPS BPIH Kontribusi Pertumbuhan Pendaftar Haji Terbaik 2024 kategori Bank Nasional – BUS, Terbaik ke-2
BPS BPIH Contribution to the Growth of the Best Hajj Registrants 2024 National Bank Category – BUS, 2nd



BPKH Banking Awards **BPKH RI**

Predikat | Predicate
BPS BPIH Pendaftar Haji Terbaik 2024 kategori Bank Nasional – BUS, Terbaik ke-2
BPS BPIH Hajj Registrant 2024 National Bank Category – BUS, 2nd Best



BPKH Banking Awards **BPKH RI**

Predikat | Predicate
Rewarding Umrah Pencapaian Terbaik semester 2 kategori Bank Nasional – BUS, Terbaik ke-2
Umrah Rewarding for Best Achievement Semester 2 of Category National Bank – BUS, 2nd Best



BPKH Banking Awards **BPKH RI**

Predikat | Predicate
BPS BPIH Pendaftar Haji Muda Terbaik 2024 kategori Bank Nasional – BUS, Terbaik ke-2
BPS BPIH Best Young Hajj Applicants 2024 National Bank – BUS, 2nd Best



BPKH Banking Awards **BPKH RI**

Predikat | Predicate
BPS BPIH Transformasi Digital Terbaik 2024 kategori Bank Nasional – BUS, Terbaik ke-2
BPS BPIH Best Digital Transformation 2024 Category National – BUS, 2nd Best

Sertifikasi **Certification**

Nama Sertifikasi Name of Certification	Deskripsi Sertifikasi Description of Certification	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi Institution of Certification Issuance	Masa Berlaku Validity Period
ISO 37001 : 2016	Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System Certification	PT TUV SUD Indonesia	28 November 2026 November 28, 2026
ISO/IEC 27001 : 2013	Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi Information Security Management System Certification	PT TUV SUD Indonesia	25 Oktober 2025 October 25, 2025

Peristiwa Penting Events Highlights



18 Januari | January

Rakernas PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Bank Muamalat mengadakan Rakernas dengan tema FAST dengan seluruh *Branch Manager* Selindo, di Ballroom BJ Habibie Muamalat Tower Lt. 2.

National Working Meeting of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Bank Muamalat held National Working Meeting with the theme FAST, with all Branch Managers participated in the event held at BJ Habibie Muamalat Tower Ballroom, 2nd Floor.



23 Februari | February

Safari Haji BPKH-BMI

Jajaran Manajemen Bank Muamalat bersama BPKH dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) mengadakan "Safari Haji" dalam rangka peningkatan layanan bagi pendaftar haji Indonesia.

BPKH-BMI Haji Safari

The Management of Bank Muamalat, joined by BPKH and Hajj and Umrah Guidance Group held a "Haji Safari in order to improve services for Indonesia Hajj applicants.



28 Februari | February

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BMI dengan Yayasan Rumah Sehat Terpadu (YRST) Dhuafa

Bank Muamalat diwakili oleh CEO bersama jajaran pimpinan Dompot Dhuafa mengadakan penandatanganan perjanjian kerjasama Layanan Digital Cash Management dan *Grand Launching* Platform Donasi YRST Dompot Dhuafa di Ballroom BJ Habibie Muamalat Tower Lt. 2.

Signing of the BNN Cooperation Agreement with the Integrated Healthy Home Foundation (RST) for the Poor

Bank Muamalat, represented by the CEO joined by the leaders of Dompot Dhuafa, held the signing of the cooperation agreement for Digital Cash Management Services and the Grand Launching of the Dompot Dhuafa YRST Donation Platform at the BJ Habibie Muamalat Tower Ballroom, 2nd Floor.



29 Februari | February

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BMI dengan Hiswana Migas

Bank Muamalat yang diwakili oleh CEO dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) menjalin kerja sama pemanfaatan fasilitas perbankan di Ballroom BJ Habibie Muamalat Tower Lt. 2.

Signing of BMI Cooperation Agreement with Hiswana Migas

Bank Muamalat, represented by the CEO and the National Oil and Gas Entrepreneurs Association (Hiswana Migas), established a cooperation for utilizing banking facilities at the BJ Habibie Muamalat Tower Ballroom, 2nd Floor.



6 Maret | March

Grand Launching Layanan Quick Commerce Hijrah Groceries

Jajaran pimpinan Bank Muamalat bekerja sama dengan WIR Group (PT WIR ASIA Tbk), perusahaan teknologi imersif dan web3 yang berfokus pada Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Artificial Intelligence (AI), dan blockchain terdepan di Asia Tenggara, melalui anak perusahaannya Mindstores, meluncurkan layanan *quick commerce* Hijrah Groceries yang dapat diakses melalui aplikasi Muamalat DIN.

Grand Launching of Hijrah Groceries Quick Commerce Service

Bank Muamalat's leadership team in collaboration with WR Group (PT WIR ASIA Tbk), an immersive and web3 technology company focused on Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Artificial Intelligence (AI), and blockchain leading in Southeast Asia, through its subsidiary Mindstores, launched the Hijrah Groceries Quick Commerce Service accessible through the Muamalat DIN application.



20 Maret | March

Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Telkomsel

Bank Muamalat diwakili oleh SEVP Retail Banking Dedy Suryadi melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Layanan Telkomsel Enterprise, mencakup beragam inisiatif kolaborasi, termasuk fitur pembukaan rekening melalui aplikasi MyTelkomsel dan MyIndihome, fitur pendaftaran Indihome melalui aplikasi Muamalat-DIN, serta pemanfaatan teknologi Host to Host VA di aplikasi MyTelkomsel dan aplikasi koperasi digital Telkomsel untuk pembayaran melalui Bank Muamalat.

Signing of the Memorandum of Understanding with Telkomsel

Bank Muamalat, represented by SEVP Retail Banking Dedy Suryadi, signed the Memorandum of Understanding for Telkomsel Enterprise Services, including account opening features through the MyTelkomsel and MyIndihome applications, Indihome registration features through the Muamalat-DIN application, as well as the use of Host to Host VA technology in the MyTelkomsel application and the Telkomsel digital cooperative application for payments through Bank Muamalat.



28 Maret | March

Santunan Anak Yatim & Dhuafa bersama BMM dan BMI

Bank Muamalat berkolaborasi dengan Baitulmaal Muamalat (BMM) melaksanakan sejumlah program sosial santunan kepada Anak Yatim dan Dhuafa.

Terdapat empat program utama yang bekerja sama dengan BMM, yaitu Ketuk Berkah, Bahagiakan Yatim dan Dhuafa, Bersih-Bersih Masjid serta Berbagi Takjil.

Orphan & Dhuafa Assistance with BMM and BMI

Bank Muamalat collaborated with Baitulmaal Muamalat (BMM) to implement several social assistance programs for orphans and dhuafa.

The four main programs in the collaboration with BMM, namely Ketuk Berkah (Tap for Blessing), Bahagiakan Yatim dan Dhuafa (Make Orphans & Dhuafas Happy), Bersih-Bersih Masjid (Cleaning Mosques), and Berbagi Takjil (Sharing Takjil).



17 April | April

Halal bi halal BMI x BPKH

Jajaran Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh karyawan BMI bersama dengan BPKH mengadakan halal bi halal di Lobby Gedung Muamalat Tower.

Halal bi Halal BMI-BPKH

All members of the Board of Commissioners and the Board of Directors and employees of BMI, joined by BPKH, held a Halal bi Halal event at the lobby of the Muamalat Tower Building.



2 Mei | May

Milad ke-32 BMI

Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh karyawan BMI bersama mengadakan tasyakuran atas milad BMI yang ke-32 di Ballroom BJ Habibie Gedung Muamalat Tower Lt. 2.

BMI 32nd Anniversary

All members of the Board of Commissioners and the Board of Directors and employees of BMI held a thanksgiving event for BMI's 32nd anniversary at the BJ Habibie Ballroom, Muamalat Tower Building 2nd Floor.



3 Mei | May

Costumer Gathering MP Spesial Milad & Launching Program Muamalat Tebar Rezeki 32 Umroh

Bank Muamalat mengadakan *gathering* sekaligus meluncurkan program menabung berhadiah dengan *campaign* bernama "Muamalat Tebar Rezeki 2024" kepada seluruh nasabah Bank Muamalat baik nasabah eksisting maupun nasabah baru di Ballroom BJ Habibie Muamalat Tower Lt. 2.

Costumer Gathering MP Spesial Anniversary & Launching Program of "Muamalat Tebar Rezeki 32 Umroh"

Bank Muamalat held a gathering and launching of a savings program with prizes and campaign of "Muamalat Tebar Rezeki (Muamalat Spreading Fortune) 2024" to all Bank Muamalat customers, both existing and new customers, at the BJ Habibie Muamalat Tower Ballroom, 2nd Floor.



27 Juni | June

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Bank Muamalat menyelenggarakan RUPST di Ballroom BJ Habibie Gedung Muamalat Tower Lt. 2.

Annual General Meeting of Shareholders

Bank Muamalat held the Annual GMS at the BJ Habibie Ballroom of Muamalat Tower Building, 2nd Floor.



1 Agustus | August

Launching produk terbaru bernama Solusi Emas Hijrah

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk meluncurkan produk terbaru bernama Solusi Emas Hijrah sebagai solusi kepemilikan emas untuk nasabah dan masyarakat luas.

Launching of New Product "Hijrah Gold Solution"

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk launched the new product "Hijrah Gold Solution" as a gold ownership solution for customers and the wider community.



14 Agustus | August

KOBAR BMI dengan BPKH

Dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-79 BMI dengan BPKH menggelar sejumlah kegiatan mulai dari tingkat pusat hingga kantor cabang. Kegiatan bertema "KOBAR" (Kolaborasi Bersama Dalam Harmoni) ini diikuti oleh karyawan Bank Muamalat dan BPKH serta dilaksanakan secara *hybrid*.

BMI KOBAR with BPKH

In commemorating the 79th Independence Day of the Republic of Indonesia, BMI and BPKH held several activities starting from the central level to the branch offices. The theme of the activities "KOBAR" (Collaboration Together in Harmony) attended by Bank Muamalat and BPKH employees and was carried out in a hybrid manner.

Bank Muamalat Rayakan Harpelnas 2024

Jajaran pimpinan BMI turut merayakan Hari Pelanggan Nasional dengan langsung menyapa bersama dengan Nasabah di Kantor Cabang Utama Muamalat Tower.

Bank Muamalat Celebrated National Customers' Day 2024

BMI's leadership team celebrated the National Customer Day (Harpelnas) by directly greeting customers at the Muamalat Tower Main Branch Office.



4 September | September



14 Oktober | October

Penandatanganan Nota Kesepahaman BMI dengan Universitas Muhammadiyah Kupang

Bank Muamalat menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Muhammadiyah Kupang terkait kerja sama dalam lingkup pemanfaatan produk pendanaan, pembiayaan dan jasa perbankan syariah serta pengembangan pendidikan.

Signing of the Memorandum of Understanding between BMI and Universitas Muhammadiyah Kupang

Bank Muamalat signed a memorandum of understanding with Universitas Muhammadiyah of Kupang regarding cooperation in the scope of utilizing funding products, financing and sharia banking services as well as education development.



3 November | November

Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)

Dalam rangka turut serta mendukung aktivitas ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, Bank Muamalat ikut serta meramaikan pada acara ISEF yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)

To participate in support of sharia economic and financial activities in Indonesia, Bank Muamalat took part in enlivening the ISEF event organized by Bank Indonesia.



18 November | November

Penandatanganan Nota Kesepahaman

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk resmi menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Terbuka dalam rangka pemanfaatan layanan jasa perbankan dan Tridharma Perguruan Tinggi.

Signing of Memorandum of Understanding

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk officially signed a memorandum of understanding with Universitas Terbuka in the context of utilizing banking services and the Tridharma of Higher Education.



18 November | November

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BMI dengan KSEI

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk resmi menjadi bank kustodian setelah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan akan melayani kebutuhan kustodian para nasabah institusi dan individual, baik lokal ataupun asing.

Signing of Cooperation Agreement between BMI and KSEI

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk officially became a custodian bank upon signing the Cooperation Agreement with Indonesian Central Securities Depository (KSEI) and will serve with custodian services of institution and individual customers, both local and foreign.



11 Desember | December

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menyelenggarakan RUPSLB di Ballroom BJ Habibie Gedung Muamalat Tower Lt. 2.

Extraordinary General Meeting of Shareholders

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk held the Extraordinary GMS at the BJ Habibie Ballroom of Muamalat Tower Building, 2nd Floor.



SATU APLIKASI UNTUK SEMUA KEBUTUHAN TRANSAKSI

Buka Rekening
Online

Dilengkapi
Fitur Islami

Fitur
Dana Impian

Layanan Nasabah
Digital



Laporan Manajemen

Management Report

Laporan Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board Report	26
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	31
Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioner's Report	32
Dewan Komisaris Board of Commissioner	41
Laporan Direksi Board of Director's Report	42
Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior Board of Directors and Senior Executive Vice President	60
Surat Pernyataan Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Statement of the Board of Commissioners regarding Responsibility for the 2024 Annual Report of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	62
Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Statement of the Board of Directors regarding Responsibility for the 2024 Annual Report of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	63





Laporan Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board Report



Dewan Pengawas Syariah (DPS) menyampaikan apresiasi kepada manajemen serta seluruh pemangku kepentingan di Bank Muamalat Indonesia atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik sepanjang tahun 2024. Dengan kerja sama dan dukungan tersebut, DPS dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Manajemen BMI telah berupaya untuk menghasilkan kinerja bisnis yang optimal serta pemenuhan tata kelola perusahaan yang baik. DPS berharap pencapaian tersebut dapat terus dioptimalkan pada tahun 2025 guna memastikan pertumbuhan dan profitabilitas bisnis yang berkelanjutan serta mengukuhkan komitmen Bank dalam menjaga pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola syariah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha.

The Sharia Supervisory Board expresses its appreciation to the management and all stakeholders at Bank Muamalat Indonesia for the cooperation that has been established well throughout 2024. Such cooperation and support enabled us to exercise our duties and functions well.

BMI Management has striven to deliver optimal business performance and good corporate governance. DPS hopes that this achievement can continue to be optimized in 2025 to ensure sustainable business growth and profitability while strengthening the Bank's commitment to keep applying Sharia governance principles in running the business.

Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of the Sharia Supervisory Board

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamin, Was-Shalatu Was-Salamu 'Ala Nabiyyina Muhammadin, Wa 'Ala Aalihi Wa Ashhabih Waman Tabi'ahum Bi Ihsanin Ila Yaumiddin, Amma Ba'du.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah untuk baginda Rasulullah SAW, beserta seluruh keluarga dan kerabatnya.

Sebagai bagian dari penerapan prinsip tata kelola syariah yang baik, kami menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat Indonesia", "BMI", "Bank") untuk tahun buku 2024. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat memiliki jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang yang seluruhnya telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai DPS.

Selanjutnya dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah, DPS juga menyusun Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Bank Muamalat Indonesia. Selain itu, laporan juga diberikan kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara periodik setiap semester.

PENGAWASAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, pelaksanaan pengawasan DPS didukung oleh Unit Kerja Kepatuhan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah, Unit Kerja Manajemen Risiko terkait pelaksanaan fungsi manajemen risiko syariah serta Unit Kerja Internal Audit untuk pelaksanaan fungsi audit internal syariah. Hal ini selaras dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan OJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Distinguished Shareholders and Stakeholders,

Our praise and gratitude to Allah Subhanahu Wa Ta'ala for His grace and blessings upon us. May peace and blessings be upon Prophet Muhammad SAW, his family, and relatives.

As part of the implementation of the principle of sharia governance, we present our report on the duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board (DPS) of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat Indonesia," "BMI," or "Bank") for the financial year 2024. In exercising its functions, the Sharia Supervisory Board of Bank Muamalat has 3 (three) members, all of whom have obtained approval from the Financial Services Authority through fit and proper tests before discharging their actions, duties, and functions as DPS.

Furthermore, in supervising the implementation of the fulfillment of Sharia Principles, DPS also prepares the Supervision Report of the Sharia Supervisory Board which is submitted to the Board of Commissioners and the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia. In addition, the report is delivered to the National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) and the Financial Services Authority (OJK) every semester.

SUPERVISION ON THE IMPLEMENTATION OF THE SHARIA PRINCIPLES

In carrying out its duties and responsibilities, the implementation of DPS supervision is supported by the Compliance Unit related to the implementation of sharia compliance functions, the Risk Management Unit related to the implementation of sharia risk management functions and the Internal Audit Unit for the implementation of sharia internal audit functions. This is consistent with OJK Regulation No. 2 of 2024, which addresses the implementation of Sharia governance in Sharia commercial banks and Sharia business units.



Secara umum, DPS berkewajiban melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan BMI yang di antaranya mencakup pengawasan terhadap tata kelola syariah, penghimpunan dana, penyaluran dana, layanan, serta aktivitas yang berkaitan dengan pasar modal. DPS memandang bahwa secara umum, untuk tahun buku 2024, Bank Muamalat Indonesia telah menerapkan prinsip syariah yang memadai dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

Rincian pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis Bank Muamalat pada tahun 2024, antara lain mencakup:

1. Pengawasan terhadap Tata Kelola Syariah

DPS telah melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi terhadap temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas serta lembaga lain, terkait penerapan prinsip syariah. DPS juga secara rutin menyelenggarakan rapat bersama Direksi maupun dengan Dewan Komisaris untuk koordinasi sekaligus bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan serta untuk memberikan petunjuk dan/atau arahan kepada Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan prinsip syariah, termasuk jika ditemukan pelanggaran yang berpotensi menimbulkan risiko bagi kelangsungan usaha Bank.

2. Pengawasan terhadap Penghimpunan Dana

DPS telah melakukan pengawasan terhadap produk penghimpunan dana BMI dan melakukan kajian atas kesesuaian produk Bank dengan ketentuan DSN-MUI serta peraturan terkait lainnya. Pengawasan tersebut meliputi kajian atas ketentuan, sistem dan prosedur produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh Bank telah sesuai dengan prinsip syariah. Untuk tahun 2024, produk-produk penghimpunan dana Bank telah sesuai dengan prinsip syariah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI dan pedoman akad OJK.

3. Pengawasan terhadap Penyaluran Dana

DPS telah melakukan pengawasan terhadap produk penyaluran dana BMI dan melakukan kajian atas kesesuaian produk penyaluran dana dengan fatwa DSN-MUI serta peraturan terkait lainnya. Pengawasan tersebut meliputi kajian atas ketentuan, sistem dan prosedur produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh Bank telah sesuai dengan prinsip syariah. Untuk tahun 2024, produk-produk penyaluran dana Bank telah sesuai dengan prinsip syariah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI dan pedoman akad OJK.

DPS is generally responsible for supervising and assessing BMI's activities, which include sharia governance, fund raising, fund distribution, services, and capital market activities. DPS believes that for the financial year 2024, Bank Muamalat Indonesia has adequately implemented Sharia principles in these activities.

Details of activities of the Sharia Supervisory Board on the implementation of the sharia principles within the business activities of Bank Muamalat during the year 2024, among others, include the following:

1. Supervision of Sharia Governance

DPS has overseen the Board of Directors' follow-up on the audit or inspection findings and recommendations of the Bank's internal audit work unit, the external auditor, the results of OJK supervision, and/or the results of supervision by other authorities and institutions regarding the implementation of Sharia principles. DPS also met on a regular basis with the Board of Directors and the Board of Commissioners to coordinate and carry out the supervisory function, as well as to provide instructions and/or directions to the Board of Directors and the Board of Commissioners on the implementation of Sharia principles. This includes the possibility of violations being discovered, which could jeopardize the Bank's business continuity.

2. Supervision of Fund Raising

DPS has supervised BMI's fund raising products and reviewed the Bank's products for compliance with DSN-MUI provisions and other relevant regulations. This supervision includes a review of the provisions, systems, and procedures of the Bank's fund raising products to ensure that they are compliant with Sharia principles. For the year 2024, the Bank's fund raising products have complied with sharia principles as stipulated in DSN-MUI fatwa and OJK contract guidelines.

3. Supervision of Fund Distribution

DPS has supervised BMI's fund distribution products and reviewed their compliance with the DSN-MUI fatwa and other relevant regulations. This supervision includes a review of the provisions, systems, and procedures of the Bank's fund distribution products to ensure that they are in accordance with Sharia principles. For the year 2024, the Bank's fund distribution products have complied with sharia principles as regulated in the fatwa of DSN-MUI and OJK contract guidelines.

4. Pengawasan terhadap Layanan

DPS telah melakukan pengawasan terhadap layanan BMI dan melakukan kajian atas kesesuaian layanan dengan fatwa DSN-MUI dan peraturan terkait lainnya. Pengawasan tersebut meliputi kajian atas ketentuan, sistem dan prosedur layanan Bank telah sesuai dengan Prinsip Syariah. Untuk tahun 2024, layanan-layanan Bank telah sesuai dengan prinsip syariah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI dan pedoman akad OJK.

5. Pengawasan terhadap Usulan Produk/Aktivitas Baru

DPS dibantu oleh *liaison officer (Sharia Compliance)* telah melakukan kajian dan pembahasan usulan produk/aktivitas baru sepanjang tahun 2024. Di antaranya, adalah layanan Bank Kustodian, prosedur layanan open API pembayaran, *bancassurance* produk Asuransi Salam Hijrah Arafah (ASHAR) dolar AS dengan model bisnis referensi, penetapan komponen biaya administrasi, pengiriman uang asing (*remittance*) melalui Muamalat DIN, tabungan iB Hijrah Pensiun, layanan tarik & setor tunai melalui PT Pos Indonesia, layanan pengelolaan rekening yang terpisah (*Segregated Account*) oleh BMI sebagai bank penyimpan dana margin, *bancaassurance* produk asuransi Salam Hijrah Sejahtera (SAHAJA) model bisnis referensi, layanan QRIS tarik tunai, transfer dan setor tunai (TUNTAS), rekening pengeluaran milik kementerian negara/lembaga, Salam Trade iB, fitur hijrah *groceries* pada Muamalat DIN (MDIN).

Selain itu, sepanjang tahun 2024, DPS juga telah melakukan review dan/atau endorsement terhadap *loose leaf* atas prosedur standar akad. Dewan Pengawas Syariah juga menyelenggarakan kegiatan training dirasah islamiyah selama 2 (dua) kali sepanjang tahun buku. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan arahan dan pemahaman atas prinsip dan ketentuan syariah kepada seluruh jajaran karyawan Bank dalam melaksanakan aktivitas kerja sesuai prinsip syariah dan berlandaskan fatwa DSN-MUI.

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sepanjang tahun buku 2024 hingga diterbitkannya laporan ini, tidak terdapat perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian, susunan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Ketua	Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si	Chairman
Anggota	Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH	Member
Anggota	Dr. H. Agung Danarto, M.Ag	Member

4. Supervision of Services

DPS has supervised BMI's services and ensured that they comply with DSN-MUI's fatwa and other relevant regulations. This supervision includes reviews of the Bank's service provisions, systems, and procedures to ensure they are in accordance with Sharia principles. For the year 2024, the Bank's services are assessed as complied with sharia principles regulated in the fatwa of DSN-MUI and OJK contract guidelines.

5. Supervision of New Product/Activity Recommendations

With the assistance of the liaison officer (Sharia Compliance), DPS reviewed and discussed recommendations for new products/activities in 2024. This included, among others, Custodian Bank services, procedures on open API payment services, *bancassurance* product of Arafah Hijrah Salam Insurance (ASHAR) in US dollar as reference for business models, determining the administrative cost components, foreign remittances through Muamalat DIN, iB Hijrah Pension savings, cash withdrawal & deposit services through PT Pos Indonesia, separate account management services (Segregated Account) by BMI as a margin fund deposit bank, *bancassurance* insurance products of Salam Hijrah Sejahtera (SAHAJA) as reference for business models, QRIS cash withdrawal, transfer and cash deposit services (TUNTAS), expenditure accounts owned by ministries/institutions, Salam Trade iB, hijrah *groceries* features on Muamalat DIN (MDIN)

Furthermore, throughout 2024, DPS reviewed and/or endorsed a loose leaf of standard contract procedures. The Sharia Supervisory Board also conducted dirasah islamiyah training activities twice during the financial year. Such activities were held to provide all Bank employees with guidance and understanding of sharia principles and provisions in order for them to conduct their work activities in accordance with sharia principles and the DSN-MUI fatwa.

COMPOSITION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

During the financial year 2024 until the publication of this report, there were no changes in the composition of the Sharia Supervisory Board. Thus, the composition of the Sharia Supervisory Board is as follows:



APRESIASI

Dewan Pengawas Syariah menyampaikan apresiasi kepada manajemen serta seluruh pemangku kepentingan di Bank Muamalat Indonesia atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik sepanjang tahun 2024. Dengan kerja sama dan dukungan tersebut, DPS dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Manajemen BMI telah berupaya untuk menghasilkan kinerja bisnis yang optimal serta pemenuhan tata kelola perusahaan yang baik. DPS berharap pencapaian tersebut dapat terus dioptimalkan pada tahun 2025 guna memastikan pertumbuhan dan profitabilitas bisnis yang berkelanjutan serta mengukuhkan komitmen Bank dalam menjaga pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola syariah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha.

DPS berharap agar semua yang telah dilakukan maupun direncanakan dalam upaya memajukan Bank Muamalat diridai serta mendapat pertolongan Allah SWT. Semoga taufik dan hidayah serta inayah-Nya selalu menyertai kita semua untuk mencapai kesuksesan di dunia maupun di akhirat kelak.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

APPRECIATION

The Sharia Supervisory Board appreciates the management and all stakeholders of Bank Muamalat Indonesia for their continued cooperation through 2024. With such cooperation and support, the DPS was able to carry out its duties and functions effectively.

BMI's Management has endeavored to produce optimal business performance and fulfillment of good corporate governance. DPS hopes that these achievements can continue to be optimized in 2025 to ensure sustainable business growth and profitability and strengthen the Bank's commitment to maintaining the fulfillment of sharia governance principles in carrying out business activities.

DPS hopes that everything accomplished or planned this year to advance Bank Muamalat will be blessed with success and assistance from Allah SWT. May His guidance, blessings, and mercy be with us all as we strive for greatness in this life and hereafter.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, 30 April 2025 | April 30, 2025

Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of The Sharia Supervisory Board

Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board



Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH
Anggota
Member

Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si
Ketua
Chairman

Dr. H. Agung Danarto, M.Ag
Anggota
Member



Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioner's Report



Mempertimbangkan pencapaian finansial dan non-finansial, Dewan Komisaris berpandangan berbagai perbaikan yang dilakukan di Bank Muamalat Indonesia telah memberikan hasil yang baik.

Considering the financial and non-financial achievements, the Board of Commissioners is of the view that the various improvements made at Bank Muamalat Indonesia have yielded good results.

Sapto Amal Damandari
Komisaris Utama Independen
Independent President Commissioner

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamin, Was-Shalatu Was-Salamu 'Ala Nabiyyina Muhammadin, Wa 'Ala Aalihi Wa Ashhabih Waman Tabi'ahum Bi Ihsanin Ila Yaumiddin, Amma Ba'du.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas karunia-Nya, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat," "Bank") mampu melalui tahun 2024 yang sangat dinamis. Pada tahun 2024, perkembangan Indonesia dan global dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, politik, dan lingkungan.

Dari sisi perekonomian global, rencana kebijakan perdagangan di Amerika Serikat (AS) melalui kenaikan tarif impor, komoditas, dan cakupan negara yang lebih luas telah menimbulkan risiko peningkatan fragmentasi perdagangan dunia. Kekhawatiran tersebut memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi dunia yang pada tahun 2025 diperkirakan melambat menjadi 3,1% dari 3,2% di tahun 2024.

Tekanan juga terjadi pada perekonomian domestik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,03% *year on year* (yoy), sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang 5,05%.

Pada tahun buku 2024 juga merupakan tahun politik, sehingga ikut mempengaruhi keputusan investasi, terutama oleh investor asing yang cenderung lebih hati-hati. Namun peningkatan pengeluaran pemerintah mendorong konsumsi masyarakat dan memberikan efek pengganda yang positif pada perekonomian.

Dari sisi lingkungan, Indonesia dan negara-negara lain di dunia masih terus berjuang untuk mengatasi perubahan iklim dan perbaikan lingkungan. Ke depan, peningkatan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan lingkungan diprediksi meningkat.

Dear Shareholders and Stakeholders,

All praise is due to Allah Subhanahu Wa Ta'ala. By His grace, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat" or "Bank") successfully went through a dynamic year in 2024. Both domestic and global developments in 2024 were influenced by various factors, including economic, political, and environmental conditions.

On the global economic side, the United States' planned trade policy, involving higher import tariffs, commodities, and broader country coverage, has raised concerns about increasing fragmentation in world trade. These concerns have pressured global economic growth, which is expected to slow to 3.1% in 2025, a decrease from 3.2% in 2024.

Pressure also occurs in the domestic economy. According to the Central Statistics Agency (BPS), Indonesia's economic growth was 5.03% *year on year* (yoy), slightly slower than the previous year's growth of 5.05%.

The 2024 financial year is also a political year, influencing investment decisions, especially among foreign investors who tended to adopt a more cautious approach. However, the government's increased spending boosted public consumption, resulting in a positive multiplier effect on the economy.

From an environmental standpoint, Indonesia, along with other countries, is still working to address climate change and enhance environmental conditions. It is expected that, in the future, there will be a growing awareness of the importance of environmental protection.



Di tengah situasi yang dinamis tersebut, kondisi industri perbankan tetap kuat, seperti ditunjukkan oleh penyaluran kredit yang tumbuh positif. Fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan dengan baik. Dewan Komisaris berharap adanya keberlanjutan pemulihan ekonomi di masa mendatang, sehingga kegiatan usaha, termasuk bisnis Bank Muamalat dapat berjalan dengan normal serta mampu menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Berkenaan dengan respons Bank terhadap perkembangan situasi global maupun domestik, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah berupaya menjalankan kegiatan perbankan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah ditetapkan termasuk perubahannya. Direksi juga telah menyampaikan kepada Dewan Komisaris terkait aspek kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, begitu pun kepatuhan terhadap aspek syariah.

Perubahan visi dan misi Bank Muamalat pada tahun 2025 juga menjadi pengukuhan kembali atas komitmen Bank Muamalat untuk menjadi jalan hijrah menuju keberkahan yang menyeluruh baik bagi individu pada organisasi, bagi seluruh pemangku kepentingan dan bagi penguatan ekonomi syariah.

Oleh karena itu, Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja Direksi dan mendorong adanya akselerasi pertumbuhan yang sehat untuk menciptakan profit yang berkelanjutan. Upaya tersebut telah direalisasikan melalui transformasi *retail*, peningkatan produktivitas serta efektivitas dan efisiensi di setiap lini bisnis dan operasional Bank Muamalat.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI

Dasar Penilaian

Dalam memberikan penilaian kepada Direksi, Dewan Komisaris mengacu pada pencapaian finansial dan non-finansial. Untuk pencapaian finansial, beberapa faktor yang menjadi perhatian di antaranya pemenuhan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank. Misalnya, dari sisi pencapaian nilai aset, penyaluran pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan laba yang dibukukan.

Selain pencapaian finansial tersebut, Dewan Komisaris turut memberikan penilaian yang diukur dari rasio-rasio penting seperti *Non-Performing Financing* (NPF), *Return on Asset* (ROA), termasuk *Return on Equity* (ROE). Sementara untuk pencapaian non-finansial, beberapa hal yang menjadi pertimbangan penilaian antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Amid these changes, the banking sector remains resilient, as reflected by the positive growth in loan disbursement. The banking intermediary function continues to operate effectively. The Board of Commissioners hopes for continued economic recovery in the future, which will enable business activities, including Bank Muamalat's business, to return to normal and create added value for all stakeholders.

With regard to the Bank's response to global and domestic developments, the Board of Commissioners believes the Board of Directors has made significant efforts to align banking activities with the existing Business Plan (RBB), including any amendments. Furthermore, the Board of Directors has reported to the Board of Commissioners of the Bank's compliance with applicable regulations, laws, and Sharia principles.

The change in the vision and mission of Bank Muamalat in 2025 is also a reaffirmation of Bank Muamalat's commitment to be a way of hijrah towards a comprehensive blessing for both individuals in the organization, for all stakeholders and for strengthening the Islamic economy.

Therefore, the Board of Commissioners acknowledges the performance of the Board of Directors and encourages the acceleration of healthy growth to generate sustainable profits. These efforts have been reflected in the retail transformation, enhanced productivity, and improvements in effectiveness and efficiency across all business lines and operations of Bank Muamalat.

PERFORMANCE EVALUATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Basis of Evaluation

In evaluating the performance of the Board of Directors, the Board of Commissioners considers both financial and non-financial achievements. For financial performance, key factors of focus include meeting the targets set in the Bank's Business Plan, such as achieving asset values, financing distribution, Third Party Funds (DPK), and recorded profits.

In addition to these financial achievements, the Board of Commissioners also assesses the performance using important ratios such as *Non-Performing Financing* (NPF), *Return on Assets* (ROA), and *Return on Equity* (ROE). For non-financial achievements, the assessment also takes into account the implementation of *Good Corporate Governance* (GCG).

Dewan Komisaris senantiasa memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank. Termasuk pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta terus berupaya memantau pelaksanaan seluruh rencana dan strategi yang telah ditetapkan Bank seperti tertuang dalam RBB tahun 2024.

Hasil Penilaian

Dengan mempertimbangkan pencapaian finansial dan non-finansial, Dewan Komisaris berpandangan bahwa secara umum, kinerja Direksi pada tahun buku 2024 cukup baik yang terlihat dari berbagai upaya perbaikan yang dilakukan. Dari pencapaian finansial, walaupun terjadi sedikit penurunan pada aset maupun pembiayaan dibandingkan tahun sebelumnya, hal itu merupakan dampak dari strategi transformasi *retail*. Bank melakukan *shifting* pembiayaan segmen *enterprise* ke segmen *retail* dengan tujuan mengoptimalkan penyaluran pembiayaan *retail* seiring pengurangan risiko dalam konsentrasi pembiayaan di segmen korporat dan penyaluran pembiayaan yang *high yield*.

Begitu pun dengan penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) maupun Dana Pihak Kedua (DP2), terjadi sebagai konsekuensi dari strategi *reprofiling* DPK untuk mendorong peningkatan dana murah (*low cost fund*). Inisiatif ini tercermin dari rasio *Current Account Saving Account* (CASA) yang meningkat, dari 47,14% pada tahun 2023 menjadi 53,18% di tahun 2024.

Dengan berbagai inisiatif strategis yang direalisasikan, Bank Muamalat tetap mempertahankan profitabilitas. Bank berhasil membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp20,4 miliar, meningkat 44,72% (yoy), dengan pencapaian 102,07% terhadap target RBB.

Dari sisi non finansial, Bank berhasil meningkatkan program akuisisi porsi haji, baik secara organik maupun optimalisasi kerja sama dengan mitra. Total pencapaian akuisisi porsi haji Bank Muamalat sebanyak 70,826 jamaah, dengan pencapaian 101% jika dibandingkan dengan target.

Di bidang *digital banking*, Bank terus melakukan pengembangan *digital* melalui Muamalat Digital Islamic Network (MDIN) sebagai respons terhadap perkembangan kebutuhan nasabah terhadap perbankan digital serta pesatnya pertumbuhan transaksi *digital*. Pengembangan ini akan menambah daya saing Bank di industri.

Pencapaian kinerja Bank Muamalat juga mendapatkan apresiasi dari pemangku kepentingan, seperti ditunjukkan melalui penghargaan. Bank meraih penghargaan sebagai "Bank Umum Syariah Terbaik dalam Pelayanan Prima" tahun 2023-2024 dari Infobank. Bank juga menjadi peringkat pertama dari sebelumnya peringkat ketiga dalam kategori

The Board of Commissioners consistently ensures that GCG principles are applied in all business activities of the Bank, across all organizational levels, while continuously monitoring the implementation of all plans and strategies outlined in the 2024 Business Plan (RBB).

Evaluation Results

Considering both financial and non-financial achievements, the Board of Commissioners believes that, overall, the performance of the Board of Directors in the 2024 financial year has been quite good, as reflected in the various improvement efforts made. In terms of financial results, while there was a slight decline in assets and financing compared to the previous year, this was due to the impact of the retail transformation strategy. The Bank shifted its focus from the enterprise segment to the retail segment, aiming to optimize retail financing distribution and reduce risks related to the concentration of financing in the corporate segment, as well as the distribution of high-yield financing.

Similarly, the decrease in Third Party Funds (DPK) and Second Party Funds (DP2) was a result of the DPK reprofiling strategy, aimed at increasing low-cost funds. This effort is reflected in the rise of the Current Account Saving Account (CASA) ratio, which grew from 47.14% in 2023 to 53.18% in 2024.

With various strategic initiatives that have been realized, Bank Muamalat has maintained profitability. The Bank achieved a profit before tax of Rp20.4 billion, reflecting a 44.72% increase (yoy) and exceeding the RBB target by 102.07%.

On the non-financial side, the Bank has successfully increased its hajj portion acquisition program, both organically and by optimizing partnerships. The total number of hajj portions acquired by Bank Muamalat was 70,826 pilgrims, achieving 101% of the target.

In digital banking, the Bank has continued to advance its digital initiatives through the Muamalat Digital Islamic Network (MDIN), responding to growing customer demand for digital banking and the rapid increase in digital transactions. This development enhances the Bank's competitiveness in the industry.

Bank Muamalat's performance has also been recognized by stakeholders, as evidenced by several awards. The Bank was honored with the "Best Sharia Commercial Bank in Excellent Service" award for 2023-2024 by Infobank. Additionally, the Bank rose from third to first place in the category of the most excellent service for Sharia commercial banks. Furthermore,



pelayanan paling prima bank umum syariah. Selain itu, Bank mendapatkan 4 (empat) penghargaan sekaligus sebagai peringkat kedua dalam “Annual Meeting dan Banking Award 2024” yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Jakarta.

Pengawasan terhadap Perumusan dan Implementasi Strategi

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah berupaya menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan usaha Bank. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan strategi dan bisnis Bank berada di jalur yang benar, yakni mematuhi regulasi yang berlaku, baik secara legal maupun dalam koridor syariah.

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah berupaya menjalankan kegiatan perbankan sesuai dengan RBB yang telah ditetapkan termasuk perubahannya. Direksi juga telah menyampaikan kepada Dewan Komisaris terkait aspek kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepatuhan terhadap aspek syariah. Oleh karena itu, Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja Direksi dalam pemenuhan target dari RBB tersebut.

Dewan Komisaris senantiasa akan memantau pelaksanaan strategi Bank khususnya implementasi *Turn Around Plan* dan tema strategis Rencana Bisnis Bank Muamalat Tahun 2024 yakni “Pertumbuhan Bisnis yang Sehat dan Profit yang Berkelanjutan”. Direksi menyampaikan bahwa langkah-langkah strategis di tahun 2024 yang telah dilaksanakan dengan kerangka 3 (tiga) pilar utama, yaitu: *business refocussing*, *fixing the fundamental*, dan *strengthen enablers*.

Dewan Komisaris menilai ketiga pilar penting tersebut telah direalisasikan melalui beragam program yang berjalan dengan baik. Sebagai contoh untuk pilar *business refocussing*, Bank menjalankan strategi *reprofiling* DPK yang fokus kepada dana murah sehingga dapat mendorong peningkatan Rasio CASA dan fokus bisnis pada pembiayaan retail serta menjadikan segmen enterprise banking sebagai *entry gate* dalam memperluas jangkauan bisnis ke dalam ekosistem bisnis dan keuangan syariah.

Untuk pilar *fixing the fundamental*, Bank secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dan teknologi informasi serta bisnis proses yang sesuai dengan perkembangan bisnis Bank. Sedangkan pilar *strengthen enablers*, antara lain dengan memperkuat *enabler* kinerja melalui peningkatan sinergi *enterprise* dan *retail* guna memperoleh peluang bisnis yang lebih luas, menghasilkan, dan berkualitas.

the Bank received four awards and second place at the “Annual Meeting and Banking Award 2024” organized by the Hajj Financial Management Agency (BPKH) in Jakarta.

Supervision of Strategy Formulation and Implementation

Throughout 2024, the Board of Commissioners has carried out its supervisory role over the Bank’s business activities. The aim is to ensure that the Bank’s strategy and operations align with the established goals, ensuring compliance with applicable regulations, both legal and sharia-compliant.

The Board of Commissioners believes that the Board of Directors has made significant efforts to conduct banking activities in accordance with the approved Business Plan (RBB), including any amendments. The Board of Directors has also reported to the Board of Commissioners on compliance with all applicable regulations and laws, including adherence to Sharia principles. As a result, the Board of Commissioners recognizes the Board of Directors’ performance in successfully meeting the RBB targets.

The Board of Commissioners will continue to oversee the implementation of the Bank’s strategy, particularly the Turn Around Plan and the strategic focus of the Bank Muamalat Business Plan for 2024, which is centered on “Healthy Business Growth and Sustainable Profit.” The Board of Directors has outlined that the strategic steps taken in 2024 are carried out on three main pillars: business refocusing, fixing the fundamental, and strengthen enablers.

The Board of Commissioners believes that these three key pillars have been implemented through various well-implemented programs. For the business refocusing pillar, The Bank implemented a deposit reprofiling strategy that focuses on low-cost funds so as to encourage an increase in the CASA ratio and business focus on retail financing and make the enterprise banking segment an entry gate in expanding business reach into the business ecosystem and Islamic finance.

In terms of fixing the fundamental pillar, the Bank has consistently improved the capacity and capabilities of its human resources, information technology, and business processes to align with the Bank’s development. For the Strengthen Enablers pillar, the Bank has prioritized performance enablers by improving synergy between the enterprise and retail sectors, allowing it to capture broader, more productive, and higher-quality business opportunities.

Mekanisme Dewan Komisaris dalam Melakukan Pengawasan Sebagai upaya untuk mendorong kinerja Direksi agar mencapai target yang telah ditetapkan, Dewan Komisaris memberikan nasihat dan saran kepada Direksi yang disampaikan melalui mekanisme rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris mendapatkan laporan Direksi setiap bulan, triwulan, dan semester mengenai perkembangan kinerja Bank.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melakukan 26 kali rapat gabungan bersama Direksi. Dari seluruh pertemuan itu, Dewan Komisaris menginisiasi sebanyak 6 (enam) kali dan Direksi 20 kali. Dalam rapat itu, Dewan Komisaris memberikan arahan serta nasihat kepada Direksi. Segala arahan serta nasihat yang diberikan kepada Direksi setelah Dewan Komisaris memahami penjelasan atas suatu permasalahan yang disampaikan oleh Direksi.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI

Dewan Komisaris berpandangan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun yang penuh optimisme bagi Bank Muamalat, berkaca pada perkembangan pencapaian yang terjadi di tahun 2024. Dewan Komisaris meyakini bahwa Direksi telah melakukan upaya terbaik dalam menyusun dan mengimplementasikan strategi, mengendalikan risiko, serta menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang tetap sesuai dengan regulator dan prinsip-prinsip syariah.

Dewan Komisaris menilai bahwa ke depan, fokus utama Bank yang tertuang dalam tema strategis RBB tahun 2025 adalah “Menciptakan Akselerasi Bisnis Retail yang Berkualitas untuk Profit yang Berkelanjutan” akan terealisasi dengan baik. Tema tersebut mendorong Bank untuk fokus pada percepatan pertumbuhan bisnis *retail* yang sehat serta melakukan perbaikan kualitas aset yang diharapkan turut meningkatkan kualitas profitabilitas Bank.

Dalam hal peningkatan kualitas aset, Dewan Komisaris mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan kepada segmen *retail* yang memberi dampak positif terhadap perbaikan profitabilitas. Selain itu, Bank juga akan fokus pada upaya perbaikan likuiditas Bank melalui peningkatan rasio CASA dan fokus pada target segmen yang telah ditetapkan. Peningkatan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan peran Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan.

Melalui inisiatif strategis yang telah ditetapkan tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa Bank Muamalat siap menghadapi tahun 2025 dengan pencapaian kinerja yang lebih baik.

Mechanism for Supervision by the Board of Commissioners To encourage the Board of Directors to meet the established targets, the Board of Commissioners meets with the Board of Directors and provides advice and recommendations. In addition, the Board of Commissioners receives monthly, quarterly, and semi-annual reports from the Board of Directors on the Bank's performance.

Throughout 2024, the Board of Commissioners held 26 joint meetings with the Board of Directors. The Board of Commissioners initiated 6 (six) meetings, while the Board of Directors initiated 20 (twenty). During these meetings, the Board of Commissioners provided advice and recommendations based on a thorough understanding of the issues raised by the Board of Directors.

VIEWS ON BUSINESS PROSPECTS PREPARED BY THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners believes that 2025 will be a year of optimism for Bank Muamalat, considering the progress made in 2024. The Board of Commissioners is confident that the Board of Directors has made significant efforts in formulating and implementing strategies, managing risks, and adhering to corporate governance practices in line with regulatory requirements and Sharia principles.

Looking ahead, the Board of Commissioners believes that the Bank's main focus, as outlined in the strategic theme of the 2025 Business Plan (RBB)—“Creating Quality Retail Business Acceleration for Sustainable Profit”—will be successfully realized. This theme will guide the Bank to focus on accelerating healthy growth in the retail business and enhancing the quality of assets, which is expected to positively impact the Bank's profitability.

To improve the quality of assets, the Board of Commissioners encourages increasing financing distribution to the retail segment, which is expected to enhance profitability. Additionally, the Bank will focus on improving the Bank liquidity by raising the CASA ratio and targeting specific segments that have been determined. These improvements are expected to optimize the Bank's role as a financial intermediary.

Through the strategic initiatives that have been established, the Board of Commissioners believes that Bank Muamalat is well-positioned to face 2025 with improved performance achievement.



PANDANGAN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan tanggung jawab kepatuhan dan moral Bank yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan usaha Bank dan perbankan syariah di Indonesia. Karena itu, dalam menjalankan kegiatan bisnis, Bank Muamalat selalu berupaya mengedepankan kesesuaian dengan prinsip tata kelola dengan berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, serta kesetaraan dan kewajaran.

Dalam menilai penerapan tata kelola di Bank Muamalat, Dewan Komisaris tidak hanya bertanggung jawab pada hasil, tetapi juga proses penerapannya. Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris menilai implementasi penerapan prinsip GCG di Bank Muamalat telah berjalan dengan baik.

Segala ikhtiar yang dilakukan oleh manajemen Bank pada tahun buku tersebut telah memberikan pengaruh positif bagi Bank. Hal itu, antara lain tercermin dari upaya perbaikan yang telah dilakukan manajemen yang memberikan hasil positif. Dengan demikian, pada akhirnya penerapan GCG turut memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan Bank melalui kinerja yang dicapai.

Sebagai bagian dari penerapan prinsip GCG adalah sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang memungkinkan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal dapat melaporkan kecurangan yang terjadi dalam proses bisnis Bank. Dalam sistem ini, pelapor dapat dilindungi identitasnya selama laporan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan.

Dewan Komisaris turut berperan dalam mekanisme *whistleblowing system* dengan melakukan pemantauan dan memberikan wewenang untuk menindaklanjuti pelaporan yang masuk. Adapun pemantauan yang dilakukan Dewan Komisaris, antara lain meliputi pelanggaran etika bisnis dan etika kerja serta pelanggaran rahasia Bank Muamalat.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam melakukan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh 4 (empat) organ penunjang, di antaranya Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Tata Kelola Perusahaan. Keempat komite tersebut telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

VIEWS ON THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

The Board of Commissioners believes that the implementation of good corporate governance (GCG) is both a compliance and moral responsibility for the Bank, which is expected to support the growth of the Bank's business and the Sharia banking sector in Indonesia. Therefore, in conducting its business activities, Bank Muamalat always strives to prioritize adherence to governance principles, focusing on transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

In evaluating the implementation of governance at Bank Muamalat, the Board of Commissioners considers not only the outcomes but also the process of implementation. Throughout 2024, the Board of Commissioners observed that the implementation of GCG principles at Bank Muamalat had been effective.

All efforts made by the Bank's management during the financial year have resulted in a positive impact for the Bank. This is reflected, among other things, in the improvements driven by management, which have led to favorable outcomes. Ultimately, the implementation of GCG has benefited the Bank's stakeholders through the performance achieved.

As part of the implementation of GCG principles, there is a whistleblowing system, which allows both internal and external stakeholders to report fraud that occurs within the Bank's business processes. The system ensures that the identity of the whistleblower is protected, provided the report is substantiated.

The Board of Commissioners also plays a role in overseeing the whistleblowing system by monitoring and authorizing the necessary actions to address the reports. The Board of Commissioners's monitoring includes violations of business and work ethics, as well as breaches of Bank Muamalat's confidentiality.

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF BOC SUPPORTING COMMITTEES

In carrying out its supervisory role, the Board of Commissioners is assisted by 4 (four) supporting committees: the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Corporate Governance Committee. These committees have consistently provided valuable recommendations to the Board of Commissioners in line with their respective duties and functions.

Dewan Komisaris juga telah melakukan penilaian yang didasarkan pada keaktifan komite dalam menjalankan tugas, proses dokumentasi, pelaksanaan rapat, serta rekomendasi yang diberikan. Berdasarkan penilaian tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh komite telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik dan telah berkontribusi terhadap perkembangan Bank.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2024, komposisi Dewan Komisaris mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali. Perubahan pertama, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 27 Juni 2024 menyetujui untuk mengakhiri tugas Dewan Komisaris masa jabatan periode 2019-2024 serta menyetujui pengangkatan Dewan Komisaris masa jabatan periode 2024-2029.

Keputusan RUPST memutuskan mengakhiri tugas Komisaris Utama Mardiasmo serta mengangkat Amin Said Husni sebagai Komisaris Utama Independen, Sartono sebagai Komisaris Independen dan Andre Mirza Hartawan sebagai Komisaris. Berikut susunan Dewan Komisaris setelah Keputusan RUPST 27 Juni 2024:

Komisaris Utama Independen	Amin Said Husni	Independent President Commissioner
Komisaris Independen	Sartono	Independent Commissioner
Komisaris	Andre Mirza Hartawan	Commissioner

Perubahan kedua diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 11 Desember 2024. RUPSLB menyetujui pemberhentian dengan hormat Komisaris Utama Independen Amin Said Husni serta mengangkat Komisaris Utama Independen Sapto Amal Damandari. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah mendapatkan persetujuan penetapan penilaian kemampuan dan kepatutan OJK, sehingga dapat menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya secara penuh sebagai Dewan Komisaris Bank Muamalat. Berikut susunan Dewan Komisaris setelah RUPSLB tanggal 11 Desember 2024:

Komisaris Utama Independen	Sapto Amal Damandari	Independent President Commissioner
Komisaris Independen	Sartono	Independent Commissioner
Komisaris	Andre Mirza Hartawan	Commissioner

The Board of Commissioners has conducted an evaluation based on the committees' activity levels, documentation processes, meeting implementation, and the recommendations provided. Based on this assessment, the Board of Commissioners believes that all committees have effectively carried out their roles and responsibilities, contributing positively to the Bank's development.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2024, the composition of the Board of Commissioners changed twice. The first change occurred during the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on June 27, 2024, where it was agreed to terminate the duties of the Board of Commissioners for the 2019-2024 term and approve the appointment of the new Board of Commissioners for the 2024-2029 term.

The AGMS resolution resulted in the conclusion of the term of President Commissioner Mardiasmo and the appointment of Amin Said Husni as Independent President Commissioner, Sartono as Independent Commissioner, and Andre Mirza Hartawan as Commissioner. The following is the updated composition of the Board of Commissioners after the AGMS resolution on June 27, 2024:

The second change was approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on December 11, 2024. The EGMS authorized the honorable dismissal of Independent President Commissioner Amin Said Husni and the appointment of Sapto Amal Damandari. All members of the Board of Commissioners have received OJK fit and proper assessment approval, so that they can carry out their actions, duties and functions fully as the Board of Commissioners of Bank Muamalat. The following is the Board of Commissioners' composition following the EGMS on December 11, 2024:



PENUTUP DAN APRESIASI

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada Direksi serta seluruh karyawan Bank Muamalat atas kinerja yang telah dipersembahkan pada tahun 2024. Dewan Komisaris meyakini bahwa pencapaian pada tahun buku ini akan menjadi pijakan penting bagi pengembangan Bank Muamalat ke depan.

Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham atas kepercayaan dan dukungannya, sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Begitu juga dengan regulator, Dewan Komisaris berterima kasih atas bimbingannya dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

CLOSING AND APPRECIATION

The Board of Commissioners expresses its appreciation to the Board of Directors and all employees of Bank Muamalat for the performance delivered in 2024. The Board of Commissioners believes that the achievements in this financial year will serve as a significant foundation for the future growth of Bank Muamalat.

The Board of Commissioners also extends its gratitude to the Shareholders for their trust and support, which has enabled the Board of Commissioners to carry out its duties and responsibilities effectively. Similarly, the Board of Commissioners extends its gratitude to the regulators for their guidance in ensuring compliance with applicable laws and regulations.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, 30 April 2025 | April 30, 2025

Sapto Amal Damandari
Komisaris Utama Independen
Independent President Commissioner

Dewan Komisaris

Board of Commissioner



Andre Mirza Hartawan
Komisaris
Commissioner

Sapto Amal Damandari
Komisaris Utama Independen
Independent President Commissioner

Sartono
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Laporan Direksi

Board of Director's Report



Bank terus mendorong transformasi bisnis retail untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan profit berkelanjutan.

The Bank continues to drive retail business transformation to drive healthy business growth and sustainable profits.

Imam Teguh Saptono
Direktur Utama
President Director

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamin, Was-Shalatu Was-Salamu 'Ala Nabiyyina Muhammadin, Wa 'Ala Aalihi Wa Ashhabih Waman Tabi'ahum Bi Ihsanin Ila Yaumiddin, Amma Ba'du.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia-Nya PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dapat melalui tahun 2024 dengan cukup baik di tengah kondisi perekonomian yang dinamis. Pada tahun buku tersebut, Bank berkomitmen untuk meningkatkan pencapaian kinerja yang sejalan dengan tema Rencana Bisnis Bank (RBB): "Pertumbuhan Bisnis yang Sehat dan Profit yang Berkelanjutan" dengan tetap mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal Bank.

Sejumlah program dan inisiatif strategis yang dijalankan pada tahun 2024 telah menghasilkan perbaikan bagi kegiatan usaha Bank. Manajemen berharap, proses *turnaround* yang masih terus berjalan akan menjadi fundamental yang kuat untuk pengembangan bisnis Bank Muamalat ke depan.

KONDISI PEREKONOMIAN

Kondisi perekonomian global sepanjang triwulan IV-2024 memperlihatkan pergerakan yang divergensi serta dinamika ketidakpastian pasar. Rencana kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS) berupa kenaikan tarif impor komoditas berpotensi menimbulkan pengaruh negatif terhadap kondisi perdagangan dunia.

Ketegangan geopolitik di banyak negara yang belum berakhir, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun depan diperkirakan melambat menjadi 3,1%, dari proyeksi tahun 2024 yang sebesar 3,2%. Inflasi dunia diproyeksikan meningkat dibandingkan perkiraan sebelumnya, yang dipengaruhi oleh gangguan rantai pasok.

Di tengah kondisi global yang masuk bergerak dinamis tersebut, kinerja perekonomian nasional pada 2024 relatif stabil walaupun tumbuh sedikit melambat, yakni 5,03%. Sementara tahun sebelumnya sebesar 5,05%.

Dear Shareholders and Stakeholders,

Praise and gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala for His blessings, which have allowed PT Bank Muamalat Indonesia Tbk to successfully navigate through the year 2024 amidst dynamic economic conditions. In this financial year, the Bank remained committed to enhancing its performance in line with the theme of the Bank's Business Plan (RBB): "Healthy Business Growth and Sustainable Profit," while carefully considering both internal and external factors.

Several strategic programs and initiatives implemented in 2024 have led to improvements in the Bank's business activities. Management is optimistic that the ongoing turnaround process will serve as a strong foundation for the future growth and development of Bank Muamalat.

ECONOMIC CONDITIONS

Global economic conditions in the fourth quarter of 2024 showed varying trends and market uncertainties. The United States' trade policy, which includes increasing import tariffs on commodities, has the potential to negatively affect global trade conditions.

Geopolitical tensions in various regions, which remain unresolved, are contributing to a projected slowdown in global economic growth, with an estimated rate of 3.1% next year, a decrease from the 2024 projection of 3.2%. Global inflation is also expected to rise due to ongoing supply chain disruptions.

Amid these dynamic global conditions, the national economic performance in 2024 remained relatively stable, despite a slight slowdown in growth, recorded at 5.03%, compared to 5.05% in the previous year.



Nilai tukar rupiah pada perdagangan di akhir tahun 2024 ditutup menguat 10,50 poin atau 0,06% ke level Rp16.132 per dolar AS setelah sebelumnya juga terapresiasi. Perkembangan nilai tukar rupiah tersebut dipengaruhi oleh makin tingginya ketidakpastian global, terutama terkait dengan arah kebijakan AS, ruang penurunan FFR yang lebih rendah, penguatan mata uang dolar AS secara luas, dan risiko geopolitik yang mengakibatkan berlanjutnya preferensi investor global untuk memindahkan alokasi portofolionya kembali ke AS.

Sedangkan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2024 terjaga dalam kisaran sasarannya $2,5 \pm 1\%$, sejalan inflasi IHK Desember 2024 yang tercatat 1,57% (yoy).

As of the end of 2024, the Rupiah closed at Rp16,132 per US dollar, reflecting a strengthening of 10.50 points or 0.06% after previously appreciating. This exchange rate development was influenced by rising global uncertainty, particularly regarding US policies, limited room for further FFR reduction, the general strengthening of the US dollar, and geopolitical risks that have caused global investors to continue relocating their portfolios toward the US.

The 2024 Consumer Price Index (IHK) inflation remained within the target range of $2.5 \pm 1\%$, with the December 2024 IHK inflation recorded at 1.57% (yoy).



44,7%

Bank berhasil membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp20,4 miliar atau meningkat 44,7% (yoy), dengan pencapaian 102% terhadap target Rencana Bisnis Bank (RBB).

The bank managed to record a profit before tax of Rp20.4 billion or an increase of 44.7% (yoy), with an achievement of 102% of the Bank Business Plan (RBB) target.

Untuk kinerja industri perbankan tahun 2024, pertumbuhan kredit/pembiayaan tetap kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, yakni mencapai 10,39% (yoy). Realisasi tersebut berada dalam kisaran perkiraan Bank Indonesia yang sebesar 10–12%.

Pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja usaha korporasi yang terjaga, di tengah konsumsi rumah tangga yang terbatas. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi, masing-masing sebesar 8,35% (yoy), 13,62% (yoy), dan 10,61% (yoy). Pembiayaan syariah tumbuh sebesar 9,87% (yoy), sementara kredit UMKM tumbuh 3,37% (yoy).

Likuiditas perbankan juga tetap memadai, seperti tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) pada Desember 2024 yang sebesar 25,59%. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan pada Desember 2024 tercatat sebesar 26,89%, tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit. Risiko kredit juga tetap terkendali. Hal ini tercermin dari rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) perbankan pada Desember 2024 yang terjaga rendah, yaitu sebesar 2,19% (bruto) dan 0,75% (neto).

With regards to the banking sector's performance in 2024, loan/financing growth remained strong, supporting economic growth, with a growth rate of 10.39% (yoy). This figure is in line with Bank Indonesia's projected range of 10–12%.

Credit growth was driven by solid corporate business performance, despite weak household consumption. By usage type, working capital loan grew by 8.35% (yoy), investment loan by 13.62% (yoy), and consumer loans by 10.61% (yoy). Sharia financing saw a growth of 9.87% (yoy), while MSME loan increased by 3.37% (yoy).

Banking liquidity remains sufficient, as shown by the ratio of Liquid Assets to Third Party Funds (AL/DPK) of 25.59% in December 2024. The banking sector's Capital Adequacy Ratio (CAR) was 26.89% in December 2024, indicating a strong capacity to absorb risks and support loan growth. Loan risk is also well-managed, as reflected in the banking sector's Non-Performing Loan (NPL) ratio of 2.19% (gross) and 0.75% (net) in December 2024, which remains at a low level.

Pada Triwulan IV 2024, seiring dengan perkembangan ekonomi global dan domestik, Bank juga terus mengantisipasi ketidakpastian perekonomian ke depan, terutama penetapan suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) pada bulan Desember 2024 sebesar 6,00% dan bulan Januari menurun menjadi 5,75%. Sedangkan Tingkat bunga penjaminan LPS (LPS rate) bertahan pada level 4,25%.

In the fourth quarter of 2024, while monitoring global and domestic economic trends, the Bank continues to prepare for potential economic uncertainties, specifically, the determination of the BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) at 6.00% in December 2024 and reduced to 5.75% in January. Meanwhile, the LPS guarantee interest rate (LPS rate) remained unchanged at 4.25%.

PENCAPAIAN KINERJA USAHA 2024

Target Pasar

Target dari segmen bisnis Bank terbagi menjadi 2 (dua) tujuan: (1) memberikan solusi yang tepat untuk nasabah dan (2) meningkatkan kinerja bisnis Bank Muamalat. Dengan pertimbangan tersebut, pada Tahun 2024 Bank fokus pada target bisnis:

1. Haji dan Umrah

Bank akan fokus untuk menggarap segmen haji dan umrah dengan potensi ±500 ribu pendaftar haji dan ±1,5 juta Jemaah umrah per tahun. Fokus target segmen ini juga sejalan dengan kegiatan usaha utama BPKH sebagai PSP.

2. Pensiun

Memberikan pelayanan perbankan dalam bentuk pembiayaan dan layanan perbankan lainnya bagi pensiunan.

3. Enterprise Banking

Melanjutkan strategi tahun sebelumnya *enterprise banking* menjadi *entry gate* untuk segmen retail dalam memperluas peluang bisnis.

4. Rumah Sakit

Bank memberikan pembiayaan pada rumah sakit yang terdiri dari perusahaan yang menjadi *supply chain / value chain* Rumah sakit, dokter dan karyawan, serta *cross selling* produk Bank untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pemberian layanan perbankan di ekosistem rumah sakit.

5. Pendidikan

Bank memperluas jangkauan bisnis untuk masuk ke dalam ekosistem komunitas sekolah, pesantren, dan universitas.

6. ASN/BPG

Bank berfokus pada ASN untuk memberikan pelayanan *payroll* dan *cross selling* produk lainnya.

Kendala dan Tantangan

Sepanjang tahun 2024, Bank dihadapkan oleh sejumlah tantangan, yakni kondisi geopolitik yang masih kurang kondusif, ketidakpastian perkembangan ekonomi Indonesia, serta situasi di tahun politik yang berdampak positif pada peningkatan konsumsi secara agregat serta peningkatan ekspektasi pasar. Di sisi lain, tahun politik dikhawatirkan menyebabkan terjadinya polarisasi dalam masyarakat

BUSINESS PERFORMANCE ACHIEVEMENTS 2024

Market Targets

The Bank's business target is divided into two objectives: (1) offering the right solutions for customers and (2) enhancing Bank Muamalat's business performance. In line with these objectives, the Bank's focus for 2024 is on the following business targets:

1. Hajj and Umrah

The Bank prioritizes the Hajj and Umrah segments, targeting approximately 500,000 Hajj registrants and ±1.5 million Umrah pilgrims annually. This focus aligns with the main activities of the BPKH as a PSP.

2. Pensions

The Bank aims to provide banking services, including financing and other offerings, to retirees.

3. Enterprise Banking

Continuing the previous year's strategy, the Bank uses enterprise banking as a gateway to expand business opportunities in the retail segment.

4. Hospitals

The Bank provides financing to hospitals, including companies within the hospital's supply chain, doctors, and employees. Additionally, the Bank focuses on cross-selling its products to maximize banking services within the hospital ecosystem.

5. Education

The Bank extends its reach into the education sector, targeting school communities, Islamic boarding schools, and universities.

6. ASN/BPG

The Bank focuses on providing payroll services to civil servants (ASN) and cross-selling other products to this segment.

Obstacles and Challenges

In 2024, the Bank faces several challenges, including ongoing geopolitical tensions that remain uncondusive, uncertainty in Indonesia's economic development, and the dynamics of an election year. While the political year is expected to positively influence aggregate consumption and raise market expectations, it also brings concerns. The potential for societal polarization during this period may lead to



sehingga akan mengarah pada kestabilan politik secara signifikan dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Dominasi pangsa pasar perbankan konvensional juga masih menjadi tantangan tersendiri bagi bisnis perbankan syariah. Dalam menghadapi situasi tersebut, perbankan syariah masih harus melalui perjalanan yang membutuhkan peningkatan efisiensi dan inovasi yang dapat memberikan keunggulan kompetitif serta meningkatkan literasi syariah masyarakat.

Tingginya beban bagi hasil kepada nasabah juga menjadi tantangan bagi Bank. Hal ini disebabkan adanya tekanan pasar, yang salah satunya dipicu oleh tren kenaikan suku bunga Bank Indonesia yang sejak akhir tahun 2022 terus meningkat hingga pada level 6,25%. Namun pada Desember 2024, BI7DRR turun menjadi 6,00%, serta suku bunga penjaminan LPS (bertahan pada level 4,25%). Hal ini berpengaruh pada besaran *cost of fund* Bank.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Bank menerapkan strategi *reprofiling* dana pihak ketiga. Inisiatif ini dilakukan untuk mendorong peningkatan dana murah (*low cost fund*), sehingga dapat meningkatkan porsi CASA dan menurunkan beban bagi hasil.

Strategi dan Kebijakan Strategis

Dalam menentukan arah strategi tahun 2024, Bank senantiasa melakukan penilaian terhadap setiap perubahan kondisi lingkungan bisnis, evaluasi kekuatan utama Bank, serta potensi yang dapat dioptimalkan guna mencapai tujuan. Bank juga menyelaraskan arah strategi dengan rencana korporasi yang telah disusun, yakni: "Pertumbuhan Bisnis yang Sehat dan Profit yang Berkelanjutan".

Tema tersebut merupakan pilar dalam *house of strategy* yang menjadi fokus untuk mencapai *goals* 1 hingga 5 tahun ke depan, serta merepresentasikan fokus pada akselerasi pertumbuhan bisnis yang sehat dan peningkatan produktivitas di tengah dinamika ketidakpastian ekonomi yang terjadi di Indonesia maupun global. Tema strategis dan kebijakan manajemen tersebut dituangkan dalam bentuk 3 (tiga) pilar utama:

1. Business Refocusing

Pada pilar pertama, Bank melakukan *refocusing* pada nasabah individu untuk meningkatkan *current account saving account* (CASA) dan fokus penyaluran pembiayaan retail serta menjadikan segmen enterprise banking sebagai *entry gate* dalam memperluas jangkauan bisnis ke dalam ekosistem bisnis dan keuangan syariah seperti lembaga negara, Aparatur Sipil negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), komunitas sekolah negeri dan/atau swasta, pesantren, serta universitas dengan penekanan kuat pada prinsip-prinsip Islam, ekosistem rumah sakit, serta melakukan penetrasi kepada ekosistem haji dan umrah.

significant political instability, which could ultimately impact economic growth.

The Sharia banking sector continues to face challenges due to conventional banking's market dominance. To address this, Sharia banks must focus on improving efficiency and innovation, which can provide competitive advantages while also increasing sharia literacy in the community.

Another challenge is the high profit-sharing burden imposed on customers, which is influenced by market pressures such as rising Bank Indonesia rates. Since late 2022, these rates have risen steadily, reaching 6.25%. However, in December 2024, the BI7DRR was reduced to 6.00%, while the LPS guarantee interest rate remained constant at 4.25%. These fluctuations have an impact on the Bank's cost of funds.

To address these challenges, the Bank has implemented a third-party fund reprofiling strategy. This approach aims to increase low-cost funds, thereby boosting the proportion of CASA and reducing the profit-sharing burden.

Strategy and Strategic Policy

In determining the 2024 strategy, the Bank consistently evaluates changes in the business environment, assesses its core strengths, and identifies opportunities that can be leveraged to achieve its objectives. The Bank also aligns its strategy with the corporate plan, which focuses on "Healthy Business Growth and Sustainable Profit."

This theme serves as the pillar of the house of strategy, with an emphasis on achieving goals for the next 1 to 5 years, and represents a focus on accelerating healthy business growth and increasing productivity amid the ongoing economic uncertainties in both Indonesia and globally. The strategic direction and management policies are outlined in three key pillars:

1. Business Refocusing

In the first pillar, the Bank refocuses on individual customers to increase current account saving accounts (CASA) and focus on retail financing and make the enterprise banking segment as an entry gate in expanding business reach into the Islamic business and finance ecosystem, such as state institutions, State Civil Apparatus (ASN) and State-Owned Enterprises (BUMN), public and/or private school communities, Islamic boarding schools, and universities with a strong emphasis on Islamic principles, hospital ecosystems, and penetrating the haji and umrah ecosystems.

Selain itu Bank Muamalat juga fokus pada meningkatkan layanan dan jasa yang dapat mendorong *low cost fund*, peningkatan transaksi & *fee based income*. Hal ini dilakukan melalui pengembangan dan penambahan fitur dan peningkatan layanan berbasis digital sesuai kebutuhan nasabah.

2. **Fixing The Fundamental**

Pada pilar kedua, Bank secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dan teknologi informasi serta bisnis proses yang sesuai dengan perkembangan bisnis Bank. Inisiatif ini dilakukan melalui peningkatan *capability* dan *skill* sumber daya manusia, melakukan penyesuaian organisasi sesuai kebutuhan bisnis, meningkatkan keandalan teknologi informasi dan layanan digital, memperbaiki layanan dan bisnis proses pembiayaan yang lebih *streamline* dan terus menjaga program efisiensi yang efektif. Bank mengoptimalkan penyelesaian pembiayaan berkualitas rendah melalui langkah-langkah yang efektif, baik dilakukan oleh Bank atau bekerja sama dengan pihak lain.

3. **Strengthen Enablers**

Pada pilar ketiga, Bank memperkuat *enabler* kinerja melalui peningkatan sinergi *enterprise* dan *retail* untuk memperoleh peluang bisnis yang lebih luas, menghasilkan, dan berkualitas. Bank juga melanjutkan pengukuran kinerja berbasis profit untuk jaringan dan kantor pusat, meningkatkan produktivitas dan profitabilitas *channel* distribusi, serta mencermati peluang terhadap pengembangan bisnis secara *inorganic*, dan memperkuat *branding*.

Selain itu, Bank menjalankan strategi *reprofiling* dana pihak ketiga untuk mendorong peningkatan dana murah. Hasil strategi tersebut tercermin dari CASA yang tercatat sebesar Rp23,50 triliun dengan rasio CASA sebesar 53,19%, meningkat dari periode Desember 2023 yang sebesar 47,14%.

Dari sisi pembiayaan, Bank melakukan transformasi *retail*, yakni bank berfokus pada strategi pembiayaan segmen *retail* dan menjadikan *enterprise* sebagai *entry gate* dengan tujuan mengoptimalkan penyaluran pembiayaan *retail*, seiring dengan pengurangan risiko dalam konsentrasi pembiayaan di segmen korporat dan penyaluran pembiayaan yang *high yield*. Hasilnya, komposisi pembiayaan segmen *enterprise* mulai menurun, walaupun masih mendominasi.

Di tahun 2024, Bank juga meluncurkan produk Baru seperti cicil emas atau disebut Solusi Emas Hijrah. Bank telah memulai menyalurkan pembiayaan Solusi Emas Hijrah yang dipasarkan secara umum.

In addition, Bank Muamalat focuses on enhancing services and offerings to encourage low-cost funds, increase transactions and fee-based income. This is carried out by developing and improving digital-based services tailored to customer needs.

2. **Fixing The Fundamental**

The second pillar focuses on continuously enhancing the capacity and capability of the Bank's human resources, information technology, and business processes to align with its evolving business needs. This initiative involves improving the skills and capabilities of the human resources, adjusting the organizational structure to meet business needs, strengthening the reliability of information technology and digital services, and streamlining services and business financing processes. Additionally, the Bank remains committed to maintaining effective efficiency programs. To optimize financing quality, the Bank focuses on resolving low-quality financing through effective measures, whether undertaken by the Bank itself or in collaboration with an external party.

3. **Strengthen Enablers**

The third pillar focuses on enhancing performance enablers by fostering synergies between enterprise and retail segments to create broader, more productive, and high-quality business opportunities. The Bank also continues to evaluate profit-based performance for both its networks and head offices while working to increase the productivity and profitability of its distribution channels. Additionally, the Bank explores opportunities for inorganic business development and strengthens its branding.

In addition, the Bank is implementing a third-party fund reprofiling strategy to boost low-cost funds. This strategy has resulted in a significant increase in CASA, which reached Rp23.50 trillion, with a CASA ratio of 53.19%, an increase from 47.14% in December 2023.

In terms of financing, the Bank carried out a retail transformation, in which the bank focused on the retail segment financing strategy and made the enterprise as the entry gate with the aim of optimizing the distribution of retail financing, along with reducing risk in the concentration of financing in the corporate segment and channeling high yield financing. Consequently, the composition of enterprise segment financing has started to decrease, although it still remains dominant.

In 2024, the Bank also introduced new products, such as gold installment or the Hijrah Gold Solution (Solusi Emas Hojrah). The Bank has been trialing the Hijrah Gold Solution, and by December 2024, it was officially launched to the public.



Solusi Emas Hijrah akan menjadi unggulan Bank Muamalat karena SLA dilakukan 1 (satu) hari, limit gramasi emas hingga 500 gram dengan jangka waktu pembiayaan hingga 10 tahun. Selain itu, Bank melakukan penambahan varian produk baru seperti KPR Hijrah Baitullah dan Multiguna untuk payroll ASN, sehingga mendorong peningkatan pencairan pembiayaan multiguna.

Bank terus meningkatkan program akuisisi porsi haji melalui peningkatan secara organik maupun optimalisasi kerja sama dengan mitra, termasuk kampanye yang dilakukan di seluruh cabang dan di Kuala Lumpur. Bank juga telah melakukan optimalisasi akuisisi program haji, seperti tercermin dari peningkatan *market share* Bank dibandingkan dengan nasional sebagai berikut:

- Bank berhasil melakukan akuisisi haji reguler sebanyak 47.874 jamaah, dengan porsi haji reguler Bank per Desember 2024 sebesar 13,51% dari total porsi haji nasional.
- Bank berhasil melakukan akuisisi haji khusus sebanyak 22.952 jamaah, dengan porsi haji khusus Bank per Desember 2024 sebesar 57,77% dari total porsi haji nasional.
- Total pencapaian akuisisi porsi haji Bank Muamalat sebanyak 70.826 jamaah, dengan pencapaian 101% jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh BPKH sebanyak 70,115 jamaah.
- Atas perolehan porsi haji tersebut, mendorong tabungan haji yang meningkat sebesar 12,3% yoy dari sebelumnya posisi Desember 2023 Rp1,40 triliun menjadi Rp1,57 triliun dengan peningkatan NOA tumbuh sebesar 5,6% yoy dari sebelumnya posisi Desember 2023 sebanyak 873rb NOA menjadi 922rb NOA.

Bank melalui aplikasi layanan *mobile banking* MDIN (Muamalat Digital Islamic Network) terus berupaya meningkatkan fitur dan jumlah penggunaannya yang merupakan langkah strategis dalam meningkatkan *funding* dan *fee based income*. Bank telah meningkatkan fitur dan akuisisi MDIN, dari sebelumnya 81 fitur menjadi lebih dari 151 fitur.

Optimalisasi MDIN telah mendorong jumlah *user* MDIN yang meningkat sebesar 19,50% (yoy) atau 93.849 *user*, dari 481 ribu *user* pada Desember 2023, menjadi 575 ribu *user* di Desember 2024. Pada periode yang sama, volume transaksi meningkat sebesar 31,98% (yoy), dari 19,98 juta transaksi menjadi 26,36 juta transaksi dan nominal transaksi meningkat sebesar 22,00% (yoy), dari Rp25,69 triliun menjadi Rp31,34 triliun.

The Hijrah Gold Solution is set to be a flagship product for Bank Muamalat, offering a one-day service level agreement (SLA), with financing for gold up to 500 grams and a repayment period of up to ten years. Additionally, the Bank has introduced new product variants like Hijrah Baitullah Mortgage and Multiguna for ASN payroll.

The Bank continues to focus on growing its hajj program acquisition through both organic growth and optimized partnerships. This includes campaigns across all branches, including in Kuala Lumpur. The Bank has seen positive results in its hajj program acquisition, as reflected in an increase in its market share compared to national figures, as follows:

- The Bank successfully acquired 47,874 regular hajj pilgrims, with the Bank's regular hajj portion reaching 13.51% of the total national hajj portion as of December 2024.
- The Bank successfully acquired 22,952 special hajj pilgrims, with its special hajj portion amounting to 57.77% of the total national hajj portion as of December 2024.
- Overall, the Bank's total hajj portion acquisition reached 70,826 pilgrims, exceeding the target set by BPKH of 70,115 pilgrims, achieving 101% of the target.
- This success in hajj portion acquisition has led to a 12.3% yoy increase in hajj savings, growing from Rp1.40 trillion in December 2023 to Rp1.57 trillion. Additionally, the NOA grew by 5.6% yoy, from 873 thousand NOA in December 2023 to 922 thousand NOA.

The Bank, through its MDIN (Muamalat Digital Islamic Network) mobile banking application, continues to enhance its features and expand its user base as part of its strategic efforts to increase funding and fee-based income. The Bank has significantly increased the number of MDIN features, expanding from 81 features to over 151 features.

The optimization of MDIN has led to a 19.50% (yoy) increase in the number of MDIN users, growing by 93,849 users, from 481 thousand users in December 2023 to 575 thousand users in December 2024. During the same period, transaction volume increased by 31.98% (yoy), from 19.98 million transactions to 26.36 million transactions, while the transaction nominal value increased by 22.00% (yoy), from Rp25.69 trillion to Rp31.34 trillion.

Peran Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis

Direksi memiliki peranan penting dalam menentukan arah dan prioritas strategi Bank serta memastikan kegiatan usaha Bank agar selalu sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Direksi dibantu oleh unit kerja dan komite di bawahnya, terlibat langsung dalam menyiapkan perumusan strategi dan kebijakan strategis.

Komite Direksi dimaksud adalah *Risk Management Committee*, Komite Kebijakan Pembiayaan, Komite Pembiayaan, Komite Bisnis, *IT Steering Committee*, ALCO, dan *Human Capital Committee*. Selain komite tersebut, Unit Kerja Perencanaan Strategis turut mendukung Direksi dalam perumusan serta pemantauan realisasi rencana bisnis.

Proses Direksi untuk Memastikan implementasi Strategi

Evaluasi pelaksanaan strategi merupakan tahapan penting yang perlu dilakukan untuk memastikan suatu strategi telah diimplementasi dengan baik. Dalam menjalankan implementasi evaluasi pelaksanaan strategi dan kebijakan strategis, Direksi menerima laporan secara berkala dari komite terkait serta melakukan tindak lanjut dari temuan audit serta rekomendasi dari audit internal Bank, auditor eksternal, serta hasil pengawasan yang dilakukan oleh OJK maupun otoritas lainnya.

Laporan berkala yang diterima, kemudian menjadi dasar Direksi untuk melakukan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi audit dari audit internal Bank. Begitu pun rekomendasi dari auditor eksternal dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh OJK maupun otoritas lainnya.

Pencapaian Kinerja

Pencapaian keuangan secara umum dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi total aset tercatat sebesar Rp60,02 triliun, turun 10,35% (yoy). Sejalan dengan upaya Bank dalam *reprofil* aset yang memiliki kualitas dan *yield* yang tinggi.
2. Penyaluran pembiayaan tercatat sebesar Rp16,76 triliun, lebih rendah 25,38% dibandingkan tahun sebelumnya (yoy). Bank masih fokus pada strategi transformasi *retail* dengan melakukan *shifting* pembiayaan melalui optimalisasi penyaluran pembiayaan *retail* seiring pengurangan risiko dalam konsentrasi pembiayaan di segmen korporat dan penyaluran pembiayaan yang *high yield*.

The Board of Directors' Role in Developing Strategy and Strategic Policies

The Board of Directors plays a key role in determining the direction and priorities for the Bank's strategy, ensuring that its business activities consistently align with the established vision and mission. The Board of Directors is supported by various work units and committees, which are directly involved in the development of strategies and strategic policies. The committees under the Board of Directors include the Risk Management Committee, Financing Policy Committee, Financing Committee, Business Committee, IT Steering Committee, ALCO, and Human Capital Committee. Additionally, the Strategic Planning Work Unit assists the Board of Directors in developing and monitoring the implementation of business plans.

Board of Directors Process for Ensuring Strategy Implementation

Evaluating the implementation of a strategy is a crucial step to ensure that strategies have been implemented effectively. The Board of Directors regularly receives reports from the relevant committees to assess the progress of strategy implementation and strategic policies. These reports also help the Board address audit findings and recommendations from the Bank's internal and external auditors, as well as the supervision results from OJK and other authorities.

These periodic reports serve as the basis for the Board of Directors to conduct further evaluations and make necessary adjustments. The Board of Directors consistently follows up on audit findings and recommendations from both internal and external auditors, as well as the oversight results from OJK and other regulatory bodies.

Performance Achievement

The financial achievements are outlined as follows:

1. The total asset realization was recorded at Rp60.02 trillion, a decrease of 10.35% (yoy). Consistent with the Bank's efforts to reprofiling on high-quality, high-yield assets.
2. Financing distribution was recorded at Rp16.76 trillion, representing a 25.38% decrease compared to the previous year (yoy). The Bank remains focused on its retail transformation strategy, which involves shifting financing by optimizing retail financing disbursement while reducing risk in financing concentration in the corporate segment and high-yield financing disbursements.



3. Penghimpunan pendanaan tercatat sebesar Rp44,19 triliun, menurun 12,10% (yoy). Bank terus menerapkan strategi melakukan *reprofiling* dana pihak ketiga untuk mendorong peningkatan dana murah (*low cost fund*).
4. Dari sisi profitabilitas, Bank senantiasa meningkatkan profitabilitas melalui upaya peningkatan *margin income* dengan penyaluran pembiayaan yang memberikan *high yield* dan *fee-based income* serta menurunkan *margin expense* dengan strategi *reprofiling* DPK dan *operating expense* (OPEX) melalui upaya efisiensi operasional yang bertujuan untuk menjaga performa keuangan dengan memastikan seluruh aspek dapat berkontribusi produktif terhadap pertumbuhan Bank. Melalui strategi tersebut, Bank berhasil membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp20,4 miliar atau meningkat 44,72% (yoy), dengan pencapaian 102,07% terhadap target Rencana Bisnis Bank (RBB).
5. Rasio-rasio utama Bank dalam pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Permodalan Bank, tercermin dari rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank yang pada Desember 2024 sebesar 28,48%. Hal ini terjadi karena penurunan total modal. Sedangkan total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) tercatat menurun, sejalan dengan strategi Bank untuk fokus pada bisnis ritel dan lebih selektif dalam penyaluran pembiayaan segmen korporasi.
 - b. Kemampuan Bank dalam menghasilkan laba, seperti tercermin dari *Return on Equity* (ROE), mencapai 0,42% dan *Return on Asset* (ROA) 0,03% atau masing-masing 144,76% dan 109,85% dari target.
 - c. Upaya Bank meningkatkan efisiensi di segala aspek, perbaikan proses, dan juga kontrol biaya agar lebih efektif, berdampak pada peningkatan produktivitas. Namun dengan adanya peningkatan beban dari sisi *margin expense*, menyebabkan secara keseluruhan rasio Beban Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO) tercatat sebesar 99,04%. Posisi tersebut lebih baik dibandingkan target yang sebesar 99,70% (pencapaian 100,66%).
 - d. Dari sisi kualitas pembiayaan yang ditunjukkan oleh rasio *Non-Performing Financing* (NPF), untuk NPF *gross* tercatat sebesar 3,35%, dengan NPF *nett* 2,74%. Bank akan terus mengupayakan perbaikan kualitas pembiayaan tersebut ke depan, sehingga dapat terjaga sesuai dengan target yang telah ditentukan.
3. Funding collection was recorded at Rp44.19 trillion, a decrease of 12.10% (yoy). The Bank continues to implement its third-party fund reprofiling strategy to boost low-cost funds.
4. In terms of Profitability, the Bank continues to enhance profitability by increasing margin income through high-yield financing distribution and fee-based income, while reducing margin expenses through third-party fund reprofiling (DPK) and operational expense (OPEX) efficiency efforts. These initiatives are aimed at maintaining financial performance and ensuring all aspects contribute productively to the Bank's growth. As a result, the Bank recorded a profit before tax of Rp20.4 billion, an increase of 44.72% (yoy), exceeding the Bank's Business Plan (RBB) target with an achievement of 102.07%.
5. The Bank's main ratios in its achievements can be explained as follows:
 - a. Bank capital, reflected from the Bank's Capital Adequacy Ratio (KPMM), which was 28.48% in December 2024. This decrease was due to a decline in total capital. At the same time, total Risk-Weighted Assets (ATMR) decreased, in line with the Bank's strategy to focus more on retail business and be more selective in corporate financing disbursement.
 - b. The Bank's ability to generate profits, as indicated by the Return on Equity (ROE), reached 0.42%, and Return on Assets (ROA) was 0.03%. These figures represented 144.76% and 109.85% of their respective targets.
 - c. The Bank's efforts to improve efficiency across all areas, optimize processes, and control costs effectively, leading to higher productivity. However, due to an increase in margin expenses, the overall Operating Expenses to Operating Income (BOPO) ratio was recorded at 99.04%. This was an improvement over the target of 99.70%, with an achievement of 100.66%.
 - d. In terms of financing quality, as reflected in the Non-Performing Financing (NPF) ratio, the gross NPF was recorded at 3.35%. The net NPF was recorded at 2.74%, which also exceeded the target of 0.72% (achieving 27.00%). The Bank will continue its efforts to enhance the quality of financing to align with the predetermined targets in the future.

Pencapaian kinerja keuangan hingga akhir tahun 2024 secara umum masih memerlukan perbaikan dan percepatan, sehingga bank terus mendorong bisnis dengan transformasi Retail dengan harapan dapat menciptakan Pertumbuhan Bisnis yang Sehat dan Profit yang Berkelanjutan.

The overall financial performance by the end of 2024 shows that there is still room for improvement and acceleration. As such, the Bank remains focused on its Retail transformation strategy to achieve Healthy Business Growth and Sustainable Profit moving forward.

Komitmen Penyaluran Kredit kepada UMKM

Bank Muamalat memiliki komitmen kuat untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), seperti ditunjukkan melalui penyaluran pembiayaan. Pada tahun 2024, realisasinya sebesar Rp1,74 triliun, kendati sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,29 triliun

Penurunan tersebut merupakan dampak dari penyaluran pembiayaan UMKM yang selektif sejalan dengan fokus utama Bank yang ditujukan kepada segmen bisnis ekosistem haji & umrah, Aparatur Sipil Negara/Bank Penyalur Gaji (ASN/BPG), pensiun, rumah sakit, pendidikan, dan segmen *enterprise* sebagai *entry gate* untuk segmen *retail* dalam memperluas peluang bisnis retail.

PROSPEK USAHA DAN HAL PENTING YANG BERPOTENSI TERJADI KE DEPAN

Sejumlah kondisi diperkirakan bakal mempengaruhi kondisi perekonomian global maupun domestik pada tahun depan. Misalnya, volatilitas harga komoditas yang masih tinggi, meningkatnya suku bunga, kendala rantai pasok global, hingga kerentanan ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim. Kondisi tersebut mendorong prospek ekonomi global diproyeksikan hanya tumbuh sekitar 3,2% pada 2024 dan 2025.

Menghadapi kondisi yang dinamis pada tahun depan, Bank Muamalat telah menyiapkan sejumlah inisiatif strategis yang selaras dengan tema strategis Rencana Bisnis Bank Muamalat Tahun 2025, yaitu “Menciptakan Akselerasi Bisnis Retail yang berkualitas untuk profit yang berkelanjutan”. Tema tersebut merepresentasikan fokus pada akselerasi pertumbuhan bisnis *retail* yang sehat dan juga peningkatan produktivitas di tengah dinamika ketidakpastian ekonomi yang terjadi di Indonesia maupun di kondisi Global.

Tema Strategis dan Kebijakan manajemen tersebut dituangkan dalam bentuk 4 (empat) pilar utama.

1. **Business Growth**

Pada pilar pertama, Bank memperluas kolaborasi dan sinergi bisnis yang *sizeable* dan fokus pada akselerasi pertumbuhan bisnis *retail* serta menjadikan *enterprise* sebagai *entry gate* untuk segmen *retail*. Bank mendorong pertumbuhan bisnis *retail* melalui strategi *refocusing* pada nasabah dana pihak ketiga untuk meningkatkan CASA dan pembiayaan segmen retail yang fokus pada pembiayaan konsumsi dan pembiayaan usaha kecil dan menengah (SME) yang memiliki *high yield* dan *low risk*, Bank memanfaatkan potensi *channel* bisnis *enterprise banking* untuk memperluas jangkauan bisnis retail untuk pembiayaan maupun penempatan dana.

Commitment to the Disbursement of Loans to MSMEs

Bank Muamalat remains strongly committed to supporting the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), as reflected by its financing disbursement. In 2024, the Bank's MSME financing reached Rp1.74 trillion, a slight decrease from the previous year, which was Rp2.29 trillion.

This decline was a result of the Bank's more selective approach in disbursing MSME financing, in line with regulatory guidance. The Bank's primary focus is now on the hajj & umrah ecosystem, State Civil Apparatus/ Salary Distribution Banks (ASN/BPG), pensions, hospitals, education, and the enterprise segment, which serves as an entry gate for expanding opportunities in the retail business.

BUSINESS PROSPECTS AND KEY FACTORS WITH POTENTIAL IMPACT IN THE FUTURE

Several factors are expected to influence global and domestic economic conditions in the coming year. These include high volatility in commodity prices, rising interest rates, disruptions in the global supply chain, and the increasing vulnerability of food and energy security due to climate change. These challenges are contributing to a global economic outlook that is projected to grow by only around 3.2% in 2024 and 2025.

In response to the dynamic conditions anticipated next year, Bank Muamalat has developed several strategic initiatives that align with its 2025 Business Plan, which centers around the theme “Creating Quality Retail Business Acceleration for Sustainable Profit.” This theme emphasizes accelerating the growth of a healthy retail business and increasing productivity amidst the economic uncertainties both in Indonesia and globally.

The Strategic Theme and Management Policy are outlined in 4 (four) key pillars:

1. **Business Growth**

In the first pillar, the Bank seeks to enhance collaboration and business synergy that are scalable, with a focus on accelerating the growth of its retail business and positioning enterprise banking as an entry gate for the retail segment. The Bank drives retail growth by refocusing on third-party fund customers to increase CASA and expand financing in the retail sector, particularly in consumer financing and small and medium enterprise (SME) financing, which offer high yields and low risks. The Bank also leverages its enterprise banking channels to broaden the reach of its retail business in terms of financing and fund placement.



Bank juga akan memperluas sinergi baik dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) atau mitra usaha lain dalam meningkatkan potensi bisnis. Bank berfokus pada meningkatkan layanan dan jasa yang dapat mendorong *low cost fund*, peningkatan transaksi & *fee based income* melalui pengembangan dan penambahan fitur serta peningkatan layanan berbasis digital sesuai kebutuhan nasabah.

2. Asset Quality

Pada pilar kedua, Bank melakukan optimalisasi *recovery* dan *bad bank management* dengan menurunkan LQF/NPF serta mencegah pemburukan kualitas lebih jauh. Bank akan mengoptimalkan penyelesaian pembiayaan berkualitas rendah melalui langkah-langkah yang efektif, baik dilakukan oleh Bank atau bekerja sama dengan pihak lain.

3. People, Operation & IT

Pada pilar ketiga, Bank akan memperkuat kapasitas dan kapabilitas SDM, melakukan pengembangan digital dan peningkatan proses bisnis yang efektif serta efisien sesuai kebutuhan nasabah. Bank secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM dan teknologi informasi serta bisnis proses yang sesuai dengan perkembangan bisnis Bank melalui peningkatan *capability* dan *skill* SDM, menyesuaikan organisasi sesuai kebutuhan bisnis, meningkatkan keandalan teknologi informasi dan layanan digital, memperbaiki layanan dan bisnis proses pembiayaan yang lebih *streamline* dan terus menjaga program efisiensi yang efektif.

4. Inorganic Business Growth

Pada pilar keempat, Bank akan melakukan persiapan dan membuka peluang untuk melaksanakan strategi non organik dalam rangka pelaksanaan *turnaround plan*. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan rencana jangka panjang dan strategi percepatan Bank untuk melakukan perbaikan fundamental bisnis.

The Bank will also enhance synergies with the Hajj Financial Management Agency (BPKH) or other business partners to increase business potential. It aims to improve services that drive low-cost funds, increase transactions and fee-based income by developing and adding features, as well as enhancing digital services to meet customer needs.

2. Asset Quality

In the second pillar, the Bank will focus on optimizing recovery and bad bank management by reducing LQF/NPF and preventing further degradation in asset quality. It will take effective steps to resolve low-quality financing, either by the Bank or in collaboration with other parties.

3. People, Operation, & IT

In the third pillar, the Bank will strengthen the capacity and capabilities of its HR, develop digital capabilities, and improve effective and efficient business processes to better serve customer needs. The Bank continuously improves the capacity and capability of HR and information technology and business processes in accordance with the Bank's business development through improving HR capabilities and skills, adjusting the organization according to business needs, improving the reliability of information technology and digital services, streamlining financing and service processes, and maintaining ongoing efficiency programs.

4. Inorganic Business Growth

In the fourth pillar, the Bank will evaluate and explore opportunities to implement non-organic strategies as part of its turnaround plan. This aligns with the Bank's long-term vision and acceleration strategy to drive significant business improvements.

Hal Penting yang Berpotensi Terjadi di Masa Mendatang

Tantangan yang dihadapi ke depan tidak terlepas dari kondisi global yang masih dipengaruhi berbagai ketidakpastian, seperti arah kebijakan ekonomi dan perdagangan Amerika Serikat (AS). Sedangkan untuk perekonomian Indonesia, relaksasi kebijakan ekonomi, khususnya moneter dapat menjadi arah positif dalam mendukung pertumbuhan kinerja perbankan pada tahun depan. Pemangkasan suku bunga diharapkan dapat berdampak positif bagi penghimpunan dana perbankan, sehingga meningkatkan pertumbuhan DPK dan menurunkan biaya dana (*cost of fund*).

Important Factors That May Occur in the Future

The challenges ahead are closely linked to global conditions, which are still influenced by various uncertainties, such as the trajectory of the United States' economic and trade policies. For Indonesia, however, a relaxation of economic policies, particularly in the monetary sector, could provide a positive outlook for supporting the growth of the banking sector next year. Expected interest rate cuts may help boost bank fund raising, leading to increased growth in DPK and reduced funding costs.

Berkenaan dengan perbankan syariah, OJK telah menerbitkan “Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027” yang bertujuan meningkatkan ketahanan dan daya saing perbankan syariah. Beberapa di antaranya, yaitu program kerja konsolidasi perbankan syariah dan peningkatan daya saing dan efisiensi bank syariah. Tak hanya itu, OJK juga telah merilis Peraturan OJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta 3 (tiga) pedoman produk perbankan bank syariah.

Untuk merespons tantangan tersebut, Bank tetap fokus menumbuhkan bisnis *retail banking* dari sisi pendanaan dan pembiayaan melalui pengembangan dan perbaikan, sehingga dapat mengoptimalkan profitabilitas Bank. Bank Muamalat juga akan melakukan transformasi ekosistem haji dan ekonomi syariah untuk akselerasi bisnis dengan memperluas porsi haji serta memberikan pelayanan perbankan pada ekosistem ekonomi syariah melalui perluasan kerja sama dengan mitra strategis. Selain itu, Bank akan menyusun program kerja sinergi dengan seluruh unit bisnis, baik pendanaan dan pembiayaan serta pemanfaatan pengembangan teknologi informasi sesuai yang dibutuhkan oleh nasabah.

Dari sisi peningkatan produk dan layanan, Bank terus melakukan inovasi khususnya pengembangan layanan digital. Adapun Langkah strategis yang akan dilakukan, antara lain memperkuat penerapan teknologi digital dalam menyelenggarakan layanan sistem pembayaran, membuat layanan sistem pembayaran menjadi terintegrasi, simpel dan mudah, penambahan fitur dan layanan sistem pembayaran dalam berbagai kanal transaksi, serta menjalin kerja sama strategis dengan pihak ketiga untuk menambah dan meningkatkan layanan sistem pembayaran.

Memasuki tahun 2025 dan menjelang 33 tahun beroperasinya Bank Muamalat, kami melakukan kajian dan pendalaman terkait penyesuaian Visi dan Misi Bank Muamalat, agar tetap relevan dengan perkembangan kondisi serta strategi ke depan. Dengan dukungan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, perubahan Visi dan Misi Bank Muamalat resmi diperbarui dengan tetap mengusung nilai inti Bank Muamalat, IDEAL. Dengan visi baru “Menjadi Jalan Hijrah menuju Berkah”, menguatkan kembali makna Bank Muamalat menjadi solusi hijrah terdepan bagi ekosistem bisnis dan keuangan syariah dengan kinerja keuangan yang berkelanjutan untuk mencapai keberkahan. Penjelasan perubahan visi dan misi tersebut terdapat pada Profil Perusahaan.

With regard to Islamic banking, the OJK has introduced the “Roadmap for the Development and Strengthening of Indonesian Sharia Banking (RP3SI) 2023-2027.” This initiative aims to enhance the resilience and competitiveness of Sharia banking. Key aspects include a work program focused on consolidating Sharia banks and improving their competitiveness and efficiency. Additionally, the OJK has released OJK Regulation No. 2 of 2024, on the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, along with three guidelines for Sharia banking products.

To address these challenges, the Bank remains committed to growing its retail banking business, focusing on both funding and financing through development and improvements to optimize the Bank profitability. Bank Muamalat will also work to transform the Hajj and Sharia economy ecosystem, accelerating business growth by expanding its involvement in the Hajj sector and offering banking services within the Sharia economy ecosystem through expanded collaborations with strategic partners. Additionally, the Bank will implement a synergy program across all business units, including both funding and financing, while leveraging advancements in information technology to meet customer needs.

In terms of product and service improvements, the Bank continues to innovate, particularly in digital services. The strategic actions planned include strengthening the use of digital technology to enhance payment system services, ensuring these services are integrated, simple, and user-friendly, adding new features and services across various transaction channels, and developing strategic partnerships with third parties to enhance and expand payment system offerings.

Welcoming the year 2025 and approaching its 33 years of Bank Muamalat’s operation, we have conducted reviews and in-depth study related to the adjustment of Bank Muamalat’s vision and mission, in order to stay relevant to the dynamic conditions and future strategies. With the support of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board, the changes to Bank Muamalat’s vision and mission have been officially updated while still upholding Bank Muamalat’s core values, IDEAL. With the new vision Becoming the Path of ‘Hijrah’ Towards ‘Barokah’”, it re-strengthens the meaning of Bank Muamalat as the leading hijrah solution for the sharia business and financial ecosystem with sustainable financial performance to reach blessings. Details of the vision and mission changes are available in the Company Profile.



PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Praktik penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Muamalat, antara lain mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Usaha Syariah. Bank juga menyesuaikan penerapan GCG sesuai dengan prinsip syariah dan praktik terbaik di lingkungan industri.

Pada tahun 2024, Bank melalui Satuan Kerja Kepatuhan melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) pelaksanaan GCG dengan hasil penilaian pada peringkat 3 (tiga) yang mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapannya, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

Bank juga telah memiliki struktur tata kelola perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi serta Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi. Seluruh unsur tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsinya masing-masing.

Mekanisme tata kelola di Bank Muamalat berlandaskan kebijakan dan prosedur operasional terkait GCG (*soft structure*). Kebijakan dan prosedur tersebut diimplementasikan dalam kegiatan bisnis Bank sehari-hari, sementara efektivitasnya dikaji secara berkala. Norma tersebut secara berkelanjutan dikomunikasikan kepada seluruh jajaran karyawan dalam organisasi Bank untuk dapat dijadikan sebagai landasan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Bank.

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Kebijakan, pengelolaan dan perencanaan strategi pengembangan Teknologi Informasi (TI) senantiasa sejalan dengan strategi dan tujuan bisnis yang akan dicapai oleh Bank. Melalui penerapan tata kelola TI yang baik dan sesuai aturan yang berlaku, hingga saat ini telah terbukti mampu mendukung keberhasilan transformasi *digital* Bank.

Proses transformasi *digital* masih terus dikembangkan. Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan ekosistem *digital* syariah yang lebih optimal dengan menciptakan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi melalui *digital banking*.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) at Bank Muamalat adheres to several regulations, including the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17 of 2023 regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks and the Financial Services Authority Regulation No. 2 of 2024 regarding the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Businesses. Additionally, the Bank ensures that its GCG implementation aligns with Sharia principles and adheres to industry best practices.

In 2024, the Bank, through the Compliance Work Unit, conducted a self-assessment of its corporate governance practices. The assessment resulted in a rating of 3 (three), indicating that the Bank's management has implemented GCG in a generally appropriate manner. This rating reflects the effective application of key GCG principles. However, any weaknesses identified in the implementation were found to be significant and require the Bank's management to give them proper attention.

The Bank has a corporate governance structure that includes the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and various committees at both the Board of Commissioners and Board of Directors levels. Each of these bodies carries out its duties and responsibilities according to its specific function.

The governance mechanism at Bank Muamalat is based on operational policies and procedures related to GCG (*soft structure*). These policies and procedures are applied in the Bank's daily business operations, with their effectiveness being reviewed periodically. These guidelines are consistently communicated across all employees of the organization to ensure that GCG principles are implemented throughout the Bank.

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT

The policies, management, and planning of Information Technology (IT) development strategies at the Bank are closely aligned with its business strategies and objectives. By implementing effective IT governance in compliance with applicable regulations, the Bank has successfully supported its digital transformation journey.

The digital transformation process is ongoing, with efforts focused on creating a more efficient Sharia digital ecosystem. The goal is to enhance ease and convenience in digital banking transactions.

Bank telah mencanangkan rencana dan strategi yang komprehensif di bidang TI yang mencakup:

1. Pengembangan infrastruktur dan aplikasi yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan telekomunikasi dan data center (serta *disaster recovery center*) yang selalu dalam keadaan optimal dalam mendukung operasional Bank serta mampu mengantisipasi pertumbuhan bisnis.
2. Menjamin ketersediaan sistem TI yang andal untuk memberikan layanan yang cepat, efisien dan aman dalam mencapai proses operasional dan Bisnis Bank sesuai dengan target dan *Services Level Agreement* (SLA) yang ditetapkan.
3. Melakukan pengelolaan dan pengendalian risiko operasional sistem TI.

Sepanjang tahun 2024, pengelolaan TI di lingkungan Bank mendapatkan sejumlah apresiasi dari pihak eksternal, yaitu berupa penghargaan. Di antaranya:

The Bank has launched a comprehensive IT strategy and plan, which includes:

1. Development of infrastructure and applications, including hardware, software, telecommunication networks, and data centers (as well as disaster recovery centers), to ensure they remain in optimal condition, supporting the Bank's operations and anticipating future business growth.
2. The Bank is committed to ensuring the availability of IT systems that provide fast, efficient, and secure services, aligning with the Bank's operational and business processes to meet the determined targets and Service Level Agreements (SLA).
3. Managing and controlling IT system operational risks.

Throughout 2024, the Bank's IT management received various appreciations from external parties, including several awards, among others:

No.	Nama Penghargaan Name of Award	Kategori Category	Pemberi Penghargaan Awarding Institution	Tanggal Diberikan Date
1.	The 2 nd Best – Email Service	Sharia Bank	Info Bank Media Group	2 Juli 2024 July 2, 2024
2.	The 2 nd Best – Internet Banking	Sharia Bank	Info Bank Media Group	2 Juli 2024 July 2, 2024

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bank Muamalat menjadikan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai satu di antara fokus utama dalam menjalankan kegiatan operasional. Bank memandang bahwa SDM unggul sangat penting untuk mendukung pencapaian target, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang Bank.

Dengan pertimbangan tersebut, Bank senantiasa menyiapkan program pengembangan SDM secara berkelanjutan. Apalagi, kebijakan tersebut juga selaras dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum.

Program pengembangan dilakukan melalui kegiatan yang terstruktur, optimalisasi efektivitas biaya tenaga kerja, peningkatan skema *reward* dan *recognition* yang lebih terarah, serta peningkatan infrastruktur SDM yang juga mendukung penguatan nilai-nilai budaya Bank. Melalui inisiatif pengelolaan dan pengembangan SDM tersebut, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan *engagement* terhadap Bank.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

Bank Muamalat prioritizes Human Capital (HC) management as a key focus in its operational activities. The Bank recognizes that a strong and capable HC is crucial for achieving its short, medium, and long-term goals.

With this in mind, the Bank has established a sustainable HC development program. This approach is aligned with the provision of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 24 of 2022 on the Development of Human Resources Quality for Commercial Banks.

The development program includes structured activities aimed at optimizing labor costs, increasing targeted reward and recognition schemes, and enhancing HC infrastructure to support the strengthening of the Bank's cultural values. Through these HC management and development initiatives, the Bank expects to boost productivity and employee engagement.



Selama periode Tahun 2024, Bank Muamalat telah melaksanakan sejumlah inisiatif dan program kerja sesuai dengan target atau rencana pengembangan SDM yang telah ditetapkan oleh Bank, yakni:

1. Memberikan solusi pembelajaran yang tepat dan terintegrasi untuk peningkatan produktivitas dan peningkatan kinerja di *front office*, *middle office*, dan *back office*.
2. Membangun program akselerasi, memastikan konversi, dan mengatur *Fast Track Program* untuk mendukung optimalisasi organisasi.
3. Meningkatkan kemampuan talenta yang ada dengan manajemen talenta yang baik dan kepemimpinan untuk mendukung kualifikasi tinggi Bank.
4. Membuat anggaran yang efektif dan pengendalian risiko untuk mendukung efisiensi dan kesadaran risiko Bank di era digital.
5. Membangun transformasi *human capital* untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

Realisasi Program pelatihan dan pembelajaran di Bank pada tahun 2024 yang telah berjalan dibagi dalam beberapa kategori, di antaranya adalah:

1. *Learning Program*
2. Sertifikasi *Regulatory* dan Internal
3. *Functional/Matrix Training Program*
4. *Departmental Training Program*
5. *Non Class Room Learning Program*

Selain program pembelajaran di atas, pada tahun 2024, Bank Muamalat juga telah meluncurkan program-program khusus berikut:

1. Muamalat *Internship Program* (MIP) to Muamalat Associate Program (MAP) *Digital Banking*
2. MAP *Consumer Banking*
3. *Relationship Manager Acceleration* (RM Acceleration)
4. *Customer Service Development Program* (CSDP)
5. Muamalat Indonesia *Apprentice* (MULIA)

Bagi Bank, pengembangan SDM merupakan pilar utama dalam proses transformasi bisnis, sehingga diperlukan strategi yang terpadu dan komprehensif sesuai dengan *human capital cycle*. Fokus utama pengembangannya adalah menyiapkan SDM yang berintegritas, tanggap terhadap perubahan, dan mampu memberikan layanan prima, sejalan dengan nilai IDEAL (Islami, Modern, Profesional).

Bank juga memprioritaskan 3 (tiga) aspek utama dalam pengembangan SDM—*Right Sizing*, *Right Skilling*, dan *Right Spending*—agar SDM memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi perubahan bisnis yang cepat.

In 2024, Bank Muamalat implemented a series of initiatives and work programs in line with the HC development targets and plans established by the Bank, which include:

1. This aims to enhance productivity and performance across the front office, middle office, and back office by offering appropriate and integrated learning solutions.
2. The Bank ensures the implementation of conversion and Fast Track Programs to accelerate and optimize organizational performance.
3. Enhance talent management and leadership to align with the Bank's high qualification requirements.
4. Develop effective budgets and risk control mechanisms to ensure the Bank operates efficiently while maintaining risk awareness in the digital era.
5. Build a human capital transformation to create excellent human resources.

The realization of the training and learning programs at the Bank in 2024 has been implemented across several categories, including:

1. Learning Program
2. Regulatory and Internal Certification
3. Functional/Matrix Training Program
4. Departmental Training Program
5. Non Class Room Learning Program

In addition to the learning programs mentioned above, Bank Muamalat also launched the following special programs in 2024:

1. Muamalat Internship Program (MIP) to Muamalat Associate Program (MAP) *Digital Banking*
2. MAP *Consumer Banking*
3. *Relationship Manager Acceleration* (RM Acceleration)
4. *Customer Service Development Program* (CSDP)
5. Muamalat Indonesia *Apprentice* (MULIA)

For the Bank, HR development is a main pillar in its business transformation process. Therefore, an integrated and comprehensive strategy is essential, aligned with the human capital cycle. The main focus of HR development is to prepare an HR with integrity, adaptability to change, and the ability to provide excellent service, in line with the IDEAL values (Islamic, Modern, Professional).

The Bank prioritizes three key aspects in HR development—*Right Sizing*, *Right Skilling*, and *Right Spending*—to ensure that its HR remains highly competitive and capable of adapting to rapid business changes.

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Bank Muamalat senantiasa mengemban amanah untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Komitmen ini diwujudkan melalui program-program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) yang sejalan dengan prinsip syariah dan mendukung agenda pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang dicanangkan pemerintah.

Bank telah merumuskan strategi CSR yang didasarkan pada visi, misi, dan nilai-nilai utama Bank. Strategi ini diwujudkan melalui berbagai program yang dirancang untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pada pelaksanaannya, Bank bekerja sama dengan berbagai pihak guna memastikan program CSR sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung agenda pembangunan nasional.

Untuk lebih memfokuskan pelaksanaan program, kegiatan CSR Bank dikategorikan ke dalam 6 (enam) bidang utama: pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, sosial dakwah, pembangunan/peningkatan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Pada tahun, 2024, total penerima manfaat kegiatan sosial Bank Muamalat mencakup 23.620 individu dan 75 lembaga dengan detail berikut:

No.	Bidang Field	Penerima Manfaat Beneficiaries	
		Individu Individual	Lembaga Institution
1.	Pendidikan Education	4.858	9
2.	Kesehatan Health	797	-
3.	Kemanusiaan Humanitarian	1.081	3
4.	Sosial Dakwah Social Da'wah	14.425	61
5.	Ekonomi Economy	2.459	2
Total		23.620	75

PENILAIAN DIREKSI TERHADAP KOMITE DI BAWAHNYA

Direksi telah membentuk 5 (lima) komite untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Komite tersebut adalah Komite Pengarah Teknologi, Komite Aset dan Liabilitas, Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Pembiayaan dan Komite Pembiayaan.

IMPLEMENTATION OF SOCIAL AND COMMUNITY RESPONSIBILITY

Bank Muamalat always carries out the responsibility to contribute to the development of a more prosperous and sustainable society. This commitment is realized through corporate social responsibility (CSR) programs that adhere to Sharia principles and support the government's agenda for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).

The Bank has developed a CSR strategy based on its vision, mission, and core values. This strategy is implemented through various programs aimed at creating a positive and sustainable impact on society. In its implementation, the Bank collaborates with different stakeholders to ensure that its CSR initiatives meet community needs and align with the national development agenda.

To further focus its efforts, the Bank categorizes its CSR activities into six main areas: education, health, humanity, social da'wah, infrastructure development/improvement, and local economic empowerment.

In 2024, the total beneficiaries of Bank Muamalat's social activities include 23,620 individuals and 75 institutions. The breakdown is as follows:

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF BOD SUPPORTING COMMITTEES

The Board of Directors has established 5 (five) committees to support the effective implementation of its duties and responsibilities. These committees are the Technology Steering Committee, Asset and Liability Committee, Risk Management Committee, Financing Policy Committee, and Financing Committee.



Direksi telah melakukan penilaian yang didasarkan pada keaktifan komite dalam menjalankan tugas, proses dokumentasi, pelaksanaan rata, serta rekomendasi yang diberikan. Berdasarkan penilaian tersebut, pada tahun buku 2024 Direksi menilai bahwa seluruh komite telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik serta telah berkontribusi dengan sangat baik terhadap pertumbuhan Bank.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI DAN ALASANNYA

Sepanjang tahun 2024, komposisi Direksi mengalami 2 (dua) kali perubahan. Pertama, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 27 Juni 2024 menyetujui untuk melakukan pengakhiran tugas Direksi masa jabatan periode 2019-2024 serta menyetujui pengangkatan Direksi masa jabatan periode 2024-2029.

Rapat menyetujui mengakhiri tugas terhadap Direktur Utama Indra Falatehan, Direktur Keuangan dan Strategi Suhendar, dan Direktur Operasi dan Digital Wahyu Avianto. Pada kesempatan yang sama, RUPST mengangkat Hery Syafril sebagai Direktur Utama, Karno sebagai Direktur Kepatuhan, dan Riksa Prakoso sebagai Direktur Operasi dan Digital. Berikut susunan Direksi setelah Keputusan RUPST 27 Juni 2024:

Direktur Utama	Hery Syafril	President Director
Direktur Kepatuhan	Karno	Compliance Director
Direktur	Riksa Prakoso	Director

Kedua, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 11 Desember 2024 memberhentikan dengan hormat Direktur Utama Hery Syafril, Direktur Operasi dan Digital Riksa Prakoso serta mengangkat Imam Teguh Saptono sebagai Direktur Utama dan Kukuh Rahardjo sebagai Direktur.

Berikut susunan Direksi setelah RUPSLB tanggal 11 Desember 2024:

Direktur Utama	Imam Teguh Saptono	President Director
Direktur Kepatuhan	Karno	Compliance Director
Direktur	Kukuh Rahardjo^{*)}	Director

^{*)} Efektif tidak menjabat sejak tanggal 25 Maret 2025.
Effective from resignation on March 25, 2025.

The Board of Directors conducted an evaluation based on the committees' levels of activity in carrying out their duties, the documentation process, plan implementation, and recommendations provided. Based on this assessment, the Board of Directors concluded that for the financial year 2024, all committees effectively performed their functions and responsibilities and contributed significantly to the Bank's growth.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS, AND THE REASONS

Throughout 2024, the composition of the Board of Directors changed twice. First, during the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on June 27, 2024, the termination of the Board of Directors' duties for the 2019-2024 term was approved, and the appointment of the Board of Directors for the 2024-2029 term was confirmed.

The meeting agreed to terminate the duties of President Director Indra Falatehan, Finance and Strategy Director Suhendar, and Operations and Digital Director Wahyu Avianto. On the same occasion, the AGMS appointed Hery Syafril as President Director, Karno as Compliance Director, and Riksa Prakoso as Operations and Digital Director. The following is the composition of the Board of Directors after the AGMS resolution on June 27, 2024:

Second, during the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on December 11, 2024, President Director Hery Syafril and Director of Operations and Digital Riksa Prakoso were honorably dismissed. Imam Teguh Saptono was appointed as President Director and Kukuh Rahardjo as Director.

The following is the composition of the Board of Directors after the EGMS decision on December 11, 2024:

APRESIASI DAN PENUTUP

Direksi menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, baik nasabah, mitra usaha, maupun pemegang saham dan regulator atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan dalam menjalankan kepengurusan bisnis Bank. Kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, Direksi memberikan apresiasi atas pengawasan, arahan, nasihat, dan kerja sama yang terjalin demi kemajuan Bank.

Kepada seluruh karyawan, Direksi juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dedikasi yang diberikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di tengah beragam tantangan yang dihadapi. Direksi menyadari bahwa kontribusi dari seluruh karyawan sangat berperan dalam proses pencapaian target serta visi misi Bank ke depan.

Pencapaian kinerja Bank Muamalat tahun 2024 akan menjadi pemicu semangat optimalisasi kinerja pada tahun-tahun ke depan. Direksi meyakini Bank Muamalat memiliki ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan, dengan komitmen kuat menjadi jalan yang lebih baik untuk kesejahteraan serta keberkahan umat.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

APPRECIATION AND CLOSING

The Board of Directors would like to express its sincere gratitude to all stakeholders, including customers, business partners, shareholders, and regulators, for their trust and support in the management of the Bank's operations. The Board of Directors also extends its appreciation to the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board for their supervision, guidance, advice, and cooperation in driving the Bank's progress.

To all employees, the Board of Directors expresses deep appreciation for their dedication in fulfilling their duties and responsibilities amid the various challenges faced. The Board recognizes that the contributions of all employees are crucial to achieving the Bank's goals, vision, and mission for the future.

The performance achievement of Bank Muamalat in 2024 will be a driving force for optimizing performance in the years ahead. The Board of Directors believes that Bank Muamalat has the resilience to face various challenges, with a solid commitment to becoming a better path for the welfare and blessings of the ummah.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, 30 April 2025 | April 30, 2025



Imam Teguh Saptono
Direktur Utama
President Director



Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior Board of Directors and Senior Executive Vice President



Dedy Suryadi Dharmawan
SEVP Operation
SEVP Operation

Imam Teguh Saptono
Direktur Utama
President Director

Karno
Direktur Kepatuhan
Compliance Director



Dedy Suryadi Dharmawan
SEVP Operation
SEVP Operation

Imam Teguh Saptono
Direktur Utama
President Director

Karno
Direktur Kepatuhan
Compliance Director



Surat Pernyataan Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Statement of the Board of Commissioners regarding Responsibility for the 2024 Annual Report of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dimaksud.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 April 2025

We, the undersigned, hereby declare that all information in the 2024 Annual Report of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk has been fully disclosed and we are solely responsible upon the accuracy of all contents of the Annual Report.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 30 April 2025

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Sapto Amal Damandari
Komisaris Utama Independen
Independent President Commissioner

Sartono
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Andre Mirza Hartawan
Komisaris
Commissioner

Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Statement of the Board of Directors regarding Responsibility for the 2024 Annual Report of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dimaksud.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 April 2025

We, the undersigned, hereby declare that all information in the 2024 Annual Report of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk has been fully disclosed and we are solely responsible upon the accuracy of all contents of the Annual Report.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 30 April 2025

Direksi
Board of Directors



Imam Teguh Saptono
Direktur Utama
President Director



Karno
Direktur Kepatuhan
Compliance Director

Profil Perusahaan

Company Profile

Identitas Perusahaan Company Identity	66	Perubahan Komposisi Direksi Change in the Composition of the Board of Directors	131
Riwayat Singkat Brief History	68	Profil Pejabat Eksekutif Profile of Executive Officers	132
Logo Perusahaan The Company's Logo	71	Statistik Karyawan Employee Statistics	137
Jejak Langkah Milestones	72	Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali Information on Major and Controlling Shareholders	139
Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Value	74	Kronologi Pencatatan Saham Share Listing Chronology	143
Bidang Usaha Line of Business	78	Kronologi Pencatatan Efek Lainnya Other Securities Listing Chronology	144
Produk dan Layanan Products and Services	81	Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure	145
Wilayah Operasional Operational Area	95	Profil Entitas Anak dan Entitas Asosiasi Profile of Subsidiaries and Associates	146
Peta Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi Map of Business Network and Operating Areas	108	Daftar Entitas Anak dan Asosiasi List of Subsidiaries and Associates	149
Struktur Organisasi Organization Structure	110	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Office	150
Komite Level Komisaris Board of Commissioners Level Committees	112	Nama dan Alamat Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal Name and Address of Capital Market Supporting Institutions and Professionals	150
Komite Level Direksi Board of Directors Level Committees	113	Keanggotaan Asosiasi Membership in Associations	153
Profil Dewan Pengawas Syariah Profile of the Sharia Supervisory Board	114	Informasi pada Website Perusahaan Information on the Company's Website	154
Profil Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners	120		
Profil Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior Profile of the Board of Directors and Senior Executive Officers	126		
Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Change in the Composition of the Board of Commissioners	131		





Identitas Perusahaan Company Identity

Bank Muamalat

Pertama Murni Syariah



Nama
Name

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Nama Panggilan
Initial Name

Bank Muamalat Indonesia (BMI)



Bidang Usaha
Line of Business

Perbankan Syariah
Sharia Banking



Tanggal Pendirian
Date of Establishment

1 November 1991/Resmi
beroperasi 1 Mei 1992
1 November 1991/Officially
operational on 1 May 1992



Modal Dasar
Authorized Capital

Rp5.600.000.000.115

Modal Ditempatkan
Issued Capital

Rp2.297.736.324.240



Jumlah Karyawan
Tahun Buku
Number of Employees for
the Fiscal Year

2.508 orang | person



Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment

Akta No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 H, dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris, di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 Tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 Tambahan No. 1919A.

Deed No. 1 dated 1 November 1991 AD or 24 Rabiul Akhir 1412 H, made before Yudo Paripurno, S.H., Notary, in Jakarta. This deed of establishment obtained the ratification of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. C2-2413.HT.01.01 of Year 1992 dated 21 March 1992 and registered in the Central Jakarta District Court on 30 March 1992 under No. 970/1992 and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No 34 dated 28 April 1992 Supplement No 1919A.



Kepemilikan Saham
Share Ownership

- Badan Pengelola Keuangan Haji : 82,69%
- Ir. Andre Mirza Hartawan, MBA : 5,19%
- Apliani : 2,48%

- Reza Rhenaldi Syaiful : 2,19%
- Dewi Monita : 2,18%
- Islamic Development Bank : 2,04%
- Masyarakat (masing-masing <5%) : 3,23%
- Public (each <5%) : 3,23%
- Total** : **100,00%**



Anggaran Dasar Terkini Latest Articles of Association

Akta No. 24 tanggal 18 Desember 2024 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 31 Desember 2024 No. AHU-AH.01.03-0231070.

Deed No. 24 dated 18 December 2024 made before Notary Ashoya Ratam, S.H. M.Kn., and announcement of the amendment to the articles of association was received and registered by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the letter dated 31 December 2024 No. AHU-AH.01.03-0231070.



Alamat Kantor Cabang Luar Negeri Address of Overseas Branch Office

Kantor Cabang Kuala Lumpur, Malaysia
Suite 1.03-1.05 Ground Floor No. 67
Wisma Goldhill Jalan Raja Chulan 50200
Kuala Lumpur Malaysia 50200
Tel. : +603 2711 0807/7427



Entitas Asosiasi dan Afiliasi Accosiated Entities and Affiliation

- PT Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF) (dalam Likuidasi | in Liquidation)
- Baitulmaal Muamalat (BMM)
- Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
- PT Syarikat Takaful Indonesia Financial Institution Pension Fund



Jaringan Layanan Network of Services

235 Kantor Layanan, terdiri dari:
Service Offices, consisting of:

80 Kantor Cabang
Branch Offices

154 Kantor Cabang Pembantu
Sub-Branch Offices

564 ATM

55 Mobile Branch

±77.000 ATM Bersama

±90.000 ATM Prima
Prima ATM



Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

corporate.affairs@bankmuamalat.co.id

Kontak Alamat Contact Address

Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary
corporate.affairs@bankmuamalat.co.id

Hubungan Investor | Investor Relations
Tel. : (021) 8066 6000
Fax. : (021) 8066 6001
E-mail : investor.relations@bankmuamalat.co.id

Call Center
1500016

Alamat Kantor Pusat Head Office Address

Muamalat Tower
Jl. Prof Dr Satrio, Kav. 18, Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12940

Tel. : (021) 8066 6000

Fax. : (021) 8066 6001

E-mail : info@bankmuamalat.co.id

Situs dan Media Sosial Website and Social Media

BankMuamalatIndonesia

@bank.muamalat

@BankMuamalat

Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk



Riwayat Singkat

Brief History

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat Indonesia," "BMI," "Bank") merupakan bank pertama di Indonesia yang beroperasi menggunakan konsep perbankan secara syariah. BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim di Indonesia, yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Secara legal, BMI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah, yang dibuat di hadapan Yudo Paripurno, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 tambahan No. 1919A.

Anggaran Dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan. Untuk perubahan terakhir, dirumuskan pada Akta No. 24 tanggal 18 Desember 2024 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 31 Desember 2024 No. AHU-AH.01.03-0231070.

Bank mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992 M/27 Syawal 1412 H. Tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari lahir BMI. Bank memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan izin kepada BMI untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat Indonesia," "BMI," "Bank") is the first in Indonesia that operates with the sharia banking concept. BMI was founded on the idea of the Indonesian Ulama Council (MUI), the Indonesian Muslim Intellectuals (ICMI), and muslim entrepreneurs in Indonesia, which subsequently received the support of the Government of the Republic of Indonesia.

Legally, BMI was established based on Deed of Establishment No. 1 dated 1 November 1991 AD or 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah, made before Yudo Paripurno, SH, Notary in Jakarta. This deed of establishment obtained ratification from the Minister of Justice of the Republic of Indonesia (currently the Minister of Law and Human Rights) with Decree No. C2-2413.HT.01.01 of the year 1992 dated 21 March 1992 and registered in Central Jakarta District Court on 30 March 1992 under No. 970/1992 and was announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 34 dated 28 April 1992 supplement No. 1919A.

The Bank's Articles of Association has been amended several times. The last amendment was formulated on Deed No. 24 dated 18 December 2024 made before Notary Ashoya Ratam, S.H. M.Kn., and the announcement of the articles of association's amendment was received and registered by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the letter dated 31 December 2024 No. AHU-AH.01.03-0231070.

The Bank began operation on 1 May 1992 AD/27 Syawal 1412 H. This date was determined as the date of establishment of BMI. The Bank obtained the permit to operate as a commercial bank based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 1223/MK.013/1991 dated 5 November 1991 and the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 430/KMK.013/1992 on Granting Company Business Permit in Jakarta dated 24 April 1992, as amended with the Decree of the Minister of Finance 131/KMK.017/1995 on the Amendment of the Minister of Finance Decree No. 430/KMK.013/1992 on the Granting of Company Business Permit dated 30 March 1995, which in its decision granted permission to BMI to be able to conduct business as a commercial bank based on sharia principles.

BMI merupakan perusahaan publik yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan secara resmi beroperasi sebagai bank devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank "Indonesia No. 27/76/KEP/DIR tentang Penunjukan PT Bank Muamalat Indonesia Menjadi Bank Devisa tanggal 27 Oktober 1994. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-79/MK.03/1995 tanggal 6 Februari 1995, BMI secara resmi ditunjuk sebagai Bank Devisa Persepsi Kas Negara.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-9383/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006, BMI memperoleh status Bank Persepsi yang mengizinkan Bank menerima setoran-setoran pajak. Kemudian, pada tanggal 25 Juli 2013, BMI telah menjadi peserta program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana tercantum dalam Surat Lembaga Penjamin Simpanan No. S.617/DPMR/VII/2013 perihal Kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan. Selanjutnya, BMI ditetapkan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 4/BPKH.00/2018 tanggal 28 Februari 2018.

BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Sukuk Subordinasi Mudharabah, Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah Muamalat (DPLK Syariah Muamalat) dan *multifinance* syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Shar-e yang diluncurkan pada 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.

Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 berhasil memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai kartu debit syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti *Internet Banking*, *mobile banking*, ATM, dan *cash management*.

Seluruh produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah. Seiring kapasitas Bank yang semakin besar dan diakui, BMI kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya, tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri.

Pada 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, BMI telah memiliki 234 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia.

BMI is a public company whose shares are not listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and has been officially in operation as a foreign exchange bank since 27 October 1994, based on the Decision Letter of the Board of Directors of Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR on the Appointment of PT Bank Muamalat Indonesia to Become Foreign Exchange Bank dated 27 October 1994. Based on the Minister of Finance Decree No. S-79/MK.03/1995 dated 6 February 1995, BMI was officially appointed as a Perception Foreign Exchange Bank of the State Treasury.

Based on Minister of Finance Decision Letter No. S-9383/MK.5/2006 dated 28 December 2006, BMI obtained the status of Perception Bank with the permission to receive tax deposits. Subsequently, on 25 July 2013, BMI became a member of the Deposit Insurance Corporation (LPS) guarantee program as stated in the Deposit Insurance Corporation Letter No. 617/DPMR/VII/2013 regarding the Membership of the Deposit Insurance Corporation. Subsequently, BMI was determined as Bank Receiving Deposit for Hajj Pilgrimage Costs based on the Decree of the Hajj Financial Management Agency No. 4/BPKH.00/2018 dated 28 February 2018.

BMI continued to innovate with issuing sharia financial products such as the Mudharabah Subordinated Sukuk, Sharia Insurance (Takaful Insurance), Pension Fund of the Muamalat Sharia Financial Institution (DPLK Muamalat Sharia), and sharia multifinance (Al-Ijarah Indonesia Finance), which were all new breakthroughs in Indonesia. Apart from that, the Shar-e product launched in 2004 was the first instant savings in Indonesia.

The Shar-e Gold Debit Visa product, launched in 2011, successfully received an award from the Indonesia Record Museum (MURI) as the sharia debit card with the use of the first chip technology in Indonesia as well as e-channel services such as the Internet Banking, mobile banking, ATM, and cash management.

All such products were sharia product pioneers in Indonesia and became important milestones in the sharia banking industry. As the Bank's capacity grew and was acknowledged, BMI continued to expand its wing by continuing to add to its network of branch offices, not only throughout Indonesia but also abroad.

In 2009, the Bank received the permit to open a branch office in Kuala Lumpur, Malaysia, and became the first bank in Indonesia and the only one to realize business expansion in Malaysia. To date, BMI has 234 service offices, including one branch office in Malaysia.



Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 564 unit ATM Muamalat, ±90.000 jaringan ATM Prima, ±77.000 ATM Bersama, dan 55 unit Mobil Kas Keliling.

BMI telah melakukan *rebranding* pada logo Bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap *image* sebagai “Bank Syariah Islami, Modern dan Profesional.” Bank terus merealisasikan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui, baik secara nasional maupun internasional.

Kini, dalam memberikan layanan terbaiknya, BMI beroperasi bersama beberapa entitas asosiasi dan afiliasi, yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah (dalam proses likuidasi), (DPLK Syariah Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

INFORMASI PERUBAHAN NAMA

Sesuai dengan akta pendirian, yakni Akta No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 H, dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris, di Jakarta, BMI didirikan dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia. Kemudian, merujuk pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah yang menentukan kewajiban mencantumkan kata “Syariah” setelah kata “Bank” dan disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Juni 2000, Bank berganti nama menjadi PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk.

Setelah itu, pada 23 April 2008 berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Bank kembali mengganti namanya, menggunakan nama sebelumnya yakni PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Hal ini dilakukan sesuai dengan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 5 ayat 4 di mana pencantuman kata “Syariah” setelah kata “Bank” hanya berlaku bagi bank yang mendapatkan izin usaha setelah berlakunya UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008.

The Bank’s operation is also supported by the extensive services of 564 Muamalat ATM units, approximately 90,000 ATM Prima networks, approximately 77,000 ATM Bersama, and 55 units of Mobile Cash Vehicle.

BMI conducted the rebranding of the Bank’s logo to increase awareness of the image as “Islamic, Modern, and Professional Sharia Bank.” The Bank continued to realize various acknowledged achievements, both nationally and internationally.

Today, in providing the best services, BMI operates jointly with several associated and affiliated entities, namely Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF), which provides sharia financing services (in the liquidation process); DPLK Muamalat Sharia, which provides pension fund services through the Pension Plan Financial Institute; and Baitulmaal Muamalat, which provides services to distribute Zakat, Infak, and Charity (ZIS).

INFORMATION ON NAME CHANGE

In accordance with the deed of establishment, namely Deed No. 1 dated 1 November 1991 AD or 24 Rabiul Akhir 1412 H, made before Yudo Paripurno, S.H., Notary, in Jakarta, BMI was established under the name PT Bank Muamalat Indonesia. Subsequently, referring to the Board of Directors of Bank Indonesia Decision Letter No. 32/34/KEP/DIR dated 12 May 1999 on Commercial Banks based on the Sharia Principles, which determines the obligation to include the word “Sharia” after the word “Bank” and was ratified at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 22, 2000, the Bank changed its name to PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk.

Afterwards, on 23 April 2008, based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, the Bank again changed its name to use the previous PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. This was conducted in accordance with Law No. 21 of the year 2008 regarding Sharia Banking Article 5 paragraph 4, where the inclusion of the word “Sharia” following the word “Bank” is only applicable for banks with the business permit after the Law on Sharia Banking No. 21 of the year 2008 was enforced.

Logo Perusahaan The Company's Logo



Bank Muamalat

Pertama Murni Syariah

SIMBOL HURUF

Simbol huruf yang diambil dari alfabet arab (hijaiyah) “Dal-Yaa’- Nuun” memiliki makna ganda yaitu:

1. “Ad Diin” yang berarti agama (Islam).
2. “Madaniyah” yang mewakili niat-niat luhur Bank Muamalat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sesuai konsep Islam.

WARNA

Terdiri dari 2 warna Hijau dan Ungu yang keduanya juga memiliki makna sebagai berikut:

1. Hijau yang merepresentasikan nilai universal yang segar, memiliki kesesuaian dengan gambaran dunia Islam sehingga relevan menggambarkan nilai Islami.
2. Ungu pada huruf dan tulisan Bank Muamalat, memberikan makna kedewasaan dan kemapanan yang sesuai dengan nilai profesionalisme.

TULISAN

“Pertama Murni Syariah” merupakan simbolisasi bahwa Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia.

LETTER SYMBOL

The letter symbol adopted from the Arabic alphabet (hijaiyah) “Dal-Yaa’ – Nuun” bears multiple meanings as follows:

1. “Ad Diin” which means religion (Islam).
2. “Madaniyah” which represents the noble intentions of Bank Muamalat Indonesia to create a prosperous, just and affluent society according to the concept of Islam.

COLOR

Consists of 2 colors, Green and Purple, of which both mean the following:

1. Green represents a universal value that is fresh, conforms with the picture of the Islamic world so that it is relevant in depicting Islamic values.
2. Purple on the letter and writing of Bank Muamalat, gives meaning of maturity and stability in line with the value of professionalism.

OBJECTIVE

The tagline “Pertama Murni Syariah” (“The First and Pure Sharia”) symbolizes that Bank Muamalat Indonesia is the first sharia bank in Indonesia.



Jejak Langkah

Milestones

1991 - 1992	1993 - 1994	1998 - 2000	2002 - 2003	
1991 Pendirian Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabiul Akhir 1412 H. The establishment of Bank Muamalat Indonesia as the first sharia Bank in Indonesia on November 1, 1991 or 24 Rabiul Akhir 1412 H. 1992 Mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H dan menjadi pelopor bisnis keuangan syariah lainnya. Began operation on May 1, 1992 or 27 Syawal 1412 H and became the pioneer in other sharia financial business.	1993 Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat sahamnya di Bursa. The Company became a Public Company whose shares were not listed in the Stock Exchange. 1994 Memperoleh izin sebagai Bank Devisa pada 27 Oktober 1994. Obtained the permit as a Foreign Exchange Bank on October 27, 1994.	1998 - Penawaran Umum Terbatas I Seri Saham B dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. - Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat. - Limited Public Offering I of B Series Shares with Pre-emptive Rights. - Establishment of the Muamalat Financial Institute Pension Plan (DPLK). 2000 Bank Muamalat Indonesia melakukan perubahan atau penggantian nama menjadi Bank Syariah Muamalat Indonesia yang disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Juni 2000. Bank Muamalat Indonesia made a change or alteration on the name to Bank Syariah Muamalat Indonesia ratified by the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 22 June 2000.	2002 Penawaran Umum Terbatas II Seri Saham C dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Limited Public Offering II of C Series Shares with Pre-emptive Rights. 2003 Peluncuran produk Shar-e yang merupakan tabungan instan pertama di Indonesia melalui ribuan jaringan <i>online</i> Kantor Pos di seluruh Indonesia, yakni <i>System Online Payment Point</i> (SOPP). The launching of Shar-e products as the first instant savings in Indonesia through thousands of online networks of Post Offices throughout Indonesia, namely the Online Payment Point system (SOPP).	
2015	2016 - 2017	2018	2019 - 2020	
2015 Peresmian Muamalat Tower sebagai Kantor Pusat Bank Muamalat Indonesia di mana Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan persetujuan atas pemindahan alamat kantor pusat Bank Muamalat berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-65/PB.1/2015 perihal Permohonan Izin Pemindahan Alamat Kantor Pusat Operasional dan Non Operasional PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. The inauguration of Muamalat Tower as the Head Office of Bank Muamalat Indonesia where the Financial Services Authority granted the approval for the relocation of the address of Bank Muamalat's head office based on the Financial Services Authority Letter No. S-65/PB.1/2015 regarding the Application for Permit to Change the Address of the Operational and Non-Operational Head Office of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.	2016 Meluncurkan aplikasi Muamalat <i>Mobile Banking</i>. Launched the Muamalat Mobile Banking application. 2017 Pada bulan Juli 2017, Bank Muamalat Indonesia menerbitkan <i>Medium Term Notes Sharia</i> (MTNS) dengan total nilai Rp200 miliar, yang terdiri dari Rp100 miliar MTNS subordinasi dengan tenor 5 tahun dan Rp100 miliar MTNS dengan tenor 3 tahun. In July 2017, Bank Muamalat Indonesia issued the Sharia Medium Term Notes (MTNS) with a total value of Rp200 billion, consisting of Rp100 billion subordinated MTNS with a tenure of 5 years and Rp100 billion MTNS with a tenure of 3 years.	2018 - Meluncurkan kampanye #AyoHijrah yang mengajak masyarakat untuk berhijrah dalam hal layanan syariah. Kampanye #AyoHijrah dilandasi oleh cita-cita Bank yang ingin menjadi pusat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia ingin turut membangun industri halal di dalam negeri yang diselaraskan dengan perkembangan teknologi digital. - Menerbitkan Sukuk Subordinasi Mudharabah Trust Certificate senilai Rp1,6 triliun. - Launched the #AyoHijrah campaign which invited the public to migrate in terms of sharia services. The #AyoHijrah campaign is based on the Bank's ideals of becoming the center of the sharia economic ecosystem in Indonesia. Bank Muamalat Indonesia is interested to participate in building a domestic halal industry that is aligned with the development of digital technology. - Issued the Mudharabah Subordinated Sukuk Trust Certificate worth Rp1.6 trillion.	2019 Meluncurkan aplikasi <i>mobile banking</i> terbaru yaitu Muamalat <i>Digital Islamic Network</i> (DIN) yang dilengkapi dengan berbagai fitur terbaru yang dirancang untuk melakukan transaksi finansial maupun non finansial secara <i>real time</i> dengan fitur yang lebih aman. Launched the latest mobile banking application, namely Muamalat Digital Islamic Network (DIN), which is equipped with various new features designed to carry out financial and non-financial transactions in real time with safer features. 2020 Menerima penghargaan sebagai Peringkat ke-1 <i>Digital Brand Awards</i> Bank Umum Syariah BUKU 2 dengan Aset Rp25 triliun ke atas dari Infobank. Received the award as First Place in the Digital Brand Awards of Sharia Commercial Banks BOOK 2 with an Asset of Rp25 trillion and above from Infobank.	

2005 - 2007	2008	2009 - 2011	2012 - 2013
2005 Penawaran Umum Terbatas III Seri Saham C dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Limited Public Offering III of C Series Shares with Pre-emptive Rights. 2007 Pendirian Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) sebagai multifinance syariah pertama di Indonesia. Establishment of Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) as the first sharia multifinance in Indonesia.	2008 • Penerbitan Sukuk Subordinasi Mudharabah II sebesar Rp314 miliar. • Bank kembali menggunakan nama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2008 sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 April 2008. • Issuance of Mudharabah Subordinated Sukuk II amounting to Rp314 billion. • The Bank again used the name PT Bank Muamalat Indonesia Tbk of year 2008 in accordance with resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated April 23, 2008.	2009 Pembukaan kantor cabang internasional pertama di Kuala Lumpur, Malaysia. The opening of the first international branch office in Kuala Lumpur, Malaysia. 2010 Penawaran Umum Terbatas IV Seri Saham C dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Limited Public Offering IV of C Series Shares with Pre-emptive Rights. 2011 Peluncuran produk Shar-e Gold Debit Visa. Launching of Shar-e Gold Debit Visa product.	2012 • Bank Muamalat Indonesia melakukan <i>rebranding</i> atau perubahan logo. • Menerbitkan Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012 senilai Rp800 miliar. • Bank Muamalat Indonesia performed rebranding or change in logo. • Issued the Sustainable Mudharabah Subordinated Sukuk I Stage I of Year 2012 worth Rp800 billion. 2013 • Penawaran Umum Terbatas V Saham Seri B dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu • Menerbitkan Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II tahun 2013 senilai Rp700 miliar. • Limited Public Offering V of B Series Shares with Pre-emptive Rights • Issued the Sustainable Mudharabah Subordinated Sukuk I Stage II of year 2013 worth Rp700 billion.
2021	2022	2023	2024
2021 • Bank Muamalat masuk jajaran Bank Terbaik Dunia Versi Forbes • Bank Muamalat menerbitkan Sukuk Mudharabah Bank Muamalat Indonesia Tahun 2021 pada tanggal 15 November 2021 tanpa Penawaran Umum dengan tanggal jatuh tempo pada 15 November 2041. • Penawaran Umum Terbatas (Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) VI Saham Seri C. • Bank Muamalat was included in the the World's Best Banks, Forbes version • Bank Muamalat issues the Mudharabah Sukuk of Bank Muamalat Indonesia of Year 2021 on 15 November 2021 without Public Offering with maturity date of 15 November 2041. • Limited Public Offering (Additional Capital With Pre-emptive Rights) VI of C Series Shares.	2022 • Menerbitkan Sukuk Subordinasi Mudharabah Jangka Panjang yang dilakukan tanpa Penawaran Umum senilai Rp2 Triliun. • Bank Muamalat mendapatkan peringkat (<i>rating</i>) idA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan prospek perusahaan 'stabil'. Peringkat ini juga berlaku untuk Sukuk Mudharabah Tahun 2021. • Issued the Long-Term Mudharabah Subordinated Sukuk carried out without Public Offering worth Rp2 trillion. • Bank Muamalat received the idA+ rating from PT Peringkat Efek Indonesia/Pefindo (Indonesia Securities Rating company) with prospective company as stable." This rating was also applicable for Mudharabah Sukuk of Year 2021.	2023 • BMI dinobatkan sebagai Bank Penyedia Layanan Pembayaran Zakat Terbaik dari Badan Amil Zakat Nasional RI pada BAZNAS Award 2023. • BMI ditunjuk Kementerian Keuangan sebagai Bank Penyalur Gaji (BPG) atau <i>payroll</i> bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). • BMI was crowned as the Best Zakat Payment Service Provider Bank from the National Zakat Collection Agency of the Republic of Indonesia at the BAZNAS Award 2023. • BMI was appointed by the Ministry of Finance as the Salary Distribution Bank (BPG) or <i>papyroll</i> for State Civil Apparatus (ASN).	2024 • Bank Muamalat secara resmi menjadi Bank Kustodian Syariah pasca persetujuan OJK tanggal 22 Oktober 2024. • <i>Grand Launching</i> layanan <i>quick commerce</i> Hijrah Groceries yang dapat diakses melalui aplikasi Muamalat DIN • Bank Muamalat officially became a Sharia Custodian Bank after OJK approval on October 22, 2024. • Grand Launching of Hijrah Groceries quick commerce services that can be accessed through the Muamalat DIN application.



Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan

Vision, Mission, and Corporate Value

REVIEW TERHADAP VISI DAN MISI PERUSAHAAN

Memasuki tahun 2025 dan menjelang 33 tahun beroperasinya Bank Muamalat, telah dilakukan review dan kajian mendalam untuk melakukan perubahan Visi dan Misi perusahaan agar tetap relevan dengan dinamika industri dan strategi ke depannya. Perumusan Visi dan Misi melalui proses Focus Group Discussion (FGD) dalam beberapa tahap melibatkan karyawan dan manajemen, yang mengerucut pada 3 pilar utama yaitu memberi inspirasi dan solusi, menuju arah yang lebih baik, serta mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan umat. Usulan perubahan Visi dan Misi tersebut setelah mendapatkan rekomendasi Dewan Pengawas Syariah, serta telah disetujui Dewan Komisaris dan Direksi.

Perubahan Visi dan Misi Bank Muamalat diresmikan melalui Surat Keputusan Direksi No. 030/B/DIR-KPTS/IV/2025. Dengan perubahan tersebut, manajemen akan melaksanakan sosialisasi dan komunikasi atas perubahan Visi dan Misi Bank Muamalat, baik kepada seluruh karyawan, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya dengan mengoptimalkan berbagai saluran komunikasi.

REVIEW OF COMPANY VISION AND MISSION

Welcoming the year 2025 and approaching 33 years of Bank Muamalat's operation, an in-depth review and study has been conducted to make changes to the company's Vision and Mission to remain relevant to the dynamics of the industry and future strategies. The formulation of the Vision and Mission went through the Focus Group Discussion (FGD) in several stages involving employees and management, which narrowed down to 3 main pillars, namely providing inspiration and solutions, heading in a better direction, and bringing goodness and welfare to the community. The proposal for changes to the Vision and Mission was made after receiving recommendations from the Sharia Supervisory Board and have been approved by the Board of Commissioners and Directors.

The changes to the Vision and Mission of Bank Muamalat were formalized through the Decree of the Board of Directors No. 030/B/DIR-KPTS/IV/2025. Upon these changes, management will carry out socialization and communication of the changes to the Vision and Mission of Bank Muamalat, both to all employees, shareholders, and other stakeholders by optimizing various communication channels.

VISI Vision



Menjadi Jalan Hijrah Menuju Berkah

Becoming the Path of 'Hijrah' Towards 'Barakah'

Visi Bank Muamalat Indonesia adalah "Menjadi Jalan Hijrah menuju Berkah" yang memiliki makna menjadi solusi hijrah terdepan bagi ekosistem bisnis dan keuangan syariah dengan kinerja keuangan yang berkelanjutan untuk mencapai keberkahan.

Bank Muamalat Indonesia's vision is "Becoming the Path of Hijrah toward Barakah" which means becoming the leading Hijrah solution for the sharia business and financial ecosystem with sustainable financial performance to achieve Barakah (blessings).

Landasan Perumusan Visi Bank Muamalat

Background of Vision Formulation

QS. An-Nahl [16]: 97

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”

“Whoever does good, whether male or female, and is a believer, We will surely bless them with a good life, and We will certainly reward them according to the best of their deeds.”

QS. An-Nisā’ [4]:100

“Siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan (rezeki dan hidup). Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian meninggal (sebelum sampai ke tempat tujuan), sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

“Whoever emigrates in the cause of Allah will find many safe havens and bountiful resources throughout the earth. Those who leave their homes and die while emigrating to Allah and His Messenger—their reward has already been secured with Allah. And Allah is All-Forgiving, Most Merciful.”

QS. Al-A’rāf [7]:96

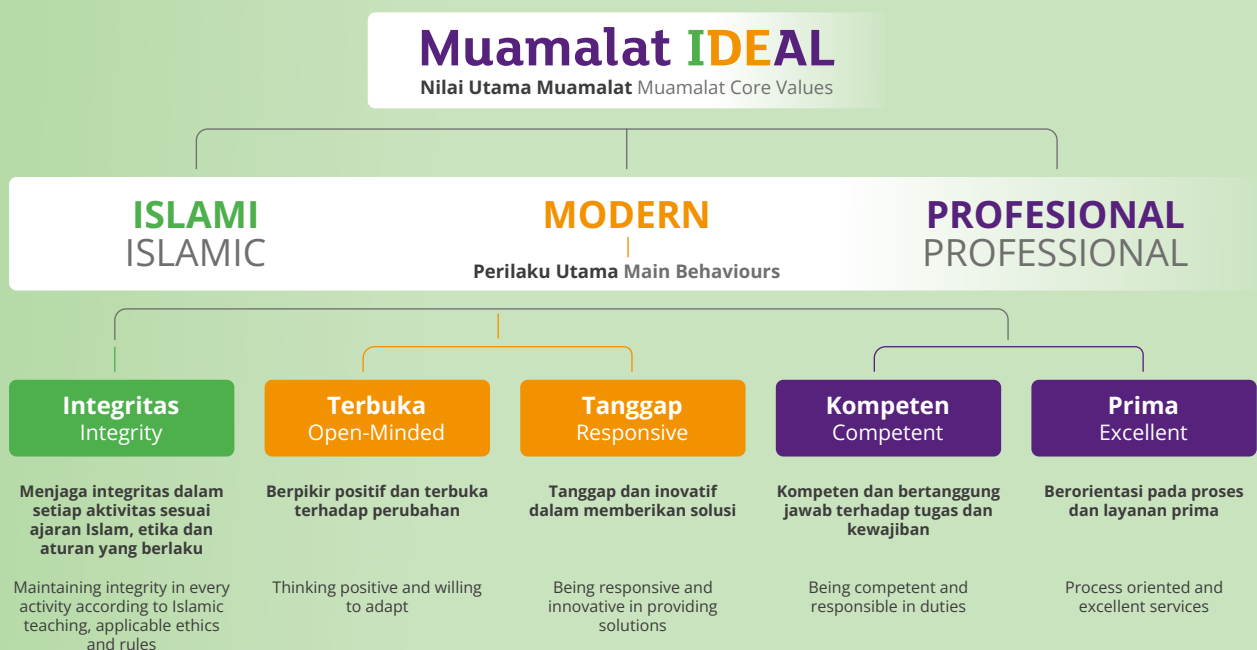
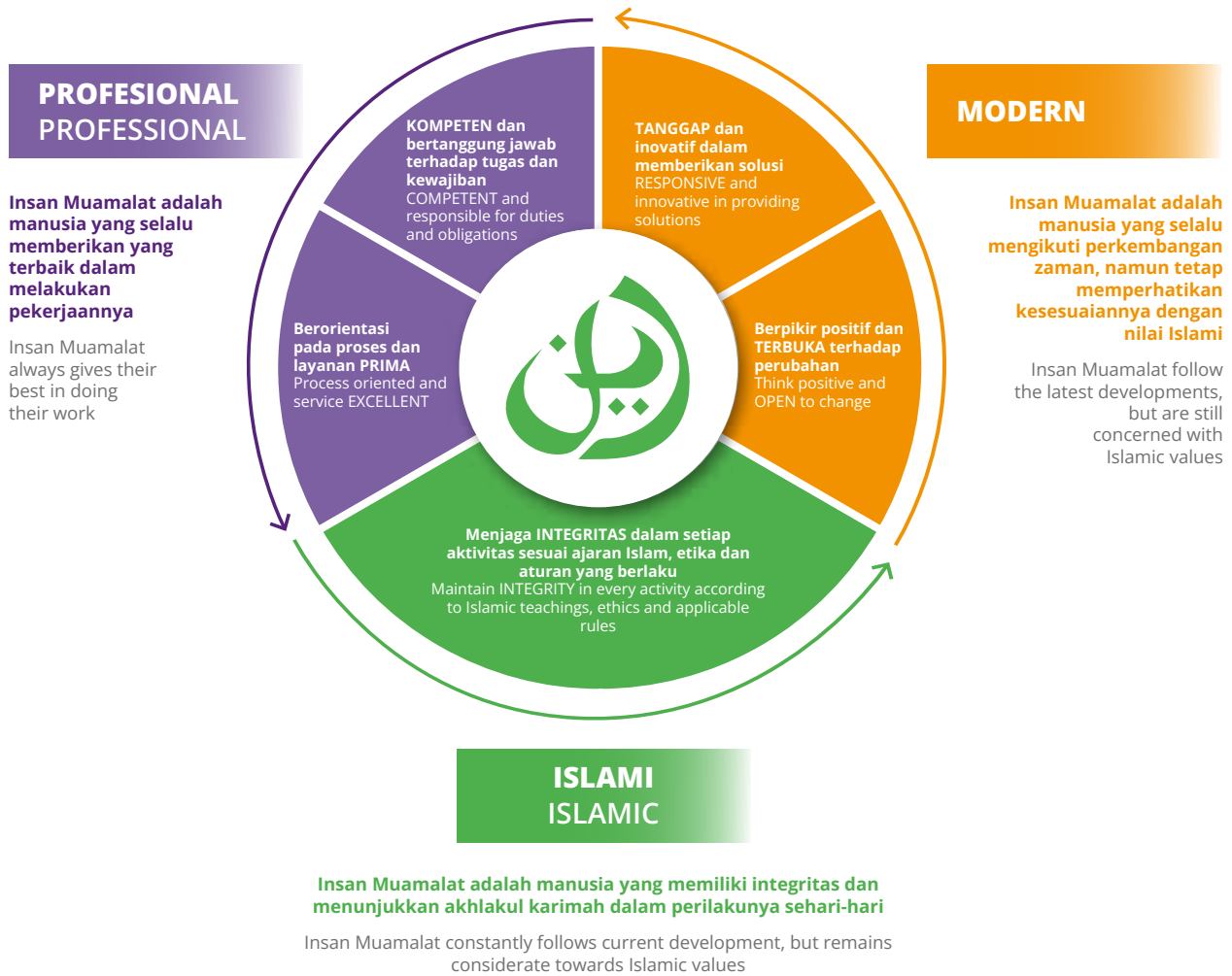
“Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.”

“Had the people of those societies been faithful and mindful of Allah, We would have overwhelmed them with blessings from heaven and earth. But they disbelieved, so We seized them for what they used to commit.”



MISI Mission

1. Mencapai kinerja keuangan dengan profitabilitas yang sehat dan berkelanjutan untuk memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan:
 - a) Menjalankan dan mengembangkan produk dan layanan sesuai dengan prinsip syariah demi meningkatkan profitabilitas dalam jangka panjang.
 - b) Menjalankan proses bisnis dan operasional sesuai ketentuan, prinsip kehati-hatian dan aspek syariah yang memberikan dampak pada *sustainability business* dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan kelembagaan.
 2. Mempermudah aktivitas keuangan melalui produk yang inovatif, komprehensif dan layanan terbaik yang menguntungkan bagi nasabah:
 - a) Meningkatkan kualitas produk dan layanan modern berbasis digital yang komprehensif.
 - b) Sebagai *One Stop Solution* dalam memberikan layanan terpercaya kepada mitra bisnis dan memfasilitasi umat untuk berhijrah.
 3. Mendukung perkembangan ekosistem ekonomi Syariah, industri halal dan ekosistem haji menuju masyarakat madani:
 - a) Menjadi Bank terdepan dalam melayani kebutuhan produk keuangan untuk mendukung pengelolaan ekosistem ekonomi syariah, industri halal dan ekosistem haji dengan melakukan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
 - b) Mendukung peningkatan aktivitas mitra bisnis dalam ekosistem ekonomi syariah, industri halal dan ekosistem haji.
 4. Memberikan kontribusi sosial yang positif kepada masyarakat:
 - a) Memberikan pendampingan dan pembinaan untuk mendukung pengembangan ekonomi produktif kepada masyarakat.
 - b) Mendukung peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi, lingkungan dan sosial kemasyarakatan.
 5. Bekerja secara profesional sebagai bentuk perwujudan ibadah:
 - a) Bekerja dengan tekun, sungguh-sungguh dan ikhlas untuk memberikan kinerja terbaik bagi perusahaan selaras dengan Nilai-nilai Inti Bank Muamalat.
 - b) Mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat memfasilitasi "syiar" ekonomi syariah demi meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.
1. Achieving financial performance with healthy and sustainable profitability to provide optimal added value for all stakeholders:
 - a) Running and developing products and services in accordance with sharia principles to increase profitability in the long term.
 - b) Running business and operational processes in accordance with provisions, prudential principles and sharia aspects that have an impact on business sustainability by considering environmental, social and institutional aspects.
 2. Facilitating financial activities through innovative, comprehensive products and the best services that benefit customers:
 - a) Improving the quality of modern, comprehensive digital-based products and services.
 - b) As a One Stop Solution in providing trusted services to business partners and facilitating the people to migrate.
 3. Supporting the development of the Sharia economic ecosystem, halal industry and hajj ecosystem towards a civil society:
 - a) Becoming a leading bank in serving the needs of financial products to support the management of the sharia economic ecosystem, halal industry and hajj ecosystem by collaborating with all stakeholders.
 - b) Supporting the increase in business partner activities in the sharia economic ecosystem, halal industry and hajj ecosystem.
 4. Providing positive social contributions to the community:
 - a) Helping and coaching to support the development of a productive economy for the community.
 - b) Supporting the improvement of the quality of education, economy, environment and social society.
 5. Working professionally as a form of worship:
 - a) Working diligently, earnestly and sincerely to provide the best performance for the company in line with the Core Values of Bank Muamalat.
 - b) Developing activities that can facilitate the "propagation" of the sharia economy to increase literacy and inclusion of sharia finance in Indonesia.





Bidang Usaha

Line of Business

Bank Muamalat Indonesia menjalankan kegiatan usaha pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Selain melakukan transaksi antar-bank berdasarkan prinsip syariah, Bank juga melakukan transaksi pembayaran dan perdagangan nasional dan internasional, yang mencakup jasa kiriman uang, inkaso/collection, transaksi valuta asing, dan pembiayaan ekspor-impor dalam bentuk *letter of credit* (L/C) yang memberikan pendapatan imbal jasa/komisi kepada Bank.

BIDANG USAHA SESUAI ANGGARAN DASAR

Mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan yakni Akta No. 24 tanggal 18 Desember 2024 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya tertanggal 31 Desember 2024 No. AHU-0086493.AH.01.02 tahun 2024 serta pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 31 Desember 2024 No. AHU-AH.01.03-0231070, disebutkan bahwa maksud dan tujuan Bank Muamalat Indonesia adalah yaitu menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Bank menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat meliputi:
 - a. Bentuk simpanan berupa:
 - i. giro berdasarkan akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - ii. tabungan berdasarkan akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; atau
 - iii. bentuk lain berdasarkan akad Wadi'ah atau atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - b. Bentuk investasi berupa:
 - i. deposito berjangka berdasarkan akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - ii. tabungan berdasarkan akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; atau

Bank Muamalat Indonesia carries out its main business activities in collecting funds from the public and distributing them back in the form of financing based on the sharia principles. Apart from conducting interbank transactions based on sharia principles, the Bank also conducts payment transactions and both national and international trading, which cover money transfer service, collection, foreign exchange transaction, and export-import financing in the form of a letter of credit (L/C) that provides fee/commission income to the Bank.

LINE OF BUSINESS ACCORDING TO ARTICLES OF ASSOCIATION

Referring to the Articles of Association, namely Deed No. 24 dated 18 December 2024 made before Notary Ashoya Ratam, S.H. M.Kn., and obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with Decision Letter dated 31 December 2024 No. AHU-0086493.AH.01.02 of year 2024 as well as notification of the change in the articles of association as approved and registered by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia according to Letter No. AHU-AH.01.03-0231070 dated 31 December 2024 where it was stated that the purpose and objective of Bank Muamalat Indonesia is to conduct banking business based on sharia principles. To accomplish this purpose and objective, the Bank implements the sharia principles in its business activities as follows:

1. Collect funds from the public including the following:
 - a. Savings in the form of:
 - i. Demand deposits based on Wadi'ah contracts or other contracts that do not conflict with sharia principles;
 - ii. Savings based on the Wadi'ah contract or other contracts that do not conflict with sharia principles; or
 - iii. Other forms based on the Wadi'ah contract or other contracts that do not conflict with sharia principles.
 - b. Investment in the following forms:
 - i. Time deposit based on Mudharabah contract or other contracts that do not conflict with sharia principles;
 - ii. Savings based on Mudharabah contract or other contracts that do not conflict with sharia principles; or

iii. bentuk lainnya berdasarkan akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 2. Menyalurkan Pembiayaan a. Untuk transaksi jual beli berdasarkan akad antara lain: i. Murabahah. ii. Istishna. iii. Salam. iv. Akad lain berdasarkan prinsip syariah. b. Untuk transaksi bagi hasil berdasarkan akad antara lain: i. Mudharabah. ii. Musyarakah. iii. Akad lain berdasarkan prinsip syariah. c. Penyewaan barang benda bergerak atau tidak bergerak berdasarkan akad antara lain: i. Ijarah. ii. Ijarah muntahiya bittamlik. iii. Akad lain berdasarkan prinsip syariah. d. Untuk transaksi pinjam meminjam berdasarkan: i. Akad Qardh. ii. Akad lain berdasarkan prinsip syariah. 3. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad prinsip syariah antara lain: a. Wakalah. b. Hawalah. c. Kafalah. d. Rahn. 4. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (<i>underlying transaction</i>) berdasarkan prinsip syariah. 5. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia. 6. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah. 7. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah. 8. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah. 9. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah. 10. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah; 11. Memberi fasilitas <i>letter of credit</i> (L/C) berdasarkan prinsip syariah. 12. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah.	iii. Other forms based on Mudharabah contract or other contracts that do not conflict with sharia principles. 2. Distribute Financing a. For buy-sell transactions based on such contracts as follows: i. Murabahah ii. Istishna iii. Salam iv. Other contracts based on sharia principles b. For profit sharing transactions based on such contracts as follows: i. Mudharabah ii. Musyarakah iii. Other contracts based on sharia principles c. Rental of movable or immovable property based such contracts as follows: i. Ijarah ii. Ijarah muntahiya bittamlik iii. Other contracts based on sharia principles d. For lending and borrowing transactions based on the following contracts: i. Qardh ii. Other contracts based on sharia principles 3. Provide banking services based on sharia principles as follows: a. Wakalah b. Hawalah c. Kafalah d. Rahn 4. Buy, sell and/or guarantee at own risk of securities of third party issued on the basis of underlying transaction based on sharia principles. 5. Buy securities based on sharia principles issued by the Government and/or Bank Indonesia. 6. Accept payments from billing or securities and make calculations with a third party or among third parties based on sharia principles. 7. Transfer money for own interest and/or customers based on sharia principles. 8. Accept billing payments of securities issued and make calculations with or among third parties based on sharia principles. 9. Provide a place to store goods and valuable documents based on the principle of wadi'ah mandate or other principle based on sharia principles. 10. Conduct custody activities including its administration for the benefit of another party based on a contract with the wakalah principle; 11. Provide letter of credit (L/C) facilities based on sharia principles. 12. Provide bank guarantee facilities based on sharia principles.



13. Melakukan kegiatan usaha kartu debit, *charge card* berdasarkan prinsip syariah.
14. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad Wakalah.
15. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Di samping itu, BMI juga menjalankan kegiatan usaha lain yakni:

1. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyaertaannya.
4. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.
5. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal.
6. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
7. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang.
8. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui pasar modal.
9. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

BIDANG USAHA YANG DIJALANKAN PADA TAHUN BUKU 2024

Kegiatan usaha Bank pada tahun 2024 masih sesuai dengan ketentuan pada Anggaran Dasar Bank.

13. Conduct debit and card business activities based on sharia principles.
14. Conduct trustee activities based on Wakalah.
15. Conduct other activities commonly carried out by banks as long as they are approved by the Financial Services Authority and have received a fatwa from the National Sharia Council.

Apart from the above, BMI also carries out business activities, namely as follows:

1. Conduct foreign exchange activities based on sharia principles.
2. Conduct capital participation activities in sharia general banks or financial institutions that conduct business activities based on sharia principles.
3. Conduct temporary capital participation activities to overcome the consequences of failure to finance based on sharia principles with the condition that they must withdraw their participation.
4. Act as founder and management member for the pension based on sharia principles.
5. Conduct activities in the capital market as long as they are not in conflict with sharia principles and provisions of laws and regulations applicable in the capital market.
6. Conduct activities or which concern bank products based on sharia principles by use of electronic facilities.
7. Issue, offer and trade short-term securities based on sharia principles, both directly or indirectly, through the money market.
8. Issue, offer, and trade long-term securities based on sharia principles, both directly or indirectly through the capital market.
9. Provide products or conduct business activities of other sharia commercial banks based on sharia principles.

LINE OF BUSINESS IMPLEMENTED IN FISCAL YEAR 2024

The Bank's business activities in the year 2024 remained in accordance with provisions of the Bank's Articles of Association.

Produk dan Layanan

Products and Services

PRODUK

Bank Muamalat Indonesia membagi produk perbankan syariah ke dalam 2 (dua) kategori besar, yakni produk penghimpunan dana dan produk pembiayaan. Produk penghimpunan dana terdiri dari beragam produk yang disesuaikan dengan tujuan dan preferensi nasabah. Sementara produk pembiayaan merupakan sarana menyalurkan dana yang dihimpun oleh Bank dalam bentuk pembiayaan, baik untuk usaha produktif maupun keperluan konsumtif.

BMI juga melakukan penempatan dana bekerja sama dengan mitra strategis berupa pembiayaan *channelling* maupun *executing* melalui Lembaga Keuangan Mikro Kecil yaitu, BMT (Baitul Maal Wa-Tamwil), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan perusahaan pembiayaan.

Dalam rangka menjaga posisi likuiditas jangka pendek, BMI melakukan penempatan dana pada bank lain serta pembelian surat-surat berharga berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, Bank meningkatkan intensitas pembiayaan yang ditujukan pada pasar yang selama ini mempunyai kinerja pembiayaan yang baik dengan mengalokasikan porsi yang lebih besar kepada UMKM dalam realisasi portofolio pembiayaan.

PRODUCTS

Bank Muamalat Indonesia divides sharia banking products into 2 (two) big categories, namely funds collection products and financing products. Fund collection products consist of various types in line with their respective objectives and customer preferences. Meanwhile, financing products are facilities to channel funds collected by the Bank in the form of financing, both for productive businesses as well as consumptive needs.

BMI also places funds in cooperation with strategic partners in the form of channeling funds as well as executing through the Micro Small Financial Institution, namely the Baitul Maal Wa-Tamwil (BMT), Islamic People's Credit Bank (BPRS), and financing companies.

In the effort to maintain a short-term liquidity position, BMI carries out fund placements in other banks and purchases of securities based on sharia principles. In addition, the Bank increases financing directed to the market that has had good financing performance by allocating a larger portion to MSMEs in the realization of the financing portfolio.



Adapun uraian dari produk penghimpunan dana dan produk pembiayaan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

The description of the fundraising products and financing products is described in the following table:

No.	Produk Penghimpunan Dana Fund Collection Products	Produk Pembiayaan Financing Products
1.	Tabungan iB Hijrah Tabungan dalam mata uang rupiah yang dapat digunakan untuk beragam jenis transaksi, memberikan akses yang mudah, serta manfaat yang luas. Tabungan iB Hijrah kini hadir dengan empat pilihan kartu ATM/Debit yaitu: Kartu Shar-E Regular (GPN), Kartu Shar-E Classic (VISA), Kartu Shar-E 1HRAM (VISA) dan Kartu Shar-E Prioritas (VISA). iB Hijrah Savings Savings in rupiah currency that can be used for various types of transaction, provide easy access and vast benefits. The iB Hijrah savings is now available with four choices of ATM/Debit car: Shar-E Regular Card (GPN), Shar-E Classic Card (VISA), Shar-E 1HRAM Card (VISA) and Shar-E Priority Card (VISA).	KPR iB Muamalat Pembiayaan kepada perorangan dengan peruntukan pembelian rumah tinggal ready stock baik primary maupun secondary. Pembiayaan ini juga dapat digunakan untuk pengalihan (take over) KPR dari bank syariah maupun bank konvensional, renovasi, dan pembiayaan konsumtif beragun properti. Untuk Nasabah existing KPR di Bank Muamalat dapat mengajukan top up untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. iB Muamalat KPR Financing to individuals for the purpose of purchasing ready-stock, both primary and secondary, housing units. This financing may also be used for Home Ownership Credit (KPR) takeovers from sharia banks as well as conventional banks, renovation, and consumptive financing utilizing property as collateral. Existing KPR customers at Bank Muamalat can request top-ups to meet their consumptive needs.
2.	Tabungan iB Hijrah Valas Tabungan dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) bertujuan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam. iB Hijrah Foreign Currency Savings Savings in US Dollar (US\$) and Singapore Dollar (SGD) denominations are intended to service more varieties of transactional and investment needs.	iB Muamalat Multiguna Pembiayaan kepada perorangan untuk pembelian barang halal bersifat konsumtif (seperti kendaraan bermotor roda dua atau roda empat (mobil), perencanaan ibadah, bahan-bahan bangunan, barang elektronik, furniture/perabot rumah tangga) serta sewa jasa yang dibolehkan secara syariah seperti umrah, wisata dan lainnya. iB Muamalat Multiguna Financing for individuals to purchase halal goods that are consumptive in nature (such as two-wheel or four-wheel vehicles), pilgrimage plans, building materials, electronic products, furniture/household equipment, as well as service rental allowable by sharia, for example, umrah, tourism, and others.
3.	Tabungan iB Hijrah Haji Haji Tabungan haji dan umrah dalam mata uang rupiah dan valuta asing dolar AS yang dikhususkan bagi nasabah masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah Haji dan Umrah. Dapat dilengkapi dengan <i>standing instruction</i> untuk setoran rutin maupun setoran insidental yang fleksibel sesuai kebutuhan nasabah untuk mewujudkan keinginan beribadah ke Tanah Suci. iB Hijrah Hajj Savings Haji and Umrah savings in Rupiah and US\$ specifically for Indonesian Muslim customers who plan to perform the Hajj and Umrah pilgrimages. This can be equipped with standing instructions for routine deposits or flexible incidental deposits according to customer needs to actualize the desire to worship in the Holy Land.	iB Muamalat Koperasi Karyawan Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi karyawan untuk disalurkan kepada para anggotanya (karyawan BUMN/PNS/swasta) dengan tujuan pembelian barang halal. Diperuntukan bagi para anggota koperasi karyawan dan diajukan secara berkelompok. iB Muamalat Employee Cooperatives Funding is provided to employee cooperatives to be distributed to their members (state-owned enterprises (BUMN), civil servants (PNS), and private sector employees) for the purpose of purchasing halal goods. The funding is intended for the members of employee cooperatives and is submitted in groups.
4.	Tabungan iB Hijrah Haji – Haji Anak Hebat Tabungan iB Hijrah Haji – Haji anak Hebat adalah tabungan iB Haji dikhususkan untuk anak- anak dibawah umur 17 tahun yang ingin menabung ibadah haji. iB Hijrah Hajj Savings – Super Children Hajj The iB Hijrah Hall Savings – Super Children Hajj is especially provided for children under 17 years of age who wish to save funds for hajj pilgrimage.	
5.	Tabungan iB Hijrah Rencana Tabungan iB Hijrah Rencana merupakan tabungan berjangka dalam mata uang rupiah, memiliki setoran rutin bulanan dan tidak bisa ditarik sebelum jangka waktu berakhir kecuali penutupan rekening serta pencairan dana hanya bisa dilakukan ke rekening sumber dana. Tabungan iB Muamalat Rencana dapat membantu mewujudkan berbagai rencana nasabah di masa yang akan datang. iB Hijrah Plan Savings iB Hijrah Plan Savings is a term savings in rupiah currency, with regular monthly deposits, and cannot be withdrawn before the end of the term except for account closure and disbursement of funds, which can only be made to the source account. iB Muamalat Plan Savings can help actualize various customers' plans in the future.	Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Via Multifinance) Pembiayaan yang diberikan kepada <i>end user</i> dengan tujuan pembelian kendaraan bermotor (mobil dan motor) melalui perusahaan <i>multifinance</i> yang bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia. Motor Vehicle Financing (via Multifinance) Financing provided to end users with the purpose to purchase motor vehicles (car and motorcycle) through multifinance company in cooperation with Bank Muamalat Indonesia.

No.	Produk Penghimpunan Dana Fund Collection Products	Produk Pembiayaan Financing Products
6.	TabunganKu iB Tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang sangat terjangkau bagi nasabah dari semua kalangan masyarakat. iB Mysavings Sharia savings in rupiah currency that is very affordable for customers from all parts of the community.	iB Modal Kerja Reguler Pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan atas aset lancar (persediaan). iB Regular Work Capital Financing used to finance current assets (inventory).
7.	Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) iB Tabungan yang dikelola dengan akad Mudharabah dan dikhususkan untuk segmen pelajar. Tabungan SimPel iB dapat dibukakan untuk siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Madrasah (RA, MI, Mts, MA) atau sederajat tanpa batasan umur minimal, di mana batasan maksimal masih berstatus SMA/SMK dan belum memiliki KTP melalui kerja sama antara Bank Muamalat Indonesia dan sekolah. iB Student Savings Account (SimPel) Savings is managed with a Mudharabah contract, specifically for the student segment. iB SimPel savings can be opened for educational purposes of Early Childhood (PAUD), Kindergarten (TK), Elementary School (SD), Junior High School (SMP), Senior High School (SMA), Madrasah (RA, MI, Mts, MA), or equivalent students without a minimum age limit, where the maximum limit is still high school/vocational school status and does not have an ID card through cooperation between Bank Muamalat Indonesia and the school.	iB Modal Kerja Proyek Pembiayaan yang digunakan untuk pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak yang ada. iB Project Work Capital Financing use to conduct projects based on existing contracts.
8.	Tabungan iB Hijrah Prima Tabungan iB Hijrah Prima merupakan tabungan yang didesain bagi nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil maksimal dan kebebasan bertransaksi. Nasabah dapat memiliki empat pilihan kartu debit, yaitu Kartu Shar-E Reguler (GPN), Kartu Shar-E Classic (VISA), Kartu Shar-E 1HRAM (VISA), dan Kartu Shar-E Prioritas (VISA). iB Hijrah Prima Savings iB Hijrah Prima Savings is a savings account designed for customers who wish to obtain maximum profit sharing and freedom of transactions. Customers can have four debit card options, namely the Regular Shar-E Card (GPN), the Classic Shar-E Card (VISA), the 1HRAM Shar-E Card (VISA), and the Priority Shar-E Card (VISA).	iB Modal Kerja Konstruksi Developer Pembiayaan yang digunakan untuk pembangunan proyek properti. iB Construction Developer Work Capital Financing used to develop property projects.
9.	Tabungan iB Hijrah Bisnis Tabungan iB Hijrah Bisnis adalah produk tabungan yang digunakan untuk mengakomodir kebutuhan bisnis nasabah non individu dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi yang didukung oleh fasilitas <i>Cash Management System</i> MADINA. iB Hijrah Business Savings iB Hijrah Business Savings is a savings product used to accommodate the business needs of non-individual customers by providing ease and convenience of transactions supported by MADINA Cash Management System facilities.	iB Modal Kerja Lembaga Keuangan Syariah Pembiayaan yang digunakan untuk pembangunan proyek properti. iB Sharia Financial Institution Work Capital Financing used to develop property projects.
10.	Tabungan iB Hijrah Payroll Tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan yang merupakan karyawan dari suatu perusahaan/institusi tertentu di mana pendistribusian gaji (<i>payroll</i>) yang diterima, dilakukan melalui Bank Muamalat. iB Hijrah Payroll Savings Savings that are used for individual customers who are employees of a particular company/institution where accepted payroll is carried out by Bank Muamalat.	
11.	Tabungan Prima Berhadiah Tabungan yang diperuntukkan bagi perorangan maupun non perorangan dengan pemberian hadiah di muka sesuai keinginan nasabah tanpa diundi, di mana nasabah bersedia mengendapkan dana dalam jangka waktu tertentu. Prima Prize Savings Savings that are intended for individuals and non-individuals with prizes given up front according to the customer's wishes without a draw, where the customer is willing to deposit funds for a certain period of time.	



No.	Produk Penghimpunan Dana Fund Collection Products	Produk Pembiayaan Financing Products
12.	Rekening Tabungan Jamaah Haji (RTJH) RTJH adalah tabungan dalam mata uang rupiah (IDR) dengan akad Wadiah bagi anda yang telah memiliki dana porsi haji dan dapat digunakan untuk kebutuhan transaksi dan berbelanja menggunakan Muamalat DIN dan kartu Shar-E Debit. Haji Pilgrims Savings Account (RTJH) RTJH is savings in rupiah (Rp) currency with a Wadiah contract for those who already have Hajj portion funds and can be used for transaction and shopping needs using Muamalat DIN and Shar-E debit cards.	
13.	Deposito iB Hijrah Deposito syariah dengan akad mudharabah dalam mata uang rupiah dan dolar AS yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi nasabah. Diperuntukkan bagi nasabah perorangan dan institusi yang memiliki legalitas badan. iB Hijrah Deposit Sharia deposits with flexible mudharabah contracts in rupiah and US dollars that provide optimal investment results for customers. Intended for individual customers and institutions with legal entity/status.	iB Investasi Non Properti Bisnis Pembiayaan untuk pembelian barang investasi penunjang usaha. iB Investasi Non Properti Bisnis Financing for the purchase of business support investment goods.
14.	Deposito Online iB Hijrah Deposito syariah dengan akad mudharabah yang dapat dibuka secara praktis kapan pun dan di mana pun melalui Muamalat DIN dengan bagi hasil yang optimal dalam mata uang rupiah. Diperuntukkan hanya untuk nasabah perorangan yang sebelumnya telah memiliki rekening tabungan/giro di Muamalat dan telah mengunduh dan terdaftar di aplikasi Muamalat DIN. Online iB Hijrah Deposit Sharia deposit with a Mudharabah contract that can be opened practically anytime and from anywhere through Muamalat DIN with optimal profit sharing in rupiah currency. Intended only for individual customers who previously had a savings/current account at Muamalat and have downloaded and registered on the Muamalat DIN application.	iB Properti Bisnis Pembiayaan investasi untuk pembangunan properti bisnis yang menunjang keberlangsungan usaha. iB Business Property Investment financing for development of property business that supports business continuity.
15.	Deposito Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) iB Hijrah Deposito DHE SDA yang dikelola secara syariah dengan akad mudharabah dalam mata uang rupiah dan dolar AS yang dapat memberikan hasil investasi secara optimal dan barokah bagi Anda serta pajak bagi hasil yang lebih rendah. Produk ini dibuat untuk mendukung kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/2019 tentang penerimaan Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), Bank Muamalat melayani pembukaan Rekening Khusus DHE SDA. Rekening Khusus (Reksus) Deposito Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) adalah Rekening Deposito yang digunakan khusus untuk penerimaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Reksus DHE SDA ini diperuntukkan khusus untuk nasabah non perorangan. iB Hijrah Foreign Exchange Deposit from Export of Natural Resources (DHE SDA) DHE SDA Deposit is managed in accordance with sharia with a mudharabah contract in rupiah and US dollar currencies that can provide optimal investment results and blessings for you as well as lower profit-sharing taxes. This product was made to support the government's policy as stated in Government Regulation (PP) No. 1/2019 regarding the receipt of Export Foreign Exchange from Exported Natural Resource Goods (DHE SDA); Bank Muamalat serves the opening of a Special DHE SDA Account. Special Account for Foreign Exchange Deposit from Natural Resource Exports (DHE SDA) is a Deposit Account used specifically for receiving Foreign Exchange from Natural Resource Exports (DHE SDA). This Special Account is specifically intended for non-individual customers.	iB Muamalat Usaha Mikro Pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan investasi diberikan kepada pengusaha mikro baik untuk perorangan maupun badan usaha non-hukum. iB Muamalat Micro Business Financing in the form of work capital and investment provided for micro entrepreneurs both individual and non-legal business entities.

No.	Produk Penghimpunan Dana Fund Collection Products	Produk Pembiayaan Financing Products
16.	Giro ib Hijrah Giro syariah dengan akad wadiah dalam mata uang rupiah dan dolar AS yang memudahkan semua jenis kebutuhan transaksi bisnis maupun transaksi keuangan personal nasabah. Giro ini diperuntukan bagi nasabah perorangan dan institusi yang memiliki legalitas badan. ib Hijrah Current Account Sharia current account with a wadiah contract in rupiah and US dollar currencies providing easy access for all business transaction needs as well as customers' personal financial transactions. This current account is intended for individual customers and institutions with legal status.	ib Rekening Koran Muamalat Pembiayaan yang disediakan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan akan pembelian Properti Bisnis sebagai investasi ataupun untuk peremajaan/renovasi dan pembangunan properti bisnis baru di atas lahan milik nasabah. ib Muamalat Current Account Financing that is provided to customers to meet the need to purchase business property as an investment or for the rejuvenation/renovation and construction of new business property on land owned by the customer.
17.	Giro ib Hijrah Ultima Giro syariah dengan akad mudharabah dalam mata uang rupiah dan dolar AS yang memudahkan semua jenis kebutuhan transaksi bisnis maupun transaksi keuangan personal nasabah disertai bagi hasil yang kompetitif dan berbagai benefit transaksi lainnya. Giro ini diperuntukan bagi nasabah perorangan dan institusi yang memiliki legalitas badan. ib Hijrah Ultima Current Account Sharia current account with a mudharabah contract in rupiah and US dollar currencies that facilitates all types of business transaction needs and personal financial transactions for customers, accompanied by competitive profit sharing and various other transaction benefits. This current account is intended for both individual customers and legal entities.	
18.	Giro Ultima USD Berhadiah Giro Ultima USD Berhadiah (GUUB) Program giro berjangka khusus di mana Bank memberikan hadiah (barang dan jasa sesuai ketentuan bank, mengacu pada katalog terbaru) dimuka atau dibelakang. Ultima USD Current Account with Prizes GUUB is a special term current account program where the Bank provides prizes (goods and services in accordance with bank regulations, referring to the latest catalog) in advance or at the end.	
19.	Giro ib Hijrah/ib Hijrah Ultima-Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) Rekening Khusus (Reksus) Giro Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) adalah Rekening Giro yang digunakan khusus untuk penerimaan Devisa Hasil Ekspor Sumber daya Alam (DHE SDA) bagi nasabah non perorangan. Giro ini dikelola secara syariah dengan dua pilihan akad, yaitu akad wadiah dan mudharabah dalam mata uang rupiah dan dolar AS. Untuk akad mudharabah, giro disertai dengan bagi hasil kompetitif serta pajak bagi hasil yang lebih rendah. Produk ini dibuat untuk mendukung kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/2019 tentang penerimaan Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). ib Hijrah Ultima-Foreign Exchange from Export of Natural Resources (DHE-SDA) The Special Account for Foreign Currencies from Export of Natural Resources (DHE-SDA) is a current account used specifically for receipt of foreign exchange proceeds from export of natural resources (DHE-SDA) for non-individual customers. This current account is managed in a shared manner with two contract options, namely wadiah and mudharabah contracts in rupiah and US dollars. For the Mudharabah contract, the current account comes with competitive profit sharing and lower profit sharing tax. This product was made to support the government's policy as stipulated in Government Regulation (PP) No. 1/2019 on the receipt of Foreign Exchange Proceeds from Natural Resources Exported Goods (DHE-SDA).	



No.	Produk Penghimpunan Dana Fund Collection Products	Produk Pembiayaan Financing Products
20.	Giro iB Hijrah SAR Giro iB Hijrah SAR (Saudi Arabian Riyal) adalah produk pengembangan dari Giro iB Hijrah yang diperuntukkan untuk nasabah perorangan dan non perorangan dalam melakukan transaksi bisnis dengan menggunakan jenis mata uang Saudi Arabian Riyal (SAR). iB Hijrah SAR Current Account A development product of Giro iB Hijrah that is intended for individual and non-individual customers in conducting business transactions using Saudi Arabian Riyal (SAR) currency.	
21.	Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah Muamalat Merupakan satu-satunya DPLK syariah di Indonesia, menjadikan kami DPLK yang paling tepat bagi mereka yang ingin merencanakan dana pensiun yang amanah, berkah dan sesuai prinsip syariah. Dengan pelayanan prima dan pengembangan investasi yang kompetitif, menjadikan DPLK Syariah Muamalat sebagai pilihan terbaik untuk mempersiapkan kesejahteraan saat memasuki usia pensiun. Didukung jaringan Bank Muamalat yang luas di seluruh provinsi di Indonesia serta tim yang profesional, DPLK Syariah Muamalat siap membantu menginvestasikan dana secara aman dan optimal, memberikan layanan mudah dan transparan. Pastikan kesiapan dana pensiun Anda dan keluarga di DPLK Syariah Muamalat yang aman, nyaman, dan menguntungkan. Muamalat Financial Institution Pension Fund (DPLK) The only sharia DPLK in Indonesia that makes us the most appropriate DPLK for those planning a trusted and blessed retirement fund that is in accordance with sharia principles. With excellent service and competitive investment development, DPLK Syariah Muamalat is the best choice to prepare for welfare when entering retirement age. Supported by Bank Muamalat's extensive network in all of Indonesia's provinces and a professional team, DPLK Syariah Muamalat is prepared to help invest funds safely and optimally, providing easy and transparent services. Assured that you and your family are prepared for a safe, comfortable, and profitable DPLK Syariah Muamalat pension fund.	

LAYANAN

BMI senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang maksimal. Upaya itu direalisasikan 4 (empat) layanan yang diberikan kepada para nasabah, yakni layanan perbankan internasional, layanan *trade finance*, layanan 24 jam, *Treasury*, dan Muamalat Prioritas..

1. Perbankan Internasional (Remitansi)

- a. *Incoming Muamalat Remittance iB*
Merupakan kiriman uang masuk dalam denominasi valuta asing yang ditujukan kepada penerima, baik untuk diterima tunai ataupun dimasukkan ke dalam kredit rekening penerima yang merupakan nasabah Bank.
- b. *Outgoing Muamalat Remittance iB*
Ialah kiriman uang keluar dalam denominasi valuta asing yang ditujukan kepada penerima, baik untuk diterima tunai ataupun dimasukkan dalam kredit rekening penerima pada bank lain, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan instruksi pengirim melalui Bank.

2. Trade Finance

- a. Ekspor
Produk dan layanan transaksi ekspor yang tersedia bagi nasabah/eksportir Bank meliputi:
 - i. *Advising L/C*
Layanan yang diberikan Bank untuk meneruskan/ menyampaikan L/C kepada *beneficiary* yang tercantum dalam L/C, baik secara langsung maupun melalui *second Advising Bank*.
 - ii. *Outward Bills*
Layanan yang diberikan Bank untuk menangani dokumen L/C Ekspor berupa: pengujian dokumen L/C Ekspor, pengiriman dokumen kepada Issuing Bank atau pihak yang ditunjuk, penerimaan pembayaran hasil ekspor dan kegiatan lainnya yang masih berkaitan dengan penanganan dokumen L/C Ekspor.
 - iii. *Negotiation*
Dana talangan yang diberikan oleh Bank kepada *beneficiary* atas presentasi dokumen L/C Ekspor (*post shipment financing*). Negosiasi dapat dilakukan baik menggunakan fasilitas ataupun tanpa fasilitas nasabah.
 - iv. *L/C Transfer*
Layanan yang diberikan oleh Bank untuk menerbitkan L/C transfer berdasarkan L/C yang diterima oleh Bank dari *Issuing Bank*.
- b. Impor
Produk dan layanan transaksi impor yang tersedia bagi nasabah/ Importir Bank meliputi:
 - i. *Letter of Credit (L/C)*
Bank Muamalat Indonesia memiliki layanan

SERVICES

BMI always strives to provide maximum service. This effort is realized through four services provided to customers, namely international banking services, trade finance services, 24-hour services, Treasury, and Muamalat Priority.

1. International Banking (Remittances)

- a. Incoming Muamalat Remittance iB
Foreign currency remittances directed to recipients, either for cash receipt or credited to the recipient's account at the Bank.
- b. Outgoing Muamalat Remittance iB
Foreign currency remittances directed to recipients, either for cash receipt or credited to the recipient's account at another bank, both domestically and internationally, according to sender instructions through the Bank.

2. Trade Finance

- a. Export
Products and export transaction services available to customers/exporters of the Bank include:
 - i. *Advising L/C*
A service provided by the Bank to forward/ convey L/C to the beneficiary stated in the L/C, either directly or through a second Advising Bank.
 - ii. *Outward Bills*
A service provided by the Bank to handle export L/C documents including: examination of export L/C documents, sending documents to the Issuing Bank or designated parties, receiving export payment proceeds, and other activities related to handling export L/C documents.
 - ii. *Negotiation*
Advance funds provided by the Bank to the beneficiary upon presentation of export L/C documents (post-shipment financing). Negotiations can be conducted with or without customer facilities.
 - iv. *L/C Transfer*
A service provided by the Bank to issue L/C transfers based on the L/C received by the Bank from the Issuing Bank.
- b. Import
Products and import transaction services available to customers/Importers of the Bank include:
 - i. *Letter of Credit (L/C)*
Bank Muamalat Indonesia provides L/C



penerbitan L/C yaitu penerbitan pernyataan oleh Bank atas permintaan nasabah untuk keuntungan pihak lain (*beneficiary*), yang oleh karenanya Bank mengikatkan diri untuk membayar kepada *beneficiary* apabila *beneficiary* dapat memenuhi permintaan/persyaratan yang dinyatakan dalam L/C tersebut. Terdapat beberapa macam L/C berdasarkan jangka waktu pembayarannya yakni:

- *Sight L/C*
L/C yang mewajibkan *Issuing Bank* untuk melaksanakan pembayaran kepada *beneficiary*, segera setelah dokumen-dokumen yang disediakan *beneficiary* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam L/C.
- *Usance L/C*
L/C di mana pada saat dokumen-dokumen yang disediakan *beneficiary* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam L/C, *Issuing Bank* berkewajiban untuk memberikan akseptasi *draft* yang menyatakan bahwa *Issuing Bank* akan membayar kepada *beneficiary* dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- *Usance Payable at Sight (UPAS) L/C*
L/C yang mewajibkan *Issuing Bank* untuk melaksanakan pembayaran kepada *beneficiary* segera setelah dokumen-dokumen yang disediakan *beneficiary* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam L/C. Di sisi lain, *applicant* akan melakukan pembayaran kepada *Issuing Bank* dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- *Usance Payable at Usance (UPAU) L/C*
Usance L/C di mana *Issuing Bank* akan melakukan pembayaran kepada *beneficiary* atas *draft* (tagihan) yang sudah diterima sesuai akseptasi Bank kepada *beneficiary*. Di sisi lain, *applicant* akan melakukan pembayaran kepada *Issuing Bank* dalam jangka waktu tertentu yang akan datang yang sudah disepakati.

- ii. Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri (SKBDN)
Pada dasarnya produk dan layanan yang disediakan untuk eksportir dan importir dapat juga digunakan untuk mendukung perdagangan dalam negeri. Yang membedakannya adalah acuan *best practice* yang digunakan, di mana transaksi ekspor/impor menggunakan standar internasional

issuance services, which involve issuing a statement by the Bank at the request of the customer for the benefit of another party (*beneficiary*), whereby the Bank undertakes to pay the beneficiary if they can fulfill the requests/requirements stated in the L/C. There are several types of L/C based on the payment terms, namely:

- *Sight L/C*
L/C that obliges the Issuing Bank to make payment to the beneficiary immediately after the documents provided by the beneficiary meet the requirements stated in the L/C.
- *Usance L/C*
L/C where when the documents provided by the beneficiary meet the requirements stated in the L/C, the Issuing Bank is obliged to provide acceptance of the draft stating that the Issuing Bank will pay the beneficiary within a certain period in the future.
- *Usance Payable at Sight (UPAS) L/C*
L/C that obliges the Issuing Bank to make payment to the beneficiary immediately after the documents provided by the beneficiary meet the requirements stated in the L/C. On the other hand, the applicant will make payment to the Issuing Bank within a certain period in the future.
- *Usance Payable at Usance (UPAU) L/C*
Usance L/C where the Issuing Bank will make payment to the beneficiary for the draft (bill) received according to the Bank's acceptance to the beneficiary. On the other hand, the applicant will make payment to the Issuing Bank within an agreed-upon period in the future.

- ii. Domestic Documented Credit (SKBDN)
Basically, the products and services provided for exporters and importers can also be used to support domestic trade. What sets it apart is the best practice reference used, where export/import transactions follow international standards regulated by UCP DC (Uniform Custom Practice on Documentary Collection), while domestic transactions

- yang diatur dalam UCP DC (*Uniform Custom Practice on Documentary Collection*), sementara untuk transaksi dalam negeri mengikuti Peraturan Bank Indonesia. Oleh karena itu SKBDN lazim juga disebut sebagai L/C Lokal.
- iii. **Bank Garansi**
Bank Garansi adalah penerbitan pernyataan oleh Bank atas permintaan nasabah (pihak terjamin) untuk menjamin kewajiban nasabah karena ketidakmampuan nasabah untuk menjalankan kewajibannya dengan baik (wanprestasi) kepada pihak yang menerima jaminan berdasarkan suatu perjanjian yang telah dibuat antara nasabah dengan pihak yang menerima jaminan. Bank Garansi yang dapat diterbitkan oleh Bank Muamalat Indonesia antara lain:
 - *Bid Bond* (Jaminan Penawaran)
 - *Performance Bond* (Jaminan Pelaksanaan)
 - *Advance Payment Bond* (Jaminan Uang Muka)
 - *Retention Bond* (Jaminan Pemeliharaan)
 - *Payment Bond* (Jaminan Pembayaran)
 - *Custom Bond*
 - *Shipping Guarantee*
 - *Counter Guarantee*
 - iv. **Klaim Bank Garansi**
Merupakan layanan yang diberikan oleh Bank atas permintaan *beneficiary* untuk melakukan penagihan kepada *Issuing Bank* ketika *applicant* tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik (wanprestasi) kepada pihak *beneficiary*.
 - v. **Standby L/C**
Standby L/C merupakan suatu bentuk penjaminan dari Bank Penerbit *Standby L/C* kepada *beneficiary* terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi/ default atas diri *applicant* (pihak yang dijamin/ pemohon *Standby L/C*).
 - vi. **Deposito Plus**
Program pemasaran deposito yang dikombinasikan dengan SKBDN. Melalui program ini, nasabah yang menempatkan deposito di Bank memiliki kemungkinan untuk memiliki kendaraan secara langsung.
 - vii. **LC Murabahah**
LC Murabahah adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada debitur importir untuk pembayaran atau pelunasan L/C atau SKBDN baik *sight* (atas unjuk) maupun *usance* (berjangka) yang diterbitkan melalui Bank Muamalat Indonesia.
 - viii. **Buyer Financing**
Merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan oleh Bank dalam rangka menjaga kemampuan nasabah dalam pembelian bahan
- adhere to the regulations of Bank Indonesia. Therefore, SKBDN is commonly referred to as a Local L/C.
- iii. **Bank Guarantees**
Bank Guarantees are the issuance of a statement by the Bank at the request of the customer (guaranteed party) to guarantee the obligations of the customer due to the inability of the customer to fulfill their obligations properly (default) to the party receiving the guarantee based on an agreement made between the customer and the party receiving the guarantee. Bank Guarantees that can be issued by Bank Muamalat Indonesia include:
 - Bid Bond (Bid Guarantee)
 - Performance Bond (Performance Guarantee)
 - Advance Payment Bond (Advance Payment Guarantee)
 - Retention Bond (Retention Guarantee)
 - Payment Bond (Payment Guarantee)
 - Custom Bond
 - Shipping Guarantee
 - Counter Guarantee
 - iv. **Bank Guarantee Claims**
Bank Guarantee Claims are services provided by the Bank at the request of the beneficiary to make claims to the Issuing Bank when the applicant fails to fulfill their obligations properly (default) to the beneficiary.
 - v. **Standby L/C**
Standby L/C is a form of guarantee from the *Standby L/C Issuing Bank* to the beneficiary against the possibility of default by the applicant (guaranteed party/applicant of *Standby L/C*).
 - vi. **Deposito Plus**
Deposito Plus is a deposit marketing program combined with SKBDN. Through this program, customers placing deposits in the Bank have the opportunity to directly own a vehicle.
 - vii. **LC Murabahah**
LC Murabahah is a working capital financing facility provided to importer debtors for payment or settlement of L/C or SKBDN, both *sight* (on presentation) and *usance* (deferred), issued through Bank Muamalat Indonesia.
 - viii. **Buyer Financing**
Buyer Financing is short-term financing provided by the Bank to ensure the ability of customers to purchase raw materials/



baku/barang dagangan secara tepat waktu kepada *supplier*/penjual sehingga kredibilitas nasabah di mata *supplier*/penjual terjaga.

ix. *AR Financing*

Produk pembiayaan jangka pendek dengan pemberian dana talangan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja berdasarkan piutang usaha perusahaan dari transaksi perdagangan atau penjualan barang dan jasa.

x. *Value Chain Financing*

Pembiayaan kepada nasabah melalui skema pembiayaan vendor maupun distributor.

3. Layanan 24 Jam

a. ATM Muamalat

ATM Muamalat dilengkapi dengan berbagai fitur untuk memudahkan nasabah dalam melakukan info saldo, cetak 5 (lima) transaksi terakhir, pembayaran tagihan, pembelian pulsa isi ulang, pembelian tiket, pembayaran premi asuransi, transfer antar bank, pembayaran uang sekolah dan pembayaran ZIS.

b. Muamalat Mobile/*Digital Islamic Network* (DIN)

Muamalat DIN merupakan aplikasi *mobile banking* yang meliputi fitur transaksional dan non transaksional untuk melengkapi gaya hidup syariah Nasabah. Fitur transaksional yang tersedia meliputi transfer (pemindahbukuan, online antar bank, BI-FAST, SKN dan RTGS), pembayaran (Telkom, Internet, PLN, PDAM, TV Kabel, Tiket, Asuransi, Samsat Digital, PBB, Pendidikan, E-Commerce, Donasi, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, DPLK, BPJS PH dan *Virtual account*) pembelian (pulsa isi ulang, Paket Data, Token Listrik, uang elektronik, Voucher Google Play, dan Spotify Premium, Hewan Qurban, Ziswaf dan Hijrah Tour), pembayaran menggunakan QRIS, pembukaan deposito, pembukaan rekening tambahan (ETB) serta rekening baru (NTB) fitur non transaksional berupa cek saldo, mutasi rekening, info produk, layanan Nasabah Digital, daily hadist, arah kiblat, jadwal shalat, kalkulator zakat, cek nilai manfaat haji dan informasi promo. Selain itu juga *Mobile banking* Muamalat (DIN) dilengkapi dengan layanan DPLK Muamalat yang terintegrasi serta layanan pengaduan yang seamless. Dalam Mobile Banking Muamalat (DIN) menawarkan juga kemudahan dalam bertransaksi secara *real time*, aman dan praktis menggunakan perangkat *smart phone* nasabah yang terdaftar di bank dan terkoneksi jaringan internet.

Muamalat DIN dapat digunakan pada sistem operasi Android, IOS dan Huawei. Untuk dapat menggunakan layanan Muamalat DIN, nasabah hanya perlu mengunduh aplikasi Muamalat DIN

commodities from suppliers/sellers in a timely manner, thereby maintaining the credibility of customers in the eyes of suppliers/sellers.

ix. *AR Financing*

Short-term financing products with advance funding to meet the working capital needs based on the business receivables of the company from trading transactions or sales of goods and services.

x. *Value Chain Financing*

Financing provided to customers through vendor or distributor financing schemes.

3. 24-Hour Services

a. Muamalat ATM

Muamalat ATMs are equipped with various features to facilitate customers in checking balances, printing the last 5 transactions, bill payments, prepaid top-ups, ticket purchases, insurance premium payments, interbank transfers, school fee payments, and Zakat payments.

b. Muamalat Mobile/*Digital Islamic Network* (DIN)

Muamalat DIN is a mobile banking application that includes both transactional and non-transactional features to complement the Sharia lifestyle of customers. Transactional features include transfers (inter-account, online interbank, BI-FAST, SKN, and RTGS), payments (Telkom, internet, electricity, PDAM, cable TV, tickets, insurance, digital Samsat, property tax, education, e-commerce, donations, health insurance, social security, pension funds, Hajj, and virtual accounts), purchases (prepaid top-ups, data packages, electricity tokens, electronic money, Google Play vouchers, Spotify Premium, Qurban animals, Ziswaf, and Hajj tours), QRIS payments, deposit opening, additional account opening (ETB), and new account opening (NTB). Non-transactional features include balance checks, account statements, product information, digital customer services, daily hadith, Qibla direction, prayer times, Zakat calculators, Hajj benefit checks, and promotional information. Additionally, Muamalat Mobile Banking (DIN) includes integrated DPLK Muamalat services and seamless complaint handling. Muamalat DIN offers real-time, secure, and convenient transactions using customers' registered smartphones connected to the internet.

Muamalat DIN is compatible with Android, iOS, and Huawei operating systems. To use Muamalat DIN, customers only need to download the Muamalat DIN app from the app store (Apple),

dari app store (Apple) play store (Android) dan App Gallery (Huawei) dengan kata kunci “Muamalat DIN” dan cukup melakukan pendaftaran melalui aplikasi.

c. *Internet Banking Muamalat*

Layanan ini bertujuan untuk memudahkan nasabah ritel (individu) dalam melakukan transaksi finansial berupa transfer (pemindahbukuan, antar bank, SKN dan RTGS), pembayaran (Telkom, Telko, PLN, TV Kabel, ZIS dan *Virtual Account*), pembelian (pulsa isi ulang, PLN, sukuk *online*) dan non transaksional berupa cek saldo, mutasi rekening, bahasa, dan informasi promo serta Internet Banking Muamalat juga memiliki fitur transaksi debit *online*, nasabah dapat berbelanja di mitra atau *merchant-merchant* yang sudah bekerja sama dengan Bank Muamalat dengan lebih mudah, praktis dan aman. Untuk dapat menggunakan layanan *Internet Banking* Muamalat, nasabah cukup mengunjungi ATM Muamalat terdekat dan melakukan registrasi *Internet Banking* Muamalat serta melakukan aktivasi transaksi finansial melalui cabang Muamalat terdekat.

d. *SalaMuamalat*

Layanan *Contact Center* 24 jam yang memberikan kemudahan kepada nasabah, setiap saat dan di manapun nasabah berada, baik untuk layanan informasi, permintaan, maupun pengaduan produk perbankan. Untuk dapat terhubung dengan *SalaMuamalat* nasabah dapat mengakses melalui:

- Telepon dengan nomor 1500016, sementara nasabah yang berada di luar negeri melalui nomor +6221 8066 8000.
- *E-mail* dengan alamat salamuamalat@bankmuamalat.co.id.
- *Chat* melalui WebChat pada *website* Bank Muamalat WhatsApp dengan nomor 081280651800.

e. *Muamalat Digital Integrated Access (MADINA)*

Layanan *Internet Banking* untuk nasabah non Individual yang berbasis *website* dan memiliki pilihan menu yang beragam, proses transaksi yang *realtime*, pengaturan wewenang, limit transaksi yang mudah sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dengan MADINA, nasabah dapat memonitor maupun melakukan transaksi perbankan atas rekening nasabah di Bank tanpa terbatas waktu dan tempat.

f. *Muamalat Merchants Apps (MMA)*

QRIS Acquiring Muamalat adalah layanan Bank Muamalat yang ditawarkan kepada Nasabah yang memiliki usaha yang memenuhi syarat yang telah ditentukan sebagai *Merchant* QRIS untuk dapat memproses data uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain atau Bank Muamalat sendiri berupa aplikasi uang elektronik berbasis *server*. Mobile Banking (mis. MDIN) atau Uang elektronik

play store (Android), or App Gallery (Huawei) using the keyword “Muamalat DIN” and complete the registration process through the app.

c. *Muamalat Internet Banking*

This service aims to facilitate retail customers (individuals) in conducting financial transactions such as transfers (inter-account, interbank, SKN, and RTGS), payments (Telkom, Telko, electricity, cable TV, Zakat, and virtual accounts), purchases (prepaid top-ups, electricity, online Sukuk), and non-transactional activities such as balance checks, account statements, language options, and promotional information. Muamalat Internet Banking also features online debit transactions, allowing customers to shop with Muamalat's partner merchants more easily, conveniently, and securely. To use Muamalat Internet Banking, customers simply need to visit the nearest Muamalat ATM to register and activate financial transactions through the nearest Muamalat branch.

d. *SalaMuamalat*

SalaMuamalat is a 24-hour contact center service that provides convenience to customers for information, requests, or banking product complaints anytime and anywhere. Customers can connect with *SalaMuamalat* through:

- Telephone at 1500016, or for customers outside Indonesia, at +6221 8066 8000.
- E-mail at salamuamalat@bankmuamalat.co.id.
- Chat via WebChat on the Bank Muamalat website or WhatsApp at 081280651800.

e. *Muamalat Digital Integrated Access (MADINA)*

MADINA is an internet banking service for non-individual customers based on a website platform with various menu options, real-time transaction processes, customizable transaction limits according to customer needs, allowing monitoring and banking transactions on customer accounts with the bank without time or location restrictions.

f. *Muamalat Merchants Apps (MMA)*

QRIS Acquiring Muamalat is a Bank Muamalat service offered to customers who have a business that meets the requirements that have been determined as a QRIS Merchant to be able to process electronic money data issued by other parties or Bank Muamalat itself in the form of server-based electronic money applications. Mobile Banking (e.g. MDIN) or Electronic money (e.g. OVO,



(mis. OVO, GoPay, LinkAja, Dana) memiliki fitur pembayaran menggunakan QR. Layanan tersebut menggunakan Muamalat Merchants App (MMA) yang dapat di unduh dari playstore yang digunakan oleh Merchant untuk mengelola transaksi pembayaran barang/jasa melalui QRIS Merchant. Fitur yang tersedia pada Muamalat Merchant Apps yaitu notifikasi transaksi, cek histori transaksi, refund transaksi, generate QR Statis dan Dinamis.

g. Gerai Muamalat

Gerai Muamalat adalah layanan atau fasilitas sistem pembelian dan pembayaran tagihan secara tunai oleh masyarakat pada Loker atau *Payment Point (PP)* yang sudah bekerjasama dengan Bank Muamalat

h. Virtual Account

Virtual Account (VA) merupakan layanan Bank Muamalat untuk memudahkan Nasabah/Mitra dalam penerimaan pembayaran tagihan dari *End User*, berupa nomor identifikasi khusus yang dibuat unit untuk digunakan sebagai nomor tujuan pembayaran serta identifikasi tagihan bagi setiap *End User*.

i. Standard Nasional Open API Pembayaran (SNAP)

Standard Nasional Open API Pembayaran adalah layanan bagi mitra Bank Muamalat agar dapat melakukan instruksi beberapa fitur transaksi perbankan dari rekening yang dimiliki oleh Mitra secara langsung baik untuk kebutuhan transaksi Mitra sendiri, nasabah dari Mitra maupun non Mitra. Mitra mendapatkan fleksibilitas dalam mengakses sistem perbankan melalui sistem *internal business process* milik nasabah sendiri.

4. Layanan Treasury

a. Money Market

Aktivitas transaksi *Money Market* (Pasar Uang) di Bank Muamalat Indonesia dalam rangka baik pemenuhan likuiditas maupun optimalisasi likuiditas, di mana aktivitas tersebut *treasury* mencatatkan pendapatan dan biaya berupa margin, bagi hasil, athaya dan uroh atas penempatan maupun pinjaman di pasar uang.

b. Foreign Exchange

Aktivitas transaksi Foreign Exchange di Bank Muamalat Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan baik nasabah perorangan, nasabah korporasi dan antarbank untuk memperoleh *fee-based income* dan juga sebagai transaksi pemenuhan kebutuhan bank (*Banking Book*). Mata uang yang dilayani adalah USD, MYR, SGD, EUR, JPY, SAR, KWD dan MultiCurrency. Produk Forex adalah *Cash transaction: Today, Tom (tomorrow) dan Spot*. Hedging transaction: hedging sederhana (*forward/ Al-Tahawwuth al-Basith*) dan hedging kompleks (*Al-Tahawwuth al-Murakkab*)

GoPay, LinkAja, Dana) has a payment feature using QR. The service uses the Muamalat Merchants App (MMA) which can be downloaded from the playstore which is used by merchants to manage payment transactions for goods / services through QRIS Merchant. Features available on Muamalat Merchant Apps are transaction notifications, check transaction history, refund transactions, generate Static and Dynamic QR.

g. Muamalat Outlets

Muamalat Outlets are cash payment and bill payment facilities provided to the public at designated counters or payment points (PP) that collaborate with Bank Muamalat.

h. Virtual Account

Virtual Account (VA) is a Bank Muamalat service that facilitates customers/partners in receiving bill payments from end-users. It consists of a unique identification number created by the unit to be used as a payment destination number and bill identification for each end-user.

i. National Standard Open Payment API (SNAP)

Standard Nasional Open API Pembayaran is a service provided to Bank Muamalat's partners to execute several banking transaction features directly from the partner's account for the partner's own transactions, transactions of the partner's customers, or non-partner transactions. Partners gain flexibility in accessing banking systems through their internal business process systems.

4. Treasury Services

a. Money Market

Money Market transactions at Bank Muamalat Indonesia serve both liquidity fulfillment and liquidity optimization purposes. In these activities, the treasury records income and expenses in the form of margins, profit-sharing, fees, and returns on placements or loans in the money market.

b. Foreign Exchange

Foreign Exchange transactions at Bank Muamalat Indonesia cater to the needs of individual customers, corporate clients, and interbank transactions to generate fee-based income and fulfill the bank's requirements (Banking Book). Supported currencies include USD, MYR, SGD, EUR, JPY, SAR, KWD, and MultiCurrency. Forex products include Cash transactions: Today, Tomorrow (Tom), and Spot. Hedging transactions include simple hedging (forward/Al-Tahawwuth al-Basith) and complex hedging (Al-Tahawwuth al-Murakkab).

Selain itu, juga melayani *exotic currency* seperti Won Korea (KRW), Dinar Jordan (JOD), dan Thailand Bath (THB) dan lain-lain. Nasabah juga dapat melakukan jual beli banknote ke Bank Muamalat Indonesia untuk mata uang USD, SAR, dan SGD. Transaksi - transaksi diatas dapat dilakukan baik di Indonesia maupun di cabang Kuala Lumpur, Malaysia.

c. *Fixed Income* (Sukuk)

Aktivitas transaksi Sukuk di Bank Muamalat Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah dalam berinvestasi sukuk dan memenuhi kebutuhan bank (banking position) untuk mata uang IDR dan USD. Sukuk yang ditransaksikan adalah sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah dan korporasi. Sukuk yang aktif ditransaksikan adalah SR (Sukuk Ritel), PBS (Project Based Sukuk) dan Indois (Sukuk pemerintah mata uang USD).

Transaksi dilakukan dengan nasabah individu, korporasi dan antarbank. Adapun tujuan transaksi sukuk adalah untuk memperoleh fee-based income dan pendapatan margin/ujroh atas kupon sukuk pada portofolio *banking book*. Dan melanjutkan pada tahun-tahun sebelumnya BMI sebagai mitra distribusi sukuk pemerintah, BMI ikut berpartisipasi dalam penjualan sukuk yang diterbitkan pemerintah.

d. Bank Kustodian

Aktivitas Layanan Core Custody adalah layanan yang diberikan Bank Muamalat selaku Bank Kustodian kepada Nasabah untuk menyimpan dan mengadministrasikan surat berharga (efek) milik Nasabah sesuai dengan prinsip syariah.

Melayani kebutuhan Nasabah dalam menyimpan mengadministrasikan, menyelesaikan transaksi efek Nasabah serta memberikan pelaporan sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

Fitur Utama Core Custody meliputi:

- Jasa Penitipan Efek Syariah
- Jasa Penyelesaian Transaksi Efek Syariah
- Jasa Aksi Korporasi
- Jasa Administrasi dan Pelaporan

5. Muamalat Prioritas

Muamalat Prioritas membantu mewujudkan aspirasi dan kebutuhan perbankan syariah secara menyeluruh mulai dari pengelolaan keuangan, investasi, proteksi, dan pengelolaan finansial Islami lainnya secara berkesinambungan.

Additionally, exotic currencies such as Korean Won (KRW), Jordanian Dinar (JOD), Thai Baht (THB), and others are also served. Customers can also buy and sell banknotes of USD, SAR, and SGD currencies at Bank Muamalat Indonesia. These transactions can be conducted in Indonesia or at the Kuala Lumpur, Malaysia branch.

c. Fixed Income (Sukuk)

Sukuk transactions at Bank Muamalat Indonesia aim to meet the investment needs of customers and the bank's requirements (banking position) in IDR and USD currencies. Tradable Sukuk includes those issued by governments and corporations. Active Sukuk transactions include Retail Sukuk (SR), Project-Based Sukuk (PBS), and Indois (USD-denominated government Sukuk).

Transactions are conducted with individual customers, corporations, and interbank entities. The purpose of Sukuk transactions is to generate fee-based income and margin/returns on Sukuk coupons in the banking book portfolio. As in previous years, Bank Muamalat Indonesia continues to participate as a government Sukuk distribution partner, contributing to the sale of government-issued Sukuk.

d. Custodian Bank

Core Custody Service Activity is a service provided by Bank Muamalat as a Custodian Bank to the Customer to store and administer the Customer's securities in accordance with sharia principles.

Serving the customer's needs in storing administering, completing customer securities transactions and providing reporting in accordance with sharia principles and applicable regulations.

Core Custody Key Features include:

- Sharia Securities Custody Services
- Sharia Securities Transaction Settlement Services
- Corporate Action Services
- Administration and Reporting Services

5. Muamalat Priority

Muamalat Priority helps to manifest the overall aspirations and needs of Your sharia banking, starting from financial management, investment, protection, and other Islamic financial management on continuous basis.



Melalui konsep ISLAMIC WEALTH MANAGEMENT, Bank Muamalat hadir menemani setiap langkah Nasabah dengan memberikan solusi komprehensif melalui produk dan layanan konsultasi perencanaan keuangan yang sesuai syariah, melalui :

- Wealth Creation, mengelola dan membantu mengembangkan aset keuangan yang berasal dari bisnis, profesi, atau perdagangan dan tabungan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- Wealth Accumulation, investasi berbagai instrumen syariah, seperti Reksa Dana dan Sukuk untuk imbal hasil yang optimal.
- Wealth Protection, perlindungan aset dan individu melalui manajemen risiko dan takaful (asuransi syariah).
- Wealth Purification, memurnikan aset keuangan atau investasi lainnya melalui Zakat, Infak dan Sedekah, didukung layanan yang lengkap dan tepat guna melalui LAZ Baitulmaal Muamalat.
- Wealth Distribution, mendistribusikan aset keuangan atau investasi untuk keluarga dengan edukasi dan manajemen waris (penulisan wasiat), wakaf, dan hibah.

Through the ISLAMIC WEALTH MANAGEMENT concept, Bank Muamalat here to accompany Customer every step of the way by providing comprehensive solutions through financial planning products and consulting services in accordance with sharia, through the following means:

- Wealth Creation, managing and developing financial assets generated from business, profession, or trade and savings in accordance with the sharia principles.
- Wealth Accumulation, investment of various sharia instruments, such as Mutual Funds and Sukuk for optimal returns.
- Wealth Protection, asset and individual protection through risk management and takaful (sharia insurance).
- Wealth Purification, purification of financial assets or other investments through Zakat, Infak and Alms, supported by complete and appropriate services through LAZ Baitulmaal Muamalat..
- Wealth Distribution, distribution of financial assets or investments for family with education and inheritance management (writing wills), endowments, and grants.

AKTIVITAS UTAMA DAN TARGET PASAR BANK

Aktivitas utama BMI pada tahun buku 2024 tidak mengalami perubahan. Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, aktivitas utama Bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Selain melakukan transaksi antarbank berdasarkan prinsip syariah, BMI juga memberikan jasa layanan transaksi pembayaran dan perdagangan nasional dan internasional. Layanan ini mencakup jasa kiriman uang, inkaso/*collection*, transaksi valuta asing, dan pembiayaan ekspor impor dalam bentuk *Letter of Credit* (L/C) yang memberikan pendapatan imbal jasa atau *fee-based income* kepada Bank.

THE BANK'S MAIN ACTIVITIES AND TARGET MARKET

The main activities of BMI in financial year 2024 remained the same. According to the Company's Articles of Association, the Bank's main activities are to collect funds from the public and channel back the funds in the form of financing based on sharia principles.

Aside from interbank transactions based on sharia principles, BMI also provides payment transaction services as well as national and international trade. Services provided include money transfer, collection, foreign exchange transaction, and export-import financing in the form of a *Letter of Credit* (L/C), which generates fee-based income for the Bank.

Wilayah Operasional Operational Area

JARINGAN KERJA DAN MITRA USAHA DI DALAM DAN/ATAU LUAR NEGERI

Bank Muamalat Indonesia memiliki jaringan kerja yang terbagi di wilayah Indonesia dan luar negeri yakni Malaysia. Sampai dengan berakhirnya tahun buku 2024, jaringan kerja Bank di dalam negeri sebanyak (234) yang terdiri dari kantor cabang utama, dan kantor cabang pembantu tersebar di hampir seluruh provinsi tanah air.

Sementara itu, untuk jaringan kerja di luar negeri yaitu Malaysia terdapat 1 (satu) kantor luar negeri.

OPERATION NETWORK AND DOMESTIC AND/OR INTERNATIONAL BUSINESS PARTNERSHIP

Bank Muamalat Indonesia maintains an operational network divided between Indonesia and international regions, namely Malaysia. Until the end of financial year 2024, the Bank's domestic network accounts for 234 branch offices consisting of the main branch offices and sub-branches spread throughout almost all the provinces in the country.

Meanwhile, the overseas network includes Malaysia, which has 1 (one) branch office.

JUMLAH, JENIS, DAN LOKASI KANTOR

Hingga 31 Desember 2024, Bank Muamalat Indonesia memiliki (234) kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh (55) *Mobile Branch* ditambah jaringan layanan yang luas berupa (564) unit ATM Muamalat, jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

NUMBER, TYPES AND LOCATIONS OF OFFICES

Until 31 December 2024, Bank Muamalat Indonesia retains 234 service offices, including 1 (one) branch office in Malaysia. The Bank's operations are supported by 55 mobile branches in addition to a vast service network of 564 Muamalat ATM units, shared ATM networks of ATM Bersama and ATM Prima, as well as the ATM network in Malaysia through the Malaysian Electronic Payment (MEPS).

Jenis Kantor	2024	2023	2022	2021	2020	Office Type
Kantor Pusat	1	1	1	1	1	Head Office
Kantor Cabang Utama	80	80	80	80	81	Main Branch Office
Kantor Cabang Pembantu	154	155	128	131	135	Sub-Branch Office
Kantor Kas	0	0	27	28	33	Cash Office
Kantor Luar Negeri	1	1	1	1	1	Overseas Office
Jumlah^{*)}	234	235	235	239	249	Total^{*)}

^{*)} Di Luar Kantor Pusat dan Kantor Luar Negeri
Outside the Head Office and Overseas Offices



Bank beroperasi di seluruh wilayah Indonesia serta Kuala Lumpur, Malaysia. Berikut adalah sebaran kantor dari wilayah operasional BMI per 31 Desember 2024.

The Bank operates in all regions of Indonesia as well as Kuala Lumpur, Malaysia. Following is the distribution of the offices within the BMI operational area as of 31 December 2024.

Nama Kantor Name of Office	Alamat Address	Kota/ Kabupaten City/Province	Provinsi Province	Telepon Telephone	Kategori Category
Kantor Pusat Operasional - Muamalat Tower Operational Head Office – Muamalat Tower	Gedung Muamalat Tower Jl. Raya Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi	Jakarta Selatan South Jakarta	DKI Jakarta	021-80666000	Kantor Pusat Head Office
Kantor Cabang Bintaro Jaya Bintaro Jaya Branch Office	Ruko Emerald Avenue 2 Blok EB/B No. 16-18, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan	Tangerang Selatan South Tangerang	Banten	021-22211090	KCU
Kantor Cabang Bumi Serpong Damai Bumi Serpong Damai Branch Office	Jl. Pahlawan Seribu Sektor IV Kav.D7 Blok RD No.73 Ruko Perkantoran BSD Serpong Tangerang 15310	Tangerang Selatan South Tangerang	Banten	021-5371036-37	KCU
Kantor Cabang Cengkareng Cengkareng Branch Office	Komp. Ruko Mutiara Taman palem Blok A3 No. 32-33, Jl. Kamal Raya Outer Ring Road Cengkareng Timur, Jakarta Barat 11730	Jakarta Barat West Jakarta	DKI Jakarta	021-54350004	KCU
Kantor Cabang Cilegon Cilegon Branch Office	Jl. Ahmad Yani KM 36, link. Kalanganyar, RT 06/01, Kel. Kedaleman, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Banten	Cilegon	Banten	0254-7876988/ 394295	KCU
Kantor Cabang Kebon Jeruk Kebon Jeruk Branch Office	Gedung Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jl. Panjang No. 12, Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Jakarta Barat West Jakarta	DKI Jakarta	021-22127144, 021-22127653	KCU
Kantor Cabang Puri Indah Puri Indah Branch Office	Sentra Niaga Puri Indah Blok T3, No. 12A-14	Jakarta Barat West Jakarta	DKI Jakarta	021- 5817259	KCU
Kantor Cabang Roxy Roxy Branch Office	Jl. KH. Hasyim Ashari, Ruko ITC Roxy Mas Blok D3 No.14 Jakarta Barat 10150	Jakarta Pusat Central Jakarta	DKI Jakarta	021-38793088	KCU
Kantor Cabang Sawangan Saangan Branch Office	Ruko Felicity Town House, Kav No. A5, Kel.kedaung Kec. Sawangan Kota Depok, Jawa Barat 16516	Depok	Jawa Barat West Java	0251-8412244/ 0251-8412275	KCU
Kantor Cabang Serang Serang Branch Office	Jl. Ahmad Yani No. 91 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang, Banten	Serang	Banten	0254-229180	KCU
Kantor Cabang Tangerang City Tangerang City Branch Office	Tangerang City Business Park Blok F No. 56, Jl. Jend Sudirman No. 1 Kota Tangerang	Tangerang	Banten	021- 55782368/ 55782528	KCU
Kantor Cabang Bogor Bogor Branch Office	Jl. Pajajaran No. 165 RT 03 RW 05 Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara	Bogor	Jawa Barat West Java	0251 - 8320111	KCU
Kantor Cabang Ciledug Ciledug Branch Office	Ruko CBD Ciledug Blok D.2 No. 19-20 Karang Tengah, Tangerang 15157	Tangerang	Banten	021 - 7310230	KCU
Kantor Cabang Cipulir Cipulir Branch Office	Jl. Ciledug No. 23 dan 23 A Jakarta Selatan	Jakarta Selatan South Jakarta	DKI Jakarta	021-7228242	KCU
Kantor Cabang Depok Depok Branch Office	Jl. Margonda Raya No. 187 RT 002 RW 015 Kel. Kemirimuka Kec. Beji Kota Depok Jawa Barat	Depok	Jawa Barat West Java	021-77202588	KCU
Kantor Cabang Fatmawati Fatmawati Branch Office	Jl. RS. Fatmawati No. 15 B-D Jaksel 12420	Jakarta Selatan South Jakarta	DKI Jakarta	021-7662479-82	KCU
Kantor Cabang Melawai Melawai Branch Office	Jl. Melawai Raya No. 72, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Jakarta Selatan South Jakarta	DKI Jakarta	021-7223623	KCU

Nama Kantor Name of Office	Alamat Address	Kota/ Kabupaten City/Province	Provinsi Province	Telepon Telephone	Kategori Category
Kantor Cabang Buaran Klender Klender Buaran Branch Office	Ruko Buaran Indah Blok C No. 9-11 Jl. Raden Inten Buaran Klender Jakarta Timur 13470	Jakarta Timur East Jakarta	DKI Jakarta	021 - 86609797	KCU
Kantor Cabang Jababeka Jjababeka Branch Office	Ruko Roxy Pecenongan Square JABABEKA, Jl. Kasuari Raya S1 B No. 2-3, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi	Bekasi	Jawa Barat West Java	021-89261851	KCU
Kantor Cabang Kalimalang Kalimalang Branch Office	Ruko Duta Permai Plaza Blok B II No. 20-22 Jl. KH. Noer Ali (d/h Jl. Raya Kalimalang Jakasampurna - Bekasi Barat)	Bekasi	Jawa Barat West Java	021-8840867	KCU
Kantor Cabang Kalimas Bekasi Kalimas Bekasi Branch Office	Jl. Chairil Anwar Ruko Kalimas Blok C. 29-30 Margahayu Bekasi Timur	Bekasi	Jawa Barat West Java	021 - 8826566	KCU
Kantor Cabang Bandung Bandung Branch Office	Jl. Buah Batu No. 276 A Bandung 40265, Kel. Cijagra Kec. Lengkong	Bandung	Jawa Barat West Java	022-7305919/ 7309229	KCU
Kantor Cabang Kelapa Gading Kelapa Gading Branch Office	Jl. Boulevard Raya Raya TB 2, No.28, Kelapa Gading Selatan	Jakarta Utara North Jakarta	DKI Jakarta	021 - 45856969	KCU
Kantor Cabang Kramat Raya Kramat Raya Branch Office	Gedung Dewan Dakwah Islamiyah, Jl. Kramat Raya No. 45, Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10450	Jakarta Timur East Jakarta	DKI Jakarta	021 - 85913534/ 85913552	KCU
Kantor Cabang Dewi Sartika Dewi Sartika Branch Office	Jl. Dewi Sartika No. 199A Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur 13630	Jakarta Timur East Jakarta	DKI Jakarta	021 - 21012400	KCU
Kantor Cabang Pancoran Pancoran Branch Office	Wisma Haroen, Jl Raya Pasar Minggu No. 2 B-C, Pancoran, Jakarta Selatan	Jakarta Selatan South Jakarta	DKI Jakarta	021-7973654	KCU
Kantor Cabang Rawamangun Rawamangun Branch Office	Jl. Paus No.83 B-C Kel. Jati, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur 13220	Jakarta Timur East Jakarta	DKI Jakarta	021-47864444	KCU
Kantor Cabang Wolter Monginsidi Walter Monginsidi Branch Office	Jl. Wolter Minginsidi No.123 D-E RT/RW 001/02, Kel. Rawa Barat, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12180	Jakarta Selatan South Jakarta	DKI Jakarta	021-7226767/ 7226868/ 7227272	KCU
Kantor Cabang Denpasar Denpasar Branch Office	Jl. Teuku Umar No. 82 Denpasar, Bali	Denpasar	Bali	0361-255474	KCU
Kantor Cabang Jember Jember Branch Office	Jl. PB. Sudirman No. 35 Pagah, Jemberlor, Kec. Patrang, Kab. Jember Jawa Timur	Jember	Jawa Timur East Java	0331-410433	KCU
Kantor Cabang Kediri Kediri Branch Office	Jl. Hasanuddin No. 26 Kel. Dandangan Kediri 64122	Kediri	Jawa Timur East Java	0354-671801-04	KCU
Kantor Cabang Surabaya Undaan Undaan Surabaya Branch Office	Jl. Undaan Kulon No.53, Kel. Peneleh, Kec. Gubeng, Surabaya - Jawa Timur	Surabaya	Jawa Timur East Java	031-35979135	KCU
Kantor Cabang Kupang Kupang Branch Office	Jl. Jend. Sudirman No. 88 E-F Kupang	Kupang	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara	0380-829556	KCU
Kantor Cabang Malang Malang Branch Office	Jl Kertanegara No 2 Malang	Malang	Jawa Timur East Java	0341-556020	KCU
Kantor Cabang Mataram Mataram Branch Office	Jl. Langko No. 01, Kel. Gomong Barat, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat	Mataram	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara	0370-646060	KCU
Kantor Cabang Surabaya Darmo Darmo Surabaya Branch Office	Jl. Raya Darmo 81 Surabaya	Surabaya	Jawa Timur East Java	0315-611230	KCU



Nama Kantor Name of Office	Alamat Address	Kota/ Kabupaten City/Province	Provinsi Province	Telepon Telephone	Kategori Category
Kantor Cabang Surabaya Sungkono Sungkono Surabaya Branch Office	Jl. Mayjend Sungkono No. 107, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya - 60224	Surabaya	Jawa Timur East Java	031-5666983	KCU
KCP Dago Dago Sub-Branch Office	Jl. Ir. H. Djuanda Nomor 185, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Bandung	Jawa Barat West Java	022-20467048	KCP
KCP Setiabudi Setiabudi Sub-Branch Office	Jl. Dr. Setiabudi No. 192C, Rt. 004/05, Kel. Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kota Bandung	Bandung	Jawa Barat West Java	022-20270305/ 081542500438	KCP
KCP Garut Garut Sub-Branch Office	Jl. Ciledug No. 247 Garut, Kel. Kota Kulon, Kec. Garut Kota, Kab. Garut	Garut	Jawa Barat West Java	0262-243399	KCP
KCP Cimahi Cimahi Sub-Branch Office	Jl. Amir Machmud No. 315 Ds. Cigugur Tengah, Kec. Cimahi, Kota Cimahi	Cimahi	Jawa Barat West Java	022-6643920	KCP
KCP Purwakarta Purwakarta Sub-Branch Office	Jl. R E Martadinata No. 39, Kel. Nagritengah, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta 41114	Purwakarta	Jawa Barat West Java	0264-8222999	KCP
Kantor Cabang Kudus Kudus Branch Office	Jl. Ahmad Yani No. 19-20, Panjunan, Kudus, Jawa Tengah	Kudus	Jawa Tengah Central Java	0291-4251720	KCU
Kantor Cabang Pekalongan Pekalongan Branch Office	Jl. Hayam Wuruk No. 142 Pekalongan, RT 001/RW 011, Sampangan	Pekalongan	Jawa Tengah Central Java	0285-411222	KCU
Kantor Cabang Purwokerto Purwokerto Branch Office	Komp. Ruko Satria Plaza Blok A 4-5 Jl. Jend. Sudirman Purwokerto 53111	Banyumas	Jawa Tengah Central Java	0281-642345/ 642347	KCU
Kantor Cabang Semarang Semarang Branch Office	Jl. Sugiopranoto No. 102 Semarang 50246	Semarang	Jawa Tengah Central Java	024-3564134	KCU
Kantor Cabang Solo Solo Branch Office	Jl. Slamet Riyadi No. 388 Solo, 57141	Surakarta	Jawa Tengah Central Java	0271-743457	KCU
Kantor Cabang Tegal Tegal Branch Office	Ruko Gajah Mada Town Square No. 3 - 4 Jl. Gajah Mada Tegal 52121	Tegal	Jawa Tengah Central Java	0283-354807	KCU
Kantor Cabang Yogyakarta Jogyakarta Branch Office	Jl. Magelang No.65 Kel. Kricak, Kec. Tegalrejo - Kota Yogyakarta - DIY	Yogyakarta	DI Yogyakarta	0274-544416	KCU
Kantor Cabang Balikpapan Balikpapan Branch Office	Jl. Jend. Sudirman Komp. Klandasan Permai Blok A No. 6-7 Balikpapan Selatan 76112, Kaltim	Balikpapan	Kalimantan Timur East Kalimantan	0542-731881	KCU
KCP Ujung Berung Ujung Berung Sub-Branch Office	Ruko Tritan Point Blok B5-15 Jl. AH Nasution, RT003 RW 02 Kel. Cipadung Wetan, Kec. Panyileukan	Bandung	Jawa Barat West Java	022-63721824/ 7832086	KCP
KCP Cicadas Cicadas Sub-Branch Office	Jl. Ahmad Yani No. 778 Kel. Cicaheum, Kec. Kiaracondong.	Bandung	Jawa Barat West Java	022-7277839	KCP
KCP Kopo Kopo Sub-Branch Office	Jl. Kopo Sayati No. 98A-2, Blok Bihbul, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung	Bandung	Jawa Barat West Java	81548804333	KCP
Kantor Cabang Samarinda Samarinda Branch Office	Jl. Pahlawan Blok F No. 3A-B Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Samarinda, 75123	Samarinda	Kalimantan Timur East Kalimantan	0541-745511/ 735697	KCU
Kantor Cabang Ambon Ambon Branch Office	Jl. AM. Sangadji No. 45, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku	Ambon	Maluku	0911 - 314444	KCU
Kantor Cabang Gorontalo Orontalo Branch Office	Jl. Nani Wartabone No. 26, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo	Gorontalo	Gorontalo	0435-831747	KCU

Nama Kantor Name of Office	Alamat Address	Kota/ Kabupaten City/Province	Provinsi Province	Telepon Telephone	Kategori Category
Kantor Cabang Jayapura Jayapura Branch Office	Ruko Pasific Permai Blok C no. 33 Dok II, Kelurahan Bhayangkara, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua 99112	Jayapura	Papua	0967-551777	KCU
Kantor Cabang Kendari Kendari Branch Office	Jl.Dr. Sam Ratulangi No. 170 Kendari 93111	Kendari	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi	0401-3129903	KCU
Kantor Cabang Makassar Makassar Branch Office	Jl. DR. Ratulangi No. 12, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar	Makassar	Sulawesi Selatan South Sulawesi	0411-832777	KCU
Kantor Cabang Mamuju Mamuju Branch Office	Jl. Urip Sumoharjo No. 53 Mamuju	Mamuju	Sulawesi Barat West Sulawesi	0426-22467	KCU
Kantor Cabang Manado Manado Branch Office	Jl. Samratulangi No.11, Kelurahan Wenang, Kecamatan Wenang, Kota Manado	Manado	Sulawesi Utara North Sulawesi	0431-877778	KCU
Kantor Cabang Palu Palu Branch Office	JL. Prof. Moh. Yamin Kompleks Perkantoran D'Vatulemo No. 2-3	Palu	Sulawesi Tengah Central Sulawesi	0451-457555/ 457671	KCU
Kantor Cabang Sorong Sorong Branch Office	Ruko H. Lasedi Jl. Jend Sudirman No.2a-2b Depan Pasar Bersama Sorong	Sorong	Papua Barat Daya Southwest Papua	0951-332777	KCU
Kantor Cabang Ternate Ternate Branch Office	Jl. Hasan Esa No.19 Kel. Takoma Ternate	Ternate	Maluku Utara North Maluku	0921-3124029	KCU
Kantor Cabang Bengkulu Bengkulu Branch Office	Jl. S. Parman No. 62 C-D Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu	Bengkulu	Bengkulu	0736-348100	KCU
Kantor Cabang Jambi Jambi Branch Office	Jl. Sultan Agung No. 01 Kel. Murni Kec. Danau Sipin, Kota Jambi	Jambi	Jambi	0741-7551241	KCU
Kantor Cabang Lampung Lampung Branch Office	Jl. Diponegoro 11 D-E, Kel. Enggal Kec. Tanjung Kramat Pusat bandar Lampung	Bandar Lampung	Lampung	0721-242123	KCU
Kantor Cabang Padang Padang Branch Office	Jl. Rasuna Said No. 107 Padang	Padang	Sumatera Barat West Sumatera	0751 - 7054106	KCU
Kantor Cabang Palembang Palembang Branch Office	Jl. Kapten A.Rivai Komplek Ruko Taman Mandiri - Palembang	Palembang	Sumatera Selatan South Sumatera	0711-351239	KCU
Kantor Cabang Pangkal Pinang Pangkal Pinang Branch Office	Jl. Ahmad Yani Dalam Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang	Pangkalpinang	Bangka Belitung	0717-422812/ 422783	KCU
Kantor Cabang Banda Aceh Banda Aceh Branch Office	Jl. Tgk H.M Daud Beureueh No. 174 A-B, Banda Aceh	Banda Aceh	Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)	0651-635654/ 635655	KCU
Kantor Cabang Batam Batam Branch Office	Jl. Raja Haji Fisabilillah, Ruko Mahkota Raya Blok D No.11-12, Batam Center, Kota Batam - Kepulauan Riau	Batam	Kepulauan Riau	0778-467241	KCU
Kantor Cabang Langsa Langsa Branch Office	Jln. Ahmad Yani No.1-2 Kota Langsa	Langsa	Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)	0641-426584	KCU
Kantor Cabang Medan Balaikota Medan Balaikota Branch Office	Jl. Balai Kota No. 10 D-E, Medan	Medan	Sumatera Utara North Sumatera	061-4535353	KCU
Kantor Cabang Medan Baru Medan Baru Branch Office	Jl. Iskandar Muda No. 121 Medan, Sumatra Utara	Medan	Sumatera Utara North Sumatera	061-4579343	KCU
Kantor Cabang Padang Sidempuan Padang Sidempuan Branch Office	Jl. Baginda Oloan / Gatot Subroto No. 08 Padangsidempuan 22718	Padang Sidempuan	Sumatera Utara North Sumatera	0634-22999	KCU



Nama Kantor Name of Office	Alamat Address	Kota/ Kabupaten City/Province	Provinsi Province	Telepon Telephone	Kategori Category
Kantor Cabang Pekanbaru Pakanbaru Branch Office	Jl. Jend. Sudirman No. 411 Kota Pekanbaru, Propinsi Riau	Pekanbaru	Riau	0761-862915	KCU
Kantor Cabang Pematang Siantar Pematang Siantar Branch Office	Jl. Sangnawaluh/Asahan Komp. Megaland Blok A No. 6 dan 7, Pematangsiantar	Pematang Siantar	Sumatera Utara North Sumatera	0622-26662	KCU
Kantor Cabang Tanjung Pinang Tanjung Pinang Branch Office	Jl. DI. Panjaitan Blok A No. 3/3A Km. 9 Tanjung Pinang - Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	Kepulauan Riau Islands of Riau	0771-441999	KCU
Kantor Cabang Kuala Lumpur Kuala Lumpur Branch Office	Suite 1.03-1.05 Ground Floor No. 67, Wisma Goldhill Jalan Raja Chulan 50200 Kuala Lumpur	Malaysia	Malaysia	603-2711 0807/ 603-27117427	KCU
KCP Cikupa Tangerang Cikupa Tangerang Sub- Branch Office	Jl. Boulevard Ruko Citra Raya Blok H-1 No. 17 R, Desa Cikupa, Kec. Cikupa, Tangerang	Tangerang	Banten	021-44622426	KCP
KCP Darunnajah Darunnajah Sub-Branch Office	Jl. Ulujami Raya No.56 RT.01 RW.07, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan - Kota Jakarta Selatan	Jakarta Selatan South Jakarta	DKI Jakarta	021-7376085	KCP
KCP PB Sudirman PB Sudirman Sub-Branch Office	Komplek YYS Pendidikan PB Soedirman, Jl. Raya Bogor KM 24 Pasar Rebo Jaktim	Jakarta Timur East Jakarta	DKI Jakarta	021-8413728	KCP
KCP Amikom Yogyakarta Amikom Jogyakarta Sub- Branch Office	Kampus STMIK AMIKOM, Jl. Ring Road Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283	Sleman	DI Yogyakarta	0274-4477663	KCP
KCP Istiqomah Bandung Istiqomah Bandung Sub- Branch Office	Jl. Citarum No. 1 Kel. Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kodya Bandung 40115	Bandung	Jawa Barat West Java	022-4234156	KCP
KCP Merdeka Tangerang Merdeka Tangerang Sub- Branch Office	Jl. Merdeka Raya No. 101c Cimone Raya, Karawaci	Tangerang	Banten	021-5581052/ 5581067/ 5581015	KCP
KCP Pamulang Pamulang Sub-Branch Office	Jl. Raya Pamulang Blok SH 19/9 Tangerang Selatan 15417	Tangerang Selatan South Tangerang	Banten	021-7428865	KCP
KCP AL Azhar Serpong Al Azhar Serpong Sub- Branch Office	Jl. Puspitaloka III / 2 BSD Serpong Tangerang Selatan	Tangerang Selatan South Tangerang	Banten	021-5381944	KCP
KCP Slipi Slipi Sub-Branch Office	Jl. KS Tubun No. 146, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat	Jakarta Pusat Central Jakarta	DKI Jakarta	021-5326744-45	KCP
KCP Balaraja Balaraja Sub-Branch Office	Jl. Raya Serang Jakarta KM 22, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Banten	Tangerang	Banten	82818932088	KCP
KCP IPB Darmaga IPB Dermaga Sub-Branch Office	Jl. Raya Dramaga RT 02 RW 01 Kel. Babakan, Kec. Dramaga	Kab. Bogor Bogor Regency	Jawa Barat West Java	0251-8622856	KCP
KCP Cibinong Cibinong Sub-Branch Office	Cibinong City Center Blok A/22, Jl Tegar Beriman No. 01 RT 05 RW 12, Pakansari, Cibinong, Bogor	Kab. Bogor Bogor Regency	Jawa Barat West Java	021-29231065	KCP
KCP Cikeas Cikeas Sub-Branch Office	Rukan Transyogi No. 11 Jl. Transyogi Cibubur, Kel. Nagrak Kec. Gn. Putri Bogor 16967	Bogor	Jawa Barat West Java	021-82481996	KCP
KCP Cimanggis Cimanggis Sub-Branch Office	Jl. Raya Bogor Km 29 No. 9B RT 004 RW 001 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok Jawa Barat	Depok	Jawa Barat West Java	021-87713174	KCP
KCP Kranggan Kranggan Sub-Branch Office	Jl. Transyogi Cibubur Komp. Ruko Kranggan Permai Blok XVI No.11 RT 002 RW 016 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat	Bekasi	Jawa Barat West Java	021-8444694	KCP

Nama Kantor Name of Office	Alamat Address	Kota/ Kabupaten City/Province	Provinsi Province	Telepon Telephone	Kategori Category
KCP Cinere Cinere Sub-Branch Office	Jl. Cinere Raya Blok A No. 37, Depok, Jawa Barat	Depok	Jawa Barat West Java	021-7532201/ 7532195/ 7532196	KCP
KCP UIN Syarif Hidayatullah UIN Syarif Hidayatullah Sub-Branch Office	Komp. Masjid Fatahillah UIN Syarif Hidayatullah Jl. Ir. H. Juanda Ciputat Tangerang	Tangerang Selatan South Tangerang	Banten	021-7442464/ 7442465	KCP
KCP AL Azhar Kebayoran Al Azhar Kebayoran Sub- Branch Office	YPI Al Azhar Jl. Sisingamangaraja Kby Baru	Jakarta Selatan South Jakarta	DKI Jakarta	021-7253404 021- 7253403	KCP
KCP Pondok Kopi Pondok Kopi Sub-Branch Office	Jalan Nusa Indah Raya Blok 40 No. 15 Rt 12 Rw 3 Duren Sawit, Jakarta Timur 13460	Jakarta Timur East Jakarta	DKI Jakarta	021-86610490	KCP
KCP Cikarang Cikarang Sub-Branch Office	Ruko Sentra Cikarang Blok A No. A7 Desa Sukaresmi, Cikarang Selatan Kab. Bekasi 17530	Bekasi	Jawa Barat West Java	021-89900638	KCP
KCP Pondok Gede Pondok Gede Sub-Branch Office	Jl Raya Pondok Gede No. 50B, Kav. NO.9, Kel. Jatirahayu, Kec. Melati, Bekasi	Bekasi	Jawa Barat West Java	021-84990375	KCP
KCP Juanda Bekasi Juanda Bekasi Sub-Branch Office	Jl. Ir. H. Juanda No. 60 Margajaya, Bekasi 17141	Bekasi	Jawa Barat West Java	021-8850966	KCP
KCP Kemang Pratama Kemang Pratama Sub- Branch Office	Komplek YPI Al Azhar Kemang Pratama Bojong Rawalumbu, Bekasi 17116	Bekasi	Jawa Barat West Java	021-82400251	KCP
KCP Asrama Haji Pondok Gede Asrama Haji Pondok Gede Sub-Branch Office	Jl. Raya pondok Gede Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jaktim 13560	Jakarta Timur East Jakarta	DKI Jakarta	021-8011233	KCP
KCP Bintara Bekasi Bintara Bekasi Sub-Branch Office	Jl. Bintara Raya Komplek Ruko Bintara Bisnis Center No. 8, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat	Bekasi	Jawa Barat West Java	021-88966129	KCP
KCP Grand Wisata Grand Wisata Sub-Branch Office	Jl. Celebration Boulevard Ruko Grand Wisata, Blok AA 12 No. 7, Tambun, Bekasi	Bekasi	Jawa Barat West Java	021- 82648115	KCP
KCP Kemenkeu Kemenkeu (Ministry of Finance) Sub-Branch Office	Gd. Auditorium Dhanapala Jl. Wahidin Raya No. 1, Komplek Kementrian Keuangan, Jakarta Pusat	Jakarta Pusat Central Jakarta	DKI Jakarta	021-42883774/ 42885956	KCP
KCP Condet Condet Sub-Branch Office	Ruko Mutiara Faza Jl. Raya Condet Kelurahan Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur	Jakarta Timur East Jakarta	DKI Jakarta	021-87798827	KCP
KCP Pasar Minggu Pasar Minggu Sub-Branch Office	Ruko Royal Spring Business Park, Jl. Raya Ragunan No.29 A Unit 7, Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan	Jakarta Selatan South Jakarta	DKI Jakarta	021- 78848710	KCP
KCP Sunan Giri Rawamangun Sunan Ggiri Rawamangun Sub-Branch Office	Jl. Sunan Giri No. 1 Rawamangun Jaktim 13220	Jakarta Timur East Jakarta	DKI Jakarta	021- 4706725	KCP
KCP Genteng Geneng Sub-Branch Office	Jl. Diponegoro No. 19 Genteng Kulon, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur	Banyuwangi	Jawa Timur East Java	0333-846997	KCP
KCP Situbondo Situbondo Sub-Branch Office	Jl. A. Yani No. 197 A Situbondo	Situbondo	Jawa Timur East Java	0338-670766	KCP
KCP Banyuwangi Banyuwangi Sub-Branch Office	Jl. Adi Sucipto No. 40 A, Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Timur East Java	0333-412136	KCP
KCP Madiun Madiun Sub-Branch Office	Jl. Kol Marhadi No. 62 Pangongangan Manguharjo Kota Madiun	Madiun	Jawa Timur East Java	0351-493400	KCP
KCP Ponorogo Ponorogo Sub-Branch Office	Jl. Urip Sumoharjo No.55 Mangkujayan	Ponorogo	Jawa Timur East Java	0352-488400	KCP
KCP Nganjuk Nganjuk Sub-Branch Office	Jl Gatot Subroto No 52 Nganjuk	Nganjuk	Jawa Timur East Java	0358-331901	KCP



Nama Kantor Name of Office	Alamat Address	Kota/ Kabupaten City/Province	Provinsi Province	Telepon Telephone	Kategori Category
KCP Blitar Blitar Sub-Branch Office	Komplek Ruko Merdeka Timur Center Blok H Kel. Kepanjen Lor Ke. Kepanjen Kidul Blitar	Blitar	Jawa Timur East Java	0342-807867	KCP
KCP Tulung Agung Tulung Agung Sub-Branch Office	Ruko Panglima Sudirman Blok C No. 2, Jl. Hasanudin, Kenayan, Tulungagung, Jawa Timur	Tulungagung	Jawa Timur East Java	0355-328500	KCP
KCP Lamongan Lamongan Sub-Branch Office	Jl Lamongrejo No 115 Lamongan	Lamongan	Jawa Timur East Java	0322-316201 0322-321086	KCP
KCP Sumenep Sumenep Sub-Branch Office	Komplek Ruko Graha Adi Poday Kav. Blok A, Jl. Trunojoyo No. 214, Sumenep, Madura.	Sumenep	Jawa Timur East Java	0328-6763228 0328-6763548	KCP
KCP Sepanjang Sepanjang Sub-Branch Office	Jl. Raya Ngelom No. 83, Ngelom, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur	Sidoarjo	Jawa Timur East Java	0317-880311	KCP
KCP Pasuruan Pasuruan Sub-Branch Office	Jl. Panglima Sudirman No 40C, Kota Pasuruan	Pasuruan	Jawa Timur East Java	0343-416262	KCP
KCP Probolinggo Probolinggo Sub-Branch Office	Jl. Sukarno Hatta No. 275 Kav 4 Kel. Tisnonegaran Probolinggo, Jawa Timur	Probolinggo	Jawa Timur East Java	0335-430016	KCP
KCP Kepanjen Kepanjen Sub-Branch Office	Jl. Ahmad Yani No. 5, Ardirejo, Kepanjen kab. Malang	Malang	Jawa Timur East Java	0341-393801	KCP
KCP Batu Batu Sub-Branch Office	Jl KH Agus Salim Kav 100 No. 145, Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65315	Batu	Jawa Timur East Java	0341-592544	KCP
KCP Wiyung Wiyung Sub-Branch Office	Jl. Raya Menganti Babatan 8C, Surabaya, Jawa Timur / 60227	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara	031-58289210	KCP
KCP Jombang Jombang Sub-Branch Office	JL. Gus Dur No.18A, Kelurahan Candimulyo, Kec. Jombang, Kab.Jombang	Jombang	Jawa Timur East Java	0321-8490557/8490535	KCP
KCP Mojokerto Mojokerto Sub-Branch Office	Jl. Gajah Mada No. 104 Mojokerto, Bolangsari, Megarsari Kota Mojokerto	Mojokerto	Jawa Timur East Java	0321-381638/ 381641	KCP
KCP Sidoarjo Sidoarjo Sub-Branch Office	Jl. Jenggolo No.20 Kel. Pucang, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur	Sidoarjo	Jawa Timur East Java	031-8959988	KCP
KCP Rungkut Rungkut Sub-Branch Office	Jl. Dr. Ir. Soekarno No. 416 Ruko Raya Merr, Kedung Baruk Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur	Surabaya	Jawa Timur East Java	031-87856535	KCP
KCP Subang Subang Sub-Branch Office	Jl. Otista No. 94 Subang, Kel. Karang Anyar, Kec. Subang	Subang	Jawa Timur East Java	0260-421666	KCP
KCP Rancaekek Rancaekek Sub-Branch Office	Jl. Raya Rancaekek No. 20, Rt. 01/02, Desa Bojongloa, kec. Rancaekek, Kabupaten Bandung	Bandung	Jawa Barat West Java	022-7799227/ 081542002840/ 081542002830	KCP
KCP Padalarang Padalarang Sub-Branch Office	Jl. Raya Cimareme No. 340 B, Ds. Cimareme, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat.	Bandung Barat West Bandung	Jawa Barat West Java	022-6867783	KCP
Kantor Cabang Cirebon Cirebon Branch Office	Jl. Siliwangi No. 60 Cirebon 45121	Cirebon	Jawa Barat West Java	0231-200828 Fax 0231-206817	KCU
KCP Kuningan Cirebon Cirebon Kuningan Sub-Branch Office	Jl. Siliwangi No. 124 Kuningan 45511	Kuningan	Jawa Barat West Java	0232-879664 Fax 0232 - 872418	KCP
KCP Indramayu Indramayu Sub-Branch Office	Jl. Jend. Sudirman No.170 Rt. 003 Rw. 007, Kel. Karanganyar, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu	Indramayu	Jawa Barat West Java	0234-5278815 Fax 0234 - 5278816	KCP

Nama Kantor Name of Office	Alamat Address	Kota/ Kabupaten City/Province	Provinsi Province	Telepon Telephone	Kategori Category
KCP Majalengka Majalengka Sub-Branch Office	Jl. KH. Abdul Halim No. 81 RT/ RW 03/11 Kab. Majalengka	Majalengka	Jawa Barat West Java	0233-8286427 0233- 8286428	KCP
KCP Arjawinangun Arjawinangun Sub-Branch Office	Ruko 5, Jl. Palimanan - Jakarta KM 02 Ds. Junjang RT/RW 05/03 Kab. Cirebon /45162	Cirebon	Jawa Barat West Java	0231 - 357007 Fax 0231- 359227	KCP
KCP Sumber Cirebon Sumber Cirebon Sub-Branch Office	Jl. Dewi Sartika No. 10 A, Kel. Tukmudal, Kec. Sumber, Kab. Cirebon	Cirebon	Jawa Barat West Java	0231 - 322775 Fax 0231- 322765	KCP
Kantor Cabang Cianjur Cianjur Sub-Branch Office	Jl. Kh. Abdullah Bin Nuh No. 03 Pamoyanan Cianjur, Jawa Barat	Cianjur	Jawa Barat West Java	0263-280950	KCU
KCP Cipanas Cipanas Sub-Branch Office	Jl. Raya Cipanas (Depan Pasar Cipanas) No. 134 E Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur	Cianjur	Jawa Barat West Java	0263-520268	KCP
KCP Soreang Soreang Sub-Branch Office	Soreang Square No.1 Jl. Raya Soreang, Ds. Cingcin, Kec. Soreang, Kab. Bandung	Bandung	Jawa Barat West Java	022-5893875	KCP
Kantor Cabang Tasikmalaya Tasikmalaya Branch Office	Jl. HZ. Mustofa No. 294 Kota Tasikmalaya	Tasikmalaya	Jawa Barat West Java	0265-326 900	KCU
KCP Ciamis Ciamis Sub-Branch Office	Jl MR. Iwakusumasumantri Ruko No 9 Kabupaten Ciamis 46211	Ciamis	Jawa Barat West Java	0265-777 998	KCP
Kantor Cabang Sukabumi Sukabumi Branch Office	Jl. Jend. Sudirman No. 77 Kota Sukabumi	Sukabumi	Jawa Barat West Java	0266-245888	KCU
KCP Cibadak Cibadak Sub-Branch Office	Jl. Siliwangi No. 132 RT 01/ RW 17, Kel. Cibadak, Kab. Sukabumi	Sukabumi	Jawa Barat West Java	0266-536257	KCP
Kantor Cabang Karawang Karawang Branch Office	Jl. Tuparev No. 297, Karawang Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat	Karawang	Jawa Barat West Java	0267-8452333	KCU
Kantor Cabang Banjarmasin Banjarmasin Branch Office	Jl. Ahmad Yani Km. 6 No.3, Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Kalimantan Selatan South Kalimantan	0511-3264050	KCU
KCP Banjarbaru Banjarbaru Sub-Branch Office	Jl. Ahmad Yani Km.36 Banjarbaru - Kalimantan Selatan	Banjarbaru	Kalimantan Selatan South Kalimantan	0511-4773199	KCP
KCP Barabai Berabai Sub-Branch Office	Jl. Brigjend H. Hasan Basri Kemasan Luar, Rt. 03 Rw. 01, Kel. Barabai Tengah, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah	Hulu Sungai Tengah Central Hulu Sungai	Kalimantan Selatan South Kalimantan	0517-43681	KCP
KCP Pati Pati Sub-Branch Office	Jl. Kol Sunandar Komplek Puri Plaza No. 15, Kelurahan Puri, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati	Pati	Jawa Tengah Central Java	0295-387796	KCP
KCP Pemalang Pemalang Sub-Branch Office	Jl. Ahmad Yani no 132 Kebondalem Pemalang	Pemalang	Jawa Tengah Central Java	0284-324767	KCP
KCP Batang Batang Sub-Branch Office	Jl. Pangeran Diponegoro Ruko Srikandi Blok.A Nomor 3 Batang	Batang	Jawa Tengah Central Java	0285-392622	KCP
KCP Cilacap Cilacap Sub-Branch Office	Jl. Gatot Soebroto No. 104 A - RT 05 RW 09 Kel. Sidanegara Kec Cilacap Tengah, Kab Cilacap 53223	Cilacap	Jawa Tengah Central Java	0282-5253195	KCP
KCP Purbalingga Purbalingga Sub-Branch Office	Jl. Jend. Sudirman No. 189, Purbalingga, RT 01 RW 01 Kel. Bancar, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah	Purbalingga	Jawa Tengah Central Java	0281-895415	KCP
KCP Magelang Magelang Sub-Branch Office	Jl. Tentara Pelajar No. 12 Ruko C, Kel. Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah	Magelang	Jawa Tengah Central Java	0293-313358	KCP



Nama Kantor Name of Office	Alamat Address	Kota/ Kabupaten City/Province	Provinsi Province	Telepon Telephone	Kategori Category
KCP Kendal Kendal Sub-Branch Office	Jl. Soekarno Hatta No. 244, Pekauman, Kendal	Kendal	Jawa Tengah Central Java	0294-382700	KCP
KCP Salatiga Salatiga Sub-Branch Office	Jl. Sukowati No 19 C Salatiga	Salatiga	Jawa Tengah Central Java	0298-315937	KCP
KCP Wonosobo Wonosobo Sub-Branch Office	Jl. RSU No. 10 Wonosobo	Wonosobo	Jawa Tengah Central Java	0286-325197	KCP
KCP Kartasura Kertasura Sub-Branch Office	Jl. A. Yani No. 54 C Kartasura Sukoharjo	Sukoharjo	Jawa Tengah Central Java	0271-780962	KCP
KCP Boyolali Boyolali Sub-Branch Office	Jl. Pandanaran Dk Karangturi RT 02 RW 02 Kiringan Boyolali (Barat Pasar Sunggingan)	Boyolali	Jawa Tengah Central Java	0276-323484	KCP
KCP Wonogiri Wonogiri Sub-Branch Office	Jl. Achmad Yani No. 119 B, Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah	Wonogiri	Jawa Tengah Central Java	0274-324021	KCP
KCP Klaten Klaten Sub-Branch Office	Jl. Pemuda Utara No. 80 Rt. 03/01, Bareng, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten	Klaten	Jawa Tengah Central Java	0272-323244	KCP
KCP Sragen Sragen Sub-Branch Office	Jl. Raya Sukowati 133 Sragen	Sragen	Jawa Tengah Central Java	0271-8823199	KCP
KCP Karanganyar Karanganyar Sub-Branch Office	Jl. Lawu 356 Karanganyar	Karanganyar	Jawa Tengah Central Java	0271-6497033	KCP
KCP Wirobrajan Wirobrajan Sub-Branch Office	Jl. Mayjen Sutoyo No. 71 B Mantrijeron, Yogyakarta	Yogyakarta	DI Yogyakarta	0274-414666	KCP
KCP Bantul Bantul Sub-Branch Office	Jl. Jend. Sudirman No.63 Kab. Bantul, DIY	Bantul	DI Yogyakarta	0274-367121/ 367183	KCP
KCP Tanah Grogot Tanah Grogot Sub-Branch Office	Jl. Jendral Sudirman No. 86, Rt. 05/03, Kel. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur	Paser	Kalimantan Timur East Kalimantan	0543-23434	KCP
KCP Kilo Kilo Sub-Branch Office	Jl. Soekarno Hatta Km 2,5 Rt. 15 No. 23 Kel. Gn. Samarinda, Balikpapan 76125, Kaltim	Balikpapan	Kalimantan Timur East Kalimantan	0543-417682	KCP
Kantor Cabang Pontianak Pontianak Branch Office	Jl. Sultan Syarif Abdurrahman no.62 A, Kel. Parit Tokaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, 78121, Prop. Kalimantan Barat	Pontianak	Kalimantan Barat West Kalimantan	0561-731756	KCU
Kantor Cabang Palangkaraya Palangkaraya Branch Office	Jl. Diponegoro No. 17 Palangkaraya 73111, Palangka Raya, Kalimantan Tengah	Palangka Raya	Kalimantan Tengah Central Kalimantan	0536-3224509	KCU
KCP Sampit Sampit Sub-Branch Office	Jl. Ais Nasution No. 8 Sampit Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur East Kotawaringin	Kalimantan Tengah Central Kalimantan	0531-30954	KCP
KCP Pangkalan Bun Pangkalan Bun Sub- Branch Office	Jl. Iskandar RT.09 RW.02, Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan Pangkalan Bun - Kota Waringin Barat/ 74112	Kotawaringin Barat West Kotawaringin	Kalimantan Tengah Central Kalimantan	0532-22234	KCP
KCP Bontang Bontang Sub-ranch Office	Jl. MT Haryono No.15 RT.29 RW.09 Kel. Api-API Kec. Bontang Utara, Bontang 75311	Bontang	Kalimantan Timur East Kalimantan	0548-26601	KCP
KCP Sangatta Sanggata Sub-Branch Office	Jl. Yos Sudarso II No. 27 Rt. 22 Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur 75683	Kutai Timur East Kutai	Kalimantan Timur East Kalimantan	0549-22574/25391	KCP
KCP Tarakan Tarakan Sub-Branch Office	Jl. Jendral Sudirman Rt. 04, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara	Tarakan	Kalimantan Utara North Kalimantan	0551-37001	KCP
KCP Berau Berau Sub-Branch Office	Jl. Aminuddin Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau	Berau	Kalimantan Timur East Kalimantan	0554-2027043	KCP

Nama Kantor Name of Office	Alamat Address	Kota/ Kabupaten City/Province	Provinsi Province	Telepon Telephone	Kategori Category
KCP Limboto Limboto Sub-Branch Office	Jl. AA Wahab Lingkungan Durian Kel. Hepuhulawa, Kec. Limboto Kab. Gorontalo	Limboto	Gorontalo	0435-881477	KCP
KCP Boalemo Boalemo Sub-Branch Office	Jl. Husin Dj. Rahman Desa Limbato Kec. Tilamuta Kab. Boalemo	Boalemo	Gorontalo	0443-211110	KCP
KCP Timika Timika Sub-Branch Office	Jl. Poros Cendrawasih Kel. Kwamki, Distrik Mimika Baru, Timika - Papua	Timika	Papua	0901-323999	KCP
KCP Merauke Merauke Sub-Branch Office	Jl. Raya Mandala Bampel Distrik Merauke Kab. Merauke	Merauke	Papua	0971-324995	KCP
KCP Kolaka Kolaka Sub-Branch Office	Jl. Chairil Anwar No. 28 Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara	Kolaka	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi	0405-2323947	KCP
KCP Bau – Bau Bau-Bau Sub-Branch Office	Jl. Betoambari No. 50A, Kel. Lanto, Kec. Batu Poaro, Kota Baubau	Bau-Bau	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi	0402-2822577	KCP
KCP Bombana Bombana Sub-Branch Office	Jl. Yos Sudarso Kelurahan Lantawonua Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana	Bombana	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi	0816-248049	KCP
KCP Unaha Konawe Unaha Konawe Sub-Branch Office	Jl. Sapati Kel. Ambekairi Kec. Unaaha Kab Konawe Sultra	Konawe	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi	0408-2422444	KCP
KCP Palopo Palopo Sub-Branch Office	Jl. Jend. Sudirman No. 43 Kel Amassangan, Kec Wara, Kota Palopo	Palopo	Sulawesi Selatan South Sulawesi	0471-326623	KCP
KCP Pare – Pare Pare-Pare Sub-Branch Office	Jl. Sultan Hasanuddin No. 3 Kel. Ujung, Kec. Ujung Sabbang, Kota Pare-pare	Parepare	Sulawesi Selatan South Sulawesi	0421-28061	KCP
KCP Bone Bone Sub-Branch Office	Jl. Ahmad Yani No. 169 Kab. Bone	Bone	Sulawesi Selatan South Sulawesi	0481-27555	KCP
KCP Gowa Gowa Sub-Branch Office	Jl. KH. Wahid Hasyim, Ruko Balla Lompoe Plaza Blok B2, Gowa, Sulawesi Selatan	Gowa	Sulawesi Selatan South Sulawesi	0411-8220375	KCP
KCP Maros Maros Sub-Branch Office	Jl. Jend. Sudirman No.18-20 Kel. Alliritengae Kec. Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan	Maros	Sulawesi Selatan South Sulawesi	0411-373888	KCP
KCP Pettarani Pettarani Sub-Branch Office	Jl. AP. Pettarani Ruko No. 10 D, Makassar, Sulawesi Selatan	Makassar	Sulawesi Selatan South Sulawesi	0411-432422	KCP
KCP Wonomulyo Mamuju Wonomulyo Mamuju Sub-Branch Office	Jl. Jend. Sudirman No. 91, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar	Mamuju	Sulawesi Barat West Sulawesi	0428-52393	KCP
KCP Palu Barat Palu Barat Sub-Branch Office	Jl. Sis Aljufri No. 48, Kel. Siranindi, Kec. Palu Barat, Kota Palu Sulawesi Tengah	Palu Barat West Palu	Sulawesi Tengah Central Sulawesi	0451-424444	KCP
KCP Luwuk Luwuk Sub-ranch Office	Jl. Urip Sumoharjo No. 30 C, Kec Luwuk, Kab Banggai, Prof Sulawesi Tengah	Luwuk	Sulawesi Tengah Central Sulawesi	0461-21666	KCP
KCP Aimas Aimas Sub-Branch Office	Jl. Klamono Km.19 Depan Alun-Alun Aimas Kab. Sorong	Aimas	Papua Barat Daya Southwest Papua	0951-3123593	KCP
KCP Manokwari Manokwari Sub-Branch Office	Jl. Trikora Wosi, Depan Transito Kab. Monokwari, Prov. Papua Barat	Manokwari	Papua Barat West Papua	0986-212555	KCP
KCP Labuha Bacan Labuha Bacan Sub-Branch Office	Jl. Raya Mandaong, Kel. Tomori, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara	Halmahera	Maluku Utara North Maluku	0927-2321053	KCP
KCP Tidore Tidore Sub-Branch Office	Jl Nusantara, Kelurahan Indonesiana, Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara	Tidore	Maluku Utara North Maluku	0921-3161734	KCP
KCP Curup Curup Sub-Branch Office	Jl. Merdeka No. 732 Pasar Baru Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong	Rejang Lebong	Bengkulu	0732-22290	KCP



Nama Kantor Name of Office	Alamat Address	Kota/ Kabupaten City/Province	Provinsi Province	Telepon Telephone	Kategori Category
KCP Manna Bengkulu Manna Bengkulu Sub-Branch Office	Jl. Jendral Sudirman No. 81 Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan	Bengkulu Selatan	Bengkulu	0739-21289	KCP
KCP Arga Makmur Arga Makmur Sub-Branch Office	Jl. Sutan Syahrir No. 10 Pasar Purwodadi Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara	Bengkulu Utara North Bengkulu	Bengkulu	0737-521682	KCP
KCP Muara Bungo Muara Bungo Sub-Branch Office	Jl.M. YAMIN NO. 14, Kec. Pasar Muara Bungo, Kab. Muara Bungo, Jambi	Bungo	Jambi	0747-321778	KCP
KCP Bandar Jaya Bandar Jaya Sub-Branch Office	Jl. Proklamator No. 138 A Bandar Jaya, Lampung Tengah	Lampung Tengah Central Lampung	Lampung	0725-527400	KCP
KCP Metro Lampung Metro Lampung Sub-Branch Office	Jl. Jend. Sudirman No. 282 B Metro	Metro	Lampung	0725-7850047	KCP
KCP ZA Pagar Alam Lampung Pagar Alam Lampung Sub-Branch Office	Jl. ZA Pagar Alam No. 12 Bandar Lampung	Bandar Lampung	Lampung	0721-785535	KCP
KCP Kotabumi Lampung Kotabumi Lampung Sub-Branch Office	Jl. Jend. Sudirman Lingkungan 6 Rt. 001, Rw.006, Kotabumi	Lampung Utara North Lampung	Lampung	0724-22510	KCP
KCP Antasari Lampung Antasari Lampung Sub-Branch Office	Jl. P. Antasari No. 134, Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung	Bandar Lampung	Lampung	0721-709030	KCP
KCP Bukittinggi Bukittinggi Sub-Branch Office	Jl. A. Yani No 99 D RT 02 RW 03, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kec. Guguak Pajang, Kota Bukittinggi, Prov. Sumatera Barat, 26113	Bukittinggi	Sumatera Barat West Sumatera	0752 - 302006	KCP
KCP Payakumbuh Payakumbuh Sub-Branch Office	Jl. Soekarno Hatta No. 87 Payakumbuh	Payakumbuh	Sumatera Barat West Sumatera	0752 - 796757	KCP
KCP Solok Solok Sub-Branch Office	Jl. M. Yamin No. 87 Kel. Pasar Pandan Air Mati, Kec. Tanjung Harapan Kota Solok	Solok	Sumatera Barat West Sumatera	0755 - 20011	KCP
KCP Plaju Plaju Sub-Branch Office	Jl. Jend. A. Yani 13 Ulu Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumsel	Palembang	Sumatera Selatan South Sumatera	0711-511107	KCP
KCP Baturaja Baturaja SubBranch Office	Jl. Jendral A. Yani No.324 Kel. Kemalaraja Kec.Baturaja Timur Kab.OKU	Ogan Komering Ulu	Sumatera Selatan South Sumatera	0735-321811	KCP
KCP Enim Enim Sub-Branch Office	Jl. Jend. Sudirman Talang Jawa Atas, Muara Enim 31315	Muara Enim	Sumatera Selatan South Sumatera	0734-421848	KCP
KCP Tanjung Pandan Tanjung Pandan Sub-Branch Office	Jl. Jend.Sudirman No.28, Pangkal Lalang, Kota Tanjungpandan - Kab. Belitung, Prov. Kepulauan Bangka Belitung 33412	Belitung	Bangka Belitung	0719-21513	KCP
KCP Sungailiat Sungailiat Sub-Branch Office	Komp. Ruko Permata Indah Blok B No.6-7 Jl. Jend. Sudirman No. 30, Kota Sungailiat, Kab. Bangka, Prov. Kepulauan Bangka Belitung 33215	Bangka	Bangka Belitung	0717-95912	KCP
KCP Koba Koba Sub-Branch Office	Jl. Soekarno Hatta II, Simpang Perlang, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah	Bangka Tengah Central Bangka	Bangka Belitung	0718-4222222	KCP
KCP Lhokseumawe Lhokseumawe Sub-Branch Office	Jln. Merdeka No. 2-3 Kel. Simpang Empat, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe	Lhokseumawe	Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)	0645-631537	KCP
KCP Sukaramai Sukaramai Sub-Branch Office	Jl. A.R. Hakim No. 70A-70B, Kel. Sukaramai I, Kec. Medan Area, Kota Medan	Medan	Sumatera Utara North Sumatera	061-7367476	KCP

Nama Kantor Name of Office	Alamat Address	Kota/ Kabupaten City/Province	Provinsi Province	Telepon Telephone	Kategori Category
KCP Serdang Serdang Sub-Branch Office	Jl. Prof. H. M. Yamin, SH No. 225, Medan	Medan	Sumatera Utara North Sumatera	061-4144343	KCP
KCP Binjai Binjai Sub-Branch Office	Jl. Jend. Sudirman No.202 Binjai Sumatera Utara.	Binjai	Sumatera Utara North Sumatera	061-8823434	KCP
KCP Stabat Stabat Sub-Branch Office	Jl. KH. Zainul Arifin No. 52 B-C, Stabat	Langkat	Sumatera Utara North Sumatera	061-8912323	KCP
KCP Panyabungan Panyabungan Sub-Branch Office	Jl. Willem Iskandar No. 173 Panyabungan 22912	Mandailing Natal	Sumatera Utara North Sumatera	0636-321234	KCP
KCP Kampar Kampar Sub-Branch Office	Jl. Jend. Sudirman No. 8 Bangkinang, kab. Kampar	Kampar	Riau	0762-20908	KCP
KCP Kisaran Kisaran Sub-Branchh Office	Jl. Cokroaminoto No. 245 Kisaran	Asahan	Sumatera Utara North Sumatera	0623-43558	KCP
KCP Masjid Baiturrahman Semarang Masjid Baiturrahman Semarang Sub-Branch Office	Jl. Pandanaran No. 126 Semarang 50134	Semarang	Jawa Tengah Central Java	024-8445285	KCP
KCP Bondowoso Bondowoso Sub-Branch Office	JL. AHMAD YANI NO. 82 BONDOWOSO	Bondowoso	Jawa Timur East Java	0332-431450	KCP
KCP Masbagik Masbagik Sub-Branch Office	Komplek Masjid Jami' Al-Akbar Masbagik (83661)	Lombok Timur East Lombok	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara	0376-631898	KCP
KCP Gresik Gresik Sub-Branch Office	Jl. Dr. Soetomo No.86, Gresik	Gresik	Jawa Timur East Java	031-3988233	KCP
KCP PKU Bantul PKU Bantul Sub-Branch Office	RSU PKU Muhammadiyah Bantul, Jl. Jend. Sudirman 124 Bantul, Yogyakarta	Bantul	DI Yogyakarta	0274-368801	KCP
KCP UII Yogyakarta UII Jogyakarta Sub-Branch Office	Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM 14,5 Sleman, Yogyakarta 55584	Sleman	DI Yogyakarta	0274-898505	KCP
KCP UGM Yogyakarta UGM Jogyakarta Sub-Branch Office	Masjid Kampus UGM, Jl. Tevisia 1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281	Sleman	DI Yogyakarta	0274-548777	KCP
KCP Athirah Makasar Athirah Makasar Sub-Branch Office	Jl. Kajaolalido No. 22, Makassar	Makassar	Sulawesi Selatan South Sulawesi	0411-3690499	KCP
KCP Pengayoman Makasar Pengayoman Makasar Sub-Branch Office	Jl. Pengayoman Ruko Jasper III No. 17 Makassar	Makassar	Sulawesi Selatan South Sulawesi	0411-441100	KCP
KCP Daya Makasar Daya Makasar Sub-ranchh Office	Jl. Perintis Kemerdekaan Km 12 Daya, Komp. Bukit Katulistiwa Ruko Blok A No. 7, Kodya Makassar	Makassar	Sulawesi Selatan South Sulawesi	0411-4772200	KCP

Keterangan | Description:

KCU : Kantor Cabang Utama | Main Branch Office

KCP : Kantor Cabang Pembantu | Sub-Branch Office



Peta Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi

Map of Business Network and Operating Areas



80

Kantor Cabang
Branch Offices

234

Total Kantor Cabang
Total Sub-Branch Offices

154

Kantor Cabang Pembantu
Sub-Branch Offices

564

ATM

55

Mobile Branch

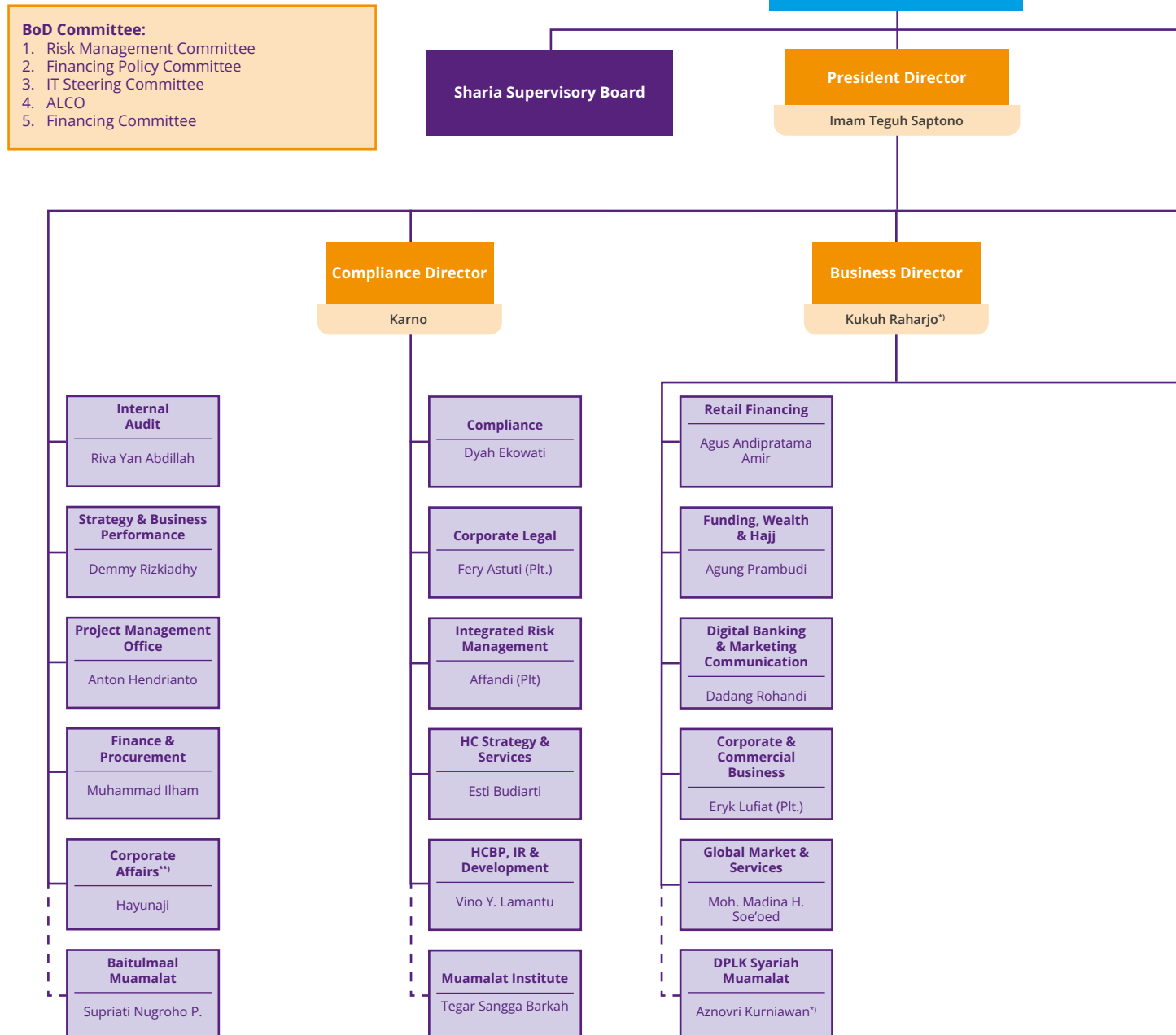




Struktur Organisasi

Organization Structure

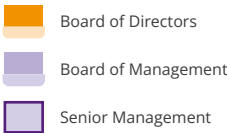
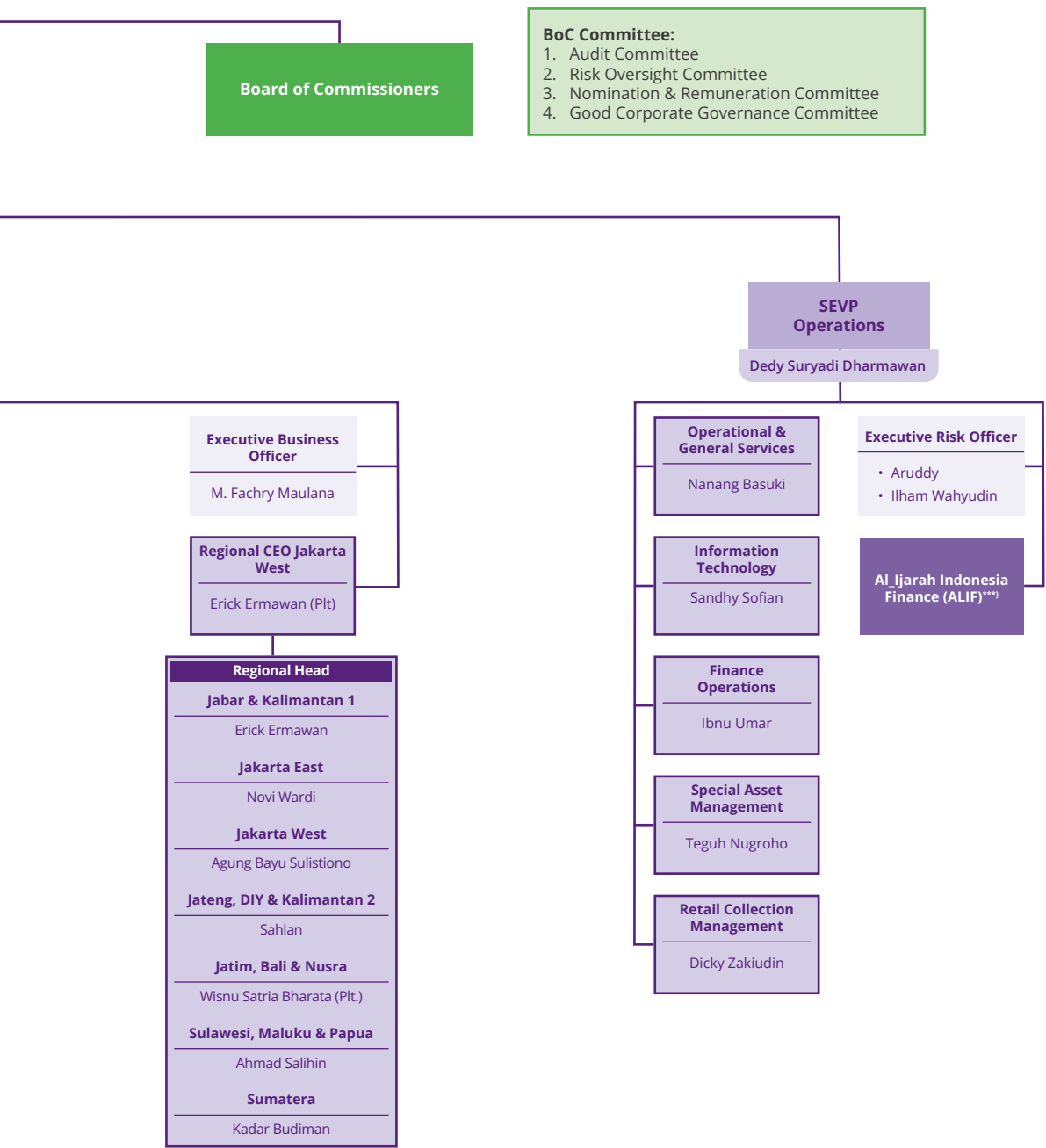
Struktur Organisasi per 10 Februari 2025
Organization Structure as of February 10, 2025



*) Efektif tidak menjabat pertanggal 25 Maret 2025
Effective from resignation on March 25, 2025

**) Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

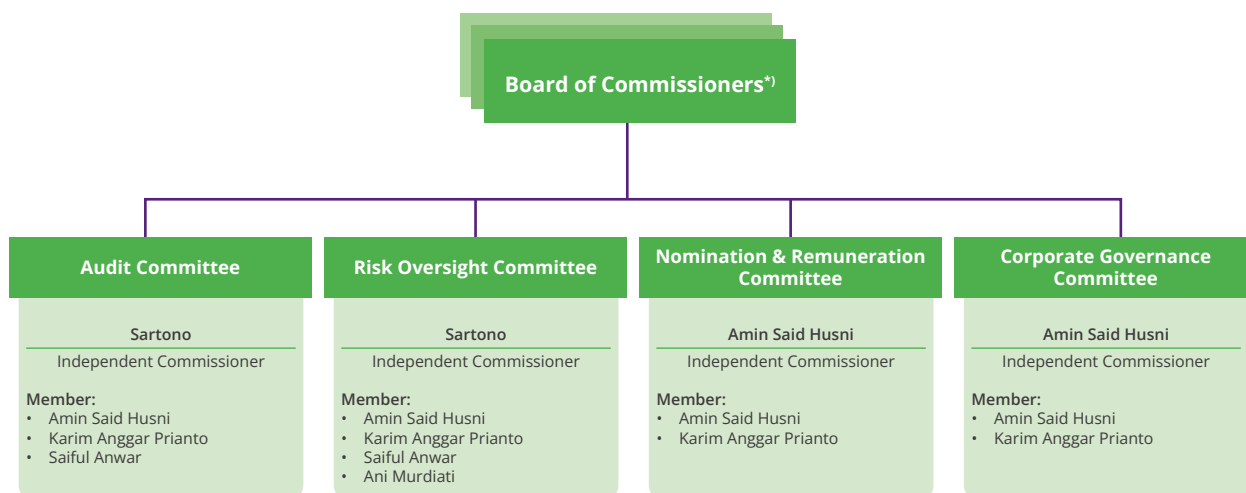
***) Dalam proses likuidasi
In liquidation process



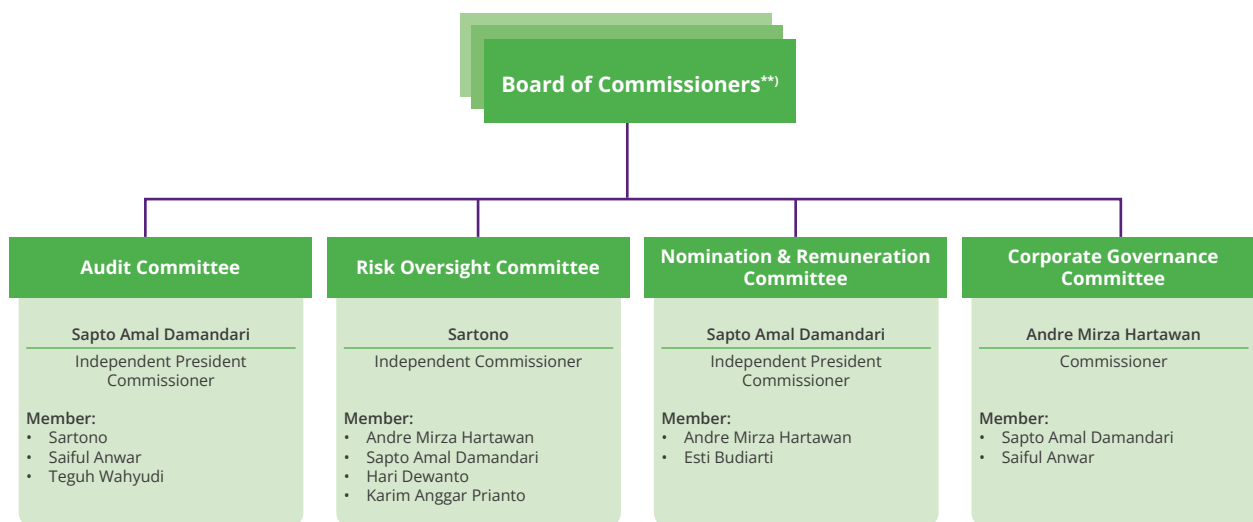


Komite Level Komisaris

Board of Commissioners Level Committees



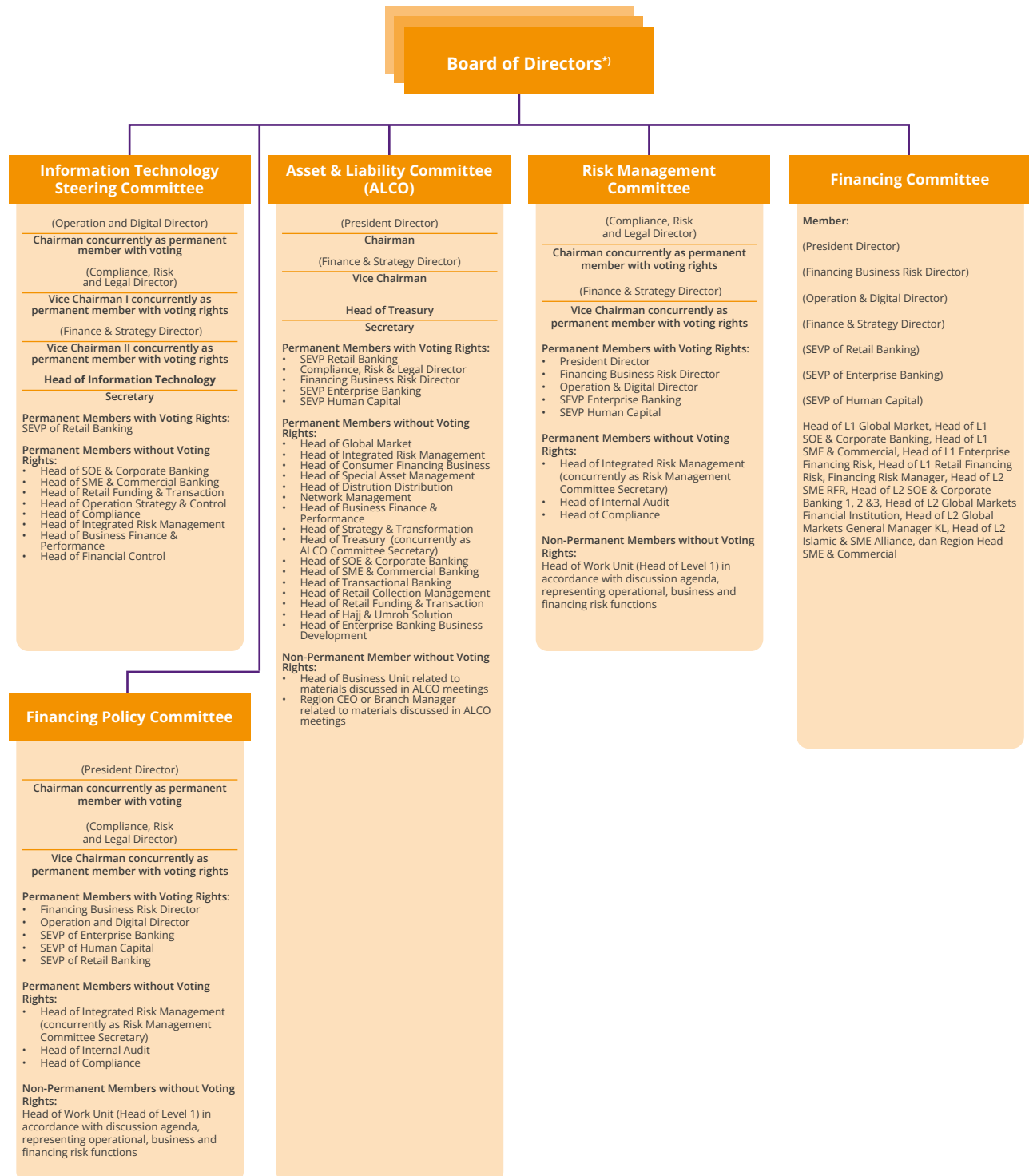
* Perubahan terjadi setelah RUPST 27 Juni 2024
Changes made after the AGM on June 27, 2024



** Perubahan terjadi setelah RUPSLB 11 Desember 2024
Changes occurred after the EGM on December 11, 2024

Komite Level Direksi

Board of Directors Level Committees



^{*)} Per 31 Desember 2024
As of December 31, 2024



Profil Dewan Pengawas Syariah

Profile of the Sharia Supervisory Board



Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of the Sharia Supervisory Board

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Usia Age	50 tahun pada akhir Tahun Buku 2024	50 years as of the end of Financial Year 2024
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis of First Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Juni 2016 dan telah mendapat persetujuan dari OJK pada tanggal 2 Februari 2017	Annual General Meeting of Shareholders dated June 29, 2016 and received the approval of OJK on February 2, 2017
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis of Last Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Juni 2024	Annual General Meeting of Shareholders dated June 27, 2024
Periode Jabatan Term of Office	Kedua	Second

Riwayat Pendidikan Educational Background	- Magister Ekonomi dan Keuangan Syariah dari Universitas Indonesia (2007) - Sarjana Tarbiyah dari Institute Agama Islam Al-Aqidah (IAIA) (2003)	- Master's degree (Magister) in Sharia Economy and Finance from Universitas Indonesia (2007) - Bachelor's degree (Sarjana) in Tarbiyah from Institute Agama Islam Al-Aqidah (IAIA) (2003)
Sertifikasi Certification	Sertifikasi Pengawas Syariah	Sharia Supervisory Certification
Rangkap Jabatan Concurrent Position	- Anggota Dewan Pengawas Syariah Indo Mobil Finance Indonesia Syariah (2013-sekarang) - Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Reasuransi Syariah Indonesia (ReINDO Syariah) (2016-sekarang) - Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Aladin Syariah (2020-sekarang) - Anggota Dewan Penasehat Syariah BP TAPERA (2022-sekarang) - Ketua MUI bidang Ekonomi Syariah (2015-sekarang) - Wakil Sekretaris BPH DSN MUI (2020-sekarang) - Katib Syuriah di PBNU (2015-sekarang)	- Member of the Sharia Supervisory Board of Indo Mobil Finance Indonesia Syariah (2013-present) - Chairman of the Sharia Supervisory Board of PT Reasuransi Syariah Indonesia (ReINDO Syariah) (2016-present) - Member of the Sharia Supervisory Board of Bank Aladin Syariah (2020-present) - Member of the Sharia Advisory Board of BP TAPERA (2022-present) - Chairman of MUI in Sharia Economy (2015-present) - Deputy Secretary of BPH DSN MUI (2020-present) - Syuriah Secretary at PBNU (2015-present)
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham Perusahaan	No ownership of Company's shares
Pengalaman Kerja Work Experience	- Wakil Ketua Badan Pengurus Harian DSN-MUI (2020-2025) - Ketua MUI bidang Ekonomi Syariah (2020-2025) - Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2019-sekarang) - Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2017-2019) - Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Fatwa dan Bidang Pengkajian Majelis Ulama Indonesia (MUI) (2015-2020) - Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (DSN) (2015-2020) - Ketua Dewan Pengawas Syariah Suzuki Finance Indonesia Syariah (2013-2017) - Katib Syuriah Bidang Bahtsul Masail PBNU (2010-2020)	- Vice Chairman of the Daily Management Board of DSN-MUI (2020-2025) - Chairman of MUI in Sharia Economy (2020-2025) - Chairman of Sharia Supervisory Board of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2019-present) - Member of Sharia Supervisory Board of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2017-2019) - Deputy Secretary General of Wakil Sekretaris Jenderal of Fatwa Division and Research of Majelis Ulama Indonesia (MUI) (2015-2020) - Deputy Secretary of the Daily Executive Board of of the National Sharia Board (DSN) (2015-2020) - Chairman of Sharia Supervisory Board of Suzuki Finance Indonesia Syariah (2013-2017) - Syuriah Secretary of Bahtsul Masail Division of PBNU (2010-2020)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung	No affiliation either in terms of financial or family relationships with members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Directors and Major Shareholder or Controlling Shareholder either directly or indirectly



Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of the Sharia Supervisory Board

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Usia Age	40 tahun pada akhir Tahun Buku 2024	40 years as of the end of Financial Year 2024
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis of First Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 Desember 2019 dan telah mendapat persetujuan dari OJK pada tanggal 22 Januari 2021	Extraordinary General Meeting of Shareholders dated December 16, 2019 and received approval from OJK on January 22, 2021
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis of Last Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Juni 2024	Annual General Meeting of Shareholders dated June 27, 2024
Periode Jabatan Term of Office	Kedua	Second

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Magister Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (2015) • Bachelor of Laws dari Ahmad Ibrahim Kulliyah of Laws International Islamic University Malaysia (2010)	• Master's degree (Magister) of Legal Studies from Universitas Indonesia (2015) • Bachelor of Laws from Ahmad Ibrahim Kulliyah of Laws International Islamic University Malaysia (2010)
Sertifikasi Certification	• Sertifikasi Pengawas Syariah • CRGP (Certified Risk Governance Professional) • Sertifikasi Asesor Kompetensi LSP MUI	• Sharia Supervisoryr Certification • CRGP (Certified Risk Governance Professional) • Competency Assessor Certification of LSP MUI
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BNI Life Insurance (2020-sekarang) • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Jasindo Syariah (2016-sekarang) • Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi BRI Life (2016-sekarang) • Anggota Dewan Pengawas Syariah DPLK Syariah Muamalat (2017-sekarang)	• Member of Sharia Supervisory Board of PT BNI Life Insurance (2020-present) • Chairman of Sharia Supervisory Board of PT Asuransi Jasindo Syariah (2016-present) • Member of Sharia Supeprvisory Board of PT Asuransi BRI Life (2016-present) • Member of Sharia Supervisory Board of DPLK Syariah Muamalat (2017-present)
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham Perusahaan	No ownership of Company's shares
Pengalaman Kerja Work Experience	• Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2019-sekarang) • Anggota DPS BNI Life Insurance (2020-sekarang) • Anggota DPS Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah Muamalat (2017-sekarang) • Anggota DPS PT BRILife (2016-sekarang) • Ketua DPS PT Asuransi Jasindo Syariah (2016-sekarang) • Dosen dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih (STIF) Syekh Nawawi Tanara (SYENTRA), Serang, Banten (2016-sekarang) • Anggota DPS PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera (AJSB) (2016-2020)	• Member of Sharria Supervisory Board of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2019-present) • Member of DPS BNI Life Insurance (2020-present) • Member of Pension Fund of Financial Institutions (DPLK) of Syariah Muamalat (2017-present) • Member of DPS PT BRILife (2016-present) • Chairman of DPS PT Asuransi Jasindo Syariah (2016-present) • Lecturer and Chairman of College of Islamic Jurisprudence (STIF) of Syekh Nawawi Tanara (SYENTRA), Serang, Banten (2016-present) • Member of DPS PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera (AJSB) (2016-2020)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung	No affiliation either in terms of financial or family relationships with members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Directors and Major Shareholder or Controlling Shareholder either directly or indirectly



Dr. H. Agung Danarto, M. Ag

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of the Sharia Supervisory Board

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Usia Age	56 tahun pada akhir Tahun Buku 2024	56 years as of the end of Financial Year 2024
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis of First Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Agustus 2021 dan telah mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 7 Juli 2022	Extraordinary General Meeting of Shareholders dated August 30, 2021 and received effective decision from OJK on July 7, 2022
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis of Last Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Juni 2024	Annual General Meeting of Shareholders dated June 27, 2024
Periode Jabatan Term of Office	Kedua	Second

Riwayat Pendidikan Educational Background	- Doktor Studi Islam dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006) - Magister Agama Studi Islam dari IAIN Alauddin Makassar (1996) - Sarjana Tafsir Hadis dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1993)	- Doctorate in Islamic Studies from IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta (2006) - Master's degree (Magister) in Islamic Studies from IAIN Alauddin Makassar (1996) - Bachelor's degree (Sarjana) in Hadith Interpretation from IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta (1993)
Sertifikasi Certification	Sertifikasi Pengawas Syariah	Sharia Supervisory Certification
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan	No concurrent position
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham Perusahaan	No ownership of Company's shares
Pengalaman Kerja Work Experience	- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2021-sekarang) - Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2015-sekarang) - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2010-2015) - Dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1994-sekarang)	- Member of Sharia Supervisory Board of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2021-present) - Secretary to Central Management of Muhammadiyah (2015-present) - General Secretary to Central Management of Muhammadiyah (2010-2015) - Lecturer at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1994-present)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung	No affiliation either in terms of financial or family relationships with members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Directors and Major Shareholder or Controlling Shareholder either directly or indirectly



Profil Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners



Sapto Amal Damandari

Komisaris Utama Independen
Independent President Commissioner

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Usia Age	70 tahun pada akhir Tahun Buku 2024	70 years as of the end of Financial Year 2024
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis of First Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 11 Desember 2024 dan telah mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 25 Maret 2025	Extraordinary General Meeting of Shareholders of December 11, 2024 and has obtained an effective decision from OJK on March 25, 2025
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis of Last Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 11 Desember 2024	Extraordinary General Meeting of Shareholders of December 11, 2024
Periode Jabatan Term of Office	Pertama	First

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada (1991) • Sarjana Muda Ekonomi, Jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada (1978)	• Bachelor's degree (Sarjana) in Economics, Major in Accounting from Universitas Gadjah Mada (1991) • Diploma (Sarjana Muda) in Economics, Major in Accounting from Universitas Gadjah Mada (1978)
Sertifikasi Certification	Manajemen Risiko Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	Risk Management Qualification 6 Banking Risk Management Field
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Direktur Utama SAO Advisory (2020-sekarang) • Ketua Komite Audit UGM (2018-sekarang) • Anggota Dewan Penasihat Ikatan Akuntan Indonesia - Chartered Accountant	• President Director of SAO Advisory (2020-present) • Chairman of the Audit Committee of UGM (2018-present) • Member of the Advisory Board of the Indonesian Institute of Accountants - Chartered Accountant
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham Perusahaan	No ownership of Company's shares
Pengalaman Kerja Work Experience	• Komisaris Utama Independen PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2024-sekarang) • Ketua Komite Pengawasan Internal Audit BPK RI (2022-2023) • Wakil Komisaris Utama PT Bank KB Bukopin Tbk (2020-2021) • Direktur Utama SAO Advisory (2020-sekarang) • Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2018-2020) • Ketua Komite Audit UGM (2018-sekarang) • Senior Advisor RSM Indonesia (2017-2020) • Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2017-2018) • Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) (2014-2017) • Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) (2007-2013) • Partner Kantor Akuntan Publik (KAP) Junianto & Saptoamal (1998-2007)	• Independent President Commissioner of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2024-present) • Chairman of Internal Audit Supervisory Committee of BPK RI (2022-2023) • Vice President Commissioner of PT Bank KB Bukopin Tbk (2020-2021) • President Director of SAO Advisory (2020 – present) • President Commissioner of PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2018 – 2020) • Chairman of Audit Committee of UGM (2018-present) • Senior Advisor of RSM Indonesia (2017-2020) • President Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2017-2018) • Vice Chairman of the Financial Inspection Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) (2014-2017) • Member of the Financial Inspection Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) (2007-2013) • Partner in the Public Accountant Firm (KAP) of Junianto & Saptoamal (1998-2007)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung	No affiliation either in terms of financial or family relationships with members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Directors and Major Shareholder or Controlling Shareholder either directly or indirectly



Sartono

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Usia Age	63 tahun pada akhir Tahun Buku 2024	63 years as of the end of Financial Year 2024
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis of First Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 24 Juni 2022 dan telah mendapat keputusan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 16 Januari 2023	Annual General Meeting of Shareholders of June 24, 2022 and received the effective decision from the Financial Services Authority (OJK) dated January 16, 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis of Last Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Juni 2024	Annual General Meeting of Shareholders dated June 27, 2024
Periode Jabatan Term of Office	Kedua	Second

Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung (1987)	Bachelor's degree (Sarjana) from Universitas Padjadjaran Bandung (1987)
Sertifikasi Certification	Manajemen Risiko Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	Risk Management Qualification 6 Banking Risk Management Field
Rangkap Jabatan Concurrent Position	- Ketua Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2023-Januari 2024) - Ketua Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Januari 2024-sekarang) - Ketua Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Januari 2024-sekarang)	- Chairman of the Corporate Governance Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2023-January 2024) - Chairman of the Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (January 2024-present) - Chairman of the Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (January 2024-present)
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham Perusahaan	No ownership of Company's shares
Pengalaman Kerja Work Experience	- Komisaris Independen PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2022-sekarang) - Jaksa Fungsional Kejaksaan Agung (September 2021-2022) - Sekretaris JAM Pembinaan Kejaksaan Agung (Desember 2019-September 2021) - Inspektur Keuangan pada Jamwas Kejaksaan Agung (September 2019-Desember 2019) - Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung (Maret 2019-September 2019) - Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung (Februari 2016-Maret 2019) - Koordinator JAM Intel Kejaksaan Agung (Mei 2014-Februari 2016) - Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Februari 2012-Mei 2014) - Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Februari 2010-Februari 2012) - Kabag Pendapatan dan BRN Kejaksaan Agung (Agustus 2008-Februari 2010) - Kabag Anggaran Kejaksaan Agung (Mei 2006-Agustus 2008) - Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang (Oktober 2004-Mei 2006) - Pengkaji kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Maret 2004-Oktober 2004)	- Independent Commissioner of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2022-present) - Functional Prosecutor of the Attorney General's Office (September 2021-2022) - Secretary to JAM of Attorney General's Office (Desember 2019-September 2021) - Inspector of Finance at Jamwas of the Attorney General's Office (September 2019-December 2019) - Head of Lampung High Prosecutor's Office (March 2019-September 2019) - Head of the Attorney General's Office Finance Bureau (February 2016-March 2019) - Coordinator of Attorney General's Office Intelligence JAM (May 2014-February 2016) - Assistant for Development of the East Java High Prosecutor's Office (February 2012-May 2014) - Head of the East Jakarta District Attorney's Office (February 2010-February 2012) - Head of Revenue and BRN Division of the Attorney General's Office (August 2008-February 2010) - Head of Budget Division of the Attorney General's Office (May 2006-August 2008) - Head of the Bengkayang District Attorney's Office (October 2004-May 2006) - Reviewer at West Java High Prosecutor's Office (March 2004-October 2004)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung	No affiliation either in terms of financial or family relationships with members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Directors and Major Shareholder or Controlling Shareholder either directly or indirectly



Andre Mirza Hartawan

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Usia Age	55 tahun pada akhir Tahun Buku 2024	55 years as of the end of Financial Year 2024
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis of First Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 Februari 2022 dan telah mendapat keputusan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 19 Juli 2022	Annual General Meeting of Shareholders on February 28, 2022 and has received an effective decision from the Financial Services Authority (OJK) on July 19, 2022.
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis of Last Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Juni 2024	Annual General Meeting of Shareholders dated June 27, 2024
Periode Jabatan Term of Office	Kedua	Second

Riwayat Pendidikan Educational Background	- Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Trisakti (2020) - Master of Business Administration dari Graduate School of Business, Curtin University Perth Australia (1996) - Sarjana Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (1993)	- Doctorate in Economic Science from Universitas Trisakti (2020) - Master of Business Administration from Graduate School of Business, Curtin University Perth Australia (1996) - Bachelor's degree (Sarjana) in Industrial Engineering at Institut Teknologi Bandung (1993)
Sertifikasi Certification	Manajemen Risiko Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	Risk Management Qualification 6 Banking Risk Management Field
Rangkap Jabatan Concurrent Position	- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2023-sekarang) - Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2023-sekarang) - Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2023-sekarang) - Komisaris Utama PT Wisma Seratus Sejahtera (2016-sekarang)	- Member of the Nomination and Remuneration Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2023-present) - Member of the Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2023-present) - Member of the Corporate Governance Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2023-present) - President Commissioner of PT Wisma Seratus Sejahtera (2016-present)
Kepemilikan Saham Share Ownership	Memiliki saham perusahaan sebanyak 5,19%	Owns 5.19% of Company's shares
Pengalaman Kerja Work Experience	- Komisaris PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2022-sekarang) - Komisaris Independen PT Bank Oke Indonesia Tbk (2019-2022) - Komisaris Utama PT Wisma Seratus Sejahtera (2016-sekarang) - Komisaris Utama PT Syres Power Energy (2014-2019) - Komisaris Utama PT Auto Daya Amara (2014- 2019) - Komisaris PT Panca Amara Utama (2008-2019) - Komisaris Utama di PT Auto Daya Keisindo (2014-2019) - Komisaris PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2009-2014)	- Commissioner of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2022-present) - Independent Commissioner at PT Bank Oke Indonesia Tbk (2019-2022) - President Commissioner of PT Wisma Seratus Sejahtera (2016-present) - President Commissioner of PT Syres Power Energy (2014-2019) - President Commissioner of PT Auto Daya Amara (2014- 2019) - Commissioner of PT Panca Amara Utama (2008-2019) - President Commissioner of di PT Auto Daya Keisindo (2014-2019) - Commissioner of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2009-2014)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung	No affiliation either in terms of financial or family relationships with members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Directors and Major Shareholder or Controlling Shareholder either directly or indirectly



Profil Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior

Profile of the Board of Directors and Senior Executive Officers



Imam Teguh Saptono

Direktur Utama
President Director

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Usia Age	55 tahun pada akhir Tahun Buku 2024	55 years as of the end of Financial Year 2024
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis of First Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Desember 2024 dan telah mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 25 Maret 2025	Extraordinary General Meeting of Shareholders dated December 11, 2024 and has obtained an effective decision from OJK on March 25, 2025
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis of Last Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Desember 2024	Extraordinary General Meeting of Shareholders of December 11, 2024
Periode Jabatan Term of Office	Pertama	First

Riwayat Pendidikan Educational Background	- Doktor Manajemen Bisnis Institut Pertanian Bogor (2011) - Magister Manajemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor (1994) - Sarjana Pertanian, Institut Pertanian Bogor (1992)	- Doctorate in Business Management from Institut Pertanian Bogor (2011) - Master's degree (Magister) in Agribusiness Management, Institut Pertanian Bogor (1994) - Bachelor's degree (Sarjana) in Agriculture, Institut Pertanian Bogor (1992)
Sertifikasi Certification	Manajemen Risiko Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	Risk Management Qualification 7 Banking Risk Management Field
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan	No concurrent position
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham Perusahaan	No ownership of Company's shares
Pengalaman Kerja Work Experience	- Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia Republik Indonesia (BWI RI) (2017-2024) - Direktur Utama PT Bank BNI Syariah (2016-2017) - Direktur Bisnis PT Bank BNI Syariah (2012-2016) - Direktur Risiko & Kepatuhan PT Bank BNI Syariah (2010-2012) - VP - Sekretaris Perusahaan PT Bank Permata Tbk (2005-2007) - Head of Investor Relations PT Bank Permata Tbk (2003-2005) - Dosen Program Magister & Doktor Institut Pertanian Bogor (1997-sekarang) - Komisaris PT Cipta Pilar Persada (Waqf Company) 2008 - 2024	- Vice Chairman of the Indonesian Waqf Board of the Republic of Indonesia (BWI RI) (2017-2024) - President Director of PT Bank BNI Syariah (2016-2017) - Director of Business of PT Bank BNI Syariah (2012-2016) - Director of Risk & Compliance of PT Bank BNI Syariah (2010-2012) - VP-Corporate Secretary of PT Bank Permata Tbk (2005-2007) - Head of Investor Relations of PT Bank Permata Tbk (2003-2005) - Lecturer in the Master & Doctorate Program of Institut Pertanian Bogor (1997-present) - Commissioner of PT Cipta Pilar Persada (Waqf Company) 2008 - 2024
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung	No affiliation either in terms of financial or family relationships with members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Directors and Major Shareholder or Controlling Shareholder either directly or indirectly



Karno

Direktur Kepatuhan
Compliance Director

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Usia Age	52 tahun pada akhir Tahun Buku 2024	52 years as of the end of Fiscal Year 2024
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis of First Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 24 Juni 2022 dan telah mendapatkan persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan keputusan pada tanggal 3 Oktober 2022	Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 14, 2022 and received the approval of OJK upon passing the fit and proper assessment on October 3, 2022
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis of Last Appointment	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Juni 2024	Annual General Meeting of Shareholders dated June 27, 2024
Periode Jabatan Term of Office	Kedua	Second

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Magister Manajemen dari Institut Pertanian Bogor (2012) • Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (2000)	• Master's degree in Management from Institut Pertanian Bogor (2012) • Bachelor's degree (Sarjana) in Economics from Universitas Indonesia (2000)
Sertifikasi Certification	Manajemen Risiko Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	Risk Management Qualification 7 Banking Risk Management Field
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan	No concurrent position
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham Perusahaan	No ownership of Company's shares
Pengalaman Kerja Work Experience	• Deputi Manajemen Risiko di Badan Pengelola Keuangan Haji (2018-2022) • Head of Risk Management PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (2016-2018) • Kepala Departemen Manajemen Risiko PT Bank BCA Syariah (2013-2016) • Kepala Cabang Mataram dan Purwokerto PT Bank Bukopin Tbk (2011-2013) • Manajer Kepatuhan PT Bank Bukopin Tbk (2002-2011)	• Deputy of Risk Management at Hajj Financial Management Agency (2018-2022) • Head of Risk Management of PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (2016-2018) • Head of Risk Management Department of PT Bank BCA Syariah (2013-2016) • Head of Mataram and Purwokerto Branch Office of PT Bank Bukopin Tbk (2011-2013) • Manager of Compliance at PT Bank Bukopin Tbk (2002-2011)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung	No affiliation either in terms of financial or family relationships with members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Directors and Major Shareholder or Controlling Shareholder either directly or indirectly



Dedy Suryadi Dharmawan

SEVP Operation
SEVP Operation

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Tangerang	Tangerang
Usia Age	46 tahun pada akhir Tahun Buku 2024	46 years as of the end of Financial Year 2024
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi No. 0236/HSE/TAP/LMP/XII/2023 tanggal 3 November 2023	Decision Letter of the Board of Directors No. 0236/HSE/TAP/LMP/XII/2023 dated 3 November 2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	- Magister Manajemen dari Universitas Padjadjaran - Sarjana Regional City Planning dari Institut Teknologi Bandung	- Master's degree (Magister) in Management from Universitas Padjadjaran - Bachelor's degree (Sarjana) in Regional City Planning from Institut Teknologi Bandung
Pengalaman Kerja Work Experience	- SEVP Retail Banking PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2023) - Group Head, SME Business Group (2021-2023) - Regional CEO, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2019-2021) - Area Manager, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2016-2019) - Departement Head, Corporate Banking Group 1 PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2015-2016) - Branch Manager, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2009-2015) - Marketing Manager, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2007-2009) - Operation Manager, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2005-2007) - Account Officer, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2003-2005) - Officer Development Program PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2002-2003)	- SEVP Retail Banking of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2023) - Group Head, SME Business Group (2021-2023) - Regional CEO, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2019-2021) - Area Manager at PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2016-2019) - Department Head, Corporate Banking Group 1 of PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2015-2016) - Branch Manager at PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2009-2015) - Marketing Manager at PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2007-2009) - Operation Manager at PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2005-2007) - Account Officer at PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2003-2005) - Officer Development Program at PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2002-2003)

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Change in the Composition of the Board of Commissioners

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Composition of the Board of Commissioners

Sebelum Perubahan Before Change	Jabatan Position	Dasar Perubahan Basis of Change	Alasan Perubahan Reason of Change
Mardiasmo	Komisaris Utama President Commissioner	- Keputusan RUPS LB 13 November 2023 - Resolution of Extraordinary GMS of November 13, 2023	Sesuai permintaan Pemegang Saham Pengendali, dalam rangka penguatan kinerja perusahaan As requested by the Controlling Shareholders, in order to strengthen the company's performance
Amin Said Husni	Komisaris Independen/Plt. Komisaris Utama Independent Commissioner/Act. President Commissioner		
Sartono	Komisaris Independen Independent Commissioner		
Andre Mirza Hartawan	Komisaris Commissioner		
Amin Said Husni	Komisaris Utama President Commissioner	- Keputusan RUPST 24 Juni 2024 - Resolution of Annual GMS of June 24, 2024	Sesuai permintaan Pemegang Saham Pengendali, dalam rangka penguatan kinerja perusahaan As requested by the Controlling Shareholders, in order to strengthen the company's performance
Sartono	Komisaris Independen Independent Commissioner		
Andre Mirza Hartawan	Komisaris Commissioner		
Sapto Amal Damandari	Komisaris Utama President Commissioner	- Keputusan RUPSLB 11 Desember 2024 - Resolution of Extraordinary GMS of December 11, 2024	Sesuai permintaan Pemegang Saham Pengendali, dalam rangka penguatan kinerja perusahaan As requested by the Controlling Shareholders, in order to strengthen the company's performance
Sartono	Komisaris Independen Independent Commissioner		
Andre Mirza Hartawan	Komisaris Commissioner		

Perubahan Komposisi Direksi

Change in the Composition of the Board of Directors

KOMPOSISI DEWAN DIREKSI

Composition of the Board of Directors

Sebelum Perubahan Before Change	Jabatan Position	Dasar Perubahan Basis of Change	Alasan Perubahan Reason of Change
Indra Falatehan	Direktur Utama President Director	- Keputusan RUPS LB 13 November 2023 - Resolution of Extraordinary GMS of November 13, 2023	Sesuai permintaan Pemegang Saham Pengendali, dalam rangka penguatan kinerja perusahaan As requested by the Controlling Shareholders, in order to strengthen the company's performance
Karno	Direktur Kepatuhan, Risiko dan Hukum Compliance, Risk and Law Director		
Hery Syafril	Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan Business Financing Risk Director		
Wahyu Avianto	Direktur Operasi & Digital Digital & Operations Director		
Suhendar	Direktur Keuangan & Strategi Finance & Strategy Director		
Hery Syafril	Direktur Utama President Director	- Keputusan RUPST 24 Juni 2024 - Resolution of Annual GMS of June 24, 2024	Sesuai permintaan Pemegang Saham Pengendali, dalam rangka penguatan kinerja perusahaan As requested by the Controlling Shareholders, in order to strengthen the company's performance
Karno	Direktur Kepatuhan, Risiko dan Hukum Compliance, Risk and Law Director		
Riksa Prakoso	Direktur Operasi, TI, dan SDM Operation, IT, and HC Director		
Imam Teguh Saptono	Direktur Utama President Director	- Keputusan RUPSLB 11 Desember 2024 - Resolution of Extraordinary GMS of December 11, 2024	Sesuai permintaan Pemegang Saham Pengendali, dalam rangka penguatan kinerja perusahaan As requested by the Controlling Shareholders, in order to strengthen the company's performance
Karno	Direktur Kepatuhan Compliance Director		
Kukuh Rahardjo ^{*)}	Direktur Bisnis Business Director		

^{*)} Efektif tidak menjabat pertanggal 25 Maret 2025.
Effective from resignation on March 25, 2025.



Profil Pejabat Eksekutif

Profile of Executive Officers

Nama Name	Tanggal Bergabung Date Joined	Jabatan Position	Usia (tahun) Age (year)	Pendidikan Terakhir Last Education Level	Institusi Pendidikan Educational Institute
Dedy Suryadi Dharmawan	3 Agustus 2023 August 3, 2023	SEVP Operation	46	S2	Universitas Padjadjaran
Agung Bayu Sulistiono	14 April 2023 April 14, 2023	Head of Consumer Financing Business	45	S1	Universitas Indonesia
Anton Hendrianto	3 Juli 2017 July 3, 2017	Head of HC Strategy & Development	46	S2	Universitas Bina Nusantara
Aruddy	11 Mei 2012 May 11, 2012	Head of Enterprise Financing Risk	54	S3	Institut Pertanian Bogor
Bambang Rudi Hariyanto	14 Mei 2018 May 14, 2018	Head of Retail Financing Risk	52	S1	Institut Pertanian Bogor
Catur Andayani	17 Agustus 2024 August 17, 2024	Head of Integrated Risk Management	55	S2	Universitas Indonesia
Dadang Rohandi	5 Juni 2023 June 5, 2023	Head of Digital Banking	49	S2	Universitas Indonesia
Demmy Rizkiadhy	15 Oktober 2015 October 15, 2015	Head of Strategy & Transformation	43	S1	Universitas Trisakti
Dicky Zakiudin	16 April 2018 April 16, 2018	Head of Retail Collection Management	54	S1	Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Dyah Ekowati	7 Mei 1997 May 7, 1997	Head of Compliance	53	S1	Institut Pertanian Bogor
Esti Budiarti	18 Juli 2016 July 18, 2016	Head of HCBP & Services	45	S1	Universitas Indonesia
Hayunaji	17 Desember 2018 December 17, 2018	Head of Corporate Affairs	53	S1	Universitas Indonesia
Ibnu Umar	4 Maret 2019 March 4, 2019	Head of Financing Operations	53	S1	Universitas Pancasila
Ilham Wahyudin	9 April 2018 April 9, 2018	Head of Enterprise Banking Business Development	49	S1	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen
Khusnudhon	12 Januari 2022 January 12, 2022	Head of Corporate Legal	49	S2	Universitas Gadjah Mada
Moh. Madina Hendrik Soe'oad	12 April 2019 April 12, 2019	Head of Global Market	50	S2	Melbourne University of Technology
Muhammad Fachry Maulana	12 Juni 2023 June 12, 2023	Head of Islamic Business & SME Banking	44	S1	Institut Teknologi Bandung
Muhammad Ilham	1 September 2016 September 1, 2016	Head of Financial Control	53	S1	Universitas Andalas
Nanang Basuki	22 Juni 1993 June 22, 1993	Head of Operation Services	54	S2	Institut Teknologi Bandung
Riva Yan Abdillah	28 Januari 2021 January 28, 2021	Head of Anti Fraud	52	S1	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI)

Nama Name	Tanggal Bergabung Date Joined	Jabatan Position	Usia (tahun) Age (year)	Pendidikan Terakhir Last Education Level	Institusi Pendidikan Educational Institute
Sandhy Sofian	14 Februari 2022 February 14, 2022	Head of Information Technology	52	S2	Universitas Prasetya Mulya
Supriati Nugroho Pernamawati	22 Juli 2015 July 22, 2015	Head of Marketing Communication	50	S2	London School of Public Relations
Tegar Sangga Barkah	1 September 2023 September 1, 2023	Head of Internal Audit	47	S1	Universitas Indonesia
Teguh Nugroho	1 Oktober 2012 October 1, 2012	Head of Special Asset Management	42	S1	Institut Pertanian Bogor
Vino Yudessa Lamantu	9 Mei 2016 May 9, 2016	Head of HCBP & Industrial Relations	46	S1	Universitas Islam Indonesia
Wita Hanayori	13 Juni 2016 June 13, 2016	Head of Distribution & Network Management	51	S2	Sekolah Tinggi Manajemen IPMI
Zefri Ananta	23 Februari 2023 February 23, 2023	Head of Operation Strategy & Development	56	S2	Institut Pertanian Bogor
Agung Prambudi	20 Februari 2017 February 20, 2017	Regional CEO - Jakarta West	55	S1	Universitas Brawijaya
Agus Andipratama Amir	19 Mei 2016 May 19, 2016	Regional CEO - Jateng, DIY & Kalimantan 2	48	S1	University Of South Australia
Ahmad Salihin	8 September 1997 September 8, 1997	Regional CEO - Sulawesi, Maluku & Papua	51	S1	Universitas Hasanuddin
Ana Hastuti	18 September 1996 September 18, 1996	Regional CEO - Jakarta East	48	S1	STIE Adhy Niaga
Aufrieda Artsiana Dewi	31 Juli 2024 July 31, 2024	Regional CEO - Jatim, Bali & Nusra	55	S1	Universitas Airlangga
Erick Ermawan	1 Mei 2013 May 1, 2013	Regional CEO - Jabar & Kalimantan 1	53	S1	Institut Pertanian Bogor
Kadar Budiman	1 September 2000 September 1, 2000	Regional CEO - Sumatera	47	S2	Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
Mahmud Abu Bakar	15 April 2019 April 15, 2019	General Manager - Kuala Lumpur Branch	60	S2	University of Leicester
Aan Noor Diana	2 April 2018 April 2, 2018	Branch Manager - Melawai Branch	38	S2	Universitas Trisakti
Abdul Kadir Jailani	1 Maret 2019 March 1, 2019	Branch Manager - Pangkal Pinang Branch	41	S1	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
Abdul Rohman	4 Agustus 2014 August 4, 2014	Branch Manager - Plt. Kalimas Bekasi Branch	35	S1	Universitas Komputer Indonesia
Additya Dian Eko Putra	8 Mei 2014 May 8, 2014	Branch Manager - Batam Branch	34	S1	Universitas Sriwijaya
Adi Tri Wibowo	22 Oktober 2010 October 22, 2010	Branch Manager - Jember Branch	40	S1	Universitas Muhammadiyah Malang
Aditya Nugroho	9 Mei 2022 May 9, 2022	Branch Manager - Jababeka Branch	36	S1	STMIK Cikarang
Affan Syu'aidi	3 Juni 2010 June 3, 2010	Branch Manager - Langsa Branch	39	S1	UIN Sumatera Utara
Agus Rian Kusumadika	11 Juli 2011 July 11, 2011	Branch Manager - Tegal Branch	39	S1	Universitas Sebelas Maret
Ahmad Azwar	1 April 2014 April 1, 2014	Branch Manager - Lampung Branch	42	S1	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Akbar Sulaiman Karib	31 Desember 2004 December 31, 2004	Branch Manager - Ternate Branch	45	S1	Universitas Hasanuddin



Nama Name	Tanggal Bergabung Date Joined	Jabatan Position	Usia (tahun) Age (year)	Pendidikan Terakhir Last Education Level	Institusi Pendidikan Educational Institute
Anggit Pragusto Sumarsono	8 Juli 2024 July 8, 2024	Branch Manager - Kalimalang Branch	40	S2	Universitas Indonesia
Anike Defriana	27 Februari 2017 February 27, 2017	Branch Manager - Kelapa Gading Branch	50	S1	Universitas Tanjungpura
Anshar	12 Juni 1999 June 12, 1999	Branch Manager - Samarinda Branch	53	S1	Universitas Hasanuddin
Arie Boentaram	17 Mei 2001 May 17, 2001	Branch Manager - Pontianak Branch	46	S1	Universitas Persada Indonesia Y.A.I.
Aris Haryanto Budiman	16 Januari 2013 January 16, 2013	Branch Manager - Mamuju Branch	41	S1	Universitas Padjadjaran
Betha Muhammad Zaky	1 Februari 2007 February 1, 2007	Branch Manager - Banjarmasin Branch	44	S1	Institut Pertanian Bogor
Bimo Setyawan	6 April 2017 April 6, 2017	Branch Manager - KPO Muamalat Tower	46	S2	Universitas Atma Jaya
Budi Santoso	1 Maret 1996 March 1, 1996	Branch Manager - Purwokerto Branch	51	S1	Universitas Stikubank
Busman	25 Maret 2013 March 25, 2013	Branch Manager - Ambon Branch	40	S1	Universitas Gadjah Mada
Christinawulansari Elok Jatiwaluyaningtias	1 September 2006 September 1, 2006	Branch Manager - Jayapura Branch	43	S1	Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Christine Dameyanti	1 Januari 2024 January 1, 2024	Branch Manager - Bogor Branch	47	S2	Universitas Gadjah Mada
Danang Rokhmad Sulendra	15 Juni 2009 June 15, 2009	Branch Manager - Surabaya Darmo Branch	39	S1	Universitas Negeri Surabaya
Devi Septiana	26 Juni 2023 June 26, 2023	Branch Manager - Depok Branch	45	S1	STIE Prasetya Mandiri Lampung
Dewi Fathia	1 Desember 2016 December 1, 2016	Branch Manager - Fatmawati Branch	51	S1	STIE Kampus Ungu
Dhiana Nur Aulia Sari	22 Maret 2024 March 22, 2024	Branch Manager - Tangerang City Branch	46	S1	Universitas Indonesia
Dian Anggraeni	17 Januari 2024 January 17, 2024	Branch Manager - Semarang Branch	41	S1	Universitas Jendral Sudirman
Dian Sulistyowati	2 Januari 2019 January 2, 2019	Branch Manager - Kramat Raya Branch	42	S1	Universitas Jayabaya
Dony Wicaksono	10 Maret 2023 March 10, 2023	Branch Manager - Roxy Branch	43	S1	Universitas Islam Indonesia
Dwi Poedji Widodo	3 Januari 2017 January 3, 2017	Branch Manager - Makassar Branch	53	S2	STIE Malangucecwara Malang
Dwi Rahayu Warnaningsih	9 Mei 2022 May 9, 2022	Branch Manager - Mataram Branch	44	S1	Universitas Udayana
Dyanne Poespa Sari	16 Maret 2020 March 16, 2020	Branch Manager - BSD Branch	46	S2	Universitas Gadjah Mada
Efrida Yanti Siregar	18 Maret 2003 March 18, 2003	Branch Manager - Padang Sidempuan Branch	46	S1	Universitas Sumatera Utara
Erine Widya Kusumawati	10 Juni 2019 June 10, 2019	Branch Manager - Surabaya Sungkono Branch	46	S1	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Eris Fahrulroji	2 Oktober 2023 October 2, 2023	Branch Manager - Tasikmalaya Branch	45	S1	Universitas Galuh

Nama Name	Tanggal Bergabung Date Joined	Jabatan Position	Usia (tahun) Age (year)	Pendidikan Terakhir Last Education Level	Institusi Pendidikan Educational Institute
Evia Lutvita Sarie	5 Januari 2006 January 5, 2006	Branch Manager - Yogyakarta Branch	43	S1	Universitas Islam Indonesia
Fahmi Arham	1 Agustus 2023 August 1, 2023	Branch Manager - Puri Indah Branch	44	S1	Universitas Pancasila
Feri Ferdian	1 September 2006 September 1, 2006	Branch Manager - Cengkareng Branch	43	S1	Universitas Cenderawasih
Fitra Nirwan	28 April 2008 April 28, 2008	Branch Manager - Pekanbaru Branch	40	S2	IAIN Batusangkar
Fitrawan	7 Januari 2004 January 7, 2004	Branch Manager - Kendari Branch	43	S2	Universitas Halu Oleo
Giat Waluyo	7 Januari 2004 January 7, 2004	Branch Manager - Pekalongan Branch	48	S1	Universitas Jendral Soedirman
Handoko	1 Maret 2024 March 1, 2024	Branch Manager - Ciledug Branch	38	S1	STIE Adhy Niaga
Heri Siswanto	1 April 2024 April 1, 2024	Branch Manager - Solo Branch	44	S2	Universitas Sebelas Maret
Hyang Pramesti Kesumawijaya	24 November 2014 November 24, 2014	Branch Manager - Cianjur Branch	44	S1	Universitas Jenderal Achmad Yani
Januar Fadlillah	26 September 2016 September 26, 2016	Branch Manager - Palembang Branch	38	S1	Universitas Lampung
Lindawati	16 Juli 2018 July 16, 2018	Branch Manager - Kebon Jeruk Branch	35	S1	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
M. Asrul	31 Oktober 2008 October 31, 2008	Branch Manager - Gorontalo Branch	40	S1	Universitas Negeri Makassar
M. Helmi	24 Januari 2005 January 24, 2005	Branch Manager - Jambi Branch	48	S1	Universitas Andalas
M. Nahdhudin Al Asady	2 Januari 2004 January 2, 2004	Branch Manager - Serang Branch	47	S1	UIN Walisongo Semarang
Madiah Insaniyah	1 Oktober 2013 October 1, 2013	Branch Manager - Buaran Klender Branch	34	S1	Universitas Padjadjaran
Maghfiroh	27 Juni 2016 June 27, 2016	Branch Manager - Cipulir Branch	42	S1	Universitas Jayabaya
Mahmud K Diko	20 Juni 2007 June 20, 2007	Branch Manager - Plt. Manado Branch	41	S1	Universitas Muslim Indonesia
Melinawati Amran	1 Desember 2016 December 1, 2016	Branch Manager - Bintaro Jaya Branch	51	S2	Universitas Persada Indonesia Y.A.I.
Mhd Taufik	3 April 2011 April 3, 2011	Branch Manager - Padang Branch	39	S1	Universitas Komputer Indonesia
Mhd. Jar'i Daek	22 Juni 2020 June 22, 2020	Branch Manager - Medan Baru Branch	47	S1	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Mucthar	11 Maret 2013 March 11, 2013	Branch Manager - Palu Branch	46	S1	Universitas Tadulako
Muhammad Amin	18 April 2005 April 18, 2005	Branch Manager - Medan Branch	45	S1	Universitas Islam Bandung
Muhammad Harmein	28 Mei 2001 May 28, 2001	Branch Manager - Aceh Branch	51	S1	Universitas Dharmawangsa
Muhammad Husein Sucipto	1 Maret 2008 March 1, 2008	Branch Manager - Denpasar Branch	40	S1	Universitas Sriwijaya
Muhammad Mundzir	12 Juni 2009 June 12, 2009	Branch Manager - Kediri Branch	42	S1	Universitas Airlangga



Nama Name	Tanggal Bergabung Date Joined	Jabatan Position	Usia (tahun) Age (year)	Pendidikan Terakhir Last Education Level	Institusi Pendidikan Educational Institute
Nasrulloh	1 Maret 2004 March 1, 2004	Branch Manager - Cilegon Branch	45	S2	Universitas Negeri Jember
Pandu Angga Ikhsana	1 September 2015 September 1, 2015	Branch Manager - Wolter Monginsidi Branch	42	S1	Institut Teknologi Bandung
Rani Savitri Azhari	1 Juni 2021 June 1, 2021	Branch Manager - Kupang Branch	46	S1	Universitas Nusa Cendana
Retno Ferna Astuti	9 Mei 2022 May 9, 2022	Branch Manager - Dewi Sartika Branch	50	S1	STMI Depperindag RI
Ribut Budi Putro Utomo	10 Agustus 2003 August 10, 2003	Branch Manager - Palangkaraya Branch	45	S1	Universitas Muhammadiyah Surakarta
Rifyal Fajri	18 Desember 2006 December 18, 2006	Branch Manager - Bengkulu Branch	42	S1	STT Telkom
Rista Puji Kasprianti	8 Mei 2014 May 8, 2014	Branch Manager - Malang Branch	35	S1	Universitas Negeri Malang
Rivelino Satya Nugraha	8 Januari 2024 January 8, 2024	Branch Manager - Rawamangun Branch	46	S1	Universitas Diponegoro
Riza Stiadi	1 Juli 2011 July 1, 2011	Branch Manager - Pematangsiantar Branch	37	S1	Sekolah Tinggi Teknik Harapan Medan
Rizma	13 Maret 1995 March 13, 1995	Branch Manager - Surabaya Undaan Branch	54	S1	Universitas Muhammadiyah Malang
Siti Herlina	17 September 2018 September 17, 2018	Branch Manager - Sawangan Bojongsari Branch	42	S1	Universitas Sriwijaya
Sofiwati Sanusi Limpo	7 Mei 2024 May 7, 2024	Branch Manager - Sorong Branch	44	S2	Universitas Gorontalo
Syaskowar Yuldiansyah	26 April 2006 April 26, 2006	Branch Manager - Plt. Karawang Branch	41	S1	Universitas Lampung
T. Abdullah Suherman	23 April 2004 April 23, 2004	Branch Manager - Sukabumi Branch	44	S1	Universitas Padjadjaran
Widyanti Hidayat	23 Desember 2019 December 23, 2019	Branch Manager - Bandung Branch	43	S1	Universitas Padjadjaran
Wisnu Zul Hilmy	1 Juni 2010 June 1, 2010	Branch Manager - Kudus Branch	39	S1	Universitas Islam Indonesia
Wondo Widokdo	14 November 2005 November 14, 2005	Branch Manager - Tanjung Pinang Branch	43	S1	STIE Pembangunan
Yeni Pradekawati	1 Mei 2013 May 1, 2013	Branch Manager - Plt. Cirebon Branch	41	S1	Universitas Jenderal Achmad Yani
Yeyen Djannati	26 Agustus 2006 August 26, 2006	Branch Manager - Pancoran Branch	44	S1	Universitas Muslim Indonesia

Statistik Karyawan

Employee Statistics

Hingga 31 Desember 2024, jumlah karyawan Bank Muamalat Indonesia tercatat sebanyak 2.508, dengan rincian sebagai berikut:

Until 31 December 2024, the number of employees of Bank Muamalat Indonesia was recorded at 2,508, with details as follows:

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN MASA KERJA
Number of Employees Based on Year of Service

Masa Kerja	Jumlah Karyawan per 31 Desember Number of Employees as of December 31						Length of Service
	2024	%	2023	%	2022	%	
<1 tahun	193	8%	368	14%	283	11%	<1 year
1-2 tahun	470	19%	283	11%	161	6%	1-2 years
3-5 tahun	180	7%	254	10%	371	15%	3-5 years
6-10 tahun	372	15%	436	17%	574	23%	6-10 years
>10 tahun	1.293	52%	1.256	48%	1.091	44%	>10 years
Jumlah	2.508	100%	2.597	100%	2.480	100%	Total

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN GENDER
Number of Employees by Gender

Gender	Jumlah Karyawan per 31 Desember Number of Employees as of December 31						Gender
	2024	%	2023	%	2022	%	
Laki-laki	1.514	60%	1.574	61%	1.523	61%	Male
Perempuan	994	40%	1.023	39%	957	39%	Female
Jumlah	2.508	100%	2.597	100%	2.480	100%	Total

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN LOKASI KERJA
Number of Employees by Work Location

Lokasi Kerja	Jumlah Karyawan per 31 Desember Number of Employees as of December 31						Work Location
	2024	%	2023	%	2022	%	
Sumatera	307	12%	317	12%	316	13%	Sumatra
Jawa	1.834	73%	1.888	73%	1.766	71%	Jawa
Kalimantan	93	4%	101	4%	104	4%	Kalimantan
Bali	10	0%	11	0%	11	0%	Bali
Nusa Tenggara	21	1%	21	1%	20	1%	Nusa Tenggara
Maluku	23	1%	24	1%	25	1%	Maluku
Sulawesi	172	7%	179	7%	180	7%	Sulawesi
Papua	24	1%	30	1%	32	1%	Papua
Malaysia	24	1%	26	1%	26	1%	Malaysia
Jumlah	2.508	100%	2.597	100%	2.480	100%	Total

**JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KARYAWAN**

Number of Employees by Employment Status

Status Karyawan	Jumlah Karyawan per 31 Desember Number of Employees as of December 31						Employee Status
	2024	%	2023	%	2022	%	
Permanen	2.413	96%	2.487	96%	2.426	98%	Permanent
Kontrak	95	4%	110	4%	54	2%	Contract
Jumlah	2.508	100%	2.597	100%	2.480	100%	Total

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN USIA

Number of Employees by Age

Usia	Jumlah Karyawan per 31 Desember Number of Employees as of December 31						Age
	2024	%	2023	%	2022	%	
Sampai dengan 30 tahun	331	13%	340	13%	237	10%	Up to 30 years old
31–40 tahun	1.221	49%	1.403	54%	1.500	60%	31-40 years old
di atas 40 tahun	956	38%	854	33%	743	30%	above 40 years old
Jumlah	2.508	100%	2.597	100%	2.480	100%	Total

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI

Number of Employees by Organization Level

Level Organisasi	Jumlah Karyawan per 31 Desember Number of Employees as of December 31						Level of Organization
	2024	%	2023	%	2022	%	
Corporate Leadership	9	0%	15	1%	14	1%	Corporate Leadership
Senior Management	41	2%	39	2%	36	1%	Senior Management
Middle Management/ Professional	194	8%	197	8%	192	8%	Middle Management/ Professional
Junior Management/ Professional	1.088	43%	1.140	44%	1.068	43%	Junior Management/ Professional
Staff	1.173	47%	1.203	46%	1.165	47%	Staff
Non Banking Staff	3	0%	3	0%	5	0%	Non Banking Staff
Jumlah	2.508	100%	2.597	100%	2.480	100%	Total

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Number of Employees by Education Level

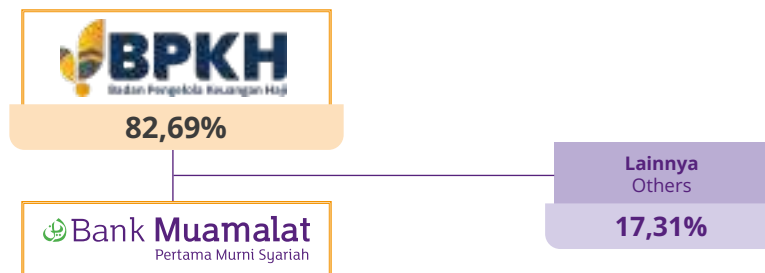
Tingkat Pendidikan	Jumlah Karyawan per 31 Desember Number of Employees as of December 31						Education Level
	2024	%	2023	%	2022	%	
Pasca Sarjana	168	7%	143	6%	137	6%	Postgraduate
Sarjana	2.110	84%	2.200	85%	2.141	86%	Undergraduate
Diploma	209	8%	233	9%	189	8%	Diploma
Di Bawah Diploma	21	1%	21	1%	13	1%	Below Diploma
Jumlah	2.508	100%	2.597	100%	2.480	100%	Total

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Information on Major and Controlling Shareholders

Pemegang saham utama sekaligus pengendali Bank Muamalat Indonesia adalah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dengan kepemilikan saham pada tahun 2024 mencapai 82,69%.

The major and controlling shareholder of Bank Muamalat Indonesia is the Hajj Financial Management Agency (BPKH), with share ownership as of the year 2024 of 82.69%.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)

Hajj Financial Management Agency (BPKH)

Nama Name	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	Hajj Financial Management Agency (BPKH)
Tahun Pendirian Year of Establishment	2017	
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis for Establishment	• Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji • Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji • Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	• Law of the Republic of Indonesia No. 34 of 2014 concerning Hajj Financial Management • Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 110 of 2017 on the Hajj Financial Management Agency • Government Regulation No. 5 of 2018 on the Implementation of Law No. 34 of 2014 on Hajj Financial Management
Bidang Usaha Line of Business	Pengelolaan Keuangan Haji	Hajj Financial Management
Alamat Address	Muamalat Tower Lantai 14 - 19, Jl. Prof Dr Satrio, Kav. 18, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940	
Visi dan Misi Vision and Mission		
Visi Vision	BPKH berkomitmen menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat	BPKH is committed to becoming a trusted financial management institution that provides optimal benefit value for pilgrims and the benefit of the people.
Misi Mission	• Membangun kepercayaan melalui pengelolaan sistem keuangan yang transparan dan modern • Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas BPIH melalui kerja sama strategis • Melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian dan profesionalitas • Menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan SDM yang berintegritas dan profesional • Memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat	• Building trust through the management of transparent and modern financial system • Improve efficiency and rationality of BPIH through strategic cooperation • Investing in optimal returns with sharia principles and considering aspects of security, prudence and professionalism. • Creating a comprehensive and accountable governance and work system by developing human resources with integrity and professionalism. • Providing benefits to improve the welfare of the people
Struktur Organisasi Organizational Structure	Berdasarkan Perpres No. 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji, organ BPKH terdiri atas Badan Pelaksana yang paling sedikit terdiri atas lima orang anggota yang berasal dari unsur profesional dan Dewan Pengawas yang terdiri atas tujuh orang anggota yang berasal dari unsur profesional dan pemerintah	Based on Presidential Regulation No. 110/2017 on the Hajj Financial Management Agency, the BPKH organ consists of a Governing Board consisting of at least five members from professional elements and a Supervisory Board consisting of seven members from professional and government elements.



KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Hingga diterbitkannya laporan ini, komposisi kepemilikan saham PT Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham Shareholder Name	Status	Jumlah Saham (Lembar) Number of Shares (pages)	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)
Badan Pengelola Keuangan Haji Hajj Financial Management Agency	Lokal Local	27.573.880.629	82,69
Ir. Andre Mirza Hartawan, MBA	Lokal Local	1.731.033.333	5,19
Apliani	Lokal Local	826.850.464	2,48
Reza Rhenaldi Syaiful	Lokal Local	729.056.793	2,19
Dewi Monita	Lokal Local	728.150.000	2,18
Islamic Development Bank	Asing Foreign	680.513.489	2,04
Masyarakat lainnya (masing-masing <2%) Other public (<2% each)	Lokal Local	1.075.676.254	3,23
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Total Issued and Fully Paid-up Capital		33.345.160.962	100,00
Saham dalam Portepel Shares in Portepel		22.103.739.589	
Total		55.448.900.551	

Kepemilikan saham BPKH mengalami perubahan +0,04% dari sebelumnya 82,65% menjadi 82,69%.

Perubahan kepemilikan saham terjadi pada tanggal 3 Desember 2024 setelah dilakukannya pengalihan saham-saham jemaah haji tahun 1992-1994 ("Saham Haji") yang tidak diketahui keberadaannya sejumlah 12.507.733 lembar saham seri A dari rekening escrow kepada BPKH, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom.

Pengalihan Saham Haji kepada BPKH dilakukan sebagai pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 818/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL. Adapun BPKH sebagai pengelola keuangan haji sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji.

Perubahan komposisi kepemilikan saham tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan POJK 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.

COMPOSITION OF SHAREHOLDERS

Up to the publication of this report, the composition of shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk is as follows:

BPKH's share ownership changed by +0.04% from 82.65% to 82.69%.

The change in share ownership occurred on December 3, 2024 after the transfer of shares of Hajj pilgrims in 1992-1994 ("Hajj Shares") whose whereabouts were unknown, totaling 12,507,733 series A shares from the escrow account to BPKH, which was carried out by the Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom.

The transfer of Hajj Shares to BPKH was carried out as the implementation of the Stipulation of the South Jakarta District Court number 818/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL. BPKH is the financial manager of Hajj in accordance with the mandate of Law Number 34 of 2014 concerning Hajj Financial Management and Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 110 of 2017 concerning the Hajj Financial Management Agency.

Changes in the composition of share ownership have been reported to the Financial Services Authority in accordance with the provisions of POJK 4 of 2024 concerning Reports on Ownership or Any Changes in Share Ownership of Public Companies and Activities of Pledging Shares of Public Companies.

KELOMPOK PEMEGANG SAHAM 5% DAN/ATAU LEBIH

Shareholders Group with 5% and/or More

Nama Pemegang Saham Shareholder Name	Jumlah Kepemilikan Number of Ownership	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)
Badan Pengelola Keuangan Haji Haji Financial Management Agency	27.573.880.629	82,69
Ir. Andre Mirza Hartawan, MBA	1.731.033.333	5,19

KELOMPOK PEMEGANG SAHAM KURANG DARI 5%

Shareholders Group with Less than 5%

Nama Pemegang Saham Shareholder Name	Status	Jumlah Saham (Lembar) Number of Shares (pages)	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)
Apliani	Lokal Local	826.850.464	2,48
Reza Rhenaldi Syaiful	Lokal Local	729.056.793	2,19
Dewi Monita	Lokal Local	728.150.000	2,18
Islamic Development Bank	Asing Foreign	680.513.489	2,04
Masyarakat lainnya (masing-masing <2%) Other public (<2% each)	Lokal Local	1.075.676.254	3,23

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SECARA LANGSUNG

Direct Shares Ownership of the Board Commissioners and the Board of Directors

Pemegang Saham Shareholders	Jabatan Position	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Sapto Amal Damandari	Komisaris Utama Independen Independent President Commissioner	-	-
Sartono	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
Ir. Andre Mirza Hartawan, MBA	Komisaris Independen Independent Commissioner	1.731.033.333	5,19
Direksi Board of Directors			
Imam Teguh Saptono	Direktur Utama President Director	-	-
Karno	Direktur Kepatuhan Compliance Director	-	-
Kukuh Rahardjo ^{*)}	Direktur Director	-	-

^{*)} Efektif tidak menjabat pertanggal 25 Maret 2025.
Effective from resignation on March 25, 2025.



Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Secara Tidak Langsung

Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak ada yang memiliki saham BMI secara tidak langsung.

Indirect Share Ownership of Board of Commissioners and Directors

None of the Bank's Board of Commissioners and Directors own BMI shares indirectly.

PEMEGANG SAHAM BERDASARKAN KLASIFIKASI (DATA PER 31 DESEMBER 2024)

Shareholders Based on Classification (Data as of December 31, 2024)

Kelompok	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Kepemilikan (Lembar) Total Ownership (Shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Group
Individu dan Institusi Lokal		Individuals and Local Institutions		
Individu	338.128	4.850.940.923	14,55	Individuals
Institusi				Institutions
Pemerintah Daerah	492	3.040.410	0,01	Local Government
Koperasi	769	98.814.764	0,30	Cooperatives
Yayasan	110	57.396.961	0,17	Foundation
Dana Pensiun	15	57.035.037	0,17	Pension Fund
Asuransi	6	7.459.870	0,02	Insurance
Bank	14	4.877.465	0,01	Bank
Perseroan Terbatas	220	9.937.503	0,03	Limited Liability Company
Badan Usaha Lainnya	114	27.575.144.540	82,69	Other Business Entities
Jumlah Saham	339.868	32.664.647.473	97,96	Total Shares
Individu dan Institusi Asing		Foreign Individuals and Institutions		
Individu	-	-	-	Individual
Institusi	1	680.513.489	2,04	Institutions
Jumlah Saham	1	680.513.489	2,04	Total Shares
JUMLAH	339.869	33.345.160.962	100,00	TOTAL

Kronologi Pencatatan Saham

Share Listing Chronology

Berikut adalah kronologi penerbitan/pencatatan saham PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Following is the chronology of the issuance/listing of shares of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Tahun Year	Aksi Korporasi Corporate Action	Jumlah Saham Baru Number of New Shares	Nilai Nominal Saham (Rp) Nominal Value of Shares (Rp)	Tanggal Efektif Effective Date	Bursa Efek Stock Exchange
1993	Penawaran Umum Saham Perdana Initial Public Offering	2.489.090	1.000	28 Oktober 1993 October 28, 1993	Non Listed
1998	Penawaran Umum Terbatas I Seri Saham B dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Limited Public Offering I Series B Shares with Pre-emptive Rights	172.504.936	1.000	19 Juni 1998 June 19, 1998	Non Listed
2002	Penawaran Umum Terbatas II Seri Saham C dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Limited Public Offering II Series C Shares with Pre-emptive Rights	208.727.863	500	15 November 2002 November 15, 2002	Non Listed
2005	Penawaran Umum Terbatas III Seri Saham C dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Limited Public Offering III Series C Shares with Pre-emptive Rights	446.194.051	500	26 April 2005 April 26, 2005	Non Listed
2010	Penawaran Umum Terbatas IV Seri Saham C dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Limited Public Offering IV Series C Shares with Pre-emptive Rights	820.251.749	500	28 Juni 2010 June 28, 2010	Non Listed
2011	Pembagian Saham Bonus (Rasio 15 :1) Bonus Share Distribution (15:1 Ratio)	78.352.338	500	26 Mei 2011 May 26, 2011	Non Listed
2012	Pemecahan Nilai Saham/Stock Split - Saham Seri A dan B (Rp1.000) menjadi Saham Seri A (Rp200) - Saham Seri C (Rp500) menjadi Saham Seri B (Rp100) Stock Split - Series A and B Shares (Rp1,000) into Series A Shares (Rp200) - Series C Shares (Rp500) into Series B Shares (Rp100)	7.391.784.490	Saham Seri A Rp200 Saham Seri B Rp100 Series A Shares Rp200 Series B Shares Rp100	21 November 2012 November 21, 2012	Non Listed
2013	Penawaran Umum Terbatas V Saham Seri B dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Limited Public Offering V Series B Shares with Pre-emptive Rights	2.815.917.885	100	7 November 2013 November 7, 2013	Non Listed
2021	Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI (PMHMETD VI) Limited Public Offering in the context of Capital Increase with Pre-emptive Rights VI (PMHMETD VI)	39.810.039.107	30	16 Desember 2021 December 16, 2021	Non Listed
2023	Penggabungan Nilai Saham/Reverse Stock Split - Saham Seri A (Rp200) menjadi (Rp300) - Saham Seri B (Rp100) menjadi (Rp150) - Saham Seri C (Rp30) menjadi (Rp45) Reverse Stock Split - Series A shares (Rp200) to (Rp300) - Series B shares (Rp100) to (Rp150) - Series C shares (Rp30) to (Rp45)	33.345.160.962	Saham Seri A Rp300 Saham Seri B Rp150 Saham Seri C Rp45 Series A Shares Rp300 Series B Shares Rp150 Series C Shares Rp45	20 November 2023 November 20, 2023	Non Listed



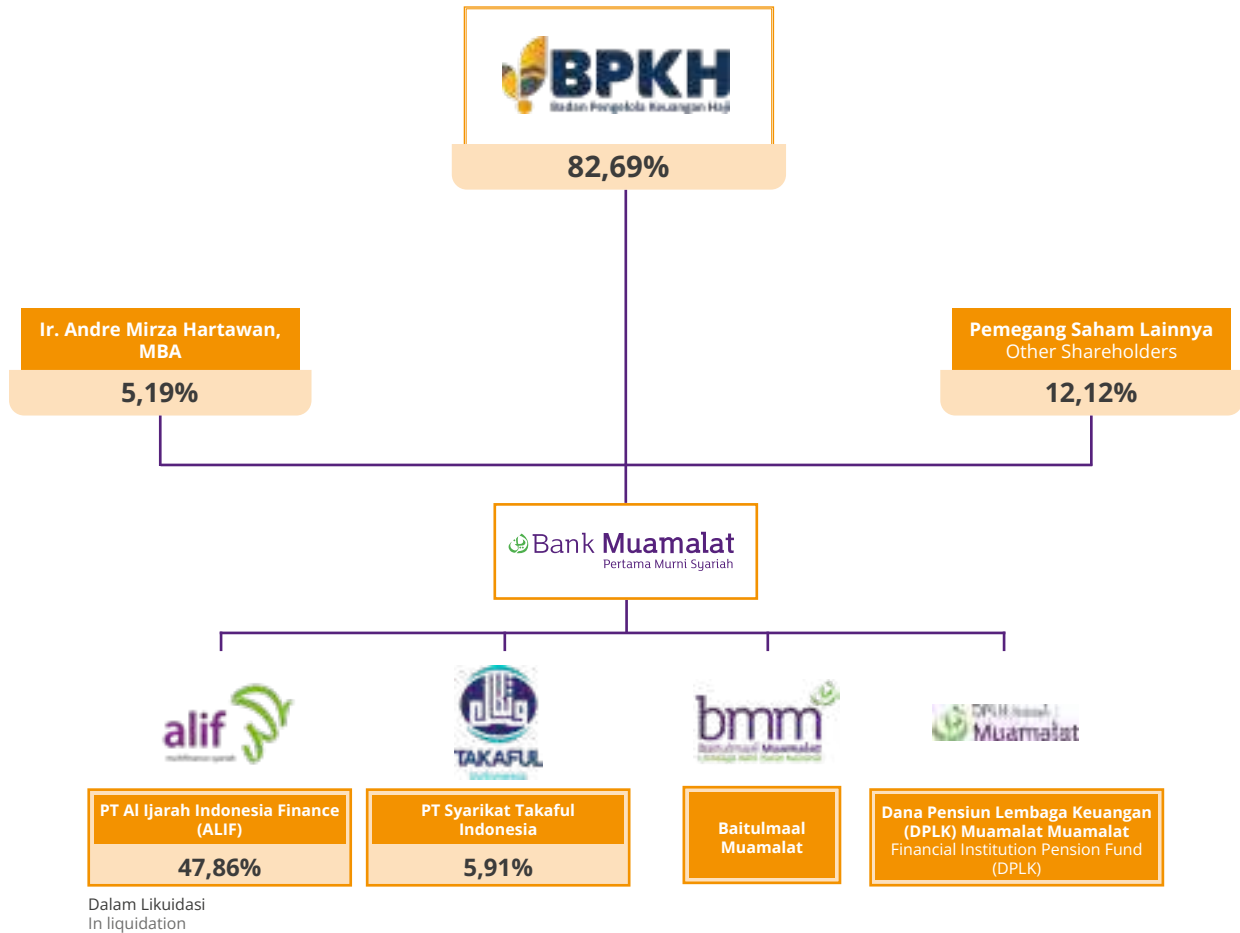
Kronologi Pencatatan Efek Lainnya

Other Securities Listing Chronology

Nama Efek Name of Securities	Tahun Penerbitan Efek Year of Issuance	Nilai Pokok (Rp) Principal Value (Rp)	Nisbah Pemegang Efek (%) Shareholder Ratio (%)	Jatuh Tempo Maturity Date	Peringkat Efek Securities Rating
Sukuk Subordinasi Mudharabah 2022 Mudharabah Subordinated Sukuk 2022	2022	2.000.000.000.000	58,64	15 Maret 2032 March 15, 2032	Non-rated
Sukuk Mudharabah 2018 Sukuk Mudharabah 2018	2018	1.600.000.000.000	-	29 Juni 2038 June 29, 2038	Non-rated
Sukuk Mudharabah Bank Muamalat Indonesia 2021 Sukuk Mudharabah Bank Muamalat Indonesia 2021	2021	2.440.856.000.000	50,72	15 November 2041 November 15, 2041	idA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) idA+ from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Struktur Grup Perusahaan

Company Group Structure





Profil Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Profile of Subsidiaries and Associates

Bank Muamalat Indonesia memiliki 4 (empat) entitas anak, yakni PT Al Ijarah Indonesia Finance/ALIF (Dalam Likuidasi), Baitulmaal Muamalat, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah Muamalat, dan PT Syarikat Takaful Indonesia. Berikut ialah profil singkat dari masing-masing entitas anak tersebut:

1. PT Al Ijarah Indonesia Finance/ALIF (Dalam Likuidasi)

ALIF didirikan pada bulan Desember 2006 di Jakarta, ALIF memulai operasionalnya pada tanggal 27 Agustus 2007. Lembaga ini berdiri dengan modal awal yang ditempatkan oleh tiga lembaga keuangan terkemuka Indonesia dan Timur Tengah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Boubyan Kuwait, Alpha Lease & Finance Holding Company.

ALIF merupakan perusahaan keuangan syariah yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan keuangan masyarakat Indonesia.

Adapun saat ini pemegang saham utama dari PT Al Ijarah Indonesia Finance (Dalam Likuidasi)/ALIF telah berubah dengan kepemilikan mayoritas oleh pemegang saham dalam negeri.

2. BAITULMAAL MUAMALAT (BMM)

(lisensi sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dan Nazir Waqaf)

Sejak tahun 1994, Bank Muamalat Indonesia telah membentuk unit pengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL). Pendiriannya merupakan inisiatif dengan dasar tanggung jawab Bank Muamalat Indonesia terhadap pemberdayaan ekonomi mikro. Hal ini kemudian semakin berkembang dan diresmikan sebagai Yayasan Baitulmaal Muamalat pada tanggal 16 Juni 2000.

Sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan lembaga amil zakat yang independen dan profesional serta UU No. 38 tahun 1999, pada tanggal 22 Desember 2000 badan hukum Yayasan Baitulmaal Muamalat dikukuhkan sebagai lembaga amil zakat nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia, dan terus mendapatkan izin perpanjangan periodik lima tahunan.

Bank Muamalat Jakarta has 4 (four) subsidiaries, namely Jakarta Al Ijarah Jakarta Finance/ALIF (Under Liquidation), Baitulmaal Muamalat, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah Muamalat, and Jakarta Syarikat Takaful Jakarta. Here are brief profiles of each of these subsidiary entities:

1. Jakarta Al Ijarah Jakarta Finance/ALIF (Under Liquidation)

ALIF was established in December 2006 in Jakarta, commenced its operations on August 27, 2007. The institution was founded with initial capital provided by three leading Jakarta institutions from Jakarta and the Middle East, namely Bank Muamalat Jakarta, Bank Boubyan Kuwait, and Alpha Lease & Finance Holding Company.

ALIF is a Sharia Jakarta company established to meet the Jakarta financing needs of the Indonesian community.

Currently, the major shareholders of Jakarta Al Ijarah Jakarta Finance (Under Liquidation)/ALIF have changed with the majority ownership by Jakarta shareholders.

2. BAITULMAAL MUAMALAT (BMM)

(licensed as the National Zakat Amil Institution and Waqf Trustee)

Since 1994, Bank Muamalat Jakarta has established a unit for managing Zakat, Infak, and Sedekah (ZIS) funds, as well as other religious social funds (DSKL). Its establishment was initiated based on Bank Muamalat Jakarta's responsibility towards the empowerment of microeconomics. This initiative further evolved and was officially inaugurated as the Baitulmaal Muamalat Foundation on Jakarta 16, 2000.

In line with the demands and needs of society for independent and professional zakat amil institutions, as well as Law Jakarta. 38 of 1999, on December 22, 2000, the legal entity of the Baitulmaal Muamalat Foundation was confirmed as the national zakat amil institution by the Minister of Religious Affairs of the Republic of Jakarta and continues to receive periodic extension permits every five years.

Selanjutnya BMM dikukuhkan sebagai Lembaga Nazhir Waqaf berdasarkan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Badan Waqaf Indonesia No. 3.3.0000.6 tertanggal 13 Nov 2012, dan terus mendapatkan izin perpanjangan dengan periode lima tahunan.

Baitulmaal Muamalat memiliki 3 (tiga) aspek fokus kegiatan, yakni:

- Mengelola dana-dana sosial sesuai prinsip syariah Islam.
- Mengembangkan komunitas yang mandiri, tumbuh dan berkarakter.
- Menjadi mediator pengembangan usaha dan lembaga keuangan mikro syariah.

Kegiatan-kegiatan tersebut dijalankan dengan memfungsikan dan memanfaatkan jaringan kantor layanan Bank Muamalat Jakarta yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta dan melalui tujuh kantor perwakilan wilayah Baitulmaal Muamalat serta satu kantor pusat di Jakarta.

Baitulmaal Muamalat telah mendapat kepercayaan dari badan internasional seperti Islamic Development Bank dan menjadi model pemberdayaan di Jakarta yang menjalankan fungsi *Corporate Social Responsibility*.

3. DPLK SYARIAH MUAMALAT

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah Muamalat didirikan oleh Jakarta Bank Muamalat Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan Nomor KEP 485-KM.17/1997 tanggal 12 September 1997 dan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) terakhir dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Keputusannya Nomor KEP-22/NB.21/2022 tanggal 10 Mei 2022 dengan Program pensiun yang dilaksanakan adalah Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan Program Pensiun Untuk Kompensasi Pasca Kerja (PPUKP).

DPLK Syariah Muamalat menawarkan kemudahan perencanaan keuangan masa depan bagi perusahaan, karyawan maupun pekerja mandiri. Pengelolaan dana peserta dilakukan secara profesional berdasarkan pilihan paket investasi yang ditetapkan langsung oleh peserta sebagai investasi jangka panjang. Dengan begitu, siapapun bisa mendapat jaminan kesinambungan penghasilan selama masa pensiun di kemudian hari.

Furthermore, BMM was confirmed as a Waqf Trustee Institution based on the Registration Certificate of the Indonesian Waqf Board Nazhir Institution Jakarta. 3.3.0000.6 dated November 13, 2012, and continues to receive extension permits with five-year periods.

Baitulmaal Muamalat focuses on three aspects of activities:

- Managing social funds in accordance with Islamic Sharia principles.
- Developing independent, growing, and character-building communities.
- Acting as a mediator for the development of business and Sharia microfinance institutions.

These activities are carried out by utilizing the service office network of Bank Muamalat Jakarta spread throughout Jakarta and through seven regional representative offices of Baitulmaal Muamalat, as well as one head office in Jakarta.

Baitulmaal Muamalat has gained trust from international bodies such as the Islamic Development Bank and serves as a model for empowerment in Indonesia that executes Corporate Social Responsibility functions.

3. DPLK SYARIAH MUAMALAT

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah Muamalat was established by PT Bank Muamalat Indonesia and has been approved by the Minister of Finance with Decree No. KEP 485-KM.17/1997 dated September 12, 1997, and the last amendment approval of the Pension Fund Regulation (PDP) from the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) with Decree No. KEP-22/NB.21/2022 dated May 10, 2022. The pension programs implemented are the Defined Contribution Pension Program (PPIP) and the Post-Employment Compensation Pension Program (PPUKP).

DPLK Syariah Muamalat offers convenience in financial planning for the future for companies, employees, and self-employed workers. Participant fund management is carried out professionally based on investment package choices determined directly by participants as long-term investments. Thus, anyone can secure income continuity during retirement in the future.



Layanan DPLK Muamalat mencakup beragam pilihan produk pensiun baik bagi perorangan maupun perusahaan, pengelolaan dana secara syariah, berbagai macam paket investasi dengan hasil pengembangan yang kompetitif dan bebas pajak, fleksibel, jaringan luas dan akses 24 jam. Dengan mengikutsertakan diri sebagai peserta DPLK Syariah Muamalat, individu/pekerja bisa mempersiapkan keberlanjutan penghasilan saat masa pensiun atau hari tua dan bagi pemberi kerja/perusahaan dapat mempersiapkan pemenuhan kewajiban imbalan pasca kerja sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku dengan tidak dibebankan Pajak Penghasilan (PPH 25).

DPLK Muamalat services include various pension product options for individuals and companies, Sharia-compliant fund management, various investment packages with competitive and tax-free development returns, flexibility, extensive networks, and 24-hour access. By participating in DPLK Syariah Muamalat, individuals/workers can prepare for income sustainability during retirement or old age, and for employers/companies, they can prepare for the fulfillment of post-employment benefits obligations in accordance with prevailing labor regulations without being burdened by Income Tax (PPH 25).

4. PT SYARIKAT TAKAFUL INDONESIA

Atas prakarsa dari Tim Pembentukan Asuransi Takaful Jakarta (TEPATI) yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Jakarta (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Jakarta Bank Muamalat Jakarta Tbk, Syarikat Takaful Malaysia Bhd. (STM), Jakarta Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha muslim Jakarta, Jakarta Syarikat Takaful Jakarta berdiri pada 24 Februari 1994.

Melalui dua perusahaan operasionalnya, yaitu Jakarta Asuransi Takaful Keluarga dan Jakarta Asuransi Takaful Umum, Perusahaan melayani jasa asuransi dan perencanaan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah untuk masyarakat Jakarta.

Pada tahun 2018 saham STI telah dialihkan ke Koperasi Simpan Pinjam Jasa sehingga dengan demikian perusahaan operasional STI hanya Jakarta Asuransi Takaful Keluarga.

4. PT SYARIKAT TAKAFUL INDONESIA

On the initiative of the Indonesian Muslim Intellectuals Association (ICMI) through the Abdi Bangsa Foundation, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Syarikat Takaful Malaysia Bhd. (STM), PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, and several Indonesian Muslim entrepreneurs, PT Syarikat Takaful Indonesia was established on February 24, 1994.

Through its two operational companies, namely PT Asuransi Takaful Keluarga and PT Asuransi Takaful Umum, the company provides insurance services and financial planning based on Sharia principles for the Indonesian community.

In 2018, STI shares were transferred to the Cooperative Savings and Loan Service, thus making the operational company of STI only PT Asuransi Takaful Keluarga.

Daftar Entitas Anak dan Asosiasi

List of Subsidiaries and Associates

Hingga berakhirnya tahun buku 2024, Bank memiliki 4 (empat) entitas anak dan asosiasi dengan uraian sebagai berikut.

Up to the end of the 2024 financial year, the Bank has 4 (four) subsidiaries and associates with the following description.

Nama Name	Kegiatan Usaha Line of Business	Tahun Pendirian Year of Establishment	Domisili Domicile	Status Operasi Status of Operation	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)	Aset 2024 (Rp Juta) Asset 2024 (Rp Million)	Alamat Address
PT Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF)	Pembiayaan Financing	2006	Jakarta	Beroperasi (Dalam Likuidasi) In Operation (In Liquidation)	47,86	18.591	Menara Palma Lt. 25, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6 Kuningan, Jakarta 12950 Indonesia
Yayasan Baitulmaal Muamalat (BMM)	Dana Sosial Social Fund	2000	Jakarta	Beroperasi In Operation		28.126	Ruko Mitra Matraman Blok A1 No. 27 Jl. Matraman Raya, RT 1/RW 4 Kb. Manggis, Matraman, Jakarta 13150 Indonesia
DPLK Syariah Muamalat	Pengelolaan Dana Pensiun Pension Fund Management	1997	Jakarta	Beroperasi In Operation	100% didirikan oleh Bank Muamalat Indonesia established by Bank Muamalat Indonesia	1.648.397	Gedung Muamalat Tower Lt. 10 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18. Karet Kuningan Jakarta 12940 Indonesia
PT Syarikat Takaful Indonesia	Asuransi Syariah Sharia Insurance	1994	Jakarta	Beroperasi In Operation	5,91	1.809.079	Graha Takaful Indonesia Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100 Jakarta 12790 Indonesia



Kantor Akuntan Publik

Public Accounting Office

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Menara Kuningan Lt. 11
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 5, Jakarta 12940
Tel.: (021) 5289 5000
Faks.: (021) 5299 1199
Jasa yang Diberikan:
Audit Laporan Keuangan: Rp1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% dan Biaya Operasional Lainnya
Jasa Lain: Tidak ada

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Kuningan Tower 11th Fl.
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 5, Jakarta 12940
Tel.: (021) 5289 5000
Fax.: (021) 5299 1199
Services Provided:
Audit of Financial Statements Audit: Rp1.300.000.000 (one billion three hundred million rupiah) not including Added Value Tax (PPN) of 11% and Other Operational Expenses
Other Services: none

Nama dan Alamat Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal

Name and Address of Capital Market Supporting Institutions and Professionals

BIRO ADMINISTRASI EFEK

Share Registrar

Nama Name	PT Datindo Entrycom	
Alamat Address	Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lt. 2 Jakarta 10120	Jl. Hayam Wuruk No. 28, 2 nd Floor Jakarta 10120
Tlp & Faks Phone & Fax	Telp. (021) 350 8077 Faks. (021) 350 8078	Tel. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078
Jasa yang diberikan Services provided	Biaya Jasa Administrasi Saham	Share Registrar Service Fee
Biaya Fee	Rp199.800.000 per tahun (termasuk PPN 11%)	Rp199,800,000 per year (including 11% VAT)
Jasa yang diberikan Services provided	Jasa Profesi Penunjang RUPS	GMS Support Professional Services
Biaya Fee	Rp34.965.000 (PPN11%)	Rp34,965,000 (11% VAT)
Periode Penugasan Period of Assignment	2013-sekarang	2013-present

KUSTODIAN

Custodian

Nama Name	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	
Alamat Address	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, 5 th Fl. Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Tlp & Faks Phone & Fax	Telp. (021) 515 2855 Faks. (021) 5299 1199	Tel. (021) 515 2855 Fax. (021) 5299 1199
Jasa yang diberikan Services provided	Kustodian MTN Syariah Subordinasi I BMI	Custodian of MTN Syariah Subordinated I BMI
Biaya Fee	Rp10.000.000 per tahun (0,01% dari nominal surat berharga yang diterbitkan)	Rp10,000,000 per year (0.01% of the nominal value of the securities issued)
Periode Penugasan Period of Assignment	2017-sekarang	2017-present

NOTARIS

Notary

Nama Name	Ashoya Ratam S.H., Mkn.	
Alamat Address	Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12180	Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru - South Jakarta 12180
Tlp & Faks Phone & Fax	Telp. (021) 2938 0800 Faks. (021) 2938 0801	Tel. (021) 2938 0800 Fax. (021) 2938 0801
Jasa yang diberikan Services provided	Pengurusan akta notarial Bank	Administration of the Bank's notarial deed
Periode Penugasan Period of Assignment	Tahun Buku 2023	Fiscal Year 2023

WALI AMANAT

Trustee

Nama Name	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
Alamat Address	Gedung BRI II Lt. 30 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210	Gedung BRI II 30 th Fl. Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210
Tlp & Faks Phone & Fax	Telp. (021) 575 8130; 575 2362 Faks. (021) 575 2444	Tel. (021) 575 8130; 575 2362 Fax. (021) 575 2444
Jasa yang diberikan Services provided	Agen Pemantau/Wali Amanat	Monitoring Agent/Trustee

LEMBAGA PEMERINGKAT

Rating Agency

Nama Name	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)	
Alamat Address	Panin Tower Senayan City, Lt. 17, Jl. Asia Afrika Kav. 19, Jakarta 10270	Panin Tower Senayan City, 17 th Fl., Jl. Asia Afrika Kav. 19, Jakarta 10270
Tlp & Faks Phone & Fax	Telp. (021) 7278-2380 Faks. (021) 7278-2370	Tel. (021) 7278-2380 Fax. (021) 7278-2370
Jasa yang diberikan Services provided	Pemantauan Pemeringkat Bank Muamalat periode tahun 2023 atas Sukuk Mudharabah 2021 dan <i>General Obligation</i>	Monitoring of Bank Muamalat Rating for the period of 2023 on Sukuk Mudharabah 2021 and General Obligation
Biaya Fee	Rp194.250.000 (termasuk PPN11%)	Rp194,250,000 (including VAT11%)



KONSULTAN HUKUM

Legal Consultant

Nama Name	IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD – BALI OFFICE	
Alamat Address	District 8 SCBD, Prosperity Tower Lantai 19F, Jl. Senopati Dalam 8B, Jakarta 12190 dan Nakula Square, Jl. Nakula No. 99x, Seminyak, Kuta, Badung, Bali 80361	District 8 SCBD, Prosperity Tower 19 th F Fl., Jl. Senopati Dalam 8B, Jakarta 12190 and Nakula Square, Jl. Nakula No. 99x, Seminyak, Kuta, Badung, Bali 80361
Tlp & Faks Phone & Fax	Telp. (021) 5011 2006	Tel. (021) 5011 2006
Jasa yang diberikan Services provided	<i>Retainer Basis</i> , pelayanan jasa hukum atas berbagai permasalahan hukum yang dihadapi Perseroan (tidak termasuk penanganan perkara litigasi) sebagaimana disampaikan dan/atau dimintakan.	Retainer Basis, legal services for various legal issues faced by the Company (excluding the handling of litigation cases) as submitted and/or requested.
Biaya Fee	Rp50.000.000,- per bulan	Rp50,000,000 per month
Periode Penugasan Period of Assignment	21 Januari 2023-21 Januari 2024	January 21, 2023-January 21, 2024

Nama Name	Makes & Partners Law Firm	
Alamat Address	Menara Batavia, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220	Menara Batavia, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin, Central Jakarta 10220
Tlp & Faks Phone & Fax	Telp. (021) 5747181 Faks. (021) 5747180	Tel. (021) 5747181 Fax. (021) 5747180
Jasa yang diberikan Services provided	Melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada konsultan hukum selama periode aksi korporasi bank muamalat tahun 2023	Conduct a legal examination of the facts regarding the Company submitted by the Company to the legal consultant during the corporate action period of bank muamalat in 2023
Periode Penugasan Period of Assignment	2023	2023



Keanggotaan Asosiasi

Membership in Associations

No.	Asosiasi Association	Jenis Keanggotaan Type of Membership
1.	Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) National Bank Association (PERBANAS)	Anggota Member
2.	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Indonesia Payment Systems Association (ASPI)	Anggota Member
3.	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) Banking Compliance Directors Communication Forum (FKDKP)	Anggota Member
4.	Forum Komunikasi Direktur Operasional Perbankan (FKDOP) Bankin Operation Directors Communication Forum (FKDOP)	Anggota Member
5.	Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) Indonesia Sustainable Finance Initiative (IKBI)	Anggota Member
6.	Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) Indonesia Sharia Banks Association (ASBISINDO)	Anggota Member
7.	Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)	Anggota Member
8.	Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) National Sharia Council-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI)	Anggota Member
9.	Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sharia Economic Community (MES)	Anggota Member
10.	Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Indonesia Muslim Scholars Association (ICMI)	Anggota Member
11.	Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) Indonesian Sharia Fintech Association (AFSI)	Anggota Member
12.	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) Alternative Institution for Dispute Resolution in the Financial Services Sector 9LAPS-SJK)	Anggota Member
13.	Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Indonesian Bankers Association (IBI)	Anggota Member
14.	Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA) Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA)	Anggota Member
15.	Himpunan Pedagang Surat Utang Negara (HIMDASUN) Association of Government Bond Traders (HIMDASUN)	Anggota Member
16.	Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Indonesian Issuers Association (AEI)	Anggota Member
17.	Asosiasi SWIFT Indonesia (ASWIFTINDO) Indonesian SWIFT Association (ASWIFTINDO)	Anggota Member
18.	International Chamber of Commerce (ICC) International Chamber of Commerce (ICC)	Anggota Member
19.	Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA) Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA)	Anggota Member



Informasi pada Website Perusahaan

Information on the Company's Website



Informasi yang termuat dalam *website* PT Bank Muamalat Indonesia Tbk untuk para pemangku kepentingan Bank telah memenuhi ketentuan yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. Seluruh informasi tersebut dapat diakses oleh publik melalui situs www.bankmuamalat.co.id yang tersaji dalam dua bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Alamat *website*: <https://www.bankmuamalat.co.id>

Informasi pada web BMI terdiri dari:

- Informasi umum tentang BMI terdiri dari: Profil BMI, Visi dan Misi, Informasi Manajemen, Sekretaris Perusahaan, Anak Perusahaan, Penghargaan, Kode Etik, Hubungan Investor, dan Informasi bagi Umum dan Investor.
- Informasi tentang produk dan layanan BMI bagi Consumer, Retail Banking maupun Enterprise Banking dan e-Banking
- Informasi tentang Kurs Jual Beli, Kantor Layanan dan ATM, simulasi KPR Hijrah, SalaMuamalat, Berita dan Artikel tentang BMI
- Pada informasi Karir, BMI membuka kesempatan berkarir kepada masyarakat yang ingin bergabung menjadi pekerja di BMI.

Information contained on the PT Bank Muamalat Indonesia Tbk website for stakeholders of the Bank complies with the provisions regulated by Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.04/2015 regarding the Website of Issuers or Public Companies. All such information can be accessed by the public through the website www.bankmuamalat.co.id available in two languages, Indonesian and English.

Website address: <https://www.bankmuamalat.co.id>

Information on the BMI website includes:

- General information about BMI consisting of: BMI Profile, Vision and Mission, Management Information, Corporate Secretary, Subsidiaries, Awards, Code of Ethics, Investor Relations, and Information for the General Public and Investors.
- Information about BMI products and services for Consumers, Retail Banking, Enterprise Banking, and e-Banking.
- Information about Buy-Sell Rates, Service Offices and ATMs, Hajj Savings Account (SalaMuamalat), News and Articles about BMI.
- In the Career information section, BMI offers career opportunities for individuals who want to join as employees at BMI.

**Muamalat DIN**
The New Mobile Banking

**Bank Muamalat**
Pertama Murni Syariah

DENGAN UJUNG JARI BISA SEDEKAH KE SELURUH NEGERI



UPLOAD QR

BPKH

#AyoHijrah

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Tinjauan Ekonomi Economic Overview	158
Tinjauan Industri Perbankan Banking Industry Overview	161
Tinjauan Posisi Bank Muamalat Indonesia di Industri Perbankan Overview of Bank Muamalat Indonesia in the Banking Industry	162
Tinjauan Kinerja Per Segmen Usaha Performance Overview by Business Segment	164
Tinjauan Kinerja Keuangan Financial Performance Overview	178





Tinjauan Ekonomi

Economic Overview

Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2024 masih penuh tantangan, sehingga tumbuh lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Indonesia's economic conditions in 2024 are still challenging, resulting in slower growth compared to the previous year.



5,03%

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 mencapai 5,03%.
Indonesia's economic growth in 2024 reached 5.03%.



4,48%

Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tercatat tumbuh sebesar 4,48% yoy menjadi Rp8.837 triliun.
Third-Party Funds (DPK) were recorded to have grown by 4.48% yoy to Rp8,837 trillion.



Perkembangan perekonomian dan dinamika geopolitik dunia mengalami perubahan yang cepat dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Kondisi ini dapat memengaruhi prospek perekonomian dunia ke depan karena tingginya risiko geopolitik dan berlanjutnya fragmentasi pola perdagangan dunia, bergesernya pola pertumbuhan ekonomi spasial dunia, tingginya suku bunga dan risiko utang, berubahnya pola investasi keuangan dunia, serta cepatnya digitalisasi antarnegara dan meningkatnya risiko operasional (siber).

Dinamika dan prospek perekonomian global ke depan tersebut berimplikasi besar pada perekonomian Indonesia. Karena itu, perlu diantisipasi dengan respons bauran kebijakan ekonomi nasional yang optimal.

Pada tahun 2024, perubahan dinamika geopolitik dunia yang cepat telah berdampak pada perkembangan ekonomi dan pasar keuangan. Untuk tahun 2025 diperkirakan masih akan berlanjut, bahkan di tahun-tahun berikutnya. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi global pada 2024 melambat, dari 3,3% pada 2023 menjadi 3,2% pada 2024 dan diproyeksikan tetap 3,2% pada 2025, kemudian menjadi 3,1%. Divergensi pola pertumbuhan antarnegara berlanjut dengan fragmentasi ekonomi dan perdagangan dunia yang meningkat.

Ekonomi Amerika Serikat (AS) diperkirakan tetap kuat pada 2024 dan 2025, disertai dengan risiko pemanasan ekonomi membayangi dengan membengkaknya defisit fiskal dan utang pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan kawasan Eropa akan cenderung melambat dengan masih lemahnya permintaan domestik dan kemungkinan dampak pengenaan tarif dagang yang tinggi oleh pemerintah AS.

Pertumbuhan ekonomi India, Indonesia, dan sejumlah negara *Emerging Market Economies* (EMEs) masih cukup baik, didukung oleh permintaan domestik di tengah kendala ekspor akibat perlambatan ekonomi dan fragmentasi perdagangan global. Inflasi dunia menurun, dari 6,2% pada 2023 ke 5,2% pada 2024. Namun diperkirakan masih tetap tinggi pada 2025 dan 2026, masing-masing 4,5% dan 4,2%, dengan kemungkinan terjadinya perang dagang antara AS dengan sejumlah mitra dagang utamanya, serta terganggunya mata rantai pasok perdagangan dunia.

Global economic development and geopolitical dynamics are experiencing rapid changes with a high level of uncertainties. This condition can affect the future outlook of the global economy due to high geopolitical risks and the continued fragmentation of world trade patterns, shifting patterns of world spatial economic growth, high interest rates and debt risks, changing patterns of world financial investment, as well as rapid digitalization between countries and increasing operational risks (cyber).

The dynamics and prospects of the global economy have major implications for the Indonesian economy. Therefore, it is necessary to anticipate this with an optimal national economic policy mix response.

In 2024, rapid changes in the dynamics of global geopolitics have impacted on economic development and financial markets. This is estimated to continue in 2025, even in the following years. Overall, global economic growth in 2024 slowed down, from 3.3% in 2023 to 3.2% in 2024 and is projected to remain at 3.2% in 2025, then to 3.1%. The divergence of growth patterns between countries continues with increasing fragmentation of the world economy and trade.

The United States (US) economy is expected to remain strong in 2024 and 2025, accompanied by the risk of economic overheating, looming with the swelling fiscal deficit and government debt. Economic growth in China and the European region will tend to slow down with domestic demand remaining weak and the possible impact of the imposition of high trade tariffs by the US government.

The economic growth of India, Indonesia, and several Emerging Market Economies (EMEs) is still adequate, supported by domestic demand amid export constraints due to economic slowdown and global trade fragmentation. Global inflation is declining, from 6.2% in 2023 to 5.2% in 2024. However, it is estimated to remain high in 2025 and 2026, at 4.5% and 4.2%, respectively, with the possibility of a trade war between the US and several of its main trading partners, as well as disruption to the world trade supply chain.



Sinergi antara regulator dan pemerintah dalam menetapkan kebijakan nasional mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi domestik, dengan ketahanan yang kuat dalam memitigasi dampak rambatan global dan kinerja yang diakui secara internasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 mencapai 5,03%, walaupun sedikit melambat dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 5,05%.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat berada di posisi 1,57% pada Desember 2024, lebih rendah dibandingkan Desember 2023 yang sebesar 2,61%. Sedangkan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, ditopang likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang kuat, serta risiko kredit yang rendah.

Investasi tetap membaik, khususnya investasi bangunan sejalan dengan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Konsumsi rumah tangga, khususnya kelas menengah ke atas juga tetap terjaga.

Ekspor non-migas tumbuh relatif tinggi di tengah perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas. Sementara impor meningkat baik untuk kebutuhan ekspor maupun permintaan domestik.

Synergy between regulators and the government in determining national policies supports the continuation of domestic economic recovery, with strong resilience in mitigating the impact of global spillovers and internationally recognized performance. Indonesia's economic growth in 2024 reached 5.03%, although despite the slight slowdown compared to 2023, which reached 5.05%.

Consumer Price Index (CPI) inflation was recorded at 1.57% in December 2024, lower than December 2023, which stood at 2.61%. Meanwhile, financial system stability remains maintained, supported by adequate liquidity, strong banking capital, and low credit risk.

Investment continues to improve, especially building investment, which is in line with the completion of various National Strategic Projects (PSN). Household consumption, especially in the upper middle class, also remains maintained.

Non-oil and gas exports grew relatively high amid the global economic slowdown and falling commodity prices. Meanwhile, imports increased, both for export needs and domestic demand.

Tinjauan Industri Perbankan

Banking Industry Overview

Perkembangan kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga. Pertumbuhan kredit perbankan sepanjang tahun 2024 mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,39% *year on year* (yoy) menjadi Rp7.827 triliun, didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi sebesar 13,62% yoy dan diikuti oleh kredit konsumsi 10,61% yoy. Sedangkan kredit modal kerja tumbuh 8,35% yoy.

Sementara kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) *gross* sebesar 2,08% dan NPL net sebesar 0,74%. *Loan at Risk* (LaR) juga menunjukkan tren penurunan, menjadi sebesar 9,28%. Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tercatat tumbuh sebesar 4,48% yoy menjadi Rp8.837 triliun, dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 3,34%, 6,78%, dan 3,50% yoy.

Ketahanan perbankan terjaga kuat dengan tingkat permodalan atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan yang berada di level tinggi, yaitu sebesar 26,68%. Likuiditas perbankan pada Desember 2024 tetap memadai dengan rasio Alat Likuid/*Non-Core Deposit* (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 112,87% dan 25,59%, jauh di atas *threshold* masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Kendati demikian, industri perbankan dihadapkan oleh berbagai tantangan. Di antaranya, berkenaan dengan perubahan suku bunga BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sepanjang tahun 2024, yang pada bulan Desember 2024 ada di posisi 6,00%. Sementara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) sebesar 4,25% untuk simpanan rupiah di bank umum. Hal tersebut memberikan dampak pada peningkatan *Cost of Fund* (COF) perbankan.

The development of banking intermediation performance grew positively with a maintained risk profile. Banking credit growth throughout 2024 recorded a growth of 10.39% year on year (yoy) to Rp7,827 trillion, driven by investment credit, which had a high growth of 13.62% yoy and was followed by consumer credit by 10.61% yoy. Meanwhile, working capital credit grew by 8.35% yoy.

Meanwhile, credit quality remains maintained with a gross non-performing loan (NPL) ratio of 2.08% and a net NPL of 0.74%. Loan at Risk (LaR) also showed a downward trend to 9.28%. On the other hand, Third-Party Funds (DPK) were recorded to have grown by 4.48% yoy to Rp8,837 trillion, with current accounts, savings accounts, and deposits growing by 3.34%, 6.78%, and 3.50% yoy, respectively.

Banking resilience was well maintained with a high level of banking capital or Capital Adequacy Ratio (CAR) of 26.68%. Banking liquidity in December 2024 remains adequate with the Liquid Assets/ Non-Core Deposit (LA/NCD) and Liquid Assets/ TPF (LA/TPF) ratios recorded at 112.87% and 25.59%, respectively, well above the thresholds of 50% and 10%, respectively.

However, the banking industry is faced with various challenges. Including changes in the BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) throughout 2024, which stood at 6.00% in December 2024. Meanwhile, the Deposit Insurance Corporation (LPS) maintained the Guaranteed Interest Rate at 4.25% for rupiah deposits in commercial banks. This has an impact on increasing the banking Cost of Fund (COF).



Tinjauan Posisi Bank Muamalat Indonesia di Industri Perbankan

Overview of Bank Muamalat Indonesia in the Banking Industry

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat”, “Bank”) merupakan pionir perbankan syariah di Indonesia. Hal tersebut membuat Bank memiliki nilai unik tersendiri di industri perbankan. Sebagai pionir bank syariah, Bank Muamalat memiliki peran dalam menginisiasi beberapa lembaga keuangan maupun non-keuangan syariah di Indonesia.

Namun seiring perkembangan industri perbankan, tingkat persaingan semakin kompetitif dengan pertumbuhan bisnis bank umum dan bank umum syariah serta tingkat konsentrasi industri. Pada tahun 2024 terdapat 105 bank umum dan 14 bank syariah.

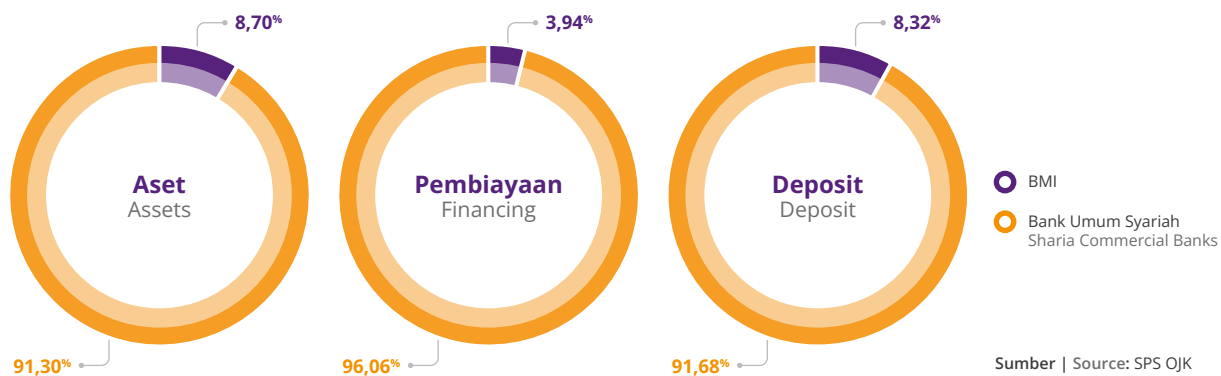
Pada tahun 2024, total aset Bank Muamalat mencapai Rp60,0 triliun. Jika dibandingkan total aset bank umum syariah, porsi atau pangsa pasarnya sekitar 8,70%. Sedangkan dari sisi penghimpunan dana, Bank Muamalat mencapai Rp44,19 triliun dengan porsi atau pangsa pasar sekitar 8,32% dan penyaluran pembiayaan dana Bank Muamalat mencapai Rp16,76 triliun dengan porsi atau pangsa pasarnya sekitar 3,94%.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat” or “Bank”) is a pioneer in Indonesian Sharia banking. This gives the Bank its own distinct value in the banking industry. Bank Muamalat, a pioneer in sharia banking, has helped to establish several sharia financial and non-financial institutions in Indonesia.

However, along with the development of the banking industry, the level of competition is increasingly fierce with the growth of commercial banks and sharia commercial banks and the level of industry concentration. In 2024 there were 105 commercial banks and 14 sharia banks.

In 2024, Bank Muamalat’s total assets reached Rp60.0 trillion. Compared to the total assets of sharia commercial banks, its portion or market share is approximately 8.70%. In terms of funding, Bank Muamalat reached Rp44.19 trillion with a portion, or market share, of approximately 8.32%, and Bank Muamalat’s financing reached Rp16.76 trillion with a portion, or market share, of approximately 3.94%.

BANK MUAMALAT TERHADAP PANGSA PASAR BANK SYARIAH
Bank Muamalat to Islamic Bank Market Share



Pada tahun 2024, Bank Muamalat tercatat sebagai bank syariah terbesar ke-2 di industri perbankan syariah berdasarkan aset. Hal tersebut menunjukkan eksistensi Bank Muamalat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah.

In 2024, Bank Muamalat was recorded as the 2nd largest sharia bank in the sharia banking industry based on assets. This demonstrates the role of Bank Muamalat in promoting the growth of the Sharia economy.

Bank Muamalat terus menghadirkan layanan perbankan yang *customer oriented* dengan layanan prima, produk yang beragam, serta layanan digital terbaik melalui aplikasi Muamalat DIN. Layanan digital ini menghadirkan berbagai fitur menarik, seperti pembayaran menggunakan QRIS, *top-up* uang elektronik, Bank Haji, serta Hijrah Amal untuk memfasilitasi nasabah membayar zakat, infak, sedekah, wakaf (ziswaf) dan kurban.

Kendati demikian, Bank Muamalat tercatat sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang memiliki cabang di luar negeri. Pencapaian tersebut membuat Bank memiliki nilai tambah sekaligus menjadi acuan bagi perkembangan bisnis di industri perbankan syariah.

Ke depan, Bank Muamalat Indonesia akan terus berupaya meningkatkan pangsa pasarnya di industri perbankan. Selain itu, Bank juga berkomitmen untuk berkontribusi lebih besar bagi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

Bank Muamalat continues to present customer-oriented banking services with excellent services, diverse products, and the best digital services through the Muamalat DIN application. The digital service presents various attractive features, such as payments using QRIS, electronic money top-ups, Bank Haji, and Hijrah Amal to facilitate customers in paying zakat, infak, alms, waqf (ziswaf), and qurban.

Nonetheless, Bank Muamalat is listed as Indonesia's first sharia bank with international branches. This achievement adds value to the Bank while also serving as a reference for business development in the Sharia banking industry.

Going forward, Bank Muamalat Indonesia will continue to strive for a larger market share in the banking industry. Furthermore, the Bank is committed to contributing more to the development of sharia banking in Indonesia.



Tinjauan Kinerja Per Segmen Usaha

Performance Overview by Business Segment

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat", "BMI" "Bank") membagi segmen usahanya menjadi 4 (empat) yaitu *Retail*, *Enterprise*, Perbankan Internasional, dan *Treasury*.

STRATEGI USAHA

Sejak tahun 2024, dalam menentukan arah strategi, Bank senantiasa melakukan penilaian terhadap setiap perubahan kondisi lingkungan bisnis serta mengevaluasi secara terus-menerus tentang kekuatan utama Bank serta potensi yang dapat dioptimalkan guna mencapai tujuan Bank. Bank telah menetapkan tema strategis tahun 2024, yaitu "Pertumbuhan Bisnis yang Sehat dan Profit yang Berkelanjutan".

Bank telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang ditargetkan, yakni melalui *refocusing* bisnis, pengembangan produk serta layanan Bank. Inisiatif ini dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi nasabah, penguatan portofolio melalui penyaluran pembiayaan pada segmen yang telah ditargetkan, serta pengendalian manajemen risiko untuk perbaikan kualitas portofolio juga terus dilakukan.

Langkah-langkah strategis di tahun 2024 yang telah dilaksanakan dengan kerangka 3 (tiga) fokus utama, yaitu:

1. **Business Refocusing**

Bank melakukan *refocusing* pada nasabah Individu untuk meningkatkan porsi *current account saving account* (CASA) dan pembiayaan segmen *retail* menjadikan *enterprise banking* sebagai *entry gate* nasabah individu. Hal ini dilakukan untuk memperluas jangkauan bisnis kedalam ekosistem bisnis dan keuangan syariah seperti lembaga negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), komunitas sekolah negeri dan/atau swasta, pesantren, serta universitas dengan penekanan kuat pada prinsip-prinsip Islam, ekosistem rumah sakit, serta melakukan penetrasi kepada ekosistem haji dan umrah.

Selain itu, Bank Muamalat juga fokus pada meningkatkan layanan dan jasa yang dapat mendorong *low cost fund*, peningkatan transaksi & *fee based income* melalui pengembangan dan penambahan fitur dan peningkatan layanan berbasis digital sesuai kebutuhan nasabah.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat", "BMI" "Bank") divides its business activities into 4 (four) segments: Retail, Enterprise, International Banking, and Treasury.

BUSINESS STRATEGY

Since the beginning of 2024, the Bank has always assessed every change in the business environment and continuously evaluated the Bank's main strengths and potential that can be optimized to achieve the Bank's goals in determining the strategic direction. The Bank has set a strategic theme for 2024, namely "Sound Business Growth and Sustainable Profits."

The Bank has made various efforts to achieve the set business growth targets, namely through business refocusing and the development of Bank products and services. These initiatives were carried out to increase accessibility for customers, strengthen the portfolio through financing disbursement to targeted segments, and tighten risk management to improve portfolio quality.

Strategic measures in 2024 that have been implemented with a framework of 3 (three) main focuses, namely:

1. **Business Refocusing**

The Bank is refocusing on individual customers to increase current account saving accounts (CASA) and retail segment financing, making enterprise banking the entry gate for individual customers. This is carried out to expand the reach of the business into the sharia business and financial ecosystem, such as state institutions, State Civil Apparatus (ASN) and State-Owned Enterprises (SOEs), public and/or private school communities, Islamic boarding schools, and universities with a strong emphasis on Islamic principles, hospital ecosystems, and to penetrate the hajj and umrah ecosystems.

Additionally, Bank Muamalat also focuses on improving services that promote low cost funds as well as increasing transactions & fee-based income through the development and addition of features and improvement of digital-based services in response to customer needs.

2. *Fixing the Fundamental*

Bank secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) dan teknologi informasi serta bisnis proses yang sesuai dengan perkembangan bisnis Bank. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kapabilitas dan keahlian SDM, penyesuaian organisasi sesuai kebutuhan bisnis, meningkatkan keandalan teknologi informasi & layanan digital, memperbaiki layanan dan bisnis proses pembiayaan yang lebih *streamline* dan terus menjaga program efisiensi yang efektif. Bank akan mengoptimalkan penyelesaian pembiayaan berkualitas rendah melalui langkah-langkah yang efektif, baik dilakukan oleh Bank sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain.

3. *Strengthen Enablers*

Bank akan memperkuat *enabler* kinerja melalui peningkatan sinergi *enterprise* dan *retail* untuk memperoleh peluang bisnis yang lebih luas, menghasilkan, dan berkualitas. Selain itu, Bank melanjutkan pengukuran kinerja berbasis profit untuk jaringan dan kantor pusat, meningkatkan produktivitas & profitabilitas *channel* distribusi. Bank juga akan mencermati peluang terhadap pengembangan bisnis secara non-organik dan memperkuat *branding*.

2. *Fixing The Fundamental*

The Bank continuously improves the capacity and capability of human resources (HR) and information technology, and business processes in accordance with the Bank's business development. These efforts are carried out by improving HR capabilities and expertise, adjusting the organization according to business needs, increasing the reliability of information technology & digital services, improving the services and business processes of financing to be more streamlined, and continuing to maintain effective efficiency programs. The Bank will optimize the resolution of low-quality financing through effective steps, either on its own or in collaboration with other parties.

3. *Strengthen Enablers*

The Bank will strengthen performance enablers by increasing enterprise and retail synergies to create more diverse, productive, and high-quality business opportunities. Furthermore, The Bank continues to measure profit-based performance for the network and head office, increase distribution channel productivity and profitability, explore non-organic business development opportunities, and strengthen branding.

SEGMENT RETAIL

Kegiatan usaha segmen *retail banking* Bank Muamalat merupakan lini bisnis dengan individu dan non-individu. Layanan yang diberikan mencakup pembiayaan dan penghimpunan dana. Produk penghimpunan dana yang disediakan oleh segmen ini mencakup giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Strategi Usaha

Sepanjang tahun 2024, penghimpunan dana segmen *retail banking* lebih diprioritaskan pada pertumbuhan dana murah khususnya giro (*current account*) dan tabungan (*saving account*) yang akan didorong melalui:

1. *Individual Customer*

- Bank memperluas *customer base* sebagai bank penyalur gaji untuk ASN, Polri, TNI, pejabat negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja secara terpusat oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Program tabungan *payroll*, serta program tabungan berhadiah.
- Memperkuat layanan perbankan elektronik dan meningkatkan aktivasi transaksi nasabah (misalnya melalui *digital account opening*, QRIS *acquiring*, uang elektronik dan sebagainya) serta menambahkan *basic feature* untuk memudahkan transaksi nasabah pada aplikasi *internet banking* dan *mobile banking*.

RETAIL SEGMENT

The retail business segment of Bank Muamalat is a business line with individuals and non-individuals. The services provided include financing and funding. Funding products provided by this segment include current accounts, savings accounts, and time deposits.

Business Strategy

Throughout 2024, the retail banking segment's funding prioritized the growth of low-cost funds, especially current accounts and savings accounts, which are supported through:

1. *Individual Customer*

- The Bank expands its customer base as a salary distribution bank for ASN, Polri, TNI, state officials, and government employees with centralized work agreements by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.
- Payroll savings program as well as the rewards savings program.
- Strengthening electronic banking services and increasing customer transaction activation (for example, through Digital Account Opening, QRIS *acquiring*, electronic money, and others), as well as adding basic features to facilitate customer transactions on internet banking and mobile banking applications.



- d. Dalam mendorong peningkatan transaksi pada aplikasi *mobile banking* Bank Muamalat (MDIN). Bank telah menambahkan fitur baru yakni:
 - 1) *Enhancement* Fitur Kurban *Online* melalui Muamalat DIN.
 - 2) Implementasi Menu Sedekah Daging pada Muamalat DIN.
 - 3) Implementasi fitur Top Up Flazz BCA pada Muamalat DIN
 - 4) Implementasi Pembayaran Super Air Jet
 - 5) Implementasi Pembayaran Internet XL home
 - 6) Implementasi Pembayaran IPL Sinarmas Land
 - 7) Implementasi Pembayaran ZISWAF Yayasan Asar Humanity
 - 8) Implementasi Pembelian Paket Lengkap Internet Telkomsel
 - 9) Implementasi Pembayaran ZISWAF Yayasan Asar Humanity
- e. Bank meningkatkan akuisisi porsi haji melalui seluruh jaringan yang dimiliki, baik *offline* maupun *online* serta melalui mitra dengan skema kerja sama seperti dengan PT Pegadaian dan Amitra.

2. *Non Individual Customer*

- a. Fokus pada akuisisi Giro iB Hijrah dengan akad Wadiah.
- b. Fokus pada penawaran layanan *cash management services* dan *virtual account* untuk layanan transaksional dan program campaign Giro yang mendukung transaksi melalui CMS.
- c. Selain itu, *customer base* Muamalat *Digital Integrated Access* (MADINA) juga mengalami peningkatan sebesar 20,52% (yoy) atau 2.032 *Customer* dari 9.902 *Customer* (Des 23) menjadi 11.934 *Customer* (Des 24).
- d. Bank akan melakukan penetrasi kepada nasabah non individual dengan penawaran pembukaan rekening operasional perusahaan beserta variasi layanan dan kemudahan yang dihadirkan.

Dari sisi pembiayaan pada segmen *Retail Banking*, Bank mengimplementasikan bisnis model yang bersifat *customer centric* melalui penyaluran pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, baik untuk tujuan produktif dan konsumtif. Bank telah melakukan transformasi *retail* untuk menumbuhkan bisnis *consumer* melalui pengembangan produk dan perbaikan proses menjadi kunci terciptanya *competitive advantage* untuk menunjang pertumbuhan pembiayaan *consumer*.

Beberapa strategi yang akan dilakukan antara lain:

- 1. Bank melakukan perluasan perjanjian kerja sama (PKS) dengan pengembang yang memiliki reputasi baik, sehingga dapat mengoptimalkan penyaluran Pembiayaan KPR dan memberikan rasa nyaman kepada nasabah.

- d. In encouraging increased transactions on the Bank Muamalat (MDIN) mobile banking application, the bank has added new features, namely:
 - 1) Enhancement of Online Kurban Features via Muamalat DIN.
 - 2) Implementation of the Meat Alms Menu on Muamalat DIN.
 - 3) Implementation of the BCA Flazz Top Up feature on Muamalat DIN
 - 4) Implementation of Super Air Jet Payment
 - 5) Implementation of Internet XL home Payment
 - 6) Implementation of IPL Sinarmas Land Payment
 - 7) Implementation of ZISWAF Payments by Asar Humanity Foundation
 - 8) Implementation of Complete Telkomsel Internet Package Purchase
 - 9) Implementation of ZISWAF Payments by Asar Humanity Foundation
- e. The Bank increases its hajj acquisition portion through all its networks, both offline and online, as well as through partners with cooperation schemes, such as with PT Pegadaian and Amitra.

2. *Non Individual Customer*

- a. Focus on the acquisition of Wadiah-based Giro iB Hijrah.
- b. Focus on offering cash management services and virtual accounts for transaction services and Giro campaign programs that support transactions via CMS.
- c. In addition, the customer base of Muamalat *Digital Integrated Access* (MADINA) also increased by 20.52% (yoy) or 2,032 customers from 9,902 customers (Dec 23) to 11,934 customers (Dec 24).
- d. The bank will penetrate non-individual customers by offering to open company operational accounts along with the variety of services and conveniences provided.

In terms of financing for the Retail Banking segment, the Bank employs a Customer Centric business model, distributing financing tailored to customer needs, both productive and consumptive. The Bank has undertaken a retail transformation to expand its consumer business through product development and process improvements, which are critical to creating a competitive advantage to support the growth of consumer financing.

Some of the strategies that will be implemented include:

- 1. The Bank is expanding its cooperation agreement (PKS) with bona fide developers, allowing it to optimize the distribution of mortgage financing and provide a sense of comfort to customers.

2. Bank menyalurkan pembiayaan multiguna iB Hijrah yang disasarkan kepada ekosistem rumah sakit, lembaga keuangan syariah, BUMN, lembaga negara, ASN, dan *enterprise banking client*.
3. Bank meluncurkan produk baru (Solusi Emas Hijrah) dan varian produk baru seperti KPR Hijrah Baitullah dan multiguna untuk *payroll* ASN. Solusi Emas Hijrah akan menjadi unggulan Bank Muamalat karena *Services Level Agreement* (SLA) dilakukan 1 (satu) hari, limit gramasi emas hingga 500 gr dengan jangka waktu pembiayaan hingga 10 (sepuluh) tahun.
4. Penggunaan *decision engine* untuk multiguna dan Prohaji untuk meningkatkan *booking volume* dari pembiayaan Multiguna dengan menciptakan efisiensi proses dan mengembangkan target segmen portofolio baru.
5. Segmen *retail* juga menyalurkan pembiayaan *Small and Medium Enterprise* (SME) yang menyasarkan kepada *community/ecosystem*, *linkage*, *value chain*, dan *general* SME seperti pengembang perumahan.

Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, segmen *retail* Bank Muamalat membukukan Dana Pihak Ketiga (DPK) sekitar Rp33,12 triliun, lebih tinggi 1,66% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp32,58 triliun. CASA meningkat Rp1,28 triliun, sementara *time deposit* turun Rp742 miliar dibanding tahun 2023.

Sedangkan total pembiayaan mengalami penurunan 11,83%, dari Rp6,37 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp5,62 di tahun 2024.

KINERJA SEGMENT USAHA RETAIL

Retail Business Segment Performance

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Pembiayaan Financing	5.618	6.372	(754)	(11,83)
Dana Pihak Ketiga Third-Party Fund	33.123	32.581	542	1,66
Pendapatan Margin Margin Income	607	653	(46)	(7,04)
Beban Margin Margin Expense	773	704	69	9,86
Pendapatan Berbasis Jasa Fee-Based Income	243	170	73	(43,15)
Gain on Forex & Securities Gain on Forex & Securities	14	15	(1,4)	(9,22)
Pendapatan Bersih Net Income	328	517	(189)	(36,49)

(Rp billion, unless stated otherwise)

2. The bank disburses iB Hijrah multipurpose financing, which is targeted at the hospital ecosystem, sharia financial institutions, SOEs, state institutions, ASN, and enterprise banking clients.
3. The Bank launched a new product (Solusi Emas Hijrah) and new product variants, such as KPR Hijrah Baitullah and multipurpose for ASN payroll. Solusi Emas Hijrah will be Bank Muamalat's flagship as the Services Level Agreement (SLA) is carried out for 1 (one) day, the gold grammage limit is up to 500 grams and the financing period is up to 10 (ten) years.
4. Utilization of decision engines for multipurpose and Prohaji to increase booking volume from multipurpose financing by creating process efficiencies and developing new target portfolio segments.
5. The retail segment also distributes Small and Medium Enterprise (SME) financing, which targets communities/ecosystems, linkages, value chains, and general SMEs, such as housing developers.

Performance in 2024

In 2024, Bank Muamalat's retail segment posted approximately Rp33.12 trillion in Third-Party Funds (TPF), 1.66% higher compared to 2023, which amounted to Rp32.58 trillion. CASA increased by Rp1.28 trillion, while time deposits decreased by Rp742 billion compared to 2023.

Meanwhile, total financing decreased by 11.83%, from Rp6.37 trillion in 2023 to Rp5.62 trillion in 2024.



Profitabilitas

Segmen usaha *retail* membukukan pendapatan margin tahun 2024 mencapai Rp607 miliar, lebih rendah 7,04% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp653 miliar. Sementara beban margin tercatat sebesar Rp773 miliar, naik 9,86% dari Rp704 miliar di tahun 2023.

Pendapatan berbasis jasa tercatat Rp243 miliar, lebih tinggi 43,15% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp170 miliar. Untuk kegiatan usaha *forex* dan *securities*, pada tahun 2024 mencapai Rp14 miliar, lebih rendah 9,22% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp15 miliar.

Sebagai hasil dari pertumbuhan tersebut, pendapatan bersih untuk segmen usaha *retail* mencapai Rp328 miliar. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp517 miliar, pendapatan bersih mengalami penurunan 36,49%.

Rencana Strategis 2025

Pada tahun 2025, strategi pengumpulan dana segmen *retail* tetap diprioritaskan pada pertumbuhan dana murah khususnya giro (*current account*) dan tabungan (*saving account*) melalui strategi *life-cycle* 10 sumber CASA yang didorong melalui nasabah prioritas, pendidikan/sekolah, haji & umrah serta nasabah lainnya.

1. Individual Customer

Pada sasaran nasabah individual, fokus bisnis Bank kepada nasabah *payroll*, baik *payroll* ASN maupun non ASN. Bank terus meningkatkan sasaran sebagai penyalur gaji untuk ASN, Polri, TNI, pejabat negara dan pegawai pemerintah. Sedangkan *payroll* non ASN ditujukan kepada nasabah BUMN, Perusahaan swasta, nasabah *enterprise banking*, rumah sakit, sekolah, dan pensiun. Penawaran yang diberikan kepada karyawan perusahaan dengan memiliki keuntungan menarik bagi nasabah yang dikombinasikan dengan produk-produk lainnya, seperti pembiayaan *consumer*, *mobile banking* (MDIN), dan layanan Bank Muamalat.

Selain nasabah *payroll*, layanan Muamalat Prioritas terus ditingkatkan dengan program *Member Get Member* (MGM). Layanan ini diharapkan dapat terus menjaring nasabah yang berstatus *high net worth income*. Layanan Muamalat Prioritas terus berupaya untuk meningkatkan kenyamanan dan menciptakan kemudahan transaksi nasabah yang dikemas secara *personalized*.

Nasabah individu lainnya akan fokus pada akuisisi via *mobile banking* MDIN yang terus dilengkapi dengan fitur-fitur terkini, sesuai kebutuhan nasabah, dengan produk tabungan dengan akad *wadiah* maupun *mudharabah*.

Profitability

The retail business segment posted a margin income of Rp607 billion in 2024, 7.04% lower compared to Rp653 billion in 2023. Meanwhile, margin expenses were posted at Rp773 billion, an increase of 9.86% compared to Rp704 billion in 2023.

Fee-based income was posted at Rp243 billion, 43.15% higher compared to 2023, which amounted to Rp170 billion. Forex and securities business activities reached Rp14 billion in 2024, 9.22% lower compared to 2023, which amounted to Rp15 billion.

As a result of this growth, net income for the retail business segment reached Rp328 billion. Compared to 2023, which amounted to Rp517 billion, net income decreased by 36.49%.

Strategic Plan for 2025

In 2025, the retail segment's funding strategy will continue to prioritize the growth of low-cost funds, especially current accounts and savings accounts, through a life-cycle strategy of 10 CASA sources, which is encouraged through priority customers, education/schools, hajj and umrah, as well as other customers.

1. Individual Customer

In targeting individual customers, the Bank's business focus is on payroll customers, both ASN and non-ASN payroll. The Bank continues to increase its target as a salary distributor for ASN, Polri, TNI, state officials and government employees. While non-ASN payroll is aimed at SOE customers, private companies, enterprise banking customers, hospitals, schools, and pensions. The offers given to company employees have attractive benefits for customers, which are combined with other products, such as consumer financing, mobile banking (MDIN), and Bank Muamalat services.

In addition to payroll customers, Muamalat Prioritas services continue to be improved with the Member Get Member (MGM) program. This service is expected to continue to attract customers with high net worth income status. Muamalat Prioritas services continue to strive to improve comfort and create convenience customer transactions that are packaged in a personalized manner.

Other individual customers will focus on acquisitions via MDIN mobile banking, which continues to be equipped with the latest features, according to customer needs, with savings products with wadiah and mudharabah contracts.

2. Nasabah Non-Individu

Dalam mengakuisisi nasabah non individu, Bank Muamalat akan mengupayakan untuk menjadi bank operasional utama bagi nasabah melalui penawaran berbagai keunggulan produk dan layanan, di antaranya melalui MADINA yang merupakan aplikasi *cash management system* lengkap dan terintegrasi. Sasaran nasabah non individu pada nasabah pendidikan, kesehatan, haji & umrah, ziswaf & masjid, UMKM, dan BPR/BPRS.

Strategi Pembiayaan segmen Retail Pada tahun 2025, Bank akan terus melanjutkan transformasi *retail* untuk mengakselerasi bisnis consumer dan SME. beberapa strategi yang akan dilakukan antara lain:

1. Pembiayaan *consumer* akan difokuskan kepada produk solusi emas hijrah (cicil emas) yang akan *bundling* dengan biaya pelunasan haji sekaligus investasi yang menarik bagi nasabah, lalu produk Pro Hajj, KPR, dan multiguna *payroll* yang terus dipasarkan dengan memperluas target *market* dan memperbanyak inovasi fitur produk sesuai kebutuhan nasabah.
2. Melanjutkan penyaluran pembiayaan kepada *Islamic Ecosystem* sebagai bentuk komitmen Bank dalam mendukung pertumbuhan perekonomian syariah.
3. Penggunaan *decision engine* untuk semua produk konsumen sebagai upaya meningkatkan *booking volume* dari pembiayaan konsumen.
4. Fokus segmen *Consumer* yakni satuan kerja pemerintah pusat dan daerah, BUMN dan lembaga negara, rumah sakit dan klinik utama, *enterprise banking clients*, BUMD, yayasan dan perusahaan swasta, nasabah individu terutama nasabah *funding* dan *priority*.
5. Pembiayaan SME difokuskan kepada *community/ ecosystem* seperti Muhammadiyah dan Non Muhammadiyah (edukasi, kesehatan), ekosistem haji umrah (BIPIH Khusus, Maktab Haji Khusus, Booking Seat), Hiswana Migas. *Linkage* yang selektif dengan *risk appetite* yang dijaga baik dan *value chain*.

SEGMENT USAHA ENTERPRISE

Segmen usaha *enterprise* merupakan usaha Bank dengan pangsa pasar nasabah korporasi. Produk dan layanan yang disediakan mencakup pembiayaan: modal kerja dan investasi; simpanan berupa deposito dan giro untuk keperluan investasi dan pengelolaan kas nasabah; serta ekspor/impor: *trade finance*, *forex line*, dan *hedging* (lindung nilai).

2. Non-Individual Customer

In acquiring non-individual customers, Bank Muamalat will strive to become the main operational bank for customers by offering various superior products and services, including through MADINA, which is a comprehensive and integrated cash management system application. Targets for non-individual customers include education, health, hajj and umrah, ziswaf and mosque, MSMEs, and BPR/ BPRS customers.

In terms of Retail Segment Financing Strategy, the Bank will continue its retail transformation in 2025 to accelerate consumer and SME businesses. Some of the strategies that will be implemented include:

1. Consumer financing will focus on the gold hijrah solution (gold installments) product, which will be bundled with the cost of paying off the hajj as well as an attractive investment for customers, the Pro Hajj, mortgage, and multipurpose payroll products, which will continue to be marketed by expanding the target market and increasing product feature innovations in response to customer needs.
2. Continuing the distribution of financing to the Islamic Ecosystem as a form of the Bank's commitment to supporting sharia economic growth.
3. Utilization of decision engines for all consumer products as an effort to increase booking volume from consumer financing.
4. The focus of the Consumer segment includes central and regional government work units, SOEs and state institutions, main hospitals and clinics, enterprise banking clients, ROE, foundations and private companies, and individual customers, especially funding and priority Customers
5. SME financing is focused on communities/ ecosystems, such as Muhammadiyah and Non Muhammadiyah (education, health), the Hajj and Umrah ecosystem (Special Hajj Pilgrimage Costs, Special Hajj Office, Booking Seat), Hiswana Migas. Selective linkage with well-maintained risk appetite and value chain.

ENTERPRISE SEGMENT

The enterprise segment is the Bank's businesses with a market share of corporate customers. Products and services provided include financing: working capital and investment; savings: deposits and current accounts for investment purposes, and customer cash management; as well as export/import: trade finance, forex line, and hedging.



Strategi Usaha

Sepanjang tahun 2024, penghimpunan dana segmen *Enterprise Banking* akan fokus kepada produk dana murah, yaitu giro, antara lain dengan strategi sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan terhadap nasabah pembiayaan, sehingga dapat meningkatkan penggunaan rekening operasionalnya di Bank Muamalat.
2. Meningkatkan *cross selling* terhadap nasabah pembiayaan, sehingga dapat memperluas akuisisi nasabah grup usaha, pemasok maupun distributor dari nasabah *existing*.
3. Melakukan *leveraging* terhadap produk-produk *transactional banking* dan *treasury*, di antaranya fasilitas *forex*, *trade finance*, *cash management*, serta *virtual account* sebagai sarana akuisisi nasabah non pembiayaan.
4. Fokus kepada nasabah dengan rantai bisnis yang luas seperti BUMN dan kementerian, perusahaan sekuritas dan *asset management*, serta perusahaan *fintech* dan *e-commerce*.
5. Mengembangkan kampanye dalam bentuk program yang spesifik untuk industri atau nasabah tertentu.

Meningkatkan layanan transaksi nasabah korporasi dengan terus mengembangkan dan mengoptimalkan layanan perbankan elektronik melalui MADINA (Muamalat Digital Integrated Access), sehingga berdampak pada peningkatan penghimpunan dana murah.

Pembiayaan segmen *Enterprise Banking* berperan sebagai *entry gate* bagi segmen *retail* untuk memperluas sasaran bisnis. Beberapa strategi yang telah dilakukan pada pembiayaan antara lain:

1. Pemilihan *target market* yang potensial, pemberian pembiayaan akan diarahkan kepada segmen yang memiliki *risk weighted asset* atau aset tertimbang menurut risiko yang rendah seperti BUMN, kementerian dan korporasi dengan peringkat (*rating*) yang baik. Selain itu, segmen *Enterprise Banking* juga berpartisipasi dalam pembiayaan sindikasi pada industri yang mendapatkan fokus dari Pemerintah.
2. Disamping itu, segmen *Enterprise Banking* juga mengembangkan pembiayaan pada sektor komersial dengan beberapa program, di antaranya pembiayaan *multifinance*, pembiayaan *value chain* untuk pemasok dan distributor, serta pembiayaan dengan skema *mudharabah muqayyadah* atau SRIA (*Sharia Restricted Intermediary Account*).

Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, segmen korporasi membukukan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp11,07 triliun, turun 37,44% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp17,69 triliun. Deposito turun Rp5,18 triliun atau 35,8% yoy, diikuti CASA yang juga mengalami penurunan 46,0% atau sebesar Rp1,52 triliun dibanding tahun 2023.

Business Strategy

Throughout 2024, funding for the Enterprise Banking segment will focus on low-cost fund products, namely current accounts, including the following strategy:

1. Providing convenience to financing customers so they can increase the use of their operational accounts at Bank Muamalat Indonesia.
2. Increase cross-selling to financing customers in order to expand customer acquisition to business groups, suppliers, and distributors from existing customers.
3. Leveraging transactional banking and treasury products, including forex facilities, trade finance, cash management, and virtual accounts, as a means of acquiring non-financing customers.
4. Focus on customers with a wide business chain, such as SOEs and ministries, securities and asset management companies, as well as fintech and e-commerce companies.
5. Develop campaigns in the form of specific programs for certain industries or customers.

Improving corporate customer transaction services by continuing to develop and optimize electronic banking services through MADINA (Muamalat Digital Integrated Access), thereby having an impact on increasing the collection of low-cost funds.

Enterprise Banking segment financing acts as an entry point for the retail segment to expand business goals. Some strategies that have been implemented in financing include:

1. Selecting a potential target market and distribution of financing directed to segments that have risk-weighted assets or assets weighted according to low risk, such as State-Owned Enterprises (SOE), ministries and corporations with good ratings. In addition, the Enterprise Banking segment will also participate in syndicated financing in industries that receive focus from the Government.
2. In addition, the Enterprise Banking segment also develops financing in the commercial sector with several programs, including multifinance financing, value chain financing for suppliers and distributors, as well as financing with the *mudharabah muqayyadah* scheme or SRIA (*Sharia Restricted Intermediary Account*).

Performance in 2024

In 2024, the enterprise segment posted Rp11.07 trillion in Third-Party Funds (TPF), a decrease of 37.44% compared to 2023, which amounted to Rp17.69 trillion. Deposits declined by Rp5.18 trillion or 35.8% yoy, followed by CASA, which also experienced a decline of 46.0% or Rp1.52 trillion compared to 2023.

Sementara lini bisnis penyaluran pembiayaan atau kredit, pencapaiannya yakni Rp11,15 triliun. Dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp16,1 triliun, terjadi penurunan 30,7%.

As for the financing or credit distribution business line, its achievement amounted to Rp11.15 trillion. Compared to the previous year, which amounted to Rp16.1 trillion, there was a decrease of 30.7%.

KINERJA SEGMENT USAHA ENTERPRISE

Enterprise Segment Performance

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion, unless stated otherwise)

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Pembiayaan Financing	11.146	16.093	(4.947)	(30,74)
Dana Pihak Ketiga Third-Party Fund	11.069	17.693	(6.624)	(37,44)
Pendapatan Margin Margin Income	849	826	23	2,83
Beban Margin Margin Expense	750	796	(46)	(5,82)
Pendapatan Berbasis Jasa Fee-Based Income	32	103	(70)	(68,39)
Gain on Forex & Securities Gain on Forex & Securities	23	13	10	73,48
Pendapatan Bersih Net Income	(232)	(110)	(122)	110,46

Profitabilitas

Segmen usaha korporasi membukukan pendapatan marjin tahun 2024 mencapai Rp849 miliar. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp826 miliar, mengalami kenaikan 2,83%. Sedangkan beban marjin lebih rendah 5,82% dari tahun 2023 yang sebesar Rp796 miliar, sehingga menjadi Rp750 miliar.

Profitability

The enterprise segment posted a margin income of Rp849 billion in 2024. Compared to Rp826 billion in 2023, there was an increase of 2.83%. Meanwhile, margin expense amounted to Rp796 billion, which was 5.82% lower compared to 2023, which amounted to Rp750 billion.

Pendapatan berbasis jasa yang diakumulasi tercatat Rp32 miliar, turun 68% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp103 miliar. Untuk kegiatan usaha *forex* dan *securities*, pada tahun 2024 mencapai Rp23 miliar, lebih tinggi 73% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp13 miliar.

Accumulated fee-based income was posted at Rp32 billion, a decrease of 68% compared to 2023, which amounted to Rp103 billion. For forex and securities business activities, it reached Rp23 billion in 2024, an increase of 73% compared to 2023, which amounted to Rp13 billion.

Hingga akhir tahun buku 2024, pendapatan bersih Bank Muamalat dari segmen usaha korporasi dan komersial tercatat negatif Rp232 miliar. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar negatif Rp110 miliar.

As of the end of the 2024 financial year, Bank Muamalat's net income from the corporate and commercial business segments was posted at negative Rp232 billion. Compared to 2023, which amounted to negative Rp110 billion.

Rencana Strategis 2025

Pada tahun 2025, strategi penghimpunan dana segmen *enterprise* difokuskan pada dana murah melalui akuisisi nasabah baru *funding* korporasi, mengoptimalkan DPK yang terkait dengan pembiayaan, meningkatkan bisnis CMS, dan mendorong optimalisasi bisnis cabang Kuala Lumpur.

Strategic Plan for 2025

In 2025, the funding strategy of the enterprise segment will focus on low-cost funds by acquiring new corporate funding customers, optimizing TPF related to financing, increasing the CMS business, and encouraging the business optimization of the Kuala Lumpur branch.

Sedangkan strategi pembiayaan segmen *enterprise* melanjutkan strategi tahun sebelumnya, yakni sebagai *entry gate* bagi segmen retail untuk memperluas sasaran bisnis. Dengan beberapa langkah strategis yakni:

Meanwhile, the enterprise segment financing strategy will continue the strategy from the previous year, which serves as an entry gate for the retail segment to expand business targets. Some of the strategic steps include:



a. Melakukan <i>leveraging</i> terhadap produk-produk <i>transactional banking</i> dan <i>treasury</i>, termasuk di antaranya fasilitas <i>forex</i>, <i>trade finance</i>, <i>cash management</i>, serta <i>virtual account</i> sebagai sarana akuisisi nasabah non pembiayaan. b. Fokus kepada nasabah dengan rantai bisnis yang luas seperti BUMN dan kementerian, perusahaan sekuritas dan <i>asset management</i>, serta perusahaan <i>fintech</i> dan <i>e-commerce</i>. c. Mengembangkan kampanye dalam bentuk program yang spesifik untuk industri atau nasabah tertentu. d. Meningkatkan layanan transaksi nasabah Korporasi dengan terus mengembangkan dan mengoptimalkan layanan perbankan elektronik melalui Madina (<i>Muamalat Digital Integrated Access</i>), sehingga berdampak pada peningkatan penghimpunan dana murah. e. Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan permintaan nasabah untuk dapat bertransaksi dengan lebih mudah dan aman melalui penerapan proses layanan transaksi menggunakan tanda tangan digital/elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara tanda tangan digital/elektronik yang tersertifikasi oleh Kementerian terkait. f. Memberikan kemudahan terhadap nasabah pembiayaan sehingga dapat meningkatkan penggunaan rekening operasionalnya di Bank Muamalat. g. Meningkatkan <i>cross selling</i> terhadap nasabah pembiayaan sehingga dapat memperluas akuisisi nasabah terhadap grup usaha, pemasok maupun distributor dari nasabah <i>existing</i>.	a. Leveraging transactional banking and treasury products, including forex facilities, trade finance, cash management, as well as virtual accounts, as a means of acquiring non-financing customers. b. Focus on customers with an extensive business chain, such as SOEs and ministries, securities and asset management companies, as well as fintech and e-commerce companies. c. Develop campaigns in the form of specific programs for certain industries or customers. d. Improving Corporate customer transaction services by continuing to develop and optimize electronic banking services through Madina (Muamalat Digital Integrated Access), thereby having an impact on increasing the collection of low-cost funds. e. Adapting to technological developments and customer requests to be able to make transactions more easily and safely by implementing a transaction service process using digital/electronic signatures issued by digital/electronic signature providers certified by the relevant Ministry. f. Providing convenience to financing customers so they can increase the use of their operational accounts at Bank Muamalat Indonesia. g. Increase cross-selling to financing customers in order to expand customer acquisition to business groups, suppliers, and distributors from existing customers.

SEGMENT PERBANKAN INTERNASIONAL

Dalam memaksimalkan potensi segmen perbankan internasional, maka sejak tahun 2009 Bank telah mendirikan satu Cabang internasional di Malaysia. Dengan ijin usaha International Islamic Bank, Cabang Kuala Lumpur berfokus untuk melayani nasabah Malaysia (Labuan) dan International termasuk memfasilitasi warga negara Indonesia yang berada di Malaysia.

Hingga berakhirnya tahun buku 2024, produk dan layanan yang diberikan oleh Cabang Kuala Lumpur adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

INTERNATIONAL BANKING SEGMENT

In order to maximize the potential of the international banking segment, the Bank has established an international branch in Malaysia since 2009. With an International Islamic Bank business license, the Kuala Lumpur Branch focuses on serving Malaysian (Labuan) and international customers, including facilitating Indonesian citizens in Malaysia.

Until the end of the 2024 financial year, the products and services offered by the Kuala Lumpur Branch are as described in the following table.

Produk/Jasa Products/Services	Uraian Layanan Description of Services
Financing	- Working Capital - Contract Financing - Trade Financing
Funding	- Qard Current Account - Time Deposit
Treasury	- Forex - Money Market
Transactional	- Cash Management - Remittance - Trade Finance

Strategi Usaha

Pengembangan dana murah, bisnis treasury dan transaksional adalah 3 strategi utama Cabang Kuala Lumpur di tahun 2024. Selain itu, pengembangan produk tabungan haji dan porsi haji juga termasuk fokus pengembangan segmen *retail* Cabang Kuala Lumpur. Sedangkan pada segmen pembiayaan, pemutakhiran *standard operating procedures* dan re-segmentasi nasabah menjadi fokus utama.

Kinerja Tahun 2024

Hingga akhir tahun buku 2024, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari segmen usaha perbankan internasional di Cabang Kuala Lumpur mencapai Rp1,08 triliun, turun 60,45% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp2,73 triliun. Penurunan ini selaras dengan strategi Bank dan merupakan salah satu fungsi cabang Kuala Lumpur sebagai penjaga likuiditas. Walaupun terdapat penurunan total *outstanding*, namun pertumbuhan nasabah baru tetap mencatatkan kenaikan sebesar 6,52% sehingga total 5.225 rekening, dibandingkan tahun 2023 yang sebanyak 4.905 rekening.

Strategi *non expansive* pada sektor pembiayaan, juga merupakan bagian dari salah satu strategi cabang Kuala Lumpur agar memiliki kesempatan melakukan re-segmentasi atas nasabah-nasabah potensial yang ada serta melakukan serangkaian pemutakhiran prosedur operasional guna mendukung pertumbuhan di tahun-tahun mendatang. Strategi tersebut menyebabkan penyaluran pembiayaan mengalami penurunan sebesar 74,28%, dari Rp891 miliar di tahun 2023 menjadi Rp230 miliar pada tahun 2024.

Pendapatan berbasis jasa mengalami penurunan sebesar 74,71% pada tahun 2024 dengan mencapai Rp3,5 miliar, dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp14 miliar. Kenaikan *gain on forex* mencapai 57,20% dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga menjadi Rp21 miliar.

Business Strategy

The development of low-cost funds, treasury, and transactional businesses are the 3 main strategies of the Kuala Lumpur Branch in 2024. Furthermore, the development of hajj savings products and hajj portions is also included in the focus of Kuala Lumpur Branch's retail segment development. In the financing segment, updating standard operating procedures and customer re-segmentation are the main focuses.

Performance in 2024

Until the end of the 2024 financial year, Third-Party Funds (TPF) collection from the international banking business segment at the Kuala Lumpur Branch reached Rp1,08 trillion, a decrease of 60.45% compared to 2023, which amounted to Rp2.73 trillion. This decrease is in line with the Bank's strategy and is one of the functions of the Kuala Lumpur branch as a liquidity guard. Despite the decrease in the total outstanding, the growth of new customers still recorded an increase of 6.52% to a total of 5,225 accounts, compared to 4,905 accounts in 2023.

The non-expansive strategy in the financing sector was also part of one of the Kuala Lumpur branch's strategies to have the opportunity to re-segment existing potential customers as well as carry out a series of operational procedure updates to support growth in the coming years. This strategy led to a decrease of 74.28% in financing distribution, from Rp891 billion in 2023 to Rp230 billion in 2024.

Fee-based income managed to post an decreased by 74.71% in 2024, reaching Rp3.5 billion, compared to Rp14 billion in 2023. The gain on forex increase to 57.20% compared to the previous year, to Rp21 billion.

**KINERJA SEGMENT USAHA PERBANKAN INTERNASIONAL**

International Banking Business Segment Performance

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion, unless stated otherwise)

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Pembiayaan Financing	229	891	(661)	(74,28)
Dana Pihak Ketiga Third-Party Funds	1.078	2.725	(1.647)	(60,45)
Rekening Nasabah (satuan penuh) Customer Account (full unit)	5.225	4.905	320	6,52
Pendapatan Marjin Bersih – Pembiayaan Net Margin Income – Financing	14	25	(11)	(45,87)
Beban Marjin Bersih – Pendanaan Net Margin Expense – Funding	43	36	7,5	20,84
Pendapatan Berbasis Jasa Fee-Based Income	3,5	14	(10)	(74,71)
Gain on Forex & Securities Gain on Forex & Securities	21	13	7,7	57,20
Pendapatan Bersih (PBT) Net Income (PBT)	55	19	37	196,83

Profitabilitas

Hingga tahun 2024, pendapatan marjin bersih dari pembiayaan mencapai Rp14 miliar, turun 45,87% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp25 miliar. Pada periode yang sama, beban bersih dari pendanaan adalah Rp43 miliar. Dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp36 miliar, terjadi kenaikan 20,84 %.

Pendapatan jasa forex yang berhasil dibukukan Bank pada tahun 2024 mencapai Rp21 miliar. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp13 miliar, terjadi kenaikan 57,2%. Secara total, pendapatan bersih Cabang Kuala Lumpur tercatat sebesar Rp55 miliar.

Profitability

Until 2024, net margin income from financing reached Rp14 billion, a decrease of 45.87% compared to 2023, which amounted to Rp25 billion. In the same period, net expense from financing amounted to Rp43 billion. Compared to Rp36 billion in the previous year, there was an increase of 20.84%.

The Bank successfully posted Rp21 billion in forex service income in 2024. Compared to 2023, which amounted to Rp13 billion, there was an increase of 57.2%. In total, the net income of the Kuala Lumpur Branch was recorded at Rp55 billion.

Rencana Strategis 2025

Rencana strategis cabang Kuala Lumpur dibuat konsisten dengan fokus utama *grand strategy* kantor pusat, yaitu pengembangan *low cost fund*, peningkatan *fee based income* dan *stability financing growth*. Melalui fokus utama tersebut, cabang Kuala Lumpur diharapkan tetap dapat memberikan kontribusi yang positif kepada Bank.

Pada tahun 2025, cabang Kuala Lumpur berharap dapat memperkenalkan 1 (satu) produk pembiayaan yang sesuai dengan tipe dan kondisi pasar di Malaysia. Selain itu, penguatan aspek tata kelola juga menjadi agenda utama. Kesesuaian tata kelola usaha dengan aturan yang berlaku akan mendukung pertumbuhan dan memastikan keberlanjutan pendapatan yang diperoleh.

Strategic Plan for 2025

The Kuala Lumpur branch’s strategic plan is made consistent with the main focus—the grand strategy of the head office, namely the development of low-cost funds, increasing fee-based income, and stability of financing growth. Through this main focus, the Kuala Lumpur branch is expected to continue to provide positive contributions to the Bank.

By 2025, the Kuala Lumpur branch is expected to be able to introduce 1 (one) financing product that is tailored to the type and market conditions in Malaysia. In addition, strengthening the governance aspect is also a main agenda. The compliance of business governance with applicable regulations will support growth and ensure the sustainability of the income obtained.

SEGMENT TREASURY

Hingga berakhirnya tahun buku 2024, produk dan layanan yang diberikan oleh segmen usaha *treasury* seperti diuraikan dalam tabel di bawah ini.

TREASURY SEGMENT

Until the end of the 2024 financial year, the products and services provided by the Treasury business segment are as described in the following table.

Produk Product	Uraian	Description
Money Market	Aktivitas transaksi <i>Money Market</i> (Pasar Uang) di Bank Muamalat dalam rangka baik pemenuhan likuiditas maupun optimalisasi likuiditas. Dalam aktivitas tersebut, <i>treasury</i> mencatatkan pendapatan dan biaya berupa margin, bagi hasil, athaya dan ujroh atas penempatan maupun pinjaman di pasar uang. Di antara transaksinya sebagai berikut: • Transaksi dengan Bank Indonesia: Operasi pasar terbuka seperti SUKBI, SBIS, TD valas, PASBI dan <i>standing facilities</i> seperti FASBI dan FLISBI • Pengelolaan RIM, PLN dan PLM • Transaksi Antarbank: SIMA dan SIPA (Indonesia), DP2 (Deposito Pihak ke-2), dan Commodity Murabahah (Cabang Kuala Lumpur)	Money Market transaction activities at Bank Muamalat are in order to both fulfill and optimize liquidity. In these activities, the Treasury records income and expenses in the form of margin, profit sharing, athaya, and ujroh for money market placements and loans. Among the transactions are as follows: • Transactions with Bank Indonesia: open market operations such as SUKBI, SBIS, foreign exchange TD, PASBI, and standing facilities, such as FASBI and FLISBI • Management of RIM, PLN, and PLM • Interbank Transactions: SIMA and SIPA (Indonesia), DP2 (2nd Party Deposits), and Commodity Murabahah (Kuala Lumpur Branch)
Foreign Exchange	Aktivitas transaksi Foreign Exchange di Bank Muamalat dalam rangka memenuhi kebutuhan baik nasabah perorangan, nasabah korporasi dan antarbank untuk memperoleh fee-based income dan juga sebagai transaksi pemenuhan kebutuhan bank (Banking Book). Mata uang yang dilayani adalah USD, MYR, SGD, EUR, JPY, SAR, KWD dan MultiCurrency. Produk Forex sebagai berikut: • <i>Cash transaction</i>: <i>Today</i>, <i>Tom (tomorrow)</i> dan <i>Spot</i> • <i>Hedging transaction</i>: <i>hedging sederhana (forward/ Al-Tahawwuth al-Basith)</i> dan <i>hedging kompleks (Al-Tahawwuth al-Murakkab)</i> Selain itu, Bank juga melayani <i>exotic currency</i> seperti Won Korea (KRW), Dinar Jordan (JOD), dan Thailand Bath (THB) dan lain-lain. Nasabah juga dapat melakukan jual beli banknote ke Bank Muamalat untuk mata uang USD, SAR, dan SGD. Transaksi-transaksi di atas dapat dilakukan baik di Indonesia maupun di cabang Kuala Lumpur, Malaysia.	Foreign Exchange transaction activities at Bank Muamalat are in order to meet the needs of individual customers, corporate, and interbank customers to obtain fee-based income and also as transactions to fulfill Bank needs (Banking Book). The currencies served are USD, MYR, SGD, EUR, JPY, SAR, KWD, and MultiCurrency. Forex products are as follows: • Cash transactions: <i>Tod (today)</i>, <i>Tom (tomorrow)</i>, and <i>Spot</i> • Hedging transactions: simple hedging (<i>forward/ Al-Tahawwuth al-Basith</i>) and complex hedging (<i>Al-Tahawwuth al-Murakkab</i>) In addition, the Bank also serves exotic currencies such as Korean Won (KRW), Jordan Dinar (JOD), Thai Bath (THB), and others. Customers can also buy and sell banknotes to Bank Muamalat in USD, SAR, and SGD currencies. The above transactions can be carried out both in Indonesia and at the Kuala Lumpur, Malaysia, branch.



Produk Product	Uraian	Description
<i>Fixed income (sukuk)</i>	Aktivitas transaksi Sukuk di Bank Muamalat Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah dalam berinvestasi sukuk dan memenuhi kebutuhan bank (<i>banking position</i>) untuk mata uang IDR dan USD. Sukuk yang ditransaksikan adalah sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah dan korporasi. Sukuk yang aktif ditransaksikan adalah SR (Sukuk Ritel), PBS (Project Based Sukuk) dan Indoio (Sukuk pemerintah mata uang USD). Transaksi dilakukan dengan nasabah individu, korporasi dan antarbank. Adapun tujuan transaksi sukuk adalah untuk memperoleh <i>fee-based income</i> dan pendapatan margin/ujroh atas kupon sukuk pada portofolio <i>banking book</i>. Melanjutkan pada tahun-tahun sebelumnya, BMI sebagai mitra distribusi sukuk pemerintah, ikut berpartisipasi dalam penjualan sukuk yang diterbitkan tahun ini, yaitu SR016, SR017 dan ST009.	Sukuk transaction activities at Bank Muamalat Indonesia are in order to meet customer needs for investment in sukuk and fulfill the bank's needs (<i>banking position</i>) for IDR and USD currencies. The sukuk transacted are sukuk issued by the Government and corporations. The sukuk that actively transacted are SR (Retail Sukuk), PBS (Project Based Sukuk) and Indoio (USD-denominated Government Sukuk). Transactions are carried out with individual, corporate, and interbank customers. The purpose of sukuk transactions is to obtain fee-based income and margin/ ujhro income on sukuk coupons in the banking book portfolio. Continuing from the previous years, BMI, as the government's sukuk distribution partner, participated in the sale of sukuk issued this year, namely SR016, SR017, and ST009.

Strategi Usaha

Pada tahun 2024, Bank Muamalat mengimplementasikan sejumlah strategi untuk mendorong kinerja segmen *Treasury*, yang di antaranya mencakup:

1. Melayani nasabah individu dan korporasi dalam melakukan transaksi jual dan beli sukuk pemerintah, baik dalam mata uang rupiah maupun dolar Amerika Serikat sebagai pilihan investasi.
2. Melayani transaksi *foreign exchange*, baik *to*, *from*, *spot*, dan *hedging* dalam berbagai mata uang dan transaksi *bank notes* untuk mata uang USD, SGD, SAR, EUR, JPY, AUD, NZD, GBP.
3. Meningkatkan kerja sama *cross selling* dengan produk Bank lainnya, baik korporasi maupun ritel.
4. Melakukan pembelian sukuk untuk portofolio *trading* maupun *banking* yang memberikan imbal hasil yang optimal.
5. Mengembangkan pasar uang antarbank untuk produk syariah dalam tujuan pendalaman pasar keuangan syariah melalui Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank (SIMA), transaksi sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antarbank (SIPA), Wakalah Bil Al Istitsmar (WKBI) dan Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah antarbank (SIKA).
6. Memperkuat rasio PLM, alat likuid, RIM, RPIM dan rasio lainnya dengan melakukan investasi yang optimal pada sukuk, reksa dana, dan produk pasar keuangan syariah lainnya.
7. Mengoptimalkan cabang Kuala Lumpur dalam memberikan layanan transaksi *foreign exchange* untuk nasabah di Kuala Lumpur sendiri maupun nasabah yang terafiliasi ke Indonesia.

Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, *total gain on forex* dari segmen usaha Treasury sekitar Rp41 miliar, naik 43,37% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp29 miliar. Sementara *gain on security* tercatat Rp6,1 miliar, mengalami penurunan 86,64% dibandingkan tahun sebelumnya.

Business Strategy

In 2024, Bank Muamalat implemented a number of strategies to boost the performance of the Treasury segment, including:

1. Serving individual and corporate customers in conducting buying and selling transactions of government sukuk in both rupiah and US Dollar currencies as investment options.
2. Serving foreign exchange transactions, including *to*, *from*, *spot*, and *hedging* in various currencies and banknotes transactions for USD, SGD, SAR, EUR, JPY, AUD, NZD, and GBP.
3. Increase cross-selling cooperation with other products of the Bank, both wholesale and retail.
4. Purchase sukuk for trading and banking portfolios that provide optimal returns.
5. Developing an interbank money market for sharia products in order to deepen the sharia financial market through interbank Mudharabah Investment Certificates (SIMA), interbank sharia-based fund management certificate transactions (SIPA), Wakalah Bil Al Istitsmar (WKBI) and interbank Sharia-Based Commodity Trading Certificates (SIKA).
6. Strengthening the ratios for PLM, liquid assets, RIM, RPIM, and other ratios by making optimal investments in sukuk, mutual funds and other sharia financial market products.
7. Optimizing the Kuala Lumpur branch to provide foreign exchange transaction services for customers in Kuala Lumpur itself and customers affiliated with Indonesia.

Performance in 2024

In 2024, the total gain on forex from the Treasury business segment amounted to approximately Rp41 billion, an increase of 43.37% compared to 2023 which amounted to Rp29 billion. Meanwhile, gain on security was posted at Rp6.1 billion, a decrease of 86.64% compared to the previous year.

KINERJA PROFITABILITAS USAHA TREASURY

Treasury Business Profitability Performance

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion, unless stated otherwise)

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
<i>Gain on Forex</i> (Rp Miliar) Gain on Forex (Rp Billion)	41	29	13	43,37
<i>Gain on Security</i> (Rp Miliar) Gain on Security (Rp Billion)	6,1	46	(40)	(86,64)
<i>Income Margin</i> (Rp Miliar) Income Margin (Rp Billion)	698	678	20	2,94
<i>Expense Margin</i> (Rp Miliar) Expense Margin (Rp Billion)	395	326	70	21,42
NIM – net	303	353	(50)	(14,14)

Profitabilitas

Fee-Based Income (FBI) *forex* pada tahun 2024 mengalami peningkatan 43,37%, dari Rp29 miliar di tahun 2023 menjadi Rp41 miliar. Sedangkan FBI untuk sukuk tercatat Rp6,1 miliar, turun 86,64% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp46 miliar.

Untuk pendapatan marjin di tahun 2024 mencapai Rp698 miliar. Dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp678 miliar, terjadi kenaikan 2,94%. Sementara beban marjin juga mengalami kenaikan sebesar 21,42% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan paling besar berasal dari kenaikan beban baghas surat berharga BI – PaSBI sebesar Rp54,24 miliar, diikuti kenaikan beban bagi hasil pinjaman non bank sebesar Rp17,5 miliar secara tahunan.

Rencana Strategis Tahun 2025

Bank Muamalat telah menyiapkan kebijakan strategis tahun 2025 untuk segmen Treasury, di antaranya adalah:

1. Memperluas transaksi *bank notes* mata uang asing untuk melayani nasabah travel haji dan umrah.
2. Memperluas jangkauan pemasaran kepada nasabah korporasi untuk bertransaksi sukuk.
3. Pemasaran *foreign exchange* yang lebih intens, baik *cash* maupun *hedging* yang sesuai dengan prinsip syariah.
4. Memperluas investasi ke instrumen reksa dana syariah.
5. Menjajaki potensi untuk menjadi primary dealer sukuk International Islamic Liquidity Management (ILM) dan sukuk negara.
6. Mengembangkan pasar uang antarbank untuk produk syariah dalam tujuan pendalaman pasar keuangan syariah melalui SIMA, SiPA, SIKa dan WKBI.
7. Memperkuat rasio PLM, alat likuid, RIM, RPIM dan rasio lainnya dengan melakukan investasi yang optimal pada sukuk, reksa dana, dan produk pasar keuangan syariah lainnya.

Profitability

Fee-Based Income (FBI) of *Forex* increased by 43.37% in 2024, from Rp29 billion in 2023 to Rp41 billion. Meanwhile, the FBI for sukuk was posted at Rp6.1 billion, a decrease of 86.64% compared to 2023, which amounted to Rp46 billion.

Margin income in 2024 reached Rp698 billion. Compared to 2023, which amounted to Rp678 billion, there was an increase of 2.94%. Meanwhile, margin expenses also increased by 21.42% compared to the previous year. The largest increase was derived from an increase in BI securities baggage expenses – PaSBI, in the amount of Rp54.24 billion, followed by an increase in non-bank loan profit sharing expenses in the amount of Rp17.5 billion on an annual basis.

Strategic Plan for 2025

Bank Muamalat has prepared strategic policies for 2025 for the Treasury segment, including:

1. Expand foreign currency banknote transactions to serve hajj and umrah travel customers.
2. Expand marketing reach to corporate customers for sukuk transactions.
3. More intense foreign exchange marketing, both cash and hedging, in accordance with sharia principles.
4. Expanding investment to sharia mutual fund instruments.
5. Exploring the potential to become a primary dealer for International Islamic Liquidity Management (ILM) sukuk and sovereign sukuk.
6. Developing the interbank money market for sharia products with the aim of deepening the sharia financial market through SIMA, SiPA, SIKa, and WKBI.
7. Strengthen the ratios for PLM, liquid assets, RIM, RPIM, and other ratios by making optimal investments in sukuk, mutual funds, and other sharia financial market products.



Tinjauan Kinerja Keuangan

Financial Performance Overview

Uraian tentang kinerja keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat," "BMI," "Bank") disusun berdasarkan Laporan Keuangan Bank yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (DBSD&A) dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

A review of the financial performance of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat," "The Bank") is based on the Bank's Financial Statements, which are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (FAS), including the Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") for the period ending December 31, 2024. These Financial Statements were audited by the Public Accounting Firm (KAP) of Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang, and Ali (DBSD&A), who provided an unqualified opinion.

ASET

Total aset Bank Muamalat hingga akhir tahun buku 2024 mencapai Rp60,0 triliun, turun 10,3% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp67,0 triliun. Penurunan dikontribusi paling besar dari dari aktiva tidak lancar khususnya pembiayaan Musyarakah. Hal ini sejalan dengan aktifitas *reprofiling* pembiayaan pada beberapa *selective* segmen bisnis ritel yaitu sektor pembiayaan yang bersifat *low-risk* dengan hasil maksimal (*high yield*).

ASSETS

As of the end of the 2024 financial year, Bank Muamalat's total assets amounted to Rp60.0 trillion, a decrease of 10.3% compared to Rp67.0 trillion in 2023. The decrease was contributed the most from non-current assets, especially Musyarakah financing. This aligns with financing reprofiling activities in several selective retail business segments, namely low-risk financing sectors with maximum results (high yield).

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion, unless stated otherwise)

Uraian	2024	2023	2022	Description
Aset Lancar	35.432	37.723	36.313	Current Assets
Kas	781	720	702	Cash
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	2.812	5.010	7.191	Current Account and Placement at Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	698	1.464	521	Current Accounts with Other Banks
Penempatan pada Bank Lain	14	4	43	Placement with Other Banks
Investasi pada Surat Berharga	31.127	30.525	27.855	Investment in Securities
Aset Tidak Lancar	24.578	29.230	25.051	Non Current Assets
Piutang	4.850	6.488	6.698	Receivables
Piutang Murabahah	4.520	5.852	6.695	Muharabah Receivables
Piutang Istishna	1	1	1	Istishna Receivables
Piutang Ijarah	0	1	1	Ijarah Receivables
Pinjaman Qardh	329	634	865	Qardh Loans
Pembiayaan Mudharabah	380	594	564	Mudharabah Financing
Pembiayaan Musyarakah	11.527	15.382	10.695	Musyarakah Financing
Penyertaan Saham	408	408	408	Investment in Shares
Tagihan Akseptasi	164	154	46	Acceptance Receivables
Aset yang Diperoleh untuk Ijarah	6	2	1	Assets Received for Ijarah
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(463)	(680)	(690)	Allowance for Impairment Losses
Aset Tetap	3.366	2.791	2.709	Fixed Assets
Aset Pajak Tangguhan	138	138	140	Differed Tax Assets
Aset Lain-lain-Neto	3.924	3.464	3.615	Other Assets-Net
Total Aset	60.022	66.953	61.364	Total Assets

Aset Lancar

Pada tahun 2024, total aset lancar Bank Muamalat mencapai Rp35,4 triliun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp37,7 triliun, terjadi penurunan 6,1%. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia yang tercatat turun dari Rp5,01 triliun di tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp2,8 triliun. Penurunan juga disebabkan oleh Giro pada Bank Lain yang tercatat sebesar Rp698 miliar di tahun 2024 dari sebelumnya 1,5 triliun pada tahun 2023.

Aset Tidak Lancar

Asset tidak lancar Bank Muamalat di tahun 2024 tercatat Rp24,58 triliun, turun 15,9% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp29,2 triliun. Total pembiayaan tercatat sebesar Rp16,7, menurun 25,4% (yoy) jika dibandingkan dengan Desember 2023 sebesar Rp22,5 triliun. Penurunan terbesar berasal dari pembiayaan Musyarakah yang turun sebesar 25,1% dari Rp15,4 triliun di 2023 menjadi Rp11,5 di 2024. Hal tersebut disebabkan oleh penyaluran pembiayaan yang lebih selektif khususnya segmen Enterprise, seiring Bank juga menjalankan strategi transformasi Retail dengan melakukan *shifting* pembiayaan Enterprise ke segmen Retail, selain itu juga terdapat *run off* yang cukup besar pada pada segmen Enterprise.

Current Assets

In 2024, Bank Muamalat's total current assets amounted to Rp35.4 trillion, a decrease of 6.1% compared to Rp37.7 trillion in 2023. This decline was primarily due to a reduction in Current Accounts and Placements with Bank Indonesia, which decreased from Rp5.01 trillion in the previous year to Rp2.8 trillion. Additionally, the decrease was driven by a reduction in Current Accounts with Other Banks, which recorded at Rp1.5 trillion in 2023 to Rp698 billion in 2024.

Non-Current Assets

Bank Muamalat's non-current assets for 2024 were recorded at Rp24.58 trillion, a decrease of 15.9% compared to Rp29.2 trillion in 2023. Total financing was recorded at Rp16.7 trillion, a decrease of 25.4% (yoy) from Rp22.5 trillion in December 2023. The most significant decrease came from Musyarakah financing, which reduced by 25.1%, from Rp15.4 trillion in 2023 to Rp11.5 trillion in 2024. This reduction was due to a more selective approach to financing, particularly in the Enterprise segment. The Bank also implemented a Retail transformation strategy, shifting financing from the Enterprise to the Retail segment. Additionally, there was a substantial runoff in the Enterprise segment.

LIABILITAS

Total liabilitas Bank Muamalat hingga 31 Desember 2024 mencapai Rp13,5 triliun, lebih rendah 10,7% dibandingkan akhir tahun 2023 yang sebesar Rp15,0 triliun. Penurunan dikontribusi oleh penurunan kewajiban pada Bank Indonesia, Giro Wadiah dan Pinjaman yang diterima.

LIABILITIES

As of December 31, 2024, Bank Muamalat's total liabilities amounted to Rp13.5 trillion, a 10.7% decrease from Rp15.0 trillion at the end of 2023. The decrease was driven by reductions in liabilities to Bank Indonesia, Wadiah Current Account, and Borrowings.

TABEL POSISI LIABILITAS

Liabilities Position Table

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion, unless stated otherwise)

Uraian	2024	2023	2022	Description
Liabilitas Jangka Pendek	11.081	11.289	9.433	Short-term Liabilities
Liabilitas Segera	298	164	116	Immediate Payables
Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	50	83	68	Undistributed Profit Sharing
Simpanan	10.699	11.022	9.227	Deposits
Giro Wadiah	3.270	3.965	3.170	Wadiah Current Account
Tabungan Wadiah	7.429	7.058	6.057	Wadiah Savings Account
Utang Pajak	34	20	22	Tax Payable
Liabilitas Jangka Panjang	2.408	3.759	2.845	Long-term Liabilities
Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja	145	127	125	Estimated Liabilities for Employee Benefits
Liabilitas kepada Bank Indonesia	1.410	2.170	-	Liabilities to Bank Indonesia
Simpanan dari Bank Lain	28	46	2.215	Deposits on Other Banks
Liabilitas Akseptasi	31	8	14	Acceptance Payable



(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion, unless stated otherwise)

Uraian	2024	2023	2022	Description
Pinjaman yang Diterima	500	1.000	500	Borrowing
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	1	1	1	Estimated Losses on Commitments and Contingencies
Liabilitas Lain-lain	293	407	431	Other Liabilities
Total Liabilitas	13.489	15.048	10.565	Total Liabilities

Liabilitas Jangka Pendek

Hingga berakhirnya tahun buku 2024, liabilitas jangka pendek Bank tercatat senilai Rp11,0 triliun, berkurang 2,7% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp11,3 triliun. Giro Wadiah tercatat sebesar Rp3,27 triliun dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp3,96 triliun atau turun 17,5% (yoy), penurunan giro wadiah disebabkan oleh *reprofiling* terhadap nasabah pada segmen *enterprise* yang memiliki biaya dana tinggi. Sementara itu, tabungan wadiah tumbuh 5,3% (yoy) atau tercatat sebesar Rp7,43 triliun dari Rp7,06 triliun di tahun sebelumnya, sejalan dengan upaya Bank untuk melakukan akselerasi dana ritel khususnya Wadiah.

Liabilitas Jangka Panjang

Bank mencatatkan liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2024 mencapai Rp2,3 triliun, turun dari tahun 2023 yang sebesar Rp3,8 triliun, terjadi penurunan 39,5%. Penurunan dikontribusi oleh Kewajiban PasBI yang turun sebesar Rp760 miliar atau 35% (yoy) dari Rp2,17 triliun di 2023 menjadi sebesar Rp1,41 triliun di 2024. Pinjaman yang diterima juga turun 50% menjadi Rp500 miliar dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp1,0 triliun. Upaya ini memiliki dampak positif pada beban dana liabilitas jangka panjang yang lebih efisien.

Dana Syirkah Temporer

Bank mencatatkan dana syirkah temporer mencapai Rp41,3 triliun, terjadi penurunan 11,4% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp46,7 triliun. Penurunan terbesar dikontribusi dari Deposito Mudharabah yang turun sebesar 22,2% (yoy). Deposito Mudharabah tercatat sebesar 20,69 triliun di tahun 2024 dari sebelumnya Rp26,57 triliun di tahun 2023. Tabungan Mudharabah juga tercatat sebesar Rp10,10 triliun dari posisi tahun sebelumnya Rp10,33 triliun atau turun 2,2% (yoy). Sementara itu, Giro Mudharabah meningkat 16,3% (yoy) menjadi Rp2,67 triliun dibanding tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp2,29 triliun.

TABEL PERKEMBANGAN DANA SYIRKAH TEMPORER

Temporary Syirkah Fund Development Table

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion, unless stated otherwise)

Uraian	2024	2023	2022	Description
Giro Mudharabah	2.672	2.297	1.862	Mudharabah Current Account
Tabungan Mudharabah	10.102	10.332	10.710	Mudharabah Deposit
Deposito Mudharabah	20.688	26.577	26.501	Mudharabah Deposit
Surat Berharga yang Diterbitkan	7.853	7.483	6.525	Marketable Securities Issued
Total Dana Syirkah Temporer	41.315	46.688	45.597	Total temporary Syirkah Fund

Short-term Liabilities

By the end of the 2024 financial year, Bank Muamalat's short-term liabilities amounted to Rp11.0 trillion, a 2.7% decrease compared to Rp11.3 trillion in 2023. Wadiah Current Account was recorded at Rp3.27 trillion, a decrease of 17.5% (yoy) from Rp3.96 trillion in 2023, the decrease in wadiah current accounts was due to reprofiling of customers in the enterprise segment who have a high cost of funds. Meanwhile, Wadiah savings grew by 5.3% (yoy), or Rp7.43 trillion, compared to Rp7.06 trillion in the previous year, in line with the Bank's efforts to accelerate retail funds, especially Wadiah.

Long-term Liabilities

The Bank's long-term liabilities as of December 31, 2024, were recorded at Rp2.3 trillion, a decrease 39.5% from 2023 at Rp3.8 trillion. This decline was largely driven by a reduction in PasBI Obligations, which reduced by Rp760 billion, or 35% (yoy), from Rp2.17 trillion in 2023 to Rp1.41 trillion in 2024. Borrowings also reduced by 50%, from Rp1.0 trillion in 2023 to Rp500 billion in 2024. This effort has a positive impact long-term liabilities.

Temporary Syirkah Fund

The Bank's temporary syirkah funds were recorded at Rp41.3 trillion, a decrease of 11.4% from Rp46.7 trillion in 2023. The most significant decrease came from Mudharabah Deposits, which reduced by 22.2% (yoy), from Rp26.57 trillion in 2023 to Rp20.69 trillion in 2024. Mudharabah Savings also saw a slight decline of 2.2% (yoy), from Rp10.33 trillion in 2023 to Rp10.10 trillion in 2024. On the other hand, Mudharabah Current Account increased by 16.3% (yoy), rising to Rp2.67 trillion from Rp2.29 trillion in 2023.

Dana Pihak Ketiga

Total dana pihak ketiga Bank Muamalat pada tahun 2024 mencapai Rp41,7 triliun, sedangkan pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp47,6 triliun, sehingga terjadi penurunan 12,4%. Penurunan dikontribusi oleh Deposito dan Giro. Deposito tercatat sebesar Rp19,28 triliun dibanding tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp24,82 triliun, menurun sebesar Rp5,54 triliun atau 22,3% (yoy). Giro juga menurun 7,1% (yoy) dari sebelumnya Rp6,09 triliun di 2023 menjadi Rp5,66 triliun di 2024. Sementara itu, Tabungan tercatat meningkat 0,8% (yoy) menjadi Rp16,77 triliun dibanding tahun sebelumnya di Rp24,82 triliun. Bank secara berkelanjutan melakukan *reprofiling* Dana Pihak Ketiga yang fokus pada dana murah (*low cost fund*). Hal ini tercermin pada peningkatan rasio CASA dari sebelumnya 47,14% pada 2023 menjadi 53,19% di 2024, yang dapat memberikan dampak positif bagi profitabilitas Bank.

TABEL POSISI DANA PIHAK KETIGA

Third-Party Fund Position Table

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion, unless stated otherwise)

Uraian	2024	2023	2022	Description
Giro	5.661	6.096	4.878	Current Account
Tabungan	16.770	16.642	16.122	Saving
Deposito	19.280	24.822	25.143	Deposit
Total Dana Pihak Ketiga	41.711	47.559	46.143	Total Third-Party Fund

Penyaluran Dana terhadap UMKM

Penyaluran dana kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sampai dengan akhir tahun 2024 mencapai Rp1,74 triliun, mengalami penurunan 24% dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp2,3 triliun. Penurunan sejalan dengan fokus Bank pada ekosistem haji dan umrah, ASN/BPG, pensiun, rumah sakit pendidikan dan segmen Enterprise sebagai *entry gate* untuk segment retail dalam memperluas peluang bisnis retail.

Dari sisi kualitas, pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) pada tahun 2024 terjaga pada level 0,8%. Kondisi tersebut lebih baik jika dibandingkan NPF UMKM perbankan syariah nasional yang tercatat lebih tinggi sebesar 0,91%.

EKUITAS

Hingga akhir tahun buku 2024, ekuitas Bank Muamalat mencapai Rp5,21 triliun, naik 0,04% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp5,21 triliun. Peningkatan dikontribusi dari peningkatan laba.

Third-Party Funds

Bank Muamalat's total third-party funds in 2024 amounted to Rp41.7 trillion, a decrease of 12.4% from Rp47.6 trillion in 2023. The decrease was mainly due to reductions in Deposits and Current Accounts. Deposits were recorded at Rp19.28 trillion compared to 2023, which was recorded at Rp24.82 trillion, a decrease of Rp5.54 trillion, or 22.3% (yoy). Current accounts also declined by 7.1% (yoy), from Rp6.09 trillion in 2023 to Rp5.66 trillion in 2024. However, Savings increased by 0.8% (yoy), reaching Rp16.77 trillion compared to Rp24.82 trillion in the previous year. The Bank has been actively reprofiling its Third-Party Funds to focus on low-cost funds. This strategy is reflected in the increase in the CASA ratio, which rose from 47.14% in 2023 to 53.19% in 2024, which can have a positive impact on the Bank's profitability.

Distribution of Funds to MSMEs

Distribution of funds to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) until the end of 2024 reached Rp1.74 trillion, a 24% decrease from Rp2.3 trillion in 2023. This reduction aligns with the Bank's strategic focus on the Hajj and Umrah ecosystem, ASN/BPG, pensions, teaching hospitals, and the Enterprise segment, which serves as an entry point for expanding retail business opportunities.

In terms of quality, non-performing financing (NPF) remained stable at 0.8% in 2024, which is better than the national sharia banking MSME NPF, which was recorded at 0.91%.

EQUITY

By the end of the 2024 financial year, Bank Muamalat's equity reached Rp5.21 trillion, an slight increase of 0.04% compared to Rp5.21 trillion in 2023. This growth was primarily driven by an increase in profit.

**TABEL POSISI EKUITAS**

Equity Position Table

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion, unless stated otherwise)

Uraian	2024	2023	2022	Description
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.298	2.298	2.298	Issued and Fully Paid-up Capital
Tambahan Modal Disetor – Bersih	1.571	1.571	1.571	Additional Paid-in Capital – Net
Keuntungan Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti – Setelah Pajak	70	86	82	Profit Remeasurement of post-employment benefits - After tax
Keuntungan (Kerugian) Belum Direalisasi dari Perubahan Harga Pasar Efek Tersedia untuk Dijual	-	-	(1)	Unrealized Gain (Loss) from Changes in Market Price of Available-for-Sale Marketable Securities.
Surplus Revaluasi atas Aset Tetap – Setelah Pajak	559	559	564	Revaluation Surplus of Fixed Assets – After Tax
Saldo Laba	721	703	689	Retained Earnings
Total Ekuitas	5.219	5.216	5.202	Total Equity

KINERJA LABA RUGI

Bank Muamalat berhasil membukukan laba tahun 2024 sebesar Rp16,58 miliar. Dibandingkan tahun 2023 yang Rp13,29 miliar, terjadi kenaikan 24,7%.

INCOME STATEMENT

Bank Muamalat successfully recorded a profit of Rp16.58 billion in 2024, representing a 24.7% increase compared to Rp13.29 billion in 2023.

TABEL LABA RUGI

Income Table

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion, unless stated otherwise)

Uraian	2024	2023	2022	Description
Jumlah Pendapatan Bank sebagai Mudharib	2.134	2.153	1.764	Total Bank Income as Mudharib
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil dana Syirkah Temporer	(1.954)	(1.949)	(1.435)	Third Parties Share on the Returns of Temporary Syirkah Funds
Hak Bagi Hasil Milik Bank	180	205	330	The Right of Bank's Share in Revenue Sharing
Pendapatan Operasional Lainnya	855	905	1.098	Other Operational income
Beban Operasional	(1.267)	(1.208)	(1.230)	Operational Expenses
Pembalikan (Beban) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Non Produktif	213	94	(130)	Reversal (Expenses) Allowance for Impairment Losses on Earning and Non-Earning Assets
Keuntungan Selisih Kurs	48	23	30	Gain on Foreign Exchange
Laba (Rugi) Usaha	29	18	98	Income (Loss) from Operations
Pendapatan (Beban) Non Operasional-Neto	(9)	(4)	(46)	Non-Operating (Expense) - Net
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	20	14	52	Income (Loss) before Tax
Manfaat (Beban) Pajak	(2)	(1)	(25)	IncomeTax (Tax Expense)
Laba Bersih	18	13	27	Net Profit
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	2	19	27	Comprehensive Income for the Current Year
Laba Tahun Berjalan per Saham (Rupiah)	0,55	0,40	0,80	Income for the Current Year per Share (Rupiah)

Pendapatan Usaha

Dari sisi profitabilitas, Bank senantiasa meningkatkan profitabilitas melalui upaya peningkatan margin income dan fee-based income. Pendapatan usaha Bank pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 mencapai Rp2,13

Operating Income

In terms of profitability, the Bank continues to increase profitability through efforts to increase margin income and fee-based income. For the financial year ending December 31, 2024, the Bank's operating income reached Rp2.13

triliun, lebih rendah 0,9% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp2,15 triliun. Penurunan terjadi dengan seiringnya penurunan pembiayaan disebabkan oleh *run off* pada segmen Enterprise dan SME yang cukup besar serta fokus Bank pada strategi transformasi retail dengan melakukan shifting pembiayaan segmen Enterprise ke segmen Retail dengan tujuan mengoptimalkan penyaluran pembiayaan retail seiring dengan pengurangan risiko pada konsentrasi pembiayaan di segmen Enterprise dan penyaluran pembiayaan *high yield*.

Sedangkan untuk pendapatan operasional lainnya, yang berhasil dibukukan mencapai Rp855 miliar. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp905 miliar, terjadi penurunan 5,5%. Pertumbuhan negative fee-based income tersebut dipengaruhi oleh penurunan *financing fee* sebesar 47% atau tercatat Rp114 miliar pada 2023 menjadi Rp60 miliar pada 2024. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan yang lebih rendah dari tahun sebelumnya dan penurunan bisnis *Trade Finance*. Pendapatan *asset sale recovery* juga tercatat sebesar Rp511,7 miliar atau menurun 9.24%.

Asset Sale Recovery akan cenderung menurun dari tahun ke tahun seiring dengan tingkat kesulitan dari aset yang tersisa. Bank akan terus melakukan upaya optimalisasi *recovery* atas portofolio *Asset Sale* sebagai komitmen untuk perbaikan dan penyelesaian aset bermasalah.

Beban Usaha

Total beban bagi hasil dana syirkah temporer pada tahun 2024 tercatat Rp1,95 triliun. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp1,94 triliun, terjadi peningkatan 0,1%. Pertumbuhan *Margin Expense* disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi tantangan bagi Bank, diantaranya adalah tingginya beban bagi hasil ke nasabah. Hal ini disebabkan adanya tekanan pasar yang salah satunya dipicu oleh tren kenaikan suku bunga Bank Indonesia yang sejak akhir tahun 2022 terus mengalami peningkatan hingga level 6,25% meski di Desember 2024 BI7DRR turun menjadi 6,00%. Penurunan tersebut diharapkan dapat menurunkan beban bagi hasil kepada nasabah, dimana pada gilirannya diharapkan dapat menurunkan suku bunga acuan LPS untuk kemudian menekan besaran *Cost of Fund*.

Sementara untuk beban operasional lainnya, mengalami kenaikan 4,1%, yaitu dari Rp1,20 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp1,27 triliun di tahun 2024. Peningkatan *Operating expense* (Opex) disebabkan oleh meningkatnya beban umum dan administrasi serta beban karyawan yang masing-masing meningkat sebesar 6,6% dan 3,3% (yoy). Untuk menjaga tingkat Opex, Bank melakukan upaya efisiensi operasional yang bertujuan menjaga performa keuangan dengan memastikan seluruh aspek dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan Bank.

trillion, a slight decrease of 0.9% compared to Rp2.15 trillion in 2023. This decline was primarily due to a reduction in financing, driven by a significant runoff in the enterprise and SME segments, alongside the Bank's focus on retail transformation by shifting financing from the enterprise to the retail segment. This strategy aims to optimize retail financing distribution while reducing the risk of financing concentration in the enterprise segment and focusing on high-yield financing.

In terms of other operating income, the Bank recorded Rp855 billion, a 5.5% decrease from Rp905 billion in 2023. The negative growth in fee-based income was mainly due to a 47% decline in financing fees, which decreased from Rp114 billion in 2023 to Rp60 billion in 2024. This was in line with slower financing growth compared to the previous year and a downturn in the Trade Finance business. Additionally, asset sale recovery income was recorded at Rp511.7 billion, reflecting a 9.24% decrease.

Asset Sale Recovery will tend to decrease from year to year in line with the level of difficulty of the remaining assets. The Bank remains committed to optimizing the recovery of its Asset Sale portfolio as part of its efforts to improve and resolve the non-performing assets.

Operating Expenses

In 2024, the total profit-sharing cost for temporary syirkah funds was recorded at Rp1.95 trillion, a slight increase of 0.1% compared to Rp1.94 trillion in 2023. The growth in margin expenses was driven by several challenges faced by the Bank, one of which was the significant profit-sharing obligations to customers. These were influenced by market pressures, particularly the upward trend in Bank Indonesia's interest rates, which had steadily increased since late 2022 and peaked at 6.25%, although the BI7DRR rate reduced to 6.00% in December 2024. The decline is expected to ease the profit-sharing burden on customers, potentially leading to a decrease in the LPS benchmark interest rate and, as a result, a reduction in the Cost of Funds.

At the same time, other operational expenses increased by 4.1%, from Rp1.20 trillion in 2023 to Rp1.27 trillion in 2024. The increase in Operating Expense (Opex) was mainly due to higher general and administrative expenses, along with employee-related expenses, which grew by 6.6% and 3.3% (yoy), respectively. To maintain the Opex level, the Bank is implementing operational efficiency measures to manage financial performance, ensuring all aspects of the organization contribute positively to the Bank's growth.



Penghasilan Komprehensif Lain

Bank menutup tahun buku 2024 dengan laba komprehensif tercatat Rp2,19 miliar, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp19,4 miliar. Hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah laba komprehensif lain bersih setelah pajak.

ARUS KAS

Bank membukukan kas dan setara kas pada akhir tahun buku 2024 sekitar Rp4.3 triliun, menurun 40% dibandingkan posisi tahun 2023 yang sebesar Rp7,1 triliun. Arus kas dari aktivitas pendanaan menurun Rp4,4 triliun menjadi negatif Rp929 miliar. Sementara itu, arus kas dari aktifitas Operasi dan arus kas dari aktivitas investasi meningkat masing-masing Rp1,7 triliun dan Rp1,0 triliun.

TABEL ARUS KAS

Cash Flow Table

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion, unless stated otherwise)

Uraian	2024	2023	2022	Description
Arus kas dari Aktivitas Operasi	(1.841)	(3.588)	1.112	Cash Flow from Operating Activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(121)	(1.161)	(2.604)	Cash Flow from Investing Activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(930)	3.489	2.300	Cash Flow from Financing Activities
Kenaikan/(Penurunan) kas dan setara kas Bersih	(2.891)	(1.259)	809	Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalent
Kas dan setara kas awal tahun	7.198	8.458	7.649	Cash and Cash Equivalent at the Beginning of the Year
Kas dan setara kas akhir tahun	4.307	7.198	8.458	Cash and Cash Equivalent at the End of the Year

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun buku 2024 tercatat negatif Rp1,84 triliun, mengalami peningkatan 49% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar negatif Rp3,6 triliun. Peningkatan dikontribusi oleh aktivitas penyaluran dana pada pembiayaan Musyarakah.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan hingga 31 Desember 2024 adalah negatif Rp930 miliar, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang negatif Rp3,5 triliun. Penurunan dikontribusi oleh penurunan kewajiban pada Bank Indonesia, penurunan pinjaman yang diterima dan penempatan pada sertifikat Mudharabah antar Bank (SIMA).

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi hingga 31 Desember 2024 mencapai minus Rp121 miliar, meningkat 90% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar minus Rp1,1 triliun. Peningkatan dikontribusi oleh kenaikan perolehan investasi pada surat berharga.

Other Comprehensive Income

The Bank concluded the 2024 financial year with a comprehensive profit of Rp2.19 billion, a significant decline from Rp19.4 billion in 2023. The decrease was mainly due to a reduction in other comprehensive income after tax.

CASH FLOW

By the end of 2024, the Bank's cash and cash equivalents were recorded at approximately Rp4.3 trillion, a decrease of 40% from Rp7.1 trillion in 2023. Cash flow from financing activities reduced by Rp4.4 trillion, resulting in a negative balance of Rp929 billion. On the other hand, cash flow from operating and investing activities increased of Rp1.7 trillion and Rp1.0 trillion, respectively.

Cash Flow from Operating Activities

In the 2024 financial year, net cash from operating activities was recorded at negative Rp1.84 trillion, an increase of 49% from negative Rp3.6 trillion in 2023. The improvement was largely driven by fund distribution through Musyarakah financing.

Cash Flow from Financing Activities

As of December 31, 2024, net cash used in financing activities was recorded at negative Rp930 billion, a decrease from negative Rp3.5 trillion in 2023. This was mainly due to reductions in liabilities to Bank Indonesia, borrowings, and placements with interbank Mudharabah certificates (SIMA).

Cash Flow from Investing Activities

Net cash used for investing activities as of December 31, 2024, was negative Rp121 billion, an increase of 90% from negative Rp1.1 trillion in the previous year. The growth was primarily driven by increased investments in securities.

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas

Hingga berakhirnya 31 Desember 2024, posisi kas dan setara kas Bank tercatat menurun 40%, dari Rp7,2 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp4,3 triliun di tahun 2024. Penurunan dikontribusi oleh penurunan penempatan pada Bank Indonesia dan Giro bank Indonesia.

RASIO KINERJA

Pengukuran rasio kinerja Bank Muamalat mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Rasio yang disampaikan melalui tabel di bawah adalah rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas Bank. Rasio tersebut mengindikasikan keberhasilan dan kemampuan Bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber daya yang ada.

Secara umum, rasio kinerja utama Bank Muamalat di tahun 2024 mengalami peningkatan, seperti dibuktikan dengan membaiknya beberapa rasio inti keuangan. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencapai 28,48%, sementara pada tahun sebelumnya sebesar 29,42%.

Untuk rasio rentabilitas, Bank mencatatkan *Return on Equity* (ROE) pada tahun 2024 mencapai 0,42%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,28%. Kemudian, *Return on Asset* (ROA) sebesar 0,03%, sedangkan tahun sebelumnya 0,02%. Untuk tingkat efisiensi yang tercermin dari Rasio BOPO, yakni sebesar 99,04%, sedikit lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang 99,41%.

Rasio kualitas aset yang ditunjukkan melalui rasio *Non-Performing Financing* (NPF) *Gross* mencapai 3,35%, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 2,06%. Sementara NPF *Nett* terealisasi 2,74%, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,66%.

TABEL RASIO KINERJA

Performance Ratio Table

(dalam %)

(in %)

Uraian	2024	2023	2022	Description
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	28,48	29,42	32,70	Capital Adequacy Ratio Requirement (CAR)
Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif	2,15	1,73	2,11	Non-Performing Earning Assets and Non-Performing Non-Earning Assets to Total Earning Assets and Non-Earning Assets
Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif	2,17	1,75	2,15	Non-Performing Earning Assets to Total Earning Assets
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap Aset Produktif	0,94	1,24	1,60	Allowance for impairment in value of financial assets to Earning Assets
NPF <i>Gross</i>	3,35	2,06	2,78	NPF <i>Gross</i>
NPF <i>Net</i>	2,74	0,66	0,86	NPF <i>Net</i>

Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents

By the end of December 31, 2024, cash and cash equivalents decreased by 40%, from Rp7.2 trillion in 2023 to Rp4.3 trillion in 2024. The decline was attributed to reduced placements with Bank Indonesia and Bank Indonesia Current Accounts (Giro).

PERFORMANCE RATIOS

Bank Muamalat's performance ratios are measured based on the Financial Services Authority Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2020, concerning the Transparency and Publication of Reports of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The ratios presented in the table below are the Bank's liquidity, solvency, and profitability ratios. These ratios indicate the Bank's success and ability to generate profits using existing resources.

In general, Bank Muamalat's key performance ratio in 2024 increased, as reflected by the improvement of several core financial ratios. The Capital Adequacy Ratio (CAR) reached 28.48%, slightly down from 29.42% in 2023.

For the profitability ratio, the Bank recorded the Return on Equity (ROE) at 0.42%, a decrease compared to the previous year of 0.28%. Further, the Return on Assets (ROA) was recorded at 0.03%, while in the previous year, it was recorded at 0.02%. For the level of efficiency, as reflected by the BOPO ratio, it was recorded at 99.04%, slightly better than the previous year, which was 99.41%.

The asset quality ratio, as indicated by the Gross Non-Performing Financing (NPF) ratio, decreased to 3.35% from 2.06% in the previous year. Meanwhile, net NPF was realized at 2.74%, a decrease compared to the previous year, which was 0.66%.



(dalam %)

(in %)

Uraian	2024	2023	2022	Description
Return on Assets (ROA)	0,03	0,02	0,09	Return on Assets (ROA)
Return on Equity (ROE)	0,42	0,28	0,53	Return on Equity (ROE)
Net Imbalan (NI)	0,33	0,37	0,66	Net Income
Net Operating Margin (NOM)	0,06	0,03	0,20	Net Operating Margin (NOM)
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	99,04	99,41	96,62	Operating Expenses to Operating Income (BOPO)
Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan	71,03	71,11	59,82	Profit Sharing Financing to Total Financing
Financing to Deposit Ratio (FDR)	40,08	47,14	40,63	Financing to Deposit Ratio (FDR)

RASIO KEPATUHAN

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/ SEOJK.032020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Rasio kepatuhan meliputi: Perhitungan pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); Perhitungan persentase Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing pada posisi laporan; serta Perhitungan persentase Posisi Devisa Neto (PDN) pada posisi laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPK, GWM rupiah dan valas serta PDN bagi Bank Umum Syariah.

TABEL RASIO KEPATUHAN

Compliance Ratio Table

(dalam %)

(in %)

Uraian	2024	2023	2022	Description
Kepatuhan				Compliance
Persentase Pelanggaran BMPD				Percentage of BMPD Violations
Pihak Terkait	0,00	0,00	0,00	Related Parties
Pihak Tidak Terkait	0,00	0,00	0,00	Non-related parties
Persentase Pelampauan BMPD				Percentage of BMPD Exceedance
Pihak Terkait	0,00	0,00	0,00	Related Parties
Pihak Tidak Terkait	0,00	0,00	0,00	Non-related parties
GWM				GWM
GWM Rupiah				GWM in Rupiah
Harian	0,00	4,59	13,87	Daily
Rata-rata	2,69	7,50	7,50	Average
GWM Valuta Asing	1,14	1,18	1,84	GWM in Foreign Exchange
Posisi Devisa Neto (PDN) secara Keseluruhan	1,13	0,23	0,46	Overall Net Open Position (NOP)

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Hingga berakhirnya tahun buku 2024, Bank memiliki tagihan komitmen mencapai Rp311 miliar, lebih tinggi 75,7% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp177 miliar hal ini disebabkan adanya peningkatan volume transaksi valas dari nasabah dibandingkan tahun sebelumnya.

COMPLIANCE RATIO

In line with Financial Services Authority Circular Letter No. 10/ SEOJK.03/2020, concerning the Transparency and Publication of Reports of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, the compliance ratio includes calculations related to violations and exceedances of the Maximum Limit for Disbursement of Funds (BMPD); the calculation of the percentage of Minimum Statutory Reserves (GWM) in both Rupiah and foreign currency in the position of the report; and the percentage of the Net Open Position (PDN) in the report, in accordance with regulations governing the Legal Lending Limit, GWM in Rupiah and foreign currency, and PDN for Sharia Commercial Banks.

COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

By the close of the 2024 financial year, the Bank's commitment receivables amounted to Rp311 billion, an increase of 75.7% from the 2023 figure of Rp177 billion. The increase was primarily due to higher volumes of foreign exchange transactions conducted by customers compared to the previous year.

Sementara tagihan kontinjensi sampai dengan akhir tahun 2024 mencapai Rp5 miliar, turun 85,7% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp35 miliar. Turunnya pendapatan menjadi penyebab turunnya tagihan kontinjensi.

Untuk kewajiban komitmen Bank hingga 31 Desember 2024 tercatat mencapai Rp747 miliar, mengalami kenaikan 40,4% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp532 miliar.

Sedangkan kewajiban kontinjensi mencapai Rp35 miliar, turun 28,56% dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp49 miliar.

Meanwhile, contingent receivables declined significantly to Rp5 billion by the end of 2024, a decrease of 85.7% from Rp35 billion in 2023. The decline was due to a reduction in income.

As for the Bank's commitment liabilities as of December 31, 2024, were recorded at Rp747 billion, an increase of 40.4% compared to 2023, which was Rp532 billion.

Contingent liabilities was recorded at Rp35 billion, a decrease of 28.56%, from Rp49 billion in the previous year.

TABEL PERKEMBANGAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Commitment and Contingency Development Table

(Rp miliar)

(Rp billion)

Uraian	2024	2023	2022	Description
Tagihan Komitmen	311	177	230	Commitment Receivable
Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	-	-	-	Unused Financing Facilities
Posisi valas yang akan diterima dari transaksi <i>spot & forward</i>	311	177	230	Forex positions to be received from spot and forward transactions
Kewajiban Komitmen	747	532	800	Commitment Liabilities
Fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah yang Belum Ditarik	517	240	323	Unused Financing Facilities to Customers
Fasilitas Pembiayaan kepada Bank yang Belum Ditarik	0	0	0	Unused Financing Facilities for Banks
<i>Irrevocable</i> L/C yang Masih Berjalan	13	55	120	Outstanding Irrevocable L/C
Posisi Penjualan <i>Spot</i> dan <i>Forward</i> yang Masih Berjalan	217	237	357	Outstanding Spot and Forward Sales Position
Tagihan Kontinjensi	5	35	47	Contingent Receivables
Garansi yang Diterima	-	-	-	Guarantees Received
Pendapatan dalam Penyelesaian	5	35	47	Income in Progress
Kewajiban Kontinjensi	35	49	85	Contingent Liabilities
Garansi yang Diberikan	35	49	85	Warranty Issued

INFORMASI KINERJA KEUANGAN LAIN

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Bank selalu berupaya menjaga rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) agar sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh regulator. Beragam upaya penguatan modal juga terus dilakukan guna menjaga rasio KPMM.

Pada tahun 2024, rasio KPMM bank mencapai 28,48%, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 29,42%. Hal tersebut dikarenakan penurunan total modal dari Rp6,99 triliun pada 2023 menjadi Rp5,96 triliun di tahun 2024. Total ATMR tercatat menurun sebesar Rp2,91 triliun sejalan dengan strategi Bank untuk fokus pada bisnis ritel dan lebih selektif dalam penyaluran pembiayaan segmen korporasi.

OTHER FINANCIAL PERFORMANCE INFORMATION

Capital Adequacy Requirement (CAR)

The Bank consistently aims to uphold its Capital Adequacy Ratio (CAR) in line with regulatory requirements. To support this, various initiatives are being undertaken to strengthen the Bank's capital position and ensure CAR remains at a healthy level.

In 2024, the Bank's CAR (KPMM) was recorded at 28.48%, slightly down from 29.42% in 2023. The decline was primarily due to a reduction in total capital, from Rp6.99 trillion in 2023 to Rp5.96 trillion in 2024. Total Risk-Weighted Assets (ATMR) declined by Rp2.91 trillion, in line with the Bank's strategy to prioritize the retail business and adopt a more selective approach in disbursing financing for the corporate sector.

**TABEL KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM**

Table of Capital Adequacy Requirements

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion, unless stated otherwise)

Uraian	2024	2023	2022	Description
Modal Inti (<i>Tier 1</i>)	3.807	4.802	4.796	Core Capital (<i>Tier 1</i>)
Modal Inti Utama (CET 1)	3.807	4.802	4.796	Main Core Capital (CET 1)
Modal Inti Tambahan (AT 1)	-	-	-	Additional Core Capital (AT 1)
Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>)	2.133	2.189	2.176	Complementary Capital (<i>Tier 2</i>)
Total Modal	5.940	6.990	6.972	Total Capital
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	20.854	23.762	21.323	Risk Weighted Assets (RWA)
Rasio KPMM (Aktual) (%)				Capital Adequacy Ratio (KPMM) (Actual) (%)
Rasio CET 1 (%)	18,26	20,21	22,49	CET 1 Ratio
Rasio AT 1 (%)	0,00	0,00	0,00	AT 1 Ratio
Rasio <i>Tier 1</i> (%)	18,26	20,21	22,49	<i>Tier 1</i> Ratio
Rasio <i>Tier 2</i> (≥ <i>Tier 1</i>) (%)	10,23	9,21	10,21	<i>Tier 2</i> Ratio (highest is equal to <i>Tier 1</i>)
Rasio Total KPMM (%)	28,48	29,42	32,70	KPMM Total Ratio (%)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Sebagai salah satu upaya mitigasi risiko di masa yang akan datang, Bank Muamalat membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan penyisihan kerugian terhadap portofolio piutang serta pembiayaan yang dimiliki oleh Bank. Pada tahun 2024, jumlah CKPN dan Penyisihan Kerugian yang dibentuk oleh Bank telah sesuai dengan peraturan, seperti ditampilkan melalui tabel di bawah.

Allowance for Impairment Losses

As an effort to mitigate future risks, Bank Muamalat has set aside an Allowance for Impairment Losses (CKPN), along with provisions for losses on its receivables and financing portfolios. In 2024, the Bank's CKPN and provisions for losses were established in compliance with regulatory requirements, as detailed in the table below.

TABEL PERHITUNGAN CKPN DAN PENYISIHAN KERUGIAN

Calculation of CKPN and Allowance for Losses Table

(Rp miliar)

(Rp billion)

Uraian Description	2024				2023			
	CKPN		PPA Wajib Dibentuk PPA must be Established		CKPN		PPA Wajib Dibentuk PPA must be Established	
	Individual	Kolektif Collective	Umum General	Khusus Special	Individual	Kolektif Collective	Umum General	Khusus Special
Penempatan pada Bank Lain Placements with Other Banks	0	0	7.127	0	-	-	14,68	-
Tagihan <i>Spot</i> dan <i>Forward</i> Spot and Forward Claims	0	0	0,05	0	-	-	0,03	-
Surat Berharga yang Dimiliki Securities	0	0	80	0	-	-	82,30	-
Tagihan Akseptasi Acceptance Receivables	0	74	0,5	74	-	71,87	0,49	70,26
Piutang Murabahah Murabahah Receivables	77	67	28	102	137,59	88,46	37,90	109,83
Piutang Istishna' Istishna' Receivables	0	0,09	0,09	0	-	0,01	0,01	-
Piutang Qardh Qardh Receivables	0	8	2	61	-	62,11	4,92	46,46
Piutang Sewa Lease Receivables	0	1	0	1	-	1,05	-	1,07
Pembiayaan Mudharabah Mudharabah Financing	0	4	4	2	-	8,12	5,92	2,20

(Rp miliar)

(Rp billion)

Uraian Description	2024				2023			
	CKPN		PPA Wajib Dibentuk PPA must be Established		CKPN		PPA Wajib Dibentuk PPA must be Established	
	Individual	Kolektif Collective	Umum General	Khusus Special	Individual	Kolektif Collective	Umum General	Khusus Special
Pembiayaan Musyarakah Musharaka Financing	0	146	98	225	-	225,32	135,80	93,19
Pembiayaan Lainnya Other Financing	0	0	0	0	-	-	-	-
Penyertaan Investments	0	85	61	60	-	85,24	0,06	60,24
Komitmen dan Kontinjensi Commitments and Contingencies	0	0	0	0	-	-	-	-

Transaksi Spot dan Forward

Transaksi *spot* dan *forward* yang dilakukan oleh Bank Muamalat merupakan transaksi yang terkait dengan valuta asing pada bank syariah (di luar jual beli bank notes) yang hanya dapat dilakukan untuk kepentingan nasabah dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulasi. Bank melakukan transaksi lindung nilai syariah, baik transaksi lindung nilai syariah sederhana (*'Aqd al Tahawwuth al-Basith*) yaitu transaksi lindung nilai dengan skema *forward agreement* yang diikuti dengan transaksi spot pada saat jatuh tempo.

Spot and Forward Transactions

Bank Muamalat conducts spot and forward transactions related to foreign exchange at Sharia banks (excluding the buying and selling of banknotes). These transactions can only be carried out for the benefit of customers and are prohibited for speculative purposes. The Bank engages in both simple (*'Aqd al Tahawwuth al-Basith*) and complex sharia-compliant (*'Aqd al Tahawwuth al-Murakkab*) hedging transactions. Simple hedging transactions (*'Aqd al Tahawwuth al-Basith*) involve a forward agreement scheme, followed by spot transactions at maturity, and complex sharia-compliant hedging transactions.

Begitu juga dengan transaksi lindung nilai kompleks (*'Aqd al Tahawwuth al-Murakkab*), yakni transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi *spot* dan *forward agreement* yang diikuti dengan transaksi spot pada saat jatuh tempo. Rincian realisasi pada tahun 2024 diuraikan dalam tabel di bawah.

On the other hand, complex hedging transactions (*'Aqd al Tahawwuth al-Murakkab*) consist of a series of spot transactions and forward agreements, with spot transactions occurring at maturity. The details of these transactions in 2024 are provided in the table below.

TABEL SPOT DAN FORWARD

Spot and Forward Table

(Rp miliar)

(Rp billion)

Transaksi	Nilai Notional Notional Value	Tujuan Purpose		Tagihan dan Liabilitas Receivables and Liabilities		Transaction
		Bukan Hedging Not Hedging	Hedging Hedging	Tagihan Receivables	Liabilitas Liabilities	
Terkait dengan Nilai Tukar	222	0	222	0,2	0,5	Related to Exchange Rates
Spot	136	136	0	0,2	0,1	Spot
Forward	0	0	0	0	0	Forward
Lainnya	0	0	0	0	0	Other
Lainnya	-	-	-	-	-	Other



Laporan Distribusi Bagi Hasil

Pada tahun 2024, bank mendistribusikan bagi hasil mengalami kenaikan 0,27%, dari Rp19,49 triliun menjadi Rp1,95 triliun. Peningkatan disebabkan peningkatan bagi hasil mudharabah dari produk deposito dan giro mudharabah serta meningkatnya beban sukuk mudharabah & MTN subordinasi dan bagihasil pinjaman yang diterima.

Laporan Sumber dan Peyaluran Dana Zakat

Bank menerima penyetoran zakat yang berasal dari pihak internal maupun eksternal, seperti nasabah maupun amil zakat lainnya. Namun begitu, Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat, melainkan menyalurkan dana zakat tersebut melalui entitas pengelola zakat.

Pada tahun 2024, realisasi penerimaan dana zakat dari pihak internal maupun eksternal mencapai Rp4,64 miliar turun 36,4% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp6,1 miliar. Dana tersebut disalurkan seluruhnya melalui Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat masing-masing sebesar Rp0,7 miliar dan Rp3,9 miliar.

TABEL PERKEMBANGAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT & WAQAF

Table of Development of Sources and Distribution of Zakat & Waqaf Funds

(Rp miliar)

(Rp billion)

Uraian	2024	2023	2022	Description
Saldo Awal Dana Zakat	4,03	0,40	-	Beginning Balance of Zakat Funds
Dana Zakat yang Berasal dari:	4,64	5,77	7,35	Zakat Funds from:
Internal BUS	0,33	0,66	0,22	Internal BUS
Eksternal BUS	4,31	5,11	7,12	External BUS
Penyaluran Dana Zakat kepada Entitas Pengelola Zakat	4,64	6,17	6,94	Disbursement of Zakat to Zakat Management Organizations
Lembaga Amil Zakat	0,72	1,69	2,48	Lembaga Amil Zakat
Badan Amil Zakat	3,92	4,48	4,47	Badan Amil Zakat
Kenaikan (Penurunan) Dana Zakat	0	(0,40)	0,40	Increase (Decrease) in Zakat Funds
Saldo Akhir Dana Zakat	4,03	(0,00)	0,40	Ending Balance of Zakat Fund

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Bank Muamalat menerima dana kebajikan, baik berupa infaq, sedekah, denda, maupun penerimaan non-halal. Pada tahun 2024, penerimaan dana kebijakan berasal dari penerimaan non-halal mencapai Rp2,2 miliar dan denda Rp2,5 miliar. Dengan demikian, total dana kebajikan sebesar Rp5,72 miliar.

Dana tersebut digunakan untuk dana kebajikan berupa sumbangan yang disalurkan melalui lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqah sebesar Rp5,76 miliar. Hingga akhir tahun buku, dana kebajikan tersisa Rp41 juta.

Profit Sharing Distribution Report

In 2024, the Bank's profit-sharing distribution increased by 0.27%, from Rp19.49 trillion to Rp1.95 trillion. The growth was driven by higher mudharabah profit-sharing from deposit products and the mudharabah current account, along with an increase in expenses related to subordinated mudharabah sukuk & MTN, as well as profit-sharing on borrowings.

Report on the Sources and Distribution of Zakat Funds

The Bank collects zakat deposits from both internal and external sources, such as customers and other amil zakat. However, the Bank does not directly manage the zakat funds but distributes them through a zakat management entity.

In 2024, the total amount of zakat funds collected from internal and external sources was Rp4.64 billion, a 36.4% decrease compared to Rp6.1 billion in 2023. These funds were entirely distributed through the Amil Zakat Institution and the Amil Zakat Agency, with amounts of Rp0.7 billion and Rp3.9 billion, respectively.

Report on Sources and Utilization of Benevolent Funds

Bank Muamalat receives benevolent funds, including infaq, alms, fines, and non-halal funds. In 2024, the benevolent funds collected from non-halal and fines reached Rp2.2 billion and Rp2.5 billion, respectively. As a result, the total benevolent funds amounted to Rp5.72 billion.

These funds were allocated to charitable donations, distributed through zakat, infaq, and shadaqah management institutions, totaling Rp5.76 billion. As of end of financial year, the remaining balance of benevolent funds was Rp41 million.

TABEL SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

Table of Sources and Use of Benevolent Funds

(Rp miliar)

(Rp billion)

Uraian	2024	2023	2022	Description
Sumber Dana Kebajikan pada Awal Periode	0,17	-	-	Sources of Qardhul Hasan Funds at the Beginning of the Period
Penerimaan Dana Kebajikan				Receiving of Qardhul Hasan Funds
Infak	0,48	2,35	-	Infak
Sedekah	-	-	-	Sodaqoh
Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	-	-	-	Return of a Productive Qardhul Hasan Funds
Denda	2,54	1,02	0,33	Penalty
Penerimaan Non Halal	2,23	1,36	1,28	Non-Halal fund
Lainnya	0,45	0,02	-	Other
Total Penerimaan	5,72	4,90	1,60	Total Qhardul Hasan Received
Penggunaan Dana Kebajikan				Use of Benevolent Funds
Dana Kebajikan Produktif	-	-	-	Productive Qhardul Hassan Fund
Sumbangan	5,76	4,73	1,60	Donation
Penggunaan Lainnya untuk kepentingan Umum	-	-	-	Other uses for Public Interest
Total Penggunaan	5,76	4,73	1,60	Total Fund Allocated
Kenaikan (Penurunan) Sumber Dana Kebajikan	(0,04)	0,17	-	Increase (Decrease) in Sources of Qardhul Hasan funds
Sumber Dana Kebajikan pada Akhir Periode	0,12	0,17	-	Sources of Qardhul Hasan Funds at the End of the Period

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Bank dalam memenuhi seluruh kewajiban, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, diukur melalui sejumlah rasio. Di antaranya, rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rentabilitas. Kemampuan membayar utang juga tercermin dari telah ikutnya Bank sebagai peserta program penjaminan pada Lembaga Penjaminan Simpanan. Rincian penjelasan tentang kemampuan membayar utang diuraikan sebagai berikut.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

Kemampuan Bank dalam membayar utang jangka pendek ditunjukkan melalui rasio likuiditas, yang dapat diukur melalui rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR). Pada tahun 2024, posisi FDR Bank mencapai 40,08%, menurun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 47,1%. Untuk menjaga tingkat likuiditas, Bank melakukan reprofiling segmentasi nasabah sehingga meningkatkan dominasi Retail Funding/ ritelisasi funding serta memperhatikan besaran penyaluran dana nasabah dengan memperhitungkan kondisi aset likuid serta rasio likuiditas sebagai indikator tingkat likuiditas yang aman. Tercatat rasio AL/DPK Bank pada akhir 2024 adalah sebesar 20,92% atau di atas batas minimum yang sebesar 10%.

ABILITY TO PAY DEBTS

The Bank's capacity to meet all of its obligations, both short-term and long-term, is assessed using various ratios, including liquidity, solvency, and profitability ratios. The Bank's debt repayment ability is also reflected through its participation in the Deposit Insurance Agency's guarantee program. A detailed explanation of the debt repayment capacity is provided below.

Ability to RePay Short-Term Debt

The Bank's ability to pay short-term debt is reflected by the liquidity ratio, which can be assessed through the financing-to-third-party funds ratio (FDR). In 2024, the Bank's FDR reached 40.08%, a decrease from 47.1% in 2023. To maintain liquidity levels, the Bank adjusted its customer segmentation strategy to increase the dominance of Retail Funding and monitor the distribution of customer funds while considering the status of liquid assets and the liquidity ratio as indicators of secure liquidity levels. At the end of 2024, the Bank's AL/DPK ratio was 20.92%, or above the minimum requirement of 10%, indicating sufficient funds for the Bank's financing distribution.



Hal ini mengindikasikan kecukupan dalam ketersediaan dana untuk penyaluran pembiayaan Bank. Selanjutnya, rasio AL/NCD Bank tercatat sebesar 100,79% pada tahun 2024. Angka ini jauh diatas ambang bawah yakni 50% untuk AL/NCD. Terhadap perkembangan ekonomi, suku bunga dan bisnis Bank, maka Bank akan terus mengoptimalkan pengelolaan likuiditas khususnya strategi Bank dalam menyalurkan pembiayaan maupun penghimpunan dana.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang

Bank Muamalat mengukur rasio solvabilitas dengan memastikan kecukupan modal Bank agar dapat memenuhi risiko pembiayaan, pasar dan operasional yang tercermin dari Rasio Kecukupan Modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko (ATMR) atau *Risk-Weighted Assets* (RWA).

Pada tahun 2024, CAR Bank mencapai 28,48%. Posisi tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 29,42%. Hal tersebut dikarenakan penurunan total modal dari Rp6,99 triliun pada 2023 menjadi Rp5,96 triliun di tahun 2024. Total ATMR tercatat menurun sebesar Rp2,91 triliun sejalan dengan strategi Bank untuk fokus pada bisnis ritel dan lebih selektif dalam penyaluran pembiayaan segmen korporasi.

Kolektibilitas Piutang

Pada tahun 2024, tingkat kolektibilitas piutang dan pembiayaan yang dimiliki oleh Bank mengalami penurunan. Hal tersebut diindikasikan oleh penurunan pembiayaan bermasalah yang merupakan pembiayaan dengan kolektibilitas 3 (kurang lancar), 4 (diragukan), dan 5 (macet).

Rasio pembiayaan bermasalah kotor (NPF-gross) Bank pada tahun 2024 tercatat mencapai 3,35%, lebih tinggi 29bps dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 2,06%. NPF Nett tercatat sebesar 2,74% lebih tinggi dibanding tahun lalu yang tercatat 0,95%. Bank terus mengupayakan perbaikan rasio NPF Gross dan NPF Nett sehingga diharapkan rasio NPF di tahun 2025 dapat terjaga sesuai dengan target yang ditentukan.

TABEL PERKEMBANGAN KOLEKTIBILITAS

Collectibility Development Table

(Rp miliar)

(Rp billion)

Uraian	2024	2023	2022	Description
Total Pembiayaan Bermasalah – Bukan Bank (Rp miliar)	559	463	521	Total Non-performing Financing - Non-Bank (Rp billion)
Total Pembiayaan yang Diberikan (Gross)–Bukan Bank (Rp miliar)	16.715	22.419	18.748	Total Financing Disbursement (Gross) - Non-Bank (Rp billion)
% Pembiayaan Bermasalah (NPF-Bruto)	3,35	2,06	2,78	% of Non-performing Financing (Gross-NPF)
% Pembiayaan Bermasalah (NPF-Neto)	2,74	0,95	0,86	% of Non-performing Financing (Net-NPF)

Additionally, the Bank's AL/NCD ratio was recorded at 100.79% in 2024, significantly exceeding the lower limit of 50% for AL/NCD. In light of economic trends, interest rates, and the Bank's operations, the Bank plans to continue optimizing liquidity management, particularly its strategies for financing distribution and fundraising.

Ability to Pay Long-Term Debt

Bank Muamalat assesses its solvency ratio by ensuring that its capital is adequate to cover financing, market, and operational risks, as reflected by the Capital Adequacy Ratio (CAR). CAR measures the ratio of capital to risk-weighted assets (RWA).

In 2024, the Bank's CAR reached 28.48%, lower than the 29.42% in 2023. This decline was due to a reduction in total capital, from Rp6.99 trillion in 2023 to Rp5.96 trillion in 2024. Additionally, the total Risk-Weighted Assets (ATMR) decreased by Rp2.91 trillion, reflecting the Bank's strategy to concentrate on the retail business and adopt a more selective approach in financing the corporate segment.

Receivables Collectibility

In 2024, the Bank experienced a decline in the collectibility of its receivables and financing, as indicated by a decrease in non-performing financing (NPF), which includes the financing collectibility categories of 3 (substandard), 4 (doubtful), and 5 (loss).

The Bank's gross non-performing financing ratio (NPF-gross) was 3.35% in 2024, an increase of 29 bps from 2.06% in the previous year. The net NPF ratio increased by 2.74%, compared to the previous year, which was 0.95%. The Bank is committed to improving both the Gross and Net NPF ratios, aiming to keep the NPF ratio within the target range in 2025.

STRUKTUR MODAL

Kebijakan Modal

Pada prinsipnya, kebijakan permodalan Bank Muamalat bertujuan untuk melindungi kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Dengan demikian, Bank dapat memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya mempertahankan struktur permodalan yang optimal dalam rangka pemenuhan likuiditas Bank yang ditentukan oleh regulator. Kebijakan permodalan merupakan bagian dari Rencana Bisnis Bank yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Manajemen permodalan yang dilakukan oleh Bank difokuskan kepada pengelolaan struktur permodalan yang sehat. Tujuannya adalah untuk menyerap risiko serta memenuhi ketentuan permodalan dari regulator, serta untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

Rincian Struktur Modal

Rincian struktur modal Bank diuraikan melalui tabel di bawah.

TABEL PERKEMBANGAN STRUKTUR MODAL

Capital Structure Development Table

(dalam Rp)

Uraian	2024	2023	2022	Description
Modal Dasar	5.600.000.000.115	5.600.000.000.115	5.600.000.00.000	Authorized Capital
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.297.736.324.240	2.297.736.324.240	2.297.736.324.210	Issued and Fully Paid-In Capital

(in Rp)

CAPITAL STRUCTURE

Capital Policy

Bank Muamalat's capital policy is designed to ensure the Bank's ability to sustain business operations, providing returns to shareholders and benefits to other stakeholders. The policy also aims to maintain an optimal capital structure to meet the Bank's liquidity requirements set by the regulator. This policy is part of the Bank's Business Plan, which is developed by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners.

The Bank's capital management focuses on maintaining a robust capital structure that can absorb risks, fulfill regulatory capital requirements, and support business growth.

Capital Structure Overview

The details of the Bank's capital structure are provided in the table below.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Sepanjang tahun 2024, Bank tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal.

MATERIAL COMMITMENT TO CAPITAL GOODS INVESTMENT

Throughout 2024, the Bank did not have any material commitments for investment in capital goods.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Hingga 31 Desember 2024, realisasi investasi barang modal Bank sebesar Rp4,7 triliun. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sebesar Rp4,1 triliun, realisasi tersebut lebih tinggi 14,6%.

Perubahan realisasi investasi barang modal merupakan salah satu strategi bank untuk melakukan optimalisasi dari barang-barang yang dimiliki oleh Bank. Ke depannya Bank akan terus melanjutkan proses optimasi barang modal agar seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Bank menjadi lebih terukur dan efisien. Rincian realisasi investasi barang modal tahun buku adalah sebagai berikut:

REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

As of December 31, 2024, the Bank's capital goods investment was recorded at Rp4.7 trillion, an increase of 14.6% compared to the Rp4.1 trillion in 2023.

The changes in the realization of capital goods investment are part of the Bank's strategy to optimize its assets. Moving forward, the Bank will continue to focus on optimizing its capital goods to ensure that all operations are more measurable and efficient. The details of the capital goods investment realization for the financial year are outlined below:

**TABEL REALISASI INVESTASI BARANG MODAL**

Table of Realization of Capital Goods Investment

(Rp miliar)

(Rp billion)

Jenis Investasi	Tujuan Investasi	Nilai Investasi Investment Value	Objectives	Type of Investment
Tanah	Pelayanan Bank	2.635	Bank Service	Land
Bangunan	Pelayanan Bank	781	Building	Bank Service
Kendaraan Bermotor	Akomodasi Aktivitas Operasional	6	Operational Activities Accomodation	Motor Vehicles
Inventaris Kantor	Akomodasi Aktivitas Operasional	422	Operational Activities Accomodation	Inventory
Komputer	Akomodasi Aktivitas Operasional	750	Operational Activities Accomodation	Computer
Perbaikan Sarana dan Prasarana	Pelayanan Bank	157	Bank Service	Improvement of facilities and infrastructure
Aset Sewa Pembiayaan Kendaraan Bermotor	Akomodasi Aktivitas Operasional	-	Operational Activities Accomodation	Motor vehicle finance lease assets
Total		4.754		Total

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTANSI

Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan setelah tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen yang perlu diungkapkan dalam laporan tahunan ini.

PROSPEK USAHA

Perkembangan dinamika global yang terus menjadi faktor yang turut mempengaruhi perkembangan ekonomi nasional kedepan, dengan risiko berupa volatilitas harga komoditas yang masih tinggi, meningkatnya suku bunga, kendala rantai pasok global, hingga kerentanan ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim. Kondisi tersebut mendorong prospek ekonomi global diproyeksikan hanya tumbuh pada kisaran 3,2% pada 2024 dan 2025.

Sedangkan perekonomian nasional masih mencerminkan ketahanan dan daya saing dengan tetap tumbuh pada tingkat yang solid sebesar 4,95% (yoy) pada triwulan III-2024, dimana lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lain, seperti Thailand dan Korea Selatan. Sejumlah indikator sektor riil, diantaranya PMI Manufaktur juga tetap ekspansif, dengan permintaan domestik yang kuat, serta optimisme konsumen yang stabil tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang terus optimis dan Indeks Penjualan Riil yang tumbuh positif.

Pertumbuhan PDB riil 2024 diproyeksikan dalam kisaran 4,7-5,5% didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat dan pertumbuhan investasi yang mengimbangi hambatan ekspor neto akibat tekanan eksternal, termasuk melemahnya harga

MATERIAL INFORMATION AND FACTS SUBSEQUENT TO THE ACCOUNTING REPORT DATE

There were no material or relevant events after December 31, 2023, up until the date of the Independent Auditor's Report that need to be disclosed in this annual report.

BUSINESS PROSPECT

The ongoing global dynamics continue to be a factor in shaping the national economy in the future, with risks including high commodity price volatility, rising interest rates, global supply chain disruptions, and vulnerabilities in food and energy security due to climate change. As a result, the global economic outlook for 2024 and 2025 is projected to only grow in the range of 3.2%.

On the other hand, the national economy continues to demonstrate resilience and competitiveness, with a solid growth rate of 4.95% (yoy) in the third quarter of 2024, outperforming several other countries such as Thailand and South Korea. Key real sector indicators, including the Manufacturing PMI, remain in expansion, supported by strong domestic demand. Consumer confidence also remains stable, as reflected by the optimistic Consumer Confidence Index (CCI) and the growing Real Sales Index.

Real GDP growth in 2024 is expected to range between 4.7% and 5.5%, driven by increased public consumption and investment growth, which are expected to offset net export constraints due to external pressures like weakening

komoditas dan pertumbuhan mitra dagang. Sementara pertumbuhan ekonomi tahun 2025 di kisaran 4,8-5,6%.

Dari sisi perbankan, perbankan nasional mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,39% YoY per Desember 2024. Sementara, per Desember 2023 penyaluran kredit perbankan tumbuh sebesar 10,38% YoY. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi, masing-masing sebesar 8,35% (yoy), 13,62% (yoy), dan 10,61% (yoy). Pembiayaan syariah tumbuh sebesar 9,87% (yoy), sementara kredit UMKM tumbuh 3,37% (yoy). Pertumbuhan kredit di proyeksikan akan meningkat menjadi 11-13% pada tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi tahun 2024 yang berada di kisaran 10-12%. Hal ini menunjukkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi dan peningkatan permintaan kredit di sektor-sektor prioritas yang dapat menciptakan lapangan kerja.

Penghimpunan simpanan atau dana pihak ketiga (DPK) perbankan November 2024 dilaporkan tumbuh sebesar 6,3% secara tahunan (YoY). Angka ini lebih tinggi ketimbang bulan sebelumnya yang sebesar 6,0% YoY. Namun, jika dibandingkan dengan pertumbuhan kredit, angka kenaikan DPK lebih rendah. Berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar yang diterbitkan oleh BI, penghimpunan DPK per bulan kesebelas tahun ini tercatat senilai Rp8.534,8 triliun. Pertumbuhan DPK di proyeksikan akan meningkat menjadi 8-10% pada tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi tahun 2024 yang berada di kisaran 7-9%.

Bank dalam menentukan arah strategi, senantiasa melakukan penilaian terhadap setiap perubahan kondisi lingkungan bisnis dan juga melakukan evaluasi secara terus-menerus terhadap apa yang menjadi kekuatan utama Bank serta potensi yang dapat dioptimalkan guna mencapai tujuan Bank. Bank juga menselaraskan arah strategi Bank dengan Rencana Korporasi yang telah disusun, sehingga Tema strategis Rencana Bisnis Bank Muamalat Tahun 2025 adalah "Menciptakan Akselerasi Bisnis Retail yang berkualitas untuk profit yang berkelanjutan". Tema tersebut merepresentasikan fokus pada akselerasi pertumbuhan bisnis Retail yang sehat dan juga peningkatan produktivitas ditengah dinamika ketidakpastian ekonomi yang terjadi di Indonesia maupun di kondisi Global.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI PROYEKSI 1 (SATU) TAHUN MENDATANG

Target dan Realisasi

Bank Muamalat menetapkan target keuangan yang akan dicapai tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2024. Secara umum, kinerja Bank dinilai baik, Bank dapat

commodity prices and slower growth in trading partner economies. Economic growth in 2025 is projected to be in the range between 4.8% and 5.6%.

From the banking side, as of December 2024, the national banking sector recorded a growth of 10.39% YoY. In comparison, by December 2023, bank loan disbursement increased by 10.38% YoY. Based on usage groups, growth in working capital loans, investment loans, and consumer loans was 8.35% (yoy), 13.62% (yoy), and 10.61% (yoy), respectively. Sharia financing grew by 9.87% (yoy), while MSME loans grew by 3.37% (yoy). Loan growth is projected to increase to 11-13% in 2025, higher than the 2024 projection of 10-12%. This shows optimism about economic recovery and increased demand for loans in priority sectors that can create jobs.

In November 2024, banking sector savings or third-party fund (DPK) collections saw an increase of 6.3% year-on-year (YoY). This amount is higher than the previous month, which was 6.0% YoY. Despite this growth, it remains lower than the increase in loan disbursement. According to Bank Indonesia's Money Circulation Analysis, total DPK for the first eleven months of 2024 reached Rp8,534.8 trillion. Looking ahead, DPK is predicted to grow by 8-10% in 2025, improving on the 2024 projection of 7-9%.

To define its strategic direction, the Bank continuously assesses every change in the business environment and evaluates its core strengths and areas for optimization to achieve the Bank's goals. The Bank also ensures its strategies are aligned with its Corporate Plan. For 2025, the strategic theme of Bank Muamalat's Business Plan is "Creating Quality Retail Business Acceleration for Sustainable Profit." This theme represents the Bank's focus on accelerating healthy retail business growth and enhancing productivity amidst the dynamics of economic uncertainties both domestically and globally.

COMPARISON BETWEEN TARGET AND PROJECTED REALIZATION FOR THE NEXT 1 (ONE) YEAR

Target and Realization

Bank Muamalat has outlined financial targets in its 2024 Bank Business Plan (RBB), and overall, the Bank's performance is viewed positively. It has managed to sustain positive



mempertahankan pertumbuhan bisnis yang positif dari sisi aset, DPK dan pembiayaan, serta pemupukan profitabilitas.

Total aset Bank yang pada tahun 2024 tercatat mencapai Rp60,0 triliun, merupakan 87,4% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK), yaitu Rp44,2 triliun, setara dengan 84,1% dari target dan pembiayaan Rp16,8 triliun atau setara 68,5% dari target (tidak termasuk pembiayaan Salam).

Untuk laba, sepanjang tahun 2024 yang berhasil dibukukan oleh Bank mencapai Rp20 miliar atau setara dengan 102,1% dari target. Pencapaian laba sebelum pajak didorong oleh peningkatan profitabilitas melalui upaya peningkatan *margin income* dan *fee-based income*, dari sisi beban pertumbuhan *Margin Expense* sangat dirasakan oleh beberapa faktor yang menjadi tantangan bagi Bank, diantaranya adalah tingginya beban bagi hasil kepada nasabah, hal ini disebabkan adanya tekanan pasar yang salah satunya dipicu oleh tren kenaikan suku bunga Bank Indonesia yang sejak akhir tahun 2022 terus meningkat hingga pada level 6,25%, namun di Desember 2024 BI7DRR turun menjadi 6,00%, hal tersebut diharapkan dapat menekan beban bagi hasil kepada nasabah, hal ini pada gilirannya diharapkan akan menurunkan suku bunga acuan LPS (*LPS rate*) yang kemudian berpengaruh pada besaran *Cost of Fund*.

Rincian pencapaian dibandingkan dengan target lainnya diuraikan melalui tabel di bawah.

TABEL PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI

Target and Realization Comparison Table

(Rp miliar)

(Rp billion)

Uraian	Target 2024 2024 Projection	Realisasi 2024 2024 Realization	Pencapaian Achievement (%)	Description
Total Aset	68.700	60.023	87,4%	Total Assets
Dana Pihak Ketiga	52.559	44.190	84,1%	Third-Party Funds
Pembiayaan ^{*)}	24.463	16.758	68,5%	Financing ^{*)}
Pendapatan Operasional	3.244	3.035	93,6%	Operating Income
Beban Operasional	3.235	3.006	92,9%	Operating Expenses
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	20,0	20,4	102,1%	Profit (Loss) Before Tax
Struktur Modal	2.298	2.298	100,00%	Capital Structure

^{*)} Exclude pembiayaan Salam.
Exclude Salam financing.

Proyeksi Tahun 2025

Bank Muamalat telah menyusun target untuk tahun buku 2025, seperti tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Penyusunan RBB tersebut telah mempertimbangkan potensi eksternal yang akan terjadi dan berpengaruh pada Bank, serta kemampuan Bank dalam merealisasikan target. Rinciannya disampaikan dalam tabel di bawah.

business growth in terms of assets, DPK and financing, and profitability.

In 2024, the Bank's total assets were recorded at Rp60.0 trillion, achieving 87.4% of the target. DPK was recorded at Rp44.2 trillion, which represents 84.1% of the target, while financing reached Rp16.8 trillion, or 68.5% of the target (excludes Salam financing).

On the profitability, the Bank recorded a profit before tax of Rp20 billion, exceeding its target by reaching 102.1%. This performance was supported by improvements in profitability through increases in margin income and fee-based income. The growth in margin expense has been significantly impacted by several challenges, particularly the high profit-sharing burden to customers. This pressure comes from broader market conditions, such as the rising Bank Indonesia interest rates, which had steadily increased since late 2022 and peaked at 6.25%. However, with the BI7DRR rate reduced to 6.00% in December 2024, the Bank expects a reduction in profit-sharing obligations. This decrease is anticipated to lower the LPS benchmark rate (LPS rate), ultimately helping to reduce the Bank's overall Cost of Fund.

A more detailed breakdown of these achievements in comparison to the other targets is provided in the table below.

2025 Projection

Bank Muamalat has set its financial targets for the 2025 financial year, as outlined in the Bank Business Plan (RBB). In formulating these targets, the Bank has taken into account both external factors that may impact its operations and its internal capacity to achieve the objectives. A detailed breakdown of these targets is presented in the table below.

TABEL PROYEKSI, REALISASI, DAN PERUBAHAN

Projection, Realization, and Change Table

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

(Rp billion, unless stated otherwise)

Uraian	Proyeksi 2025 2025 Projection	Realisasi 2024 2024 Realization	Perubahan Change (%)	Description
Total Aset	66.101	60.023	10,1%	Total Assets
Dana Pihak Ketiga	51.691	44.190	17,0%	Third-Party Funds
Pembiayaan	20.764	16.758	23,9%	Financing
Pendapatan Operasional	3.038	3.035	0,1%	Operating Income
Beban Operasional	3.008	3.006	0,1%	Operating Expenses
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	30	20	47,0%	Profit (Loss) Before Tax
Struktur Modal	2.298	2.298	0,00%	Capital Structure
Kebijakan Dividen	10-20%	10-20%	0,00%	Dividend Policy

ASPEK PEMASARAN

Kebijakan

Bank Muamalat Indonesia menyusun kebijakan pemasaran berdasarkan perkembangan industri perbankan dan kebutuhan nasabah serta fokus dalam strategi bank terhadap sasaran bisnis yang dituju, Bank berusaha menelaraskan kebijakan pemasaran dengan posisi.

Bank yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Kondisi tersebut menjadikan Bank Muamalat memiliki posisi yang unik, sekaligus menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi pengembangan bisnis. Sementara sebagai pionir, Bank memiliki peran penting dalam kemajuan perbankan syariah di Indonesia.

Bank juga melihat perkembangan digitalisasi yang pesat dan tumbuhnya industri halal serta semakin besar kesadaran masyarakat terhadap literasi keuangan syariah. Dalam menghadapi digitalisasi tersebut, Bank telah mempersiapkan beragam strategi, antara lain mengembangkan produk berdaya saing tinggi menggunakan sistem digital seperti mengembangkan layanan Digital Banking seperti *mobile banking* atau disebut Muamalat DIN (*Digital Islamic Network*), *Internet Banking* atau yang disebut Muamalat Digital Integrated Access (MADINA), Muamalat QRIS, dan ATM yang terus dilakukan penambahan fitur dan layanan, termasuk menjalin kerja sama melalui *strategic partnership* dengan pihak ketiga.

Selain itu, Bank memiliki 234 jaringan kantor Bank yang terdiri dari 1 kantor cabang luar negeri (Kuala Lumpur) dan 233 jaringan kantor di dalam negeri yang mencakup kantor pusat, kantor cabang utama, dan kantor cabang pembantu, serta Bank memiliki 635 kegiatan pelayanan kas yang tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia sehingga dapat memperkuat branding Bank Muamalat.

MARKETING ASPECTS

Policy

Bank Muamalat Indonesia develops its marketing policy by considering trends in the banking industry and customer needs and focusing on the Bank's strategy towards the business objectives, aligning the marketing policies with its positions.

As the first Sharia bank in Indonesia, Bank Muamalat holds a distinctive position, which also presents challenges, particularly in terms of business expansion. As a pioneer, the Bank plays a significant role in advancing the Sharia banking sector in Indonesia.

The bank recognizes the rapid growth of digital technology, the expanding halal industry, and the increasing public awareness of Islamic financial literacy. To respond to these trends, the Bank has implemented various strategies, including the development of competitive digital products and services. These include mobile banking, also known as Muamalat DIN (Digital Islamic Network), Internet Banking, or Muamalat Digital Integrated Access (MADINA), Muamalat QRIS, and ATM services, all of which are continually being enhanced. The Bank also collaborates through strategic partners with third parties to further develop its digital services.

In addition, the Bank operates through a network of 234 offices, consisting of 1 overseas branch in Kuala Lumpur and 233 offices within Indonesia, which covers head office, main branch offices, and sub-branch offices. The Bank also has 635 cash service operations spread throughout nearly every province, enhancing its brand presence across the country.



Bank berfokus pada segmen retail individual dengan segment enterprise sebagai *entry gate* sebagai target bisnis yang akan saling berkolaborasi. Pemenuhan variasi produk konsumen dan *risk acceptance* kriteria khusus untuk segmen enterprise akan menjadi langkah awal untuk memenuhi kebutuhan nasabah (*customer centric*).

Distribusi dan jangkauan Bank kepada nasabah akan diperluas melalui sejumlah alternatif *channel*, yaitu mitra yang akan membantu Bank dalam melayani kebutuhan nasabah selain jaringan kantor cabang yang telah ditingkatkan statusnya. Program pemasaran kepada komunitas dan sinergi dengan BPKH tetap menjadi sarana penyampaian produk dan program Bank agar nasabah memahami dan mengerti produk bank selain itu *engagement activity* seperti *customer gathering* dan *co-creation* lain terhadap branding haji akan memperkuat rencana pemasaran produk dan program yang dimiliki bank, baik secara *soft sell* dan *hard sell*.

Strategi

Sejak dimulai tahun 2023, Bank dalam menentukan arah strategi, senantiasa melakukan penilaian terhadap setiap perubahan kondisi lingkungan bisnis dan juga melakukan evaluasi secara terus-menerus terhadap apa yang menjadi kekuatan utama Bank serta potensi yang dapat dioptimalkan guna mencapai tujuan Bank. Hal itu, terutama terlihat pada ekosistem ekonomi syariah seperti sektor Haji & Umrah, ASN/BPG, Pensiun, Pendidikan, Kesehatan, Lembaga Keuangan Syariah, Industri Halal serta Masjid dan Lembaga ZISWAF. Bank Muamalat juga memiliki brand value yang kuat sebagai pionir Bank Syariah di Indonesia yang dipelopori oleh Umat, melalui MUI, ICMI, serta Jemaah Haji, memberikan nilai historis yang sangat melekat pada *brand* Muamalat.

Sebagai upaya untuk menarik lebih banyak nasabah baru, Bank sangat memperhatikan materi pemasaran yang relevan dengan perkembangan digital dan perkembangan ekonomi syariah terkini. Mulai dari konten, *experience*, *storytelling*, dan kegiatan *sharing*. Bank juga merealisasikan sejumlah produk baru dan pengembangan produk yang mengarah kepada *Customer Centric* sehingga dapat menarik minat dan membantu masyarakat, di antaranya pembiayaan solusi emas hijrah, Tabungan iB Hijrah Rencana, dan pengembangan pada Muamalat DIN (Penambahan biller pembayaran, Penambahan Fitur Verifikasi Liveness Biometric pada Customer on Boarding, Fitur Top Up Uang Elektronik Tap Cash BNI, dan fitur pendaftaran DPLK Syariah Muamalat).

BMI juga senantiasa menjalin komunikasi dengan nasabah secara virtual untuk menginformasikan dan menjawab keluhan nasabah. Kegiatan tersebut dilakukan melalui beragam saluran informasi, dari *email*, *website*, media sosial, *push notification*, maupun pesan melalui aplikasi MDIN

The bank prioritizes the individual retail market, using the enterprise segment as an entry point for broader business collaboration. Fulfillment of consumer product variants and risk acceptance criteria specifically for the enterprise segment will be the first step to meet customer needs (*customer centric*).

The Bank's distribution and customer reach will be expanded through a number of alternative channels, including partners who will help the Bank serve customer needs in addition to the branch office network, which has been upgraded. Community-focused marketing initiatives and collaboration with BPKH continue to serve as key channels for promoting the Bank's products and programs, helping customers gain a clearer understanding of its offerings. These efforts are further supported by engagement activities such as customer gatherings and the co-creation of Hajj branding, which enhance the effectiveness of both soft and hard selling strategies.

Strategy

Since early 2023, in determining its strategic direction, the Bank has continuously analyzed changes in the business environment and evaluated its core strengths and its potential that can be optimized to achieve the Bank's goal. This approach is particularly evident in its focus on the sharia economic ecosystem, which includes sectors such as Hajj & Umrah, ASN/BPG, pensions, education, healthcare, Sharia financial institutions, the halal industry, mosques, and ZISWAF institutions. As the first Sharia bank in Indonesia, Bank Muamalat carries strong brand recognition, rooted in its establishment by the Ummah through MUI, ICMI, and Hajj pilgrims, giving the brand a deep historical significance.

To attract new customers, the Bank prioritizes marketing content that aligns with digital advancements and current developments in the sharia economy. This includes tailored content, experiences, storytelling, and sharing initiatives. The Bank has also introduced new customer-focused products and product developments so that they can attract interest and help the community, such as hijrah gold solution financing (Gold Installment), iB Hijrah Rencana Savings, and enhancements to Muamalat DIN (addition of payment billers, Addition of Biometric Liveness Verification Features for Customer onboarding, Tap Cash BNI Electronic Money Top-Up Feature, and Muamalat Syariah DPLK registration feature).

BMI also maintains active communication with customers virtually to inform and address the customer complaints. These activities are carried out through various information channels, including email, websites, social media, push notifications, and messages through the MDIN application.

Pangsa Pasar

Mengacu pada Statistik Perbankan Syariah Posisi Desember 2024 yang dikeluarkan oleh OJK, terdapat 14 bank umum syariah dan 19 usaha syariah. Dari 14 bank tersebut, BMI menduduki posisi 2 dalam jumlah jaringan kantor dengan 1 kantor pusat dan 234 kantor cabang pembantu.

Sementara untuk pangsa pasar dari sisi aset, porsi Bank Muamalat adalah 8,70%, dengan total aset Rp60,0 triliun. Pada tahun 2024, total aset bank umum syariah mencapai Rp980,30 triliun.

Dari sisi pembiayaan, pangsa pasar Bank Muamalat sekitar 3,94% terhadap total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah nasional, yakni Rp16,76 triliun. Sementara nilai Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Muamalat yang tercatat sebesar Rp44,19 triliun dari total DPK bank syariah yang mencapai Rp753,60 triliun.

DIVIDEN

Kebijakan

Kebijakan Bank Muamalat untuk dividen mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Bank. Keputusan pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan.

Pembahasannya diawali oleh rekomendasi dari Direksi, setelah mempertimbangkan beragam faktor yang mendukungnya. Faktor dimaksud, yakni kondisi keuangan Bank, tingkat kesehatan, posisi permodalan, target dan proyeksi kecukupan modal di masa depan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, rencana dan prospek usaha Bank di masa depan. Selain itu, Direksi juga mempertimbangkan -hal lain yang dipandang relevan.

Kendati demikian, tidak ada jaminan bahwa Bank memiliki kemampuan atau membayar dividen atau keduanya pada masa yang akan datang. Demikian pula apabila ditentukan oleh regulator, Bank dapat tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham BMI, seperti dalam hal Bank membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha atau pemenuhan kecukupan modal yang ditentukan oleh regulator.

Dengan demikian, Bank hanya akan membayar dividen dari laba bersih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pembayaran dividen dapat dilakukan dalam bentuk pembayaran secara tunai, penerbitan saham dividen atau kombinasi dari keduanya.

Market Share

According to the Sharia Banking Statistics for December 2024 released by the OJK, there are currently 14 Sharia commercial banks and 19 Sharia businesses operating in Indonesia. Among these, BMI ranks second in terms of branch network, operating 1 head office and 234 branch offices.

Meanwhile, for asset market share, Bank Muamalat held 8.70%, with total assets amounting to Rp60.0 trillion. In 2024, the total assets of the Sharia commercial bank were recorded at Rp980.30 trillion.

In terms of financing, Bank Muamalat contributed approximately 3.94% of the total financing disbursed by national sharia banks, which was Rp16.76 trillion. Additionally, Bank Muamalat recorded Third Party Funds (DPK) of Rp44.19 trillion, out of the total DPK in the sharia banking sector, which reached Rp753.60 trillion.

DIVIDEND

Policy

Bank Muamalat's dividend policy is guided by relevant laws and regulations and its Articles of Association. Any decision to distribute dividends must be approved by shareholders during the annual General Meeting of Shareholders (GMS).

The process begins with a recommendation from the Board of Directors, who take into account several key factors. These include the Bank's financial performance, overall soundness, capital strength, future capital requirements and projections, regulatory compliance, and the Bank's strategic plans and business outlook. The Board of Directors may also consider other factors it finds relevant.

However, there is no guarantee that the Bank will be able to pay dividends in the future. If the regulator requires it, the Bank may not distribute dividends to BMI Shareholders, such as in cases if the Bank needs funds to support business growth or meet capital adequacy as determined by the regulator.

Therefore, dividends will only be paid out of net income and in accordance with Indonesian laws and regulations. Dividend payments may be made in cash, in the form of shares, or a combination of both.



Dividen yang Dibagikan

Berdasarkan hasil keputusan RUPST Bank tanggal 27 Juni 2024 diputuskan bahwa laba bersih Bank tahun buku 2023 digunakan untuk cadangan modal, sehingga tidak diadakan pembagian dividen atas laba bersih Bank tahun buku 2023.

REALISASI PEMBAYARAN DIVIDEN

Realization of Dividend Payments

Tahun Buku Financial Year	Tahun Dividen Dividend Year	Tanggal Pembayaran Payment Date	Dividen yang Dibagikan (Rp juta) Dividends Distributed (Rp million)	Dividen per Lembar Saham (Rp) Dividends per Share (Rp)	Rasio Dividen terhadap Laba Bersih (%) Dividend to Net Income Ratio (%)
2023	2024	-	-	-	-
2022	2023	8 Juni 2023 June 8, 2023	Rp5.001	Rp0,1	18,80%
2021	2022	-	-	-	-

Dividends Distribution

In accordance with the resolution from the Bank's Annual General Meeting (AGM) held on June 27, 2024, it was decided that the net profit from the 2023 financial year would be allocated to capital reserves. As a result, no dividends will be distributed from the Bank's 2023 net profit.

KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK

Kebijakan Pengelolaan dan Pembayaran Pajak

Kontribusi Bank Muamalat kepada negara, antara lain diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban Bank sebagai wajib pajak dan sebagai pemotong/pemungut pajak.

Realisasi

Pada tahun 2024, total pajak yang dibayarkan mencapai Rp282,6 Miliar lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp262,6 miliar.

TAX PAYMENT COMPLIANCE

Tax Management and Payment Policy

Bank Muamalat demonstrates its contribution to the nation, among other ways, by fulfilling its responsibilities as both a taxpayer and a tax withholder/collector.

Realization

In 2024, the total tax paid reached Rp282.6 billion, higher than in 2023, which was Rp262.6 billion.

TABEL KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK

Tax Payment Compliance Table

(Rp miliar)

(Rp billion)

Uraian	2024	2023	Description
Pajak Penghasilan	-	-	Income Tax
Pasal 4 (2)	191,4	11	Article 4 (2)
Pasal 21	68,9	8	Article 21
Pasal 23	3,1	0,30	Article 23
Pasal 26	0,3	0,07	Article 26
Pasal 29	0	0,08	Article 29
Pajak Pertambahan Nilai	18,8	2	Value Added Tax
Total	282,6	22	Total

KOMPENSASI JANGKA PANJANG: PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Hingga 31 Desember 2024, Bank tidak mengeluarkan program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP).

LONG TERM COMPENSATION: EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP/MSOP)

Until December 31, 2024, the Bank did not issue a Share Ownership Program for Employees and/or Management (ESOP/MSOP).

INFORMASI MATERIAL TERKAIT DENGAN INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI

Investasi

Bank Muamalat Indonesia tidak melakukan kegiatan investasi di tahun 2024 sehingga informasi terkait tujuan, nilai transaksi dan sumber dana kegiatan investasi tidak disajikan oleh Bank Muamalat Indonesia.

Ekspansi

Bank Muamalat Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspansi di tahun 2024 sehingga informasi terkait tujuan, nilai transaksi dan sumber dana kegiatan ekspansi tidak disajikan oleh Bank Muamalat Indonesia.

Divestasi

Bank Muamalat Indonesia tidak melakukan transaksi kegiatan divestasi yang material di tahun 2024.

Akuisisi

Bank Muamalat Indonesia tidak melakukan kegiatan akuisisi pada tahun 2024 sehingga informasi terkait tujuan, nilai transaksi dan sumber dana kegiatan akuisisi tidak disajikan.

Restrukturisasi Utang/Modal

Jumlah pembiayaan yang telah direstrukturisasi Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,10 triliun dan Rp0,21 triliun. Skema restrukturisasi umumnya dilakukan dengan perpanjangan masa pelunasan piutang dan penjadwalan kembali pembayaran yang tertunggak.

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AGILIASI/BERELASI

Bank Muamalat mendefinisikan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai dengan PSAK No. 7 (Penyesuaian 2010) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi." Mengacu pada ketentuan tersebut, suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

- Langsung atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak:
 - Mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank;
 - Memiliki kepentingan dalam Bank yang memberikan pengaruh signifikan atas Bank; atau
 - Memiliki pengendalian bersama atas Bank;
- Suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;

MATERIAL INFORMATION RELATED TO INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION, AND RESTRUCTURING

Investment

In 2024, Bank Muamalat Indonesia did not engage in any investment activities. Therefore, information related to the objectives, transaction value, and sources of funds for such activities is not presented.

Expansion

In 2024, Bank Muamalat Indonesia did not undertake any expansion activities. As such, information regarding the objectives, transaction value, and sources of funds related to expansion activities is not presented.

Divestment

Bank Muamalat Indonesia did not conduct any material divestment transactions in 2024.

Acquisition

In 2024, Bank Muamalat Indonesia did not engage in any acquisition activities. Accordingly, information related to the objectives, transaction value, and funding sources for such activities is not applicable and therefore not presented.

Debt/Capital Restructuring

As of December 31, 2024, and 2023, the total financing restructured by the Bank amounted to Rp0,10 trillion and Rp0,21 trillion, respectively. The restructuring was generally conducted through mechanisms such as extending the loan repayment period and rescheduling outstanding payments.

MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED/RELATED PARTIES

Bank Muamalat defines transactions with related parties in accordance with SFAS No. 7 (2010 Adjustment) concerning Related Party Disclosures. Under these provisions, a party is considered a related party to the Bank if:

- A party, directly or indirectly through one or more intermediaries, is considered a related party if it:
 - Controls, or is controlled by, or is under common control with, the Bank;
 - Has an interest in the Bank that provides significant influence over the Bank; or
 - Has joint control over the Bank;
- A party that is in the same business group as the Bank;



3. Suatu pihak adalah ventura bersama di mana Bank sebagai *venture*;
4. Suatu pihak adalah anggota dari personel dari manajemen kunci Bank;
5. Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
6. Suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk pihak yang memiliki hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, yaitu individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); dan
7. Suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.

3. A party that is a joint venture in which the Bank is the venturer;
4. A party that is a member of the Bank's key management personnel;
5. A party that is a close family member of an individual described in points (1) or (4);
6. A party that is an entity controlled, jointly controlled, or significantly influenced by, or for which significant voting rights are held in several entities, directly or indirectly, by an individual referred to in points (4) or (5); and
7. A party that is a post-employment benefit program for the employee benefits from the Bank or an entity related to the Bank.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi atau Berelasi

Dari definisi PSAK No. 7 (Revisi 2010) mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", Bank Muamalat mengelompokkan pihak-pihak berelasi: Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan kunci, pemegang saham, komisaris PT Syarikat Takaful Indonesia, Pengurus utama Baitul Maal Muamalat dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat, PT Al Ijarah Indonesia Finance.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam laporan keuangan.

Penjelasan Pihak yang Bertransaksi

Penjelasan pihak afiliasi/berelasi yang melakukan transaksi dengan Bank Muamalat Indonesia hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Transactions with Affiliated or Related Parties

Based on the definition outlined in SFAS No. 7 (Revised 2010) on Related Party Disclosures, Bank Muamalat classifies related parties to include: members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and key employees, shareholders, commissioners of PT Syarikat Takaful Indonesia, the main board of Baitul Maal Muamalat, the Pension Fund of Muamalat Financial Institution, and PT Al Ijarah Indonesia Finance.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the financial statements, with detailed information presented accordingly.

Explanation of Transacting Parties

The following is an explanation of affiliated/related parties that have conducted transactions with Bank Muamalat Indonesia up to the end of 2024:

Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
Badan Pengelola Keuangan Haji	Entitas Induk Parent Entity	Giro wadiah, deposito mudharabah, dan sukuk Mudharabah subordinasi Wadiah demand deposit, mudharabah time deposits, and Subordinated mudharabah sukuk
PT Al Ijarah Indonesia Finance	Entitas Asosiasi Associate	Piutang murabahah, pembiayaan mudharabah dan musyarakah, penyertaan saham Murabahah receivables, mudharabah and musyarakah financing investment in shares
PT Syarikat Takaful Indonesia	Entitas Asosiasi Associate	Giro mudharabah, deposito mudharabah, dan penyertaan saham Murabahah receivables, mudharabah financing, and investment in shares
Direksi, Karyawan Kunci Director, Key Employees	Hubungan pengendalian kegiatan Bank Significant influence on Bank's activities	Piutangmurabahah, pinjaman qardh, pembiayaan musyarakah, giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah Murabahah receivables, funds of qardh, musyarakah financing, wadiah demand deposits, mudharabah saving deposit, and mudharabah time deposits
Komisaris, Dewan Pengawas Syariah Commissioner, Sharia Supervisory Board	Hubungan pengendalian kegiatan Bank Significant influence on Bank's activities	Giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah Wadiah demand deposit, mudharabah saving deposit, and mudharabah time deposits
Baitul Maal Muamalat	Hubungan pengendalian melalui karyawan kunci Significant influence through key employees	Giro wadiah dan deposito mudharabah Wadiah demand deposit and mudharabah time deposits

Nilai Transaksi

Saldo transaksi hingga akhir tahun buku 2024 diuraikan melalui tabel di bawah ini:

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

Transaction Value

The transaction balances as of the end of the 2024 financial year are presented in the table below:

(Rp billion, unless stated otherwise)

Uraian	2024	2023	Description
Aset Assets			
Piutang Murabahah Karyawan Kunci	6.514	7.636	Murabahah Receivables Key Employees
Pinjaman Qardh Karyawan Kunci	129	349	Funds of Qardh Key Employees
Pembiayaan Musyarakah Karyawan Kunci	14.649	11.256	Musyarakah Financing Key Employees
Aset Ijarah Karyawan Kunci	346	-	Ijarah Asset Key Employees
Penyertaan Saham			Penyertaan Saham
PT Al Ijarah Indonesia Finance	401.616	401.616	PT Al Ijarah Indonesia Finance
PT Syarikat Takaful Indonesia	6.095	6.095	PT Syarikat Takaful Indonesia
Investasi pada DPLK Muamalat	9.906	2.940	Investment at DPLK Muamalat
Jumlah Aset dari Pihak Berelasi	438.910	429.893	Total assets from related parties
Total Aset	60.022.877	66.953.059	Total Assets
Persentase Jumlah Aset dari Pihak Berelasi terhadap Total Aset	0,73%	0,64%	Percentage of total assets from related parties to total assets
Liabilitas Liabilities			
Giro Wadiah			Wadiah Demand Deposits
Asuransi Takaful/Baitul Maal Muamalat/Dana Pensiun Lembaga Keuangan	23.669	15.096	Takaful Insurance/Baitul Maal Muamalat/Financial Institutions Pension Fund
Entitas Asosiasi	13.900	684	Associates
Entitas Induk	716	13.592	Parent entities
Komisaris	-	-	Commissioner
Karyawan Kunci	0,74	0	Key employees
Tabungan Wadiah			Wadiah Saving Deposits
Asuransi Takaful/Baitul Maal Muamalat/Dana Pensiun Lembaga Keuangan	14.667	11.585	Takaful Insurance/Baitul Maal Muamalat/Financial Institutions Pension Fund
Karyawan Kunci	3.360	3.165	Key employees
Jumlah	56.387	44.122	Total
Dana Syirkah Temporer			Temporary Syirkah Fund
Surat Berharga yang Diterbitkan Entitas Induk	2.000.000	2.000.000	Securities Issued
Deposito Mudharabah			Mudharabah Time Deposits
Entitas Induk	6.983.487	8.765.255	Parent entities
Karyawan Kunci	8.838	9.266	Key employees
Entitas Asosiasi	0	10.500	Associates
Dewan Pengawas Syariah	0	1.504	Sharia Supervisory Board
PT Syarikat Takaful/Baitul Maal Muamalat/Dana Pensiun Lembaga Keuangan/Muamalat Institute	85.513	397.648	PT Syarikat Takaful/Baitul Maal Muamalat/Financial Institutions Pension Fund/Muamalat Institute
Tabungan Mudharabah			Mudharabah Saving Deposits
Asuransi Takaful/Baitul Maal Muamalat/Dana Pensiun Lembaga Keuangan	2.810	1.376	Takaful Insurance/Baitul Maal Muamalat/Financial Institutions Pension Fund
Karyawan Kunci	8.078	10.942	Key employees
Giro Mudharabah			Mudharabah Demand Deposits
Asuransi Takaful/Baitul Maal Muamalat/Dana Pensiun Lembaga Keuangan	3.387	3.961	Takaful Insurance/Baitul Maal Muamalat/Financial Institutions Pension Fund
Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan Kunci	0	38.398	Estimated Liabilities for Employee Benefit
Jumlah Liabilitas dan Dana Syirkah Temporer dari Pihak Berelasi	913.626	11.282.971	Total Liabilities and Temporary Syirkah Fund From Related Parties
Total Liabilitas dan Dana Syirkah Temporer	54.804.298	61.736.673	Total Liabilities and Temporary Syirkah Fund
Persentase Jumlah Liabilitas dan Dana Syirkah Temporer Pihak Berelasi terhadap Total Liabilitas dan Dana Syirkah Temporer	16,70%	18,28%	Percentage of Total Liabilities and Temporary Syirkah Fund from Related Parties to Total Liabilities and Temporary Syirkah Fund



KEBIJAKAN PENELAAHAN DAN PERSETUJUAN TRANSAKSI

Kewajaran Transaksi

Bank Muamalat melakukan transaksi benturan kepentingan atau dengan pihak afiliasi didasari pada persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.

Bank memiliki kebijakan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi material diputuskan oleh Dewan Komisaris dan senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, transaksi material juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara Independen. Selama tahun 2024 tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi serta tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan

Transaksi benturan kepentingan atau dengan pihak afiliasi yang dilakukan oleh Bank berlandaskan pada syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan Bank telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan POJK No. 42/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan.

Pernyataan Direksi

Direksi selalu memastikan bahwa transaksi afiliasi yang berlangsung di Bank sesuai dengan definisi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transaksi juga telah melalui prosedur yang memadai serta sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*).

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit

Untuk transaksi material yang mengandung benturan kepentingan, Dewan Komisaris dan Komite Audit memiliki peran untuk memastikan transaksi yang dilakukan melalui prosedur yang memadai. Transaksi juga harus dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum serta memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*).

TRANSACTION REVIEW AND APPROVAL POLICY

Fairness of Transactions

Bank Muamalat ensures that transactions involving conflicts of interest or affiliated parties are conducted on the basis of mutually agreed terms. These transactions are carried out under conditions equivalent to those applied in dealings with third parties.

The Bank has established a policy governing transactions involving conflicts of interest and/or related parties. Material transactions are subject to the approval of the Board of Commissioners and are conducted with careful consideration of the principles of prudence, as well as in full compliance with applicable laws and regulations.

Furthermore, all material transactions must be independently approved by the Board of Commissioners. Throughout 2024, there were no violations of prevailing laws and regulations concerning related party transactions, nor were there any transactions identified as involving conflicts of interest.

Compliance with Rules and Regulations

Transactions involving conflicts of interest or affiliated parties conducted by the Bank are carried out under terms and conditions equivalent to those applied in transactions with third parties. These transactions are in full compliance with the applicable regulations, specifically Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, and POJK No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions, at the time such transactions are carried out.

Statement of the Board of Directors

The Board of Directors consistently ensures that all affiliated transactions conducted by the Bank comply with the definitions and provisions set forth in applicable laws and regulations. These transactions are carried out following appropriate procedures and align with generally accepted business practices, including adherence to the arm's-length principle.

Role of the Board of Commissioners and Audit Committee

For material transactions involving a conflict of interest, the Board of Commissioners and the Audit Committee play a key role in ensuring that such transactions are conducted through proper and adequate procedures. These transactions must also adhere to generally accepted business practices and comply with the arm's-length principle.

Rujukan dalam Laporan Keuangan

Informasi terkait dengan transaksi afiliasi diuraikan lebih rinci pada Laporan Keuangan yang telah diaudit catatan xxx, yang terdapat pada bagian “Lampiran Laporan Tahunan”.

References in Financial Statements

Detailed information regarding affiliated transactions can be found in Note xxx of the audited Financial Statements, which is included in the “Annual Report Attachments” section.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Pada tahun 2024, Bank Muamalat tidak melakukan penawaran umum dalam bentuk penerbitan saham baru.

REALIZATION OF THE USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

In 2024, Bank Muamalat did not conduct any public offering involving the issuance of new shares.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH TERHADAP BANK

Berikut adalah perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap Bank beserta dampak Perubahan dan Informasi penyesuaian yang dilakukan Bank Muamalat terhadap perubahan tersebut selama tahun buku 2024 adalah sebagai berikut:

CHANGES IN LAW AND REGULATIONS WITH EFFECT ON THE BANK

The following are amendments to statutory regulations that impact the Bank, including the effects of these amendments and details on the adjustments made by Bank Muamalat in response to these changes during the 2024 financial year:

No.	Peraturan Law or Regulation	Pokok Peraturan Principal Regulation	Dampak Terhadap Bank Impact on the Bank
1.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan Law Number 41 of 2024 concerning the Maternal and Child Welfare During the First Thousand Days of Life	Pembangunan sumber daya manusia yang unggul sangat ditentukan oleh pemenuhan hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak. Peraturan perundang-undangan ini mengatur mengenai kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan. Adapun pokok pengaturan dalam undang-undang ini sebagai berikut: a. Kewajiban perusahaan memberikan cuti melahirkan kepada pekerja. b. Larangan perusahaan memberhentikan pekerja yang melaksanakan hak cuti melahirkan. c. Ketentuan upah bagi pekerja yang melaksanakan cuti melahirkan. d. Hak suami mendapatkan cuti untuk mendampingi istri. e. Kewajiban perusahaan memberikan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, akomodasi yang layak, sarana, dan prasarana di tempat kerja. The development of high-quality human resources is significantly influenced by the fulfillment of the basic rights and needs of mothers and children. This legislation focuses on the welfare of mothers and children during the first thousand days of life. The key provisions of this law are as follows: a. The company's obligation to provide maternity leave to employees. b. The company's prohibition on dismissing employees who exercise their right to maternity leave. c. Wage provisions for employees during their maternity leave. d. The husband's right to take leave to accompany his wife. e. The company's obligation to provide appropriate facilities, decent accommodation, facilities, and infrastructure in the workplace.	Menjadi acuan Bank dalam melakukan pengkinian pada Kebijakan Internal Bank terkait Cuti dan Upah Pekerja. This serves as a reference for the Bank in updating its Internal Policy regarding Employee Leave and Wages.



No.	Peraturan Law or Regulation	Pokok Peraturan Principal Regulation	Dampak Terhadap Bank Impact on the Bank
2.	PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Government Regulation Number 47 of 2024 concerning the Write-off of Bad Debts for Micro, Small, and Medium Enterprises	Adapun pokok pengaturan dalam regulasi ini sebagai berikut: a. Pemberlakuan peraturan terhadap Bank dan/ atau lembaga keuangan Non-Bank BUMN dan Pemerintah. b. Kriteria Penghapusbukuan. c. Kriteria Penghapustagihan. d. Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang terjadi. e. Dokumentasi dan pencatatan penghapusbukuan dan penghapustagihan f. Pemutakhiran data debitur atau nasabah yang diberikan penghapustagihan piutang g. Jangka waktu berlakunya ketentuan. The main provisions of this regulation are as follows: a. Enforcement of regulations on SOEs Banks and/or Non-Bank and Government financial institutions. b. Write-off Criteria. c. Absolute Write-off Criteria. d. The Board of Directors cannot be held responsible for losses incurred. e. Documentation and recording requirements for write-offs and absolute write-offs f. Updating of debtor or customer data for those granted receivables write-off g. Period of validity of the provisions.	Bank agar melakukan <i>mapping</i> terhadap data debitur untuk digunakan sebagai dasar penghapustagihan. The Bank should map debtor data to serve as the basis for absolute write-offs.
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan Government Regulation Number 11 of 2014 concerning Levies Imposed by the Financial Services Authority	Mengatur jenis pungutan, besaran pungutan, dan mekanisme pembayaran tagihan Bank kepada OJK. It regulates the types of levies, the amounts of levies, and the mechanism for payment of Bank bills to the OJK.	Menjadi acuan Bank dalam melakukan self assessment perhitungan pungutan dan acuan pembayaran tagihan. This serves as a reference for the Bank in conducting a self-assessment of levy calculations and bill payment procedures.
4.	POJK Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Informasi Rekam Jejak Pelaku Melalui Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan (POJK SIPELAKU) OJK Regulation No. 28 of 2024 concerning Management of Information on the Track Records of Individuals through the Pelaku Information System in the Financial Services Sector (POJK SIPELAKU)	Mengatur mengenai pemanfaatan dan tata kelola SIPELAKU serta memuat data dan informasi rekam jejak pelaku fraud di Sektor Jasa Keuangan. Dengan adanya akses data dan informasi rekam jejak pelaku melalui SIPELAKU, diharapkan dapat meminimalisir risiko kerugian industri jasa keuangan akibat kejadian fraud. It regulates the utilization and governance of SIPELAKU, which contains data and information on the track record of fraud perpetrators in the financial services sector. With access to this data, SIPELAKU aims to minimize the risk of losses in the financial services industry caused by fraudulent incidents.	Bank mengajukan proses pendaftaran akses pihak yang dapat memanfaatkan SIPELAKU kepada Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan dan melaporkan terkait rekam jejak pelaku fraud kepada OJK melalui SIPELAKU. Selain itu Bank wajib melakukan audit internal terhadap penggunaan SIPELAKU paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Banks are required to submit the registration process for access to SIPELAKU to the Financial Services Authority (OJK) electronically through the OJK licensing system. Additionally, banks must report the track record of fraud perpetrators to the OJK via SIPELAKU. Furthermore, banks are obligated to conduct an internal audit of SIPELAKU usage at least once a year.

No.	Peraturan Law or Regulation	Pokok Peraturan Principal Regulation	Dampak Terhadap Bank Impact on the Bank
5.	POJK Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan	Mengatur antara lain penyesuaian cakupan Perusahaan Anak (<i>investee</i>) Bank Umum agar selaras dengan UU P2SK, kegiatan penyertaan modal oleh BPR atau BPR Syariah, pengalihan piutang oleh Bank Umum serta BPR atau BPR Syariah, penjaminan oleh Bank Umum, pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan perjanjian elektronik oleh Bank Umum, penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) oleh Bank, dan produk perbankan syariah.	Dengan berlakunya POJK ini, Bank dapat melakukan Penyertaan Modal kepada lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan/atau lembaga non-keuangan yang mendukung industri perbankan syariah yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Bank juga wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur pembiayaan dalam hal melakukan dan/atau menerima pengalihan piutang sesuai POJK Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan, paling lambat 13 Juni 2025.
	OJK Regulation No. 26 of 2024 concerning Expansion of Banking Business Activities	It regulates, among other matters, the alignment of the scope of Subsidiary Companies (investees) of Commercial Banks with the P2SK Law, capital participation activities by BPR or BPR Sharia, the transfer of receivables by Commercial Banks and BPR or BPR Sharia, guarantees provided by Commercial Banks, the use of Electronic Signatures (TTE) and electronic agreements by Commercial Banks, the implementation of Foreign Exchange Business Activities (KUPVA) by banks, and sharia banking products.	With the enactment of this POJK, Banks are permitted to make capital participation in: financial service institutions that operate based on Sharia principles; and/or non-financial institutions that support the sharia banking industry, provided that such participation does not conflict with Sharia principles. Additionally, banks are required to align their financing policies and procedures for making and/or receiving transfers of receivables in accordance with POJK No. 26 of 2024 concerning the Expansion of Banking Business Activities, no later than June 13, 2025.
6.	POJK Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan	POJK ini mengatur antara lain kriteria Konglomerasi Keuangan yang wajib membentuk Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK), persyaratan pembentukan, kepemilikan dan permodalan serta kegiatan usaha PIKK, penilaian kemampuan dan kepatutan serta penilaian kembali bagi pihak utama PIKK dan kewajiban pelaporan PIKK.	Dengan berlakunya POJK ini, Bank wajib memperhatikan tata cara perubahan kepemilikan dan pengendalian dalam Konglomerasi keuangan, kepengurusan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK); larangan kepemilikan silang; kewenangan OJK untuk menetapkan kebijakan tertentu; serta pengakhiran PIKK dan tindak lanjut pembentukan PIKK
	OJK Regulation No. 30 of 2024 concerning Financial Conglomerates and Financial Conglomerate Holding Companies	This POJK regulates, among other aspects, the criteria for financial conglomerates that are required to establish a Financial Conglomerate Holding Company (PIKK), the requirements for the establishment, ownership, and capital of PIKK, as well as its business activities. It also outlines the fit and proper assessments and re-assessments for the key parties of PIKK, along with the reporting obligations of PIKK.	With the enactment of this POJK, Banks are required to adhere to the procedures for changes in ownership and control within financial conglomerates, the management of the Financial Conglomerate Holding Company (PIKK), and the prohibition on cross-ownership. It also outlines the OJK's authority to establish certain policies, as well as the termination of PIKK and the follow-up procedures for its establishment.



No.	Peraturan Law or Regulation	Pokok Peraturan Principal Regulation	Dampak Terhadap Bank Impact on the Bank
7.	POJK Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perintah Tertulis OJK Regulation No. 31 of 2024 concerning Written Orders	Ketentuan ini merupakan amandemen ketentuan perintah tertulis sehubungan dengan terbitnya UU P2SK dengan menambahkan ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan OJK dalam pemberian perintah tertulis kepada LJK untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi (P3IK) dan menyelaraskan ketentuan terkait pengawasan market conduct dalam "pemberian perintah atau tindakan tertentu". POJK ini mencabut 3 POJK eksisting terkait perintah tertulis. This provision amends the regulations regarding written orders in connection with the issuance of the P2SK Law. It adds provisions that further define the authority of the OJK to issue written orders to LJKs (financial service institutions) for the execution of business incorporation, merger, acquisition, integration, and/or conversion (P3IK). Additionally, it aligns the provisions related to market conduct supervision in terms of "giving certain orders or actions." This POJK revokes three existing POJKs related to written orders.	Bank wajib memperhatikan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk kewenangan memberikan Perintah Tertulis kepada LJK untuk: - melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi; dan/atau - menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi. Banks must observe the authority of the Financial Services Authority, which includes the power to issue Written Orders to LJKs (financial service institutions) to: - Carry out business incorporation, merger, acquisition, integration, and/or conversion; and/or - Accept business incorporation, merger, acquisition, integration, and/or conversion.
8.	POJK Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank OJK Regulation No. 44 of 2024 concerning Bank Secrecy	Mengatur kebutuhan pengecualian Rahasia Bank antara lain untuk kepentingan peradilan; kepentingan instansi lain untuk tujuan penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan kepentingan umum sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam Undang-Undang; serta pelaksanaan perjanjian kerja sama otoritas antarnegara yang telah ditandatangani secara resiprokal. POJK ini juga mengatur mekanisme umum pembukaan Rahasia Bank, baik yang melalui izin atau koordinasi dengan OJK serta yang tanpa melalui izin OJK (langsung kepada bank). POJK ini mencabut PBI Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. This regulation outlines the conditions under which exceptions to Bank Secrecy can be made, including in the interest of justice, to support the responsibilities of other agencies involved in state administration at the central level, and for the public interest, in line with the relevant legal duties and authorities. It also covers the execution of international cooperation agreements between authorities, provided they are based on reciprocal arrangements. Additionally, this POJK sets out the general procedures for disclosing Bank Secrecy, either with approval or coordination from the OJK, or directly to the bank without OJK approval. This POJK revokes PBI Number 2/19/PBI/2000 on the Requirements and Procedures for Issuing Written Orders or Permissions to Disclose Bank Secrecy.	Bank wajib menyusun prosedur internal mengenai pembukaan Rahasia Bank sesuai amanat POJK Nomor 44 Tahun 2024 serta mendokumentasikan seluruh permintaan dan pemberian pembukaan informasi Rahasia Bank. Banks must establish internal procedures for handling the disclosure of Bank Confidentiality in line with the provisions of POJK No. 44 of 2024, and are required to properly document all requests for and approvals of such disclosures.
9.	POJK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik OJK Regulation No. 45 of 2024 concerning the Development and Strengthening of Issuers and Public Companies	Mengatur substansi pengaturan antara lain terkait jangka waktu efektifnya pernyataan pendaftaran, konfirmasi perubahan informasi jumlah dan harga penawaran awal (<i>bookbuilding</i>), persyaratan dan jangka waktu perubahan status Perusahaan Terbuka menjadi perseroan tertutup sebagai akibat delisting, perubahan status Perusahaan Terbuka menjadi perseroan tertutup secara sukarela, jangka waktu penyampaian keterbukaan atas informasi atau fakta material, serta kedudukan pemegang saham publik dalam likuidasi emiten atau perusahaan publik. This regulation covers various key aspects, including the validity period of the registration statement, procedures for confirming changes in the number and price of securities offered, the minimum duration for the initial offering period (<i>bookbuilding</i>), requirements and timelines for converting a Public Company into a private company due to delisting or voluntary action, deadlines for disclosing material information or facts, and the position of public shareholders during the liquidation of an issuer or public company.	Bank wajib memperhatikan perubahan persyaratan dan jangka waktu perubahan status Perusahaan Terbuka menjadi perseroan tertutup sebagai akibat delisting, perubahan status Perusahaan Terbuka menjadi perseroan tertutup secara sukarela, jangka waktu penyampaian keterbukaan atas informasi atau fakta material, serta kedudukan pemegang saham pub Banks must take into account the updated requirements and timelines for converting a Public Company into a private company, whether due to delisting or voluntary action, as well as the deadlines for disclosing material information or facts, and the position of public shareholders in these processes.

No.	Peraturan Law or Regulation	Pokok Peraturan Principal Regulation	Dampak Terhadap Bank Impact on the Bank
10.	POJK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion OJK Regulation No. 17 of 2024 concerning the Implementation of Bullion Business Activities	Memberikan pedoman bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam menyelenggarakan Kegiatan Usaha Bulion antara lain mengenai cakupan Kegiatan Usaha Bulion, persyaratan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion, mekanisme perizinan Kegiatan Usaha Bulion, pentahapan pelaksanaan Kegiatan Usaha Bulion dan penerapan prinsip kehati-hatian. Provides guidance for Financial Services Institutions (LJK) in conducting Bullion Business Activities, covering the scope of such activities, eligibility requirements for LJKs, licensing procedures, stages of implementation, and the implementation of prudent principles.	Sebagai acuan bagi Bank Muamalat dalam menyelenggarakan Kegiatan Usaha Bulion meliputi: a. Simpanan Emas; b. Pembiayaan Emas; c. Perdagangan Emas; d. Penitipan Emas; dan/atau e. kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan. Serves as a reference for Bank Muamalat in conducting Bullion Business Activities, which include: a. Gold Deposits; b. Gold Financing; c. Gold Trading; d. Gold Custody; and/or e. Other related activities undertaken by Financial Services Institutions.
11.	POJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan OJK Regulation No. 12 of 2024 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Financial Services Institutions	POJK ini mengatur antara lain: a. Jenis perbuatan yang tergolong <i>fraud</i> ; b. Ruang lingkup pihak yang terlibat; c. Kewajiban LJK untuk menyusun dan menerapkan strategi anti <i>fraud</i> ; d. Penyusunan dan penerapan strategi anti fraud terdiri atas 4 (empat) pilar; e. Kewajiban penerapan fraud detection sistem; f. Kewajiban LJK memiliki unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti fraud disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha LJK; g. Jenis dan pedoman pengisian laporan yang wajib disampaikan oleh LJK kepada OJK; dan h. Penyampaian laporan. This POJK sets out regulations on several key areas, including: a. The types of actions considered fraudulent, b. The scope of parties involved in such acts, c. The obligation for LJK to develop and implement anti-fraud strategies, d. The preparation and implementation of anti-fraud strategies, which are based on 4 (four) pillars, e. The obligation to implement a fraud detection system, f. The obligation for LJK to have a dedicated unit or function responsible for anti-fraud implementation, tailored to the complexity of their business operations, g. The types of reports and guidelines for their completion that must be submitted to the OJK, and h. The procedures for submitting the reports.	Dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> bagi Lembaga Jasa Keuangan, POJK ini menjadi acuan pelaksanaan strategi Anti <i>Fraud</i> . With the issuance of Financial Services Authority Regulation No. 12 of 2024 on the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Financial Services Institutions, this POJK serves as the reference for implementing anti-fraud measures.
12.	POJK No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank OJK Regulation No. 15 of 2024 concerning the Integrity of Bank Financial Reporting	Mengatur mengenai penyusunan informasi dan laporan keuangan mencakup kewajiban bank untuk memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas dan memiliki kebijakan/prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, serta larangan bagi direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan pejabat eksekutif terhadap praktik <i>window dressing</i> . Regulations concerning the preparation of financial information and reports require banks to implement a financial reporting process with integrity, supported by internal control policies and procedures. Additionally, Boards of Directors, Boards of commissioners, Sharia Supervisory Boards, and Executive Officers are prohibited from engaging in window dressing practices.	Bank wajib menyusun kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank, paling lambat 9 Januari 2025. Selain itu Bank wajib membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank, paling lambat 9 April 2025. Banks must establish internal control policies and procedures for their financial reporting process by January 9, 2025. Additionally, Banks are required to establish a dedicated unit responsible for preventing fraud or manipulation in the Bank's financial information and/or reports by April 9, 2025.



No.	Peraturan Law or Regulation	Pokok Peraturan Principal Regulation	Dampak Terhadap Bank Impact on the Bank
13.	POJK No. 11 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas POJK No. 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK OJK Regulation (POJK) No. 11 of 2024, the Second Amendment to POJK No. 18/POJK.03/2017, regarding the Reporting and Requesting of Debtor Information Through SLIK.	Terdapatnya penambahan pihak yang wajib menyampaikan informasi pendukung aktivitas penyediaan dana pada SLIK. Additional parties are now required to submit supporting information related to funding provision activities on SLIK.	Bank wajib menjadikan ketentuan dimaksud dalam melakukan pelaporan SLIK kepada regulator, melakukan monitoring pelaporan SLIK kepada regulator, serta menjadi acuan dalam rangka melakukan permintaan data Informasi Debitur. Banks are required to establish provisions for reporting SLIK to regulators, monitor SLIK reporting to regulators, and use it as a reference when requesting Debtor Information data.
14.	POJK No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum POJK No. 5 of 2024 concerning the Determination of Supervision Status and the Handling of Issues of Commercial Banks	Pengaturan dalam POJK 5/2024 memuat empat topik ketentuan utama yaitu: Pertama, pengkinian mekanisme dan koordinasi antara lembaga dalam penetapan Bank Sistemik; Kedua, penetapan status dan tindakan pengawasan bank; Ketiga, rencana aksi pemulihan (recovery plan); dan Keempat, pendirian Bank Perantara dalam rangka resolusi bank oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). POJK 5/2024 covers four main provisions: First, it updates the mechanisms and coordination between institutions in identifying Systemic Banks; Second, it outlines the determination of bank supervision status and actions; Third, it addresses the recovery action plan; and Fourth, it establishes the role of an Intermediary Bank in bank resolution by the Deposit Insurance Agency (LPS).	Bank wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan Bank dan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan, jika diperlukan. Rencana Aksi Pemulihan untuk pertama kali wajib disusun dan disampaikan sebelum akhir bulan November 2024 Banks are required to prepare and submit a Bank Recovery Action Plan and update the Recovery Action Plan, if necessary. The Recovery Action Plan must be prepared and submitted for the first time before the end of November 2024.
15.	Surat OJK No. S-264/PB.01/2024 tentang Pengungkapan Informasi Tambahan yang Tidak Disyaratkan oleh Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku OJK Letter No. S-264/PB.01/2024 concerning the Disclosure of Additional Information Not Required by the Applicable Financial Reporting Framework.	Tanggapan OJK terhadap terkait Panduan Teknis – Audit atas Informasi Tambahan yang Tidak Disyaratkan oleh Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku. OJK's response to the Technical Guidelines for the Audit of Additional Information Not Required by the Applicable Financial Reporting Framework.	1. Bank mengungkapkan indikator prudensial dalam laporan tahunan (<i>annual report</i>). Indikator prudensial dimaksud paling sedikit mencakup indikator prudensial yang diatur dalam ruang lingkup audit spesifik pada SEOJK AP KAP. 2. Bank dapat memperkuat peran audit intern dengan memasukkan indikator prudensial sebagai ruang lingkup audit dari audit intern; dan 3. OJK mengharapkan agar tidak terdapat informasi yang diberikan label “tidak diaudit” dalam laporan keuangan audited bank. 1. Banks are required to disclose prudential indicators in their annual reports, which at a minimum include the prudential indicators specified in the audit scope outlined in the SEOJK AP KAP. 2. Banks may enhance the role of internal audit by including prudential indicators within the scope of internal audits. and 3. OJK expects that no information marked as “unaudited” appears in the bank's audited financial statements.

No.	Peraturan Law or Regulation	Pokok Peraturan Principal Regulation	Dampak Terhadap Bank Impact on the Bank
16.	SEOJK Nomor 18/SEOJK.08/2024 tentang Penilaian Sendiri terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan SEOJK No. 18/SEOJK.08/2024 concerning the Self-Assessment for Compliance with Consumer and Community Protection Provisions in the Financial Services Sector	Merupakan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penilaian sendiri terhadap pemenuhan ketentuan pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan bagi PUJK guna memenuhi amanat POJK 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. This serves as a guideline and implementation instruction for conducting a self-assessment of compliance with consumer and community protection provisions in the financial services sector for PUJK, in order to fulfill the requirements of POJK 22 of 2023 on Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector.	Bank melakukan Penilaian Sendiri terhadap pemenuhan ketentuan Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dan menyampaikan laporan hasil Penilaian Sendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan hasil Penilaian Sendiri sebagaimana dimaksud disusun dengan mengacu pada format standar dan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran SEOJK Nomor 18/SEOJK.08/2024. The Bank is required to conduct a Self-Assessment on its compliance with Consumer and Community Protection provisions in the financial services sector and submit a report on the results to the Financial Services Authority. The report must be prepared in accordance with the standard format and technical guidelines outlined in the Attachment to SEOJK No. 18/SEOJK.08/2024.
17.	SE OJK No. 13.SEOJK.08.2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rencana dan Laporan Realisasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan SE OJK No. 13.SEOJK.08.2024 concerning Preparation and Submission of Financial Literacy and Financial Inclusion Plan and Realization Reports	SEOJK ini mengatur mengenai penyusunan dan penyampaian laporan rencana dan laporan realisasi literasi keuangan dan inklusi keuangan, antara lain: - bentuk dan penyusunan laporan literasi keuangan dan inklusi keuangan; - penyampaian laporan literasi keuangan dan inklusi keuangan; - penanggung jawab laporan; - tata cara penyampaian laporan; dan - penyampaian pengajuan permohonan pengecualian pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan. This SEOJK governs the preparation and submission of financial literacy and inclusion planning and realization reports, which include: - The format and preparation of financial literacy and inclusion reports; - The submission of financial literacy and inclusion reports; - The designated person responsible for the reports; - The procedures for report submission; and - The process for requesting exemptions from conducting activities aimed at enhancing financial literacy and inclusion.	Bank wajib menyusun dan menyampaikan laporan Literasi Keuangan; dan laporan Inklusi Keuangan, kepada Otoritas Jasa Keuangan. Banks are required to prepare and submit Financial Literacy and Financial Inclusion reports to the Financial Services Authority.
18.	Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.10 tahun 2024 tentang Penerapan APU, Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) bagi pihak yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 10 of 2024 concerning the Implementation of APU, PPT and PPSPM for parties regulated and supervised by Bank Indonesia	Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10 Tahun 2024 mengatur tentang penerapan Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM). Peraturan ini berlaku bagi pihak yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 10 of 2024 governs the implementation of Anti-Money Laundering (APU), Prevention of Terrorism Funding (PPT), and the Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (PPSPM). This regulation applies to all parties under the regulation and supervision of Bank Indonesia.	Bank memastikan bahwa rekanan pihak ketiga eksisting dan/atau calon rekanan pihak ketiga Bank Muamalat Indonesia sudah menerapkan (PBI) No.10 tahun 2024 tentang Penerapan APU, PPT dan PPSPM bagi pihak yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. The Bank must ensure that both existing and/or prospective third-party partners of Bank Muamalat Indonesia comply with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 10 of 2024 on the Implementation of APU, PPT, and PPSPM for entities regulated and supervised by Bank Indonesia.



No.	Peraturan Law or Regulation	Pokok Peraturan Principal Regulation	Dampak Terhadap Bank Impact on the Bank
19.	PADG No. 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas PADG No. 21/25/PADG/2019 tentang Rasio FTV untuk Pembiayaan Properti, & Uang Muka untuk Pembiayaan Kendaraan Bermotor PADG No. 19 of 2024 concerning the Sixth Amendment to PADG No. 21/25/PADG/2019 concerning the FTV Ratio for Property Financing & Down Payment for Motor Vehicle Loans	Melanjutkan pelonggaran ketentuan Rasio LTV untuk KP, Rasio FTV untuk PP, dan Uang Muka untuk KKB atau PKB, dengan batasan Rasio LTV untuk KP, Rasio FTV untuk PP, dan Uang Muka untuk KKB atau PKB sebagaimana terakhir diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. The relaxation of provisions related to the LTV Ratio for KP, the FTV Ratio for PP, and the Down Payment requirements for KKB or PKB, is being continued. These relaxations remain subject to the limitations set forth in Regulation of the Member of the Board of Governors No. 19 of 2023, concerning the Fifth Amendment to the Regulation of the Member of the Board of Governors No. 21/25/PADG/2019 concerning the Loan To Value Ratio for Property Loans, the Financing To Value Ratio for Property Financing, and the Down Payment for Motor Vehicle Loans or Financing.	Dengan berlakunya ketentuan ini, menjadi acuan Bank dalam pemberlakuan ketentuan Pembiayaan Properti dan/atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. With the enactment of this provision, it serves as a reference for the Bank in applying the rules related to Property Financing and/or Motor Vehicle Financing.
20.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Regulation No. 13 of 2024 concerning Macroprudential Policy	Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip dasar kebijakan makroprudensial, kerangka kebijakan kerja makroprudensial, perumusan kebijakan makroprudensial, pelaksanaan kebijakan makroprudensial, pelaporan dan pengawasan, koordinasi dan sinergi, akuntabilitas dan transparansi dan ketentuan penutup. This regulation outlines the general provisions and fundamental principles of macroprudential policy, including the macroprudential policy framework, formulation and implementation processes, reporting and supervision mechanisms, coordination and synergy, as well as provisions on accountability, transparency, and closing clauses.	Menjadi acuan Bank dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. Serves as a reference for the Bank in the formulation and implementation of macroprudential policies.
21.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial Regulation of the Members of the Board of Governors No. 21 of 2024 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Members of the Board of Governors No. 11 of 2023 concerning the Implementation Regulation of the Macroprudential Liquidity Incentive Policy	Mengatur mengenai mekanisme dan teknis pemberian insentif kepada bank. It governs the mechanisms and technical details for providing incentives to banks.	Menjadi acuan Bank untuk dapat memperoleh KLM atas pemberian Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM. Serves as a reference for the Bank to obtain KLM for providing inclusive loans or financing based on RPIM achievements.
22.	PADG BI No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PADG No. 21/12/PADG/2019 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia. PADG BI No. 5 of 2024 concerning Amendments to PADG No. 21/12/PADG/2019 concerning the Implementation of Scheduled Fund Transfers and Clearing by Bank Indonesia.	Memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia, dilakukan pengembangan sarana pendukung, penyesuaian kriteria penetapan zona wilayah kliring, penyesuaian mekanisme dalam kegiatan pertukaran warkat debit, serta penyesuaian kegiatan pertukaran warkat secara terpusat atau bilateral. It contains regulations on the implementation of scheduled fund transfers and clearing by Bank Indonesia, the development of supporting facilities, the adjustment of criteria for determining clearing area zones, adjustment of mechanisms in debit script exchange activities, and adjustment of script exchange activities, whether centrally or bilaterally.	Bank wajib melakukan penyesuaian mekanisme operasional pertukaran warkat debit. Banks are required to modify the operational mechanisms for exchanging debit script.

No.	Peraturan Law or Regulation	Pokok Peraturan Principal Regulation	Dampak Terhadap Bank Impact on the Bank
23.	PADG No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PADG No. 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor PADG No. 6 of 2024 concerning Amendments to PADG No. 4 of 2023 concerning Foreign Exchange from Exports and Foreign Exchange from Import Payments	Memuat pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap mekanisme transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah. It covers the regulation, development, and oversight of the Foreign Exchange Market transaction mechanism based on Sharia Principles.	Menjadi acuan Bank dalam melaksanakan transaksi transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah. Serves as a reference for the Bank in conducting foreign exchange market transactions based on Sharia principles.
24.	PBI No. 3 Tahun 2024 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan PBI No. 3 of 2024 concerning Alternative Institutions for Dispute Resolution in the Financial Sector	Peraturan Bank Indonesia ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan, fungsi, tugas dan wewenang, kelembagaan, kelembagaan dan penyelenggaraan lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor keuangan, penyelesaian sengketa oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor keuangan, pelaporan dan pemberian informasi oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor keuangan, pengawasan, koordinasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. This Bank Indonesia Regulation covers general provisions, objectives, functions, responsibilities and authorities, institutions, as well as the establishment and implementation of alternative dispute resolution mechanisms in the financial sector. It also addresses dispute resolution processes, reporting and information provision by these institutions, supervision, coordination, transitional provisions, and closing provisions.	Dengan terbitnya ketentuan ini, menjadi pedoman Bank dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor keuangan. With the issuance of this provision, it serves as a guideline for the Bank in carrying out dispute resolution through alternative dispute resolution institutions in the financial sector.
25.	PBI No. 2 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia PBI No. 2 of 2024 concerning Information System Security and Cyber Resilience for Payment System Providers, Money Market and Foreign Exchange Market Participants, and Other Parties Regulated and Supervised by Bank Indonesia	Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kerangka pengaturan dan pengawasan KKS, tata kelola, pencegahan, penanganan, pengawasan, kolaborasi, penerapan KKS dan ketentuan penutup This regulation sets out general provisions, the regulatory and supervisory framework for KKS, as well as governance, prevention, handling, supervision, collaboration, implementation of KKS, and closing provisions.	Bank wajib menyampaikan laporan terkait Data dan/atau informasi Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (KKS) dan menyampaikan laporan Insidental pada saat terjadi Insiden Siber. The Bank is required to submit reports containing data and/or information related to Information System Security and Cyber Resilience (KKS), as well as submit incidental reports in the event of a cyber incident.



No.	Peraturan Law or Regulation	Pokok Peraturan Principal Regulation	Dampak Terhadap Bank Impact on the Bank
26.	PBI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran (PBI SK SP). PBI No. 5 of 2024 concerning Competency Standardization in the Payment System Sector (PBI SK SP).	Pokok pengaturan dalam regulasi ini sebagai berikut: - Kepemilikan Sertifikat PBK dan/atau Sertifikasi Kompetensi Sistem Pembayaran harus dipenuhi paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal efektif menduduki jabatan. - Pemeliharaan kompetensi sistem pembayaran untuk PBK Sistem Pembayaran dilakukan melalui training atau workshop yang diselenggarakan oleh LPK Sistem Pembayaran. - Pemeliharaan kompetensi sistem pembayaran untuk sertifikasi kompetensi sistem pembayaran dilakukan melalui uji sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP Sistem Pembayaran. - Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku SK SP, LPK Sistem Pembayaran, dan LSP Sistem Pembayaran yang melanggar ketentuan mengenai SK SP. The key provisions in this regulation include: - Holders of PBK Certificates and/or Payment System Competency Certifications must meet the certification requirements within six (6) months from the effective date of assuming their position. - Maintenance of payment system competency for PBK in the Payment System sector is conducted through training or workshops provided by a LPK Payment System. - Competency maintenance for holders of payment system competency certifications is carried out through certification tests organized by the LSP Payment System. - Bank Indonesia may impose administrative sanctions on SK SP Actors, LPK Payment System, and LSP Payment System, that violate the provisions related to SK SP.	Bank wajib memastikan SDM yang melaksanakan kegiatan sistem pembayaran memiliki sertifikat PBK sistem pembayaran dan wajib menyediakan dana yang cukup untuk pengembangan dan penguatan kompetensi SDM. The Bank must ensure that human resources involved in payment system activities hold a valid Payment System PBK Certificate and are also required to allocate sufficient funds for the development and enhancement of the human resources competencies.
27.	PLPS Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank PLPS No. 4 of 2024 concerning Reporting of Bank Customer-Based Deposit Guarantee Data	Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kegunaan data SCV, kategori nasabah berdasarkan SCV, kewajiban dan tanggung jawab bank dan pelaporan, This regulation covers general provisions, the use of SCV data, customer categorization based on SCV, as well as obligations and responsibilities, and reporting requirements for banks.	Menjadi acuan Bank dalam mengkategorikan nasabah berdasarkan SCV dan pembuatan pelaporan, Serves as a reference for the Bank in categorizing customers based on SCV data and in preparing the required reports.
28.	PLPS Nomor 2 tahun 2024 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum PLPS No. 2 of 2024 concerning the Resolution Plan for Commercial Banks	Mengatur mengenai pedoman penyusunan Rencana Resolusi. Provides guidelines for the preparation of a Resolution Plan.	Bank wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Resolusi kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk mendapat persetujuan. Rencana Resolusi untuk pertama kali wajib disusun dan disampaikan sebelum akhir bulan November 2024 The Bank is required to prepare and submit a Resolution Plan to the Deposit Insurance Agency for approval. The initial Resolution Plan must be completed and submitted no later than the end of November 2024.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, dan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 yang berdampak terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 116: "Sewa" tentang liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik;
- Amendemen PSAK 201: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas lancar atau tidak lancar;
- Amendemen PSAK 201: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan; dan
- Revisi PSAK 401: "Penyajian Laporan Keuangan Syariah" tentang penghilangan penyajian laporan perubahan aset kelolaan sebagai salah satu komponen laporan keuangan.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi dan tidak memiliki dampak terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Beberapa standar akuntansi baru dan interpretasi dari standar akuntansi telah diterbitkan dan belum berlaku efektif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan belum diterapkan pada penyusunan laporan keuangan ini.

PSAK dibawah ini akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025 dan penerapan dini diperbolehkan:

- Amendemen PSAK 221: "Pengaruh perubahan Kurs Valuta Asing" tentang kekurangan ketertukaran.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

The new standards, revisions, and interpretations that have been issued and are effective for financial years beginning on or after January 1, 2024, and that impact financial statements, are as follows:

- Amendment to SFAS 116: "Leases" regarding lease liabilities in sale and leaseback transactions;
- Amendment to SFAS 201: "Presentation of Financial Statements" concerning the classification of current or non-current liabilities;
- Amendment to SFAS 201: "Presentation of Financial Statements" related to long-term liabilities with covenants; and
- Revision to SFAS 401: "Presentation of Sharia Financial Statements" eliminating the requirement to present the report on changes in managed assets as part of the financial statements.

The implementation of these standards does not lead to changes in accounting policies and has no impact on the amounts reported for the current period or in previous years.

Several new accounting standards and interpretations have been issued but are not yet effective for the financial year ending December 31, 2024, and have not been applied in the preparation of these financial statements.

The following SFAS will be effective on January 1, 2024, with early implementation permitted:

- Amendment to SFAS 221: "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" regarding lack of exchangeability.

Fungsi Penunjang Bisnis

Business Support Function

Sumber Daya Manusia Human Capital	218
Teknologi Informasi Information Technology	236
Manajemen Risiko Risk Management	248



Sumber Daya Manusia Human Capital

Di antara fokus pengelolaan SDM Bank Muamalat Indonesia tahun 2024 adalah meningkatkan kapabilitas talenta untuk mendukung peningkatan kualifikasi Bank.

Among the focus of Bank Muamalat Indonesia's HR management in 2024 is to improve the capabilities of talent to support the improvement of the Bank's qualifications.



111 Jam
Hours

Rata-rata jam pelatihan karyawan
Average hours of employee training



65,5%

Sebagian besar atau sekitar 65% hasil rekrutmen karyawan baru tahun 2024 merupakan Generasi Y (Milenial).
Most or about 65% of the new employee recruitment results in 2024 are Generation Y (Millennials).





PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“BMI”, “Bank”) menjadikan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai satu di antara fokus utama Bank dalam menjalankan kegiatan operasional. BMI memandang bahwa SDM unggul sangat penting untuk mendukung pencapaian target, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang Bank.

Dengan pertimbangan tersebut, Bank senantiasa menyiapkan program pengembangan SDM secara berkelanjutan. Apalagi, kebijakan tersebut juga selaras dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum.

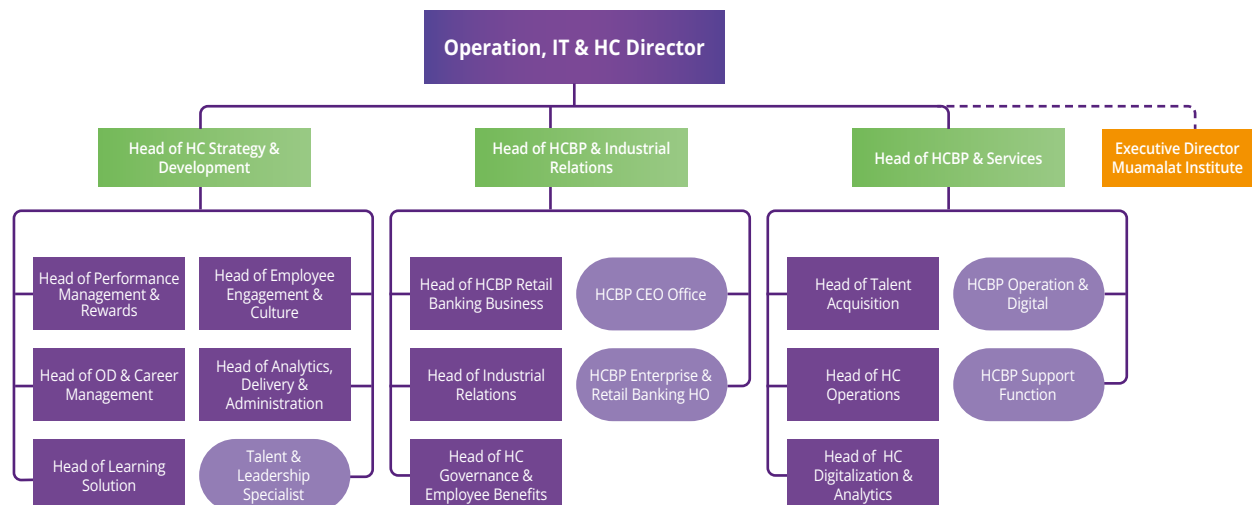
Program pengembangan dilakukan melalui kegiatan yang terstruktur, optimalisasi efektivitas biaya tenaga kerja, peningkatan skema *reward* dan *recognition* yang lebih terarah, serta peningkatan infrastruktur SDM yang juga mendukung penguatan nilai-nilai budaya Bank.

Melalui inisiatif pengelolaan dan pengembangan SDM tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan *engagement* terhadap Bank.

PENGELOLA SDM

Dalam organisasi Bank, pengelolaan SDM dilaksanakan oleh Direktorat Human Capital. Direktorat ini dipimpin oleh Senior Executive Vice President (SEVP) Human Capital dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan karyawan.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA SDM HR Management Organizational Structure



PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“BMI” or “the Bank”) prioritizes Human Resources (HR) management as a key focus in its operational activities. BMI recognizes that having excellent HR is crucial for achieving both short-term and long-term targets of the Bank.

With this consideration, the Bank consistently implements sustainable HR development programs. This approach is in line with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 24 of 2022 on the Development of Human Resource Quality for Commercial Banks.

The development program is carried out through structured activities that optimize labor cost-effectiveness, enhance more targeted reward and recognition schemes, and improve HR infrastructure, all of which support the Bank’s cultural values.

Through these HR management and development efforts, the Bank aims to increase productivity and strengthen engagement with the Bank.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

In the Bank’s organization, human resource management is carried out by the Human Capital Directorate. This directorate is led by the Senior Executive Vice President (SEVP) of Human Capital and is responsible for managing and developing employees.

Direktorat Human Capital memiliki 4 (empat) unit kerja, yang 1 (satu) di antaranya merupakan *subsidiary*, yaitu Muamalat Institute - Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Perbankan Syariah (LPPBS). Penjelasan mengenai peran dan fungsi masing-masing unit kerja diuraikan melalui tabel di bawah ini.

The Human Capital Directorate consists of 4 (four) work units, one of which is a subsidiary, the Muamalat Institute - Sharia Banking Education and Development Institute (LPPBS). The roles and functions of each work unit are detailed in the table below.

No.	Unit Kerja Work Unit	Peran dan Fungsi	Role and Function
1.	Human Capital Strategy & Development	Menerjemahkan strategi bisnis ke dalam prioritas Human Capital. Mencakup pengembangan organisasi, perencanaan tenaga kerja dan penganggaran biaya tenaga kerja, manajemen kinerja, kerangka kerja remunerasi dan kompensasi, serta bertanggung jawab untuk menyusun strategi yang efektif dan efisien dalam pengelolaan pengembangan SDM. Mengelola seluruh aktivitas dalam pelaksanaan program pembelajaran dan pembinaan talenta di BMI untuk menciptakan kualitas program pembelajaran dan pembinaan talenta sesuai dengan strategi pengembangan SDM guna mendukung peningkatan kualitas SDM dalam mendukung strategi bisnis Bank. Peran lainnya adalah mengelola komunikasi karyawan (<i>Employee Engagement</i>) dan <i>Employer Branding</i> .	Interpret business strategies into Human Capital priorities, which encompass organizational development, workforce planning, labor cost budgeting, performance management, remuneration, and compensation frameworks. This role is responsible for developing effective and efficient strategies for managing HR development. It involves managing all activities related to the implementation of learning and talent development programs at BMI to create high-quality learning and talent initiatives aligned with HR development strategies, ultimately supporting the improvement of HR quality to support the Bank's business strategy. Other responsibilities include managing employee engagement and Employer Branding.
2.	Human Capital Business Partner (HCBP) & Industrial Relations	<i>Human Capital Business Partner</i> (HCBP), memberikan rekomendasi, konsultasi, solusi-solusi strategis yang implementatif terkait dengan SDM serta organisasi kepada seluruh pemangku kepentingan (Direksi, Pejabat Eksekutif, dan seluruh <i>line manager</i>) di Direktorat <i>Retail Banking</i>, <i>Wholesale Banking</i> dan <i>CEO Directorate</i>. Unit ini juga membuat penyesuaian (<i>customization</i>) produk dan program-program SD yang sesuai dengan kebutuhan organisasi di seluruh Direktorat tersebut, agar tercipta ketersediaan organisasi dan SDM yang mumpuni guna mendukung pencapaian dan produktivitas organisasi. <i>Industrial Relations</i>, berperan dalam menciptakan hubungan industrial yang kondusif dan harmonis antara Karyawan, Serikat Pekerja, dan Perusahaan dengan memastikan bahwa proses yang terkait dengan hubungan kerja, syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak, penanganan keluhan karyawan, serta penanganan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan dengan cara yang tepat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk menghindari/meminimalisir risiko hukum dan risiko reputasi Bank, berlandaskan prinsip-prinsip (1) kepentingan bersama antara pengusaha, pekerja, masyarakat, serta pemerintah, (2) kemitraan menguntungkan (<i>mutualistik</i>) antara pekerja dan pengusaha; (3) hubungan fungsional serta adanya pembagian tugas; (4) memiliki sifat kekeluargaan; (5) terciptanya ketenangan serta ketentraman dalam bekerja; (6) peningkatan produktivitas; dan (7) peningkatan kesejahteraan bersama.	The Human Capital Business Partner (HCBP) provides recommendations, consultations, and strategic solutions related to HR and organizational matters to all stakeholders, including the Board of Directors, Executive Officers, and all line managers within the Retail Banking Directorate, Wholesale Banking, and the CEO Directorate. This unit also customizes and aligns SD programs to meet the specific needs of the organization across all Directorates, aiming to develop a qualified human resources and organization that supports the achievement and productivity goals of the company. The Industrial Relations function is responsible for fostering a conducive and harmonious relationship between Employees, Labor Unions, and the Company. It ensures that processes related to employment relations, working conditions, the rights and obligations of all parties, handling employee complaints, and resolving industrial relations disputes are conducted correctly and in accordance with applicable laws and regulations. This is conducted to minimize legal and reputational risks to the Bank. The principles guiding this function are: (1) common interests between employers, employees, the society, and the government; (2) mutualistic partnerships between employees and employers; (3) functional relationships and clear division of tasks; (4) a family-oriented approach; (5) promoting peace and tranquility at work; (6) increasing productivity; and (7) increasing shared prosperity.



No.	Unit Kerja Work Unit	Peran dan Fungsi	Role and Function
3.	Human Capital Business Partner (HCBP) & Services	Memberikan rekomendasi, konsultasi dan solusi-solusi strategis yang implementatif terkait dengan SDM serta organisasi kepada seluruh pemangku kepentingan (Direksi, Pejabat Eksekutif, dan seluruh manajer lini) di Direktorat Operation, Compliance, Risk & Legal, Financing dan Finance. Unit ini juga membuat penyesuaian (<i>customization</i>) produk dan program-program SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi di seluruh Direktorat <i>Operation, Compliance, Risk & Legal, Financing</i> dan <i>Finance</i> , agar tercipta ketersediaan organisasi dan SDM yang mumpuni guna mendukung pencapaian dan produktivitas organisasi. Unit ini juga bertanggung jawab dalam mengelola dan mengimplementasikan strategi <i>talent acquisition</i> , manajemen sistem SDM (<i>database</i>), serta memastikan eksekusi transaksi operasional SDM telah sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku dan sesuai dengan rencana, program dan inisiatif HC dan Bank.	The unit provides recommendations, consultations, and implementable strategic solutions related to HR and organizational matters to all stakeholders, including the Board of Directors, Executive Officers, and all line managers within the Directorate of Operations, Compliance, Risk & Legal, Financing, and Finance. It also aligns products and HR programs to meet the specific needs of the organization throughout the Operation, Compliance, Risk & Legal, Financing, and Finance Directorates, ensuring the availability of qualified organizations and HR to support the achievement and productivity of the organization. Additionally, the unit is responsible for managing and implementing talent acquisition strategies, HR system management (databases), and ensuring that HR operational transactions comply with applicable regulations, policies, and the plans, programs, and initiatives of both HC and the Bank.
4.	Muamalat Institute	Lembaga dengan fungsi pelatihan dan pengembangan yang berperan mewujudkan edukasi dan literasi keuangan syariah terbaik di Tanah Air.	An institution that focused on training and development, playing a key role in achieving the best Sharia financial education and literacy in the country.

REALISASI PENGEMBANGAN SDM 2024

Selama periode tahun 2024, Direktorat Human Capital telah melaksanakan sejumlah inisiatif dan program kerja sesuai dengan target atau rencana pengembangan SDM yang telah ditetapkan oleh BMI, yakni:

1. Memberikan solusi pembelajaran yang tepat dan terintegrasi untuk peningkatan produktivitas dan peningkatan kinerja di *front office, middle office*, dan *back office*.
2. Membangun program akselerasi, memastikan konversi, dan mengatur *Fast Track Program* untuk mendukung optimalisasi organisasi.
3. Meningkatkan kemampuan *talent* yang ada dengan manajemen talenta yang baik dan kepemimpinan untuk mendukung kualifikasi tinggi Perusahaan.
4. Membuat anggaran yang efektif dan pengendalian risiko untuk mendukung efisiensi dan kesadaran risiko Bank di era digital.
5. Membangun Transformasi Human Capital untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

Realisasi pengembangan yang meliputi pendidikan dan pelatihan secara kumulatif disampaikan melalui tabel di bawah ini.

REALIZATION OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT FOR 2024

In 2024, the Directorate of Human Capital has carried out various initiatives and programs aligned with the Human Resource development goals set by BMI, which include:

1. Delivering appropriate and integrated learning solutions to enhance productivity and performance across the front office, middle office, and back office.
2. Developing acceleration programs, ensuring conversions, and organizing Fast Track Programs to optimize organizational performance.
3. Enhancing existing talent capabilities through effective talent management and leadership to support the company's high qualifications.
4. Creating effective budgets and risk control to support the Bank's efficiency and risk awareness in the digital era.
5. Building Human Capital Transformation to develop excellent human resources.

The overall development realization, including education and training, is presented in the table below.

Uraian	2024	2023	Description
Rata-rata Jam Pelatihan per Tahun per Karyawan	111	82	Average Training Hours per Year per Employee

Realisasi Program pelatihan dan pembelajaran di Bank pada tahun 2024 yang telah berjalan dibagi dalam beberapa kategori, di antaranya adalah:

1. *Learning Program*

Kategori *Learning Program* terbagi menjadi 5 (lima) program utama, yaitu:

a. *Core Training Program*

Training yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan Bank. Bentuk pelatihan ini terdiri dari program inti, yaitu:

- i. *Induction Program* yang berisi Modul *Basic*.
- ii. *Sharia Banking dan Product Knowledge*.
- iii. *Basic Risk Awareness Program* yang berisi *Financing and Operation Risk Modul.General Compliance dan Introduction to Audit Process*.

iv. *Anti Fraud Awareness*.

v. *APU PPT*.

vi. *Cyber Risk Awareness*

b. Program Sertifikasi *Regulatory* dan Internal

Program sertifikasi wajib yang harus diikuti oleh karyawan guna memenuhi peraturan yang diterbitkan oleh regulator atau internal perusahaan dan juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dalam bidang dan jabatan tertentu. Berikut adalah contoh sertifikasi yang dibagi dalam jenis sertifikasi:

i. Sertifikasi *Regulatory*

- 1) Sertifikasi Manajemen Risiko
- 2) Sertifikasi Treasury
- 3) Sertifikasi WPPE
- 4) Sertifikasi AASI
- 5) Sertifikasi SKSP

ii. Sertifikasi Internal (*e-Learning*)

- 1) *Basic Sharia Banking*
- 2) *Intermediate Sharia Banking*
- 3) *Basic Risk Awareness*
- 4) *AntiFraud Awareness*
- 5) *APU-PPT*
- 6) *Code of Conduct*
- 7) *Corporate Values*
- 8) *Health Safety & Environment*
- 9) *Cyber Risk Awareness*

c. *Functional/Matrix Training Program*

Program *training* yang didesain untuk karyawan Bank berdasarkan fungsi kerjanya. Bentuk pelatihan ini terbagi dalam 4 (empat) akademi, sesuai dengan fungsi pekerjaan. yaitu:

i. *Region Academy Training Program* yang membahas mengenai: *Performance, Soft Skill, Selling Skills dan Risk Awareness*

ii. *Branch Manager Program*: Dirancang untuk memberikan pemahaman dasar (fundamental) kepada para *Branch Manager* tentang berbagai aspek penting dalam menjalankan

The training and learning programs realization at the Bank in 2024 are divided into several categories, including:

1. *Learning Program*

The *Learning Program* category is divided into 5 (five) main programs, which include:

a. *Core Training Program*

This training is mandatory for all Bank employees and includes the following core programs:

- i. *Induction Program*, which covers the *Basic Module*.
- ii. *Sharia Banking and Product Knowledge*.
- iii. *Basic Risk Awareness Program*: Includes modules on *Financing and Operational Risk, General Compliance, and an Introduction to the Audit Process*.

iv. *Anti-Fraud Awareness*

v. *APU PPT*

vi. *Cyber Risk Awareness*

b. *Regulatory and Internal Certification Programs*

This is a mandatory certification program that all employees must complete to comply with regulations issued by regulators or internal company policies. It also aims to enhance employee competence in specific fields and positions. The following are examples of certifications, categorized by type:

i. *Regulatory Certification*

- 1) *Risk Management Certification*
- 2) *Treasury Certification*
- 3) *WPPE Certification*
- 4) *AASI Certification*
- 5) *SKSP Certification*

ii. *Internal Certification (eLearning)*

- 1) *Basic Sharia banking*
- 2) *Intermediate Sharia Banking*
- 3) *Basic Risk Awareness*
- 4) *Anti-Fraud Awareness*
- 5) *APU-PPT*
- 6) *Code of Conduct*
- 7) *Corporate Values*
- 8) *Health, Safety & Environment*
- 9) *Cyber Risk Awareness*

c. *Functional/Matrix Training Program*

This training program is tailored for Bank employees based on their specific work functions. It is divided into four academies, each focused on a particular job function, which are as follows:

i. The *Region Academy Training Program* covers topics such as *Performance, Soft Skills, Selling Skills, and Risk Awareness*.

ii. *Branch Manager Program*: This program is designed to provide *Branch Managers* with a foundational understanding of key areas in managing a branch business, such as



- dan mengelola bisnis cabang seperti *Branch Business Strategy and Managing Branch Profit, People Development and Management Concept, Managing Risk in Operational and Financing, Managing Consumer Financing Business*
- iii. *Enterprise Banking Program: Financing Risk and Analysis, Asset and Liability Management (ALMA)*
 - iv. *Financing Program & Refreshment Training Program* yang meliputi program – program seperti Sosialisasi Produk *financing, Document Review & Input System Financing, Enhance Developer Construction Financing*
 - d. *Departmental Training Program*
Program pelatihan ini diadakan berdasarkan usulan atau permintaan dari masing-masing unit kerja dalam rangka pengembangan kompetensi karyawan. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara in-house maupun dengan mengirimkan karyawan untuk mengikuti seminar atau pelatihan di luar Bank.
 - e. *Non Class Room Learning Program*
Program ini menggunakan platform berbasis teknologi yang dapat diakses oleh seluruh karyawan Bank Muamalat Indonesia. Tahun 2024 Bank berkomitmen untuk terus menumbuhkan *learning culture* dengan memperkuat program-program pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*). Program-program yang dikembangkan pada tahun 2024 adalah:
 - i. *Muamalat Knowledge One (MK One)*, adalah suatu media di mana modul-modul pembelajaran bisa di akses oleh seluruh karyawan pada aplikasi *Human Capital Information System* (Muamalat Human Power - MHP).
 - ii. *M-Coach*, yaitu sebuah sistem yang diperuntukan bagi *leaders* untuk melakukan *coaching* terhadap karyawan dibawah supervisinya dengan standar acuan *coaching* yang ditentukan oleh manajemen.
- Selain program pembelajaran di atas, pada tahun 2024 Bank Muamalat Indonesia juga telah meluncurkan program-program khusus berikut:
- a. *Muamalat Internship Program to Muamalat Associate Program Digital Banking*: Dirancang untuk memenuhi kebutuhan talenta & pengembangan Digital Banking Bank Muamalat.
 - b. *MAP Consumer Banking*
MAP Consumer Banking dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang semakin mendesak untuk membina spesialis yang menjanjikan yang menjanjikan di bidang Pembiayaan untuk bisnis komersial yang selaras dengan budaya perusahaan, nilai-nilai, karakter dan kompetensi yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia.
- Branch Business Strategy and Branch Profit Management, People Development and Management Concepts, Risk Management in Operations and Financing, and Consumer Financing Business Management.
- iii. Enterprise Banking Program: Financing Risk and Analysis, Asset and Liability Management (ALMA).
 - iv. Financing Program & Refreshment Training Program: Includes various programs such as Financing Product Socialization, Document Review & Input System for Financing, and Developer Construction Financing Enhancement.
 - d. Departmental Training Program
This training program is organized based on proposals or requests from individual work units to enhance employee competencies. It can be conducted in-house or by sending employees to attend external seminars or training sessions outside the Bank.
 - e. Non-Classroom Learning Program
This program utilizes a technology-based platform accessible to all Bank Muamalat Indonesia employees. In 2024, the Bank is committed to further developing a learning culture by enhancing knowledge management programs. The programs introduced in 2024 are:
 - i. Muamalat Knowledge One (MK One): A platform where learning modules are available to all employees through the Human Capital Information System (Muamalat Human Power - MHP) application.
 - ii. M-Coach: A system designed for leaders to coach their subordinates using coaching reference standards established by management.
- In addition to the learning programs mentioned above, Bank Muamalat Indonesia has also introduced the following special programs in 2024:
- a. Muamalat Internship Program to Muamalat Associate Program Digital Banking: This program is aimed at addressing the talent and development needs of Bank Muamalat's Digital Banking division.
 - b. MAP Consumer Banking
MAP Consumer Banking is designed to develop promising specialists in the field of Financing for commercial businesses. This program aligns with Bank Muamalat Indonesia's corporate culture, values, character, and competencies.

- c. *Relationship Manager Acceleration (RM Acceleration)*
Program untuk para karyawan pemasaran di tingkat pemula, yang dilaksanakan untuk menghasilkan Relationship Manager berkualitas pada segmen *Retail*. Program yang berlangsung selama 6 (enam) bulan ini berisi pembekalan dan pelatihan *soft skills* dan *hard skills* terkait akad dan produk syariah.
- d. *Customer Service Development Program (CSDP)*
Program pemagangan yang bertujuan untuk membekali peserta pemagangan dengan wawasan pengetahuan, keterampilan dan keahlian tertentu sesuai kualifikasi jabatan *Customer Service*. Peserta program yang memiliki kinerja baik dan telah mencapai masa program yang ditentukan akan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya
- e. *Muamalat Indonesia Apprentice (MULIA)*
Program pendidikan yang ditunjukan bagi lulusan SMA dan sederajat untuk ditempatkan sebagai *frontliner (Teller dan Customer Service)* di Bank Muamalat Indonesia seluruh Indonesia. Melalui program ini, peserta program yang memiliki kinerja baik dan telah mencapai masa program yang ditentukan akan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya.

Serta pelatihan-pelatihan lain yang dilaksanakan untuk membekali karyawan dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pekerjaan.

REKRUTMEN

Kebijakan rekrutmen Bank mengacu pada perkembangan bisnis yang terus meningkat sertabagian dari proses regenerasi, sehingga dibutuhkan penambahan SDM. Dalam proses rekrutmen karyawan baru tersebut, Bank melakukan mencari, menidentifikasi, serta menarik calon karyawan untuk memenuhi kebutuhan organisasi.

RINGKASAN REKRUTMEN SDM TAHUN 2024

Summary of 2024 Human Resource Recruitment

Uraian Description	Full Time Equivalent (FTE) Full Time Equivalent (FTE)	
	Jumlah Quantity	Persentase dari Total Rekrutmen (%) Percentage from Total Recruitment (%)
Level Pekerjaan Level of Work		
Corporate Leadership	9	2,7%
Senior Management	5	2,7%
Junior Management/Professional	151	45,3%
Middle Management/Professional	16	4,8%
Staff	152	45,6%
Total	333	100,0%

- c. *Relationship Manager Acceleration (RM Acceleration)*
A program designed for entry-level marketing employees, aimed at developing high-quality Relationship Managers in the Retail segment. This six-month program includes both soft skills and hard skills training, focusing on sharia contracts and products.
- d. *Customer Service Development Program (CSDP)*
An internship program designed to provide participants with the knowledge, skills, and expertise necessary for the Customer Service position. Participants who demonstrate good performance and complete the program duration will be awarded a scholarship to continue their education.
- e. *Muamalat Indonesia Apprentice (MULIA)*
An educational program for high school graduates and equivalent to work as frontliners (Tellers and Customer Service) at Bank Muamalat Indonesia across the country. Participants who perform well and complete the program will receive a scholarship to continue their education.

Additionally, other training programs are implemented to provide employees with the relevant knowledge and skills needed for their roles.

RECRUITMENT

The Bank's recruitment policy is aligned with its continuous business growth and regeneration efforts, requiring the addition of more human resources. During the recruitment process, the Bank actively seeks, identifies, and attracts potential candidates to fulfill the organization's needs.



Uraian Description	Full Time Equivalent (FTE) Full Time Equivalent (FTE)	
	Jumlah Quantity	Persentase dari Total Rekrutmen (%) Percentage from Total Recruitment (%)
Generasi Generation		
Baby Boomer Baby Boomer	2	0,6%
Generasi X X Generation	49	4,7%
Generasi Y (Milenial) Y Generation (Milenial)	228	68,5%
Generasi Z (Centennials) Z Generation (Centennials)	54	16,2%
Total	333	100,0%

SISTEM PENILAIAN KINERJA

BMI telah memiliki sistem penilaian kinerja karyawan, yakni menggunakan *Performance Management System* (PMS). Penilaian tersebut dilaksanakan berdasarkan *Most Important Goals* (MIG) yang telah ditentukan pada awal tahun, selanjutnya ditelaah pada pertengahan dan akhir tahun melalui *Human Capital Information System* (Muamalat Human Power/MHP).

Proses penilaian kinerja dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari penilaian mandiri (*self-assessment*) oleh karyawan dan evaluasi atasan langsung (*manager assessment*). Selanjutnya dikaji dan dievaluasi oleh pimpinan unit kerja yang lebih tinggi sampai dengan Direksi.

Sistem ini dibentuk dengan tujuan untuk memastikan kinerja karyawan selaras dengan kinerja Bank. Selain itu, sekaligus mendorong, memotivasi, dan mengarahkan karyawan untuk selalu meningkatkan kinerja serta mewujudkan hubungan yang jelas antara pencapaian rencana karyawan dengan pengembangan karier karyawan (promosi jabatan).

PENGEMBANGAN KARIER

Manajemen pengembangan karier di lingkungan BMI bertujuan untuk memastikan ketersediaan karyawan dengan kualifikasi dan pengalaman yang tepat. Kemudian, meningkatkan kepuasan kerja karyawan serta membantu karyawan dalam memahami peluang karier dan menentukan jalur karier yang dipilih.

Program pengembangan karier yang dilaksanakan secara konsisten untuk membantu karyawan dalam memahami potensi dan keahliannya. Dengan demikian, karyawan dapat mencapai tujuan individu sekaligus target Bank sebagai hubungan timbal balik yang bermanfaat bagi kesejahteraan karyawan dan tujuan perusahaan. Terlaksananya manajemen pengembangan karier yang baik dapat menurunkan tingkat *turnover*, dan menurunkan biaya tenaga kerja, khususnya anggaran untuk mendidik karyawan baru.

PERFORMANCE EVALUATION SYSTEM

BMI utilizes the Performance Management System (PMS) for employee performance evaluation. These evaluations are based on the Most Important Goals (MIG) set at the beginning of the year, with reviews conducted at mid-year and the end of the year through the Human Capital Information System (Muamalat Human Power/MHP).

The performance evaluation process is carried out in stages, beginning with a self-assessment by employees, followed by an evaluation from their direct supervisors (manager assessment). The process is subsequently reviewed and evaluated by higher work unit leaders, up to the Board of Directors.

This system is intended to ensure that employee performance aligns with the Bank's overall performance. It also encourages, motivates, and guides employees to continually improve their performance while establishing a clear correlation between achieving employee goals and career development (job promotions).

CAREER DEVELOPMENT

The goal of career development management at BMI is to ensure that the Bank has employees with the appropriate qualifications and experience. It also aims to enhance job satisfaction, help employees in understanding career opportunities, and help them determine their career paths.

Career development programs are regularly implemented to help employees recognize their potential and skills. This enables employees to achieve both personal goals and contribute to the Bank's objectives, creating a mutually beneficial relationship that enhances employee welfare and supports company goals. Effective career development management helps reduce turnover rates and labor costs, particularly the expenses associated with training new employees.

BMI juga menerbitkan dan menerapkan kebijakan mutasi, promosi, dan demosi. Hal ini dilakukan agar seluruh karyawan mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai mekanisme pengembangan karier secara terperinci.

Dalam penerapannya, pengembangan karier karyawan telah didukung dengan sistem berbasis teknologi yang dimiliki oleh BMI, yaitu Muamalat Human Power (MHP). Salah satunya adalah menu *e-movement* yang dapat diakses manajer lini setiap karyawan.

Dengan demikian, pengajuan mutasi dapat diproses dengan lebih efisien dan efektif karena berbasis digital. Adapun proses promosi dan demosi karyawan dilakukan melalui pengajuan dari pimpinan unit kerja terkait untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dan/atau asesmen dengan mempertimbangkan kinerja dan kompetensi karyawan.

SERIKAT PEKERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Sejalan dengan peraturan perundang-undangan, BMI menjamin kebebasan karyawan untuk berkumpul, berserikat dan mengemukakan pendapatnya, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, pekerja dapat secara mudah mendaftarkan diri dan bergabung dalam keanggotaan Serikat Pekerja. Serikat pekerja Bank bernama Syarikat Pejuang Muamalat (SP Muamalat), yang telah tercatat pada Suku Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan dengan nomor bukti pencatatan No. 804/SP/JS/II/2018 tanggal 28 Februari 2018.

Bank memandang bahwa Serikat Pekerja tersebut merupakan mitra strategis dalam menciptakan hubungan industrial yang berkualitas dan harmonis. Serikat Pekerja dapat menjadi saluran komunikasi terbaik untuk menjaga dan memperhatikan hak-hak karyawan Bank serta menciptakan hubungan kerja yang harmonis, selaras dan berkeadilan di lingkungan Bank, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan *engagement*. Bank selalu memberikan dukungan baik atas setiap kegiatan-kegiatan Serikat Pekerja.

Bank mendasarkan pelaksanaan hubungan industrial pada prinsip kesetaraan, kewajaran, rasa keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam suatu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau yang disebut sebagai Ittifaq Muamalat yang disepakati bersama antara manajemen dan pihak karyawan yang diwakili oleh Serikat Pejuang Muamalat (Serikat Pekerja).

BMI also establishes and implements policies related to employee transfers, promotions, and demotions. This ensures that all employees have clear and transparent information about the career development processes.

In its implementation, employee career development is supported by BMI's technology-based system, Muamalat Human Power (MHP). One of its features, the *e-movement* menu, allows each employee's line manager to access relevant information.

This digital system enables the transfer process to be handled more efficiently and effectively. The promotion and demotion process is initiated by submissions from the relevant department leaders, followed by evaluation and/or assessment based on employee performance and competence.

LABOR UNIONS AND INDUSTRIAL RELATIONS

In accordance with applicable laws and regulations, BMI ensures that employees have the freedom to gather, associate, and express their opinions. As a result, workers are able to easily register and become members of the Labor Union. The Bank's labor union, Syarikat Pejuang Muamalat (SP Muamalat), is officially registered with the South Jakarta City Manpower Sub-department under registration No. 804/SP/JS/II/2018, dated February 28, 2018.

The Bank views the Labor Union as a strategic partner in developing quality and harmonious industrial relations. The Labor Union serves as an effective communication channel for protecting and prioritizing the rights of Bank employees, as well as developing harmonious, equal, and fair working relationships. This approach aims to boost productivity and engagement. The Bank consistently provided strong support for all Labor Union activities.

The Bank's approach to industrial relations is based on the principles of equality, fairness, justice, and respect for human values. These principles are reflected in the Collective Labor Agreement (PKB), also known as Ittifaq Muamalat, which is mutually agreed upon by management and employees, represented by the Serikat Pejuang Muamalat (Workers Union).



Jika terjadi perselisihan hubungan industrial terkait dengan ketenagakerjaan, penanganan kasusnya dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penyelesaiannya diutamakan secara bipartit/internal tanpa melibatkan pihak ketiga.

Pada tahun 2024, terdapat 1 (satu) kasus perselisihan hubungan industrial (perselisihan PHK), dan dapat diselesaikan pada tingkatan perundingan bipartit.

In the event of an industrial relations dispute related to employment, the matter is addressed through a process in accordance with legal requirements. The preferred resolution method is bipartite/internal negotiations, without involving third parties.

In 2024, there was one industrial relations dispute (a termination of employment issue), which was successfully resolved through bipartite negotiations.

PROGRAM KETERLIBATAN KARYAWAN

Program keterlibatan karyawan atau *employee engagement* merupakan inisiatif BMI dalam melibatkan peran aktif karyawan untuk mengikuti beragam kegiatan. Karena itu, Bank memandang bahwa keterlibatan seluruh karyawan dan jajaran Direksi dalam program *employee engagement* sangat penting.

Setiap kegiatan terkait dengan program tersebut senantiasa disampaikan kepada karyawan melalui semua kanal komunikasi. Dengan harapan, partisipasi karyawan terus meningkat.

Aktivitas *employee engagement* ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kedisiplinan, loyalitas karyawan, profitabilitas Bank, serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah. Program ini direalisasikan dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga keterlibatan karyawan menjadi sangat luas di seluruh kantor perwakilan Bank.

Program keterlibatan karyawan yang mendukung tujuan utama dari *employee engagement* tersebut dibagi menjadi beberapa bagian: *Spiritual Engagement*, *Emotional Engagement*, dan *Rational Engagement*. Rinciannya dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

EMPLOYEE ENGAGEMENT PROGRAM

The Employee Engagement Program is an initiative by BMI aimed at encouraging employees to actively participate in various activities. The Bank believes that the involvement of all employees, including the Board of Directors, in this program is essential.

All activities related to the program are communicated to employees through various channels, with the goal of continuously increasing participation.

The purpose of this employee engagement initiative is to boost productivity, discipline, employee loyalty, and bank profitability, as well as customer satisfaction and loyalty. By leveraging digital technology, the program ensures extensive employee involvement across all Bank representative offices.

The employee engagement program, which supports the main objectives of employee engagement, is divided into some categories: Spiritual Engagement, Emotional Engagement, and Rational Engagement. Further details are provided in the table below.

Program	Penjelasan	Description
<i>Spiritual Engagement</i>	Keikutsertaan atau keterlibatan karyawan secara spiritual. Program <i>spiritual engagement</i> , antara lain melalui kajian masjid Al-Muamalah dan pengajian Al-Wiqoyah yang dilaksanakan secara berkala. Kegiatan ini melibatkan seluruh karyawan, keluarga karyawan, nasabah, alumni, dan anak perusahaan Bank melalui virtual. Masyarakat umum juga dapat menyaksikan video kajian tersebut melalui <i>channel Youtube</i> Bank: Kajian Muamalat. <i>Channel Youtube</i> kajian Muamalat juga berisi video <i>My Hijrah My Adventure</i> (MHMA) yang merupakan perjalanan hijrah nasabah atau seseorang yang dapat memberikan inspirasi untuk berhijrah bagi masyarakat yang melihat tayangan video tersebut. Aktivitas spiritual lain adalah <i>tahajud on call</i> yang dilaksanakan secara berkala untuk seluruh karyawan dan keluarga karyawan.	Spiritual engagement activities include programs such as the Al-Muamalah mosque studies and Al-Wiqoyah recitations, which are held periodically. These events involve not only employees but also their families, customers, alumni, and subsidiaries of the Bank, all of whom can participate virtually. The general public can also view the study videos through the Bank's YouTube channel, Kajian Muamalat. This channel also features the My Hijrah My Adventure (MHMA) video, which shares the hijrah journey of customers or individuals, offering inspiration to the community who watch it. Another spiritual activity is Tahajud on Call, a program held periodically for all employees and their families.

Program	Penjelasan	Description
<i>Emotional Engagement</i>	Bertujuan menumbuhkan antusiasme untuk bekerja dan antusiasme terhadap organisasi. Kegiatan emotional engagement antara lain CERIA (Cerita Apa Aja) yang merupakan <i>Employee Assistancy Program</i> (EAP), memberikan kesempatan kepada karyawan yang mempunyai masalah untuk berkonsultasi dengan psikolog, harapannya agar masalahnya dapat teratasi dan tidak mempengaruhi kinerjanya. Di samping itu, terdapat program <i>financial planning</i> yang merupakan pelatihan perencanaan keuangan agar dapat memahami dan mengerti dalam mengatur arus kas keuangan karyawan. Kegiatan lainnya adalah “CEO Menyapa” yang merupakan <i>non-monetary</i> program yang diberikan kepada karyawan atas kontribusi optimal yang diberikan bagi Bank.	Emotional engagement activities aim to inspire enthusiasm for work and the organization. These include CERIA (Cerita Apa Aja), an Employee Assistance Program (EAP) that provides employees with the opportunity to consult with a psychologist to address personal issues, ensuring that these challenges do not impact their work performance. Additionally, there is a financial planning program that offers training to help employees understand and manage their personal finances. Another initiative is CEO Menyapa, a non-monetary program that recognizes and appreciates employees for their optimal contributions to the Bank.
<i>Rational Engagement</i>	Ditujukan agar karyawan memahami dengan baik peran dan tanggung jawab mereka. Kegiatan <i>rational engagement</i> merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Muamalat Club baik yang berada di kantor pusat maupun di seluruh cabang Bank Muamalat. Kegiatan Muamalat Club antara lain <i>Muamalat Virtual Ride</i> (MVR) dan <i>Virtual Charity Concert</i> Harmoni Muamalat, yang bertujuan mengumpulkan donasi untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Kegiatan lainnya adalah <i>basketball virtual coaching clinic</i> . Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kebugaran karyawan di masa <i>new normal</i> . Bank melakukan <i>rational engagement</i> kepada para alumni dan keluarga karyawan dengan menciptakan <i>M-Shop Muamalahplace</i> untuk mendukung UMKM, khususnya bagi alumni karyawan dan keluarga karyawan agar meningkatkan bisnis mereka. Dengan memberikan dukungan ini, selain dapat menjaga silaturahmi, Bank juga akan memperoleh pertumbuhan rasa dan positif <i>branding</i> dari para alumni dan keluarga karyawan.	Rational engagement activities are designed to help employees better understand their roles and responsibilities. These activities are organized by the Muamalat Club, both at the head office and across all Bank Muamalat branches. The Muamalat Club hosts events such as the Muamalat Virtual Ride (MVR) and the Virtual Charity Concert Harmoni Muamalat, which focus on raising donations for those in need. Another initiative is a virtual basketball coaching clinic, aimed at improving employee fitness during the new normal. The Bank promotes rational engagement with alumni and employee families by establishing M-Shop Muamalahplace to support MSMEs, particularly those owned by employee alumni and their families. This initiative helps enhance their businesses, fosters stronger relationships, and also creates positive branding and emotional connections for the Bank with alumni and employee families.

PROGRAM PENSIUN

Karyawan yang mengambil program MPPK tidak diwajibkan berada di lingkungan kerja, namun tetap mendapatkan upah dan benefit sebagai karyawan. Program MPPK berjalan selama minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan sebelum usia pensiun. Karyawan peserta program tersebut mendapatkan pelatihan dan dibekali ilmu terkait perencanaan dan aktivitas bermanfaat yang dapat dijalankan pada masa pensiun.

Selain itu, BMI memberikan apresiasi *Long Service Award* dalam bentuk logam mulia bagi karyawan Bank yang pensiun di BMI dengan masa kerja di atas 20 tahun. Selama tahun 2024, terdapat 13 karyawan yang memasuki masa pensiun.

LINGKUNGAN KERJA YANG KONDISIF

BMI menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sesuai dengan values Bank Muamalat, yaitu IDEAL: Islami, Modern, dan Profesional serta sesuai dengan *brand promise* “IDEAL Place to Work”. Untuk mewujudkannya, Bank memberikan perhatian terhadap *worklife balance* melalui program *employee engagement*, baik spiritual, emosional, dan rasional.

PENSION PROGRAM

Employees participating in the MPPK program are not required to be present in the work environment, but they continue to receive their salary and benefits. The MPPK program lasts between 3 (three) and 6 (six) months before retirement age. Those enrolled in the program undergo training and are provided with knowledge on planning and activities that can be beneficial during retirement.

In addition, BMI offers a Long Service Award in the form of precious metals to employees who retire after more than 20 years of service. In 2024, 13 employees retired.

A CONDUCTIVE WORK ENVIRONMENT

BMI fosters a conducive work environment aligned with Bank Muamalat's values, IDEAL: Islamic, Modern, and Professional, as well as its brand promise of being the “IDEAL Place to Work.” To bring this vision to life, the Bank emphasizes work-life balance through employee engagement programs that address spiritual, emotional, and rational needs.



1. Spiritual Program

Bertujuan untuk menyeimbangkan kehidupan karyawan. Tidak hanya bekerja, tetapi juga bisa beribadah yang dapat meningkatkan keimanan dan ketawaan terhadap Allah SWT sesuai dengan *values* Islami. Program spiritual tersebut, antara lain mencakup: Kajian Rutin, Qiyamul Lail (Kuketuk Pintu LangitMu), Pengajian Al Wiqoyah, dan kelas tahsin.

2. Rational Program

Dilaksanakan melalui wadah Muamalat Club guna memberikan keseimbangan antara kehidupan profesional dengan kesempatan untuk tetap menyeimbangkan pola hidup sehat. Adapun kegiatan yang dilakukan, seperti: Muamalat Merdeka Fun Walk, Muamalat Adventure Club, Turnamen Futsal Merdeka, Turnamen Pingpong Merdeka, Turnamen Badminton Merdeka, dll.

Selain itu, untuk mendukung kesehatan mental karyawan, Bank memberikan fasilitas konseling dengan psikolog profesional melalui program DigiCeria (Digital Cerita Apa Aja).

3. Emotional Program

Dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada karyawan agar dapat berbagi pengetahuan atau melakukan kegiatan sosial yang dapat membantu sesama. Adapun kegiatannya, seperti: CSR *for Employee*, yang terdiri dari *Principal*, *Planet*, dan *People*. *Principal* dilakukan melalui program CSR Geulis - Gerakan Literasi Syariah, *Planet* seperti Gerakan Bersih Masjid, dan *People* seperti gerakan donor darah.

Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan produktivitas, Bank memanfaatkan penggunaan media atau sarana komunikasi yang dimiliki dengan rincian sebagai berikut:

1. Aplikasi *chat group* yang memungkinkan karyawan untuk mendapatkan informasi, instruksi, berita secara cepat dan lengkap.
2. *E-mail Blast* yang mengirimkan informasi-informasi terkini kepada seluruh karyawan melalui fasilitas *e-mail* kantor.
3. Muamalat Human Power (MHP) untuk mengakses pengumuman-pengumuman penting dan peraturan-peraturan terbaru, yang juga tersedia dalam versi *mobile*.
4. *M-Channel* pada televisi di setiap ruang breakout Muamalat Tower, yang memungkinkan karyawan mendapatkan informasi terkait program, produk dan pengetahuan-pengetahuan terbaru yang berkaitan dengan pengembangan karyawan.

1. Spiritual Program

The spiritual program is designed to help employees maintain a balanced life, allowing them not only to work but also to engage in worship that strengthens their faith and devotion to Allah SWT, in line with Islamic values. The spiritual program includes activities such as: Routine Study, Qiyamul Lail (Kuketuk Pintu Langitmu), Al Wiqoyah recitations, and Tahsin classes.

2. Rational Program

Implemented through the Muamalat Club, this program aims to strike a balance between professional life and maintaining a healthy lifestyle. Activities include the Muamalat Merdeka Fun Walk, Muamalat Adventure Club, Merdeka Futsal Tournament, Merdeka Pingpong Tournament, Merdeka Badminton Tournament, etc.

Additionally, to support employee mental health, the Bank offers counseling services with professional psychologists through the DigiCeria (Digital Cerita Apa Aja) program.

3. Emotional Program

This initiative aims to provide employees with the opportunity to share knowledge or engage in social activities that can benefit others. The activities include CSR for Employees, which focuses on *Principal*, *Planet*, and *People*. The *Principal* is carried out through the CSR Geulis program - Shariah Literacy Movement, the *Planet* includes initiatives such as the Clean Mosque Movement, and the *People* encompass activities such as the blood donation movement.

To establish a conducive and productive work environment, the Bank makes use of its media or communication tools as detailed below:

1. A group chat application that enables employees to receive information, instructions, and news promptly and comprehensively.
2. An email blast system that distributes the latest updates to all employees through the office email network.
3. Muamalat Human Power (MHP) provides access to important announcements and the latest regulations, which is also available in a mobile version.
4. The M-Channel, available on televisions in each Muamalat Tower breakout room, offers employees information on programs, products, and the latest employee development insights.

5. Buletin digital yang menampilkan berita-berita dari unit-unit tertentu juga diterbitkan secara reguler, seperti misalnya *HC news*, *Operation Splash*, dan *Fraud Awareness*.
6. *CEO Message* adalah informasi yang disampaikan dalam kesempatan-kesempatan khusus yang memerlukan penjelasan langsung dari CEO.
7. Untuk informasi-informasi terkait strategi Bank yang lebih formal, dilakukan melalui acara *sharing session* antara manajemen dan karyawan di seluruh unit kerja dan dikemas dalam bentuk *town hall meeting* dan *BOD road show* yang diikuti oleh karyawan di unit kerja yang dikunjungi.

5. Digital bulletins, featuring updates from specific departments such as HC news, Operation Splash, and Fraud Awareness, are regularly published.
6. The CEO Message is delivered on special occasions that require a direct explanation from the CEO.
7. Formal information about the Bank's strategy is shared through sessions between management and employees across all work units, presented as town hall meetings and BOD roadshows that employees attend in their respective work units.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI

BMI senantiasa berupaya meningkatkan kapabilitas karyawan agar memiliki keunggulan kompetitif. Dalam pandangan Bank, SDM harus memiliki keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan oleh Bank, baik dalam rangka mendukung strategi dan sasaran bisnis saat ini maupun masa yang akan datang. Untuk itu, Bank mengembangkan kompetensi SDM yang dibutuhkan melalui pendekatan terintegrasi yang dirancang dengan memperhatikan kebutuhan individu karyawan, organisasi, perencanaan suksesi karyawan, dan sasaran bisnis dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pengembangan karyawan berbasis kompetensi ini ditujukan untuk mendukung karyawan menjalankan pekerjaannya secara optimal yang pada akhirnya dapat membantu Bank dalam mewujudkan tujuannya. Bank berkomitmen memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi, keahlian, dan kesempatan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Bank selalu memperhatikan kesetaraan gender dan persamaan kesempatan bagi seluruh jenjang jabatan karyawan Bank, termasuk bagi karyawan yang baru direkrut baik staf maupun *officer*.

Bank menerjemahkan berbagai tantangan yang dihadapi dan dibutuhkan industri perbankan ke dalam materi program pengembangan kompetensi SDM. Pelaksanaannya direalisasikan menggunakan kanal pembelajaran dengan pihak internal dan eksternal guna mendorong pencapaian tujuan proses pembelajaran yang optimal.

Bank juga telah menyiapkan infrastruktur dan program yang memadai untuk beradaptasi dengan perubahan, terutama di sektor digital. Hal itu dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan sarana komunikasi digital platform yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja, sehingga proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien.

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

BMI always strives to enhance employee capabilities to maintain a competitive edge. The Bank believes that HR must possess the necessary skills and competencies to support both current and future business strategies and objectives. To achieve this, the Bank develops the required HR competencies through an integrated approach, considering the individual needs of employees, organizational requirements, employee succession planning, and both short-term and long-term business goals.

This competency-based employee development program is designed to help employees perform their roles optimally, ultimately contributing to the Bank in achieving its goals. The Bank is dedicated to providing equal opportunities for every employee to grow and advance according to their potential, expertise, and available opportunities according to the needs. Gender equality and equal opportunities are emphasized across all levels of the Bank, including newly recruited staff and officers.

The Bank aligns its HR competency development programs with the challenges and needs of the banking industry. These programs are delivered through various learning channels, both internal and external, to ensure an effective learning process.

Additionally, the Bank has invested in the necessary infrastructure and programs to adapt to change, particularly in the digital sector. This includes maximizing the use of digital communication platforms that can be accessed anytime, anywhere, making the learning process more efficient and effective.



INVESTASI PENGEMBANGAN SDM

BMI mengalokasikan investasi pengembangan SDM sebesar 3,5% dari total biaya *gross salary*, sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Anggaran tersebut disalurkan untuk program pelatihan dan pengembangan. Pada tahun 2024, total biaya pendidikan dan pelatihan mencapai Rp15.381.863.880.

Fokus pembelajaran selama tahun 2024 diarahkan pada program sertifikasi wajib, pengembangan dan pelatihan unit bisnis, operasional, akselerasi dan *online learning*. Program tersebut disusun dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dampak, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

Total *man days learning* pada tahun 2024 (karyawan aktif dan *resign*) mencapai 13,9 *man days* meningkat 36% dibandingkan tahun sebelumnya. Metode pembelajaran terbagi menjadi dua yaitu 60% dilakukan dalam metode tatap muka dan 40% melalui metode pembelajaran digital atau *e-learning*.

Penyerapan biaya pelatihan dan *man days learning* menunjukkan komitmen Bank dalam pengembangan SDM melalui media atau fasilitas yang tersedia di perusahaan. Rincian *man days learning* Bank pada tahun 2024 berdasarkan direktorat, level organisasi dan lokasi kerja untuk karyawan aktif disampaikan dalam tabel di bawah ini.

MAN DAYS LEARNING BERDASARKAN DIREKTORAT

Man Days Learning By Directorate

Direktorat	Rata-rata <i>Man Days</i> Average Man Days	Directorate
Board	4,0	Board
CEO	6,1	CEO
Compliance, Risk & Legal	8,4	Compliance, Risk & Legal
Enterprise Banking	5,8	Enterprise Banking
Operation, IT & HC	14,7	Operation, IT & HC
Retail Banking	11,8	Retail Banking
Class Program	41,5	Class Program
Jumlah	12,4	Total

MAN DAYS LEARNING BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI

Man Days Learning by Organization Level

Level Organisasi	Rata-rata <i>Man Days</i> Average Man Days	Organization Level
Corporate Leadership	4,0	Corporate Leadership
Senior Management	13,4	Senior Management
Middle Management	11,8	Middle Management
Junior Management	9,9	Junior Management
Staff	13,5	Staff
Jumlah	12,4	Total

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT INVESTMENT

BMI allocates 3.5% of the total gross salary expenses for human resources development, in line with the Financial Services Authority (OJK) regulations. This budget is directed towards training and development programs. In 2024, the total cost for education and training reached Rp15,381,863,880.

The focus of learning in 2024 is centered on mandatory certification programs, business unit development and training, operations, acceleration, and online learning. The program is designed with a focus on effectiveness, efficiency, impact, and the desired learning outcomes.

In 2024, the total number of man days learning (including both active and resigned employees) reached 13.9 man days, an increase of 36% from the previous year. The learning approach is split, with 60% conducted through face-to-face sessions and 40% through digital learning methods or e-learning.

The allocation of training and man days learning costs reflects the Bank's commitment to HR development through the available media and facilities. The table below provides a breakdown of the Bank's man days learning in 2024, categorized by directorate, organizational level, and work location for active employees.

MAN DAYS LEARNING BERDASARKAN LOKASI KERJA

Man Days Learning By Work Location

Lokasi Kerja	Rata-rata Man Days Average Man Days	Work Location
Kantor Pusat	7,6	Head Office
Cabang Luar Negeri	3,4	Foreign Branches
Jawa Barat & Kalimantan 1	13,7	West Java & Kalimantan 1
Jakarta Timur	13,2	East Jakarta
Jakarta Barat	13,1	West Jakarta
Jawa Tengah, DI Yogyakarta & Kalimantan 2	14,4	Central Java, DI Yogyakarta & Kalimantan 2
Jawa Timur, Bali & Nusa Tenggara	14,1	East Java, Bali & Nusa Tenggara
Sulawesi, Maluku & Papua	17,7	Sulawesi, Maluku & Papua
Sumatera	13,1	Sumatera
Jumlah	12,4	Total

SISTEM, MEKANISME REWARD, DAN PUNISHMENT KARYAWAN

BMI selalu menelaah penerapan *reward* and *punishment* secara berkelanjutan agar setiap kebijakan yang diterapkan tidak hanya konsistensi terhadap penerapan sanksi atas kasus-kasus pelanggaran, namun mampu mendorong pertumbuhan kinerja Bank. BMI akan memberikan apresiasi kepada karyawan dengan kinerja sangat baik dan melebihi target yang ditentukan.

Reward yang diberikan bagi karyawan yang memberikan kontribusi kepada Bank tidak hanya berupa remunerasi finansial, tetapi juga benefit dan pengembangan karier. Pada sisi lain, Bank juga mempunyai *Performance Improvement Plan* (PIP) bagi para karyawan jika tidak mencapai target yang telah disepakati dan ditentukan sebelumnya. Melalui program ini, diharapkan setelah dilakukan pembinaan, *monitoring* dan evaluasi secara berkala karyawan dapat kembali mencapai target yang telah ditentukan.

ASESMEN KARYAWAN

BMI telah memiliki kebijakan asesmen untuk karyawan, yang penerapannya dilakukan secara berkala setiap tahun demi kepentingan pemenuhan manajemen talenta dan suksesor dari posisi kunci untuk setiap unit kerja. Asesmen terdiri atas 2 (dua) besaran area, yakni penilaian kinerja (*performance*) yang dilakukan secara berkala setiap semester dan penilaian potensi yang berfokus kepada LEAD3A: *Leadership, Ability, Agility & Ambition* yang dilakukan oleh pimpinan dengan persetujuan berjenjang sesuai tingkatan organisasi.

Pelaksanaan proses asesmen karyawan untuk memastikan kompetensi dan kapabilitasnya sesuai kebutuhan Bank. BMI melakukan asesmen karyawan dengan pendekatan *Key Performance Indicators* (KPI), yang disusun berdasarkan target kinerja Bank, target kinerja unit terkait maupun

EMPLOYEE REWARD AND PUNISHMENT SYSTEM AND MECHANISM

BMI continuously evaluates the implementation of rewards and punishment actions to ensure that every policy is not only aligned with sanction protocols for violations but also contributes to enhancing the Bank's performance. BMI recognizes employees who demonstrate excellent performance and exceed set targets.

The rewards provided to employees who contribute to the Bank include not just financial compensation but also benefits and career development. On the other hand, the Bank also has a Performance Improvement Plan (PIP) for employees who fail to meet predetermined targets. This program aims to help employees get back on track to achieving their goals through regular coaching, monitoring, and evaluation.

EMPLOYEE EVALUATION

BMI has an employee evaluation policy, which is implemented periodically every year for fulfilling talent management and successors from key positions for each work unit. The evaluation consists of 2 (two) areas, which are performance evaluation, which is conducted periodically every semester, and potential evaluation, which focuses on LEAD3A: *Leadership, Ability, Agility & Ambition*, which is conducted by the leadership with tiered approval according to the organizational level.

The implementation of the employee evaluation process is to ensure that their competence and capabilities are in accordance with the Bank's needs. BMI conducts employee evaluations using the *Key Performance Indicators* (KPI) approach, which is compiled based on the Bank's



individu yang diselaraskan dengan tujuan dan strategi Bank serta mempertimbangkan aspek risiko dan kepatuhan.

Asesmen karyawan dilakukan dalam beberapa siklus *human capital*, di antaranya dalam proses pengembangan karier dan identifikasi talenta. Dalam pengembangan karier, terdapat beberapa aspek yang digunakan sebagai acuan, antara lain *job grade*, histori kinerja karyawan, kompetensi, catatan kedisiplinan karyawan serta hasil evaluasi dari pimpinan kerja terkait.

Dalam proses identifikasi talenta, acuan yang digunakan adalah hasil penilaian kinerja akhir tahun dan evaluasi potensi yang dimiliki oleh karyawan. Identifikasi talenta dilakukan secara periodik 1 (satu) tahun sekali oleh seluruh pimpinan unit kerja terhadap subordinatnya masing-masing. Seluruh proses ini mengacu pada kebijakan promosi, demosi, dan manajemen talenta yang berlaku di Bank.

FASILITAS KESEJAHTERAAN

BMI menentukan kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas bagi karyawan, antara lain mengacu kepada Undang-Undang No. 13 tahun 2003, Undang-Undang No. 11 tahun 2020 dan seluruh aturan pelaksanaannya, termasuk pemenuhan ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Provinsi. Bank secara berkala melakukan kajian terhadap program-program benefit dengan tetap menyesuaikan keadaan pasar, kondisi mendatang dan tetap memperhatikan kinerja keuangan Bank serta strategi jangka panjang.

Selain fasilitas kesejahteraan yang bersifat wajib seperti melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Bank juga memberikan menerapkan program kesejahteraan lain, seperti: *flexible working hour*, *flexible benefit* untuk *medical insurance* dan *life insurance*, pemberian tunjangan Hari Raya Idul Adha, uang saku ibadah haji/umrah, hadiah kelahiran, hadiah pernikahan, santunan duka, bantuan biaya pendidikan anak, fasilitas olahraga, *car ownership program*, dan tunjangan lainnya.

Bank secara rutin juga mengadakan event dan seminar untuk mendukung *worklife balance* pekerja serta peningkatan *health and well-being* pekerja. Kegiatan tersebut mendatangkan pembicara dari kalangan praktisi, motivator, psikolog, maupun *influencer* yang sudah dikenal luas seperti program M-Fit, yaitu kompetisi karyawan sehat, kompetisi cabang sehat, reward keluarga sehat, dan konsultasi dokter secara *online (telemedicine)*.

Melalui program DIGICERIA, Bank memberikan wadah bagi karyawan untuk melakukan konseling, yaitu kegiatan konsultasi/bantuan yang dilakukan untuk membantu

performance targets, performance targets of related units and individuals that are aligned with the Bank's goals and strategies and consider risk and compliance aspects.

Employee evaluations are conducted in several human capital cycles, including in the career development process and talent identification. In career development, there are several aspects that are used as references, including job grade, employee performance history, competence, employee disciplinary records, and evaluation results from related work leaders.

In the talent identification process, the reference used is the results of the year-end performance evaluation and the evaluation of the employees' potential. Talent identification is carried out periodically once a year by all work unit leaders for their respective subordinates. This entire process refers to the promotion, demotion, and talent management policies applied at the Bank.

WELFARE FACILITIES

BMI determines compensation, welfare programs, and employee facilities by referring to Law No. 13 of 2003, Law No. 11 of 2020, and all related regulations, including compliance with both the Regency/City Minimum Wage and Provincial Minimum Wage. The Bank regularly reviews its benefit programs, making adjustments based on market conditions, future trends, and the Bank's financial performance and long-term strategy.

In addition to mandatory welfare facilities, such as those provided through the Social Security Administering Body (BPJS), the Bank offers various other welfare programs. These include flexible working hours, flexible benefits for medical and life insurance, Eid al-Adha allowances, Hajj/Umrah pilgrimage allowances, birth gifts, wedding gifts, bereavement compensation, educational support for children, sports facilities, car ownership programs, and additional benefits.

The Bank regularly organizes events and seminars to support employee work-life balance and enhance health and well-being. These activities feature speakers from various fields, such as practitioners, motivators, psychologists, and well-known influencers such as the M-Fit program which is the healthy competition among employees, branches, and families, while also offering online doctor consultations (*telemedicine*).

Through the DIGICERIA program, the Bank provides a platform for employee counseling, offering support to address personal issues that may impact work performance.

mengatasi permasalahan pribadi pekerja yang berdampak kepada kinerja. Bank juga mewajibkan *block leave* bagi pekerja, yaitu kebijakan untuk mengambil cuti selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut dalam 1 (satu) tahun dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bagi karyawan. *Maternity leave* juga diberikan kepada karyawan wanita sesuai undang-undang yang berlaku serta *paternity leave* untuk karyawan laki-laki yang istrinya melahirkan.

Bank melengkapi kebijakan tersebut dengan memberikan fasilitas khusus berupa ruang laktasi yang berada di Muamalat Tower bagi karyawan wanita sebagai prasarana pemerah ASI. Keberadaan ruang laktasi ini penting untuk mendukung pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif. Selain itu, Bank menyediakan *childcare facilities* berupa *Day Care* yang diadakan saat menjelang Hari Raya Idul Fitri di lingkungan kantor untuk memberikan rasa tenang dan aman bagi karyawan wanita yang mempunyai bayi berusia di bawah 5 (lima) tahun (balita).

The Bank also enforces a block leave policy, requiring employees to take 5 consecutive working days off once a year to focus on their health and well-being. Additionally, maternity leave is provided for female employees in accordance with applicable laws, and paternity leave is offered to male employees when their wives give birth.

To further support employees, the Bank offers special facilities, including a lactation room at Muamalat Tower for female employees for breastfeeding. This room is important for supporting exclusive breastfeeding (ASI). The Bank also provides daycare facilities during the run-up to Eid al-Fitr, offering a secure and reassuring environment for female employees with children under five years old.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan terendah sesuai *grade* maksimum masing-masing karyawan di Bank adalah sebagai berikut:

Rasio Gaji Tertinggi : Terendah	24,4	Highest Employee Salary Ratio : Lowest
Rasio Gaji Direksi Tertinggi : Terendah	1,7	Highest Salary Ratio of Directors : Lowest
Rasio Gaji Komisaris Tertinggi : Terendah	1,1	Highest Commissioner Salary Ratio : Lowest
Rasio Gaji Direksi Tertinggi : Karyawan Tertinggi	2,3	Highest Salary Ratio of Directors : Highest Employee

HIGHEST AND LOWEST SALARY RATIO

The highest and lowest salary ratios according to the maximum grade of each employee at the Bank are as follows:

DEMOGRAFI SDM

Informasi lengkap mengenai hal ini disajikan dalam Bab "Profil Perusahaan".

HR DEMOGRAPHICS

Complete information regarding this is presented in the "Company Profile" chapter.

STRATEGI DAN PROGRAM 2025

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi pilar utama dalam proses transformasi bisnis Bank, sehingga diperlukan strategi yang terpadu dan komprehensif sesuai dengan *Human Capital Cycle*. Fokus utama dari pengembangan SDM adalah menyiapkan SDM yang berintegritas, tanggap terhadap perubahan, dan mampu memberikan layanan prima, sejalan dengan nilai IDEAL (Islami, Modern, Profesional).

Bank juga memprioritaskan tiga aspek utama dalam pengembangan SDM *Right Sizing*, *Right Skilling*, dan *Right Spending* agar SDM memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi perubahan bisnis yang cepat.

STRATEGY AND PROGRAM 2025

Human Resources (HR) Development is a key component in the Bank's business transformation, requiring a comprehensive and integrated strategy aligned with the Human Capital Cycle. The main focus of HR development is to develop HR with integrity, responsive to change, and capable of delivering exceptional service, in line with the IDEAL values (Islamic, Modern, Professional).

The Bank places a strong emphasis on three key areas in HR development: Right Sizing, Right Skilling, and Right Spending, ensuring HR is highly competitive in navigating the fast-paced business environment.



Selaras dengan tujuan dan fokus bisnis perusahaan di tahun 2025, yaitu “Menciptakan Akselerasi Bisnis Ritel yang Berkualitas untuk Profit yang Berkelanjutan,” perusahaan akan berlandaskan pada empat inisiatif utama: Pertumbuhan Bisnis, Kualitas Aset, Pengembangan SDM, Operasi & TI, dan Strategi Inorganik.

Sebagai perusahaan yang berkomitmen pada visi jangka panjang untuk tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan (*sustainable growth*), Bank secara konsisten mengkaji dan mengevaluasi struktur organisasinya baik di kantor pusat, kantor wilayah, maupun kantor cabang dengan pendekatan berbasis rumpun pekerjaan (*Job Family*). Langkah ini bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi guna mendukung pencapaian tujuan organisasi, baik dari aspek finansial maupun non-finansial.

Dalam rangka mendukung pencapaian strategi korporasi pada tahun 2025 maka bank akan terus melakukan langkah-langkah strategis pengembangan SDM antara lain :

1. Pengembangan organisasi dan pencapaian kinerja melalui program pelatihan karyawan serta manajemen talenta yang efektif menjadi pilar penting dalam mencapai prioritas strategi dan fokus Bank di tahun 2025. Upaya ini bertujuan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, berintegritas tinggi, dan produktif, serta mampu mengelola operasional perusahaan berbasis teknologi digital. Dengan demikian, SDM yang dihasilkan siap mencapai target yang telah ditetapkan dan beradaptasi dalam era digitalisasi.
2. Peningkatan kompetensi *soft skill* dan *technical skill* sehingga mendorong produktifitas *Business Function* dan *key enabler function* dengan optimalisasi *digital blended learning platform*. Serta peningkatan kompetensi digital baik dari sisi *mindset* dan *skill set* agar organisasi dapat bertransformasi dan bersaing dalam era teknologi finansial dan kebiasaan baru.
3. Peningkatan *Growth from Within* untuk posisi pelaksana dan manajerial demi mendukung *career management program*.
4. Peningkatan kapasitas/kemampuan manajerial, kepemimpinan dan manajemen talenta.
5. Membangun kemampuan organisasi bertransformasi dan bersaing dalam era teknologi finansial dan kebiasaan baru.
6. Penerapan *Performance based Organization* dengan implementasi budaya *coaching* serta menyiapkan *tools* untuk membantu penerapannya.
7. Meningkatkan keterlibatan & keterlekatan karyawan (*employee engagement*) Bersama *Senior Management Team* sehingga meningkatkan *employer branding* yang sesuai dengan budaya perusahaan dan *brand promise* IDEAL *Place to Work*.

Aligned with the Company's business objectives for 2025—"Creating Quality Retail Business Acceleration for Sustainable Profit"—the Company will focus on four key initiatives: Business Growth, Asset Quality, HR Development, Operations & IT, and Inorganic Strategy.

As a company committed to long-term sustainable growth, the Bank regularly reviews and evaluates its organizational structure across its head office, regional offices, and branches, using a Job Family-based approach. This process aims to enhance effectiveness and efficiency to support the achievement of both financial and non-financial organizational goals.

To support the achievement of its corporate strategy for 2025, the Bank will continue implementing strategic initiatives for human resource development, which include:

1. Organizational development and performance achievement through employee training programs and effective talent management. These are critical elements for achieving the Bank's strategic priorities and focus in 2025. This effort aims to develop competent, high-integrity, and productive HR that can manage company operations with digital technology. As a result, HR will be well-prepared to meet established targets and adapt to the digitalization era.
2. Enhancing both soft skills and technical skills to boost the productivity of Business Functions and key enabling functions by optimizing the digital blended learning platform. Additionally, improving digital competencies, including mindset and skill set, to ensure the organization can transform and remain competitive in the era of financial technology and new behaviors.
3. Increasing Growth from Within for executive and managerial roles to support career management programs.
4. Strengthening managerial capacity, leadership skills, and talent management.
5. Building organizational capabilities to drive transformation and competitiveness in the financial technology sector and the new habits era.
6. Implementing a Performance-based Organization by fostering a coaching culture and developing tools to support its implementation.
7. Enhancing employee engagement with the Senior Management Team to strengthen employer branding, aligning with the Company culture and the brand promise of being the IDEAL Place to Work.

Teknologi Informasi Information Technology

► Pada tahun 2024, Bank melakukan percepatan transformasi digital dan ekosistem perbankan cerdas, membangun teknologi yang memumpuni serta aman.

In 2024, the Bank will accelerate digital transformation and smart banking ecosystem, building capable and secure technology.



Rp25 Miliar
Billion

Investasi di bidang teknologi informasi pada tahun 2024.
Investment in information technology in 2024.



2 Penghargaan
Awards

Pada tahun 2024, penerapan teknologi informasi Bank mendapatkan 2 (dua) penghargaan, yakni terkait dengan *email service* dan *internet banking*.
In 2024, the Bank's information technology implementation received 2 (two) awards, namely related to email service and internet banking.





PT Bank Muamalat Indonesia ("BMI," "Bank") berkeyakinan bahwa keberadaan Teknologi Informasi (TI) yang andal memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan operasional Bank serta layanan kepada nasabah. Karena itu, Bank terus mengadopsi perkembangannya serta berupaya meningkatkan kapasitas TI.

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis, Bank telah mencanangkan rencana dan strategi yang komprehensif di bidang TI, yaitu mencakup:

1. Pengembangan infrastruktur dan aplikasi yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan telekomunikasi dan data center (serta *disaster recovery center*) yang selalu dalam keadaan optimal dalam mendukung operasional Bank serta mampu mengantisipasi pertumbuhan bisnis.
2. Menjamin ketersediaan sistem TI yang andal untuk memberikan layanan yang cepat, efisien dan aman dalam mencapai proses operasional dan bisnis Bank sesuai dengan target dan *Services Level Agreement* (SLA) yang ditetapkan.
3. Melakukan pengelolaan dan pengendalian risiko operasional sistem TI.

PT Bank Muamalat Indonesia ("BMI," "Bank") believes that the presence of reliable Information Technology (IT) plays an important role in supporting the Bank's operational activities and services to customers. For this is why the Bank continues to adopt its development and strives to improve IT capacity.

To endorse business growth, the Bank launched a comprehensive plan and strategy in the IT sector, which includes the following:

1. Development of infrastructure and applications that encompass hardware, software, telecommunication networks and data centers (as well as disaster recovery center), which is always in optimal condition in supporting the Bank's operations and are capable of anticipating business growth.
2. Assurance of the availability of a reliable IT system that provides fast, efficient, and safe services in achieving the Bank's operational and business processes in line with the set targets and Services Level Agreement (SLA).
3. Management and control of IT system operational risks.

FOKUS PENGEMBANGAN 2024

Pada tahun 2024, fokus pengelolaan dan pengembangan TI diarahkan pada:

**Improved IT Service Excellent for Supporting Business Growth and Regulatory Requirement
Y2023-Y2024**

**Strengthen IT Security Infrastructure and Operation
Y2023-Y2024**

**Strengthen IT Digital Smart Banking Platform
Y2023-Y2024**

1. Peningkatan penyediaan layanan IT dengan mengikuti perkembangan dan *best practice* untuk mendukung permintaan bisnis dan regulator.
2. Penguatan infrastruktur keamanan dan jaringan komunikasi serta *backup system* Data Center DC dan DRC.
3. Percepat transformasi digital dan ekosistem perbankan cerdas, bangun teknologi yang mumpuni dan aman.

DEVELOPMENT FOCUS IN 2024

In the year 2024, the focus of IT management and development is directed to the following:

1. Improvement in providing IT services by keeping track of developments and best practices to support business and regulators' demands.
2. Strengthening security infrastructure and communication network as well as DC and DRC Data Center backup system.
3. Accelerate smart banking digital and ecosystem transformation and build qualified and safe technology.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Kebijakan, pengelolaan dan perencanaan strategi pengembangan TI akan sejalan dengan strategi dan tujuan bisnis yang akan dicapai oleh Bank. Melalui penerapan tata kelola TI yang baik dan sesuai aturan yang berlaku, hingga saat ini telah terbukti mampu mendukung keberhasilan transformasi digital Bank.

Proses transformasi digital masih terus dikembangkan hingga sekarang. Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan ekosistem digital syariah yang lebih optimal dengan menciptakan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi melalui digital banking.

Organisasi TI

Dalam organisasi BMI, pengelolaan TI dilaksanakan oleh Divisi Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Divisi, dalam hal ini Head Information Technology (IT). Kepala Divisi bertanggung jawab langsung kepada Direktur Operasi. Hingga akhir tahun buku 2024, Divisi Teknologi Informasi BMI didukung oleh 66 karyawan.

Divisi Teknologi Informasi BMI memiliki 5 (lima) sub-unit: IT Operation, IT Governance, IT Security, IT Solution Delivery, dan IT Enterprise Data Management. Berikut adalah struktur organisasinya.

INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

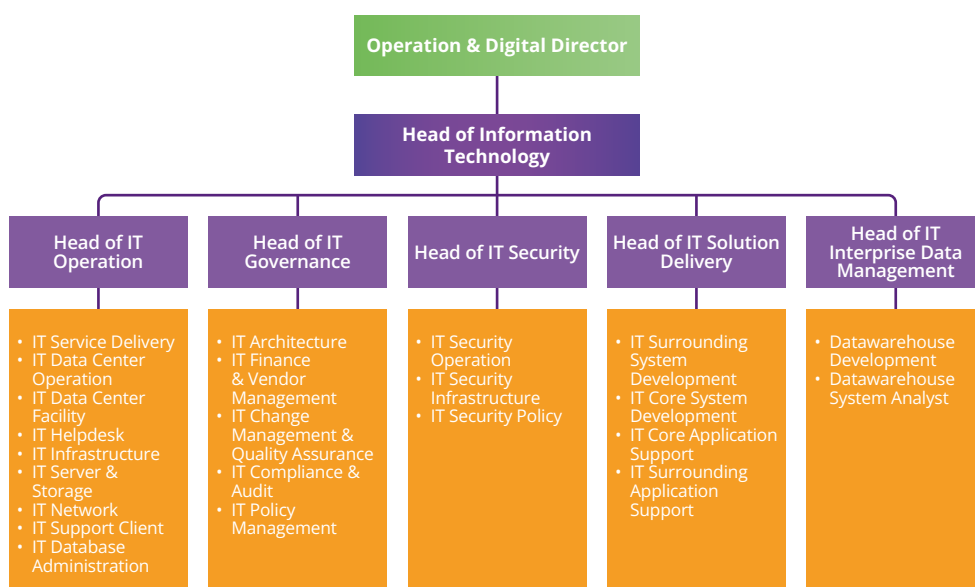
Policy, management, and strategic planning of IT development are aligned with the Bank's business strategies and goals to achieve. Through the implementation of good IT governance and in accordance with applicable provisions, to date, it has been proven to be capable of supporting the Bank's success in digital transformation.

The digital transformation process continues to develop to date. Such efforts aim to establish a more optimal sharia digital ecosystem by creating ease and convenience in transactions through digital banking.

IT Organization

Within BMI's organization, IT management by the Information Technology Division is led by a Division Head, in this context it is the Head of Information Technology. The Division Head reports directly to the Director of Operations. Until the end of financial year 2024, the Information Technology Division of BMI is supported by 66 personnel.

BMI's Information Technology Division consists of 5 (five) sub-units: IT Operation, IT Governance, IT Security, IT Solution Delivery, and IT Enterprise Data Management. Below is the organizational structure.





Masing-masing sub-unit tersebut dipimpin oleh seorang Kepala dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Each of the sub-unit is lead by a Sub-Unit Head with the duties and responsibilities as follows:

No.	Job Title (PIC)	Tugas dan Tanggung Jawab	Duties and Responsibilities
1.	Kepala Divisi Teknologi Informasi Head of Information Technology	- Mengelola dan mengarahkan sumber daya manusia dan layanan teknologi informasi di Divisi Teknologi Informasi - Laporan langsung kepada Direktur Operasional	- Manage and direct human resources and information technology services in the Information Technology Division - Directly report to the Director of Operations
1.1	Kepala Operasional Teknologi Informasi Head of IT Operation	- Mengelola Operasi Pusat data - Mengelola aplikasi layanan dan <i>helpdesk</i> - Mengelola server dan jaringan infrastruktur	- Manage data Operation Center - Manage service application and helpdesk - Manage server and infrastructure network
1.2	Kepala Tata Kelola Teknologi Informasi Head of IT Governance	- Mengelola anggaran dan <i>vendor</i> - Mengelola mekanisme TI - Mengelola <i>governance</i> terkait tata kelola IT	- Manage budget and vendor - Manage IT mechanism - Manage governance related to IT governance
1.3	Kepala Pengembangan Sistem TI Head of Information Technology Solution Delivery	- Mengelola <i>system core banking</i> - Mengelola <i>trade, treasury</i>, transaksi perbankan, dan <i>developer</i>	- Manage core banking system - Manage trade, treasury, banking transaction, and developer
1.4	Kepala Manajemen Data Perusahaan Teknologi Informasi Head of IT Enterprise Data Management	- Mengelola MIS dan DWH - Mengelola Pelaporan Peraturan - Mengelola Analisis Data - Mengelola <i>e-channel</i> - Mengelola sistem integrasi	- Manage MIS and DWH - Manage Regulation Reporting - Manage Data Analysis - Manage e-channel - Manage integration system
1.5	Kepala Keamanan Teknologi Informasi Head of IT Security	- Mengelola keamanan TI - Mengelola keamanan infrastruktur & jaringan	- Manage IT security - Manage infrastructure & network security

STRATEGI KEAMANAN DAN PEMULIHAN BENCANA

Sebagai bagian dari tata kelola di bidang teknologi informasi, BMI telah memiliki prosedur untuk mengatasi beragam gangguan TI, pemulihan bencana, hingga sistem pelaporan. Uraianya adalah sebagai berikut:

Mekanisme Identifikasi Disrupsi (Gangguan)

- Laporan gangguan yang telah diterima baik tim IT *Helpdesk* dan/atau tim IT Data Center Operator dikelompokkan berdasarkan kategori:
 - Kategori aplikasi (Aplikasi *surrounding & support*)
 - Kategori *Core Banking* (*Muamalat Core Banking* (MCB))
 - Kategori *Data Center Operation*
 - Kategori *E-channel*
 - Kategori Infrastruktur
 - Kategori *IT Security Administrator*
- Alur Identifikasi dan Penanganan Gangguan **Level-1**
 - IT *Helpdesk* menerima dan menganalisis laporan permasalahan dari *requestor* (*bankwide*) yang diinput melalui aplikasi IT *Helpdesk* portal,
 - IT *Helpdesk* menindaklanjuti laporan permasalahan dengan memberikan solusi terkait permasalahan yang disampaikan oleh *requestor*,
 - IT *Helpdesk* dapat mengatasi permasalahan, maka permasalahan tersebut dinyatakan selesai.

SECURITY AND DISASTER RECOVERY STRATEGY

As part of governance in information technology, BMI has retained procedures to overcome various IT disruptions and disaster recovery up to the reporting system. Details are described below:

Disruption Identification Mechanism

- Report on disruption received by both IT *Helpdesk* team and/or IT Data Center Operator team as grouped in the folloing categories:
 - Application Category (*Surrounding & Support*)
 - Core Banking Category (*Muamalat Core Banking*/ MCB)
 - Data Center Operation Category
 - E-Channel Category
 - Infrastructure Category
 - IT Security Administrator Category
- Flow of Disruption Identification and Handling **Level-1**
 - IT *Helpdesk* receives and analyzes report of disruption from *requestor* (*bankwide*) which is entered into the IT *Helpdesk* application portal,
 - IT *Helpdesk* follow-up the report by providing a solution related to the disruption submitted by *requestor*,
 - IT *Helpdesk* overcomes the disruption and confirms as completed.

Level-2

- a. Apabila IT *Helpdesk* tidak dapat menyelesaikan permasalahan, maka IT *Helpdesk* dapat melakukan eskalasi permasalahan kepada *Support Group* terkait untuk dapat diselidiki dan analisa untuk mencari solusi atas permasalahannya.
- b. Permasalahan dapat terselesaikan, maka *Support Group* terkait dapat langsung melakukan *update* penyelesaian pada aplikasi IT *Helpdesk* portal mengenai penyelesaian masalahnya, maka permasalahan tersebut dinyatakan selesai.

Level-3

- a. Jika penyelesaian masalah tidak dapat diselesaikan secara langsung sesuai penyelidikan dan analisis *Support Group*, dan harus melalui Prosedur Pengembangan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi dengan pengajuan *Change Request* (CR) yang dibuat oleh unit bisnis pemilik aplikasi.
- b. Dengan pengajuan *Change Request* (CR) dan melalui Proses Prosedur Pengembangan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi, maka penyelesaian permasalahan harus dipantau oleh *Support Group* dan unit bisnis pemilik aplikasi sampai permasalahan dinyatakan selesai.

Level-2

- a. If IT *Helpdesk* is not able to solve the disruption, then IT *Helpdesk* may escalate the report to the related *Support Group* in order to further investigate and analyze in finding a solution to the concerned problem.
- b. If the problem is solved, then the related *Support Group* can directly update the status of the reported disruption in the IT *Helpdesk* application as solved, and then the problem is confirmed as completed.

Level-3

- a. If the disruption cannot be resolved directly according to the *Support Group*'s investigation and analysis, it must then go through the Application System Development, Procurement, and Maintenance Procedure by submitting a *Change Request* (CR) made by the business unit of the application owner.
- b. By submitting the *Change Request* (CR) and through the Application System Development, Procurement, and Maintenance Procedure Process, the resolution of the problem must be monitored by the *Support Group* and the business unit of the application owner until the problem is declared resolved.

Strategi Keamanan Sistem Siber (Cyber Security)

1. Penerapan Manajemen Risiko Siber
Dalam menjaga keamanan Sistem Siber dilakukan dengan Penerapan Manajemen Risiko Siber mencakup 4 (empat) aspek berikut:
 - a. Tata kelola risiko terkait keamanan siber, meliputi perumusan tingkat risiko terkait keamanan siber yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko terkait keamanan siber (*risk tolerance*), serta budaya dan kesadaran risiko terkait keamanan siber,
 - b. Kerangka manajemen risiko terkait keamanan siber, yang meliputi strategi manajemen risiko, kecukupan perangkat organisasi, serta kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko terkait keamanan siber,
 - c. Proses manajemen risiko, kecukupan Sumber Daya Manusia (SDM) serta kecukupan system informasi manajemen risiko terkait keamanan siber, dan
 - d. Sistem pengendalian risiko terkait keamanan siber, yang meliputi kecukupan sistem pengendalian *intern* dan kecukupan kaji ulang.
2. Implementasi *Security Information and Event Management* (SIEM)
3. Implementasi *Web Application Firewall* (WAF)

Strategy of Cyber System Security Strategy

1. Implementation Cyber Risk Management
In maintaining Cyber System security, it involves cyber system management that includes the following 4 (four) aspects:
 - a. Cyber security risk management, including the formulation of the level of cyber security risk to be taken (*risk appetite*) and cyber security risk tolerance, as well as cyber security risk culture and awareness,
 - b. Cyber security risk management framework, which includes risk management strategy, organization device coverage, and adequacy of cyber security risk policies, procedures, and limit setting.
 - c. Risk management process, adequacy of Human Resources (HR) as well as adequacy of risk management information system related to cyber security, and
 - d. Risk control system related to cyber security, which includes the adequacy of the internal control system and the adequacy of the review.
2. Implementation of *Security Information and Event Management* (SIEM)
3. Implementation of *Web Application Firewall* (WAF)



4. Tim *Security Operation Center* (SOC), melakukan pemantauan jaringan melalui SIEM, WAF secara terus menerus selama 24 jam dan melakukan Analisa & tindakan terhadap keadaan anomali yang ditemukan
5. Melakukan *Penetration Test* terhadap Jaringan, Web dan kritikal aplikasi untuk memastikan tidak ada kerentanan
6. Melakukan uji coba berkala terkait penanganan dan keamanan siber sesuai yang telah ditetapkan oleh OJK.

4. Security Operation Center (SOC) Team conducts monitoring of network by means of SIEM, WAF on continuous basis for 24 hours and conduct Analysis & Action on found anomalous condition
5. Conduct Penetration Test on the network, web, and critical applications to make sure there is no vulnerability.
6. Conduct periodic trial tests related to cyber handling and security in accordance with those determined by OJK.

Strategi dan Proses Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery*)

1. Karyawan yang pertama mengetahui insiden TI, melaporkan kepada unit kerja Teknologi Informasi, melalui IT *Helpdesk* dan/atau dapat langsung menghubungi PIC IT Support (level 1) terkait, IT Support (level 1) memiliki waktu tidak melebihi 30 menit untuk menyelesaikan insiden tersebut. Bila dalam waktu maksimal 30 menit insiden tidak dapat diselesaikan, maka dieskalasi kepada Head IT Operations (L2). Head IT Operations (L2) berkewajiban untuk segera melakukan analisis dan berkoordinasi dengan pihak terkait lain termasuk vendor yang dapat menyelesaikan insiden tersebut.
2. Unit kerja yang terkena dampak dari insiden, wajib mengetahui proses yang sedang berjalan agar dapat menjalankan *workaround* yang sudah ditentukan. Maksimal 60 menit, jika insiden tersebut belum dapat diselesaikan, maka wajib dieskalasi kepada Kepala Divisi IT (L1). Kepala Divisi IT (L1) berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
3. Segera setelah menerima informasi tersebut, Kepala Divisi IT sebagai Ketua Tim DRC mengaktifkan *call tree* dengan kata kunci "*Recovery*."
4. Seluruh anggota tim harus segera berkumpul di lokasi *command center* dan memberikan masukan mengenai kondisi terakhir, perbaikan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan penyebab bencana TI, dan kesiapan masing-masing proses untuk kembali kepada sistem DC.
5. Ketua Tim DRC menginformasikan kepada tim DRC mengenai hasil pertemuan pemulihan DRC. Berdasarkan informasi tersebut, Ketua Tim DRC memutuskan untuk kembali kepada operasional DC dan menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
6. Ketua Tim DRC menginstruksi kepada seluruh Anggota Tim DRC.
7. Tim Komunikasi Cabang menginformasikan kepada seluruh cabang dan unit kerja bahwa operasional akan dikembalikan ke mesin DC.
8. PIC Information Security memberikan akses yang diperlukan kepada PIC Jaringan.
9. PIC Jaringan mengembalikan akses cabang dari mesin DRC ke mesin DC sekaligus melakukan uji coba koneksi.

Disaster Recovery Strategy and Process

1. The employee who first learned of an IT incident reports to the Information Technology work unit through the IT Helpdesk and/or directly contacts the related IT PIC Support (level 1). IT Support (level 1) has no more than 30 minutes to resolve the incident. If in 30 minutes at maximum the incident is not resolved, then it is escalated to the Head of IT Operations (Level 2/L2). The Head of IT Operations (L2) is obligated to immediately analyze and coordinate with other related parties including vendors that can resolve the incident.
2. The work unit affected by the incident must be aware of the ongoing process so that they can work around it as determined. A maximum of 60 minutes, if the incident is not resolved, then it must be escalated to the Head of IT Division (L1). The Head of the IT Division (L1) is obligated to take necessary steps to resolve the problem.
3. Immediately upon receipt of the concerned information, the Head of the IT Division, as the DRC Team Leader activates the call tree with the keyword "*Recovery*."
4. All team members must immediately gather at the command center location and provide input regarding the latest conditions, improvements already made to resolve the cause of the IT disaster, and the readiness of each process to return to the DC system.
5. The Head of the DRC Team informs the DRC Team on the results of the DRC recovery meeting. Based on this information, The Head of the DRC Team decides to return to DC Operation and instructs taking necessary steps.
6. Head of the DR Team instructs all DRC Team Members.
7. The Branch Communication Team informs all branch offices and work units that operations will return to the DC mechanism.
8. The Information Security PIC provides the needed access to the Network PIC.
9. The Network PIC returns the branch offices' access from the DRC mechanism to the DC mechanism while at the same time running a trial test connection.

10. Bila uji coba berhasil, PIC Jaringan membuka koneksi mesin DC agar dapat diakses oleh cabang.
11. Tim Komunikasi Cabang menginformasikan kepada seluruh cabang dan unit kerja bahwa operasional dapat kembali dilakukan seperti semula dan mencatat masalah yang dilaporkan oleh cabang untuk ditindak-lanjuti (*e-mail*, telepon/media komunikasi).
12. PIC Jaringan mengembalikan akses kepada PIC Information Security.
13. Ketua Tim DRC menginformasikan bahwa proses pemulihan DRC telah berhasil dilakukan.

Sistem/Mekanisme Pelaporan Kepada Direksi

Jika insiden TI yang terjadi merupakan masuk dalam kategori level 3 yaitu:

1. Kejadian perlu adanya intervensi dari pihak ketiga diluar perusahaan.
2. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah melebihi RTO masing-masing aplikasi.
3. Hal ini hanya dapat dipecahkan dengan melakukan *set up* ulang infrastruktur IT.
4. Teknologi informasi atau proses operasional/bisnis tidak dapat berjalan.
5. Dan/atau merupakan insiden keamanan siber.

Maka insiden harus dilaporkan kepada *Incident Management Team* (IMT) di mana selanjutnya ketua IMT akan menghubungi Direksi untuk meminta arahan atau keputusan terkait tindakan selanjutnya yang akan dilaksanakan.

ROADMAP TEKNOLOGI INFORMASI

BMI telah memiliki rancangan strategis dalam pengembangan TI ke depan, seperti tertuang dalam “*Roadmap Teknologi Informasi 2025*” yang mencakup *IT Governance & IT Information Enhancement* dengan rinciannya sebagai berikut:

No.	Materi Pengembangan Development Material	Uraian	Description
1.	Pemenuhan infrastruktur TI Fulfillment of IT infrastructure	Melakukan pemenuhan infrastruktur penunjang dan penggantian <i>obsolete server</i> DC-DRC, pemenuhan <i>core network</i> DC-DRC.	Fulfillment of supporting infrastructure and replacing obsolete DC-DRC servers, fulfillment of DC-DRC core network.
2.	Penambahan DC <i>Colocation</i> Additional DC Colocation	Penambahan 1 area DC <i>Colocation</i> yang sudah diakui secara standar internasional dengan minimal standar <i>tier 3</i> .	Additional 1 DC Colocation area already acknowledged as of international standards with tier 3 minimal standards.
3.	<i>Service Management</i> Service Management	Peningkatan penyediaan layanan IT dengan mengikuti perkembangan dan <i>best practice</i> untuk mendukung permintaan bisnis dan regulator.	Improvement in provision of IT services by keeping track of developments and best practices to support business and regulatory demands.
4.	Implementasi arsitektur <i>microservice</i> untuk <i>Surrounding System</i> Implementation of microservice architecture for Surrounding System	Mengimplementasikan <i>platform microservice</i> untuk sistem <i>surrounding</i> .	Implement microservice platform for surrounding systems.
5.	Implementasi penguatan IT <i>Security</i> untuk <i>e-mail</i> dan perangkat <i>user</i> Implementation of strengthening IT Security for e-mail and device user	Pengadaan implementasi penunjang <i>tools e-mail security</i> .	Procurement of supporting implementation of email security tools

10. If the trial test succeeds, the Network PIC opens the DC mechanism connection so it can be accessed by the branch offices.
11. The Branch Communication Team informs all branch offices and work units that operation returns to normal and records the problems reported by the branch offices for further follow-up (email, telephone/communication media).
12. The Network PIC returns the access to the Information Security PIC.
13. Head of the DRC Team informs that the DRC recovery process is successfully completed.

System/Mechanism of Reporting to the Board of Directors

If an IT incident that occurs falls into level 3 category:

1. The incident requires intervention from a third party outside of the company.
2. The time needed to resolve the problem exceeds the RTO of each application.
3. This can only be resolved with resetting of the IT infrastructure.
4. Information Technology or operational/business process cannot proceed.
5. And/or an incident of cyber security.

Then the incident must be reported to the Incident Management Team (IMT), where subsequently the head of IMT can contact the Board of Directors to request a directive or decision related to the following action to take.

INFORMATION TECHNOLOGY ROADMAP

BMI retains a strategic design in the future IT development, as depicted in the 2025 Information Technology Roadmap,” which covers IT Governance & IT Information Enhancement with details as follows:



INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI

Pada tahun 2024, total realisasi belanja modal yang dikeluarkan Bank untuk pengembangan TI mencapai Rp25 miliar. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp30,3 miliar.

STRATEGI PENGEMBANGAN TI

Sepanjang tahun 2024, strategi pengembangan TI yang telah direalisasikan oleh BMI antara lain meliputi:

1. Pengembangan TI secara berkelanjutan fokus kepada pengembangan Infrastruktur IT Security hal ini dilakukan untuk memperkuat sistem keamanan Bank dari ancaman kejahatan siber. BMI telah melakukan penguatan pada infrastruktur dan sistem keamanan di antaranya:
 - a. Implementasi *Web Application Firewall* (WAF),
 - b. Implementasi *Privilege Access Management* (PAM),
 - c. Implementasi *Intrusion Detection and Prevention System* (IDPS),
 - d. Implementasi *Endpoint Detection and Response* (EDR),
 - e. Implementasi SD WAN di seluruh kantor cabang.
2. Guna mempersiapkan pengembangan TI dari segi infrastruktur *Data Center* (DC & DRC), BMI telah melakukan pengadaan infrastruktur penunjang meliputi Pengadaan *Obsolete Server Payment* BI (BI-RTGS, BI-SSS dan BI-ETP), Pengadaan *Backup System* dan *Storage Backup*.
3. Implementasi *Standard CVN 18* dengan metode pergantian solusi aplikasi *Switching* merupakan upgrade 3 Digit CVN (*Cryptogram Version Number*) dari CVN 10 ke CVN 18 yang diperlukan untuk pengetatan autentikasi transaksi dengan menggunakan kartu ATM/Debit. Baik migrasi BIN 8 Digit dan CVN 18 merupakan hal umum yang dilakukan oleh semua *switching* yang menyelenggarakan jaringan International agar transaksi lebih *secure*.
4. Pengembangan TI terkait Digital meliputi pengembangan Open API & *Middleware Microservices*, pengembangan aplikasi token CMS, dengan pengembangan layanan/fitur pada MDIN terdiri:
 - a. Modul Penerimaan Negara
 - b. Hijrah Groceries
 - c. *Remittance* melalui *Mobile Banking*
 - d. Pembayaran Internet Oxygen
 - e. Pembayaran XL home
 - f. Fitur Daftar Indihome
 - g. Pembayaran Asuransi CAR Syariah,
 - h. Pembayaran AIA Syariah
 - i. Pembayaran Manulife Syariah
 - j. Pembayaran Tiket Super Air Jet

INFORMATION TECHNOLOGY INVESTMENT

In the year 2024, the capital expenditure spent by the Bank for IT development purposes reached a total of Rp25 billion. This realization is lower than the previous year's spending of Rp30.3 billion.

IT DEVELOPMENT STRATEGY

Throughout the year 2024, the IT development strategy realized by BMI, among others, is as follows:

1. Continuous IT development focuses on the development of IT Security Infrastructure to strengthen the Bank's security system from cyber crime threats. BMI has strengthened the security infrastructure and system, including the following:
 - a. Implementation of *Web Application Firewall* (WAF),
 - b. Implementation of *Privilege Access Management* (PAM),
 - c. Implementation of *Intrusion Detection and Prevention System* (IDPS),
 - d. Implementation of *Endpoint Detection and Response* (EDR),
 - e. Implementation of SD WAN in all branch offices.
2. In order to prepare IT development from the perspective of *Data Center* (DC & DRC) infrastructure, BMI has procured the supporting infrastructure, which includes the Procurement of BI *Obsolete Server Payment* (BI-RTGS, BI-SSS and BI-ETP), Procurement of *Backup System* and *Backup Storage*.
3. The implementation of *Standard CVN 18* with the *Switching* application solution replacement method, a 3-Digit CVN (*Cryptogram Version Number*) upgrade from CVN 10 to CVN 18, is required to tighten transaction authentication using ATM/Debit cards. Both 8-Digit BIN and 18 CVN migrations are common practices carried out by all switches that provide international networks to make transactions more secure.
4. IT development related to digital involves the development of Open API & *Middleware Microservices*, the development of a CMS token application, and service/feature development on MDIN, consisting of the following:
 - a. State Revenue Module
 - b. Hijrah Groceries
 - c. *Remittance* through *Mobile Banking*
 - d. Payment for Oxygen Internet Billing
 - e. Payment for Home XL Billing
 - f. Indihome Registration Feature
 - g. Payment for CAR Syariah Insurance
 - h. Payment for AIA Syariah
 - i. Payment for Syariah Manulife
 - j. Payment for Super Air Jet Ticket

k. Pembayaran IPL Sinarmasland l. <i>Group</i> Telkomsel <i>Roaming</i> m. <i>Online Treasury</i> FX CMS Madina n. Rumah Amal Salman Shadaqah o. Rumah Amal Salman Zakat p. Rumah Amal Salman Infaq q. Ziswaf Yayasan Asar Humanity r. <i>Top Up</i> Flazz BCA s. <i>Top Up</i> BNI TapCash t. Pajak Daerah DKI u. Implementasi Setor Tunai PT. POS Indonesia v. Smart Machine Kiosk Hijra w. <i>Microsite</i> pada Aplikasi Pospay (Layanan Perbankan Digital dengan Perjanjian Kemitraan) x. QRIS TUNTAS (Transfer) y. Sedekah Shubuh 5. Pengembangan TI terkait pembiayaan <i>Consumer Financing Business</i> dengan pengembangan layanan/fitur pada FOS terdiri: a. Pengembangan Sistem <i>Surrounding Financing</i> (Pensiun) b. Pengembangan Sistem <i>Surrounding Financing</i> (Otomasi <i>Hold Dana</i>) c. Pengembangan Sistem <i>Surrounding Financing</i> (<i>Spread Margin</i>) d. Pengembangan Sistem <i>Surrounding Financing</i> (Multiguna Non ASN) e. Pengembangan Sistem <i>Surrounding Financing</i> (Cicil Emas) f. Pengembangan Sistem <i>Surrounding Financing</i> (Atribusi Biaya) 6. Pengembangan <i>Branch Delivery System</i> (BDS) secara berkelanjutan untuk mengakomodir <i>single apps</i> di cabang-cabang Bank Muamalat.	k. Payment for Sinarmasland IPL l. Telkomsel Group Roaming m. Online Treasury FX CMS Madina n. Salman Shadaqah Charity House o. Amal Salman Zakat Charity House p. Salman Infaq Charity House q. Ziswaf Asar Humanity Foundation r. Top Up Flazz BCA s. Top Up BNI TapCash t. Regional Tax of DKI u. Cash Deposit Implementation of PT. POS Indonesia v. Smart Machine Kiosk Hijra w. Microsite on Pospay Application (Digital Banking Services with Partnership Agreement) x. QRIS TUNTAS (Transfer) y. Shubuh Alms 5. IT development related to Consumer Financing Business with development of service/feature on FOS consists of the following: a. Development of Surrounding Financing System (Pension) b. Development of Surrounding Financing System (Hold Fund Automation) c. Development of Surrounding Financing System (Spread Margin) d. Development of Surrounding Financing System (Multipurpose for Non-Civil Servant) e. Development of Surrounding Financing System (Ggold Installment) f. Development of Surrounding Financing System (Cost Attribution) 6. Continuous development of Branch Delivery System (BDS) to accommodate single apps in branch offices of Bank Muamalat.

PENGHARGAAN

Sepanjang tahun 2024, pengelolaan TI di lingkungan BMI mendapatkan sejumlah apresiasi dari pihak eksternal, yaitu berupa penghargaan. Di antaranya, disampaikan melalui tabel di bawah ini.

AWARDS

During the year 2024, IT management within BMI received a number of recognitions from external parties, namely in the form of awards, among others, as presented in the table below.

No.	Nama Penghargaan Name of Award	Kategori Category	Pemberi Penghargaan Award Issuer	Tanggal Diberikan Date
1.	The 2 nd Best – Email Service	Sharia Bank	Info Bank Media Group	2 Juli 2024 July 2, 2024
2.	The 2 nd Best – Internet Banking	Sharia Bank	Info Bank Media Group	2 Juli 2024 July 2, 2024



KINERJA 2024

Realisasi pencapaian di TI selama 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Improve IT Service Excellent
Peningkatan penyediaan layanan IT dengan mengikuti perkembangan dan *best practice* untuk mendukung permintaan bisnis dan regulator diantaranya:
 - a. Implementasi ISO 27001 for DUKCAPIL
 - b. Uji coba berkala (*switch over*) dan menjalankan operasional 11 (sebelas) kritikal aplikasi dengan menggunakan infrastruktur *backup* pada lokasi *Data Recovery Center* (DRC)
2. Strengthen IT Security Infrastructure & Operation
Penguatan infrastruktur *security* dan jaringan komunikasi serta *backup system* Data Center DC dan DRC.
BMI telah melakukan penguatan pada infrastruktur dan sistem keamanan diantaranya:
 - a. Implementasi *Web Application Firewall* (WAF),
 - b. Implementasi *Privilege Access Management* (PAM),
 - c. Implementasi *Intrusion Detection and Prevention System* (IDPS),
 - d. Implementasi *Endpoint Detection and Response* (EDR),
 - e. Implementasi SD WAN di seluruh kantor cabang,
 - f. Melakukan *penetration test* (*pentest*) kritikal aplikasi dan jaringan
 - g. Pengujian kesiapan Bank dalam keamanan siber, dalam bentuk uji coba *DRP cyber security* dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. IT Digital Infrastructure & Smart Banking Platform
Strengthen IT Digital & Smart Banking Platform untuk mendukung percepatan transformasi digital dan ekosistem perbankan cerdas, membangun teknologi yang mumpuni dan aman yang meliputi pengembangan Open API & Middleware Microservices, pengembangan aplikasi token CMS, dengan pengembangan layanan/fitur pada MDIN terdiri:
 - a. Modul Penerimaan Negara
 - b. Hijrah Groceries
 - c. Remittance melalui Mobile Banking
 - d. Pembayaran Internet Oxygen,
 - e. Pembayaran XL home,
 - f. Fitur Daftar Indihome
 - g. Pembayaran Asuransi CAR Syariah,
 - h. Pembayaran AIA Syariah,
 - i. Pembayaran Manulife Syariah,
 - j. Pembayaran Tiket Super Air Jet
 - k. Pembayaran IPL Sinarmasland
 - l. GroupTelkomsel Roaming
 - m. Online Treasury FX CMS Madina
 - n. Rumah Amal Salman Shadaqah

2024 PERFORMANCE

Realization of IT achievements during the year 2024 is as follows:

1. Improved IT Service Excellence
Improvement in the provision of IT services by keeping track of developments and best practices to support business and regulatory demands, including the following:
 - a. Implementation of ISO 27001 for Civil Registry Office (DUKCAPIL)
 - b. Periodic trial run (*switch over*) and implemented the operation of 11 (eleven) critical applications by use of backup infrastructure on Data Recovery Center (DRC) location
2. Strengthened IT Security Infrastructure & Operation
Strengthening of security and communication network infrastructure as well as Data Center (DC) and DRC backup system.
BMI strengthened the security infrastructure and system including the following:
 - a. Implementation of Web Application Firewall (WAF),
 - b. Implementation of Privilege Access Management (PAM),
 - c. Implementation of Intrusion Detection and Prevention System (IDPS),
 - d. Implementation of Endpoint Detection and Response (EDR),
 - e. Implementation of SD WAN in all of branch offices,
 - f. Conduct penetration test on critical applications and network
 - g. Testing of Bank's readiness in cyber security, in the form of a *DRP cyber security* trial and reported to the Financial Services Authority (OJK)
3. IT Digital Infrastructure & Smart Banking Platform
Strengthened IT Digital & Smart Banking Platform to support the acceleration of digital transformation and smart banking ecosystem, developed powerful and safe technology that covers development of Open API & Middleware Microservices, development of CMS token application, with development of service/feature on MDIN consisting of the following:
 - a. State Revenue Module
 - b. Hijrah Groceries
 - c. Remittance through Mobile Banking
 - d. Payment for Oxygen Internet Billing,
 - e. Payment of XL Home Billing,
 - f. Indihome Registration Feature
 - g. CAR Syariah Insurance Payment,
 - h. AIA Syariah Payment,
 - i. Payment of Syariah Manulife,
 - j. Payment of Super Air Jet Ticket
 - k. Payment of Sinarmasland IPL
 - l. Telkomsel Group Roaming
 - m. FX CMS Madina Online Treasury
 - n. Salman Shadaqah Charity House

- o. Rumah Amal Salman Zakat
- p. Rumah Amal Salman Infaq
- q. Ziswaf Yayasan Asar Humanity
- r. Top Up Flazz BCA
- s. Top Up BNI TapCash
- t. Pajak Daerah DKI
- u. Implementasi Setor Tunai PT. POS Indonesia
- v. Smart Machine Kiosk Hijra
- w. Microsite pada Aplikasi Pospay (Layanan Perbankan Digital dengan Perjanjian Kemitraan)
- x. QRIS TUNTAS (Transfer)
- y. Sedekah Shubuh

- o. Salman Zakat Charity House
- p. Salman Infaq Charity House
- q. Ziswaf Asar Humanity Foundation
- r. Top Up Flazz BCA
- s. Top Up BNI TapCash
- t. Regional Tax of DKI
- u. Cash Deposit Implementation of PT. POS Indonesia
- v. Kiosk Hijra Smart Machine
- w. Microsite on Pospay Application (Digital Banking Services with Partnership Agreement)
- x. QRIS TUNTAS (Transfer)
- y. Shubuh Alms

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025

Tahun 2025, BMI mengupayakan peningkatan keandalan dan keamanan sistem TI melalui pengembangan pada infrastruktur DC, *Infrastructure IT Security* dan *Operation Excellence* dengan cakupan:

1. Pemenuhan infrastuktur TI dan DC Colocation meliputi:
 - Replace Obsolete Server Muamalat Core Banking (MCB)
 - Pemenuhan Core Network Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC)
 - Pengadaan Replacement Obsolete Server dan GAP Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC)
 - Pengadaan DC 3 Colocation
2. Penguatan IT Security meliputi:
 - a. Penguatan *security TI*, berkelanjutan
 - Penguatan *Infrastructure security*
 - Penguatan *Network security*
 - Penguatan *Endpoint security*
 - Penguatan *Application security*
 - Penguatan *Email security*
 - b. *Security Awareness & Risk Prevention*, berkelanjutan
 - Sosialisasi security awareness melalui *e-mail (e-mail blasting)*
 - Sosialisasi *security awareness* melalui notifikasi MHP saat *login*
 - *Induction Training cyber awareness* untuk seluruh karyawan baru
 - *Awareness* keamanan informasi/siber – materi MIC
 - Simulasi *e-mail phishing/fake* ke karyawan

STRATEGIC PLAN IN 2025

In 2025, BMI will continue to strive to improve the reliability and safety of IT systems through developments in DC infrastructure, IT Security and Operation Excellence Infrastructure with covers the following:

1. Fulfillment of IT infrastructure and DC Colocation consisting of:
 - Replace Obsolete Server Muamalat Core Banking (MCB)
 - Fulfillment of Core Network Data Center (DC) and Disaster Recovery Center (DRC)
 - Procurement of Obsolete Server and GAP Data Center (DC) and Disaster Recovery Center (DRC) Replacement
 - Procurement of DC 3 Colocation
2. Strengthening of IT Security consists of the following:
 - a. Strengthening of IT security on continuous basis
 - Strengthening of Security infrastructure
 - Strengthening of Network security
 - Strengthening of Endpoint security
 - Strengthening of Application security
 - Strengthening of Email security
 - b. Security Awareness & Risk Prevention on continuous basis
 - Socialization on security awareness by email (email blast)
 - Socialization of security awareness by MHP notification upon login
 - Induction Training on cyber awareness for all new employees
 - Awareness on information security/cyber – MIC material
 - Simulation on email phishing/fake to employees



c. Data Management system, Implementasi Data Loss Prevention (IDLP) 3. Pemenuhan ketentuan Regulator POJK 11/POJK.03/2022, SEOJK 21/SEOJK.03/2017 dan ISO27001 a. Melakukan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) atas tingkat maturitas siber b. Melakukan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) atas tingkat maturitas digital c. Pengujian kesiapan Bank dalam keamanan siber, dalam bentuk uji coba <i>DRP cyber security</i> dan/atau <i>table top exercise</i> minimal 1 (satu) kali dalam setahun sesuai ketentuan regulator d. Melakukan pengkinian prosedur ITY berdasarkan gap ketentuan regulator • Prosedur Operasional Teknologi Informasi • Prosedur Pengamanan Informasi • Prosedur IT Disaster Recovery (DR) • Prosedur Business Continuity Plan IT • Prosedur Pengembangan Sistem Aplikasi Teknologi Informasi 4. Penguatan Infrastructure Digital Banking diantaranya meliputi: a. Fill-in the gaps-IT Datawarehouse & Digital Banking Platform. b. Implement ISO 20022 for SWIFT. c. Implementasi Standar Nasional Open API (SNAP) Bank Indonesia d. Revamp Middleware API Micro Service.	c. Data Management system, Implementation of Data Loss Prevention (IDLP) 3. Compliance with Regulator POJK 11/POJK.03/2022, SEOJK 21/SEOJK.03/2017 and ISO27001 a. Conduct self assessment on cyber maturity level b. Conduct self assessment on digital maturity level c. Testing on Bank's readiness regarding cyber security ini the form of <i>DRP cyber security</i> trial test and/or <i>table top exercise</i> at least 1 (satu) time in a year as stipulated by regulator d. Conduct updates on ITY procedures based on gap regulatory provisions • Information Technology Operating Procedure • Information Security Procedure • IT Disaster Recovery (DR) Procedure • IT Business Continuity Plan Procedure • Information Technology Application System Development Procedure 4. Strengthening of Digital Banking Infrastructure, among others, are as follows: a. Fill-in the gaps-IT Datawarehouse & Digital Banking Platform. b. Implementation of ISO 20022 for SWIFT. c. Implementation of Open API National Standard (SNAP) of Bank Indonesia d. Revamp Middleware API Micro Service.

Manajemen Risiko

Risk Management

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“BMI”, “Bank”) menyadari, seiring dengan perkembangan bisnis serta dinamika di industri perbankan, risiko yang dihadapi oleh Bank semakin kompleks. BMI dituntut mampu menerapkan manajemen risiko yang andal agar dapat tetap menjaga pencapaian kinerja keuangan yang positif dan berkelanjutan, serta selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

BMI berkomitmen untuk menerapkan manajemen risiko dalam segala aspek pengelolaan operasional Bank secara independen dan objektif.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Tantangan yang dihadapi oleh Bank sangat dinamis sehingga dapat mempengaruhi kegiatan bisnis. Tantangan dimaksud, antara lain:

1. Penurunan *fee based income* sebagai dampak penurunan pendapatan pembiayaan yang disebabkan oleh penurunan pembiayaan, terutama pada segmen Corporate, Commercial dan SME, juga penurunan pada bisnis treasuri;
2. Peningkatan atas pembiayaan bermasalah;
3. Penurunan atas tingkat *recovery asset sale*, seiring dengan tingkat kesulitan aset yang tersisa.
4. Tingkat konsentrasi pembiayaan yang secara relatif masih tinggi.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Bank menerapkan manajemen risiko dalam kerangka *Governance, Risk & Compliance* (GRC). Pelaksanaan manajemen risiko bersamaan dengan penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik serta terpenuhinya aspek kepatuhan dan hukum dalam kerangka GRC, menjadi *enabler* dalam pencapaian target bisnis Bank.

PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Dalam melakukan pengelolaan risiko, BMI menerapkan prinsip antara lain :

1. Pengelolaan risiko dilakukan pada setiap aktivitas bisnis atau operasional Bank yang diterapkan berdasarkan prinsip kehati-hatian;

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“BMI” or “the Bank”) recognizes that, with the growth of its business and the evolving dynamics within the banking industry, the risks it faces are becoming increasingly complex. As such, BMI must implement effective risk management practices to maintain positive and sustainable financial performance, in accordance with the principles of good corporate governance.

BMI is committed to ensuring that risk management is implemented into all aspects of its operational management, carried out with independence and objectivity.

RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Bank faces dynamic challenges that can impact its business activities, including:

1. A decrease in fee-based income due to lower financing income, particularly in the Corporate, Commercial, and SME sectors, as well as a decline in treasury business performance;
2. An increase in non-performing financing;
3. A decrease in the level of asset sale recovery, in line with the level of difficulty of the remaining assets.
4. A relatively high level of financing concentration.

To address these challenges, the Bank implements risk management within the Governance, Risk & Compliance (GRC) framework. The implementation of risk management with effective corporate governance practices and the fulfillment of compliance and legal requirements within the GRC framework supports the achievement of the Bank's business objectives.

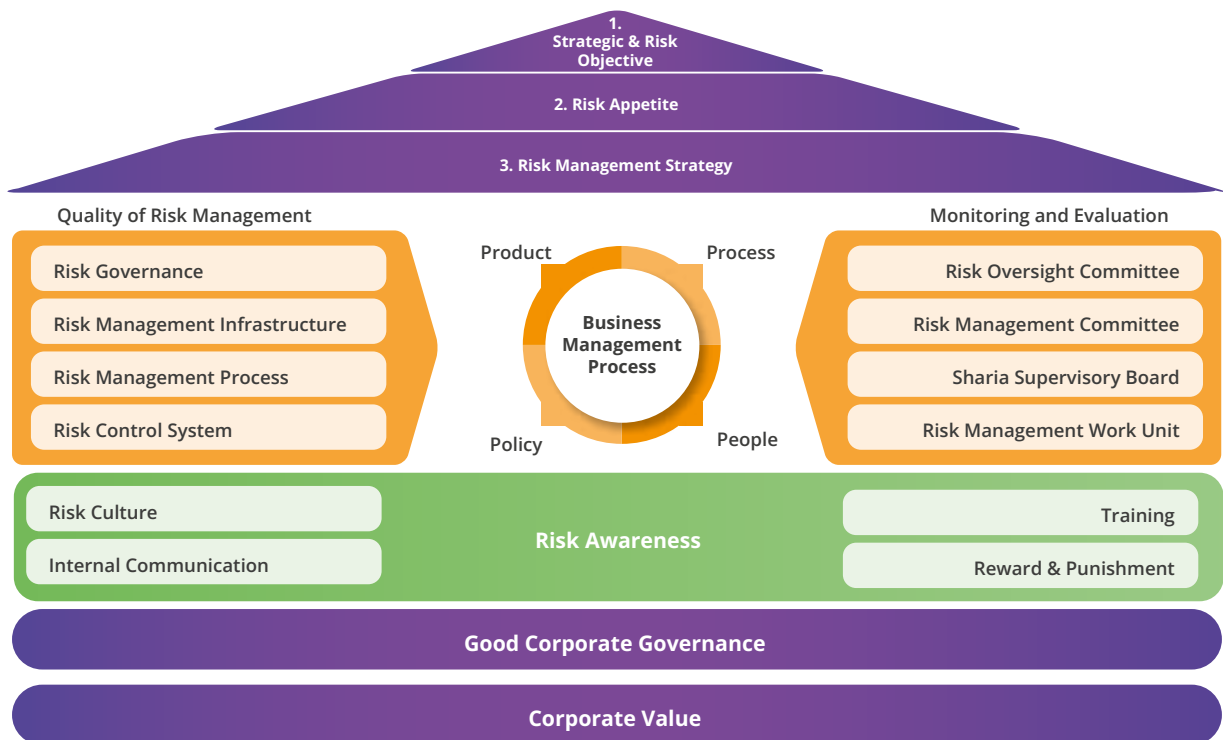
RISK MANAGEMENT PRINCIPLES

In managing risk, BMI follows the principles outlined below:

1. Risk management is carried out into every business or operational activity of the Bank, following the principle of prudence.



2. Dalam pengelolaan risiko, BMI menerapkan kebijakan internal berdasarkan asas GCG dan mengelola risiko dengan mekanisme yang sejalan dengan ketentuan regulator;
 3. Prinsip-prinsip manajemen Risiko Bank, antara lain:
 - a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris dan DPS;
 - b. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko;
 - c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko;
 - d. Sistem Pengendalian Intern.
 4. Bank mengimplementasikan kerangka kerja manajemen risiko. Mengimplementasikan kerangka kerja manajemen risiko (*risk management framework*) sebagaimana grafik di bawah ini.
2. In managing risks, BMI applies internal policies based on GCG principles and manages risk using mechanisms that align with regulatory requirements.
 3. Bank's Risk Management Principles, which include:
 - a. Active supervision by the Board of Directors, Board of Commissioners, and DPS;
 - b. Risk management policies and procedures, along with the setting of risk limits;
 - c. Processes for risk identification, measurement, monitoring, control, and the use of a risk management information system;
 - d. Internal control systems.
 4. The Bank has implemented a risk management framework, as illustrated in the following chart.



Kerangka manajemen risiko BMI dibangun dengan mengedepankan nilai-nilai GCG dan *corporate value* serta penguatan *risk awareness* di seluruh unit kerja Bank.

BMI's risk management framework is developed with a focus on GCG values and corporate values, while also strengthening risk awareness across all Bank work units.

Proses bisnis yang dijalankan Bank ditopang oleh adanya ketentuan yang mengatur setiap aktivitas, produk yang ditawarkan, proses yang dijalankan, serta penguatan sumber daya manusia. Pelaksanaan proses bisnis dilakukan dengan senantiasa memperhatikan 2 (dua) pilar manajemen risiko, yaitu:

The Bank's business processes are supported by regulations that govern each activity, product offerings, and processes, as well as by strengthening human resources. The implementation of these business processes consistently considers two key pillars of risk management, as follows:

DUA PILAR MANAJEMEN RISIKO

Two Pillars of Risk Management

Pilar 1 Pillar 1	Pilar kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai sesuai dengan jenis risiko inheren yang dapat diidentifikasi, dalam bentuk <i>risk governance</i> , <i>risk management infrastructure</i> , <i>risk management process</i> , dan <i>risk control system</i> .	The pillars for the effective implementation of adequate risk management, based on the identified types of inherent risk, include risk governance, risk management infrastructure, risk management processes, and the risk control system.
Pilar 2 Pillar 2	Pilar pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan atas proses bisnis yang dilakukan antara lain melalui: a. Komite di level Dewan Komisaris, antara lain: <i>Risk Oversight Committee</i> (ROC), <i>Audit Committee</i> , <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) <i>Committee</i> dan <i>Nomination & Remuneration Committee</i> di level Dewan Komisaris; b. Komite di level Direksi, antara lain: <i>Risk Management Committee</i> (RMC), Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP), <i>IT Steering Committee</i> (ITSC), <i>Asset and Liability Committee</i> (ALCO), Komite Pembiayaan (KP); c. Dewan Pengawas Syariah (DPS); dan d. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).	The pillars of continuous monitoring and evaluation of business processes include: a. Committees at the Board of Commissioners level: the Risk Oversight Committee (ROC), Audit Committee, Good Corporate Governance (GCG) Committee, and Nomination & Remuneration Committee; b. Committees at the Board of Directors level: the Risk Management Committee (RMC), Financing Policy Committee (KKP), IT Steering Committee (ITSC), Asset and Liability Committee (ALCO), and Financing Committee (KP); c. The Sharia Supervisory Board (DPS); and d. The Risk Management Work Unit (SKMR).

BMI senantiasa berupaya mencapai dan melaksanakan *corporate strategy* dan *risk objective*, baik jangka panjang, menengah, maupun pendek. Bank juga menjaga eksposur risiko sesuai *risk appetite* yang ditopang landasan dan pilar yang kuat.

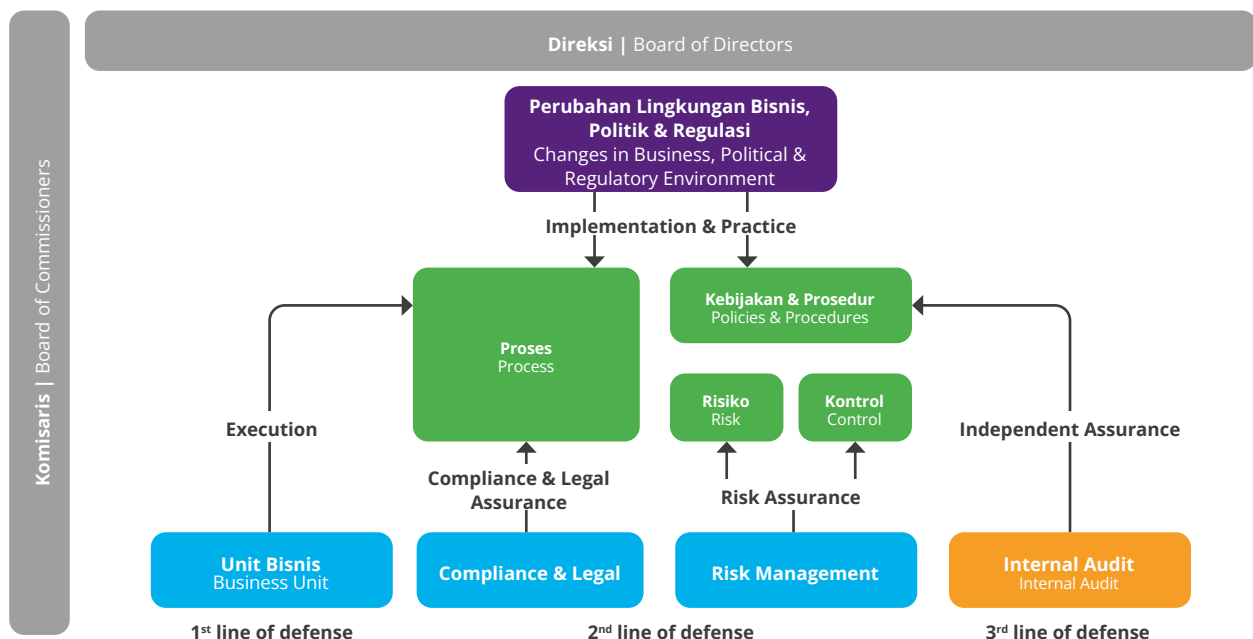
Dalam mengimplementasikan manajemen risiko di Bank, GRC diimplementasikan melalui konsep 3 (tiga) lini pertahanan (*three lines of defence*) manajemen risiko. Pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Direksi dan diawasi oleh Dewan Komisaris.

BMI consistently works to achieve and implement its corporate strategy and risk objectives across long-term, medium-term, and short-term goals. The Bank also ensures that its risk exposure aligns with its risk appetite, supported by robust foundations and key pillars.

In implementing risk management in the Bank, GRC is implemented through the concept of three lines of defense of risk management. The implementation of this framework is the responsibility of the Board of Directors and is overseen by the Board of Commissioners.

TIGA LINI PERTAHANAN

Three Lines of Defense





Lini 1: Lini Pertahanan Pertama (*First Line of Defense*)

First line of defense atau lini pertahanan pertama terdiri dari unit bisnis dan unit kerja lainnya yang melaksanakan kegiatan bisnis dan operasional Bank secara langsung dan harian. Unit-unit kerja ini bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko pada setiap produk, proses, kegiatan, dan sistem yang dijalankan, sejalan dengan perubahan lingkungan bisnis, politik dan regulasi yang dinamis dan mempengaruhi implementasi yang dilakukan oleh Bank.

Lini 2: Lini Pertahanan Kedua (*Second Line of Defense*)

Second line of defense atau lini pertahanan kedua terdiri dari SKMR, unit kepatuhan dan unit hukum. SKMR bertanggung jawab memastikan kecukupan kontrol atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis dan operasional Bank, yang dituangkan antara lain dalam ketentuan internal dan kerangka manajemen risiko. Pengembangan dan implementasi ketentuan internal serta kerangka manajemen risiko BMI dilaksanakan dengan memperhatikan juga perubahan lingkungan bisnis, politik dan regulasi yang dinamis. Unit kepatuhan dan hukum bertanggung jawab memastikan bahwa aspek kepatuhan dan hukum telah terpenuhi dalam produk dan proses yang dilakukan oleh Bank.

Lini 3: Lini Pertahanan Ketiga (*Third Line of Defense*)

Third line of defense atau lini pertahanan ketiga dilaksanakan fungsinya oleh unit internal audit yang melaksanakan fungsi sebagai Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai unit independen yang memastikan bahwa lini pertahanan pertama dan kedua telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik.

ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Unit kerja manajemen risiko sebagai *second line of defense* berada di bawah Compliance, Risk & Legal Director. *Second line of defense* memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan tata kelola manajemen risiko, menyediakan dan memperbaharui kerangka manajemen risiko, memastikan terlaksananya proses manajemen risiko, sistem informasi dan sumber daya manusia serta pelaksanaan sistem pengendalian risiko.

Line 1: First Line of Defense

The first line of defense includes business units and other operational units that directly manage the Bank's daily business and operational activities. These units are responsible for identifying and managing risks in all products, processes, activities, and systems, adapting to changes in the dynamic business, political, and regulatory environments that impact the Bank's operations.

Line 2: Second Line of Defense

The second line of defense consists of the SKMR, compliance unit, and legal unit. SKMR is responsible for ensuring adequate control over the risks associated with the Bank's business and operations, as outlined in internal provisions and the risk management framework. The development and implementation of these frameworks also take into account changes in the dynamic business, political, and regulatory environment. The compliance and legal units ensure that all legal and compliance requirements are met in the Bank's products and processes.

Line 3: Third Line of Defense

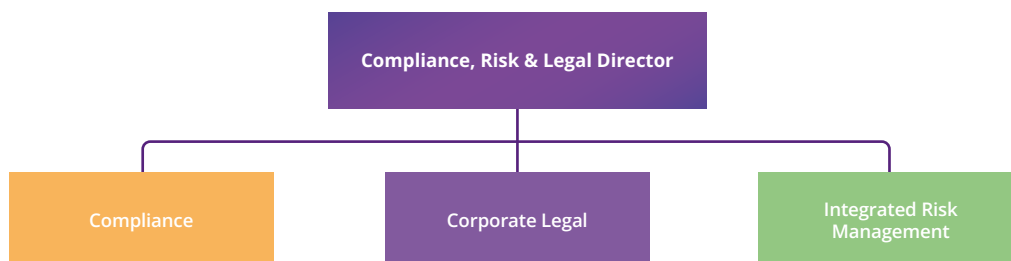
The third line of defense is managed by the internal audit unit, which operates as the Internal Audit Work Unit (SKAI). It functions independently to ensure that both the first and second lines of defense are properly fulfilling their responsibilities.

RISK MANAGEMENT ORGANIZATION

The risk management unit, serving as the second line of defense, reports to the Compliance, Risk & Legal Director. This second line of defense has the responsibility to ensure the implementation of governance of risk management, provide and update the risk management framework, ensure the implementation of the risk management process, information systems, and human resources, and enforce the risk control system.

Unit kerja manajemen risiko bersifat independen dari unit bisnis dan operasional Bank. Struktur organisasi di bawah *Compliance, Risk & Legal Director* pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The risk management unit operates independently from the Bank's business and operational units. The organizational structure under the *Compliance, Risk & Legal Director* for 2024 is as follows:



FOKUS MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2024

Fokus penerapan manajemen risiko yang dilakukan pada tahun 2024 sejalan dengan *bankwide strategy* tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Business Refocusing**, dengan inisiatif prioritas sebagai berikut:
 - a. *First Core: Retail Individual*
 - b. *Second Core: Enterprise as Entry Gate*
 - c. *Low Cost Fund, Transaction & Fee Based Income*
 - d. *Islamic & Hajj Ecosystem*
 - e. *Collection & Recovery*
2. **Fixing the Fundamental**, dengan inisiatif prioritas sebagai berikut:
 - a. *People & Organization*
 - b. *IT & Digital Banking*
 - c. *Streamlined Business Process*
 - d. *Operational Efficiency*
3. **Strengthen Enablers**, dengan inisiatif prioritas sebagai berikut:
 - a. *Union Strategy Enterprise & Retail*
 - b. *Contribution Margin*
 - c. *Distribution Channel Strategy*
 - d. *Inorganic Strategy*
 - e. *BPKH Synergy*

RISK MANAGEMENT FOCUS IN 2024

The focus of risk management implementation carried out in 2024 in line with the 2024 bankwide strategy is as follows:

1. **Business Refocusing**, with the following key initiatives:
 - a. *First Core: Retail Individual*
 - b. *Second Core: Enterprise as Entry Gate*
 - c. *Low Cost Fund, Transaction & Fee Based Income*
 - d. *Islamic & hajj Ecosystem*
 - e. *Collection & Recovery*
2. **Fixing the Fundamentals**, with the following key initiatives:
 - a. *People & Organization*
 - b. *IT & Digital Banking*
 - c. *Steamlined Business Process*
 - d. *Operational Efficiency*
3. **Strengthen Enablers**, with the following key initiatives:
 - a. *Union Strategy Enterprise & Retail*
 - b. *Contribution Margin*
 - c. *Distribution Channel Strategy*
 - d. *Inorganic Strategy*
 - e. *BPKH Synergy*



PENGAWASAN AKTIF DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DPS

Direksi, Dewan Komisaris, komite yang dibentuk pada level Direksi dan Dewan Komisaris, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjalankan peran aktif dalam memperkuat tata kelola manajemen risiko melalui rapat dan diskusi yang dilakukan berkala. Hal-hal yang dibahas dalam rapat terkait dengan perkembangan kinerja Bank, termasuk pengelolaan risiko yang dihadapi Bank, perumusan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.

Pada tingkat Direksi, terdapat komite yang mendukung pengawasan implementasi manajemen risiko, antara lain: *Risk Management Committee* (RMC), *IT Steering Committee* (ITSC), *Asset & Liability Committee* (ALCO), Komite Kebijakan Pembiayaan, Komite Bisnis dan *Human Capital Committee* yang melaksanakan rapat sesuai dengan piagam masing-masing komite.

Dewan Komisaris juga telah memiliki komite yang lengkap, yaitu: *Audit Committee*, *Risk Oversight Committee* (ROC), *Good Corporate Governance Committee* dan *Nomination & Remuneration Committee*.

Selama tahun 2024, terkait dengan manajemen risiko, pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan antara lain dalam bentuk pelaksanaan rapat ROC, RMC dan DPS:

ACTIVE SUPERVISION BY THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND SHARIA SUPERVISORY BOARD (DPS)

The Board of Directors, Board of Commissioners, committees established at both the Board of Directors and Board of Commissioners levels, and the Sharia Supervisory Board (DPS) all play an active role in enhancing risk management governance through regular meetings and discussions. These meetings focus on the Bank's performance development, including the management of risks faced by the Bank, determining the acceptable level of risk, and setting risk tolerance.

At the Board of Directors level, several committees assist in overseeing the implementation of risk management, such as the Risk Management Committee (RMC), IT Steering Committee (ITSC), Asset & Liability Committee (ALCO), Financing Policy Committee, Business Committee, and Human Capital Committee. These committees hold meetings as outlined in their respective charters.

The Board of Commissioners also has a comprehensive set of committees, including the Audit Committee, Risk Oversight Committee (ROC), Good Corporate Governance Committee, and Nomination & Remuneration Committee.

In 2024, the Board of Commissioners and Board of Directors engaged in active supervision related to risk management through the implementation of ROC, RMC, and DPS meetings, among other activities:

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	Pelaksanaan Pengawasan Aktif Implementation of Active Supervision
A. Risk Oversight Committee (ROC) Risk Oversight Committee (ROC)		
1.	Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Manajemen dan kesesuaian pelaksanaan kebijakan tersebut. Assessing the risk management policies and strategies developed by Management, along with evaluating the alignment of their implementation.	Memberikan evaluasi dan persetujuan atas kebijakan dan strategi Bank. Provide evaluations and approvals for the Bank's policies and strategies.
2.	Melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko. Reviewing the actions taken by the Board of Directors to ensure compliance with regulations from Bank Indonesia/the Financial Services Authority, and other relevant laws to uphold the principle of prudence, particularly in relation to risk management.	Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan umum manajemen risiko melalui rapat Komite Pemantau Risiko, yang telah dilaksanakan sebanyak 12 kali di tahun 2024, dengan agenda, antara lain: a. Perkembangan <i>asset sale recovery</i> dan penanganan pembiayaan <i>Low Quality Financing</i> (LQF); b. Tindak lanjut temuan audit OJK; c. Kinerja portofolio pembiayaan; d. <i>Progress</i> perbaikan IT; e. Perkembangan produk <i>digital banking</i> BMI; f. Kinerja dan Kondisi Likuiditas; g. Nasabah <i>Low Quality Financing</i> (LQF). Assess the implementation of general risk management policies through Risk Monitoring Committee meetings, which were held 12 times in 2024, covering the following agendas: a. Asset sale recovery development and management of Low Quality Financing (LQF); b. Follow-up on OJK audit findings; c. Financing portfolio performance; d. Progress on IT improvements; e. Development of BMI digital banking products; f. Liquidity performance and conditions; g. Low Quality Financing (LQF) customers.

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	Pelaksanaan Pengawasan Aktif Implementation of Active Supervision
3.	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko serta memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko telah dilaksanakan dengan baik. Providing recommendations to the Board of Commissioners to enhance the effectiveness of risk management duties and responsibilities, while ensuring proper implementation of risk management policies.	Mengevaluasi implementasi manajemen risiko secara berkala yang dilakukan antara lain melalui: a. Pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) sebelum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK); b. Strategi manajemen risiko terkait <i>progress</i> penyelesaian pembiayaan bermasalah, penetapan <i>target market</i>, pemantauan risiko konsentrasi pembiayaan; c. Analisis dan kinerja finansial dan non finansial. Periodically assess the implementation of risk management, which is conducted through: a. Discussion of the Bank's Business Plan (RBB) prior to its submission to the Financial Services Authority (OJK); b. Risk management strategies related to the progress of resolving non-performing financing, identifying target markets, and monitoring financing concentration risks; c. Analysis of both financial and non-financial performance.
4.	a. Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan. b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap struktur organisasi manajemen risiko, pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko. c. Melakukan evaluasi terhadap laporan profil risiko dan laporan Bank baik internal maupun eksternal agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Memastikan bahwa Unit Kerja Manajemen Risiko memenuhi kriteria independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. a. Assess the Board of Directors' recommendation related to transactions or business activities beyond their authority, which the Board of Commissioners will use as a basis for decision-making. b. Oversee and evaluate the structure of the risk management organization, along with the performance of the Risk Management Committee and the Risk Management Work Unit. c. Review the risk profile report and both internal and external reports of the Bank to ensure compliance with applicable regulations. d. Ensure that the Risk Management Work Unit maintains independence in carrying out its duties and responsibilities.	Memberikan arahan dan masukan yang terkait dengan aktivitas Bank melalui rapat Dewan Komisaris-Direksi dan rapat ROC, yang terkait dengan, antara lain: a. Penilaian atas laporan profil risiko dan tingkat kesehatan Bank; b. Pencapaian target Bank; c. Isu atas dan beberapa proyek inisiatif yang telah dilakukan; dan d. Kajian atas pembiayaan dengan limit tertentu yang perlu dikoordinasikan kepada Dewan Komisaris baik melalui proses pelaporan maupun permintaan rekomendasi. Provide guidance and feedback on the Bank's activities through Board of Commissioners-Board of Directors meetings and ROC meetings, covering, among other things: a. Evaluation of the Bank's risk profile and health report; b. Achievement of the Bank's targets; c. Issues and several initiative projects that have been carried out; and d. Review of financing with specific limits, which must be coordinated with the Board of Commissioners either through the reporting process or by seeking recommendations.
B Risk Management Committee (RMC) Risk Management Committee (RMC)		
1.	Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif. Develop comprehensive written risk management policies and strategies.	Ketentuan dan strategi manajemen risiko telah dimiliki oleh Bank, diperbarui secara berkala. The Bank has provisions and risk management strategies that are updated periodically.



No.	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	Pelaksanaan Pengawasan Aktif Implementation of Active Supervision
2.	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan umum manajemen risiko Bank Muamalat dan eksposur risiko yang diambil secara keseluruhan.	RMC telah melakukan hal-hal sebagai berikut: - Menetapkan strategi manajemen risiko, identifikasi risiko yang melekat pada produk dan aktivitas Bank, penetapan limit risiko, pemantauan risiko, kajian <i>stress test</i> dan risiko. - Menetapkan <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> untuk risiko operasional baik secara <i>bankwide</i> maupun untuk risiko keamanan siber; - Memastikan bahwa proses manajemen risiko yang dilakukan telah didokumentasikan dengan baik. - Melakukan pengujian beberapa ketentuan internal sesuai dengan hierarki ketentuan internal Bank, yaitu dalam bentuk Kebijakan, Prosedur, Manual Produk, SE Direksi, maupun Petunjuk Teknis. Rapat RMC dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda sebagai berikut: - Penilaian <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) dan Profil Risiko; - Usulan <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> untuk risiko operasional, baik secara <i>bankwide</i> maupun untuk risiko siber; - Tindak lanjut pemenuhan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM); - Dampak berakhirnya stimulus (restrukturisasi COVID-19) pada kinerja pembiayaan Bank; - Usulan keanggotaan Direksi dan SEVP pada Komite Level Direksi.
	Be accountable for implementing Bank Muamalat's general risk management policies and managing overall risk exposures.	The Risk Management Committee (RMC) has undertaken the following actions: - Established risk management strategies, identified risks inherent in the Bank's products and activities, set risk limits, conducted risk monitoring, stress tests and risk reviews. - Defined the risk appetite and risk tolerance for operational risks, both bankwide and specifically for cybersecurity risks. - Ensure that the risk management process is properly documented. - Updated several internal provisions in accordance with the Bank's internal provisions hierarchy, including Policies, Procedures, Product Manuals, Directors' Circulars, and Technical Instructions. RMC meetings are held five times, covering the following agenda items: - Assessment of Risk-Based Bank Rating (RBBR) and Risk Profile; - Recommendation for risk appetite and risk tolerance for operational risks, both bankwide and specifically for cyber risks; - Follow-up on the fulfillment of the Macroprudential Inclusive Financing Ratio (RPIM); - Analyzing the impact of the end of stimulus (COVID-19 restructuring) on Bank financing performance; - Recommendation for the membership of the Board of Directors and SEVP on the Board of Directors Level Committee.
3.	Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat satu tingkat di bawah level Direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi sesuai ketentuan internal yang berlaku.	Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi sesuai dengan limit kewenangan yang ditetapkan berjenjang dan dikaji secara berkala.
	Evaluate and decide on transactions that exceed the authority of officials one level below the Board of Directors or transactions that require the Board of Directors' approval, in accordance with internal provisions.	Evaluate and decide on transactions that require the approval of the Board of Directors, in accordance with authority limits that are determined in stages and reviewed periodically.
4.	Meminta opini/rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan kegiatan transaksi/pembiayaan/operasional atau aktivitas tertentu yang memerlukan opini/rekomendasi dari Dewan Komisaris.	Melakukan komunikasi dan/atau diskusi dengan Dewan Komisaris terkait dengan aktivitas yang memerlukan opini/rekomendasi Dewan Komisaris. Hal ini dilakukan secara tertulis atau pun melalui rapat Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala.
	Request opinions/recommendations from the Board of Commissioners for transactions/financing/operational activities, or specific actions that require their input.	Facilitate communication and/or discussions with the Board of Commissioners regarding activities that require their opinion/recommendation. This is conducted either in writing or through regular meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners.

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	Pelaksanaan Pengawasan Aktif Implementation of Active Supervision
5.	Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. Develop a risk management culture throughout all levels of the organization.	Mengembangkan dan mendorong penerapan budaya risiko di seluruh level karyawan, dengan melaksanakan <i>program risk awareness</i> melalui video, <i>email blast</i>, dan pelatihan/ <i>training</i> terkait manajemen risiko. Develop and encourage the implementation of a risk culture at all levels of employees by implementing risk awareness programs through videos, email blasts, and training related to risk management.
6.	Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko. Ensure improvement in the competency of human resources related to risk management.	Memastikan dilaksanakannya program untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia terkait manajemen risiko, antara lain: a. Muamalat Internal Certification (MIC) <i>for frontliners</i>; b. <i>Refreshment</i> Muamalat Internal Certification (MIC) untuk seluruh karyawan; c. <i>Basic Risk Awareness</i> melalui program Induction Training Program (INTRA) yang dilakukan oleh SKMR; d. INTRA <i>for Leaders</i>; e. <i>Region Academy</i> untuk karyawan region; f. Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR); g. Pelatihan Customer Service (CS) Forum; h. <i>Training</i> Teller Muamalat Indonesia Apprentice (MULIA) program; i. Sosialisasi <i>Basic Risk Awareness</i> dan <i>Mail Phishing</i> baik oleh SKMR maupun melalui Operational Risk Champion (ORION) yang ada di cabang dan unit kerja masing-masing. j. <i>Super Star</i> dan SPRINT: <i>Sharing session</i> bulanan memberikan <i>update</i> produk dan program. Ensure the implementation of programs to enhance human resource competency related to risk management, including: a. Muamalat Internal Certification (MIC) for frontliners; b. Refreshment Muamalat Internal Certification (MIC) for all employees; c. Basic Risk Awareness through the Induction Training Program (INTRA) conducted by SKMR. d. INTRA for Leaders; e. Region Academy for regional employees. f. Risk Management Certification (SMR); g. Customer Service (CS) Forum Training; h. Muamalat Indonesia Apprentice Teller (MULIA) Training program; i. Socialization of Basic Risk Awareness and Mail Phishing, both by SKMR and through Operational Risk Champion (ORION) in each branch and work unit; j. Super Star and SPRINT: Monthly sharing sessions to provide product and program updates.
7.	Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen. Ensure the risk management function operates independently.	Menetapkan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) pada lini pertahanan kedua berada di bawah supervisi Compliance, Risk & Legal Director yang terpisah dari unit kerja di lini pertahanan pertama dan lini pertahanan kedua. Establish a Risk Management Work Unit (SKMR) in the second line of defense, under the supervision of the Compliance, Risk & Legal Director, which is separated from the first line of defense and other second-line work units.
8.	Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan: a. Keakuratan metodologi penilaian risiko; b. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko; c. Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. d. Menetapkan kebijakan untuk menindaklanjuti temuan audit eksternal dan/atau internal; dan e. Membentuk komite yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi pengelolaan risiko. Conduct periodic reviews to ensure: a. The accuracy of risk assessment methodology; b. The adequacy of risk management information system implementation; c. The accuracy of policies, procedures, and risk limit determinations. d. Establishment of policies to address external and/or internal audit findings; and e. Establish a committee responsible for implementing risk management strategies.	Secara berkelanjutan, mengembangkan seluruh perangkat manajemen risiko, baik terhadap ketersediaan ketentuan internal, <i>tools</i> proses manajemen risiko, aktivitas bisnis maupun operasional yang dijalankan oleh seluruh lini perusahaan. Continuously develop risk management tools, ensuring their availability for internal provisions, risk management processes, and the business activities and operations of all company lines.



No.	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	Pelaksanaan Pengawasan Aktif Implementation of Active Supervision
9.	Menyetujui perhitungan internal kecukupan modal sesuai dengan profil risiko (<i>Internal Capital Adequacy Assessment Process/ICAAP</i>). Approve the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) in line with the Bank's risk profile Approve the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) in line with the Bank's risk profile	Memastikan pemenuhan kewajiban atas tingkat pengelolaan modal minimum Bank sesuai profil risikonya, serta penyampaian atas laporan ICAAP Bank kepada OJK telah sesuai dengan ketentuan. Ensure the fulfillment of obligations regarding the Bank's minimum capital management levels according to its risk profile and ensure the timely submission of the Bank's ICAAP report to the OJK in accordance with applicable regulations. Ensure the fulfillment of obligations regarding the Bank's minimum capital management levels according to its risk profile and ensure the timely submission of the Bank's ICAAP report to the OJK in accordance with applicable regulations.
C Dewan Pengawas Syariah (DPS) Sharia Supervisory Board		
1.	Melakukan evaluasi (<i>review</i>) atas kebijakan umum manajemen risiko Bank Muamalat yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Conducting an evaluation (<i>review</i>) of Bank Muamalat's general risk management policies to ensure alignment with sharia principles.	DPS telah memberikan masukan atas produk atau aktivitas yang membutuhkan opini syariah yang dilakukan baik secara tertulis maupun melalui rapat DPS yang dilaksanakan sebulan sekali, dengan agenda sebagai berikut: - Permohonan opini atas produk dan aktivitas Bank; - Ringkasan Konfirmasi Hasil Pemeriksaan (KHP) pemeriksaan OJK tahun 2023 terkait aspek syariah; - Laporan uji petik; - Laporan konsultasi syariah triwulanan; - Penyampaian SEOJK NO. 25 tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; - Tindak lanjut pelanggaran aspek syariah sebagai pengurang <i>Key Performance Indicator</i> (KPI); - Penyampaian POJK No.2 tahun 2024 terkait Tata Kelola Syariah; - Penjelasan kertas kerja DPS pada penerapan manajemen risiko; <i>Update</i> terkait <i>sharing session Dirasah Islamiyah</i>; - Laporan <i>income smooting</i>; - Temuan audit internal; <i>Update</i> pengelolaan <i>bad bank</i> di segmen Retail; - Penjelasan kertas kerja DPS pada penerapan manajemen risiko; - Restrukturisasi pembiayaan akad musyarakah; - Laporan Profil Risiko; - Rencana aksi pemulihan Bank. The Sharia Supervisory Board (DPS) provides input on products or activities requiring sharia opinions, both in writing and during monthly DPS meetings. These meetings cover the following agenda items: - Requests for opinions on Bank products and activities; - Summary of the Audit Results Confirmation (KHP) from OJK audits in 2023, focusing on sharia aspects; - Random test reports; - Quarterly sharia consultation reports. - Presentation of SEOJK No. 25 of 2023 concerning Risk Management Implementation for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units - Follow-up on sharia violations that impact Key Performance Indicators (KPI); - Introduction of POJK No. 2 of 2024 concerning Sharia Governance; - Explanation of DPS working papers on risk management implementation; - Updates on the Dirasah Islamiyah sharing session. - Income smooting report; - Internal audit findings; - Updates on bad bank management in the Retail segment. - Discussion on DPS working papers regarding risk management implementation; - Restructuring of musyarakah contract financing; - Risk Profile Report. - Bank recovery action plan.

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	Pelaksanaan Pengawasan Aktif Implementation of Active Supervision
2.	Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan pelaksanaan kebijakan umum manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Assessing the Board of Directors' accountability for implementing general risk management policies in accordance with sharia principles.	DPS mengevaluasi pelaksanaan kebijakan umum manajemen risiko yang terkait dengan prinsip syariah antara lain melalui rapat DPS yang dilakukan sebulan sekali, laporan berkala atas uji petik DPS serta memberikan saran perbaikan dan masukan kepada Direksi. DPS evaluates the implementation of general risk management policies in relation to sharia principles, including through DPS meetings held once a month, periodic reports on DPS random checks, and provides suggestions for improvement and input to the Board of Directors.
3.	Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan manajemen bisnis syariah mengenai hal-hal terkait dengan prinsip syariah. Providing advice and recommendations to the Board of Directors and sharia business management on matters related to the adherence to sharia principles.	Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan manajemen bisnis syariah terkait prinsip syariah yang dijalankan oleh Bank yang disampaikan antara lain melalui rapat DPS. It also offers advice and recommendations on sharia principles to the Board of Directors and sharia business management, conveyed through DPS meetings.

KECUKUPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO SERTA PENETAPAN LIMIT RISIKO

BMI telah memiliki struktur organisasi yang layak, antara lain melalui pembentukan unit kerja Internal Audit dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Unit kerja tersebut untuk mendukung Bank dalam penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang memadai. Bank senantiasa memastikan bahwa kebijakan dan prosedur terkait manajemen risiko serta penetapan limit risiko telah memadai, sebagaimana penjelasan di bawah ini.

Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko di BMI berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.65/POJK.03/2016 dan SEOJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penerapan manajemen risiko di internal Bank mengacu pada:

1. Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR), yang menjadi pilar dan acuan dasar dalam penyusunan seluruh ketentuan internal Bank;
2. Kebijakan Umum Sistem Pengendalian Internal;
3. *Good Corporate Governance* (GCG);
4. *Code of Conduct* (Kode Etik);
5. Budaya Perusahaan, yaitu Islami, Modern dan Profesional (IDEAL).

DEQUACY OF RISK MANAGEMENT POLICIES AND PROCEDURES AND RISK LIMIT DETERMINATION

BMI has established an appropriate organizational structure, which includes the establishment of an Internal Audit work unit and a Risk Management Work Unit (SKMR). These units have an important role in supporting the Bank's efforts to implement effective risk management and internal control. The Bank consistently ensures that its policies and procedures related to risk management and the determination of risk limits are adequate, as outlined below.

Risk Management Policy and Procedures

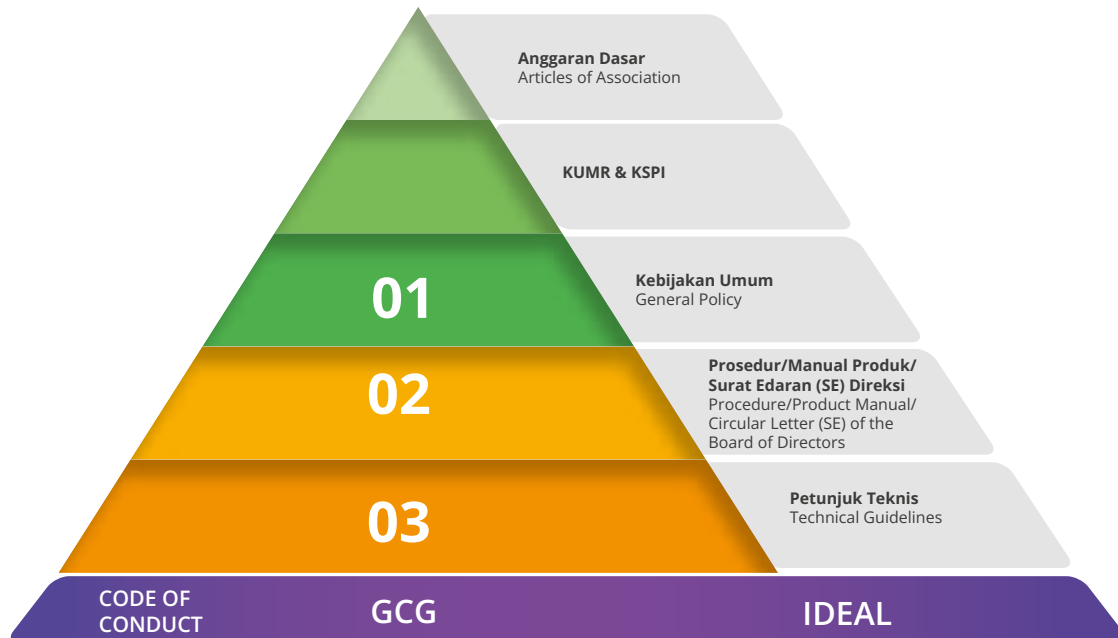
The implementation of risk management at BMI is guided by the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 65/POJK.03/2016 and OJK Circular Letter No. 25/SEOJK.03/2023 concerning the Risk Management implementation for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The risk management implementation at the Bank is based on the following:

1. General Risk Management Policy (KUMR): This serves as the core and primary reference for the establishment of all internal provisions at the Bank;
2. General Policy of Internal Control System
3. Good Corporate Governance (GCG);
4. Code of Conduct;
5. Corporate Culture: Defined as Islamic, Modern, and Professional (IDEAL).



Hierarki atas ketentuan terkait manajemen risiko di BMI mengikuti hierarki ketentuan internal yang berlaku di Bank, dengan urutan sebagai berikut:

The hierarchy of provisions related to risk management at BMI follows the structure of internal provisions at the Bank, in the following order:



1. Level 1 – Kebijakan Umum

Merupakan kebijakan tertinggi yang bersifat *high level*, strategis dan jangka panjang (tidak cepat berubah), serta berisikan filosofi dan prinsip-prinsip dasar yang berlaku secara menyeluruh (*bank wide*) dan menjadi landasan bagi ketentuan di bawahnya.

2. Level 2 – terdiri dari:

- a. **Prosedur** adalah ketentuan khusus dan alur proses dari awal hingga akhir (*end to end*) dari suatu aktivitas, kegiatan operasional, bisnis, maupun pengendalian sebagai bentuk penerapan kebijakan yang dijadikan acuan.
- b. **Manual Produk** adalah ketentuan yang mengatur fitur, syarat dan ketentuan atas suatu produk dan jasa.
- c. **Surat Edaran (SE) Direksi** merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan program bisnis atau ketentuan internal yang bersifat mendesak untuk diberlakukan dari sisi waktu maupun urgensinya, di mana belum ada Prosedur atau Manual Produk yang mengatur.

1. Level 1 – General Policy

This is the highest-level policy, strategic, and long-term in nature (stable over time), containing the philosophy and basic principles that apply comprehensive (bank wide). It serves as the foundation for the provisions outlined below.

2. Level 2 – Consists of:

- a. **Procedures:** These are specific provisions and process flows that cover an activity, operational activities, business process, or control from end to end, serving as a reference for policy implementation.
- b. **Product Manual:** This provision outlines the features, terms, and conditions of a product or service.
- c. **Board of Directors' Circular (SE):** This is a communication tool used to convey urgent business programs or internal provisions that need to be implemented quickly, especially when there are no existing Procedures or Product Manuals to address them.

3. Level 3 – Petunjuk Teknis

Merupakan ketentuan yang dapat disusun apabila diperlukan oleh unit pemilik ketentuan. Dalam petunjuk teknis dijelaskan secara teknis tata cara penggunaan suatu media, aplikasi, sistem dan/atau *tools* lainnya untuk mempermudah unit kerja terkait melakukan suatu proses atau kegiatan atau penggunaan suatu *tools*. Ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis bersifat *risk-free*, artinya tidak diperkenankan mengandung risiko tambahan dari Ketentuan Internal yang telah diatur dalam Prosedur yang menjadi acuan.

Kebijakan dan Prosedur

BMI selalu melakukan *review* secara berkala terhadap efektivitas kebijakan dan prosedur yang dilakukan oleh pemilik ketentuan internal, yang berkoordinasi dengan unit kerja terkait. Dalam pelaksanaannya, organisasi memperhatikan masukan dari hasil pemeriksaan unit internal audit dan auditor eksternal dalam rangka perbaikan proses dan prosedur internal.

Metode lain untuk melihat efektivitas atas kebijakan dan prosedur adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit Internal Audit yang secara berkala melakukan pemeriksaan secara *sampling* terhadap kantor cabang atau kantor cabang pembantu, maupun audit tematik di kantor pusat dan juga melakukan audit sesuai jadwal dan rencana yang ditetapkan. Atas kebijakan dan prosedur yang dipandang tidak efektif dan/atau tidak relevan lagi berdasarkan *review* berkala, dilakukan penyempurnaan lebih lanjut yang dilakukan oleh pemilik ketentuan.

Ketentuan internal BMI dapat diakses melalui portal internal Baitul Ilmi Muamalat yang mulai digunakan sejak tahun 2023. Untuk memastikan bahwa ketentuan internal dilakukan *review* dan/atau diperbarui sesuai kebutuhan, dilakukan pemberian *reminder* kepada seluruh unit kerja pemilik ketentuan untuk melakukan *review* secara berkala atas ketentuan yang dimilikinya melalui *e-mail*.

3. Level 3 – Technical Guidelines

These are provisions that can be implemented if necessary by the unit responsible for them. Technical guidelines are detailed procedures for using media, applications, systems, or other tools that help related work units in carrying out processes, activities, or utilizing tools more efficiently. The provisions outlined in the Technical Guidelines are considered risk-free, which means they cannot involve additional risks from the Internal Provisions regulated in the Procedures that serve as a reference.

Policies and Procedures

BMI regularly conducts reviews to assess the effectiveness of its policies and procedures in coordination with the relevant work units responsible for internal provisions. During implementation, the organization takes into account feedback from the review result of the internal audit unit and external auditors to improve internal processes and procedures.

Another method to evaluate the effectiveness of these policies and procedures is through inspections by the Internal Audit unit. This unit performs periodic sampling inspections of branch offices, sub-branch offices, and thematic audits at the head office, in addition to conducting audits as per the specified schedule and plan. For policies and procedures identified as ineffective or irrelevant during periodic reviews, improvements are made by the respective provision owners.

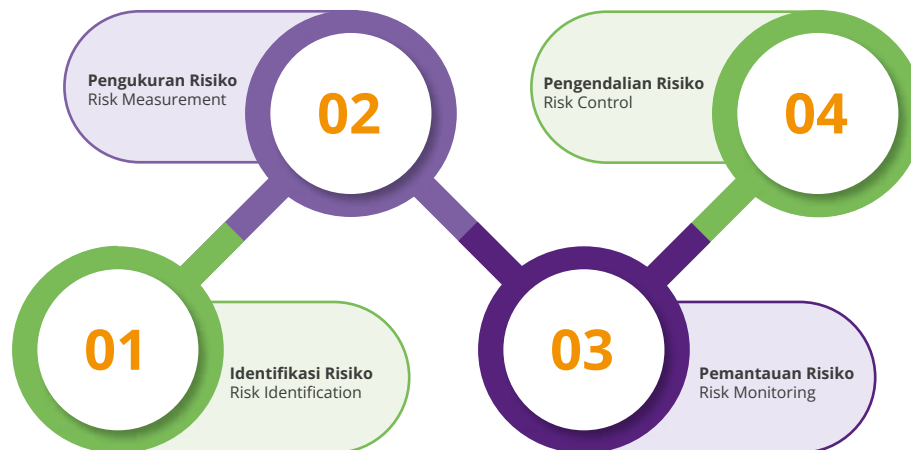
BMI's internal provisions are accessible through the Baitul Ilmi Muamalat internal portal, which has been in operation since 2023. To ensure these provisions are reviewed and updated as necessary, reminders are sent to all work units via e-mail, prompting them to periodically review their respective provisions.



KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko yang melekat pada aktivitas perusahaan dengan maksud memberikan nilai tambah yang berkelanjutan secara maksimal terhadap keseluruhan aktivitas. Proses manajemen risiko BMI digambarkan sebagai berikut:



1. Identifikasi Risiko

Bertujuan untuk mengetahui seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap produk, aktivitas layanan dan aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Bank.

2. Pengukuran Risiko

Bertujuan untuk mengetahui besaran risiko yang melekat pada aktivitas Bank untuk dibandingkan dengan *risk appetite* Bank sehingga Bank dapat mengambil tindakan mitigasi risiko, dan menentukan modal untuk mengcover residual risiko.

3. Pemantauan Risiko

Dilakukan dengan membandingkan limit risiko dengan eksposur risiko yang dihadapi.

4. Pengendalian Risiko

Bentuk pelaksanaan mitigasi atas potensi risiko yang ada.

ADEQUACY OF RISK IDENTIFICATION, MEASUREMENT, MONITORING, AND CONTROL PROCESS AND RISK MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

Risk Management Process

The risk management process is designed to manage the risks inherent in the company's activities, ensuring that maximum sustainable added value is delivered across all operations. The risk management process at BMI is outlined as follows:

1. Risk Identification

This process aims to identify all types of risks inherent in each product, service, and functional activity that could potentially harm the Bank.

2. Risk Measurement

The goal is to assess the magnitude of risks inherent in the Bank's activities, comparing them with the Bank's risk appetite. This helps the Bank take appropriate mitigation actions and determine the capital required to cover residual risks.

3. Risk Monitoring

This involves comparing the risk limits with the actual risk exposure.

4. Risk Control

The implementation mitigation of potential risks that have been identified.

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, Bank mengembangkan sistem informasi manajemen risiko secara berkesinambungan sesuai dengan meningkatnya perkembangan dan kompleksitas bisnis Bank.

Sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki oleh BMI, diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Laporan internal Bank;
2. Laporan Profil Risiko;
3. Laporan *Risk Based Bank Rating* (RBBR);
4. Laporan Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko;
5. Laporan Portofolio Pembiayaan secara *bankwide* dan per segmen bisnis;
6. Laporan Risiko Operasional;
7. *Liquidity Key Risk Indicator* (LKRI) untuk risiko likuiditas, dan laporan-laporan lainnya.

Laporan-laporan tersebut dapat dijadikan sebagai sumber yang mendukung untuk pengambilan keputusan oleh manajemen.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL YANG MENYELURUH

Implementasi sistem pengendalian internal dilakukan secara melekat pada masing-masing unit kerja yang merupakan lini pertahanan pertama manajemen risiko. Pelaksanaan sistem pengendalian internal didukung oleh ketentuan dan kerangka yang dikembangkan oleh fungsi lini pertahanan kedua manajemen risiko. Kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal dikaji ulang secara berkala oleh unit kerja audit internal yang merupakan lini pertahanan ketiga manajemen risiko.

Selama tahun 2024, peran dan efektivitas unit kerja audit internal untuk memberikan nilai tambah bagi proses bisnis dan operasional sebagai berikut:

1. Merencanakan audit berbasis risiko yang selaras dengan strategi, tujuan, dan fokus risiko Bank;
2. Menerapkan pendekatan *thematic audit* untuk mendorong peningkatan efektivitas terhadap identifikasi kebutuhan perbaikan pengelolaan risiko dan kontrol;
3. Melakukan diskusi dan pembahasan dalam rangka upaya perbaikan kecukupan dan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian, berkoordinasi dengan SKMR dan Kepatuhan *Compliance* (CPL);
4. Pada tahun 2024, dilakukan penggabungan fungsi *Operation Control* (OPC) yang semula berada di bawah unit *Operation Strategy & Control* (OSR) menjadi di bawah fungsi internal audit. dengan bergabungnya fungsi OPC ke dalam fungsi internal audit dengan lokasi yang

Risk Management Information System

To support risk identification, measurement, monitoring, and control, the Bank continuously develops its risk management information system in line with the increasing development and complexity of its business.

The Bank's risk management information system is reflected in the following forms:

1. Internal Bank Report;
2. Risk Profile Report;
3. Risk-Based Bank Rating (RBBR) Report
4. Minimum-Capital Requirements Report based on Risk Profile
5. Financing Portfolio Reports Bankwide and by Business Segment;
6. Operational Risk Report;
7. Liquidity Key Risk Indicator (LKRI) for liquidity risk, and aother reports.

These reports serve as valuable resources to support management decision-making.

COMPREHENSIVE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The internal control system is implemented within each work unit, serving as the first line of defense in risk management. This system is supported by provisions and frameworks developed by the second line of defense function for risk management. The adequacy and effectiveness of the internal control system are periodically assessed by the internal audit unit, which functions as the third line of defense for risk management.

In 2024, the internal audit unit's role and effectiveness to provide added value to business and operational processes are outlined as follows:

1. Planning risk-based audits that align with the Bank's strategy, goals, and risk priorities;
2. Adopting a thematic audit approach to enhance the effectiveness of identifying areas for improvement in risk management and control;
3. Engaging in discussions and deliberations to improve the adequacy and effectiveness of governance, risk management, and control, in collaboration with SKMR and Compliance (CPL);
4. In 2024, the Operational Control (OPC) function, previously part of the Operation Strategy & Control (OSR) unit, is integrated into the internal audit function. This merger will expand the scope of audits, covering both thematic audits (systemic risks) and unit-based audits



tersebar di beberapa cabang di seluruh Indonesia, maka ruang lingkup audit tidak hanya dilakukan berdasarkan tematik audit (*systemic risk*) namun juga berdasarkan *unit-based audit* (*non-systemic risk*);

5. Secara umum *unit-based audit* dilakukan oleh tim Resident Audit (RA) dengan siklus pemeriksaan 1 (satu) atau 2 (dua) bulan sekali atas setiap unit kerja cabang atau Kantor Cabang Pembantu (KCP) (*non-systemic risk*).

(*non-systemic risks*), with locations across branches in Indonesia.

5. Typically, unit-based audits are conducted by the Resident Audit (RA) team, with an inspection cycle of one or two months for each branch unit or Sub-Branch Office (KCP) (*non-systemic risks*).

PENERAPAN BUDAYA MANAJEMEN RISIKO

BMI memandang bahwa internalisasi budaya manajemen risiko sangat penting untuk mendukung pelaksanaannya. Berikut adalah rangkaian penerapan budaya manajemen risiko yang dijalankan oleh Bank.

1. Prinsip

Landasan inti yang kuat diperlukan dalam penerapan manajemen risiko yang efektif pada semua lini guna menanamkan prinsip kehati-hatian dan nilai-nilai penting suatu risiko kepada seluruh sumber daya manusia yang dimiliki. Kesadaran pentingnya penerapan risiko diharapkan dapat menjadi panduan dalam menjalankan setiap aktivitas, baik terhadap risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko lainnya.

2. Sosialisasi

Pada tahun 2024, BMI telah menjalankan berbagai program dan inisiasi secara berkelanjutan, yang bertujuan untuk mengembangkan budaya risiko di lingkungan kerja, beberapa program dan inisiatif yang dijalankan antara lain mencakup:

- a. Menyampaikan materi *awareness* melalui *e-mail blast* kepada seluruh karyawan. Materi *risk awareness* dalam bentuk *email blast/ campaign*, antara lain :
 - 1) Bahaya *link* penipuan;
 - 2) Pencatatan Loss Event Database (LED) melalui aplikasi Operational Risk Database Integrated Tools (ORBIT);
 - 3) *Dual Control & Dual Custody*: Satu Pengamanan Tak Cukup, Dua Lebih Aman;
 - 4) Kerahasiaan Data Nasabah;
 - 5) Prinsip Pengendalian Selisih Kas;
 - 6) Pencatatan Kejadian Risiko Operasional (KRO) melalui aplikasi ORBIT.
- b. Pelaksanaan dan pemberdayaan *Operational Risk Champion* (ORION) untuk mendorong unit kerja melakukan proses identifikasi risiko yang melekat pada semua aktivitas unit kerja dan memastikan bahwa tindak lanjut perbaikan dilakukan;
- c. Menyampaikan sosialisasi atas ketentuan yang berlaku untuk memastikan bahwa ketentuan dipahami oleh seluruh unit kerja terkait;

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT CULTURE

BMI recognizes the importance of internalizing a risk management culture to support its effective implementation. Below is a summary of the Bank's efforts in fostering this culture:

1. Principle

A strong core foundation is essential for effective risk management across all levels, ensuring that all personnel understand the principles of prudence and the importance of risk. By raising awareness of the importance of managing risks, the Bank aims to guide all activities, including those related to operational risk, compliance risk, and other types of risk.

2. Socialization

In 2024, BMI has implemented various programs and initiatives on an ongoing basis, which aim to develop a risk culture in the work environment, some of the programs and initiatives carried out include:

- a. Delivering awareness materials through email campaigns to all employees. These materials covered topics such as:
 - 1) The risks of fraudulent links;
 - 2) Recording Loss Event Database (LED) through the Operational Risk Database Integrated Tools (ORBIT) application;
 - 3) Dual Control & Dual Custody: One Security is Not Enough, Two are more secure;
 - 4) Customer Data Confidentiality;
 - 5) Principles of Cash Difference Control;
 - 6) Recording of Operational Risk Events (KRO) through the ORBIT application.
- b. Implementation and empowerment of Operational Risk Champions (ORION) to encourage work units in identifying risks inherent in all work unit activities and ensuring necessary follow-up improvements are carried out;
- c. The socialization of applicable regulations to guarantee all relevant work units understand and adhere to the provisions;

- d. Pelaksanaan sertifikasi manajemen risiko yang dilakukan berdasarkan prioritas yang ditetapkan dan mengacu pada ketentuan regulator yang berlaku;
- e. Pelaksanaan *sharing session* terkait dengan manajemen risiko;
- f. Pelaksanaan sosialisasi terkait *operational risk awareness* dan *mail phishing* di cabang dan unit kerja untuk tahun 2024, baik oleh unit Manajemen Risiko maupun melalui ORION yang ada di cabang dan unit kerja masing-masing. Pada tahun 2024 juga ditambahkan tema-tema baru terkait *risk awareness*, antara lain:
 - 1) *Cyber Risk*;
 - 2) *Politically Exposed Person (PEP) & Sanction*;
 - 3) Pinjaman *Online* dan Judi *Online*;
 - 4) *Clear Screen* dan *Dual Control*;
 - 5) Layanan Satu Atap (Lasatap);
- 6) Mitigasi risiko gempa bumi.
- g. Pelaksanakan *Muamalat Internal Certification (MIC)* dengan topik antara lain mengenai manajemen risiko, *Code of Conduct*, *Corporate Values*, Anti Fraud, Anti Pencucian Uang – Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), *Health, Safety and Environment (HSE)* dan pada tahun 2024 ditambahkan MIC terkait *Cyber Risk Awareness*;
- h. Menyampaikan *anti-fraud campaign* melalui *email blast* dan sosialisasi.

3. Pengembangan

Pengembangan budaya risiko di Bank dilakukan dengan, antara lain:

- a. Pelaksanaan *risk forum* di unit kerja secara rutin untuk membahas *risk issue* yang muncul dan bentuk perbaikan yang telah dan akan dilakukan;
- b. Pengembangan *operational risk tools* seperti melakukan kajian pada *Key Risk Indicator (KRI)*, *Risk & Control Self Assessment (RCSA)* dan parameter pengukuran risiko operasional;
- c. Pengembangan Loss Event Database (LED) berupa aplikasi *Operational Risk Database Integrated Tools (ORBIT)* sebagai sarana pelaporan kejadian risiko operasional yang digunakan untuk seluruh unit kerja dalam melakukan pelaporan rutin setiap bulan, baik jika ada kejadian risiko operasional maupun nihil;
- d. Penginian ketentuan internal terkait risiko kredit, risiko pasar dan kejadian risiko operasional;
- e. Implementasi *Fraud Detection System (FDS)* untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan menggunakan *tools* yang dikembangkan oleh internal Bank.

- d. Risk management certification is carried out based on established priorities and in accordance with applicable regulatory guidelines;
- e. Implementation of sharing sessions related to risk management;
- f. In 2024, the Bank implemented socialization activities on operational risk awareness and phishing email across branches and work units. These activities were conducted by the Risk Management unit and through ORION in each branch and work unit. Additionally, new topics on risk awareness were introduced in 2024, such as:
 - 1) Cyber Risk;
 - 2) Politically Exposed Person (PEP) & Sanctions;
 - 3) Online Loans and Online Betting;
 - 4) Clear Screen dan Dual Control;
 - 5) Integrated Service or "Layanan Satu Atap" (Lasatap);
 - 6) Earthquake Risk Mitigation.
- g. Implementation of Muamalat Internal Certification (MIC), covering topics such as Risk Management, Code of Conduct, Corporate Values, Anti-Fraud, Anti-Money Laundering, Countering the Financing of Terrorism (APU-PPT), Health, Safety, and Environment (HSE), with the addition of Cybersecurity Risk Awareness MIC in 2024.
- h. Conducting anti-fraud awareness campaigns through email blasts and socialization.

3. Development

The development of risk culture in the Bank is carried out by, among other things:

- a. Regular risk forums within work units to discuss emerging risk issues and identify improvements that have been or will be carried out;
- b. Development of operational risk tools, such as review on Key Risk Indicators (KRI), Risk & Control Self-Assessment (RCSA), and parameters for measuring operational risk;
- c. Development of the Loss Event Database (LED) through the Operational Risk Database Integrated Tools (ORBIT) application, used by all work units for monthly reporting of operational risk events, whether incidents occur or not;
- d. Updating internal policies concerning credit risk, market risk, and operational risk events;
- e. Implementation of the Fraud Detection System (FDS) to identify suspicious transactions using tools developed internally by the Bank.



TINJAUAN EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Pada tahun 2024, efektivitas sistem manajemen risiko Bank telah berjalan efektif. Dewan Komisaris dan Direksi dibantu oleh komite di bawahnya serta DPS telah menjalankan perannya secara aktif. Secara berkala, seluruh organ tersebut melaksanakan pertemuan untuk membahas dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Penilaian efektivitas sistem manajemen risiko tersebut dikaji berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko telah dimiliki oleh Bank. Kebijakan dan prosedur diatur dalam hierarki ketentuan internal Bank di atas. Limit risiko telah diimplementasikan oleh Bank antara lain dalam bentuk limit risiko kewenangan memutus pembiayaan, limit alokasi pembiayaan untuk meminimalkan terjadinya risiko konsentrasi pembiayaan, limit dealer untuk melakukan transaksi treasury, dan limit lain terkait operasional Bank;
2. Perkembangan eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank dipantau secara berkala dan dilaporkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam bentuk laporan dan/atau presentasi di rapat Direksi atau Dewan Komisaris, atau rapat komite level Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko telah dilakukan oleh unit-unit kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh telah dilaksanakan oleh unit Internal Audit dalam bentuk pelaksanaan audit berkala maupun audit tematik dan dilaksanakan juga dalam bentuk kajian independen yang dilakukan oleh SKMR atas produk, program, proses dan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja pemilik produk, proses, program dan aktivitas.

Evaluasi atas efektivitas manajemen risiko juga dilakukan melalui laporan berkala yang dikirimkan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan DPS dalam Laporan Profil Risiko dan Laporan Risk Based Bank Rating (RBRR).

Risk Appetite

Penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance* dapat membantu Bank untuk mencapai target bisnis yang ingin dicapai. Dalam implementasinya, bisa dilakukan secara dua arah, yakni *bottom up* dan *top down*. *Risk appetite* dan *risk tolerance* Bank dituangkan dalam bentuk antara lain *target market*, *risk acceptance criteria* dan limit-limit risiko serta *threshold*.

REVIEW OF RISK MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS

In 2024, the Bank's risk management system has been functioning efficiently. The Board of Commissioners and the Board of Directors, with support from their committees and the DPS, have been actively fulfilling their responsibilities. Regular meetings are held by all of these bodies to discuss and offer recommendations to the Board of Commissioners and the Board of Directors.

The evaluation of the risk management system's effectiveness is examined based on the following:

1. The Bank has established policies, procedures, and risk limit determination. These policies and procedures are outlined in the Bank's internal regulation hierarchy. Risk limits have been implemented by the Bank, such as those governing decision-making authority on financing, limits on financing allocations to minimize concentration risk, dealer limits for treasury transactions, and other operational limits;
2. The Bank monitors the development of risk exposures on a regular basis and reports them to the Board of Directors or the Board of Commissioners through reports and/or presentations at the Board of Directors or Board of Commissioners meetings, or committee meetings at the Board of Directors and Board of Commissioners level;
3. Work units have carried out the identification, measurement, monitoring, and control of risks in accordance with their respective duties and responsibilities.
4. A comprehensive internal control system is in place, executed by the Internal Audit unit through periodic and thematic audits, as well as independent studies conducted by SKMR on products, programs, processes, and activities carried out by the relevant work units.

The effectiveness of risk management is also assessed through regular reports, including the Risk Profile Report and Risk Based Bank Rating (RBRR) Report, which are submitted to the Board of Commissioners, Board of Directors, and DPS.

Risk Appetite

Defining risk appetite and risk tolerance can help the Bank to meet its business objectives. There are two approaches to implementing this: bottom-up or top-down. The Bank's risk appetite and tolerance are reflected through factors such as target markets, risk acceptance criteria, and risk limits and thresholds.

Dalam menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance*, Bank mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis serta kemampuan dalam mengambil risiko (*risk bearing capacity*). Apabila terjadi perubahan atas kondisi Bank Muamalat dan/atau kondisi eksternal, limit dapat disesuaikan lebih cepat sehingga selalu terbaru dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Stress Test

Stress test atas risiko kredit, likuiditas, pasar dan operasional dilakukan secara berkala oleh SKMR. Stress test dimaksud dilakukan untuk melihat kerentanan kondisi permodalan Bank terhadap kondisi stress yang mungkin dihadapi. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan stress test tahun buku 2024 antara lain:

1. Stress test atas risiko likuiditas dengan menggunakan asumsi adanya kebutuhan penyaluran pembiayaan, kemungkinan penarikan dana oleh nasabah dilihat dari *behaviour* maupun kontraknya.
2. Stress test atas risiko pasar antara lain dengan menggunakan asumsi perubahan nilai tukar tertentu terhadap Posisi Devisa Neto (PDN) Bank.
3. Stress test atas risiko kredit terkait dampak berakhirnya restrukturisasi COVID-19, dengan data Maret 2024.
4. Stress test risiko operasional dengan melakukan:
 - a. Simulasi *Business Continuity Plan* (BCP) *site* terkait *payment service & development*, dengan cakupan uji coba sebagai berikut:
 - 1) Test call tree terkait eskalasi gangguan non IT berupa terkendalanya akses ke kantor pusat karena banjir.
 - 2) Evakuasi sebagian karyawan unit kritikal, yakni E-Channel Operations ke lokasi BRC;
 - 3) Proseduk *workaround* sesuai dengan BCP yang berlaku di unit E-Channel Operations;
 - b. Simulasi tanggap darurat gempa bumi di kantor pusat.
 - c. Uji keamanan siber menggunakan skenario berupa aktivasi Honeypot pada jaringan BMI. Honeypot adalah strategi pertahanan untuk menarik perhatian penyerang dan mengidentifikasi serangan yang mungkin tidak terdeteksi oleh sistem pertahanan lainnya, seperti *firewall* atau *Intrusion Detection System* (IDS).

When determining risk appetite and risk tolerance, the Bank takes into account its business strategies, goals, and risk bearing capacity. In the event of changes in Bank Muamalat's internal conditions or external factors, the limits can be adjusted promptly to ensure they remain current and aligned with the prevailing circumstances.

Stress Test

Stress tests for credit, liquidity, market, and operational risks are regularly conducted by the SKMR. These tests are designed to assess the vulnerability of the Bank's capital under stressful conditions that may arise. The assumptions used for the 2024 financial year stress test include:

1. Liquidity Risk Stress Test: This test is based on assumptions about the need for financing disbursement and the possibility of customer fund withdrawals, considering customer behaviour and contracts.
2. Market Risk Stress Test: This includes assumptions regarding certain changes in exchange rates on the Bank's Net Open Position (PDN).
3. Credit Risk Stress Test: This focuses on the effects of the end of the COVID-19 restructuring, using data from March 2024.
4. Operational Risk Stress Test: This involves several simulations:
 - a. Business Continuity Plan (BCP) Simulation for payment services and development, including:
 - 1) A call tree test related to non-IT disruptions escalation, such as limited access to the head office due to flooding.
 - 2) Evacuating some critical unit employees, specifically E-Channel Operations, to the BRC location.
 - 3) Implementing workaround procedures as outlined in the BCP for the E-Channel Operations unit.
 - b. Earthquake emergency response simulation at the head office.
 - c. Cyber Security Test: This scenario involves activating a Honeypot on the BMI network. A Honeypot is a defense strategy used to attract the attention of attackers and identify attacks that might not be detected by other defense systems, such as firewalls or Intrusion Detection Systems (IDS).



Limit Risiko

Dalam menetapkan limit risiko, Bank menyesuaikannya dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi Bank secara keseluruhan. Hal tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, histori kerugian di masa lalu, kemampuan sumber daya manusia, dan kepatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

Limit tersebut dikomunikasikan dengan baik kepada setiap pihak yang terkait agar dapat dipahami secara bersama-sama. Penetapan limit dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan risiko, yang mencakup limit secara keseluruhan, limit per risiko, dan limit per aktivitas bisnis Bank yang memiliki eksposur risiko.

Limit risiko yang ditetapkan oleh Direksi diimplementasikan sebagai bagian dari pemantauan dan pengendalian risiko Bank. Untuk memastikan bahwa limit risiko yang diterapkan masih sesuai dengan risk appetite Bank dan perubahan lingkungan bisnis, maka Bank memastikan dilakukannya proses kaji ulang atas limit risiko secara berkala, sesuai dengan prosedur Bank yang berlaku.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAU KOMITE AUDIT ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Pada tahun 2024, Bank telah berupaya maksimal dalam memastikan kecukupan sistem manajemen risiko, antara lain melalui penerapan tata kelola manajemen risiko, hasil kajian, kerangka manajemen risiko, ketentuan internal, limit risiko yang dikaji secara berkala dan pelaksanaan pengendalian internal, yang didukung dengan infrastruktur yang memadai. Inisiatif tersebut dilakukan terhadap untuk semua jenis risiko yang dihadapi agar tingkat risikonya dapat dikelola dan diukur.

Penyampaian hasil pengelolaan manajemen risiko Bank kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS telah dilakukan melalui media yang tersedia secara konsisten dan tepat waktu sebagai sarana pengambilan keputusan.

Penerapan manajemen risiko di seluruh lini Bank dilaksanakan secara aktif dalam bentuk mengidentifikasi risiko inheren dan memastikan kecukupan kontrol telah dilakukan. Hal ini diperkuat dengan adanya budaya risiko yang secara berkelanjutan ditekankan, baik dalam aktivitas bisnis, maupun operasional.

Dengan berbagai pertimbangan itu, Direksi, Dewan Komisaris, maupun DPS serta organ lain yang dalam organisasi manajemen risiko Bank, meyakini bahwa

Risk Limits

When establishing risk limits, the Bank tailors them to align with the level of risk it is willing to accept, its risk tolerance, and overall strategy. This process also takes into account the Bank's capacity to absorb potential risk or losses, past loss history, human resource capabilities, and adherence to relevant internal and external regulations.

These limits are clearly communicated to all relevant parties to ensure mutual understanding. The determination of limits is carried out in a comprehensive manner, addressing all risk-related factors, including overall limits, specific limits for each risk type, and limits for each business activity with associated risk exposure.

The risk limits set by the Board of Directors are implemented as part of the Bank's risk monitoring and control systems. To ensure that the risk limits remain aligned with the Bank's risk appetite and the evolving business environment, the Bank ensures that periodic reviews of the risk limits are conducted in line with its established procedures.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR THE BOARD OF COMMISSIONERS OR THE AUDIT COMMITTEE ON THE ADEQUACY OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

In 2024, the Bank has made significant efforts to ensure the adequacy of its risk management system. This includes the implementation of risk management governance, review result, risk management frameworks, internal regulations, and risk limits that are periodically reviewed, as well as the application of internal controls, all supported by the necessary infrastructure. These initiatives address all types of risks the Bank encounters to ensure that risk levels are effectively managed and assessed.

The results of the Bank's risk management activities are consistently and promptly communicated to the Board of Directors, Board of Commissioners, and DPS, using available channels, as a means of decision-making.

Risk management is actively implemented across all areas of the Bank, including the identification of inherent risks and the assurance that appropriate controls are in place. This is further strengthened by a risk-aware culture that is continuously emphasized in both business and operational activities.

Based on these factors, the Board of Directors, Board of Commissioners, DPS, and other stakeholders in the Bank's risk management structure believe that the risk management

sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh BMI telah memadai. Kendati demikian, Bank akan terus mengevaluasi penerapannya seiring dengan perkembangan usaha Bank serta industri.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan, struktur konglomerasi keuangan antara BMI sebagai entitas utama dengan PT Al-Ijarah Finance (ALIF) sebagai anggota konglomerasi tidak berlaku lagi mengingat struktur konglomerasi keuangan yang terjalin tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh OJK sebagai konglomerasi keuangan.

Penghapusan kewajiban Bank dalam struktur konglomerasi keuangan bersama dengan ALIF disampaikan melalui surat Bank kepada OJK dengan Nomor 175/B/CPD-SRT/XII/2020 terkait Pemberitahuan Pembubaran Konglomerasi Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Meskipun demikian, pemantauan perkembangan grup keuangan BMI tetap dilakukan melalui penyampaian tertulis melalui Laporan Data Grup Keuangan kepada OJK hingga periode Juni 2024.

BMI merealisasikan rencana perbaikan strategis atas ALIF, berupa pencabutan ijin usaha, sebagaimana arahan yang diberikan oleh OJK melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-20/D.06/2023 tanggal 24 Oktober 2023. Dengan dicabutnya izin usaha ALIF ini maka BMI terhitung sejak Desember 2023 hingga saat ini, sudah tidak lagi menyampaikan laporan Data Grup Keuangan kepada OJK.

PENGELOLAAN RISIKO UTAMA BANK

Risiko Kredit

Pengungkapan Eksposur dan Penerapan Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank, terutama dari penyaluran pembiayaan. Bank juga menghadapi risiko kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antarbank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar serta kewajiban komitmen dan kontinjensi.

system in place at BMI is sufficient. However, the Bank will continue to evaluate its effectiveness as its business and the industry evolve.

IMPLEMENTATION OF INTEGRATED RISK MANAGEMENT

In line with the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 45/POJK.03/2020 on Financial Conglomerates, the financial conglomerate structure between BMI as the parent company and PT Al-Ijarah Finance (ALIF) as a member of the conglomerate is no longer valid, as it no longer meets the criteria set by OJK for a financial conglomerate.

The Bank formally communicated the termination of its obligations in the financial conglomerate structure with ALIF through a letter to OJK, No. 175/B/CPD-SRT/XII/2020, regarding the Notification of Dissolution of the financial conglomerate of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. However, monitoring of BMI's financial group continues, with written submissions of the Financial Group Data Report to OJK up until June 2024.

BMI has implemented a strategic improvement plan for ALIF, which includes the revocation of its business license, as mandated by OJK in the Decree of the OJK Board of Commissioners Number KEP-20/D.06/2023 dated 24 October 2023. Following the revocation of ALIF's business license, BMI has ceased submitting Financial Group Data reports to OJK from December 2023 onward.

MANAGEMENT OF THE BANK'S MAJOR RISK

Credit Risk

Disclosure of Exposure and Implementation of Credit Risk Management

Credit risk refers to the risk resulting from the failure of customers or other parties to meet their obligations to the Bank as per the agreed terms. This includes risks from debtor default, credit concentration risk, counterparty credit risk, and settlement risk.

Credit risk can arise from various Bank business activities, especially from financing disbursement. The Bank also faces credit risk from various financial instruments such as securities, acceptances, interbank transactions, trade financing transactions, exchange rate transactions, and commitment and contingency obligations.



Kerangka Manajemen Risiko Kredit

1. Bank telah memiliki ketentuan pembiayaan, mulai dari level Kebijakan, Prosedur/Manual Produk, dan Petunjuk Teknis terkait pembiayaan yang dikaji secara berkala.
2. Menetapkan organisasi terkait risiko kredit dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terkait dengan pembiayaan;
3. Limit kewenangan memutus pembiayaan ditetapkan dan dikaji secara berkala sesuai dengan perkembangan organisasi dan ditetapkan berjenjang sesuai segmen pembiayaan.
4. Ketentuan *Target Market* dan *Financing Allocation Limit* (FAL) serta *Target Market* dan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) sebagai panduan dalam melakukan pembiayaan telah diperbarui secara berkala dan diimplementasikan, terutama untuk segmen pembiayaan produktif.
5. Ketentuan pembiayaan, terkait produk, program dan proses pembiayaan diperbarui dan diimplementasikan, termasuk ketentuan RAC untuk segmen *Consumer*.
6. Mengimplementasikan BMPD internal sebagai *soft limit* untuk memastikan bahwa Bank mematuhi ketentuan mengenai BMPD yang berlaku.

Organisasi Manajemen Risiko Kredit

Dalam rangka mengelola aktivitas pembiayaan Bank untuk meminimalkan risiko kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan, BMI telah memiliki organisasi manajemen risiko kredit sebagai berikut:

Credit Risk Management Framework

1. The Bank has financing guidelines, starting with its policies, product manuals/procedures, and technical guidelines, all of which are regularly reviewed.
2. Establishing an organization related to credit risk, outlining the roles and responsibilities of each party involved in financing;
3. The limit of authority to decide on financing is determined and reviewed periodically in accordance with the development of the organization and is determined in phases according to the financing segment.
4. Provisions on Target Market and Financing Allocation Limit (FAL) as well as Target Market and Risk Acceptance Criteria (RAC) as a guide in conducting financing have been updated periodically and implemented, especially for the productive financing segment.
5. Financing provisions related to products, programs, and financing processes are updated and implemented, including RAC provisions for the Consumer segment.
6. Implementing internal BMPD as a soft limit to ensure that the Bank complies with the provisions regarding applicable BMPD.

Credit Risk Management Organization

In order to manage the Bank's financing activities and minimize credit risk in line with the principles of banking prudence, BMI has established the following credit risk management organization:

Organisasi Organization	Tanggung Jawab	Responsibilities
Dewan Komisaris The Board of Commissioners	1. Menyetujui rencana pembiayaan tahunan, termasuk pembiayaan kepada pihak terkait Bank dan pembiayaan kepada nasabah besar tertentu; 2. Mengawasi pelaksanaan rencana pembiayaan dan melakukan fungsi pengawasan terhadap Direksi terkait langkah perbaikan apabila pelaksanaan pembiayaan menyimpang dari rencana yang telah dibuat; 3. Melakukan kajian atas pembiayaan dengan limit tertentu yang perlu dikoordinasikan kepada Dewan Komisaris baik melalui proses pelaporan maupun permintaan konsultasi; 4. Melakukan keputusan pembiayaan kepada pihak terkait sesuai ketentuan regulator yang berlaku; 5. Menjalankan fungsi pengawasan risiko kredit melalui antara lain rapat bersama dengan Direksi, ROC, <i>Audit Committee</i> dan GCG <i>Committee</i>.	1. Approve the annual financing plan, including financing to related parties of the Bank and to certain large customers; 2. Supervise the Implementation of the Financing Plan and oversee the Board of Directors to ensure corrective actions are taken if financing implementation deviates from the approved plan; 3. Reviewing financing within a specified limit that must be coordinated with the Board of Commissioners, either through reporting or requests for consultation; 4. Analyze financing decisions for related parties in compliance with prevailing regulatory requirements. 5. Implementing credit risk oversight functions, which include holding joint meetings with the Board of Directors, ROC, Audit Committee, and GCG Committee.

Organisasi Organization	Tanggung Jawab	Responsibilities
Direksi The Board of Directors	- Menyusun dan melaksanakan strategi pembiayaan yang dituangkan dalam rencana bisnis Bank serta memastikan pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana; - Memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan perundangan yang berlaku terkait pembiayaan. Tanggung jawab ini juga dijalankan oleh Direksi melalui RMC dan Komite Kebijakan Pembiayaan; - Memastikan bahwa keputusan pembiayaan dilakukan dengan berdasarkan pada <i>four-eye principle</i> sesuai limit kewenangan memutus pembiayaan yang ditetapkan berjenjang dan dilaksanakan oleh Komite Pembiayaan dan/atau oleh pemegang kewenangan pembiayaan yang ditunjuk.	- Prepare and implement financing strategies outlined in the Bank's business plan and ensure that its implementation is in accordance with the plan; - Ensure the Bank's compliance with applicable laws and regulations related to financing. This responsibility is also carried out by the Board of Directors through the RMC and the Financing Policy Committee; - Ensure that financing decisions are made following the four-eye principle, in accordance with the authority limits set for financing decisions. These limits are determined in phases and implemented by the Financing Committee and/or by the designated financing authority holder.
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board (DPS)	- Memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam kebijakan pembiayaan Bank; - Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait pembiayaan agar sesuai dengan prinsip syariah.	- Ensure that the Bank's financing policies adhere to Sharia principles; - Offer recommendations to the Board of Directors concerning financing to ensure compliance with sharia principles.
Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) Financing Policy Committee (KKP)	- Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Pembiayaan Bank, termasuk perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan; - Mengawasi pelaksanaan ketentuan internal Bank, memantau perkembangan dan kondisi portofolio pembiayaan serta memberikan saran langkah perbaikan kepada Direksi; - Memantau dan mengevaluasi proses pemberian dan perkembangan pembiayaan, serta kualitas pembiayaan termasuk pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait Bank serta nasabah besar tertentu.	- Offer insights to the Board of Directors in developing the Bank's Financing Policy, including the establishment of prudent principles for financing; - Oversee the implementation of the Bank's internal regulations, monitor the progress and status of the financing portfolio, and recommend improvement measures to the Board of Directors; - Monitor and assess the financing provision and development process, as well as the quality of financing, including financing provided to the Bank's related parties and certain large customers.
Komite Pembiayaan dan Pemegang Kewenangan Memutus Pembiayaan The Financing Committee and Authority Holders Make Decisions on Financing	- Memastikan bahwa pembiayaan diberikan berdasarkan analisis yang jujur, objektif dan seksama serta bebas dari benturan kepentingan; - Memastikan pembiayaan yang diberikan telah memenuhi norma umum perbankan dan telah sesuai dengan prinsip pembiayaan yang sehat.	- Ensure that financing is granted based on honest, objective, and comprehensive analysis, and is free from conflicts of interest; - Verify that the financing provided adheres to standard banking practices and aligns with sound financing principles.
Asset and Liabilities Committee Asset and Liabilities Committee	- Melakukan <i>review</i> atas ketersediaan dana untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan; - Melakukan <i>review</i> dan mengusulkan margin/ujrah/bagi hasil/nisbah bagi hasil pembiayaan secara berkala.	- Assess the availability of funds to be allocated for financing; - Review and recommend the margin/ujrah/profit sharing/nisbah for financing on a regular basis.
Unit Kerja terkait Pembiayaan Work Units related to Financing	- Lini pertahanan pertama manajemen risiko kredit adalah unit bisnis terkait pembiayaan (termasuk unit kerja pengelola pembiayaan bermasalah), unit kerja risiko pembiayaan dan unit kerja operasional pembiayaan, yang langsung berhadapan dengan risiko dan bertanggung jawab untuk mengembangkan kesadaran untuk meminimalkan risiko kredit. - Lini pertahanan kedua manajemen risiko kredit adalah SKMR, unit kepatuhan dan unit legal, yang bertanggung jawab melakukan pengembangan strategi manajemen risiko kredit, pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan dari kerangka pengelolaan risiko kredit dan memberikan masukan serta arahan kepada unit kerja terkait pembiayaan mengenai proses pengelolaan risiko kredit, pengukuran risiko kredit dan pelaporan pembiayaan pada sistem Bank. - Lini pertahanan ketiga manajemen risiko kredit adalah unit internal audit yang bertanggung jawab melakukan <i>risk-based</i> audit yang memberikan <i>added value</i> kepada lini pertahanan pertama dan kedua, untuk memastikan bahwa seluruh elemen Bank telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik termasuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan manajemen BMI dan regulasi yang berlaku.	- The first line of defense in credit risk management consists of the financing-related business units (including the unit responsible for managing non-performing financing), the financing risk unit, and the financing operations unit. These units are directly involved with risk management and are accountable for fostering awareness to minimize credit risk. - The second line of defense in credit risk management includes the SKMR, compliance unit, and legal unit. They are responsible for developing credit risk management strategies, maintaining and improving the credit risk management framework, and offering guidance to financing-related units on the credit risk management process, risk measurement, and financing reporting in the Bank's system. - The third line of defense in credit risk management is the internal audit unit, which conducts risk-based audits that add value to the first and second lines of defense. Their role is to ensure that all Bank elements fulfill their functions and responsibilities properly, including compliance with BMI management policies and relevant regulations.



Strategi Manajemen Risiko Kredit

1. Menetapkan arah pembiayaan dengan target dan ukuran yang jelas, meliputi pembiayaan *good bank* dan *new bank* yang berkualitas, dengan target nasabah pembiayaan yang berisiko rendah;
2. Mengimplementasikan proses pembiayaan yang sehat secara *end to end* antara lain dengan menetapkan dan/atau memperbaiki *Risk Acceptance Criteria* (RAC), melaksanakan proses inisiasi, analisis, pemutusan pembiayaan, pencairan pembiayaan dan pemantauan pembiayaan secara berkualitas;
3. Mengimplementasikan strategi untuk meminimalkan risiko konsentrasi pembiayaan dan fokus pada sektor industri yang baik;
4. Menjaga kualitas pembiayaan melalui pemantauan pembiayaan secara individual atau *portfolio*, melakukan penetapan limit pembiayaan antara lain atas sektor ekonomi tertentu, dan eksposur pembiayaan pada nasabah dan/atau grup nasabah;
5. Mengimplementasikan *Global Account Management* (GAM) dalam pembiayaan dan melaksanakan pembiayaan yang terkoordinasi antar segmen pembiayaan, yang dilaksanakan dengan konsep Kebun;
6. Mempercepat penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menetapkan strategi penyelesaian, didukung oleh infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai;
7. Melakukan inisiasi untuk mengembangkan sistem untuk otomasi atas proses pembiayaan sehingga dapat meminimalkan risiko operasional.

Kebijakan Pengelolaan Risiko Konsentrasi Pembiayaan

Bank mengelola risiko konsentrasi pembiayaan melalui penetapan limit, antara lain atas sektor ekonomi tertentu dan eksposur pembiayaan pada nasabah dan/atau grup nasabah. Beberapa data yang digunakan untuk pengelolaan risiko konsentrasi di antaranya:

1. Menetapkan *soft limit* Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) sebesar 80% yang merupakan persentase maksimum penyaluran dana yang ditetapkan terhadap modal Bank bagi penyaluran dana kepada pihak terkait atau modal inti (*tier 1*) Bank bagi penyaluran dana kepada selain pihak terkait.
2. Melakukan *review* dan menginisiasi *Target Market* dan *Financing Allocation Limit* (FAL) setiap tahun sebagai yang merupakan batasan maksimum pembiayaan pada suatu sektor/sub sektor ekonomi tertentu dengan mempertimbangkan *risk appetite* Bank dan potensi serta risiko sektor/sub sektor ekonomi tersebut. Tools ini diimplementasikan oleh unit bisnis terkait pembiayaan dalam bentuk *target market* dan *risk acceptance criteria* (RAC) yang ditetapkan berdasarkan segmen pembiayaan atau sektor/sub sektor ekonomi tertentu.

Credit Risk Management Strategy

1. Establishing clear financing targets and measurements by focusing on financing for well-established and new, high-quality banks, with an emphasis on low-risk financing customers as the primary target.
2. Implementing a healthy end-to-end financing process, including the establishment and/or improvement of the Risk Acceptance Criteria (RAC), and ensuring a thorough process for initiation, analysis, financing decisions, disbursement, and monitoring financing in quality manner;
3. Minimizing financing concentration risk by implementing strategies that focus on good industrial sectors;
4. Maintaining financing quality by monitoring individual or portfolio financing, setting financing limits, among others, for certain economic sectors, and financing exposure to customers and/or customer group;
5. Implementing Global Account Management (GAM) in financing and promoting coordinated financing between financing segments, implemented with the "Kebun" concept;
6. Accelerating the resolution of non-performing financing by establishing a resolution strategy, supported by sufficient infrastructure and human resources;
7. Initiating the development of an automated financing system to minimize operational risk.

Financing Concentration Risk Management Policy

The Bank manages financing concentration risk by establishing limits, including those related to specific economic sectors and financing exposure to customers and/or customer groups. Some of the data used in managing concentration risk includes:

1. Setting a Soft Limit for Maximum Limit for Disbursement of Funds (BMPD) of 80%, which represents the maximum percentage of fund distribution relative to the Bank's capital for funding to related parties, or relative to the Bank's core capital (Tier 1) for funding to non-related parties.
2. Annual review and update of the Target Market and Financing Allocation Limit (FAL), which establishes the maximum financing limit for specific economic sectors/sub-sectors, taking into account the Bank's risk appetite, as well as the potential and risks associated with those sectors/sub-sectors. These tools are implemented by business units related to financing through target markets and risk acceptance criteria (RAC) that are determined based on the financing segment or a particular economic sector/sub-sector.

3. Melakukan optimalisasi pembiayaan di tahun 2025 dengan proyek *Retail Financing Business Acceleration Project*, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Proyek dilaksanakan untuk menyempurnakan fitur produk dan RAC, proses bisnis serta sumber daya manusia, *channel* dan organisasi yang mendukung pembiayaan Consumer;
 - b. *Revamping* atas fungsi dari kantor cabang menjadi cabang koordinator, cabang *stand alone* dan cabang *sales point*;
 - c. Pada tahap awal, implementasi dilaksanakan di area Jabodetabek yang akan diperluas secara bertahap, dengan kewenangan memutus pembiayaan diberikan kepada Branch Manager, Region Consumer Financing Manager (RCFM) dan Regional Head (RH);
 - d. Melakukan pembiayaan KPR yang lebih inklusif bekerja sama dengan developer perumahan skala kecil-menengah untuk mengejar target pertumbuhan bisnis KPR;
 - e. Melakukan *review* atas Risk Assessment Criteria (RAC) untuk pembiayaan segmen SME di tahun 2025.
3. Optimizing Financing in 2025 through the Retail Financing Business Acceleration Project, which includes the following initiatives:
 - a. Improving Product Features and RAC, business processes, human resources, channels, and organizations supporting Consumer financing;
 - b. Revamping branch functions by transforming branch offices into coordinator branches, stand-alone branches, and sales point branches;
 - c. Initial Implementation in the Jabodetabek area, with gradual expansion, where decision-making authority for financing will be granted to the Branch Manager, Region Consumer Financing Manager (RCFM), and Regional Head (RH);
 - d. Implementing more inclusive mortgage financing by partnering with small-to-medium-scale housing developers to achieve mortgage business growth targets;
 - e. Reviewing the Risk Assessment Criteria (RAC) for SME segment financing in 2025.

Pengukuran Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Bank melakukan perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan mengacu pada POJK No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah dan juga SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum yang diubah dengan SE OJK No. 13/ SEOJK.03/2018 tentang Perubahan atas SE OJK No. 34/ SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah.

Pengukuran risiko kredit dilakukan melalui:

Parameter	Uraian	Description
Kebijakan Penggunaan Peringkat dalam Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit Policy on the Use of Ratings in the Calculation of RWA for Credit Risk	Sesuai dengan metodologi pengukuran risiko kredit pendekatan standar, perhitungan ATMR secara umum dilakukan berdasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat eksternal yang diakui oleh OJK.	According to the standard approach of credit risk measurement methodology, the RWA calculation is generally conducted based on ratings issued by external ratings agencies that are acknowledged by OJK.
Kategori Portofolio yang Menggunakan Peringkat Portfolio Categories based on Ratings	Berdasarkan pendekatan standar, perhitungan ATMR risiko kredit untuk beberapa kategori portofolio didasarkan pada peringkat eksternal dan sebagian lagi sudah ditentukan langsung bobot risikonya sesuai ketentuan OJK untuk nasabah yang telah memiliki peringkat eksternal. Untuk nasabah yang tidak memiliki peringkat eksternal, maka ATMR dihitung menggunakan bobot risiko sesuai ketentuan OJK.	Based on the standard approach, the calculation of credit risk RWA for several portfolio categories is based on external ratings, while for other categories, the risk weight are directly determined in accordance with OJK provisions for customers with external ratings. For customers without external ratings, RWA is calculated using the applicable risk weight as defined by OJK provisions.

Credit Risk Measurement with Standard Approach

The Bank calculates the ATMR for credit risk by referring to OJK Regulation No. 21/POJK.03/2014 regarding the Mandatory Minimum-Capital Requirements for Sharia Commercial Banks and OJK Circular Letter No. 34/SEOJK.03/2015 regarding the Calculation of Risk-Weighted Assets for Credit Risk Using the Standard Approach for Commercial Banks, as amended by OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2018 concerning Amendments to OJK Circular Letter No. 34/SEOJK.03/2015 concerning Calculation of Risk-Weighted Assets for Credit Risk Using the Standard Approach for Sharia Commercial Banks.

Credit risk measurement is carried out through:



Parameter	Uraian	Description
Lembaga Pemeringkat Ratings Agencies	Bank menggunakan peringkat terkini yang diterbitkan dari lembaga pemeringkat eksternal yang telah diakui oleh OJK berdasarkan SEOJK No.37/SEOJK.03/2016, tanggal 8 September 2016 perihal Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang diakui OJK.	The Bank uses the latest ratings issued by external rating agencies that have been recognized by OJK, based on SEOJK No.37/SEOJK.03/201 dated September 8, 2016 regarding Rating Agencies and Ratings recognized by OJK.
Risiko Kredit Pihak Lawan Counterparty Credit Risk	Kegiatan transaksi Bank yang meliputi pertukaran mata uang asing, <i>repo</i> dan <i>reverse repo</i> dapat membuat Bank terekspos risiko kredit pihak lawan. Limit kredit pihak lawan ditetapkan untuk setiap pihak lawan berdasarkan penilaian atas kapasitas pihak lawan dan BMPD sesuai dengan kebijakan internal Bank. Perhitungan risiko kredit dalam rangka perhitungan kecukupan modal untuk eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan dilakukan menggunakan pendekatan standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku	The Bank's transaction activities, which include foreign currency exchange, repo, and reverse repo, can expose the Bank to counterparty credit risk. The counterparty credit limit is set for each counterparty based on an assessment of the capacity of each counterparty and LLL, in accordance with the Bank's internal policy. Calculation of credit risk, in terms of calculating capital adequacy for exposures that could create credit risk due to counterparty failure, is carried out by using a standard approach in accordance with applicable regulations.

Pengendalian Risiko Kredit

Pengendalian risiko kredit dilakukan antara lain melalui:

1. Penguatan sistem pengendalian internal, dilakukan antara lain dalam bentuk pengawasan oleh Dewan Komisaris, DPS dan Direksi secara berkala serta Direksi secara berkala dan melaksanakan budaya pengendalian risiko yang melibatkan seluruh unit kerja terkait pembiayaan, dan pemeriksaan internal secara berkala dilakukan oleh unit internal audit yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait;
2. Menetapkan mitigasi risiko, termasuk penetapan agunan dengan bentuk dan rasio yang dapat diterima Bank;
3. Melakukan penutupan asuransi atas agunan, pembiayaan dan/atau jiwa nasabah untuk menutup risiko kredit yang mungkin terjadi;
4. Melakukan perbaikan proses pembiayaan dan kelengkapan organisasi pembiayaan sejalan dengan strategi dan target pembiayaan yang ditetapkan;
5. Melakukan pembiayaan secara sindikasi dengan bank lain untuk menurunkan potensi risiko kredit pada suatu pembiayaan;
6. Memastikan bahwa ketentuan internal terkait dengan pembiayaan selalu terbaru dan sesuai dengan dinamika perusahaan dan kondisi bisnis.

Definisi Tagihan Jatuh Tempo dan Tagihan Mengalami Penurunan Nilai

Bank mendefinisikan tagihan yang telah jatuh tempo sebagaimana diatur pada SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah yang diubah dengan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2018 tentang Perubahan atas SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan

Credit Risk Control

Credit risk control is implemented through several measures, including:

1. Strengthening the internal control system, which includes regular oversight by the Board of Commissioners, DPS, and the Board of Directors, as well as fostering a risk control culture that involves all work units related to financing. Additionally, periodic internal audits are conducted by the internal audit unit and followed up by the respective work units;
2. Defining risk mitigation, which include setting acceptable collateral types and ratios for the Bank;
3. Closing insurance on collateral, financing and/or customer life to cover potential credit risks;
4. Improving the financing process and comprehensiveness of the financing organization in accordance with the defined financing strategy and targets;
5. Conducting syndicated financing with other banks to reduce the potential credit risk in a financing;
6. Ensuring that internal provisions related to financing are always updated and in accordance with the dynamics of the company and business conditions.

Definition of Past Due Receivables and Impairment Losses on Receivables

The Bank defines past due receivables as outlined in OJK Circular Letter No. 34/SEOJK.03/2015 regarding the Calculation of Risk-Weighted Assets for Credit Risk Using the Standard Approach for Islamic Commercial Banks, as amended by OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2018 concerning amendments to OJK Circular Letter No. 34/SEOJK.03/2015 concerning Calculation of Risk-Weighted Assets for Credit Risk Using the Standard Approach for

Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah, yakni tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bagi hasil atau margin atau ujarah.

Pendekatan Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Individual dan Kolektif

Perhitungan CKPN yang dilakukan oleh Bank hanya untuk eksposur dengan akad murabahah saja, sesuai dengan penerapan PSAK 50/55 (Revisi 2006) sementara PSAK Syariah tidak mengatur secara detail. Perhitungan CKPN dilakukan dalam 2 (dua) pendekatan, yaitu:

1. CKPN Individual dihitung berdasarkan jumlah ekspektasi arus kas yang diterima di masa akan datang, dikurangi jumlah tercatat.
2. CKPN Kolektif dihitung dengan mempertimbangkan *Probability of Default* dan *Loss Given Default* dengan menggunakan data historis 3 (tiga) tahun terakhir.

Metode Statistik dalam Perhitungan CKPN

Penggunaan metode statistik dalam perhitungan CKPN sebagaimana dijelaskan pada butir sebelumnya hanya diperuntukkan pada perhitungan CKPN Kolektif. Metode statistik yang digunakan oleh Bank adalah:

1. *Probability of Default*, yakni tingkat kemungkinan kegagalan nasabah memenuhi kewajiban, yang diukur menggunakan metode Migration untuk segmen Enterprise dan SME, sedangkan untuk segmen Consumer menggunakan metode *Net Flow Rate*.
2. *Loss Given Default*, yaitu tingkat kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan nasabah memenuhi kewajibannya. Perhitungan dilakukan menggunakan metode *Collateral Short Fall*.

Pengungkapan Mitigasi Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

Mengacu pada Peraturan OJK terkait perhitungan ATMR untuk risiko kredit yang disebutkan sebelumnya, Bank juga mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan atau asuransi kredit sebagai teknik mitigasi risiko kredit (MRK). Bank menggunakan Teknik MRK-Agunan dengan pendekatan sederhana untuk sebagian besar portofolionya, di mana jenis agunan keuangan yang diakui dalam Teknik MRK Agunan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Meskipun tidak diikutsertakan dalam perhitungan MRK, Bank juga menerima jenis agunan lainnya seperti tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, mesin dan agunan/jaminan lainnya yang telah diatur dalam kebijakan Bank.

Dalam ketentuan internal, juga diatur mengenai kecukupan agunan yang harus dipenuhi oleh nasabah, pihak yang melaksanakan penilaian dan pemeriksaan agunan, aturan dan prosedur penilaian baik internal maupun eksternal, serta frekuensi penilaian berdasarkan jenis agunan.

Islamic Commercial Banks, which is receivables that are past due for more than 90 days, either for principal payments and/or profit sharing or margin or ujarah payments.

Individual and Collective Impairment Losses (CKPN) Establishment Approach

The CKPN calculation performed by the Bank applies only to exposures with murabahah contracts, in line with SFAS 50/55 (Revised 2006), as SFAS Syariah does not provide detailed regulations on this matter. CKPN is calculated using two approaches:

1. Individual CKPN is determined based on the expected future cash flows, less the recorded amount.
2. Collective CKPN is calculated by considering the Probability of Default (PD) and Loss Given Default (LGD) using historical data from the past three years.

Statistical Method in CKPN Calculation

The statistical methods used for CKPN calculations, as mentioned earlier, apply only to the calculation of Collective CKPN. The statistical methods employed by the Bank are:

1. Probability of Default (PD): The likelihood of a customer failing to meet their obligations, measured using the Migration method for the Enterprise and SME segments, and the Net Flow Rate method for the Consumer segment.
2. Loss Given Default (LGD): The degree of loss incurred due to the customer's failure to fulfill obligations, calculated using the Collateral Short Fall method.

Disclosure of Credit Risk Mitigation Using the Standard Approach

In line with the OJK Regulation on the calculation of ATMR for credit risk, the Bank acknowledges the use of collateral, guarantees, or credit insurance as techniques for credit risk mitigation (MRK). The Bank primarily utilizes the MRK-Collateral Technique with a simplified approach for most of its portfolio, where the types of financial collateral recognized follow the applicable regulations.

Even though not considered in the MRK calculation, the Bank also accepts various types of collateral, including land and buildings, motor vehicles, machinery, and other collateral/security as outlined in the Bank's policies.

The internal regulations also specify the required adequacy of collateral that customers must meet, the parties responsible for conducting collateral assessments and inspections, the rules and procedures for both internal and external assessments, as well as the frequency of these assessments based on the type of collateral.



Pengungkapan Sekuritisasi Aset

Penjelasan mengenai sekuritisasi aset dijelaskan lebih lanjut pada tabel eksposur risiko.

Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit

Proses manajemen risiko pada aktivitas pembiayaan Bank telah diterapkan secara berkala dan berkelanjutan, yang pada perkembangannya memberikan informasi-informasi yang signifikan bagi Bank dalam perbaikan bisnis ke depannya.

Adapun beberapa hasil dari proses manajemen risiko kredit yang dijalankan oleh Bank dilaporkan melalui beberapa laporan berkala baik internal maupun eksternal, seperti:

1. Laporan *Watchlist* atas pembiayaan,
2. Laporan utilisasi Batas Minimum Penyaluran Dana (BMPD) termasuk BMPD internal yang disampaikan kepada unit kerja dan manajemen,
3. Laporan *Portfolio* Pembiayaan,
4. Laporan *Stress Test* Pembiayaan,
5. Laporan Konsentrasi Pembiayaan (25 Debitur Inti),
6. Laporan kinerja dan utilisasi *Target Market & Financing Allocation Limit*,
7. Laporan *Uniform Classification System* (penyeragaman kolektibilitas dengan bank lain).

Risiko Pasar

Pengungkapan Eksposur dan Penerapan Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Sebagai bank devisa, BMI memiliki portofolio valuta asing di mana nilai dari aset dan kewajiban tersebut selalu terkait dengan perubahan nilai tukar valuta asing terhadap rupiah.

Selain itu, Bank juga menghadapi risiko pasar terkait dengan portofolio surat-surat berharga jenis *trading* yang dimiliki. Dampak terhadap kegiatan usaha Bank akibat perubahan nilai tukar valuta asing terhadap rupiah dan perubahan harga surat-surat berharga akibat adanya perubahan imbal hasil di pasar dapat berdampak pada kinerja Bank baik dalam hal tingkat profitabilitas atau kecukupan permodalan yang dimiliki oleh Bank.

Kerangka Manajemen Risiko Pasar

Kerangka manajemen risiko pasar yang telah dimiliki oleh Bank, antara lain:

1. Ketentuan terkait risiko pasar, mulai dari level kebijakan, prosedur dan petunjuk teknis. Secara berkelanjutan, Bank telah melakukan pembaharuan atas ketentuan internal risiko pasar;

Asset Securitization Disclosure

The details of asset securitization are further explained in the risk exposure table.

Credit Risk Management Information System

The Bank has implemented a periodic and continuous risk management process for its financing activities, which has provided valuable insights for improving future business operations.

Some of the key outputs from the Bank's credit risk management process are communicated through various internal and external periodic reports, including:

1. Watchlist Report on financing,
2. Minimum Limit for Disbursement of Fund (BMPD) utilization report, including internal BMPD provided to work units and management,
3. Financing Portfolio Report,
4. Financing Stress Test Report,
5. Financing Concentration Report (25 Core Debtors),
6. Target Market & Financing Allocation Limit performance and utilization report,
7. Uniform Classification System Report (aligning collectability standards with other banks).

Market Risk

Disclosure of Exposure and Implementation of Market Risk Management

Market risk refers to the risk on balance sheet and administrative account positions due to changes in market prices, including risks arising from fluctuations in the value of tradable or leased assets. As a foreign exchange bank, BMI holds a foreign exchange portfolio, where the value of assets and liabilities is always affected by changes in the exchange rate against the Rupiah.

Additionally, the Bank faces market risks associated with its trading securities portfolio. The effects of the Bank's business activities due to changes in the foreign exchange rate against the rupiah, as well as fluctuations in security prices due to yield changes in the market, can impact the Bank's performance, influencing both profitability and the adequacy of its capital.

Market Risk Management Framework

The Bank's market risk management framework includes the following:

1. Provisions related to market risk, starting from the policies level, procedures, and technical guidelines. The Bank regularly updates its internal market risk provisions;

- Mengimplementasikan limit *dealer* yang ditetapkan secara berjenjang dan melakukan proses pemantauan serta pengukuran risiko pasar, termasuk penggunaan atas limit kewenangan dealer beserta dengan tingkat limit *cut loss* per masing-masing *dealer*;
- Implementasi rasio Posisi Devisa Neto (PDN) dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) secara internal sebagai *soft limit* untuk memastikan rasio PDN dan PLN sesuai dengan ketentuan regulator.

- Implementing dealer limits, which are set in stages, and carrying out the monitoring and measurement of market risk. This includes the use of dealer authority limits and the cut loss limits per each dealer;
- Implementing the Net Open Position (PDN) and Foreign Loans (PLN) ratios internally as soft limits, ensuring compliance with regulatory requirements for PDN and PLN ratios.

Organisasi Manajemen Risiko Pasar

Organisasi manajemen risiko pasar untuk memastikan bahwa DPS, Dewan Komisaris dan Direksi serta komite di bawahnya melaksanakan fungsinya dengan baik. Termasuk dalam organisasi manajemen risiko adalah dibentuknya unit kerja terkait dengan risiko pasar yang terdiri dari tiga lini pertahanan manajemen risiko dengan fungsinya masing-masing.

Untuk meminimalkan risiko pasar sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan, Bank telah memiliki organisasi manajemen risiko pasar yang mencakup:

Market Risk Management Organization

The market risk management organization ensures that the DPS, Board of Commissioners, Board of Directors, and the committees below them effectively perform their responsibilities. This organization includes the establishment of a work unit dedicated to market risk, consisting of three lines of defense, each with its specific functions.

To minimize market risk in line with banking prudence principles, the Bank has established a market risk management organization that includes:

Organisasi Organization	Tanggung Jawab	Responsibilities
Dewan Komisaris The Board of Commissioners	Menjalankan fungsi pengawasan risiko pasar melalui ROC, <i>Audit Committee</i> dan GCG <i>Committee</i> .	Perform market risk monitoring through ROC, Audit Committee, and GCG Committee.
Dewan Pengawas Syariah (DPS) Sharia Supervisory Board (SSB)	Memastikan pengawasan atas aktivitas transaksi bisnis Bank, khususnya produk-produk treasuri agar tetap terjaga sesuai dengan aspek syariah.	To ensure sure that the supervision of the Bank's business transaction activities, specifically on treasury products, to be maintained in accordance with sharia aspect.
Direksi dengan tanggung jawab yang sama dilaksanakan juga melalui ALCO yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan strategi terkait risiko pasar The Board of Directors with same responsibilities are carried out through ALCO, which is responsible for establishing policies and strategies related to market risk	- Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko pasar sesuai tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis dan profil risiko pasar - Memastikan adanya integrasi penerapan manajemen risiko pasar dengan risiko lainnya yang dapat berdampak bagi Bank.	- Ensure that the market risk management function is in line with the strategic objectives, scale, business characteristics, and market risk profile; - Ensure the integration of market risk management implementation with other risks that may affect the Bank.
Unit kerja terkait risiko pasar, terdiri dari unit kerja yang berdasarkan tiga lini pertahanan manajemen risiko Work units related to market risks, which consist of work units based on three lines of defense in risk management	- Lini pertahanan pertama manajemen risiko pasar adalah unit treasuri yang bertanggung jawab antara lain mengelola transaksi terkait risiko pasar dan memelihara Posisi Devisa Neto (PDN) dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) terjaga pada level yang aman bagi Bank. - Lini pertahanan kedua manajemen risiko pasar adalah SKMR yang mendukung ALCO dalam pemantauan dan pengukuran risiko pasar, serta unit kepatuhan yang memastikan kepatuhan Bank atas rasio pasar yang harus dijaga. - Lini pertahanan ketiga manajemen risiko pasar adalah unit internal audit yang bertanggung jawab melakukan <i>risk-based audit</i> yang memberikan <i>added value</i> kepada lini pertahanan pertama dan kedua, untuk memastikan bahwa seluruh elemen Bank telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik termasuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan manajemen Bank dan regulasi yang berlaku.	- The first line of defense in market risk management is the treasury unit, which is responsible for managing transactions related to market risks and maintaining the Net Open Position (NOP) and Foreign Loan (PLN) at a safe level for the Bank. - The second line of defense in market risk management is SKMR, which supports ALCO in monitoring and measuring market risks, as well as the compliance unit, which ensures the Bank's compliance with market ratios that must be maintained. - The third line of defense in market risk management is the internal audit unit, which is responsible for conducting risk-based audits that provide added value to the first and second line of defense and ensure that all elements of the Bank have carried out their functions and responsibilities properly, including ensuring compliance with the Bank's management policies and applicable regulations.



Strategi Manajemen Risiko Pasar

1. Menjaga tingkat PDN pada level maksimal 5% atau lebih rendah daripada yang ditetapkan regulator (20%);
2. Memastikan bahwa *dealer* melakukan transaksi terkait dengan risiko pasar sesuai dengan limit yang telah diberikan;
3. Mengimplementasikan OSTs yang merupakan *end to end treasury system*, yang digunakan bersama oleh tim bisnis treasuri maupun SKMR untuk memastikan risiko pasar terjaga dengan baik;
4. Memantau rasio PLN Bank agar tidak melanggar ketentuan regulator;
5. Mengupayakan dan mengelola fasilitas pinjaman antar Bank melalui transaksi di pasar uang, baik melalui instrumen SIPA maupun SIMA;
6. Mengelola ketersediaan aset treasuri Bank terjaga secara optimal, baik dalam hal likuiditas transaksi maupun valuasinya di pasar, yang ditunjukkan oleh analisis komprehensif atas rencana pemanfaatannya di masa depan.

Pengelolaan Portofolio *Trading book* dan *Banking book* Serta Metodologi Evaluasi

Risiko pasar *trading book* adalah risiko yang muncul dari potensi kerugian akibat aktivitas *trading book*, antara lain perubahan suku bunga dan nilai tukar. Pengelolaan risiko pasar Bank dilakukan dengan menerapkan prinsip *segregation of duties* yaitu memisahkan fungsi dan tanggung jawab secara independen atas transaksi treasuri, yang terdiri dari:

- a. *Front office*: unit treasuri sebagai unit pelaksana transaksi treasuri dan investasi.
- b. *Middle office*: unit SKMR sebagai unit yang melakukan pemantauan, menilai serta menginformasikan risiko yang timbul dari kegiatan *trading* yang dilakukan oleh unit *front office*.
- c. *Back office*: unit operasional treasuri sebagai unit yang melakukan pencatatan dan valuasi terhadap seluruh eksposur pada aktivitas *trading* secara harian dengan menggunakan harga pasar dari sumber yang independen.

Risiko pasar *banking book* muncul akibat adanya perubahan suku bunga dan nilai tukar atas aktivitas *banking book* yang dapat berpengaruh pada profitabilitas Bank (*earning perspective*). Pengelolaan risiko pasar *banking book* Bank dilakukan dengan mengoptimalkan struktur neraca agar mendapatkan imbal hasil yang maksimal dengan tingkat risiko yang dapat diterima.

Dalam menghitung ATMR untuk Risiko Pasar, Bank mengacu pada POJK No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah dan SEOJK No. 35/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar dengan menggunakan Metode Standar bagi Bank Umum Syariah. Risiko pasar yang

Market Risk Management Strategy

1. Keeping the PDN level at a maximum of 5%, which is lower than the regulator's threshold of 20%;
2. Ensuring that dealers carry out market risk-related transactions within the specified limits;
3. Implementing OSTs, which is an end-to-end treasury system, used by both the treasury business team and SKMR to effectively manage market risk;
4. Monitoring the Bank's PLN ratio to ensure compliance with regulatory requirements;
5. Striving and managing interbank loan facilities through money market transactions, utilizing both SIPA and SIMA instruments
6. Managing the availability of the Bank's treasury assets to be optimally maintained, both in terms of transaction liquidity and valuation in the market, as indicated by a comprehensive analysis of its future utilization plans.

Trading Book and Banking Book Portfolio Management and Evaluation Methodology

Market risk in the trading book refers to the potential losses arising from trading book activities, including fluctuations in interest rates and exchange rates. The Bank manages market risk by adhering to the principle of segregation of duties, which involves clearly defining independent roles and responsibilities for treasury transactions. These roles are divided into:

- a. *Front Office*: The treasury unit responsible for executing treasury and investment transactions
- b. *Middle Office*: The SKMR unit, which monitors, evaluates, and reports on risks associated with the trading activities performed by the front office
- c. *Back Office*: The treasury operations unit, which records and assesses all exposures from trading activities daily, using market prices from independent sources.

Banking book market risk arises from fluctuations in interest rates and exchange rates on banking book activities that can impact the Bank's profitability (from an earnings perspective). The Bank manages this risk by optimizing the balance sheet structure to maximize returns while maintaining an acceptable level of risk.

In calculating ATMR for Market Risk, the Bank refers to POJK No. 21/POJK.03/2014 concerning Mandatory Minimum-Capital Requirements for Sharia Commercial Banks and SEOJK No. 35/SEOJK.03/2015 concerning Calculation of Risk-Weighted Assets for Market Risk using the Standard Method for Sharia Commercial Banks. Market risks that must be

wajib diperhitungkan dalam beban modal untuk pendekatan standar adalah:

- Posisi instrumen keuangan dalam *trading book* yang terekspos risiko suku bunga.
- Posisi valuta asing dalam *trading book* dan *banking book* yang terekspos risiko nilai tukar.

Untuk keperluan perhitungan modal minimum menggunakan metode standar, Bank menghitung semua posisi instrumen keuangan dalam *trading book* yang terekspos risiko suku bunga seperti pada portofolio surat berharga, serta derivatif lainnya seperti FX *Forward* dan FX *Swap*. Untuk risiko nilai tukar, Bank menghitung seluruh posisi *on* dan *off balance sheet*, baik dalam portofolio *trading book* dan *banking book*.

Setiap harinya, SKMR melakukan pemantauan terhadap pelampauan *trading limit*. Penetapan limit berfungsi untuk membatasi konsentrasi eksposur risiko pada suatu posisi, jenis risiko, tipe instrumen dan/atau pasar tertentu. Penetapan limit ini mengacu kepada *risk tolerance* Bank dengan mempertimbangkan *target profit* dan risiko dari aktivitas perdagangan.

Sistem Informasi Manajemen Risiko Pasar

Proses manajemen risiko pasar, khususnya pada aktivitas bisnis treasuri terus dikembangkan guna mendukung kompleksitas bisnis dan juga mengakomodasi kebutuhan nasabah yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Secara internal maupun eksternal, Bank telah menerapkan system pelaporan secara berkala dan berkelanjutan, yang memberikan informasi-informasi yang signifikan bagi Bank dalam memitigasi risiko akibat perubahan kondisi lingkungan bisnis, khususnya pada aspek makro ekonomi dan kebijakan moneter.

Adapun beberapa hasil pemantauan dari proses manajemen risiko pasar yang dijalankan oleh Bank, adalah sebagai berikut:

- Laporan Pemantauan atas Penggunaan *Limit Dealer Treasury*.
- Laporan Pemantauan atas *Stop Loss Limit Dealer Treasury*.
- Laporan Posisi Devisa Neto (PDN).
- Laporan Batas Pinjaman Luar Negeri (PLN).
- Laporan *Mark to Market* atas Transaksi *Treasury*.
- Laporan *Stress Test* atas Risiko Pasar.
- Laporan *Risk Factor* terhadap Transaksi Forex dan Volatilitas Perubahan Harga Emas.

taken into account in the capital charge for the standard approach are:

- Positions of financial instruments in the trading book exposed to interest rate risk
- Foreign exchange positions in both the trading book and banking book that are exposed to exchange rate risk.

To calculate the minimum capital using the standard method, the Bank assesses all financial instrument positions in the trading book that are exposed to interest rate risk, including those in the securities portfolio, as well as derivatives like FX *Forward* and FX *Swap*. For exchange rate risk, the Bank evaluates all on and off-balance sheet positions in both the trading book and banking book portfolios.

SKMR monitors trading limit excess level on a daily basis. The purpose of limit setting is to control the concentration of risk exposure related to specific positions, risk types, instruments type and/or markets. These limits are based on the Bank's risk tolerance, taking into account the profit objectives and risk from trading activities.

Market Risk Management Information System

The market risk management process, particularly in treasury operations, is continuously developed to address business complexity and meet the growing needs of customers over time.

Both internally and externally, the Bank has implemented a periodic and ongoing reporting system that provides crucial information for mitigating risks arising from changes in the business environment, especially in macroeconomic conditions and monetary policies.

The following are some of the monitoring reports generated from the Bank's market risk management process:

- Treasury Dealer Limits Usage Monitoring Report
- Treasury Dealer Stop Loss Limits Monitoring Report
- Net Open Position (PDN) Report
- Foreign Loan Limit (PLN) Report
- Mark to Market Report for Treasury Transactions
- Market Risk Stress Test Report
- Risk Factor Report on Forex Transactions and Gold Price Volatility.



Risiko Likuiditas

Pengungkapan Eksposur dan Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat dilikuidasi segera dan/atau diagunkan tanpa mengganggu aktivitas keuangan bank.

Kerangka Manajemen Risiko Likuiditas

Bank mengimplementasikan kerangka risiko likuiditas yang meliputi:

1. Ketentuan internal dalam bentuk kebijakan, prosedur dan petunjuk teknis terkait strategi, proses, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko likuiditas;
2. Menetapkan organisasi terkait risiko likuiditas dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang berkepentingan;
3. Mengimplementasikan limit atas rasio likuiditas dan dipantau secara harian untuk melihat kondisi likuiditas Bank;
4. Menyiapkan kerangka pendanaan darurat/*Contingency Funding Plan* (CFP) melalui pembentukan *Liquidity Crisis Mitigation Team* (LCMT) jika likuiditas berada pada kondisi yang kurang baik.

Organisasi Manajemen Risiko Likuiditas

Organisasi manajemen risiko likuiditas diperlukan untuk memastikan bahwa DPS, Dewan Komisaris dan Direksi beserta komite di bawahnya melaksanakan fungsinya dengan baik. Termasuk dalam organisasi manajemen risiko adalah dibentuknya unit kerja terkait dengan likuiditas yang terdiri dari tiga lini pertahanan manajemen risiko dengan fungsinya masing-masing.

Untuk meminimalkan risiko likuiditas sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan, Bank telah memiliki manajemen risiko likuiditas sebagai berikut:

Liquidity Risk

Disclosure of Exposure and Implementation of Liquidity Risk Management

Liquidity risk refers to the risk arising from the Bank's inability to fulfill maturing obligations using available cash flow funding sources and/or high-quality liquid assets that can be quickly liquidated and/or pledged without affecting the Bank's financial operations.

Liquidity Risk Management Framework

The Bank implements a liquidity risk framework that consist of:

1. Internal provisions in the form of policies, procedures, and technical instructions related to strategies, processes, controls, and liquidity risk management information systems;
2. Establishing organizations related to liquidity risk, outlining the duties and responsibilities of all relevant parties;
3. Setting a maximum liquidity ratio limit and monitoring it daily to assess the Bank's liquidity position;
4. Preparing a contingency funding plan (CFP), which involves developing a Liquidity Crisis Mitigation Team (LCMT) if liquidity levels deteriorate.

Liquidity Risk Management Organization

A liquidity risk management organization is essential to ensure that the DPS, Board of Commissioners, Board of Directors, and their committees effectively perform their duties. The risk management organization includes the establishment of a work unit focused on liquidity, consisting of three lines of defense, with their respective functions.

To reduce liquidity risk in line with banking prudence principles, the Bank has implemented the following liquidity risk management practices:

Organisasi Organization	Tanggung Jawab	Responsibilities
Dewan Komisaris The Board of Commissioners	Menjalankan fungsi pengawasan risiko likuiditas melalui ROC.	Carry out the liquidity risk monitoring function through ROC.
Dewan Pengawas Syariah (DPS) Sharia Supervisory Board (SSB)	Memastikan pengawasan atas aktivitas pengelolaan likuiditas Bank, khususnya yang terkait dengan kebijakan pendanaan dan bagi hasil kepada nasabah, agar tetap terjaga sesuai dengan aspek syariah.	To ensure that the supervision of the Bank's liquidity management activities, especially those related to funding policies and profit sharing to customers, so that they are maintained in accordance with sharia aspect.

Organisasi Organization	Tanggung Jawab	Responsibilities
Direksi dimana tanggung jawab ini dilaksanakan juga melalui ALCO yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan strategi terkait risiko likuiditas The Board of Directors where this responsibilities are also carried out through ALCO, which is responsible for setting up policies and strategies related to liquidity risks	- Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko likuiditas sesuai tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis dan profil risiko likuiditas; - Memastikan adanya integrasi penerapan manajemen risiko likuiditas dengan risiko lainnya yang dapat berdampak bagi Bank; - Menerapkan rencana pendanaan darurat apabila status kondisi likuiditas Bank memburuk.	- Ensure that the function of liquidity risk management is line with strategic objectives, scale, business characteristics, and liquidity risk profile; - Ensure the integration of liquidity risk management implementation with other risks that may affect the Bank; - Implement an emergency funding plan if the Bank's liquidity conditions worsen.
Unit kerja terkait risiko likuiditas, terdiri dari unit kerja yang berdasarkan tiga lini pertahanan manajemen risiko Work units related to liquidity risks, which consist of work units based on three lines of defense in risk management	- Lini pertahanan pertama manajemen risiko likuiditas adalah unit treasury yang bertanggung jawab mengelola transaksi arus dana masuk dan keluar terjaga pada level yang aman bagi Bank; - Lini pertahanan kedua manajemen risiko likuiditas adalah SKMR yang mendukung ALCO dalam pemantauan dan pengukuran indikator-indikator risiko likuiditas, serta unit kepatuhan yang memastikan rasio likuiditas Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator; - Lini pertahanan ketiga manajemen risiko pasar adalah unit internal audit yang bertanggung jawab melakukan <i>risk-based</i> audit yang memberikan <i>added value</i> kepada lini pertahanan pertama dan kedua, untuk memastikan bahwa seluruh elemen Bank telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik termasuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan manajemen Bank dan regulasi yang berlaku.	- The first line of defence in liquidity risk management is the treasury unit, which is responsible for managing incoming and outgoing fund transactions at a safe level for the Bank; - The second line of defense in liquidity risk management is the SKMR, which supports ALCO in monitoring and measuring liquidity risk indicators, as well as the compliance unit, which ensures that the Bank's liquidity ratio complies with regulatory provisions. - The third line of defense in market risk management is the internal audit unit, which is responsible for conducting risk-based audits that provide added value to the first and second line of defense, as well as making sure that all elements of the Bank have carried out their functions and responsibilities properly, including ensuring compliance with the Bank's management policies and applicable regulations.

Strategi Manajemen Risiko Likuiditas

- Menetapkan *soft limit* atas rasio likuiditas, khususnya pada rasio AL/DPK dan AL/NCD di mana pemantauan internal menggunakan ambang batas yang lebih ketat dari ambang batas regulator;
- Memastikan dan menjaga kondisi likuiditas Bank tetap sehat melalui pemantauan risiko likuiditas secara harian;
- Menetapkan strategi peningkatan likuiditas dengan fokus pada pertumbuhan dana murah dan mengoptimalkan pendapatan berbasis jasa;
- Meningkatkan *funding* dan transaksi di segmen Retail melalui implementasi Bank Penyalur Gaji (BPG) untuk ASN, meningkatkan akuisisi porsi haji dan promosi.
- Meningkatkan *funding* dan transaksi antara lain dengan mengoptimalkan transaksi melalui *cash management system*, meningkatkan penggunaan *virtual account* dan transaksi *remittance*.
- Memperkuat layanan perbankan elektronik dan meningkatkan aktivasi transaksi nasabah, melalui antara lain optimalisasi *mobile banking* dan promo untuk transaksi di *merchant* tertentu.
- Melakukan simulasi implementasi perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) sebagai tambahan rasio untuk pemantauan kondisi likuiditas Bank.

Liquidity Risk Management Strategy

- Implementing a soft limit on liquidity ratios, particularly for the AL/DPK and AL/NCD ratios, where internal monitoring applies stricter thresholds than those set by regulators.
- Monitoring liquidity risk daily to ensure the Bank's liquidity remains healthy.
- Developing a strategy to enhance liquidity, focusing on increasing low-cost funds and optimizing income generated from services.
- Increasing funding and transactions in the Retail segment by introducing Salary Distribution Banks (BPG) for civil servants (ASN), expanding hajj portion acquisitions, and running promotions.
- Expanding funding and transactions, among others, by optimizing the cash management system, increasing the use of virtual accounts, and promoting remittance transactions.
- Strengthening electronic banking services and increasing customer transaction activation through, among others, optimizing mobile banking and promoting transactions with certain merchants.
- Conducting simulations of the implementation of Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) calculations as additional ratios for monitoring the Bank's liquidity condition.



Teknik Mitigasi Risiko Likuiditas termasuk Indikator Peringatan Dini Permasalahan

Setiap harinya, Bank melakukan pemantauan atas risiko likuiditas melalui pelaporan atas pencapaian rasio-rasio likuiditas yang terangkum dalam *Liquidity Key Risk Indicator* (LKRI). Indikator-indikator yang masuk dalam laporan tersebut ialah parameter likuiditas yang menggambarkan fungsinya masing-masing, baik sebagai penyangga likuiditas, tingkat konsentrasi, ketergantungan pendanaan dan tingkat ekspansi bisnis Bank.

Penilaian atas kondisi likuiditas Bank diperoleh melalui hasil pemeringkatan secara komposit atas seluruh parameter, sehingga sebagai *output* penilaiannya akan diketahui tingkat risiko dari kondisi likuiditas Bank. Hasil penilaian atas kondisi likuiditas ini diinformasikan kepada Direksi secara harian sehingga ketika kondisi likuiditas terlihat menurun dapat diberikan arahan atas langkah-langkah pemulihan likuiditas yang harus dilakukan.

Likuiditas dan Rencana Pendanaan Darurat

Dalam hal pemantauan dan pengelolaan risiko likuiditas saat kondisi krisis, BMI telah mempunyai kebijakan yaitu *Contingency Funding Plan* (CFP), yang pelaksanaannya direpresentasikan melalui pelaksanaan rapat *Liquidity Crisis Mitigation Team* (LCMT) yang lebih intensif.

Pelaksanaan rapat LCMT dijalankan dengan mempertimbangkan hasil pemantauan status kondisi likuiditas Bank yang tercantum pada laporan LKRI dengan kondisi tertentu. Rapat LCMT ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan atas kondisi likuiditas Bank, terutama melalui perbaikan atas kinerja pendanaan dari sisi nasabah, maupun alternatif sumber pendanaan yang dapat diupayakan dari pasar uang.

Mekanisme Pengukuran dan Stress Test serta Pengendalian Risiko Likuiditas

Stress test likuiditas dilakukan oleh Bank sebagai salah satu metode manajemen risiko untuk mengevaluasi ketahanan modal, likuiditas dan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian pada suatu kejadian krisis yang *exceptional but plausible*, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memitigasi risiko dan menjaga modal.

Ruang lingkup pelaksanaan stress test likuiditas mencakup *regular issue* dan juga *forward looking scenario* yang mengacu pada kondisi terkini seperti kondisi pasar dan lingkungan bisnis dan dampaknya terhadap bisnis Bank.

Dalam perhitungan *stress test* likuiditas, Bank mengidentifikasi potensi tekanan yang mungkin terjadi untuk menilai kecukupan likuiditas dan cadangan aktiva likuid yang dimiliki dalam menyerap tekanan yang timbul serta langkah pencegahan dan penanggulangan yang tercantum dalam

Liquidity Risk Mitigation Techniques, including Early Warning Indicators of Issues

The Bank monitors liquidity risk daily by reporting the achievement of liquidity ratios, which are summarized in the Liquidity Key Risk Indicator (LKRI). The indicators in this report reflect various liquidity parameters that describe their respective functions, such as liquidity buffers, concentration levels, funding dependence, and the Bank's business expansion.

The Bank assesses its liquidity condition through a composite ranking of all these parameters, which helps determine the overall risk level of its liquidity status. The assessment results are reported to the Board of Directors daily, allowing for timely action if liquidity conditions are observed to be deteriorating. This enables the Board of Directors to provide guidance on the necessary steps to restore liquidity.

Liquidity and Contingency Funding Plan

To monitor and manage liquidity risk during a crisis, BMI has established a policy known as the Contingency Funding Plan (CFP). The implementation of this policy is supported by the more intensive meetings of the Liquidity Crisis Mitigation Team (LCMT).

The LCMT meetings are held based on the results of monitoring the Bank's liquidity status, as outlined in the LKRI report, under specific conditions. These meetings are designed to accelerate the recovery of the Bank's liquidity, particularly by improving funding performance from customers and exploring alternative funding sources in the money market.

Mechanism of Measurement and Stress Test and Liquidity Risk Control

The Bank conducts liquidity stress tests as a key risk management tool to assess the resilience of its capital, liquidity, and its ability to absorb losses during exceptional but plausible crisis incidents. These tests also help identify necessary actions to mitigate risks and maintain capital.

The scope of the liquidity stress test includes both regular issue and forward-looking scenarios that reflect current conditions, such as market trends and the business environment, and their potential impact on the Bank's operations.

In performing the liquidity stress test, the Bank identifies potential pressures that could arise to evaluate the adequacy of its liquidity and liquid asset reserves in absorbing such pressures. It also outlines preventive and mitigation measures in the CFP. The liquidity stress test is carried

CFP. Stress test likuiditas dilakukan secara berkala (sebulan sekali) dan dilaporkan kepada regulator.

Sistem Informasi Manajemen Risiko Likuiditas

Proses manajemen risiko likuiditas berperan penting dalam memantau kemampuan Bank dalam mengatasi kewajibannya kepada para *stakeholder*, maupun dalam mengantisipasi kebutuhan yang timbul dari lingkungan bisnis dan perilaku nasabah di masa mendatang.

Bank telah menerapkan proses pemantauan secara berkala dan responsif terhadap hasil penilaian atas kondisi likuiditas Bank secara harian, termasuk di dalamnya mengantisipasi potensi-potensi tekanan yang mungkin terjadi pada bisnis Bank.

Adapun beberapa hasil dari proses manajemen risiko likuiditas yang dijalankan oleh Bank dilaporkan melalui beberapa laporan berkala baik internal maupun eksternal, seperti:

1. Laporan *Key Risk Indicators* (LKRI),
2. Laporan *Stress Test* Likuiditas,
3. Informasi terkait Update Risiko Likuiditas yang disampaikan di rapat ALCO,
4. Informasi terkait Penarikan berdasarkan Perilaku Nasabah,
5. Informasi terkait Tingkat Konsentrasi Pendanaan (50 Deposan Inti).

Risiko Operasional

Pengungkapan Eksposur dan Penerapan Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional didefinisikan sebagai kerugian akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau isu eksternal yang dapat mempengaruhi operasional Bank. Kerugian dari dampak risiko operasional dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan mengganggu pencapaian visi dan misi bank.

Lemahnya pengendalian risiko operasional dapat menyebabkan dampak terhadap kegiatan usaha Bank yaitu meningkatnya biaya operasional dan pada akhirnya mengurangi laba usaha serta modal Bank. Selain itu, secara umum kelemahan ini akan mengakibatkan kelancaran operasional dan mutu pelayanan menjadi terganggu dan menurunkan kinerja dan daya saing BMI.

Kerangka Manajemen Risiko Operasional

Bank mengimplementasikan kerangka risiko operasional yang meliputi:

1. Ketentuan internal yang mengatur dalam bentuk kebijakan, prosedur dan petunjuk teknis terkait strategi, proses, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko operasional;

out periodically (on a monthly basis), and the results are reported to the regulator.

Liquidity Risk Management Information System

The liquidity risk management process is crucial in monitoring the Bank's ability to meet its obligations to stakeholders, as well as in anticipating future needs arising from the business environment and customer behavior.

The Bank has established a responsive and periodic monitoring process to assess the daily liquidity status, which includes anticipating potential pressures that could arise in its operations.

The outcomes of the liquidity risk management process carried out by the Bank are reported through various periodic reports, both internal and external, such as:

1. Key Risk Indicators (LKRI) Report,
2. Liquidity Stress Test Report,
3. Information on the Liquidity Risk Update, presented at ALCO meetings,
4. Information on Withdrawals based on Customer Behavior,
5. Information on Funding Concentration Level (50 Core Depositors).

Operational Risk

Disclosure of Exposure and Implementation of Operational Risk Management

Operational risk refers to losses caused by inadequate and/or failed internal processes, human errors, system failures, or external factors that could impact the Bank's operations. The losses resulting from operational risk can affect the Bank's financial performance and hinder the achievement of its vision and mission.

Weak operational risk control may impact the Bank's business activities, which is increasing operational costs and ultimately reducing the Bank's operating profit and capital. In addition, this weakness will, in general, disrupt the smooth operation and quality of service and reduce BMI's performance and competitiveness.

Operational Risk Management Framework

The Bank implements an operational risk framework that includes:

1. Internal regulations such as policies, procedures, and technical guidelines that govern strategies, processes, controls, and operational risk management information systems;



2. Pembentukan organisasi dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang berkepentingan; 3. Pelaksanaan <i>dual control</i> dan <i>segregation of duties</i> dalam kegiatan operasional Bank. 4. Limit operasional yang ditetapkan secara berjenjang dan dikaji berkala sesuai dengan dinamika bisnis Bank. 5. <i>Risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> atas risiko operasional termasuk siber yang dikaji berkala dan dipantau.	2. The establishment of an organization with roles and responsibilities for all relevant parties. 3. The implementation of dual control and segregation of duties in the Bank's operational activities. 4. Setting operational limits in phases, with periodic reviews in line with the Bank's business dynamics. 5. Defining and regularly reviewing the Bank's risk appetite and tolerance for operational risks, including those related to cyber threats.

Organisasi Manajemen Risiko Operasional

Organisasi Manajemen Risiko Operasional Organisasi manajemen risiko operasional yang memastikan bahwa DPS, Dewan Komisaris dan Direksi serta komite di bawahnya melaksanakan fungsinya dengan baik. Termasuk dalam organisasi manajemen risiko adalah dibentuknya unit kerja terkait dengan operasional yang terdiri dari 3 (tiga) lini pertahanan manajemen risiko dengan fungsinya masing-masing, sebagai berikut:

Operational Risk Management Organization

The Operational Risk Management Organization ensures that the Sharia Supervisory Board (DPS), Board of Commissioners, and Board of Directors, as well as the committees they oversee, carry out their duties effectively. The risk management organization includes the establishment of relevant operational work units, which consist of three (3) lines of defense in risk management, each with its own function, as follows:

Organisasi Organization	Tanggung Jawab	Responsibilities
Dewan Komisaris The Board of Commissioners	Menjalankan fungsi pengawasan risiko operasional melalui ROC, Audit Committee dan GCG Committee.	Perform operational risk monitoring function through ROC, the Audit Committee, and the GCG Committee.
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	Memastikan pengawasan atas bisnis Bank, khususnya dalam hal penerbitan produk maupun program bisnis baru, agar tetap terjaga sesuai dengan aspek syariah, dalam hal ini meliputi produk dan program, proses bisnis yang terlibat dan juga pemanfaatan teknologi dalam aktivitas bisnis Bank.	To ensure supervision of the Bank's business, especially in terms of the issuance of new products and business programs, so that it is maintained in accordance with sharia aspects, in this case including products and programs, business processes involved and also the use of technology in the Bank's business activities.
Direksi The Board of Directors	1. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko operasional telah memadai sesuai dengan karakteristik kompleksitas dan profil risiko Bank serta memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank; 2. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Direksi membentuk Risk Management Committee yang memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko operasional telah memberikan perlindungan memadai bagi Bank.	1. Ensure adequate function of operational risk management, in line with the Bank's complexity characteristics and risk profile, as well as fully understand the type and level of risk inherent in the Bank's business activities; 2. In carrying out its responsibilities, the Board of Directors established a Risk Management Committee, which ensures that the operational risk management framework provides adequate protection for the Bank.
Unit kerja terkait risiko operasional, terdiri dari unit kerja yang berdasarkan tiga lini pertahanan manajemen risiko Work units related to operational risks, which consist of work units based on three lines of defense in risk management	1. Lini pertahanan pertama manajemen risiko operasional adalah seluruh unit kerja di Bank yang dalam fungsinya memiliki risiko inheren masing-masing dan bertanggung jawab atas pengelolaan risiko operasionalnya sehari-hari, dan melaporkan permasalahan dan kejadian risiko operasional kepada SKMR. 2. Lini pertahanan kedua manajemen risiko operasional adalah SKMR yang berfungsi untuk meyakini bahwa risiko yang dihadapi Bank dalam diidentifikasi, diukur dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar, serta unit kepatuhan yang memastikan kepatuhan Bank atas rasio operasional yang harus dijaga. SKMR juga berperan dalam penyusunan kebijakan dan perangkat manajemen risiko operasional. 3. Lini pertahanan ketiga manajemen risiko operasional adalah unit internal audit yang bertanggung jawab melakukan <i>risk-based audit</i> yang memberikan <i>added value</i> kepada lini pertahanan pertama dan kedua, untuk memastikan bahwa seluruh elemen Bank telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik termasuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan manajemen Bank dan regulasi yang berlaku.	1. The first line of defence in operational risk management is all of the Bank's work units, which in their respective functions, have inherent risks and are responsible for managing their daily operational risks and reporting issues and incidents in operational risk to RMWU. 2. The second line of defence in operational risk management is RMWU, which ensures that the risks faced by the Bank are identified, measured, monitored, controlled, and reported correctly, and the compliance unit, which ensures the Bank's compliance in maintaining operational ratios. RMWU also plays a role in formulating policies and tools in operational risk management. 3. The third line of defence in operational risk management is the internal audit unit, which is responsible for conducting risk-based audits that provide added value to the first and second line of defence, making sure that all elements of the Bank have carried out their functions and responsibilities properly, including ensuring compliance with the Bank's management policies applicable regulations.

Strategi Manajemen Risiko Operasional

1. Meningkatkan efektivitas penerapan dan pemantauan risiko operasional melalui program *Operational Risk Champion* (ORION) yang memfasilitasi proses manajemen risiko operasional di unit kerja masing-masing;
2. Memastikan kinerja pencapaian atas *risk appetite* dan *risk tolerance* Bank atas risiko operasional serta menjaga agar kerugian risiko operasional Bank berada di bawah *risk tolerance* untuk risiko operasional secara *bankwide*, maupun atas risiko siber;
3. Melaksanakan program budaya risiko melalui :
 - a. Penyampaian *e-mail blast* terkait *operational risk awareness*, termasuk terkait *Anti Fraud* dan *IT Security Awareness* kepada seluruh karyawan;
 - b. Sosialisasi secara langsung terkait *operational risk awareness* dan *Anti Fraud* maupun secara langsung baik di kantor cabang maupun di unit kerja Kantor Pusat;
 - c. Pelaksanaan Muamalat Internal Certification (MIC) dengan tambahan pada tahun 2024 terkait *Cyber Risk Awareness*;
4. Menjaga agar kerugian risiko operasional Bank berada di bawah *risk tolerance* untuk risiko operasional;
5. Melakukan pemantauan atas proyek perbaikan terkait dengan risiko operasional yang menjadi perhatian Bank, antara lain terkait dengan kualitas data dan dokumentasi pembiayaan;
6. Melaksanakan strategi *Anti Fraud*, antara lain dengan :
 - a. Mengimplementasikan *Fraud Detection System* (FDS) untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan menggunakan *tools* yang dikembangkan oleh internal Bank;
 - b. Melaksanakan sosialisasi implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di beberapa cabang secara *offline* dan *online*;
 - c. Melakukan *surprised visit* ke cabang atau unit kerja yang berisiko *fraud* tinggi.
7. Memisahkan tugas dan fungsi berdasarkan konsep *four eyes principles* yang jelas untuk memastikan objektivitas dan menghindari benturan kepentingan;
8. Melakukan kajian risiko terhadap proses/produk Bank;
9. Mengimplementasikan perangkat risiko operasional dalam pengelolaan risiko operasional Bank, salah satunya yakni aplikasi untuk pencatatan LED dengan nama ORBIT sebagai sarana pelaporan kejadian risiko operasional yang digunakan untuk seluruh unit kerja dalam melakukan pelaporan rutin setiap bulan, baik jika ada kejadian risiko operasional maupun nihil ;
10. Melakukan perbaikan risiko keamanan dan ketahanan siber untuk mengantisipasi serangan siber;
11. Mengimplementasikan perangkat risiko operasional dalam pengelolaan risiko operasional Bank;
12. Mengimplementasikan *Business Continuity Management* (BCM) untuk mengendalikan risiko akibat kejadian eksternal.

Operational Risk Management Strategy

1. Improve the effectiveness of operational risk implementation and monitoring through the Operational Risk Champion (ORION) program, which facilitates the operational risk management process within each unit;
2. Ensure the achievement of the Bank's risk appetite and risk tolerance for operational risks, while maintaining that the operational risk losses are below the operational risk tolerance Bank-wide, including cyber risks;
3. Implement a risk culture program through:
 - a. Sending email blasts regarding operational risk awareness, including Anti-Fraud and IT Security Awareness to all employees;
 - b. Direct socialization on operational risk awareness and Anti-Fraud, either in branch offices or at the Head Office;
 - c. Carrying out the Muamalat Internal Certification (MIC) program, with an additional focus on Cyber Risk Awareness in 2024;
4. Ensure that the Bank's operational risk losses remain below the risk tolerance for operational
5. Monitor improvement projects related to operational risks that are of concern to the Bank, including those concerning data quality and financing documentation;
6. Implement an Anti-Fraud strategy, including:
 - a. Implementing a Fraud Detection System (FDS) to detect suspicious transactions using tools developed internally by the Bank;
 - b. Conducting socialization of the implementation of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) at several branches both offline and online;
 - c. Conducting surprise visits to branches or units with high fraud risk;
7. Separate tasks and functions based on the concept of the four eyes principle to ensure objectivity and avoid conflicts of interest;
8. Conduct risk assessments on Bank processes/products;
9. Implement operational risk management tools in managing the Bank's operational risks, one of which is the application for recording LED incidents, called ORBIT, as a means of reporting operational risk events used by all work units for monthly routine reporting, whether or not an operational risk incident occurs;
10. Make improvements to cybersecurity and resilience risks to anticipate cyber attacks;
11. Implement operational risk management tools in the management of the Bank's operational risks;
12. Implement Business Continuity Management (BCM) to control risks arising from external incidents.



Sistem Informasi Manajemen Risiko Operasional

Proses penerapan manajemen risiko operasional Bank semakin berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan semakin berkembangnya bentuk produk bisnis Bank yang ditawarkan kepada nasabah. Selain itu perkembangan teknologi informasi digital yang telah terintegrasi dalam platform bisnis Bank turut pula menuntut pengawasan intensif atas setiap potensi risiko yang muncul, yang dapat menimbulkan kerugian dari sisi nasabah namun juga bagi Bank dalam hal penjagaan reputasinya dalam menyediakan layanan perbankan kepada nasabah.

Bank secara berkelanjutan terus berupaya meningkatkan kualitas atas proses pemantauan secara berkala dari sisi bisnis proses yang dijalankannya, di mana beberapa hasil dari proses manajemen risiko operasional yang dijalankan oleh Bank dilaporkan melalui beberapa laporan berkala, seperti:

1. Laporan *Key Risk Indicator* Risiko Operasional,
2. Laporan pemantauan Kejadian Risiko Operasional sesuai *risk appetite*,
3. Laporan Hasil Kajian atas LED dan RCSA dari seluruh unit kerja terkait.

Risiko Lainnya

Bank juga melakukan pengelolaan risiko lainnya yang mencakup risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi.

Organisasi Manajemen Risiko Lainnya

Bank memisahkan unit kerja yang berperan mengelola risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi dengan satuan kerja operasional lainnya sesuai dengan prinsip *three lines of defense* dan memastikan bahwa proses *dual control* dan *segregation of duties* dilaksanakan dengan baik.

Kerangka Manajemen Risiko Lainnya

Bank memiliki ketentuan internal terkait pengelolaan risiko tersebut di atas, antara lain:

1. Kebijakan Umum Pelindungan Data Pribadi;
2. Kebijakan Umum Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
3. Prosedur Komunikasi Bank Muamalat;
4. Prosedur *Corporate Social Responsibility* (CSR);
5. Prosedur Tanggap Darurat;
6. Prosedur Operasional *Business Continuity Management* (BCM) Kantor Cabang;
7. Prosedur Tata Kelola Dokumen PT Bank Muamalat Indonesia Tbk;
8. Petunjuk Teknis *Income Smoothing* Tanpa Cadangan;
9. Prosedur Pengajuan dan Penunjukan Advokat Rekanan;
10. Prosedur Operasional *Business Continuity Plan* (BCP) Kantor Cabang;

Operational Risk Management Information System

The Bank's operational risk management implementation has developed over time in line with the growing range of business products offered to customers. Furthermore, the integration of digital information technology into the Bank's business platform requires close monitoring of all potential risks, which could result in losses for both customers and the Bank, particularly in terms of maintaining its reputation for providing banking services.

The Bank is constantly striving to improve the quality of its periodic monitoring processes in the business activities that it carries out. Several outcomes of the Bank's operational risk management process are reported in various periodic reports, such as:

1. Operational Risk Key Risk Indicator Report,
2. Operational Risk Incident Monitoring Report according to Risk Appetite,
3. Report on the LED and RCSA Review Results for all relevant work units.

Other Risks

The Bank also manages other risks, including legal risk, reputational risk, strategic risk, compliance risk, return risk, and investment risk.

Other Risk Management Organization

The Bank separates the work units responsible for managing legal risk, reputational risk, strategic risk, compliance risk, return risk, and investment risk from other operational units in accordance with the "three lines of defense" principle and ensures that the dual control and segregation of duties processes are properly implemented.

Other Risk Management Frameworks

The Bank has internal provisions for managing the above risks, which include:

1. General Policy on Personal Data Protection
2. General Policy on Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector
3. Communication Procedure of Bank Muamalat
4. Corporate Social Responsibility (CSR) Procedures
5. Emergency Response Procedures
6. Operational Procedures for Business Continuity Management (BCM) at Branch Offices;
7. Document Governance Procedures for PT Bank Muamalat Indonesia Tbk;
8. Technical Guidelines for Income Smoothing without Reserves;
9. Procedure for Submission and Appointment of Partner Advocate;
10. Operational Procedure for the Business Continuity Plan (BCP) of the Branch Office;

11. Surat Edaran (SE) Direksi Penggunaan Kantor Akuntan Publik (KAP) Nasabah Segmen Enterprise;
12. Surat Edaran (SE) Direksi *Data Governance* dan *Data Ownership*;
13. Surat Edaran (SE) Direksi Ketentuan Produk Ijarah Muntahiya Bi Tamlik (IMBT) Segmentasi Enterprise Banking;
14. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Jaminan Fidusia Online;
15. Petunjuk Teknis *Review Perjanjian*, *Memorandum of Understanding*, dan *Non-Disclosure Agreement*.

Strategi Manajemen Risiko Lainnya

1. Melakukan penyesuaian organisasi Bank sesuai dengan dinamika perkembangan bisnis Bank.
2. Memastikan pencapaian bisnis Bank sesuai target yang telah ditetapkan dengan melalui koordinasi antar unit kerja;
3. Memastikan bahwa Bank mematuhi ketentuan regulator dan tindak lanjut atas komitmen kepada regulator dengan melakukan *reminder* dan evaluasi secara berkala oleh unit kerja Compliance;
4. Melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dari sisi kepatuhan melalui sosialisasi regulasi, *sharing* informasi, materi pelatihan, dan *compliance awareness*;
5. Menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui *website* Bank dan surat kabar dengan berkoordinasi bersama antar unit kerja dan meningkatkan pemberitaan positif mengenai Bank;
6. Memastikan bahwa Bank mempunyai panduan membuat kontrak, standar akad pembiayaan dan pengelolaan notaris rekanan;
7. Memastikan bahwa Bank telah memberikan tinjauan risiko hukum terkait Perjanjian Kerja Sama/*Non Disclosure Agreement* dengan pihak lain;
8. Menurunkan jumlah pengaduan nasabah dengan perbaikan sistem dan *maintenance* kanal-kanal transaksi Bank (*mobile banking*, ATM, *cash management system*);
9. Meningkatkan kualitas layanan ke nasabah dengan melakukan pembaharuan atas *sales kit*, prosedur layanan *frontliners*, video layanan sebagai pembelajaran, *service measurements* dan *service event*.

Sistem Informasi Manajemen Risiko Lainnya

1. Laporan berkala kepada Direksi mengenai eksposur risiko dan mitigasinya;
2. Laporan pemantauan aspek *prudential banking*;
3. Laporan kajian secara independen antara lain atas rasio regulatori dan ketentuan regulator yang baru diterapkan;
4. Laporan Rencana Bisnis Bank dan pencapaiannya.

11. Circular Letter (SE) of the Board of Directors on the Use of Public Accounting Firm (KAP) for Enterprise Segment Customers;
12. Circular Letter (SE) of the Board of Directors on Data Governance and Data Ownership;
13. Circular Letter (SE) of the Board of Directors on Provisions for Ijarah Muntahiya Bi Tamlik (IMBT) Products for Enterprise Banking Segmentation;
14. Technical guidelines for the implementation of online fiduciary guarantee services;
15. Technical Guidelines for Reviewing Agreements, Memorandums of Understanding, and Non-Disclosure Agreements.

Other Risk Management Strategies

1. Adjusting the Bank's organization in accordance with the dynamics of the Bank's business development;
2. Ensuring the Bank's business achievements are in accordance with the targets that have been set through coordination between work units;
3. Ensuring that the Bank complies with regulatory provisions and follows up on commitments to regulators by conducting periodic reminders and evaluations by the Compliance work unit;
4. Improving the quality of human resources in terms of compliance through regulatory socialization, information sharing, training materials, and compliance awareness;
5. Conveying information transparency to the public through the Bank's website and newspapers by coordinating with work units and increasing positive news about the Bank;
6. Ensuring that the Bank has a guideline for making contracts, financing agreement standards, and managing notary partners.
7. Ensuring that the Bank has provided a legal risk review for Cooperation Agreements/*Non-Disclosure Agreements* with other parties;
8. Reducing customer complaints by improving and maintaining the Bank's transaction channels (*mobile banking*, ATM, *cash management system*).
9. Improving customer service by updating sales kits, frontline service procedures, service videos for training, service measurements, and service events.

Other Risk Management Information Systems

1. Periodic risk exposure and mitigation reports to the Board of Directors;
2. Report on monitoring of prudential banking aspects;
3. Reports on independent review, including regulatory ratios and new provisions;
4. Progress reports on the Bank's Business Plan.



Muamalat DIN
The New Mobile Banking

Bank Muamalat
Pertama Murni Syariah

Unduh Versi Terbaru MDIN Sekarang!

KINI LIMIT TRANSFER DI MDIN LEBIH BESAR

BPKH

#AyoHijrah

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN

DISCLOSURE OF RISK EXPOSURE REPORT

A. Risiko Kredit

Credit Risk

1. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah

Individual Disclosure of Net Claims by Region

No.	Kategori Portofolio Portfolio Categories	31 Desember 2024 December 31, 2024					
		Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah Net Claim by Region					
		Jabodetabek Greater Jakarta	Jawa Java	Sumatera Sumatra	Kalimantan Kalimantan	Lainnya Others	Total Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan kepada Pemerintah Claim to The Government	25.945.346	-	-	-	-	25.945.346
2.	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	3.199.667	18.996	98.162	-	-	3.316.825
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan kepada Bank Claim to The Bank	651.152	35.378	21.463	-	56.265	764.258
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans	1.090.690	602.891	197.912	123.694	146.510	2.161.697
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans	2.609	5.039	7.991	2.129	4.740	22.508
7.	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan Retired Employee Credit	14.421	56.678	63.121	11.547	13.508	159.275
8.	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small and Retail Portfolio	1.308.495	1.329.667	324.548	138.138	373.989	3.474.837
9.	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	14.352.532	562.390	12.713	67.062	232.120	15.226.817
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on Past Due	377.295	88.848	7.637	8.220	7.324	489.324
11.	Aset Lainnya Others Asset	6.404.999	922.357	420.475	114.902	283.114	8.145.847
Total		53.347.206	3.622.244	1.154.022	465.692	1.117.570	59.706.734



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

	31 Desember 2023 December 31, 2023					
	Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah Net Claim by Region					
	Jabodetabek Greater Jakarta	Jawa Java	Sumatera Sumatra	Kalimantan Kalimantan	Lainnya Others	Total Total
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	27.282.719,0	-	-	-	-	27.282.719
	3.537.637,0	8.985	98.401	-	-	3.645.023
	-	-	-	-	-	-
	1.610.662,0	19.823	25.999	-	62.355	1.718.839
	1.305.342,0	646.932	263.164	151.196	188.786	2.555.420
	4.298,0	7.562	5.167	2.831	6.448	26.306
	19.639,0	22.306	23.430	4.647	4.297	74.319
	1.583.285,0	1.771.956	356.375	172.249	375.072	4.258.937
	17.182.688,0	1.668.732	41.029	73.424	893.867	19.859.740
	33.548,0	-	-	-	-	33.548
	5.808.050,0	760.894	222.436	62.721	191.041	7.045.142
	58.367.868	4.907.190	1.036.001	467.068	1.721.866	66.499.993

2. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Disclosure of Net Claims based on Remaining Contract Term

No.	Kategori Portofolio Portfolio Categories	31 Desember 2024 December 31, 2024				
		Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Net Claims based Remaining Contract Term				
		< 1 Tahun < 1 Year	>1-3 Tahun > 1-3 Years	>3-5 Tahun > 3-5 Years	Non- Kontraktual Non-Contractual	Total Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1.	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government	4.609.931	263.812	21.071.603	-	25.945.346
2.	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	504.357	1.142.361	1.670.107	-	3.316.825
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-
4.	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank	9.491	32.726	8.861	713.180	764.258
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans	37.478	507.216	1.617.003	-	2.161.697
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans	428	6.105	15.975	-	22.508
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan Retired Employee Credit	7.544	38.947	112.784	-	159.275
8.	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small, and Retail Portfolio	496.666	1.010.023	1.968.148	-	3.474.837
9.	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	2.179.232	1.747.985	11.241.634	57.966	15.226.817
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on Past Due	326.152	34.890	97.059	31.223	489.324
11.	Aset Lainnya Others Asset	-	-	-	8.145.847	8.145.847
Total		8.171.279	4.784.065	37.803.174	8.948.216	59.706.734



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

	31 Desember 2023 December 31, 2023				
	Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Net Claims based Remaining Contract Term				
	< 1 Tahun < 1 Year	>1-3 Tahun > 1-3 Years	>3-5 Tahun > 3-5 Years	Non-Kontraktual Non-Contractual	Total Total
	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
	5.808.154	259.801	21.214.764	-	27.282.719
	642.713	328.756	2.673.554	-	3.645.023
	-	-	-	-	-
	219.320	19.423	9.177	1.470.919	1.718.839
	56.221	356.408	2.142.791	-	2.555.420
	1.159	3.315	21.832	-	26.306
	3.786	19.147	51.386	-	74.319
	524.351	847.098	2.887.488	-	4.258.937
	3.742.431	2.032.064	14.035.837	49.408	19.859.740
	-	-	-	33.548	33.548
	442.272	-	-	6.602.870	7.045.142
	11.440.407	3.866.012	43.036.829	8.156.745	66.499.993

3. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Sektor Ekonomi

Disclosure of Net Claims by Economic Sector

No.	Sektor Ekonomi Economic Sector	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31 Desember 2024 December 31, 2024					
1.	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan Agriculture, Hunting, and Forestry	-	-	-	-
2.	Perikanan Fisheries	-	-	-	-
3.	Pertambangan dan Penggalian Mining and Quarrying	-	-	-	-
4.	Industri pengolahan Manufacturing Industry	-	478.638	-	-
5.	Listrik, Gas, dan Air Electricity, Gas, and Water	-	1.226.277	-	-
6.	Konstruksi Construction	-	15.997	-	-
7.	Perdagangan Besar dan Eceran Wholesale and Retail Trade	-	-	-	-
8.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan minum Accommodation Providers and Food and Beverage Providers	-	-	-	-
9.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi Transportation, Storage, and Communication	-	1.501.815	-	-
10.	Perantara Keuangan Financial Brokers	-	3.390	-	41.296
11.	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Real Estate, Rental Business, and Corporate Services	-	59.424	-	-
12.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Public Administration, Defense and Compulsory Social Security	-	-	-	-
13.	Jasa Pendidikan Education Services	-	-	-	5.608
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Health Services and Social Activities	-	-	-	-
15.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya Social Services, Socio-Cultural, Entertainment and Other Individual	-	-	-	-
16.	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Households Personal Services	-	-	-	-
17.	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya International and Extra International Agencies	-	-	-	-
18.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya Undefined Activities	-	-	-	-
19.	Bukan Lapangan Usaha Not a Business Field	-	-	-	-
20.	Lainnya Others	25.945.346	31.284	-	717.354
Total		25.945.346	3.316.825	-	764.258



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan Retired Employee Credit	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small and Retail Portfolio	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on past due	Aset Lainnya Others Asset
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	-	-	146.572	97.725	412	-
-	-	-	2.284	-	-	-
-	-	-	700	1.170.334	37.447	-
-	-	-	234.855	1.608.640	56.890	-
-	-	-	18.834	653.145	68.463	-
-	-	-	69.279	753.794	512	-
-	-	-	165.840	1.112.363	75.404	-
-	-	-	10.564	9.600	300	-
92	-	-	48.338	327.295	122.958	-
176	-	-	215.526	429.186	2.185	-
187	-	-	79.211	542.502	15.329	-
-	-	-	16	-	-	-
-	4.183	-	1.144.083	258.734	107	-
-	-	-	277.441	65.967	8.843	-
49	-	-	54.950	3.507	1.145	-
-	-	-	3.726	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2.147.860	18.245	158.524	877.947	-	67.989	-
13.333	80	751	124.671	8.194.025	31.340	8.145.847
2.161.697	22.508	159.275	3.474.837	15.226.817	489.324	8.145.847

No.	Sektor Ekonomi Economic Sector	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31 Desember 2023 December 31, 2023					
1.	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan Agriculture, Hunting, and Forestry	-	-	-	-
2.	Perikanan Fisheries	-	-	-	-
3.	Pertambangan dan Penggalian Mining and Quarrying	-	-	-	-
4.	Industri pengolahan Manufacturing Industry	-	538.099	-	-
5.	Listrik, Gas, dan Air Electricity, Gas, and Water	-	1.192.758	-	-
6.	Konstruksi Construction	-	8.985	-	-
7.	Perdagangan Besar dan Eceran Wholesale and Retail Trade	-	-	-	-
8.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan minum Accommodation Providers and Food and Beverage Providers	-	-	-	-
9.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi Transportation, Storage, and Communication	-	1.512.982	-	-
10.	Perantara Keuangan Financial Brokers	-	313.078	-	43.383
11.	<i>Real Estate</i> , Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Real Estate, Rental Business, and Corporate Services	-	66.216	-	-
12.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Public Administration, Defense and Compulsory Social Security	-	-	-	-
13.	Jasa Pendidikan Education Services	-	-	-	-
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Health Services and Social Activities	-	-	-	-
15.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya Social Services, Socio-Cultural, Entertainment and Other Individual	-	-	-	-
16.	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Households Personal Services	-	-	-	-
17.	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya International and Extra International Agencies	-	-	-	-
18.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya Undefined Activities	-	-	-	-
19.	Bukan Lapangan Usaha Not a Business Field	-	-	-	-
20.	Lainnya Others	27.282.719	12.905	-	1.675.456
Total		27.282.719	3.645.023	-	1.718.839



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan Retired Employee Credit	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small and Retail Portfolio	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on past due	Aset Lainnya Others Asset
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	-	-	237.232	191.455	-	-
-	-	-	3.250	-	-	-
-	-	-	2.452	1.343.543	-	-
-	-	-	304.730	2.174.656	-	-
-	-	-	449	888.946	-	-
-	102	-	77.051	872.957	-	-
130	-	-	208.213	2.157.177	-	-
-	-	-	33.001	10.172	-	-
105	-	-	90.065	1.523.608	-	-
-	-	773	402.066	869.494	-	-
456	-	-	92.983	1.277.896	-	-
-	-	-	18	-	-	-
-	642	-	1.573.569	241.837	-	-
-	-	-	291.545	40.534	-	-
61	-	-	126.017	1.470	-	-
-	-	-	6.412	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2.537.471	25.431	73.165	735.735	-	-	-
17.197	131	381	74.149	8.265.995	33.548	7.045.142
2.555.420	26.306	74.319	4.258.937	19.859.740	33.548	7.045.142

4. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan berdasarkan Wilayah Disclosure of Bills and Allowance by Region

No	Kategori Portofolio Portfolio Categories	31 Desember 2024 December 31, 2024					
		Wilayah Region					
		Jabodetabek Greater Jakarta	Jawa Java	Sumatera Sumatra	Kalimantan	Lainnya Others	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Claims	49.763.103	3.622.244	1.154.021	465.692	1.117.570	56.122.630
2.	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai (<i>Impaired</i>) Impaired Claims						-
	a. Belum Jatuh Tempo Not Past Due Yet	46.504.547	3.261.554	1.103.214	443.169	860.122	52.172.606
	b. Telah Jatuh Tempo Past Due	3.258.556	360.690	50.807	22.523	257.448	3.950.024
3.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) – Individual Allowance for Impairment Losses – Individual	76.820	-	-	-	-	76.820
4.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) – Kolektif Allowance for Impairment Losses – Collective	322.240	37.800	8.743	4.166	13.180	386.129
5.	Tagihan yang Dihapus Buku Written-Off Claims	1.168.044	138.134	148.764	25.336	52.935	1.533.213



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

31 Desember 2023 December 31, 2023						
	Wilayah Region					
	Jabodetabek Greater Jakarta	Jawa Java	Sumatera Sumatra	Kalimantan	Lainnya Others	Total
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	47.632.766	4.146.297	813.564	404.346	1.530.825	54.527.798
						-
	44.574.883	3.773.356	660.095	363.327	1.136.063	50.507.724
	3.057.883	372.941	153.468	41.019	394.762	4.020.073
	137.691	-	-	-	-	137.691
	390.159	106.693	14.443	9.228	21.550	542.073
	1.169.290	139.803	152.543	25.607	54.762	1.542.005

5. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan berdasarkan Sektor Ekonomi

Disclosure of Claims and Allowance by Economic Sector

No		31 Desember 2024 December 31, 2024					
		Tagihan Claim	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Claims		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual Allowance for Impairment Losses - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif Allowance for Impairment Losses - Collective	Tagihan yang Hapus Buku Written-Off Claims
			Belum Jatuh Tempo Not Past Due Yet	Telah Jatuh Tempo Past Due			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan Agriculture, Hunting, and Forestry	244.709	244.222	487	-	2.513	-
2.	Perikanan Fisheries	2.284	2.284	-	-	23	-
3.	Pertambangan dan Penggalian Mining and Quarrying	1.208.481	1.020.297	188.184	-	14.898	-
4.	Industri Pengolahan Manufacturing Industry	2.379.023	1.728.641	650.382	-	35.537	-
5.	Listrik, Gas, dan Air Electricity, Gas, and Water	1.966.719	1.532.334	434.385	-	27.072	-
6.	Konstruksi Construction	839.581	604.032	235.549	-	12.198	-
7.	Perdagangan Besar dan Eceran Wholesale and Retail Trade	1.353.607	368.626	984.981	-	29.752	-
8.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Accommodation Providers and Food & Beverage Providers	20.464	12.971	7.493	-	327	-
9.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi Transportation, Storage, and Communication	2.000.498	1.626.315	374.183	76.820	22.556	-
10.	Perantara Keuangan Financial Brokers	691.760	689.575	2.185	-	8.835	-
11.	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Real Estate, Rental Business, and Corporate Services	696.654	630.998	65.656	-	8.631	-
12.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Public Administration, Defense, and Compulsory Social Security	16	-	16	-	-	-
13.	Jasa Pendidikan Education Services	1.412.715	1.350.253	62.462	-	15.010	-
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Health Services and Social Activities	352.250	330.204	22.046	-	4.313	-
15.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya Social Services, Socio-Cultural, Entertainment and Other Individual	59.652	46.433	13.219	-	982	-
16.	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Households Personal Services	3.726	3.726	-	-	37	-
17.	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya International and Extra International Agencies	-	-	-	-	-	-
18.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya Undefined Activities	-	-	-	-	-	-
19.	Bukan Lapangan Usaha Not a Business Field	3.270.565	2.980.108	290.457	-	42.210	-
20.	Lainnya Others	39.619.926	39.001.587	618.339	-	161.235	1.533.213
Total		56.122.630	52.172.606	3.950.024	76.820	386.129	1.533.213



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

31 Desember 2023 December 31, 2023						
	Tagihan Claim	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Claims		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual Allowance for Impairment Losses - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif Allowance for Impairment Losses - Collective	Tagihan yang Hapus Buku Written-Off Claims
		Belum Jatuh Tempo Not Past Due Yet	Telah Jatuh Tempo Past Due			
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	428.687	412.550	16.137	-	4.653	-
	3.250	3.250	-	-	33	-
	1.345.995	1.213.785	132.210	-	13.184	-
	3.017.485	1.662.174	1.355.311	-	69.448	-
	2.082.153	1.692.767	389.386	-	19.268	-
	959.095	949.312	9.783	-	12.865	-
	2.365.520	1.997.934	367.586	-	80.098	-
	43.174	32.630	10.544	-	389	-
	3.126.760	2.853.649	273.111	137.691	30.216	-
	1.628.793	1.629.473	(680)	-	20.927	-
	1.437.551	650.185	787.366	-	29.689	-
	18	-	18	-	3	-
	1.816.049	1.767.389	48.660	-	17.930	-
	332.079	330.930	1.149	-	3.313	-
	127.548	110.608	16.940	-	9.791	-
	6.412	4.383	2.029	-	56	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	3.371.801	3.115.920	255.882	-	71.902	-
	32.435.428	32.080.785	354.641	-	158.308	1.542.005
	54.527.798	50.507.724	4.020.073	137.691	542.073	1.542.005

6. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Disclosure of Mutation Details of Allowance for Impairment Losses

(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

No.	Keterangan Information	31 Desember 2024 December 31, 2024		31 Desember 2023 December 31, 2023	
		CKPN Individual Allowance of Possible Losses- Individual	CKPN Kolektif Allowance for Impairment Losses-Collective	CKPN Individual Allowance for Impairment Losses-Individual	CKPN Kolektif Allowance for Impairment Losses-Collective
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Saldo Awal CKPN Allowance for Impairment Losses Beginning Balance	137.691	542.073	144.560	535.204
2.	Pembentukan (Pemulihan) CKPN pada Periode Berjalan (Net) Provisions (Reversal of Provisions) of Possible Losses in Current Year				
a.	Pembentukan CKPN pada Periode Berjalan Provisions of AIL in Current Year	-	-	-	56.958
b.	Pemulihan CKPN pada Periode Berjalan Reversal of AIL in Current Year	(60.871)	(139.199)	(8.090)	(150.886)
3.	CKPN yang Digunakan untuk Melakukan Hapus Buku atas Tagihan pada Periode Berjalan Allowance for Impairment Losses that used for Write-off in Current Year	-	-	-	-
4.	Pembentukan (Pemulihan) Lainnya pada Periode Berjalan Other Provisions (Other Reversal of Provisions) in Current Year	-	(16.745)	1.221	100.797
	Saldo Akhir CKPN Allowance for Impairment Losses Ending Balance	76.820	386.129	137.691	542.073



The advertisement features a blurred background of a modern building. In the foreground, a man in a white shirt gives a thumbs up, and a man in a black apron holds a QR code. A large QR code labeled 'Syariah Payment' is prominently displayed. Various logos and text are overlaid on the image.

Muamalat Merchant App
Lantai 10 Menara Bank Muamalat

Bank Muamalat
Pertama Murni Syariah

Pembayaran Mudah dan Berkah Pakai Syariah Payment Aja!

Bayar Cashless Lebih Mudah!

Gak Perlu Pusing Uang Kembali

Pembayaran Berhasil!

Muamalat Merchant App

Syariah Payment

BPKH

#AyoHijrah

7. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

Disclosure of Net Claims by Portfolio Category and Rating Scale

No		31 Desember 2024				
		Net Claims				
		Lembaga Pemeringkat Rating Agencies	Peringkat Jangka Panjang Long-term Rating			
		Standard and Poor's	AAA	AA+ - AA-	A+ - A-	BBB+ - BBB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ - AA-	A+ - A-	BBB+ - BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 - Aa3	A1 - A3	Baa1 - Baa3
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) - AA-(idn)	A+(idn) - A-(idn)	BBB+(idn) - BBB-(idn)
		PT ICRA Indonesia	[Idr]AAA	[Idr]AA+ - [Idr]AA-	[Idr]A+ - [Idr]A-	[Idr]BBB+ - [Idr]BBB-
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ - idAA-	idA+ - id A-	id BBB+ - id BBB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government		-	-	-	-
2.	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities		2.629.930	18.002	520.452	2.999
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions		-	-	-	-
4.	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank		47.796	12.398	7.496	101
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans					
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans					
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan Retired Employee Credit					
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small, and Retail Portfolio					
9.	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate		290.759	-	746.942	7.235
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on Past Due					
11.	Aset Lainnya Others Asset					
TOTAL			2.968.485	30.400	1.274.890	10.335



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

December 31, 2024								
Net Claims								
	Peringkat Jangka Pendek Short-term Rating						Tanpa Peringkat Non Rated	Total
BB+ - BB-	B+ - B-	Kurang dari B- Less than B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3 Less than A3		
BB+ - BB-	B+ - B-	Kurang dari B- Less than B-	F1+ - F1	F2	F3	Kurang dari F3 Less than F3		
Ba1 - Ba3	B1 - B3	Kurang dari B3 Less than B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3 Less than P-3		
BB+(idn) - BB-(idn)	B+(idn) - B-(idn)	Kurang dari B-(idn) Less than B-(idn)	F1+(idn) - F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn) Less than F3(idn)		
[Idr]BB+ - [Idr]BB-	[Idr]B+ - [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B- Less than [Idr]B-	[Idr]A1+ - [Idr]A1	[Idr]A2+ - [Idr]A2	[Idr]A3+ - [Idr]A3	Kurang dari [Idr]A3 Less than [Idr]A3		
id BB+ - id BB-	id B+ - id B-	Kurang dari idB- Less than idB-						
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
-	-	-	-	-	-	-	25.945.346	-
-	-	-	-	-	-	-	145.442	3.171.383
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	696.467	67.791
-	-	-	-	-	-	-	14.	1.044.936
-	-	-	-	-	-	-	40.969.136	4.284.110

NoKategori Portofolio Portfolio Categories		31 Desember 2023				
		Net Claims				
		Lembaga Pemeringkat Rating Agencies	Peringkat Jangka Panjang Long-term Rating			
		Standard and Poor's	AAA	AA+ - AA-	A+ - A-	BBB+ - BBB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ - AA-	A+ - A-	BBB+ - BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 - Aa3	A1 - A3	Baa1 - Baa3
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) - AA-(idn)	A+(idn) - A-(idn)	BBB+(idn) - BBB-(idn)
		PT ICRA Indonesia	[Idr]AAA	[Idr]AA+ - [Idr]AA-	[Idr]A+ - [Idr]A-	[Idr]BBB+ - [Idr]BBB-
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ - idAA-	idA+ - id A-	id BBB+ - id BBB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government		-	-	-	-
2.	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities		2.607.339	329.685	66.216	521.492
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions		-	-	-	-
4.	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank		109.018	220.743	6.286	101
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans					
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans					
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan Retired Employee Credit					
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small, and Retail Portfolio					
9.	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate		1.510.901	264.178	315.417	52.578
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on Past Due					
11.	Aset Lainnya Others Asset					
TOTAL			4.227.258	814.606	387.919	574.171



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

December 31, 2023								
Net Claims								
	Peringkat Jangka Pendek Short-term Rating						Tanpa Peringkat Non Rated	Total
BB+ - BB-	B+ - B-	Kurang dari B- Less than B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3 Less than A3		
BB+ - BB-	B+ - B-	Kurang dari B- Less than B-	F1+ - F1	F2	F3	Kurang dari F3 Less than F3		
Ba1 - Ba3	B1 - B3	Kurang dari B3 Less than B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3 Less than P-3		
BB+(idn) - BB-(idn)	B+(idn) - B-(idn)	Kurang dari B-(idn) Less than B-(idn)	F1+(idn) - F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn) Less than F3(idn)		
[Idr]BB+ - [Idr]BB-	[Idr]B+ - [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B- Less than [Idr]B-	[Idr]A1+ - [Idr]A1	[Idr]A2+ - [Idr]A2	[Idr]A3+ - [Idr] A3	Kurang dari [Idr]A3 Less than [Idr]A3		
id BB+ - id BB-	id B+ - id B-	Kurang dari idB- Less than idB-						
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
-	-	-	-	-	-	-	27.282.719	-
-	-	-	-	-	-	-	120.291	3.524.732
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1.382.691	336.148
590.044	-	-	-	-	-	-	17.126.622	2.733.118
590.044	-	-	-	-	-	-	45.912.323	6.593.998

8. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan Disclosure of Counterparty Credit Risk

a. Transaksi Derivatif | Derivative Transactions

No	Variabel yang Mendasari Underlying Variable	31 Desember 2024 December 31, 2024							
		Notional Amount			Tagihan Derivatif Derivative Claim	Kewajiban Derivatif Derivative Liabilities	Tagihan Bersih sebelum MRK Net Claim before CRM	MRK CRM	Tagihan Bersih setelah MRK Net Claim after CRM
		≤ 1 Tahun ≤ 1 Year	> 1 Tahun- < 5 Tahun > 1 Year- < 5 Years	> 5 Tahun > 5 Years					
1.	Shariah Compliant Profit Rate Swap	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Shariah Compliant Foreign Currency Swap	460.317	-	-	453	-	5.056	-	5.056
3.	Lainnya Others	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		460.317	-	-	453	-	5.056	-	5.056

b. Transaksi Repo | Repo Transactions

No	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2024 December 31, 2024			
		Nilai Wajar SSB Repo Fair Value of SSB Repo	Kewajiban Repo Obligatory Repo	Tagihan Bersih Net Charges	ATMR
1.	Tagihan kepada Pemerintah Claims to Government	-	-	-	-
2.	Tagihan kepada Entitas Publik Bill on Public Entity	-	-	-	-
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Bill on Development Bank Multilateral and International Institutions	-	-	-	-
4.	Tagihan kepada Bank Bill to the Bank	-	-	-	-
5.	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Bill on Micro Business, Enterprises Small, and Retail Portfolio	-	-	-	-
6.	Tagihan kepada Korporasi Corporate Bill	-	-	-	-
Total		-	-	-	-

c. Transaksi Reverse Repo | Reverse Repo Transactions

No	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2024 December 31, 2024			
		Tagihan Bersih Net Charges	Nilai MRK MRK Value	Tagihan Bersih Setelah MRK Net Charges after MRK	ATMR Setelah MRK ATMR after MRK
1.	Tagihan kepada Pemerintah Claims to Government	-	-	-	-
2.	Tagihan kepada Entitas Publik Bill on Public Entity	-	-	-	-
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Bill on Development Bank Multilateral and International Institutions	-	-	-	-
4.	Tagihan kepada Bank Bill to the Bank	-	-	-	-
5.	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Bill on Micro Business, Enterprises Small, and Retail Portfolio	-	-	-	-
6.	Tagihan kepada Korporasi Corporate Bill	-	-	-	-
Total		-	-	-	-



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

31 Desember 2023 December 31, 2023								
	Notional Amount			Tagihan Derivatif Derivative Claim	Kewajiban Derivatif Derivative Liabilities	Tagihan Bersih sebelum MRK Net Claim before CRM	MRK CRM	Tagihan Bersih setelah (MRK) Net Claim after CRM
	≤ 1 Tahun ≤ 1 Year	> 1 Tahun- < 5 Tahun > 1 Year- < 5 Years	> 5 Tahun > 5 Years					
	-	-	-	-	-	-	-	-
	209.079	61.588	-	3.337	-	8.507	-	8.507
	-	-	-	-	-	-	-	-
	209.079	61.588	-	3.337	-	8.507	-	8.507

31 Desember 2023 December 31, 2023				
	Nilai Wajar SSB Repo Fair Value of SSB Repo	Kewajiban Repo Obligatory Repo	Tagihan Bersih Net Charges	ATMR
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

31 Desember 2023 December 31, 2023				
	Tagihan Bersih Net Charges	Nilai MRK MRK Value	Tagihan Bersih Setelah MRK Net Charges after MRK	ATMR Setelah MRK ATMR after MRK
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

9. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

Disclosure of Net Claims based on Risk Weighted After Impact Calculation of Credit Risk Mitigation

No	Kategori Portofolio Portfolio Categories	31 Desember 2024				
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit				
		0%	20%	35%	40%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A Eksposur Neraca Exposure on Balance Sheet						
1	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government	25.945.346	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	-	2.678.985	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank	46.577	698.239	-	-	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans	6.013	1.024.568	1.131.116	-	
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans	2.512	-	-	-	
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan Retired Employee Credit	30.711	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small, and Retail Portfolio	567.524	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	8.018.677	291.655	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on Past Due	44.244	-	-	-	
11	Aset Lainnya Others Asset	-	-	-	-	
	Total Eksposur Neraca Total Exposure on Balance Sheet	34.661.604	4.693.447	1.131.116	-	
B Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi Commitments and Contingencies Report Exposure						
1	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank	-	-	-	-	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans	-	-	-	-	
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans	-	-	-	-	
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan Retired Employee Credit	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small, and Retail Portfolio	-	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	-	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on Past Due	-	-	-	-	
	Total Eksposur TRA Total Exposure on Off Balance Transactions	-	-	-	-	
C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) Exposure on Counterparty Credit Risk						
1	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank	-	4.555	-	-	
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small, and Retail Portfolio	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	-	-	-	-	
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk Total Exposure on Counterparty Credit Risk	-	4.555	-	-	



December 31, 2024							ATMR	Beban Modal Capital Charge
	Net Claims Based on Risk Weighted After Impact Calculation of Credit Risk Mitigation							
	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya Others		
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	-	-	-	-	-		-	-
	-	637.840	-	-	-		854.717	85.472
	-	-	-	-	-		-	-
	-	14.887	-	-	-		147.091	14.709
	-	-	-	-	-		600.804	60.080
	-	-	-	19.996	-		19.996	2.000
	-	128.564	-	-	-		64.282	6.428
	-	-	2.907.313	-	-		2.180.485	218.048
	-	747.426	-	6.141.335	-		6.573.379	657.338
	-	-	-	445.080	-		445.080	44.508
	-	-	-	8.145.847	-		8.145.847	814.585
	-	1.528.717	2.907.313	14.752.258	-	-	19.031.681	1.903.168
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	27.223	-		27.223	2.722
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	27.223	-	-	27.223	2.722
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		911	91
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	501	-		501	50
	-	-	-	501	-	-	1.412	141

No	Kategori Portofolio Portfolio Categories	31 Desember 2023			
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit			
		0%	20%	35%	40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Eksposur Neraca Exposure on Balance Sheet					
1	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government	27.282.719	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	-	2.949.052	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank	38.283	1.668.374	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans	6.815	1.314.786	1.233.819	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans	3.514	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan Retired Employee Credit	30.557	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small, and Retail Portfolio	619.088	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	8.174.070	1.776.316	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on Past Due	-	-	-	-
11	Aset Lainnya Others Asset	-	-	-	-
Total Eksposur Neraca Total Exposure on Balance Sheet		36.155.046	7.708.528	1.233.819	-
B Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi Commitments and Contingencies Report Exposure					
1	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan Retired Employee Credit	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small, and Retail Portfolio	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on Past Due	-	-	-	-
Total Eksposur TRA Total Exposure on Off Balance Transactions		-	-	-	-
C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) Exposure on Counterparty Credit Risk					
1	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank	-	2.107	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small, and Retail Portfolio	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	-	-	-	-
Total Eksposur Counterparty Credit Risk Total Exposure on Counterparty Credit Risk		-	2.107	-	-



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

December 31, 2023							ATMR	Beban Modal Capital Charge
	Net Claims Based on Risk Weighted After Impact Calculation of Credit Risk Mitigation							
	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya Others		
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	-	-	-	-	-		-	-
	-	695.971	-	-	-		937.796	93.780
	-	-	-	-	-		-	-
	-	4.392	-	-	-		335.871	33.587
	-	-	-	-	-		694.794	69.479
	-	-	-	22.792	-		22.792	2.279
	-	43.762	-	-	-		21.881	2.188
	-	-	3.639.849	-	-		2.729.887	272.989
	-	315.735	-	9.550.543	-		10.063.674	1.006.367
	-	-	-	33.548	-		33.548	3.355
	-	-	-	7.045.142	-		7.045.142	704.514
	-	1.059.860	3.639.849	16.652.025	-	-	21.885.384	2.188.538
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-							

10. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit

Disclosure of Net Claims and Credit Risk Mitigation Techniques

(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

31 Desember 2024 December 31, 2024							
No	Kategori Portofolio Portfolio Categories	Tagihan Bersih Net Claim	Bagian yang Dijamin dengan Portion Secured by				Bagian yang Tidak Dijamin Portion not Secured
			Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Credit Insurance	Lainnya Others	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)- [(4)+(5)+(6)+(7)]
A Eksposur Neraca Exposure on Balance Sheet							
1	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government	25.945.346	-	-	-		25.945.346
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	3.316.825	-	-	-		3.316.825
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank	759.703	46.577	-	-		713.126
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans	2.161.697	6.013	-	-		2.155.684
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans	22.508	2.512	-	-		19.996
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan Retired Employee Credit	159.275	30.711	-	-		128.564
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small, and Retail Portfolio	3.474.837	567.524	-	-		2.907.313
9	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	15.199.093	8.018.677	-	-		7.180.416
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on Past Due	489.324	44.244	-	-		445.080
11	Aset Lainnya Others Asset	8.145.847	-	-	-		8.145.847
	Total Eksposur Neraca Total Exposure on Balance Sheet	59.674.455	8.716.258	-	-	-	50.958.197
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif Exposure on Commitments/ Contingencies for off Balance Sheet Transactions							
1	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government	-	-	-	-		-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	-	-	-	-		-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank	-	-	-	-		-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans	-	-	-	-		-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans	-	-	-	-		-



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

31 Desember 2024 December 31, 2024							
No	Kategori Portofolio Portfolio Categories	Tagihan Bersih Net Claim	Bagian yang Dijamin dengan Portion Secured by				Bagian yang Tidak Dijamin Portion not Secured
			Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Credit Insurance	Lainnya Others	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)- [(4)+(5)+(6)+(7)]
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan Retired Employee Credit	-	-	-	-		-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small, and Retail Portfolio	-	-	-	-		-
9	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	27.223	-	-	-		27.223
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on Past Due	-	-	-	-		-
Total Eksposur TRA Total Exposure on Off Balance Transactions		27.223	-	-	-	-	27.223
C Eksposur Neraca Exposure on Balance Sheet							
1	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government	-	-	-	-		-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	-	-	-	-		-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank	4.555	-	-	-		4.555
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small, and Retail Portfolio	-	-	-	-		-
6	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	501	-	-	-		501
Total Eksposur Counterparty Credit Risk Total Exposure on Counterparty Credit Risk		5.056	-	-	-	-	5.056
TOTAL (A+B+C)		59.706.734	8.716.258	-	-	-	50.990.476

(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

31 Desember 2023 December 31, 2023							
No	Kategori Portofolio Portfolio Categories	Tagihan Bersih Net Claim	Bagian yang Dijamin dengan Portion Secured by				Bagian yang Tidak Dijamin Portion not Secured
			Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Credit Insurance	Lainnya Others	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)- [(4)+(5)+(6)+(7)]
A Eksposur Neraca Exposure on Balance Sheet							
1	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government	27.282.719	-	-	-		27.282.719
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	3.645.023	-	-	-		3.645.023
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank	1.711.049	38.283	-	-		1.672.766
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans	2.555.420	6.815	-	-		2.548.605
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans	26.306	3.514	-	-		22.792
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan Retired Employee Credit	74.319	30.557	-	-		43.762
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small, and Retail Portfolio	4.258.937	619.088	-	-		3.639.849
9	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	19.816.664	8.174.070	-	-		11.642.594
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on Past Due	33.548	-	-	-		33.548
11	Aset Lainnya Others Asset	7.045.142	-	-	-		7.045.142
	Total Eksposur Neraca Total Exposure on Balance Sheet	66.449.127	8.872.327	-	-	-	57.576.800
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif Exposure on Commitments/ Contingencies for off Balance Sheet Transactions							
1	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government	-	-	-	-		-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	-	-	-	-		-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank	-	-	-	-		-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans	-	-	-	-		-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans	-	-	-	-		-



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

No		31 Desember 2023 December 31, 2023					
		Tagihan Bersih Net Claim	Bagian yang Dijamin dengan Portion Secured by				Bagian yang Tidak Dijamin Portion not Secured
			Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Credit Insurance	Lainnya Others	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)- [(4)+(5)+(6)+(7)]
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan Retired Employee Credit	-	-	-	-		-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small, and Retail Portfolio	-	-	-	-		-
9	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	42.358	-	-	-		42.358
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on Past Due	-	-	-	-		-
Total Eksposur TRA Total Exposure on Off Balance Transactions		42.358	-	-	-	-	42.358
C Eksposur Neraca Exposure on Balance Sheet							
1	Tagihan kepada Pemerintah Claim to the Government	-	-	-	-		-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claim to Public Sector Entities	-	-	-	-		-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claim to the Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank Claim to the Bank	7.790	-	-	-		7.790
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claim to Micro, Small, and Retail Portfolio	-	-	-	-		-
6	Tagihan kepada Korporasi Claim to Corporate	718	-	-	-		718
Total Eksposur Counterparty Credit Risk Total Exposure on Counterparty Credit Risk		8.507	-	-	-	-	8.507
TOTAL (A+B+C)		66.499.993	8.872.327	-	-	-	57.627.666

11. Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi Aset

Disclosure of Securitization Transactions

No		31 Desember 2024 December 31, 2024						
		Nilai Aset yang Disekuritisasi The Value of the Securitized Asset	Nilai Aset yang Disekuritisasi yang Mengalami Penurunan Nilai The Value of Assets that are Securitized which has Decreased Value		Laba/Rugi dari Aktivitas Sekuritisasi Profit/Loss from Securitization Activities	ATMR	Pengurang Modal Capital Reduction	
			Telah Jatuh Tempo Due	Belum Jatuh Tempo Not Due				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Bank Bertindak sebagai Kreditur Asal The Bank Acts as the Creditor	-			-			
2	Bank Bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung The Bank Acts as a Supporting Credit Provider	-	-	-	-	-	-	
	a. Fasilitas Penanggung Risiko Pertama First Risk Insurer Facility	-	-	-	-	-		
	b. Fasilitas Penanggung Risiko Kedua Second Risk Insurer Facility	-	-	-	-	-		
3	Bank Bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas The Bank Acts as a Facility Provider Liquidity	-	-	-	-	-		
4	Bank Bertindak sebagai Penyedia Jasa The Bank Acts as a Service Provider	-						
5	Bank Bertindak sebagai Bank Kustodian The Bank Acts as a Custodian Bank	-						
6	Bank Bertindak sebagai Pemodal The Bank Acts as Capitalist	-	-	-	-	-	-	
	a. Senior Tranche	-	-	-	-	-	-	
	b. Junior Tranche	-	-	-	-	-	-	
	Total	-	-	-	-		-	

12. Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Bank Bertindak sebagai Kreditur Awal

Disclosure of Summary Securitization Transaction Activity Bank as Creditor

No		31 Desember 2023 December 31, 2023		
		Nilai Aset yang Disekuritisasi The Value of the Securitized Asset	Keuntungan (Kerugian) Penjualan Sales Profit (Loss)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tagihan kepada Pemerintah Claims to Government	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claims on Public Sector Entities	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Bill on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	
4	Tagihan kepada Bank Claims on Banks	-	-	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Housing Backed Financing	-	-	
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Backed Financing	-	-	
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan Employee/Pension Funding	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claims on Micro, Small Business, and Retail Portfolios	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi Corporate Bill	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on past due	-	-	
11	Aset Lainnya Other Assets	-	-	
	Total	-	-	



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

	31 Desember 2023 December 31, 2023					
	Nilai Aset yang Disekuritisasi The Value of the Securitized Asset	Nilai Aset yang Disekuritisasi yang Mengalami Penurunan Nilai The Value of Assets that are Securitized which has Decreased Value		Laba/Rugi dari Aktivitas Sekuritisasi Profit/Loss from Securitization Activities	ATMR	Pengurang Modal Capital Reduction
		Telah Jatuh Tempo Due	Belum Jatuh Tempo Not Due			
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	-			-		
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
	7.237					
	-					
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	7.237	-	-	-		-

(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

31 Desember 2023 December 31, 2023	
Nilai Aset yang Disekuritisasi The Value of the Securitized Asset	Keuntungan (Kerugian) Penjualan Sales Profit (Loss)
(5)	(6)
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

13. Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

Disclosure of RWA Calculations for Credit Risk Using a Standardized Approach

a. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca

Disclosure of Assets Exposures in Balance Sheet

No	Kategori Portofolio Portfolio Categories	31 Desember 2024 December 31, 2024		
		Tagihan Bersih Claim Net	ATMR sebelum MRK RWA before CRM	ATMR setelah MRK RWA after CRM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah Claims to Government	25.945.346	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claims on Public Sector Entities	3.316.825	854.717	854.717
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Bill on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Claims on Banks	759.703	170.380	147.091
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans	2.161.697	640.952	639.378
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans	22.508	22.508	19.996
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan Employee/Pension Funding	159.275	79.638	64.282
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claims on Micro, Small Business, and Retail Portfolios	3.474.837	2.606.128	2.180.485
9	Tagihan kepada Korporasi Corporate Bill	15.199.093	14.592.056	6.573.379
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on the Past Due	489.324	489.324	445.080
11	Aset Lainnya Other Assets	8.145.847	-	7.364.584
Total		59.674.455	19.455.702	18.288.993

b. Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administrasi

Disclosure of Commitments/Contingent Exposure Balance Sheet

No	Kategori Portofolio Portfolio Categories	31 Desember 2024 December 31, 2024		
		Tagihan Bersih Claim Net	ATMR sebelum MRK RWA before CRM	ATMR setelah MRK RWA after CRM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah Claims to Government	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claims on Public Sector Entities	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Bill on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Claims on Banks	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Mortgage Loans	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Mortgage Loans	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan Employee/Pension Funding	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claims on Micro, Small Business, and Retail Portfolios	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi Corporate Bill	27.223	27.223	27.223
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Claim on the Past Due	-	-	-
Total		27.223	27.223	27.223



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

31 Desember 2023 December 31, 2023			
	Tagihan Bersih Claim Net	ATMR sebelum MRK RWA before CRM	ATMR setelah MRK RWA after CRM
	(3)	(4)	(5)
	27.282.719	-	-
	3.645.023	937.796	937.796
	-	-	-
	1.711.049	354.787	335.871
	2.555.420	746.619	744.763
	26.306	26.306	22.792
	74.319	37.160	21.881
	4.258.937	3.194.203	2.729.887
	19.816.664	18.237.744	10.063.674
	33.548	33.548	33.548
	7.045.142	-	6.324.933
	66.449.127	23.568.162	21.215.144

(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

31 Desember 2023 December 31, 2023			
	Tagihan Bersih Claim Net	ATMR sebelum MRK RWA before CRM	ATMR setelah MRK RWA after CRM
	(6)	(7)	(8)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	42.358	42.358	42.358
	-	-	-
	42.358	42.358	42.358

**c. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan
(Counterparty Credit Risk)**

Disclosure of Potential Credit Risk Exposure due to Failure of Competitor (Counterparty Credit Risk)

No	Kategori Portofolio Portfolio Categories	31 Desember 2024 December 31, 2024		
		Tagihan Bersih Claim Net	ATMR sebelum MRK RWA before CRM	ATMR setelah MRK RWA after CRM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah Claims to Government	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claims on Public Sector Entities	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Bill on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Claims on Banks	4.555	911	911
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Claims on Micro, Small Business, and Retail Portfolios	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi Corporate Bill	501	501	501
Total		5.056	1.412	1.412

d. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (Settlement Risk)

Disclosure of Potential Credit Risk Exposure Due to Failure of Settlement (Settlement Risk)

No	Kategori Portofolio Portfolio Categories	31 Desember 2024 December 31, 2024		
		Nilai Eksposur Exposure Value	Faktor Pengurang Modal Capital Reduction Factor	ATMR setelah MRK RWA after CRM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<i>Delivery versus payment</i>	-		-
a.	Beban modal 8% (5-15 hari) Capital expenses 8% (5-15 days)	-		-
b.	Beban modal 50% (16-30 hari) Capital expenses 50% (16-30 days)	-		-
c.	Beban modal 75% (31-45 hari) Capital expenses 75% (31-45 days)	-		-
d.	Beban modal 100% (lebih dari 45 hari) Capital expenses 100% (more than 45 days)	-		-
2	<i>Non-delivery versus payment</i>	-	-	-
Total		-	-	-



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

31 Desember 2023 December 31, 2023			
	Tagihan Bersih Claim Net	ATMR sebelum MRK RWA before CRM	ATMR setelah MRK RWA after CRM
	(6)	(7)	(8)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	7.790	3.263	3.263
	-	-	-
	718	718	718
	8.507	3.980	3.980

(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

31 Desember 2023 December 31, 2023			
	Nilai Eksposur Exposure Value	Faktor Pengurang Modal Capital Reduction Factor	ATMR setelah MRK RWA after CRM
	(6)	(7)	(8)
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-

e. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi Disclosure of Securitization Exposures

(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

No	Jenis Transaksi Type of Transaction	31 Desember 2024 December 31, 2024		31 Desember 2023 December 31, 2023	
		Faktor Pengurang Modal Capital Reduction Factor	ATMR setelah MRK RWA after CRM	Faktor Pengurang Modal Capital Reduction Factor	ATMR setelah MRK RWA after CRM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Fasilitas Pembiayaan Pendukung yang memenuhi persyaratan Supporting Financing Facilities that meet the requirements	-	-	-	-
2.	Fasilitas Pembiayaan Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan Supporting Financing Facilities that do not meet the requirements	-	-	-	-
3.	Fasilitas Pembiayaan yang memenuhi persyaratan Financing Facilities that meet the requirements		-		-
4.	Fasilitas Pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan Financing Facilities that do not meet the requirements	-	-	-	-
5.	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan Purchase of Asset Backed Securities that meet the requirements	-	6.998	-	6.998
6.	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan Purchase of Asset-Backed Securities that do not meet the requirements	-	-	-	-
7.	Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum Securitization exposures that are not covered by the Financial Services Authority Regulation on prudential principles in asset securitization activities for commercial banks		-		-
Total		-	6.998	-	6.998

f. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit Disclosure of Total Credit Risk Measurement

(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

Eksposur Sekuritisasi	31 Desember 2024 December 31, 2024	31 Desember 2023 December 31, 2023	Securitization Exposures
Total ATMR Risiko Kredit	18.324.626	21.268.481	Total of Risk Weighted Assets Credit Risk
Total Faktor Pengurang Modal	-	-	Total of Deduction from Capital Factor



B. Risiko Pasar Market Risk

(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

No	Jenis Risiko Risk Type	31 Desember 2023 December 31, 2023		31 Desember 2023 December 31, 2023	
		Beban Modal Capital Charge	ATMR	Beban Modal Capital Charge	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Risiko <i>Benchmark</i> Suku Bunga Interest Rate Benchmark Risk	1.875	23.437	1.496	18.699
	a. Risiko Spesifik Specific Risk	-	-	-	-
	b. Risiko Umum General Risk	1.875	23.437	1.496	18.699
2.	Risiko Nilai Tukar Foreign Exchange Risk	5.364	67.050	4.299	53.733
3.	Risiko Ekuitas ^{*)} Equity Risk ^{*)}				
4.	Risiko Komoditas ^{*)} Commodity Risk ^{*)}				
Total		7.239	90.487	5.795	72.432

^{*)} Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko
For banks that have subsidiary companies that have risk exposure

B. Risiko Likuiditas

Liquidity Risk

1. Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah

Disclosure of Maturity Profile for Rupiah

No	Pos-pos Posts	31 Desember 2024 December 31, 2024					
		Saldo Balance	Jatuh Tempo Due Date				
			≤ 1 Bulan ≤ 1 Month	> 1-3 Bulan > 1-3 Months	> 3-6 Bulan > 3-6 Months	> 6-12 Bulan > 6-12 Months	> 12 Bulan > 12 Months
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENT OF FINANCIAL POSITION							
A Aset Asset		48.487.864	2.893.732	782.143	1.568.907	1.656.349	41.586.733
1. Kas Cash		708.517	708.517	-	-	-	-
2. Penempatan pada Bank Indonesia Placement on Bank of Indonesia		2.778.730	1.275.000	-	-	-	1.503.730
3. Penempatan pada Bank Lain Placements on Other Banks		32.490	1.451	-	-	-	31.039
4. Surat Berharga Securities		30.604.800	244.361	125.768	760.000	519.623	28.955.048
5. Kredit yang Diberikan Loan							
a. Piutang murabahah (gross) Murabahah receivables (gross)		4.290.762	285.627	152.348	99.305	576.033	3.177.449
b. Piutang salam Salam		-	-	-	-	-	-
c. Piutang Istishna' Istishna'		936	-	-	-	-	936
d. Piutang qardh Qardh Receivables		328.513	78.254	12.369	3.573	18.915	215.402
6. Pembiayaan Bagi Hasil Financing Profit Sharing							
a. Pembiayaan mudharabah Mudharabah Financing		379.944	2.220	23.609	7.491	6.239	340.385
b. Pembiayaan musyarakah Musyarakah Financing		9.300.604	297.065	464.495	645.727	535.359	7.357.958
7. Pembiayaan sewa Lease Financing		7.234	991	22	1.462	180	4.579
8. Aset Lainnya Other Asset		55.334	246	3.532	51.349	-	207
B Kewajiban Liabilities		50.081.497	36.714.375	3.461.568	1.626.772	1.580.957	6.697.825
1. Dana Pihak Ketiga Third Party Funds							
a. Giro Wadiah Wadiah Demand Deposits		2.110.361	2.110.361	-	-	-	-
b. Deposito Mudharabah Mudharabah Time Deposits		17.038.165	11.374.384	3.104.987	1.553.839	1.004.955	-
c. Tabungan Wadiah Wadiah Savings		7.128.126	7.128.126	-	-	-	-
d. Tabungan Mudharabah Mudharabah Savings		9.331.008	9.331.008	-	-	-	-
e. Lainnya Other		2.363.383	2.363.383	-	-	-	-
2. Kewajiban pada Bank Indonesia Liabilities on Bank of Indonesia		1.409.965	1.409.965	-	-	-	-
3. Kewajiban pada Bank Lain Liabilities on Other Banks		2.319.475	1.841.409	354.814	47.250	76.002	-
4. Surat Berharga yang Diterbitkan Securities Issued		7.852.825	1.155.000	-	-	-	6.697.825
5. Pembiayaan yang Diterima Borrowing		500.000	-	-	-	500.000	-
6. Kewajiban Lainnya Other Liabilities		28.189	739	1.767	25.683	-	-
C Laporan Kewajiban Komitmen dan Kontinjensi Commitment and Contingent Liability Report							
1. Kewajiban komitmen Commitment Report		8.517	-	8.381	136	-	-
2. Kewajiban kontinjensi Contingent Report		31.408	6.542	4.595	602	6.529	13.140
D Selisih Difference (A-B)		(1.593.633)	(33.820.643)	(2.679.425)	(57.865)	75.392	34.888.908



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

31 Desember 2023 December 31, 2023						
	Saldo Balance	Jatuh Tempo Due Date				
		≤ 1 Bulan ≤ 1 Month	> 1-3 Bulan > 1-3 Months	> 3-6 Bulan > 3-6 Months	> 6-12 Bulan > 6-12 Months	> 12 Bulan > 12 Months
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	5.493.461	325.907	796.010	171.712	57.575	4.142.257
	41.774	41.774	-	-	-	-
	181.334	153.970	-	-	-	27.364
	1.388.198	2.310	-	-	-	1.385.888
	487.562	-	-	-	-	487.562
	373.064	-	153.970	-	-	219.094
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	155.987	26.770	65.535	63.374	308	-
	-	-	-	-	-	-
	2.757.960	-	570.006	108.338	57.267	2.022.349
	-	-	-	-	-	-
	107.582	101.083	6.499	-	-	-
	5.387.024	5.152.308	161.499	54.983	18.234	-
	1.798.469	1.798.469	-	-	-	-
	2.743.473	2.515.256	155.000	54.983	18.234	-
	259.225	259.225	-	-	-	-
	3.003	3.003	-	-	-	-
	34.172	34.172	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	542.183	542.183	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	6.499	-	6.499	-	-	-
	52.578	52.578	-	-	-	-
	2.310	-	-	-	2.310	-
	106.437	(4.826.401)	634.511	116.729	39.341	4.142.257

2. Pengungkapan Profil Maturitas Valas

Disclosure of Maturity Profile for Foreign Currency

31 Desember 2024 December 31, 2024							
No	Pos-pos Posts	Saldo Balance	Jatuh Tempo Due Date				
			≤ 1 Bulan ≤ 1 Month	> 1-3 Bulan > 1-3 Months	> 3-6 Bulan > 3-6 Months	> 6-12 Bulan > 6-12 Months	> 12 Bulan > 12 Months
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENT OF FINANCIAL POSITION							
A Aset Asset		3.873.984	263.191	20.110	235.427	59.610	3.295.646
1. Kas Cash		72.746	72.746	-	-	-	-
2. Penempatan pada Bank Indonesia Placement on Bank of Indonesia		34.169	-	-	-	-	34.169
3. Penempatan pada Bank Lain Placements on Other Banks		680.265	8.995	4.024	-	-	667.246
4. Surat Berharga Securities		522.347	16.095	-	125.885	-	380.367
5. Kredit yang Diberikan Loan							
a. Piutang murabahah (gross) Murabahah receivables (gross)		229.026	-	-	-	-	229.026
b. Piutang salam Salam		-	-	-	-	-	-
c. Piutang istishna' Istishna'		-	-	-	-	-	-
d. Piutang qardh Qardh Receivables		-	-	-	-	-	-
6. Pembiayaan Bagi Hasil Financing Profit Sharing							
a. Pembiayaan mudharabah Mudharabah Financing		-	-	-	-	-	-
b. Pembiayaan musyarakah Musyarakah Financing		2.226.708	59.690	16.086	106.484	59.610	1.984.838
7. Pembiayaan sewa Lease Financing		-	-	-	-	-	-
8. Aset Lainnya Other Asset		108.723	105.665	-	3.058	-	-
B Kewajiban Liabilities		3.903.841	3.773.672	48.433	62.991	18.745	-
1. Dana Pihak Ketiga Third Party Funds							
a. Giro wadiah wadiah demand deposits		1.162.066	1.162.066	-	-	-	-
b. Deposito mudharabah mudharabah time deposits		2.241.804	2.114.693	48.433	59.933	18.745	-
c. Tabungan wadiah Wadiah savings		300.960	300.960	-	-	-	-
d. Tabungan mudharabah Mudharabah savings		9.416	9.416	-	-	-	-
e. Lainnya Other		25.445	25.445	-	-	-	-
2. Kewajiban pada Bank Indonesia Liabilities on Bank of Indonesia		-	-	-	-	-	-
3. Kewajiban pada Bank Lain Liabilities on Other Banks		161.092	161.092	-	-	-	-
4. Surat Berharga yang Diterbitkan Securities Issued		-	-	-	-	-	-
5. Pembiayaan yang Diterima Borrowing		-	-	-	-	-	-
6. Kewajiban Lainnya Other Liabilities		3.058	-	-	3.058	-	-
C Laporan Kewajiban Komitmen dan Kontinjensi Commitment and Contingent Liability Report							
1. Kewajiban komitmen Commitment Report		4.041	4.041	-	-	-	-
2. Kewajiban kontinjensi Contingent Report		4.024	-	-	-	4.024	-
D Selisih Difference (A-B)		(29.857)	(3.510.481)	(28.323)	172.436	40.865	3.295.646



(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

31 Desember 2023 December 31, 2023						
	Saldo Balance	Jatuh Tempo Due Date				
		≤ 1 Bulan ≤ 1 Month	> 1-3 Bulan > 1-3 Months	> 3-6 Bulan > 3-6 Months	> 6-12 Bulan > 6-12 Months	> 12 Bulan > 12 Months
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	5.493.461	325.907	796.010	171.712	57.575	4.142.257
	41.774	41.774	-	-	-	-
	181.334	153.970	-	-	-	27.364
	1.388.198	2.310	-	-	-	1.385.888
	487.562	-	-	-	-	487.562
	373.064	-	153.970	-	-	219.094
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	155.987	26.770	65.535	63.374	308	-
	-	-	-	-	-	-
	2.757.960	-	570.006	108.338	57.267	2.022.349
	-	-	-	-	-	-
	107.582	101.083	6.499	-	-	-
	5.387.024	5.152.308	161.499	54.983	18.234	-
	1.798.469	1.798.469	-	-	-	-
	2.743.473	2.515.256	155.000	54.983	18.234	-
	259.225	259.225	-	-	-	-
	3.003	3.003	-	-	-	-
	34.172	34.172	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	542.183	542.183	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	6.499	-	6.499	-	-	-
	52.578	52.578	-	-	-	-
	2.310	-	-	-	2.310	-
	106.437	(4.826.401)	634.511	116.729	39.341	4.142.257

D. Risiko Operasional
Operational Risk

(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

No	Pendekatan yang Digunakan Approach Method	31 Desember 2024 December 31, 2024			31 Desember 2023 December 31, 2023		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir) Gross Income (Average Last 3 years)	Beban Modal Capital Charge	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir) Gross Income (Average Last 3 years)	Beban Modal Capital Charge	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pendekatan Indikator Dasar Basic Indicator Approach	1.297.531	194.630	2.432.871	1.291.146	193.672	2.420.899
Total		1.297.531	194.630	2.432.871	1.291.146	193.672	2.420.899



Pembayaran Mudah dan Berkah Pakai Syariah Payment Aja!

Praktis
Semua Transaksi
Tercatat

Aman
terhindar dari kekurangan
uang dan uang palsu

QR Code Fleksibel
Dapat Digunakan dengan
Pembayaran Bank Lain



PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BPKH)

#AyoHijrah

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance	332	Nominasi dan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi Nomination and Remuneration of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners, and the Board of Directors	475	Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT & PPPSPM) Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Prevention of Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (APU, PPT & PPPSPM)	618
Komitmen dan Kebijakan Penerapan Commitment and Implementation Policy	334	Rapat Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi Meeting of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners, and the Board of Directors	480	Perkara Penting Important Cases	621
Peningkatan Kualitas GCG Tahun 2025 GCG Quality Improvement in 2025	342	Komite Audit Audit Committee	506	Sanksi Administratif Administrative Sanction	622
Penilaian Penerapan GCG Assessment of GCG Implementation	344	Komite Remunerasi dan Nominasi Nomination and Remuneration Committee	518	Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Company Data and Information	623
Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Companies	350	Komite Pemantau Risiko Risk Oversight Committee	530	Kode Etik Perusahaan Corporate Code of Conduct	629
Struktur dan Mekanisme GCG GCG Structure and Mechanisms	368	Komite Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Committee	543	Penerapan Kebijakan Anti Korupsi dan Strategi Anti <i>Fraud</i> Anti-Corruption/Fraud Policy and Its Socialization	631
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	371	Komite di Bawah Direksi Committees Under the Board of Directors	550	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Perusahaan Transparency of the Company's Financial and Non-Financial Conditions	635
Informasi Pemegang Saham Utama/ Pengendali Information on Main/Controlling Shareholders	398	Komite Pengarah Teknologi Informasi Information Technology Steering Committee	551	Pembelian Kembali Saham dan Obligasi Bank Muamalat Indonesia Buy Back of Bank Muamalat Indonesia Shares and Bonds	636
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	399	Asset & Liability Committee (ALCO) Asset & Liability Committee (ALCO)	558	Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik Buy Back of Bank Muamalat Indonesia Shares and Bonds	636
Dewan Komisaris Board of Commissioners	416	Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	575	Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) Legal Lending Limit (LLL)	636
Komisaris Independen Independent Commissioners	434	Komite Kebijakan Pembiayaan Financing Policy Committee	582	Kebijakan Perlindungan Nasabah Customers' Protection Policy	637
Direksi Board of Directors	438	Komite Pembiayaan Financing Committee	587	Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System	638
Hubungan Afiliasi antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Affiliated Relationships between Members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Majority and/or Controlling Shareholders	459	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	594	Kebijakan Pencegahan <i>Insider Trading</i> Insider Trading Prevention Policy	640
Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Share Ownership Information Disclosure Policy	461	Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Internal Audit Work Unit (IAU)	599	Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya Non-Halal Income and Its Use	640
Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi Diversity Policy of the Board of Commissioners and Directors	462	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	605		
Penilaian Dewan Komisaris dan Direksi Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors	465	Audit Eksternal External Audit	611		
		Sistem Manajemen Risiko Risk Management System	612		
		Satuan Kerja Kepatuhan Compliance Unit	613		



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Setiap tahun, Bank terus melakukan evaluasi dan peningkatan terhadap pengelolaan GCG di lingkungan Bank Muamalat Indonesia.

Every year, the Bank continues to evaluate and improve GCG management within Bank Muamalat Indonesia.



15

Inisiatif
Initiatives

Ada 15 (lima belas) inisiatif pengembangan GCG pada tahun 2024.

There are 15 (fifteen) GCG development initiatives in 2024.

3

Hasil penilaian GCG Bank mencapai skor 3 ("Baik").
The Bank's GCG assessment results achieved a score of 3 ("Good").





Praktik penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat Indonesia," "BMI," "Bank") mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank juga menyesuaikan penerapan GCG sesuai dengan prinsip syariah dan praktik terbaik di lingkungan industri.

Dengan penerapan prinsip-prinsip GCG yang konsisten, Bank percaya dapat menumbuhkan perusahaan agar selalu dapat berkembang lebih baik dalam menjalankan kegiatan usahanya serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Bank Muamalat telah memperoleh pengakuan atas penerapan GCG pada tahun 2024 dengan diraihinya: *Indonesia Sustainable Development Goals Award 2024 Kategori SDGs 4.1 Social Pillar* yang diselenggarakan oleh *Corporate Forum for CSR Development (CFCD)*, *The Best Indonesia Annual Report Award tahun 2024 (Indonesian Annual Report Award III 2024)* yang diselenggarakan oleh Economic Review, dan Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat yaitu Bapak Hayunaji sebagai pemenang pada *Corporate Secretary Champion 2024* oleh SWA Media Group.

The practice of the implementation of good corporate governance (GCG) of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat Indonesia," "BMI," "Bank") refers to Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks and Financial Services Authority Regulation No. 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Unit. The Bank also adjusts the implementation of GCG in accordance with sharia principles and best practices in the industrial environment.

By consistently implementing GCG principles, the Bank believes it can grow the company so that it can always develop better in carrying out its business activities and increase the trust of stakeholders. Bank Muamalat has received recognition for its implementation of GCG in 2024 by winning: *Indonesia Sustainable Development Goals Award 2024 SDGs 4.1 Social Pillar Category* organized by the *Corporate Forum for CSR Development (CFCD)*, *The Best Indonesia Annual Report Award 2024 (Indonesian Annual Report Award III 2024)* organized by Economic Review, and the *Corporate Secretary of Bank Muamalat*, namely Mr. Hayunaji, as the winner of the *Corporate Secretary Champion 2024* by SWA Media Group.

Komitmen dan Kebijakan Penerapan

Commitment and Implementation Policy

Penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Bank Muamalat Indonesia diuraikan melalui tabel berikut ini:

The application of GCG principles within Bank Muamalat Indonesia is described in the following table:

Prinsip Principle	Implementasi di Bank Muamalat Indonesia	Implementation at Bank Muamalat Indonesia
Keterbukaan "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (hak/informasi) kepada yang berhak menerimanya" (QS. An-Nisa: 58) Transparency "Indeed, Allah commands you to convey the mandate (rights/information) to those who are entitled to receive it" (QS. An-Nisa: 58)	Keterbukaan atau transparansi mengandung unsur pengungkapan (<i>disclosure</i>) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat. Bank dan jajaran manajemen selalu berupaya menjamin adanya keterbukaan dalam menyampaikan informasi materiil dan relevan. Begitu juga dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Seluruh Informasi mudah diakses oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Kebijakan BMI dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang berhak memperoleh informasi. Keterbukaan tidak hanya mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting dalam proses pengambilan keputusan sesuai ketentuan syariah, tanpa mengurangi kewajiban Bank memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Openness or transparency contains elements of disclosure and providing information in a timely, adequate, clear, accurate, comparable, and easily accessible manner to stakeholders and the public. The Bank and management always strive to ensure openness in conveying material and relevant information. Similarly, in carrying out the decision-making process. All information is easily accessible to stakeholders according to their rights. BMI policies are made in writing and communicated to stakeholders who have the right to obtain information. Openness is not only disclosing information required by laws and regulations but is also important in the decision-making process in accordance with sharia provisions, without reducing the Bank's obligation to fulfill organizational confidentiality provisions in accordance with applicable laws and regulations.
Akuntabilitas "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama (orang-orang yang berilmu pengetahuan)" (QS Fathir: 28) "Adakah sama orang yang berilmu pengetahuan dengan yang tidak berilmu pengetahuan" (QS Az-Zumar: 9) "Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha Mengetahui apa-apa yang kamu lakukan" (QS Al-Mujaadilah: 11) Accountability "Indeed, those who fear Allah among His servants are only scholars (those who are knowledgeable)" (QS Fathir: 28) "Are there people who are knowledgeable and those who are not knowledgeable" (QS Az-Zumar: 9) "Allah raises the rank of those who believe among you and those who have knowledge by several degrees. Allah is All-Knowing of what you do" (QS Al-Mujaadilah: 11)	Akuntabilitas merupakan bagian dari kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif. Manajemen Bank Muamalat Indonesia mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, bisnis Bank Muamalat Indonesia harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai kepentingan pelaku bisnis dengan tetap memperhitungkan kepentingan para pemangku kepentingan.	Accountability is part of clarifying functions in an organization and how to account for them so that management can run effectively. Bank Muamalat Indonesia management is accountable for its performance in a transparent and fair manner. For this reason, Bank Muamalat Indonesia's business must be managed correctly, measurably, and in accordance with the interests of business actors while still considering the interests of stakeholders.



Prinsip Principle	Implementasi di Bank Muamalat Indonesia	Implementation at Bank Muamalat Indonesia
Tanggung Jawab "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya" (QS Al-Muddatsir: 38) Responsibility "Everyone is responsible for what he has done" (QS Al-Muddatsir: 38)	Tanggung jawab atau responsibilitas merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik/good corporate citizen. Jajaran manajemen BMI selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip pengelolaan bank yang sehat dalam setiap tindakannya, dengan tetap menyadari segala risiko dan implikasi negatif yang mungkin ditimbulkan oleh tindakannya. Bank dan jajaran manajemen Bank harus selalu mengingat kepentingan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan fungsinya dan menetapkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.	Accountability, or responsibility, is a form of compliance with statutory regulations and internal provisions as well as responsibility towards society and the environment. Responsibility is needed in order to ensure the maintenance of business continuity in the long term and to gain recognition as a good corporate citizen. BMI management always adheres to the principle of prudence and applicable laws and regulations as well as the principles of sound bank management in all its actions while remaining aware of all risks and negative implications that may arise from its actions. Banks and Bank management must always remember the interests of all stakeholders in carrying out their functions and determine policies in making decisions.
Independensi "Barang siapa meniru-niru suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka" (HR Abu Daud) "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara profesional (itqon)" (HR Abu Ya'la dan dishahihkan oleh Albany) Independency "Whoever imitates a people, then he is among their group" (HR Abu Daud) "Indeed, Allah loves someone if they do something, done professionally (itqon)" (HR Abu Ya'la and authenticated by Albany)	Bank mendefinisikan independensi sebagai keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika sertastandar, prinsip, dan praktik. Bank dan seluruh jajaran manajemen menjamin bahwa Bank Muamalat Indonesia dikelola secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan dapat menghindari pengaruh/tekanan dari pihak mana pun (independen) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Implementasi prinsip profesional dan kemandirian dilaksanakan oleh BMI.	The Bank defines independence as a state of being managed independently and professionally and free from conflicts of interest and influence or pressure from any party that is not in accordance with the provisions of laws and regulations and ethical values as well as standards, principles and practices. The Bank and all levels of management guarantee that Bank Muamalat Indonesia is managed Independent without any conflict of interest and can avoid influence/pressure from any party (independent), which is not in accordance with applicable laws and regulations and healthy corporate principles. The implementation of professional principles and independence is carried out by BMI.
Kewajaran "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan" (QS An-Nahl: 90) "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu..." (QS An-Nisa:135) Fairness "Indeed, Allah commands you to act justly and do good" (QS An-Nahl: 90) "Those who are believers, be true upholders of justice, witnesses for Allah, even if it is against yourselves or your parents and your relatives..." (QS An-Nisa: 135)	Kewajaran dan kesetaraan merupakan nilai dari perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai proporsinya dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesetaraan mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan, sehingga senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran serta kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkut antara lain: 1. BMI menerapkan prinsip kewajaran yang diimplementasikan sebagai keadilan dan kesetaraan (<i>equal treatment</i>) di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. BMI menjamin bahwa setiap pemangku kepentingan akan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.	Fairness and equality are the values of fair treatment and equal opportunities according to proportion in fulfilling the rights of stakeholders based on agreements and applicable laws and regulations. Equality contains elements of equal treatment and opportunity, so that we always pay attention to the interests of shareholders, customers and other stakeholders based on the principles of fairness and equality for each party concerned, including: 1. BMI applies the principle of fairness, which is implemented as fairness and equality (equal treatment) in fulfilling stakeholder rights arising based on agreements and applicable laws and regulations. 2. BMI guarantees that every stakeholder will receive equal treatment without discrimination in accordance with existing laws and regulations.

Solusi Emas Hijrah

MILIKI EMAS SEKARANG
MASA DEPAN LEBIH TENANG

Emas
hingga 500 Gr

Jangka Waktu
hingga 10 Thn

DP Ringan

* Syarat dan Ketentuan Berlaku, Info Lebih Lanjut: <https://bit.ly/BMISolusiEmas>

DASAR PENERAPAN GCG

Penerapan prinsip GCG Bank Muamalat mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan, yang antara lain mencakup:

BASIS OF GCG IMPLEMENTATION

The implementation of Bank Muamalat's GCG principles refers to various statutory regulations, which include:

Jenis Peraturan Type of Regulation	Peraturan	Regulation
Undang-Undang Law	- Undang Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. - Undang Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. - Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.	- Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets as amended by Law no. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector. - Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking as amended by Law no. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector. - Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by PERPU No. 2 of 2022 concerning Job Creation.
Surat Edaran Bank Indonesia Bank Indonesia Circular Letter	Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.	Bank Indonesia Circular Letter No. 12/13/DPbS dated April 30, 2010 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.



Jenis Peraturan Type of Regulation	Peraturan	Regulation
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK) Regulation	- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Usaha Syariah. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.	- Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks. - Financial Services Authority Regulation No. 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Businesses. - OJK Regulation No. 16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks. - Financial Services Authority Regulation No. 2/POJK.03/2022 concerning Asset Quality Assessment of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. - Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. - Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.04/2015 concerning Issuer or Public Company Websites. - Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Public Company Governance Guidelines. - Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies. - Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities. - Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions. - Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.03/2021 Concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.03/2018 Concerning Reassessment for Main Parties of Financial Services Institutions. - Financial Services Authority Regulation No. 27/POJK.03/2016 concerning Capability and Conformity Assessment for Main Parties of Financial Services Institutions. - Financial Services Authority Regulation No. 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies. - Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies. - Financial Services Authority Regulation No. 65/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. - Financial Services Authority Regulation No. 46/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Commercial Bank Compliance Functions. - Financial Services Authority Regulation No. 59/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Governance in Providing Remuneration for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Jenis Peraturan Type of Regulation	Peraturan	Regulation
	- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar bagi Bank Umum Syariah. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.	- Financial Services Authority Regulation No. 15/ POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies. - Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies. - Financial Services Authority Regulation No. 37/ POJK.03/2019 concerning Transparency and Publication of Bank Reports. - Financial Services Authority Regulation No. 3/ POJK.04/2021 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector. - Financial Services Authority Regulation No. 5/POJK.03/2016 concerning Bank Business Plans. - Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.03/2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function in Banks. - Financial Services Authority Regulation No. 39/POJK.03/2019 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Commercial Banks. - Financial Services Authority Regulation No. 26/POJK.03/2021 concerning Legal Lending Limits for Fund Distribution and Large Fund Distribution for Sharia Commercial Banks. - Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2022 concerning the Implementation of Information Technology by Banks. - Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Regulation No. 15 of 2024 concerning the Integrity of Bank Financial Reporting. - Financial Services Authority Regulation No. 45 of 2024 concerning the Development and Strengthening of Issuers and Public Companies.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Circular Letter of the Financial Services Authority (OJK)	- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.	- Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Circular No. 15/SEOJK.03/2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. - Financial Services Authority Circular No. 10/SEOJK.03/2014 concerning the Assessment of the Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. - Financial Services Authority Circular No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines. - Financial Services Authority Circular No. 16/SEOJK.04/2021 concerning Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies. - Financial Services Authority Circular No. 10/SEOJK.03/2020 concerning Transparency and Publication of Reports of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.



Jenis Peraturan Type of Regulation	Peraturan	Regulation
Lain-lain Others	• Anggaran Dasar PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. • Pedoman Umum <i>Good Governance</i> Bisnis Syariah. • <i>Board Manual</i> PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. • Kebijakan <i>Good Corporate Governance</i> PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. • Piagam Komite. • Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Pengaduan Nasabah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. • Kode Etik Bankir. • Kode Etik PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. • Ittifaq Muamalat.	• Articles of Association of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. • General Guidelines for Sharia Business Good Governance. • Board Manual of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. • PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Good Corporate Governance Policy. • Committee Charter. • Implementation of Guidelines and Procedures for Handling Customer Complaint Reporting of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. • Banker Code of Ethics. • PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Code of Ethics. • Ittifaq Muamalat.

TUJUAN PENERAPAN GCG

Penerapan prinsip-prinsip GCG di Bank Muamalat bertujuan untuk:

1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Organ Perusahaan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah), karyawan, nasabah, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan agar seluruh aktivitas Bank dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
2. Memenuhi peraturan perundang-undangan, standar, nilai-nilai etika, prinsip dan praktik yang berlaku umum.
3. Meningkatkan daya saing Bank dan respon Bank terhadap perubahan lingkungan eksternal dan internal yang semakin kompleks dan kompetitif.
4. Meningkatkan citra (*image*) Bank Muamalat Indonesia menjadi semakin baik di tingkat nasional maupun regional.
5. Meningkatkan kinerja Bank Muamalat melalui program-program efisiensi perusahaan yang tercipta dari penerapan budaya GCG di setiap kegiatan operasional.
6. Meningkatkan pertanggungjawaban serta menjaga keseimbangan kepentingan pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan lain.
7. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Bank Muamalat.
8. Mempersiapkan landasan yang kuat bagi pertumbuhan berkelanjutan Bank Muamalat.

OBJECTIVES OF GCG IMPLEMENTATION

The implementation of GCG principles at Bank Muamalat aims to:

1. Control and direct the relationship between Company Organs (Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board), employees, customers, and work partners, as well as the community and environment, so that all Bank activities can be carried out well in accordance with GCG principles.
2. Comply with laws and regulations, standards, ethical values, and generally accepted principles and practices.
3. Increasing the Bank's competitiveness and the Bank's response to changes in the increasingly complex and competitive external and internal environment.
4. Improve the image of Bank Muamalat Indonesia to become better at the national and regional levels.
5. Improving Bank Muamalat's performance through company efficiency programs created by implementing a GCG culture in every operational activity.
6. Increase accountability and maintain the balance of interests of shareholders and all other stakeholders.
7. Prevent irregularities in the management of Bank Muamalat.
8. Prepare a strong foundation for Bank Muamalat's sustainable growth.

REALISASI PENERAPAN GCG TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, Bank Muamalat Indonesia telah melakukan sejumlah inisiatif perbaikan, yang di antaranya adalah:

1. Bank Muamalat meraih 16 penghargaan dari Infobank Media Group dalam 'The 8th Infobank *Satisfaction, Loyalty, and Engagement* 2025'. Bank menerima dua trofi yakni *The Best Sharia Bank in Satisfaction, Loyalty, and Engagement* 2025 dan menjadi satu-satunya Bank Umum Syariah penerima *Golden Champion in Satisfaction, Loyalty, and Engagement* (2019-2024).
2. Menerima sertifikat ISO 37001:2016 pada 25 Januari 2024 oleh TUV SUD Indonesia yang merupakan badan sertifikasi internasional yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atas komitmennya dalam menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Sertifikasi ini berlaku selama periode 20 Desember 2023 hingga 28 November 2026 yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dengan standar internasional dalam pencegahan praktik penyuapan yang bertujuan untuk membangun manajemen bisnis yang berintegritas yang didasari oleh nilai-nilai etika dan tata kelola yang profesional.
3. Memperoleh *Indonesia Sustainable Development Goals Award 2024 Kategori SDGs 4.1 Social Pillar* yang diselenggarakan oleh *Corporate Forum for CSR Development (CFCD)*, *The Best Indonesia Annual Report Award tahun 2024 (Indonesian Annual Report Award III 2024)* yang diselenggarakan oleh Economic Review, dan Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat yaitu Bapak Hayunaji sebagai pemenang pada *Corporate Secretary Champion 2024* oleh SWA Media Group.
4. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 27 Juni 2024 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 11 Desember 2024.
5. Menyempurnakan ketentuan Anggaran Dasar sesuai amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Usaha Syariah.

REALIZATION OF GCG IMPLEMENTATION IN 2024

Throughout 2024, Bank Muamalat Indonesia has carried out a number of improvement initiatives, including:

1. Bank Muamalat won 16 awards from Infobank Media Group in 'The 8th Infobank *Satisfaction, Loyalty, and Engagement* 2025.'. The Bank received two trophies, namely the *Best Sharia Bank in Satisfaction, Loyalty, and Engagement* 2025, and was the only Sharia Commercial Bank to receive the *Golden Champion in Satisfaction, Loyalty, and Engagement* (2019-2024).
2. Received the ISO 37001:2016 certificate on January 25, 2024, from TUV SUD Indonesia, which is an international certification body that has been accredited by the National Accreditation Committee (KAN) for its commitment to implementing the Anti-Bribery Management System (SMAP). This certification is valid for the period December 20, 2023 to November 28, 2026 and is used as a control instrument with international standards in preventing bribery practices, which aims to build business management with integrity based on ethical values and professional governance.
3. Obtained the 2024 Indonesia Sustainable Development Goals Award in the SDGs. 4.1 Social Pillar Category organized by the Corporate Forum for CSR Development (CFCD), The Best Indonesia Annual Report Award 2024 (Indonesian Annual Report Award III 2024) organized by the Economic Review, and the Corporate Secretary of Bank Muamalat, namely Mr. Hayunaji, as the winner of the 2024 Corporate Secretary Champion by SWA Media Group.
4. Hold an Annual General Meeting of Shareholders on June 27, 2024, and an Extraordinary General Meeting of Shareholders on December 11, 2024.
5. Improve the provisions of the Articles of Association in accordance with the mandate of Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks and Financial Services Authority Regulation No. 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Businesses.



6. Memproses permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris sesuai perubahan susunan pengurus Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 11 Desember 2024.
 7. Memproses permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas 2 (dua) orang anggota Direksi sesuai perubahan susunan pengurus Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 11 Desember 2024.
 8. Melakukan pengkinian Struktur Organisasi sesuai dengan perubahan susunan pengurus Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 11 Desember 2024.
 9. Melakukan pengkinian Komite-Komite Tingkat Dewan Komisaris dan Komite-Komite Tingkat Direksi sesuai dengan perubahan susunan pengurus Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 11 Desember 2024.
 10. Mengajukan sertifikat kompetensi Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat ASPM atas 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah sebagai komitmen Bank dalam meningkatkan pengawasan DPS dalam kegiatan syariah di pasar modal.
 11. Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi wajib seperti Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri, Wakil Perantara Pedagang Efek, Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), Standarisasi Kompetensi Sistem Pembayaran (SKSP) dan Sertifikasi Manajemen Risiko kepada pejabat dan pegawai terkait secara berkala.
 12. Membangun sosialisasi budaya kepatuhan (*compliance culture*), budaya risiko, budaya *anti-fraud* dan kode etik Bank Muamalat di lingkungan Bank melalui *email blast* dan juga sistem *Muamalat Human Power* (MHP).
 13. Mewajibkan setiap karyawan Bank Muamalat untuk membuat persetujuan secara elektronik surat pernyataan kepatuhan, pelaksanaan GCG dan deklarasi anti-fraud secara berkala.
 14. Memonitor penerbitan produk dan aktivitas Bank oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Compliance Syariah agar tetap sesuai dengan aspek syariah.
 15. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah, termasuk penerapan kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, dan audit intern syariah.
6. Process the application for a Fit and Proper Test for 1 (one) member of the Board of Commissioners in accordance with changes to the composition of the Company's management at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on December 11, 2024.
 7. Processing requests for a Fit and Proper Test for 2 (two) members of the Board of Directors in accordance with changes to the composition of the Company's management at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on December 11, 2024.
 8. Update the Organizational Structure in accordance with changes to the composition of the Company's management at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on December 11, 2024.
 9. Updating Board of Commissioners Level Committees and Board of Directors Level Committees in accordance with changes in the composition of the Company's management at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on December 11, 2024.
 10. Submit a Capital Market Sharia Expert competency certificate, hereinafter abbreviated as ASPM, to 1 (one) member of the Sharia Supervisory Board as the Bank's commitment to increasing DPS supervision in sharia activities in the capital market.
 11. Organizing mandatory training and certification such as the implementation of Treasury Certification, Broker-Dealer Representative, Competency-Based Training (PBK), Payment System Competency Standardization (SKSP), and Risk Management Certification for relevant officials and employees on a regular basis.
 12. Developing the socialization of compliance culture, risk culture, anti-fraud culture, and Bank Muamalat's code of ethics within the Bank through email blasts and also the Muamalat Human Power (MHP) system.
 13. Require every Bank Muamalat employee to electronically approve a statement of compliance, GCG implementation and anti-fraud declarations periodically.
 14. Monitor the issuance of Bank products and activities by the Sharia Supervisory Board (DPS) and Sharia Compliance so that they remain in accordance with Sharia aspects.
 15. Evaluate the implementation of Sharia Governance, including the implementation of sharia compliance, sharia risk management, and sharia internal audit.

Peningkatan Kualitas GCG Tahun 2025

GCG Quality Improvement in 2025

Bank Muamalat berkomitmen untuk selalu meningkatkan praktik penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik agar dapat memacu pertumbuhan dan profit yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. *Action plan* untuk *continues improvement* implementasi GCG Bank Muamalat akan didasarkan pada hasil *assessment* GCG yang dilakukan secara periodik. Adapun *action plan* pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Melakukan finalisasi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan ketentuan pada Board of Manual yang disesuaikan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Desember 2024.
- Meningkatkan kualitas data pelaporan Bank dan memitigasi terjadinya Risiko Kepatuhan dengan menciptakan sistem reminder laporan yang terpusat dan melakukan pemberian *reminder* berupa notifikasi yang diterima lewat email kepada *Person in Charge* secara periodik.
- Pengkinian keanggotaan komite level Direksi sesuai perubahan pengurus pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Desember 2024.
- Melakukan perbaikan proses Tata Kelola pada kegiatan bisnis Bank secara berkelanjutan dan terencana dengan baik.
- Membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank Umum sesuai amanat POJK Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.
- Mendukung seluruh proses aksi korporasi Bank pada tahun 2025 dan memastikan jalannya aksi korporasi Bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank Muamalat is committed to always improving the practice of implementing good Corporate Governance in order to spur sustainable growth and profits while still paying attention to the interests of shareholders and stakeholders. The action plan for continued improvement in Bank Muamalat's GCG implementation will be based on the results of GCG assessments carried out periodically. The action plan for 2025 is as follows:

- Finalize the Corporate Governance Policy and provisions in the Board of Manual, which are adjusted to changes to the Company's Articles of Association in accordance with the resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on December 11, 2024.
- Improving the quality of Bank reporting data and mitigating the occurrence of Compliance Risk by creating a centralized report reminder system and providing reminders in the form of notifications received via email to the Person in Charge periodically.
- Updated Board of Directors-level committee membership in accordance with management changes at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on December 11, 2024.
- Improving the Governance process in the Bank's business activities in a sustainable and well-planned manner.
- Establish a special work unit responsible for preventing fraud or manipulation in Financial Information and/or Commercial Bank Financial Statements in accordance with the mandate of POJK No. 15 of 2024 concerning the Integrity of Bank Financial Reporting.
- Support the entire Bank's corporate action process in 2025 and ensure that the Bank's corporate actions are carried out in accordance with sharia principles and the provisions of applicable laws and regulations.



STANDAR KUALITAS PENERAPAN GCG

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Bank Muamalat Indonesia melingkupi seluruh aktivitas kerja di semua organ Bank, yang meliputi: Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite tingkat Dewan Komisaris, Komite-komite tingkat Direksi, Pejabat Eksekutif serta seluruh karyawan Bank. Standar kualitas penerapan GCG berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Usaha Syariah serta praktik terbaik di industri perbankan.

Dalam penerapan GCG, Dewan Pengawas Syariah bertugas dalam mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah termasuk penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan audit intern syariah serta kebijakan strategis Bank yang terkait dengan penerapan Prinsip Syariah. Adapun Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan pengelolaan GCG dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. Termasuk, dalam memberikan saran/pendapat atas tindakan/kegiatan strategis yang akan dan telah dilaksanakan oleh Direksi.

Sementara Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank secara amanah dan profesional serta menghindari terjadinya segala potensi benturan kepentingan. Demikian juga dengan Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris dan Komite-komite di tingkat Direksi serta organ-organ GCG lainnya yang saling bersinergi untuk menciptakan seluruh kegiatan operasional Bank berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan target bisnis yang ditetapkan.

GCG IMPLEMENTATION QUALITY STANDARDS

The implementation of good corporate governance within Bank Muamalat Indonesia covers all work activities in all Bank organs, which include: General Meeting of Shareholders, Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, Board of Directors, Board of Commissioners level committees, Board of Directors level committees, Executive Officers and all Bank employees. The quality standards for implementing GCG are guided by Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, Financial Services Authority Regulation No. 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Businesses as well as best practices in the banking industry.

In implementing GCG, the Sharia Supervisory Board is tasked with directing, monitoring, and evaluating the implementation of Sharia Governance, including the implementation of sharia risk management, sharia compliance, and sharia internal audit, as well as the Bank's strategic policies related to the implementation of Sharia Principles. The Board of Commissioners carries out a supervisory function to ensure that GCG management is carried out by the Board of Directors in accordance with the provisions of statutory regulations, articles of association, and/or GMS resolutions. Including, providing suggestions/opinions on strategic actions/activities that will be and have been implemented by the Board of Directors.

Meanwhile, the Board of Directors is fully responsible for managing the Bank for the Bank's interests in a trustworthy and professional manner and avoiding any potential conflicts of interest. Similarly, Committees at the Board of Commissioners level and Committees at the Board of Directors level, as well as other GCG organs, synergize with each other to ensure that all Bank operational activities run in accordance with applicable laws and regulations and established business targets.

Penilaian Penerapan GCG

Assessment of GCG Implementation

Bank Muamalat secara mandiri (*self-assessment*) melakukan penilaian penerapan GCG yang bertujuan untuk mengukur kedalaman implementasi praktik GCG setiap semester dan mendapatkan umpan balik perbaikan penerapan GCG selanjutnya. Pelaksanaan *self-assessment* dimaksud mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Usaha Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 Tentang Bank Umum Syariah, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bank Muamalat independently (*self-assessment*) carries out GCG implementation assessments, which aim to measure the depth of implementation of GCG practices every semester and obtain feedback on improvements to subsequent GCG implementation. The implementation of the self-assessment refers to Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, Financial Services Authority Regulation No. 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Businesses, and Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.03/2014 concerning Assessment of the Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks, Financial Services Authority Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2014 concerning Assessment of the Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, and Circular Letter of the Financial Services Authority Number 15/SEOJK.03/2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

PROSEDUR PENILAIAN

Terdapat 3 (tiga) aspek GCG yang dinilai secara terstruktur dan menyeluruh dalam penerapan GCG, yaitu:

1. Struktur Tata Kelola

Pada penilaian ini, Bank Muamalat mengukur kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang dimiliki secara menyeluruh, guna menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan Bank.

2. Proses Tata Kelola

Penilaian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas proses implementasi tata kelola yang berjalan.

3. Hasil Tata Kelola

Penilaian tata kelola dilakukan Bank Muamalat guna menilai kualitas hasil tata kelola perusahaan serta meninjau struktur dan proses tata kelola yang dilakukan guna menghasilkan penerapan tata kelola yang berkualitas sesuai harapan seluruh pemangku kepentingan Bank.

ASSESSMENT PROCEDURE

There are 3 (three) aspects of GCG that are assessed in a structured and comprehensive manner in implementing GCG, namely:

1. Governance Structure

In this assessment, Bank Muamalat measures the adequacy of its overall governance structure and infrastructure in order to produce results that meet the expectations of all Bank stakeholders.

2. Governance Process

This assessment aims to measure the effectiveness of the ongoing governance implementation process.

3. Governance Results

The governance assessment was carried out by Bank Muamalat to assess the quality of corporate governance results and to review the governance structure and processes carried out to produce quality governance implementation in line with the expectations of all Bank stakeholders.



Penilaian penerapan GCG Bank Muamalat Indonesia dilaksanakan secara mandiri atau *self-assessment* secara berkala dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan persiapan materi penilaian dengan mengacu kepada format kertas kerja atau kuisioner yang ditetapkan oleh OJK.
2. Mendistribusikan kertas kerja/kuisioner *self-assessment* GCG kepada organ perusahaan dan fungsi terkait.
3. Mengacu pada *feedback* yang diterima dari organ perusahaan dan fungsi terkait, Satuan Kerja Kepatuhan Bank melakukan *review* dan evaluasi atas pengisian kertas kerja/kuisioner. Dalam proses tersebut, dimungkinkan untuk meminta penjelasan atau klarifikasi dari unit terkait atas hasil pengisian kuisioner yang telah disusun.
4. Satuan Kerja Kepatuhan membuat analisis dari hasil pengisian kuisioner dan menuangkannya dalam Laporan *Self-Assessment* GCG.
5. Meminta *review* dan persetujuan kepada jajaran manajemen atas Laporan *Self-Assessment* GCG yang telah disusun.
6. Mengirimkan hasil Laporan *Self-Assessment* GCG yang telah disetujui manajemen Perseroan kepada OJK sesuai dengan batas waktu yang berlaku.
7. Menginformasikan kepada Dewan Komisaris Bank atas hasil pelaksanaan penilaian *self-assessment* GCG, antara lain melalui rapat Komite Tata kelola Perusahaan.

KRITERIA YANG DIGUNAKAN

Dalam memastikan penerapan 5 (lima) prinsip GCG, Bank melakukan penilaian sendiri (*self assesment*) secara berkala yang paling kurang meliputi aspek berikut:

Penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank paling sedikit diwujudkan dalam:

- a. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
- b. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
- d. Penanganan benturan kepentingan;
- e. Penerapan fungsi kepatuhan;
- f. Penerapan fungsi audit intern;
- g. Penerapan fungsi audit ekstern;
- h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- i. Pemberian remunerasi;
- j. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
- k. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi;

Bank Muamalat Indonesia's GCG implementation assessment is carried out independently or periodically by self-assessment with the following stages:

1. Prepare assessment materials by referring to the working paper or questionnaire format determined by the OJK.
2. Distribute GCG self-assessment working papers/questionnaires to company organs and related functions.
3. Referring to the feedback received from company organs and related functions, the Bank Compliance Work Unit reviews and evaluates the filling out of work papers/questionnaires. In this process, it is possible to request an explanation or clarification from the relevant unit regarding the results of filling out the questionnaire that has been prepared.
4. The Compliance Work Unit makes an analysis of the results of filling out the questionnaire and presents it in the GCG Self-Assessment Report.
5. Request review and approval from management regarding the GCG Self-Assessment Report that has been prepared.
6. Send the results of the GCG Self-Assessment Report, which has been approved by the Company's management, to the OJK according to the applicable deadline.
7. Inform the Bank's Board of Commissioners regarding the results of the GCG self-assessment, including through Corporate Governance Committee meetings.

CRITERIA USED

In ensuring the implementation of the 5 (five) GCG principles, the Bank carries out periodic self-assessments, which at least cover the following aspects:

The implementation of Good Governance in Banks is at least manifested in:

- a. Implementation of the duties, responsibilities, and authority of the Board of Directors;
- b. Implementation of the duties, responsibilities, and authority of the Board of Commissioners;
- c. Completeness and implementation of committee duties;
- d. Handling conflicts of interest;
- e. Implementation of compliance functions;
- f. Implementation of the internal audit function;
- g. Implementation of external audit function;
- h. Implementation of risk management, including internal control systems;
- i. Providing remuneration;
- j. Providing funds to related parties and providing large funds;
- k. Integrity of reporting and information technology systems;

- l. Rencana strategis Bank;
- m. Aspek pemegang saham;
- n. Penerapan strategi anti fraud, termasuk anti penyuapan;
- o. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
- p. Penerapan tata kelola dalam kelompok usaha Bank.

Dalam menerapkan Tata Kelola Syariah Bank wajib memiliki kerangka tata kelola syariah diwujudkan paling sedikit melalui:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS;
- b. Penerapan fungsi kepatuhan syariah;
- c. Penerapan fungsi manajemen risiko syariah;
- d. Penerapan fungsi audit intern syariah; dan
- e. Pelaksanaan kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Penilaian dilakukan oleh internal Bank Muamalat dengan metode penilaian *self-assessment*. Adapun pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK).

HASIL PENILAIAN

Pada tahun 2024, Bank Muamalat Indonesia melalui Satuan Kerja Kepatuhan melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) pelaksanaan GCG dengan hasil penilaian pada peringkat 3 (tiga) yang mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

Analisis

Berdasarkan kertas kerja *self-assessment* tahun 2024 secara komprehensif dan terstruktur yang mencakup *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, dapat diidentifikasi mengenai permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya (*root caused*) dan kekuatan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

- l. Bank strategic plan;
- m. Shareholder aspect;
- n. Implementation of anti-fraud strategies, including anti-bribery;
- o. Implementation of sustainable finance, including implementation of social and environmental responsibility; and
- p. Implementation of governance within the Bank's business group.

In implementing Sharia Governance, Banks are required to have a Sharia governance framework realized at least through:

- a. Implementation of DPS duties and responsibilities;
- b. Implementation of sharia compliance functions;
- c. Implementation of sharia risk management functions;
- d. Implementation of the sharia internal audit function; and
- e. Implementation of external reviews of sharia governance.

PARTY CARRYING OUT THE ASSESSMENT

The assessment was carried out internally by Bank Muamalat using the self-assessment method. The implementation is carried out by the Compliance Work Unit (SKK).

ASSESSMENT RESULTS

In 2024, Bank Muamalat Indonesia, through the Compliance Work Unit, carried out a self-assessment of GCG implementation with assessment results at rank 3 (three), which reflects that Bank Management has implemented GCG, which is generally quite good. This is reflected in the adequate implementation of GCG principles. If there are weaknesses in the application of GCG principles, in general these weaknesses are quite significant and require sufficient attention from Bank management.

Analysis

Based on the 2024 self-assessment working paper in a comprehensive and structured manner, which includes governance structure, governance process, and governance outcomes, problems can be identified in the form of weaknesses and their root causes and strengths in the implementation of Good Corporate Governance as follows:



No.	Uraian	Description
1.	Governance Structure	
	Struktur organisasi Bank Muamalat telah memadai dan terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham telah sesuai dengan ketentuan. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS memperhatikan faktor integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Desember 2024 terkait perubahan pengurus Perseroan, seluruh anggota DPS telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Adapun dari 3 (tiga) orang jumlah anggota Dewan Komisaris, terdapat 2 (dua) anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari OJK dan dari 3 (tiga) orang anggota Direksi, terdapat 1 (satu) anggota Direksi yang telah mendapat persetujuan dari OJK. Komisaris Utama Bank telah mendapatkan persetujuan dari OJK pada tanggal 24 Maret 2025, sehingga seluruh anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPSLB tanggal 11 Desember 2024 telah efektif menjabat. Direktur Utama juga telah mendapatkan persetujuan dari OJK tanggal 24 Maret 2025, sehingga jumlah anggota Direksi yang efektif menjabat adalah 2 (dua) orang. Dewan Komisaris, Direksi dan DPS telah memiliki pedoman kerja yang mengatur pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk Audit Committee, Risk Oversight Committee (ROC), Corporate Governance Committee dan Nomination and Remuneration Committee (NRC). Direksi telah membentuk 5 (lima) komite yaitu Risk Management Committee, Komite Kebijakan Pembiayaan, Komite Pembiayaan, IT Steering Committee, dan ALCO, guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Berikutnya, Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Kerja Kepatuhan Bank Muamalat dibentuk secara independen terhadap satuan kerja operasional Bank. Adapun terkait dengan fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit intern syariah dilaksanakan oleh fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan fungsi audit intern yang ada yang telah didukung oleh pejabat minimal setingkat Pejabat Eksekutif yang mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah. Infrastruktur tata kelola Bank berupa kebijakan, pedoman, dan prosedur Bank, tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah memadai dan mendukung kegiatan usaha Bank serta telah dikiniikan secara berkala. Dalam rangka meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia, Bank juga telah menyelenggarakan <i>training/workshop</i>, sosialisasi dan sertifikasi yang bekerjasama dengan lembaga berwenang terkait.	Bank Muamalat's organizational structure is adequate and consists of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Sharia Supervisory Board (DPS), Corporate Secretary, Internal Audit Work Unit, Risk Management Work Unit and Compliance Work Unit. The number and composition of members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and Sharia Supervisory Board (DPS) appointed through the General Meeting of Shareholders is in accordance with the provisions. The appointment of members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and DPS considers the factors of integrity, competence, and financial reputation. Members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and DPS have adequate competence and are relevant to their positions to carry out their duties and responsibilities. Based on the results of the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on December 11, 2024, regarding changes to the Company's management, all DPS members have received approval from the OJK. Of the 3 (three) members of the Board of Commissioners, there are 2 (two) members of the Board of Commissioners who have received approval from the OJK, and of the 3 (three) members of the Board of Directors, there is 1 (one) member of the Board of Directors who has received approval from the OJK. The Bank's President Commissioner has received approval from OJK on March 24, 2025, so that all members of the Board of Commissioners determined in the EGMS on December 11, 2024 have effectively served. The President Director has also received approval from OJK on March 24, 2025, so that the number of members of the Board of Directors who are effectively serving is 2 (two) people. The Board of Commissioners, the Board of Directors, and DPS have work guidelines that regulate the implementation of their duties and responsibilities. In order to assist in carrying out its supervisory duties, the Board of Commissioners has formed an Audit Committee, Risk Oversight Committee (ROC), Corporate Governance Committee, and Nomination and Remuneration Committee (NRC). The Board of Directors has formed 5 (five) committees, namely the Risk Management Committee, Financing Policy Committee, Financing Committee, IT Steering Committee, and ALCO, to support the effective implementation of the Board of Directors' duties and responsibilities. Subsequently, the Internal Audit Work Unit, Risk Management Work Unit, Corporate Secretary, and Bank Muamalat Compliance Work Unit were formed independently of the Bank's operational work units. As for the sharia compliance function, sharia risk management function, and sharia internal audit function, they are carried out by the existing compliance function, risk management function, and internal audit function, which have been supported by officials at least at the executive officer level who have knowledge and/or understanding of sharia banking operations. The Bank's governance infrastructure in the form of Bank policies, guidelines, and procedures; the main tasks; and the functions of each organizational structure are adequate, support the Bank's business activities, and have been updated regularly. In order to improve Human Resources competency, the Bank has also organized training/workshops, socialization, and certification in collaboration with relevant authorized institutions.

No.	Uraian	Description
2.	Governance Process	
	Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan antara lain memberikan arahan kepada Direksi, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategik Bank dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional Bank. Dewan Komisaris telah menyesuaikan keanggotaan Komite level Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Tata Kelola bagi Bank Umum. Komite-Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris telah menyampaikan rekomendasi proses perbaikan kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dan Komite level Dewan Komisaris juga telah menyelenggarakan rapat sesuai dengan ketentuan. Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat bersama Direksi guna melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris kepada Direksi. Dewan Komisaris telah menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah disusun dan melakukan pengawasan terhadap realisasi RBB serta menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada OJK secara periodik. Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengawasi pemenuhan tata kelola syariah, DPS telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah termasuk penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan audit intern syariah. Fungsi audit syariah yang merupakan bagian dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang dipimpin oleh Kepala SKAI telah melakukan audit penerapan aspek syariah di Kantor Pusat Bank dan Kantor Cabang Bank. DPS telah menyelenggarakan rapat rutin bulanan guna membahas dan memberikan opini terhadap usulan produk, aktivitas dan program sesuai dengan prinsip syariah. Adapun rapat rutin Dewan Pengawas Syariah bersama Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. DPS telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Bank dan menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada OJK dan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) secara semesteran. Direksi bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian, GCG dan aspek syariah. Direksi telah menyusun RBB dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Proses pengambilan keputusan Direksi antara lain dilakukan melalui rapat rutin Direksi yang diselenggarakan secara mingguan. Dalam rangka merealisasikan target bisnis dalam RBB dan memperbaiki kinerja Bank, Direksi telah melakukan upaya-upaya antara lain sebagai berikut: - Melakukan perbaikan-perbaikan atas tata kelola pembiayaan antara lain menyempurnakan komposisi dan limit kewenangan memutus pembiayaan, menyusun dan menginikan ketentuan internal, meningkatkan kualitas SDM terkait risiko pembiayaan, menyusun perangkat analisis dan <i>tools</i> terkait pembiayaan dan memantau pengelolaan risiko kredit. - Melakukan inisiatif perbaikan atas tata kelola operasional Bank melalui pengelolaan risiko operasional bank, pendampingan pengelolaan risiko operasional untuk Risk Taking Unit (RTU), baik pada <i>business/support function</i>, penyempurnaan dan penyusunan ketentuan internal terkait operasional, peningkatan kualitas SDM terkait risiko operasional, dan pemantauan pengelolaan risiko operasional. - Mengembangkan budaya manajemen risiko dan kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi, antara lain melalui <i>e-mail blast</i>, video dan pelatihan.	The Board of Commissioners has carried out supervisory duties, including providing direction to the Board of Directors, evaluating the implementation of the Bank's strategic policies, and supervising the Bank's operational activities. The Board of Commissioners has adjusted the membership of Board of Commissioners-level committees in accordance with the provisions of POJK No. 17 of 2023 concerning Governance for Commercial Banks. Committees formed by the Board of Commissioners have submitted recommendations for the improvement process to the Board of Commissioners. The Board of Commissioners and Board of Commissioners-level committees have also held meetings in accordance with the provisions. The Board of Commissioners has held meetings with the Board of Directors to supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and provide advice from the Board of Commissioners to the Board of Directors. The Board of Commissioners has approved the Bank Business Plan (RBB), which has been prepared and supervises the realization of the RBB and submits reports on the results of its supervision to the OJK periodically. In order to carry out its duties and responsibilities in supervising the fulfillment of sharia governance, DPS has directed, monitored, and evaluated the implementation of Sharia Governance, including the implementation of sharia risk management, sharia compliance, and sharia internal audit. The sharia audit function, which is part of the Internal Audit Work Unit (SKAI) led by the Head of SKAI, has carried out audits of the implementation of sharia aspects at the Bank Head Office and Bank Branch Offices. DPS has held regular monthly meetings to discuss and provide opinions on proposed products, activities, and programs in accordance with sharia principles. The regular meetings of the Sharia Supervisory Board together with the Board of Commissioners and the Board of Directors are held at least once every 4 (four) months. DPS has supervised the Bank's business activities and submitted reports on the results of its supervision to the OJK and the National Sharia Board - Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) on a semesterly basis. The Board of Directors is fully responsible for the implementation of Bank management based on the principles of prudence, GCG, and sharia aspects. The Board of Directors has prepared the RBB and has received approval from the Board of Commissioners. The decision-making process for the Board of Directors is carried out, among other things, through regular meetings of the Board of Directors, which are held weekly. In order to realize the business targets in the RBB and improve the Bank's performance, the Board of Directors has made efforts, including the following: - Carrying out improvements to financing governance includes improving the composition and limits of authority to decide on financing, compiling and updating internal regulations, improving the quality of human resources related to financing risk, developing analytical tools and tools related to financing, and monitoring credit risk management. - Carrying out initiatives to improve the operational governance of the Bank through managing operational risks of the bank, assisting with operational risk management for Risk Taking Units (RTU), both in business/support functions, refining and drafting internal regulations related to operations, improving the quality of human resources related to operational risks, and monitoring operational risk management. - Developing a culture of risk management and compliance at all levels of the organization, including through e-mail blasts, videos and training.



No.	Uraian	Description
	d. Melakukan beberapa inisiatif <i>project</i> dan pengembangan produk dan aktivitas Bank. Selama tahun 2024, Bank Muamalat telah menyampaikan 1 (satu) surat penyampaian informasi uji coba produk baru yaitu, Uji Coba Muamalat Hijrah <i>Groceries</i> dan menyampaikan 1 (satu) surat Laporan Realisasi penerbitan produk, yaitu Laporan Realisasi Solusi Emas Hijrah. Bank Muamalat secara resmi telah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-50/PM.02/2024 tanggal 22 Oktober 2024. Sebagai bank kustodian, Bank akan melayani kebutuhan kustodian para nasabah institusi dan individual, baik lokal ataupun asing. e. Melaksanakan training/<i>workshop</i> & sosialisasi, dan sertifikasi profesi, antara lain terkait dengan sertifikasi manajemen risiko beserta <i>refreshment</i>, sertifikasi treasury beserta <i>refreshment</i>, Standarisasi Kompetensi Sistem Pembayaran (SKSP), Sertifikasi Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), Sertifikasi Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Campaign Terkait dengan Anti-Fraud, Mandatory Muamalat Internal Certification (MIC), Muamalat Associate Program (MAP) Wholesale Banking dan Small Medium Enterprise, program Muamalat <i>internal certification</i> yang ditujukan untuk profesi Teller, CS dan Operation supervisor, dan webinar Dirasah Islamiyah. f. Melaksanakan penerapan strategi pencegahan <i>anti-fraud</i> secara periodik melalui program <i>Anti-Fraud Awareness</i>, identifikasi kerawanan, dan <i>know your employee</i>. Bank juga telah melakukan evaluasi dan penguatan terhadap ketentuan internal secara berkala dalam rangka menjaga efektivitas, kecukupan dan kesesuaian ketentuan internal dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip syariah. Pengujian produk dan aktivitas baru telah dikaji/dievaluasi oleh fungsi-fungsi terkait yaitu Satuan Kerja Manajemen Risiko, unit kerja kepatuhan dan legal serta telah mendapatkan opini/pendapat dari DPS atas kesesuaian produk dan aktivitas baru sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.	d. Carry out several project initiatives and develop Bank products and activities. In 2024, Bank Muamalat submitted 1 (one) letter conveying information on new product trials, namely, the Muamalat Hijrah Groceries Trial, and submitted 1 (one) letter of Realization Report on product issuance, namely, the Hijrah Gold Solution Realization Report. Bank Muamalat has officially been based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-50/PM.02/2024 dated October 22, 2024. As a custodian bank, the Bank will serve the custodial needs of institutional and individual customers, both local and foreign. e. Carrying out training/workshops & socialization, and professional certification, including related to risk management certification with refreshment, treasury certification with refreshment, Payment System Competency Standardization (SKSP), Securities Brokerage Representative Certification (WPPE), Indonesian Sharia Insurance Association (AASI) Certification, Campaign Related to Anti-Fraud, Mandatory Muamalat Internal Certification (MIC), Muamalat Associate Program (MAP) Wholesale Banking and Small Medium Enterprise, Muamalat internal certification program aimed at Teller, CS and Operation supervisor professions, and Dirasah Islamiyah webinar. f. Implementing periodic anti-fraud prevention strategies through the Anti-Fraud Awareness program, identifying vulnerabilities, and knowing your employees. The Bank has also evaluated and updated internal regulations periodically in order to maintain the effectiveness, adequacy, and conformity of internal regulations with applicable laws and regulations and sharia principles. Submissions of new products and activities have been reviewed/evaluated by related functions, namely the Risk Management Work Unit and compliance and legal work units, and have received opinions from DPS regarding the suitability of new products and activities in accordance with the DSN-MUI Fatwa.
3.	Governance Outcome	
	Bank telah melaksanakan RUPS tahunan dan pertanggungjawaban manajemen telah diterima oleh Pemegang Saham. Setiap pengambilan keputusan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi dilakukan melalui rapat yang dituangkan dalam risalah rapat dan telah ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan. Rencana Bisnis Bank telah disusun dan dikaji secara komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis, kekuatan yang dimiliki Bank serta kelemahan dan ancaman yang akan dihadapi. Rencana Bisnis Bank juga telah dikomunikasikan kepada seluruh pejabat di internal Bank. Produk dan aktivitas yang diterbitkan oleh Bank sesuai dengan fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI. Setiap produk dan aktivitas yang diterbitkan oleh Bank telah mendapat opini syariah dari DPS. Prosedur pelaksanaan dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa Bank juga telah sesuai dengan regulasi dan prinsip syariah. Bank telah merealisasikan produk Solusi Emas Hijrah. Bank telah berhasil meraih sertifikat ISO 37001:2016 atas komitmen Bank dalam menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Bank Muamalat meraih Indonesia Sustainable Development Goals Award 2024 Kategori SDGs 4.1 Social Pillar yang diselenggarakan oleh Corporate Forum for CSR Development (CFCD), The Best Indonesia Annual Report Award tahun 2024 (Indonesian Annual Report Award III 2024) yang diselenggarakan oleh Economic Review, dan Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat yaitu Bapak Hayunaji sebagai pemenang pada Corporate Secretary Champion 2024 oleh SWA Media Group. Secara umum rasio prudensial Bank telah sesuai dengan ketentuan. Bank juga tidak melakukan pelanggaran dan/atau pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).	The Bank has held an annual GMS, and management accountability has been accepted by Shareholders. Every decision made by the Board of Commissioners, DPS, and the Board of Directors is carried out through meetings that are outlined in the minutes of the meeting and have been followed up as an improvement effort. The Bank's Business Plan has been prepared and studied comprehensively by considering business opportunities, the Bank's strengths as well as the weaknesses and threats it will face. The Bank's Business Plan has also been communicated to all internal Bank officials. Products and activities issued by the Bank are in accordance with the fatwa issued by DSN-MUI. Every product and activity issued by the Bank has received sharia opinion from DPS. Implementation procedures for collecting funds, distributing funds, and providing Bank services are also in accordance with sharia regulations and principles. The Bank has realized the Hijrah Gold Solutions product. The Bank has succeeded in achieving ISO 37001:2016 certificate for the Bank's commitment to implementing the Anti-Bribery Management System (SMAP). Bank Muamalat won the Indonesia Sustainable Development Goals Award 2024 in the SDGs 4.1 Social Pillar Category organized by the Corporate Forum for CSR Development (CFCD), The Best Indonesia Annual Report Award 2024 (Indonesian Annual Report Award III 2024) organized by Economic Review, and Bank Muamalat's Corporate Secretary, Mr. Hayunaji, won the Corporate Secretary Champion 2024 by SWA Media Group. In general, the Bank's prudential ratios are in accordance with the provisions. The Bank also did not violate and/or exceed the Maximum Fund Distribution Limit (BMPD).

Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Companies

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka sebagai standar penerapan GCG, Bank Muamalat mengimplementasikan dasar Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang meliputi 5 (lima) aspek yang diturunkan ke dalam 8 (delapan) prinsip dan 25 rekomendasi. Aspek-aspek dan prinsip-prinsip tersebut, adalah sebagai berikut:

Based on Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Guidelines for Public Company Governance and Financial Services Authority Circular Letter No. 32/ SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines as a standard for implementing GCG, Bank Muamalat implements the basic Corporate Governance Guidelines, which include 5 (five) aspects that are broken down into 8 (eight) principles and 25 recommendations. These aspects and principles are as follows:

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Implementation at Bank Muamalat
Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham Aspect 1: Public Company Relationship with Shareholders in Guaranteeing Shareholder Rights			
Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	1.1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi.	Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengumpulan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengumpulan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>.	Telah Diterapkan Bank telah memiliki ketentuan tata cara pengambilan keputusan melalui pengumpulan suara (<i>voting</i>) dalam RUPS, baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Ketentuan tersebut diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan Prosedur Pelaksanaan RUPS sebagai berikut: - Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan RUPS adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. - Pemungutan suara mengenai diri orang dan pemungutan suara mengenai hal-hal lain diatur sebagai berikut: - diri orang dilakukan secara tertulis dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani; - mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang hadir dalam RUPS.



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Implementation at Bank Muamalat
Principle 1: Increase the value of holding a General Meeting of Shareholders (GMS).	1.1. Public Companies have technical methods or procedures for collecting votes (voting) both openly and privately that prioritize independence.	Each share with voting rights issued has one voting right (one share, one vote). Shareholders can use their voting rights when making decisions, especially when making decisions by collecting votes. However, the decision-making mechanism by means of voting, both openly and privately, has not been regulated in detail. Public Companies are recommended to have procedures for collecting votes in making decisions on a GMS agenda. The voting procedures must maintain the independence or freedom of shareholders. For example, voting is done openly by raising hands in accordance with the choice instructions offered by the chairman of the GMS. Meanwhile, closed voting is carried out on decisions that require confidentiality or at the request of shareholders by using voting cards or by using electronic voting.	Has Been Implemented The Bank has provisions for procedures for making decisions through voting at the GMS, both openly and closed, which prioritizes independence and the interests of shareholders. These provisions are regulated in the Bank's Articles of Association and the GMS Implementation Procedures as follows: 1. GMS decisions are taken based on deliberation to reach consensus. 2. In the event that a decision based on deliberation to reach consensus is not reached, the GMS decision is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with voting rights present at the GMS, unless the statutory regulations and/or the Articles of Association determine that the decision is valid if it is approved by a greater number of affirmative votes. 3. Voting regarding individuals and voting regarding other matters are regulated as follows: a. personally executed in writing with an unsigned closed voice; b. regarding other matters, this is done orally unless the chairman of the GMS determines otherwise without any objection from 1 (one) or more shareholders present at the GMS.
	1.2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.	Telah Diterapkan 1. RUPS Tahunan (RUPST) tanggal 27 Juni 2024 dihadiri oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas Syariah, 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, dan 4 (empat) orang anggota Direksi. 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah, 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, dan 1 (satu) orang anggota Direksi berhalangan hadir. 2. RUPSLB pada tanggal 11 Desember 2024 dihadiri seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah, 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) orang anggota Direksi. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris dan 2 (dua) orang anggota Direksi berhalangan hadir.
	1.2. All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of Public Companies are present at the Annual GMS.	Members of the Board of Commissioners of Public Companies aim to ensure that every member of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners can pay attention to, explain and answer directly problems that occur or questions raised by shareholders regarding the agenda at the GMS.	Has Been Implemented 1. The Annual GMS (AGMS) on June 27, 2024, was attended by 2 (two) members of the Sharia Supervisory Board, 1 (one) member of the Board of Commissioners, and 4 (four) members of the Board of Directors. 1 (one) member of the Sharia Supervisory Board, 2 (two) members of the Board of Commissioners, and 1 (one) member of the Board of Directors were unable to attend. 2. The EGMS on December 11, 2024, was attended by all members of the Sharia Supervisory Board, 2 (two) members of the Board of Commissioners, and 1 (one) member of the Board of Directors. 1 (one) member of the Board of Commissioners and 2 (two) members of the Board of Directors were unable to attend.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Implementation at Bank Muamalat
	1.3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. 1.3. A summary of the GMS minutes is available on the Public Company Website for at least 1 (one) year.	Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui situs <i>web</i> Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada situs <i>web</i> Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di situs <i>web</i> dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut. Public Companies are required to prepare a summary of the minutes of the GMS in Indonesian and a foreign language (at least in English), and announce it 2 (two) working days after the GMS is held to the public, one of which is via the Public Company website. The availability of a summary of the GMS minutes on the Public Company website provides an opportunity for shareholders who are not present to obtain important information in holding the GMS easily and quickly. Therefore, the provisions regarding the minimum period for the availability of a summary of the GMS minutes on the website are intended to provide sufficient time for shareholders to obtain this information.	Telah Diterapkan Bank memiliki ringkasan risalah RUPS atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang telah diselenggarakan, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris dan dapat diakses oleh masyarakat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS, salah satunya adalah melalui Situs Web Bank (www.bankmuamalat.co.id) pada menu hubungan investor-RUPS yang tersedia selama lebih dari 1 (satu) tahun. Has Been Applied The Bank has a summary of the minutes of the GMS, for the GMS that has been held, both in Indonesian and English and can be accessed by the public 2 (two) working days after the GMS is held, one of which is through the Bank's Website (www.bankmuamalat.co.id) on the investor relations-GMS menu available for more than 1 (one) year.
Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	2.1. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Di samping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.	Telah Diterapkan Dalam kebijakan GCG diatur bahwa dalam hubungan dengan Pemegang Saham, Bank Muamalat Indonesia senantiasa mendorong penerapannya berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 1. Melindungi hak-hak Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank; 2. Menyelenggarakan Daftar Pemegang Saham secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank; 3. Menyediakan informasi mengenai Bank secara tepat waktu, benar, dan teratur bagi seluruh Pemegang Saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia; dan 4. Memberikan penjelasan yang lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS. Bank Muamalat Indonesia melakukan komunikasi dengan para pemegang saham melalui media komunikasi antara lain melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), <i>website</i> Bank (www.bankmuamalat.co.id), <i>e-mail helpdesk</i>: investor.relations@bankmuamalat.co.id, akun sosial media Bank Muamalat, SalaMuamalat, dan melalui surat menyurat.



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Implementation at Bank Muamalat
Principle 2: Improving the Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors.	2.1. Public Companies have a communication policy with shareholders or investors.	The existence of communication between Public Companies and shareholders or investors is intended to ensure that shareholders or investors gain a clearer understanding of information that has been published to the public, such as periodic reports, information disclosure, business conditions or prospects and performance, as well as the Implementation of Public Company Governance. Apart from that, shareholders or investors can also submit input and opinions to the management of the Public Company. The communication policy with shareholders or investors shows the Public Company's commitment to implementing communication with shareholders or investors. This policy may include strategies, programs, and timing for implementing communications, as well as guidelines that support shareholders or investors in participating in such communications.	Has Been Implemented The GCG policy stipulates that in relations with Shareholders, Bank Muamalat Indonesia always encourages its implementation based on the following provisions: 1. Protect the rights of Shareholders in accordance with laws and regulations and the Bank's Articles of Association; 2. Organize an orderly Register of Shareholders in accordance with statutory regulations and the Bank's Articles of Association; 3. Provide information regarding the Bank in a timely, correct, and regular manner to all Shareholders, except for matters of a confidential nature; and 4. Provide complete explanations and accurate information regarding the implementation of the GMS. Bank Muamalat Indonesia communicates with shareholders through communication media, including the General Meeting of Shareholders (GMS), the Bank's website (www.bankmuamalat.co.id), e-mail helpdesk: investor_relations@bankmuamalat.co.id , Bank Muamalat's social media account, SalaMuamalat, and through correspondence.
	2.2. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.	Telah Diterapkan Bank telah menyediakan mekanisme komunikasi antara Pemegang Saham dengan Bank sebagaimana dijelaskan pada website Bank.
	2.2. The Public Company discloses the Public Company's communication policy with shareholders or investors on the Website.	Disclosure of communication policies is a form of transparency regarding the Public Company's commitment to providing equality to all shareholders or investors regarding the implementation of communications. Disclosure of this information also aims to increase the participation and role of shareholders or investors in implementing Public Company communication programs.	Has Been Implemented The Bank has provided a communication mechanism between Shareholders and the Bank as explained on the Bank's website.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Implementation at Bank Muamalat
Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Aspect 2: Functions and Roles of the Board of Commissioners			
Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	3.1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda di antara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.	Telah Diterapkan Hingga berakhirnya tahun buku 2024, jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) orang di mana 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut telah memenuhi regulasi dan mempertimbangkan karakteristik, kapasitas, ukuran, dan komposisi terhadap Direksi serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis Bank.
Principle 3: Strengthen the Membership and Composition of the Board of Commissioners.	3.1. Determining the number of members of the Board of Commissioners considers the conditions of the Public Company.	The number of members of the Board of Commissioners can influence the effectiveness of the implementation of the duties of the Board of Commissioners. Determining the number of members of the Board of Commissioners of a Public Company must refer to the provisions of applicable laws and regulations, consisting of at least 2 (two) people based on the provisions of OJK regulations concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. Apart from that, it is also necessary to consider the conditions of Public Companies, which include, among other things, characteristics, capacity, and size, as well as achieving goals and meeting different business needs among Public Companies. However, the number of members of the Board of Commissioners that is too large has the potential to disrupt the effectiveness of the implementation of the Board of Commissioners' functions.	Has Been Implemented Until the end of the 2024 financial year, the number of members of the Board of Commissioners is 3 (three) people, of which 2 (two) members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners. The determination of the number of members of the Board of Commissioners has complied with regulations and considered the characteristics, capacity, size, and composition of the Board of Directors as well as achieving objectives and meeting the Bank's business needs.
	3.2. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.	Telah Diterapkan Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan di mana keberagaman tersebut tercermin dari keahlian dan pengalaman yang dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris memiliki keahlian pada bidang: • Perbankan syariah • Audit • Industri keuangan • Manajemen strategis • Tata Kelola Perusahaan • Hukum



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Implementation at Bank Muamalat
	3.2. Determining the composition of members of the Board of Commissioners considers the diversity of skills, knowledge, and experience required.	The composition of the Board of Commissioners is a combination of characteristics both in terms of the organs of the Board of Commissioners and individual members of the Board of Commissioners, in accordance with the needs of the Public Company. These characteristics can be reflected in determining the skills, knowledge and experience required in carrying out supervisory duties and providing advice by the Board of Commissioners of a Public Company. A composition that considers the needs of Public Companies is a positive thing, especially regarding decision-making in the context of implementing the supervisory function, which is carried out by considering various broader aspects.	Has Been Implemented The composition of the members of the Board of Commissioners has considered the diversity of skills, knowledge, and experience required, where this diversity is reflected in the skills and experience possessed by each member of the Board of Commissioners. Members of the Board of Commissioners have expertise in the areas of: • Islamic banking • Audits • Financial industry • Strategic management • Corporate governance • Law
Prinsip 4: Meningkatkan kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	4.1. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Kebijakan penilaian sendiri (self- assessment) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal. Self-assessment atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing- masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya self-assessment ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, di mana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Telah Diterapkan Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) sebagai mekanisme penilaian kinerja Dewan Komisaris.
Principle 4: Improving the quality of implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.	4.1. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.	The Board of Commissioners' self-assessment policy is a guideline used as a form of accountability for the collegial performance assessment of the Board of Commissioners. Self-assessment is carried out by each member to assess the implementation of the performance of the Board of Commissioners in a collegial manner and not to assess the individual performance of each member of the Board of Commissioners. With this self-assessment, it is hoped that each member of the Board of Commissioners can contribute to improving the performance of the Board of Commissioners on an ongoing basis. This policy may include the assessment activities carried out along with their goals and objectives, the timing of their implementation on a regular basis, and the benchmarks or assessment criteria used in accordance with the recommendations provided by the nomination and remuneration function of the Public Company, where the existence of this function is required in the OJK Regulations concerning the Remuneration and Nomination Committee of Issuers or Public Companies.	Has Been Implemented The Board of Commissioners has a self-assessment policy as a mechanism for assessing the performance of the Board of Commissioners.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Implementation at Bank Muamalat
	4.2. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Pengungkapan kebijakan <i>self-assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga, untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris.	Telah Diterapkan Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.
	4.2. The self-assessment policy for assessing the performance of the Board of Commissioners is disclosed in the Public Company's Annual Report.	Disclosure of the self-assessment policy on the performance of the Board of Commissioners is carried out not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of its duties but also to provide confidence, especially to shareholders or investors regarding the efforts that need to be made to improve the performance of the Board of Commissioners. With this disclosure, shareholders or investors know the check and balance mechanism for the performance of the Board of Commissioners.	Has Been Implemented The self-assessment policy for assessing the performance of the Board of Commissioners has been disclosed in the Bank's Annual Report.
	4.3. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Pengungkapan kebijakan <i>self-assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga, untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balances</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris.	Telah Diterapkan Dalam <i>Board Manual</i> Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia di bab Etika Berkaitan dengan Penyusunan dan Kejahatan Keuangan diatur bahwa anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam tindak kejahatan keuangan sebagai status terpidana maka harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris.
	4.3. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes.	Disclosure of the self-assessment policy on the performance of the Board of Commissioners is carried out not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of its duties but also to provide confidence, especially to shareholders or investors regarding the efforts that need to be made to improve the performance of the Board of Commissioners. With this disclosure, shareholders or investors know the checks and balances mechanism for the performance of the Board of Commissioners.	Has Been Implemented In the Board Manual for the Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia, in the chapter on Ethics Relating to Bribery and Financial Crimes, it is stipulated that members of the Board of Commissioners who are involved in financial crimes as convicts must resign from their position as members of the Board of Commissioners.



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Implementation at Bank Muamalat
4.4. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi		Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.	Telah Diterapkan Bank telah memiliki dan menerapkan program <i>Talent Management</i> dan <i>Succession Plan</i>. Program <i>Talent Management</i> bertujuan untuk mempersiapkan <i>Pool of Talent</i> dari Bank sebagai upaya menyediakan dan penguatan Sumber Daya Insani di Bank. Suksesi diterapkan untuk penyiapan kader-kader terbaik dari <i>Pool of Talent</i> Bank yang siap menduduki posisi-posisi kritis termasuk posisi Pejabat Eksekutif Bank. Bank telah memiliki <i>database Pool of Talent</i> dan <i>Successor</i> berdasarkan proses identifikasi <i>talent</i> dan suksesor dengan menggunakan metodologi yang disiapkan Bank. Proses validasi dan kalibrasi dilakukan atas <i>talent</i> dan suksesor, baik di tingkat Direktorat maupun di tingkat Direksi untuk posisi-posisi strategis yaitu posisi satu level di bawah Direksi dan <i>Region Head</i>. Database ini diperbarui setiap tahun dan menjadi referensi manajemen dalam melakukan rotasi maupun promosi karyawan serta untuk kebutuhan nominasi jabatan strategis termasuk Direksi.
4.4. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the Nomination and Remuneration function prepares a succession policy in the Nomination process for members of the Board of Directors.		Based on the provisions of the OJK Regulations concerning Remuneration and Nomination Committees for Issuers or Public Companies, the committee carrying out the nomination function has the task of formulating the policies and criteria required in the nomination process for prospective members of the Board of Directors. One policy that can support the nomination process as intended is the succession policy for members of the Board of Directors. The policy regarding succession aims to maintain the continuity of the leadership regeneration or cadre process in the company in order to maintain business continuity and the company's long-term goals.	Has Been Implemented The Bank had and has implemented a Talent Management and Succession Plan program. The Talent Management Program aims to prepare the Bank's Pool of Talent as an effort to provide and strengthen Human Resources at the Bank. Succession is applied to prepare the best cadres from the Bank's Pool of Talent who are ready to occupy critical positions, including the position of Bank Executive Officer. The Bank has a Pool of Talent and Successor database based on the talent and successor identification process using a methodology prepared by the Bank. The validation and calibration process is carried out on talent and successors, both at the Directorate level and at the Board of Directors level for strategic positions, namely positions one level below the Board of Directors and Region Head. This database is updated every year and becomes a reference for management in carrying out employee rotations and promotions as well as for nomination needs for strategic positions, including the Board of Directors.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Implementation at Bank Muamalat
Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi Aspect 3: Functions and Roles of the Board of Directors			
Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	5.1. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, di mana berdasarkan Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Di samping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka, meliputi karakteristik, kapasitas dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.	Telah Diterapkan Komposisi Direksi telah sesuai dengan regulasi dan telah mempertimbangkan karakteristik, kapasitas, dan skala usaha Bank. Per Desember 2024, jumlah Direksi sebanyak 3 (tiga) orang dengan pembagian tugas sebagai Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia, dan Direktur Bisnis. Adapun untuk bidang Operasi diampu oleh Senior Executive Vice President (SEVP) Operasi dan Teknologi Informasi. Seluruh anggota Direksi memiliki keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Principle 5: Strengthen the Membership and Composition of the Board of Directors.	5.1. Determining the number of members of the Board of Directors considers the condition of the Public Company and effectiveness in decision-making.	As a company organ with authority to manage the company, determining the number of the Board of Directors greatly influences the performance of a Public Company. Therefore, determining the number of members of the Board of Directors must be carried out through careful consideration and must refer to the provisions of applicable laws and regulations, which based on OJK Regulations regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies consists of at least 2 (two) people. In addition, determining the number of the Board of Directors must be based on the need to achieve the goals and objectives of the Public Company and adjusted to the conditions of the Public Company, including the characteristics, capacity, and size of the Public Company, as well as how to achieve the effectiveness of the Board of Directors' decision-making.	Has Been Implemented The composition of the Board of Directors is in accordance with regulations and has considered the characteristics, capacity, and scale of the Bank's business. As of December 2024, the number of the Board of Directors was 3 (three) people with a division of duties as President Director, Compliance and Human Resources Director, and Business Director. The Operations sector is supervised by the Senior Executive Vice President (SEVP) Operations and Information Technology. All members of the Board of Directors have expertise and experience in accordance with their respective fields of duties.



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Implementation at Bank Muamalat
5.2. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	5.2. Determining the composition of members of the Board of Directors considers the diversity of skills, knowledge and experience required.	Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukkan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegal.	Telah Diterapkan Komposisi anggota Direksi telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai pembagian fungsi, tugas dan wewenang Direksi dalam mencapai tujuan Bank.
5.3. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	5.3. Members of the Board of Directors who oversee the accounting or finance department have expertise and/or knowledge in the accounting field.	Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sector pasar modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan dan/atau pengalaman kerja terkait.	Telah Diterapkan Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang keuangan. Beliau memiliki pengalaman berkarir sebagai Direktur Utama PT Bank BNI Syariah (2016-2017), Direktur Bisnis PT Bank BNI Syariah (2012-2016), Direktur Risiko dan Kepatuhan PT Bank BNI Syariah (2010-2012), serta memegang peran penting lainnya seperti VP Corporate Secretary PT Bank Permata Tbk (2005-2007) dan Head of Investor Relations PT Bank Permata Tbk (2003-2005). Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (2017-2024).

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Implementation at Bank Muamalat
	5.3. Members of the Board of Directors who are in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in the field of accounting.	Financial Statements are management accountability reports for the management of resources owned by Public Companies, which must be prepared and presented in accordance with generally accepted Financial Accounting Standards in Indonesia and also related OJK regulations, including laws and regulations in the Capital Market sector that regulate the presentation and disclosure of Public Company Financial Statements. Based on statutory regulations in the capital markets sector, which regulate the responsibility of the Board of Directors for Financial Statements, the Board of Directors is jointly and severally responsible for the Financial Statements, which are signed by the President Director and members of the Board of Directors who are in charge of accounting or finance. Therefore, the disclosure and preparation of financial information presented in financial statements will greatly depend on the expertise and/or knowledge of the Board of Directors, especially members of the Board of Directors who are in charge of accounting or finance. The existence of qualifications of expertise and/or knowledge in the field of accounting that at least members of the Board of Directors have can provide confidence in the preparation of Financial Statements, so that the Financial Statements can be relied upon by stakeholders as a basis for making economic decisions regarding the Public Company in question. These skills and/or knowledge can be proven by educational background, training certification, and/or related work experience.	Has Been Implemented Directors in charge of accounting or finance have an educational background and work experience in the financial sector. He has career experience as President Director of PT Bank BNI Syariah (2016-2017), Business Director of PT Bank BNI Syariah (2012-2016), Director of Risk and Compliance of PT Bank BNI Syariah (2010-2012), as well as holding other important roles such as VP Corporate Secretary of PT Bank Permata Tbk (2005-2007) and Head of Investor Relations of PT Bank Permata Tbk (2003-2005). Apart from that, he also served as Deputy Chair of the Indonesian Waqf Board (2017-2024).
	6.1. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegal. <i>Self-assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>self-assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, di mana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam peraturan OJK tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Telah Diterapkan Direksi memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi secara kolegal. Selain itu <i>self-assessment</i> kinerja Direksi juga dilakukan secara berkala terhadap <i>governance structure</i> , <i>governance process</i> dan <i>governance outcome</i> di level Direksi. Berdasarkan hasil <i>self-assessment</i> tersebut telah dilakukan upaya-upaya yang perlu ditingkatkan untuk peningkatan kinerja ke depan.



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Implementation at Bank Muamalat
6.1. The Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.		As is the case with the Board of Commissioners, the Board of Directors' self-assessment policy is a guideline used as a form of accountability for the collegial assessment of the Board of Directors' performance. Self-assessment is carried out by each member of the Board of Directors to assess the implementation of the performance of the Board of Directors in a collegial manner and not to assess the individual performance of each member of the Board of Directors. With this self-assessment, it is hoped that each member of the Board of Directors can contribute to improving the performance of the Board of Directors on an ongoing basis. This policy may include assessment activities carried out along with their goals and objectives, periodic implementation times, and benchmarks or assessment criteria used in accordance with the recommendations provided by the nomination and remuneration function of Public Companies, where the establishment of this function has been required in OJK regulations regarding Remuneration and Nomination Committees for Issuers or Public Companies.	Has Been Implemented The Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors in a collegial manner. Apart from that, self-assessment of the Board of Directors' performance is also carried out periodically on the governance structure, governance process, and governance outcomes at the Board of Directors level. Based on the results of the self-assessment, efforts have been made to improve future performance.
6.2. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.		Pengungkapan kebijakan <i>self-assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balances</i> terhadap kinerja Direksi.	Telah Diterapkan Kebijakan <i>self-assessment</i> atas kinerja Direksi diungkapkan dalam bagian Penilaian Kinerja Direksi di Laporan Tahunan.
6.2. The self-assessment policy for assessing the performance of the Board of Directors is disclosed in the Public Company's annual report.		Disclosure of the self-assessment policy on the performance of the Board of Directors is carried out not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of their duties but also to provide important information regarding improvement efforts in the management of Public Companies. This information is very useful for providing confidence to shareholders or investors that there is certainty that company management will continue to be carried out in a better direction. With this disclosure, shareholders or investors know the check and balance mechanism for the performance of the Board of Directors.	Has Been Implemented The self-assessment policy on the Board of Directors' performance is disclosed in the Directors' Performance Assessment section in the Annual Report.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Implementation at Bank Muamalat
	6.3. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi.	Telah Diterapkan Dalam ketentuan Internal: <i>Board Manual</i> Direksi Bank Muamalat Indonesia dalam bab Etika Berkaitan dengan Penyuapan dan Kejahatan Keuangan bagi Direksi antara lain diatur bahwa: 1. Direksi dilarang melakukan tindakan manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta tindakan pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang. 2. Anggota Direksi yang terlibat dalam tindak kejahatan keuangan sebagai status terpidana, maka harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota Direksi.
	6.3. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes	The policy of resigning members of the Board of Directors who are involved in financial crimes is a policy that can increase stakeholders' trust in Public Companies so that the company's integrity will be maintained. This policy is needed to help the legal process run smoothly and so that the legal process does not interfere with the running of business activities. Apart from that, from a morality perspective, this policy will build an ethical culture within the Public Company environment. These policies can be included in the Guidelines or Code of Ethics that apply to the Board of Directors.	Has Been Implemented In the Internal provisions: <i>Board Manual</i> for the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia in the Ethics chapter relating to Bribery and Financial Crimes for the Board of Directors, among other things, it is regulated that: 1. The Board of Directors is prohibited from carrying out acts of manipulation and various forms of embezzlement in financial services activities as well as criminal acts of money laundering as intended in Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering. 2. Members of the Board of Directors who are involved in financial crimes as convicted persons must resign from their positions as members of the Board of Directors.
Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect 4: Stakeholder Participation			
Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	7.1. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya insider trading tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan informasi yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.	Telah Diterapkan Kebijakan GCG Bank mengatur bahwa Bank senantiasa menyediakan informasi yang cukup, akurat, dipercaya dan tepat waktu kepada segenap pemangku kepentingan dengan mengedepankan prinsip <i>equal/treatment</i> . Jajaran Bank dilarang untuk membeli atau menjual saham (<i>common stock</i>) atau surat berharga Bank lainnya pada saat yang bersangkutan bertanggung jawab atas informasi penting yang tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik yang dapat mempengaruhi nilai harga saham dan surat berharga Bank. Sebagai informasi bahwa Bank Muamalat Indonesia merupakan perusahaan terbuka, namun tidak memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, sehingga potensi terjadinya <i>insider trading</i> sangat rendah.



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Implementation at Bank Muamalat
Principle 7: Improving Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation.	7.1. Public Companies have policies to prevent insider trading.	A person who has inside information is prohibited from carrying out securities transactions using inside information as intended in the Law on Capital Markets. Public Companies can minimize the occurrence of insider trading through prevention policies, for example, by strictly separating confidential data and/or information from public information, as well as dividing duties and responsibilities for managing the information in question proportionally and efficiently.	Has Been Implemented The Bank's GCG policy stipulates that the Bank always provides sufficient, accurate, reliable, and timely information to all stakeholders by prioritizing the principle of equal/treatment. Bank officials are prohibited from buying or selling shares (common stock) or other Bank securities when they are responsible for important information that is not intended for public consumption, which may affect the price value of the Bank's shares and securities. For information, Bank Muamalat Indonesia is a public company but does not trade its shares on the Indonesian Stock Exchange, so the potential for insider trading to occur is very low.
	7.2. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti-Fraud.	Kebijakan anti-korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>Fraud</i> , suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.	Telah Diterapkan Ketentuan terkait anti-korupsi dan anti <i>Fraud</i> telah diatur dalam Board Manual dan Prosedur. Bank telah menyusun Prosedur Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang secara umum mengatur tugas dan tanggung jawab unit kerja Anti <i>Fraud</i>, wewenang anti-<i>Fraud</i>, pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, sanksi, pemantauan, evaluasi tindak lanjut dan <i>whistleblowing system</i>.
	7.2. Public Companies have anti-corruption and anti-fraud policies.	Anti-corruption policies are useful for ensuring that Public Company business activities are carried out legally, prudently, and in accordance with the principles of good governance. This policy can be part of a code of ethics or in its own form. This policy may include, among other things, programs and procedures carried out to overcome corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery, and/or gratification in Public Companies. The scope of the policy must describe the Public Company's prevention of all corrupt practices, whether giving or receiving from other parties.	Has Been Implemented Provisions related to anti-corruption and anti-fraud have been regulated in the Board Manual and Procedures. The Bank has developed an Anti-Bribery Management System Procedure, which generally regulates the duties and responsibilities of the Anti-Fraud work unit, Anti-Fraud authority, prevention, detection, investigation, reporting, sanctions, monitoring, follow-up evaluation, and whistleblowing system.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Implementation at Bank Muamalat
	7.3. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas <i>output</i> perusahaan. Pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan Kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor.	Telah Diterapkan Kebijakan GCG mengatur bahwa Bank dalam berinteraksi dengan Penyedia Barang/Jasa antara lain dengan pemasok dan pihak lain yang melakukan transaksi usaha dengan Bank senantiasa menjalin hubungan baik didasarkan atas dasar profesionalisme kepercayaan, kejujuran, saling menghormati dan memberi kesempatan yang sama dalam memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis dengan Perseroan sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar. Dalam menjalin hubungan antara Bank dengan penyedia barang/jasa, seluruh pihak berkewajiban untuk merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak. Dalam melaksanakan hubungan dengan penyedia barang/jasa, Bank senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut: • Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat dengan memberikan perlakuan yang setara terhadap semua calon mitra bisnis yang telah memenuhi syarat/kriteria tertentu dari perusahaan. • Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi, tata cara evaluasi serta hasil evaluasi disampaikan kepada calon mitra bisnis yang akan melakukan bisnis dengan perusahaan. • Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon mitra bisnis secara proporsional dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara apapun. • Mekanisme seleksi pemasok atau vendor telah diatur secara detil dalam Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Implementation at Bank Muamalat
7.3. Public Companies have policies regarding the selection and improvement of supplier or vendor capabilities.		Policies regarding supplier or vendor selection are useful for ensuring that Public Companies obtain the required goods or services at competitive prices and good quality. Meanwhile, the policy of increasing supplier or vendor capabilities is useful for ensuring that the supply chain runs efficiently and effectively. The ability of suppliers or vendors to supply/fulfill the goods or services required by the company will affect the quality of the company's output. The implementation of these policies can guarantee continuity of supply, both in terms of quantity and quality required by Public Companies. The scope of this Policy includes criteria for selecting suppliers or vendors, transparent procurement mechanisms, efforts to increase the capabilities of suppliers or vendors, and fulfillment of rights related to suppliers or vendors.	Has Been Implemented The GCG policy stipulates that the Bank, in interacting with Goods/Service Providers, including suppliers and other parties conducting business transactions with the Bank, always maintains good relationships based on professionalism, trust, honesty, mutual respect, and providing equal opportunities to obtain relevant information in accordance with the business relationship with the Company so that each party can make decisions based on fair and reasonable considerations. In establishing relationships between the Bank and providers of goods/services, all parties are obliged to keep information confidential and protect the interests of each party. In carrying out relationships with goods/service providers, the Bank always prioritizes the following principles: • Procurement of goods/services must be carried out through fair selection and competition by providing equal treatment to all prospective business partners who have met certain requirements/criteria from the company. • All provisions and information regarding the procurement of goods/services including administrative technical requirements, evaluation procedures and evaluation results are conveyed to prospective business partners who will do business with the company. • Providing equal treatment to all potential business partners proportionally and not aiming to provide benefits to certain parties in any way. • The supplier or vendor selection mechanism has been regulated in detail in the Goods and Services Procurement Procedure.
7.4. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.		Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.	Telah Diterapkan Pemenuhan hak-hak kreditur telah diatur pada prosedur produk Bank serta tercantum dalam perjanjian.
7.4. Public Companies have policies regarding the fulfillment of creditor rights.		Policies regarding the fulfillment of creditors' rights are used as guidelines in making loans to creditors. The aim of the policy in question is to ensure the fulfillment of rights and maintain creditors' trust in Public Companies. This policy includes considerations in entering into agreements, as well as follow-up actions in fulfilling the Public Company's obligations to creditors.	Has Been Implemented Fulfillment of creditor rights is regulated in the Bank's product procedures and stated in the agreement.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Implementation at Bank Muamalat
	7.5. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan <i>system whistleblowing</i> .	Kebijakan <i>system whistleblowing</i> yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan <i>system whistleblowing</i> mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i> , cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.	Telah Diterapkan Bank memiliki kebijakan pelaksanaan <i>Whistleblowing System</i> sebagaimana diatur dalam Kebijakan GCG dan Prosedur Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang mencakup: • Perlindungan kepada <i>Whistleblower</i>. • Sistem Pelaporan dan Mekanisme Tindak Lanjut Laporan <i>Whistleblower</i>. • Pengaduan indikasi <i>Fraud</i>. • <i>Contact center whistleblowing system</i>.
	7.5. Public Companies have a whistleblowing system policy.	A well-drafted whistleblowing system policy will provide guaranteed protection to witnesses or whistleblowers for indications of violations committed by employees or management of a Public Company. The implementation of these system policies will have an impact on the formation of a good corporate governance culture. The whistleblowing system policy includes, among other things, the types of violations that can be reported through the whistleblowing system, how to make complaints, protection and guarantee of confidentiality of the whistleblower, handling of complaints, parties who manage complaints, and the results of handling and follow-up on complaints.	Has Been Implemented The Bank has a Whistleblowing System implementation policy as regulated in the GCG Policy and Anti-Bribery Management System Procedures, which includes: • Protection for Whistleblowers. • Reporting System and Follow-up Mechanism for Whistleblower Reports. • Complaints indicating fraud. • Whistleblowing system Contact center.
	7.6. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup, antara lain: maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, serta kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.	Telah Diterapkan <i>Long Term Incentive Plan</i> (LTIP) dikembangkan sebagai bagian dari penerapan konsep <i>Talent Management</i> dan <i>Succession Plan</i> di Bank. <i>Talent dan Successor Pool</i> yang tersedia merupakan karyawan terpilih yang diharapkan menjadi penggerak utama proses bisnis perusahaan. Salah satu upaya untuk mempertahankan mereka adalah melalui program retensi baik yang bersifat finansial maupun non finansial. Program LTIP merupakan salah satu program retensi dari sisi finansial di mana skema yang dibuat mengacu pada pencapaian kinerja atas <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) jangka panjang dengan syarat dan kondisi khusus. Beberapa skema ditetapkan dalam beberapa opsi yaitu <i>upfront payment system</i> dengan <i>bonding period</i> dan mekanisme <i>clawback</i> serta opsi x. Masing-masing terikat dengan syarat dan ketentuan yang relevan.



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Implementation at Bank Muamalat
	7.6. Public Companies have a policy of providing long-term incentives to the Board of Directors and employees.	Long-term incentives are incentives that are based on long-term performance achievements. Long-term incentive plans are based on the premise that the company's long-term performance is reflected by the growth in the value of shares or other long-term company targets. Long-term incentives are useful in order to maintain loyalty and provide motivation to the Board of Directors and employees to improve their performance or productivity, which will have an impact on improving company performance in the long term. The existence of a long-term incentive policy is a real commitment of the Public Company to encourage the implementation of providing long-term incentives to the Board of Directors and Employees with terms, procedures, and forms that are adapted to the long-term goals of the Public Company. The policy in question may include, among other things, the goals and objectives of providing long-term incentives, terms and procedures for providing incentives, as well as conditions and risks that Public Companies must pay attention to when providing incentives. The policy may also be included in the Public Company's existing remuneration policy.	Has Been Implemented The Long-Term Incentive Plan (LTIP) was developed as part of the implementation of the Talent Management and Succession Plan concept at the Bank. The available Talent and Successor Pool are selected employees who are expected to be the main drivers of the company's business processes. One effort to retain them is through retention programs, both financial and non-financial. The LTIP program is a retention program from a financial perspective where the scheme created refers to achieving performance on long-term Key Performance Indicators (KPI) with special terms and conditions. Several schemes are specified in several options, namely an upfront payment system with a bonding period and a clawback mechanism and option x. Each is bound by the relevant terms and conditions.

Aspek 5: Keterbukaan Informasi
Aspect 5: Information Disclosure

Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	8.1. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.	Telah Diterapkan Bank senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada <i>stakeholders</i> dan <i>shareholders</i> melalui media teknologi informasi selain website Bank. Media teknologi informasi yang digunakan oleh Bank untuk melakukan pelayanan dan update kebutuhan informasi kepada nasabah atau calon nasabah adalah website Bank Muamalat, SalaMuamalat, media sosial, yang terdiri dari Youtube, TikTok, X dan Instagram.
Principle 8: Improving the Implementation of Information Disclosure.	8.1. Public Companies make wider use of information technology apart from Websites as a medium for information disclosure.	The use of information technology can be useful as a medium for information disclosure. The information disclosure carried out is not only information disclosure that has been regulated in statutory regulations but also other information related to Public Companies that is considered to be useful for shareholders or investors to know. By utilizing information technology more widely besides websites, it is hoped that companies can increase the effectiveness of disseminating company information. However, the use of information technology still considers the company's benefits and costs.	Has Been Implemented The Bank always strives to improve the quality of information disclosure to stakeholders and shareholders through information technology media other than the Bank's website. The information technology media used by the Bank to provide services and update information needs for customers or prospective customers are the Bank Muamalat websites, SalaMuamalat, and social media, consisting of YouTube, TikTok, X, and Instagram.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Rekomendasi OJK Explanation of OJK Recommendations	Penerapan di Bank Muamalat Implementation at Bank Muamalat
	8.2. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.	Telah Diterapkan Bank telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki lebih dari 5% (lima) persen atau lebih saham Bank kepada Regulator dan Masyarakat melalui website, publikasi Laporan Keuangan, dan Laporan Tahunan Bank. Pengungkapan informasi tersebut telah diungkapkan pada website Bank menu Hubungan Investor bagian pemegang saham, Laporan Triwulan serta bagian ikhtisar saham dalam Laporan Tahunan ini.
	8.2. The Annual Report of a Public Company discloses the ultimate beneficial owner in Public Company share ownership of at least 5% (five percent), in addition to disclosure of the ultimate beneficial owner in Public Company share ownership through the main and controlling shareholders.	Legislation in the Capital Market sector that regulates the submission of annual reports for Public Companies has regulated the obligation to disclose information regarding shareholders who own 5% (five percent) or more of the shares of a Public Company as well as the obligation to disclose information regarding the main and controlling shareholders of a Public Company, both directly and indirectly, up to the last beneficial owner of the share ownership. In these Governance Guidelines, it is recommended to disclose the ultimate beneficial owner of Public Company share ownership of at least 5% (five percent), in addition to disclosing the ultimate beneficial owner of share ownership by the main and controlling shareholders.	Has Been Implemented The Bank has disclosed information regarding shareholders who own more than 5% (five) percent or more of the Bank's shares to Regulators and the Public through the website, publication of Financial Statements and the Bank's Annual Report. Disclosure of this information has been disclosed on the Bank's website, Investor Relations menu, shareholder section, Quarterly Reports and share overview section in this Annual Report.

Struktur dan Mekanisme GCG

GCG Structure and Mechanisms

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Bank Muamalat memiliki struktur tata kelola perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi serta Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi. Seluruh unsur tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsinya masing-masing.

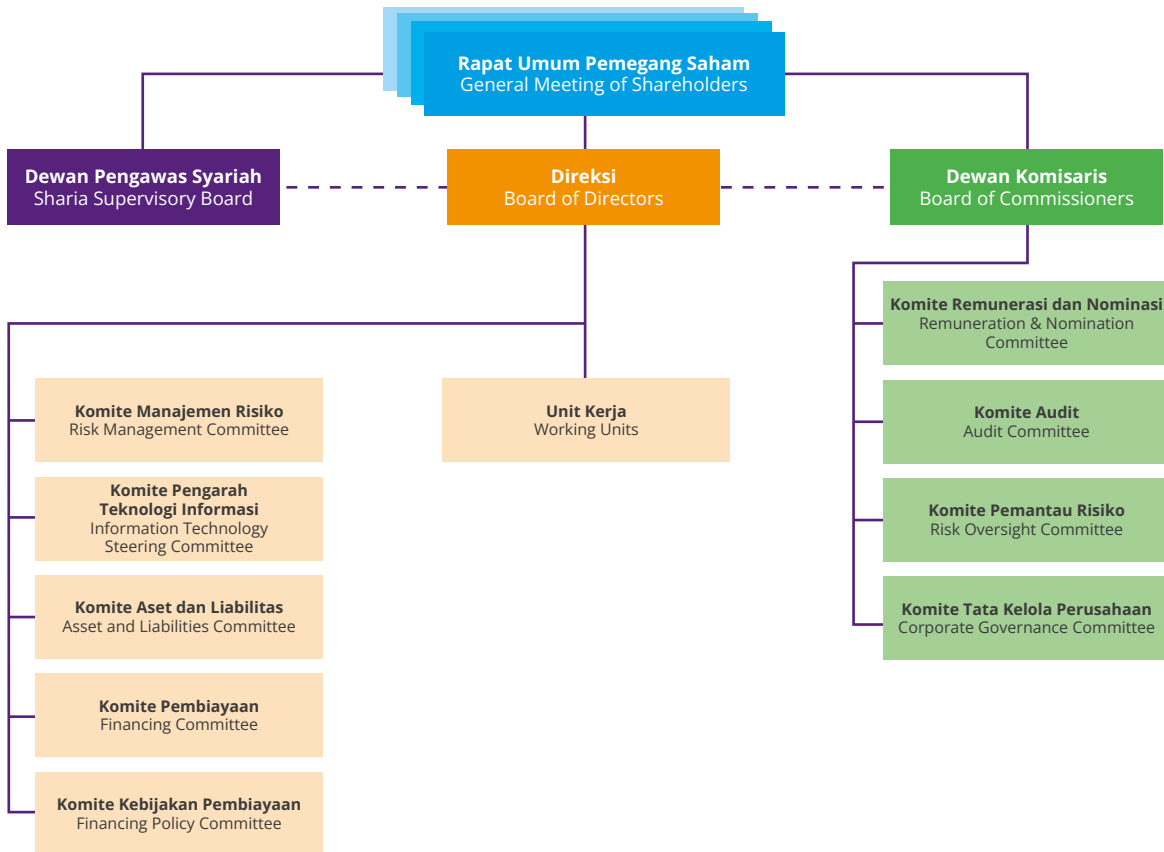
CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

Bank Muamalat has a corporate governance structure consisting of the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Board of Directors, and committees at the level of the Board of Commissioners and the Board of Directors. All these elements carry out duties and responsibilities according to their respective functions.



STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA BANK MUAMALAT INDONESIA

Bank Muamalat Indonesia Governance Organization Structure



INFRASTRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Infrastruktur tata kelola perusahaan pada Bank Muamalat terdiri dari kebijakan dan prosedur sebagai panduan dalam menjalankan fungsi dan tugas organ perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

- Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia
- *Board Manual* Bank Muamalat Indonesia
- Kode Etik Bank Muamalat Indonesia
- Kebijakan GCG Bank Muamalat Indonesia
- Kebijakan Umum Operasional Bank
- Kebijakan Umum dan Prosedur Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
- Kebijakan Umum Akuntansi
- Prosedur Pelaksanaan Rapat Direksi
- Prosedur Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
- Piagam Komite Audit
- Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi
- Piagam Komite Pemantau Risiko
- Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan

CORPORATE GOVERNANCE INFRASTRUCTURE

The corporate governance infrastructure at Bank Muamalat consists of policies and procedures as a guide in carrying out the functions and duties of corporate organs, with the following details:

- Bank Muamalat Indonesia's Articles of Association
- Bank Muamalat Indonesia Board Manual
- Bank Muamalat Indonesia Code of Ethics
- Bank Muamalat Indonesia GCG Policy
- General Bank Operational Policy
- General Policy and Procedures for Anti-Money Laundering, Countering the Financing of Terrorism, and Countering the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction
- General Accounting Policies
- Procedures for Implementing Board of Directors Meetings
- Procedures for Implementing the General Meeting of Shareholders
- Audit Committee Charter
- Remuneration and Nomination Committee Charter
- Risk Monitoring Committee Charter
- Corporate Governance Committee Charter

- Piagam Komite Aset dan Liabilitas
- Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi
- Piagam Komite Manajemen Risiko
- Piagam Komite Kebijakan Pembiayaan
- Prosedur Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- Piagam Internal Audit

- Asset and Liability Committee Charter
- Information Technology Steering Committee Charter
- Risk Management Committee Charter
- Financing Policy Committee Charter
- Anti-Bribery Management System Procedures
- Internal Audit Charter

MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Mekanisme tata kelola di Bank Muamalat berlandaskan kebijakan dan prosedur operasional terkait GCG (*soft structure*). Kebijakan dan prosedur tersebut diimplementasikan dalam kegiatan bisnis Bank sehari-hari dan dikaji secara berkala efektivitasnya. Norma tersebut secara berkelanjutan dikomunikasikan kepada seluruh jajaran karyawan dalam organisasi Bank untuk dapat dijadikan sebagai landasan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Bank.

Organ utama Bank dalam pelaksanaannya dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari komite di tingkat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Satuan Kerja Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan, Manajemen Risiko dan Internal Audit.

Berikut adalah komite-komite di tingkat Dewan Komisaris BMI yang bertugas untuk membantu dan meningkatkan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, yaitu:

- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Komite Remunerasi dan Nominasi
- Komite Tata Kelola Perusahaan

Adapun komite tingkat Direksi adalah sebagai berikut:

- Komite Aset dan Liabilitas
- Komite Pengarah Teknologi Informasi
- Komite Manajemen Risiko
- Komite Kebijakan Pembiayaan
- Komite Pembiayaan

CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM

The governance mechanism at Bank Muamalat is based on operational policies and procedures related to GCG (*soft structure*). These policies and procedures are implemented in the Bank's daily business activities, and their effectiveness is periodically reviewed. These norms are continuously communicated to all levels of employees within the Bank's organization to serve as a basis for implementing GCG principles within the Bank.

The Bank's main organs are assisted in their implementation by supporting organs consisting of committees at the level of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Compliance Work Unit, Corporate Secretary, Risk Management, and Internal Audit.

The following are committees at the level of the BMI Board of Commissioners whose task is to assist and improve the supervisory duties and functions of the Board of Commissioners, namely:

- Audit Committee
- Risk Monitoring Committee
- Remuneration and Nomination Committee
- Corporate Governance Committee

The Board of Directors level committees are as follows:

- Assets and Liabilities Committee
- Information Technology Steering Committee
- Risk Management Committee
- Financing Policy Committee
- Financing Committee



Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur organisasi GCG Bank Muamalat Indonesia. Hak dan kewenangan RUPS tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris serta Direksi Bank, namun batasannya diatur oleh undang-undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.

RUPS juga berfungsi sebagai salah satu media komunikasi antara para Pemegang Saham dengan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi melalui forum tanya jawab. Forum tersebut memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pemegang saham yang hadir pada setiap mata acara RUPS. RUPS selanjutnya juga berfungsi sebagai forum bagi para pemegang saham untuk mengevaluasi kinerja Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris Bank. Penyelenggaraan RUPS Bank Muamalat berdasarkan pada beberapa ketentuan, di antaranya:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2024 Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
6. Anggaran Dasar Bank.
7. Prosedur Internal terkait Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in the GCG organizational structure of Bank Muamalat Indonesia. The rights and authority of the GMS are not owned by the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors, but the limitations are regulated by the law regarding limited liability companies and/or the articles of association.

The GMS also functions as a communication medium between Shareholders and the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, and Board of Directors through a question-and-answer forum. The forum provides equal opportunities to all shareholders who attend each GMS agenda. The next GMS also functions as a forum for shareholders to evaluate the performance of the Board of Directors, Sharia Supervisory Board, and Board of Commissioners of the Bank. The implementation of the Bank Muamalat GMS is based on several provisions, including:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which was amended by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.
2. OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies.
3. OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies.
4. OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.
5. OJK Regulation No. 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units
6. Bank Articles of Association.
7. Internal procedures related to the implementation of the General Meeting of Shareholders.
8. Other related laws and regulations.

JENIS RUPS

Sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, terdapat 2 (dua) jenis RUPS yang mencakup:

1. RUPS Tahunan

RUPS Tahunan ialah RUPS yang diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku atau batas waktu yang ditentukan oleh OJK. Agenda utama RUPS Tahunan terdiri dari pengajuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan dari Direksi untuk disahkan dan disetujui oleh Pemegang Saham. Agenda lainnya ialah penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku berikutnya, pengesahan penggunaan laba, transaksi material, pengangkatan atau pemberhentian anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris serta hal-hal lain yang diperlukan.

2. RUPS Luar Biasa atau RUPS Lainnya

RUPS Luar Biasa atau RUPS Lainnya ialah RUPS yang pelaksanaannya tidak terbatas oleh ketentuan waktu, dapat diselenggarakan kapan saja sesuai keperluan perusahaan oleh Dewan Komisaris atau Direksi, atas permintaan dari Pemegang Saham.

WEWENANG RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham memiliki wewenang tertinggi dalam Tata Kelola Perusahaan yang tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris maupun Direksi, yang batasannya ditentukan dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Anggaran Dasar Bank dan peraturan terkait lainnya. Wewenang RUPS yaitu:

1. Melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Melakukan pengesahan perubahan Anggaran Dasar;
3. Melakukan pengesahan transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha;
4. Memberikan persetujuan atas Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan;
5. Memutuskan alokasi penggunaan laba;
6. Menunjuk dan menetapkan biaya jasa akuntan publik;
7. Memutuskan jumlah dan jenis kompensasi serta fasilitas pengurus;

TYPE OF GMS

In accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 of 2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies, there are 2 (two) types of GMS, which include:

1. Annual GMS

Annual GMS is a GMS held no later than 6 (six) months after the end of the financial year or the time limit determined by the OJK. The main agenda of the Annual GMS consists of submitting the Financial Statement and Annual Report from the Board of Directors to be ratified and approved by Shareholders. Other agendas include the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm for the next financial year, ratification of the use of profits, material transactions, appointment or dismissal of members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners, and other necessary matters.

2. Extraordinary GMS or Other GMS

Extraordinary GMS or Other GMS is a GMS whose implementation is not limited by time requirements and can be held at any time according to the company's needs by the Board of Commissioners or the Board of Directors, at the request of the Shareholders.

GMS AUTHORITY

The General Meeting of Shareholders has the highest authority in Corporate Governance, which is not owned by the Board of Commissioners or the Board of Directors, the limits of which are determined in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies, Financial Services Authority Regulation No. 3/POJK.04/2021 concerning Organizing Activities in the Capital Market Sector, Bank Articles of Association, and other related regulations. The authority of the GMS is:

1. Evaluate the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
2. Ratify changes to the Articles of Association;
3. Validate material transactions and/or changes in business activities;
4. Give approval to the Board of Directors' Report, the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report and the Company's Financial Statement;
5. Decide on the allocation of profit use;
6. Appoint and determine the fees for public accounting services;
7. Decide on the amount and type of compensation as well as management facilities;



8. Memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya masing-masing; 9. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menentukan dan membayar dividen final; 10. Mengambil keputusan-keputusan menyangkut struktur organisasi misalnya perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi Perseroan; 11. Mengangkat dan/atau mengubah susunan anggota Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Dewan Komisaris; 12. Menetapkan remunerasi yakni penetapan gaji, tunjangan lain serta honorarium Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Dewan Komisaris Perseroan; 13. Memberi persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan; 14. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit; 15. Menetapkan Pihak yang menjadi Pengendali dari Perusahaan Terbuka.	8. Approving the Annual Report, including the Company's Financial Statement and the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners, as well as granting repayment and discharge of responsibility (<i>acquit et decharge</i>) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision actions that each of them has carried out; 9. Give power and authority to the Board of Directors to determine and pay final dividends; 10. Make decisions regarding the organizational structure, for example changes to the Articles of Association, merger, consolidation, separation, dissolution and liquidation of the Company; 11. Appoint and/or change the composition of members of the Sharia Supervisory Board, Board of Directors and Board of Commissioners; 12. Determine remuneration, namely determining salaries, other allowances, and honorarium for the Sharia Supervisory Board, Board of Directors and Board of Commissioners of the Company; 13. Approving transactions that contain conflicts of interest; 14. Grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm (KAP) by considering recommendations from the Audit Committee; 15. Determine the party who controls the public company.

HAK PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank dan peraturan terkait, pemegang saham memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Pemegang saham dapat melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS. Permintaan tersebut dapat dilakukan atas permintaan: 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.
2. Menghadiri dan memberikan hak suara di RUPS berdasarkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan tata tertib RUPS.
3. Pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Bank.
4. Menerima dividen saham dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan keputusan RUPS.
5. Menerima informasi mengenai tata tertib RUPS dan prosedur *voting* di dalam RUPS.
6. Hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

SHAREHOLDER RIGHTS

Based on the Bank's Articles of Association and related regulations, shareholders have the following rights:

1. Shareholders can request to hold a GMS. This request can be made at the request of 1 (one) or more shareholders who together represent 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with voting rights, unless the articles of association determine a smaller amount.
2. Attend and cast voting rights at the GMS based on the applicable terms and conditions and GMS rules and regulations.
3. Shareholders have the right to obtain information on the meeting agenda and materials related to the meeting agenda as long as it does not conflict with the interests of the Bank.
4. Receive share dividends with terms and conditions in accordance with the GMS resolution.
5. Receive information regarding the GMS rules and voting procedures at the GMS.
6. Other rights in accordance with relevant laws and regulations.

PELAKSANAAN RUPS TAHUN BUKU 2024

Sepanjang tahun 2024, Bank Muamalat Indonesia telah melaksanakan 2 (dua) kali RUPS, yang mencakup: 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa.

RUPS Tahunan

RUPS Tahunan (RUPST) diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2024.

DAFTAR PESERTA RUPS TAHUNAN

List of AGM Participants

No.	Nama Name	Jabatan	Position
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board			
1.	Sholahudin Al Aiyub	Ketua	Chairman
2.	Siti Haniatunnisa	Anggota	Member
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
1.	Andre Mirza Hartawan	Komisaris	Commissioner
Direksi Board of Directors			
1.	Indra Falatehan	Direktur Utama	President Director
2.	Karno	Direktur Kepatuhan, Risiko, dan Hukum	Compliance, Risk, and Legal Director
3.	Hery Syafril	Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan	Financing Business Risk Director
4.	Suhendar	Direktur Keuangan dan Strategi	Finance and Strategy Director

Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan atau Pendapat pada Rapat

Dalam tiap-tiap Mata Acara RUPS Tahunan telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat/usulan terkait mata acara Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan selalu dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka yang melibatkan pihak independen yang dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

Keterlibatan Pihak Independen dalam Penghitungan Suara

Mekanisme pengambilan keputusan dalam setiap agenda RUPS Tahunan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Sehingga tidak terdapat pengambilan keputusan dalam agenda RUPS yang dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka yang melibatkan pihak independen.

IMPLEMENTATION OF THE 2024 FINANCIAL YEAR GMS

Throughout 2024, Bank Muamalat Indonesia has held 2 (two) GMS, including 1 (one) Annual GMS and 1 (one) Extraordinary GMS.

Annual GMS

The Annual General Meeting of Shareholders (AGM) was held on June 27, 2024.

Opportunity to Ask Questions and/or Opinions at the Meeting

In each Annual GMS agenda, the opportunity is given to shareholders and/or shareholder proxies to ask questions and/or provide opinions/suggestions regarding the Meeting agenda.

Meeting Decision-Making Mechanism

Decision-making at the Annual GMS is always carried out through a deliberation mechanism to reach consensus. However, if deliberation to reach consensus cannot be reached, then decision-making at the meeting is carried out by means of open voting involving independent parties carried out by PT Datindo Entrycom as the Company's Securities Administration Bureau.

Involvement of Independent Parties in Vote Counting

The decision-making mechanism in each Annual GMS agenda is carried out by deliberation to reach consensus. Therefore, there is no decision-making on the GMS agenda, which is carried out by means of open voting involving independent parties.



TAHAPAN PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN

Stages of Implementation of the Annual GMS

Pemberitahuan Notification	Pengumuman Announcement	Pemanggilan Summon	Pelaksanaan Implementation	Hasil dan Keputusan Result and Resolution
Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat beserta Mata Acara Rapat kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK melalui surat nomor 123/B/PRD-SRT/V/2024 dan kepada Kepala Departemen Pengawasan Perbankan Syariah OJK tertanggal 23 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Bank Muamalat Indonesia ("Perseroan").	Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat, telah dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu surat kabar "Harian Ekonomi Neraca" dan melalui <i>Website</i> Perseroan pada tanggal 20 Mei 2024 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.	Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan pada tanggal 4 Juni 2024 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu surat kabar "Harian Ekonomi Neraca" dan melalui <i>Website</i> Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.	Bank melaksanakan RUPS Tahunan (RUPST) pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 10.15 WIB s.d. 12.15 WIB bertempat di Ballroom BJ Habibie-Muamalat Tower Lantai 2, Jalan Prof. DR. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia.	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan telah diumumkan pada tanggal 1 Juli 2024 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional yaitu surat kabar "Harian Ekonomi Neraca" dan melalui <i>Website</i> Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
The Company has submitted notification of the plan to hold the Meeting along with the Meeting Agenda to the Chief Executive of Supervision of Capital Markets, Derivative Finance, and the OJK Carbon Exchange via letter number 123/B/PRD-SRT/V/2024 and to the Head of the OJK Sharia Banking Supervision Department dated May 23, 2024, regarding Notification of the Plan to Hold the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of PT Bank Muamalat Indonesia ("Company").	The announcement to shareholders regarding the invitation to the Meeting has been made through 1 (one) Indonesian-language daily newspaper with national circulation, namely the newspaper "Harian Ekonomi Neraca," and through the Company's Website on May 20, 2024, in Indonesian and English.	Summons to shareholders regarding the holding of the Meeting were made on June 4, 2024, through 1 (one) daily Indonesian-language newspaper with national circulation, namely the newspaper "Harian Ekonomi Neraca," and through the Company's Website in Indonesian and English.	The Bank held an Annual GMS (AGMS) on June 27, 2024, from 10:15 WIB to 12:15 WIB at the BJ Habibie Ballroom-Muamalat Tower Floor 2, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia.	A summary of the Minutes of the Annual GMS was announced on July 1, 2024, through 1 (one) Indonesian-language daily newspaper with national circulation, namely the newspaper "Harian ekonomi Neraca," and through the Company's Website in Indonesian and English.

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan

Seluruh Keputusan rapat telah disahkan dalam RUPS Tahunan tanggal 27 Juni 2024.

Resolution and Realization of the Annual GMS

All resolutions of the meeting have been ratified at the Annual GMS on June 27, 2024.

No.	Agenda	Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan & Pendapat/Usulan Number of Shareholders Who Asked Questions & Opinions/Suggestions	Pengambilan Keputusan Decision-Making	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
1.	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2023 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.	Terdapat 2 (dua) usulan dan 1 (satu) tanggapan dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham.	Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat.	- Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (DBSD&A), afiliasi BKR International, sesuai laporan Nomor 00007/2.0936/AU.4/07/0396-3/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan Opini Wajar dalam Semua Hal yang Material, posisi keuangan PT Bank Muamalat Tbk tanggal 31 Desember 2023, dan kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat serta sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. - Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et decharge</i>) kepada Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	Sudah direalisasikan pada tahun 2024 dan Bank Muamalat telah menyampaikan Laporan Tahunan tahun buku 2023 melalui surat No. 075/S/CAR-SRT/IV/2024 dan No. 076/S/CAR-SRT/IV/2024 tanggal 30 April 2024 kepada pihak-pihak terkait dan kepada lembaga-lembaga terkait serta dipublikasikan di <i>website</i> Bank sesuai ketentuan.



No.	Agenda	Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan & Pendapat/Usulan Number of Shareholders Who Asked Questions & Opinions/Suggestions	Pengambilan Keputusan Decision-Making	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
	Approval of the Company's Annual Report for Financial Year 2023, including the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board for Financial Year 2023, as well as ratification of the Company's Financial Statement for Financial Year 2023.	There were 2 (two) proposals and 1 (one) response from shareholders and/or shareholder proxies.	Decision making is carried out by deliberation to reach unanimous consensus.	1. Approve and accept the Company's Annual Report including the Supervisory Task Report, which has been carried out by the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board for the Financial Year ending December 31, 2023, and ratify the Consolidated Financial Statement for the Financial Year ending December 31, 2023, which has been audited by the Public Accounting Firm Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (DBSD&A), an affiliate of BKR International, according to report No. 00007/2.0936/AU.4/07/0396-3/1/III/2024 dated March 26, 2024, with a Fair Opinion in All Material Matters, the financial position of PT Bank Muamalat Tbk as of December 31, 2023, and its financial performance, cash flow, reconciliation of income and profit sharing, sources and distribution of zakat funds as well as sources and uses of benevolent funds for the year ended on that date, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia. 2. Provide full release and discharge of responsibility (vollediq acquit et decharge) to the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, and Board of Directors of the Company for supervisory and management actions that have been carried out during the financial year ending December 31, 2023, as long as these actions do not constitute criminal acts and these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statement for the financial year ending December 31, 2023.	It has been realized in 2024, and Bank Muamalat has submitted its Annual Report for the 2023 financial year via letter No. 075/S/ CAR-SRT/IV/2024 and No. 076/S/CAR-SRT/IV/2024 dated April 30, 2024, to related parties and related institutions and published on the Bank's website in accordance with provisions.
2.	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.	Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat/usulan.	Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat.	Menyetujui laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 setelah Pajak sebesar Rp13.294.252.000,00 (tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), seluruhnya dipergunakan untuk cadangan Perseroan, sehingga tidak diadakan pembagian dividen atas laba bersih Perseroan tahun buku 2023.	Sudah direalisasikan pada tahun 2023 dan Laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 tidak dibagikan dan dipergunakan seluruhnya untuk cadangan Perseroan.
	Approval of the Use of the Company's Net Profit for the 2023 Financial Year.	There were no shareholders and/or shareholder proxies who submit questions and/or opinions/suggestions.	Decision making is carried out by deliberation to reach unanimous consensus.	Approved the Company's net profit for the 2023 financial year after Tax amounting to Rp 13,294,252,000.00 (thirteen billion two hundred ninety-four million two hundred and fifty-two thousand rupiah), all of which were used for the Company's reserves, so that there will be no dividend distribution on the Company's net profit for the 2023 financial year.	It has been realized in 2023, and the Company's net profit for the 2023 Financial Year was not distributed and was used entirely for the Company's reserves.

No.	Agenda	Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan & Pendapat/Usulan Number of Shareholders Who Asked Questions & Opinions/Suggestions	Pengambilan Keputusan Decision-Making	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
3.	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statement for the 2024 Financial Year and other audits required by the Company.	Terdapat 1 (satu) usulan dan 2 (dua) tanggapan dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang. There were 1 (one) proposal and 2 (two) responses from shareholders and/or their proxies.	Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat. Decision making is carried out by deliberation to reach unanimous consensus.	Menyetujui Penunjukan langsung Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (DBSD&A) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Tahun Buku 2024. Approved the direct appointment of the Public Accounting Firm Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (DBSD&A) as the Public Accounting Firm that will audit the financial statements of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk for the 2024 financial year.	Sudah direalisasikan pada tahun 2024 dan KAP serta Akuntan Publik yang ditunjuk bekerja berdasarkan perjanjian kerjasama No.: 047-3.2-1024/EL/DBSDA Tanggal 16 November 2024. Hasil audit akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2025. It has been realized in 2024, and the appointed KAP and Public Accountant worked based on cooperation agreement No.: 047-3.2-1024/EL/DBSDA dated November 16, 2024. The audit results will be submitted to the Financial Services Authority no later than March 31, 2025.
4.	Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2024. Determination of salaries or honorarium and allowances for members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board of the Company for the 2024 financial year.	Terdapat 2 (dua) tanggapan dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham. There were 2 (two) responses from shareholders and/or shareholder proxies.	Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat. Decision making is carried out by deliberation to reach unanimous consensus.	1. Menyetujui penetapan Gaji, Uang Jasa dan Tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2024 tidak mengalami perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan untuk tahun 2023. 2. Menyetujui penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun 2024 tidak mengalami perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan untuk tahun 2024. 1. Approve the determination of salaries, service fees, and other allowances for the Board of Commissioners and members of the Board of Directors for 2024 without changes as determined for 2023. 2. Approve the determination of the Honorarium and/or Allowances for members of the Company's Sharia Supervisory Board for 2024 without changes as determined for 2024.	Sudah direalisasikan pada tahun 2024, di mana sesuai dengan amanat RUPS, tidak terdapat perubahan Gaji, Uang Jasa dan Tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Honorarium dan Tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun 2024. It has been realized in 2024, where, in accordance with the mandate of the GMS, there were no changes to salaries, service fees, and other allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as honorarium and allowances for members of the Sharia Supervisory Board for 2024.



No.	Agenda	Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan & Pendapat/Usulan Number of Shareholders Who Asked Questions & Opinions/Suggestions	Pengambilan Keputusan Decision-Making	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
5.	Perubahan susunan pengurus Perseroan.	Terdapat 4 (empat) tanggapan dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham.	Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat.	1. Menyetujui pengakhiran Masa Tugas Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan Periode 2019-2024 disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa mereka selama ini untuk kemajuan Perseroan. Dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan, serta diangkatnya anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi Periode 2024-2029, Rapat menyetujui pemberian asuransi purna jabatan kepada anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi yang berakhir masa jabatannya, serta mengalokasikannya untuk anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi yang diangkat dalam Rapat, yang besarnya didelagasikan kepada Dewan Komisaris, setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham Pengendali dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Nomor: 023/S/COM-SRT/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 perihal Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dalam RUPS Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 27 Juni 2024, maka susunan Pengurus Perseroan Periode 2024-2029 sebagai berikut: Dewan Pengawas Syariah Ketua: Sholahudin Al Aiyub Anggota: Siti Haniatunnisa Anggota: Agung Danarto Dewan Komisaris Komisaris Utama/Independen: Amin Said Husni Komisaris Independen: Sartono Komisaris: Andre Mirza Hartawan Direksi Direktur Utama: Hery Syafril Direktur Kepatuhan: Karno Direktur: Riksa Prakoso	Keputusan berkenaan dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan periode 2024-2029 telah dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Nomor 23 Tanggal 11 Juli 2024, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.09-0228236 tertanggal 18 Juli 2024. Akta tersebut dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

No.	Agenda	Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan & Pendapat/Usulan Number of Shareholders Who Asked Questions & Opinions/Suggestions	Pengambilan Keputusan Decision-Making	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
				RUPS menyetujui pengangkatan calon Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi Periode 2024 hingga 2029 tersebut di atas, yang berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS sampai dengan RUPS Tahunan kelima sejak pengangkatan masing-masing, yang akan dilaksanakan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Bagi calon anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan yang belum memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Assessment</i>), maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari RUPS. Sehubungan dengan persetujuan pengangkatan tersebut di atas, RUPS juga memutuskan untuk menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi tersebut dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	



No.	Agenda	Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan & Pendapat/Usulan Number of Shareholders Who Asked Questions & Opinions/Suggestions	Pengambilan Keputusan Decision-Making	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
	Changes in the composition of the Company's management.	There were 4 (four) responses from shareholders and/or shareholder proxies.	Decision making is carried out by deliberation to reach unanimous consensus.	1. Approved the termination of the term of office of the Company's Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, and Board of Directors for the 2019-2024 period, accompanied by gratitude and appreciation for their services so far for the progress of the Company. With the end of the term of office of members of the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, as well as the appointment of members of the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners and Board of Directors for the 2024-2029 period, the Meeting approved the provision of retirement insurance to members of the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners and Board of Directors whose terms of office expire, as well as allocating it to members of the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners and Board of Directors appointed at the Meeting, the amount of which is delegated to the Board of Commissioners, after consulting with the Controlling Shareholders and considering recommendations from the Committee Remuneration and Nomination as well as the provisions of applicable laws and regulations. 2. Considering the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee No. 023/S/COM-SRT/VI/2024 dated June 26, 2024 regarding Changes in the Composition of the Company's Management at the Annual GMS of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated June 27, 2024, the composition of the Company's Management for the 2024-2029 Period, is as follows: Sharia Supervisory Board Chairman: Sholahudin Al Aiyub Member: Siti Haniatunnisa Member: Agung Danarto Board of Commissioners Independent President Commissioner: Amin Said Husni Independent Commissioner: Sartono Commissioner: Andre Mirza Hartawan Board of Directors President Director: Hery Syafril Compliance Director: Karno Director: Riksa Prakoso	The decision regarding the appointment of members of the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, and Board of Directors of the Company for the period 2024-2029 has been stated in the Deed of Statement of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 23 dated July 11, 2024, in which the Receipt of Notification of Changes to Company Data has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with letter No. AHU-AH.01.09-0228236 dated July 18, 2024. The deed was made in the presence of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.

No.	Agenda	Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan & Pendapat/Usulan Number of Shareholders Who Asked Questions & Opinions/Suggestions	Pengambilan Keputusan Decision-Making	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
				The GMS approved the appointment of candidates for the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, and Board of Directors for the 2024 to 2029 period mentioned above, which will be effective from the closing of the GMS until the fifth Annual GMS since their respective appointments, which will be held in 2029, without prejudice to the GMS's right to dismiss them at any time before their term of office in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association. For prospective members of the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, and Board of Directors of the Company who have not received a determination of passing the Fit and Proper Assessment from the OJK, their appointment will become effective after obtaining a determination of passing the Fit and Proper Test from the OJK. In the event that the person concerned is declared not to have passed the Fit and Proper Assessment, then the appointment in question will be cancelled, without the need for a resolution from the GMS. In connection with the approval of the appointment above, the GMS also decided to approve the granting of power to the Board of Directors with the right of substitution, to restate the decision regarding changes to the composition of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners and the Board of Directors in a Notarial deed and to notify the competent authorities and in connection with this matter to do everything necessary in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.	

Alasan Belum Terealisasinya Keputusan

Seluruh hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 27 Juni 2024 telah direalisasikan pada tahun 2024.

Reasons for the Unrealized Resolutions

All results of the Annual GMS resolutions on June 27, 2024 have been realized in 2024.



RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa (RUPSLB) diselenggarakan pada tanggal 11 Desember 2024.

Extraordinary GMS

The Extraordinary GMS (EGMS) was held on December 11, 2024.

DAFTAR PESERTA RUPS LUAR BIASA

List of the Extraordinary GMS Participants

No.	Nama Name	Jabatan	Position
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board			
1.	Sholahudin Al Aiyub	Ketua	Chairman
2.	Siti Haniatunnisa	Anggota	Member
3.	Agung Danarto	Anggota	Member
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
1.	Sartono	Komisaris Independen	Independent Commissioner
2.	Andre Mirza Hartawan	Komisaris	Commissioner
Direksi Board of Directors			
1.	Karno	Direktur Kepatuhan, Risiko, dan Hukum	Compliance, Risk, and Legal Director

Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan atau Pendapat pada Rapat

Dalam tiap-tiap Mata Acara RUPS Luar Biasa telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat/usulan terkait mata acara Rapat.

Opportunity to Ask Questions and/or Opinions at the Meeting

In each Extraordinary GMS Agenda, an opportunity has been given to shareholders and/or shareholder proxies to ask questions and/or provide opinions/suggestions regarding the Meeting agenda.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam setiap agenda RUPS Luar Biasa dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Sehingga tidak terdapat pengambilan keputusan dalam agenda RUPS yang dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka yang melibatkan pihak independen.

Meeting Decision-Making Mechanism

The decision-making mechanism in each Extraordinary GMS agenda is carried out by deliberation to reach consensus. Therefore, there is no decision-making on the GMS agenda, which is carried out by means of open voting involving independent parties.

Keterlibatan Pihak Independen dalam Penghitungan Suara

Mekanisme pengambilan keputusan dalam setiap agenda RUPS Luar Biasa dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Sehingga tidak terdapat pengambilan keputusan dalam agenda RUPS yang dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka yang melibatkan pihak independen.

Involvement of Independent Parties in Vote Counting

The decision-making mechanism in each Extraordinary GMS agenda is carried out by deliberation to reach consensus. Therefore, there is no decision-making on the GMS agenda, which is carried out by means of open voting involving independent parties.

TAHAPAN PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA

Stages of Implementation of the Extraordinary GMS

Pemberitahuan Notification	Pengumuman Announcement	Pemanggilan Summon	Pelaksanaan Implementation	Hasil dan Keputusan Result and Resolution
1. Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat beserta Mata Acara Rapat kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK dan kepada Kepala Departemen Pengawasan Perbankan Syariah OJK melalui surat nomor 352/B/PRD-SRT/X/2024 tertanggal 18 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Bank Muamalat Indonesia ("Perseroan"). 2. Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan perubahan tanggal dan Mata Acara Rapat kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK dan kepada Kepala Departemen Pengawasan Perbankan Syariah OJK melalui surat nomor 366/S/PRD-SRT/XI/2024 tertanggal 1 November 2024 perihal Pemberitahuan Perubahan Tanggal dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Bank Muamalat Indonesia ("Perseroan").	1. Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat, telah dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu surat kabar "Harian Ekonomi Neraca" dan melalui Website Perseroan pada tanggal 28 Oktober 2024 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 2. Ralat Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat, telah dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu surat kabar "Harian Ekonomi Neraca" dan melalui Website Perseroan pada tanggal 4 November 2024 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.	Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan pada tanggal 19 November 2024 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu surat kabar "Harian Ekonomi Neraca" dan melalui Website Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.	Bank melaksanakan RUPS Luar Biasa (RUPST) pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 10.10 WIB sd 10.57 WIB bertempat di Ballroom BJ Habibie – Muamalat Tower Lantai 2, Jalan Prof. DR. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia.	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan telah diumumkan pada tanggal 13 Desember 2024 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional yaitu surat kabar "Harian Ekonomi Neraca" dan melalui Website Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.



Pemberitahuan Notification	Pengumuman Announcement	Pemanggilan Summon	Pelaksanaan Implementation	Hasil dan Keputusan Result and Resolution
- The Company has submitted notification of the plan to hold the Meeting along with the Meeting Agenda to the Chief Executive of Supervision of the Capital Market, Derivative Finance, and Carbon Exchange of the OJK and to the Head of the OJK Sharia Banking Supervision Department via letter number 352/B/PRD-SRT/X/2024 dated October 18, 2024, regarding Notification of the Plan to Hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Bank Muamalat Indonesia ("the Company"). - The Company has submitted notification of changes to the date and agenda of the Meeting to the Chief Executive of Supervision of the Capital Market, Derivative Finance, and Carbon Exchange of the OJK, and to the Head of the OJK Sharia Banking Supervision Department via letter number 366/S/PRD-SRT/XI/2024 dated November 1, 2024, regarding Notification of Changes to the Date and Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Bank Muamalat Indonesia ("Company").	- Announcement to shareholders regarding the invitation to the Meeting has been made through 1 (one) Indonesian-language daily newspaper with national circulation, namely the newspaper "Harian Ekonomi Neraca," and through the Company's Website on October 28, 2024, in Indonesian and English. - Rectification of the announcement to shareholders regarding the invitation to the Meeting has been made through 1 (one) daily Indonesian-language newspaper with national circulation, namely the newspaper "Harian Ekonomi Neraca," and through the Company's Website on November 4, 2024, in Indonesian and English.	Summons to shareholders regarding the holding of the Meeting were made on November 19, 2024, through 1 (one) Indonesian-language daily newspaper with national circulation, namely the newspaper "Harian Ekonomi Neraca," and through the Company's Website in Indonesian and English.	The Bank held an Extraordinary GMS (AGMS) on December 11, 2024, from 10:10 WIB to 10:57 WIB at the BJ Habibie Ballroom – Muamalat Tower Floor 2, Jalan Prof. DR. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia.	A summary of the Minutes of the Annual GMS was announced on December 13, 2024, through 1 (one) daily Indonesian-language newspaper with national circulation, namely the newspaper "Harian Ekonomi Neraca," and through the Company's Website in Indonesian and English.

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa

Seluruh Keputusan rapat telah disahkan dalam RUPS Luar Biasa tanggal 11 Desember 2024.

Resolutions and Realization of Extraordinary GMS

All resolutions of the meeting have been ratified at the Extraordinary GMS on December 11, 2024.

No.	Agenda	Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan & Pendapat/Usulan Number of Shareholders Who Asked Questions & Opinions/Suggestions	Pengambilan Keputusan Decision-Making	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
1.	Perubahan Susunan Pengurus.	Terdapat 1 (satu) tanggapan dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham.	Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat.	1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat yaitu: - Bapak Amin Said Husni sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen; - Bapak Hery Syafril sebagai Direktur Utama; dan - Bapak Riksa Prakoso sebagai Direktur. Terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa mereka selama ini untuk kemajuan Perseroan. 2. Menyetujui pengangkatan: - Bapak Sapto Amal Damandari sebagai Komisaris Utama Independen; - Bapak Imam Teguh Saptono sebagai Direktur Utama; dan - Bapak Kukuh Rahardjo sebagai Direktur. Dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2029, dengan ketentuan bahwa bagi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang belum memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, pengangkatan akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK. 3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan anggota Dewan Komisaris tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	Keputusan berkenaan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan telah dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Nomor 23 Tanggal 18 Desember 2024, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.09-0291015 tanggal 20 Desember 2024. Akta tersebut dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.



No.	Agenda	Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan & Pendapat/Usulan Number of Shareholders Who Asked Questions & Opinions/Suggestions	Pengambilan Keputusan Decision-Making	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
				Maka susunan selengkapnya anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut: Dewan Pengawas Syariah Ketua: Sholahudin Al Aiyub Anggota: Siti Haniatunnisa Anggota: Agung Danarto Dewan Komisaris Komisaris Utama Independen: Sapto Amal Damandari*) Komisaris Independen: Sartono Komisaris: Andre Mirza Hartawan Direksi Direktur Utama: Imam Teguh Saptono*) Direktur Kepatuhan: Karno Direktur: Kukuh Rahardjo*) *) Bagi calon anggota Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan yang belum memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari RUPS. Apabila Direktur Utama belum memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, maka Bapak Karno selaku Direktur Kepatuhan yang telah mendapat penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK akan menjadi Pelaksana Tugas Direktur Utama.	

No.	Agenda	Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan & Pendapat/Usulan Number of Shareholders Who Asked Questions & Opinions/Suggestions	Pengambilan Keputusan Decision-Making	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
	Changes in Management Composition.	There was 1 (one) response from the shareholder and/or shareholder's proxy.	Decision making is carried out by deliberation to reach unanimous consensus.	- Agree to honorably discharge, namely: - Mr. Amin Said Husni as President Commissioner and Independent Commissioner; - Mr. Hery Syafril as President Director; and - Mr. Riksa Prakoso as Director. starting from the closing of the Meeting accompanied by gratitude and appreciation for their services so far for the progress of the Company. - Approve the appointment: - Mr. Sapto Amal Damandari as Independent President Commissioner; - Mr. Imam Teguh Saptono as President Director; and - Mr. Kukuh Rahardjo as Director; without prejudice to the GMS's right to dismiss them at any time before their term of office in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, starting from the closing of the GMS until the closing of the Company's 2029 Annual GMS, provided that prospective members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors who have not yet received a determination have passed the Fit and Proper Test from the OJK. The appointment will be effective after obtaining a determination of passing the Fit and Proper Test from the OJK. - Approved the granting of authority to the Board of Directors with the right of substitution to restate the decision regarding the change of members of the Board of Commissioners into a Notarial deed and notify the competent authorities and, in connection with this matter, do everything necessary in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.	The decision regarding changes to the composition of the Company's management has been stated in the Deed of Statement of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 23 dated December 18, 2024, in which the Receipt of Notification of Changes to Company Data has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with letter No. AHU-AH.01.09-0291015 dated December 20, 2024. The deed was made in the presence of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.



No.	Agenda	Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan & Pendapat/Usulan Number of Shareholders Who Asked Questions & Opinions/Suggestions	Pengambilan Keputusan Decision-Making	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
				Therefore, the complete composition of members of the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, and Board of Directors of the Company will be as follows: Sharia Supervisory Board Chairman: Sholahudin Al Aiyub Member: Siti Haniatunnisa Member: Agung Danarto Board of Commissioners Independent President Commissioner: Sapto Amal Damandari*) Independent Commissioner: Sartono Commissioner: Andre Mirza Hartawan Board of Directors President Director: Imam Teguh Saptono*) Compliance Director: Karno Director: Kukuh Rahardjo*) *) For prospective members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who have not yet received a determination of passing the Fit and Proper Assessment from the OJK, their appointment will become effective after obtaining a determination of passing the Fit and Proper Test from the OJK. In the event that the person concerned is declared not to have passed the Fit and Proper Test, then the appointment in question will be cancelled, without the need for a resolution from the GMS. If the President Director has not received the determination of passing the Fit and Proper Test from the OJK, then Mr. Karno, as the Compliance Director who has received the determination of passing the Fit and Proper Test from the OJK, will become the Acting President Director.	
2.	Pengesahan Asuransi Purna Jabatan untuk Pengurus Lama dan Pengurus Baru.	Terdapat 1 (satu) tanggapan dan pertanyaan dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham.	Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat.	Menyetujui pemberian Asuransi Purna Jabatan kepada Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi yang diangkat dalam RUPS maupun Rapat berikutnya selama periode 2024 hingga 2029, sesuai dengan pengalokasian yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 27 Juni 2024.	Pemberian Asuransi Purna Jabatan kepada Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi yang diangkat dalam RUPS Luar Biasa tanggal 11 Desember 2024 telah direalisasikan sesuai dengan pengalokasian yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 27 Juni 2024.

No.	Agenda	Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan & Pendapat/Usulan Number of Shareholders Who Asked Questions & Opinions/Suggestions	Pengambilan Keputusan Decision-Making	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
	Approval of Retirement Insurance for Old Management and New Management.	There was 1 (one) response and question from a shareholder and/or shareholder's proxy.	Decision making is carried out by deliberation to reach unanimous consensus.	Approved the provision of Retirement Insurance to the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, and Board of Directors appointed at the GMS and subsequent meetings during the period 2024 to 2029, in accordance with the allocation determined in the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders on June 27, 2024.	The provision of retirement insurance to the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, and Board of Directors appointed at the Extraordinary GMS on December 11, 2024, has been realized in accordance with the allocation determined in the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders on June 27, 2024.
3.	Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan.	Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat/usulan.	Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat.	Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan Tahun 2024.	Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan Tahun 2024 yang telah disahkan oleh RUPS telah disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Approval of the Company's Recovery Action Plan.	There were no shareholders and/or shareholder proxies who submit questions and/or opinions/suggestions.	Decision making is carried out by deliberation to reach unanimous consensus.	Approved the Company's 2024 Recovery Action Plan.	The Company's Recovery Action Plan for 2024, which has been approved by the GMS, has been submitted by the Company to the Financial Services Authority.



No.	Agenda	Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan & Pendapat/Usulan Number of Shareholders Who Asked Questions & Opinions/Suggestions	Pengambilan Keputusan Decision-Making	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
4.	Perubahan Anggaran Dasar.	Terdapat 1 (satu) tanggapan dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham.	Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat.	1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris dan menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Nomor 24 tanggal 18 Desember 2024 yang telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0086493.AH.01.02. TAHUN 2024 tanggal 31 Desember 2024 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0231070 tanggal 31 Desember 2024. Akta tersebut dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

No.	Agenda	Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan & Pendapat/Usulan Number of Shareholders Who Asked Questions & Opinions/Suggestions	Pengambilan Keputusan Decision-Making	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
	Changes to the Articles of Association.	There was 1 (one) response from the shareholder and/or shareholder's proxy.	Decision making is carried out by deliberation to reach unanimous consensus.	1. Approve changes to the Company's Articles of Association. 2. Approved the granting of authority to the Company's Board of Directors with the right of substitution to restate decisions regarding changes and re-drafting of all provisions of the Company's Articles of Association into a Notarial deed and to submit notification of the changes to the Articles of Association to the authorized parties and, in connection with this matter, to do everything necessary in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.	Changes to the Company's Articles of Association have been included in the Deed of Statement of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 24 dated December 18, 2024, which has received approval from the Minister of Law of the Republic of Indonesia No. AHU-0086493.AH.01.02. TAHUN 2024 dated December 31, 2024, and Receipt of Notification of Changes to the Articles of Association has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0231070 dated December 31, 2024. The deed was made in the presence of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta

Alasan Belum Terealisasinya Keputusan

Seluruh hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 11 Desember 2024 telah direalisasikan pada tahun 2024.

Reasons for the Unrealized Resolutions

All results of the Extraordinary GMS decisions on December 11, 2024, have been realized in 2024.



KEPUTUSAN DAN REALISASI RUPS TAHUN SEBELUMNYA

Sepanjang tahun 2023, Bank Muamalat Indonesia telah melaksanakan 2 (dua) kali RUPS, yang mencakup: 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa.

PREVIOUS GMS RESOLUTIONS AND REALIZATIONS

Throughout 2023, Bank Muamalat Indonesia has held 2 (two) GMS, including: 1 (one) Annual GMS and 1 (one) Extraordinary GMS.

Keputusan RUPS Tahunan 11 Mei 2023

Annual GMS Resolutions May 11, 2023

No.	Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
1.	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2022 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022	- Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (DBSD&A), afiliasi BKR International, sesuai laporan Nomor 00003/2.0936/AU.4/07/0396-2/1/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 dengan Opini Wajar dalam, tanggal 17 Februari 2023 dengan Opini Wajar dalam Semua Hal yang Material, posisi keuangan PT Bank Muamalat Tbk tanggal 31 Desember 2022, dan kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat serta sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. - Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>vollediq acquit et decharge</i>) kepada Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	Sudah direalisasikan pada tahun 2023 dan Laporan Tahunan Perseroan telah disampaikan kepada OJK melalui surat No. 078/B/PRD-SRT/IV/2023 dan No. 079/B/PRD-SRT/IV/2023 tanggal 18 April 2023 kepada pihak-pihak terkait dan kepada lembaga-lembaga terkait.
	Approval of the Company's Annual Report for Financial Year 2022, including the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board for Financial Year 2022, as well as ratification of the Company's Financial Statement for Financial Year 2022.	- Approve and accept the Company's Annual Report, including the Supervisory Task Report, which has been carried out by the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board for the Financial Year ending December 31, 2022, and ratify the Consolidated Financial Statement for the Financial Year ending December 31, 2022, which has been audited by the Public Accounting Firm Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (DBSD&A), an affiliate of BKR International, according to report No. 00003/2.0936/AU.4/07/0396-2/1/II/2023 dated February 17, 2023, with a Fair Opinion in All Material Respects, the financial position of PT Bank Muamalat Tbk as of December 31, 2022, and financial performance, cash flow, reconciliation of income and profit sharing, sources and distribution of zakat funds as well as the source and use of benevolent funds for the year ending on that date, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia. - Provide full release and discharge of responsibility (<i>vollediq acquit et decharge</i>) to the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, and Board of Directors of the Company for supervisory and management actions that have been carried out during the financial year ending December 31, 2022, as long as these actions do not constitute criminal acts and these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statement for the financial year ending December 31, 2022.	It has been realized in 2023, and the Company's Annual Report has been submitted to the OJK via letter No. 078/B/PRD-SRT/IV/2023 and No. 079/B/PRD-SRT/IV/2023 dated April 18, 2023 to related parties and to related institutions.

No.	Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
2.	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022. Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2022 Financial Year.	Menyetujui pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebesar 18,8% (delapan belas koma delapan per seratus) dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 atau sebesar Rp5.001.774.144,- (lima miliar satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh empat Rupiah), dengan memperhatikan persetujuan yang diperlukan, dan sisa dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 tersebut secara keseluruhan akan dipergunakan untuk Cadangan Umum Perseroan. Approved the distribution of dividends to Shareholders in the amount of 18.8% (eighteen point eight per hundred) of the Company's Net Profit for the 2022 Financial Year or Rp. 5,001,774,144,- (five billion one million seven hundred seventy-four thousand one hundred and forty-four Rupiah), considering the necessary approvals, and the remainder of the Company's Net Profit for the 2022 Financial Year as a whole was used for the Company's General Reserves.	Pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebesar 18,8% (delapan belas koma delapan per seratus) dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 atau sebesar Rp5.001.774.144,- telah direalisasikan pada tahun 2023 kepada para pemegang saham yang mengajukan permohonan pembayaran dividen. Adapun untuk keterbukaan informasi mengenai Tata Cara Pembagian Dividen Tunai telah diumumkan kepada pemegang saham pada tanggal 15 Mei 2023 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu surat kabar "Harian Ekonomi Neraca" dan melalui Website Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dividend distribution to Shareholders of 18.8% (eighteen point eight per hundred) of the Company's Net Profit for the 2022 Financial Year or Rp. 5,001,774,144,- has been realized in 2023 to shareholders who submitted applications for dividend payments. As for the disclosure of information regarding the Procedures for Distribution of Cash Dividends, it was announced to shareholders on May 15, 2023, through 1 (one) daily Indonesian-language newspaper with national circulation, namely the newspaper "Harian Ekonomi Neraca," and through the Company's Website in Indonesian and English.
3.	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statement for the 2023 Financial Year and other audits required by the Company.	Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk, mengakhiri dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk harus merupakan Kantor Akuntan Publik yang dapat diandalkan dan memiliki reputasi yang baik; 2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan dengan tata kelola yang baik; 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Approved to grant authority to the Company's Board of Commissioners to appoint, terminate, and/or replace the Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statement for the 2023 financial year and/or other audits required by the Company as well as determine the amount of honorarium and other reasonable appointment requirements for the Public Accounting Firm. The following provisions apply to the delegation of authority: 1. The appointed Public Accounting Firm must be a Public Accounting Firm that is reliable and has a good reputation; 2. The appointment of a Public Accounting Firm is carried out with good governance; 3. The appointment of the Public Accounting Firm does not conflict with applicable laws and regulations.	Sudah direalisasikan pada tahun 2023 dan Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit. Penunjukan berdasarkan surat Dewan Komisaris tanggal 26 Oktober 2023 dan telah dilaporkan kepada OJK melalui surat No. 113/B/FSD-SRT/XI/2023 tanggal 23 November 2023. It has been realized in 2023, and the Board of Commissioners has appointed a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statement for the 2023 Financial Year, based on recommendations from the Audit Committee. The appointment is based on a letter from the Board of Commissioners dated October 26, 2023, and has been reported to the OJK via letter No. 113/B/FSD-SRT/XI/2023 dated November 23, 2023.



No.	Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
4.	Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023. Determination of salaries or honorarium and allowances for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for 2023.	1. Perseroan menyetujui penetapan Gaji, Uang Jasa dan Tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2023 tidak mengalami perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan untuk tahun 2022. 2. Perseroan menyetujui penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun 2023 tidak mengalami perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan untuk tahun 2022. Rapat juga menyetujui penetapan Gaji, Uang Jasa dan Tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Honorarium dan Tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. 1. The Company agrees that the determination of salaries, service fees, and other allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2023 without changes as determined for 2022. 2. The Company agrees to determine the Honorarium and/or Allowances for members of the Company's Sharia Supervisory Board for 2023 without changes as determined for 2022. The meeting also approved the determination of salaries, service fees, and other allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as honorarium and allowances for members of the Company's Sharia Supervisory Board to be determined based on the GMS resolution.	Sudah direalisasikan pada tahun 2023, di mana sesuai dengan amanat RUPS, tidak terdapat perubahan Gaji, Uang Jasa dan Tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Honorarium dan Tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun 2023. It has been realized in 2023, where, in accordance with the mandate of the GMS, there were no changes to Salaries, Service Fees and other Allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as Honorarium and Allowances for members of the Sharia Supervisory Board for 2023.
5.	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Changes to the Company's Articles of Association.	Mata Acara "Perubahan Anggaran Dasar Perseroan" tidak dilakukan pembahasan dalam Rapat dan akan diagendakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan terdekat. The agenda item "Amendments to the Company's Articles of Association" was not discussed at the Meeting and will be on the agenda at the nearest Extraordinary General Meeting of Shareholders or Annual General Meeting of Shareholders.	Tidak terdapat realisasi karena pembahasan Mata Acara Rapat ditunda. There was no realization because discussion of the Meeting Agenda was postponed.
6.	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Changes in the Composition of the Company's Management.	Mata Acara "Perubahan Susunan Pengurus Perseroan" tidak dilakukan pembahasan dalam Rapat dan akan diagendakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan terdekat. The agenda item "Changes in the Composition of the Company's Management" was not discussed at the Meeting and will be put on the agenda at the nearest Extraordinary General Meeting of Shareholders or Annual General Meeting of Shareholders.	Tidak terdapat realisasi karena pembahasan Mata Acara Rapat ditunda. There was no realization because discussion of the Meeting Agenda was postponed.

Alasan Belum Terealisasinya Keputusan

Seluruh hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 11 Mei 2023 telah direalisasikan pada tahun 2023.

Reasons for the Unrealized Resolutions

All results of the Annual GMS resolutions on May 11, 2023 have been realized in 2023.

Keputusan RUPS Luar Biasa 13 November 2023

Extraordinary GMS Resolutions November 13, 2023

No.	Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
1.	Persetujuan Penggabungan Nilai Nominal Saham (<i>Reverse Stock Split</i>). Approval of Merger of Nominal Value of Shares (<i>Reverse Stock Split</i>).	Menyetujui Penggabungan Saham Perseroan (<i>Reverse Stock Split</i>) dengan Rasio 3:2 (tiga banding dua), sehingga nilai nominal saham: 1. Seri A dari semula Rp200,00 (dua ratus rupiah) per saham menjadi Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per saham; 2. Seri B dari semula Rp100,00 (seratus rupiah) per saham menjadi Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) per saham; dan 3. Seri C dari semula Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per saham menjadi Rp45,00 (empat puluh lima rupiah) per saham. Approved the Merger of Company Shares (<i>Reverse Stock Split</i>) with a Ratio of 3:2 (three to two), so that the nominal value of the shares: 1. Series A from Rp. 200.00 (two hundred rupiah) per share to Rp. 300.00 (three hundred rupiah) per share; 2. Series B from Rp. 100.00 (one hundred rupiah) per share to Rp. 150.00 (one hundred and fifty rupiah) per share; and 3. Series C from Rp. 30.00 (thirty rupiah) per share to Rp. 45.00 (forty-five rupiah) per share.	Keputusan berkenaan dengan Penggabungan Nilai Nominal Saham (<i>Reverse Stock Split</i>) telah dituangkan ke dalam akta Notaris No. 6 tanggal 13 November 2023 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn dan telah memberitahukannya kepada pihak yang berwenang The resolution regarding the Merger of Nominal Value of Shares (<i>Reverse Stock Split</i>) has been stated in Notary Deed No. 6 dated November 13, 2023, made by Notary Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, and has been notified to the authorities.

No.	Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
2.	Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	- Menyetujui penambahan Modal Dasar sebesar Rp 115,00 (seratus lima belas rupiah) dan penambahan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor sebesar Rp30,00 (tiga puluh rupiah) sebagai akibat dari Penggabungan Saham atau <i>Reverse Stock Split</i>. - Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga menjadi sebagai berikut: Pasal 4.1 Modal Dasar dan Nilai Nominal Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp5.600.000.000.115,00 (lima triliun enam ratus miliar seratus lima belas rupiah) yang terbagi atas 55.448.900.551 (lima puluh lima miliar empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu lima ratus lima puluh satu) lembar saham, yang terdiri dari: - Sejumlah 551.099.450 (lima ratus lima puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh) lembar saham Seri A masing-masing dengan nilai nominal Rp300,00 (tiga ratus rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp165.329.835.000,00 (seratus enam puluh lima miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah); - Sejumlah 28.231.134.434 (dua puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat) lembar saham Seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp4.234.670.165.100,00 (empat triliun dua ratus tiga puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh lima ribu seratus rupiah); - Sejumlah 26.666.666.667 (dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) lembar saham Seri C masing-masing dengan nilai nominal Rp45,00 (empat puluh lima rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp1.200.000.000.015,00 (satu triliun dua ratus miliar lima belas rupiah). Pasal 4.2 Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor penuh 33.345.160.962 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua) lembar saham yang terdiri dari: 551.099.450 (lima ratus lima puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh) lembar saham Seri A dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp165.329.835.000,00 (seratus enam puluh lima miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah); 6.254.035.440 (enam miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh) lembar saham Seri B dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp938.105.316.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan miliar seratus lima juta tiga ratus enam belas ribu rupiah); 26.540.026.072 (dua puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta dua puluh enam ribu tujuh puluh dua) lembar saham Seri C dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.194.301.173.240,00 (satu triliun seratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah); - dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.297.736.324.240,00 (dua triliun duaratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu duaratus empat puluh rupiah). - Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah direalisasikan dan dituangkan dalam Akta No. 6 tanggal 13 November 2023 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya tertanggal 20 November 2023 No. AHU-0071588. AH.01.02.



No.	Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
	Approval of changes to the Company's Articles of Association.	- Approve an increase in Authorized Capital of Rp 115.00 (one hundred and fifteen rupiah) and an increase in Issued Capital and Paid-up Capital of Rp 30.00 (thirty rupiah) as a result of the Stock Merger or Reverse Stock Split. - Approve changes to Article 4, paragraphs 1 and 2 of the Company's Articles of Association, so that they become as follows: Article 4.1 Authorized Capital and Nominal Value The authorized capital of the Company is Rp 5,600,000,000,115.00 (five trillion six hundred billion one hundred and fifteen rupiah), which is divided into 55,448,900,551 (fifty-five billion four hundred forty-eight million nine hundred thousand five hundred and fifty-one) shares, consisting of: - A total of 551,099,450 (five hundred fifty-one million ninety-nine thousand four hundred and fifty) Series A shares each with a nominal value of Rp300.00 (three hundred rupiah) or a total nominal value of Rp165,329,835,000.00 (one hundred and sixty-five billion three hundred twenty-nine million eight hundred thirty-five thousand rupiah); - A total of 28,231,134,434 (twenty-eight billion two hundred thirty-one million one hundred thirty-four thousand four hundred thirty-four) Series B shares, each with a nominal value of Rp150.00 (one hundred and fifty rupiah) or a total nominal value of Rp4,234,670,165,100.00 (four trillion two hundred thirty-four billion six hundred seventy million one hundred sixty-five thousand one hundred rupiah); - A total of 26,666,666,667 (twenty-six billion six hundred sixty-six million six hundred sixty-six thousand six hundred sixty-seven) Series C shares, each with a nominal value of Rp 45.00 (forty-five rupiah) or a total nominal value of Rp 200,000,000,015.00 (one trillion two hundred billion fifteen rupiah). Article 4.2 Issued Capital and Paid Up Capital From the authorized capital, 33,345,160,962 (thirty-three billion three hundred forty-five million one hundred sixty thousand nine hundred and sixty-two) shares have been placed and subscribed and paid up, consisting of: 551,099,450 (five hundred fifty-one million ninety-nine thousand four hundred and fifty) Series A shares with a total nominal value of Rp 65,329,835,000.00 (one hundred sixty-five billion three hundred twenty-nine million eight hundred thirty-five thousand rupiah); 6,254,035,440 (six billion two hundred fifty-four million thirty-five thousand four hundred and forty) Series B shares with a total nominal value of Rp938,105,316,000.00 (nine hundred thirty-eight billion one hundred five million three hundred and sixteen thousand rupiah); 26,540,026,072 (twenty-six billion five hundred forty million twenty-six thousand seventy-two) Series C shares with a total nominal value of Rp1.194,301,173,240.00 (one trillion one hundred ninety-four billion three hundred one million one hundred seventy-three thousand two hundred and forty rupiah); - with a total nominal value of Rp2,297,736,324,240.00 (two trillion two hundred ninety-seven billion seven hundred thirty-six million three hundred twenty-four thousand two hundred and forty rupiah). - Approved the granting of authority to the Board of Directors with the right of substitution to restate the decision regarding changes to the Articles of Association into a Notarial deed and notify the competent authorities and, in connection with this matter, do everything necessary in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.	Changes to the Company's Articles of Association have been realized and stated in Deed No. 6 dated November 13, 2023, made in the presence of Notary Ashoya Ratam, S.H. M.Kn., and have obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with its Decree dated November 20, 2023 No. AHU-0071588.AH.01.02.
3.	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Changes in the Composition of the Company's Management.	Mata Acara: "Perubahan Susunan Pengurus Perseroan" tidak dilakukan pembahasan dalam Rapat dan karenanya Rapat tidak mengambil keputusan. Agenda item: "Changes in the Composition of the Company's Management" was not discussed at the Meeting and therefore the Meeting did not take a decision.	Tidak terdapat realisasi karena pembahasan mata acara Rapat tidak dilakukan pembahasan dalam Rapat. There was no realization because discussion of the Meeting agenda was not discussed at the Meeting.

Alasan Belum Terealisasinya Keputusan

Seluruh hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 13 November 2023 telah direalisasikan pada tahun 2023.

Reasons for the Unrealized Resolutions

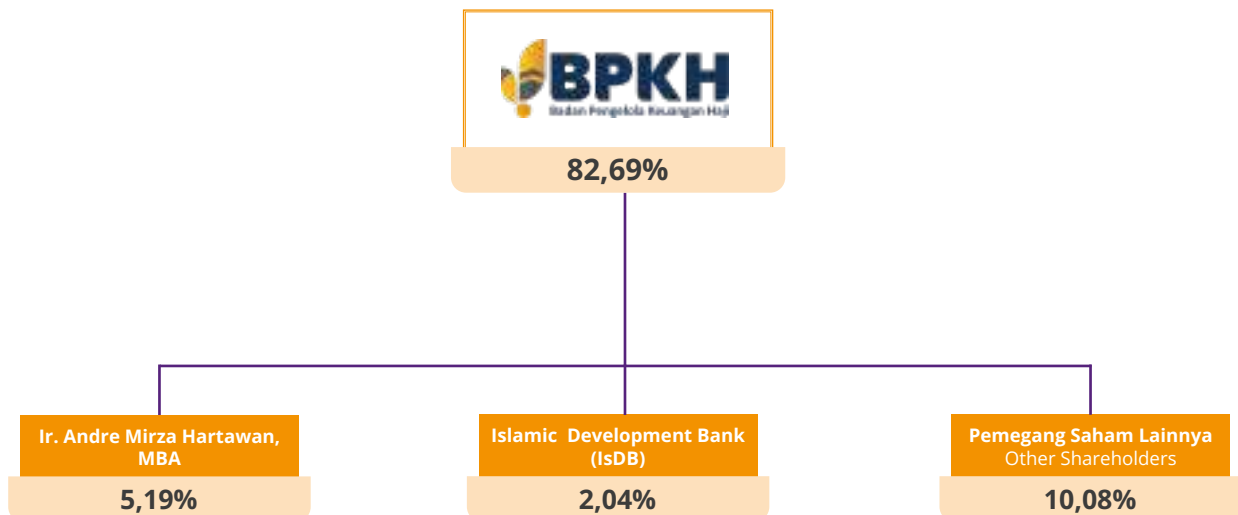
All results of the Extraordinary GMS resolutions on November 13, 2023 have been realized in 2023.

Informasi Pemegang Saham Utama/ Pengendali

Information on Main/Controlling Shareholders

Pengendali Bank Muamalat Indonesia ialah pihak yang memiliki saham Perseroan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Sampai dengan laporan ini diterbitkan, Pemegang saham utama Bank Muamalat ialah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan kepemilikan saham sebesar 82,69% dari total keseluruhan saham yang ada. Berikut ialah bagan terkait informasi pemegang saham utama Bank:

The controller of Bank Muamalat Indonesia is the party who owns 25% (twenty-five percent) of the Company's shares or more than the number of shares issued and has voting rights as intended in OJK Regulation No. 39/POJK.03/2017 concerning Sole Ownership in Indonesian Banking. As of the publication of this report, the main shareholder of Bank Muamalat is the Hajj Fund Management Agency (BPKH) with share ownership of 82.69% of the total existing shares. The following is a chart related to information on the Bank's main shareholders:





Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board

Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

The Sharia Supervisory Board, hereinafter abbreviated as DPS, is the party tasked with providing advice and suggestions to the Board of Directors and supervising the Bank's activities so that they comply with Sharia Principles in accordance with the provisions of statutory regulations, articles of association, and/or GMS resolutions.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pembentukan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah, ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 16/ POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/ POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
7. Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia.
8. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Nomor 07 tanggal 15 April 2025 yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.09-0194966 tanggal 19 April 2025. Kedua akta terakhir dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

LEGAL BASIS

The legal basis for the formation and implementation of the duties of the Sharia Supervisory Board is as follows:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.
2. Law of the Republic of Indonesia No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking as amended by Law No. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector.
3. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 16/ POJK.03/2022 of 2022 concerning Sharia Commercial Banks.
4. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.
5. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
6. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 15/ POJK.04/2015 concerning the Application of Sharia Principles in the Capital Market.
7. Articles of Association of Bank Muamalat Indonesia.
8. Deed of Statement of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 07 dated April 15, 2025, regarding the receipt of Notification of Changes to Company Data has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia in accordance with letter No. AHU-AH.01.09-0194966 dated April 19, 2025. The last two deeds were made in the presence of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, agar kegiatan Bank sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
2. Memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal.
3. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
4. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang telah dikeluarkan Bank Muamalat Indonesia.
5. Sebagai mediator antara Bank Muamalat Indonesia dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Bank Muamalat Indonesia yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN-MUI.
6. Mengawasi proses pengembangan produk baru dan kegiatan Bank Muamalat Indonesia agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
7. Melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk kepentingan Bank dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
8. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah.
9. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank Muamalat Indonesia yang belum ada fatwanya.
10. Sebagai perwakilan DSN-MUI yang ditempatkan di Bank Muamalat Indonesia, Dewan Pengawas Syariah wajib melaporkan atas hasil pengawasannya kepada DSN-MUI dan OJK dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.
11. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank Muamalat Indonesia secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank Muamalat Indonesia.
12. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Muamalat Indonesia.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

The duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board of Bank Muamalat Indonesia are as follows:

1. Carry out supervision in the interests of the Bank over the policies and course of management by the Board of Directors and be responsible for such supervision, so that the Bank's activities are in accordance with Sharia Principles and are responsible for such supervision, in accordance with the provisions of laws and regulations, the articles of association, and/or GMS resolutions.
2. Provide advice and suggestions and supervise the fulfillment of Sharia Principles in the Capital Market to Parties carrying out Sharia Activities in the Capital Market.
3. Provide advice and suggestions to the Board of Directors, including providing sharia opinions regarding the Bank's activities so that they are in accordance with Sharia Principles.
4. Assess and ensure compliance with sharia principles for operational and product guidelines issued by Bank Muamalat Indonesia.
5. As a mediator between Bank Muamalat Indonesia and DSN-MUI in communicating proposals and suggestions for product and service development from Bank Muamalat Indonesia, which require study and fatwa from DSN-MUI.
6. Supervise the process of developing new products and activities of Bank Muamalat Indonesia so that they comply with the DSN-MUI fatwa.
7. Carry out duties, authority, and responsibilities for the interests of the Bank in good faith and with the principle of prudence.
8. Supervise the Board of Directors' follow-up on audit findings or examinations and recommendations from the Bank's internal audit work unit, external auditors, OJK supervision results, and/or supervision results from other authorities and institutions, related to the implementation of Sharia Principles.
9. Request a fatwa from DSN-MUI for new Bank Muamalat Indonesia products for which there is no fatwa yet.
10. As a representative of DSN-MUI placed at Bank Muamalat Indonesia, the Sharia Supervisory Board is obliged to report the results of its supervision to DSN-MUI and OJK within 6 (six) months.
11. Provide opinions from sharia aspects regarding the overall operational implementation of Bank Muamalat Indonesia in Bank Muamalat Indonesia's published reports.
12. Conduct regular reviews on the fulfillment of sharia principles regarding the mechanism for collecting funds and distributing funds as well as Bank Muamalat Indonesia's services.



13. Memberikan opini aspek syariah atas temuan/ penyimpangan yang dijumpai oleh audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah.
14. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah, termasuk penerapan kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, dan audit intern syariah secara terintegrasi.
15. Memberikan opini terkait hal-hal strategis dan/atau hal-hal yang disyaratkan dalam ketentuan sehingga tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, antara lain pelaksanaan sinergi perbankan, rencana aksi pemulihan dan rencana tindak, serta penanganan permasalahan bank umum;
16. Memberikan pendapat mengenai pemenuhan Prinsip Syariah kepada komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
17. Memberikan layanan konsultasi dan pendapat kepada fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit intern syariah.
18. Memberikan rekomendasi terkait pemenuhan Prinsip Syariah berdasarkan hasil pengawasan DPS.
19. Berkoordinasi dengan otoritas fatwa dan/atau regulator terkait, apabila diperlukan.
20. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di Bank Muamalat Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Adapun tugas dan tanggung jawab pengawasan DPS terhadap proses pengembangan produk baru Bank Muamalat ialah sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan dari pejabat Bank Muamalat Indonesia yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan.
2. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa DSN-MUI
 - a. Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisis atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa DSN-MUI.
 - b. Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari DSN-MUI.
3. Melakukan *review* sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
4. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.
5. Memberikan opini atas hasil kaji ulang terhadap konsep akad/perjanjian/formulir aplikasi produk Bank baru.

13. Provide opinions on sharia aspects regarding findings/ deviations found by the Bank's internal audit, external auditors, results of supervision by the Financial Services Authority, and/or results of supervision by other authorities and institutions, related to the implementation of Sharia Principles.
14. Direct, monitor, and evaluate the implementation of Sharia Governance, including the implementation of sharia compliance, sharia risk management, and sharia internal audit in an integrated manner.
15. Provide opinions related to strategic matters and/or matters required in the provisions so as not to conflict with Sharia Principles, including the implementation of banking synergy, recovery action plans and action plans, and handling of general bank problems;
16. Provide opinions regarding the fulfillment of Sharia Principles to the committee supporting the implementation of the Board of Commissioners' duties.
17. Provide consultation services and opinions to the sharia compliance function, sharia risk management function, and sharia internal audit function.
18. Provide recommendations regarding the fulfillment of Sharia Principles based on the results of DPS supervision.
19. Coordinate with the fatwa authority and/or relevant regulators, if necessary.
20. Request data and information related to sharia aspects from work units at Bank Muamalat Indonesia in the context of carrying out their duties.

The duties and responsibilities of DPS supervision of Bank Muamalat's new product development process are as follows:

1. Request an explanation from the authorized Bank Muamalat Indonesia official regarding the objectives, characteristics, and contracts used in the new product that will be released.
2. Check whether the contract used in the new product has a DSN-MUI fatwa
 - a. In the event that there is a fatwa, the Sharia Supervisory Board will conduct an analysis of the suitability of the new product contract with the DSN-MUI fatwa.
 - b. In the event that there is no fatwa, the Sharia Supervisory Board proposes to the Bank's Board of Directors to complete the new product agreement with a fatwa from DSN-MUI.
3. Review systems and procedures for new products that will be issued in relation to compliance with sharia principles.
4. Provide sharia opinions on new products that will be released.
5. Provide opinions on the results of the review of the concept of the agreement/contract/application form for new Bank products.

Tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap kegiatan Bank Muamalat ialah sebagai berikut:

1. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
2. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah.
3. Memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha Perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal.
4. Memeriksa, mengamati, meminta keterangan dan/atau konfirmasi kepada karyawan Bank Muamalat Indonesia dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen, apabila diperlukan.
5. Melakukan *review* terhadap prosedur terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan dimaksud.
6. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
7. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat merujuk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.03/2022 Tentang Bank Umum Syariah, dan *Board Manual* Bank Muamalat, yang antara lain meliputi:

1. Persyaratan
2. Komposisi
3. Pengangkatan
4. Rangkap Jabatan
5. Masa Jabatan dan Pemberhentian
6. Program Orientasi Dan Peningkatan Kapabilitas

The duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board's supervision of Bank Muamalat's activities are as follows:

1. Analyze reports submitted by and/or requested from the Board of Directors, implementing the internal audit function and/or compliance function to determine the quality of implementation of compliance with sharia principles for fund collection and distribution activities as well as Bank services.
2. Supervise the Board of Directors' follow-up on audit findings or examinations and recommendations from the Bank's internal audit work unit, external auditors, results of supervision by the Financial Services Authority, and/or results of supervision by other authorities and institutions, related to the implementation of Sharia Principles.
3. Provide advice and/or supervise the implementation of Sharia Principles in the Capital Market in the Company's business activities and/or provide Sharia conformity statements for Sharia products or services in the Capital Market.
4. Examine, observe, ask for information, and/or confirmation from Bank Muamalat Indonesia employees and/or customers to strengthen the results of document examination, if necessary.
5. Review procedures related to sharia aspects if there are indications of non-compliance with the implementation of compliance with sharia principles for the activities in question.
6. Provide sharia opinions on fund collection and distribution activities as well as Bank services.
7. Report the results of the supervision of the Sharia Supervisory Board to the Board of Directors and Board of Commissioners.

WORK GUIDELINES AND PROCEDURES OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

The work guidelines and procedures of the Bank Muamalat Sharia Supervisory Board refer to the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 2 of 2024 Concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks, and the Bank Muamalat Board Manual, which includes, among other things:

1. Requirements
2. Composition
3. Appointment
4. Concurrent Positions
5. Term of Office and Dismissal



7. Standar Etika Dewan Pengawas Syariah
8. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah
9. Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah
10. Pembagian Tugas Dewan Pengawas Syariah (Pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan DPS)
11. Rapat Dewan Pengawas Syariah
12. Pola Hubungan Kerja DPS dengan Dewan Komisaris dan Direksi
13. Pelaporan Dewan Pengawas Syariah
14. Hak Kompensasi Dewan Pengawas Syariah
15. Larangan Terhadap Dewan Pengawas Syariah
16. Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah

6. Orientation and Competency Improvement Program
7. Ethical Standards of the Sharia Supervisory Board
8. Duties, Responsibilities, and Authorities of the Sharia Supervisory Board
9. Work Procedures of the Sharia Supervisory Board
10. Division of Duties of the Sharia Supervisory Board (Setting the authority and decision procedures of the DPS)
11. Sharia Supervisory Board Meeting
12. DPS Working Relationship Pattern with the Board of Commissioners and the Board of Directors
13. Sharia Supervisory Board Reporting
14. Sharia Supervisory Board Compensation Rights
15. Prohibition against the Sharia Supervisory Board
16. Evaluation of the Performance of the Sharia Supervisory Board

KRITERIA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Kriteria anggota Dewan Pengawas Syariah Bank merujuk pada ketentuan Pasal 60 POJK Nomor 16/POJK.03/2022 Tentang Bank Umum Syariah, Pasal 8 POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta tertuang pada Board Manual Bank Muamalat dengan uraian sebagai berikut:

1. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
2. Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik.
3. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
4. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*).
5. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
6. Memiliki keahlian di bidang *fiqh mu'amalah*.
7. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
8. Jika diperlukan anggota DPS dapat pula memiliki keahlian selain *fiqh mu'amalah*, tetapi harus memiliki pengalaman di bidang perbankan dan atau lembaga keuangan syariah.
9. Tidak termasuk dalam daftar kredit/pembiayaan macet.
10. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pihak yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
11. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

CRITERIA FOR MEMBERS OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

The criteria for members of the Bank's Sharia Supervisory Board refer to the provisions of Article 60 POJK No. 16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks, Article 8 POJK No. 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, and are contained in the Bank Muamalat Board Manual with the following description:

1. Have good characters and morals.
2. Have integrity, competence, and a good reputation.
3. Have a commitment to comply with sharia banking regulations and other applicable laws and regulations.
4. Have a high commitment to developing a healthy and resilient Bank (*sustainable*).
5. Not included in the Failed List in accordance with the provisions stipulated by Bank Indonesia and/or the Financial Services Authority.
6. Have expertise in the field of *mu'amalah fiqh*.
7. Have knowledge and experience in the field of sharia mu'amalah and knowledge in the field of banking and/or finance in general.
8. If necessary, DPS members can also have expertise other than *mu'amalah fiqh* but must have experience in banking and/or sharia financial institutions.
9. Not included in the list of bad credit/financing.
10. Have never been declared bankrupt or been a party found guilty of causing a company to be declared bankrupt within the last 5 (five) years before being nominated.
11. Every proposal for appointment and/or replacement of DPS members to the GMS must consider the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.

12. Calon anggota DPS wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai pihak utama. Dalam rangka memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, calon anggota DPS harus memperoleh rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

12. Prospective DPS members are required to obtain approval from the Financial Services Authority through a fit and proper test before carrying out their actions, duties, and functions as the main party. In order to obtain approval from the Financial Services Authority, prospective DPS members must obtain a recommendation from the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PERIODE PENUGASAN

Bank Muamalat telah memiliki pedoman dalam menentukan susunan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah yaitu POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 3 (tiga) orang atau paling banyak 50%(lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi. Pada tahun 2024, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah Bank berjumlah 3 (tiga) orang dengan detail sebagai berikut:

COMPOSITION OF MEMBERSHIP OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD AND ASSIGNMENT PERIOD

Bank Muamalat has guidelines for determining the membership composition of the Sharia Supervisory Board, namely POJK No. 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. Article 10, paragraph (1), states that the number of members of the Sharia Supervisory Board is at least 3 (three) people or a maximum of 50% (fifty percent) of the total number of members of the Board of Directors. In 2024, the number of members of the Bank's Sharia Supervisory Board was 3 (three) people with the following details:

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TAHUN 2024

Composition of the Sharia Supervisory Board in 2024

Nama Name	Jabatan Position	RUPS Pengangkatan Appointment GMS	Persetujuan OJK FSA Approval	Tanggal Efektif Effective Date	Pengangkatan Kembali Reappointment	Periode Penugasan Assignment Period
Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si	Ketua Chairman	RUPS LB 16 Desember 2019 (Ketua DPS) EGMS December 16, 2019 (Chairman of DPS)	Surat OJK No. SR-2/ PB.13/2017 tanggal 2 Februari 2017 FSA Letter No. SR-2/ PB.13/2017 dated February 2, 2017	2 Februari 2017 February 2, 2017	RUPS LB 27 Juni 2024 (Ketua DPS) EGMS June 27, 2024 (Chairman of DPS)	2024-2029
Hj. Siti Haniatunnisa,LLB., MH	Anggota Member	RUPS LB 16 Desember 2019 (Anggota DPS) EGMS December 16, 2019 (Member of DPS)	Surat OJK No. S-13/ PB.1/2021 tanggal 22 Januari 2021 FSA Letter No. S-13/ PB.1/2021 dated January 22, 2021	22 Januari 2021 January 22, 2021	RUPS LB 27 Juni 2024 (Anggota DPS) EGMS June 27, 2024 (Member of DPS)	2024-2029
Dr. H. Agung Danarto, M.Ag	Anggota Member	RUPS LB 30 Agustus 2021 (Anggota DPS) EGMS August 30, 2021 (Member of DPS)	Surat OJK No.SR-8/ PB.1/2022 tanggal 7 Juli 2022 FSA Letter No.SR-8/ PB.1/2022 dated 7 July 2022	7 Juli 2022 July 7, 2022	RUPS LB 27 Juni 2024 (Anggota DPS) EGMS June 27, 2024 (Member of DPS)	2024-2029

RANGKAP JABATAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketentuan mengenai rangkap jabatan DPS mengacu pada POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 12. Berikut detail mengenai rangkap jabatan DPS Bank Muamalat:

CONCURRENT POSITION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Provisions regarding concurrent positions of DPS refer to POJK No. 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, Article 12. The following are details regarding concurrent positions of DPS at Bank Muamalat:



DAFTAR RANGKAP JABATAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

List of Concurrent Position of Sharia Supervisory Board

Nama Name	Jabatan Position	Nama Perusahaan Name of Company
Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	Indo Mobil Finance Indonesia Syariah
	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	PT Reasuransi Syariah Indonesia (ReINDO Syariah)
	Dewan Penasihat Syariah Sharia Advisor Board	BP TAPERA
	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	Bank Aladin Syariah
	Direktur Eksekutif Executive Director	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan (KNEKS) ^{*)} National Economic and Financial Committee (KNEKS)
Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	PT BNI Life Insurance ^{**)}
	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	DPLK Syariah Muamalat ^{****)}
	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	PT Asuransi Jasindo Syariah
	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	PT Asuransi BRI Life
Dr. H. Agung Danarto, M.Ag	Tidak memiliki rangkap jabatan No concurrent positions	Tidak memiliki rangkap jabatan No concurrent positions

^{*)} Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 18 November 2024, yang bersangkutan berkomitmen untuk menyesuaikan dan mematuhi ketentuan batas rangkap jabatan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Based on the Statement Letter dated November 18, 2024, the person concerned is committed to adjusting and complying with the provisions on concurrent position limits in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

^{**)} Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2025, yang bersangkutan berkomitmen untuk menyesuaikan dan mematuhi ketentuan batas rangkap jabatan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Based on the Statement Letter dated January 17, 2025, the person concerned is committed to adjusting and complying with the provisions on concurrent position limits in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

^{****)} Efektif telah mengundurkan diri sejak 25 Februari 2025.
Has resigned effectively since February 25, 2025.

INDEPENDENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, DPS Bank Muamalat berkomitmen untuk selalu mengedepankan kesesuaian dengan prinsip syariah dan mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi dan tidak dipengaruhi oleh pihak mana pun.

Seluruh anggota DPS Bank Muamalat ialah pihak independen yang tidak memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan, serta hubungan keluarga dengan Perseroan, Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham.

INDEPENDENCE OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

In carrying out its supervisory duties, Bank Muamalat's DPS is committed to always prioritizing conformity with sharia principles and prioritizing the Bank's interests above personal interests and is not influenced by any party.

All members of Bank Muamalat's DPS are independent parties who have no management, ownership, and/or financial relationships, as well as familial relationships with the Company, the Board of Commissioners, the Board of Directors, or Shareholders.

PERNYATAAN INDEPENDENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Statement of Independence of the Sharia Supervisory Board

Aspek Independensi Independence Aspect	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si	Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH	Dr. H. Agung Danarto, M.Ag
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Have no financial relationship with the Boards of Commissioners and Directors	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Have no management relationship in the Company, its subsidiaries, or affiliated companies	√	√	√

Aspek Independensi Independence Aspect	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si	Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH	Dr. H. Agung Danarto, M.Ag
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Have no management relationship in the Company, its subsidiaries, or affiliated companies	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG Have no any family relations with the Boards of Commissioners or Directors, and/or fellow members of the Nomination, Remuneration and GCG Committees	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah Have not served as a manager of political parties, officials, and government	✓	✓	✓

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Salah satu wujud independensi DPS Bank Muamalat ialah tidak terdapatnya kepemilikan saham yang bersangkutan yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Muamalat maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri hingga berakhirnya tahun buku 2024. Dengan demikian, tidak terdapat *conflict of interest* dalam proses pengawasan yang dijalankan.

PERNYATAAN KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Statement of Share Ownership of Sharia Supervisory Board

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham (Lembar Saham) Share Ownership (Number of Shares)			
		Bank Muamalat	Bank Lain Other Banks	LJK-Non Bank Non-Bank Financial Institution	Bank Lain Other Banks
Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si	Ketua DPS Chairman of DPS	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Hj. Siti Haniatunnisa,LLB., MH	Anggota DPS Member of DPS	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Dr. H. Agung Danarto, M.Ag	Anggota DPS Member of DPS	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil

PEMBAGIAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pembagian tugas di antara anggota DPS telah merujuk pada ketentuan dalam Board Manual Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia, Anggaran Dasar Bank Muamalat, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun uraian tugas dari masing-masing jabatan DPS ialah sebagai berikut:

SHARIA SUPERVISORY BOARD SHARE OWNERSHIP

One manifestation of the independence of Bank Muamalat's DPS is that there is no relevant share ownership of 5% (five percent) or more in Bank Muamalat or in other banks and/or companies, domiciled at home and abroad, until the end of the 2024 financial year. Therefore, there is no conflict of interest in the supervision process carried out.

DIVISION OF DUTIES OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

The division of duties between DPS members has referred to the provisions in the Board Manual of the Sharia Supervisory Board of Bank Muamalat Indonesia, the Articles of Association of Bank Muamalat, and applicable statutory provisions. The job description of each DPS position is as follows:



Ketua

- Memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas Syariah.
- Menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya.
- Memimpin rapat Dewan Pengawas Syariah.
- Menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Pengawas Syariah.

Anggota

- Membantu Ketua Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya menurut pembedangan yang telah ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas Syariah.
- Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah.

Chairman

- Lead all activities of members of the Sharia Supervisory Board.
- Prepare work programs for implementing their duties.
- Chairing Sharia Supervisory Board meetings.
- Determine the division of duties of the members of the Sharia Supervisory Board.

Member

- Assist the Chairman of the Sharia Supervisory Board in carrying out its duties according to the areas determined by the Chairman of the Sharia Supervisory Board.
- Carry out other tasks assigned by the Chairman of the Sharia Supervisory Board.

HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Check and balance hubungan kerja antara Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi yang diciptakan Bank memiliki beberapa tujuan akhir, yakni untuk kemajuan Bank, pelaksanaan kegiatan bisnis dan operasional Bank yang sesuai dengan prinsip syariah, dan pemenuhan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk implementasi GCG di dalamnya.

Merujuk pada fungsinya masing-masing, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk menjaga kelangsungan usaha Bank Muamalat dalam jangka panjang, yang tercermin pada:

1. Terpeliharanya kesehatan Bank Muamalat Indonesia sesuai prinsip kehati-hatian dan mematuhi (*comply*) terhadap prinsip syariah Islam serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Terlaksananya dengan baik penerapan fungsi manajemen risiko syariah dan penerapan fungsi audit intern syariah.
3. Terlaksananya pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal oleh Bank Muamalat.
4. Terlindunginya kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* secara wajar.
5. Terpenuhinya pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
6. Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas Manajemen di semua lini organisasi.

WORKING RELATIONSHIP BETWEEN THE SHARIA SUPERVISORY BOARD, BOARD OF COMMISSIONERS, AND BOARD OF DIRECTORS

The check and balance working relationship between the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, and Board of Directors created by the Bank has several final objectives, namely for the progress of the Bank, implementation of the Bank's business and operational activities in accordance with sharia principles, and compliance with applicable regulations and legislation, including the implementation of GCG therein.

Referring to their respective functions, the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, and Board of Directors are responsible for maintaining Bank Muamalat's long-term business continuity, which is reflected in:

1. Maintaining the health of Bank Muamalat Indonesia in accordance with the principle of prudence and complying with Islamic sharia principles as well as applicable regulations and legislation.
2. Implementation of the sharia risk management function and implementation of the sharia internal audit function well.
3. Implementation of the Sharia Principles on Sharia products or services in the Capital Market by Bank Muamalat.
4. The interests of shareholders and stakeholders are protected fairly.
5. Fulfillment of the implementation of Good Corporate Governance.
6. Implementation of leadership succession and management continuity in all lines of the organization.

KEBIJAKAN PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

DPS mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah, termasuk penerapan kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, dan audit intern syariah secara terintegrasi. Penerapan fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit intern syariah dilaksanakan oleh fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan fungsi audit intern Bank yang telah didukung oleh pejabat minimal setingkat Pejabat Eksekutif yang mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah. DPS dibantu oleh Sharia Compliance Officer yang berada dalam Unit Kerja Kepatuhan, yang bertugas sebagai *liaison officer* dan bertugas secara administratif untuk mendokumentasikan rincian kegiatan kerja DPS dengan baik ke dalam kertas kerja pengawasan. Kertas kerja tersebut kemudian dituangkan dalam Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang disampaikan kepada Direksi Bank Muamalat Indonesia, DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.

RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketentuan mengenai penyelenggaraan rapat DPS merujuk pada POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta ketentuan Board Manual Bank Muamalat Indonesia, yakni paling kurang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Dewan Pengawas Syariah juga melaksanakan rapat rutin bersama Dewan Komisaris dan Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Materi-materi yang dibahas dalam rapat Dewan Pengawas Syariah telah diatur pada *Board Manual* Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia, di antaranya:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan produk baru dan hasil *review* produk yang telah ada, antara lain mengenai tujuan, karakteristik dan akad yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pengajuan aktivitas baru dan *review* aktivitas Bank yang telah berjalan dari aspek syariah.
3. Permasalahan yang timbul akibat aktivitas Bank yang membutuhkan opini dari DPS.
4. Hasil temuan syariah dari auditor, baik auditor eksternal maupun auditor internal.
5. Hasil terkait Aksi Korporasi.
6. *Financial Highlights*
7. Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham.

SHARIA SUPERVISORY BOARD SUPERVISION POLICY

DPS directs, monitors, and evaluates the implementation of Sharia Governance, including the implementation of sharia compliance, sharia risk management, and sharia internal audit in an integrated manner. The implementation of the sharia compliance function, sharia risk management function, and sharia internal audit function is carried out by the Bank's compliance function, risk management function, and internal audit function which have been supported by officials at least at the Executive Officer level who have knowledge and/or understanding of sharia banking operations. DPS is assisted by the Sharia Compliance Officer, who is in the Compliance Work Unit, who serves as a liaison officer and has administrative duties to properly document details of DPS work activities in supervisory working papers. The working paper is then outlined in the Sharia Supervisory Board Supervision Report, which is submitted to the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia, DSN-MUI, and the Financial Services Authority on a semesterly basis.

SHARIA SUPERVISORY BOARD MEETING

The provisions regarding the holding of DPS meetings refer to POJK No. 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units as well as the provisions of the Bank Muamalat Indonesia Board Manual, namely that it must be implemented at least once per month. The Sharia Supervisory Board also holds regular meetings with the Board of Commissioners and the Board of Directors at least once every 4 (four) months.

The materials discussed at the Sharia Supervisory Board meeting have been regulated in the Board Manual of the Bank Muamalat Indonesia Sharia Supervisory Board, including:

1. Matters relating to the development of new products and the results of reviews of existing products, including regarding the objectives, characteristics, and contracts used in accordance with sharia principles.
2. Proposing new activities and reviewing existing Bank activities from a sharia aspect.
3. Problems arising from Bank activities that require an opinion from DPS.
4. Results of sharia findings from auditors, both external auditors and internal auditors.
5. Results related to Corporate Actions.
6. Financial Highlights
7. Preparation for the General Meeting of Shareholders.



Pengambilan keputusan pada rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila terdapat perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat tersebut dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasannya. Detail frekuensi dan rekapitulasi kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah pada rapat disajikan dalam Sub Bab Rapat Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi.

Decision-making at Sharia Supervisory Board meetings is carried out based on deliberation to reach consensus. If there is a difference of opinion, the difference of opinion is included in the minutes of the meeting along with the reasons. Details of the frequency and recapitulation of the attendance of members of the Sharia Supervisory Board at meetings are presented in the Sub-chapter Meetings of the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, and Board of Directors.

TATA CARA PEMBERIAN NASIHAT DAN SARAN SERTA PENGAWASAN PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Tata cara pemberian nasihat, saran, serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- Melakukan rapat rutin secara berkala bersama Dewan Komisaris dan Direksi.
- Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai hal yang berkaitan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- Mengawasi pemenuhan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal oleh pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal.
- Melakukan penelaahan secara berkala atas penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal oleh pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal.
- Memberikan peringatan tertulis dan meminta Direksi atau Unit Kerja yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal untuk melakukan upaya perbaikan, paling lama 2 (dua) hari kerja setelah ditemukannya penyimpangan (jika ada), dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan komisaris
- Meminta data dan informasi kepada pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal dalam rangka pengawasan pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- Jika diperlukan, DPS Mendampingi atau mewakili pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal dalam berdiskusi dengan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
- Memberikan *sharing knowledge* terkait aspek syariah secara berkala ke semua pihak terkait.
- Memberikan *advise* dalam hal peningkatan akhlaqul karimah.

PROCEDURES FOR THE PROVISION OF ADVICE AND SUGGESTIONS AND MONITORING THE COMPLIANCE OF SHARIA PRINCIPLES IN THE CAPITAL MARKET

The procedures for providing advice, suggestions, and supervision by the Sharia Supervisory Board are carried out as follows:

- Conduct regular meetings with the Board of Commissioners and the Board of Directors.
- Provide advice and suggestions to the Board of Directors and Board of Commissioners regarding matters relating to Sharia Principles in the Capital Market.
- Supervise the fulfillment of the implementation of Sharia Principles in the Capital Market by parties carrying out Sharia Activities in the Capital Market.
- Conduct regular reviews of the application of Sharia Principles in the Capital Market by parties carrying out Sharia Activities in the Capital Market.
- Provide a written warning and ask the Board of Directors or Work Units carrying out Sharia Activities in the Capital Market to make corrective efforts no later than 2 (two) working days after the discovery of irregularities (if any), with a copy to the Financial Services Authority and the Board of Commissioners.
- Request data and information from parties carrying out Sharia Activities in the Capital Market in the context of monitoring the implementation of Sharia Principles in the Capital Market.
- If necessary, DPS accompanies or represents parties carrying out Sharia activities in the Capital Market in discussions with the National Sharia Board – Indonesian Ulama Council;
- Provide regular sharing of knowledge related to sharia aspects to all related parties.
- Providing advice in terms of improving morals.

PELAKSANAAN KEGIATAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TAHUN 2024

Penyampaian Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada manajemen Bank Muamalat, DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. Laporan Hasil Pengawasan DPS telah disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan semester. Untuk laporan Semester I tahun 2024 telah disampaikan kepada OJK melalui surat No. 305/R/PRD-SRT/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024, sedangkan Laporan Pengawasan DPS Semester II tahun 2024 telah disampaikan kepada OJK melalui surat No. 088/R/PRD-SRT/II/2025 tanggal 19 Februari 2025. Bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada kegiatan bisnis Bank Muamalat meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan pasar modal, penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. Dalam melakukan pengawasannya, Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh 1 (satu) orang *liaison officer* dari Unit Kepatuhan Syariah. Rincian pengawasan Dewan Pengawas Syariah tahun 2024 kami uraikan sebagai berikut:

Pengawasan Pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Tahun 2024

Dewan Pengawas Syariah telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai hal yang berkaitan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, terutama dalam inisiasi layanan Bank Muamalat sebagai bank kustodian syariah. Dewan Pengawas Syariah melakukan kajian atas kesesuaian layanan Kustodian dengan fatwa DSN-MUI sehingga PT Bank Muamalat Indonesia Tbk resmi menjadi bank kustodian dan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-50/PM.02/2024 tanggal 22 Oktober 2024.

Menindaklanjuti ketentuan POJK Nomor 5 /POJK.04/2021 Tentang Ahli Syariah Pasar Modal serta menunjang peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi pemenuhan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank juga telah mendapat pelatihan Ahli Syariah Pasar Modal oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (MUI).

IMPLEMENTATION OF SHARIA SUPERVISORY BOARD ACTIVITIES IN 2024

Submission of the Sharia Supervisory Board Supervision Report to the management of Bank Muamalat, DSN-MUI, and the Financial Services Authority is carried out every 6 (six) months. The DPS Supervision Results Report has been submitted to the OJK no later than 2 (two) months after the semester reporting period. The 2024 Semester I report has been submitted to OJK via letter No. 305/R/PRD-SRT/VIII/2024 dated August 23, 2024, while the 2024 Semester II DPS Supervision Report has been submitted to OJK via letter No. 088/R/PRD-SRT/II/2025 dated February 19, 2025. The form of supervision of the Sharia Supervisory Board on Bank Muamalat's business activities includes supervision of the implementation of sharia principles in capital market activities, fund collection, and distribution of funds and services. In carrying out its supervision, the Sharia Supervisory Board is assisted by 1 (one) liaison officer from the Sharia Compliance Unit. We describe the details of the supervision of the Sharia Supervisory Board in 2024 as follows:

Supervision of Compliance with Sharia Principles in the Capital Market in 2024

The Sharia Supervisory Board has provided advice and suggestions to the Board of Directors and Board of Commissioners regarding matters relating to Sharia Principles in the Capital Market, especially in initiating Bank Muamalat's services as a sharia custodian bank. The Sharia Supervisory Board conducted a review of the suitability of Custodian services with the DSN-MUI fatwa so that PT Bank Muamalat Indonesia Tbk officially became a custodian bank and obtained approval from the Financial Services Authority in accordance with the Decree of the OJK Board of Commissioners No. KEP-50/PM.02/2024 dated October 22, 2024.

Following up on the provisions of POJK No. 5 /POJK.04/2021 concerning Capital Market Sharia Experts and supporting the role of the Sharia Supervisory Board in supervising the implementation of Sharia Principles in the Capital Market, Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si, as Chairman of the Bank's Sharia Supervisory Board, has also received Capital Market Sharia Expert training by the Indonesian Ulema Council (MUI) Professional Certification Institute.



Pengawasan terhadap Penerapan Tata Kelola Syariah pada Tahun 2024

DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik. DPS telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah antara lain melalui rapat DPS yang dilakukan minimal setiap 1 (satu) bulan sekali serta melalui rapat rutin DPS bersama Direksi dan rapat rutin DPS bersama Dewan Komisaris minimal setiap 4 (empat) bulan sekali.

DPS melakukan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah dan internal audit syariah di Bank Muamalat secara berkala dan meminta laporan baik dalam bentuk surat maupun presentasi dalam meeting terkait dengan pelaksanaan audit intern aspek syariah.

Pengawasan terhadap Penerapan Kepatuhan Syariah pada Tahun 2024

Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan syariah, dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang membawahi fungsi kepatuhan syariah. Unit Kerja Kepatuhan didukung oleh pejabat minimal setingkat Pejabat Eksekutif yang mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah, yang dijabat oleh Head of Compliance. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap kepatuhan syariah diuraikan sebagai berikut:

Pengawasan terhadap Penghimpunan Dana pada tahun 2024

Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pengawasan atas produk penghimpunan dana Bank Muamalat Indonesia dan melakukan kajian atas kesesuaian produk penghimpunan dana dengan fatwa DSN-MUI. Dari pengawasan tersebut, tidak terdapat produk-produk penghimpunan dana yang bertentangan dengan fatwa DSN-MUI.

Supervision of the Implementation of Sharia Governance in 2024

DPS has carried out its duties and responsibilities in accordance with the Sharia Governance framework and the principles of good governance. DPS has provided advice and suggestions to the Board of Directors and supervised the Bank's activities so that they comply with sharia principles, including through DPS meetings held at least once per month as well as through regular DPS meetings with the Board of Directors and regular DPS meetings with the Board of Commissioners at least once every 4 (four) months.

DPS regularly evaluates the implementation of sharia risk management, sharia compliance, and sharia internal audit at Bank Muamalat and requests reports both in the form of letters and presentations in meetings related to the implementation of sharia aspects of internal audit.

Supervision of the Implementation of Sharia Compliance in 2024

The Sharia Supervisory Board, in carrying out its supervisory function regarding sharia compliance, is assisted by the Compliance Work Unit, which oversees the sharia compliance function. The Compliance Work Unit is supported by officials at least at the Executive Officer level who have knowledge and/or understanding of sharia banking operations in implementing the sharia compliance function, who is held by the Head of Compliance. The Sharia Supervisory Board's supervision of sharia compliance is described as follows:

Supervision of Fund Collection in 2024

The Sharia Supervisory Board has supervised Bank Muamalat Indonesia's fund collection products and conducted a review of the conformity of fund collection products with the DSN-MUI fatwa. From this supervision, there were no fund collection products that conflicted with the DSN-MUI fatwa.

Produk Penghimpunan Dana

Berikut kami uraikan produk penghimpunan dana Bank Muamalat sebagai berikut:

Jenis Produk Product Type	Nama Produk Product Name
Tabungan Saving	• Tabungan iB Hijrah iB Hijrah Saving • Tabungan iB Hijrah Haji iB Hijrah Haji Saving • Tabungan iB Hijrah Rencana iB Hijrah Rencana Saving • Tabungan iB Hijrah Valas iB Hijrah Valas Saving • Tabungan iB Hijrah Prima iB Hijrah Prima Saving • Tabungan iB Hijrah Bisnis iB Hijrah Bisnis Saving • Tabungan iB Muamalat Sahabat iB Muamalat Sahabat Saving • TabunganKu • Tabungan Simple iB Simple iB Saving • Tabungan Ib Hijrah Pensiun iB Hijrah Pension Saving
Giro Current Account	• Giro iB Hijrah iB Hijrah Current Account • Giro iB Hijrah Ultima iB Hijrah Ultima Current Account
Deposito Time Deposit	Deposito iB Hijrah iB Hijrah Deposit

Pengawasan terhadap Penyaluran Dana pada tahun 2024

Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pengawasan atas produk penyaluran dana Bank Muamalat Indonesia dan melakukan kajian atas kesesuaian produk penyaluran dana dengan fatwa DSN-MUI. Dari pengawasan tersebut, tidak terdapat produk-produk penyaluran dana yang bertentangan dengan fatwa DSN-MUI.

Produk Penyaluran Dana

Berikut kami uraikan produk penyaluran dana Bank Muamalat sebagai berikut:

Jenis Produk Product Type	Nama Produk Product Name
Produk Pembiayaan Financing Product	• KPR iB Hijrah • Multiguna iB Hijrah • iB Asset Refinance Hijrah • iB Investasi Hijrah • iB Properti Bisnis Hijrah • iB Modal Kerja Hijrah • iB Modal Kerja Konstruksi Developer Hijrah • iB Modal Kerja kepada LKS Hijrah • iB Pembiayaan Rekening Koran Syariah Hijrah • iB Koperasi Segmen Konsumer Hijrah • iB Multifinance Hijrah • iB Pensiun Hijrah • Pembiayaan Pro Hajj Khusus Special Pro Hajj Financing • Pembiayaan Kepemilikan Emas: Solusi Emas Hijrah Gold Ownership Financing: Gold Hijrah Solution

Pengawasan terhadap Layanan pada tahun 2024

Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pengawasan atas layanan Bank Muamalat Indonesia dan melakukan kajian atas kesesuaian layanan dengan fatwa DSN-MUI. Dari pengawasan tersebut, tidak terdapat layanan-layanan yang bertentangan dengan fatwa DSN-MUI.

Fund Collection Products

Below we describe Bank Muamalat's fund collection products as follows:

Supervision of Fund Distribution in 2024

The Sharia Supervisory Board has supervised Bank Muamalat Indonesia's fund distribution products and conducted a review of the conformity of fund distribution products with the DSN-MUI fatwa. From this supervision, there were no fund distribution products that conflicted with the DSN-MUI fatwa.

Fund Distribution Products

Below we describe Bank Muamalat's fund distribution products as follows:

Supervision of Services in 2024

The Sharia Supervisory Board has supervised Bank Muamalat Indonesia's services and conducted a review of the suitability of services with the DSN-MUI fatwa. From this supervision, there were no services that conflicted with the DSN-MUI fatwa.



Jenis Produk Product Type	Nama Produk Product Name
Remittance	- Remittance iB Muamalat - Remittance BMI
Trade Finance	- Bank Garansi Bank Guarantee - Trade Finance-Ekspor Trade Finance-Export - Trade Finance-Impor Trade Finance-Import - SBLC (Standby L/C) - Letter of Credit - Produk/Layanan untuk Perdagangan Dalam Negeri SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) - Products/Services for Domestic Trade SKBDN (Domestic Letter of Credit) - Vendor Payment iB - Trade Salam iB
Layanan Corporate Corporate Services	- Layanan Muamalat <i>Cash Management-MADINA</i> Muamalat Cash Management Service -MADINA - Jasa Layanan Escrow Escrow Services - Layanan <i>Cash Pick-up and Delivery</i> Cash Pick-up and Delivety Services
e-Banking	<i>Mobile Banking</i> Muamalat Muamalat Mobile Banking <i>Internet Banking</i> Muamalat Muamalat Internet Banking - ATM Muamalat Muamalat ATM - Gerai Muamalat Muamalat Outlet - Layanan <i>Host to Host Web Service</i> Host to Host Web Services - Kartu ATM/Debit Shar-e ATM Card/Debit Share-e - Layanan Tarik Tunai di <i>merchant</i> Cash Withdrawal Service at merchants - Layanan Tarik dan Setor Tunai di PT Pos Indonesia Cash Withdrawal and Deposit Services at PT Pos Indonesia
Layanan 24 Jam 24 Hour Services	- Salam Muamalat <i>Virtual Account</i> - Sosial Media Social Media
Layanan Investasi dan <i>Wealth Management</i> Investment and Wealth Management Services	- Muamalat Investment Service - Bancassurance - Layanan Muamalat Prioritas Priority Muamalat Service <i>Safe Deposit Box</i> - Layanan Gerai Online Reksa Dana Syariah Sharia Mutual Fund Online Outlet Services
Kustodian Custodian	Bank Kustodian Custodian Bank

Pengawasan terhadap Usulan Produk/Aktivitas Baru

Dewan Pengawas Syariah melalui *Liasion Officer* (Sharia Compliance) telah melakukan kajian dan pembahasan usulan produk/aktivitas baru sepanjang tahun 2024 yakni layanan Bank Kustodian, *Bancassurance* Salam Hijrah Sejahtera (Sahaja), *Bancassurance* Salam Hijrah Arafah (Ashr) USD, Tabungan iB Hijrah Pensiun, dan Pembiayaan Kepemilikan Emas: Solusi Emas Hijrah.

Review, Endorsement atas Kebijakan, dan Standard Operational Procedure (SOP)

Sepanjang tahun 2024, Dewan Pengawas Syariah telah melakukan *review* dan/atau *endorsement* terhadap kebijakan dan prosedur Bank Muamalat agar sesuai dengan prinsip syarah, fatwa DSN-MUI dan ketentuan terkait yang dibantu oleh Unit Kepatuhan Syariah. Beberapa kebijakan dan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang menjadi perhatian Dewan Pengawas Syariah yakni:

- Kebijakan Umum Pelindungan Data Pribadi dan Kebijakan Umum Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Loose Leaf* atas Prosedur Pelaksanaan Standar Akad dengan perubahan yaitu:
 - Akad Realisasi LF-MMQ Pembelian
 - Akad Realisasi LF-MMQ Refinancing
 - Akad Realisasi LF-IMBT

Supervision of New Product/Activity Proposals

The Sharia Supervisory Board, through the *Liaison Officer* (Sharia Compliance), has conducted studies and discussions on proposed new products/activities throughout 2024, namely Custodian Bank services, Salam Hijrah Sejahtera (Sahaja) Bancassurance, Salam Hijrah Arafah (Ashr) USD Bancassurance, iB Hijrah Pension Savings, and Gold Ownership Financing: Gold Hijrah Solutions.

Review, Endorsement of Policies, and Standard Operational Procedures (SOP)

Throughout 2024, the Sharia Supervisory Board has reviewed and/or endorsed Bank Muamalat's policies and procedures so that they comply with sharia principles, DSN-MUI fatwas, and related provisions assisted by the Sharia Compliance Unit. Several policies and Standard Operational Procedures (SOP) that are of concern to the Sharia Supervisory Board are:

- General Policy for Protection of Personal Data and General Policy for Protection of Consumers and the Public in the Financial Services Sector.
- Loose Leaf* on Standard Contract Implementation Procedures with changes, namely:
 - LF-MMQ Purchase Realization Agreement
 - LF-MMQ Refinancing Realization Agreement
 - LF-IMBT Realization Agreement

4. Akad Tunggal Ijarah (Pembiayaan dan Non Pembiayaan)
5. Akad Tunggal IMFD (Pembiayaan dan Non Pembiayaan)

Pengawasan terhadap Fungsi Audit Intern Syariah

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan bisnis Bank, Dewan Pengawas Syariah memastikan penerapan prinsip syariah Bank melalui fungsi audit intern syariah. Fungsi audit syariah yang dimiliki oleh Bank, merupakan bagian dari Satuan Kerja Audit Intern yang dipimpin oleh Kepala SKAI yang merupakan Pejabat Eksekutif yang mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah dalam pelaksanaan fungsi audit intern syariah.

Pengawasan terhadap Fungsi Manajemen Risiko Syariah

Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap manajemen risiko syariah, dibantu oleh Head of Integrated Risk Management yang membawahi fungsi manajemen risiko syariah. Pengawasan secara efektif Dewan Pengawas Syariah terhadap pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko syariah, diuraikan sebagai berikut:

1. DPS turut mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko syariah, antara lain dengan:
 - a. DPS telah menyusun laporan pengawasan DPS berdasarkan kondisi *update* atas penerapan manajemen risiko dalam bentuk Laporan Profil Risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank yang dikirimkan kepada DPS di tiap-tiap periode pelaporan;
 - b. DPS memantau dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko syariah melalui pembahasan atas laporan Profil Risiko Bank di rapat rutin DPS tanggal 18 November 2024;
 - c. Bank telah melakukan kaji ulang atas ketentuan internal terkait penerapan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis Bank, yakni Surat Edaran (SE) Direksi Ketentuan Produk *Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik* (IMBT) Segmen Enterprise Banking yang berlaku pada 26 Juni 2024.

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko merupakan kebutuhan penunjang Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penerapan manajemen risiko syariah. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

4. Single Ijarah Agreement (Financing and Non-Financing)
5. IMFD Single Agreement (Financing and Non-Financing)

Supervision of the Sharia Internal Audit Function

In order to carry out its supervisory function over the Bank's business activities, the Sharia Supervisory Board ensures the implementation of the Bank's sharia principles through the sharia internal audit function. The sharia audit function owned by the Bank is part of the Internal Audit Work Unit, which is led by the Head of SKAI who is an Executive Officer who has knowledge and/or understanding of sharia banking operations in implementing the sharia internal audit function.

Supervision of the Sharia Risk Management Function

The Sharia Supervisory Board, in carrying out its supervisory function over sharia risk management, is assisted by the Head of Integrated Risk Management, who oversees the sharia risk management function. The Sharia Supervisory Board's effective supervision of the implementation of Sharia Risk Management is described as follows:

1. DPS also directs, monitors, and evaluates the implementation of Sharia Risk Management, including by:
 - a. DPS has prepared a DPS supervision report based on updated conditions regarding the implementation of risk management in the form of a Risk Profile Report and Bank Soundness Report, which is sent to DPS in each reporting period;
 - b. DPS monitors and evaluates the implementation of sharia risk management through discussion of the Bank Risk Profile report at the regular DPS meeting on November 18, 2024;
 - c. The Bank has carried out a review of internal provisions related to the application of sharia principles in the Bank's business activities, namely the Circular Letter (SE) of the Board of Directors on *Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik* (IMBT) Product Provisions for the Enterprise Banking Segment, which takes effect on June 26, 2024.

RISK MANAGEMENT CERTIFICATION

Competence and expertise in the field of risk management is a supporting need for the Sharia Supervisory Board in supervising, directing, monitoring, and evaluating the implementation of sharia risk management. This is also confirmed by the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Regulation No. 24 of 2022 concerning



2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

the Development of the Quality of Human Resources for Commercial Banks and Financial Services Authority Regulation No. 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

KEPEMILIKAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ownership of Sharia Supervisory Board Risk Management Certification

Nama Name	Jabatan Position	Level Sertifikat Certificate Level	Bidang Field	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikat Certification Body	Tanggal Dikeluarkan Date of Issue	Tanggal Kadaluarsa Expiry date	Program Pemeliharaan Maintenance Program
Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si	Ketua Chairman	4	Risk Management Certification	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Professional Certification Agency (BNSP)	7 November 2024 November 7, 2024	7 November 2027 November 7, 2027	-
Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH	Anggota Member	4	Risk Management Certification	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Professional Certification Agency (BNSP)	15 Februari 2025 February 15, 2025	15 Februari 2025 February 15, 2025	-
Dr. H. Agung Danarto, M.Ag	Anggota Member	4	Risk Management Certification	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Professional Certification Agency (BNSP)	24 Oktober 2024 October 24, 2024	24 Oktober 2027 October 24, 2027	-

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Kebijakan

Bank Muamalat senantiasa memberikan kesempatan yang sama bagi para pegawainya dalam hal pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum. Regulasi tersebut menegaskan, Bank wajib melakukan pengelolaan SDM dan pengembangan kualitas SDM yang dimiliki secara berkelanjutan.

Pengembangan kualitas SDM dimaksud, antara lain melalui kegiatan training peningkatan kompetensi kerja SDM. Bank juga diwajibkan menyediakan anggaran sebagai wujud dukungan pada pengembangan kompetensi tersebut.

Realisasi

Realisasi pengembangan kompetensi Dewan Pengawas Syariah diuraikan dalam "Profil Perusahaan" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

SHARIA SUPERVISORY BOARD COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

Policy

Bank Muamalat always provides equal opportunities for its employees in terms of developing Human Resources (HR) competencies, which refer to Financial Services Authority Regulation No. 24 of 2022 concerning the Development of the Quality of Commercial Bank Human Resources. This regulation emphasizes that banks are obliged to manage human resources and develop the quality of their human resources on an ongoing basis.

The development of HR quality includes, among other things, training activities to increase HR work competency. Banks are also required to provide a budget as a form of support for developing these competencies.

Realization

The realization of the competency development of the Sharia Supervisory Board is described in the "Company Profile" contained in this Annual Report.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan baik secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, memberi nasihat kepada Direksi serta bertugas memastikan Bank Muamalat Indonesia telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang Baik. Pengangkatan dan pemberhentian, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban Dewan Komisaris serta hal-hal lain terkait Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Bank, *Board Manual*, serta ketentuan-ketentuan lain berdasarkan *best practices* tata kelola perusahaan.

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta penetapan masa jabatan anggota Dewan Komisaris BMI ditetapkan melalui RUPS. Adapun untuk hasil pengawasan Dewan Komisaris terkait Perseroan, disampaikan Dewan Komisaris kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan melalui RUPS.

The Board of Commissioners is the Bank's organ tasked with carrying out supervision both in general and/or specifically in accordance with the articles of association, providing advice to the Board of Directors, and ensuring that Bank Muamalat Indonesia has implemented the principles of good corporate governance. Appointment and dismissal, duties and authority, as well as rights and obligations of the Board of Commissioners, as well as other matters related to the Board of Commissioners, are regulated in the Bank's Articles of Association and Board Manual, as well as other provisions based on corporate governance best practices.

Procedures for appointing and dismissing as well as determining the term of office of members of the BMI Board of Commissioners are determined through the GMS. As for the results of the Board of Commissioners' supervision regarding the Company, the Board of Commissioners will convey them to shareholders and stakeholders through the GMS.

DASAR HUKUM

Bank merujuk pada beberapa ketentuan sebagai dasar hukum untuk pengangkatan Dewan Komisaris yaitu:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

LEGAL BASIS

The Bank refers to several provisions as the legal basis for the appointment of the Board of Commissioners, namely:

1. Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets as amended by Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector.
2. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.
3. Law of the Republic of Indonesia No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking as amended by Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector.
4. Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Regulation No. 16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks.
5. Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.
6. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.



7. Peraturan OJK (POJK) Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan & Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
11. Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia.
12. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Nomor 07 tanggal 15 April 2025 yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.09-0194966 tanggal 19 April 2025. Kedua akta terakhir dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
7. OJK Regulation (POJK) No. 33 of 2024 concerning the Development and Strengthening of Investment Management in the Capital Market.
8. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies
9. Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies.
10. Financial Services Authority Regulation No. 27/POJK.03/2016 concerning Capability & Conformity Assessment for Main Parties of Financial Services Institutions.
11. Articles of Association of Bank Muamalat Indonesia.
12. Deed of Statement of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 07 dated April 15, 2025, regarding the receipt of Notification of Changes to Company Data has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia in accordance with letter No. AHU-AH.01.09-0194966 dated April 19, 2025. The last two deeds were made in the presence of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas Komisaris Utama

- Memimpin semua kegiatan Rapat Dewan Komisaris.
- Melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris secara tertulis yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Pada pelaksanaan teknisnya dibantu oleh Sekretaris Perusahaan.
- Komisaris Utama wajib memimpin RUPS. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan, RUPS dapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya.
- Mengkoordinasikan serta memastikan pelaksanaan tugas dan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Komite-komite Dewan Komisaris sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BMI antara lain mencakup:

1. Melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
2. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling kurang mencantumkan waktu kerja dan pengaturan rapat.
3. Mengawasi terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Duties of the President Commissioner

- Leading all Board of Commissioners Meeting activities.
- Summon for a Board of Commissioners Meeting in writing, which is delivered to all members of the Board of Commissioners by stating the agenda, date, time, and place of the meeting. The Corporate Secretary assists in the technical implementation.
- The President Commissioner is obliged to chair the GMS. In the event that the President Commissioner is absent, the GMS can be chaired by another member of the Board of Commissioners.
- Coordinate and ensure the implementation of duties and meetings of the Board of Commissioners and Committee meetings of the Board of Commissioners in accordance with applicable statutory provisions.

In general, the duties and responsibilities of the BMI Board of Commissioners include, among others:

1. Carry out duties and responsibilities in accordance with GCG principles.
2. Have work guidelines and procedures that are binding for each member of the Board of Commissioners, which at least include working hours and meeting arrangements.
3. Oversee the implementation of GCG in every Bank business activity at all levels of the organization.

4. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank dan keputusan RUPS.
5. Beritikad baik, dengan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha bank, dengan berupaya untuk mengambil tindakan dalam mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian dan/atau terjadinya kepailitan.
6. Mengawasi kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank termasuk pelaksanaan ketentuan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Memastikan Direksi mematuhi ketentuan internal Bank dan memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank.
8. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan pengurusan Bank.
9. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan penyusunan Visi, Misi serta rencana-rencana strategis Bank Muamalat lainnya seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar.
10. Memberikan pendapat dan saran serta pengesahan mengenai rencana bisnis Bank yang diusulkan Direksi.
11. Meneliti dan menelaah atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama.
12. Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari Komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris.
13. Mengikuti perkembangan kegiatan Bank, baik dari informasi-informasi internal yang disediakan oleh manajemen maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya.
14. Menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya.
15. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya dalam mengelola Bank Muamalat Indonesia.
16. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berjalan.
17. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
18. Memantau efektivitas praktik *Good Corporate Governance* antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance*.
4. Subject to the provisions of applicable laws and regulations, the Bank's Articles of Association, and GMS resolutions.
5. In good faith, with the principle of prudence and responsibility in carrying out duties for the interests and business of the bank, by endeavoring to strive to prevent the emergence or continuation of losses and/or bankruptcy.
6. Supervise the Board of Directors' policies in carrying out the management of the Bank, including the implementation of the provisions of the Articles of Association and resolutions of the General Meeting of Shareholders and applicable laws and regulations.
7. Ensure that the Board of Directors complies with the Bank's internal regulations and provides advice to the Board of Directors in carrying out the management of the bank.
8. Provide opinions and suggestions to the Board of Directors and all staff regarding the management of the Bank.
9. Provide opinions and suggestions to the Board of Directors and all staff regarding the preparation of Bank Muamalat's Vision, Mission, and other strategic plans as regulated in the Articles of Association.
10. Provide opinions and suggestions as well as approval regarding the Bank's business plan proposed by the Board of Directors.
11. Examine and review reports from the Board of Directors and all staff, especially those relating to specific tasks that have been decided together.
12. Research and review reports from Committees under the Board of Commissioners.
13. Follow developments in the Bank's activities, both from internal information provided by management and from external information originating from the media and from other sources.
14. Attend work/coordination meetings with the Board of Directors and all staff.
15. Make efforts to ensure that the Board of Directors and staff comply with statutory provisions and other regulations in managing Bank Muamalat Indonesia.
16. Prepare a work plan for the Board of Commissioners for the current year period.
17. Monitor and evaluate the implementation of the Bank's strategic policies.
18. Monitor the effectiveness of Good Corporate Governance practices, including by holding regular meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors to discuss the implementation of Good Corporate Governance.



19. Membentuk paling kurang Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Audit, Komite Tata Kelola Perusahaan dan memastikan komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
20. Dewan Komisaris wajib independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dalam arti melaksanakan tugas secara obyektif dan bebas dari tekanan serta kepentingan pihak mana pun, termasuk dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan dengan Direksi.
21. Wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
22. Menyetujui kebijakan APU & PPT serta mengawasi pelaksanaan program APU & PPT.
23. Melakukan kajian atas efektivitas sistem pengendalian internal, dengan menilai kompetensi dan jumlah sumber daya, ruang lingkup tugas dan kewenangan serta independensi dari Auditor Intern sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
24. Melakukan kajian atas efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal, dengan menilai kompetensi, independensi serta ruang lingkup tugas Auditor Eksternal.
19. Establish at least a Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee, Audit Committee, and Corporate Governance Committee, and ensure that the committees that have been formed carry out their duties effectively.
20. The Board of Commissioners must be independent in carrying out its duties and responsibilities, in the sense of carrying out its duties objectively and free from pressure and interests of any party, including in their relationships with each other and with the Board of Directors.
21. Must carry out active supervision of the implementation of the Compliance Function.
22. Approve the APU & CFT policy and supervise the implementation of the APU & CPT program.
23. Conduct a review of the effectiveness of the internal control system, by assessing the competency and number of resources, the scope of duties and authority, and the independence of the Internal Auditor in accordance with the Commercial Bank Internal Audit Function Implementation Standards (SPFAIB) issued by Bank Indonesia/Financial Services Authority.
24. Conduct a review of the effectiveness of the implementation of the External Auditor's duties by assessing the competence, independence, and scope of the External Auditor's duties.

HAK DAN WEWENANG

Hak dan wewenang Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

1. Hak meminta penjelasan dan menanyakan segala hal yang berhubungan dengan tugas-tugas Dewan Komisaris dan Direksi, dan Direksi wajib menyampaikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
2. Hak meminta semua keterangan yang berkenaan dengan Bank kepada Direksi dan Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Bank sebagaimana diperlukan para anggota Dewan Komisaris melalui Dewan Komisaris.
3. Pembagian kerja dan keanggotaan Komite di antara para Anggota Komisaris diatur oleh anggota Dewan Komisaris sendiri dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.
4. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya, dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.

RIGHTS AND AUTHORITIES

The rights and authorities of the Bank's Board of Commissioners are as follows:

1. The right to request explanations and ask questions about all matters relating to the duties of the Board of Commissioners and the Board of Directors, and the Board of Directors is obliged to provide explanations regarding all matters asked by the Board of Commissioners.
2. The right to request all information relating to the Bank from the Board of Directors, and the Board of Directors must provide all information relating to the Bank as required by the members of the Board of Commissioners through the Board of Commissioners.
3. The division of work and Committee membership among the Commissioners is regulated by the members of the Board of Commissioners themselves, and for the smooth running of their duties, the Board of Commissioners may be assisted by a Secretary appointed by the Board of Commissioners.
4. At any time, the Board of Commissioners, based on a resolution of the Board of Commissioners Meeting, may temporarily dismiss a member of the Board of Directors from their position by stating the reasons, with the provisions as outlined in the Limited Liability Company Law.

5. Berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, Dewan Komisaris berwenang memberikan kekuasaan sementara untuk menjalankan tindakan pengurusan Bank dan mewakili Bank terhadap pihak lain kepada seseorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan Dewan Komisaris, jika oleh sebab apa pun jabatan anggota Direksi lowong dan/atau Bank tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi.
6. Tiap anggota Dewan Komisaris memiliki hak untuk menerima honorarium dan tunjangan lain sesuai yang ditetapkan sesuai dengan Anggaran Dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Based on the resolution of the Board of Commissioners' meeting, the Board of Commissioners has the authority to grant temporary powers to carry out management actions of the Bank and represent the Bank to other parties to one or more of them at the expense of the Board of Commissioners if, for any reason, the position of a member of the Board of Directors is vacant and/or the Bank does not have a single member of the Board of Directors.
6. Each member of the Board of Commissioners has the right to receive an honorarium and other benefits as determined in accordance with the Articles of Association or resolutions of the General Meeting of Shareholders.

PEDOMAN KERJA/PIAGAM DEWAN KOMISARIS

Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris tertuang pada *Board Manual*. Pedoman kerja tersebut bertujuan untuk mempermudah Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Pedoman kerja Dewan Komisaris Bank Muamalat terus dievaluasi dan diperbarui secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat wajib mematuhi pedoman dan tata tertib kerja tersebut untuk dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efisien, efektif, transparan, independen dan akuntabel. Dasar penyusunan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris Bank Muamalat mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
4. Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan;
5. Anggaran Dasar Bank
6. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

BOARD OF COMMISSIONERS WORK GUIDELINES/CHARTER

The Board of Commissioners' work guidelines and procedures are contained in the Board Manual. These work guidelines aim to make it easier for the Board of Commissioners to carry out their duties and responsibilities. The work guidelines of the Board of Commissioners of Bank Muamalat continue to be evaluated and updated periodically, at least once in 3 (three) years with reference to the laws and regulations in force in Indonesia.

Each member of the Board of Commissioners of Bank Muamalat is obliged to comply with the work guidelines and procedures to be able to carry out the supervisory function efficiently, effectively, transparently, independently, and accountably. The basis for preparing the work guidelines and procedures for the Board of Commissioners of Bank Muamalat refers to the following provisions:

1. Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets as amended by Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector.
2. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.
3. Law of the Republic of Indonesia No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking as amended by Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector.
4. OJK Regulations and OJK Circular Letters regarding the implementation and organs of Corporate Governance;
5. Bank Articles of Association
6. Other related provisions and laws and regulations.



Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris Bank Muamalat merujuk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Board Manual Bank Muamalat, yang antara lain meliputi:

1. Fungsi
2. Komposisi dan Persyaratan
3. Pengangkatan dan Masa Jabatan
4. Rangkap Jabatan
5. Pengunduran Diri dan Pemberhentian
6. Komisaris Independen
7. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas
8. Etika Jabatan
9. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
10. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
11. Rapat Dewan Komisaris
12. Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi
13. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
14. Komite-komite Dewan Komisaris
15. Larangan Terhadap Dewan Komisaris

KRITERIA DEWAN KOMISARIS

Bank Muamalat telah menetapkan kriteria Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam lima tahun sebelum pengangkatan tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan atau Laporan Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

The guidelines and work procedures of the Board of Commissioners of Bank Muamalat refer to the provisions of the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks, Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and the Bank Muamalat Board Manual, which include:

1. Function
2. Composition and Requirements
3. Appointment and Term of Office
4. Concurrent Positions
5. Resignation and Dismissal
6. Independent Commissioner
7. Orientation and Competency Improvement Program
8. Position Ethics
9. Duties and Obligations of the Board of Commissioners
10. Rights and Authorities of the Board of Commissioners
11. Board of Commissioners Meeting
12. Working Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors
13. Evaluation of the Performance of the Board of Commissioners
14. Committees of the Board of Commissioners
15. Prohibition against the Board of Commissioners

BOARD OF COMMISSIONERS CRITERIA

Bank Muamalat has established the following criteria for the Board of Commissioners:

1. Have good character, morals, and integrity.
2. Capable of carrying out legal actions.
3. In the five years prior to appointment, he/she has never been a member of the Board of Directors or Board of Commissioners during his tenure:
 - i. Never held an annual GMS.
 - ii. His/her responsibilities as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners have never been accepted by the GMS, or he/she has never provided his/her responsibilities as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS.
 - iii. Has ever caused a company that obtained permission, approval, or registration from the Financial Services Authority to fail to fulfill its obligation to submit an Annual Report and/or Financial Statement to the Financial Services Authority.

4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
5. Mempunyai komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Mempunyai komitmen terhadap pengembangan kegiatan usaha Bank Syariah yang sehat.
7. Tidak sedang menjalani konsekuensi hasil akhir dari penilaian kembali pihak utama dengan predikat tidak lulus dan/atau tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
8. Menjalani masa tunggu atau *cooling off* dengan ketentuan:
 - a. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.
 - b. Masa tunggu sebagaimana dimaksud berlaku bagi:
 - mantan direktur utama pada Bank yang bersangkutan; dan
 - mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan,
9. Tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.
10. Memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi (keahlian) yang memadai di bidang yang dibutuhkan dalam pengelolaan Bank dan relevan dengan jabatannya.
11. Mempunyai pengetahuan di bidang perbankan dan perbankan syariah yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
12. Mempunyai kemauan dan kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BMI agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah di bidang perbankan syariah.
13. Mempunyai pengetahuan dan pemahaman dalam penerapan manajemen risiko.
14. Tidak mempunyai kredit/pembiayaan macet.
15. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
4. Never been convicted of committing a criminal offense mentioned in Law No. 8 of 2010 concerning the Crime of Money Laundering, a crime that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector, within the last 20 (twenty) years before being nominated.
5. Have a commitment to comply with applicable laws and regulations including Bank rules and regulations and support the policies of the Financial Services Authority.
6. Have a commitment to developing healthy Sharia Bank business activities.
7. Not currently undergoing the consequences of the final results of the main party's reassessment with the predicate of not passing and/or not being included in the list of not passing.
8. Undergo a waiting or cooling-off period with the following conditions:
 - a. Former members of the Board of Directors or Executive Officers or parties who have a relationship with the Bank who may influence the person's ability to act independently must undergo a cooling-off period of at least 1 (one) year before becoming an Independent Commissioner at the Bank concerned.
 - b. The cooling-off period as intended applies to:
 - former president director of the Bank concerned; and
 - former member of the Board of Directors who supervised the supervisory function or Executive Officer who carried out the supervisory function at the Bank concerned,
9. Never directly or indirectly involved in acts of engineering and deviant practices, breach of contract, or other acts that are detrimental to the company where the person concerned works or has worked.
10. Have adequate knowledge and/or competence (expertise) in the fields required in Bank management and relevant to the position.
11. Have adequate knowledge in the banking and sharia banking sector that is relevant to the position.
12. Have the will and ability to supervise BMI's business activities so that they comply with prudential principles and sharia principles in the field of sharia banking.
13. Have knowledge and understanding in implementing risk management.
14. Do not have bad credit/financing.
15. Have never been declared bankrupt or been a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt within the last 5 (five) years before being nominated.



KETENTUAN MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Bank Muamalat telah menetapkan dalam anggaran dasar mengenai periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris yakni paling lama 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) periode masa jabatan yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS. Ketentuan atas masa jabatan tersebut tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatan berakhir dengan menyebutkan alasan pemberhentian. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi. Adapun untuk pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.

Dewan Komisaris dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun. Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya, maka masa jabatan penggantinya ialah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya. Selanjutnya apabila terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris lainnya yang telah ada.

Jabatan anggota Dewan Komisaris dinyatakan berakhir apabila anggota Dewan Komisaris tersebut diberhentikan melalui RUPS, mengundurkan diri, dan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meninggal dunia atau masa jabatannya berakhir.

TERMS OF SERVICE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Bank Muamalat has determined in its articles of association the term of office for members of the Board of Commissioners, namely a maximum of 5 (five) years for 1 (one) term of office starting from the effective date of appointment of members of the Board of Commissioners by the GMS. The provisions regarding the term of office do not reduce the right of the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners at any time before the term of office ends by stating the reasons for the dismissal. Every proposal for replacement and/or appointment of members of the Board of Commissioners to the GMS must consider the recommendations of the committee that carries out the nomination function. As for the dismissal or replacement of Independent Commissioners before the term of office ends, they must obtain prior approval from the Financial Services Authority before being decided at the GMS.

The Board of Commissioners can serve a maximum of 2 (two) terms of office with 1 (one) term of office of a maximum of 5 (five) years. In the event that a member of the Board of Commissioners resigns or is dismissed before his/her term of office, the term of office of his/her replacement is the remaining term of office of the member of the Board of Commissioners he/she replaced. Furthermore, if there are additional members of the Board of Commissioners, the term of office of that member of the Board of Commissioners will end at the same time as the term of office of the other existing Board of Commissioners ends.

The term of office of a member of the Board of Commissioners is declared ended if the member of the Board of Commissioners is dismissed at the GMS, resigns, and no longer fulfills the requirements as a member of the Board of Commissioners based on the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations, dies or their term of office ends.

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 November 2022, berikut ini adalah susunan anggota Dewan Komisaris beserta dasar pengangkatannya:

COMPOSITION AND BASIS FOR APPOINTMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 29, 2022, the following is the composition of the members of the Board of Commissioners and the basis for their appointment:

Nama Name	Jabatan Position	RUPS Pengangkatan Appointment GMS	Persetujuan OJK OJK Approval	Tanggal Efektif Effective Date	Pengangkatan Kembali Reappointment
Mardiasmo ^{*)}	Komisaris Utama Independen Independent President Commissioner	29 November 2022 (Komisaris Utama Independen) November 29, 2022 (Independent President Commissioner)	-	-	-
Sartono	Komisaris Independen Independent Commissioner	24 Juni 2022 (Komisaris Independen) June 24, 2022 (Independent Commissioner)	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-8/D.03/2023 tanggal 16 Januari 2023 Copy of Decree of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-8/D.03/2023 dated January 16, 2023	16 Januari 2023 January 16, 2023	RUPST 27 Juni 2024 (Komisaris Independen) AGMS June 27, 2024 (Independent Commissioner)
Amin Said Husni ^{**)}	Komisaris Independen/Plt. Komisaris utama Independent Commissioner/ Acting President Commissioner	24 Juni 2022 (Komisaris Independen) June 24, 2022 (Independent Commissioner)	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-9/D.03/2023 tanggal 16 Januari 2023 Copy of Decree of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-9/D.03/2023 dated January 16, 2023	16 Januari 2023 January 16, 2023	RUPST 27 Juni 2024 (Komisaris Utama Independen) AGMS June 27, 2024 (Independent President Commissioner)
Andre Mirza Hartawan	Komisaris Commissioner	24 Juni 2022 (Komisaris) June 24, 2022 (Commissioner)	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-114/D.03/2022 tanggal 19 Juli 2022 Copy of Decree of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-114/D.03/2022 dated July 19, 2022	19 Juli 2022 July 19, 2022	RUPST 27 Juni 2024 (Komisaris) AGMS June 27, 2024 (Commissioner)

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPST tanggal 27 Juni 2024.

Has stopped serving in accordance with the AGMS resolution on June 27, 2024.

^{**)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.

Has stopped serving in accordance with the EGMS resolution on December 11, 2024.



Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Juni 2024, berikut ini adalah susunan anggota Dewan Komisaris beserta dasar pengangkatannya:

Based on the results of the Annual General Meeting of Shareholders on June 27, 2024, the following is the composition of the members of the Board of Commissioners and the basis for their appointment:

Nama Name	Jabatan Position	RUPS Pengangkatan Appointment GMS	Persetujuan OJK OJK Approval	Tanggal Efektif Effective Date	Pengangkatan Kembali Reappointment
Amin Said Husni ^{*)}	Komisaris Utama Independen Independent President Commissioner	27 Juni 2024 (Komisaris Independen) June 27, 2024 (Independent Commissioner)	-	-	-
Sartono	Komisaris Independen Independent Commissioner	24 Juni 2022 (Komisaris Independen) June 24, 2022 (Independent Commissioner)	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-8/D.03/2023 tanggal 16 Januari 2023 Copy of Decree of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-8/D.03/2023 dated January 16, 2023	16 Januari 2023 January 16, 2023	RUPST 27 Juni 2024 (Komisaris Independen) AGMS June 27, 2024 (Independent Commissioner)
Andre Mirza Hartawan	Komisaris/Plt. Komisaris Utama Commissioner/Acting President Commissioner	24 Juni 2022 (Komisaris) June 24, 2022 (Commissioner)	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-114/D.03/2022 tanggal 19 Juli 2022 Copy of Decree of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-114/D.03/2022 dated July 19, 2022	19 Juli 2022 July 19, 2022	RUPST 27 Juni 2024 (Komisaris) AGMS June 27, 2024 (Commissioner)

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the EGMS resolution on December 11, 2024.

Susunan Dewan Komisaris Bank mengalami perubahan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Desember 2024, berikut ini adalah susunan anggota Dewan Komisaris beserta dasar pengangkatannya:

The composition of the Bank's Board of Commissioners underwent changes based on the results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on December 11, 2024. The following is the composition of the members of the Board of Commissioners and the basis for their appointment:

Nama Name	Jabatan Position	RUPS Pengangkatan Appointment GMS	Persetujuan OJK OJK Approval	Tanggal Efektif Effective Date	Pengangkatan Kembali Reappointment
Sapto Amal Damandari	Komisaris Utama Independen Independent President Commissioner	11 Desember 2024 (Komisaris Utama Independen) December 11, 2024 (Independent President Commissioner)	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-21/D.03/2025 24 Maret 2025 Copy of Decree of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-21/D.03/2025 dated March 24, 2025	24 Maret 2025 March 24, 2025	-

Nama Name	Jabatan Position	RUPS Pengangkatan Appointment GMS	Persetujuan OJK OJK Approval	Tanggal Efektif Effective Date	Pengangkatan Kembali Reappointment
Sartono	Komisaris Independen Independent Commissioner	24 Juni 2022 (Komisaris Independen) June 24, 2022 (Independent Commissioner)	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP- 8/D.03/2023 tanggal 16 Januari 2023 16 Januari 2023 Copy of Decree of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP- 8/D.03/2023 dated January 16, 2023	16 Januari 2023 January 16, 2023	RUPST 27 Juni 2024 (Komisaris Independen) AGMS June 27, 2024 (Independent Commissioner)
Andre Mirza Hartawan	Komisaris Commissioner	24 Juni 2022 (Komisaris) June 24, 2022 (Commissioner)	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP- 114/D.03/2022 tanggal 19 Juli 2022 Copy of Decree of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP- 114/D.03/2022 dated July 19, 2022	19 Juli 2022 July 19, 2022	RUPST 27 Juni 2024 (Komisaris) AGMS June 27, 2024 (Commissioner)

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS PADA BANK MUAMALAT

SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AT BANK MUAMALAT

Nama Name	Jabatan Position	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage	Jumlah Kepemilikan Saham Number of Share Ownership			Jumlah Nominal Saham (Rp) Nominal Value of Shares (Rp)		
			Seri A Series A	Seri B Series B	Seri C Series C	Seri A Series A	Seri B Series B	Seri C Series C
Sapto Amal Damandari	Komisaris Utama Independent President Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Sartono	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Andre Mirza Hartawan	Komisaris Commissioner	5,19%	-	113.000.000	1.618.033.333	-	16.950.000.000	72.811.500.000

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Kebijakan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia mengacu pada ketentuan POJK Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang mana anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan:

- Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;

POLICY ON CONCURRENT POSITIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The policy of holding concurrent positions for members of the Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia refers to the provisions of POJK No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, where members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions:

- As a member of the board of directors, member of the board of commissioners, member of the sharia supervisory board, or executive officer at a financial institution or financial company, whether a bank or non-bank;



- b. Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
- c. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
- d. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
- e. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal:

- a. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
- b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada Bank dan/atau kelompok usaha Bank; dan/atau
- c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.

- b. As a member of the board of directors, member of the board of commissioners, member of the sharia supervisory board, or executive officer in more than 1 (one) non-financial institution or company, whether domiciled in Indonesia or abroad;
- c. In the area of functional duties in bank financial institutions and/or non-bank financial institutions located at home or abroad;
- d. In other positions that may give rise to a conflict of interest in carrying out their duties as a member of the Board of Commissioners; and/or
- e. In other positions in accordance with the provisions of statutory regulations.

Excluding dual positions in the case of:

- a. A member of the Board of Commissioners serves as a member of the board of directors, a member of the board of commissioners or an executive officer who carries out supervisory functions in 1 (one) non-bank subsidiary company controlled by the Bank;
- b. A Non-Independent Commissioner carries out functional duties from a shareholder of the Bank in the form of a legal entity in the Bank and/or the Bank's business group; and/or
- c. A member of the Board of Commissioners holds a position in a non-profit organization or institution, as long as it does not result in the person concerned neglecting the implementation of duties and responsibilities as a member of the Board of Commissioners.

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS BANK MUAMALAT INDONESIA

Concurrent Position of the Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan Lain di Bank Muamalat Indonesia Other Positions at Bank Muamalat Indonesia	Jabatan pada Lembaga atau Perusahaan Lain Position in Other Institutions or Companies	Nama Lembaga atau Perusahaan Lain Name of Other Institution or Company
Sapto Amal Damandari	Komisaris Utama Independen Independent President Commissioner	-	Direktur Utama President Director	SAO Advisory
			Ketua Komite Audit ^{*)} Chairman of the Audit Committee	Universitas Gadjah Mada Gajah Mada University
Sartono	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-
Andre Mirza Hartawan	Komisaris Commissioner	-	Komisaris Utama President Commissioner	PT Wisma Seratus Sejahtera
		-	Dosen/Pengajar ^{*)} Lecturer	Institute Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Ahmad Dahlan Institute of Technology and Business

^{*)} Tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan (ref. pasal 46 ayat (2) POJK 17 Tahun 2023).
Not counted as concurrent positions (ref. article 46 paragraph (2) POJK 17 of 2023).

PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

Program orientasi diperuntukan sebagai media pengenalan Perusahaan kepada anggota Dewan Komisaris baru yang dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan, salah satunya adalah ketentuan peraturan perundang-undangan. Prosedur Program Orientasi Bank Muamalat mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Program Orientasi mengenai BMI wajib diberikan kepada anggota Dewan Komisaris yang baru pertama kali menjabat di BMI setelah pengangkatan Komisaris baru dalam RUPS.
2. Tanggungjawab pelaksanaan Program Orientasi ada pada Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama berhalangan maka tanggung jawab pelaksanaan program orientasi berada pada Direktur Utama dan disiapkan oleh Corporate Secretary.
3. Materi yang diberikan pada Program Orientasi meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Gambaran mengenai BMI berkaitan dengan visi, misi, tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, manajemen risiko dan berbagai masalah strategis lainnya.
 - b. Penjelasan mengenai produk dan aktivitas jasa perbankan BMI.
 - c. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh BMI.
 - d. Tanggung jawab hukum anggota Dewan Komisaris.
 - e. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan audit eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta tugas dan peran komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
 - f. Penjelasan mengenai kewajiban, tugas, tanggung jawab dan hak-hak Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi serta aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan terkait.
 - g. *Team building*. Dalam kegiatan ini menyertakan seluruh anggota Dewan Komisaris, baik yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya (jika memungkinkan) dengan tujuan mewujudkan kekompakan dan kerjasama tim sebagai Dewan Komisaris.
4. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas BMI, pengenalan dengan para Karyawan Senior dan para Karyawan BMI serta program lainnya.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW COMMISSIONERS

The orientation program is intended as a medium for introducing the Company to new members of the Board of Commissioners, which is carried out based on several considerations, one of which is the provisions of statutory regulations. Bank Muamalat Orientation Program procedures include the following:

1. An orientation program regarding BMI must be given to members of the Board of Commissioners who are serving at BMI for the first time after the appointment of a new Commissioner at the GMS.
2. Responsibility for implementing the Orientation Program lies with the President Commissioner. If the President Commissioner is absent, the responsibility for implementing the orientation program lies with the President Director and is prepared by the Corporate Secretary.
3. The material provided in the Orientation Program includes the following:
 - a. An overview of BMI relates to vision, mission, goals, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risk management, and various other strategic issues.
 - b. Explanation of BMI banking services products and activities.
 - c. Implementation of Good Corporate Governance principles by BMI.
 - d. Legal responsibilities of members of the Board of Commissioners.
 - e. Explanations relating to delegated authority, internal audit and external audit, internal control systems and policies, as well as the duties and roles of committees formed by the Board of Commissioners.
 - f. Explanation of the obligations, duties, responsibilities, and rights of the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, and Board of Directors as well as related rules and regulations.
 - g. Team building. This activity includes all members of the Board of Commissioners, both those who have just served and those who have served before (if possible), with the aim of creating cohesiveness and teamwork as a Board of Commissioners.
4. The orientation program provided can be in the form of presentations, meetings, or visits to BMI facilities, introductions to Senior Employees and BMI Employees as well as other programs.



PEMBIDANGAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Bank Muamalat membentuk komite-komite tingkat Dewan Komisaris yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Keanggotaan setiap anggota Dewan Komisaris pada masing-masing komite telah sesuai dengan kompetensi, pengalaman, dan bidang masing-masing anggota. Uraian mengenai komite-komite tingkat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

DIVISION OF SUPERVISORY DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners of Bank Muamalat formed committees at the Board of Commissioners level, which aim to assist in carrying out the duties and responsibilities of the Board of Commissioners. The membership of each member of the Board of Commissioners in each committee is in accordance with the competency, experience, and field of each member. A description of the committees at the Board of Commissioners level is as follows:

Nama Name	Keanggotaan Komite Level Komisaris Commissioner Level Committee Membership	Jabatan Position
Sapto Amal Damandari	Komite Audit Audit Committee	Ketua Chairman
	Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination Committee	Ketua Chairman
	Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee	Anggota Member
	Komite Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Committee	Anggota Member
Sartono	Komite Audit Audit Committee	Anggota Member
	Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee	Ketua Chairman
Andre Mirza Hartawan	Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee	Anggota Member
	Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination Committee	Anggota Member
	Komite Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Committee	Ketua Chairman

KEPUTUSAN YANG PERLU MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pasal 49 ayat (6) dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank. Ketentuan itu tidak termasuk dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah.

DECISIONS THAT REQUIRE APPROVAL FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

Following up on Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, Article 49, Paragraph (6) in carrying out supervision, the Board of Commissioners is prohibited from participating in decision-making on the Bank's operational activities. This provision is not included in the provision of funds to related parties in accordance with the Financial Services Authority Regulations regarding legal lending limits for granting credit and providing large funds for commercial banks and the Financial Services Authority Regulations regarding legal lending limits for distributing funds and distributing large funds for sharia commercial banks.

Ketentuan dimaksud juga mengatur bahwa Dewan Komisaris dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan atas hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas ialah bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris. Sehingga, tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

The provisions in question also stipulate that the Board of Commissioners can participate in decision-making on other matters stipulated in the Bank's Articles of Association or statutory regulations. Decision-making on Bank operational activities by the Board of Commissioners, as referred to above, is part of the supervisory duties of the Board of Commissioners. Thus, it does not negate the responsibility of the Board of Directors for the implementation of Bank management.

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko merupakan sebuah kebutuhan yang harus dikuasai Dewan Komisaris, sehingga dapat mengawasi pelaksanaan manajemen risiko Bank secara efektif. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2022 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum yang mengatur bahwa Dewan Komisaris dan Direksi wajib memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang manajemen risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi terkait.

RISK MANAGEMENT CERTIFICATION

Competence and expertise in the field of risk management is a requirement that must be mastered by the Board of Commissioners so that it can supervise the implementation of the Bank's risk management effectively. This is also confirmed by the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 24 of 2022 concerning the Development of the Quality of Human Resources for Commercial Banks and the Circular Letter of the Financial Services Authority No. 28/SEOJK.03/2022 concerning Risk Management Certification for Human Resources of Commercial Banks, which regulates that the Board of Commissioners and the Board of Directors are required to have Work Competency Certification in the field of risk management issued by the relevant Professional Certification Institute.

KEPEMILIKAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO DEWAN KOMISARIS

Ownership of Risk Management Certification for the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Level Sertifikat Certificate Level	Bidang Field	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikat Certification Body	Tanggal Dikeluarkan Date of Issue	Tanggal Kadaluarsa Expiration Date	Program Pemeliharaan Maintenance Program
Sapto Amal Damandari	Komisaris Utama Independen Independent President Commissioner	6	Risk Management Certification	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Professional Certification Agency (BNSP)	24 Januari 2025 January 24, 2025	24 Januari 2028 January 24, 2028	-
Andre Mirza Hartawan	Komisaris Commissioner	6	Risk Management Certification	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Professional Certification Agency (BNSP)	17 September 2024 September 17, 2024	17 September 2027 September 17, 2027	-
Sartono	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	Risk Management Certification	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Professional Certification Agency (BNSP)	27 September 2024 September 17, 2024	27 September 2027 September 17, 2027	-



PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Kebijakan

Bank Muamalat senantiasa memberikan kesempatan yang sama bagi para pegawainya dalam hal pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum. Regulasi tersebut menegaskan, Bank wajib melakukan pengelolaan SDM dan pengembangan kualitas SDM yang dimiliki secara berkelanjutan.

Pengembangan kualitas SDM dimaksud, antara lain melalui kegiatan *training* peningkatan kompetensi kerja SDM. Bank juga diwajibkan menyediakan anggaran sebagai wujud dukungan pada pengembangan kompetensi tersebut.

Realisasi

Realisasi pengembangan kompetensi Dewan Komisaris diuraikan dalam "Profil Perusahaan" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank telah memiliki pengaturan atas pengelolaan benturan kepentingan. Dalam hal terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon anggota Dewan Komisaris sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada Bank, calon yang bersangkutan mengungkapkan benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.

Apabila terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris tidak boleh mengambil tindakan yang berpotensi dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank Umum Syariah (BUS) dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusannya.

Anggota Dewan Komisaris juga diharuskan untuk senantiasa mengutamakan kepentingan Bank dan tidak mengurangi keuangan Bank dalam hal terjadi benturan kepentingan dan menghindarkan diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.

BOARD OF COMMISSIONERS COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

Policy

Bank Muamalat always provides equal opportunities for its employees in terms of developing Human Resources (HR) competencies, which refer to Financial Services Authority Regulation No. 24 of 2022 concerning the Development of the Quality of Commercial Bank Human Resources. This regulation emphasizes that banks are obliged to manage human resources and develop the quality of their human resources on an ongoing basis.

The development of HR quality includes, among other things, training activities to increase HR work competency. Banks are also required to provide a budget as a form of support for developing these competencies.

Realization

The realization of the Board of Commissioners' competency development is described in the "Company Profile" contained in this Annual Report.

MANAGEMENT OF CONFLICTS OF INTEREST OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In accordance with the provisions of Article 80, Paragraph (4) of Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, the Bank has arrangements for managing conflicts of interest. In the event that there is a conflict of interest or potential conflict of interest of a prospective member of the Board of Commissioners in connection with the relevant candidate for the Bank, the relevant candidate shall disclose the conflict of interest in the fit and proper test process.

If a conflict of interest occurs, members of the Board of Commissioners may not take action that could potentially reduce assets or reduce profits of Sharia Commercial Banks (BUS) and must disclose conflicts of interest in every decision.

Members of the Board of Commissioners are also required to always prioritize the interests of the Bank and not reduce the Bank's finances in the event of a conflict of interest and avoid making decisions in situations and conditions where there is a conflict of interest.

Selanjutnya, Anggota Dewan Komisaris diminta untuk melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan Anggota Komisaris lain dan/atau anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank dan/atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Bank serta melakukan keterbukaan dalam hal pengambilan keputusan diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.

KEPUTUSAN, REKOMENDASI, DAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja Bank Muamalat Indonesia diimplementasikan dengan memberikan rekomendasi, saran, dan nasihat kepada Direksi oleh Dewan Komisaris melalui rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Pengawasan dan nasihat Dewan Komisaris juga disampaikan melalui komite-komite tingkat Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Tata Kelola Perusahaan yang pembahasannya disampaikan pada rapat Dewan Komisaris.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Prosedur Penilaian

Penilaian kinerja komite tingkat Dewan Komisaris mengacu pada POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, POJK No. 34/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, POJK No. 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta piagam kerja masing-masing komite. Dewan Komisaris kemudian menilai kinerja komite-komite tingkat Dewan Komisaris dengan metode *self-assessment* secara kolektif dan kolegal yang dilakukan secara berkala.

Kriteria Penilaian

Berikut merupakan dasar penilaian atas kinerja anggota komite tingkat Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya:

1. Pemenuhan Struktur Organisasi Komite
2. Ketersediaan Piagam/*Charter* Komite
3. Pelaksanaan Rapat Komite
4. Dokumentasi Hasil Rekomendasi Komite

Furthermore, members of the Board of Commissioners are asked to disclose their familial relationships, financial relationships, management relationships, and ownership relationships with other members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors and/or controlling shareholders of the Bank and/or other parties within the framework of the Bank's business as well as carry out transparency in the event that decisions are taken in the event of a conflict of interest.

DECISIONS, RECOMMENDATIONS, AND IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners' supervision of the performance of Bank Muamalat Indonesia is implemented by providing recommendations, suggestions, and advice to the Board of Directors by the Board of Commissioners through meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board. Supervision and advice to the Board of Commissioners is also conveyed through committees at the Board of Commissioners level, namely the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee, and the Corporate Governance Committee, the discussions of which are presented at Board of Commissioners meetings.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Assessment Procedure

The performance assessment of Board of Commissioners level committees refers to POJK No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Implementing the Work of the Audit Committee, POJK No. 34/POJK.04/2014 of 2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, POJK No. 17/2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, as well as the work charter of each committee. The Board of Commissioners then assesses the performance of Board of Commissioners level committees using a collective and collegial self-assessment method, which is carried out periodically.

Assessment Criteria

The following is the basis for assessing the performance of committee members at the Board of Commissioners level in carrying out their duties and responsibilities:

1. Fulfillment of Committee Organizational Structure
2. Availability of Committee Charter
3. Implementation of Committee Meetings
4. Documentation of Committee Recommendation Results



Hasil Penilaian

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh komite tingkat Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam membantu fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris. Penilaian tersebut berlandaskan atas kriteria penilaian dan kinerja komite-komite yang telah memberikan masukan dan saran kepada Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tanggung jawabnya.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Dewan Komisaris Bank Muamalat ialah sebagai berikut:

- a. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir melalui pemberitahuan tertulis kepada Bank.
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan pengunduran diri.
- c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
- d. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal disetujuinya pengunduran diri.
- e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - Diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris; dan
 - Hasil penyelenggaraan RUPS.
- f. Perseroan juga wajib menyampaikan ke OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengunduran diri efektif yaitu tanggal setelah pengunduran diri yang bersangkutan mendapat persetujuan dari RUPS, serah terima jabatan, atau mekanisme lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- g. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi terhadap pengunduran diri anggota Dewan Komisaris untuk menilai pengunduran diri dilakukan secara sukarela, terdapat unsur paksaan, atau kondisi lain.

Assessment Results

In 2024, the Board of Commissioners assesses that all committees at the Board of Commissioners level have carried out their duties and responsibilities well in assisting the supervisory function carried out by the Board of Commissioners. This assessment is based on the assessment criteria and performance of committees that have provided input and suggestions to the Board of Commissioners in accordance with their areas of responsibility.

MECHANISM FOR RESIGNATION AND DISMISSAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Referring to the applicable statutory provisions and the Company's Articles of Association, the mechanism for resignation and dismissal of the Board of Commissioners of Bank Muamalat is as follows:

- a. Members of the Board of Commissioners may resign from their positions before their term of office ends by means of written notification to the Bank.
- b. The Company is obliged to hold a GMS to decide on the request for resignation of the member of the Board of Commissioners within a period of no later than 90 (ninety) days from the date of receipt of the request for resignation.
- c. In the event that the Company does not hold a GMS within the time period as intended in letter b, then upon expiry of that time period, the resignation of a member of the Board of Commissioners becomes valid without requiring approval from the GMS.
- d. Members of the Board of Commissioners who resign can still be held accountable as members of the Board of Commissioners from the time of their appointment until the date the resignation is approved.
- e. The Company is obliged to disclose information to the public and submit it to the OJK no later than 2 (two) working days after:
 - Receipt of requests for resignation of members of the Board of Commissioners; and
 - Results of the GMS.
- f. The company is also obliged to submit it to the OJK no later than 10 (ten) days after the effective resignation, namely the date after the resignation in question receives approval from the GMS, handover of positions, or other mechanisms as regulated in the Company's Articles of Association.
- g. The Financial Services Authority has the authority to evaluate the resignation of members of the Board of Commissioners to assess whether the resignation was voluntary, there was an element of coercion, or other conditions.

Komisaris Independen

Independent Commissioners

Komisaris Independen ialah anggota Dewan Komisaris Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen. Pengangkatan Komisaris Independen Bank Muamalat Indonesia merujuk pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK No. 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Komisaris Independen bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan juga mewakili kepentingan pemegang saham minoritas. Selain itu, keberadaan Komisaris Independen bertujuan untuk mendorong terwujudnya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan dapat menempatkan kewajaran (*fairness*) serta kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan *stakeholders* dan *shareholders* minoritas.

KRITERIA KOMISARIS INDEPENDEN

Berdasarkan POJK No. 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan telah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
2. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen;
3. Memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan
4. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;

Independent Commissioners are members of the Bank's Board of Commissioners who have no financial, management, share ownership, and/or familial relationships with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, and/or controlling shareholders, including the ultimate controlling shareholder, or relationships with the Bank that could influence the person's ability to act independently. The appointment of the Independent Commissioner of Bank Muamalat Indonesia refers to OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and POJK No. 17/2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.

Independent Commissioners are responsible for supervising and also representing the interests of minority shareholders. Apart from that, the existence of Independent Commissioners aims to encourage the creation of a more objective work climate and environment that can promote fairness and equality between various interests, including the interests of stakeholders and minority shareholders.

INDEPENDENT COMMISSIONER CRITERIA

Based on POJK No. 17/2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks and Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who come from outside the Issuer or Public Company and have fulfilled the requirements as Independent Commissioners as follows:

1. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Issuer or Public Company in the following period;
2. Have adequate knowledge in the banking sector that is relevant to the position as Independent Commissioner;
3. Have experience in banking and/or finance
4. Does not own shares, either directly or indirectly, in the Issuer or Public Company;



5. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
6. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Berkaitan dengan POJK No. 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Bank Muamalat telah menyusun kriteria Komisaris Independen yang tertuang dalam Board Manual dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
- b. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen;
- c. Memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan
- d. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- e. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan;
- f. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- g. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.
- h. Masa tunggu sebagaimana dimaksud berlaku bagi:
 - mantan direktur utama pada Bank yang bersangkutan; dan
 - mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan.

5. Does not have affiliations with the Issuer or Public Company, member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, or major shareholder of the Issuer or Public Company; and
6. Does not have any direct or indirect business relationships related to the business activities of the Issuer or Public Company.

In connection with POJK No. 17/2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, and Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Bank Muamalat has developed the criteria for Independent Commissioners as stated in the Board Manual with the following provisions:

- a. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months, except for reappointment as Independent Commissioner of the Company in the following period;
- b. Have adequate knowledge in the banking sector that is relevant to the position as Independent Commissioner;
- c. Have experience in banking and/or finance
- d. Does not own shares either directly or indirectly in the Company;
- e. Does not have affiliations with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of the Company;
- f. Does not have any direct or indirect business relationships related to the Company's business activities;
- g. Former members of the Board of Directors or Executive Officers or parties who have a relationship with the Bank who may influence the person's ability to act independently must undergo a cooling-off period of at least 1 (one) year before becoming an Independent Commissioner at the Bank concerned.
- h. The cooling-off period as intended applies to:
 - former president director of the bank concerned; and
 - former members of the Board of Directors who supervised supervisory functions or Executive Officers who carried out supervisory functions at the Bank concerned.

JUMLAH KOMISARIS INDEPENDEN

Pada tahun 2024, komposisi anggota Dewan Komisaris Bank berdasarkan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024 berjumlah 3 (tiga) orang, dan 2 (dua) atau 67% di antaranya merupakan Komisaris Independen. Dengan demikian, jumlah Komisaris Independen Bank telah memenuhi POJK No. 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah yang mengatur paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen dan memenuhi Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang jumlah anggota Dewan Komisaris Bank yang mengatur jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Pernyataan Independensi Komisaris Independen Bank dituangkan dalam Surat Pernyataan Independensi yang ditandatangani oleh masing-masing Komisaris Independen yang memuat pernyataan bahwa Komisaris Independen tidak memiliki saham Bank serta tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen, pada saat beliau diangkat menjadi Komisaris Independen Bank.

Pernyataan Independensi yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Komisaris Independen juga mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;

NUMBER OF INDEPENDENT COMMISSIONERS

In 2024, the composition of members of the Bank's Board of Commissioners based on the EGMS on December 11, 2024, were 3 (three) people, and 2 (two) or 67% of them were Independent Commissioners. Thus, the number of Bank Independent Commissioners has complied with POJK No. 17/2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks and Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks, which regulates that at least 50% of the total members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners and comply with OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the number of members of the Bank's Board of Commissioners, which regulates that the number of Independent Commissioners must be at least 30% of the total number of members of the Board of Commissioners.

STATEMENT OF INDEPENDENCE OF INDEPENDENT COMMISSIONERS

The Statement of Independence of the Bank's Independent Commissioners is set out in a Statement of Independence signed by each Independent Commissioner, which contains a statement that the Independent Commissioner does not own shares in the Bank and has no financial or familial relationships with members of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as Major and Controlling Shareholders or any relationship with the bank, which could affect the ability to act independently, when was appointed as an Independent Commissioner of the Bank.

The Independence Statement signed by each member of the Independent Commissioner also includes the following:

1. Have good character, moral, and integrity;
2. Capable of carrying out legal actions;
3. Within 5 (five) years before appointment and during office:
 - a. Never declared bankruptcy;
 - b. Never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
 - c. Never been convicted of committing a criminal act that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector;



d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan f. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.	d. Never been a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners who during his tenure: i. Never held an annual GMS; ii. His/her accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or has never provided his/her accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS; and iii. Has ever caused a company that obtained a permit, approval, or registration from the Financial Services Authority to fail to fulfill its obligation to submit an annual report and/or financial statement to the Financial Services Authority. e. Have a commitment to comply with statutory regulations; and f. Have knowledge and/or expertise in the fields required by Issuers or Public Companies.

PEMENUHAN KRITERIA INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Fulfillment of Independence Criteria for Independent Commissioners

Kriteria Criteria	Komisaris Independen Independent Commissioner	
	Sapto Amal Damandari	Sartono
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya. Not a person who is working or having the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise activities of the concerned Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Issuer or Public Company in the following period.	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. Not owning shares, directly or indirectly, in the concerned Issuer or Public Company.	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. Not having Affiliation with the Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of the concerned Issuer or Public Company.	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. Not having business relationship, direct or indirectly, related to the business activities of the concerned Issuer or Public Company.	✓	✓

Direksi

Board of Directors

Direksi merupakan organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Bank Muamalat Indonesia untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili BMI, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

Anggota Direksi Bank Muamalat Indonesia senantiasa memberikan pikiran, tenaga, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban, rencana bisnis, dan target serta tujuan Bank sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Anggota Direksi juga senantiasa mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, dan mengedepankan kepentingan Bank, dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan keberlanjutan usaha Bank.

The Board of Directors is the Bank's organ with authority and full responsibility for managing Bank Muamalat Indonesia for the Bank's interests in accordance with the Bank's goals and objectives and representing BMI, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.

Members of the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia always give their thoughts, energy, attention, and full dedication to their duties, obligations, business plans, and targets and objectives of the Bank in accordance with applicable laws and regulations. Members of the Board of Directors also always comply with the Company's Articles of Association and statutory regulations and implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, fairness, and prioritizing the interests of the Bank, in order to increase added value for stakeholders and the sustainability of the Bank's business.

DASAR HUKUM

Penunjukan dan Pengangkatan Direksi Bank Muamalat Indonesia merujuk pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

LEGAL BASIS

The selection and appointment of the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia refer to several provisions, including:

1. Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets as amended by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.
2. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.
3. Law of the Republic of Indonesia No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking as amended by Law No. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector.
4. Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Regulation No. 16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks.
5. Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.



6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan & Kepatuhan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
12. Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia.
13. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Nomor 07 tanggal 15 April 2025 yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.09-0194966 tanggal 19 April 2025. Kedua akta terakhir dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
6. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
7. Financial Services Authority Regulation No. 46/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Commercial Bank Compliance Functions
8. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies
9. Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies
10. Financial Services Authority Regulation no. 27/POJK.03/2016 concerning Capability & Conformity Assessment for Main Parties of Financial Services Institutions
11. Financial Services Authority Regulation no. 37/POJK.03/2017 concerning the Utilization of Foreign Workers and Knowledge Transfer Programs in the Banking Sector.
12. Articles of Association of Bank Muamalat Indonesia.
13. Deed of Statement of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 07 dated April 15, 2025, regarding the receipt of Notification of Changes to Company Data has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia in accordance with letter No. AHU-AH.01.09-0194966 dated April 19, 2025. The last two deeds were made in the presence of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Direksi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan Bank. Pembagian tugas Direksi Bank Muamalat merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, keputusan RUPS atau keputusan rapat Direksi. Anggota Direksi Bank Muamalat bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya sesuai pembagian tugas masing-masing.

Tugas dan kewajiban Direksi, antara lain namun tidak terbatas berkaitan dengan strategi dan rencana kerja, pelaksanaan fungsi kepatuhan, penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, keterbukaan dan kerahasiaan informasi, hubungan dengan para pemangku kepentingan, sistem akuntansi dan pembukuan, pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang/Transaksi Keuangan yang Mencurigakan.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Board of Directors is responsible for managing and administering the Bank. The division of duties of the Board of Directors of Bank Muamalat refers to applicable laws and regulations, the Articles of Association, GMS resolutions, or Board of Directors meeting resolutions. Members of the Board of Directors of Bank Muamalat are fully responsible for carrying out their duties in accordance with their respective division of duties.

The duties and responsibilities of the Board of Directors include, but are not limited to, strategies and work plans, implementation of compliance functions, implementation of risk management, internal control systems, transparency and confidentiality of information, relations with stakeholders, accounting and bookkeeping systems, implementation of know-your-customer principles, and eradication of money laundering/suspicious financial transactions.

Berikut adalah rincian tugas dan kewajiban Direksi Bank Muamalat Indonesia:

1. Memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
3. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, paling sedikit wajib mencantumkan: (1) pengorganisasian Bank dan pembagian tugas Direksi; (2) tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; (3) pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Direksi; (4) pengaturan etika kerja Direksi; (5) pengaturan rapat Direksi; (6) larangan terhadap Direksi; (7) evaluasi kinerja Direksi; dan (8) pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan dan mensosialisasikannya kepada seluruh karyawan/pegawai yang bekerja pada Perseroan serta memuatnya secara lengkap dalam situs *web* BMI.
5. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BMI berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
6. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Bank, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi.
7. Mengelola BMI sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BMI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BMI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
9. Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang Sekretaris Perusahaan, Audit Intern, Manajemen Risiko dan satuan kerja kepatuhan.
10. Direksi wajib membentuk komite yang paling sedikit terdiri atas: komite manajemen risiko; komite kebijakan perkreditan atau pembiayaan; komite kredit atau pembiayaan; dan komite pengarah teknologi informasi. Direksi dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank.
11. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BMI.

The following are details of the duties and obligations of the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia:

1. Have clarity of duties and responsibilities according to their field of work.
2. Carry out and be responsible for managing the Bank for the Bank's interests in accordance with the Bank's goals and objectives as stipulated in the provisions of statutory regulations, articles of association, and GMS resolutions.
3. Have work guidelines and procedures that are binding for each member of the Board of Directors, which must at least include: (1) organization of the Bank and the division of duties of the Board of Directors; (2) duties, responsibilities, and authority of the Board of Directors; (3) regulation of the authority and decision procedures of the Board of Directors; (4) regulation of the work ethics of the Board of Directors; (5) arrangements for Board of Directors meetings; (6) prohibition against Board of Directors; (7) evaluation of the performance of the Board of Directors; and (8) the working relationship pattern of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
4. Prepare a code of ethics that applies to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners, workers/employees, as well as supporting organs owned by the Company and socialize it to all workers/employees who work for the Company and post it in full on the BMI website.
5. Full responsibility for the implementation of BMI management based on the prudent principle and Sharia Principles.
6. The Board of Directors implements Good Governance at the Bank, risk management, and compliance in an integrated manner that is adapted to the latest developments in the banking ecosystem and is supported by digitalization and technological innovation.
7. Manage BMI in accordance with its authority and responsibilities as regulated in BMI's Articles of Association and applicable laws and regulations.
8. Implement GCG in every BMI business activity at all levels of the organization.
9. In order to implement GCG, the Board of Directors is required to have at least the functions of Corporate Secretary, Internal Audit, Risk Management, and a compliance work unit.
10. The Board of Directors is required to form a committee that at least consists of a risk management committee, a credit or financing policy committee, a credit or financing committee, and an information technology steering committee. The Board of Directors can form other committees that are tailored to the needs and/or complexity of the Bank.
11. In good faith and with full responsibility, carry out duties for the interests and business of BMI.



12. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta memastikan seluruh aktivitas BMI telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
13. Mematuhi ketentuan internal BMI.
14. Melaksanakan pengurusan BMI untuk kepentingan dan tujuan BMI.
15. Menetapkan susunan organisasi BMI di tingkat pusat, wilayah maupun cabang lengkap dengan pelaksanaan tugasnya.
16. Bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan BMI.
17. mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BMI yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
18. Memelihara dan mengurus kekayaan BMI.
19. Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan BMI dalam mencapai maksud dan tujuannya.
20. Mewakili BMI baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
21. Memperhatikan masukan-masukan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
22. Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan BMI serta mengikat BMI dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan BMI, dengan pembatasan tertentu.
23. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
24. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
25. Direksi wajib membuat dan memelihara seluruh daftar pemegang saham, Daftar Khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi serta dokumen-dokumen keuangan dan dokumen perseroan lainnya .
26. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham lebih dari 25% dari modal disetor perusahaan lain.
27. Anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
28. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian BMI apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas.
29. Anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan diluar negeri.
12. Subject to the provisions of applicable laws and regulations, the Articles of Association, and GMS resolutions, ensure that all BMI activities are in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, the Articles of Association, and GMS resolutions.
13. Comply with BMI internal regulations.
14. Carry out BMI management for the interests and objectives of BMI.
15. Determine the organizational structure of BMI at the central, regional, and branch levels, complete with the implementation of their duties.
16. Act as a leader in managing BMI.
17. Disclose to employees strategic BMI policies in the personnel sector.
18. Maintain and manage BMI's assets.
19. Take full responsibility in carrying out their duties for the benefit of BMI in achieving its goals and objectives.
20. Represent BMI both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.
21. Pay attention to input provided by the Board of Commissioners.
22. Carry out all actions and conduct, both regarding the management and ownership of BMI's assets as well as binding BMI with other parties and/or other parties with BMI, with certain restrictions.
23. Members of the Board of Directors are prohibited from granting general power of attorney to other parties, which results in the transfer of the duties and functions of the Board of Directors.
24. The Board of Directors is obliged to be accountable for the implementation of its duties to shareholders through the General Meeting of Shareholders.
25. The Board of Directors is obliged to create and maintain all lists of shareholders, Special Lists, minutes of the GMS, and minutes of meetings of the Board of Directors, as well as financial documents and other company documents.
26. Members of the Board of Directors, individually or collectively, are prohibited from owning shares of more than 25% of the paid-up capital of another company.
27. Members of the Board of Directors are prohibited from having familial relationships up to the second degree with fellow members of the Board of Directors and/or with members of the Board of Commissioners
28. Each member of the Board of Directors is personally responsible for BMI's losses if the person concerned is guilty or negligent in carrying out their duties.
29. Members of the Board of Directors are required to disclose share ownership of 5% (five percent) or more, both in the Bank concerned and in other Banks and companies domiciled at home and abroad.

30. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
31. Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

HAK DAN WEWENANG DIREKSI

Direksi Bank Muamalat juga memiliki hak dan wewenang yang mengacu pada peraturan perundangan-undangan serta Anggaran Dasar Perusahaan, yakni sebagai berikut:

1. Memutuskan kebijakan dalam pengelolaan Bank, berikut penentuan struktur organisasi Bank.
2. Menolak mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila pemindahan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank.
3. Menjadi wakil Bank di dalam dan di luar pengadilan.
4. Melakukan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun mengenai pemilikan Bank.
5. Mengikat Bank dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank, dengan pembatasan-pembatasan yang sesuai dengan ketentuan yang ada.
6. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai Bank baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.
7. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian BMI termasuk penetapan gaji, pensiun, jaminan hari tua dan penghasilan bagi Karyawan Bank berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Mengangkat, memberi penghargaan dan sanksi serta memberhentikan karyawan BMI berdasarkan peraturan kepegawaian Bank.
9. Memastikan kompetensi Sumber Daya Insani yang terkait.
10. Menghapus buku piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan.
11. Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
12. Melakukan aktivitas di luar Bank yang tidak secara langsung berhubungan dengan kepentingan Perseroan seperti kegiatan mengajar, menjadi pengurus

30. The Board of Directors is obliged to provide accurate, relevant, and timely data and information to the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board.
31. Every decision of the Board of Directors is binding and is the responsibility of all members of the Board of Directors.

RIGHTS AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors of Bank Muamalat also has rights and authority, which refer to statutory regulations and the Company's Articles of Association, namely as follows:

1. Decide on policies for managing the Bank, including determining the Bank's organizational structure.
2. Refuse to register the transfer of rights to shares in the Register of Shareholders if the transfer does not comply with the provisions in the Bank's Articles of Association.
3. Become a representative of the Bank inside and outside the court.
4. Carry out all actions, both regarding management and ownership of the Bank.
5. Binding the Bank to other parties and other parties to the Bank, with restrictions in accordance with existing provisions.
6. Regulate the transfer of the powers of the Board of Directors to represent the Bank inside and outside the Court to a person or several Directors specifically appointed for this purpose or to a person or several Bank employees either individually or jointly or to another person or body.
7. Regulate provisions regarding BMI employment, including determining salaries, pensions, old age security, and income for Bank Employees based on applicable regulations.
8. Appoint, reward, sanction, and dismiss BMI employees based on Bank personnel regulations.
9. Ensure the competency of related Human Resources.
10. Write off bad debts, which are then reported and accounted for in the Annual Report.
11. Purchasing part or all of the collateral, either through auction or outside auction based on voluntary delivery by the collateral owner or based on the power of attorney to sell outside of auction from the collateral owner in the event that the Debtor does not fulfill its obligations to the Bank, provided that the collateral purchased must be liquidated as soon as possible, considering the applicable laws and regulations.
12. Carrying out activities outside the Bank that are not directly related to the interests of the Company, such as teaching activities, serving as administrators of



asosiasi bisnis dan sejenisnya diperkenankan sebatas menggunakan waktu yang wajar dan sepengetahuan Direktur Utama atau Direktur lainnya.

13. Memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Jika diperlukan, mempergunakan saran profesional.
15. Menerima gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya termasuk santunan purnajabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS atau Dewan Komisaris berdasarkan pelimpahan wewenang dari RUPS.
16. Apabila BMI mencapai tingkat keuntungan, maka Direksi dapat menerima insentif sebagai imbalan atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS.
17. Menggunakan sarana dan fasilitas Bank untuk kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Bank, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Bank.
18. Berhak menerima fasilitas yang ditetapkan Bank.
19. Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka 18, Direksi juga berhak menerima tantiem yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Kewenangan Direksi yang Harus Mendapatkan Persetujuan Dewan Komisaris

Kewenangan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu adalah sebagai berikut:

1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Bank sejumlah uang yang melampaui kewenangan Direksi yang dari waktu ke waktu akan ditentukan secara tertulis oleh Dewan Komisaris.
2. Membeli, menjual, atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap (tanah dan/atau bangunan) dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan yang nilainya sama atau lebih besar dari nilai transaksi material sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku.
3. Mengikat Bank sebagai penjamin/penanggung utang (*corporate guarantor*).
4. Mendirikan suatu badan usaha baru.
5. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Bank baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain yang terjadi dalam 1 (satu) tahun buku.
6. Membeli atau melepaskan saham Bank dalam perusahaan lain.
7. Mengambil tindakan-tindakan hukum atau transaksi yang bersifat strategis yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank secara materiil sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku, jenis tindakan hukum atau transaksi tersebut dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

business associations, and the like, is permitted within reasonable time limits and with the knowledge of the President Director or other Directors.

13. Obtain leave according to applicable regulations.
14. If necessary, use professional advice.
15. Receive salary along with other facilities and allowances, including retirement compensation, the amount of which is determined by the GMS or the Board of Commissioners based on the delegation of authority from the GMS.
16. If BMI reaches a profit level, the Board of Directors can receive incentives as compensation for their work performance, the amount of which is determined by the GMS.
17. Use Bank facilities and equipment for activities related to the Bank's interests, in accordance with statutory regulations and Bank policies.
18. Entitled to receive facilities determined by the Bank.
19. In addition to the facilities referred to number 18, the Board of Directors is also entitled to receive tantiem, the amount of which is determined by the General Meeting of Shareholders.

Authority of the Board of Directors, which must obtain approval from the Board of Commissioners

The authority of the Board of Directors, which must first obtain approval from the Board of Commissioners is as follows:

1. Borrowing or lending money on behalf of the Bank in an amount that exceeds the authority of the Board of Directors, which from time to time will be determined in writing by the Board of Commissioners.
2. Buy, sell, or otherwise dispose of rights to fixed assets (land and/or buildings) and companies or encumber the Company's assets whose value is equal to or greater than the material transaction value in accordance with applicable capital market regulations.
3. Binding the Bank as guarantor/debt guarantor (*corporate guarantor*).
4. Establishing a new business entity.
5. Transfer, relinquish rights, or use as collateral for debt all or most of the Bank's assets, either in 1 (one) transaction or several transactions that stand alone or are related to each other that occur within 1 (one) financial year.
6. Purchase or dispose of Bank shares in another company.
7. Take strategic legal actions or transactions that can materially affect the continuity of the Bank's business in accordance with applicable capital market regulations. The types of legal actions or transactions will, from time to time, be determined by the Board of Commissioners.

Pedoman Kerja/Piagam Direksi

Pedoman Kerja Bank Muamalat Indonesia tertuang pada Board Manual Direksi Bank Muamalat yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Fungsi
2. Komposisi dan Persyaratan
3. Pengangkatan dan Masa Jabatan
4. Pengunduran Diri dan Pemberhentian
5. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas
6. Independensi (Kemandirian) Direksi
7. Etika Jabatan
8. Tugas dan Kewajiban Direksi
9. Hak dan Wewenang Direksi
10. Penetapan Kebijakan Pengurusan Perusahaan oleh Direksi
11. Pendelegasian Wewenang di antara Direktur Perusahaan
12. Pembagian Tugas Direksi
13. Rapat Direksi
14. Komite-komite Direksi
15. Larangan Terhadap Direksi
16. Hubungan Kerja
17. Hubungan Dengan Profesi Pasar Modal
18. Penggunaan Saran Profesional.

KRITERIA DIREKSI

Kriteria anggota Direksi Bank Muamalat terdiri dari 3 (tiga) bagian yakni integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Uraian dari masing-masing kriteria tersebut adalah berikut.

Integritas

1. Mempunyai akhlak dan moral yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang:
 - a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Board of Directors' Work Guidelines/Charter

Bank Muamalat Indonesia's Work Guidelines are contained in the Bank Muamalat Board of Directors' Board Manual, which includes the following matters:

1. Function
2. Composition and Requirements
3. Appointment and Term of Office
4. Resignation and Dismissal
5. Orientation and Competency Improvement Program
6. Independence of the Board of Directors
7. Position Ethics
8. Duties and Obligations of the Board of Directors
9. Rights and Authorities of the Board of Directors
10. Determination of Company Management Policies by the Board of Directors
11. Delegation of Authority among Company Board of Directors
12. Division of Duties of the Board of Directors
13. Board of Directors Meeting
14. Board of Directors Committees
15. Prohibition against the Board of Directors
16. Employment Relations
17. Relationship with Capital Markets Professionals
18. Use of Professional Advice.

BOARD OF DIRECTORS' CRITERIA

The criteria for members of the Board of Directors of Bank Muamalat consist of 3 (three) parts, namely integrity, competence, and financial reputation. A description of each of these criteria is as follows.

Integrity

1. Have good character and moral.
2. Capable of carrying out legal actions.
3. In the 5 (five) years prior to appointment and during his/her tenure, he/she has never been a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners who:
 - a. Never held an annual GMS;
 - b. His/her accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or has never provided his/her accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS; and
 - c. Has ever caused a company that obtained a permit, approval, or registration from the Financial Services Authority to fail to fulfill its obligation to submit an annual report and/or financial statement to the Financial Services Authority.



4. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana asal yang disebut dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
5. Tidak sedang menjalani konsekuensi hasil akhir dari penilaian kembali pihak utama dengan predikat tidak lulus dan/atau tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
6. Memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank Syariah yang sehat.
8. Tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan Perseroan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.
9. Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).

Kompetensi

1. memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi (keahlian) yang memadai di bidang yang dibutuhkan dalam pengelolaan Bank dan relevan dengan jabatannya;
2. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan, perbankan syariah, bidang keuangan atau keuangan syariah paling sedikit 5 (lima) tahun;
3. melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat,
4. Memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam penerapan manajemen risiko.
5. memiliki pengetahuan tentang Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya, dan bahasa Indonesia, bagi anggota Direksi yang merupakan tenaga kerja asing sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan di sektor perbankan.

Reputasi

1. Tidak memiliki kredit/pembiayaan macet.
2. Tidak pernah dinyatakan pailit.
3. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
5. Mendukung pelaksanaan pengelolaan Bank yang sehat.
6. Menjaga reputasi Bank.

4. Never been punished for being proven to have committed a predicate crime as mentioned in Law No. 8 of 2010 concerning the Crime of Money Laundering, a crime that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector, within the last 20 (twenty) years before being nominated.
5. Not currently undergoing the consequences of the final results of the main party's reassessment with the predicate of not passing and/or not being included in the list of not passing.
6. Have a commitment to comply with statutory provisions, including Bank rules and regulations, and support the policies of the Financial Services Authority.
7. Have a commitment to developing healthy Sharia Bank operations.
8. Never directly or indirectly involved in acts of engineering and deviant practices, breach of contract, or other acts that are detrimental to the Company where the person concerned works or has worked.
9. Not listed on the Failed List (DTL).

Competence

1. have adequate knowledge and/or competency (expertise) in the fields required in Bank management and relevant to the position;
2. have experience and expertise in the field of banking operations, sharia banking, finance, or sharia finance for at least 5 (five) years;
3. carry out strategic management in the context of developing a healthy Bank,
4. have knowledge and understanding in implementing risk management.
5. have knowledge about Indonesia, especially regarding the economy, culture, and Indonesian language, for members of the Board of Directors who are foreign workers in accordance with the Financial Services Authority Regulations regarding the use of foreign workers and knowledge transfer programs in the banking sector.

Reputation

1. Do not have bad credit/financing.
2. Never declared bankruptcy.
3. Have never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt.
4. Have never been convicted of committing a criminal act that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector.
5. Support the implementation of sound Bank management.
6. Maintain the Bank's reputation.

MASA JABATAN DIREKSI

Masa jabatan anggota Direksi mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS, yang antara lain mengatur:

1. Direksi Bank Muamalat diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS pengangkatan dan berakhir pada penutupan RUPS tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya. Ketentuan tersebut tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan sebelum masa jabatan berakhir dengan menyebutkan alasannya.
2. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan anggota Direksi untuk sementara waktu, tidak terbatas oleh waktu dengan menyebutkan alasannya.
3. Jabatan Direktur dinyatakan berakhir, apabila anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS, mengundurkan diri, dan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian meninggal dunia atau masa jabatannya berakhir. Pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.
4. Anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS setelah masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan yakni masa jabatan Direktur Utama dibatasi hanya 2 (dua) kali masa jabatan sebagai Direktur Utama serta masa jabatan anggota Direksi (selain Direktur Utama) dibatasi maksimal 2 (dua) kali masa jabatan. Ketentuan tersebut tidak termasuk apabila yang bersangkutan diangkat menjadi Direktur Utama, maka masa jabatannya hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF DIRECTORS

The term of office of members of the Board of Directors refers to the Limited Liability Company Law, Articles of Association, and GMS resolutions, which, among other things, regulate:

1. The Board of Directors of Bank Muamalat is appointed for a period starting from the date of the appointment of the GMS and ending at the closing of the 5th (fifth) annual GMS after the date of appointment. This provision does not prejudice the GMS's right to dismiss at any time before the end of the term of office by stating the reasons.
2. Based on the resolution of the Board of Commissioners Meeting, the Board of Commissioners may dismiss members of the Board of Directors temporarily, without time limit, by stating the reasons.
3. A Director's position is declared terminated if the relevant member of the Board of Directors is dismissed based on a GMS resolution, resigns, and no longer meets the requirements as a member of the Board of Directors based on the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations, then dies or his/her term of office ends. Dismissal or replacement of the president director and/or director in charge of the compliance function before the term of office ends must obtain prior approval from the Financial Services Authority before being decided at the GMS.
4. Members of the Board of Directors can be reappointed by the GMS after their term of office ends, with the provision that the term of office of the President Director is limited to 2 (two) terms of office as President Director and the term of office of members of the Board of Directors (other than the President Director) is limited to a maximum of 2 (two) terms of office. This provision does not include if the person concerned is appointed as President Director; then the term of office is only 1 (one) term of office.



KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DIREKSI

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 November 2022, berikut komposisi dan dasar hukum pengangkatan Direksi Bank Muamalat Indonesia:

COMPOSITION AND BASIS OF APPOINTMENT OF BOARD OF DIRECTORS

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 29, 2022, the following is the composition and legal basis for the appointment of the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia:

Nama Name	Jabatan Position	RUPS Pengangkatan Appointment GMS	Persetujuan OJK OJK Approval	Tanggal Efektif Effective Date	Pengangkatan Kembali Reappointment
Indra Falatehan ^{*)}	Direktur Utama President Director	RUPSLB 29 November 2022 (Direktur Utama) EGMS November 29, 2022 (President Director)	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor Kep-21/D.03/2023 tanggal 18 April 2023 Copy of Decree of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. Kep-21/D.03/2023 dated April 18, 2023	18 April 2023 April 18, 2023	-
Karno	Direktur Kepatuhan, Risiko & Hukum Compliance, Risk & Legal Director	RUPSLB 24 Juni 2022 (Direktur Kepatuhan) EGMS June 24, 2022 (Compliance Director)	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor Kep-153/D.03/2022 tanggal 3 Oktober 2022 Copy of Decree of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. Kep-153/D.03/2022 dated October 3, 2022	3 Oktober 2022 October 3, 2022	RUPST 27 Juni 2024 (Direktur Kepatuhan) AGMS June 27, 2024 (Compliance Director)
Hery Safril ^{**)}	Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan Financing Business Risk Director	RUPSLB 20 September 2015 (Direktur) EGMS September 20, 2015 (Director)	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor No. Kep-9/D.03/2018 tanggal 21 Maret 2016 Copy of Decree of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. No. Kep-9/D.03/2018 dated March 21, 2016	21 Maret 2016 March 21, 2016	- RUPST 17 Mei 2019 (Direktur) - RUPST 27 Juni 2024 (Direktur Utama) - AGMS May 17, 2019 (Director) - AGMS June 27, 2024 (President Director)
Wahyu Avianto ^{*)}	Direktur Operasi & Digital Operations & Digital Director	RUPSLB 29 November 2022 (Direktur) EGMS November 29, 2022 (Director)	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor No. Kep-154/D.03/2022 tanggal 3 Oktober 2022 Copy of Decree of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. No. Kep-154/D.03/2022 dated October 3, 2022	3 Oktober 2022 October 2, 2022	-
Suhendar ^{*)}	Direktur Keuangan dan Strategi Finance and Strategy Director	RUPSLB 29 November 2022 (Direktur) EGMS November 29, 2022 (Director)	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor Kep-21/D.03/2023 tanggal 18 April 2023 Copy of Decree of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. Kep-21/D.03/2023 dated April 18, 2023	18 April 2023 April 18, 2023	-

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPST tanggal 27 Juni 2024.

Has stopped serving in accordance with the AGMS resolution on June 27, 2024.

^{**)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.

Has stopped serving in accordance with the EGMS resolution on December 11, 2024.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Juni 2024, berikut komposisi dan dasar hukum pengangkatan Direksi Bank Muamalat Indonesia:

Based on the Annual General Meeting of Shareholders on June 27, 2024, the following is the composition and legal basis for the appointment of the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia:

Nama Name	Jabatan Position	RUPS Pengangkatan Appointment GMS	Persetujuan OJK OJK Approval	Tanggal Efektif Effective Date	Pengangkatan Kembali Reappointment
Karno	Direktur Kepatuhan, Risiko & Hukum/Plt. Direktur Utama Compliance, Risk & Legal Director/Acting President Director	RUPSLB 24 Juni 2022 (Direktur Kepatuhan) EGMS June 24, 2022 (Compliance Director)	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor Kep-153/D.03/2022 tanggal 3 Oktober 2022 Copy of Decree of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. Kep-153/D.03/2022 dated October 3, 2022	3 Oktober 2022 October 3, 2022	RUPST 27 Juni 2024 (Direktur Kepatuhan) AGMS June 27, 2024 (Director)
Hery Safril ^{*)}	Direktur Utama President Director	RUPST 27 Juni 2024 (Direktur Utama) GMS June 27, 2024 (President Director)	-	-	-
Riksa Prakoso ^{**)}	Direktur Operasi, TI dan SDM Operations, IT and HR Director	RUPST 27 Juni 2024 (Direktur) AGMS June 27, 2024 (Director)	-	-	-

^{*)} Efektif menjabat selaku Direktur Utama setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.
Effectively serves as President Director after obtaining a determination of passing the Fit and Proper Test from the OJK.

^{**)} Efektif menjabat setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.
Effectively serve after obtaining a determination of passing the Fit and Proper Test from the OJK.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Desember 2024, berikut komposisi dan dasar hukum pengangkatan Direksi Bank Muamalat Indonesia:

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders on December 11, 2024, the following is the composition and legal basis for the appointment of the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia:

Nama Name	Jabatan Position	RUPS Pengangkatan Appointment GMS	Persetujuan OJK OJK Approval	Tanggal Efektif Effective Date	Pengangkatan Kembali Reappointment
Karno	Direktur Kepatuhan Compliance Director	RUPSLB 24 Juni 2022 (Direktur Kepatuhan) EGMS June 24, 2022 (Compliance Director)	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor Kep-153/D.03/2022 tanggal 3 Oktober 2022 Copy of Decree of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. Kep-153/D.03/2022 dated October 3, 2022	3 Oktober 2022 October 3, 2022	RUPST 27 Juni 2024 (Direktur Kepatuhan) AGMS June 27, 2024 (Compliance Director)
Imam Teguh Saptono	Direktur Utama President Director	RUPSLB 11 Desember 2024 (Direktur Utama) EGMS December 11, 2024 (President Director)	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-22/D.03/2025 24 Maret 2025 Decree of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEPR-22/D.03/2025 24 dated March 24, 2025	24 Maret 2024 March 24, 2024	-



Nama Name	Jabatan Position	RUPS Pengangkatan Appointment GMS	Persetujuan OJK OJK Approval	Tanggal Efektif Effective Date	Pengangkatan Kembali Reappointment
Kukuh Rahardjo ^{*)}	Direktur Bisnis Business Director	RUPSLB 11 Desember 2024 (Direktur) EGMS December 11, 2024 (Director)	-	-	-

^{*)} Efektif tidak menjabat sejak tanggal 25 Maret 2025.
Effective from resignation on March 25, 2025.

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING DIREKSI

Pembagian tugas dan wewenang masing-masing Direksi Bank Muamalat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, Keputusan RUPS atau Keputusan rapat Direksi. Berdasarkan RUPS, Direksi Bank dapat melakukan pembagian tugas dan wewenang atau *job description* di antara anggota Direksi. Namun apabila RUPS tidak menetapkan, maka penetapan tugas dan wewenang Direksi mengacu pada keputusan rapat Direksi. Rincian pembagian tugas dan wewenang Direksi ialah sebagai berikut:

1. Direktur Utama

- Merencanakan, mengembangkan dan menetapkan kebijakan umum perusahaan berdasarkan prinsip kehematan, efektif, dan efisien, sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan.
- Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan perusahaan secara menyeluruh.
- Mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direktur.
- Menyiapkan *corporate plan* dan *business plan*.
- Menetapkan kebijakan umum terkait Internal Audit dan memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Internal Audit.
- Memimpin kegiatan yang bersifat strategis dalam pengembangan perusahaan.

2. Direktur Kepatuhan

- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan perusahaan telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan.

DIVISION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF EACH BOARD OF DIRECTORS

The division of duties and authority of each Bank Muamalat Board of Director refers to the applicable laws and regulations, the Articles of Association, GMS Resolutions, or Board of Directors' meeting resolutions. Based on the GMS, the Bank's Board of Directors can distribute duties and authority or job descriptions among members of the Board of Directors. However, if the GMS does not determine, then the determination of the duties and authority of the Board of Directors refers to the resolution of the Board of Directors meeting. Details of the division of duties and authority of the Board of Directors are as follows:

1. President Director

- Plan, develop, and establish general company policies based on the principles of economy, effectiveness, and efficiency, in accordance with the company's vision, mission, and goals.
- Direct, develop, and determine overall company management strategies.
- Coordinate the activities and implementation of duties of all Directors.
- Prepare corporate plans and business plans.
- Establish general policies regarding Internal Audit and pay attention to and immediately take the necessary steps regarding everything stated in each audit report prepared by Internal Audit.
- Lead strategic activities in company development.

2. Director of Compliance

- Determine the necessary steps to ensure that the company has complied with all regulations of Bank Indonesia, the Financial Services Authority, and other applicable laws and regulations in order to implement the prudential principle. Formulate strategies to encourage the creation of a culture of compliance.

- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan.
- Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah.
- Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi BMI tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memantau dan menjaga kepatuhan Bank Muamalat Indonesia terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank Muamalat Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.
- Meminimalkan risiko kepatuhan bank.
- Mengkoordinir perumusan *framework* risiko terintegrasi di BMI.
- Memastikan bahwa konsep risiko terintegrasi terkait ke dalam perencanaan strategis Bank.
- Mengelola dan mengawasi pengukuran risiko Bank dilakukan secara menyeluruh, khususnya risiko pada kegiatan penghimpunan dana dan operasional Bank.
- Membangun dan mengembangkan budaya risiko di Bank Muamalat Indonesia.
- Memberlakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi dan menanggulangi berbagai jenis risiko yang dapat dihadapi oleh Bank Muamalat Indonesia dengan berkoordinasi dengan Direksi lainnya.
- Membangun, mengembangkan dan mengawasi aktivitas mitigasi risiko perbankan Bank Muamalat Indonesia menjadi lebih efisien dengan mempertimbangkan *cost efficiency* guna mencapai hasil bisnis yang optimal dari pelaksanaan seluruh aktivitas bisnis perusahaan.
- Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Muamalat Indonesia berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah.
- Melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank Muamalat Indonesia pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Formulate strategies to encourage the creation of a culture of compliance.
- Ensure that all policies, provisions, systems, and procedures, as well as business activities carried out by Bank Muamalat Indonesia, are in accordance with the provisions of Bank Indonesia, the Financial Services Authority, and applicable laws and regulations, including sharia principles for Sharia Commercial Banks.
- Take preventive measures so that the policies and/or decisions taken by the BMI Board of Directors do not deviate from the provisions of Bank Indonesia, the Financial Services Authority, and applicable laws and regulations.
- Monitor and maintain Bank Muamalat Indonesia's compliance with commitments made by Bank Muamalat Indonesia to the Financial Services Authority and other competent supervisory authorities.
- Minimize bank compliance risks.
- Coordinate the formulation of an integrated risk framework at BMI.
- Ensure that risk concepts are integrated into the Bank's strategic planning.
- Manage and supervise the Bank's risk measurements as a whole, especially risks in fund collection activities and Bank operations.
- Building and developing a risk culture at Bank Muamalat Indonesia.
- Implement steps that can reduce and overcome various types of risks that Bank Muamalat Indonesia may face by coordinating with other Directors.
- Building, developing, and supervising Bank Muamalat Indonesia's banking risk mitigation activities to become more efficient by considering cost efficiency in order to achieve optimal business results from the implementation of all company business activities.
- Fully responsible for implementing the management of Bank Muamalat Indonesia based on prudential principles and Sharia principles.
- Implement GCG in every Bank Muamalat Indonesia business activity at all organizational levels.



3. Direktur Bisnis

- Menyusun dan menetapkan rencana kerja, rencana pengembangan bisnis dan sumber daya manusia di bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
- Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan strategi bisnis Perseroan, konsolidasi komunikasi dan program-program untuk peningkatan kualitas layanan kepada nasabah.
- Memimpin dan mengkoordinasi pengaturan produk secara agresif dengan memperhatikan kebijakan Perseroan dan prinsip kehati-hatian.
- Memimpin dan mengkoordinasi secara efektif promosi produk dan layanan Bank sesuai dengan riset pasar dan segmen nasabah.
- Melakukan pembinaan hubungan nasabah.
- Mengarahkan dan membina Regional untuk mencapai target pangsa pasar (*market share*) dan meningkatkan target volume bisnis di Regional.
- Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan portofolio pembiayaan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan seluruh ketentuan yang berlaku.
- Melaksanakan GCG termasuk memastikan setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dilakukan secara berintegritas.

3. Director of Business

- Prepare and determine work plans, business development plans, and human resources in the areas of responsibility for the Company's interests in achieving the Company's goals and objectives.
- Coordinate and direct the preparation of the Company's business strategy, communication consolidation, and programs to improve the quality of service to customers.
- Lead and coordinate aggressive product regulation by paying attention to Company policies and the prudential principle.
- Lead and coordinate effectively the promotion of Bank products and services in accordance with market research and customer segments.
- Carry out customer relationship development.
- Directing and developing Regional to achieve market share targets and increase business volume targets in the Region.
- Fully responsible for the implementation of management of the Bank's financing portfolio based on prudential principles, sharia principles, and all applicable regulations.
- Implementing GCG includes ensuring that every Bank business activity at all levels of the organization is carried out with integrity.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham (Lembar Saham) Share Ownership (shares)			
		Bank Muamalat	Bank Lain Other Bank	LJK-Non Bank Non-Bank FSI	Bank Lain Other Bank
Imam Teguh Saptono	Direktur Utama President Director	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Karno	Direktur Kepatuhan Compliance Director	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Kukuh Rahardjo ^{*)}	Direktur Bisnis Business Director	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil

^{*)} Efektif tidak menjabat sejak tanggal 25 Maret 2025.
Effective from resignation on March 25, 2025.

RANGKAP JABATAN DIREKSI

Ketentuan mengenai rangkap jabatan Anggota Direksi Bank Muamalat mengacu pada Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022 Tentang Bank Umum Syariah. Anggota Direksi Bank Muamalat tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Rangkap jabatan dikecualikan apabila:

1. Direksi bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
2. Direksi bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun, yang dimiliki oleh Bank;
3. Direksi melaksanakan tugas sebagai direktur pengganti; dan/atau
4. Menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi.

RANGKAP JABATAN DIREKSI PER 31 DESEMBER 2024

Concurrent Position of the Board of Directors as of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan Lain di Bank Muamalat Indonesia Other Positions at Bank Muamalat Indonesia	Jabatan pada Lembaga atau Perusahaan Lain Position in Other Institutions or Companies	Nama Lembaga atau Perusahaan Lain Name of Other Institution or Company
Imam Teguh Saptono	Direktur Utama President Director	-	-	-
Karno	Direktur Kepatuhan Compliance Director	-	-	-
Kukuh Rahardjo ^{*)}	Direktur Bisnis Business Director	-	Direktur Utama President Director	PT Bank NTB Syariah

^{*)} Efektif telah mengundurkan diri dari PT Bank NTB Syariah sesuai Surat Pengunduran Diri tanggal 16 Desember 2024.
Effectively has resigned from PT Bank NTB Syariah according to the Letter of Resignation dated December 16, 2024.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 80 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, anggota Direksi Bank Muamalat dilarang untuk mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan bank umum syariah dan

CONCURRENT POSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The provisions regarding concurrent positions as members of the Board of Directors of Bank Muamalat refer to Article 15 of the Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks and Article 50 of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Regulation No. 16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks. Members of the Board of Directors of Bank Muamalat do not hold concurrent positions as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Executive Officers at other banks, companies, and/or institutions. Concurrent positions are excluded if:

1. The Board of Directors is responsible for supervising the Bank's investment in subsidiary companies, carrying out functional duties as a member of the Board of Commissioners in non-bank subsidiary companies controlled by the Bank;
2. The Board of Directors is responsible for supervising pension funds or carrying out duties as a supervisory board for pension funds owned by the Bank;
3. The Directors carry out their duties as substitute directors; and/or
4. Holding a position in a non-profit organization or institution

As long as it does not result in the person concerned neglecting the implementation of their duties and responsibilities as a member of the Board of Directors.

MANAGEMENT OF CONFLICTS OF INTEREST OF THE BOARD OF DIRECTORS

Following up on the provisions of Article 80 of Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, members of the Board of Directors of Bank Muamalat are prohibited from taking actions that could reduce assets or



wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan, apabila terjadi benturan kepentingan. Dengan demikian, Direksi wajib untuk:

1. Direksi selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan.
2. Direksi melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Bank Muamalat maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
3. Direksi tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan atau yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan/aset BMI.
4. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BMI selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas.
6. Direksi wajib mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada BMI dan pada perusahaan lain.
7. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka harus diungkapkan, dan anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perusahaan yang berkaitan dengan kasus tersebut.
8. Apabila terjadi benturan kepentingan, Direksi dilarang mengambil tindakan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.
9. Apabila benturan kepentingan dan/atau terjadinya perkara tersebut menyangkut seluruh Direktur, maka Perusahaan akan diwakili oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

reduce profits of Islamic commercial banks and are required to disclose conflicts of interest in every decision if a conflict of interest occurs. Thus, the Board of Directors is obliged to:

1. The Board of Directors always avoids conflicts of interest.
2. The Board of Directors reports to the Company regarding their and/or their family's share ownership in Bank Muamalat or in other banks and/or companies, domiciled at home and abroad.
3. The Board of Directors will not use their position for personal interests or for the interests of other people or parties that conflict with the interests of the Company or that may harm or reduce BMI's profits/assets.
4. Do not take and/or receive personal benefits from BMI other than remuneration and other facilities determined by the General Meeting of Shareholders.
5. Avoid any activities that could affect their independence in carrying out their duties.
6. The Board of Directors is required to fill out a Special List containing their and/or their family's share ownership in BMI and other companies.
7. If a conflict of interest occurs, it must be disclosed, and the member of the Board of Directors concerned must not involve themselves in the Company's decision-making process relating to the case.
8. If a conflict of interest occurs, the Board of Directors is prohibited from taking action that is detrimental to or reduces the Bank's profits and is obliged to disclose the conflict of interest in every decision.
9. If the conflict of interest and/or the occurrence of the case concerns all Directors, the Company will be represented by all Members of the Board of Commissioners with due observance of applicable laws and regulations.

PROGRAM ORIENTASI DIREKSI BARU

Program orientasi Bank Muamalat Indonesia bagi anggota Direksi baru ialah program pengenalan perusahaan yang dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan, yakni ketentuan regulasi, keberagaman latar belakang Direksi, serta media pengenalan antar anggota Direksi. Dengan demikian, program orientasi ini penting untuk menciptakan suatu tim kerja yang solid bagi Direksi.

NEW BOARD OF DIRECTORS ORIENTATION PROGRAM

Bank Muamalat Indonesia's orientation program for new members of the Board of Directors is a company introduction program that is carried out based on several considerations, namely regulatory provisions, diversity of backgrounds of the Board of Directors, as well as media for introduction between members of the Board of Directors. Thus, this orientation program is important to create a solid work team for the Board of Directors.

Prosedur Program Orientasi Bank Muamalat Indonesia mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Anggota Direksi yang baru pertama kali menjabat wajib diberikan Program Orientasi mengenai BMI.
- b. Direktur Utama bertanggungjawab untuk mengadakan program Orientasi. Dalam hal Direktur Utama berhalangan, maka tanggung jawab pelaksanaan Program Orientasi berada pada Komisaris Utama atau anggota Direksi yang ada, di mana materi disiapkan oleh Corporate Secretary.
- c. Program Orientasi anggota Direksi, antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - Gambaran mengenai BMI berkaitan dengan visi, misi, tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, manajemen risiko dan berbagai masalah strategis lainnya.
 - Penjelasan mengenai produk dan aktivitas jasa perbankan BMI.
 - Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh BMI.
 - Tanggung jawab hukum anggota Direksi.
 - Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta tugas dan peran komite-komite yang dibentuk oleh Direksi.
 - Penjelasan mengenai kewajiban, tugas, tanggung jawab dan hak-hak Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi serta aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan terkait.
 - *Team building*. Dalam kegiatan ini menyertakan seluruh Direksi, baik yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya.
- d. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas BMI, pengenalan dengan para Karyawan Senior dan para Karyawan BMI serta program lainnya.

Bank Muamalat Indonesia Orientation Program procedures include the following:

- a. Members of the Board of Directors who are serving for the first time must be given an Orientation Program regarding BMI.
- b. The President Director is responsible for holding the Orientation program. In the event that the President Director is absent, the responsibility for implementing the Orientation Program lies with the President Commissioner or existing members of the Board of Directors, where the material is prepared by the Corporate Secretary.
- c. The Orientation Program for member of the Board of Directors includes, among other things, the following:
 - An overview of BMI relating to vision, mission, objectives, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risk management, and various other strategic issues.
 - Explanation of BMI banking services products and activities.
 - Implementation of Good Corporate Governance principles by BMI.
 - Legal responsibilities of members of the Board of Directors.
 - Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems, and policies, as well as the duties and roles of committees formed by the Board of Directors.
 - Explanation of the obligations, duties, responsibilities, and rights of the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, and Board of Directors as well as related rules and regulations.
 - Team building. This activity includes all Board of Directors, both those who have just served and those who have served previously.
- d. The orientation program provided can be in the form of presentations, meetings, or visits to BMI facilities, introductions to Senior Employees and BMI Employees and other programs.



SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT CERTIFICATION

KEPEMILIKAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO DIREKSI

Ownership of Risk Management Certification of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Level Sertifikat Certificate Level	Bidang Field	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikat Certification Body	Tanggal Dikeluarkan Date of Issue	Tanggal Kadaluarsa Expiration Date	Program Pemeliharaan Maintenance Program
Karno	Direktur Kepatuhan Compliance Director	7	Risk Management Certification	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Professional Certification Agency (BNSP)	11 Juni 2024 June 11, 2024	11 Juni 2027 June 11, 2027	-
Imam Teguh Saptono	Direktur Utama President Director	7	Risk Management Certification	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Professional Certification Agency (BNSP)	10 Januari 2025 January 10, 2025	10 Januari 2028 January 10, 2028	-
Kukuh Rahardjo ^{*)}	Direktur Bisnis Business Director	7	Risk Management Certification	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Professional Certification Agency (BNSP)	27 September 2024 September 27, 2024	27 September 2027 September 27, 2027	-

^{*)} Efektif tidak menjabat sejak tanggal 25 Maret 2025.
Effective from resignation on March 25, 2025.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS' COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

Kebijakan

Bank Muamalat senantiasa memberikan kesempatan yang sama bagi para pegawainya dalam hal pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum. Regulasi tersebut menegaskan, Bank wajib melakukan pengelolaan SDM dan pengembangan kualitas SDM yang dimiliki secara berkelanjutan.

Policy

Bank Muamalat always provides equal opportunities for its employees in terms of developing Human Resources (HR) competencies, which refer to Financial Services Authority Regulation No. 24 of 2022 concerning the Development of the Quality of Commercial Bank Human Resources. This regulation emphasizes that banks are obliged to manage human resources and develop the quality of their human resources on an ongoing basis.

Pengembangan kualitas SDM dimaksud, antara lain melalui kegiatan training peningkatan kompetensi kerja SDM. Bank juga diwajibkan menyediakan anggaran sebagai wujud dukungan pada pengembangan kompetensi tersebut.

The development of HR quality includes, among other things, training activities to increase HR work competency. Banks are also required to provide a budget as a form of support for developing these competencies.

Realisasi

Realisasi pengembangan kompetensi Direksi diuraikan dalam "Profil Perusahaan" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Realization

The realization of the Board of Directors' competency development is described in the "Company Profile" contained in this Annual Report.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Berikut ialah mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Direksi:

1. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengunduran diri dimaksud.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
3. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka sebagaimana tersebut di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
4. Anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai Direktur sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal disetujuinya pengunduran diri.
5. Perusahaan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. Diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Direksi
 - b. Hasil penyelenggaraan RUPS
6. Perseroan juga wajib menyampaikan ke OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengunduran diri efektif yaitu tanggal setelah pengunduran diri yang bersangkutan mendapat persetujuan dari RUPS, serah terima jabatan, atau mekanisme lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
7. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi terhadap pengunduran diri anggota Direksi untuk menilai pengunduran diri dilakukan secara sukarela, terdapat unsur paksaan, atau kondisi lain.
 - a. Penyampaian permohonan persetujuan pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan Bank paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
 - b. Penyampaian permohonan persetujuan pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan memuat informasi mengenai:

MECHANISM FOR RESIGNATION AND DISMISSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

The following is the mechanism for resignation and dismissal of the Board of Directors:

1. Members of the Board of Directors have the right to resign from their positions by notifying the company in writing within 90 (ninety) days prior to the said resignation.
2. The Company is obliged to hold a GMS to decide on the request for resignation of the member of the Board of Directors within a period of no later than 90 (ninety) days after receipt of the letter of resignation request.
3. In the event that the Company does not hold a GMS within the period as stated above, then upon expiry of that period, the resignation of a member of the Board of Directors becomes valid without requiring approval from the GMS.
4. Members of the Board of Directors who resign can still be held accountable as Directors from the time of their appointment until the date the resignation is approved.
5. Companies are required to disclose information to the public and submit it to the Financial Services Authority no later than 2 (two) working days after:
 - a. Receipt of requests for resignation of members of the Board of Directors
 - b. Results of holding the GMS
6. The Company is also obliged to submit it to the OJK no later than 10 (ten) days after the effective resignation, namely the date after the resignation in question is approved by the GMS, handover of office, or other mechanisms as regulated in the Company's Articles of Association.
7. The Financial Services Authority has the authority to evaluate the resignation of members of the Board of Directors to assess whether the resignation is voluntary, there is an element of coercion, or other conditions.
 - a. The Bank submits a request for approval for the dismissal or replacement of the president director and/or the director in charge of the compliance function to the Financial Services Authority no later than 1 (one) month before the planned implementation of the GMS, which contains the agenda for the dismissal or replacement of the president director and/or the director in charge of the compliance function.
 - b. Submission of a request for approval to dismiss or replace the president director and/or director in charge of the compliance function to the Financial Services Authority contains information regarding:



- Alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan; dan
 - Profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
- c. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai rencana pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak layak maka:
- Rencana pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dimaksud tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - Bank dilarang memuat agenda pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam RUPS.
8. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang Direktur yang diberhentikan dari jabatannya dan RUPS dapat mengangkat seseorang sebagai Direktur untuk mengisi suatu lowongan. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan Direktur yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.
9. Direksi wajib memberitahukan perubahan susunan dan nama anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS atau keputusan yang mengikat di luar RUPS.
- Reasons or considerations for dismissing or replacing the president director and/or director in charge of the compliance function; and
 - Profile of a replacement candidate who is deemed to meet the requirements for a fit and proper test.
- c. In the event that the Financial Services Authority assesses that the plan to dismiss or replace the president director and/or the director in charge of the compliance function is not feasible, then:
- The plan to dismiss or replace the president director and/or the director in charge of the compliance function is not approved by the Financial Services Authority; and
 - Banks are prohibited from including an agenda for the dismissal or replacement of the president director and/or director in charge of the compliance function at the GMS.
8. The GMS can appoint another person to fill the position of a Director who is dismissed from his/her position, and the GMS can appoint someone as Director to fill a vacancy. The term of office of a person appointed to replace a Director who has thus resigned or to fill a vacancy is the remaining term of office of the dismissed/replaced Director.
9. The Board of Directors is obliged to notify changes in the composition and names of members of the Board of Directors to the Minister to be recorded in the company register within 30 (thirty) days from the date of the GMS resolution or a resolution that is binding outside the GMS.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Prosedur Penilaian

Penilaian kinerja komite tingkat Direksi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank bagi bank umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank bagi bank umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, POJK No. 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta piagam kerja masing-masing komite. Bank Muamalat kemudian menilai kinerja komite-komite tingkat Direksi dengan metode *self-assessment* secara kolektif dan kolegial yang dilakukan secara berkala melalui Human Capital Division.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

Assessment Procedure

The performance assessment of Board of Directors level committees refers to the Financial Services Authority Regulation regarding the implementation of information technology by commercial banks, the Financial Services Authority Regulation regarding the obligation to prepare and implement credit or bank financing policies for commercial banks, the Financial Services Authority Regulation regarding the obligation to prepare and implement credit or bank financing policies for commercial banks, the Financial Services Authority Regulation regarding the implementation of risk management for sharia commercial banks and sharia business units, POJK No. 17/2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, as well as the work charter of each committee. Bank Muamalat then assesses the performance of Board of Directors level committees using a collective and collegial self-assessment method, which is carried out periodically through the Human Capital Division.

Kriteria Penilaian

Pembentukan komite di bawah Direksi untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pembentukan komite tersebut berdasarkan surat keputusan Direksi disertai tugas dan tanggung jawab masing-masing komite. Adapun tugas dan tanggung jawab komite-komite tersebut secara rinci diatur dalam Piagam (*Charter*) Komite level Direksi Bank Muamalat.

Pada tahun 2024, komite di bawah Direksi yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia yakni Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko, Komite Aset dan Kewajiban, Komite Pembiayaan, serta Komite Kebijakan Pembiayaan.

Penilaian atas kinerja komite-komite tersebut dilakukan secara periodik. Berikut, merupakan kriteria penilaian atas kinerja anggota komite di bawah Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya:

1. Pemenuhan Struktur Organisasi Komite
2. Ketersediaan Piagam/*Charter* Komite
3. Pelaksanaan Rapat Komite
4. Dokumentasi Hasil Rekomendasi Komite

Hasil Penilaian

Berikut adalah hasil penilaian Komite di Bawah Direksi atas kinerja yang telah diberikan sepanjang tahun 2024:

Indikator Indicator	Penilaian	Assessment
Struktur Organisasi Komite Organizational Structure of Committees	Struktur organisasi dan komposisi keanggotaan komite tingkat Direksi telah lengkap dan sesuai dengan kebutuhan Bank. Proses pengangkatan keanggotaan komite telah mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.	The organizational structure and membership composition of the Board of Directors level committees are complete and in accordance with the needs of the Bank. The appointment process of committee membership has referred to the prevailing laws and regulations.
Ketersediaan Piagam Komite Availability of Committee Charter	Seluruh komite tingkat Direksi telah memiliki piagam komite sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota komite yang dievaluasi dan dikinikan secara berkala.	All committees at the Board of Directors level have a committee charter as a guide in carrying out their duties and responsibilities as committee members. However, in the future, improvement is still needed in order to update the existing committee charters.
Pelaksanaan Rapat Komite Implementation Committee Meetings	Frekuensi rapat komite tingkat Direksi selama tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan dan mengacu kepada jadwal rapat tahunan yang telah ditetapkan.	The frequency of Board of Directors committee meetings during 2024 was in accordance with the provisions and refers to the annual meeting schedule that has been set.
Dokumentasi Hasil Rekomendasi Komite Documentation of Results of Committee Recommendation	Hasil rapat komite tingkat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan <i>dissenting opinions</i> (jika ada) secara jelas.	The results of the Board of Directors level committee meetings have been set forth in the minutes of meetings and have been well documented, including clear disclosure of dissenting opinions (if any).

Assessment Criteria

Establishment of committees under the Board of Directors to assist the Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities. The formation of the committee is based on the Board of Directors' decree along with the duties and responsibilities of each committee. The duties and responsibilities of these committees are regulated in detail in the Bank Muamalat Board of Directors Committee Charter.

In 2024, the committees under the Board of Directors owned by Bank Muamalat Indonesia were the Information Technology Steering Committee, Risk Management Committee, Assets and Liabilities Committee, Financing Committee, and Financing Policy Committee.

Assessment of the performance of these committees is carried out periodically. The following are the assessment criteria for the performance of committee members under the Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities:

1. Fulfillment of Committee Organizational Structure
2. Availability of Committee Charter
3. Implementation of Committee Meetings
4. Documentation of Committee Recommendation Results

Assessment Results

Below are results of the assessment of the committees under the Board of Directors for their performance during the year 2024:



Hubungan Afiliasi antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Affiliated Relationships between Members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Majority and/or Controlling Shareholders

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS AFFILIATED RELATIONSHIP

PERNYATAAN HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Statement on Affiliated Relationship of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with						Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with						Hubungan Kepengurusan Management Relationship	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders			
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Sapto Amal Damandari	Komisaris Utama Independent President Commissioner		√		√		√		√		√		√		√
Sartono	Komisaris Independent Commissioner		√		√		√		√		√		√		√
Andre Mirza Hartawan	Komisaris Commissioner		√		√		√		√		√		√		√

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Bank mengatur pengungkapan hubungan afiliasi Direksi mencakup hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham pengendali. Bentuk hubungan keuangan termasuk di antaranya utang-piutang, kerja sama bisnis, dan sebagainya. Sementara bentuk hubungan keluarga mencakup hubungan istimewa terutama yang disebabkan hubungan pertalian darah seperti suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dan sebagainya.

BOARD OF DIRECTORS' AFFILIATED RELATIONSHIP

The Bank regulates the disclosure of the Board of Directors' affiliated relationships, including familial relationships and financial relationships with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and controlling shareholders. Forms of financial relationships include debts, business collaborations, and so on. Meanwhile, forms of familial relationships include special relationships, especially those caused by blood ties, such as husband/wife/children/parents/siblings/in-laws, and so on.

PERNYATAAN HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Statement on Affiliated Relationship of the Board of Directors

Statement on Affiliated Relationship of the Board of Directors															
Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with						Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with						Hubungan Kepengurusan Management Relationship	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders			
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Imam Teguh Saptono	Direktur Utama President Director		√		√		√		√		√		√		√
Karno	Direktur Kepatuhan Compliance Director		√		√		√		√		√		√		√
Kukuh Rahardjo ^{*)}	Direktur Bisnis Business Director		√		√		√		√		√		√		√

^{*)} Efektif tidak menjabat sejak tanggal 25 Maret 2025.
Effective from resignation on March 25, 2025.



Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham

Share Ownership Information Disclosure Policy

Sesuai dengan Peraturan OJK nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, penyampaian laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas Perusahaan. Bank Muamalat dan/atau anggota Pengurus Bank Muamalat senantiasa menyampaikan laporan terkait perubahan kepemilikan saham dari seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota Dewan Pengawas Syariah.

Sepanjang tahun 2024, tidak terjadi perubahan kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi. Rinciannya diuraikan melalui tabel di bawah ini.

In accordance with OJK Regulation No. 11/POJK.04/2017 concerning Ownership Reports or Any Changes in Ownership of Public Company Shares, submission of ownership reports and any changes in ownership of shares must be made no later than 3 (three) days from the occurrence of ownership or changes in ownership of the Company. Bank Muamalat and/or members of the Bank Muamalat Management always submit reports regarding changes in share ownership of all members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and members of the Sharia Supervisory Board.

Throughout 2024, there were no changes in share ownership of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The details are outlined in the table below.

Pemegang Saham Shareholders	Jabatan Position	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Sapto Amal Damandari	Komisaris Utama Independen Independent President Commissioner	-	-
Sartono	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
Ir. Andre Mirza Hartawan, MBA	Komisaris Independen Independent Commissioner	1.731.033.333	5,19
Direksi Board of Directors			
Imam Teguh Saptono	Direktur Utama President Director	-	-
Karno	Direktur Kepatuhan Director of Compliance	-	-
Kukuh Rahardjo ^{*)}	Direktur Bisnis Business Director	-	-

^{*)} Efektif tidak menjabat sejak tanggal 25 Maret 2025.
Effective from resignation on March 25, 2025.

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Diversity Policy of the Board of Commissioners and Directors

Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan sesuai dengan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Determining the composition of members of the Board of Commissioners has considered the diversity of skills, knowledge, and experience required in accordance with the company's objectives and needs in accordance with the recommendations of the Financial Services Authority as stated in the Attachment to the Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines.

PERNYATAAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Statement on Diversity in the Composition of the Board of Commissioners

No.	Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work experience	Keahlian Expertise
1.	Sapto Amal Damandari	Komisaris Utama President Commissioner	69	Laki-laki Male	Sarjana Ekonomi Bachelor of Economy	- Komite Audit Universitas Gadjah Mada sejak (2018-sekarang) - Wakil Komisaris Utama Bank KB Bukopin (2019-2021) - Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2018-2020) - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2014-2017) - Gadjah Mada University Audit Committee (2018-present) - Deputy President Commissioner of Bank KB Bukopin (2019-2021) - President Commissioner of PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2018-2020) - Deputy Chairman of the Financial Audit Agency of the Republic of Indonesia (2014-2017)	- Tata Kelola perusahaan - Ekonomi - Akuntansi - Corporate governance - Economy - Accountancy
2.	Sartono	Komisaris Independen Independent Commissioner	63	Laki-laki Male	Sarjana Hukum Bachelor of Law	- Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung pada tahun 2021 - Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung pada tahun 2019 - Functional Prosecutor at Junior Attorney General Development at the Attorney General's Office in 2021 - Secretary of the Deputy Attorney General for Development at the Attorney General's Office in 2019	Hukum Law



No.	Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work experience	Keahlian Expertise
3.	Andre Mirza Hartawan	Komisaris Commissioner	55	Laki-laki Male	- Doktor Ilmu Ekonomi - Master Administrasi Bisnis - Sarjana Teknik Industri - Doctor of Economics - Master of Business Administration - Bachelor of Industrial Engineering	- Dosen di Institute Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (2024-sekarang) - Komisaris Independen PT Bank Oke Indonesia Tbk (2019-2022) - Komisaris Utama PT Wisma Seratus Sejahtera (2014-sekarang) - Komisaris Utama PT Syres Power Energy (2004-2019) - Komisaris Utama PT Auto Daya Amara (2014-2019) - Lecturer at the Ahmad Dahlan Institute of Technology and Business (2024-present) - Independent Commissioner of PT Bank Oke Indonesia Tbk (2019-2022) - President Commissioner of PT Wisma Seratus Sejahtera (2014-present) - President Commissioner of PT Syres Power Energy (2004-2019) - President Commissioner of PT Auto Daya Amara (2014-2019)	- Ekonomi - Perbankan - Economy - Banking

PERNYATAAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

Statement on Diversity in the Composition of the Board of Directors

No.	Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work experience	Keahlian Expertise
1.	Imam Teguh Saptono	Direktur Utama President Director	55	Laki-laki Male	- Doktor Manajemen dan Bisnis - Magister Manajemen Agribisnis - Sarjana Ekonomi Sosial - Doctor in Management and Business - Master in Agribusiness Management - Bachelor of Social Economics	- Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (2017-2024) - Direktur Utama PT Bank BNI Syariah (2016-2017) - Direktur Risiko dan Kepatuhan PT Bank BNI Syariah (2010-2012) - VP Corporate Secretary PT Bank Permata Tbk (2005-2007) - Head of Investor Relations PT Bank Permata Tbk (2003-2005) - Deputy Chairman of the Indonesian Waqf Board (2017-2024) - President Director of PT Bank BNI Syariah (2016-2017) - Director of Risk and Compliance PT Bank BNI Syariah (2010-2012) - VP Corporate Secretary PT Bank Permata Tbk (2005-2007) - Head of Investor Relations PT Bank Permata Tbk (2003-2005)	- Perbankan Syariah - Keuangan - Sharia Banking - Finance

No.	Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work experience	Keahlian Expertise
2.	Karno	Direktur Kepatuhan Compliance Director	52	Laki-laki Male	• Magister Manajemen • Sarjana Ekonomi • Master of Management • Bachelor of Economics	• Deputi bidang Manajemen Risiko di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) (2018-2022) • Kepala Divisi Manajemen Risiko PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (2016-2018) • Kepala Departemen Manajemen Risiko PT Bank BCA Syariah (2013-2016) • Deputy for Risk Management at the Hajj Financial Management Agency (BPKH) (2018-2022) • Head of Risk Management Division PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (2016-2018) • Head of the Risk Management Department of PT Bank BCA Syariah (2013-2016).	• Manajemen Risiko • Perbankan Syariah • Risk Management • Sharia Banking
3.	Kukuh Rahardjo ^{*)}	Direktur Bisnis Business Director	56	Laki-laki Male	• Magister Manajemen (Bisnis UKM) • Sarjana Ekonomi Pertanian • Master of Management (SME Business) • Bachelor of Agricultural Economics	• Direktur Utama PT Bank NTB Syariah (2018-2024) • Direktur Bisnis Konsumer PT Bank BNI Syariah (2016-2017) • President Director of PT Bank NTB Syariah (2018-2024) • Consumer Business Director of PT Bank BNI Syariah (2016-2017)	• Perbankan Syariah • Keuangan • Sharia Banking • Finance

^{*)} Efektif tidak menjabat sejak tanggal 25 Maret 2025.
Effective from resignation on March 25, 2025.



Penilaian Dewan Komisaris dan Direksi

Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS

Prosedur Penilaian

Penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap tahunnya (paling sedikit satu tahun sekali) melalui metode *self-assessment*. Proses penilaian kinerja ini diawali dengan pengisian kertas kerja yang berisi kriteria/indikator pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang disusun oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku serta atas kompetensi kinerja Dewan Komisaris selama satu semester/tahun.

Hasil penilaian tersebut disampaikan kepada pemegang saham dan dievaluasi melalui RUPS Tahunan. Pada penyerahan laporan, RUPS Tahunan juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengelolaan (pengawasan) yang dilakukan pada tahun buku yang berakhir pada akhir tahun, sepanjang tindakan tersebut tercermin dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil evaluasi terhadap kinerja secara keseluruhan dan hasil evaluasi masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual menjadi pertimbangan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif serta menjadi salah satu dasar pertimbangan Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Selain itu, hasil evaluasi kinerja anggota Dewan Komisaris kemudian menjadi sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris secara umum ditetapkan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi

BOARD OF COMMISSIONERS ASSESSMENT

Assessment Procedure

The implementation of the Board of Commissioners performance assessment is carried out annually (at least once a year) through a self-assessment mechanism. This process begins with filling out a working paper containing criteria/indicators of the implementation of duties and responsibilities in accordance with applicable regulations and on the performance competence of the Board of Commissioners for one semester/year.

The assessment results are then submitted to the shareholders and evaluated through the Annual GMS. At the submission of the report, the GMS also granted full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Commissioners for the management (supervisory) actions carried out in the financial year ended at the end of the year, as long as such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements and do not constitute a criminal offense or violation of the provisions of applicable laws and regulations.

The results of the evaluation of the performance of the Board of Commissioners as a whole and each member of the Board of Commissioners individually are taken into consideration in the compensation and incentive scheme and become one of the bases for consideration by the Shareholders to dismiss and/or reappoint the members of the Board of Commissioners concerned. In addition, the results of the performance evaluation of members of the Board of Commissioners then become a means of assessing and improving the effectiveness of the Board of Commissioners.

Assessment Criteria

The criteria for assessing the performance of the Board of Commissioners are generally established based on the duty obligations contained in the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 of Year 2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Financial Services Authority Regulation No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks, Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.03/2022 regarding Shariah Commercial Banks, as well as applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association and Shareholders

disampaikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi secara terbuka kepada Dewan Komisaris sejak pengangkatan pertamanya.

Aspek kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris secara *self-assessment* terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu aspek: *Governance Structure* (14 indikator), *Governance Process* (20 indikator) dan *Governance Outcome* (8 indikator).

mandate. Assessment criteria are conveyed openly by the Nomination and Remuneration Committee to the Board of Commissioners since the initial appointment.

Aspects of the Board of Commissioners self-assessment criteria are divided into 3 (three), namely aspects: *Governance Structure* (14 indicators), *Governance Process* (20 indicators), and *Governance Outcome* (8 indicators).

Aspek Aspect	Indikator	Indicator
<i>Governance Structure</i>	1. Jumlah Anggota Dewan Komisaris 2. Jumlah Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia 3. Jumlah Komisaris Independen 4. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris 5. Rangkap Jabatan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite di bawah Dewan Komisaris 6. Tidak ada hubungan Keluarga sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi 7. Ketersediaan pedoman dan tata tertib kerja 8. Integritas, kompetensi dan reputasi keuangan 9. Masa tunggu (<i>cooling off</i>) bagi anggota yang berasal dari mantan anggota Direksi 10. Tidak ada hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga yang dapat mempengaruhi independensi 11. Pemenuhan kelulusan <i>fit and proper test</i> OJK 12. Kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab 13. Kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan 14. Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik	1. Number of Members of the Board of Commissioners 2. Number of members of the Board of Commissioners domiciled in Indonesia 3. Number of Independent Commissioners 4. Concurrent Positions of Members of the Board of Commissioners 5. Concurrent Positions Independent Commissioner as Chairman of the Committee under the Board of Commissioners 6. There is no family relationship among members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors 7. Availability of work guidelines and rules 8. Integrity, competence and financial reputation 9. Waiting period (<i>cooling off</i>) for members who are former members of the Board of Directors 10. There are no financial, management, share ownership and/or family relationships that may affect independence 11. Fulfillment of OJK fit and proper test 12. Competence that is sufficient and relevant to the position to carry out the duties and responsibilities 13. Willingness and ability to carry out continuous learning 14. The composition of the Board of Commissioners does not meet the requirements due to owner intervention



Aspek Aspect	Indikator	Indicator
<i>Governance Process</i>	- Proses Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris - Telah memastikan penyelenggaraan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap kegiatan usaha - Melakukan kewajiban dalam pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi - Telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank - Telah menyetujui, mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan strategi Manajemen Risiko - Evaluasi atas pertanggung jawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Manajemen Risiko - Menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank dan rencana korporasi - Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank - Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank - Melakukan pemberitahuan kepada OJK jika terjadi pelanggaran peraturan - Independensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab - Pembentukan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi - Proses pengangkatan Anggota Komite - Memastikan Komite menjalankan tugas dan tanggung jawabnya - Penyediaan waktu yang cukup oleh anggota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab - Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris - Mekanisme pengambilan keputusan Rapat - Tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain - Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank - Intervensi pemilik terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris	- The process of appointing and/or replacing members of the Board of Commissioners - Has ensured the implementation of the principles of Good Corporate Governance in every business activity - Carry out obligations in supervising the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors - Has directed, monitored and evaluated the implementation of the Bank's strategic policies - Has approved, evaluated Risk Management policies and Risk Management strategies - Evaluation of the responsibility of the Board of Directors and provide direction for improvement of the implementation of Risk Management - Approve and supervise the Bank's Business Plan and corporate plan - Not involved in making decisions on the Bank's operational activities - Ensuring that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Bank's Internal Audit Work Unit (SKAI). - Notify the OJK if there is a violation of regulations - Independence in carrying out duties and responsibilities - Formation of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee - The process of appointment of Committee Members - Ensuring that the Committee carries out its duties and responsibilities - Provision of sufficient time by members in carrying out their duties and responsibilities - Implementation of Board of Commissioners Meetings - Meeting decision-making mechanism - Do not use the Bank for personal, family and/or other party interests - Do not take and/or receive personal benefits from the Bank - Owner intervention in carrying out the duties of the Board of Commissioners
<i>Governance Outcome</i>	- Dokumentasi hasil rapat Dewan Komisaris - Penyampaian hasil rapat kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak terkait - Implementasi hasil rapat Dewan Komisaris - Pengungkapan informasi <i>mandatory</i> pada Laporan GCG Bank - Efektivitas pengawasan aktif Dewan Komisaris - Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Dewan Komisaris - Adanya gangguan/kerugian akibat intervensi pemilik terhadap Dewan Komisaris - Penerapan manajemen risiko	- Documentation of the results of the Board of Commissioners' meeting - Submission of meeting results to all members of the Board of Commissioners and related parties - Implementation of the results of the Board of Commissioners meeting - Disclosure of mandatory information on the Bank's GCG Report - The effectiveness of the Board of Commissioners' active supervision - Increasing the knowledge, skills and abilities of members of the Board of Commissioners - There are disturbances/losses due to the owner's intervention on the Board of Commissioners - Application of risk management

Aspek kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris selain memperhatikan indikator di atas juga memperhatikan indikator tambahan yang ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Metode penilaian ialah *self-assessment* yang dilakukan oleh Dewan Komisaris sendiri dan dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Hasil Penilaian

Hasil penilaian *self-assessment* yang telah dilaksanakan pada semester I dan II tahun 2024 dari aspek *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* pada Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat telah sesuai dengan ketentuan dimana Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang dan 2 (dua) di antaranya merupakan Komisaris Independen.
2. Anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris terdapat 1 (satu) orang anggota Komisaris yang belum memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK. Hasil penetapan lulus PKK seorang anggota Komisaris (Komisaris Utama Independen) tersebut telah diterbitkan oleh OJK pada tanggal 24 Maret 2025.
4. Tidak terdapat hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
5. Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan mengadakan rapat bersama Dewan Pengawas Syariah dan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
6. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai fungsinya.
7. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk Komite tingkat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan.
8. Komposisi anggota Komite tingkat Dewan Komisaris juga telah disesuaikan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

In addition to considering the indicators above, the performance assessment criteria for the Board of Commissioners also consider additional indicators specified in the Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.

Assessor

The assessment method is by means of self-assessment carried out by the Board of Commissioners and assisted by the Nomination and Remuneration Committee.

Assessment Results

Results from the self-assessment carried out in semester I and II in 2023 from such various aspects as Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome on the Board of Commissioners are described below:

1. The number and composition of members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board of Bank Muamalat is in accordance with the provisions where the Board of Commissioners who have effectively served are 3 (three) people and 2 (two) of them are Independent Commissioners.
2. Members of the Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia have competencies that are adequate and relevant with their positions to carry out their assigned duties and responsibilities as well as capable of implementing such competencies in performing their duties and responsibilities.
3. Of the 3 (three) members of the Board of Commissioners, there is 1 (one) member of the Board of Commissioners who has not yet obtained a determination of passing the Fit and Proper Test from the OJK. The result of the determination to pass the PKK of a Commissioner (Independent President Commissioner) was issued by OJK on March 24, 2025.
4. There was no family relationship up to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors.
5. The Board of Commissioners has held regular Board of Commissioners meetings at least once every 2 (two) months and held regular meetings with the Sharia Supervisory Board and meetings with the Board of Directors at least once every 4 (four) months.
6. The Board of Commissioners retains the guidelines for the implementation of duties and responsibilities in accordance with its function.
7. In supporting the implementation of supervisory duties, the Board of Commissioners established Committees at the Board of Commissioners level in accordance with the provisions.
8. The composition of members of the Committees at the Board of Commissioners level was also adjusted in accordance with Financial Services Authority Regulation No 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks.



9. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
10. Bank Muamalat juga meraih penghargaan di ajang *Indonesia Sustainable Development Goals Award 2024 Kategori SDGs 4.1 Social Pillar* yang diselenggarakan oleh *Corporate Forum for CSR Development (CFCD)* dan *The Best Indonesia Annual Report Award tahun 2024 (Indonesian Annual Report Award III 2024)* yang diselenggarakan oleh *Economic Review*.

Rekomendasi Hasil Penilaian

Perseroan perlu melakukan pembaruan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan ketentuan pada Board of Manual yang disesuaikan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Desember 2024. Selain itu sesuai amanat dari POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko perlu memperhatikan pengelolaan risiko terkait iklim dan penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* yang dilakukan Bank, termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (*stress testing*).

PENILAIAN DIREKSI

Prosedur Penilaian

Penilaian kinerja Direksi Bank Muamalat dilakukan melalui metode *self-assessment* secara berkala setiap tahun (paling sedikit satu tahun sekali). Proses penilaian kinerja ini diawali dengan pengisian kertas kerja yang berisi kriteria/indikator pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang disusun oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku serta atas kompetensi kinerja Dewan Komisaris selama satu semester/tahun.

Hasil penilaian tersebut kemudian disampaikan kepada pemegang saham dan dievaluasi melalui RUPS Tahunan. Pada penyerahan laporan, RUPS juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengelolaan (pengawasan) yang dilakukan pada tahun buku yang berakhir pada akhir tahun, sepanjang tindakan tersebut tercermin dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. The appointment and/or replacement of members of the Board of Commissioners were in compliance with the provisions and took into account the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.
10. Bank Muamalat also won an award at the 2024 Indonesia Sustainable Development Goals Award in the SDGs 4.1 Social Pillar Category organized by the Corporate Forum for CSR Development (CFCD) and the Best Indonesia Annual Report Award in 2024 (Indonesian Annual Report Award III 2024) organized by the Economic Review.

Recommendations for Assessment Results

The Company needs to update the Corporate Governance Policy and provisions in the Board of Manual, which are adjusted to the changes to the Company's Articles of Association according to the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on December 11, 2024. In addition, according to the mandate of POJK 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, the Board of Commissioners, through the Risk Monitoring Committee, needs to pay attention to climate-related risk management and the implementation of risk management related to country risk and transfer risk carried out by the Bank, including the implementation of evaluations and testing (*stress testing*).

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Assessment Procedures

Performance assessment of the Board of Directors of Bank Muamalat is carried out through the periodic self-assessment method annually (at minimum once a year). This performance assessment process is initiated with filling-out a working paper that contains the criteria/indicators for the implementation of duties and responsibilities set forth by the Nomination and Remuneration Committee in compliance with applicable provisions as well as for the performance competency of the Board of Commissioners during a semester/year.

Results of such assessment are then presented to the shareholders and evaluated through the Annual GMS. Upon submission of the report, the GMS also extends full repayment and release for responsibilities (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors for its management (supervisory) actions carried out during the financial year that ends at the end of the year, as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements and do not constitute a criminal act or violation of the provisions of applicable laws and regulations.

Hasil evaluasi terhadap kinerja secara keseluruhan dan hasil evaluasi masing-masing Direksi secara individual menjadi pertimbangan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif serta menjadi salah satu dasar pertimbangan Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali Direksi yang bersangkutan. Selain itu, hasil evaluasi kinerja anggota Direksi kemudian menjadi sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Direksi.

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian kinerja Direksi terdiri dari aspek finansial dan non finansial. Pada Aspek non finansial, secara umum ditetapkan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi disampaikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi secara terbuka kepada Direksi sejak pengangkatan pertamanya.

Kriteria *self-assessment* Direksi Bank Muamalat terbagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek: *Governance Structure* (15 indikator), *Governance Process* (25 indikator) dan *Governance Outcome* (14 indikator).

Results of evaluation on the general performance and evaluation of each individual member of the Board of Directors are used as basis of consideration for providing compensation scheme and incentive as well as one of the basis of consideration for the Shareholders to dismiss and/or reappoint the concerned members of the Board of Directors. Moreover, results of performance evaluation of members of the Board of Directors subsequently serve as means of assessing as well as improving the effectiveness of the Board of Directors.

Assessment Criteria

The criteria for performance assessment of the Board of Directors consist of such aspects as financial and non-financial. On the non-financial aspect, the criteria are generally based on the duties and obligations as contained in the Financial Services Authority Regulation No 33/POJK.04/2014 of Year 2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Financial Services Authority Regulation No 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks, Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia No. 16/POJK.03/2022 regarding Sharia Commercial Banks, as well as applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association as well as the Shareholders mandate. Assessment criteria are conveyed openly by the Nomination and Remuneration Committee to the Board of Directors since the initial appointment.

The self-assessment criteria of the Board of Directors of Bank Muamalat are divided into 3 (three) aspects, namely aspects: *Governance Structure* (15 indicators), *Governance Process* (25 indicators), and *Governance Outcome* (14 indicators).

Aspek Aspect	Indikator	Indicator
<i>Governance Structure</i>	1. Jumlah Anggota Direksi 2. Jumlah Anggota yang berdomisili di Indonesia 3. Pengalaman/<i>track record</i> anggota Direksi 4. Rangkap Jabatan anggota Direksi 5. Kepemilikan saham pada perusahaan lain 6. Tidak adanya hubungan keluarga sesama anggota Direksi dan/atau dengan Dewan Komisaris 7. Ketersediaan pedoman dan tata tertib kerja 8. Penggunaan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional oleh Direksi 9. Integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan 10. Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen 11. Pemenuhan kelulusan <i>fit and proper test</i> OJK 12. Kompetensi Direksi yang memadai dan relevan dengan jabatannya 13. Kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan 14. Budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan 15. Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik	1. Number of Directors 2. Number of Members domiciled in Indonesia 3. Experience/<i>track record</i> of members of the Board of Directors 4. Dual Position of members of the Board of Directors 5. Share ownership in other companies 6. No family relationship among members of the Board of Directors and / or with the Board of Commissioners 7. Availability of guidelines and work rules 8. The use of individual advisors and/or professional services by the Board of Directors 9. Integrity, competence and financial reputation 10. President Director or President Director, coming from an independent party 11. Fulfillment of OJK fit and proper test 12. Competence of the Board of Directors is adequate and relevant to their position 13. Willingness and ability to conduct continuous learning in order to improve knowledge 14. Culture of continuous learning in order to improve knowledge 15. Composition of the Board of Directors does not fulfill the provisions due to owner intervention



Aspek Aspect	Indikator	Indicator
Governance Process	- Proses Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi - Pengangkatan Anggota Komite Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris - Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain - Pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah - Pengelolaan Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan UU - Independensi Direksi terhadap pemegang saham - Pelaksanaan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi - Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan OJK - Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada anggota Dewan Komisaris dan DPS - Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat - Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan - Menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi - Tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain - Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank - Intervensi pemilik terhadap pelaksanaan tugas Direksi - Kebijakan Manajemen Risiko dan strategi kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif - Ketersediaan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko - Evaluasi dan/atau pengkinian kebijakan strategi dan kerangka Manajemen Risiko - Pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko - Mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan - Evaluasi dan keputusan atas transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi - Pengembangan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi - Independensi fungsi manajemen risiko - Penyusunan Rencana Bisnis Bank yang terukur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian - Komunikasi atas Rencana Bisnis Bank kepada Pemegang Saham dan seluruh jenjang organisasi	- Appointment and/or replacement process for members of the Board of Directors; - Appointment of Board of Directors Committee Members based on the decision of the Board of Commissioners meeting; - Not giving general power of attorney to other parties; - Implementation of the Bank's management based on prudential principles and sharia principles; - Management of the Bank in accordance with the authority and responsibilities of the Board of Directors as stipulated in the Articles of Association and the Law; - Independence of the Board of Directors towards shareholders; - Implementation of the principles of Good Corporate Governance in every business activity of the Bank at all levels of the organization; - Follow up on audit findings and recommendations from SKAI, external auditors, and OJK supervision results; - Providing accurate, relevant and timely data and information to members of the Board of Commissioners and DPS; - Decision making of the Board of Directors meeting has been conducted based on deliberation to reach consensus; - Every meeting decision taken by the Board of Directors can be implemented; - Determining strategic policies and decisions through the mechanism of the Board of Directors meeting; - Not utilizing the Bank for personal, family, and/or other parties' interests; - Not taking and/or receiving personal benefits from the Bank; - Owner's intervention in the implementation of the duties of the Board of Directors; - Written and comprehensive Risk Management Policy and Risk Management framework strategy; - Availability of procedures and tools to identify, measure, monitor, and control Risks; - Evaluation and/or updating of Risk Management strategy and framework policies; - Implementation of Risk Management policies and Risk exposures; - Transaction approval mechanism, including those that exceed the limit and authority; - Evaluation and decision on transactions that require the approval of the Board of Directors; - Development of Risk Management culture at all levels of the organization; - Independence of risk management function; - Preparation of a measurable Bank Business Plan with due regard to prudential principles; - Communication of the Bank's Business Plan to Shareholders and all levels of the organization.

Aspek Aspect	Indikator	Indicator
<i>Governance Outcome</i>	1. Pertanggungjawaban tugas Direksi kepada pemegang saham/RUPS 2. Pemegang saham menerima pertanggungjawaban Direksi di RUPS 3. Pengungkapan kebijakan-kebijakan strategis bank di bidang kepegawaian 4. Komunikasi kepada seluruh karyawan mengenai arah bisnis/visi misi Bank 5. Dokumentasi rapat Direksi 6. Pengungkapan informasi penting Direksi pada laporan pelaksanaan GCG 7. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi 8. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank 9. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan 10. Pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko 11. Adanya gangguan/kerugian akibat intervensi pemilik terhadap tugas Direksi 12. Penerapan Manajemen Risiko secara efektif 13. Penyusunan Rencana Bisnis Bank 14. Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan	1. Accountability of the Board of Directors' duties to the shareholders/RUPS 2. Shareholders accept the accountability of the Board of Directors in the GMS 3. Disclosure of the Bank's strategic policies related to employment 4. Communication to all employees regarding the Bank's business direction/vision and mission 5. Documentation of Board of Directors meetings 6. Disclosure of important information of the Board of Directors in the GCG implementation report 7. Improvement of knowledge, expertise, and capabilities of members of the Board of Directors 8. Improvement of knowledge, skills, and abilities of all Bank employees 9. Continuous improvement of learning culture 10. Active monitoring of the implementation of Risk Management policies and strategies 11. Disruption/loss due to owner intervention in the duties of the Board of Directors 12. Effective implementation of Risk Management 13. Preparation of the Bank's Business Plan 14. The Bank's Business Plan has described the Bank's sustainable growth.

Aspek kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris selain memperhatikan indikator di atas juga memperhatikan indikator tambahan yang ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

In addition to considering the indicators above, the performance assessment criteria for the Board of Commissioners also consider additional indicators specified in the Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Metode penilaian ialah *self-assessment* yang dilakukan oleh Direksi sendiri dan dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Assessor

The assessment method is through self-assessment carried out by the Board of Directors and assisted by the Remuneration and Nomination Committee.

Hasil Penilaian

Hasil penilaian *self-assessment* yang telah dilaksanakan pada semester I dan II tahun 2024 dari aspek *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* pada Direksi adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil PKK yang diterbitkan oleh OJK tanggal 24 Maret 2025, maka jumlah anggota Direksi yang efektif menjabat adalah 2 (dua) orang.
2. Sehubungan dengan hasil PKK Direksi tanggal 24 Maret 2025, Bank wajib memenuhi jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
3. Tidak terdapat hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Direksi.
4. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
5. Anggota Direksi Bank Muamalat memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang

Assessment Results

Results of the self-assessment conducted in semester I and II of 2024 of such various aspects as Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome on the Board of Directors are explained below:

1. Based on the results of the PKK issued by OJK on March 24, 2025, the number of effective members of the Board of Directors is 2 (two) people.
2. In connection with the results of the review of the Board of Directors dated March 24, 2025, the Bank is required to meet the number of members of the Board of Directors of at least 3 (three) people.
3. There were no family relationship up to the second degree with fellow members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
4. Members of the Board of Directors do not grant general power of attorney to other parties, which results in the transfer of duties and functions of the Board of Directors.
5. Members of the Board of Directors of Bank Muamalat have the competencies that were adequate and relevant with their positions to carry out their duties and responsibilities and capable to implement



- dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
6. Direksi telah memiliki pedoman (*board manual*) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai fungsinya.
 7. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi Bank Muamalat telah sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
 8. Direksi Bank Muamalat telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya tanpa intervensi dari pemegang saham dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
 9. Dalam rangka mendukung tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah membentuk beberapa komite tingkat Direksi yaitu Risk Management Committee, IT Steering Committee, ALCO, Komite Kebijakan Pembiayaan, dan Komite Pembiayaan.
 10. Direksi telah menyelenggarakan rapat secara rutin paling kurang setiap minggu sekali yang membahas keputusan yang bersifat strategis serta telah menyelenggarakan rapat bersama Dewan Komisaris dan rapat bersama Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 11. Direksi telah menetapkan dan mengkinikan prosedur dan *tools* untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko.
 12. Bank Muamalat juga meraih penghargaan di ajang *Indonesia Sustainable Development Goals Award 2024 Kategori SDGs 4.1 Social Pillar* yang diselenggarakan oleh *Corporate Forum for CSR Development (CFCD)* dan *The Best Indonesia Annual Report Award tahun 2024 (Indonesian Annual Report Award III 2024)* yang diselenggarakan oleh *Economic Review*.
 13. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank Muamalat yang bersifat strategis di bidang kepegawaian dan mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank.
 14. Direksi berupaya melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 15. Direksi telah mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi, melalui antara lain *e-mail blast*, *podcast*, video, pelatihan, kuis dan nilai budaya perusahaan.
 16. Direksi juga telah mengembangkan budaya kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi, melalui antara lain *e-mail blast* dan Memorandum Internal.
- their competencies in performing their duties and responsibilities.
6. The Board of Directors has retained the board manual for carrying out their duties and responsibilities in accordance with its function.
 7. The appointment and/or replacement of members of the Board of Directors of Bank Muamalat were in compliance with applicable provisions and took into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
 8. The Board of Directors of Bank Muamalat has endeavored to carry out its duties and functions without intervention from shareholders and is fully responsible for the implementation of the Bank's management.
 9. In supporting the implementation of duties and responsibilities, the Board of Directors established several committees at the Board of Directors' level, namely the Risk Management Committee, IT Steering Committee, ALCO, Human Capital Committee, Business Committee, Financing Policy Committee and Financing Committee.
 10. The Board of Directors has held regular meetings at least once a week to discuss strategic decisions and has held meetings with the Board of Commissioners and meetings with the Sharia Supervisory Board periodically at least once every 4 (four) months.
 11. The Board of Directors has established and updated procedures and tools to identify, measure, monitor, and control risk.
 12. Bank Muamalat also won an award at the Indonesia Sustainable Development Goals Award 2024 in the SDGs 4.1 Social Pillar Category organized by the Corporate Forum for CSR Development (CFCD) and the Best Indonesia Annual Report Award 2024 (Indonesian Annual Report Award III 2024) organized by the Economic Review.
 13. The Board of Directors disclosed Bank Muamalat's policies that are strategic to personnel matters and has communicated to employees on the Bank's business direction in the context of achieving the Bank's mission and vision.
 14. The Board of Directors strives to implement the principles of Good Corporate Governance in every business activity of the Bank at all levels of the organization.
 15. The Board of Directors has developed a Risk Management culture at all levels of the organization through, among others, e-mail blasts, podcasts, videos, training, quizzes, and corporate cultural values.
 16. The Board of Directors developed the culture of compliance at all levels of the organization, among others, through e-mail blast and podcast.

Rekomendasi Hasil Penilaian

1. Sehubungan dengan perubahan pengurus Bank sesuai hasil RUPS Luar Biasa tanggal 11 Desember 2024, Perseroan perlu melakukan pengkinian struktur organisasi dan pengkinian anggota Komite tingkat Direksi berdasarkan susunan pengurus terkini.
2. Mengacu pada amanat POJK No. 17 tahun 2023 tentang Tata Kelola bagi Bank Umum, Bank wajib memperhitungkan risiko keuangan terkait iklim dalam kerangka pengendalian internal melalui 3 (tiga) lini pertahanan (*three lines of defence*) yang mencakup lini manajemen bisnis, lini manajemen risiko dan kepatuhan, dan lini audit internal untuk memastikan identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko terkait iklim dilakukan dengan tepat, komprehensif, dan efektif. Direksi juga wajib memastikan penerapan manajemen risiko mencakup *country risk* dan *transfer risk* terlaksana dengan baik.
3. Melakukan perbaikan proses Tata Kelola pada kegiatan bisnis Bank secara berkelanjutan dan terencana dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank Umum sesuai amanat POJK Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.

Assessment Result Recommendations

1. In connection with the change in the Bank's management according to the results of the Extraordinary GMS on December 11, 2024, the Company needs to update the organizational structure and update the members of the Board of Directors Committee based on the current management composition.
2. Referring to the mandate of POJK No. 17 of 2023 concerning Governance for Commercial Banks, Banks are required to calculate climate-related financial risks within the internal control framework through 3 (three) lines of defense, which include the business management line, the risk management and compliance line, and the internal audit line to ensure that identification, measurement, and mitigation of climate-related risks are carried out appropriately, comprehensively, and effectively. The Board of Directors is also required to ensure that the implementation of risk management, including country risk and transfer risk, is carried out properly.
3. Improve the Governance process in the Bank's business activities in a sustainable and well-planned manner in accordance with sharia principles and applicable laws and regulations.
4. Establish a special work unit responsible for preventing fraud or manipulation in Financial Information and/ or Financial Statements of Commercial Banks in accordance with the mandate of POJK Number 15 of 2024 concerning the Integrity of Bank Financial Reporting.



Nominasi dan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi

Nomination and Remuneration of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners, and the Board of Directors

REMUNERASI

Tata kelola remunerasi Bank Muamalat mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang kemudian diturunkan ke dalam Surat Keputusan No. 012/R/DIR-KPTS/III/2024 tentang Tata Kelola Pemberian Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang ditandatangani bersama oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama pada tanggal 25 Maret 2024.

Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi yang diimplementasikan oleh Bank bertujuan untuk:

1. Memastikan kesesuaian pemberian remunerasi dengan prinsip syariah.
2. Mengatur proses dan pendekatan guna menentukan remunerasi bagi seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan berdasarkan jenis pekerjaan, prestasi kerja individu, kontribusi kepada Bank, kewajaran dengan dengan *peer group* dalam industri Bank, serta perbandingan kemampuan Bank.
3. Peningkatan tata kelola yang baik dalam pemberian remunerasi

Dalam menjalankan kebijakan remunerasi, Bank Muamalat senantiasa memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, seperti upah minimum provinsi atau upah minimum kota/kabupaten. Bank Muamalat juga mengkaji ulang kebijakan remunerasi secara berkala dengan memperhatikan hasil analisis *market* dengan *peer group* industri Bank, kontribusi individual kepada Bank, performa serta kemampuan Bank sehingga kelangsungan usaha bank dapat terjaga.

Cakupan Kebijakan dan Implementasinya

Kebijakan pemberian remunerasi pada Bank Muamalat mempertimbangkan terciptanya manajemen risiko yang efektif, stabilitas keuangan, kecukupan dan penguatan permodalan, kebutuhan likuiditas dan potensi pendapatan Bank serta kesesuaian dengan prinsip syariah. Bank Muamalat mengimplementasikan kebijakan remunerasi yang mencakup seluruh jajaran organisasi Bank, termasuk

REMUNERATION

Bank Muamalat's remuneration governance refers to the Financial Services Authority Regulation No. 59/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, which was then derived into Decree No. 012/R/DIR-KPTS/III/2024 concerning Governance of the Provision of Remuneration for the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, which was jointly signed by the President Commissioner and President Director on March 25, 2024.

Remuneration Policy

The remuneration policy implemented by the Bank aims to:

1. Ensure the suitability of remuneration with sharia principles.
2. Regulate the process and approach to determine remuneration for all Directors, Board of Commissioners, and employees based on the type of work, individual work performance, contribution to the Bank, fairness with peer groups in the Bank's industry, as well as the Bank's performance and capabilities.
3. Improvement of good governance in terms of remuneration.

In implementing the remuneration policy, Bank Muamalat always pays attention to applicable laws and regulations, such as provincial minimum wage or city/regency minimum wage. Bank Muamalat also reviews remuneration policies periodically by considering the results of market analysis with the Bank's industry peer group, individual contributions to the Bank, performance, and the Bank's ability so that the Bank's business continuity can be maintained.

Policy Scope and Its Implementation

The policy for providing remuneration at Bank Muamalat takes into account the creation of effective risk management, financial stability, adequacy and strengthening of capital, liquidity requirements and potential income of the Bank as well as conformity with sharia principles. Bank Muamalat implements a remuneration policy that covers all levels of the Bank's organization, including the Sharia Supervisory

Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan remunerasi Bank Muamalat Indonesia mengacu pada prinsip syariah sebagai berikut:

1. Pemberian remunerasi harus mempertimbangkan kewajaran dalam harga pasar di industri sejenis dan sesuai dengan kompetensi dan kinerja karyawan.
2. Pemberian remunerasi pada awal karyawan bergabung harus disepakati dan tercantum dalam sebuah kontrak kerja yang menganut asas konsensus.
3. Pemberian remunerasi harus didasari kesadaran bersama bahwa bekerja merupakan bagian dari mengejar ridha Allah SWT.
4. Pemberian remunerasi harus mempertimbangkan beban kerja yang diberikan kepada karyawan atau *al ghummu bil ghummi*.

Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko

Bank Muamalat menerapkan kebijakan dan strategi pemberian remunerasi dengan mempertimbangkan potensi risiko yang akan timbul dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Bank Muamalat telah mengategorikan pihak-pihak yang menjadi *Material Risk Takers* (MRT) berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan potensi risiko yang timbul atas suatu jabatan yang dimiliki. Dalam hal terjadi risiko akibat keputusan yang diambil, maka Bank Muamalat berhak untuk menunda pembayaran atau tidak membayarkan remunerasi yang bersifat *variable* yang belum dibayarkan kepada pihak yang telah ditetapkan sebagai MRT.

Pengukuran Kinerja Terkait Remunerasi

Bank Muamalat memiliki *Performance Management System* (PMS) dalam pengukuran kinerja terkait remunerasi. Metode PMS ialah metode pengukuran kinerja individu dan jenis risiko sesuai skala dan kompleksitas usaha Bank. Adapun Penilaian kinerja individu ditentukan melalui target atau *Most Important Goals* (MIG) yang telah ditentukan pada awal tahun buku serta peninjauan pencapaian pada akhir tahun buku.

Hasil dari penilaian MIG kemudian dijadikan dasar dalam peninjauan remunerasi yang dilakukan secara berkala setiap tahun dengan memperhatikan kinerja individu karyawan, posisi upah terhadap struktur upah (*salary*) serta kinerja dan kemampuan Bank.

Board, Board of Commissioners, Directors and employees in accordance with applicable laws and regulations.

Bank Muamalat Indonesia's remuneration policy refers to sharia principles as follows:

1. Provision of remuneration must consider fairness in market prices in similar industries and in accordance with the competence and performance of employees.
2. The provision of remuneration when employees join must be agreed upon and stated in a work contract that adheres to the principle of consensus.
3. Remuneration must be based on a shared awareness that work is part of pursuing the pleasure of Allah SWT.
4. Remuneration must consider the workload given to employees or *al ghummu bil ghummi*.

Remuneration Associated with Risk

Bank Muamalat implements policies and strategies for providing remuneration by considering the potential risks that will arise while taking into account the precautionary principle. Bank Muamalat has categorized parties who become Material Risk Takers (MRT) based on certain considerations in accordance with the potential risks that arise from a position held. In the event of a risk arising from a decision taken, Bank Muamalat has the right to postpone payment or not pay variable remuneration that has not been paid to the party that has been designated as MRT.

Performance Measurement Related to Remuneration

Bank Muamalat has a Performance Management System (PMS) in measuring performance related to remuneration. The PMS method is a method of measuring individual performance and types of risk according to the scale and complexity of the Bank's business. The individual performance assessment is determined through the targets or Most Important Goals (MIG) that have been determined at the beginning of the financial year and review of achievements at the end of the financial year.

The results of the MIG assessment are then used as the basis for a remuneration review which is carried out periodically every year by taking into account the performance of individual employees, the position of wages in relation to the wage structure (*salary*) as well as the performance and capabilities of the Bank.



Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Prinsip kehati-hatian senantiasa diimplementasikan oleh Bank Muamalat dalam memberikan remunerasi, baik remunerasi yang bersifat tetap maupun yang bersifat variabel. Remunerasi bersifat variabel bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah ditetapkan berdasarkan persetujuan Komite Nominasi dan Remunerasi. Sedangkan penetapan remunerasi bagi karyawan yang bersifat variabel didasarkan pada persetujuan Direksi terkait. Selanjutnya, pengawasan karyawan pada unit kerja dilakukan sesuai dengan kinerja individu dengan tetap memperhatikan objektivitas dan independensi.

Penerapan manajemen risiko remunerasi terwujud pada diberlakukannya ketentuan terkait pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada *Material Risk Takers*.

Konsultan Terkait Remunerasi

Konsultan Willis Tower Watson ialah konsultan yang dipilih oleh Bank Muamalat untuk mendapatkan data *market peer group*. Data tersebut diperoleh melalui survei yang diikuti oleh sebagian besar industri perbankan di Indonesia yang menjadi *market peer group*. Data statistik dari konsultan tersebut kemudian digunakan sebagai referensi peninjauan remunerasi bersifat tetap dan pemberian remunerasi bersifat variabel.

Remuneration Adjustment Linked to Performance and Risk

The precautionary principle is always implemented by Bank Muamalat in providing remuneration, both fixed and variable remuneration. Variable remuneration for members of the Board of Directors, Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board is determined based on the approval of the Nomination and Remuneration Committee. Meanwhile, the determination of remuneration for employees that is variable is based on the approval of the relevant Directors. Furthermore, supervision of employees in work units is carried out according to individual performance while still paying attention to objectivity and independence.

The implementation of remuneration risk management at was realized in the enactment of provisions related to the granting of variable remuneration to *Material Risk Takers*.

Consultants on Remuneration

The Willis Tower Watson consultant is the consultant selected by Bank Muamalat to obtain market peer group data. The data was obtained through a survey which was attended by most of the banking industry in Indonesia, which is the market peer group. Statistical data from the consultant is then used as a reference for reviewing fixed remuneration and variable remuneration.

PAKET REMUNERASI DAN FASILITAS YANG DITERIMA OLEH DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Remuneration Packages and Facilities Received by Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board

Keterangan Description	Jumlah yang Diterima dalam Satu Tahun Amount Received in One Year					
	Direksi Board of Directors		Dewan Komisaris Board of Commissioners		DPS SSB	
	Orang Person	Jutaan Million (Rp)	Orang Person	Jutaan Million (Rp)	Orang Person	Jutaan Million (Rp)
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk non natura Salary, bonuses, routine allowances, tantiem, and other facilities in kind	5	20.549,72	4	7.969,17	3	1.031,25
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki; dan/atau b. tidak dapat dimiliki. Other facilities in kind (housing, health insurance, etc.) that: a. can be owned; and/or b. cannot be owned.	-	-	-	-	-	-
Total^{*)}	5	20.549,72	4	7.969,17	3	1.031,25

^{*)} Nilai adalah jumlah total remunerasi yang diterima selama 2024.
Value is the total amount of remuneration received during 2024.

PAKET REMUNERASI YANG DIKELOMPOKKAN DALAM TINGKAT PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM 1 (SATU) TAHUN

Remuneration Package Based on the Income Level Received by Directors, Commissioners, and Sharia Supervisory Board in 1 (One) Year

Jenis Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun Type of Remuneration per Person in 1 (one) Year	Jumlah Anggota Direksi Number of Members of the Board of Directors	Jumlah Anggota Dewan Komisaris Number of Board Members Commissioner	Jumlah Anggota DPS Number of DPS Members
> Rp2 miliar > Rp2 billion	5	1	-
Rp1 miliar-Rp2 miliar Rp1 billion-Rp2 billion	-	3	-
Rp500 juta-Rp1 miliar Rp500 million-Rp1 billion	-	-	-
≤ Rp500 juta ≤ Rp500 million	-	-	3

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Dijadikan Material Risk Taker

Dalam menetapkan posisi/jabatan yang termasuk ke dalam kategori MRT, Bank Muamalat mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah. Adapun yang termasuk dalam MRT adalah:

1. Dewan Komisaris
2. Direksi
3. Pejabat setingkat SEVP
4. Karyawan yang mendapatkan remunerasi yang bersifat variabel dengan jumlah sama dengan atau lebih besar dari Rp650 juta

Share Option

Pada tahun 2024, Bank Muamalat Indonesia tidak menerbitkan program *share option* untuk Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Bank Muamalat.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah sesuai *grade* maksimum masing-masing karyawan di Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:

Rasio Gaji Tertinggi : Terendah	26,0	Highest Employee Salary Ratio : Lowest
Rasio Gaji Direksi Tertinggi : Terendah	1,7	Highest Salary Ratio of Directors : Lowest
Rasio Gaji Komisaris Tertinggi : Terendah	1,1	Highest Commissioner Salary Ratio : Lowest
Rasio Gaji Direksi Tertinggi : Karyawan Tertinggi	2,3	Highest Salary Ratio of Directors : Highest Employee

Position and Number of Parties Appointed as Material Risk Taker

In determining the position included in the MRT category, Bank Muamalat refers to the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 59/POJK.03/2020 concerning Requirements and Procedures for Separation of Sharia Business Units. Those included in the MRT are:

1. Board of Commissioners
2. Board of Directors
3. SEVP-level officials
4. Employees who receive variable remuneration with an amount equal to or greater than Rp650 million

Share Option

In 2024, Bank Muamalat Indonesia did not issue a share option program for the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, Board of Directors, and employees of Bank Muamalat.

Highest and Lowest Salary Ratio

The highest and lowest salary ratio according to the maximum grade of each employee in Bank Muamalat Indonesia is as follows:



Jumlah Remunerasi Variabel yang Ditangguhkan

Sepanjang tahun 2024, Bank Muamalat tidak memberikan remunerasi yang bersifat variabel yang diberikan dan ditangguhkan.

Total Deferred Variable Remuneration

During the year, Bank Muamalat did not provide any granted or deferred variable remuneration.

Remunerasi yang Bersifat Tetap	Keterangan (Rp) Description	Fixed Remuneration
Tunai	130.430.091.182	Cash
Saham/Instrumen yang Berbasis Saham yang Diterbitkan Bank	Nihil Nil	Stock/Instrument based on Shares Issued by the Bank
Remunerasi yang Bersifat Variabel	Nihil Nil	Variable Remuneration
Tunai	Nihil Nil	Cash
Saham/Instrumen yang Berbasis Saham yang Diterbitkan Bank	Nihil Nil	Stock/Instrument based on Shares Issued by the Bank

Informasi Kuantitatif

Informasi kuantitatif untuk MRT adalah sebagai berikut:

1. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan, baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit;
2. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan; dan
3. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

Quantitative Information

The quantitative information for MRT is as follows:

1. Total remaining deferred remuneration, both exposed to implicit and explicit adjustments;
2. Total reduction in Remuneration due to explicit adjustments during the reporting period; and
3. Total reduction in Remuneration due to implicit adjustments during the reporting period.

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel Type of Remuneration that is Variable	Sisa yang Masih Ditangguhkan Remaining Deferred	Total Pengurangan Selama Periode Laporan Total Reduction During the Reporting Period		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A) Due to Explicit Adjustment (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B) Due to Implicit Adjustment (B)	Total (A)+(B)
Tunai (Rp juta) Cash (Rp million)	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah) yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut. Shares/Share-based instruments issued by the Bank (in shares and nominal million rupiah) which are conversion of shares.	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil

Rapat Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi

Meeting of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners, and the Board of Directors

RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Kebijakan Rapat

Penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan *Board Manual* Bank Muamalat Indonesia serta Pedoman Kerja Dewan Pengawas Syariah. Rapat Dewan Pengawas Syariah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Selain itu Dewan Pengawas Syariah juga menyelenggarakan rapat bersama Direksi dan rapat bersama Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pengambilan keputusan pada rapat Dewan Pengawas Syariah dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila dalam proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat tersebut dapat dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasannya. Adapun, rapat Dewan Pengawas Syariah untuk mengeluarkan opini syariah baik untuk produk maupun aktivitas harus dihadiri dan diputuskan oleh seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah.

Rapat Dewan Pengawas Syariah terbagi menjadi Rapat Internal Dewan Pengawas Syariah dan Rapat Dewan Pengawas Syariah bersama organ Bank Muamalat Indonesia dan/atau bersama *Sharia Compliance*. Rapat Dewan Pengawas Syariah tersebut diadakan di tempat kedudukan Bank Muamalat Indonesia atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dan pemanggilan rapatnya dilakukan oleh Ketua atau oleh salah seorang anggota Dewan Pengawas Syariah atau *Sharia Compliance* yang bertindak sebagai *liaison officer*. Risalah rapat yang memuat hasil rapat Dewan Pengawas Syariah wajib didokumentasikan dengan baik. Seluruh keputusan Dewan Pengawas Syariah yang dituangkan dalam risalah rapat tersebut merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah.

MEETING OF SHARIA SUPERVISORY BOARD

Meeting Policy

The organization of the Bank Muamalat Syariah Supervisory Board meeting refers to Financial Services Authority Regulation Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and the Bank Muamalat Indonesia Board Manual and the Sharia Supervisory Board Work Guidelines. Sharia Supervisory Board meetings are held at least 1 (one) time in 1 (one) month. In addition, the Sharia Supervisory Board also holds joint meetings with the Board of Directors and joint meetings with the Board of Commissioners at least 1 (one) time in 4 (four) months.

Decision-making in the Sharia Supervisory Board meetings is based on deliberation to reach a consensus. In case there is dissent in the decision-making process, it can be stated in the minutes of the meeting along with the reasons. Meetings of the Sharia Supervisory Board that are specifically implemented to issue Sharia opinions for both products and activities must be attended to and decided by all members.

Sharia Supervisory Board Meeting then divides the types of Sharia Supervisory Board Meetings, consisting of Internal Sharia Supervisory Board Meetings and Sharia Supervisory Board Meetings with Bank Muamalat Indonesia organs and/or with Sharia Compliance. The meeting of the Sharia Supervisory Board is held at the domicile of Bank Muamalat Indonesia or elsewhere within the Republic of Indonesia territory. Invitation for Sharia Supervisory Board Meeting is carried out by the Chairman or a member of the Sharia Supervisory Board or Sharia Compliance acting as a liaison officer. The results of the Sharia Supervisory Board meetings must be stated in the minutes of the meeting and properly documented. All decisions of the Sharia Supervisory Board, as outlined in the minutes of the meeting, are joint decisions of all members of the Sharia Supervisory Board.



Materi-materi yang dibahas dalam rapat Dewan Pengawas Syariah sesuai *Board Manual* Bank Muamalat Indonesia antara lain:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan produk baru dan hasil *review* produk yang telah ada antara lain mengenai tujuan, karakteristik dan akad yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pengajuan aktivitas baru dan *review* aktivitas Bank yang telah berjalan dari aspek syariah.
3. Pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal.
4. Permasalahan mengenai penerapan fungsi kepatuhan syariah, penerapan fungsi manajemen risiko syariah; dan penerapan fungsi audit intern syariah.
5. Permasalahan yang timbul akibat aktivitas Bank yang membutuhkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.

Pelaksanaan Rapat

Sepanjang tahun buku 2024, Dewan Pengawas Syariah telah menggelar rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian sebagai berikut:

Materials discussed in the Sharia Supervisory Board meetings according to the Bank Muamalat Indonesia Board Manual include the following:

1. Matters related to the development of new products and the review results of the existing product, including regarding the objectives, characteristics, and contracts used following the sharia principles.
2. Submission of new activities and review of the existing Bank activities from the sharia aspect.
3. Implementation of sharia principles in the capital market.
4. Problems regarding the implementation of sharia compliance functions, the implementation of sharia risk management functions, and the implementation of sharia internal audit functions.
5. Problems arising from Bank activities that require opinions from the Sharia Supervisory Board.

Meeting Implementation

During the 2024 financial year, the Sharia Supervisory Board held 12 (twelve) meetings with the following details:

FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Frequency of Meetings and Attendance Level of the Sharia Supervisory Board

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
1.	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si	Ketua Chairman	12	12	100%
2.	Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH	Anggota Member	12	12	100%
3.	Dr. H. Agung Danarto, M.Ag	Anggota Member	12	11	92%

AGENDA RAPAT INTERNAL DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

Internal Meeting Agenda of Sharia Supervisory Board

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
1.	26 Januari 2024 January 26, 2024	1. Pendapatan Akru SUKBI 2. <i>Income Smoothing</i> 3. <i>Summary</i> KHP Aspek Syariah Pemeriksaan OJK Tahun 2023 4. <i>Update</i> Uji Petik 5. Permohonan Opini SNAP 6. Konsultasi Syari'ah: E-Money	• Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si • Dr. H. Agung Danarto, M.Ag • Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
2.	16 Februari 2024 February 16, 2024	- Biaya Administrasi Tabungan Dorman - Permohonan Opini Syariah <i>Trade Finance Product</i>: - Akad Salam: Skema <i>Cash and Carry</i> dan Akad Salam: Skema <i>Value Chain Buyer Financing</i> - Skema Kerjasama BJBS-BMI - Akad pada LC/SKBDN Ekspor - Kajian Penetapan Biaya Administrasi Pembiayaan - Laporan Hasil Konsultasi 3 Bulanan <i>Update</i> SE OJK - Konsultasi Syari'ah: - Pelunasan dipercepat pada akad IMBT <i>Musarakah</i>	- Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si - Dr. H. Agung Danarto, M.Ag - Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH
3.	8 Maret 2024 March 8, 2024	- Permohonan Persetujuan Implementasi Layanan Muamalat <i>Remittance</i> iB Melalui Muamalat DIN - Kerjasama <i>Multibiller</i> untuk Para Mitra - Tindak Lanjut Pelanggaran Aspek Syariah sebagai pengurang MIG/KPI - Penyampaian POJK 2.2024 Penerapan Tata Kelola Syariah - Request for Approval of Implementation of Muamalat Remittance iB Service through Muamalat DIN - Multibiller Cooperation for Partners - Follow-up on Violation of Sharia Aspects as a deduction for MIG / KPI - Submission of POJK 2.2024 Implementation of Sharia Governance	- Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si - Dr. H. Agung Danarto, M.Ag - Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH
4.	26 April 2024 April 26, 2024	- Permohonan Opini terkait Transaksi Penjualan Banknotes SAR Interbank - Permohonan opini DPS untuk Layanan Tarik & Setor Tunai PT POS - Permohonan Opini Bank Penerima Margin <i>Update</i> Informasi Sertifikasi DPS <i>Update</i> Rencana Dirasah Islamiyah semester I - Request for Opinion related to Interbank SAR Banknotes Sales Transaction - Request for DPS opinion for Cash Withdrawal & Deposit Service PT POS - Request for Opinion on Margin Receiving Bank - Update on DPS Certification Information - Update on Dirasah Islamiyah Plan for the first semester	- Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si - Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH
5.	13 Mei 2024 May 13, 2024	<i>Update</i> Permohonan opini DPS untuk Layanan Tarik & Setor Tunai PT Pos - Diskusi Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah sebelum Jatuh Tempo <i>Update</i> RCM - Laporan Konsultasi 3 Bulanan - Update on DPS opinion request for PT Pos Cash Withdrawal & Deposit Service - Discussion on Repayment of Murabahah Financing Debt Before Maturity - RCM Update 3 Monthly Consultation Report	- Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si - Dr. H. Agung Danarto, M.Ag - Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH
6.	10 Juni 2024 June 10, 2024	- Pendapatan Akru SUVBI dalam Distribusi HI-1000 - Penerimaan Pembayaran Penerimaan Negara di Bank Muamalat <i>CoBranding</i> BMI & BNI Tap Cash - Akad Pembiayaan Pada Ekosistem Pembiayaan Haji & Umrah - Penjelasan Kertas Kerja DPS pada Penerapan Manajemen Risiko - Persetujuan Besar-besaran Unit Hishah - SUVBI Accru Revenue in HI-1000 Distribution - State Revenue Payment Receipt in Bank Muamalat <i>CoBranding</i> BMI & BNI Tap Cash - Financing Agreements in Haji & Umrah Financing Ecosystem - Explanation of DPS Working Paper on Risk Management Implementation - Approval of Hishah Unit Amount	- Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si - Dr. H. Agung Danarto, M.Ag - Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
7.	19 Juli 2024 July 19, 2024	1. Permohonan Opini Bank Penyimpan Margin 2. Permohonan Opini SAHAJA 3. Permohonan Opini DPS QRIS TUNTAS 4. Permohonan Opini Penggunaan Asuransi Konvensional 5. Laporan <i>Income Smoothing</i> 6. Laporan Konsultasi Syariah tiga bulanan 7. <i>Update</i> Sertifikasi DPS 1. Request for Margin Depository Bank Opinion 2. Application for SAHAJA Opinion 3. Application for DPS QRIS Opinion COMPLETELY 4. Request for Opinion on the Use of Conventional Insurance 5. Income Smoothing Report 6. Quarterly Sharia Consultation Report 7. DPS Certification Update	• Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si • Dr. H. Agung Danarto, M.Ag • Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH
8.	19 Agustus 2024 August 19, 2024	1. Penggunaan Asuransi non Syariah PT Palma Bumi Lestari & PT Sawit Nusantara Indonesia Objek: Pabrik Kelapa Sawit 2. Restrukturisasi Pembiayaan Musyarakah 3. Temuan Audit Internal 4. Konsultasi Syariah 1. Use of non Sharia Insurance PT Palma Bumi Lestari & PT Sawit Nusantara Indonesia Object: Palm Oil Mill 2. Restructuring of Musyarakah Financing 3. Internal Audit Findings 4. Sharia Consultation	• Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si • Dr. H. Agung Danarto, M.Ag • Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH
9.	20 September 2024 September 20, 2024	1. Permohonan Opini DPS Perluasan Kerjasama dengan BPR 2. Permohonan Opini DPS atas Rekayasa Pembiayaan Pembelian Logam Mulia "Emas" di KC BSD & KC Ciledug 3. Konsultasi Syariah 1. Request for DPS Opinion on Expansion of Cooperation with BPRs 2. Request for DPS Opinion on Financing Engineering for the Purchase of Precious Metal "Gold" at KC BSD & KC Ciledug 3. Sharia Consultation	• Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si • Dr. H. Agung Danarto, M.Ag • Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH
10.	18 October 2024 October 18, 2024	1. Permohonan Opini DPS atas Salam Trade iB 2. Permohonan Opini DPS atas Tagihan <i>Unclaimed Switching</i> 3. Permohonan Rekomendasi atas Penggunaan Dana pada SSL Titipan Terkait Pembiayaan 1. Request for DPS Opinion on Salam Trade iB 2. Request for DPS Opinion on Unclaimed Switching Bill 3. Request for Recommendation on the Use of Funds in SSL Trust Related to Financing	• Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si • Dr. H. Agung Danarto, M.Ag • Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH
11.	18 November 2024 November 18, 2024	1. Rekening Pengeluaran Kementerian/Lembaga (K/L) 2. Laporan <i>Profile</i> Risiko 3. Konsultasi Syariah & Laporan Konsultasi Syariah 3 Bulanan 4. Rencana Aksi Pemulihan Bank Muamalat "<i>Recovery Plan</i>" 1. Ministry/Institution Expenditure Account (K/L) 2. Risk Profile Report 3. Sharia Consultation & 3 Monthly Sharia Consultation Report 4. Bank Muamalat Recovery Action Plan "Recovery Plan"	• Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si • Dr. H. Agung Danarto, M.Ag • Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH
12.	11 Desember 2024 December 11, 2024	1. Hijrah <i>Groceries</i> Muamalat DIN 2. Pelaporan Deposito <i>Income Smoothing Q4 Retail Banking</i> dan <i>Enterprise Banking</i> 3. <i>Debit Card</i> BIN Sponsorship 4. <i>Trade Finance</i> Product 1. Hijrah <i>Groceries</i> Muamalat DIN 2. Q4 Retail Banking and Enterprise Banking Income Smoothing Deposit Reporting 3. Debit Card BIN Sponsorship 4. Trade Finance Product	• Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si • Dr. H. Agung Danarto, M.Ag • Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Rapat

Kebijakan rapat Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan OJK Nomor 33/POJK.05/2014, Anggaran Dasar Perseroan dan *Board Manual* Bank Muamalat Indonesia. Di mana rapat Dewan Komisaris diselenggarakan paling sedikit sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu Dewan Komisaris juga menyelenggarakan rapat bersama Direksi dan rapat bersama Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Dewan Komisaris bersama Sekretaris Perusahaan, mengatur rapat, menyiapkan agenda dan materi hingga pencatatan risalah rapat. Risalah rapat tersebut berfungsi sebagai bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris apabila terjadi *dissenting opinions* dan sebagai dokumentasi untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat.

Pelaksanaan Rapat

Sepanjang tahun buku 2024, Dewan Komisaris telah menggelar rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian sebagai berikut:

AGENDA RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Internal Meeting Agenda

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Dewan Komisaris Board of Commissioners Participants	Kehadiran Attendance
1.	5 Januari 2024 January 5, 2024	1. <i>Update</i> Internal BOC 2. <i>Kick Off</i> Komite BOC 1. Update on Internal Board of Commissioners 2. Kick Off of Board of Commissioners Committee	• Amin Said Husni ^{*)} • Sartono • Andre Mirza Hartawan	• Ya/Yes • Ya/Yes • Ya/Yes
2.	12 Januari 2024 January 12, 2024	Pembahasan Rekomendasi BOC Discussion of Board of Commissioners Recommendations	• Amin Said Husni ^{*)} • Sartono • Andre Mirza Hartawan	• Ya/Yes • Ya/Yes • Ya/Yes
3.	28 Februari 2024 February 28, 2024	1. Laporan Audit Khusus PT HDC 2. Tindak Lanjut Surat OJK perihal Likuiditas 1. Special Audit Report of PT HDC 2. Follow-up of OJK Letter on Liquidity	• Amin Said Husni ^{*)} • Sartono • Andre Mirza Hartawan	• Ya/Yes • Ya/Yes • Ya/Yes
4.	26 April 2024 April 26, 2024	Status Komisaris Utama Independen Independent President Commissioner Status	• Amin Said Husni ^{*)} • Sartono • Andre Mirza Hartawan	• Ya/Yes • Ya/Yes • Ya/Yes
5.	6 Juni 2024 June 6, 2024	Penunjukan KAP 2024 Appointment of KAP 2024	• Amin Said Husni ^{*)} • Sartono • Andre Mirza Hartawan	• Ya/Yes • Ya/Yes • Ya/Yes

MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Meeting Policy

The meeting policy of the Board of Commissioners refers to OJK Regulation No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation of Commercial Banks, OJK Regulation No. 33/POJK.05/2014, the Company Articles of Association and the Board Manual of Bank Muamalat, whereby the meeting of the Board of Commissioners is held at least 1 (one) time within 2 (two) months. In addition, the Board of Commissioners also hold meetings jointly with the Board of Directors and meetings with Sharia Supervisory Board at least 1 (one) time within 4 (four) months.

The Board of Commissioners has The Secretary to the Board of Commissioners in charge of arranging meetings, starting from preparing agendas and materials to recording minutes of meetings as valid evidence for the Board of Commissioners members in the event of dissenting opinions and as documentation for the third parties regarding decisions taken at the meeting.

Meeting Implementation

During the 2024 financial year, the Board of Commissioners held 10 (ten) meetings with the following details:



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Dewan Komisaris Board of Commissioners Participants	Kehadiran Attendance
6.	19 Juli 2024 July 19, 2024	1. Pengawasan Dewan Komisaris 2. Keanggotaan Komite Level Dewan Komisaris 1. Supervision of the Board of Commissioners 2. Board of Commissioners Level Committee Membership	• Amin Said Husni*) • Sartono • Andre Mirza Hartawan	• Ya/Yes • Ya/Yes • Ya/Yes
7.	16 Agustus 2024 August 16, 2024	1. Tanggapan BOC terhadap Surat BOM No 216/B/PRD/SRT/VIII/2024 Perihal Tata Kelola Struktur BOD Baru 2. Proses Penunjukan KAP/AP dan Perbaikan Penyelesaian Transaksi Titipan 1. BOC response to BOM Letter No. 216/B/PRD/SRT/VIII/2024 Regarding Governance of the New BOD Structure 2. KAP/AP Appointment Process and Improvement of Trust Transaction Settlement	• Amin Said Husni*) • Sartono • Andre Mirza Hartawan	• Ya/Yes • Ya/Yes • Ya/Yes
8.	23 Oktober 2024 October 23, 2024	1. Proyeksi Pencapaian Kinerja <i>Retail Banking</i> dan <i>Enterprise Banking</i> 2. <i>Aging</i> LQF dan AYDA 1. Projected Achievement of Retail Banking and Enterprise Banking Performance 2. Aging LQF and AYDA	• Amin Said Husni*) • Sartono • Andre Mirza Hartawan	• Ya/Yes • Ya/Yes • Ya/Yes
9.	7 November 2024 November 7, 2024	Pembahasan RBB 2025, <i>Recovery Plan</i> , dan Rencana Resolusi Discussion of RBB 2025, Recovery Plan, and Resolution Plan	• Amin Said Husni*) • Sartono • Andre Mirza Hartawan	• Ya/Yes • Ya/Yes • Ya/Yes
10.	20 Desember 2024 December 20, 2024	Diskusi Internal Dewan Komisaris bersama Anggota Komite Dewan Komisaris Board of Commissioners Internal Discussion with Board of Commissioners Committee Members	• Sapto Amal Damandari • Sartono • Andre Mirza Hartawan	• Ya/Yes • Ya/Yes • Ya/Yes

Keterangan | Notes:

*) Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the EGMS resolution on December 11, 2024.

FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN

Meeting Frequency and Level of Attendance

No	Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Internal Meeting	
			Jumlah Rapat Number of meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance
1.	Sartono	Komisaris Independen Independent Commissioner	10	10
2.	Amin Said Husni ^{*)}	Komisaris Utama Independen (Juni s.d Desember 2024) Independent President Commissioner (June to December 2024)	9	9
3.	Andre Mirza Hartawan	Komisaris Commissioner	10	10
4.	Sapto Amal Damandari	Komisaris Utama Independen (Desember 2024 s.d sekarang) Independent President Commissioner (December 2024 to present)	1	1

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.

RAPAT DIREKSI**Kebijakan Rapat**

Kebijakan rapat Direksi Bank Muamalat Indonesia mengacu pada Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014, Anggaran Dasar Bank dan Board Manual Bank Muamalat Indonesia, yang mengatur bahwa rapat Direksi diselenggarakan secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Selain itu Direksi juga menyelenggarakan rapat bersama Dewan Komisaris dan rapat bersama Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pada rapat Direksi, Direksi memiliki kewenangan secara bersama-sama atau kolektif kolegial untuk mengambil berbagai keputusan bisnis, mengevaluasi kinerja Bank dan menetapkan berbagai kebijakan dalam pengurusan Bank. Prinsip-prinsip pada rapat Direksi adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu, atas permintaan tertulis dari:
 - a. Direksi;
 - b. Anggota Direksi;
 - c. Dewan Komisaris;
 - d. Anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - e. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS**Meeting Policy**

The meeting policy of the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia refers to OJK Regulation No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks, OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014, the Bank's Articles of Association and Board Manual of Bank Muamalat Indonesia, that regulate the meetings of the Board of Directors held periodically at least 1 (one) time every month. In addition, the Board of Directors also hold joint meetings with the Board of Commissioners and with the Sharia Supervisory Board at least 1 (one) time within 4 (four) months.

In the Board of Directors meeting, the Board of Directors has the authority to jointly or collectively make various business decisions, evaluate the Bank's performance and determine various policies in the Bank management. The principles of the Board of Directors meeting are as follows:

1. The Board of Directors Meetings may be held at any time upon written request from:
 - a. Board of Directors;
 - b. Members of the Board of Directors;
 - c. Board of Commissioners;
 - d. Board of Commissioners Members; and/or
 - e. One or more shareholders who jointly represent 1/10 (one-tenth) or more of the total number of shares with voting rights.



Yang diajukan kepada Perseroan dengan Surat Tercatat dan/atau surat yang disampaikan langsung kepada Perseroan dengan mendapat tanda-terima disertai alasannya dan tembusannya disampaikan kepada setiap anggota Direksi dan setiap anggota Dewan Komisaris dengan Surat Tercatat dan/atau surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima;

- Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain panggilan rapat Direksi dapat dilakukan oleh anggota Direksi lainnya.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan/atau pengambilan suara, akan dianggap sah apabila paling sedikit lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam rapat Direksi.
- Sekretaris Perusahaan membuat risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir untuk disimpan dan tersedia sewaktu-waktu jika diminta oleh Dewan Komisaris.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat harus dicantumkan didalam risalah rapat beserta alasannya.

Submitted to the Company by Registered Letter and/or letter submitted directly to the Company with receipt along with the reasons and a copy submitted to each member of the Board of Directors and each member of the Board of Commissioners with the Registered Letter and/or letter delivered directly to each member of the Board of Directors and each member of the Board of Commissioners by receiving a receipt;

- Invitation to the Board of Directors meeting is made by the President Director, and if the President Director is unable to attend, which does not need to be proven to other parties, an invitation for the Board of Directors meeting can be made by other members of the Board of Directors.
- Decisions are made by deliberation to reach consensus and/or voting, deemed valid if at least more than 2/3 (two-thirds) of the total members of the Board of Directors are present and/or represented at the Board of Directors meeting.
- The Corporate Secretary prepares the minutes of the meeting and is signed by all members of the Board of Directors present for safekeeping and available at any time if requested by the Board of Commissioners.
- Dissenting opinions that occurred in the meeting must be stated in the minutes of the meeting, along with the reasons.

Pelaksanaan Rapat

Meeting Implementation

AGENDA RAPAT INTERNAL DIREKSI

Board of Directors Internal Meeting Agenda

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant	Kehadiran (Ya/Tidak) Attendance (Yes/No)
1.	4 Januari 2024 January 4, 2024	- CAR & Media Update - Financial Highlights per Desember 2023 - Pengelolaan Nasabah EB	- Indra Falatehan¹⁾ - Karno - Wahyu Avianto¹⁾ - Suhendar¹⁾ - Hery Syafril²⁾ - Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes
2.	9 Januari 2024 January 9, 2024	- CAR & Media Update - Persetujuan Optimalisasi Ballroom Lt. 2 - Persetujuan Budget IT OPEX 2024 - Update Draft MIG - Update Corporate Action - Update Info Summary KHP Umum OJK tahun 2023 - Update Regulasi Baru	- Indra Falatehan¹⁾ - Karno - Wahyu Avianto¹⁾ - Suhendar¹⁾ - Hery Syafril²⁾ - Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant	Kehadiran (Ya/Tidak) Attendance (Yes/No)
3.	16 Januari 2024 January 16, 2024	1. CAR & Media Update 2. Persetujuan <i>Budget</i> IT OPEX 2024 3. <i>Budget</i> OpeX Tahun 2024 & Usulan Inisiatif Efisiensi 4. Proyeksi Kinerja Keuangan Tahun 2024 5. MIG Tahun 2024 6. Rapat Kerja Nasional 7. Penanganan Nasabah SAM 8. Proses Pencairan Pembiayaan EB 9. <i>Update</i> Produk Taspen	• Indra Falatehan¹⁾ • Karno • Wahyu Avianto¹⁾ • Suhendar¹⁾ • Hery Syafril²⁾ • Riksa Prakoso²⁾	- Ya Yes - Ya Yes - Ya Yes - Ya Yes - Ya Yes - Ya Yes
4.	23 Januari 2024 January 23, 2024	1. CAR & Media Update 2. <i>Update</i> Regulasi Baru 3. Usulan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (<i>Risk Based Bank Rating</i>) Periode Desember 2023 4. Usulan <i>Risk Appetite</i> & <i>Risk Tolerance</i> Risiko Operasional Tahun 2024 5. Pembebanan Dana Talangan PTPN 6. Penyelesaian Dokumen Agunan 7. <i>Update</i> Nasabah Pembiayaan	• Indra Falatehan¹⁾ • Karno • Wahyu Avianto¹⁾ • Suhendar¹⁾ • Hery Syafril²⁾ • Riksa Prakoso²⁾	- Ya Yes - Ya Yes - Ya Yes - Ya Yes - Ya Yes - Ya Yes
5.	31 Januari 2024 January 31, 2024	1. CAR & Media Update 2. <i>Update Corporate Action</i> 3. <i>Update</i> Proyeksi <i>Cashflow</i> 4. Proyeksi Kinerja Januari 2024 5. <i>Update Pipeline</i> dan Penanganan Nasabah EB 6. <i>Update</i> Implementasi Undang Undang Perlindungan Data Pribadi 7. <i>Update Fraud</i> oleh <i>Vendor Cash Replenish</i> ATM 8. <i>Update</i> Regulasi Baru 9. <i>Update Progress</i> KHP Umum OJK Tahun 2023 10. <i>Update</i> Nasabah RCM 11. <i>Update</i> Nasabah SAM	• Indra Falatehan¹⁾ • Karno • Wahyu Avianto¹⁾ • Suhendar¹⁾ • Hery Syafril²⁾ • Riksa Prakoso²⁾	- Ya Yes - Ya Yes - Ya Yes - Cuti Leave - Cuti Leave - Ya Yes
6.	6 Februari 2024 February 6, 2024	1. CAR & Media Update 2. Penanganan Nasabah RCM 3. Penanganan Nasabah SAM 4. <i>Update</i> Kasus Pajak Tahun 2015, 2016, dan 2018 5. <i>Update</i> dan Persetujuan BSO Tahun 2024 6. <i>Update Corporate Action</i> 7. Kinerja Keuangan Januari 2024	• Indra Falatehan¹⁾ • Karno • Wahyu Avianto¹⁾ • Suhendar¹⁾ • Hery Syafril²⁾ • Riksa Prakoso²⁾	- Ya Yes - Ya Yes - Ya Yes - Ya Yes - Sakit Sick Leave - Ya Yes



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant	Kehadiran (Ya/Tidak) Attendance (Yes/No)
7.	15 Februari 2024 February 15, 2024	1. CAR & Media Update 2. Progress Report Audit Laporan Keuangan 31 Desember 2023 3. Update Kasus Pajak Tahun 2015, 2016, dan 2018 4. Penanganan Nasabah RCM 5. Penanganan Nasabah SAM 6. Persetujuan RO Project 7. Update Progress Taspen 8. Update Progress Region Kalimantan 9. Update PT. POS Indonesia 10. Update Corporate Action 11. Update DPK & Cashflow	• Indra Falatehan¹⁾ • Karno • Wahyu Avianto¹⁾ • Suhendar¹⁾ • Hery Syafri²⁾ • Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Cuti Leave Ya Yes Ya Yes Ya Yes Cuti Leave
8.	20 Februari 2024 February 20, 2024	1. CAR & Media Update 2. Update & Persetujuan Kerjasama Bisnis PT. Pos Indonesia 3. Update Corporate Action 4. Alokasi Biaya 5. Rencana Program Ramadhan	• Indra Falatehan¹⁾ • Karno • Wahyu Avianto¹⁾ • Suhendar¹⁾ • Hery Syafri²⁾ • Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes
9.	28 Februari 2024 February 28, 2024	1. CAR & Media Update 2. Penanganan Nasabah RCM 3. Pengembangan Layanan Muamalat Remittance melalui DIN 4. Kajian Tindak Lanjut Hasil Audit ALIF 5. Update Tindak Lanjut Fraud 6. Update Corporate Action 7. Rencana Program Ramadhan 1445H dengan Nasabah 8. Liquidity Update	• Indra Falatehan¹⁾ • Karno • Wahyu Avianto¹⁾ • Suhendar¹⁾ • Hery Syafri²⁾ • Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes
10.	5 Maret 2024 March 5, 2024	1. CAR & Media Update 2. Penanganan Nasabah EB 3. Update Gerai Muamalat 4. Kajian Tindak Lanjut Hasil Audit ALIF 5. Update Corporate Action 6. Financial Highlights Februari 2024	• Indra Falatehan¹⁾ • Karno • Wahyu Avianto¹⁾ • Suhendar¹⁾ • Hery Syafri²⁾ • Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant	Kehadiran (Ya/Tidak) Attendance (Yes/No)
11.	13 Maret 2024 March 13, 2024	- CAR & Media Update - Penanganan Nasabah SAM - Penanganan Nasabah RCM - Update Kasus Pajak Tahun 2015, 2016, dan 2018 - Agenda Update Progress KHP OJK - Update Corporate Action - CAR & Media Update - SAM Customer Handling - RCM Customer Handling - Tax Case Update 2015, 2016 and 2018 - KHP OJK Agenda Update Progress - Corporate Action Update	- Indra Falatehan¹⁾ - Karno - Wahyu Avianto¹⁾ - Suhendar¹⁾ - Hery Syafril²⁾ - Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes
12.	18 Maret 2024 March 18, 2024	- CAR & Media Update - Penanganan Nasabah SAM - Kerja Sama Antara BMI dengan Rekanan <i>Bancassurance</i> - Persetujuan Validasi Hasil Laporan Penilaian Sendiri - ALIF Update - Progress Report Audit KAP - Update Corporate Action - CAR & Media Update - SAM Customer Handling - Cooperation Between BMI and Bancassurance Partners - Approval of Validation of Self-Assessment Report Results - ALIF Update - KAP Audit Progress Report - Corporate Action Update	- Indra Falatehan¹⁾ - Karno - Wahyu Avianto¹⁾ - Suhendar¹⁾ - Hery Syafril²⁾ - Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes
13.	26 Maret 2024 March 26, 2024	- CAR & Media Update - Penanganan Nasabah SAM - Pembahasan Surat OJK – Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 - Update Corporate Action - Update BMM - Update Muamalat Institute - Financial Projection Maret 2024 - Closing Laporan Keuangan Audited oleh KAP - Persetujuan Efisiensi Biaya dengan Implementasi <i>New Switching</i> - CAR & Media Update - SAM Customer Handling - OJK Letter Discussion - Adjustment of Bank Business Plan Year 2024 - Corporate Action Update - BMM Update - Muamalat Institute Update - Financial Projection March 2024 - Closing Audited Financial Statements by KAP - Approval of Cost Efficiency with the Implementation of New Switching	- Indra Falatehan¹⁾ - Karno - Wahyu Avianto¹⁾ - Suhendar¹⁾ - Hery Syafril²⁾ - Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Sakit Sick Leave Cuti Leave
14.	2 April 2024 April 2, 2024	- CAR & Media Update - Update Implementasi <i>Frontliner Hybrid</i> - Aktivitas Operasional Selama Bulan Ramadhan & Idul Fitri 1445 H tahun 2024 - Update Corporate Action - Financial Highlights per Maret 2024 - Persetujuan Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 - Update Kasus Pajak Tahun 2015, 2016, dan 2018 - Penanganan Nasabah RCM - Update Kerjasama PT. Pos Indonesia - CAR & Media Update - Hybrid Frontliner Implementation Update - Operational Activities During Ramadhan & Eid al-Fitr 1445 H in 2024 - Corporate Action Update - Financial Highlights as of March 2024 - Approval of Bank Business Plan Adjustment in 2024 - Tax Case Update 2015, 2016, & 2018 - RCM Customer Handling - PT Pos Indonesia Cooperation Update	- Indra Falatehan¹⁾ - Karno - Wahyu Avianto¹⁾ - Suhendar¹⁾ - Hery Syafril²⁾ - Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant	Kehadiran (Ya/Tidak) Attendance (Yes/No)
15.	16 April 2024 April 16, 2024	1. CAR & Media Update 2. Financial Highlights per Maret 2024 3. Update Corporate Action 4. Persetujuan Program & Acara Milad BMI ke-32 1. CAR & Media Update 2. Financial Highlights as of March 2024 3. Corporate Action Update 4. Approval of BMI 32nd Anniversary Program & Events	• Indra Falatehan¹⁾ • Karno • Wahyu Avianto¹⁾ • Suhendar¹⁾ • Hery Syafril²⁾ • Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Cuti Leave Ya Yes
16.	23 April 2024 April 23, 2024	1. CAR & Media Update 2. Penanganan Nasabah SAM 3. Update Corporate Action 4. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BMI 5. Update Resident Audit Activities 6. Update Rencana Milad BMI ke-32 7. Proyeksi Kinerja Keuangan April 2024 8. Update Progres Audit OJK 9. LQF Portofolio Enterprise Banking 1. CAR & Media Update 2. SAM Customer Handling 3. Corporate Action Update 4. BMI Annual General Meeting of Shareholders 5. Resident Audit Activities Update 6. BMI 32nd Anniversary Plan Update 7. April 2024 Financial Performance Projection 8. OJK Audit Progress Update 9. Enterprise Banking Portfolio LQF	• Indra Falatehan¹⁾ • Karno • Wahyu Avianto¹⁾ • Suhendar¹⁾ • Hery Syafril²⁾ • Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Cuti Leave Ya Yes
17.	30 April 2024 April 30, 2024	1. CAR & Media Update 2. Rencana Penerapan Ketentuan Basel 3 (LCR, NSFR, Leverage) di Perbankan Syariah 3. Sosialisasi SEOJK No. 25 tentang Management Risiko 4. POSIndo Settlement 5. Dormant Project 6. Strategi Optimalisasi Fee Based Income BMI 7. Update Corporate Action 8. Muhammadiyah Ecosystem 9. Update Kebijakan Pembiayaan Consumer (Rumah Sakit) 1. CAR & Media Update 2. Plan to Implement Basel 3 Provisions (LCR, NSFR, Leverage) in Islamic Banking 3. Socialization of SEOJK No. 25 on Risk Management 4. POSIndo Settlement 5. Dormant Project 6. BMI Fee Based Income Optimization Strategy 7. Corporate Action Update 8. Muhammadiyah Ecosystem 9. Consumer Financing Policy Update (Hospital)	• Indra Falatehan¹⁾ • Karno • Wahyu Avianto¹⁾ • Suhendar¹⁾ • Hery Syafril²⁾ • Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes
18.	7 Mei 2024 May 7, 2024	1. CAR & Media Update 2. Persetujuan Penanganan Nasabah RCM 3. Persetujuan Direktur Supervisi Region 4. Persetujuan Opsi Penyelesaian Pembiayaan Nasabah Enterprise Banking 5. Persetujuan Pembelian Sukuk dari Danareksa 6. Persetujuan Proses Pengadaan Server Bank Custodian 1. CAR & Media Update 2. Approval of RCM Customer Handling 3. Approval of Regional Supervision Director 4. Approval of Enterprise Banking Customer Financing Settlement Option 5. Approval of Sukuk Purchase from Danareksa 6. Approval of Custodian Bank Server Procurement Process	• Indra Falatehan¹⁾ • Karno • Wahyu Avianto¹⁾ • Suhendar¹⁾ • Hery Syafril²⁾ • Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Sakit Sick Leave Ya Yes Izin Absence Ya Yes

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant	Kehadiran (Ya/Tidak) Attendance (Yes/No)
19.	14 Mei 2024 May 14, 2024	1. CAR & Media Update 2. Update Bancassurance Partnership 3. Persetujuan Penyaluran Kurban BMM melalui Cabang BMI 4. Persetujuan Usulan Kegiatan Sosial dari BMM 5. Persetujuan KPR Kebun 6. Persetujuan Penanganan Nasabah SAM 7. Persetujuan Penanganan Nasabah RCM 8. Update Penyelesaian Dokumen Bermasalah 9. Update Financial Highlights Mei 2024	• Indra Falatehan¹⁾ • Karno • Wahyu Avianto¹⁾ • Suhendar¹⁾ • Hery Syafril²⁾ • Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes
20.	28 Mei 2024 May 28, 2024	1. CAR & Media Update 2. Persetujuan Penanganan Nasabah Enterprise Banking 3. Persetujuan Multiguna Dokter dan Daftar Rumah Sakit (ditunda) 4. Review Skema Insentif Porsi Haji H1-2024 & Persetujuan Perpanjangan untuk H2-2024 5. Persetujuan Proposal Biaya Program Masjid & Philanthropy 6. Persetujuan Optimalisasi Lobby MHC di Muamalat Tower (ditunda) 7. Proyeksi Kinerja Keuangan Juni 2024 8. Pembahasan Laporan Kinerja Kepada BPKH	• Indra Falatehan¹⁾ • Karno • Wahyu Avianto¹⁾ • Suhendar¹⁾ • Hery Syafril²⁾ • Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes
21.	4 Juni 2024 June 4, 2024	1. CAR & Media Update 2. Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 3. Update Kasus Nasabah 4. Persetujuan Penanganan Nasabah SAM 5. Persetujuan Pembiayaan SMEC 6. Update Penanganan Nasabah EB	• Indra Falatehan¹⁾ • Karno • Wahyu Avianto¹⁾ • Suhendar¹⁾ • Hery Syafril²⁾ • Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant	Kehadiran (Ya/Tidak) Attendance (Yes/No)
22.	11 Juni 2024 June 11, 2024	- CAR & Media Update - Agenda Persetujuan Penanganan Aset Hotel - Agenda Persetujuan Optimalisasi Muamalat Tower - Agenda <i>Financial Highlights</i> Juni 2024 - Agenda Pembahasan Materi RUPS - Agenda Update Pembahasan Risiko TPPU TPPT PPSPM - Update POJK No. 5 Tahun 2024 & Ketentuan LPS terkait Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) - Persetujuan <i>Project Office</i> Aceh	- Indra Falatehan¹⁾ - Karno - Wahyu Avianto¹⁾ - Suhendar¹⁾ - Hery Syafril²⁾ - Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Izin-OJK Absence-OJK Ya Yes
23.	25 Juni 2024 June 25, 2024	- CAR & Media Update - Persetujuan Penanganan Nasabah SAM - Agenda Update RUPS - Agenda Proyeksi Kinerja Keuangan Juni 2024 - Pembahasan Surat OJK - Persetujuan Penanganan Nasabah EB	- Indra Falatehan¹⁾ - Karno - Wahyu Avianto¹⁾ - Suhendar¹⁾ - Hery Syafril²⁾ - Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Cuti Leave Cuti Leave Ya Yes Ya Yes
24.	2 Juli 2024 July 2, 2024	- CAR & Media Update - Persetujuan Pembagian Tugas & Wewenang BOM - Update Rencana Strategis IT 2022-2027	- Hery Syafril²⁾ - Karno - Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes
25.	9 Juli 2024 July 9, 2024	- CAR & Media Update <i>Financial Highlights</i> per-Juni 2024 - Tindak Lanjut Diskusi OJK - Persetujuan Hapus Tagih Sisa Saldo Rekening Nostro - Persetujuan Strategis Bisnis Muhammadiyah - Update Lainnya	- Hery Syafril²⁾ - Karno - Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes
26.	10 Juli 2024 (<i>Ad Hoc</i>) July 10, 2024 (<i>Ad Hoc</i>)	Persetujuan Penanganan Nasabah <i>Enterprise Banking</i> Enterprise Banking Customer Handling Approval	- Hery Syafril²⁾ - Karno - Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant	Kehadiran (Ya/Tidak) Attendance (Yes/No)
27.	23 Juli 2024 July 23, 2024	1. CAR & Media Update 2. Update Saham Haji 3. Proyeksi Kinerja Juli 2024 4. Persetujuan Penanganan Nasabah EB 5. Persetujuan Komposisi Anggota Komite Tingkat BOD 6. Persetujuan DPLK Syariah Muamalat 7. BMM Update 8. Update Lainnya	• Hery Syafril²⁾ • Karno • Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes
28.	23 Juli 2024 (Ad Hoc) July 23, 2024 (Ad Hoc)	1. Organization Effectiveness Review (HC) 2. Organization Effectiveness Review (HC)	• Hery Syafril²⁾ • Karno • Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes
29.	26 Juli 2024 (Ad Hoc) July 26, 2024 (Ad Hoc)	1. Persetujuan Penanganan Nasabah Enterprise Banking 2. Persetujuan Vendor Pengelola Muamalat Hijrah Coffee 1. Enterprise Banking Customer Handling Approval 2. Approval of Muamalat Hijrah Coffee Management Vendor	• Hery Syafril²⁾ • Karno • Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes
30.	30 Juli 2024 (Ad Hoc) July 30, 2024 (Ad Hoc)	1. Persetujuan Pengambilalihan Operasional atas Jaminan Nasabah SAM 2. Update lainnya 1. Approval of Operational Takeover of SAM Customer Collateral 2. Other updates	• Hery Syafril²⁾ • Karno • Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes
31.	6 Agustus 2024 August 6, 2024	1. CAR & Media Update 2. Financial Highlights Juli 2024 3. Persiapan Rapat dengan BPKH 1. CAR & Media Update 2. Financial Highlights July 2024 3. Meeting Preparation with BPKH	• Hery Syafril²⁾ • Karno • Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes
32.	13 Agustus 2024 August 13, 2024	1. CAR & Media Update 2. Persetujuan Penanganan Nasabah RCM & SAM 3. Persetujuan Insentif Giro Wajib Minimum 4. Update Strategi Pembiayaan Enterprise Banking 5. Pelaksanaan Agenda 17 Agustus 1. CAR & Media Update 2. Approval of RCM & SAM Customer Handling 3. Approval of Statutory Reserves Incentive 4. Update on Enterprise Banking Financing Strategy 5. Implementation of August 17th Agenda	• Hery Syafril²⁾ • Karno • Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes
33.	27 Agustus 2024 August 27, 2024	1. CAR & Media Update 2. Pembahasan Tanggapan Surat OJK 3. Persetujuan Penanganan Nasabah EB 4. Persetujuan atas Update Legal 5. Persetujuan atas Tindakan ALCO Agustus 2024 6. Proyeksi Kinerja Keuangan Agustus 2024 7. Update lainnya 1. CAR & Media Update 2. Discussion of OJK Letter Response 3. Approval of EB Customer Handling 4. Approval of Legal Update 5. Approval of ALCO Follow-up August 2024 6. Projected Financial Performance August 2024 7. Other Updates	• Hery Syafril²⁾ • Karno • Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant	Kehadiran (Ya/Tidak) Attendance (Yes/No)
34.	10 September 2024 September 10, 2024	1. CAR & Media Update 2. Persetujuan Jaringan Kantor 3. Persetujuan Penyelesaian ALIF 4. Persetujuan Perpanjangan <i>Project Muhammadiyah</i> 5. <i>Financial Highlights</i> Agustus 2024 6. Rencana Bisnis Bank Muamalat Tahun 7. Persiapan Rapat BP-BPKH	• Hery Syafril²⁾ • Karno • Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes
35.	17 September 2024 September 17, 2024	1. CAR & Media Update 2. Persetujuan atas <i>Coverage Area Consumer</i> 3. <i>Update</i> Kerjasama terkait BPKH Apps dan IKANAS 4. Persetujuan Kualitas Aset 5. <i>Update</i> Tindak Lanjut Diskusi Rencana Bisnis Bank Muamalat tahun 2025 di Level BOD	• Hery Syafril²⁾ • Karno • Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes
36.	24 September 2024 September 24, 2024	1. CAR & Media Update 2. Persetujuan Penanganan Nasabah SAM 3. BNM 2023: <i>Supervisory Assessment</i> of BMI KL 4. Agenda Proyeksi Kinerja Keuangan Juni 2024 5. Proyeksi Kinerja Keuangan September 2024	• Hery Syafril²⁾ • Karno • Riksa Prakoso²⁾	Tidak No Ya Yes Ya Yes
37.	24 September 2024 (<i>Ad Hoc</i>) September 24, 2024 (<i>Ad Hoc</i>)	1. CAR & Media Update 2. SAM Customer Handling Approval 3. BNM 2023: <i>Supervisory Assessment</i> of BMI KL 4. June 2024 Financial Performance Projection Agenda 5. September 2024 Financial Performance Projection	• Hery Syafril²⁾ • Karno • Riksa Prakoso²⁾	Tidak No Ya Yes Ya Yes
38.	1 Oktober 2024 October 1, 2024	1. CAR & Media Update 2. Persetujuan Penanganan Kasus Nasabah 3. Persetujuan Penetapan Saham Haji	• Hery Syafril²⁾ • Karno • Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes
39.	4 Oktober 2024 (<i>Ad Hoc</i>) October 4, 2024 (<i>Ad Hoc</i>)	1. CAR & Media Update 2. Approval of Customer Case Handling 3. Approval of Hajj Share Determination	• Hery Syafril²⁾ • Karno • Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes
40.	7 Oktober 2024 (<i>Ad Hoc</i>) October 7, 2024 (<i>Ad Hoc</i>)	1. CAR & Media Update 2. Approval of Hajj Souvenir Budget 2024 3. Approval of Incentive Schemes & Targets 4. Financial Highlights September 2024 5. Update & Approval of Extraordinary General Meeting of Shareholders 6. Proposed Revision of Turnaround Plan 2.0	• Hery Syafril²⁾ • Karno • Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes
41.	8 Oktober 2024 October 8, 2024	1. CAR & Media Update 2. Persetujuan <i>Budget Souvenir</i> Haji 2024 3. Persetujuan Skema Insentif & Target 4. <i>Financial Highlights</i> September 2024 5. Update & Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 6. Usulan Revisi <i>Turnaround Plan 2.0</i>	• Hery Syafril²⁾ • Karno • Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant	Kehadiran (Ya/Tidak) Attendance (Yes/No)
42.	15 Oktober 2024 October 15, 2024	1. CAR & Media Update 2. Persetujuan Proposal Penawaran Perpanjangan Kerjasama BMI - SLFI 3. Persetujuan Hasil <i>Prudential Meeting</i> dengan OJK 4. Pemaparan <i>Update</i> Penanganan Nasabah SAM 5. DPLK Update September 2024 (ditunda) 6. <i>Branch Profitability</i> (ditunda) 1. CAR & Media Update 2. Approval of BMI - SLFI Cooperation Extension Bid Proposal 3. Approval of Prudential Meeting Results with OJK 4. SAM Customer Handling Update 5. DPLK Update September 2024 (postponed) 6. Branch Profitability (postponed)	• Hery Syafril²⁾ • Karno • Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Tidak No
43.	22 Oktober 2024 October 22, 2024	1. CAR & Media Update 2. Update AML CFT & CFP terkait Judi Online dan Data Masking 3. Update KHP OJK Tahun 2023 & 2024 4. Kickoff Meeting dengan KAP DBSDA 5. Penyelesaian Fasilitas Nasabah SAM 6. Persetujuan & Update ALIF 7. Update Penyelesaian Nasabah 8. DPLK Update September 2024 (ditunda) 1. CAR & Media Update 2. CFT & CFP AML Update on Online Gambling and Data Masking 3. KHP OJK Update 2023 & 2024 4. Kickoff Meeting with KAP DBSDA 5. SAM Customer Facility Settlement 6. ALIF Approval & Update 7. Customer Settlement Update 8. DPLK Update September 2024 (postponed)	• Hery Syafril²⁾ • Karno • Riksa Prakoso²⁾	Tidak No Ya Yes Ya Yes
44.	29 Oktober 2024 October 29, 2024	1. CAR & Media Update 2. DPLK Update September 2024 3. Turnaround Plan 3.0 4. Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025 5. Rencana Aksi Pemulihan dan Rencana Resolusi 6. Financial Projection Oktober 2024 1. CAR & Media Update 2. DPLK Update September 2024 3. Turnaround Plan 3.0 4. Bank Business Plan and Sustainable Finance Action Plan 2025 5. Recovery Action Plan and Resolution Plan 6. Financial Projection October 2024	• Hery Syafril²⁾ • Karno • Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes
45.	5 November 2024 November 5, 2024	1. CAR & Media Update 2. Update Bank Custodian 3. Update Perbaikan Liveness Biometric 4. Update Progress Recovery 5. Financial Highlights Oktober 2024 6. Persetujuan Kerjasama dengan SLFI 1. CAR & Media Update 2. Custodian Bank Update 3. Update on Biometric Liveness Improvement 4. Progress Recovery Update 5. Financial Highlights October 2024 6. Cooperation Agreement with SLFI	• Hery Syafril²⁾ • Karno • Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes
46.	12 November 2024 November 12, 2024	1. CAR & Media Update 2. Persetujuan Region & Branch Structure 3. ALIF Update 4. Corporate Action Update 5. Pembahasan APU, PPT dan PPPSPM 6. MI Update 7. BMM Update 1. CAR & Media Update 2. Region & Branch Structure Agreement 3. ALIF Update 4. Corporate Action Update 5. AML, CFT and PPPSPM Discussion 6. MI Update 7. BMM Update	• Hery Syafril²⁾ • Karno • Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant	Kehadiran (Ya/Tidak) Attendance (Yes/No)
47.	19 November 2024 November 19, 2024	- CAR & Media Update - Update Progres Recovery - Update POJK Nomor 15 Tahun 2024 - Pembentukan Komite GRC - Proyeksi Kinerja Keuangan November 2024	- Hery Syafril²⁾ - Karno - Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes
48.	26 November 2024 November 26, 2024	- CAR & Media Update - Penyelesaian Fasilitas Nasabah SAM - Update Persiapan RUPSLB dan Persetujuan Biaya Balik Nama Saham Haji BPKH - ALIF Update - Hasil Stress Test Risiko Pasar	- Hery Syafril²⁾ - Karno - Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes
49.	3 Desember 2024 December 3, 2024	- CAR & Media Update - Persetujuan Pencatatan Recovery Asset Sale - Financial Highlights November 2024 - Update Penyelesaian Dokumen Bermasalah - Update Progres Recovery	- Hery Syafril²⁾ - Karno - Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes
50.	10 Desember 2024 December 10, 2024	- CAR & Media Update - Persetujuan Penanganan Nasabah SAM - Update RUPSLB	- Hery Syafril²⁾ - Karno - Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes
51.	17 Desember 2024 December 17, 2024	- CAR & Media Update - Pengaturan Tugas BOM dan Pelaksanaan Pemberian Kuasa - Update Penanganan Nasabah SAM - Update Hasil Pemeriksaan OJK 2024 - Proyeksi Kinerja Desember 2024 - Update Bank Muamalat Tahun	- Imam Teguh Saptono - Karno - Kukuh Rahardjo³⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes
52.	20 Desember 2024 (Ad Hoc) December 20, 2024 (Ad Hoc)	Struktur Organisasi BMI BMI's Organizational Structure	- Imam Teguh Saptono - Karno - Kukuh Rahardjo³⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant	Kehadiran (Ya/Tidak) Attendance (Yes/No)
53.	24 Desember 2024 December 24, 2024	1. CAR & Media Update 2. Persiapan Kegiatan Operasional Akhir Tahun 2024 3. Update IT Strategy Plan 4. M-DIN Reborn 5. Persetujuan Restrukturisasi Nasabah EB 6. Update Progres Recovery Nasabah EB 7. Update Penanganan Nasabah SAM 8. Proyeksi Kinerja Desember 2024 1. CAR & Media Update 2. Preparation for Operational Activities End of 2024 3. IT Strategy Plan Update 4. M-DIN Reborn 5. EB Customer Restructuring Approval 6. EB Customer Recovery Progress Update 7. SAM Customer Handling Update 8. December 2024 Performance Projection	• Imam Teguh • Saptono • Karno • Kukuh • Rahardjo³⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes
54.	30 Desember 2024 (Ad Hoc) December 30, 2024 (Ad Hoc)	Persiapan Meeting dengan BPKH dan PSM Meeting Preparation with BPKH and PSM	• Imam Teguh • Saptono • Karno • Kukuh • Rahardjo³⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes
55.	31 Desember 2024 December 31, 2024	1. CAR & Media Update 2. Update Hasil ALCO 3. Proyeksi Kinerja Desember 2024 1. CAR & Media Update 2. ALCO Results Update 3. Projected Performance December 2024	• Imam Teguh • Saptono • Karno • Kukuh • Rahardjo³⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes
56.	31 Desember 2024 (Ad Hoc) December 31, 2024 (Ad Hoc)	Struktur Organisasi BMI (Lanjutan) BMI's Organizational Structure (Continued)	• Imam Teguh • Saptono • Karno • Kukuh • Rahardjo³⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes

Keterangan | Notes:

- ¹⁾ Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPST tanggal 27 Juni 2024.
Has stopped serving in accordance with the AGMS resolution on June 27, 2024.
- ²⁾ Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.
- ³⁾ Efektif tidak menjabat sejak tanggal 25 Maret 2025.
Effective from resignation on March 25, 2025

FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN DIREKSI

Board of Directors Meeting Frequency and Attendance Level

No.	Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Internal Meeting		RUPS GMS	
			Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance
1.	Indra Falatehan ¹⁾	Direktur Utama (Januari s.d Juni 2024) President Director (January to June 2024)	23	23	1	1
2.	Karno	Direktur Kepatuhan, Risiko, dan Hukum Compliance, Risk, and Legal Director	56	55	2	2
3.	Hery Syafril ²⁾	Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan (Januari s.d Juni 2024)/Direktur Utama (Juni 2024 s.d Desember 2024) Financing Business Risk Director (January to June 2024)/President Director (June 2024 to December 2024)	50	40	2	1



No.	Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Internal Meeting		RUPS GMS	
			Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance
4.	Wahyu Avianto ^{*)}	Direktur Operasi dan Digital (Januari s.d Juni 2024) Operations and Digital Director (January to June 2024)	23	21	1	0
5.	Suhendar ^{*)}	Direktur Keuangan dan Strategi (Januari s.d Juni 2024) Finance and Strategy Director (January to June 2024)	23	21	1	1
6.	Imam Teguh Saptono	Direktur Utama (Desember 2024 s.d sekarang) President Director (December 2024 to present)	6	6	0	0
7.	Kukuh Rahardjo ^{***)}	Direktur Bisnis (Desember 2024 s.d sekarang) Business Director (December 2024 to present)	6	6	0	0
8.	Riksa Prakoso ^{**))}	Direktur Operasi, TI dan SDM (Juni s.d Desember 2024) Operations, IT and HR Director (June to December 2024)	27	26	1	0

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPST tanggal 27 Juni 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the AGMS dated June 27, 2024.

^{**))} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.

^{***)} Efektif tidak menjabat sejak tanggal 25 Maret 2025.
Effective from resignation on March 25, 2025.

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

JOINT MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Kebijakan Rapat

Kebijakan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Muamalat merujuk pada Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang mengatur bahwa rapat diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat gabungan tersebut mencerminkan penyelenggaraan koordinasi dan sinergi fungsi manajemen antara Dewan Komisaris dan Direksi.

Meeting Policy

The joint meeting policy of the Board of Commissioners and the Board of Directors of Bank Muamalat refers to OJK Regulation No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation of Commercial Banks which regulates that meetings are held at least 1 (one) time in 4 (four) months. The joint meetings reflect the implementation of coordination and synergy of the management function between the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Pelaksanaan Rapat

AGENDA RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS BERSAMA DIREKSI

Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Dewan Komisaris Participant of the BoC	Kehadiran (Ya/ Tidak) Attendance (Yes/ No)	Peserta Direksi Participant of the BoD	Kehadiran (Ya/ Tidak) Attendance (Yes/ No)
1.	12 Januari 2024 January 12, 2024	Pembahasan Nasabah PT Harrisma Data Citta PT Harrisma Data Citta Customer Discussion	- Amin Said Husni²⁾ - Sartono - Andre Mirza Hartawan	Ya Yes Ya Yes Ya Yes	- Indra Falatehan¹⁾ - Karno - Wahyu Avianto¹⁾ - Suhendar¹⁾ - Hery Syafri²⁾ - Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Dewan Komisaris Participant of the BoC	Kehadiran (Ya/ Tidak) Attendance (Yes/ No)	Peserta Direksi Participant of the BoD	Kehadiran (Ya/ Tidak) Attendance (Yes/ No)
2.	22 Januari 2024 January 22, 2024	1. Update Tingkat Keamanan <i>Cyber</i> 2. Tanggapan atas Rekomendasi Dekom Terkait Isu Strategis dan Kinerja Keuangan 3. <i>Due Diligence</i> Laporan Keuangan <i>Unaudited</i> 4. Hasil Final TAP 2.0 1. Update on Cyber Security Level 2. Response to Dekom Recommendations on Strategic Issues and Financial Performance 3. Due Diligence of Unaudited Financial Statements 4. Final Results of TAP 2.0	• Amin Said Husni ²⁾ • Sartono • Andre Mirza Hartawan	Ya Yes Ya Yes Ya Yes	• Indra Falatehan ¹⁾ • Karno • Wahyu Avianto ¹⁾ • Suhendar ¹⁾ • Hery Syafril ²⁾ • Riksa Prakoso ²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes
3.	26 Januari 2024 January 26, 2024	MIG Tahun 2024 MIG in 2024	• Amin Said Husni ²⁾ • Sartono • Andre Mirza Hartawan	Ya Yes Tidak No Ya Yes	• Indra Falatehan ¹⁾ • Karno • Wahyu Avianto ¹⁾ • Suhendar ¹⁾ • Hery Syafril ²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes
4.	23 Februari 2024 February 23, 2024	1. <i>Financial Highlights</i> per Januari 2024 2. <i>Update Corporate Action</i> 1. Financial Highlights as of Januari 2024 2. Update Corporate Action	• Amin Said Husni ²⁾ • Sartono • Andre Mirza Hartawan	Ya Yes Ya Yes Ya Yes	• Indra Falatehan ¹⁾ • Karno • Wahyu Avianto ¹⁾ • Suhendar ¹⁾ • Hery Syafril ²⁾ • Riksa Prakoso ²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes
5.	22 Maret 2024 March 22, 2024	1. <i>Financial Highlights</i> per Februari 2024 2. <i>Update Corporate Action</i> 3. Penerapan Perlindungan Konsumen & Masyarakat 1. Financial Highlights as of February 2024 2. Update Corporate Action 3. Implementation of Consumer & Community Protection	• Amin Said Husni ²⁾ • Sartono • Andre Mirza Hartawan	Ya Yes Ya Yes Ya Yes	• Indra Falatehan ¹⁾ • Karno • Wahyu Avianto ¹⁾ • Suhendar ¹⁾ • Hery Syafril ²⁾ • Riksa Prakoso ²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes
6.	22 Maret 2024 March 22, 2024	Tindak Lanjut Hasil Audit ALIF Follow-up on ALIF Audit Results	• Amin Said Husni ²⁾ • Sartono • Andre Mirza Hartawan	Ya Yes Ya Yes Ya Yes	• Indra Falatehan ¹⁾ • Karno • Wahyu Avianto ¹⁾ • Suhendar ¹⁾ • Hery Syafril ²⁾ • Riksa Prakoso ²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes
7.	5 April 2024 April 5, 2024	Persetujuan Penyesuaian RBB tahun 2024 Approval of RBB Adjustment for 2024	• Amin Said Husni ²⁾ • Sartono • Andre Mirza Hartawan	Ya Yes Ya Yes Ya Yes	• Indra Falatehan ¹⁾ • Karno • Wahyu Avianto ¹⁾ • Suhendar ¹⁾ • Hery Syafril ²⁾ • Riksa Prakoso ²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes
8.	26 April 2024 April 26, 2024	<i>Portofolio LQF Enterprise Banking</i>	• Amin Said Husni ²⁾ • Sartono • Andre Mirza Hartawan	Ya Yes Ya Yes Ya Yes	• Indra Falatehan ¹⁾ • Karno • Wahyu Avianto ¹⁾ • Suhendar ¹⁾ • Hery Syafril ²⁾ • Riksa Prakoso ²⁾	Ya Yes Ya Yes Tidak No Ya Yes Ya Yes Ya Yes
9.	17 Mei 2024 May 17, 2024	1. Financial Highlights per April 2024 2. Update Internal Target BMI Tahun 2024 3. Rencana Pembelian Sukuk 1. Financial Highlights as of April 2024 2. Internal Update BMI Target in 2024 3. Sukuk Purchase Plan	• Amin Said Husni ²⁾ • Sartono • Andre Mirza Hartawan	Ya Yes Ya Yes Ya Yes	• Indra Falatehan ¹⁾ • Karno • Wahyu Avianto ¹⁾ • Suhendar ¹⁾ • Hery Syafril ²⁾ • Riksa Prakoso ²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Dewan Komisaris Participant of the BoC	Kehadiran (Ya/ Tidak) Attendance (Yes/ No)	Peserta Direksi Participant of the BoD	Kehadiran (Ya/ Tidak) Attendance (Yes/ No)
10.	31 Mei 2024 May 31, 2024	Penunjukan Ketua RUPS Appointment of GMS Chairman	- Amin Said Husni²⁾ - Sartono - Andre Mirza Hartawan	Ya Yes Ya Yes Ya Yes	- Indra Falatehan¹⁾ - Karno - Wahyu Avianto¹⁾ - Suhendar¹⁾ - Hery Syafril²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes
11.	31 Mei 2024 May 31, 2024	Update Tindakanjutan Rapat di Bandung Update on Follow-up Meeting in Bandung	- Amin Said Husni²⁾ - Sartono - Andre Mirza Hartawan	Ya Yes Ya Yes Ya Yes	- Indra Falatehan¹⁾ - Karno - Wahyu Avianto¹⁾ - Suhendar¹⁾ - Hery Syafril²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes
12.	6 Juni 2024 June 6, 2024	Persetujuan Perubahan RBB 2024 Approval of RBB Amendment 2024	- Amin Said Husni²⁾ - Sartono - Andre Mirza Hartawan	Ya Yes Ya Yes Ya Yes	- Indra Falatehan¹⁾ - Karno - Wahyu Avianto¹⁾ - Suhendar¹⁾ - Hery Syafril²⁾ - Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes
13.	19 Juli 2024 July 19, 2024	1. <i>Update Corporate Action</i> 2. Strategi Bisnis BMI 1. Corporate Action Update 2. BMI Business Strategy	- Amin Said Husni²⁾ - Sartono - Andre Mirza Hartawan	Ya Yes Ya Yes Ya Yes	- Hery Syafril²⁾ - Karno - Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes
14.	16 Agustus 2024 August 16, 2024	1. <i>Financial Highlights</i> per Juli 2024 2. Strategi Pembiayaan <i>Enterprise Banking</i> 1. Financial Highlights as of July 2024 2. Enterprise Banking Financing Strategy	- Amin Said Husni²⁾ - Sartono - Andre Mirza Hartawan	Ya Yes Ya Yes Ya Yes	- Hery Syafril²⁾ - Karno - Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes
15.	20 September 2024 September 20, 2024	1. <i>Financial Highlights</i> per Agustus 2024 2. Pembahasan Surat OJK 3. Konsultasi Pembiayaan Nasabah > Rp 100 Miliar 1. Financial Highlights as of August 2024 2. OJK Letter Discussion 3. Customer Financing Consultation > Rp 100 Billion	- Amin Said Husni²⁾ - Sartono - Andre Mirza Hartawan	Ya Yes Ya Yes Ya Yes	- Hery Syafril²⁾ - Karno - Riksa Prakoso	Ya Yes Ya Yes Ya Yes
16.	20 September 2024 September 20, 2024	1. Persetujuan Jaringan Kantor BMI 2. Persetujuan Manajemen Kualitas Aset 1. BMI Office Network Approval 2. Asset Quality Management Approval	- Amin Said Husni²⁾ - Sartono - Andre Mirza Hartawan	Ya Yes Ya Yes Ya Yes	- Hery Syafril²⁾ - Karno - Riksa Prakoso	Ya Yes Ya Yes Ya Yes
17.	7 Oktober 2024 (<i>Adhoc</i>) October 7, 2024 (<i>Adhoc</i>)	1. Update Kajian Organisasi BMI 2. Hasil Prudential Meeting dengan OJK 1. Update on BMI Organizational Review 2. Results of Prudential Meeting with OJK	- Amin Said Husni²⁾ - Sartono - Andre Mirza Hartawan	Ya Yes Ya Yes Ya Yes	- Hery Syafril²⁾ - Karno - Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes
18.	18 Oktober 2024 October 18, 2024	1. Persetujuan Proposal Penawaran Perpanjangan Kerjasama BMI - SLFI 2. Persetujuan Hasil Prudential Meeting dengan OJK 1. Approval of BMI - SLFI Cooperation Extension Bid Proposal 2. Approval of Prudential Meeting Results with OJK	- Amin Said Husni²⁾ - Sartono - Andre Mirza Hartawan	Ya Yes Ya Yes Ya Yes	- Hery Syafril²⁾ - Karno - Riksa Prakoso²⁾	Tidak No Ya Yes Tidak No

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Dewan Komisaris Participant of the BoC	Kehadiran (Ya/ Tidak) Attendance (Yes/ No)	Peserta Direksi Participant of the BoD	Kehadiran (Ya/ Tidak) Attendance (Yes/ No)
19.	23 Oktober 2024 October 23, 2024	- Proyeksi Pencapaian Kinerja <i>Retail Banking</i> dan <i>Enterprise Banking</i> <i>Aging LQF</i> dan <i>AYDA Retail Collection Management</i> dan <i>Special Asset Management</i> - Projected Retail Banking and Enterprise Banking Performance <i>Aging LQF</i> and <i>AYDA Retail Collection Management</i> and <i>Special Asset Management</i>	- Amin Said Husni²⁾ - Sartono - Andre Mirza Hartawan	Ya Yes Ya Yes Ya Yes	- Hery Syafril - Karno - Riksa Prakoso	Tidak No Ya Yes Ya Yes
20.	23 Oktober 2024 October 23, 2024	- Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa <i>Kick-Off Meeting</i> dengan KAP DBSDA - Approval of Extraordinary General Meeting of Shareholders <i>Kick-Off Meeting</i> with KAP DBSDA	- Amin Said Husni²⁾ - Sartono - Andre Mirza Hartawan	Ya Yes Ya Yes Ya Yes	- Hery Syafril - Karno - Riksa Prakoso	Tidak No Ya Yes Ya Yes
21.	31 Oktober 2024 October 31, 2024	- Persetujuan RBB Tahun 2025 - Persetujuan TAP 3.0 - Persetujuan <i>Recovery Plan</i> dan <i>Resolution Plan</i> - Approval of RBB Year 2025 - Approval of TAP 3.0 - Approval of <i>Recovery Plan</i> and <i>Resolution Plan</i>	- Amin Said Husni²⁾ - Sartono - Andre Mirza Hartawan	Ya Yes Ya Yes Ya Yes	- Hery Syafril²⁾ - Karno - Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes
22.	8 November 2024 November 8, 2024	- Persetujuan RBB Tahun 2025 - Persetujuan TAP 3.0 - Persetujuan <i>Recovery Plan</i> dan <i>Resolution Plan</i> - Approval of RBB Year 2025 - Approval of TAP 3.0 - Approval of <i>Recovery Plan</i> and <i>Resolution Plan</i>	- Amin Said Husni²⁾ - Sartono - Andre Mirza Hartawan	Ya Yes Ya Yes Ya Yes	- Hery Syafril²⁾ - Karno - Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes
23.	15 November 2024 November 15, 2024	- ALIF Update - Pembahasan APU, PPT dan PPPSPM - Financial Highlights Oktober 2024 - ALIF Update - AML, CFT and PPPSPM Discussion - Financial Highlights Oktober 2024	- Amin Said Husni²⁾ - Sartono - Andre Mirza Hartawan	Ya Yes Ya Yes Ya Yes	- Hery Syafril²⁾ - Karno - Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Tidak No
24.	6 Desember 2024 December 6, 2024	<i>Update Progres Recovery</i> <i>Financial Highlights</i> November 2024 <i>Update Pembiayaan Nasabah EB</i> <i>Recovery Progress Update</i> <i>Financial Highlights</i> November 2024 <i>EB Customer Financing Update</i>	- Amin Said Husni²⁾ - Sartono - Andre Mirza Hartawan	Ya Yes Ya Yes Ya Yes	- Hery Syafril²⁾ - Karno - Riksa Prakoso²⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes
25.	20 Desember 2024 December 20, 2024	- Update Penanganan Nasabah SAM - Update Lainnya	- Sapto Amal Damandari - Sartono - Andre Mirza Hartawan	Ya Yes Ya Yes Ya Yes	- Imam Teguh Saptono - Karno - Kukuh Rahardjo³⁾	Ya Yes Ya Yes Ya Yes



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Dewan Komisaris Participant of the BoC	Kehadiran (Ya/ Tidak) Attendance (Yes/ No)	Peserta Direksi Participant of the BoD	Kehadiran (Ya/ Tidak) Attendance (Yes/ No)
26.	27 Desember 2024 December 27, 2024	Proyeksi Kinerja Desember 2024 Projected Performance December 2024	- Sapto Amal Damandari - Sartono - Andre Mirza Hartawan	Ya Yes Ya Yes Ya Yes	- Imam Teguh Saptono - Karno - Kukuh Rahardjo	Tidak No Ya Yes Ya Yes

Keterangan | Notes:

- ¹⁾ Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPST tanggal 27 Juni 2024.
Has stopped serving in accordance with the AGMS resolution on June 27, 2024.
- ²⁾ Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.
- ³⁾ Efektif tidak menjabat sejak tanggal 25 Maret 2025.
Effective from resignation on March 25, 2025

Berikut adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi.

The following is the frequency of meetings and attendance levels of the Board of Commissioners and Board of Directors.

FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Board of Commissioners and Board of Directors Meeting Frequency and Attendance Level

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase (%) Percentage (%)
Dewan Komisaris The Board of Commissioners					
1.	Sartono	Komisaris Independen Independent Commissioner	26	26	100
2.	Amin Said Husni ^{*)}	Komisaris Utama Independen (Juni s.d Desember 2024) Independent President Commissioner (June to December 2024)	25	25	100
3.	Andre Mirza Hartawan	Komisaris Commissioner	26	26	100
4.	Sapto Amal Damandari	Komisaris Utama Independen Independent President Commissioner	1	1	100
Direksi The Board of Directors					
5.	Indra Falatehan ^{*)}	Direktur Utama (Januari s.d Juni 2024) President Director (January to June 2024)	12	12	100
6.	Karno	Direktur Kepatuhan, Risiko, dan Hukum Compliance, Risk and Legal Director	26	26	100
7.	Hery Syafri ^{**)}	Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan (Januari s.d Juni 2024)/Direktur Utama (Juni 2024 s.d Desember 2024) Financing Business Risk Director (January to June 2024)/President Director (June 2024 to December 2024)	24	21	87
8.	Wahyu Avianto ^{*)}	Direktur Operasi dan Digital (Januari s.d Juni 2024) Operations and Digital Director (January to June 2024)	12	11	91
9.	Suhendar ^{*)}	Direktur Keuangan dan Strategi (Januari s.d Juni 2024) Finance and Strategy Director (January to June 2024)	12	12	100
10.	Riksa Prakoso ^{**)}	Direktur Operasi, TI dan SDM (Juni s.d Desember 2024) Operations, IT and HC Director (June to December 2024)	12	10	83
11.	Imam Teguh Saptono	Direktur Utama (Desember 2024 s.d sekarang) President Director (December 2024 to present)	2	1	50
12.	Kukuh Rahardjo ^{***)}	Direktur Bisnis (Desember 2024 s.d sekarang) Business Director (December 2024 to present)	2	2	100

Keterangan | Notes:

- ^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPST tanggal 27 Juni 2024.
Has stopped serving in accordance with the AGMS resolution on June 27, 2024.
- ^{**)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.
- ^{***)} Efektif tidak menjabat sejak tanggal 25 Maret 2025.
Effective from resignation on March 25, 2025

RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan Rapat

Kebijakan rapat Dewan Pengawas Syariah bersama Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan tertuang pada Board Manual, yang mengatur bahwa rapat Dewan Pengawas Syariah bersama dengan Direksi dan rapat Dewan Pengawas Syariah bersama dengan Dewan Komisaris diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pelaksanaan Rapat

AGENDA RAPAT GABUNGAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI

Joint Meeting Agenda of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners and the Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board Participants	Kehadiran (Ya/Tidak) Attendance (Yes/No)	Peserta Dewan Komisaris Participant of the BoC	Peserta Direksi Participant of the BoD
1.	26 Januari 2024 January 26, 2024	1. <i>Financial Highlights</i> per Desember 2023 2. <i>Update Corporate Action</i> 1. Financial Highlights as of December 2023 2. Corporate Action Update	• Sholahudin Al-Aiyub • Siti Haniatunnisa • Agung Danarto	Ya Yes Ya Yes Ya Yes	• Amin Said Husni ²⁾ • Sartono • Andre Mirza Hartawan	Ya Yes Tidak No Ya Yes • Indra Falatehan ¹⁾ • Karno • Wahyu Avianto ¹⁾ • Suhendar ¹⁾ • Hery Syafril ²⁾ • Riksa Prakoso ²⁾ Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes Ya Yes
2.	26 April 2024 April 26, 2024	1. Financial Highlights per Maret 2024 2. Update Corporate Action 3. RUPST Bank Muamalat 1. Financial Highlights as of March 2024 2. Corporate Action Update 3. AGMS Bank Muamalat	• Sholahudin Al-Aiyub • Siti Haniatunnisa • Agung Danarto	Ya Yes Ya Yes Ya Yes	• Amin Said Husni ¹⁾ • Sartono • Andre Mirza Hartawan	Ya Yes Ya Yes Ya Yes • Indra Falatehan ¹⁾ • Karno • Wahyu Avianto ¹⁾ • Suhendar ¹⁾ • Hery Syafril ²⁾ • Riksa Prakoso ²⁾ Ya Yes Ya Yes Tidak No Ya Yes Ya Yes Ya Yes
3.	19 Juli 2024 July 19, 2024	1. <i>Financial Highlights</i> per Juni 2024 2. <i>Update lainnya</i> 1. Financial Highlights as of June 2024 2. Other Update	• Sholahudin Al-Aiyub • Siti Haniatunnisa • Agung Danarto	Ya Yes Ya Yes Ya Yes	• Amin Said Husni ²⁾ • Sartono • Andre Mirza Hartawan	Ya Yes Ya Yes Ya Yes • Hery Syafril ²⁾ • Karno • Riksa Prakoso ²⁾ Ya Yes Ya Yes Ya Yes
4.	18 Oktober 2024 October 18, 2024	<i>Financial Highlights</i> per September 2024 Financial Highlights as of September 2024	• Sholahudin Al-Aiyub • Siti Haniatunnisa • Agung Danarto	Ya Yes Ya Yes Ya Yes	• Amin Said Husni ¹⁾ • Sartono • Andre Mirza Hartawan	Ya Yes Tidak No Ya Yes • Hery Syafril ²⁾ • Karno • Riksa Prakoso ²⁾ Ya Yes Ya Yes Ya Yes

Keterangan | Notes:

¹⁾ Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPST tanggal 27 Juni 2024.

Has stopped serving in accordance with the AGMS resolution on June 27, 2024.

²⁾ Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.

Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.

MEETINGS OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD JOINTLY WITH THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Meeting Policy

The policy on the Sharia Supervisory Board joint meetings with the Board of Commissioners and the Board of Directors as stated in the Board Manual regulates that the meetings of the Sharia Supervisory Board jointly with the Board of Directors and the Board of Commissioners are held at least 1 (one) time in 4 (four) months.

Meeting Implementation



Berikut adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi.

The following is the frequency of meetings and attendance levels of the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners and Board of Directors.

FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI

Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, and Board of Directors Meeting Frequency and Attendance Level

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase (%) Percentage (%)
Dewan Pengawas Syariah The Sharia Supervisory Board					
1.	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si	Ketua Chairman	4	4	100
2.	Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH	Anggota Member	4	4	100
3.	Dr. H. Agung Danarto, M.Ag	Anggota Member	4	3	75
Dewan Komisaris The Board of Commissioners					
4.	Sartono	Komisaris Independen Independent Commissioner	4	2	50
5.	Amin Said Husni ^{*)}	Komisaris Utama Independen (Juni s.d Desember 2024) Independent President Commissioner (June to December 2024)	4	4	100
6.	Andre Mirza Hartawan	Komisaris/Plt. Komisaris Utama Commissioner/Acting President Commissioner	4	4	100
Direksi The Board of Directors					
7.	Indra Falatehan ^{*)}	Direktur Utama (Januari s.d Juni 2024) President Director (January to June 2024)	2	2	100
8.	Karno	Direktur Kepatuhan, Risiko, dan Hukum Compliance, Risk and Legal Director	4	4	100
9.	Hery Syafril ^{**)}	Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan (Januari s.d Juni 2024)/Direktur Utama (Juni 2024 s.d Desember 2024) Financing Business Risk Director (January to June 2024)/President Director (June 2024 to December 2024)	4	3	75
10.	Wahyu Avianto ^{*)}	Direktur Operasi dan Digital (Januari s.d Juni 2024) Operations and Digital Director (January to June 2024)	2	1	50
11.	Suhendar ^{*)}	Direktur Keuangan dan Strategi (Januari s.d Juni 2024) Finance and Strategy Director (January to June 2024)	2	2	100
12.	Riksa Prakoso ^{**)}	Direktur Operasi, TI dan SDM (Juni s.d Desember 2024) Operations, IT and HR Director (June to December 2024)	2	1	50

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPST tanggal 27 Juni 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the AGMS dated June 27, 2024.

^{**)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.

Komite Audit

Audit Committee

Dewan Komisaris Bank Muamalat membentuk Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit Bank Muamalat Indonesia. Komite tersebut juga bertugas melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit internal dan hasil audit pihak eksternal guna menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan Bank.

DASAR HUKUM

Pembentukan Komite Audit Bank Muamalat Indonesia mengacu pada peraturan perundangan-undangan, yaitu:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peraturan Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/ POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
6. Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners of Bank Muamalat formed an Audit Committee chaired by an Independent Commissioner concurrently as a member to monitor and evaluate the planning and implementation of audits and monitor the follow-up of Bank Muamalat Indonesia's audit results. The committee is also tasked with monitoring the follow-up of internal audit results and external party audit results to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the Bank's financial reporting process.

LEGAL BASIS

Bank Muamalat Indonesia established Audit Committee by referring to the laws and regulations as follows:

1. Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.
2. Financial Services Authority Regulation Number 9 of 2023 concerning the Regulation on the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.
3. Financial Services Authority Regulation Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units
4. Financial Services Authority Regulation No. 55/ POJK.04/2015 dated December 29, 2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of the Audit Committee.
5. Financial Services Authority Regulation No. 1/ POJK.03/2019 dated January 8, 2019 concerning the Implementation of Internal Audit Functions in Commercial Banks.
6. Bank Articles of Association concerning the duties and authorities of the Board of Commissioners.



PEDOMAN KERJA/PIAGAM KOMITE AUDIT

Komite Audit Bank Muamalat telah memiliki pedoman kerja atau piagam yang di dalamnya mengatur tujuan pembentukan komite, tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite, struktur dan keanggotaan komite, rapat komite, kuorum, pengambilan keputusan, masa tugas anggota komite dari Pihak Independen, mekanisme evaluasi kinerja, serta periode revidi piagam komite secara berkala. Piagam Komite Audit dan susunan anggota Komite Audit terus diperbarui secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

KRITERIA ANGGOTA KOMITE AUDIT

Piagam Komite Audit Bank Muamalat telah mengatur kriteria keanggotaan Komite Audit di mana anggota komite tersebut berasal dari Komisaris Independen dan pihak independen serta memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Komite Audit paling sedikit beranggotakan:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen; dan
 - b. Pihak Independen:
 - 1 (satu) orang yang memiliki keahlian bidang keuangan atau bidang akuntansi; dan
 - 1 (satu) orang yang memiliki keahlian bidang perbankan syariah, bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah.
2. Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah, 1 (satu) orang anggota dewan pengawas syariah dapat menjadi anggota komite audit.
3. Wajib mempunyai integritas, akhlak, moral dan reputasi keuangan yang baik.
4. Wajib mempunyai kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
5. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
6. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan
7. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Bank.
8. Wajib mempunyai paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
9. Wajib mempunyai paling kurang satu anggota yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
10. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik

WORK GUIDELINES/CHARTER OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee of Bank Muamalat retains a work guideline or charter of which its content regulates the purpose of establishing the committee, duties, responsibilities, and committee authority, committee structure and membership, committee meeting, quorum, decision-making, term of office of committee members of the Independent Party, performance assessment mechanism, as well as the periodic review of the committee charter. The Audit Committee Charter and the membership composition are continually updated periodically, at least 1 (one) time in every 3 (three) years in line with development in applicable regulations as well as current conditions of the Bank.

MEMBERSHIP CRITERIA OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee Charter of Bank Muamalat regulates the criteria of the Audit Committee membership where committee members are from Independent Commissioners and independent parties as well as complying with the requirements as follows:

1. The Audit Committee consists of members at least:
 - a. 1 (one) Independent Commissioner; and
 - b. Independent Party:
 - 1 (one) member with the expertise in finance or accounting; and
 - 1 (one) member with the expertise in sharia banking, for Banks that conduct sharia business activities.
2. For Banks that conduct sharia business activities, 1 (one) sharia supervisory board member may serve as audit committee member.
3. Must have good integrity, character, morals and financial reputation.
4. Must have the capability, knowledge, experience in accordance with the job position, as well as the capability to communicate appropriately.
5. Must understand financial report, company business specifically related to services or Bank business activities, audit process, risk management, and other related laws and regulations.
6. Willing to continuously improve competency through education and training
7. Must comply with the Audit Committee code of ethics set forth by the Bank.
8. Must have at least one member with the educational background and expertise in accounting and finance.
9. Must have at least one member with the expertise in sharia banking.
10. Not a person from a Public Accounting Firm, Legal Consultant Office, Public Appraisal Service Firm or other

atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

11. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
12. Wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Pihak Independen bagi mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
13. Tidak memiliki saham langsung maupun tidak langsung pada Bank.
14. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank Muamalat Indonesia.
15. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Muamalat Indonesia.

parties that provide assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other consulting services to concerned issuers or public companies within the last 6 (six) months period.

11. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Bank's activities within the last 6 (six) months except for Independent Commissioner.
12. Must take on a waiting period of at least 6 (six) months prior to becoming Independent Party for former members of the Board of Directors, Executive Officers, or parties with relationship with the Bank that may influence the capability of the concerned to take independent actions.
13. Not owning shares directly or indirectly at the Bank.
14. Not having affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Major Shareholders of Bank Muamalat Indonesia.
15. Not having business relationship, directly or indirectly, related to the business activities of Bank Muamalat Indonesia.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit pada Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan.
3. Melakukan penelaahan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
4. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
5. Dalam melakukan tugas sebagaimana angka 1 di atas, Komite Audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit:
 - a. Pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern;
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dengan standar audit;
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The duties and responsibilities of Audit Committee according to Audit Committee Charter are as follow:

1. Monitoring and evaluating the planning and implementation of audit as well as monitoring the follow-up to the audit results in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process.
2. Reviewing and advising the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest.
3. Reviewing compliance with laws and regulations related to the Bank's activities.
4. Maintaining the confidentiality of documents, data, and information of the Bank.
5. In carrying out the duties as referred to in item 1, Audit Committee is required to monitor and evaluate the following:
 - a. Duties implementation of internal audit unit;
 - b. Audit conformity by a Public Accountant with auditing standards;
 - c. Conformity of financial statements with financial accounting standards; and
 - d. Implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings by the internal audit work unit, public accountants, and supervision results of the Financial Services Authority in order to provide recommendations to the Board of Commissioners.



6. Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Komite Audit bertanggung jawab antara lain:
 - a. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank;
 - b. Mengevaluasi kinerja SKAI Bank;
 - c. Memastikan SKAI berkomunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, auditor ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. Memastikan SKAI bekerja secara independen serta menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran SKAI;
 - f. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat dan akurat;
 - g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian Remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
 - h. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait persetujuan pengangkatan dan pemberhentian kepala SKAI, penetapan piagam audit intern dan penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI.
 7. Dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik, Komite Audit bertanggung jawab antara lain:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
 - b. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
 - c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik paling kurang melalui:
 - i. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - ii. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - iii. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - iv. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau KAP.
 8. Dalam pemantauan dan evaluasi pelaporan keuangan, Komite Audit bertanggung jawab antara lain:
6. In monitoring and evaluating duties implementation of the Internal Audit Unit (IAU), Audit Committee is responsible for the following:
 - a. Monitoring and reviewing the effectiveness of the Bank's internal audit;
 - b. Evaluating the performance of the Bank's IAU;
 - c. Ensuring the IAU communicates with the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, external auditors, and the Financial Services Authority;
 - d. Ensuring that the IAU is independent and upholds integrity in performing duties;
 - e. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding audit plan preparation, as well as IAU scope and budget;
 - f. Reviewing audit reports and ensuring that the Board of Directors takes the necessary corrective actions rapidly and accurately;
 - g. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the provision of IAU's overall annual Remuneration and performance awards; and
 - h. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding approval for the appointment and dismissal of the Head of IAU, the establishment of an internal audit charter, and the appointment of an independent quality controller from an external party to review IAU performance.
 7. In monitoring and evaluating audits by a Public Accounting Firm, Audit Committee is responsible for the following:
 - a. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of a Public Accountant based on independence, the scope of the assignment, and fees;
 - b. Providing independent opinion in the event of disagreement between management and the Accountant for the services provided.
 - c. Evaluating the implementation of audit services on annual historical financial information by a Public Accountant and/or Public Accounting Firm, including:
 - i. Conformity of audit implementation by Public Accountant and/or Public Accounting Firm with applicable auditing standards;
 - ii. Sufficient time for field work;
 - iii. Assessment of the scope of services provided and the adequacy of sampling test; and
 - iv. Recommendations for improvement provided by the Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
 8. In monitoring and evaluating financial reporting, Audit Committee is responsible for the following:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;
- b. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.

- a. Reviewing financial information to be issued by the Bank to the public and/or authorities, including financial reports, projections, and other reports related to the Bank's financial information;
- b. Reviewing complaints related to the Bank's accounting and financial reporting processes.

WEWENANG KOMITE AUDIT

Wewenang yang dimiliki Komite Audit tertuang pada Piagam Komite Audit yang di antaranya adalah:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Bank yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Menerima tembusan Laporan Hasil Audit Intern yang disampaikan ke Direktur Utama.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

KETENTUAN MASA JABATAN

Masa jabatan anggota Komite Audit Bank Muamalat telah merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku, yakni masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN

Merujuk pasal 64 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, komposisi Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi, dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah. Selain itu, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah juga dapat menjadi anggota komite audit.

AUDIT COMMITTEE AUTHORITIES

Audit Committee has the authorities as contained in the Audit Committee Charter, which include:

1. Accessing the Bank's documents, data, and information regarding the Bank's employees, funds, assets, and resources as needed.
2. Communicating directly with employees, including the Board of Directors and those who function the internal audit, risk management, and accountants related to the duties and responsibilities of the Audit Committee.
3. Involving independent parties outside the Audit Committee members who are needed to assist in running duties.
4. Receiving a copy of the Internal Audit Report submitted to the President Director.
5. Performing other authorities granted by the Board of Commissioners

TERM OF OFFICE

The term of office for Audit Committee Members of Bank Muamalat refers to the applicable laws and regulations. The term is required to be no longer than the term of office of the Board of Commissioners and can be re-elected only for one subsequent term.

COMPOSITION AND BASIS OF APPOINTMENT

Referring to article 64 of the Financial Services Authority Regulation No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks, the composition of Members of the Audit Committee at least consists of an Independent Commissioner, an independent party with the expertise in finance or accounting, and an independent party with the expertise in sharia banking. In addition, 1 (one) member of the Sharia Supervisory Board may also serve as member of the audit committee.



Berikut komposisi dan dasar hukum pengangkatan Komite Audit Bank Muamalat Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 035/B/DIR-KPTS/VIII/2024 tentang Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 16 Agustus 2024:

The following is the composition and legal basis for the appointment of the Audit Committee of Bank Muamalat Indonesia based on the Decree of the Board of Directors No. 035/B/DIR-KPTS/VIII/2024 concerning the Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated August 16, 2024:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keterangan Description
Sartono	Ketua, Komisaris Independen Chairman, Independent Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. 035/B/DIR-KPTS/VIII/2024 tentang Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 16 Agustus 2024. Board of Directors Decree No. 035/B/DIR-KPTS/VIII/2024 concerning the Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated August 16, 2024.	2024
Amin Said Husni ^{*)}	Anggota, Anggota, Komisaris Independen Member, Independent Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. 035/B/DIR-KPTS/VIII/2024 tentang Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 16 Agustus 2024. Board of Directors Decree No. 035/B/DIR-KPTS/VIII/2024 concerning the Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated August 16, 2024.	2024
Karim Anggar Prianto	Anggota, Pihak Independen Member, Independent Party	Surat Keputusan Direksi No. 035/B/DIR-KPTS/VIII/2024 tentang Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 16 Agustus 2024. Board of Directors Decree No. 035/B/DIR-KPTS/VIII/2024 concerning the Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated August 16, 2024.	2024
Saiful Anwar	Anggota, Pihak Independen Member, Independent Party	Surat Keputusan Direksi No. 035/B/DIR-KPTS/VIII/2024 tentang Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 16 Agustus 2024. Board of Directors Decree No. 035/B/DIR-KPTS/VIII/2024 concerning the Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated August 16, 2024.	2024

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.

PROFIL KOMITE AUDIT

Berikut adalah profil Komite Audit Bank Muamalat Indonesia.

AUDIT COMMITTEE PROFILE

The following is the profile of the Audit Committee of Bank Muamalat Indonesia.



Sartono
Ketua
Chairman

Profil lengkap disajikan pada bab "Profil Perusahaan".
The complete profile is presented in the "Company Profile" chapter.



Amin Said Husni
Anggota
Member

Profil lengkap disajikan pada bab “Profil Perusahaan”.
The complete profile is presented in the “Company Profile” chapter.



Karim Anggar Prianto
Anggota
Member

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Usia Age	55 tahun pada Tahun Buku 2024	55 years old in the Financial year 2024
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 035/B/DIR-KPTS/VIII/2024 tentang Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 16 Agustus 2024.	Served as a member of the Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk in accordance with the Decree of the Board of Directors No. 035/B/DIR-KPTS/VIII/2024 concerning the Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated August 16, 2024.
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Teknik Informatika di STMIK Jabar (2011)	Bachelor of Informatics Engineering at STMIK Jabar (2011)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	-	
Pengalaman Kerja Work Experience	- Senior Auditor Financing Audit di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2018-2020) - Branch Manager di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2011- 2016)	- Senior Auditor Financing Audit at PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2018-2020) - Branch Manager at PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2011- 2016)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama/ Pengendali.	Does not have affiliated relationships with the Board of Directors, Board of Commissioners, or Main/ Controlling Shareholders.
Kualifikasi Qualification	Pihak independen yang memiliki kualifikasi di bidang akuntansi, audit dan perbankan syariah.	An independent party who has qualifications in accounting, audit and Sharia banking.



Saiful Anwar
Anggota
Member

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Usia Age	47 tahun pada Tahun Buku 2024	47 years old in the Financial Year 2024
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat menjadi Anggota Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Surat Keputusan Direksi No. 035/B/DIR-KPTS/VIII/2024 tentang Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 16 Agustus 2024.	Appointed as Member of the Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk based on the Decree of the Board of Directors No. 035/B/DIR-KPTS/VIII/2024 concerning the Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated August 16, 2024.
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Doctor of Information Science, Nagaoka University of Technology (2012). • Master of Islamic Banking & Finance di Universitas Indonesia (2008) • Sarjana Akuntansi, Universitas Indonesia (2001)	• Doctor of Information Science, Nagaoka University of Technology (2012). • Master of Sharia Banking & Finance at the University of Indonesia (2008) • Bachelor of Accounting, University of Indonesia (2001)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Komite Pemantau Risiko di PT Bank KB Bukopin Syariah dari tahun 2022 hingga sekarang.	Risk Monitoring Committee at PT Bank KB Bukopin Syariah from 2022 to present.
Pengalaman Kerja Work Experience	• Komite Pemantau Risiko di PT Bank BRI Syariah (2013-2018) • Komite Pemantau Risiko di PT Bank KB Bukopin Syariah (2022- sekarang). • Komite Audit di PT Bank BRI Syariah (2018-2021) • Komite Pemantau Risiko di PT Bank BRI Syariah (2013- 2018) • Section Head of Quality Assurance di PT Bank Syariah Mandiri (2005-2008) • Junior Auditor di Ernst & Young Indonesia (2004-2005)	• Risk Monitoring Committee at PT Bank BRI Syariah (2013-2018) • Risk Monitoring Committee at PT Bank KB Bukopin Syariah (2022-present). • Audit Committee at PT Bank BRI Syariah (2018-2021) • Risk Monitoring Committee at PT Bank BRI Syariah (2013- 2018) • Section Head of Quality Assurance at PT Bank Syariah Mandiri (2005-2008) • Junior Auditor at Ernst & Young Indonesia (2004-2005)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama/ Pengendali.	Does not have affiliated relationships with the Board of Directors, Board of Commissioners, or Main/ Controlling Shareholders.
Kualifikasi Qualification	Pihak independen yang memiliki kualifikasi di bidang akuntansi dan audit.	An independent party who has qualifications in accounting and audit.

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite Audit dituntut untuk dapat profesional dan independen tanpa campur tangan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Penjelasan independensi anggota komite diurai melalui tabel di bawah ini.

INDEPENDENCY OF THE AUDIT COMMITTEE

In carrying out its duties and function, the Audit Committee is demanded to be professional and independent without any intervention from any party that is not in accordance with the laws and regulations. Explanation on the independency of members of the committee is outlined in the table below.

Aspek Independensi Independence Aspect	Sartono	Amin Said Husni ^{*)}	Karim Anggar Prianto	Saiful Anwar
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Having no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Having no management relationship in the Company, subsidiaries, or affiliated companies	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG Having no family relations with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Nomination, Remuneration Committee and GCG Committee	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as a manager of political parties, officials, and government	✓	✓	✓	✓

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.

Dalam hal pembuktian independensi, anggota Komite Audit BMI tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan keuangan, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

In terms of proving independence, the Bank's Audit Committee members have no family or financial relationship, either directly or indirectly, relating to the Bank's business activities.

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with						Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with						Hubungan Kepengurusan Management Relationship	
		Dewan Komisaris Board of Commissioner		Direksi Board of Director		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioner		Direksi Board of Director		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders			
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Sartono	Ketua Chairman		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Amin Said Husni ^{*)}	Anggota Member		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Karim Anggar Prianto	Anggota Member		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Saiful Anwar	Anggota Member		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.

RAPAT KOMITE AUDIT

Kebijakan Rapat

Kebijakan Rapat Komite Audit Bank Muamalat mengatur bahwa rapat Komite Audit wajib diselenggarakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sejak diundangkannya POJK 17 tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum pada 14 September 2023. Rapat dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan anggota yang berasal dari pihak independen. Kebijakan tersebut mengacu pada 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank

MEETINGS OF THE AUDIT COMMITTEE

Meeting Policy

The meeting policy of the Audit Committee of Bank Muamalat regulates that meetings of the Audit Committee are mandatory to be held at least 1 (one) time within a month as of the effective date of POJK 17 of year 2023 regarding Governance of Commercial Banks on 14 September 2023. Each of the meeting is regarded as legitimate if attended by at least 51% (fifty one percent) of the members including an Independent Commissioner and a member from an independent party. The policy refers to Financial Services Authority Regulation No. 17 of Year 2023



Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta diatur dalam Piagam Komite Audit.

Selain itu, hasil rapat Komite Audit juga harus dituangkan ke dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

regarding Governance Implementation in Commercial Banks and Financial Services Authority Regulator (POJK) No. 55/POJK.04/2015 regarding Establishment and Guidelines of Work Implementation of the Audit Committee as well as regulated in the Audit Committee Charter.

Furthermore, the Audit Committee meeting resolution must be recorded in the minutes of the meeting and properly documented, including in the event of a dissenting opinion, which is signed by the entire Audit Committee members present and submitted to the Board of Commissioners.

Pelaksanaan Rapat

Meeting Implementation

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1.	12 Januari 2024 January 12, 2024	Pembahasan Hasil Audit Visit Cabang oleh KAP DBSDA Discussion of Branch Audit Visit Results by KAP DBSDA	- Sartono - Amin Said Husni^{*)} - Andre Mirza Hartawan - Syaiful Anwar - Anggar Karim Prianto
2.	16 Februari 2024 February 16, 2024	1. Progress Report Audit oleh KAP 2. Laporan Agenda Kerja KA 2024 3. Analisis Kondisi GCG Bank Muamalat 1. Audit Progress Report by KAP 2. 2024 KA Work Agenda Report 3. Analysis of GCG Condition of Bank Muamalat	- Sartono - Amin Said Husni^{*)} - Andre Mirza Hartawan - Syaiful Anwar - Anggar Karim Prianto
3.	8 Maret 2024 March 8, 2024	Evaluasi Kondisi First Line of Defense Sisi Prosedur Pembiayaan Evaluation of the Condition of the First Line of Defense on the Financing Procedure Side	- Sartono - Amin Said Husni^{*)} - Andre Mirza Hartawan - Syaiful Anwar - Anggar Karim Prianto
4.	26 April 2024 April 26, 2024	Analisa Kondisi Tata Kelola Proses Pembiayaan Analysis of Financing Process Governance Conditions	- Sartono - Amin Said Husni^{*)} - Syaiful Anwar - Anggar Karim Prianto
5.	20 Mei 2024 May 20, 2024	Update Internal Audit Internal Audit Update	- Sartono - Amin Said Husni^{*)} - Syaiful Anwar - Anggar Karim Prianto
6.	6 Juni 2024 June 6, 2024	1. Hasil Evaluasi Audit Tahun 2023 2. Proses Penunjukan KAP 2024 3. Evaluasi Kinerja Third Line of Defense 1. Audit Evaluation Results for 2023 2. KAP Appointment Process for 2024 3. Third Line of Defense Performance Evaluation	- Sartono - Amin Said Husni^{*)} - Syaiful Anwar - Anggar Karim Prianto
7.	12 Juli 2024 July 12, 2024	1. Update Temuan Signifikan Hasil Audit Tematik Semester I/2024 2. Pembahasan Surat OJK 3. Update kegiatan Komite Audit 1. Update on Significant Findings of Thematic Audit Results Semester I/2024 2. Discussion of OJK Letter 3. Update on Audit Committee activities	- Sartono - Amin Said Husni^{*)} - Syaiful Anwar - Anggar Karim Prianto
8.	15 Agustus 2024 August 15, 2024	Diskusi perubahan struktur baru dan tata kelola BOM serta dampaknya pada strategi audit Bank Discussion of new structural changes and BOM governance and its impact on the Bank's audit strategy	- Sartono - Amin Said Husni^{*)} - Syaiful Anwar - Anggar Karim Prianto

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
9.	6 September 2024 September 6, 2024	Realisasi Recovery Aset s/d Juli 2024 dan Proyeksi s/d Desember 2024 Asset Recovery Realization until July 2024 and Projection until December 2024	- Sartono - Amin Said Husni^{*)} - Syaiful Anwar - Anggar Karim Prianto
10.	11 Oktober 2024 October 11, 2024	1. Kinerja Semester I/2024 & Proyeksi Semester II 2. Paparan Realisasi Bank sesuai Target RBB 2024 3. Persiapan Pelaksanaan Audit KAP 1. Performance of Semester I/2024 & Projection of Semester II 2. Exposure of Bank Realization according to RBB Target 2024 3. Preparation for Implementation of KAP Audit	- Sartono - Amin Said Husni^{*)} - Syaiful Anwar - Anggar Karim Prianto
11.	20 November 2024 November 20, 2024	Laporan Hasil Audit dan Progress Audit Audit Result and Audit Progress Report	- Sartono - Amin Said Husni^{*)} - Syaiful Anwar - Anggar Karim Prianto
12.	13 Desember 2024 December 13, 2024	Tindak Lanjut Hasil Exit Meeting Pemeriksaan PT Bank Muamalat Indonesia 2024 Follow-up on the Results of the Exit Meeting of the Examination of PT Bank Muamalat Indonesia 2024	- Sartono - Amin Said Husni^{*)} - Syaiful Anwar - Anggar Karim Prianto

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.

Adapun tingkat kehadiran masing-masing anggota komite pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The attendance level of each committee member in 2024 is as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran (%) Attendance Percentage (%)
1.	Sartono	Ketua Chairman	12	12	100
2.	Amin Said Husni ^{*)}	Anggota Member	11	11	100
3.	Karim Anggar Prianto	Anggota Member	12	12	100
4.	Saiful Anwar	Anggota Member	12	12	100

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Bank Muamalat senantiasa mendorong Komite Audit untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan pada tahun 2024. Informasi lengkap mengenai hal ini disampaikan dalam bab "Profil Perusahaan".

COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE AUDIT COMMITTEE

Bank Muamalat continuously encourages the Audit Committee to carry out competency development through training during the year 2024. Complete information on this matter is presented in the chapter on "Company Profile".

SERTIFIKASI PROFESI

Certification of Profession

No.	Sertifikasi Profesi Certification of Profession	Nama Name	Lembaga Penerbit Issuing Institution
1.	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Risk Management Certification Level 6	1. Sartono 2. Amin Said Husni	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Agency for Certification of Profession (BNSP)
2.	Sertifikasi Register Negara Akuntan (RNA) Certification of the State Registry of Accountants	Saiful Anwar	Menteri Keuangan Ministry of Finance
3.	Sertifikasi Chartered Accountant (CA) Chartered Accountant (CA) Certification	Saiful Anwar	Ikatan Akuntan Indonesia Indonesia Accountant Association



PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan dan/atau hal-hal lain yang disampaikan Direksi, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris baik pada area Laporan Keuangan, Pengendalian Intern, maupun Kepatuhan. Adapun aktivitas Komite Audit Bank Muamalat selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 12 kali rapat Komite Audit, termasuk menyusun risalah rapat.
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
3. Melakukan penelaahan bersama Manajemen, SKAI dan Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP atas hasil audit internal maupun eksternal termasuk kesulitan yang dihadapi.
4. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP atas jasa yang diberikannya.
5. Melakukan penelaahan atas laporan tahunan untuk meyakinkan kecukupan, konsistensi dan keakuratan informasi.
6. Mengkaji Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Bank Muamalat Tahun Buku 2023 oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali.
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
8. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI maupun pihak eksternal.
9. Mengkaji efektivitas pengendalian internal melalui 3 (tiga) lini pertahanan (*three lines of defence*) yang mencakup lini manajemen bisnis, lini manajemen risiko dan kepatuhan, dan lini audit internal untuk memastikan identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko.
10. Memantau dan mengkaji realisasi kegiatan bisnis Bank sesuai Target RBB 2024.
11. Seluruh anggota Komite telah mengikuti minimal 1 (satu) kali kegiatan pengembangan kompetensi terkait dengan Perbankan/Audit.

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is tasked with duties and responsibilities to provide opinion to the Board of Commissioners on report and/or other matters presented by the Board of Directors, as well as to identify matters that require the attention of the Board of Commissioners, on areas concerning Financial Report, Internal Control, and Compliance. Activities of the Audit Committee of Bank Muamalat during the year 2023 are as follows:

1. Held 9 (nine) Audit Committee meetings,, including composing the minutes of meeting.
2. Reviewed financial information to be published by the Company to the public and/or authorities including financial statements, projections, and other reports related to the Company's financial information.
3. Reviewed jointly with the Management, SKAI and Public Accountant, KAP or Audit Team from KAP on internal as well as external audit results, including on difficulties faced.
4. Provided independent opinion in the event of a difference in opinion between the management and the Public Accountant, KAP or Audit Team from KAP regarding the services provided.
5. Reviewed the annual report to assure its adequacy, consistency and accurate information.
6. Reviewed the Evaluation Results Report on the implementation of Providing Audit Services on Bank Muamalat's Annual Historical Financial Information for the 2023 Financial Year by KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali.
7. Reviewed and provided recommendations to the Board of Commissioners related to potential conflict of interest of the Company.
8. Reviewed the audit report and ensured the Board of Directors to take actions for immediate improvement necessary to overcome control weaknesses, fraud, compliance issues on policies, laws and regulations, or other issues identified and reported by SKAI as well as by external parties.
9. Review the effectiveness of internal control through the three lines of defense, which include business management, risk management and compliance, and internal audit to ensure the identification, measurement, and mitigation of risks.
10. Monitor and review the realization of the Bank's business activities in accordance with the RBB 2024 Target.
11. All members of the Committee have participated at least 1 (one) time in competency development activity related to Banking/Audit.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Nomination and Remuneration Committee

DASAR HUKUM

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Muamalat Indonesia berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
3. Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik
4. Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

PEDOMAN KERJA/PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Muamalat Indonesia telah memiliki piagam sebagai pedoman komite dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Fungsi dari Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain, mengatur struktur dan keanggotaan, persyaratan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kode etik, program kerja, dan pelaporan komite.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk pada tahun 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 038/DIR/KPTS/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi dan susunan keanggotaan komite telah diperbarui sesuai dengan POJK 17 Tahun 2023 dan akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

LEGAL BASIS

The establishment of the Remuneration and Nomination Committee of Bank Muamalat Indonesia is guided by the following provisions:

1. OJK Regulation Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.
2. OJK Regulation Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units
3. OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Remuneration and Nomination Committee of Issuers or Public Companies
4. The Bank's Articles of Association concerning the duties and authorities of the Board of Commissioners.

WORK GUIDELINES/CHARTER FOR NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Bank Muamalat established a charter for the Nomination and Remuneration Committee as a guideline for performing duties and functions. The Nomination and Remuneration Committee regulates the structure and membership, membership requirements, duties and responsibilities, authority, code of ethics, work program, and committee reporting.

Members of the Nomination and Remuneration Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk in 2023, in accordance with the Board of Directors Decree No. 037/DIR/KPTS/XII/2022 dated 12 December 2022 regarding Nomination and Remuneration Committee. The Nomination and Remuneration Committee Charter and the composition of the committee membership have been updated in accordance with POJK 17 Year 2023 and will continue to be updated in accordance with the development of applicable regulations and the current conditions of the Bank.



KRITERIA ANGGOTA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Komite remunerasi dan nominasi wajib beranggotakan paling sedikit:
 - 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - 1 (satu) orang Komisaris Non Independen; dan
 - 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai Bank
2. Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah, 1 (satu) orang anggota dewan pengawas syariah dapat menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Mempunyai keseimbangan antara keahlian dan pengalaman dengan latar belakang pemahaman yang luas mengenai proses bisnis Bank Muamalat Indonesia secara umum.
4. Berkewajiban memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
5. Memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup di bidang:
 - a. Peraturan Perundang-undangan (pemahaman mendalam mengenai konsep dan praktik peraturan perundangan, perbankan, *Good Corporate Governance*.
 - b. Proses bisnis perbankan syariah.
6. Berkewajiban memiliki sikap yang independen, objektif dan profesional.
7. Berkewajiban memiliki dedikasi, pemahaman yang baik tentang organisasi, lingkungan bisnis, risiko maupun pengendalian.
8. Berkewajiban memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
9. Mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Pihak Independen dalam anggota komite Bank.
10. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Bank Muamalat Indonesia, seperti:
 - a. Mempunyai ikatan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan staf dan pegawai atau jajaran Manajemen Bank Muamalat Indonesia.
 - b. Mempunyai ikatan dengan rekanan Bank Muamalat Indonesia, pihak-pihak lain yang dilarang menurut ketentuan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berlaku.

CRITERIA OF MEMBERS OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Members of the Nomination and Remuneration Committee are obligated to fulfill the requirements as follows:

1. The Nomination and Remuneration Committee is required to consist of members at least as follows:
 - 1 (one) member of Independent Commissioner;
 - 1 (one) member of Non-Independent Commissioner; and
 - 1 (one) member of Executive Officer who supervises the function of human resources or 1 (one) member representing the Bank's employees
2. For Banks that carry out sharia business activities, 1 (one) member of the sharia supervisory board may serve as member of the nomination and remuneration committee.
3. Having the balance between expertise and experience with vast background knowledge on the general business process in Bank Muamalat Indonesia.
4. Must have good integrity, moral and attitude.
5. Having adequate competency and experience in the following fields:
 - a. Laws and Regulations (in-depth knowledge on the concept and practices of the laws and regulations, banking, *Good Corporate Governance*).
 - b. Sharia banking business process.
6. Obligated to have an attitude of independency, objectivity and professionalism.
7. Obligaed to have dedication, good knowledge of the organization, business environment, risk and control.
8. Obligated to have the capability to communicate appropriately.
9. Former members of the Board of Directors responsible for supervisory function or Executive Officer who carries out the supervisory function at the concerned Bank or parties with relationship with Bank that can influence the capability of the concerned officer to act independently, is required to take on a waiting period of at least 6 (six) months before taking on the position of Independent Party within the membership of the Bank's committee.
10. Not having the interest/personal ties that may cause negative impact and conflict of interest towards Bank Muamalat Indonesia, such as the following:
 - a. Having blood-family relationship up to the second degree, either in straight or sideway line, with staffs and employees or the management Board of Bank Muamalat Indonesia.
 - b. Having relationship with Bank Muamalat Indonesia partners, other parties which prohibited according to the provisions of the laws or other applicable regulations.

11. Anggota komite yang berasal dari pihak independen wajib memenuhi syarat:
- Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank Muamalat Indonesia, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Bank Muamalat Indonesia.
 - Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi.
 - Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai pedoman bagi anggota dalam menjalankan fungsinya.

Terkait dengan kebijakan nominasi.

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Pengawas Syariah dan calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit, anggota komite pemantau risiko, dan anggota komite lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan Bank.
- Menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan anggota Dewan Komisaris.

Terkait dengan kebijakan remunerasi:

- Melaksanakan kebijakan remunerasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah
- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
- Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

11. Members of the committee coming from independent parties are required to fulfill the following requirements:
- Not having affiliation with Bank Muamalat Indonesia, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or Major Shareholders of Bank Muamalat Indonesia.
 - Having the experience related to Nomination and/or Remuneration.
 - Not having concurrent positions as members of other committees within Bank Muamalat Indonesia.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Following are the duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee as guidelines for members to carry out its function.

In connection with nomination policies:

- To prepare and provide recommendations on system as well as procedures of selecting and/or replacing members of the Board of Directors, members of the Sharia Supervisory Board, and members of the Board of Commissioners to be presented to the GMS.
- To Identify and provide recommendations on candidate members of the Board of Directors, candidate members of the Sharia Supervisory Board and candidate members of the Board of Commissioners to be presented to the GMS.
- To provide recommendations to the Board of Commissioners on Independent Parties who will member of the audit committee, member of the risk monitoring committee, and member of other committees by taking into account the regulatory provisions and the needs of the Bank.
- To prepare and assess the performance of the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board and the Board of Commissioners.
- To provide recommendations to the Board of Commissioners on competency development programs for members of the Board of Directors, members of the Sharia Supervisory Board and members of the Board of Commissioners.

In connection with remuneration policies:

- To implement remuneration policies in accordance with Financial Services Authority Regulations on governance implementation in providing remuneration in sharia commercial banks and sharia business units.
- To assess remuneration policies.
- To assess the suitability between remuneration policies and implementation of these policies.



4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan karyawan secara keseluruhan.

Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas terkait dengan remunerasi, setidaknya perlu memperhatikan:

1. Kinerja keuangan
2. Pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset
3. Kewajaran dengan *peer group*
4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank

WEWENANG KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Selain wewenang yang diatur pada Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite juga berwenang untuk mengakses dokumen, data, dan informasi yang diperlukan dari Bank Muamalat Indonesia. Komite Remunerasi dan Nominasi juga dapat melibatkan pihak independen di luar anggota komite untuk membantu pelaksanaan tugasnya serta melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris, apabila dianggap perlu.

KETENTUAN MASA JABATAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Ketentuan Bank Muamalat atas masa tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Masa tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat diangkat kembali.
2. Bagi anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris, pengantiannya paling lambat dilakukan 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

4. To provide recommendations to the Board of Commissioners on remuneration policies for the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board, Executive Officers and employees in general.

The Nominatin and Remuneratin Committee, in carrying out its duties related to remuneration, must at least take into account of the following:

1. Financial performance;
2. Fulfillment in establishing Asset Losses Allowance;
3. Fairness with peer groups; and
4. Consideration of the Bank's long-term targets and strategies.

AUTHORITIES FOR NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Apart from the authority in the Nomination and Remuneration Committee Charter, the Committee is also authorized to access the necessary documents, data, and information from Bank Muamalat Indonesia. The Nomination and Remuneration Committee may involve independent parties outside the committee members to assist in duties implementation and carry out other authorities assigned by the Board of Commissioners, if necessary.

TERM OF OFFICE FOR NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Bank Muamalat provisions on the term of office for Nomination and Remuneration Committee members are as follows:

1. The term of office of the Nomination and Remuneration Committee members shall not exceed the term of office of the Board of Commissioners and may be reappointed.
2. For Committee members who are not from the Board of Commissioners, the replacement shall be carried out no later than 60 (sixty) days since the Nomination and Remuneration Committee member can no longer carry out his/her functions.

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Merujuk pada Pasal 66 POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, komposisi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Non Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai Bank.

Berikut komposisi dan dasar hukum pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Muamalat Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 005/B/DIR-KPTS/I/2024 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 5 Januari 2024:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Period of Office
Amin Said Husni ^{*)}	Ketua, Komisaris Independen Chairman, Independent Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. 005/B/DIR-KPTS/I/2024 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 5 Januari 2024. Board of Directors Decree No. 005/B/DIR-KPTS/I/2024 concerning the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated January 5, 2024.	2024
Andre Mirza Hartawan	Anggota, Komisaris Member, Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. 005/B/DIR-KPTS/I/2024 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 5 Januari 2024. Board of Directors Decree No. 005/B/DIR-KPTS/I/2024 concerning the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated January 5, 2024.	2024
Riksa Prakoso	Anggota, Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia Member, Executive Officer in charge of human resources function	Surat Keputusan Direksi No. 005/B/DIR-KPTS/I/2024 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 5 Januari 2024. Board of Directors Decree No. 005/B/DIR-KPTS/I/2024 concerning the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated January 5, 2024.	2024

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.

Berikut komposisi dan dasar hukum pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Muamalat Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 022/B/DIR-KPTS/VII/2024 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 5 Juli 2024:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Period of Office
Amin Said Husni ^{*)}	Ketua, Komisaris Independen Chairman, Independent Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. 022/B/DIR-KPTS/VII/2024 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 5 Juli 2024. Board of Directors Decree No. 022/B/DIR-KPTS/VII/2024 concerning the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated July 5, 2024.	2024

COMPOSITION AND BASIS OF APPOINTMENT OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Referring to Article 66 POJK No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks, the composition of members of the Nomination and Remuneration Committee consists at least 1 (one) member of Independent Commissioner, 1 (one) member of Non-Independent Commissioner and 1 (one) member of Executive Officer responsible for the human resource function or 1 (one) member representing the Bank's employees.

The following is the composition and legal basis for the appointment of the Remuneration and Nomination Committee of Bank Muamalat Indonesia based on the Decree of the Board of Directors No. 005/B/DIR-KPTS/I/2024 concerning the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated January 5, 2024:

The following is the composition and legal basis for the appointment of the Remuneration and Nomination Committee of Bank Muamalat Indonesia based on the Decree of the Board of Directors No. 022/B/DIR-KPTS/VII/2024 concerning the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated July 5, 2024:



Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Period of Office
Andre Mirza Hartawan	Anggota, Komisaris Member, Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. 022/B/DIR-KPTS/VII/2024 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 5 Juli 2024. Board of Directors Decree No. 022/B/DIR-KPTS/VII/2024 concerning the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated July 5, 2024.	2024
Anton Hendrianto	Anggota, Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia Member, Executive Officer in charge of human resources function	Surat Keputusan Direksi No. 022/B/DIR-KPTS/VII/2024 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 5 Juli 2024. Board of Directors Decree No. 022/B/DIR-KPTS/VII/2024 concerning the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated July 5, 2024.	2024

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.

Berikut komposisi dan dasar hukum pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Muamalat Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 038/B/DIR-KPTS/VIII/2024 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 Agustus 2024:

The following is the composition and legal basis for the appointment of the Remuneration and Nomination Committee of Bank Muamalat Indonesia based on the Decree of the Board of Directors No. 038/B/DIR-KPTS/VIII/2024 concerning the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated August 1, 2024:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Period of Office
Amin Said Husni ^{*)}	Ketua, Komisaris Independen Chairman, Independent Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. 038/B/DIR-KPTS/VIII/2024 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 Agustus 2024 Board of Directors Decree No. 038/B/DIR-KPTS/VIII/2024 concerning the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated August 1, 2024	2024
Andre Mirza Hartawan	Anggota, Komisaris Member, Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. 038/B/DIR-KPTS/VIII/2024 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 Agustus 2024 Board of Directors Decree No. 038/B/DIR-KPTS/VIII/2024 concerning the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated August 1, 2024	2024
Esti Budiarti	Anggota, Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia Member, Executive Officer in charge of human resources function	Surat Keputusan Direksi No. 038/B/DIR-KPTS/VIII/2024 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 Agustus 2024 Board of Directors Decree No. 038/B/DIR-KPTS/VIII/2024 concerning the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated August 1, 2024	2024

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.

PROFIL KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Berikut adalah profil anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Muamalat Indonesia.

PROFILE OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Following is profile of members of the Nomination and Remuneration Committee of Bank Muamalat Indonesia.



Amin Said Husni
Ketua
Chairman

Profil lengkap disajikan pada bab “Profil Perusahaan”.
The complete profile is presented in the “Company Profile” chapter.



Andre Mirza Hartawan
Anggota
Member

Profil lengkap disajikan pada bab “Profil Perusahaan”.
The complete profile is presented in the “Company Profile” chapter.



Esti Budiarti
Anggota
Member

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Usia Age	44 tahun pada Tahun Buku 2024	44 years old in the Financial Year 2024



Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 038/B/DIR-KPTS/VIII/2024 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 Agustus 2024.	Served as a Member of the Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk in accordance with the Decree of the Board of Directors No. 038/B/DIR-KPTS/VIII/2024 concerning the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated August 1, 2024.
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Psikologi di Universitas Indonesia (2004)	Bachelor of Psychology at University of Indonesia (2004)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	-	
Pengalaman Kerja Work Experience	- Head of HCBP & Services di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Februari 2023 - sekarang) - Head of HCBP & Talent Acquisition di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Mei 2020 - Januari 2023) - Head of HCBP Operation & Support Function di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Oktober 2018 - April 2020) - HCBP Operation & Finance di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Juli 2016 - September 2018)	- Head of HCBP & Services at PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (February 2023 - present) - Head of HCBP & Talent Acquisition at PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (May 2020 - January 2023) - Head of HCBP Operation & Support Function at PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (October 2018 - April 2020) - HCBP Operation & Finance at PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (July 2016 - September 2018)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Does not have affiliated relationships with the Board of Directors, Board of Commissioners, or Main/Controlling Shareholders.
Kualifikasi Qualification	Pihak independen yang memiliki kualifikasi di bidang akuntansi, audit dan perbankan syariah.	An independent party who has qualifications in accounting, audit and Sharia banking.

INDEPENDENSI KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen dituntut untuk dapat bekerja secara profesional dan independen tanpa campur tangan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penjelasan independensi anggota komite diurai melalui tabel di bawah ini.

INDEPENDENCY OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Members of the Nomination and Remuneration Committee coming from independent parties are demanded to be able to work professionally and independently without the intervention of any party that is not in accordance with the laws and regulation in carrying out their duties and functions. Explanation on the independency of members of the committee is described in the table below.

Aspek Independensi Independence Aspect	Amin Said Husni*	Andre Mirza Hartawan	Esti Budiarti
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Having no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Having no management relationship in the Company, subsidiaries, or affiliated companies	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG Having no family relations with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Nomination, Remuneration Committee and GCG Committee	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as a manager of political parties, officials, and government	✓	✓	✓

* Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.

Dalam hal pembuktian independensi, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi BMI tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan keuangan, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

In the context of proving independency, members of BMI Audit Committee do not have family relationship nor financial relationship, with directly or indirectly, related to the Bank's business activities.

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with						Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with						Hubungan Kepengurusan Management Relationship	
		Dewan Komisaris Board of Commissioner		Direksi Board of Director		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioner		Direksi Board of Director		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders			
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Amin Said Husni ^{*)}	Ketua Chairman		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Andre Mirza Hartawan	Anggota Member		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Esti Budiarti	Anggota Member		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.

RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Kebijakan Rapat

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Muamalat wajib menyelenggarakan rapat paling sedikit sebanyak 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat dimaksud dinyatakan sah apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dan salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut merupakan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi. Hal tersebut sesuai dengan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi.

Hasil rapat Komite harus dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Risalah tersebut harus ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Rapat

MEETING OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Meeting Policy

The Nomination and Remuneration Committee of Bank Muamalat is required to hold at least 1 (one) meeting within 3 (three) months. The concerned meeting is only legitimate if attended by the majority members of the Nomination and Remuneration Committee and one of the attending majority members of the Nomination and Remuneration Committee is the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee. This is in accordance with POJK No. 17 of Yr 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks as well as with the Charter of the Nomination and Remuneration Committee.

Results of the Committee meetings are recorded in the minutes of meetings, including if there occurred dissenting opinions. The minutes of meetings are signed by all members of the Nomination and Remuneration Committee who attended and submitted to the Board of Commissioners.

Meeting Implementation

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1.	2 Februari 2024 February 2, 2024	MIG Direksi 2024 MIG Board of Directors 2024	- Amin Said Husni^{*)} - Andre Mirza Hartawan - Riksa Prakoso^{*)}
2.	21 Maret 2024 March 21, 2024	Interview Kandidat Anggota Komite Pemantau Risiko Interview of Risk Monitoring Committee Candidates	- Amin Said Husni^{*)} - Andre Mirza Hartawan - Riksa Prakoso^{*)}
3.	5 April 2024 April 5, 2024	Pembahasan Surat OJK Discussion of OJK Letter	- Amin Said Husni^{*)} - Andre Mirza Hartawan - Riksa Prakoso^{*)}
4.	6 Juni 2024 June 6, 2024	1. Pembahasan Mata Acara RUPST 2. Review Struktur Organisasi Perusahaan 1. Discussion of the Agenda of the AGMS 2. Review of the Company's Organizational Structure	- Amin Said Husni^{*)} - Andre Mirza Hartawan - Riksa Prakoso^{*)}
5.	26 Juni 2024 June 26, 2024	Perubahan Susunan RUPS 27 Juni 2024 Changes to the Composition of the GMS June 27, 2024	- Amin Said Husni^{*)} - Andre Mirza Hartawan - Riksa Prakoso^{*)}



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
6.	8 July 2024 July 8, 2024	Assessment Pengurus Perseroan & Asuransi Purna Jabatan (ASPURJAB) Assessment of Company Management & Retirement Insurance (ASPURJAB)	- Amin Said Husni^{*)} - Andre Mirza Hartawan - Riksa Prakoso^{*)}
7.	10 December 2024 December 10, 2024	Confidential Confidential	- Amin Said Husni^{*)} - Andre Mirza Hartawan - Esti Budiarti
8.	19 December 2024 December 19, 2024	Confidential Confidential	- Andre Mirza Hartawan - Esti Budiarti

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.

Adapun tingkat kehadiran masing-masing anggota komite adalah sebagai berikut:

The level of attendance of each committee member is as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran (%) Attendance Percentage (%)
1.	Amin Said Husni ^{*)}	Ketua Chairman	7	7	100
2.	Andre Mirza Hartawan	Anggota Member	8	8	100
3.	Esti Budiarti	Anggota Member	2	2	100
4.	Riksa Prakoso ^{*)}	Anggota Member	6	6	100

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bank senantiasa mendorong Komite Remunerasi dan Nominasi untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan pada tahun 2024. Informasi lengkap mengenai hal ini disampaikan dalam bab "Profil Perusahaan".

COMPETENCY DEVELOPMENT

The Bank continuously encouraged the Nomination and Remuneration Committee to develop competence through trainings in 2023. Complete information regarding this matter is presented in the chapter "Company Profile".

SERTIFIKASI PROFESI

Certification of Profession

No.	Sertifikasi Profesi Certification of Profession	Nama Name	Lembaga Penerbit Issuing Institution
1.	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Risk Management Certification Level 6	1. Amin Said Husni ^{*)} 2. Andre Mirza Hartawan	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Professional Certification Agency (BNSP)
2.	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Certification Level 7	Riksa Prakoso ^{*)}	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Professional Certification Agency (BNSP)
3.	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Certification Level 4	Esti Budiarti	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Professional Certification Agency (BNSP)
4.	Sertifikasi <i>Human Resources Manager's Certification</i> Human Resources Manager's Certification	Riksa Prakoso ^{*)}	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Professional Certification Agency (BNSP)

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Pada tahun 2024, sebagaimana tugas dan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi yang tercantum dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Muamalat, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan kegiatan komite sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi/usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Bank Muamalat kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Usulan tersebut diperoleh melalui serangkaian proses yang dilakukan Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi penyusunan kebijakan, kriteria, dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam rangka proses nominasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan rencana strategis Perseroan.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisis dan mengidentifikasi data bakal calon Direksi, calon Dewan Komisaris, calon Dewan Pengawas Syariah serta calon pihak independen anggota komite Dewan Komisaris yang memenuhi syarat.
3. Selain sistem nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi juga telah membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris Bank Muamalat berupa sistem penggajian/honorarium, fasilitas/tunjangan, dan tantiem untuk tahun 2024 dan Asuransi Purna Jabatan bagi Pengurus Bank.
4. Menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris.

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

During the year 2023, as the duties and function of the Nomination and Remuneration Committee stated in the Charter of the Nomination and Remuneration Committee of Bank kMuamalat, the Nomination and Remuneration Committee implemented the following tasks:

1. Provided recommendations/ suggestions on candidates who fulfilled the requirements as members of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners and the Baord of Directors of Bank Muamalat to the Board of Commissioners for further presentation to the GMS. The recommendataions were attained through a series of processes conducted by the Remuneration and Nomination Committee which covered the establishment of policies, criteria, and qualifications needed in the nomination process of member candidates of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners and the Board of Directors that are in line with the Company's strategic plans.
2. The Nomination and Remuneration Committee assisted the Board of Commissioners to obtain and analyze and identify data of prospective candidates for the Board of Directors, candidates for the Board of Commissioners, candidates for the Sharia Supervisory Board as well as candidates for independent members of the Board of Commissioners committees who fulfill he requirements.
3. Aside from the nomination system, the Remuneration and Nomination Committee also assisted the Board of Commissioners in proposing the appropriate remuneration system for the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board and the Board of commissioners of Bank Muamalat in the form of salary/honorarium system, facilities/allowances and bonuses for the year 2024.
4. Set up the mechanism and assessed the performance of the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Commissioners.



KEBIJAKAN MENGENAI SUKSESI DIREKSI

Bank Muamalat Indonesia telah memiliki kebijakan mengenai suksesi manajemen, termasuk Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang mengacu pada Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik. Komite yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi di BMI memiliki tugas untuk menyusun suatu sistem nominasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan menjadi bagian dari Kebijakan *Good Corporate Governance* dari Perseroan serta menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan remunerasi dan nominasi anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi.

Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota manajemen Bank. Kebijakan suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang Bank.

Kebijakan suksesi manajemen diimplementasikan melalui beragam program, salah satunya ialah *Talent Management* dan *Succession Plan*. Fungsi dari *talent management* adalah mempersiapkan *pool of talent* dari Bank sebagai upaya penyediaan dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bank. Suksesi diterapkan dalam rangka menyiapkan kader-kader terbaik dari *pool of talent* yang siap menduduki posisi-posisi kritis, termasuk posisi pejabat eksekutif Bank.

Bank telah memiliki *database pool of talent* dan *successor* berdasarkan proses identifikasi *talent* dan suksesor dengan menggunakan metodologi yang disiapkan oleh Bank. Proses validasi dan kalibrasi dilakukan atas *talent* dan suksesor, baik di tingkat Direktorat maupun di tingkat Direksi untuk posisi-posisi strategis yaitu posisi satu level di bawah Direksi dan Region Head. *Database* ini diperbarui setiap tahun dan menjadi referensi Manajemen dalam melakukan rotasi maupun promosi karyawan serta untuk kebutuhan nominasi jabatan strategis pada Bank Muamalat Indonesia.

POLICIES ON THE SUCCESSION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Bank Muamalat Indonesia has retained the policies on management succession, including for the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board and the Board of Directors that refer to OJK Regulation No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks and OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 regarding Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies. The committee that carries out the functions of nomination and remuneration in BMI has the duties to establish a nomination system for members of the Sharia Supervisory Bboard, the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company that will be part of the Company's Good Corporate Governane Policy as well as the guidelines for the Board of Commissioners and the GMS to determine the remuneration and nomination of members of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners and the Board of Directors.

One of the policies that support the nomination process as referred to, is the succession policy for members of the Bank's management. The succession policy is intended to maintain continuity of the regeneration process or leadership cadre formation in the company in the context of maintaining the Bank's business continuity and long-term objectives.

The management succession policy is implemented through various programs, among which is the Talent Management and Succession Plan. The function of the talent management is to prepare the pool of talents from the Bank as an effort to supply and strengthen the Human Resources in the Bank. Succession is applied in the effort to prepare the best cadres from the pool of talents who are prepared to take on critical positions, including the position of the Bank's executive officers.

The Bank has the database pool of talents and successors based on talent and successor identification process by use of the methodology prepared by the Bank. The validation and calibration processes are carried out on the talents and successors, both at the Directorate as well as the Board of Directors levels for strategic positions, namely the position at one level below the Board of Directors and Regional Head. This database is updated yearly and serves as reference for the Management in conducting rotation as well as promotion of employees and for nomination purposes of strategic positions at Bank Muamalat Indonesia.

Komite Pemantau Risiko

Risk Oversight Committee

Pembentukan Komite Pemantau Risiko adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko serta pelaksanaannya agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Komite juga melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko.

The establishment of Risk Monitoring Committee is intended to assist the Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities to supervise and provide advices to the Board of Directors in order to attain adequate confidence that the Bank's risk management implementation continues to meet the elements of adequacy of risk management procedures and methodology as well as its implementation in accordance with the principle of prudence. The committee also evaluates the implementation of duties of the Risk Monitoring Committee and Risk Management Work Unit.

DASAR HUKUM

Dalam membentuk Komite Pemantau Risiko, Bank Muamalat Indonesia mengacu pada peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
2. Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

LEGAL BASIS

In establishing the Risk Oversight Committee, Bank Muamalat Indonesia refers to the following laws and regulations:

1. OJK Regulation No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks.
2. OJK Regulation Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
3. Bank's Articles of Association regarding the duties and authorities of the Board of Commissioners.

PEDOMAN KERJA/PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko Bank Muamalat Indonesia telah memiliki piagam atau pedoman kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Piagam tersebut mengatur struktur dan keanggotaan, persyaratan keanggotaan, masa tugas, tugas dan tanggung jawab, wewenang, tata cara dan prosedur penyelenggaraan rapat serta pelaporan kepada Dewan Komisaris.

THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE CHARTER

Bank Muamalat Indonesia Risk Monitoring Committee has a charter or work guidelines in carrying out its duties and functions. The charter regulates the structure and membership, membership requirements, term of office, duties and responsibilities, authority, procedures and procedures for holding meetings and reporting to the Board of Commissioners.



Piagam Komite Pemantau Risiko dan susunan keanggotaan komite telah diperbarui sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

The Risk Monitoring Committee Charter and the composition of the committee membership have been updated in accordance with the provisions of OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks and will continue to be updated in accordance with the development of applicable regulations and the current conditions of the Bank.

KRITERIA ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Kriteria keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah diatur oleh Bank, yang juga telah dituangkan ke dalam Piagam Komite Pemantau Risiko Kriteria tersebut di antaranya:

1. Komite pemantau risiko wajib beranggotakan paling sedikit:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang manajemen risiko; dan
 - c. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian perbankan syariah.
2. 1 (satu) orang anggota dewan pengawas syariah dapat menjadi anggota komite pemantau risiko.
3. Komite pemantau risiko diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota
4. Keahlian Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b dan huruf c dibuktikan dengan:
 - a. wajib memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Direksi; dan
 - b. memiliki sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.
5. Memiliki integritas, reputasi keuangan, akhlak dan moral yang baik.
6. Memiliki latar belakang pendidikan, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang keuangan dan perbankan.
7. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
8. Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko secara umum.
9. Memahami peraturan perbankan dan peraturan lain terkait perbankan.
10. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
11. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank Muamalat Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

CRITERIA OF MEMBERS OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE

The membership criteria of the Risk Monitoring Committee is regulated by the Bank, and is contained in the Charter of the Risk Monitoring Committee, among others, as follows:

1. Risk Monitoring Committee's membership is required to consist at least:
 - a. 1 (one) member of Independent Commissioner;
 - b. 1 (one) member of Independent Party with the expertise in risk management; and
 - c. 1 (one) member representing an Independent Party with the expertise in sharia banking.
2. 1 (one) member of the sharia supervisory board may serve as member of risk monitoring committee.
3. Risk Monitoring Committee is chaired by an Independent Commissioner concurrently as member.
4. Expertise of the Independent Party as mentioned in point (1) letter b and letter c is proven in the following manner:
 - a. Must have risk management certification as also applies to the Board of Directors; and
 - b. Having competency certification that supports the implementation of function and responsibilities of the committee.
5. Having good integrity, financial, attitude and morality.
6. Having adequate educational background, capability, knowledge and experience in the fields of finance and banking.
7. Capable of cooperating and having the ability to communicate appropriately well and provide sufficient time to carry out duties.
8. Having adequate knowledge on *Good Corporate Governance* and risk management in general.
9. Understand banking regulations and other regulations related to banking.
10. Willing to continuously develop competency through education and training.
11. Not a person from Public Accounting Firm, Legal Consultant Office, Public Appraisal Services Firm or other parties that provide assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other consulting services to Bank Muamalat Indonesia within the last 6 (six) months.

12. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank Muamalat Indonesia.
13. Tidak memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terhadap Bank Muamalat Indonesia.
14. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank Muamalat Indonesia.
15. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Muamalat Indonesia.
16. Bukan merupakan pihak yang berasal dari karyawan Bank Muamalat Indonesia.

12. Having no share directly or indirectly at Bank Muamalat Indonesia.
13. Not having personal interests that may cause conflict of interest with Bank Muamalat Indonesia.
14. Not having affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Controlling Shareholders of Bank Muamalat Indonesia.
15. Not having business relationship directly or indirectly related to business activities of Bank Muamalat Indonesia.
16. Not a party that originates from the employees of Bank Muamalat Indonesia.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko ialah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Manajemen.
2. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko.
4. Melakukan evaluasi atas langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko.
5. Melakukan evaluasi atas permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan.
6. Melakukan evaluasi atas struktur organisasi manajemen risiko.
7. Melakukan evaluasi atas laporan profil risiko dan laporan Bank baik internal maupun eksternal agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Memastikan bahwa unit kerja manajemen risiko memenuhi kriteria independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE

Duties and responsibilities of the Risk Oversight Committee are as follows:

1. Evaluating the risk management policies and strategies prepared by the Management.
2. Evaluating the conformity of the risk management policy with the implementation.
3. Evaluating duties implementation of the Risk Management Committee and Risk Management Unit.
4. Evaluating the measures taken by the Board of Directors to comply with the Financial Services Authority and other applicable laws and regulations in implementing prudential principles, particularly those relating to risk management.
5. Evaluating the requests from the Board of Directors proposal relating to transactions or business activities that exceed the authority of the Board of Directors to be used by the Board of Commissioners as a basis for decision making.
6. Evaluating the risk management organizational structure.
7. Evaluating the risk profile report and the Bank's report, both internal and external, to be in line with the applicable regulations.
8. Ensuring the risk management unit meets the independence criteria in performing duties and responsibilities.



WEWENANG KOMITE PEMANTAU RISIKO

Wewenang yang dimiliki oleh Komite Pemantau Risiko Bank Muamalat Indonesia tertuang pada Piagam Komite Pemantau Risiko, antara lain:

1. Diperbolehkan mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Bank yang diperlukan.
2. Diperbolehkan berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi manajemen risiko dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko.
3. Diperbolehkan melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Pemantau Risiko yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

KETENTUAN MASA JABATAN

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Berikut komposisi dan dasar hukum pengangkatan Komite Pemantau Risiko Bank Muamalat Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 061/B/DIR-KPTS/XI/2023 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 November 2023:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Period of Office
Sartono	Ketua, Komisaris Independen Chairman, Independent Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. 061/B/DIR-KPTS/XI/2023 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 November 2023. Board of Directors Decree No. 061/B/DIR-KPTS/XI/2023 regarding Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated 1 November 2023.	November 2023 - April 2024 November 2023 - April 2024
Andre Mirza Hartawan	Anggota, Komisaris Member, Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. 061/B/DIR-KPTS/XI/2023 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 November 2023. Board of Directors Decree No. 061/B/DIR-KPTS/XI/2023 regarding Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated 1 November 2023.	April 2024 - Agustus 2024 April 2024 - August 2024
Amin Said Husni ⁹⁾	Anggota, Komisaris Independen Member, Independent Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. 061/B/DIR-KPTS/XI/2023 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 November 2023. Board of Directors Decree No. 061/B/DIR-KPTS/XI/2023 regarding Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated 1 November 2023.	April 2024 - Agustus 2024 April 2024 - August 2024

THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE AUTHORITIES

The Risk Oversight Committee of Bank Muamalat Indonesia has authorities as contained in the Risk Monitoring Committee Charter, among others:

1. Access to bank documents, data, and information about employees, funds, assets, and company resources is needed.
2. Being able to communicate directly with the employees, including the Board of Directors as well as parties performing the risk management functions and other parties related to the duties and responsibilities of the Risk Oversight Committee.
3. Being able to involve independent parties outside the Risk Oversight Committee members to assist in running duties.
4. Performing other authorities assigned by the Board of Commissioners

TERM OF OFFICE

The term of office for the Risk Oversight Committee members must not be longer than the term of office of the Board of Commissioners. Committee members can be re-elected for only one term.

COMPOSITION AND BASIS FOR APPOINTMENT OF THE RISK MONITORING COMMITTEE

The following is the composition and legal basis for the appointment of the Risk Monitoring Committee of Bank Muamalat Indonesia based on the Decree of the Board of Directors No. 061/B/DIR-KPTS/XI/2023 concerning the Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated November 1, 2023:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Period of Office
Dedi Sopyan	Anggota, Pihak Independen Ahli di Bidang Manajemen Risiko Member, Independent Expert in the Field of Risk Management	Surat Keputusan Direksi No. 061/B/DIR-KPTS/XI/2023 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 November 2023. Board of Directors Decree No. 061/B/DIR-KPTS/XI/2023 regarding Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated 1 November 2023.	April 2024 - Agustus 2024 April 2024 - August 2024
Ani Murdiati	Anggota, Pihak Independen Ahli di Bidang Perbankan Syariah Member, Independent Expert in the Field of Sharia Banking	Surat Keputusan Direksi No. 061/B/DIR-KPTS/XI/2023 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 November 2023. Board of Directors Decree No. 061/B/DIR-KPTS/XI/2023 regarding Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated 1 November 2023.	April 2024 - Agustus 2024 April 2024 - August 2024

Berikut komposisi dan dasar hukum pengangkatan Komite Pemantau Risiko Bank Muamalat Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 015/B/DIR-KPTS/IV/2024 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 April 2024:

The following is the composition and legal basis for the appointment of the Risk Monitoring Committee of Bank Muamalat Indonesia based on the Decree of the Board of Directors No. 015/B/DIR-KPTS/IV/2024 concerning the Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated April 1, 2024:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Period of Office
Sartono	Ketua, Komisaris Independen Chairman, Independent Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. No. 015/B/DIR-KPTS/IV/2024 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 April 2024. Board of Directors Decree No. 015/B/DIR-KPTS/IV/2024 concerning the Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated April 1, 2024.	April 2024 - Agustus 2024 April 2024 - August 2024
Andre Mirza Hartawan	Anggota, Komisaris Member, Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. No. 015/B/DIR-KPTS/IV/2024 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 April 2024. Board of Directors Decree No. 015/B/DIR-KPTS/IV/2024 concerning the Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated April 1, 2024.	April 2024 - Agustus 2024 April 2024 - August 2024
Amin Said Husni ^{*)}	Anggota, Komisaris Independen Member, Independent Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. No. 015/B/DIR-KPTS/IV/2024 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 April 2024. Board of Directors Decree No. 015/B/DIR-KPTS/IV/2024 concerning the Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated April 1, 2024.	April 2024 - Agustus 2024 April 2024 - August 2024
Hari Dewanto	Anggota, Pihak Independen Ahli di Bidang Manajemen Risiko Member, Independent Expert in the Field of Risk Management	Surat Keputusan Direksi No. No. 015/B/DIR-KPTS/IV/2024 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 April 2024. Board of Directors Decree No. 015/B/DIR-KPTS/IV/2024 concerning the Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated April 1, 2024	April 2024 - Agustus 2024 April 2024 - August 2024
Ani Murdiati	Anggota, Pihak Independen Ahli di Bidang Perbankan Syariah Member, Independent Expert in the Field of Sharia Banking	Surat Keputusan Direksi No. No. 015/B/DIR-KPTS/IV/2024 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 April 2024. Board of Directors Decree No. 015/B/DIR-KPTS/IV/2024 concerning the Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated April 1, 2024.	April 2024 - Agustus 2024 April 2024 - August 2024

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.



Berikut komposisi dan dasar hukum pengangkatan Komite Pemantau Risiko Bank Muamalat Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 036/B/DIR-KPTS/VIII/2024 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 Agustus 2024:

The following is the composition and legal basis for the appointment of the Risk Monitoring Committee of Bank Muamalat Indonesia based on the Decree of the Board of Directors No. 036/B/DIR-KPTS/VIII/2024 concerning the Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated August 1, 2024:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Period of Office
Sartono	Anggota, Komisaris Independen Member, Independent Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. No. 036/B/DIR-KPTS/VIII/2024 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 Agustus 2024. Board of Directors Decree No. 036/B/DIR-KPTS/VIII/2024 concerning the Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated August 1, 2024.	Agustus 2024 - Januari 2025 August 2024 - January 2025
Andre Mirza Hartawan	Anggota, Komisaris Member, Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. No. 036/B/DIR-KPTS/VIII/2024 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 Agustus 2024. Board of Directors Decree No. 036/B/DIR-KPTS/VIII/2024 concerning the Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated August 1, 2024.	Agustus 2024 - Januari 2025 August 2024 - January 2025
Amin Said Husni ^{*)}	Anggota, Komisaris Independen Member, Independent President Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. No. 036/B/DIR-KPTS/VIII/2024 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 Agustus 2024. Board of Directors Decree No. 036/B/DIR-KPTS/VIII/2024 concerning the Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated August 1, 2024.	Agustus 2024 - 11 Desember 2024 August 2024 - December 11, 2025
Hari Dewanto	Anggota, Pihak Utama Independen Ahli di Bidang Manajemen Risiko Member, Independent Expert in the Field of Risk Management	Surat Keputusan Direksi No. No. 036/B/DIR-KPTS/VIII/2024 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 Agustus 2024. Board of Directors Decree No. 036/B/DIR-KPTS/VIII/2024 concerning the Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated August 1, 2024.	Agustus 2024 - Januari 2025 August 2024 - January 2025
Ani Murdiati	Anggota, Pihak Independen Ahli di Bidang Perbankan Syariah Member, Independent Expert in the Field of Sharia Banking	Surat Keputusan Direksi No. No. 036/B/DIR-KPTS/VIII/2024 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 Agustus 2024. Board of Directors Decree No. 036/B/DIR-KPTS/VIII/2024 concerning the Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated August 1, 2024.	Agustus 2024 - Januari 2025 August 2024 - January 2025

^{*)} Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK dan telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Effective after obtaining approval from OJK and has ceased to serve in accordance with the resolution of the EGMS on December 11, 2024..

PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO

Berikut adalah profil Komite Pemantau Risiko Bank Muamalat Indonesia.



Sartono
Ketua
Chairman

Profil lengkap disajikan pada bab "Profil Perusahaan".
The complete profile is presented in the "Company Profile" chapter.



Andre Mirza Hartawan
Anggota
Member

Profil lengkap disajikan pada bab "Profil Perusahaan".
The complete profile is presented in the "Company Profile" chapter.



Amin Said Husni
Anggota
Member

Profil lengkap disajikan pada bab "Profil Perusahaan".
The complete profile is presented in the "Company Profile" chapter.



Hari Dewanto
Anggota
Member

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Usia Age	66 tahun pada akhir Tahun Buku 2024	66 years old in the Financial Year 2024
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. No. 036/B/DIR-KPTS/VIII/2024 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 Agustus 2024.	Appointed as a Member of the Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk based on the Decree of the Board of Directors No. 036/B/DIR-KPTS/VIII/2024 concerning the Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated August 1, 2024.
Riwayat Pendidikan Educational Background	- Magister Magister Ekonomi di University of New England (1988) - Sarjana di Institut Pertanian Bogor (1981)	- Master of Economics at the University of New England (1988) - Bachelor of Science at the Bogor Agricultural Institute (1981)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	- Komite Pemantau Risiko dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Mandiri Empat (2019-sekarang) - Komisaris di PT Wahana Optima Permai (2021 - sekarang)	- Risk Monitoring Committee and Supervisory Board of Bank Mandiri Empat Pension Fund (2019-present) - Commissioner at PT Wahana Optima Permai (2021 - present)
Pengalaman Kerja Work Experience	- Komite Pemantau Risiko dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Mandiri Empat (2019-sekarang) - Komisaris di PT Wahana Optima Permai 2021 – sekarang) - Komite Pemantau Risiko di PT Bank Syariah Mandiri (2016 - 2019) - Komite Pemantau Risiko di PT Bank Negara Indonesia Tbk pada tahun 2016	- Risk Monitoring Committee and Supervisory Board of Bank Mandiri Empat Pension Fund (2019-present) - Commissioner at PT Wahana Optima Permai (2021 – present) - Risk Monitoring Committee at PT Bank Syariah Mandiri (2016 - 2019) - Risk Monitoring Committee at PT Bank Negara Indonesia Tbk in 2016
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali.	Does not have affiliated relationships either in terms of financial or familial relationships with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Main Shareholders or Controlling Shareholders.
Kualifikasi Qualification	Pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang manajemen risiko dan audit.	Independent parties who have expertise in the field of risk management and audit.



Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Usia Age	62 tahun pada akhir Tahun Buku 2023	62 years old at the end of Financial Year 2024
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. No. 036/B/DIR-KPTS/VIII/2024 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 Agustus 2024.	Appointed as a Member of the Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk based on the Decree of the Board of Directors No. 036/B/DIR-KPTS/VIII/2024 concerning the Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated August 1, 2024.
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana biologi Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1988	Bachelor of Biology from Gadjah Mada University (UGM) in 1988
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Chairman Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah (LSP-KS) (2017-sekarang)	Chairman of the Sharia Financial Professional Certification Institute (LSP-KS) (2017-present)
Pengalaman Kerja Work Experience	- Chairman Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah (LSP-KS) (2017-sekarang) - Direktur Utama PT Bank Victoria Syariah (2013-2015) - Direktur Ritel Bank Mega Syariah (2007-2012) - Direktur Bisnis Bank Mega Syariah (2004-2007) - President Director PT Bank Victoria Syariah (2013-2015)	- Chairman of the Sharia Financial Professional Certification Institute (LSP-KS) (2017-present) - President Director of PT Bank Victoria Syariah (2013-2015) - Retail Director of Bank Mega Syariah (2007-2012) - Business Director of Bank Mega Syariah (2004-2007) - President Director of PT Bank Victoria Syariah (2013-2015)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali.	Does not have affiliated relationships either in terms of financial or familial relationships with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Main Shareholders or Controlling Shareholders.
Kualifikasi Qualification	Pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang manajemen risiko dan perbankan syariah.	Independent parties who have expertise in the field of risk management and Sharia banking.

INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Muamalat Indonesia dituntut untuk dapat bekerja secara profesional dan independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Hal itu memiliki arti pelaksanaan tugasnya tanpa campur tangan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

INDEPENDENCE OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE

The Risk Oversight Committee Members who are independent parties are required to be professional and independent in carrying out functions and duties. It means, carrying out their duties without interference from any party that is not in accordance with the laws and regulations.



Aspek Independensi Independence Aspect	Sartono	Andre Mirza Hartawan	Amin Said Husni ^{*)}	Hari Dewanto	Ani Murdiati
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Having no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Having no management relationship in the Company, subsidiaries, or affiliated companies	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG Having no family relations with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Nomination, Remuneration Committee and GCG Committee	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as a manager of political parties, officials, and government	✓	✓	✓	✓	✓

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.

Dalam hal pembuktian independensi, anggota Komite Pemantau Risiko Bank tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan keuangan, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

In terms of proving independence, the Bank's Risk Oversight Committee members do not have family or financial relations, either directly or indirectly, relating to the Bank's business activities.

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with						Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with						Hubungan Kepengurusan Management Relationship	
		Dewan Komisaris Board of Commissioner		Direksi Board of Director		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioner		Direksi Board of Director		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders			
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Sartono	Ketua Chairman	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Andre Mirza Hartawan	Anggota Member	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Amin Said Husni ^{*)}	Anggota Member	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Hari Dewanto	Anggota Member	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Ani Murdiati	Anggota Member	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Kebijakan Rapat

Rapat Komite Pemantau Risiko Bank Muamalat Indonesia wajib diselenggarakan sedikitnya sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Sebagaimana Piagam Komite Pemantau Risiko, rapat dapat dinyatakan sah jika dihadiri mayoritas anggota komite.

Hasil rapat Komite Pemantau Risiko wajib dituangkan ke dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Rapat

MEETINGS OF RISK OVERSIGHT COMMITTEE

Meeting Policy

Meetings of the Risk Monitoring Committee of Bank Muamalat Indonesia must be held at least 1 (one) time in 1 (one) month. As stipulated in the Charter of the Risk Monitoring Committee, a meeting is stated as legitimate if attended by the majority members of the committee.

The meeting resolution of the Risk Oversight Committee must be written in the minutes of the meeting and well documented, including any dissenting opinions, which are signed by all members of the Risk Oversight Committee who are present and submitted to the Board of Commissioners.

Meeting Implementation

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1.	5 Januari 2024 January 5, 2024	1. <i>Progress</i> Penanganan Pembiayaan LQF 2. Ketentuan Konsultasi Pembiayaan kepada BOC 1. Progress of LQF Financing Handling 2. Financing Consultation Provisions to BOC	- Sartono - Andre Mirza Hartawan - Amin Said Husni^{*)} - Dedi Sopyan - Ani Murdiati
2.	16 Februari 2024 February 16, 2024	1. Data Portofolio Kinerja Pembiayaan <i>Retail Consumer</i> 2. Ketentuan dan RAC Pembiayaan Segmen <i>Retail Consumer</i> 3. Limit Kewenangan Memutus Pembiayaan <i>Retail Consumer</i> 1. Consumer Retail Financing Performance Portfolio Data 2. Consumer Retail Segment Financing Provisions and RAC 3. Limits of Authority to Decide on Consumer Retail Financing	- Sartono - Andre Mirza Hartawan - Amin Said Husni^{*)} - Dedi Sopyan - Ani Murdiati
3.	8 Maret 2024 March 8, 2024	1. Tindak Lanjut Temuan Audit OJK 2. Ketentuan <i>Financing Operations</i> 1. Follow-up on OJK Audit Findings 2. Financing Operations Provisions	- Sartono - Andre Mirza Hartawan - Amin Said Husni^{*)} - Dedi Sopyan - Ani Murdiati
4.	19 April 2024 April 19, 2024	1. Kinerja Portofolio Pembiayaan EB 2. Alur Pembiayaan Segmen EB 3. <i>Update</i> Proses Pembiayaan Nasabah 1. EB Financing Portfolio Performance 2. EB Segment Financing Flow 3. Customer Financing Process Update	- Sartono - Andre Mirza Hartawan - Amin Said Husni^{*)} - Hari Dewanto - Ani Murdiati
5.	20 Mei 2024 May 20, 2024	Pengelolaan <i>Human Capital</i> di BMI Human Capital Management at BMI	- Sartono - Andre Mirza Hartawan - Amin Said Husni^{*)} - Hari Dewanto - Ani Murdiati
6.	7 Juni 2024 June 7, 2024	Portofolio Pembiayaan <i>Retail Banking</i> Retail Banking Financing Portfolio	- Sartono - Andre Mirza Hartawan - Amin Said Husni^{*)} - Hari Dewanto - Ani Murdiati
7.	12 Juli 2024 July 12, 2024	Pengembangan dan Penerapan Tata Kelola IT termasuk <i>Digital Banking</i> Development and Implementation of IT Governance, including Digital Banking	- Sartono - Andre Mirza Hartawan - Amin Said Husni^{*)} - Hari Dewanto - Ani Murdiati



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
8.	16 Agustus 2024 August 16, 2024	1. Risiko Konsentrasi di <i>Enterprise Banking</i> 2. Risiko Operasional di Pengadaan Barang dan Jasa 1. Concentration Risk in Enterprise Banking 2. Operational Risk in Procurement of Goods and Services	- Sartono - Andre Mirza Hartawan - Amin Said Husni^{*)} - Hari Dewanto - Ani Murdiati
9.	20 September 2024 September 20, 2024	1. <i>Review</i> Pelaksanaan Risiko Kepatuhan Bank Muamalat 2. <i>Update</i> Profil Risiko Bank Muamalat 1. Review of Bank Muamalat's Compliance Risk Implementation 2. Bank Muamalat's Risk Profile Update	- Sartono - Andre Mirza Hartawan - Amin Said Husni^{*)} - Hari Dewanto - Ani Murdiati
10.	30 Oktober 2024 October 30, 2024	1. Progres Perbaikan IT 2. <i>Review</i> Perkembangan Pembiayaan Segmen <i>Islamic</i> 3. Perkembangan Produk <i>Digital Banking</i> 1. IT Improvement Progress 2. Review of Islamic Segment Financing Development 3. Development of Digital Banking Products	- Sartono - Andre Mirza Hartawan - Amin Said Husni^{*)} - Hari Dewanto - Ani Murdiati
11.	15 November 2024 November 15, 2024	1. Manajemen Risiko Kredit Bank (Sisi <i>Financing Risk</i> dan SKMR) 2. Kinerja dan Kondisi Likuiditas Bank 1. Bank Credit Risk Management (Financing Risk and SKMR Side) 2. Bank Performance and Liquidity Conditions	- Sartono - Andre Mirza Hartawan - Amin Said Husni^{*)} - Hari Dewanto - Ani Murdiati
12.	6 Desember 2024 December 6, 2024	Pembahasan 10 Nasabah LQF Discussion of 10 LQF Customers	- Sartono - Andre Mirza Hartawan - Amin Said Husni^{*)} - Hari Dewanto - Ani Murdiati

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.

Adapun tingkat kehadiran masing-masing anggota komite adalah sebagai berikut:

The level of attendance of each committee member is as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran (%) Attendance Percentage (%)
1.	Sartono	Ketua Chairman	12	12	100
2.	Andre Mirza Hartawan	Anggota Member	12	12	100
3.	Amin Said Husni ^{*)}	Anggota Member	12	12	100
4.	Dedi Sopyan ^{**)}	Anggota Member	3	3	100
5.	Ani Murdiati	Anggota Member	12	12	100
6.	Hari Dewanto	Anggota Member	9	9	100

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.

^{**)} Telah berhenti menjabat sejak tanggal 1 April 2024.
Has stopped serving since April 1, 2024.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bank senantiasa mendorong Komite Pemantau Risiko untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan pada tahun 2024. Informasi lengkap mengenai hal ini disampaikan dalam bab "Profil Perusahaan".

COMPETENCY DEVELOPMENT RISK OVERSIGHT COMMITTEE

The Bank continuously encouraged the Risk Oversight Committee to develop competency through training in 2023. Complete information regarding competency development is available in the chapter "Company Profile".

SERTIFIKASI PROFESI

Certification of Profession

No.	Sertifikasi Profesi Professional Certification	Nama Name	Lembaga Penerbit Certification Body
1.	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	1. Sartono 2. Andre Mirza Hartawan 3. Amin Said Husni ^{*)} 4. Dedi Sopyan ^{**)} 5. Ani Murdiati (Asesor) 6. Hari Dewanto	1. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Agency for Certification of Profession (BNSP) 2. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Agency for Certification of Profession (BNSP) 3. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Agency for Certification of Profession (BNSP) 4. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Enterprise Risk Management Academy National Agency for Certification of Profession (BNSP) and Enterprise Risk Management Academy 5. Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah (LSPKS), ASBISINDO, dan BNSP Islamic Finance Professional Certification Institute (LSPKS, ASBISINDO, and BNSP) 6. IBI, Banking Competency Center IBI, Banking Competency Center
2.	Sertifikasi Internal Auditor Internal Auditor Certification	Dedi Sopyan ^{**)}	Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor Qualified Internal Auditor Certification Board
3.	Sertifikasi Profesional Pengawas Tata Kelola Bersertifikasi	Dedi Sopyan ^{**)}	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan PPA&K National Certification of Profession Agency (BNSP) and PPA&K

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.

Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.

^{**)} Telah berhenti menjabat sejak tanggal 1 April 2024.

Has stopped serving since April 1, 2024.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko dengan senantiasa menerapkan prinsip GCG sesuai peraturan yang berlaku. Adapun aktivitas Komite Pemantau Risiko selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan rapat secara rutin setiap bulannya, termasuk menyusun dan mendokumentasikan Risalah Rapat.
2. Memberikan masukan/rekomendasi kepada Dewan Komisaris antara lain terkait perbaikan profil risiko, penanganan pembiayaan LQF, alur pembiayaan segmen EB, RAC pembiayaan segmen retail consumer, ketentuan limit kewenangan memutus pembiayaan retail consumer, risiko konsentrasi di enterprise banking, risiko operasional pada proses pengadaan barang dan jasa, ketentuan financing operations, pengelolaan SDM, pengembangan dan penerapan tata kelola IT termasuk digital banking, perbaikan IT, serta kinerja dan kondisi likuiditas Bank.
3. Seluruh anggota Komite telah mengikuti minimal 1 (satu) kali kegiatan pengembangan kompetensi terkait dengan Manajemen Risiko atau Perbankan.

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF RISK OVERSIGHT COMMITTEE

The Risk Oversight Committee has carried out its duties and function as regulated in the Risk Oversight Committee Charter by continuously implementing GCG principles according to applicable regulations. Activities of Risk Monitoring Committee during the year 2024 are as follows:

1. Held regular meetings every month, including on the preparation and documentation of Minutes of Meetings.
2. Providing input/recommendations to the Board of Commissioners, among others, related to improving risk profiles, handling of LQF financing, EB segment financing flows, RAC financing of the retail consumer segment, provisions on limits on authority to decide on retail consumer financing, concentration risk in enterprise banking, operational risk in the procurement process of goods and services, provisions on financing operations, HR management, development and implementation of IT governance including digital banking, IT improvements, and the Bank's performance and liquidity conditions.
3. All Committee members have joined competency development activities related to Banking/Risk Management at least 1 (one) time.



Komite Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Committee

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Tata Kelola Perusahaan untuk membantu pelaksanaan pengawasan dan evaluasi Dewan Komisaris terhadap penyelenggaraan Tata Kelola yang baik dalam setiap aktivitas usaha Bank pada seluruh jenjang atau tingkatan organisasi.

The Board of Commissioners established the Corporate Governance Committee to assist in the implementation of supervision and evaluation on the implementation of Governance in each of the Bank's business activities at all ranks or levels of the organization.

DASAR HUKUM

Pembentukan Komite Tata Kelola Perusahaan oleh Bank mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
2. Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 15/SEOJK.03/2024 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

LEGAL BASIS

The Bank established Corporate Governance Committee by referring to the following laws and regulations:

1. OJK Regulation No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks
2. OJK Regulation Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
3. Circular Letter of the Financial Services Authority (OJK) No. 15/SEOJK.03/2024 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
4. The Bank's Articles of Association regarding the duties and authorities of the Board of Commissioners.

PEDOMAN KERJA/PIAGAM KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Tata Kelola Perusahaan Bank Muamalat Indonesia telah memiliki pedoman kerja atau piagam sebagai panduan dalam menjalankan perannya, yang mengatur prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, struktur dan keanggotaan, persyaratan keanggotaan, masa tugas, tugas dan tanggung jawab, wewenang, tata cara dan prosedur penyelenggaraan rapat serta pelaporan kepada Dewan Komisaris. Piagam dan susunan keanggotaan komite telah diperbarui sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER

The Bank Muamalat Indonesia Corporate Governance Committee has a working guideline or charter as a guide in carrying out its role, which regulates the principles of Good Corporate Governance, structure and membership, membership requirements, term of office, duties and responsibilities, authority, procedures and procedures for holding meetings and reporting to the Board of Commissioners. The charter and membership composition of the committee have been updated in accordance with the provisions of OJK Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks and will continue to be updated in accordance with the development of applicable regulations and the current conditions of the Bank.

KRITERIA ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kriteria keanggotaan Komite Tata Kelola Perusahaan telah diatur oleh Bank, yang juga telah dituangkan ke dalam Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan. Kriteria tersebut di antaranya:

1. Wajib berintegritas dan memiliki reputasi keuangan yang baik.
2. Wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
3. Wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Bank.
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
6. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
7. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank Muamalat Indonesia.
8. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank Muamalat Indonesia.
9. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Muamalat Indonesia.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Perusahaan yang telah diatur oleh Bank:

1. Melakukan evaluasi atas struktur, kerangka tata kelola dan *kebijakan Good Corporate Governance* Bank Muamalat Indonesia.
2. Memastikan pelaksanaan kebijakan *Good Corporate Governance* dalam kegiatan Bank Muamalat Indonesia.
3. Melakukan kajian dan menilai prinsip-prinsip pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Muamalat Indonesia secara berkala dan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Dewan Komisaris.

MEMBERSHIP CRITERIA FOR CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE

The Bank regulates membership criteria for Corporate Governance Committee. The regulation is stated in the Corporate Governance Committee Charter, including:

1. Required to have integrity and a good financial reputation.
2. Required to have the ability, knowledge, and experience based on the field of work and being able to communicate well.
3. Required to comply with the code of conduct established by the Bank.
4. Willing to improve competence continuously through education and training.
5. Not a person in a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, Public Appraisal Service Firm, or any other party that provides assurance, non-assurance services, appraisal services, and/or other consulting services to the Issuer or Public Company within 6 (six) times last month.
6. Unless for the Independent Commissioner, there is no one who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Bank's activities within the last 6 (six) months.
7. Having no direct or indirect shares in Bank Muamalat Indonesia.
8. Having no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or Major Shareholders of Bank Muamalat Indonesia.
9. Having no business relationship, directly or indirectly, related to the business activities of Bank Muamalat Indonesia.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The following are the duties and responsibilities of the Corporate Governance Committee regulated by the Bank.

1. Evaluating the structure, governance framework, and Good Corporate Governance policies of Bank Muamalat Indonesia.
2. Ensuring the implementation of Good Corporate Governance policies in the activities of Bank Muamalat Indonesia.
3. Reviewing and assessing the principles of Good Corporate Governance implementation of Bank Muamalat Indonesia on a regular basis and submitting recommendations for improvements to the Board of Commissioners.



4. Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris kegiatan Bank yang tidak sesuai dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
5. Melakukan kajian atas laporan *Self-Assessment Good Corporate Governance* dan laporan tahunan *Good Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Bank Muamalat Indonesia guna memastikan transparansi dan akurasi laporan serta merekomendasikan perbaikan kepada Direksi.
6. Menyampaikan rekomendasi dalam rangka pemberian endorsement Dewan Komisaris atas laporan *Good Corporate Governance* dan kebijakan *Good Corporate Governance* Bank Muamalat Indonesia.
7. Menyusun dan memutakhirkan piagam Komite Tata Kelola secara berkala.
8. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank Muamalat Indonesia.
4. Submitting reports to the Board of Commissioners on Bank activities that are not in line with the implementation of *Good Corporate Governance*.
5. Reviewing the *Good Corporate Governance Self-Assessment* report and the *Good Corporate Governance* annual report published by Bank Muamalat Indonesia to ensure the transparency and accuracy of the report and recommend improvements to the Board of Directors.
6. Delivering recommendations in the context of endorsing the Board of Commissioners on the *Good Corporate Governance* reports and *Good Corporate Governance* policies of Bank Muamalat Indonesia.
7. Periodically preparing and updating the Governance Committee charter.
8. Maintaining the confidentiality of all documents, data, and information of Bank Muamalat Indonesia.

WEWENANG KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Tata Kelola Perusahaan Bank Muamalat Indonesia juga memiliki wewenang di samping tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan, yakni:

1. Diperbolehkan mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Bank yang diperlukan.
2. Diperbolehkan berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Perusahaan.
3. Diperbolehkan melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Tata Kelola Perusahaan yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

KETENTUAN MASA JABATAN

Berikut beberapa ketentuan atas masa jabatan anggota Komite Tata Kelola Perusahaan:

1. Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Perusahaan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE AUTHORITIES

The Corporate Governance Committee of Bank Muamalat Indonesia also has the authority apart from its duties and responsibilities, as stipulated in the Corporate Governance Committee Charter, namely:

1. Being allowed to access the Bank documents, data and information regarding the Bank employees, funds, assets, and required resources.
2. Being allowed to communicate directly with employees, including the Board of Directors and other parties related to duties and responsibilities of Corporate Governance Committee.
3. Being allowed to involve independent parties other than the Corporate Governance Committee members who are needed to assist in running duties.
4. Exercising other authorities delegated by the Board of Commissioners.

TERM OF OFFICE

The following are provisions in the term of office for Corporate Governance Committee members:

1. The term of office for Corporate Governance Committee members shall not exceed the term of office of the Board of Commissioners.
2. Committee members may be reelected only for one subsequent period.

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berikut komposisi dan dasar hukum pengangkatan Komite Tata Kelola Perusahaan Bank Muamalat Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 006/B/DIR-KPTS/I/2024 tentang Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 5 Januari 2024:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Period of Office
Amin Said Husni ^{*)}	Ketua, Komisaris Independen Chairman, Independent Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. 006/B/DIR-KPTS/I/2024 tentang Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 5 Januari 2024. Board of Directors Decree No. 006/B/DIR-KPTS/I/2024 concerning the Corporate Governance Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated January 5, 2024.	Januari - Agustus 2024 January - August 2024
Andre Mirza Hartawan	Anggota, Komisaris Member, Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. 006/B/DIR-KPTS/I/2024 tentang Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 5 Januari 2024. Board of Directors Decree No. 006/B/DIR-KPTS/I/2024 concerning the Corporate Governance Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated January 5, 2024.	Januari - Agustus 2024 January - August 2024
Dinan Supendi RAE	Anggota, Pihak Independen Member, Independent Party	Surat Keputusan Direksi No. 006/B/DIR-KPTS/I/2024 tentang Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 5 Januari 2024. Board of Directors Decree No. 006/B/DIR-KPTS/I/2024 concerning the Corporate Governance Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated January 5, 2024.	Januari - Agustus 2024 January - August 2024

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.

Berikut komposisi dan dasar hukum pengangkatan Komite Tata Kelola Perusahaan Bank Muamalat Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 037/B/DIR-KPTS/VIII/2024 tentang Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 Agustus 2024:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Period of Office
Amin Said Husni ^{*)}	Ketua, Komisaris Independen Chairman, Independent Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. 037/B/DIR-KPTS/VIII/2024 tentang Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 Agustus 2024. Board of Directors Decree No. 037/B/DIR-KPTS/VIII/2024 concerning the Corporate Governance Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated August 1, 2024.	Agustus 2024 - 11 Desember 2024 August 2024 - December 11, 2025
Andre Mirza Hartawan	Anggota, Komisaris Member, Commissioner	Surat Keputusan Direksi No. 037/B/DIR-KPTS/VIII/2024 tentang Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 Agustus 2024. Board of Directors Decree No. 037/B/DIR-KPTS/VIII/2024 concerning the Corporate Governance Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated August 1, 2024.	Agustus 2024 – Januari 2025 August 2024 – January 2025
Saiful Anwar	Anggota, Pihak Independen Members, Independent Party	Surat Keputusan Direksi No. 037/B/DIR-KPTS/VIII/2024 tentang Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 Agustus 2024. Board of Directors Decree No. 037/B/DIR-KPTS/VIII/2024 concerning the Corporate Governance Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated August 1, 2024.	Agustus 2024 – Januari 2025 August 2024 – January 2025

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.

COMPOSITION AND BASIS OF APPOINTMENT OF CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE

The following is the composition and legal basis for the appointment of the Corporate Governance Committee of Bank Muamalat Indonesia based on the Decree of the Board of Directors No. 006/B/DIR-KPTS/I/2024 concerning the Corporate Governance Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated January 5, 2024:

The following is the composition and legal basis for the appointment of the Corporate Governance Committee of Bank Muamalat Indonesia based on the Decree of the Board of Directors No. 037/B/DIR-KPTS/VIII/2024 concerning the Corporate Governance Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated August 1, 2024:



PROFIL KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berikut adalah profil Komite Tata Kelola Perusahaan Bank Muamalat Indonesia.



Amin Said Husni
Ketua
Chairman

Profil lengkap disajikan pada bab "Profil Perusahaan".
The complete profile is presented in the "Company Profile" chapter.



Andre Mirza Hartawan
Anggota
Member

Profil lengkap disajikan pada bab "Profil Perusahaan".
The complete profile is presented in the "Company Profile" chapter.



Saiful Anwar
Anggota
Member

CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE PROFILE

The following is the profile of the Corporate Governance Committee of Bank Muamalat Indonesia.

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Usia Age	47 tahun pada akhir Tahun Buku 2024	47 years old at the end of Financial Year 2024
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi No. 037/B/DIR-KPTS/VIII/2024 tentang Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 1 Agustus 2024.	Board of Directors Decree No. 037/B/DIR-KPTS/VIII/2024 concerning the Corporate Governance Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated August 1, 2024.
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Doctor of Information Science di Nagaoka University of Technology (2012) • Master of Islamic Banking & Finance di Universitas Indonesia (2008) • Sarjana Akuntansi di Universitas Indonesia (2001)	• Doctor of Information Science at Nagaoka University of Technology (2012) • Master of Islamic Banking & Finance at University of Indonesia (2008) • Bachelor of Accounting at University of Indonesia (2001)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Komite Pemantau Risiko di PT Bank KB Bukopin Syariah (2022 –sekarang)	Risk Monitoring Committee at PT Bank KB Bukopin Syariah (2022 – present)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Komite Pemantau Risiko di PT Bank KB Bukopin Syariah (2022 –sekarang) • Komite Audit di PT Bank BRI Syariah (2018-2021) • Komite Pemantau Risiko di PT Bank BRI Syariah (2013 sd 2018) • Section Head of Quality Assurance di PT Bank Syariah Mandiri (2005-2008) • Junior Auditor di Ernst&Young Indonesia (2004-2005)	• Risk Monitoring Committee at PT Bank KB Bukopin Syariah (2022 – present) • Audit Committee at PT Bank BRI Syariah (2018-2021) • Risk Monitoring Committee at PT Bank BRI Syariah (2013 to 2018) • Section Head of Quality Assurance at PT Bank Syariah Mandiri (2005-2008) • Junior Auditor at Ernst & Young Indonesia (2004-2005)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali.	Does not have affiliated relationships either in terms of financial or familial relationships with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Main Shareholders or Controlling Shareholders.
Kualifikasi Qualification	Pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang hukum dan bisnis.	Independent parties who have expertise in the fields of law and business.

RAPAT KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kebijakan Rapat

Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan Bank Muamalat Indonesia diselenggarakan paling sedikit sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah keseluruhan anggota Komite Tata Kelola Perusahaan, yang diatur dalam Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan. Hasil rapat Komite Tata Kelola Perusahaan wajib dituangkan ke dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Tata Kelola Perusahaan yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Rapat

CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE MEETING

Meeting Policy

The Corporate Governance Committee of Bank Muamalat Indonesia holds meetings at least 1 (one) time in 6 (six) months. Meetings can be declared valid if attended by more than ½ (one-half) of the total members of the Corporate Governance Committee, which is regulated in the Corporate Governance Committee Charter. The results of the Corporate Governance Committee meeting must be written into the minutes of the meeting and well documented, including any dissenting opinions, which are signed by all members of the Corporate Governance Committee who are present and submitted to the Board of Commissioners.

Meeting Implementation

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1.	19 April 2024 April 19, 2024	Sosialisasi POJK No. 2 tahun 2024 Tentang Tata Kelola Syariah Socialization of POJK No. 2 of 2024 Concerning Sharia Governance	• Amin Said Husni^{*)} • Andre Mirza Hartawan
2.	27 September 2024 September 27, 2024	Laporan <i>Self Assessment</i> GCG periode Juni 2024 GCG Self Assessment Report for June 2024	• Andre Mirza Hartawan • Amin Said Husni^{*)} • Saiful Anwar



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
3.	8 November 2024 November 8, 2024	Rencana <i>Enhancement</i> Kondisi GCG Bank untuk <i>Support</i> RBB 2025-2027 Bank GCG Condition Enhancement Plan to Support RBB 2025-2027	- Andre Mirza Hartawan - Amin Said Husni^{*)} - Saiful Anwar

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.

Adapun tingkat kehadiran masing-masing anggota komite pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The attendance level of each committee member in 2024 is as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran (%) Attendance Percentage (%)
1.	Andre Mirza Hartawan	Ketua Chairman	3	3	100
2.	Amin Said Husni ^{*)}	Anggota Member	3	3	100
3.	Dinan Rae Sufendi ^{**)}	Anggota Member	1	0	0
4.	Saiful Anwar	Anggota Member	2	2	100

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.

^{**)} Telah berhenti menjabat sejak tanggal 1 Agustus 2024.
Has stopped serving since August 1, 2024.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Kebijakan

Bank senantiasa mendorong Komite Tata Kelola Perusahaan untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan pada tahun 2024. Informasi lengkap mengenai hal ini disampaikan dalam bab “Profil Perusahaan”.

COMPETENCY DEVELOPMENT

Policy

The Bank continuously encourages the Corporate Governance Committee to conduct competency development through training in 2024. Complete information regarding this is presented in the “Company Profile” chapter.

SERTIFIKASI PROFESI

Certification of Profession

No.	Sertifikasi Profesi Professional Certification	Nama Name	Lembaga Penerbit Certification Body
1.	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	1. Amin Said Husni ^{*)} 2. Andre Mirza Hartawan 3. Dinan Supandi RAE ^{**)}	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Professional Certification Agency (BNSP)

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.

^{**)} Telah berhenti menjabat sejak tanggal 1 Agustus 2024.
Has stopped serving since August 1, 2024.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN

Untuk tahun 2024, Komite Tata Kelola menjalankan aktivitas sebagai berikut:

- Menyelenggarakan 3 (tiga) kali Rapat Komite Tata Kelola, termasuk menyusun Risalah Rapat.
- Memberi masukan terhadap implementasi POJK No. 2 tahun 2024 tentang Tata Kelola Syariah dan dampak pemberlakuannya terhadap Bank.
- Memberikan masukan enhancement kondisi GCG Bank yang dituangkan dalam RBB Bank.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE DUTIES

In 2024, the Governance Committee carried out the following activities:

- Organizing 3 (three) Governance Committee Meetings, including preparing Minutes of Meetings.
- Providing input on the implementation of POJK No. 2 of 2024 concerning Sharia Governance and the impact of its implementation on Banks.
- Providing input to enhance the Bank’s GCG conditions as outlined in the Bank’s RBB.

Komite di Bawah Direksi

Committees Under the Board of Directors



Pada tahun 2024, Direksi Bank Muamalat Indonesia membentuk 5 (lima) Komite Tingkat Direksi yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama dan/atau Direktur terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Komite Pengarah Teknologi Informasi.
2. Komite Aset dan Liabilitas.
3. Komite Manajemen Risiko.
4. Komite Kebijakan Pembiayaan.
5. Komite Pembiayaan.

In 2024, the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia formed 5 (five) Board of Directors-Level Committees led directly by the President Director and/or related Directors, namely:

1. Information Technology Steering Committee.
2. Asset and Liability Committee.
3. Risk Management Committee.
4. Financing Policy Committee.
5. Financing Committee.



Komite Pengarah Teknologi Informasi

Information Technology Steering Committee

DASAR HUKUM

Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Muamalat Indonesia merujuk pada ketentuan Pasal 62 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum serta Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Muamalat Indonesia.

LEGAL BASIS

The establishment of the Information Technology Steering Committee of Bank Muamalat Indonesia refers to the provisions in Article 62 paragraph 2 of Financial Services Authority Regulation No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks and Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2022 regarding Implementation of Information Technology by Commercial Banks as well as the Charter of the Information Technology Steering Committee of Bank Muamalat Indonesia.

PIAGAM KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Bank Muamalat telah memiliki Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi sebagai pedoman anggota komite dalam menjalankan perannya, yang mengatur mengenai tujuan pembentukan komite; tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite; struktur dan keanggotaan komite; rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan; masa tugas anggota komite dari Pihak Independen; mekanisme evaluasi kinerja; dan periode reviu pedoman dan tata tertib kerja komite secara berkala. Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi mengalami pembaruan terakhir pada tanggal 14 Agustus 2024 dan akan dilakukan pembaharuan susunan keanggotaan dan piagam komite mengikuti perubahan susunan pengurus serta struktur organisasi terkini Bank.

CHARTER OF THE INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Bank Muamalat retains the Charter of the Information Technology Steering Committee as guidelines for members to perform the committee's role, which regulates the purpose of establishing the committee; duties, responsibilities and authorities of the committee; the structure and membership of the committee; committee meeting, quorum, and decision-making; term of office of members of the committee from Independent Party; performance assessment mechanism; and review period of the committee's work guidelines and procedures on periodically. The Charter of the Information Technology Steering Committee was last updated on August 14, 2024 and will be updated on its membership composition, and the committee's charter follows changes in the management composition as well as the latest organizational structure of the Bank.

STRUKTUR, KOMPOSISI, DAN DASAR PENGANGKATAN

Bank mengatur struktur keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Muamalat Indonesia yang terdiri dari Direktur yang membawahi satuan kerja teknologi informasi, Direktur yang membawahi satuan kerja manajemen risiko, pejabat tertinggi yang membawahi satuan kerja penyelenggara teknologi informasi, dan pejabat tertinggi yang membawahkan satuan kerja pengguna teknologi informasi. Komite dimaksud diketuai oleh Direktur Utama yang merangkap sebagai anggota.

STRUCTURE, COMPOSITION, AND BASIS OF APPOINTMENT

The Bank regulates the membership structure of the Information Technology Steering Committee of Bank Muamalat Indonesia that consists of a Director who supervises the risk management work unit, the highest officer who supervises the work unit responsible for information technology implementation, and the highest officer who supervises the work unit of information technology user. The committee is chaired by the director who supervises the information technology work unit concurrently as member.

Berikut adalah komposisi keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi per 31 Desember 2024:

The following is the composition of the Information Technology Steering Committee membership as of December 31, 2024:

Fungsi/Jabatan dalam Komite Function/Position in Committee	Pelaksanaan/Pejabat dalam Organisasi Implementation/Officials in the Organization	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Ketua merangkap anggota tetap dengan hak suara Chairman concurrently permanent member with voting rights	Direktur Operasi, Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia Director of Operations, Information Technology and Human Resources	Surat Keputusan No. 034/B/DIR-KPTS/VIII/2024 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 2 Agustus 2024. Decree No. 034/B/DIR-KPTS/VIII/2024 concerning the Information Technology Steering Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated August 2, 2024.
Wakil Ketua merangkap anggota tetap dengan hak suara Deputy Chairman concurrently permanent member with voting rights	Direktur Kepatuhan, Risiko dan Hukum Director of Compliance, Risk and Legal	Surat Keputusan No. 034/B/DIR-KPTS/VIII/2024 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 2 Agustus 2024 Decree No. 034/B/DIR-KPTS/VIII/2024 concerning the Information Technology Steering Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated August 2, 2024
Sekretaris merangkap anggota tetap tanpa hak suara Secretary concurrently permanent member without voting rights	Head of Information Technology	Surat Keputusan No. 034/B/DIR-KPTS/VIII/2024 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 2 Agustus 2024 Decree No. 034/B/DIR-KPTS/VIII/2024 concerning the Information Technology Steering Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated August 2, 2024
Anggota tetap dengan hak suara Permanent member with voting rights	- Direktur Utama merangkap Direktur Keuangan dan Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan. - SEVP Retail Banking - SEVP Enterprise Banking - President Director concurrently Finance Director and Finance Business Risk Director. - SEVP Retail Banking - SEVP Enterprise Banking	Surat Keputusan No. 034/B/DIR-KPTS/VIII/2024 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 2 Agustus 2024 Decree No. 034/B/DIR-KPTS/VIII/2024 concerning the Information Technology Steering Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated August 2, 2024
Anggota tetap tanpa hak suara Permanent members without voting rights	- Head of SOE & Corporate Banking - Head of SME & Commercial Banking - Head of Retail Funding & Transaction - Head of Operation Strategy & Development - Head of Compliance - Head of Integrated Risk Management - Head of Business Finance & Performance - Head of Financial Control - Head of Digital Banking - Head of Consumer Financing Business - Head of Retail Funding & Transaction - Head of Hajj & Umroh Solution - Head of Global Market - Head of Transaction Banking	Surat Keputusan No. 034/B/DIR-KPTS/VIII/2024 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 2 Agustus 2024 Decree No. 034/B/DIR-KPTS/VIII/2024 concerning the Information Technology Steering Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated August 2, 2024

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi, yaitu sebagai berikut:

Ketua dan Wakil Ketua

- Mengusulkan agenda untuk setiap rapat dengan masukan dari anggota komite.
- Memastikan bahwa agenda rapat dan bahan pembahasan yang relevan didistribusikan kepada semua anggota komite setidaknya satu hari kerja sebelum rapat.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Information Technology Steering Committee has the duties and responsibilities set out in the Information Technology Steering Committee Charter, including:

Chairman and Deputy Chairman

- Proposing agenda for each meeting with input from committee members.
- Ensuring that the meeting agenda and relevant discussion material is distributed to all committee members at least one working day prior to the meeting.



3. Menjaga fokus topik pembahasan dalam rapat.
4. Memastikan rapat dimulai dan diakhiri tepat waktu.
5. Berperan sebagai penghubung antara satuan kerja Teknologi Informasi (TI) dengan satuan kerja pengguna TI dengan Direksi

Sekretaris

1. Menyelenggarakan rapat sesuai jadwal yang telah ditetapkan, termasuk menyiapkan daftar hadir peserta rapat.
2. Menyiapkan materi rapat kepada peserta rapat yang diundang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.
3. Mengundang peserta rapat termasuk melakukan koordinasi untuk persiapan materi yang akan dibahas dalam rapat.
4. Menyiapkan risalah rapat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah rapat diselenggarakan dan mengirimkan risalah kepada seluruh anggota komite dan seluruh peserta rapat yang hadir berdasarkan kepentingannya untuk ditindaklanjuti.
5. Memantau tindaklanjut atas hasil rapat Komite.

Anggota

1. Menghadiri rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi tepat waktu.
2. Menjaga kerahasiaan atas pembahasan topik yang sensitif yang dibahas dalam rapat komite.
3. Menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia yang dibahas dalam rapat.
4. Menindaklanjuti keputusan rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi.
5. Anggota Komite diharapkan untuk menghadiri setiap pertemuan dan menginformasikan apabila tidak dapat hadir dalam rapat komite.

PROFIL KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Profil ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi disajikan pada bab "Profil Perusahaan".

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2024

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

3. Maintaining the focus of the discussion topics in the meeting.
4. Ensuring the meetings to start and end on time.
5. Acting as a liaison between Information Technology (IT) work unit with IT user work unit and the Board of Directors.

Secretary

1. Hold meetings according to set schedule, including the preparation of the meetings' participant attendance list.
2. Prepare meeting materials for the invited meeting participants at the latest by 1 (one) working day prior to the meeting schedule.
3. Invite meeting participant including coordination for preparing meeting materials to be discussed in the meeting.
4. Prepare the minutes of meeting at the latest by 5 (five) working days following the meeting and send the minutes of meeting to all committee members and all meeting participants who attended the meeting based on priority for follow-ups.
5. Monitor follow-ups of Committee meeting results.

Members

1. Attending Information Technology Steering Committee meetings on time.
2. Maintaining confidentiality of the discussion of sensitive topics discussed in committee meetings.
3. Maintaining the confidentiality of information discussed in meetings.
4. Following up the decisions of Information Technology Steering Committee meeting.
5. Committee members are expected to attend every meeting and inform the organizer in case they are unable to attend the Committee meetings.

PROFILE OF INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Profile of the Chairman of Information Technology Steering Committee is available in the "Company Profile" chapter.

TRAINING AND/OR COMPETENCY IMPROVEMENT OF THE INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE IN 2024.

Training and/or competency improvement can be seen in the Training and/or Competency Improvement section of the Board of Directors in this Annual Report.

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Sepanjang tahun 2024, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Menetapkan Rencana Strategis IT 2024 & Realisasi Anggaran Tahun 2024
2. Menetapkan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (RPTI) 2025 & Rencana Anggaran 2025
3. Menetapkan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (RPTI).
4. Mengkaji Hasil Penilaian Tingkat Risiko Keamanan Siber Tahun 2023.
5. Mitigasi *Mail Phishing*.
6. Melakukan pembahasan *Security Operation Center Report*.
7. Bank Memantau dan memberikan arahan terhadap masalah-masalah TI
8. Melakukan monitoring status teknologi *existing*.

RAPAT KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Kebijakan

Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Muamalat Indonesia mengatur rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi yang wajib diselenggarakan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Realisasi

Sepanjang tahun 2024, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali rapat dengan agenda sebagai berikut.

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
1.	12 January 2024 January 12, 2024	1. Rencana Perubahan <i>Information Technology Strategy Plan</i> (ITSP) 2. Hasil Penilaian Tingkat Risiko Keamanan Siber Tahun 2023 3. Rekomendasi dan Permohonan Persetujuan 1. Information Technology Strategy Plan (ITSP) Change Plan 2. Results of the 2023 Cybersecurity Risk Level Assessment 3. Recommendations and Requests for Approval	Board of Management 1. Bapak Indra Falatehan, Direktur Utama^{*)} Mr. Indra Falatehan, President Director 2. Bapak Wahyu Avianto, Direktur Operasional dan Digital^{*)} Mr. Wahyu Avianto, Director of Operations and Digital 3. Bapak Karno, Direktur Kepatuhan, Risiko dan Hukum Mr. Karno, Director of Compliance, Risk and Legal 4. Bapak Suhendar, Direktur Keuangan dan Strategi^{*)} Mr. Suhendar, Director of Finance and Strategy 5. Bapak Dedy Suryadi Dharmawan, SEVP <i>Retail Banking</i> Mr. Dedy Suryadi Dharmawan, SEVP Retail Banking Head of Division 6. Bapak Sandhy Sofian, <i>Head of Information Technology</i> Mr. Sandhy Sofian, Head of Information Technology 7. Ibu Wita Hanayori, <i>Head of Retail Funding and Transaction</i> Mrs. Wita Hanayori, Head of Retail Funding and Transaction 8. Ibu Dyah Ekawati, <i>Head of Compliance</i> Mrs. Dyah Ekawati, Head of Compliance 9. Ibu Catur Andayani, <i>Head of Integrated Risk Management</i> Ms. Catur Andayani, Head of Integrated Risk Management

IMPLEMENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE ACTIVITIES

Throughout 2024, the Information Technology Steering Committee has carried out its duties and responsibilities with the following details:

1. Establishing the 2024 IT Strategic Plan & 2024 Budget Realization
2. Establishing the 2025 Information Technology Development Plan (RPTI) & 2025 Budget Plan
3. Establishing the Information Technology Development Plan (RPTI).
4. Reviewing the Results of the 2023 Cyber security Risk Level Assessment.
5. Mitigating Phishing Mail.
6. Discussing the Security Operation Center Report.
7. The Bank Monitors and provides direction on IT issues
8. Monitoring the status of existing technology.

MEETING OF THE INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Policy

The Charter of the Information Technology Steering Committee of Bank Muamalat Indonesia regulates the meetings of the Information Technology Steering Committee which are required to be held at least 4 (four) times within 1 (one) year.

Realization

Throughout 2024, the Information Technology Steering Committee has held 3 (three) meetings with the following agenda.



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
			10. Bapak Aznovri Kurniawan, <i>Head of Business Financing & Planning</i> Mr. Aznovri Kurniawan, Head of Business Financing & Planning 11. Bapak Muhammad Ilham, <i>Head of Financial Control</i> Mr. Muhammad Ilham, Head of Financial Control 12. Bapak Dadang Rohadi, <i>Head of Digital Banking</i> Mr. Dadang Rohadi, Head of Digital Banking 13. Bapak Tegar Sangga Barkah, <i>Head of Internal Audit</i> Mr. Tegar Sangga Barkah, Head of Internal Audit 14. Bapak Demmy Rizkiadhy, <i>Head of Strategy & Transformation</i> Mr. Demmy Rizkiadhy, Head of Strategy & Transformation Head of Department/Others 15. Bapak Adi Sutrisna, <i>Information Technology</i> Mr. Adi Sutrisna, Information Technology 16. Bapak Dimas Teguh, <i>Information Technology</i> Mr. Dimas Teguh, Information Technology 17. Ibu Ummi Makhalina, <i>Information Technology</i> Mrs. Ummi Makhalina, Information Technology 18. Bapak Affandi, <i>Integrated Risk Management</i> Mr. Affandi, Integrated Risk Management 19. Bapak Imam H, <i>SME & Commercial Banking</i> Mr. Imam H, SME & Commercial Banking 20. Bapak M.Aldy Sadikin, <i>Operation Services</i> Mr. M. Aldy Sadikin, Operation Services 21. Bapak Harindra, <i>Internal Audit</i> Mr. Harindra, Internal Audit 22. Bapak Virlendi, <i>Internal Audit</i> Mr. Virlendi, Internal Audit 23. Bapak Heri Chairul Damanik, <i>CEO Office</i> Mr. Heri Chairul Damanik, CEO Office 24. Bapak Ahmad Fathi, <i>Operation Strategy & Development</i> Mr. Ahmad Fathi, Operation Strategy & Development 25. Bapak Sastha, <i>Financial Operation</i> Mr. Sastha, Financial Operation 26. Bapak Faisal Femanda, <i>Financial Operation</i> Mr. Faisal Femanda, Financial Operation 27. Bapak Rizky Sabili Firdaus, <i>Strategy & Transformation</i> Mr. Rizky Sabili Firdaus, Strategy & Transformation
2.	8 May 2024 May 8, 2024	1. <i>Executive Summary Mail Phishing Exercise</i> 2. <i>Security Operation Center Report</i> 3. <i>Cost Efficiency OPEX</i> 4. Rekomendasi dan Permohonan Persetujuan 1. Executive Summary Mail Phishing Exercise 2. Security Operation Center Report 3. Cost Efficiency OPEX 4. Recommendations and Requests for Approval	Board of Management 1. Bapak Indra Falatehan, <i>Direktur Utama</i>^{a)} Mr. Indra Falatehan, President Director 2. Bapak Wahyu Avianto, <i>Direktur Operasional dan Digital</i>^{a)} Mr. Wahyu Avianto, Director of Operations and Digital 3. Bapak Karno, <i>Direktur Kepatuhan, Risiko dan Hukum</i> Mr. Karno, Director of Compliance, Risk and Legal 4. Bapak Suhendar, <i>Direktur Keuangan dan Strategi</i>^{a)} Mr. Suhendar, Director of Finance and Strategy 5. Bapak Dedy Suryadi Dharmawan, <i>SEVP Retail Banking</i> Mr. Dedy Suryadi Dharmawan, SEVP Retail Banking Head of Division 6. Bapak Sandhy Sofian, <i>Head of Information Technology</i> Mr. Sandhy Sofian, Head of Information Technology 7. Ibu Dyah Ekawati, <i>Head of Compliance</i> Mrs. Dyah Ekawati, Head of Compliance 8. Ibu Catur Andayani, <i>Head of Integrated Risk Management</i> Ms. Catur Andayani, Head of Integrated Risk Management 9. Bapak Aznovri Kurniawan, <i>Head of Business Financing & Performance</i> Mr. Aznovri Kurniawan, Head of Business Financing & Performance 10. Bapak Muhammad Ilham, <i>Head of Financial Control</i> Mr. Muhammad Ilham, Head of Financial Control 11. Bapak Tegar Sangga Barkah, <i>Head of Internal Audit</i> Mr. Tegar Sangga Barkah, Head of Internal Audit 12. Bapak Ibnu Umar, <i>Head of Financing Operations</i> Mr. Ibnu Umar, Head of Financing Operations 13. Bapak Nanang Basuki, <i>Head of Operation Services</i> Mr. Nanang Basuki, Head of Operation Services 14. Ibu Supriati Nugroho Pernamawati, <i>Head of Marketing Communication</i> Mrs. Supriati Nugroho Pernamawati, Head of Marketing Communication Head of Department/Others 15. Bapak Adi Sutrisna, <i>Information Technology</i> Mr. Adi Sutrisna, Information Technology 16. Bapak Fuad Mohamad Fachrudin, <i>Information Technology</i> Mr. Fuad Mohamad Fachrudin, Information Technology

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
			17. Bapak Andres Eko H., <i>Information Technology</i> Mr Andres Eko H., Information Technology 18. Ibu Ummi Makhalina, <i>Information Technology</i> Mrs. Ummi Makhalina, Information Technology 19. Bapak Herindra Nurbuana, <i>Internal Audit</i> Mr. Herindra Nurbuana, Internal Audit 20. Ibu Mustikawati, <i>Compliance</i> Mrs. Mustikawati, Compliance 21. Ibu Lentina Salsabila, <i>Integrated Risk Management</i> Mrs. Lentina Salsabila, Integrated Risk Management 22. Bapak Affandi, <i>Integrated Risk Management</i> Mr. Affandi, Integrated Risk Management 23. Bapak Ahmad Fathi, <i>Opeartion Strategy & Development</i> Mr. Ahmad Fathi, Operations Strategy & Development 24. Ibu Hertamawati, <i>Operation Strategy & Development</i> Mrs. Hertamawati, Operation Strategy & Development 25. Bapak Rizky Sabili Firdaus, <i>Strategy & Transformation</i> Mr. Rizky Sabili Firdaus, Strategy & Transformation 26. Bapak Muh. Syaekhan Thamrin, <i>Digital Banking</i> Mr. Muh. Syaekhan Thamrin, Digital Banking 27. Bapak Heri Chairul Damanik, <i>CEO Office</i> Mr. Heri Chairul Damanik, CEO Office
3	28 November 2024 November 28, 2024	1. Realisasi RPTI 2024 & Realisasi Anggaran Tahun 2024 2. Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (RPTI) 2025 & Rencana Anggaran 2025 3. Rekomendasi dan Permohonan Persetujuan 1. Realization of RPTI 2024 & Realization of Budget 2024 2. Information Technology Development Plan (RPTI) 2025 & Budget Plan 2025 3. Recommendations and Requests for Approval	Board of Management 1. Bapak Riksa Prakoso, Direktur Operasional, IT & Human Capital**) Mr. Riksa Prakoso, Director of Operations, IT & Human Capital 2. Bapak Karno, Direktur Kepatuhan, Risiko dan Hukum Mr. Karno, Director of Compliance, Risk and Legal 3. Bapak Dedy Suryadi Dharmawan, SEVP Retail Banking Mr. Dedy Suryadi Dharmawan, SEVP Retail Banking Head of Division 4. Bapak Sandhy Sofian, Head of Information Technology Mr. Sandhy Sofian, Head of Information Technology 5. Ibu Wita Hanayori, Head of Retail Funding & Transaction Mrs. Wita Hanayori, Head of Retail Funding & Transaction 6. Bapak Zefri Ananta, Head of Operation Strategy & Development Mr Zefri Ananta, Head of Operation Strategy & Development 7. Ibu Dyah Ekawati, Plt Direktur Kepatuhan, Risiko & Hukum dan Head of Compliance Mrs. Dyah Ekawati, Acting Director of Compliance, Risk & Legal and Head of Compliance 8. Ibu Catur Andayani, Head of Integrated Risk Management Mrs. Catur Andayani, Head of Integrated Risk Management 9. Bapak Demmy Rizkiadhy, Head of Business Finance & Performance Mr. Demmy Rizkiadhy, Head of Business Finance & Performance 10. Bapak Muhammad Ilham, Head of Financial Control Mr. Muhammad Ilham, Head of Financial Control 11. Bapak Dadang Rohandi, Head of Digital Banking Mr. Dadang Rohandi, Head of Digital Banking 12. Bapak Agung Bayu Sulistiono, Head of Consumer Financing Business Mr. Agung Bayu Sulistiono, Head of Consumer Financing Business 13. Bapak Moh. Madina Hendrik Soe'oed, Head of Global Market Mr. Moh. Madina Hendrik Soe'oed, Head of Global Market 14. Bapak Tegar Sangga Barkah, Head of Internal Audit Mr. Tegar Sangga Barkah, Head of Internal Audit 15. Bapak Ibnu Umar, Head of Financing Operations Mr. Ibnu Umar, Head of Financing Operations 16. Bapak Andi Suryawan, HC Digitalization & Analytics Mr. Andi Suryawan, HC Digitalization & Analytics 17. Bapak Adi Setiadi, Remedial Strategy & Development Mr. Adi Setiadi, Remedial Strategy & Development 18. Bapak Prasetyo Utomo, Consumer Business Improvement Mr. Prasetyo Utomo, Consumer Business Improvement 19. Bapak Herindra Nurbuana, Internal Audit Mr. Herindra Nurbuana, Internal Audit 20. Bapak Danny Yudha Nugroho, Fixed Asset & Facilities Management Mr. Danny Yudha Nugroho, Fixed Asset & Facilities Management 21. Bapak Aljufri Alparisi, Cash Management Mr. Aljufri Alparisi, Cash Management 22. Ibu Dian Luhur Budhiningtyas, Cash Management Mrs. Dian Luhur Budhiningtyas, Cash Management 23. Bapak Dicky Zakiudin, Retail Collection Management Mr. Dicky Zakiudin, Retail Collection Management 24. Ibu Siti Nurhidayah Yetty, Retail Collection Management Mrs. Siti Nurhidayah Yetty, Retail Collection Management



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
			25. Ibu Putri R., Retail Collection Management Mrs. Putri R., Retail Collection Management 26. Ibu Adlimatul Putri Ilmiyah, Global Market Product Specialist Mrs. Adlimatul Putri Ilmiyah, Global Market Product Specialist 27. Bapak Aznil Rahmat, Trade & Value Chain Product Mr. Aznil Rahmat, Trade & Value Chain Product 28. Bapak Affandi, Integrated Risk Management Mr. Affandi, Integrated Risk Management 29. Bapak Muhammad Aldy Sadikin, Payment Service & Development Mr. Muhammad Aldy Sadikin, Payment Service & Development 30. Bapak R. Nurman Purnomo, Enterprise Banking Product Mr. R. Nurman Purnomo, Enterprise Banking Product 31. Bapak Adi Sutrisna, Information Technology Mr. Adi Sutrisna, Information Technology 32. Bapak Andres Eko H., Information Technology Mr Andres Eko H., Information Technology

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPST tanggal 27 Juni 2024.

Has stopped serving in accordance with the resolution of the AGMS dated June 27, 2024.

^{**)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.

Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.

Asset & Liability Committee (ALCO)

Asset & Liability Committee (ALCO)

DASAR HUKUM

Bank Muamalat Indonesia membentuk Aset & Liability Committee (ALCO) dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Piagam ALCO Bank Muamalat Indonesia.
5. Ketentuan perundang-undangan lainnya.

PIAGAM KOMITE ALCO

Komite ALCO telah memiliki Piagam sebagai pedoman dalam menjalankan perannya, yang mengatur mengenai tujuan pembentukan komite; tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite; struktur dan keanggotaan komite; rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan; masa tugas anggota komite dari Pihak Independen; mekanisme evaluasi kinerja; dan periode revidi pedoman dan tata tertib kerja komite secara berkala. Piagam Komite ALCO mengalami pembaruan terakhir pada tanggal 6 Agustus 2024 dan akan dilakukan pembaharuan susunan keanggotaan dan piagam komite mengikuti perubahan susunan pengurus serta struktur organisasi terkini Bank.

LEGAL BASIS

Bank Muamalat Indonesia established the Asset & Liability Committee (ALCO) by referring to the laws and regulations as follows:

1. Financial Services Authority Regulation No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks.
2. Financial Services Authority Regulation Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
3. Financial Services Authority Regulation No. 65/POJK.03/2016 regarding Risk Management Implementation for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
4. ALCO Charter of Bank Muamalat Indonesia.
5. Other regulatory provisions.

ALCO COMMITTEE CHARTER

ALCO Committee retains its Charter as guidelines to carry out its role, which regulates on the purpose of its establishment; duties, responsibilities, and authorities of the committee; structure and membership of the committee; committee meetings, quorum, and decision-making; term of office of members of the committee from Independent Party; performance assessment mechanism; and review period of the work guidelines and procedures of the committee on periodic basis. The ALCO Committee's Charter was last updated on August 6, 2024 and will be updated on the membership composition, and the committee charter follows changes that occur in the management composition as well as in the latest organizational structure of the Bank.



STRUKTUR, KOMPOSISI, DAN DASAR PENGANGKATAN

Berikut adalah komposisi keanggotaan Komite ALCO per 31 Desember 2024:

STRUCTURE, COMPOSITION, AND BASIS OF APPOINTMENT

Following is the composition of ALCO Committee's membership as of December 31, 2023.

Fungsi/Jabatan dalam Komite Functions/Positions in the Committee	Pelaksanaan/Pejabat dalam Organisasi Implementation/Officials in the Organization	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Ketua Chairman	Direktur Utama merangkap Direktur Keuangan dan Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan. President Director concurrently Finance Director and the Financing Business Risk Director.	Surat Keputusan Direksi No. 029/B/DIR-KPTS/VII/2024 tentang Asset & Liability Committee (ALCO) dan ALCO Support Group (ASG) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 30 Juli 2024. Decree of the Board of Directors No. 029/B/DIR-KPTS/VII/2024 concerning the Asset & Liability Committee (ALCO) and ALCO Support Group (ASG) of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated July 30, 2024.
Wakil Ketua Deputy Chairman	Direktur Operasi, Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia Director of Operations, Information Technology and Human Resources	Surat Keputusan Direksi No. 029/B/DIR-KPTS/VII/2024 tentang Asset & Liability Committee (ALCO) dan ALCO Support Group (ASG) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 30 Juli 2024. Decree of the Board of Directors No. 029/B/DIR-KPTS/VII/2024 concerning the Asset & Liability Committee (ALCO) and ALCO Support Group (ASG) of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated July 30, 2024.
Sekretaris Secretary	Head of Treasury	Surat Keputusan Direksi No. 029/B/DIR-KPTS/VII/2024 tentang Asset & Liability Committee (ALCO) dan ALCO Support Group (ASG) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 30 Juli 2024. Decree of the Board of Directors No. 029/B/DIR-KPTS/VII/2024 concerning the Asset & Liability Committee (ALCO) and ALCO Support Group (ASG) of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated July 30, 2024.
Anggota Tetap dengan Hak Suara Permanent Members with Voting Rights	- Direktur Kepatuhan, Risiko dan Hukum - SEVP Retail Banking - SEVP Enterprise Banking - Head of Global Market - Director of Compliance, Risk and Legal - SEVP Retail Banking - SEVP Enterprise Banking - Head of Global Market	Surat Keputusan Direksi No. 029/B/DIR-KPTS/VII/2024 tentang Asset & Liability Committee (ALCO) dan ALCO Support Group (ASG) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 30 Juli 2024. Decree of the Board of Directors No. 029/B/DIR-KPTS/VII/2024 concerning the Asset & Liability Committee (ALCO) and ALCO Support Group (ASG) of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated July 30, 2024.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara Permanent Member Without Voting Rights	- Head of Consumer Financing Business - Head of Distribution Network Management - Head of Business Finance & Performance - Head of Strategy & Transformation - Head of Integrated Risk Management - Head of SOE & Corporate Banking - Head of SME & Commercial Banking - Head of Transactional Banking - Head of Retail Funding & Transaction - Head of Enterprise Banking Business Development	Surat Keputusan Direksi No. 029/B/DIR-KPTS/VII/2024 tentang Asset & Liability Committee (ALCO) dan ALCO Support Group (ASG) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 30 Juli 2024. Decree of the Board of Directors No. 029/B/DIR-KPTS/VII/2024 concerning the Asset & Liability Committee (ALCO) and ALCO Support Group (ASG) of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated July 30, 2024.
Anggota Tidak Tetap Tanpa Hak Suara Non-Permanent Members Without Voting Rights	- Kepala Unit Bisnis atau Unit Kerja yang terkait dengan materi pembahasan dalam Rapat ALCO. - Regional CEO atau Branch Manager yang terkait dengan materi pembahasan dalam rapat ALCO - Head of Business Unit or Work Unit related to the discussion material in the ALCO Meeting. - Regional CEO or Branch Manager related to the discussion material in the ALCO meeting	Surat Keputusan Direksi No. 029/B/DIR-KPTS/VII/2024 tentang Asset & Liability Committee (ALCO) dan ALCO Support Group (ASG) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 30 Juli 2024. Decree of the Board of Directors No. 029/B/DIR-KPTS/VII/2024 concerning the Asset & Liability Committee (ALCO) and ALCO Support Group (ASG) of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated July 30, 2024.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE ALCO

ALCO memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam Piagam ALCO, yang mencakup:

1. Bertanggung jawab atas pencapaian rentabilitas bank sesuai dengan target keuntungan (laba), pertumbuhan neraca dan beberapa ukuran rentabilitas yang telah ditetapkan dalam anggaran.
2. Melakukan evaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan liabilitas.
3. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen aset dan liabilitas dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
4. Melakukan evaluasi kinerja Komite Aset dan Liabilitas.
5. Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Komite Aset dan Liabilitas dalam rangka memenuhi peraturan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip.
6. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan liabilitas.

PROFIL KOMITE ALCO

Profil ketua Komite ALCO disajikan pada bab "Profil Perusahaan".

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE ALCO TAHUN 2024

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE ALCO

Sepanjang tahun 2024, Komite ALCO telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat dalam 1 (satu) tahun dan membuat seluruh risalah rapat komite.
2. Melakukan pembahasan mengenai kondisi market terkini.
3. Melakukan optimisasi neraca melalui penyesuaian biaya dana dan pinjaman serta melakukan penempatan aset alternatif pada surat berharga dengan tingkat likuidasi baik dan risiko yang dapat diterima.
4. Memastikan tingkat likuiditas Bank Muamalat selalu berada pada level yang optimum.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF ALCO COMMITTEE

ALCO is tasked with the duties and responsibilities as contained in ALCO Charter which covers the following:

1. Responsible for achieving the bank's profitability in accordance with the set targets, balance sheet growth and several profitability measures set forth in the budget.
2. Conduct assessment on asset and liability management policies and management strategies.
3. Conduct assessment on the suitability between asset and liability management policies and implementation of the policies.
4. Conduct assessment on the performance of the Asset and Liability Committee.
5. Evaluate steps taken by the Asset and Liability Committee in the context of complying with BI/OJK regulations and other applicable laws and regulations within the implementation of the principle.
6. Provide recommendations to the Board of Directors related to asset and liability management policies and strategies.

PROFILE OF ALCO COMMITTEE

The profile of the Chairman of ALCO Committee is presented in the chapter on "Company Profile".

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT OF ALCO COMMITTEE IN 2023

Information on training and/or competency development can be found in the section on Training and/or Competency Development of the Board of Directors in this Annual Report.

IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES OF ALCO COMMITTEE

Throughout the year 2023, ALCO Committee carried out its duties and responsibilities with details as follows:

1. Held 12 (twelve) meetings in 1 (one) year and completed all the minutes of meetings.
2. Ensured Bank Muamalat's liquidity level is always within optimum level.
3. Optimized the balance sheet through adjustments in the cost of funds and loans as well as through placements of alternative assets in securities with good liquidation levels and acceptable risks.
4. Ensure the liquidity level of Bank Muamalat is always at an optimum level.



- Memberikan rekomendasi kepada Direksi Bank Muamalat terkait pengelolaan aset dan liabilitas, serta pengambilan keputusan yang terkait melalui perumusan kebijakan, strategi dan sasaran untuk mengelola aset dan liabilitas Bank secara terintegrasi.
- Mengkaji dan memastikan bahwa kerangka kerja *Fund Transfer Pricing* (FTP) sesuai dan berfungsi sebagai pen jembatan antara lini bisnis dan mengedepankan konsistensi dalam kinerja Bank
- Memastikan bahwa *Early Warning Indicators* relevan dengan kondisi terkini.

- Provided recommendations to the Board of Directors of Bank Muamalat related to asset and liability management, as well as related decision-making through formulation of policies, strategies and targets to integratedly manage the Bank's assets and liabilities.
- Reviewed and ensured that Fund Transfer Pricing (FTP) framework is in accordance with and functional in bridging between business lines and prioritizing on consistency in the Bank's performance.
- Ensured that Early Warning Indicators are relevant with the latest conditions.

RAPAT KOMITE ALCO

Kebijakan

Mengacu pada Piagam ALCO Bank Muamalat Indonesia, rapat ALCO wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali rapat dalam 1 (satu) bulan dengan jadwal dan agenda yang telah ditetapkan. Adapun ketentuan mengenai rapat ALCO adalah sebagai berikut:

- Keputusan dalam Rapat Komite Komite Aset dan Liabilitas diupayakan secara musyawarah untuk mufakat. Namun Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah ($1/2 n + 1$) Direksi dan Senior Executive Vice President (SEVP) yang menjadi anggota tetap Komite Aset dan Liabilitas dan memiliki hak suara, yang hadir dan atau diwakili dalam rapat tersebut dan disetujui oleh Ketua Komite atau Wakil Ketua Komite atau penggantinya.
- Rapat ALCO dilaksanakan paling sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan pada jadwal dan agenda yang telah ditetapkan oleh sekretaris ALCO.
- Rapat ALCO didahului oleh rapat ASG. Namun, dalam keadaan tertentu Rapat ALCO dapat langsung dilaksanakan tanpa didahului oleh rapat ASG dan dapat pula dilaksanakan di luar jadwal rapat ALCO yang telah ditetapkan dengan menyesuaikan jadwal Direksi.
- Setiap anggota ALCO diwajibkan untuk menghadiri rapat ALCO. Apabila anggota ALCO berhalangan untuk menghadiri Rapat ALCO, maka harus diwakili oleh Senior Officer dalam subordinatnya.
- Rapat ALCO hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah ($1/2 n + 1$) Direksi dan Senior Executive Vice President (SEVP) yang menjadi anggota tetap dan memiliki hak suara. Selain itu Rapat juga harus dihadiri oleh dihadiri oleh Ketua atau Wakil Ketua Komite Aset dan Liabilitas atau penggantinya.
- Rapat ALCO dipimpin oleh Ketua ALCO atau Wakil Ketua ALCO apabila Ketua ALCO berhalangan untuk menghadiri rapat.
- Materi rapat ALCO disiapkan oleh Sekretaris ALCO.

MEETING OF ALCO COMMITTEE

Policy

Referring to ALCO Charter of Bank Muamalat Indonesia, ALCO meetings are required to be held at least 1 (one) time within 1 (one) month with predetermined schedule and agenda. Provisions on ALCO meetings are as follows:

- Decisions made in Asset and Liability Committee Meetings are sought by deliberation to reach consensus. However, in the event deliberation to reach consensus is not reached, then decisions are legitimate if agreed by more than half ($1/2 n + 1$) of the Board of Directors and Senior Executive Vice President (SEVP) who are permanent members of the Asset and Liability Committee and holding voting rights, attended and/or represented in the concerned meeting and approved by the Committee Chairman or Committee Vice Chairman or the replacement.
- ALCO meetings are held at least 1 (one) time in 1 (one) month according to predetermined schedule and agenda set forth by the secretary of ALCO.
- ALCO meeting is preceded by the ASG meeting. However, under certain circumstances, ALCO meeting can be held immediately without being preceded by ASG meeting and can also be held outside of ALCO meeting schedule that has been determined by adjusting the schedule of the Board of Directors.
- Each ALCO member is required to attend the ALCO meeting. If ALCO members are unable to attend the ALCO Meeting, they must be represented by a Senior Officer in their subordinates.
- ALCO meetings can only be held if attended by more than half ($1/2 n + 1$) of the Directors and Senior Executive Vice President (SEVP) who are permanent members and have voting rights. In addition, the meeting must also be attended by the Chairman or Vice Chairman of the Asset and Liability Committee or his/her alternate.
- The ALCO meeting is chaired by the Chairman of ALCO or Deputy Chairman of ALCO if the Chairman of ALCO is unable to attend the meeting.
- The Secretary of ALCO prepares ALCO materials.

8. Setiap rapat ALCO dan hasil keputusannya dituangkan ke dalam risalah rapat ALCO yang dibuat dan disampaikan oleh Sekretaris ALCO kepada Ketua ALCO dan Wakil Ketua ALCO untuk ditandatangani oleh Ketua ALCO, Wakil Ketua ALCO dan Sekretaris ALCO untuk selanjutnya didistribusikan oleh Sekretaris ALCO kepada unit kerja terkait.
9. Sekretaris ALCO mendokumentasikan seluruh dokumen rapat ALCO.
10. Hasil keputusan rapat ALCO yang terkait dengan seluruh unit bisnis ditindaklanjuti oleh ALCO dengan menyampaikan memorandum kepada seluruh unit bisnis, Region CEO, Branch Manager, dan Operation Manager serta diketahui oleh Direksi. Sementara hasil keputusan rapat ALCO yang harus ditindaklanjuti oleh unit bisnis terkait disampaikan melalui memorandum khusus.

8. Each ALCO meeting and the results of its decisions are written into the minutes of the ALCO meeting, which is prepared and submitted by the Secretary of ALCO to the Chairman of ALCO and the Deputy Chairman of ALCO to be signed by the Chairman of ALCO, Deputy Chairman of ALCO and the Secretary of ALCO for further distribution by the Secretary of ALCO to related work units.
9. Secretary of ALCO documents all ALCO meeting documents.
10. The results of ALCO meeting decisions related to all business units are followed up by ALCO by submitting a memorandum to all business units, Region Heads, Branch Managers and Operations Manager and are acknowledged by the Board of Directors. Meanwhile, the decision of the ALCO meeting which must be followed up by the related business unit is conveyed through a special memorandum.

Realisasi

Sepanjang tahun 2024, Komite ALCO telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat dengan agenda sebagai berikut.

Realization

Throughout 2024, the ALCO Committee has held 12 (twelve) meetings with the following agenda.

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
1.	25 Januari 2024 January 25, 2024	1. Materi IRM - <i>Funding & Financing Trend</i> - Indikator Risiko Likuiditas & Konsentrasi Pendanaan - <i>Stress Testing</i> - LCR (<i>Liquidity Coverage Ratio</i>) 2. <i>Market Update</i> - <i>Global Market Update</i> - <i>Local Market Update</i> 3. <i>ALM Performance</i> - <i>Bankwide Overview</i> - <i>Funding Structure</i> - <i>Financing Structure</i> - FDR IDR & Valas - COF dan <i>Yield Financing</i> - <i>Repricing Gap</i> - <i>Yield & COF Treasury</i> - <i>NIM Performance</i> 4. <i>Liquidity Update</i> - <i>Cash Flow Projection</i> - Proyeksi DPK <i>Movement</i> Bulan Ramadhan 2024 - Penyesuaian Jadwal Lelang OPT Bank Indonesia 2024 - Rencana Sekuritisasi Aset KPR - EBAS SP SMF - <i>Borrowing Capacity</i> - <i>Pipeline Enterprise Banking</i> - <i>Pipeline Retail Banking</i> 5. <i>Recommendation</i> - Ketentuan Spesial Nisbah IDR - Perpanjangan Kuota <i>Funding</i> segmen <i>Enterprise Banking</i> - Ketentuan Spesial Nisbah USD - Ketentuan Spesial <i>Price</i> USD Cabang KL dengan Akad Non Mudharabah - Ketentuan <i>Pricing</i> Deposito DOC (Deposito bulanan <i>breakable</i>) - <i>Pricing Counter</i> Deposito Bulanan IDR dan USD - Spesial Nisbah CASA Retail & <i>Enterprise</i> - Ketentuan FTP - <i>Pricing</i> Pembiayaan - <i>Pricing Trade Finance</i> - Ketentuan <i>Back to Back</i> dalam produk pembiayaan beragun tunai - Mekanisme persetujuan <i>disburse</i> dan dana keluar IDR - Mekanisme persetujuan <i>disburse</i> USD 6. Usulan Program - Program Hadiah Komitmen CASA - Program <i>Pricing</i> KPR Hijrah - Program <i>Pricing</i> Cici Emas 2024	1. Indra Falatehan^{*)} 2. Suhendar^{*)} 3. Karno 4. Hery Syafril^{*)} 5. Irvan Yulian Noor 6. Moh. Madina Hendrik Soe'oed 7. Citra Kurniawati 8. Agung Bayu Sulistiono 9. Aznovri Kurniawan 10. Elisa Ratnawardani 11. Wita Hanayori 12. Demmy Rizkiadhy 13. Supriati Nugroho Pernamawati 14. Muhammad Lutfi 15. Marissa Widyanti 16. Hafni Marfu'ah Muhidin 17. Hari C Damanik 18. Marina Oceanty 19. Muhammad Aria Pratama 20. Moch Irfan Muhazir 21. Gunarko 22. Muhammad Alviza



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
		1. IRM Materials - Funding & Financing Trend - Liquidity Risk Indicators & Funding Concentration - Stress Testing - LCR (Liquidity Coverage Ratio) 2. Market Update - Global Market Update - Local Market Update 3. ALM Performance - Bankwide Overview - Funding Structure - Financing Structure - FDR IDR & Valas - COF and Yield Financing - Repricing Gap - Yield & COF Treasury - NIM Performance 4. Liquidity Update - Cash Flow Projection - TPF Movement Projection for the Month of Ramadhan 2024 - Adjustment of Bank Indonesia's 2024 OPT Auction Schedule - KPR Asset Securitization Plan - EBAS SP SMF - Borrowing Capacity - Enterprise Banking Pipeline - Retail Banking Pipeline 5. Recommendation - Provisions for Special IDR Ratio - Extension Enterprise Banking Segment Funding Quota - Provisions for Special USD Ratio - Provisions for Special USD Price for KL Branch with Non-Mudharabah Contract - Provisions for DOC Deposit Pricing (Breakable Monthly Deposit) - Pricing for IDR and USD Monthly Counter Deposit - Special Ratio for Retail & Enterprise CASA - FTP Provisions - Financing Pricing - Trade Finance Pricing - Provisions for Back to Back in Cash-Backed Financing Products - IDR Disburse and Outflow Funds Approval Mechanism - USD Disburse Approval Mechanism 6. Program Proposals - CASA Commitment Reward Program - KPR Hijrah Pricing Program - 2024 Gold Installment Pricing Program	

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
2.	21 Februari 2024 February 21, 2024	1. Materi IRM - <i>Funding & Financing Trend</i> - Indikator Risiko Likuiditas & Konsentrasi Pendanaan - <i>Stress Testing</i> - LCR (<i>Liquidity Coverage Ratio</i>) 2. <i>Market Update</i> - <i>Global Market Update</i> - <i>Local Market Update</i> 3. <i>ALM Performance</i> - <i>Bankwide Overview</i> - <i>Funding Structure</i> - <i>Financing Structure</i> - FDR IDR & Valas - COF dan <i>Yield Financing</i> - <i>Repricing Gap</i> - <i>Yield & COF Treasury</i> - <i>NIM Performance</i> 4. <i>Liquidity Update</i> - <i>Cash Flow Projection</i> - Proyeksi DPK <i>Movement</i> Bulan Ramadhan 2024 - <i>Borrowing Capacity</i> - <i>Pipeline Enterprise Banking</i> - <i>Pipeline Retail Banking</i> - COF & <i>Yield Projection</i> 5. <i>Recommendation</i> - Ketentuan Spesial Nisbah IDR - Persetujuan Kuota <i>Funding Ad Hoc</i> ALCO Feb 2024 - Ketentuan Spesial Nisbah USD - Ketentuan Spesial <i>Price</i> USD Cabang KL dengan Akad Non Mudharabah - Ketentuan <i>Pricing</i> Deposito DOC (Deposito bulanan <i>breakable</i>) - <i>Pricing Counter</i> Deposito Bulanan IDR dan USD - Spesial Nisbah CASA <i>Retail & Enterprise</i> - Ketentuan FTP - <i>Pricing Pembiayaan</i> - <i>Pricing Trade Finance</i> - Ketentuan <i>Back to Back</i> dalam produk pembiayaan beragun tunai - Mekanisme persetujuan <i>disburse</i> dan dana keluar IDR - Mekanisme persetujuan <i>disburse</i> USD	1. Indra Falatehan^{*)} 2. Suhendar^{*)} 3. Hery Syafril^{*)} 4. Irvan Yulian Noor 5. Dedy Sryadi Dharmawan 6. Riksa Prakoso^{*)} 7. Moh. Madina Hendrik Soe'oed 8. Citra Kurniawati 9. Agung Bayu Sulistiono 10. Aznovri Kurniawan 11. Elisa Ratnawardani 12. Wita Hanayori 13. Catur Andayani 14. Muhammad Fachry Maulana 15. Yudha Surya Nugraha 16. Muhammad Lutfi 17. Marissa Widyanti 18. Hafni Marfu'ah Muhidin 19. Hari C Damanik 20. Marina Oceanty 21. Gunarko 22. Muhammad Alviza



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
3.	21 Maret 2024 March 21, 2024	1. Materi IRM - Funding & Financing Trend - Indikator Risiko Likuiditas & Konsentrasi Pendanaan - Stress Testing - LCR (Liquidity Coverage Ratio) 2. Market Update - Global Market Update - Local Market Update 3. ALM Performance - Bankwide Overview - Funding Structure - Financing Structure - FDR IDR & Valas - COF dan Yield Financing - Repricing Gap - Yield & COF Treasury - NIM Performance 4. Liquidity Update - Cash Flow Projection - Komposisi Saldo Giro BI - Borrowing Capacity - Pipeline Enterprise Banking - Pipeline Retail Banking - COF & Yield Projection 5. Recommendation - Ketentuan Spesial Nisbah IDR - Perpanjangan Kuota Funding ALCO Maret 2024 - Ketentuan Spesial Nisbah USD - Ketentuan Spesial Price USD Cabang KL dengan Akad Non Mudharabah - Ketentuan Pricing Deposito DOC (Deposito bulanan <i>breakable</i>) - Pricing Counter Deposito Bulanan IDR dan USD - Spesial Nisbah CASA Retail & Enterprise - Ketentuan FTP - Pricing Pembiayaan - Required Yield Financing - Pricing Trade Finance - Ketentuan Back to Back dalam produk pembiayaan beragun tunai - Mekanisme persetujuan <i>disburse</i> dan dana keluar IDR - Mekanisme persetujuan <i>disburse</i> USD 6. Isu Tambahan - Penurunan Nisbah Counter - Review Tarif Transactional Banking 1. IRM Material - Funding & Financing Trend - Liquidity Risk Indicators & Funding Concentration - Stress Testing - LCR (Liquidity Coverage Ratio) 2. Market Update - Global Market Update - Local Market Update 3. ALM Performance - Bankwide Overview - Funding Structure - Financing Structure - FDR IDR & Valas - COF and Yield Financing - Repricing Gap - Yield & COF Treasury - NIM Performance 4. Liquidity Update - Cash Flow Projection - BI Giro Balance Composition - Borrowing Capacity - Enterprise Banking Pipeline - Retail Banking Pipeline - COF & Yield Projection 5. Recommendation - Provisions for Special IDR Ratio - ALCO Funding Quota Extension March 2024 - Provisions for Special USD Ratio - Provisions for Special USD Price for KL Branch with Non-Mudharabah Contract - Provisions for DOC Deposit Pricing (Breakable Monthly Deposits) - Pricing for IDR and USD Monthly Counter Deposit - Special Ratio for Retail & Enterprise CASA - FTP Provisions - Financing Pricing - Required Yield Financing - Trade Finance Pricing - Provisions for Back to Back in cash - backed financing products - IDR Disburse and Outflow Funds Approval Mechanism - USD Disburse Approval Mechanism 6. Additional Issues - Counter Ratio Decrease - Review of Transactional Banking Rates	1. Indra Falatehan^{*)} 2. Suhendar^{*)} 3. Hery Syafril^{*)} 4. Karno 5. Irvan Yulian Noor 6. Dedy Suryadi Dharmawan 7. Wahyu Avianto^{*)} 8. Moh. Madina Hendrik Soe'oad 9. Citra Kurniawati 10. Agung Bayu Sulistiono 11. Aznovri Kurniawan 12. Demmy Rizkiadhy 13. Wita Hanayori 14. Catur Andayani 15. Muhammad Fachry Maulana 16. Siti Nurhidayah Yetty 17. Muhammad Lutfi 18. Marissa Widyanti 19. Hafni Marfu'ah Muhidin 20. Hari C Damanik 21. Prima Ekalisanti 22. Gunarko 23. Muhammad Alviza 24. Randi Rohandi 25. Aljufri Alparisi 26. Aznil Rahmat 27. Eko Dermawan

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
4.	25 April 2024 April 25, 2024	1. <i>Market Update</i> - <i>Global Market Update</i> - <i>Local Market Update</i> 2. <i>Materi IRM</i> - <i>Funding & Financing Trend</i> - Indikator Risiko Likuiditas & Konsentrasi Pendanaan - <i>Stress Testing</i> - <i>LCR (Liquidity Coverage Ratio)</i> 3. <i>ALM Performance</i> - <i>Financial Highlights - BS</i> - <i>Asset Growth</i> - <i>Funding Structure</i> - <i>Top Movemnet</i> - <i>TD Profile</i> - <i>Financing Structure</i> - <i>Financial Highlights - PL</i> - <i>Monitoring NIM</i> - <i>Forecast NIM</i> - <i>Financial Highlights - Key Ratios</i> - <i>Cost of Fund & Yield Financing</i> 4. <i>Liquidity Update</i> - <i>Cash Flow Projection</i> - <i>Pipeline Enterprise Banking</i> - <i>Pipeline Retail Banking</i> 5. <i>Recommendation</i> - Ketentuan Spesial Nisbah dan <i>Special Rate</i> IDR - Perpanjangan Kuota <i>Funding</i> ALCO April 2024 - Ketentuan Spesial Nisbah USD - Ketentuan Spesial <i>Price</i> USD Cabang KL dengan Akad Non Mudharabah - Ketentuan <i>Pricing</i> Deposito DOC (Deposito bulanan <i>breakable</i>) - <i>Pricing Counter</i> Deposito Bulanan IDR dan USD - Spesial Nisbah CASA <i>Retail & Enterprise</i> - Ketentuan FTP - <i>Required Yield Financing</i> - <i>Pricing Trade Finance</i> - Ketentuan <i>Back to Back</i> dalam produk pembiayaan beragun tunai - Mekanisme persetujuan <i>disburse</i> dan dana keluar IDR - Mekanisme persetujuan <i>disburse</i> USD 5. <i>Isu Tambahan</i> - <i>Yield Enhancement & Pricing Strategy Consumer Business</i> 2024	1. Indra Falatehan^{*)} 2. Suhendar^{*)} 3. Hery Syafril^{*)} 4. Karno 5. Irvan Yulian Noor 6. Dedy Suryadi Dharmawan 7. Moh. Madina Hendrik Soe'oed 8. Gunarko 9. Agung Bayu Sulistiono 10. Aznovri Kurniawan 11. Demmy Rizkiadhy 12. Wita Hanayori 13. Catur Andayani 14. Elisa Ratnawardani 15. Supriati Nugroho Pernamawati 16. Muhammad Lutfi 17. Marissa Widyanti 18. Hafni Marfu'ah Muhidin 19. Hari C Damanik 20. Prima Ekalisanti 21. Randi Rohandi 22. Muhammad Alviza



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
5.	27 Mei 2024 May 27, 2024	1. <i>Market Update</i> - <i>Global Market Update</i> - <i>Local Market Update</i> 2. <i>Materi IRM</i> - <i>Funding & Financing Trend</i> - Indikator Risiko Likuiditas & Konsentrasi Pendanaan - <i>Stress Testing</i> - LCR (<i>Liquidity Coverage Ratio</i>) - NSFR (<i>Net Stable Funding Ratio</i>) 3. <i>ALM Performance</i> - <i>Financial Highlights - BS</i> - <i>Asset Growth</i> - <i>Funding Structure</i> - <i>Top Movemnet</i> - <i>TD Profile</i> - <i>Financing Structure</i> - <i>Financial Highlights - PL</i> - <i>Monitoring NIM</i> - <i>Forecast NIM</i> - <i>Financial Highlights - Key Ratios</i> - <i>Cost of Fund & Yield Financing</i> 4. <i>Liquidity Update</i> - <i>Cash Flow Projection</i> - <i>Pipeline Enterprise Banking</i> - <i>Pipeline Retail Banking</i> 5. <i>Recommendation</i> - Ketentuan Spesial Nisbah dan <i>Special Rate</i> IDR - Perpanjangan Kuota <i>Funding</i> ALCO April 2024 - Ketentuan Spesial Nisbah USD - Ketentuan Spesial <i>Price</i> USD Cabang KL dengan Akad Non Mudharabah - Ketentuan <i>Pricing</i> Deposito DOC (Deposito bulanan <i>breakable</i>) - <i>Pricing Counter</i> Deposito Bulanan IDR dan USD - Spesial Nisbah <i>CASA Retail & Enterprise</i> - Ketentuan FTP - <i>Required Yield Financing</i> - <i>Pricing Trade Finance</i> - Ketentuan <i>Back to Back</i> dalam produk pembiayaan beragun tunai - Mekanisme persetujuan <i>disburse</i> dan dana keluar IDR - Mekanisme persetujuan <i>disburse</i> USD	1. Indra Falatehan^{*)} 2. Suhendar^{*)} 3. Hery Syafril^{**)} 4. Karno 5. Irvan Yulian Noor 6. Dedy Suryadi Dharmawan 7. Riksa Prakoso^{**)} 8. Wahyu Avianto 9. Moh. Madina Hendrik Soe'oad 10. Gunarko 11. Aznovri Kurniawan 12. Catur Andayani 13. Wita Hanayori 14. Elisa Ratnawardani 15. Supriati Nugroho Pernamawati 16. Muhammad Lutfi 17. Marissa Widyanti 18. Hafni Marfu'ah Muhidin 19. Moch Irfan Muhazir 20. Prima Ekalisanti 21. Randi Rohandi 22. Muhammad Alviza

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
6.	26 Juni 2024 June 26, 2024	1. <i>Market Update</i> - <i>Global Market Update</i> - <i>Local Market Update</i> 2. <i>Materi IRM</i> - <i>Funding & Financing Trend</i> - <i>Indikator Risiko Likuiditas & Konsentrasi Pendanaan</i> - <i>Stress Testing</i> - <i>LCR (Liquidity Coverage Ratio)</i> 3. <i>ALM Performance</i> - <i>Financial Highlights - BS</i> - <i>Asset Growth</i> - <i>Funding Structure</i> - <i>Trend Funding Financing Muhammadiyah</i> - <i>Top Movement</i> - <i>TD Profile</i> - <i>Financing Structure</i> - <i>Financial Highlights - PL</i> - <i>Monitoring NIM</i> - <i>Forecast NIM</i> - <i>Financial Highlights - Key Ratios</i> - <i>Cost of Fund & Yield Financing</i> 4. <i>Liquidity Update</i> - <i>Cash Flow Projection</i> - <i>Pipeline Enterprise Banking</i> - <i>Pipeline Retail Banking</i> 5. <i>Recommendation</i> - <i>Ketentuan Spesial Nisbah dan Special Rate IDR</i> - <i>Perpanjangan Kuota Funding ALCO April 2024</i> - <i>Ketentuan Spesial Nisbah USD</i> - <i>Ketentuan Spesial Price USD Cabang KL dengan Akad Non Mudharabah</i> - <i>Ketentuan Pricing Deposito DOC (Deposito bulanan breakable)</i> - <i>Pricing Counter Deposito Bulanan IDR dan USD</i> - <i>Spesial Nisbah CASA Retail & Enterprise</i> - <i>Ketentuan FTP</i> - <i>Required Yield Financing</i> - <i>Pricing Trade Finance</i> - <i>Ketentuan Back to Back dalam produk pembiayaan beragun tunai</i> - <i>Mekanisme persetujuan disburse dan dana keluar IDR</i> - <i>Mekanisme persetujuan disburse USD</i>	1. Indra Falatehan^{*)} 2. Hery Syafril^{*)} 3. Karno 4. Irvan Yulian Noor 5. Dedy Suryadi Dharmawan 6. Riksa Prakoso^{*)} 7. Moh. Madina Hendrik Soe'oed 8. Gunarko 9. Aznovri Kurniawan 10. Elisa Ratnawardani 11. Muhammad Lutfi 12. Marissa Widyanti 13. Hafni Marfu'ah Muhidin 14. Imam Haryanto 15. Siti Nurhidayah Yetty 16. Prima Ekalisanti 17. Randi Rohandi 18. Muhammad Alviza



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
7.	18 Juli 2024 July 18, 2024	1. <i>Market Update</i> - <i>Local Market Update</i> - <i>Global Market Update</i> 2. <i>Materi IRM</i> - <i>Funding & Financing Trend</i> - <i>Indikator Risiko Likuiditas & Konsentrasi Pendanaan</i> - <i>Stress Testing</i> - <i>LCR (Liquidity Coverage Ratio)</i> 3. <i>ALM Performance</i> - <i>Executive Summary</i> - <i>Financing Structure</i> - <i>Funding Structure</i> - <i>Asset</i> - <i>Trend NIM & Forecast</i> - <i>Margin Expense Funding</i> - <i>TD Profile</i> - <i>Margin Expense Securities & Borrowings</i> - <i>Cost of Fund & Yield Financing</i> - <i>Conclusion</i> - <i>Yield & COF Treasury</i> 4. <i>Liquidity Update</i> - <i>Cash Flow Projection</i> - <i>Pipeline Enterprise Banking</i> - <i>Pipeline Retail Banking</i> - <i>Perpanjangan PYD SMF</i> 5. <i>Recommendation</i> - <i>Ketentuan Spesial Nisbah dan Special Rate IDR</i> - <i>Perpanjangan Program Special Funding</i> - <i>Ketentuan Spesial Nisbah USD</i> - <i>Ketentuan Spesial Price USD Cabang KL dengan Akad Non Mudharabah</i> - <i>Persetujuan Kriteria Nasabah Income Smoothing</i> - <i>Ketentuan Pricing Deposito DOC (Deposito bulanan breakable)</i> - <i>Pricing Counter Deposito Bulanan IDR dan USD</i> - <i>Spesial Nisbah CASA Retail & Enterprise</i> - <i>Ketentuan FTP</i> - <i>Required Yield Financing</i> - <i>Ketentuan Back to Back dalam produk pembiayaan beragun tunai</i> - <i>Pricing Trade Financing</i> - <i>Mekanisme persetujuan disburse dan dana keluar IDR</i> - <i>Mekanisme persetujuan disburse USD</i>	1. Hery Syafril**) 2. Karno 3. Irvan Yulian Noor 4. Dedy Suryadi Dharmawan 5. Citra Kurniawati 6. Moh. Madina Hendrik Soe'oed 7. Catur Andayani 8. Agung Bayu Sulistiono 9. Aznovri Kurniawan 10. Elisa Ratnawardani 11. Demmy Rizkiadhy 12. Wita Hayanori 13. Hafni Marfuah 14. Muhammad Lutfi 15. Marissa Widyanti 16. Prima Ekalisanti 17. Siti Nurhidayah Yetty 18. Randi Rohandi 19. Muhammad Alviza

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
8.	19 Agustus 2024 August 19, 2024	1. <i>Market Update</i> - <i>Local Market Update</i> - <i>Global Market Update</i> 2. <i>Materi IRM</i> - <i>Funding & Financing Trend</i> - <i>Indikator Risiko Likuiditas & Konsentrasi Pendanaan</i> - <i>Stress Testing</i> - <i>LCR (Liquidity Coverage Ratio)</i> 3. <i>ALM Performance</i> - <i>Financial Highlights - Balance Sheet</i> - <i>Asset</i> - <i>Financing Structure</i> - <i>Funding Structure</i> - <i>Trend NIM & Forecast</i> - <i>Margin Expense Funding</i> - <i>Margin Expense Securities & Borrowing</i> - <i>Reprofiling Funding</i> - <i>TD Profile</i> - <i>Cost of Fund & Yield Financing</i> - <i>NIM Projection - Treasury</i> 4. <i>Liquidity Update</i> - <i>Cash Flow Projection</i> - <i>Pipeline Enterprise Banking</i> - <i>Pipeline Retail Banking</i> 5. <i>Recommendation</i> - <i>Ketentuan Spesial Nisbah dan Special Rate IDR</i> - <i>Perpanjangan Program Special Funding</i> - <i>Propose Program Deposit On Call Special September 2024</i> - <i>Ketentuan Spesial Nisbah USD</i> - <i>Ketentuan Spesial Price USD Cabang KL dengan Akad Non Mudharabah</i> - <i>Persetujuan Kriteria Nasabah Income Smoothing</i> - <i>Ketentuan Pricing Deposito DOC (Deposito bulanan breakable)</i> - <i>Pricing Counter Deposito Bulanan IDR dan USD</i> - <i>Spesial Nisbah CASA Retail & Enterprise</i> - <i>Perubahan Ketentuan FTP</i> - <i>Required Yield Financing</i> - <i>Ketentuan Back to Back dalam produk pembiayaan beragun tunai</i> - <i>Pricing Trade Financing</i> - <i>Mekanisme persetujuan disburse dan dana keluar IDR</i> - <i>Mekanisme persetujuan disburse USD</i> - <i>Approval Pengajuan Adjustment Bonus Deposito</i> - <i>Approval Pengajuan Review Pricing Pembiayaan Muhammadiyah</i>	1. Hery Syafril**) 2. Karno 3. Riksa Prakoso**) 4. Irvan Yulian Noor 5. Moh. Madina Hendrik Soe'oad 6. Citra Kurniawati 7. Aznovri Kurniawan 8. Catur Andayani 9. Agung Bayu Sulistiono 10. Elisa Ratnawardani 11. Muhammad Fachry Maulana 12. Demmy Rizkiadhy 13. Wita Hayanori 14. Hafni Marfuah 15. Muhammad Lutfi 16. Marissa Widyanti 17. Prima Ekalisanti 18. Dhimas 19. M. Haviz 20. Randi Rohandi 21. Muhammad Alviza



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
9.	23 September 2024 September 23, 2024	1. <i>Market Update</i> - <i>Local Market Update</i> - <i>Global Market Update</i> 2. <i>Materi IRM</i> - <i>Funding & Financing Trend</i> - <i>Indikator Risiko Likuiditas & Konsentrasi Pendanaan</i> - <i>Stress Testing</i> - <i>LCR (Liquidity Coverage Ratio)</i> 3. <i>ALM Performance</i> - <i>Financial Highlights - Balance Sheet</i> - <i>Asset</i> - <i>Financing Structure</i> - <i>Funding Structure</i> - <i>Trend NIM & Forecast</i> - <i>TD Profile</i> - <i>Cost of Fund & Yield Financing</i> - <i>NIM projection - Treasury</i> 4. <i>Liquidity Update</i> - <i>Pipeline Enterprise Banking</i> - <i>Pipeline Retail Banking</i> - <i>Cash Flow Projection</i> 5. <i>Recommendation</i> - <i>Ketentuan Spesial Nisbah dan Special Rate IDR</i> - <i>Perpanjangan Program Special Funding</i> - <i>Propose Pricing Penempatan Dana SMF</i> - <i>Ketentuan Spesial Nisbah USD</i> - <i>Ketentuan Spesial Price USD Cabang KL dengan Akad Non Mudharabah</i> - <i>Persetujuan Kriteria Nasabah Income Smoothing</i> - <i>Ketentuan Pricing Deposito DOC (Deposito bulanan breakable)</i> - <i>Pricing Counter Deposito Bulanan IDR dan USD</i> - <i>Spesial Nisbah CASA Retail & Enterprise</i> - <i>Ketentuan FTP</i> - <i>Required Yield Financing</i> - <i>Ketentuan Back to Back dalam produk pembiayaan beragun tunai</i> - <i>Pricing Trade Financing</i> - <i>Mekanisme persetujuan disburse dan dana keluar IDR</i> - <i>Mekanisme persetujuan disburse USD</i>	1. Karno 2. Riksa Prakoso**) 3. Irvan Yulian Noor 4. Dedy Suryadi Dharmawan 5. Moh. Madina Hendrik Soe'oad 6. Citra Kurniawati 7. Aznovri Kurniawan 8. Catur Andayani 9. Agung Bayu Sulistiono 10. Muhammad Fachry Maulana 11. Demmy Rizkiadhy 12. Wita Hayanori 13. Hafni Marfuah 14. Muhammad Lutfi 15. Marissa Widyanti 16. Prima Ekalisanti 17. Yusuf Iman Dewanto 18. Candra Kusumo Putro 19. Randi Rohandi 20. Muhammad Alviza

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
10.	22 Oktober 2024 October 22, 2024	1. <i>Market Update</i> - <i>Local Market Update</i> - <i>Global Market Update</i> 2. <i>Materi IRM</i> - <i>Funding & Financing Trend</i> - <i>Indikator Risiko Likuiditas & Konsentrasi Pendanaan</i> - <i>Stress Testing</i> - <i>LCR (Liquidity Coverage Ratio)</i> 3. <i>ALM Performance</i> - <i>Financial Highlights - Balance Sheet</i> - <i>Financing Structure</i> - <i>Funding Structure</i> - <i>Trend NIM & Forecast</i> - <i>TD Profile</i> - <i>Cost of Fund & Yield Financing</i> - <i>NIM projection - Treasury</i> 4. <i>Liquidity Update</i> - <i>Pipeline Enterprise Banking</i> - <i>Pipeline Retail Banking</i> - <i>Cashflow Projection; Approval Strategi Likuiditas</i> a. <i>Approval Perpanjangan Program Kuota Funding Oktober</i> b. <i>Pengajuan Approval Pembelian SUKUK Inklusif AFS 2024 sebesar maks. 250 miliar- Konteks Pemenuhan Rasio RPIM</i> c. <i>Propose Pricing Penempatan Dana PYD maks.setara 6,70</i> d. <i>Approval Pemberian Wewenang Penjualan Sukuk HPD Untuk Kebutuhan Likuiditas</i> 5. <i>Recommendation</i> - <i>Ketentuan Spesial Nisbah dan Special Rate IDR</i> - <i>Perpanjangan Program Special Funding</i> - <i>Ketentuan Spesial Nisbah USD</i> - <i>Ketentuan Spesial Price USD Cabang KL dengan Akad Non Mudharabah</i> - <i>Persetujuan Kriteria Nasabah Income Smoothing</i> - <i>Ketentuan Pricing Deposito DOC (Deposito bulanan breakable)</i> - <i>Pricing Counter Deposito Bulanan IDR dan USD</i> - <i>Spesial Nisbah CASA Retail & Enterprise</i> - <i>Ketentuan FTP</i> - <i>Required Yield Financing</i> - <i>Ketentuan Back to Back dalam produk pembiayaan beragun tunai</i> - <i>Pricing Trade Financing</i> - <i>Mekanisme persetujuan disburse dan dana keluar IDR</i> - <i>Mekanisme persetujuan disburse USD</i>	1. Karno 2. Riksa Prakoso**) 3. Dedy Suryadi Dharmawan 4. Moh. Madina Hendrik Soe'oed 5. Citra Kurniawati 6. Aznovri Kurniawan 7. Catur Andayani 8. Agung Bayu Sulistiono 9. Wita Hanayori 10. Demmy Rizkiadhy 11. Hafni Marfiah 12. Muhammad Lutfi 13. Marissa Widyanti 14. Prima Ekalisanti 15. Supriati Nugroho Pernamawati 16. Muhammad Alviza 17. Randi Rohandi



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
11.	14 November 2024 November 14, 2024	1. <i>Market Update</i> - <i>Local Market Update</i> - <i>Global Market Update</i> 2. <i>Materi IRM</i> - <i>Funding & Financing Trend</i> - <i>Indikator Risiko Likuiditas & Konsentrasi Pendanaan</i> - <i>Stress Testing</i> - <i>LCR (Liquidity Coverage Ratio)</i> 3. <i>ALM Performance</i> - <i>Financial Highlights - Balance Sheet</i> - <i>Financing Structure</i> - <i>Funding Structure</i> - <i>Trend NIM & Forecast</i> - <i>TD Profile</i> - <i>Trend HI- 1000</i> - <i>Cost of Fund & Yield Financing</i> - <i>NIM projection - Treasury</i> 4. <i>Liquidity Update</i> - <i>Pipeline Enterprise Banking</i> - <i>Pipeline Retail Banking</i> - <i>Cashflow Projection</i> - <i>Proyeksi Insentif GWM</i> - <i>Pengajuan Perpanjangan Program Kuota Funding November 2024</i> 5. <i>Recommendation</i> - <i>Ketentuan Spesial Nisbah dan Special Rate IDR</i> - <i>Perpanjangan Program Special Funding</i> - <i>Ketentuan Spesial Nisbah USD</i> - <i>Ketentuan Spesial Price USD Cabang KL dengan Akad Non Mudharabah</i> - <i>Persetujuan Kriteria Nasabah Income Smoothing</i> - <i>Ketentuan Pricing Deposito DOC (Deposito bulanan breakable)</i> - <i>Pricing Counter Deposito Bulanan IDR dan USD</i> - <i>Spesial Nisbah CASA Retail & Enterprise</i> - <i>Ketentuan FTP</i> - <i>Required Yield Financing</i> - <i>Ketentuan Back to Back dalam produk pembiayaan beragun tunai</i> - <i>Pricing Trade Financing</i> - <i>Mekanisme persetujuan disburse dan dana keluar IDR</i> - <i>Mekanisme persetujuan disburse USD</i>	1. Hery Syafril**) 2. Karno 3. Riksa Prakoso**) 4. Dedy Suryadi Dharmawan 5. Moh. Madina Hendrik Soe'oad 6. Citra Kurniawati 7. Catur Andayani 8. Agung Bayu Sulistiono 9. Wita Hanayori 10. Demmy Rizkiadhy 11. Hafni Marfuah 12. Muhammad Lutfi 13. Marissa Widyanti 14. Prima Ekalisanti 15. Supriati Nugroho Pernamawati 16. Heri Sugiri 17. Ary Parikesit 18. Muhammad Alviza 19. Randi Rohandi

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
12.	5 Desember 2024 December 5, 2024	1. <i>Market Update</i> - <i>Local Market Update</i> - <i>Global Market Update</i> 2. <i>Materi IRM</i> - <i>Funding & Financing Trend</i> - <i>Indikator Risiko Likuiditas & Konsentrasi Pendanaan</i> 3. <i>Liquidity Update</i> - <i>Pipeline Bisnis Desember</i> - <i>Cashflow Projection</i> - <i>Simulasi RIM</i> 4. <i>Recommendation</i> - <i>Propose Program Special DP2 Terkait RIM</i> - <i>Propose Program Kuota DPK Desember 2024</i> - <i>Propose Special Fresh Fund UIN dan Perpanjangan Special Pricing segmen Retail</i> - <i>Ketentuan Special Nisbah dan Special Rate IDR</i> - <i>Perpanjangan Program Special Funding</i> - <i>Ketentuan Special Nisbah USD</i> - <i>Ketentuan Special Price USD Cabang KL dengan Akad Non Mudharabah</i> - <i>Persetujuan Kriteria Nasabah Income Smoothing</i> - <i>Ketentuan Pricing Deposito DOC (Deposito bulanan breakable)</i> - <i>Pricing Counter Deposito Bulanan IDR dan USD</i> - <i>Special Nisbah CASA Retail & Enterprise</i> - <i>Ketentuan FTP; Propose New FTP</i> - <i>Required Yield Financing</i> - <i>Ketentuan Back to Back dalam produk pembiayaan beragun tunai</i> - <i>Pricing Trade Financing</i> - <i>Mekanisme persetujuan disburse dan dana keluar IDR</i> - <i>Mekanisme persetujuan disburse USD</i>	1. Karno 2. Dedy Suryadi Dharmawan 3. Moh. Madina Hendrik Soe'oad 4. Citra Kurniawati 5. Catur Andayani 6. Agung Bayu Sulistiono 7. Muhammad Fachry Maulana 8. Teguh Nugroho 9. Wita Hanayori 10. Ilham Wahyudin 11. Demmy Rizkiadhy 12. Aruddy 13. Bambang Rudi Hariyanto 14. Hafni Marfiah 15. Muhammad Lutfi 16. Marissa Widyanti 17. Prima Eklisanti 18. Randi Rohandi 19. Muhammad Alviza

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPST tanggal 27 Juni 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the AGMS dated June 27, 2024.

^{**)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.



Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee

DASAR HUKUM

Pembentukan Komite Manajemen Risiko, Bank Muamalat Indonesia didasari pada peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/ POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/ POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.
5. Kebijakan Umum Manajemen Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
6. Piagam Komite Manajemen Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

PIAGAM KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko telah memiliki Piagam sebagai pedoman dalam menjalankan perannya, yang mengatur mengenai tujuan pembentukan komite; tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite; struktur dan keanggotaan komite; rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan; masa tugas anggota komite dari Pihak Independen; mekanisme evaluasi kinerja; dan periode revidi pedoman dan tata tertib kerja komite secara berkala. Piagam Komite Manajemen Risiko mengalami pembaruan terakhir pada tanggal 15 Februari 2023 dan akan dilakukan pembaruan susunan keanggotaan dan piagam komite mengikuti perubahan susunan pengurus serta struktur organisasi terkini Bank.

LEGAL BASIS

The establishment of the Risk Management Committee of Bank Muamalat Indonesia is based on the following laws and regulations:

1. Financial Services Authority Regulation No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks.
2. Financial Services Authority Regulation Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
3. Financial Services Authority Regulation No. 65/ POJK.03/2016 dated 23 December 2016 on Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
4. Financial Services Authority Regulation No. 42/ POJK.03/2017 dated 12 July 2017 on Requirement to Prepare and Implement Bank Credit or Financing Policies for Commercial Banks.
5. General Risk Management Policy of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
6. The Charter of the Risk Management of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE CHARTER

The Risk Management Committee retains the Charter as guidelines to perform its role, which regulates the purpose of establishing the committee; duties, responsibilities, and authorities of the committee; structure and membership of the committee; committee meetings, quorum, and decision making; term of office of committee members from Independent Party; performance assessment mechanism; and review period on the work guidelines and procedures of the committee periodically. The Risk Management Committee Charter was last updated on 15 February 2023 and will be updated on the membership composition, and the committee charter follows occurring changes in the management structure as well as the Bank's latest organizational structure.

STRUKTUR, KOMPOSISI, DAN DASAR PENGANGKATAN

Berikut adalah komposisi keanggotaan Komite Manajemen Risiko per 31 Desember 2024:

STRUCTURE, COMPOSITION, AND BASIS OF APPOINTMENT

The following is the composition of the Risk Management Committee membership as of December 31, 2024:

Fungsi/Jabatan dalam Komite Functions/Positions in the Committee	Pelaksanaan/Pejabat dalam Organisasi Implementation/Officials in the Organization	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Ketua merangkap anggota tetap dengan hak suara Chairman concurrently permanent member with voting rights	Direktur Kepatuhan, Risiko & Hukum Director of Compliance, Risk & Legal	Surat Keputusan Direksi No. 025/B/DIR-KPTS/VII/2024 tentang Komite Manajemen Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 11 Juli 2024. Decree of the Board of Directors No. 025/B/DIR-KPTS/VII/2024 concerning the Risk Management Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated July 11, 2024.
Wakil Ketua merangkap anggota tetap dengan hak suara Deputy Chairman concurrently permanent member with voting rights	Direktur Operasi, Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia Director of Operations, Information Technology and Human Resources	Surat Keputusan Direksi No. 025/B/DIR-KPTS/VII/2024 tentang Komite Manajemen Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 11 Juli 2024. Decree of the Board of Directors No. 025/B/DIR-KPTS/VII/2024 concerning the Risk Management Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated July 11, 2024.
Anggota Tetap dengan Hak Suara Permanent Members with Voting Rights	- Direktur Utama merangkap Direktur Keuangan dan Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan. - SEVP Enterprise Banking - SEVP Retail Banking - President Director concurrently Finance Director and Financing Business Risk Director. - SEVP Enterprise Banking - SEVP Retail Banking	Surat Keputusan Direksi No. 025/B/DIR-KPTS/VII/2024 tentang Komite Manajemen Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 11 Juli 2024. Decree of the Board of Directors No. 025/B/DIR-KPTS/VII/2024 concerning the Risk Management Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated July 11, 2024.
Sekretaris merangkap anggota tetap tanpa hak suara Secretary concurrently permanent member without voting rights	Head of Integrated Risk Management	Surat Keputusan Direksi No. 025/B/DIR-KPTS/VII/2024 tentang Komite Manajemen Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 11 Juli 2024. Decree of the Board of Directors No. 025/B/DIR-KPTS/VII/2024 concerning the Risk Management Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated July 11, 2024.
Anggota tetap tanpa hak suara Permanent member without voting rights	- Head of Internal Audit - Head of Compliance	Surat Keputusan Direksi No. 025/B/DIR-KPTS/VII/2024 tentang Komite Manajemen Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 11 Juli 2024. Decree of the Board of Directors No. 025/B/DIR-KPTS/VII/2024 concerning the Risk Management Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated July 11, 2024.
Anggota tidak tetap tanpa hak suara Non-permanent members without voting rights	Kepala Unit Kerja (Head of Level 1) sesuai dengan agenda pembahasan, yang mewakili fungsi operasional, bisnis dan financing risk Head of Work Unit (Head of Level 1) in accordance with the discussion agenda, representing operational, business and financing risk functions	Surat Keputusan Direksi No. 025/B/DIR-KPTS/VII/2024 tentang Komite Manajemen Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 11 Juli 2024. Decree of the Board of Directors No. 025/B/DIR-KPTS/VII/2024 concerning the Risk Management Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated July 11, 2024.

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko dalam menjalankan fungsinya memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite Manajemen Risiko, sebagai berikut:

- Melaksanakan rapat berkala Komite Manajemen Risiko, termasuk menetapkan agenda pembahasan rapat dan peserta rapat khusus yang perlu menghadiri rapat dimaksud.

AUTHORITIES AND RESPONSIBILITIES OF THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee in carrying out its functions has the authority and responsibilities as stated in the Risk Management Committee Charter, as follows:

- Holding the Risk Management Committee periodic meetings, including determining the meeting agenda as well as special meeting participants who need to attend the meeting.



2. Melaksanakan wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dan seluruh Jajaran Direksi yaitu:
 - a. Melaksanakan kewenangan Komite Kebijakan Pembiayaan serta penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko Bank Muamalat antara lain:
 - (1) Melakukan penyusunan kebijakan, strategi dan ketentuan terkait penerapan Manajemen Risiko dan tata kelola perusahaan.
 - (2) Melakukan pemantauan dan perbaikan dan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi antara lain atas:
 - Penilaian atas perkembangan profil risiko bank dan tingkat kesehatan bank.
 - Penetapan strategi dan limit risiko sebagai bagian dari *risk appetite* Bank.
 - Pemantauan dan kajian risiko Bank terhadap *risk appetite* dan strategi pengelolaan risiko.
 - Ketaatan terhadap ketentuan limit-limit risiko yang dihadapi Bank secara umum.
 - Implementasi budaya manajemen risiko pada seluruh level organisasi Bank.
 - (3) Memastikan komitmen seluruh jajaran manajemen dan karyawan, dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan Bank.
 - (4) Penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal (*irregularities*) termasuk dalam keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal antara lain pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan rencana bisnis Bank dan pengambilan posisi atau eksposur risiko yang tidak sesuai dengan limit yang telah ditetapkan.
 - (5) Melakukan pemantauan, perbaikan dan/atau penyempurnaan terkait proses tata kelola, analisis risiko, Kepatuhan dan evaluasi dalam kerangka *Governance, Compliance & Risk* (GRC).
 3. Memberikan saran dan Langkah perbaikan kepada Direksi terkait dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan butir 2 di atas.
 4. Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Bank Muamalat terkait dengan pemenuhan prinsip syariah, maka laporan disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah.
2. Carry out its authorities and responsibilities to provide recommendations to the President Director and all levels of the Board of Directors, namely as follows:
 - a. Carry out the authority of the Financing Policy Committee as well as prepare policies, strategies and guidelines for implementing Bank Muamalat Risk Management, including the following
 - (1) Prepare policies, strategies and provisions related to the implementation of Risk Management and corporate governance.
 - (2) Monitor and improve and/or refine the implementation of Risk Management based on assessment results including:
 - Assessment on the development of the Bank's risk profile and the Bank's sound level.
 - Determining risk strategies and limits as part of the Bank's risk appetite.
 - Monitoring and review of the Bank's risks on risk appetite and risk management strategy
 - Compliance with the provisions on risk limits generally faced by the Bank.
 - Implementation of risk management culture at all levels of the Bank's organization.
 - (3) Ensure the commitment of all levels of the management and employees in implementing the principles of transparency, accountability, responsibility, independency and fairness in managing the Bank.
 - (4) Determine (*justification*) matters related to business decisions that are not in line with normal procedures (*irregularities*), among others, the possibility of significant business expansion compared to the Bank's business plan and taking the positions or risk exposures that do not comply with set limits.
 - (5) Carry out monitoring, improvement and/or enhancement related to governance processes, risk analysis, compliance and assessment within the Governance, Compliance & Risk (GRC) framework.
 3. Providing suggestions and corrective measures to the Board of Directors related to a copy to the Board of Commissioners regarding matters related to point 2 above.
 4. In the event of deviations in the implementation of Bank Muamalat's Financing Policy related to the fulfillment of sharia principles, the report is submitted to the Sharia Supervisory Board.

SEKRETARIS KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko memiliki sekretaris yang ditunjuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi. Adapun tanggung jawab dari Sekretaris Komite antara lain:

1. Menyelenggarakan rapat Komite Manajemen Risiko sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya atau berdasarkan *calendar of events* Bank Muamalat Indonesia, termasuk menyiapkan daftar hadir peserta rapat Komite Manajemen Risiko.
2. Menyampaikan materi rapat Komite Manajemen Risiko kepada peserta rapat yang diundang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.
3. Mengundang peserta rapat Komite Manajemen Risiko termasuk melakukan koordinasi untuk persiapan materi yang akan dibahas dalam rapat Komite Manajemen Risiko.
4. Menyusun risalah rapat Komite Manajemen Risiko selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah rapat diselenggarakan untuk ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua Manajemen Risiko, atau penggantinya.
5. Mengirimkan risalah rapat kepada seluruh anggota tetap Komite Manajemen Risiko dan seluruh peserta yang hadir berdasarkan kepentingannya untuk ditindaklanjuti.
6. Melaporkan penyelenggaraan rapat Komite Manajemen Risiko kepada Direksi dan/atau untuk kepentingan lainnya.
7. Memantau tindak lanjut atas hasil rapat Komite Manajemen Risiko.

PROFIL KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Profil ketua Komite Manajemen Risiko disajikan pada bab "Profil Perusahaan".

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2024

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

SECRETARIAT OF THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee has a secretary who is appointed and determined by a Decree of the Board of Directors. The responsibilities of the Committee Secretary include the following:

1. Holding Risk Management Committee meeting according to a predetermined schedule or based on the calendar of events of Bank Muamalat Indonesia, including preparing a list of attendees for the Risk Management Committee meeting.
2. Submitting materials for the Risk Management Committee meeting to the invited meeting participants no later than 1 (one) working day before the meeting is held.
3. Inviting participants to the Risk Management Committee meeting, including coordinating the preparation of material to be discussed in the Risk Management Committee meeting.
4. Preparing minutes of the Risk Management Committee meeting no later than 5 (five) working days after the meeting is held to be signed by the Chairman or Deputy Chairman of Risk Management Committee, or their replacement.
5. Distributing the minutes of meetings to all permanent members of the Risk Management Committee and all attendees based on their interests to be followed up.
6. Reporting the implementation of the Risk Management Committee meeting to the Board of Directors and/or for other purposes.
7. Monitoring follow-up to the Risk Management Committee meeting resolution.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE PROFILE

The profile of the chairman of the Risk Management Committee is presented in the "Company Profile" chapter.

TRAINING AND/OR COMPETENCY IMPROVEMENT OF THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE IN 2024.

Training and/or competency improvement can be seen in the Training and/or Competency Improvement section of the Board of Directors in this Annual Report.



PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Sepanjang tahun 2024, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan memberikan rekomendasi kepada Direksi antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 5 (lima) kali rapat dalam satu (1) tahun dan membuat seluruh risalah rapat komite.
2. Membahas Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Periode Semester II tahun 2023 dan Semester I tahun 2024.
3. Memberikan masukan atas usulan Risk Appetite & Risk Tolerance Risiko Operasional Tahun 2024.
4. Membahas mengenai Hasil *Assesment* Penilaian Profil Risiko Keamanan Siber.
5. Melakukan pembahasan mengenai laporan profil risiko dan RBBR
6. Membahas mengenai skenario dan hasil dari beberapa *stress test*.
7. Membahas pemenuhan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).
8. Mengkaji usulan produk Tempat Penyimpanan Emas Terkait Produk Cilik Emas (Cilem).
9. Mengkaji dampak Berakhirnya Stimulus Restrukturisasi COVID-19 pada Kinerja Pembiayaan BMI

RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Kebijakan

Mengacu pada Piagam Komite Manajemen Risiko Bank Muamalat Indonesia, rapat komite wajib diselenggarakan sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah dari Direksi yang menjadi anggota tetap dan memiliki hak suara.

Direksi yang menjadi anggota tetap dan memiliki hak suara yang berhalangan hadir dapat mewakilkan suaranya kepada Direktur lain yang menjadi anggota tetap dan memiliki hak suara, serta disampaikan kepada Sekretaris Komite Manajemen Risiko minimal 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat. Direktur yang menjadi anggota tetap Komite Manajemen Risiko dan memiliki hak suara hanya dapat mewakili 1 (satu) suara anggota tetap dan memiliki hak suara lainnya, yang berhalangan hadir.

Selain itu, Komite Manajemen Risiko juga wajib dihadiri oleh Ketua atau Wakil Ketua Komite Manajemen Risiko atau penggantinya. Komite Manajemen Risiko dapat mengambil keputusan atas kebijakan, metodologi, limit dan strategi terkait dengan manajemen risiko.

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT COMMITTEE ACTIVITIES

Throughout 2024, the Risk Management Committee has carried out its duties and its responsibility to provide recommendations to the Board of Directors includes the following:

1. Organizing 5 (five) meetings in one (1) year and preparing all minutes of committee meetings.
2. Discuss the Results of the Bank Health Level Assessment for Semester II of 2023 and Semester I of 2024.
3. Providing input on the proposed Risk Appetite & Risk Tolerance for Operational Risk in 2024.
4. Discussing the Results of the Cyber security Risk Profile Assessment.
5. Conducting discussions on risk profile reports and RBBR
6. Discussing scenarios and results of several stress tests.
7. Discussing the fulfillment of the Macroprudential Inclusive Financing Ratio (RPIM).
8. Reviewing the proposal of the Gold Storage Product Related to the Gold Installment Product (Cilem).
9. Reviewing the impact of the End of the COVID-19 Restructuring Stimulus on BMI Financing Performance

MEETINGS OF RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Policy

Referring to the Risk Management Committee Charter of Bank Muamalat Indonesia, committee meetings are required to be held at least 6 (six) times within 1 (one) year. Meetings may be held if attended by more than half of the Board of Directors who are permanent members and holding the rights to vote.

Members of the Board of Directors who are permanent members and holding voting rights are unable to attend can represent their votes to their Directors who are permanent members and have voting rights, and submit to the Secretary of the Risk Management Committee at least 1 (one) working day prior to the meeting implementation. Directors who are permanent members of the Risk Management Committee and have voting rights can only represent 1 (one) permanent member's vote and have other voting rights who are unable to attend.

Moreover, the Risk Management Committee must also be attended by the Chairman or Vice Chairman of the Risk Management Committee or the replacement. The risk Management Committee may make decisions on policies, methodologies, limits and strategies related to risk management.

Keputusan yang diambil oleh menjadi rekomendasi yang perlu memperoleh keputusan lebih lanjut dari Direksi. Pengambilan keputusan dalam rapat komite diambil berdasarkan mufakat. Apabila tidak terjadi mufakat, maka keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah anggota tetap Komite Manajemen Risiko dan memiliki hak suara, yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat tersebut dan disetujui oleh Ketua Komite atau Wakil Ketua Komite.

Realisasi

Sepanjang tahun 2024, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan 5 (lima) kali rapat dengan agenda sebagai berikut.

Decisions taken may serve as recommendations that require further decisions from the Board of Directors. Decision-making in the committee meetings may be carried out based on deliberation to reach consensus. In the event consensus is not reached, then decisions are regarded as legitimate if approved by more than half of the members of the Risk Management Committee holding voting rights, attendant and/or represented in the meetings and approved by the Committee Chairman or Vice Chairman.

Realization

Throughout 2024, the Risk Management Committee has held 5 (five) meetings with the following agenda.

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
1.	23 Januari 2024 January 23, 2024	1. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (<i>Risk Based Bank Rating</i>) Periode Desember 2023 2. Usulan <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i> Risiko Operasional Tahun 2024 1. Bank Soundness Level Assessment (Risk Based Bank Rating) Period December 2023 2. Proposal of Risk Appetite and Risk Tolerance for Operational Risk in 2024	1. Indra Falatehan ^{*)} 2. Karno 3. Hery Syafril ^{**)} 4. Suhendar ^{*)} 5. Irvan Yulian Noor 6. Riksa Prakoso ^{**)} 7. Wahyu Avianto ^{*)} 8. Deddy Suryadi Dharmawan
2.	29 Februari 2024 February 29, 2024	1. Usulan Tempat Penyimpanan Emas Terkait Produk Cilik Emas (Cilem) 2. Usulan <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i> Risiko Siber 1. Proposal of Gold Storage Place Related to Gold Installment Products (Cilem) 2. Proposal of Risk Appetit and Risk Tolerance for Cyber Risk	1. Indra Falatehan ^{*)} 2. Karno 3. Hery Syafril ^{**)} 4. Suhendar ^{*)} 5. Irvan Yulian Noor 6. Riksa Prakoso ^{**)} 7. Wahyu Avianto ^{*)} 8. Deddy Suryadi Dharmawan
3.	22 April 2023 April 22, 2024	1. Penilaian Profil Risiko Periode Triwulan I Tahun 2024 2. Tindak Lanjut Pemenuhan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) 3. Dampak Berakhirnya Stimulus Restrukturisasi COVID-19 pada Kinerja Pembiayaan BMI 1. Risk Profile Assessment for the First Quarter of 2024 2. Follow-up on Fulfillment of the Macroprudential Inclusive Financing Ratio (RPIM) 3. Impact of the End of the COVID-19 Restructuring Stimulus on BMI Financing Performance	1. Indra Falatehan ^{*)} 2. Karno 3. Wahyu Avianto ^{*)} 4. Suhendar ^{*)} 5. Irvan Yulian Noor 6. Deddy Suryadi Dharmawan
4.	17 Juli 2024 July 17, 2024	1. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank/ <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) Periode Semester I 2024 2. Usulan Keanggotaan Direksi dan SEVP pada Komite Level Direksi 1. Assessment of Bank Soundness Level/Risk Based Bank Rating (RBBR) for Semester I 2024 2. Proposal of Membership of the Board of Directors and SEVP on the Board of Directors Level Committee	1. Karno 2. Hery Syafril ^{**)} 3. Riksa Prakoso ^{**)} 4. Irvan Yulian Noor 5. Dedy Suryadi Dharmawan
5.	10 Oktober 2024 October 10, 2024	Penilaian Profil Risiko Bank Muamalat Periode Triwulan III tahun 2024 Risk Profile Assessment of Bank Muamalat for the Third Quarter of 2024	1. Karno 2. Hery Syafril ^{**)} 3. Irvan Yulian Noor 4. Dedy Suryadi Dharmawan

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPST tanggal 27 Juni 2024.

Has stopped serving in accordance with the resolution of the AGMS dated June 27, 2024.

^{**)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.

Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.



KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Selain di dalam rapat, keputusan dalam Komite Manajemen Risiko juga bisa terjadi di luar rapat, yakni secara sirkuler kepada seluruh anggota tetap dan memiliki hak suara, berdasarkan persetujuan terlebih dahulu dari Ketua Komite Manajemen Risiko. Keputusan Komite Manajemen Risiko yang dilakukan secara sirkuler mengikat semua anggota atau unit kerja di Bank Muamalat Indonesia terkait dengan risiko. Keputusan di luar rapat Komite Manajemen Risiko berlaku apabila telah disetujui oleh seluruh anggota tetap Komite dan memiliki hak suara, secara bulat atas usulan yang diajukan.

TINDAK LANJUT KEPUTUSAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Apabila Komite Manajemen Risiko memberikan masukan dan rekomendasi yang perlu memperoleh keputusan lebih lanjut dari Direksi, maka masukan dan rekomendasi Komite Manajemen Risiko harus ditindaklanjuti dengan memo usulan yang ditujukan kepada Direksi untuk memperoleh keputusan lebih lanjut. Memo usulan disusun oleh unit kerja yang menyampaikan usulan tersebut dalam rapat Komite Manajemen Risiko. Jika terdapat Unit Kerja yang melakukan presentasi dalam Rapat Komite Manajemen Risiko, maka rapat wajib dihadiri oleh Kepala Unit Kerja Level 1 (L1) atau pejabat yang setingkat.

DECISIONS OUTSIDE THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETING

Decisions in the Risk Management Committee can also take place outside the meeting, namely in a circular manner, to all permanent members with voting rights to the Risk Management Committee, based on prior approval from the Chairman of the Risk Management Committee. The Risk Management Committee's decision, carried out in a circular manner, binds all members or work units at Bank Muamalat Indonesia regarding risks. Decisions outside the Risk Management Committee meeting shall be effective if all permanent committee members with voting rights have approved unanimously on the submitted proposal.

FOLLOW-UP TO THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETING RESOLUTION

In the event that the Risk Management Committee provides input and recommendations that require further decisions from the Board of Directors, the input and recommendations of the Risk Management Committee must be followed up with a proposal memo addressed to the Board of Directors to obtain further decisions. The proposal memo is prepared by the work unit that submits the proposal at the Risk Management Committee meeting. In the event that there is a Work Unit that makes the presentation at the Risk Management Committee Meeting, the meeting must be attended by the Head of the Level 1 Work Unit (L1) or an official at the same level.

Komite Kebijakan Pembiayaan

Financing Policy Committee

DASAR HUKUM

Pembentukan Komite Kebijakan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia merujuk pada ketentuan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/POJK. 03/2021 Tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum
5. Piagam Komite Kebijakan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia.

PIAGAM KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Bank Muamalat telah memiliki Piagam Komite Kebijakan Pembiayaan sebagai pedoman anggota komite dalam menjalankan perannya, yang mengatur mengenai tujuan pembentukan komite; tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite; struktur dan keanggotaan komite; rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan; masa tugas anggota komite dari Pihak Independen; mekanisme evaluasi kinerja; dan periode revidi pedoman dan tata tertib kerja komite secara berkala. Piagam Komite Kebijakan Pembiayaan mengalami pembaruan terakhir pada tanggal 20 Februari 2023 dan akan dilakukan pembaharuan susunan keanggotaan dan piagam komite mengikuti perubahan susunan pengurus serta struktur organisasi terkini Bank.

LEGAL BASIS

The establishment of the Financing Policy Committee of Bank Muamalat Indonesia refers to the following provisions:

1. Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.03/2022 regarding Sharia Commercial Banks.
2. Financial Services Authority Regulation No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks.
3. Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 26/POJK. 03/2021 Concerning the Maximum Limit of Fund Distribution and Large Fund Distribution for Sharia Commercial Banks.
4. Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.03/2017 regarding Obligation for the Preparation and Implementation of Bank Credit or Financing Policies for Commercial Banks.
5. Charter of the Financing Policy Committee of Bank Muamalat Indonesia.

FINANCING POLICY COMMITTEE CHARTER

Bank Muamalat retains the Charter of the Financing Policy Committee as guidelines for committee members to carry out committee's role, which regulates the purpose of establishing the committee; duties, responsibilities, and authorities of the committee; structure and membership of the committee; committee meetings, quorum, and decision making; term of office of committee members from Independent Party; performance assessment mechanism; and review period on the work guidelines and procedures of the committee periodically. The Financing Policy Committee Charter was last updated on February 20, 2023 and will be updated on the membership composition, and the committee charter follows occurring changes in the management structure as well as the Bank's latest organizational structure.



STRUKTUR, KOMPOSISI, DAN DASAR PENGANGKATAN

Per 31 Desember 2024, komposisi Komite Kebijakan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

STRUCTURE, COMPOSITION, AND BASIS OF APPOINTMENT

As of December 31, 2024, the composition of the Financing Policy Committee is as follows:

Fungsi/Jabatan dalam Komite Functions/Positions in the Committee	Pelaksanaan/Pejabat dalam Organisasi Implementation/Officials in the Organization	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Ketua merangkap anggota tetap dengan hak suara. Chairman concurrently permanent member with voting rights.	Direktur Utama merangkap Direktur Keuangan dan Direktur Risiko Bisnis Pembiayaan. President Director concurrently Finance Director and the Financing Business Risk Director.	Surat Keputusan No. 024/B/DIR-KPTS/VII/2024 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 11 Juli 2024. Decree No. 024/B/DIR-KPTS/VII/2024 concerning the Financing Policy Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated July 11, 2024.
Wakil Ketua merangkap anggota tetap dengan hak suara. Deputy Chairman concurrently permanent member with voting rights.	Direktur Kepatuhan, Risiko dan Hukum Director of Compliance, Risk and Legal	Surat Keputusan No. 024/B/DIR-KPTS/VII/2024 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 11 Juli 2024. Decree No. 024/B/DIR-KPTS/VII/2024 concerning the Financing Policy Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated July 11, 2024.
Sekretaris merangkap anggota tetap tanpa hak suara. Secretary concurrently permanent member without voting rights.	Head of Integrated Risk Management	Surat Keputusan No. 024/B/DIR-KPTS/VII/2024 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 11 Juli 2024. Decree No. 024/B/DIR-KPTS/VII/2024 concerning the Financing Policy Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated July 11, 2024.
Anggota tetap dengan hak suara. Permanent member with voting rights.	- Direktur Operasi, Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia - SEVP Enterprise Banking - SEVP Retail Banking - Director of Operations, Information Technology and Human Resources - SEVP Enterprise Banking - SEVP Retail Banking	Surat Keputusan No. 024/B/DIR-KPTS/VII/2024 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 11 Juli 2024. Decree No. 024/B/DIR-KPTS/VII/2024 concerning the Financing Policy Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated July 11, 2024.
Anggota tetap tanpa hak suara. Permanent members without voting rights.	- Head of Internal Audit - Head of Compliance	Surat Keputusan No. 024/B/DIR-KPTS/VII/2024 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 11 Juli 2024. Decree No. 024/B/DIR-KPTS/VII/2024 concerning the Financing Policy Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated July 11, 2024.
Anggota tidak tetap tanpa hak suara Non-permanent members without voting rights	Kepala unit kerja (head of level 1) sesuai dengan agenda pembahasan, yang mewakili fungsi operasional, bisnis, dan <i>financing risk</i> . Head of work unit (head of level 1) in accordance with the discussion agenda, representing operational, business and financing risk functions.	Surat Keputusan No. 024/B/DIR-KPTS/VII/2024 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 11 Juli 2024. Decree No. 024/B/DIR-KPTS/VII/2024 concerning the Financing Policy Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated July 11, 2024.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Kebijakan Pembiayaan memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam Piagam Komite Kebijakan Pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada direksi dalam penyusunan Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB), terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan.
2. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan KPB. Selanjutnya Komite juga melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi dalam hal diperlukan perubahan dan perbaikan.
3. Memantau dan mengevaluasi:
 - a. Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan.
 - b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus pembiayaan.
 - c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank Muamalat Indonesia dan nasabah pembiayaan besar tertentu.
 - d. Kebenaran pelaksanaan BMPD (Batas Maksimum Penyaluran Dana).
 - e. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan.
 - f. Penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan KPB.
 - g. Upaya Bank Muamalat Indonesia dalam memenuhi kecukupan jumlah pencadangan pembiayaan.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE PEMBIAYAAN TAHUN 2024

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

PROFIL KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Profil ketua Komite Kebijakan Pembiayaan disajikan pada bab "Profil Perusahaan".

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Financing Policy Committee is tasked with the duties and responsibilities as contained in the Charter of the Financing Policy Committee, namely as follows:

1. To provide feedback to the Board of Directors in formulating the Bank's Financing Policies (KPB), especially which relate to the formulation of the prudence principle in financing.
2. To oversee to ensure that KPB is applicable consequently and consistently as well as to formulate solutions in the event there are obstacles or constraints in implementing KPB. Subsequently, the Committee also periodically reviews KPB and provides recommendations to the Board of Directors when changes and improvements are required.
3. To monitor and evaluate:
 - a. Development quality of the overall financing portfolio.
 - b. Appropriate implementation of authority to decline/excise financing.
 - c. Appropriate process of providing, developing, , and quality financing extended to parties related to Bank Muamalat Indonesia and to certain large financing customers.
 - d. Appropriate implementation of BMPD (Maximum Fund Distribution Limit).
 - e. Compliance with the provisions of laws and other regulations in the implementation of providing financing.
 - f. Settlement of problematic financing as determined by KPB.
 - g. Bank Muamalat Indonesia's efforts to ensure adequate financing reserves.

TRAINING AND/OR COMPETENCY IMPROVEMENT OF THE FINANCING POLICY COMMITTEE IN 2024

Training and/or competency improvement can be seen in the Training and/or Competency Improvement section of the Board of Directors in this Annual Report.

FINANCING POLICY COMMITTEE PROFILE

The profile of the chairman of the Financing Policy Committee is presented in the "Company Profile" chapter.



PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Sepanjang tahun 2024, Komite Kebijakan Pembiayaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 6 (enam) kali rapat dalam satu (1) tahun dan membuat seluruh risalah rapat komite.
2. Melakukan pembahasan mengenai *Target Market & Risk Acceptance Criteria* (TMRAC) Pembiayaan *Enterprise*.
3. Melakukan kajian usulan Kewenangan Memutus Pembiayaan Segmen *Consumer*.
4. Pembahasan RAC pembiayaan Segmen *Consumer*
5. Mengkaji *Politically Exposed Person* (PEP) – Usulan Penentuan *Risk Appetite* Bank pada Akuisisi Pembiayaan *Consumer*.
6. Memberikan masukan terhadap perumusan Kewenangan Memutus Pembiayaan dan perumusan Mitigasi Risiko Konsentrasi Pembiayaan.
7. Mengkaji usulan produk dan layanan diantaranya: Program Pembiayaan Multiguna untuk Profesi Dokter, Penyimpanan Agunan Emas di Khasanah FOP Lantai 5, dan Pembiayaan Maktab Haji Khusus.
8. Mengkaji Pelunasan Piutang Murabahah Sebelum Jatuh Tempo.
9. Membahas *Financing Origination System* (FOS) Produk *Consumer*.
10. Penyesuaian Keanggotaan Komite Pembiayaan Masa Transisi Segmen *Enterprise Banking* dan IBS.

RAPAT KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Kebijakan

Piagam Komite Kebijakan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia mengatur rapat Komite Kebijakan Pembiayaan yang wajib diselenggarakan paling kurang 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.

IMPLEMENTATION OF FINANCING POLICY COMMITTEE ACTIVITIES

Throughout 2024, the Financing Policy Committee has carried out its duties and responsibilities with the following details:

1. Organizing 6 (six) meetings in one (1) year and preparing all minutes of committee meetings.
2. Discussing the Target Market & Risk Acceptance Criteria (TMRAC) for Enterprise Financing.
3. Reviewing the proposal of Authority to Decide on Consumer Segment Financing.
4. Discussion of RAC financing for the Consumer Segment
5. Reviewing Politically Exposed Person (PEP) - Proposal for Determining Bank Risk Appetite in Consumer Financing Acquisitions.
6. Provide input to the formulation of the Authority to Decide Financing and the formulation of Financing Concentration Risk Mitigation.
7. Reviewing product and service proposals, including the Multipurpose Financing Program for the Doctor Profession, Gold Collateral Storage at the FOP Treasury, 5th Floor, and Special Hajj Office Financing.
8. Reviewing Murabahah Receivables Settlement Before Due Date.
9. Discussing the Financing Origination System (FOS) for Consumer Products.
10. Adjustment of the Membership of the Transition Period Financing Committee for the Enterprise Banking and IBS Segments.

MEETING OF THE FINANCING POLICY COMMITTEE

Policy

The Charter of the Financing Policy Committee of Bank Muamalat Indonesia regulates the Financing Policy Committee meetings, required to be held at least 6 (six) times in 1 (one) year.

Realisasi

Sepanjang tahun 2024, Komite Kebijakan Pembiayaan telah menyelenggarakan 6 (enam) kali rapat dengan agenda sebagai berikut:

Realization

During the year 2024, the Financing Policy Committee held 6 (six) meetings with the following agenda:

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
1.	29 Januari 2024 January 29, 2024	1. Penyampaian Informasi & Permintaan Rekomendasi Pembiayaan kepada Dewan Komisaris 2. Kinerja Pembiayaan (<i>Booking</i> Tahun 2023) & Penyempurnaan Ketentuan Produk Consumer	1. Indra Falatehan^{*)} 2. Karno 3. Hery Syafril^{**)} 4. Suhendar^{*)} 5. Irvan Yulian Noor 6. Riksa Prakoso^{**)} 7. Wahyu Avianto^{*)} 8. Deddy Suryadi Dharmawan
2.	29 Februari 2024 February 29, 2024	1. <i>Target Market & Risk Acceptance Criteria</i> (TMRAC) Pembiayaan Enterprise 2. <i>Politically Exposed Person</i> (PEP) – Usulan Penentuan <i>Risk Appetite Bank</i> pada Akuisisi Pembiayaan Consumer 3. Kehadiran Unit Kerja Compliance, Risk & Legal dalam Rapat Komite Pembiayaan	1. Indra Falatehan^{*)} 2. Karno 3. Hery Syafril^{**)} 4. Suhendar^{*)} 5. Irvan Yulian Noor 6. Riksa Prakoso^{**)} 7. Wahyu Avianto^{*)} 8. Deddy Suryadi Dharmawan
3.	25 Maret 2024 March 25, 2024	1. Perbaikan Proses Pembiayaan 2. Kajian dan Usulan Kewenangan Memutus Pembiayaan Segmen <i>Consumer</i> 3. Program Pembiayaan Multiguna untuk Profesi Dokter	1. Indra Falatehan^{*)} 2. Karno 3. Suhendar^{*)} 4. Irvan Yulian Noor 5. Riksa Prakoso^{**)} 6. Deddy Suryadi Dharmawan
4.	27 Mei 2024 May 27, 2024	1. Pelunasan Piutang Murabahah Sebelum Jatuh Tempo 2. Perkembangan Scoring Pembiayaan Consumer	1. Indra Falatehan^{*)} 2. Karno 3. Hery Syafril^{**)} 4. Suhendar^{*)} 5. Irvan Yulian Noor 6. Riksa Prakoso^{**)} 7. Wahyu Avianto^{*)} 8. Deddy Suryadi Dharmawan
5.	9 September 2024 September 9, 2024	1. Usulan Penyesuaian Keanggotaan Komite Pembiayaan Masa Transisi Segmen Enterprise Banking dan IBS 2. Pembahasan RAC Produk Unggulan Segmen Consumer 3. Update atas Financing Origination System (FOS) Produk Consumer	1. Karno 2. Hery Syafril^{**)} 3. Riksa Prakoso^{**)} 4. Irvan Yulian Noor 5. Dedy Suryadi Dharmawan
6.	2 Desember 2024 December 2, 2024	1. Permohonan Persetujuan atas Usulan <i>Target Market</i> dan <i>Financing Allocation Limit</i> (FAL) Tahun 2025 2. <i>Target Market</i> dan <i>Risk Acceptance Criteria</i> (TMRAC) Segmen Enterprise Banking 3. Produk/ Pembiayaan Consumer Banking 4. Penyimpanan Agunan Emas di Khasanah FOP Lantai 5 5. Pembiayaan Maktab Haji Khusus	1. Karno 2. Dedy Suryadi Dharmawan 3. Riksa Prakoso^{**)}

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPST tanggal 27 Juni 2024.

Has stopped serving in accordance with the resolution of the AGMS dated June 27, 2024.

^{**)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.

Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.



Komite Pembiayaan

Financing Committee

DASAR HUKUM

Pembentukan Komite Kebijakan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia merujuk pada ketentuan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum
5. Piagam Komite Kebijakan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia.

PIAGAM KOMITE PEMBIAYAAN

Bank Muamalat telah memiliki tata tertib kerja mengenai Komite Pembiayaan, yang mengatur mengenai tujuan pembentukan komite; tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite; struktur dan keanggotaan komite; rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan; masa tugas anggota komite dari Pihak Independen; mekanisme evaluasi kinerja; dan periode revidi pedoman dan tata tertib kerja komite secara berkala. Prosedur Komite Pembiayaan mengalami pembaruan terakhir pada tanggal 9 Oktober 2024 dan akan dilakukan pembaharuan susunan keanggotaan dan piagam komite mengikuti perubahan susunan pengurus serta struktur organisasi terkini Bank.

LEGAL BASIS

The establishment of the Financing Committee of Bank Muamalat Indonesia refers to the following provisions:

1. Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.03/20 regarding Sharia Commercial Banks.
2. Financial Services Authority Regulation No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks.
3. Financial Services Authority Regulation Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
4. Financial Services Authority Regulation 42/POJK.03/2017 regarding Obligations for the Preparation and Implementation of Credit or Bank Financing Policies for Commercial Banks.
5. Charter of the Financing Committee of Bank Muamalat Indonesia.

FINANCING COMMITTEE CHARTER

Bank Muamalat retains the work procedures of the Financing Committee which regulate the purpose of establishing the committee; duties, responsibilities, and authorities of the committee; structure and membership of the committee; committee meetings, quorum, and decision-making; term of office of committee members from Independent Party; performance assessment mechanism; and review period on the work guidelines and procedures of the committee periodically. The procedures of the Financing Committee were last updated on October 9, 2024 and will be updated on the membership composition, and the committee charter follows occurring changes in the management structure as well as the Bank's latest organizational structure.

STRUKTUR, KOMPOSISI, DAN DASAR PENGANGKATAN

Per 31 Desember 2024, komposisi Komite Pembiayaan segmen enterprise banking berdasarkan Surat Edaran Direksi No. IRM/P/II/297/2024 tentang Komite Pembiayaan Segmen Enterprise Banking dan Segmen Islamic Business & SME Banking (IBS) Masa Transisi adalah sebagai berikut:

ANGGOTA KOMITE PEMBIAYAAN SEGMENT ENTERPRISE BANKING

Member of the Enterprise Banking Segment Financing Committee

No.	Pelaksanaan/Pejabat dalam Organisasi Implementation/Officials in the Organization
1.	Direktur Utama President Director
2.	Enterprise Banking Director/SEVP
3.	Retail Banking Director/SEVP
4.	Head of L1 Global Market, Head of LI Client Relationship (CLR), Head of LI Enterprise Financing Risk (EFR), L2 Financing Risk Manager (FRM) – EFR, L2 Financing Risk Manager (FRM) – EFR, Head of L2 SOE, Corporate Banking 1 & Syndication, Head of L2 SOE & Corporate Banking 2, Head of L2 SOE & Corporate Banking 3, Head of L2 Commercial Banking, Head of L2 Global Markets (GLM) Financial Institution, dan Head of L2 Global Markets (GLM) General Manager KI.

ANGGOTA KOMITE PEMBIAYAAN BERMASALAH SEGMENT ISLAMIC BANKING DAN SME BANKING (IBS)

Member of the Islamic Banking and SME Banking (IBS) Segment Non-Performing Financing Committee

No.	Pelaksanaan/Pejabat dalam Organisasi Implementation/Officials in the Organization
1.	Direktur Utama President Director
2.	Retail Banking Director/SEVP
3.	Head of L1 Islamic Business & SME Banking (IBS), Head of L1 Retail Financing Risk (RFR), Head of L2 RFR-IBS, Head of L2 Islamic Business & SME Banking (IBS), Head of L2 Islamic Business & SME Banking (IBS), dan Region Head Islamic Business & SME Banking (IBS)

ANGGOTA KOMITE PEMBIAYAAN BERMASALAH SEGMENT ENTERPRISE BANKING

Member of the Enterprise Banking Segment Financing Committee

No.	Pelaksanaan/Pejabat dalam Organisasi Implementation/Officials in the Organization
1.	Direktur Utama President Director
2.	Enterprise Banking Director/SEVP
3.	Head of L1 Special Asset Management (SAM) dan Head of L1 Enterprise Financing Risk (EFR).

ANGGOTA KOMITE PEMBIAYAAN BERMASALAH SEGMENT ISLAMIC BUSINESS & SME BANKING

Member of the Islamic Business & SME Banking Segment Non-Performing Financing Committee

No.	Pelaksanaan/Pejabat dalam Organisasi Implementation/Officials in the Organization
1.	Direktur Utama President Director
2.	Retail Banking Director/SEVP
3.	Head of L1 Retail Collection Management (RCM), Head of L1 Retail Financing Risk (RFR), Head of Asset Liquidation & Big Balance, Head of Tele Calling & Retail Network Collection, Head of Collection Strategy & Support, Region Collection Manager-Jakarta & Jabar, Region Collection Manager- Jateng DIV & Jatim. Bali & Nusra, Region Collection Manager- Sulampua & Kalimantan dan Region Collection Manager – Sumatera.

STRUCTURE, COMPOSITION, AND BASIS OF APPOINTMENT

As of December 31, 2024, the composition of the Financing Committee for the enterprise banking segment based on the Board of Directors' Circular No. IRM/P/II/297/2024 concerning the Financing Committee for the Enterprise Banking Segment and the Islamic Business & SME Banking (IBS) Segment Transition Period is as follows:



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Pembiayaan memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam Piagam Komite Pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan memberikan persetujuan atas proposal pembiayaan yang diajukan sesuai dengan batas kewenangan memutus pembiayaan yang telah ditetapkan.
2. Mengevaluasi pengelolaan portofolio pembiayaan yang diberikan dan kecukupan agunan atau jaminan bagi setiap debitur, termasuk tetapi tidak terbatas terhadap hal-hal berikut: pertumbuhan dan kualitas portofolio kredit yang diberikan secara keseluruhan maupun per jenis kredit dan target market; efektivitas pelaksanaan kewenangan memutus kredit; serta kepatuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan BMPD (Batas Maksimum Penyaluran Dana) dan Penilaian Kualitas Aset.
3. Mengevaluasi *watch list* atau *early alert* dan menetapkan langkah penanganan atas pembiayaan dalam *watch list* tersebut agar kualitas pembiayaan tidak memburuk.
4. Menetapkan kualitas pembiayaan (kolektibilitas) dari setiap debitur yang diajukan oleh unit bisnis.
5. Mengevaluasi dan menetapkan debitur yang harus direstrukturasasi

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE PEMBIAYAAN TAHUN 2024

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

PROFIL KOMITE PEMBIAYAAN

Profil ketua Komite Pembiayaan disajikan pada bab "Profil Perusahaan".

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Financing Committee retains the duties and responsibilities as contained in the Financing Committee Charter, namely as follows:

1. To evaluate and provide approval on financing proposals submitted in accordance with the limits of authority to decide/excise predetermined financing.
2. To evaluate the management of the financing portfolio provided and the adequacy of collateral or guarantees for each debtor, including but not limited to the following: growth and quality of the credit portfolio provided as a whole and as per type of credit and target market, effectiveness of the implementation of credit decision authority, as well as compliance with the implementation of applicable laws and regulations, including BMPD (Maximum Fund Disbursement Limit) regulation and Asset Quality Assessment.
3. To evaluate the watchlist or early alert and determine the steps to handle financing in the watchlist so that the quality of financing will not get worse.
4. To determine financing quality (collectability) from each debtor proposed by business unit.
5. To evaluate and determine debtors requiring restructuring.

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT OF BUSINESS COMMITTEE IN 2024

Information on training and/or competency development can be found in the section on Training and/or Competency Development of the Board of Directors in this Annual Report.

PROFILE OF FINANCING COMMITTEE

The profile of the Financing Committee is presented in the chapter on "Company Profile".

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN

KEGIATAN

KOMITE

IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES OF FINANCING COMMITTEE

Sepanjang tahun 2024, Komite Kebijakan Pembiayaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 28 (dua puluh delapan) kali rapat dalam satu (1) tahun dan membuat seluruh risalah rapat komite.
2. Melakukan pembahasan mengenai proposal pembiayaan yang diajukan unit sesuai dengan batas kewenangan memutus pembiayaan yang telah ditetapkan. Sekaligus menetapkan kualitas pembiayaan (kolektibilitas) dari setiap debitur yang diajukan oleh unit bisnis.
3. Melakukan pembahasan terkait *watch list* atau *early alert* beberapa nasabah dan menetapkan langkah penanganan atas pembiayaan dalam *watch list* tersebut agar kualitas pembiayaan tidak memburuk.
4. Menetapkan debitur yang harus direstrukturisasi.
5. Melakukan tindak lanjut atas temuan audit baik internal maupun eksternal.

Throughout the year 2024, the Financing Committee conducted its duties and responsibilities, with details as follows:

1. Held 28 (twenty eight) meetings in 1 (one) year and completed all of the committee's minutes of meetings.
2. Conducted discussions on financing proposals submitted by units in accordance with the limits of authority to decide/excise on the predetermined financing. And at the same, determined the quality of financing (collecatibility) of each debtor proposed by business units.
3. Discussed the watchlist or early alert of several customers and determined the steps for handling financing on the watchlist so that the quality of financing would not get worse.
4. Determined debtors that require restructuring.
5. Followed-up on audit findings both internal and external.

RAPAT KOMITE PEMBIAYAAN

Kebijakan

Rapat Komite Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia diselenggarakan secara *ad hoc* atau sesuai dengan kebutuhan Bank Muamalat.

Realisasi

Sepanjang tahun 2024, Komite Pembiayaan telah menyelenggarakan kali rapat.

MEETING OF FINANCING COMMITTEE

Policy

Meetings of the Financing Committee of Bank Muamalat Indonesia are held on ad-hoc basis or as required by Bank Muamalat.

Realization

Throughout 2024, the Financing Committee held meetings.

KOMITE PEMBIAYAAN SEGMENT SME

SME Segment Financing Committee

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
1.	24 Juli 2024 July 24, 2024	Komite Pembiayaan Nasabah Segmen SME Usulan Annual <i>review</i> , penambahan fasilitas pembiayaan SME Segment Customer Financing Committee Proposal of Annual review, additional financing facilities	1. Hery Syafril*) 2. Irvan Yulian Noor 3. Deddy Suryadi Dharmawan
2.	20 Agustus 2024 August 20, 2024	Komite Pembiayaan Nasabah Segmen SME: 1. Usulan Annual Review an KWSG 2. Usulan Penambahan Fasilitas Pembiayaan an UMK 3. Usulan banding <i>pricing</i> , jangka waktu pembiayaan dan perubahan covenant IMB nasabah 4. Usulan Pembiayaan nasabah SME Segment Customer Financing Committee: 1. Annual Review Proposal for KWSG 2. Proposal for Addition of UMK Financing Facilities 3. Proposal for pricing comparison, financing period and changes to customer IMB covenants 4. Customer Financing Proposal	1. Karno 2. Irvan Yulian Noor 3. Deddy Suryadi Dharmawan



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
3.	17 September 2024 September 17, 2024	Komite Pembiayaan Nasabah Segmen SME an: 1. Usulan Pembiayaan nasabah 2. Usulan Pelunasan Sebagian, Pengambilan dan Roya Sebagian Jaminan nasabah SME Segment Customer Financing Committee: 1. Customer Financing Proposal 2. Proposal of Partial Repayment, Withdrawal and Partial Repayment of Customer Collateral	1. Karno 2. Irvan Yulian Noor 3. Deddy Suryadi Dharmawan
4.	14 November 2024 November 14, 2024	Komite Pembiayaan Nasabah Segmen SME: 1. Yayasan Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya 2. Yayasan PDHI SME Segment Customer Financing Committee: 1. Al Irsyad Hospital Foundation Surabaya 2. PDHI Foundation	1. Karno 2. Deddy Suryadi Dharmawan

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.

KOMITE PEMBIAYAAN SEGMENT ENTERPRISE BANKING

Enterprise Banking Segment Financing Committee

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
1.	9 Juli 2024 July 9, 2024	Agenda Komite Pembiayaan Nasabah Customer Financing Committee Agenda	1. Hery Syafril - President Director ^{*)} 2. Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking 3. Aruddy-Head of EFR
2.	18 Juli 2024 July 18, 2024	Agenda Komite Pembiayaan Nasabah Customer Financing Committee Agenda	1. Hery Syafril - President Director ^{*)} 2. Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking 3. Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking 4. Aruddy - Head of EFR
3.	26 Juli 2024 July 26, 2024	Agenda Komite Pembiayaan Nasabah Customer Financing Committee Agenda	1. Hery Syafril - President Director* 2. Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking 3. Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking 4. Aruddy-Head of EFR
4.	13 August 2024 August 13, 2024	Agenda Komite Pembiayaan Nasabah Customer Financing Committee Agenda	1. Karno - Plt./Acting President Director 2. Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking 3. Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking 4. Aruddy-Head of EFR
5.	22 Agustus 2024 August 22, 2024	Agenda Komite Pembiayaan Nasabah Customer Financing Committee Agenda	1. Karno - Plt./Acting President Director 2. Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking 3. Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking 4. Aruddy-Head of EFR
6.	3 September 2024 September 3, 2024	Agenda Komite Pembiayaan Nasabah Customer Financing Committee Agenda	1. Karno - Plt./Acting President Director 2. Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking 3. Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking 4. Aruddy-Head of EFR
7.	6 September 2024 September 6, 2024	Agenda Komite Pembiayaan Nasabah Customer Financing Committee Agenda	1. Karno - Plt./Acting President Director 2. Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking 3. Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking
8.	17 September 2024 September 17, 2024	Agenda Komite Pembiayaan Nasabah Customer Financing Committee Agenda	1. Karno - Plt./Acting President Director 2. Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking 3. Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking 4. Aruddy-Head of EFR

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
9.	24 September 2024 September 24, 2024	Agenda Komite Pembiayaan Nasabah Customer Financing Committee Agenda	1. Karno - Plt./Acting President Director 2. Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking 3. Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking 4. Aruddy-Head of EFR
10.	3 Oktober 2024 October 3, 2024	Agenda Komite Pembiayaan Nasabah Customer Financing Committee Agenda	1. Karno - Plt./Acting President Director 2. Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking 3. Aruddy-Head of EFR
11.	10 Oktober 2024 October 10, 2024	Agenda Komite Pembiayaan Nasabah Customer Financing Committee Agenda	1. Karno - Plt./Acting President Director 2. Irvan Yulian Noor - SEVP Enterprise Banking 3. Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking 4. Aruddy-Head of EFR
12.	29 Oktober 2024 October 29, 2024	Agenda Komite Pembiayaan Nasabah Customer Financing Committee Agenda	1. Karno - Plt./Acting President Director 2. Dedy Suryadi Dharmawan - Alt. SEVP Enterprise Banking 3. Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking - 4. Aruddy-Head of EFR
13.	14 November 2024 November 14, 2024	Agenda Komite Pembiayaan Nasabah Customer Financing Committee Agenda	1. Karno - Plt./Acting President Director 2. Dedy Suryadi Dharmawan - Alt. SEVP Enterprise Banking 3. Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking 4. Bambang Rudi Haryanto - Alt. Head of EFR-
14.	24 Desember 2024 December 24, 2024	Agenda Komite Pembiayaan Nasabah Customer Financing Committee Agenda	1. Karno - Plt./Acting President Director 2. Dedy Suryadi Dharmawan - Alt. SEVP Enterprise Banking 3. Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking 4. Bambang Rudi Haryanto - Alt. Head of EFR

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.

KOMITE PEMBIAYAAN SAM

SAM Financing Committee

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
1.	9 Agustus 2024 August 9, 2024	Pembahasan Restrukturisasi Nasabah Customer Restructuring Discussion	1. Karno 2. Irvan Yulian Noor 3. Aruddy 4. Teguh Nugroho 5. Dyah Ekowati 6. Catur Andayani 7. Khusnudhon 8. Tim SAM/ SAM Team
2.	19 September 2024 September 19, 2024	Pembahasan Restrukturisasi Nasabah Customer Restructuring Discussion	1. Karno 2. Irvan Yulian Noor 3. Aruddy 4. Teguh Nugroho 5. Dyah Ekowati 6. Susviarto 7. Khusnudhon 8. Ibnu Umar 9. Tim SAM/ SAM Team
3.	21 Oktober 2024 October 21, 2024	Pembahasan Restrukturisasi Nasabah Customer Restructuring Discussion	1. Karno - Plt./Acting President Director 2. Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking 3. Teguh N 4. Aruddy 5. CPL 6. IRM 7. GLG 8. FOP



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
4.	22 November 2024 November 22, 2024	Pembahasan Restrukturisasi Nasabah Customer Restructuring Discussion	1. Karno - Plt./Acting President Director 2. Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking 3. Teguh N 4. Aruddy 5. CPL 6. IRM 7. CLG 8. FOP
5.	10 Desember 2024 December 10, 2024	Pembahasan Restrukturisasi Nasabah Customer Restructuring Discussion	1. Karno - Plt./Acting President Director 2. Dedy Suryadi Dharmawan - SEVP Retail Banking 3. Teguh N 4. Aruddy 5. CPL 6. IRM 7. CLG 8. FOP

^{*)} Telah berhenti menjabat sesuai keputusan RUPSLB tanggal 11 Desember 2024.
Has stopped serving in accordance with the resolution of the EGMS dated December 11, 2024.

KOMITE PEMBIAYAAN RCM

RCM Financing Committee

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
1.	9 Agustus 2024 August 9, 2024	Komite <i>Badbank</i> Badbank Committee	1. Bapak Karno, <i>Plt. President Director</i> 2. Bapak Dedy Suryadi Dharmawan, <i>SEVP Retail Banking</i> 3. Bapak Bambang Rudi Hariyanto, <i>Head of Retail Financing Risk</i> 4. Bapak Dicky Zakiudin, <i>Head of Retail Collection Management</i> 5. Bapak Yudha Surya Nugraha, <i>Head of Tele Calling & Retail Network Collection</i> 1. Mr. Karno, Acting President Director 2. Mr. Dedy Suryadi Dharmawan, SEVP Retail Banking 3. Mr. Bambang Rudi Hariyanto, Head of Retail Financing Risk 4. Mr. Dicky Zakiudin, Head of Retail Collection Management 5. Mr. Yudha Surya Nugraha, Head of Tele Calling & Retail Network Collection

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

DASAR HUKUM

Dasar hukum pembentukan Sekretaris Perusahaan ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep00001/BEI/01-2014 perihal Perubahan Peraturan No. I-A: tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat serta Surat Keputusan No. 010/HCE/KEP/XII/2018 dan efektif sejak tanggal 14 Desember 2018

LEGAL BASIS

The legal basis for the establishment of the Corporate Secretary is the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 35/POJK.04/2014 concerning the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies, Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep00001/BEI/01-2014 regarding Amendments to Regulation No. I-A: concerning the Listing of Shares and Equity Securities Other than Shares Issued by Listed Companies as well as Decree No. 010/HCE/KEP/XII/2018 and effective since December 14, 2018.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY PROFILE



Hayunaji
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Usia Age	53 tahun pada akhir Tahun Buku 2024	53 years as of Financial Year 2024
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan No. 010/HCE/KEP/XII/2018 dan efektif sejak tanggal 14 Desember 2018	Decree No. 010/HCE/KEP/XII/2018 effective since December 14, 2018
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (1996)	Bachelor in Economics, Faculty of Economics University of Indonesia, 1996
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan	Does not have concurrent positions



Pengalaman Kerja Work Experience	• Head of Corporate Affairs PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Desember 2018-sekarang) • Vice President, Board Office Head PT Bank CIMB Niaga Tbk (April 2015-Desember 2018) • Vice President, CEO Office Head PT Bank CIMB Niaga Tbk (Januari 2015-April 2015) • Vice President, Strategy & Performance Management Head PT Bank CIMB Niaga Tbk (Maret 2014-Januari 2015) • Vice President, Investor Relations & Reporting Head PT Bank CIMB Niaga Tbk (September 2006-Maret 2014) • Senior Manager, Investor Relations Development PT Bank Permata Tbk (Januari 2003-Agustus 2006) • Change Management, Merger Integration Office, 5 Banks Merger (Indonesian Bank Restructuring Agency and Accenture) (September 2002-Januari 2003) • Senior Assistant Manager, Investor Relations Development PT Bank Universal Tbk (Desember 1999-Agustus 2002) • Assistant Manager, Priority Banking PT Bank Duta Tbk (Maret 1998-Desember 1999)	• Head of Corporate Affairs PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (December 2018-Present) • Vice President, Board Office Head PT Bank CIMB Niaga Tbk (April 2015-December 2018) • Vice President, CEO Office Head PT Bank CIMB Niaga Tbk (January 2015-April 2015) • Vice President, Strategy & Performance Management Head PT Bank CIMB Niaga Tbk (March 2014-January 2015) • Vice President, Investor Relations & Reporting Head PT Bank CIMB Niaga Tbk (September 2006-March 2014) • Senior Manager, Investor Relations Development PT Bank Permata Tbk (January 2003-August 2006) • Change Management, Merger Integration Office, 5 Banks Merger (Indonesian Bank Restructuring Agency and Accenture) (September 2002-January 2003) • Senior Assistant Manager, Investor Relations Development PT Bank Universal Tbk (December 1999-August 2002) • Assistant Manager, Priority Banking PT Bank Duta Tbk (March 1998-December 1999)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali	Has no affiliation, either in terms of financial or kinship, with members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Major Shareholders or Controlling Shareholders

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan strategi humas (*public relations/investor relations*) untuk meningkatkan citra positif dan reputasi Bank.
2. Mengelola kegiatan dan kebutuhan dinas Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.
3. Melakukan koordinasi dengan Divisi Keuangan (Financial Control) dalam penatausahaan pembagian Dividen dan pembuatan laporan keuangan secara periodik serta laporan atas setiap perubahan modal kepada regulator.
4. Mewakili Direksi dalam hubungannya dengan lembaga/institusi baik pemerintah maupun swasta.
5. Bekerja sama dengan Divisi Kepatuhan memantau kepatuhan Bank Muamalat Indonesia terhadap ketentuan dan peraturan tentang perbankan.
6. Memastikan penerapan dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank Muamalat Indonesia.
7. Menyusun daftar pemegang saham termasuk kepemilikan saham 5% atau lebih.
8. Mengawasi berbagai kegiatan kesekretariatan korporasi dan protokoler, dan korespondensi, yang terkait dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
9. Mengimplementasikan dan mengawasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan aksi korporasi, GCG, dan kepatuhan terhadap peraturan pasar modal.
10. Menggelar RUPS Tahunan, RUPS Luar Biasa dan Aksi Korporasi, bekerjasama unit kerja terkait dan lembaga profesi dan penunjang pasar modal.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary of Bank Muamalat has the following duties and responsibilities:

1. Prepare and implement public relations (investor relations) strategies to improve the Bank's positive image and reputation.
2. Manage the activities and needs of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board.
3. Coordinate with the Finance Division (Financial Control) in administering Dividend distribution and preparing periodic financial statements as well as reports on any changes in capital to regulators.
4. Represent the Board of Directors in its relations with government and private institutions.
5. Cooperate with the Compliance Division to monitor Bank Muamalat Indonesia's compliance with banking provisions and regulations.
6. Ensure the application and implementation of *Good Corporate Governance* (GCG) at Bank Muamalat Indonesia.
7. Prepare a list of shareholders, including those with 5% or more share ownership.
8. Supervise various corporate secretarial and protocol activities and correspondence related to the Board of Directors and Board of Commissioners.
9. Implement and supervise regulations related to corporate actions, GCG, and compliance with capital market regulations.
10. Hold Annual GMS, Extraordinary GMS, and Corporate Actions in collaboration with related work units and professional institutions and capital market supporters.

11. Berkoordinasi dengan unit kerja internal terkait dan pihak eksternal dalam upaya melancarkan kegiatan korporasi dan meningkatkan efektivitas tata kerja yang terkait dengan kegiatan Direksi dan Dewan Komisaris.
12. Mengkoordinasikan/memonitor kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyampaian informasi korporasi serta pelaksanaan rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
13. Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas setiap informasi yang dibutuhkan terkait dengan kondisi Bank Muamalat.
14. Menjadi penghubung atau *contact person* antara Bank dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, otoritas pasar modal lainnya, dan masyarakat.
15. Melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan prinsip keterbukaan terutama menyangkut kinerja Bank melalui komunikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
16. Mengelola dan mengadministrasikan dokumen perusahaan.

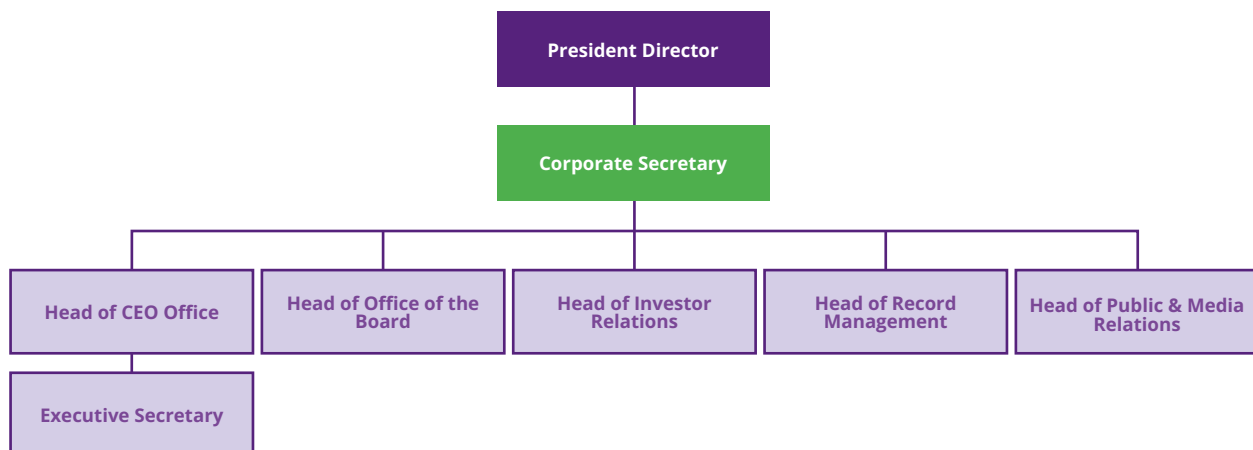
11. Coordinate with related internal work units and external parties in an effort to facilitate corporate activities and improve the effectiveness of work procedures related to the activities of the Board of Directors and Board of Commissioners.
12. Coordinate/monitor activities related to the receipt and delivery of corporate information and the implementation of meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners.
13. Provide services to stakeholders for any information needed related to the condition of Bank Muamalat.
14. Become a liaison or contact person between the Bank and the Financial Services Authority, the Indonesia Stock Exchange, other capital market authorities, and the public.
15. Carry out activities that support the implementation of the principle of transparency, especially concerning the Bank's performance through communication to interested parties.
16. Manage and administer company documents.

STRUKTUR PERUSAHAAN

ORGANISASI

SEKRETARIS

Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat Indonesia membawahi beberapa unit kerja yang dijelaskan dalam bagan berikut ini.



CORPORATE SECRETARY ORGANIZATIONAL STRUCTURE

The Corporate Secretary of Bank Muamalat Indonesia oversees several work units as described in the following chart.

PELAKSANAAN TUGAS 2024

Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat bersama seluruh unit kerja di bawahnya telah merealisasikan tugas dan fungsinya. Di antaranya adalah:

IMPLEMENTATION OF DUTIES IN 2024

Throughout 2024, the Corporate Secretary of Bank Muamalat, together with all work units under it, has realized their duties and functions. Among them are:



1. Menyelenggarakan dan menghadiri pelaksanaan Rapat Direksi serta membuat risalah hasil Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris serta Direksi. Secara keseluruhan telah dilaksanakan 56 Rapat sepanjang tahun 2024.
2. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa) yang telah diselenggarakan secara fisik, masing-masing pada tanggal 27 Juni 2024 dan 11 Desember 2024 di Ballroom BJ Habibie, Muamalat Tower, Jakarta.
3. Melaksanakan penyampaian pelaporan yang menjadi kewajiban Bank sebagai perusahaan terbuka kepada regulator perbankan dan pasar modal (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas terkait lainnya) secara tepat waktu sesuai ketentuan diantaranya penyampaian laporan keuangan, risalah RUPS, perubahan Anggaran Dasar, perubahan Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris, dan lainnya. Secara keseluruhan terdapat 64 laporan yang disampaikan sepanjang tahun 2024.
4. Menyusun Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) serta memastikan seluruh informasi yang disampaikan adalah akurat dan *disclosure* informasi terpenuhi dan penyampaian kepada regulator sesuai ketentuan. Kedua laporan tersebut disampaikan kepada regulator dan dipublikasikan pada situs *web* Bank Muamalat pada tanggal 30 April 2024. Melakukan kewajiban publikasi Bank dalam bentuk materi keterbukaan informasi melalui situs *web* Bank dan/atau media cetak sesuai ketentuan. Secara keseluruhan terdapat 25 publikasi yang dilakukan sepanjang tahun 2024, termasuk publikasi laporan keuangan, risalah RUPS, dan lainnya,
5. Melakukan penatausahaan Daftar Pemegang Saham Bank Muamalat bekerjasama dengan Biro Administrasi Efek, serta melayani permintaan pemegang saham dalam pembayaran dividen, pengalihan hak atas saham, pengkinian sertifikat saham, dan lainnya.
6. Menerbitkan siaran pers, memberikan hak jawab, dan berkomunikasi dengan para wartawan media cetak dan elektronik. Secara keseluruhan terdapat 92 siaran pers dan 5.944 artikel / berita yang dipublikasikan pada situs *web* BMI dan didistribusikan kepada media.
7. Melakukan *training* dan *sharing knowledge* dengan materi dan regulasi terkait pasar modal dan tugas terkait kesekretariatan
8. Melakukan pengaturan protokoler untuk mendampingi dan memenuhi kebutuhan dari Direksi dan Dewan Komisaris.
9. Mengelola penyimpanan dokumen aktif dan inaktif Perusahaan.
10. Berkoordinasi dengan unit kerja lain dalam melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR).
1. Organizing and attending the implementation of the Board of Directors Meeting and preparing minutes of the results of the Board of Directors Meeting, Board of Commissioners Meeting, and Joint Meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors. Overall, 56 meetings have been held throughout 2024.
2. Organizing the Annual GMS and other GMS (Extraordinary GMS), which have been held physically, respectively, on June 27, 2024, and December 11, 2024, at the BJ Habibie Ballroom, Muamalat Tower, Jakarta.
3. Carrying out the submission of reports that are the Bank's obligations as a public company to banking and capital market regulators (Financial Services Authority, Bank Indonesia, and other relevant authorities) in a timely manner according to the provisions, including submission of financial statements, minutes of GMS, changes to the Articles of Association, changes to Committees under the Board of Commissioners, and others. In total, there were 64 reports submitted throughout 2024.
4. Prepare the Annual Report and Sustainability Report and ensure that all information submitted is accurate and that disclosure of information is fulfilled and submission to regulators is in accordance with the provisions. Both reports were submitted to regulators and published on the Bank Muamalat website on April 30, 2024. Carry out the Bank's publication obligations in the form of information disclosure materials through the Bank's website and/or print media in accordance with the provisions. Overall, there were 25 publications made throughout 2024, including the publication of financial statements, minutes of the GMS, and others.
5. Administer the Bank Muamalat Shareholders Register in collaboration with the Securities Administration Bureau, and serve shareholder requests for dividend payments, transfer of share rights, updating share certificates, and others.
6. Publish press releases, provide the right of respond, and communicate with print and electronic media journalists. Overall, there were 92 press releases and 5,944 articles/news published on the BMI website and distributed to the media.
7. Conduct training and knowledge sharing with materials and regulations related to capital markets and secretarial tasks.
8. Arrange protocols to assist and meet the needs of the Board of Directors and Board of Commissioners.
9. Manage the storage of active and inactive Company documents.
10. Coordinate with other work units in carrying out Corporate Social Responsibility (CSR) activities.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bank senantiasa mendorong Sekretaris Perusahaan untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan pada tahun 2024. Informasi lengkap mengenai hal ini disampaikan dalam tabel di bawah ini.

COMPETENCY DEVELOPMENT

The Bank continues to encourage Corporate Secretaries to develop their competencies through training in 2024. Complete information regarding this is presented in the table below.

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan Type of Training	Waktu dan Tempat Penyelenggara Time and Place of Event	Penyelenggara Organizer
Hayunaji	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Regulatory Framework; Carbon Trading Compliance for Listed Companies	16 Februari 2024 February 16, 2024	ICSA
		Strategi Pengembangan SJK melalui Penguatan Perbankan Syariah dan Market Conduct SJK Development Strategy through Strengthening Sharia Banking and Market Conduct	13 Maret 2024 March 13, 2024	OJK Institute
		Strategi Mengakselerasi Pangsa Pasar Keuangan Syariah Strategy to Accelerate Sharia Financial Market Share	21 Maret 2024 March 21, 2024	OJK Institute
		Peran Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dalam Mendorong Transisi Energi Menuju Net Zero Emission Indonesia The Role of Taxonomy for Indonesian Sustainable Finance (TKBI) in Driving Energy Transition Towards Net Zero Emission Indonesia	4 April 2024 April 4, 2024	SWA
		The Importance of Government Relations In Organization	2 Mei 2024 May 2, 2024	ICSA
		Annual Report Awards: Setting Standard for Corporate Disclosure	19 Juni 2024 June 19, 2024	ICSA
		Strategi Implementasi Market Conduct: Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Kinerja Industri Jasa Keuangan Market Conduct Implementation Strategy: Building Trust and Improving Financial Services Industry Performance	8 Agustus 2024 August 8, 2024	OJK Institute
		Membangun Kepemimpinan Berbasis Spiritual: Pendekatan Holistik untuk Pertumbuhan dan Keberlanjutan Bisnis Building Spiritual-Based Leadership: A Holistic Approach to Business Growth and Sustainability	22 Agustus 2024 August 22, 2024	OJK Institute
		How to Prevent Money Laundering and Terrorism Financing	5 September 2024 September 5, 2024	OJK Institute
		The Future of Data Analytics in The Financial Industry: Trends and Innovations	12 September 2024 September 12, 2024	OJK Institute
		Program Pemeliharaan 8 UK Skema Sertifikasi Kualifikasi Jenjang 5 Bidang Manajemen risiko Perbankan Maintenance Program of 8 UK Level 5 Qualification Certification Scheme in Banking Risk Management Field	6-7 November 2024 November 6-7, 2024	Muamalat Institute
		Pendalaman POJK No. 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka In depth of POJK No. 15/POJK.04/2022 concerning Stock Splits and Share Mergers by Public Companies	29 November 2024 November 29, 2024	ICSA
		The 2 nd OJK International Research Forum 2024: Driving Financial Innovations to Enhance a Better Financial Life	18 November 2024 November 18, 2024	OJK Institute
		Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko Kualifikasi 5 Bidang Manajemen Risiko Perbankan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi – Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah Risk Management Competency Certificate Qualification 5 of Banking Risk Management Fields, National Professional Certification Agency – Sharia Financial Professional Certification Institute	13 Desember 2024 December 13, 2024	BNSP



Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Internal Audit Work Unit (IAU)

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) adalah unit kerja dalam Bank yang menjalankan fungsi audit intern, yakni suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.

Dalam melaksanakan aktivitas audit, SKAI Bank Muamalat menggunakan pendekatan Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), yaitu melalui analisa risiko berdasarkan kondisi Bank dalam 1 (satu) hingga 3 (tiga) tahun terakhir. Penggunaan penilaian risiko dilakukan untuk menentukan obyek dan frekuensi pemeriksaan khususnya frekuensi pemeriksaan terhadap kantor-kantor cabang Bank Muamalat.

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Menindaklanjuti kewajiban terhadap regulasi OJK, pelaksanaan audit di Bank Muamalat Indonesia telah dilengkapi dengan Piagam Audit Intern yang menjadi dasar pelaksanaan audit Bank yang berisi pernyataan formal dan penegasan atas visi dan misi, struktur dan kedudukan, ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, kualifikasi serta kode etik auditor, independensi dan obyektifitas, pembatasan aktivitas auditor internal, penggunaan jasa pihak ekstern, kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, kebijakan masa tunggu, hubungan audit internal dengan pihak internal/eksternal serta program asurans dan peningkatan kualitas.

Piagam Audit Intern Bank Muamalat senantiasa dilakukan kaji ulang dan diperbaharui secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan regulasi OJK dan International *Professional Practices Framework* (IPPF) 2017. Pemutakhiran terakhir Piagam Audit Intern dilakukan pada bulan November tahun 2023 dan telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris berdasarkan pertimbangan rekomendasi dari Komite Audit.

The Internal Audit Work Unit (IAU) is a work unit within the Bank that performs the internal audit function, which is namely an activity to provide confidence and consultation independently and objectively, with the aim to increase and improve the value of the company's operations, through a systematic approach, by evaluating and improving the effectiveness of risk management, control and corporate governance processes.

In performing audit activities, IAU of Bank Muamalat uses a Risk-Based Audit approach, namely through risk analysis based on the Bank's condition in the last 1 (one) to 3 (three) years. The use of risk assessment is carried out to determine the object and frequency of inspection, especially the frequency of inspection on Bank Muamalat branch offices.

THE INTERNAL AUDIT CHARTER

Following up on the obligations towards OJK regulations, the audit implementation at Bank Muamalat Indonesia is equipped with an Internal Audit Charter which is the foundation to carry out the Bank audits containing formal statements and confirmation of vision and mission, structure and position, scope, duties and responsibilities, authorities, qualifications as well as the auditor's code of ethics, independency and objectivity, restrictions on internal auditor activities, use of external party services, reporting obligations to the Financial Services Authority, waiting period policy, internal audit relationship with internal/external parties as well as quality assurance and improvement programs.

The Bank Muamalat Internal Audit Charter is constantly reviewed and updated periodically to keep its compliance to OJK regulations and the 2017 International Professional Practices Framework (IPPF). The latest update of the Internal Audit Charter was carried out in November 2023 and was approved by the President Director and Board of Commissioners based on the consideration of recommendations from the Audit Committee.

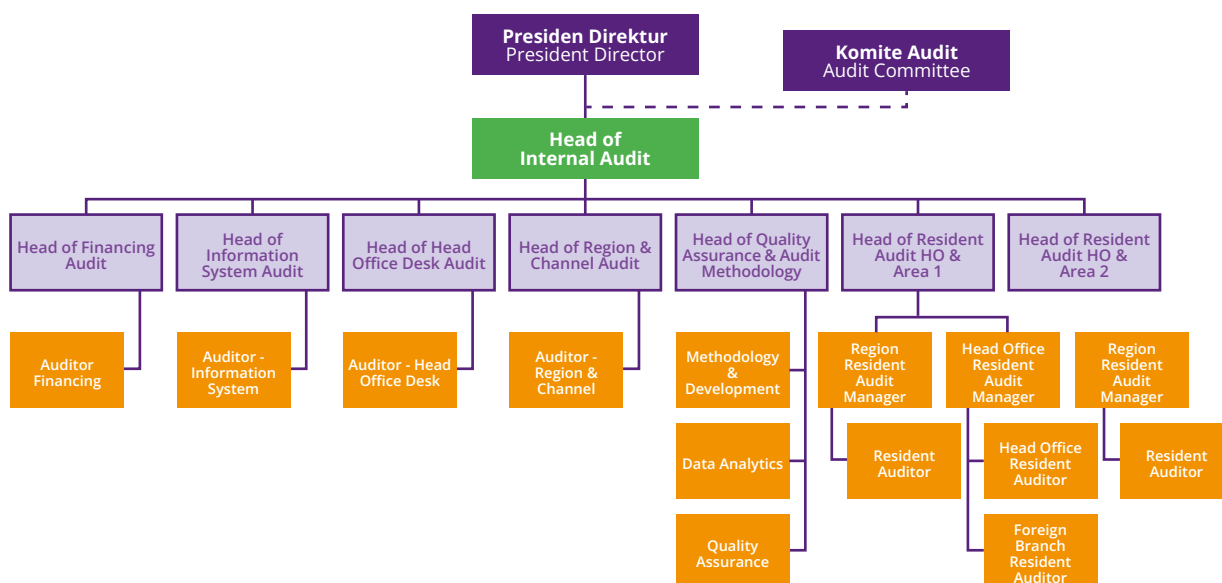
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SKAI

Merujuk kepada Peraturan OJK No. 01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, Kepala SKAI Bank Muamalat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit. Berdasarkan SK Direksi No. 0336/HSE/KEP/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 dan Persetujuan Dewan Komisaris yang tertuang dalam Surat No. 016/R/BOC-SRT/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, terhitung efektif sejak tanggal 1 September 2023, Tegar Sangga Barkah menjabat sebagai Kepala SKAI Bank Muamalat dan pengangkatannya telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan surat Bank Muamalat No. 202/B/PRD-SRT/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal Laporan Penggantian Head of internal Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

STRUKTUR ORGANISASI SKAI

Untuk mencapai tingkat independensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tanggung jawab aktivitas audit internal, Kepala Audit Internal secara fungsional bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Namun dalam melaksanakan tanggung jawab pada level organisasi, Kepala Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Berdasarkan keputusan Manajemen per tanggal 1 November 2023, terdapat perubahan Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern dimana dilakukan penggabungan fungsi *Operation Control* ke dalam fungsi Audit Intern sehingga struktur organisasi SKAI ditetapkan sebagai berikut:



THE APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE HEAD OF IAU

Referring to OJK Regulation No. 01/POJK.03/2019 regarding the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks, the Head of IAU of Bank Muamalat is appointed and dismissed by the President Director after receiving the approval from the Board of Commissioners based on consideration of the recommendations from the Audit Committee. Based on the Board of Directors Decree No. 0336/HSE/KEP/VIII/2023 dated 29 August 2023 and approval from the Board of Commissioners as stated in Letter No. 016/R/BOC-SRT/VII/2023 dated 18 July 2023, effective as of 1 September 2023, Tegar Sangga Barkah served as Head of SKAI of Bank Muamalat and his appointment was reported to OJK based on Bank Muamalat letter No. 202/B/PRD-SRT/VIII/2023 dated 31 August 2023 concerning Report on the Replacement of Head of the Internal Audit of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

THE IAU ORGANIZATIONAL STRUCTURE

To reach the level of independence required in carrying out the responsibilities of the internal audit activities, the Head of Internal Audit is functionally responsible to the Board of Commissioners through the Audit Committee. However, in carrying out responsibilities at the organizational level, the Head of Internal Audit is directly responsible to the President Director.

Based on Management's decision as of 1 November 2023, there was a change in the Organizational Structure of the Internal Audit Work Unit where the Operation Control function was merged into the Internal Audit function so that the IAU organizational structure was set out as follows:



JUMLAH PEGAWAI DAN SERTIFIKASI PROFESI

Jumlah anggota SKAI pada posisi 31 Desember 2024 berjumlah 99 orang. Berbagai kompetensi dan sertifikasi yang dimiliki Auditor SKAI Bank Muamalat Indonesia yaitu sertifikasi auditor perbankan, sertifikasi manajemen risiko dan sertifikasi kompetensi profesional lainnya seperti seperti Certified Fraud Investigator Professional, Certified Bank Internal Audit, Internal Audit Practitioner, Certified IT Auditor Professional, Certified Information System Auditor dan Certified Forensic Auditor.

KUALIFIKASI SERTIFIKASI

CERTIFICATION QUALIFICATION

No.	Sertifikasi Certification	Jumlah Pemilik Number of Owners
1	Audit Intern Bank Bank Internal Audit	11 orang 11 people
2	Internal Audit Practioner	1 orang 1 person
3	Asesor Kompetensi Competency Assessor	1 orang 1 person
4	Certified Forensic Auditor	1 orang 1 person
5	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Certification Level 7	1 orang 1 person
6	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Risk Management Certification Level 6	2 orang 2 people
7	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Risk Management Certification Level 5	31 orang 31 people
8	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Certification Level 4	1 orang 1 person
9	Sertifikasi Audit Teknologi Informasi dan pendukung a. Certified Information Technology Auditor Professional b. Certified Information System Auditor c. Cobit 5 d. IT-IL IT Service Management Information Technology Audit Certification and Support a. Certified Information Technology Auditor Professional b. Certified Information System Auditor c. Cobit 5 d. IT-IL IT Service Management	1 orang - 1 person 1 orang - 1 person 1 orang - 1 person 1 orang - 1 person
10	Certified Fraud Investigator Professional	1 orang 1 person

NUMBER OF EMPLOYEES AND PROFESSIONAL CERTIFICATIONS

The number of SKAI members as of December 31, 2024, is 99 people. Various competencies and certifications held by SKAI Auditors of Bank Muamalat Indonesia are banking auditor certification, risk management certification, and other professional competency certifications such as Certified Fraud Investigator Professional, Certified Bank Internal Auditor, Internal Audit Practitioner, Certified IT Auditor Professional, Certified Information System Auditor, and Certified Forensic Auditor.

PROFIL KEPALA SKAI

PROFILE OF HEAD OF IAU

 Tegar Sangga Barkah Kepala Satuan Kerja Audit Internal Head of Internal Audit Work Unit		
Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Usia Age	47 tahun pada Tahun Buku 2024	47 years as of Financial Year 2024
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat sebagai Kepala SKAI PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berdasarkan Surat Keputusan No. 0336/HSE/KEP/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023	Appointed as the Head of SKAI of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk based on the Decree No. 0336/HSE/KEP/VIII/2023 dated 29 August 2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Akuntansi	Bachelor (Sarjana) in Accounting
Rangkap Jabatan Concurrent Position	-	-
Pengalaman Kerja Work Experience	- Internal Audit Group Head, PT Bank Jabar Banten Syariah Tbk (Februari 2018-Agustus 2023) - Accounting Group Head, PT Bank Jabar Banten Syariah Tbk (November 2016-Februari 2018) - Audit Committee, PT Bank Jabar Banten Syariah Tbk (November 2015-November 2016) - Risk Management Committee, PT Bank Jabar Banten Syariah Tbk (Mei-November 2015) - Department Head of Accounting Policy, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (April 2011-Agustus 2015) - Department Head of Special Audit, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (Februari 2010-April 2011) - Team Leader of Auditor Investigator, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (Januari 2009-Januari 2010) - Operation Manager, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (Mei 2007-Oktober 2008) - Team Leader of Internal Audit, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (Juli 2003-Mei 2007)	- Internal Audit Group Head, PT Bank Jabar Banten Syariah Tbk (February 2018-August 2023) - Accounting Group Head, PT Bank Jabar Banten Syariah Tbk (Nov 2016-February 2018) - Audit Committee, PT Bank Jabar Banten Syariah Tbk (November 2015-November 2016) - Risk Management Committee, PT Bank Jabar Banten Syariah Tbk (May-November 2015) - Department Head of Accounting Policy, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (April 2011-August 2015) - Department Head of Special Audit, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (February 2010-April 2011) - Team Leader of Auditor Investigator, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (January 2009-January 2010) - Operation Manager, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (May 2007-October 2008) - Team Leader of Internal Audit, PT Bank Syariah Mandiri Tbk (July 2003 – May 2007)
Sertifikasi Certification	- Chartered Accountant from IAI - Internal Audit Practitioner (IAP) from Institute of Internal Auditors IIA - Certified Fraud Investigator Professional (CFIP) - Certified Information Technology Auditor Professional (CITAP) - Sertifikasi Audit Internal Bank - Level 5 certification of risk management from BSMR & LSPP - Management System (ISMS) Audit Course implementation - Manager Certification for 4DX (4 Disciplines of Execution) from FranklinCovey - Signature of 7 Habits for Highly Effective People from FranklinCovey - Certified TS (Targeted Selection) Interviewer	- Chartered Accountant from IAI - Internal Audit Practitioner (IAP) from Institute of Internal Auditors IIA - Certified Fraud Investigator Professional (CFIP) - Certified Information Technology Auditor Professional (CITAP) - Sertifikasi Audit Internal Bank - Level 5 certification of risk management from BSMR & LSPP - Management System (ISMS) Audit Course implementation - Manager Certification for 4DX (4 Disciplines of Execution) from FranklinCovey - Signature of 7 Habits for Highly Effective People from FranklinCovey - Certified TS (Targeted Selection) Interviewer



Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali	Does not have affiliated relationships either in terms of financial or familial relationships with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Main Shareholders or Controlling Shareholders
Kualifikasi Qualification	Pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang hukum dan bisnis.	Independent parties who have expertise in the fields of law and business.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SKAI

Tugas Pokok

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lain melalui audit;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Tanggung Jawab

Kepala SKAI memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern;
2. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan fungsi Internal Audit;
3. Memastikan seluruh karyawan unit kerja Internal Audit mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank sesuai Standar Profesi Audit Intern;
4. Menyusun dan mengkaji Piagam Audit Intern secara periodik;
5. Menyusun rencana audit tahunan untuk pelaksanaan fungsi audit intern;
6. Memastikan pelaksanaan rencana audit tahunan sesuai dengan rencana audit intern;
7. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat;
8. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan;
9. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan tembuskan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan;
10. Menyampaikan temuan audit terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah;

IAU DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Main Duties

1. Assisting the President Director, and the Board of Commissioners in carrying out supervision by operationally describing the planning, implementation, and monitoring of audit results;
2. Assessing and evaluating the efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities;
3. Identifying all possibilities to improve and increase the efficiency in leveraging resources and funds;
4. Providing improvement suggestions and objective information on activities audited at the entire management level.

Responsibilities

The Head of IAU has the following responsibilities:

1. Ensure that the implementation of the internal audit function is in accordance with the Internal Audit Professional Standards and the Internal Audit Code of Ethics;
2. Select competent human resources according to the needs in implementing the Internal Audit function;
3. Ensure that all employees of the Internal Audit work unit participate in continuous professional development and other training in accordance with developments in the complexity and business activities of the Bank in accordance with the Internal Audit Professional Standards;
4. Prepare and review the Internal Audit Charter periodically;
5. Prepare the annual audit plan for the implementation of the internal audit function;
6. Ensure that the implementation of the annual audit plan is in accordance with the internal audit plan;
7. Report significant findings to the Board of Directors for immediate corrective action;
8. Monitor corrective actions for significant findings;
9. Report results of monitoring follow-up improvements on significant findings to the Board of Directors and the Board of Commissioners with a copy to the Audit Committee and Compliance Director;
10. Submit audit findings related to the implementation of compliance with sharia principles to the Sharia Supervisory Board;

PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024

Hingga posisi 31 Desember 2024, realisasi penugasan audit berdasarkan Rencana Kerja Audit Tahun 2024 sebagai berikut:

- Audit tematik mencapai 107,50% atau sejumlah 43 (empat puluh tiga) penugasan audit dari total 40 (empat puluh) penugasan audit yang direncanakan, Pencapaian melebihi 100% disebabkan adanya tambahan/replacement penugasan audit sejumlah 3 (tiga) penugasan audit.
- Audit Reguler yang dilakukan Resident Audit mencapai 100% (*on schedule*) dengan jumlah audit sebanyak 1.555 penugasan

PELAKSANAAN RAPAT

Kebijakan

Tidak terdapat kebijakan khusus terkait pelaksanaan Rapat SKAI, rapat berkala yang dilakukan unit Internal Audit adalah dengan Komite Audit (sesuai konfirmasi jadwal dari Komite Audit).

FREKUENSI RAPAT

Meeting Frequency

Keterangan Description	Rapat dengan Meeting with		
	Direksi Board of Directors	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Komite Audit Audit Committee
Jumlah Rapat Number of Meetings	0	0	12

RENCANA KERJA AUDIT TAHUN 2025

Rencana Kerja Audit Tahun 2025 disusun melalui pendekatan berbasis risiko yang terdiri beberapa parameter risiko seperti strategi bisnis bank, profil risiko bank, aktivitas kritical di kantor cabang, arahan Manajemen dan pemenuhan permintaan atau kewajiban dari regulator. Parameter tersebut digunakan baik dalam menentukan ruang lingkup audit maupun frekuensi pemeriksaan.

Berdasarkan hasil penilaian risiko maka rencana pemeriksaan audit untuk tahun 2025 terbagi ke dalam beberapa cakupan yaitu:

- Operasional dan Teknologi
- Kepatuhan dan Manajemen Risiko
- Kinerja dan Efisiensi
- Fungsi Pembiayaan

Termasuk menjadi bagian dari Rencana Kerja Audit Tahun 2025 yaitu penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan auditor dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan kompetensi yang dilakukan melalui koordinasi dengan unit kerja yang menangani pelatihan SDM.

IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES IN 2024

As of December 31, 2024, the realization of audit assignments based on the 2024 Audit Work Plan is as follows:

- Thematic audits reached 107.50% or 43 (forty-three) audit assignments out of a total of 40 (forty) planned audit assignments. Achievement exceeding 100% was due to the addition/replacement of 3 (three) audit assignments.
- Regular Audits conducted by Resident Audit reached 100% (*on schedule*) with a total of 1,555 audit assignments.

MEETING IMPLEMENTATION

Policy

There is no specific policy regarding the implementation of SKAI meetings; periodic meetings conducted by the Internal Audit unit are with the Audit Committee (according to the schedule confirmation from the Audit Committee).

AUDIT WORK PLAN FOR 2025

The Audit Work Plan for 2025 is prepared through a risk-based approach consisting of several risk parameters such as the bank's business strategy, bank risk profile, critical activities at branch offices, Management's direction and fulfillment of requests or obligations from regulators. These parameters are used both in determining the scope of the audit and the frequency of the audit.

Based on the results of the risk assessment, the audit examination plan for 2025 is divided into several scopes, namely:

- Operations and Technology
- Compliance and Risk Management
- Performance and Efficiency
- Financing Function

Included as part of the Audit Work Plan for 2025, namely the implementation of auditor training and development in order to improve and maintain competency, which is carried out through coordination with the work unit that handles HR training.



Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Penerapan mekanisme pengendalian di lingkungan Bank Muamalat Indonesia ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan (*on going basis*) untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko agar tetap berada dalam batas toleransi (*risk appetite*) serta memberikan keyakinan yang memadai dalam rangka pencapaian tujuan kegiatan usaha Bank. Penerapan pengendalian berpedoman pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Bank Muamalat has implemented a control mechanism established by management on an ongoing basis to identify and manage risks to remain within the risk appetite and to provide adequate assurance in order to achieve the objectives of the Bank's business activities. The control is guided by Financial Services Authority Circular No. 35/SEOJK.03/2017 concerning Standard Guidelines on Internal Control Systems for Commercial Banks.

TUJUAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Penerapan sistem pengendalian internal di Bank Muamalat bertujuan untuk memastikan:

1. Kepatuhan terhadap ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan.
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu.
3. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha Bank.
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh.

PURPOSE OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM IMPLEMENTATION

The implementation of the internal control system at Bank Muamalat is intended to ensure the following:

1. Compliance with internal provisions and laws and regulations.
2. Availability of complete, accurate, appropriate and timely financial and management information.
3. Effectiveness and efficiency in the Bank's business activities.
4. Improvement in the effectiveness of risk culture in the Bank's organization as a whole.

KERANGKA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Penerapan Sistem Pengendalian Intern menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat di dalam organisasi Bank Muamalat, antara lain:

1. Dewan Komisaris
2. Dewan Pengawas Syariah
3. Komite Audit
4. Direksi
5. Kepala Unit Kerja dan Pegawai terkait
6. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan unit kerja kepatuhan
7. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

INTERNAL CONTROL SYSTEM FRAMEWORK

The Implementation of the Internal Control System is the responsibility of all parties involved in Bank Muamalat organization, including the following:

1. Board of Commissioners
2. Sharia Supervisory Board
3. Audit Committee
4. Board of Directors
5. Head of Work Units and related Employees
6. Risk Management Work Unit (SKMR) and Compliance Work Unit
7. Internal Audit Work Unit (IAU)

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Bank Muamalat meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
2. *Objective Setting*
3. *Event Identification*
4. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)
5. *Risk Response*
6. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)
7. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*)
8. Aktivitas Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Kesesuaian dengan *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)*.

Komponen Pengendalian Internal Bank Muamalat yang sejalan dengan COSO *Internal Control Integrated Framework*:

1. Lingkungan Pengendalian

Merupakan dasar dari semua komponen pengendalian internal mencakup pembentukan dan pemeliharaan sistem pengendalian internal yang efektif serta kegiatan untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan andal sesuai dengan tujuan.

Direksi menciptakan sistem pengendalian internal, antara lain melalui penetapan kebijakan pengendalian intern dan prosedur operasional. Dewan Komisaris melalui komite di bawah koordinasinya antara lain Komite Audit melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal.

2. Penilaian Risiko

Merupakan suatu rangkaian tindakan yang dimulai dari identifikasi, analisis dan pengukuran risiko Bank untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Penilaian risiko dilakukan terhadap seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap proses/aktivitas yang berpotensi merugikan Bank. Pelaksanaan identifikasi dan penilaian risiko, antara lain melalui penetapan kebijakan manajemen risiko dan pembentukan SKMR yang bertujuan untuk meyakinkan Bank Muamalat melakukan mitigasi risiko dengan benar melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan risiko sesuai kerangka kerja manajemen risiko, serta mampu menghadapi situasi darurat yang mengancam kelangsungan usaha Bank.

IMPLEMENTATION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

Implementation of Bank Muamalat's Internal Control System covers the following:

1. Control Environment
2. Objective Setting
3. Event Identification
4. Risk Assessment
5. Risk Response
6. Control Activities
7. Accountancy, Information and Communication
8. Monitoring Activities

Compliance with The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

Bank Muamalat's Internal Control Components are in line with the COSO *Internal Control Integrated Framework*:

1. Environmental Control

The basis of overall internal control components includes establishing and maintaining effective internal control systems and activities to ensure that the system operates safely and reliably following the objectives.

The Board of Directors established the Internal Control System, including the internal control policy and operational procedures. The Board of Commissioners, through committees under their coordination, including the Audit Committee, assessed the adequacy of internal control.

2. Risk Assessment

Risk assessment is a set of actions starting from identifying, analyzing and measuring the Bank's risks to achieve the established goals. Risk assessment is carried out on all types of risks associated with each process/activity that has the potential to impact the Bank. Implementation of risk identification and assessment, including the establishment of risk management policy and SKMR aimed at ensuring that Bank Muamalat mitigates risks properly through identification, measurement, monitoring, control, and reporting of risks according to the risk management framework and is able to deal with emergencies that threaten business continuity of the Bank.



3. Aktivitas Pengendalian

Merupakan kegiatan pengendalian yang direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi, serta penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian termasuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi. Bank Muamalat mengembangkan kebijakan dan prosedur operasional sebagai pedoman pelaksanaan kerja pada masing-masing unit kerja. Kebijakan serta prosedur operasional senantiasa dikaji secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan aktivitas pengendalian oleh unit kerja dipantau dan diuji oleh SKMR dan SKAI sebagai unit kerja independen. SKAI menyampaikan hasil audit dan pengujian penerapan aktivitas pengendalian kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi. Pemisahan fungsi diterapkan pada seluruh jenjang organisasi dan kegiatan operasional agar setiap orang di dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

4. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi

Merupakan sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing Penerapan sistem akuntansi, informasi dan komunikasi, antara lain melalui penetapan kebijakan akuntansi yang didukung dengan tersedianya sistem informasi yang dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.

5. Aktivitas Pemantauan

Merupakan kegiatan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, serta proses pelaporan atas kelemahan dalam pengendalian internal dan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan. SKAI memantau secara berkala kecukupan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit oleh unit kerja dan melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi memantau serta memastikan temuan dan rekomendasi dari SKAI, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

3. Control Activities

The activities include the planned and implemented control activities to the identified control risk as well as the establishment of control policy and procedures, including ensuring that the Policy and Procedure consistently adhered to the Bank Muamalat developed operational policy and procedures as guidelines for the work in each work unit. Operational policy and procedures are reviewed periodically based on the applicable regulations. The control is monitored and tested by RMU and IAU as independent work units. IAU reports the audit and testing results of the implementation of control activities to the Board of Commissioners, the Audit Committee, and the Board of Directors. Separation of functions is applied at all organizational levels and operational activities so that every person in their position has no opportunities to commit and hide errors or irregularities in running duties.

4. System of Accounting, Information, and Communication

The system includes an accounting, information, and communication system that can identify issues that may arise and is used as a facility for exchanging information in the context of carrying out duties according to their respective responsibilities. The application of accounting, information, and communication systems, including the establishment of accounting policy supported by the availability of information systems that can report the business activities, financial condition, implementation of risk management, and fulfillment of provisions that support the implementation of the duties of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

5. Monitoring Activities

Continuous monitoring of the overall effectiveness of internal control implementation, reporting the weaknesses in internal control, and the corrective measures taken. IAU periodically monitors the adequacy of the implementation of follow-up audit results by work units and reports the results of follow-up monitoring to the Board of Directors and Board of Commissioners. The Board of Directors monitors and ensures that findings and recommendations from IAU, External Auditors, supervisory results of the Financial Services Authority (FSA), and supervisory results of other authorities are followed up by the relevant work units.

PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERNAL

Berdasarkan kerangka dan komponen pengendalian internal yang disusun, Bank Muamalat melaksanakan pengendalian internal untuk memastikan kecukupan pengendalian keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

A. Pengendalian Keuangan

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang mendukung perkembangan Bank Muamalat Indonesia, Bank menerapkan hal-hal berikut:

1. Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana strategis Bank yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).
2. Penetapan strategi telah mempertimbangkan risiko strategis.
3. Direksi secara aktif melakukan diskusi/memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi strategi bisnis Bank Muamalat.
4. Direksi telah melaksanakan proses pengendalian keuangan guna memantau pencapaian kinerja secara berkala.
5. Direksi telah memastikan seluruh kebijakan dan standar akuntansi diperbaharui secara berkala sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

B. Pengendalian Operasional

Untuk mendukung pengendalian risiko operasional, Bank Muamalat Indonesia telah menerapkan hal-hal berikut:

1. Pemisahan fungsi sehingga tidak menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*).
2. Supervisor berfungsi melakukan pengawasan pelaksanaan pengendalian internal di Kantor Cabang dan Kantor Pusat setiap hari.
3. Pengawasan oleh unit kerja internal kontrol terhadap Kantor Cabang dan Kantor Pusat.
4. SKAI secara independen terhadap *risk taking unit* melakukan pengawasan serta penilaian kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
5. SKMR dan unit kerja kepatuhan yang independen terhadap *risk taking unit*.
6. Unit kerja *Anti Fraud* berperan meningkatkan efektivitas penerapan strategi *anti Fraud*.

IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL

Based on internal control structure and components, Bank Muamalat implements internal control to ensure the adequacy of financial control, operational effectiveness, efficiency, compliance with applicable laws and regulations.

A. Financial Control

To ensure successful implementation of strategic plans that support the development, Bank Muamalat implements the following:

1. The Board of Directors prepared and received approval from the Board of Commissioners on the Bank's strategic plan as outlined in the Bank's Business Plan (BBP).
2. Strategy setting has considered strategic risks.
3. The Board of Directors actively discusses/provides input and monitors internal conditions and the development of external factors that directly or indirectly affected business strategy of Bank Muamalat.
4. The Board of Directors has implemented financial control process to monitor performance achievement on a regular basis.
5. The Board of Directors has ensured that all accounting policy and standards are updated regularly following the rules and regulations.

B. Operational Control

To support operational risk control, Bank Muamalat has implemented the following:

1. Function division to avoid conflict of interests.
2. Supervisor provides supervised implementation of internal controls at Branch Offices and Head Office every day.
3. Supervision by internal control unit to the Branch Office and Head Office.
4. IAU independently supervises the risk taking units and assesses the adequacy and effectiveness of governance, risk management and internal control processes.
5. RMU and compliance unit are independent of the risk taking unit.
6. Anti Fraud work unit takes in role in improving the effectiveness of anti fraud strategy implementation.



C. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Untuk memastikan kepatuhan Bank Muamalat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank Muamalat menerapkan hal-hal berikut:

1. Direksi telah membentuk unit kerja kepatuhan yang independen terhadap risk taking unit dan bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Unit kerja kepatuhan melakukan pemantauan kepatuhan pelaporan kepada BI/OJK/regulator lainnya.

C. Compliance with Applicable Laws and Regulations

To ensure Bank Muamalat compliance with applicable laws and regulations, Bank Muamalat implements the following:

1. The Board of Directors established compliance unit that is independent towards risk taking unit and is in charge of monitoring compliance with applicable laws and regulations.
2. The compliance work unit monitors reporting compliance to BI/FSA/other regulators.

TINJAUAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Direksi bertanggung jawab memastikan atas efektivitas penerapan sistem pengendalian internal untuk mencapai tujuan Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan Dewan Komisaris melalui komite di bawah koordinasinya, antara lain Komite Audit melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh SKAI mencakup kecukupan desain pengendalian intern dan efektifitas implementasinya melalui serangkaian proses identifikasi dan analisa risiko serta pengujian dan evaluasi atas aktivitas operasional bank untuk memberikan hasil penilaian, wawasan, dan pandangan ke depan yang independen, berbasis risiko dan objektif kepada Manajemen Bank dalam hal ini Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

Sebagai dasar bagi Manajemen dalam melakukan evaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian risiko yang berjalan pada lingkungan internal Bank serta untuk memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan komitmen perbaikan atas hasil audit sesuai tingkat risiko yang melekat pada hasil audit, SKAI telah mengimplementasikan internal audit rating yang efektif berlaku mulai pelaporan hasil penugasan audit intern yang diterbitkan tahun 2023.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Board of Directors is responsible for ensuring the effectiveness of the implementation of the internal control system to achieve Bank Muamalat Indonesia's objectives. Meanwhile, the Board of Commissioners, through committees under its coordination, including the Audit Committee, assesses the adequacy of internal control.

The audit conducted by SKAI includes the adequacy of internal control design and the effectiveness of its implementation through a series of risk identification and analysis processes as well as testing and evaluation of the bank's operational activities to provide independent, risk-based, and objective assessment results, insights, and forward-looking views to the Bank's Management in this case the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board.

As basis for Management in evaluating the adequacy and effectiveness of risk control operating in the Bank's internal environment and to pay special attention to fulfilling commitments to improve audit results according to the level of risk inherent in audit results, IAU has implemented an internal audit rating which is effective starting from the reporting of results of internal audit assignments published in 2023.

KAJIAN ULANG (REVIEW) ATAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pelaksanaan kegiatan audit dalam rangka evaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal selama tahun 2024 difokuskan terhadap beberapa ruang lingkup di antaranya:

1. Aktivitas Pembiayaan: Segmen Corporate Banking, Segmen SME & Commercial Banking, Mortgage Business Financing dan Pengelolaan Dokumen Jaminan (*Collateral*) & Dokumen Pembiayaan (*Non Collateral*) dan Nasabah Pembiayaan Bermasalah (*Sampling*);

REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The implementation of audit activities in order to evaluate the adequacy and effectiveness of the internal control system in 2024 is focused on several areas, including:

1. Financing Activities: Corporate Banking Segment, SME & Commercial Banking Segment, Mortgage Business Financing and Collateral Document Management & Financing Documents (Non-Collateral) and Non-Performing Financing Customers (Sampling);

2. Aktivitas Operasional: Operasional Kantor Cabang, Layanan Kantor Cabang, Layanan Prioritas, Layanan Transaksi Teller, Pemasaran Produk dan Layanan, Aset Tetap, Inventaris & Barang Persediaan, Pengembangan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia; Rencana Bisnis Bank; Kinerja Regional Office; Biaya Dana (*Cost of Fund*), Pengelolaan Perpajakan Kantor Cabang, Kerjasama Bank Muamalat & PT POS Indonesia dan *Surprise Cash Count & Stock Opname* Jaminan Fisik Emas;
3. Teknologi/Sistem Informasi: Muamalat Corebanking (MCB) dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Sistem Bank terkait Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Layanan Transfer Valuta Asing/Remittance pada aplikasi Mobile Banking (Muamalat DIN), Ketahanan dan Keamanan Siber dan Pengelolaan Pengembangan Sistem;
4. Anak Perusahaan: Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah Muamalat;
5. Kewajiban Audit dari Regulator: Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Simpanan Berbasis Nasabah (SCV) dan Sistem Informasi Layanan Standar Nasional Open API (SNAP) Bank Indonesia.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal pada Bank Muamalat Indonesia dibangun dengan mengacu pada standar pengendalian internal yang berlaku umum dan sesuai dengan *best practices* di industri. Sistem tersebut dibentuk untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya risiko dalam usaha yang dijalankan oleh Bank.

Terkait sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh BMI, Dewan Komisaris dan Direksi memandang bahwa implementasi sistem pengendalian internal yang dilakukan sepanjang tahun 2024 sudah cukup baik. Kendati demikian, manajemen menilai, hasil evaluasi tersebut tetap menjadi dasar perbaikan dan pengembangan sistem pengendalian internal agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien, serta diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan keberlangsungan usaha Bank.

2. Operational Activities: Branch Office Operations, Branch Office Services, Priority Services, Teller Transaction Services, Product and Service Marketing, Fixed Assets, Inventory & Supplies, Human Resource Development and Training, Bank Business Plan, Regional Office Performance, Cost of Funds, Branch Office Tax Management, Bank Muamalat & PT POS Indonesia Cooperation, and Surprise Cash Count & Stock Opname of Physical Gold Collateral;
3. Information Technology/Systems: Muamalat Corebanking (MCB) and Financial Information Service System (SLIK), Bank System related to Population and Civil Registration (Dukcapil), Foreign Exchange Transfer/Remittance Services on the Mobile Banking application (Muamalat DIN), Cyber Resilience and Security, and System Development Management;
4. Subsidiaries: Muamalat Syariah Financial Institution Pension Fund (DPLK);
5. Audit Obligations from Regulators: Anti-Bribery Management System (SMAP), Customer-Based Deposits (SCV), and Bank Indonesia's National Standard Open API (SNAP) Service Information System.

Statement by the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of Internal Control System

The internal control system at Bank Muamalat was developed with reference to generally accepted internal control standards and in line with industry best practices. The system is formed to control and prevent risks in the business run by the Company.

Regarding the internal control system implemented by the Company, the Board of Commissioners and the Board of Directors consider that the implementation carried out throughout 2023 was fairly good. However, the Bank still uses the evaluation result of the internal control system as a basis for Management to improve and develop the internal control system. Thus, the implementation can run effectively and efficiently and is expected to encourage business growth and sustainability of the Company.



Audit Eksternal

External Audit

Bank Muamalat Indonesia menunjuk Kantor Akuntan Publik sebagai bagian dari penerapan pengawasan independen serta audit terhadap pelaporan Laporan Keuangan Bank. Kantor Akuntan Publik sebagai auditor eksternal berfungsi memastikan pencatatan akuntansi Bank telah disusun sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) dengan opini yang wajar.

Pada tahun 2024, Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Muamalat Indonesia telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (DBSD&A) yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan biaya audit sebesar 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%, biaya operasional lainnya dan diluar OPE dan pencetakan laporan.

Penunjukan KAP tersebut dilakukan melalui persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Juni 2024. Akuntan Publik dan KAP dimaksud telah menyelesaikan tugas secara independen sesuai dengan pedoman standar profesi akuntan publik serta sesuai dengan persyaratan kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan.

Bank Muamalat appointed an external audit as part of independent supervision and audit of the Company's Financial Statement reporting. As part of GCG implementation, the Bank appointed Public Accounting Firm. Public Accounting Firm as an external auditor function to ensure that the Bank's accounting records have been prepared following the provisions of the Statement of Accounting and Financial Standards (SAFS) with a fair opinion.

In 2024, the Consolidated Financial Statements of Bank Muamalat Indonesia have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang, and Ali (DBSD&A), which has been registered with the Financial Services Authority, with an audit fee of Rp 1,300,000,000 (one billion three hundred million rupiah) excluding Value Added Tax (VAT) of 11%, other operational costs, outside OPE, and printing of reports.

The appointment of the KAP was made through approval at the Annual General Meeting of Shareholders on June 27, 2024. The Public Accountant and KAP in question have completed their duties independently in accordance with the guidelines for the public accountant profession standards and in accordance with the work requirements and audit scope that have been determined.

AKUNTAN PUBLIK BANK MUAMALAT INDONESIA TAHUN BUKU 2024

Public Accountant of Bank Muamalat Indonesia for the 2024 Financial Year

Nama Name	Doli Diapary Siregar, CPA
Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan AP Registration Number from the Minister of Finance	AP.0396
Nomor Surat Tanda Terdaftar AP AP Registration Certificate Number	Perbankan Banking STTD.AP-194/PB.122/2018 Perbankan Syariah Islamic Bank STTD.APS-53/PB.122/2018 Pasar Modal Capital Market STTD.AP-314/PM.22/2018
Tahun Penugasan Year of Assignment	2024

Berikut adalah KAP yang telah mengaudit Laporan Keuangan Bank Muamalat dalam 5 (lima) tahun terakhir:

The following are the KAPs that have audited Bank Muamalat's Financial Statements in the last 5 (five) years:

Tahun Pemeriksaan Examination Year	Signing Partner	Kantor Akuntan Publik Public accounting firm	Kantor Akuntan Asing Foreign Accounting Firm	Biaya (Rp) Fee (Rp)
2024	Triyanto, Ak.,M.Si.,CPA	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (DBSD&A)	BKR Internasional	1.300.000.000
2023	Doli Diapary Siregar, CPA	Doli Diapary Siregar, CPA	BKR Internasional	1.100.000.000
2022	Doli Diapary Siregar, CPA	Doli Diapary Siregar, CPA	BKR Internasional	1.250.000.000
2021	Doli Diapary Siregar, CPA	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (DBSD&A)	BKR Internasional	1.100.000.000
2020	Bambang Sulistiyanto, CPA	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (DBSD&A)	BKR Internasional	1.300.000.000

JASA LAIN YANG DIBERIKAN

Tidak terdapat jasa lain yang diberikan, selain audit atas laporan keuangan.

OTHER SERVICES PROVIDED

There were no other services provided, other than the audit on the financial statements.

Sistem Manajemen Risiko

Risk Management System

Penjelasan mengenai Manajemen Risiko disajikan pada Bab Fungsi Penunjang Bisnis pada sub bab Manajemen Risiko.

Description of Risk Management is presented in the Business Support Functions Chapter in the Risk Management sub-chapter.



Satuan Kerja Kepatuhan

Compliance Unit

Bank Muamalat Indonesia membentuk Satuan Kerja Kepatuhan dengan merujuk pada peraturan terkait fungsi kepatuhan yang terkini, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk prinsip syariah.

Berdasarkan tujuannya tersebut, Satuan Kerja Kepatuhan bersama Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, wajib selalu berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Direktur Kepatuhan Bank Muamalat Indonesia telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan telah efektif lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK tanggal 24 Juni 2022. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017:

1. Menyusun strategi untuk mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
4. Memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
5. Meminimalisasi dan menekan risiko kepatuhan Bank.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

The establishment of the Compliance Unit of Bank Muamalat has referred to the latest regulations related to the compliance function, namely Regulations the Financial Services Authority Regulation No. 46/POJK.03/2017 dated 12 July 2017 on the Implementation of Commercial Bank Compliance Functions. The compliance function is a series of preventive actions or measures to ensure that the policies, provisions, systems, and procedures, as well as business activities carried out by the Bank, are in line with the provisions of the Financial Services Authority and the provisions of other laws and regulations, including sharia principles.

Based on these objectives, the Compliance Unit and the Director in charge of the compliance function are required to always coordinate with the Sharia Supervisory Board in implementing the compliance function with sharia principles.

The Compliance Director of Bank Muamalat Indonesia has met the requirements based on applicable laws and regulations and effectively passed the Fit and Proper Test from the FSA dated 24 June 2022. The followings are the duties and responsibilities of the Director in charge of the Compliance Function following the Financial Services Authority Regulation No. 46/POJK.03/2017:

1. Developing a strategy to encourage the creation of the Bank Compliance Culture.
2. Proposing compliance policies or principles to be approved by the Board of Directors.
3. Establishing compliance systems and procedures that are used to formulate internal provisions and guidelines of the Bank.
4. Ensuring that all policies, regulations, systems, procedures, and business activities conducted by the Bank comply with the provisions of the Financial Services Authority and laws and regulations, including sharia principles for sharia commercial banks and sharia business units.
5. Minimizing and depressing the Bank's compliance risk.
6. Taking preventive measures to ensure that policies and/or decisions taken by the Bank's Directors or the head of the branch office domiciled overseas do not deviate from the provisions of the Financial Services Authority and the provisions of laws and regulations.
7. Performing other duties related to the compliance function.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan Bank Muamalat Indonesia yang dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya. Satuan Kerja tersebut memiliki akses langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Bank Muamalat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh regulasi, antara lain persyaratan independensi, menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melaksanakan tugas lainnya di luar fungsi kepatuhan.

In running duties, the Compliance Director is assisted by the Compliance Unit of Bank Muamalat Indonesia, which is established separately and free from other work units' influence. The Compliance Unit has direct access to the Director in charge of the compliance function.

The Head of the Compliance Unit has met the criteria set by the regulations, including the independence requirements, mastering the provisions of the Financial Services Authority (FSA)/ Bank Indonesia and the prevailing laws and regulations, as well as not carrying out other duties outside the compliance function.

PROFIL KEPALA SATUAN KERJA KEPATUHAN

PROFILE OF HEAD OF COMPLIANCE WORK UNIT



Dyah Ekowati
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan
Head of Compliance Work Unit

Warga Negara Nationality	Indonesia	
Domisili Domicile	Jakarta	
Usia Age	53 tahun pada akhir Tahun Buku 2024	53-year-old at the end of Financial Year 2024
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	1. Surat Keputusan Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 053/DIR-KPTS/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Mekanisme Pengaturan Tugas Board of Management dan Pelaksanaan Pemberian Kuasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. 2. Surat Keputusan Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 080/DIR/KPTS/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Mutasi dan Penyempurnaan Penetapan Pejabat Compliance Division Head	
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Pertanian Institut Pertanian Bogor (1996) • Muamalat Officer Development Program (1997) • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4, Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan • Sertifikasi Manajemen Kepatuhan Level 2, Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	



Rangkap Jabatan Concurrent Position	Plt. Direktur Kepatuhan	Acting Director of Compliance
Pengalaman Kerja Work Experience	• Kepala Satuan Kerja Kepatuhan (2009-sekarang) • Compliance & Risk Management Group Head (2009) • Kebijakan dan Produk Pembiayaan Divisi Pembiayaan (2003-2009) • Account Manager Cabang Bumi Serpong Damai (1997-2002)	• Head of Compliance Work Unit (2009-present) • Compliance & Risk Management Group Head (2009) • Financing Policy and Products of Financing Division (2003-2009) • Account Manager of Bumi Serpong Damai Branch (1997-2002)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali.	Does not have any affiliated relationship either in terms of financial or family relationships with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Main Shareholders or Controlling Shareholders.
Kualifikasi Qualification	Pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang hukum dan bisnis.	Independent parties who have expertise in the fields of law and business.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan, yang mencakup:

1. Membantu menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan Bank dalam memenuhi seluruh peraturan internal dan eksternal serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka prinsip kehati-hatian.
2. Membantu memantau dan menjaga kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
3. Menyusun langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi,
4. Mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Memantau dan mengevaluasi secara berkala terhadap perkembangan risiko-risiko kepatuhan dan pengendalian internal untuk kepentingan Bank sesuai dengan perkembangan bisnis.
6. Menilai dan mengevaluasi atas efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan.
7. Mengkaji ulang dan/atau merekomendasikan pemutakhiran dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah.
8. Mengupayakan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The following are the duties and responsibilities of the Compliance Unit:

1. Assisting in determining the necessary measures to ensure the Bank's compliance in fulfilling the overall internal and external regulations as well as other applicable laws and regulations in the context of the prudence principle.
2. Providing assistance in monitoring and maintaining the Bank's business activities to not deviate from the applicable regulations.
3. Formulating steps in order to support the creation of Compliance Culture in the entire Bank business activities at every organizational level
4. Identifying, measuring, monitoring, and controlling Compliance Risk by referring to the Financial Services Authority regulations on the Risk Management Implementation for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
5. Periodically monitoring and evaluating the development of compliance risks and internal control for the Bank's interests based on business development.
6. Assessing and evaluating the effectiveness, adequacy, and conformity of the Bank's policies, regulations, systems, and procedures with the laws and regulations.
7. Reviewing and/or recommending updates and refinement of policies, regulations, systems, and procedures currently applied by the Bank to comply with the provisions of the Financial Services Authority and laws and regulations, including sharia principles.
8. Striving to ensure that the Bank's policies, regulations, systems, and procedures, as well as business activities, are in line with the rules of the Financial Services Authority as well as the laws and regulations.

9. Memastikan Bank telah patuh terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
10. Melakukan sosialisasi hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku kepada seluruh karyawan Bank.
11. Menjalankan peran konsultatif sebagai *strategic business partner* guna pencegahan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan serta peningkatan efektivitas kepatuhan, pengendalian internal dan GCG.
12. Menjalankan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

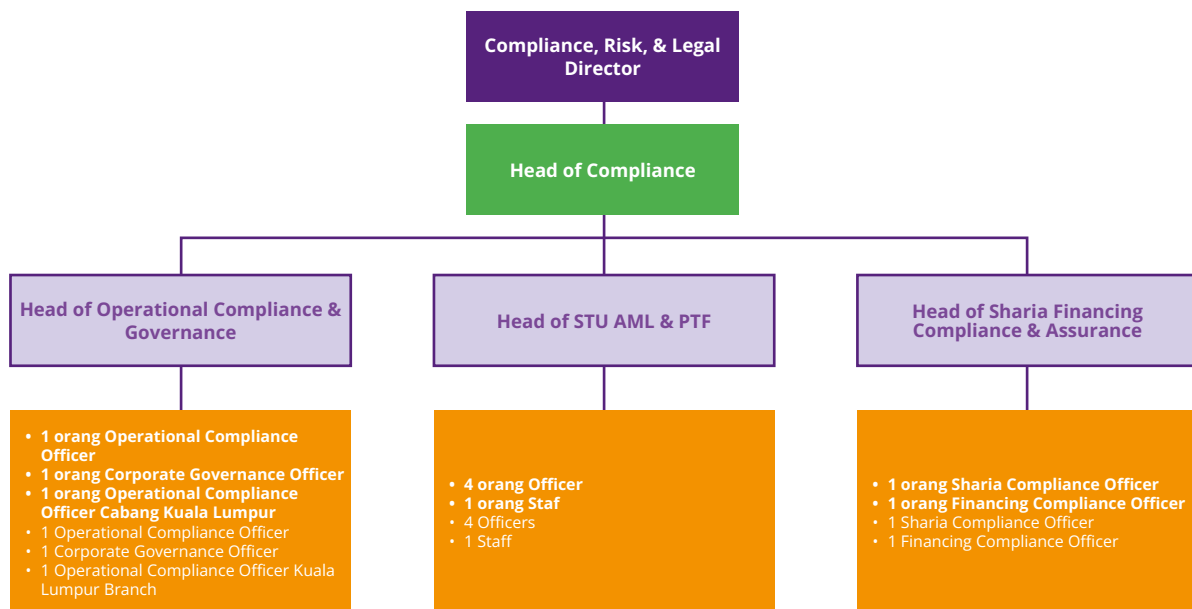
9. Ensuring the Bank has complied with the commitments to the Financial Services Authority and/or other competent supervisory authorities.
10. Disseminating matters related to the Compliance Function, especially regarding the applicable regulations to all Bank employees.
11. Carrying out a consultative role as a strategic business partner for prevention to mitigate compliance risk and providing recommendations for improving and enhancing compliance effectiveness, internal control, and GCG.
12. Carrying out other duties related to the compliance function.

STRUKTUR KEPATUHAN

ORGANISASI

UNIT KERJA

COMPLIANCE WORK UNIT ORGANIZATIONAL STRUCTURE



KUALIFIKASI DAN SERTIFIKASI

Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Kerja Kepatuhan BMI memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Terutama, kompetensi pada bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

QUALIFICATION AND CERTIFICATION

Human Resources (HR) of the BMI Compliance Work Unit have adequate competency and are in accordance with their duties and responsibilities. Especially, competency in areas of Compliance and Risk Management.

PENGELOLAAN DAN MITIGASI RISIKO KEPATUHAN

Bank Muamalat Indonesia sebagai entitas yang bergerak pada industri perbankan sarat dengan pemenuhan peraturan perundang-undangan, sehingga kepatuhan menjadi salah satu risiko penting yang harus diantisipasi oleh Bank. Risiko kepatuhan dapat bersumber antara lain

COMPLIANCE RISK MANAGEMENT AND MITIGATION

Bank Muamalat Indonesia as an entity operating in the banking industry that is full of statutory regulations on compliance that compliance is one of the important risks that must be anticipated by the Bank. Compliance risk can originate from, among others, legal behavior, namely



dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas Bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Bank yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.

Dalam rangka mengantisipasi dan menyikapi pembaharuan dan perubahan peraturan-peraturan tersebut, pihak manajemen dituntut untuk dapat melakukan penyesuaian. Kegagalan dalam melakukan penyesuaian berdampak pada kegiatan usaha dan kinerja Bank. Memperhatikan kondisi tersebut, Bank Muamalat Indonesia senantiasa berupaya untuk memaksimalkan upaya untuk dapat melaksanakan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan baik. Bank juga secara terus menerus melakukan langkah-langkah perbaikan dalam kualitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola yang baik serta memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasional bank.

Dalam menilai risiko kepatuhan, salah satu parameter yang ditetapkan adalah denda yang berasal dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta denda dari otoritas lain (non BI dan OJK). Adapaun untuk upaya mitigasi risiko, Bank Muamalat menyelenggarakan rapat *Risk Management Committee* (RMC) secara berkala untuk membahas pengelolaan risiko kepatuhan dan pembahasannya disajikan dalam Laporan Profil Risiko Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan maupun Laporan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran. Sebagai upaya pengelolaan risiko kepatuhan, sepanjang tahun 2024, Bank telah melakukan mitigasi risiko kepatuhan di antaranya:

1. Membangun compliance awareness melalui *email blast*;
2. Melakukan *sharing information* terhadap semua ketentuan baru kepada Unit Bisnis dan/atau Unit Kerja terkait baik secara tertulis maupun meeting koordinasi.
3. Memberikan opini terhadap kegiatan operasional Bank baik dari aspek kepatuhan umum maupun kepatuhan Syariah sehingga diharapkan kegiatan usaha Bank *comply* dengan regulasi dan prinsip syariah.
4. Melakukan *review* terhadap ketentuan internal baik Kebijakan Umum, Prosedur/Panduan Produk dan Petunjuk Teknis serta Surat Edaran Direksi yang sedang disusun dan/atau dikinikan oleh fungsi terkait.
5. Melakukan *compliance checklist* dan memberikan *support* kepada fungsi terkait dalam rangka pengajuan produk dan aktivitas baru, jaringan kantor termasuk melakukan *follow up* atas pengajuan izin ke OJK/BI agar persetujuan produk dan aktivitas baru serta jaringan kantor segera diterbitkan oleh OJK/BI.
6. Menyampaikan data debitur *group* kepada Unit Kerja terkait secara rutin bulanan sebagai acuan dalam pemberian pembiayaan kepada Nasabah *group*.
7. Menyampaikan laporan kepatuhan kepada Manajemen secara triwulanan.

Bank behavior or activities that deviate or violate statutory provisions and/or regulations and organizational behavior, namely Bank behavior or activities that deviate or conflict with generally accepted standards.

In order to anticipate and respond to updates and changes to these regulations, management is required to make adjustments. Failure to make adjustments causes impact on the Bank's business activities and performance. Taking into consideration to these conditions, Bank Muamalat Indonesia always strives to maximize efforts to be able to implement applicable rules and regulations properly. The Bank also continuously takes steps to improve the quality of risk management, internal control systems and implementation of good governance as well as paying attention to the principle of prudence as well as sharia principles in carrying out bank operational activities.

In assessing compliance risk, one of the determined parameters is the fines from Bank Indonesia and the Financial Services Authority as well as fines from other authorities (non-BI and OJK). As for risk mitigation efforts, Bank Muamalat holds regular Risk Management Committee (RMC) meetings to discuss compliance risk management and the discussion is presented in the Bank Risk Profile Report which is submitted to the Financial Services Authority on a quarterly basis and in the Bank Health/Soundness Level Report on a semi-annual basis. As an effort to manage compliance risk, throughout 2023, the Bank mitigated compliance risk which among others are as follows:

1. Established compliance awareness through e-mail blast.
2. Shared information on all new provisions with the relevant Business Units and/or Work Units, either in writing or at coordination meetings.
3. Provided opinion on the Bank's operational activities both from the aspects of general compliance and Sharia compliance so that it is hoped that the Bank's business activities comply with Sharia regulations and principles.
4. Reviewed internal provisions including General Policies, Procedures/Product Guidelines and Technical Instructions as well as Directors' Circulars being prepared and/or updated by the relevant functions.
5. Carried out compliance checklist and provided support to related functions in the context of submitting new products and activities, office networks including following up on permit applications to OJK/BI so that approval for new products and activities as well as office networks are immediately issued by OJK/BI.
6. Submitted data on group debtors to the relevant Work Unit on a monthly basis as reference in providing financing to group customers.
7. Submitted compliance reports to the Management on a quarterly basis.

Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT & PPPSPM)

Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Prevention of Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (APU, PPT & PPPSPM)

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Bank Muamalat Indonesia senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan terkait Prinsip Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT & PPPSPM). Bank juga telah membentuk Unit Kerja Pelaksana serta menunjuk Pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan program APU, PPT & PPPSPM yakni *Compliance Head*.

Implementasi APU, PPT & PPPSPM pada Bank Muamalat Indonesia mendapat perhatian khusus dan peran aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris. Peran Direksi dan Dewan Komisaris bertujuan untuk memotivasi karyawan dan unit kerja dalam mendorong terbentuknya budaya kepatuhan di seluruh jajaran organisasi.

Bank Muamalat Indonesia telah memiliki beragam program yang sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM Bank dilakukan secara efektif dan efisien mengacu pada Kebijakan Penerapan APU, PPT & PPPSPM yang paling kurang mencakup 5 (lima) pilar yaitu:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
2. Kebijakan dan Prosedur
3. Pengendalian Internal
4. Sistem Informasi Manajemen
5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Bank Muamalat Indonesia juga melakukan *Customer Due Diligence* (CDD) yang sebelumnya dikenal dengan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*). CDD adalah kegiatan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, *walk in customer*, atau pun nasabah. Dengan begitu, diharapkan mampu mencegah dijadikannya Bank Muamalat Indonesia sebagai sarana pencucian uang, pendanaan kegiatan terorisme serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

In carrying out its business activities, Bank Muamalat Indonesia always complies with laws and regulations related to the Principles of Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Prevention of Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (APU, PPT & PPPSPM). The Bank has also formed an Implementing Work Unit and appointed a Bank Official who is responsible for implementing the APU, PPT & PPPSPM program, namely the Compliance Head.

The implementation of APU, PPT & PPPSPM at Bank Muamalat Indonesia receives special attention and an active role from the Board of Directors and Board of Commissioners. The role of the Board of Directors and Board of Commissioners aims to motivate employees and work units in encouraging the formation of a culture of compliance throughout the organization.

Bank Muamalat Indonesia has various programs that are in line with applicable laws and regulations. The implementation of the Bank's APU, PPT & PPPSPM Program is carried out effectively and efficiently, referring to the APU, PPT & PPPSPM Implementation Policy, which includes at least 5 (five) pillars, namely:

1. Active Supervision of the Board of Commissioners and the Board of Directors
2. Policies and Procedures
3. Internal Control
4. Management Information System
5. Human Resources and Training

Bank Muamalat Indonesia also conducts Customer Due Diligence (CDD), which was previously known as the Know Your Customer Principle. CDD is an identification, verification, and monitoring activity carried out by the Bank to ensure that the transaction is in accordance with the profile of prospective customers, walk-in customers, or customers. Accordingly, it is expected to be able to prevent Bank Muamalat Indonesia from being used as a means of money laundering, financing terrorist activities, and financing the proliferation of weapons of mass destruction.



Bank Muamalat Indonesia senantiasa melakukan pengkinian data nasabah. Untuk tahun 2024, target pengkinian data nasabah adalah sebesar 3.786 nasabah yang terdiri dari 3.001 nasabah individu dan 785 nasabah non individu. Progress realisasi pengkinian yang telah dilakukan oleh seluruh Cabang sampai dengan posisi bulan Desember 2024 mencapai 3.786 nasabah (100%). Secara rutin Unit Kerja *Compliance* juga melaporkan hasil *monitoring* terkait APU, PPT & PPPSPM kepada BOD dan BOC sebagai salah satu bentuk pengawasan aktif BOD dan BOC.

Sepanjang 2024, Bank telah melakukan kegiatan terkait penerapan program APU, PPT & PPPSPM antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan implementasi Kebijakan Umum Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
2. Melakukan *sharing* informasi atau *reminder* terkait dengan penerapan Program APU, PPT & PPPSPM kepada seluruh unit kerja terkait.
3. Menyusun dan menyampaikan laporan *Individual Risk Assessment* (IRA) kepada OJK.
4. Menyusun dan menyampaikan laporan (TKM, TKT, TKL, SIPESAT, SIPENDAR, PEDAL dan PUSAKA) serta melakukan kegiatan pengkinian dan pemantauan data nasabah.
5. Melakukan Pemeliharaan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) serta Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
6. Melakukan kegiatan AML *Testing* terhadap UKK Cabang untuk memastikan pemahaman serta implementasi kegiatan APU PPT & PPPSPM di Cabang.
7. Memantau implementasi penggolongan risiko nasabah menggunakan metode *Risk Based Approach* (RBA), indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (*alert* TKM), dan orang/badan usaha yang ditetapkan sebagai Tersangka atau terdakwa kasus korupsi/pencucian uang.
8. Melakukan *review* Kebijakan, Pedoman, Prosedur Pelaksanaan, Produk atau Aktivitas Baru yang terkait dengan penerapan program APU, PPT & PPPSPM.
9. Pemenuhan permintaan data/informasi/dokumen dari pihak eksternal terutama Aparat Penegak Hukum (APGAKUM) atau Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP).
10. Pemenuhan permintaan data/informasi/dokumen dari (PPATK) dalam rangka FIR.
11. Melakukan *review* dan/atau memberikan opini APU, PPT & PPPSPM terkait dengan produk, operasional maupun aktivitas Bank.
12. Menyampaikan proses kegiatan pengkinian data nasabah dengan skala prioritas antara lain untuk nasabah dengan kategori *high risk*, aktif bermutasi dan bersaldo cukup besar.

Bank Muamalat Indonesia always updates customer data. In 2024, the target for updating customer data is 3,786 customers, consisting of 3,001 individual customers and 785 non-individual customers. The progress of the realization of updates that have been carried out by all Branches until the position of December 2024 reached 3,786 customers (100%). The Compliance Work Unit also routinely reports the results of monitoring related to APU, PPT & PPPSPM to the BOD and BOC as a form of active supervision of the BOD and BOC.

Throughout 2024, the Bank has carried out activities related to the implementation of the APU, PPT & PPPSPM programs, including the following:

1. Supervision of the implementation of the General Policy on Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Prevention of Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction.
2. Sharing information or reminders related to the implementation of the APU, PPT & PPPSPM Programs to all related work units.
3. Compiling and submitting Individual Risk Assessment (IRA) reports to the OJK.
4. Compiling and submitting reports (TKM, TKT, TKL, SIPESAT, SIPENDAR, PEDAL, and PUSAKA) and carrying out customer data updating and monitoring activities.
5. Maintaining the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT) and the List of Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction.
6. Conducting AML Testing activities on UKK's Branch to ensure understanding and implementation of APU PPT & PPPSPM activities at the Branch.
7. Monitor the implementation of customer risk classification using the Risk Based Approach (RBA) method, indications of Suspicious Financial Transactions (TKM alerts), and individuals/business entities designated as Suspects or Defendants in corruption/ money laundering cases.
8. Reviewing Policies, Guidelines, Implementation Procedures, New Products, or Activities related to the implementation of the APU, PPT & PPPSPM programs.
9. Fulfilling requests for data/information/documents from external parties, especially Law Enforcement Officers (APGAKUM) or Supervisory and Regulatory Institutions (LPP).
10. Fulfilling requests for data/information/documents from (PPATK) in the context of FIR.
11. Reviewing and/or providing opinions on APU, PPT & PPPSPM related to the Bank's products, operations, and activities.
12. Delivering the process of updating customer data with a priority scale, including for customers in the high-risk category, active mutations, and with a fairly large balance.

13. Pengisian KYC/AML *Questionnaire* yang merupakan bagian dari kegiatan *correspondent banking* guna memastikan penerapan AML/KYC dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
14. Penyampaian Informasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) dan Laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
15. Melakukan *monitoring* CIF dalam rangka memastikan Bank memelihara profil Nasabah secara terpadu (*Single CIF*) untuk mengurangi data-data CIF yang *duplicate*.
16. Pelatihan/sosialisasi/*coaching* terkait penerapan Program APU, PPT & PPPSPM kepada karyawan terkait.
17. Mengikuti pelatihan/*workshop* terkait APU, PPT & PPPSPM dari PPATK, OJK dan FKDKP.
18. Menyelenggarakan program sertifikasi APU, PPT & PPPSPM yang dilaksanakan secara internal bekerja sama dengan *Learning & Talent Management* dalam rangka meningkatkan pemahaman seluruh karyawan terhadap penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT & PPPSPM).
19. Pelaksanaan MHP Survei Kepuasan Pelayanan APU PPT 2024.
13. Completing the KYC/AML *Questionnaire*, which is part of correspondent banking activities, to ensure that the implementation of AML/KYC is carried out in accordance with the provisions.
14. Submission of Information to the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK-RI) and Reports to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK).
15. Conducting CIF monitoring in order to ensure that the Bank maintains an integrated Customer profile (*Single CIF*) to reduce duplicate CIF data.
16. Training/socialization/*coaching* related to the implementation of the APU, PPT & PPPSPM Programs for related employees.
17. Attending training/workshops related to APU, PPT & PPPSPM from PPATK, OJK, and FKDKP.
18. Organizing APU, PPT & PPPSPM certification programs implemented internally in collaboration with *Learning & Talent Management* in order to improve the understanding of all employees regarding the implementation of Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing and Prevention of Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (APU, PPT & PPPSPM).
19. Implementation of MHP APU PPT Service Satisfaction Survey 2024.



Perkara Penting

Important Cases

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DIREKSI

Sebagai perusahaan yang aktif menjalankan aktivitas bisnisnya, Bank Muamalat Indonesia memiliki risiko menghadapi permasalahan hukum, baik di bidang perdata maupun pidana. Hingga akhir 2024, berikut permasalahan hukum Bank Muamalat Indonesia sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

IMPORTANT CASES FACED BY THE COMPANY, SUBSIDIARIES, MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, AND MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

As a company that actively carries out its business activities, Bank Muamalat Indonesia is at risk of facing legal problems, both in the civil and criminal fields. Until the end of 2023, the following are Bank Muamalat Indonesia's legal problems as depicted in the following table:

Tindak Lanjut Tindak Lanjut	Jumlah Total	
	Perdata Civil	Pidana Crime
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Has been completed (has permanent legal force)	54	3
Dalam proses penyelesaian In the process of being completed	88	22

No	Nomor Register Perkara Case Register Number	Nilai Tuntutan (Rp) Lawsuit Value (Rp)	Status Terakhir Last Status	Dampak terhadap Bank Impact on Banks
1	1244/Pdt.G/2023/ PN.Tng	110.000.000.000	Perkara dinyatakan selesai karena Penggugat tidak mengajukan upaya hukum (inkracht) The case was declared closed because the Plaintiff did not file a legal action (inkracht)	Perkara telah dinyatakan selesai dengan putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, sehingga tidak ada lagi tuntutan terhadap Bank. The case has been declared closed with a decision stating that the lawsuit cannot be accepted, so there are no further lawsuit against the Bank.
2	1161/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Sel	110.000.000.000	Perkara masih berjalan, agenda berikutnya 4 Februari 2025 terkait panggilan para pihak Tergugat The case is still ongoing, the next agenda is February 4, 2025 regarding the summons of the Defendant parties	Terdapat tuntutan materiil dan imateriil, yang jika pada putusan tingkat akhir posisi Bank kalah, maka berdampak pada penghukuman Bank untuk membayar total tuntutan sesuai putusan. There are material and immaterial lawsuits, which if in the final decision is not in favor of the Bank's, this will have an impact on the Bank's punishment to pay the total lawsuits according to the decision.
3	2486/Pdt.G/2021/ PA.JB	51.045.989.251	Perkara dinyatakan selesai karena Penggugat tidak mengajukan upaya hukum (inkracht) The case was declared closed because the Plaintiff did not file a legal action (inkracht)	Perkara telah dinyatakan selesai dengan putusan menolak gugatan untuk seluruhnya, sehingga tidak ada lagi tuntutan terhadap Bank. The case has been declared closed with a decision to reject the lawsuit in its entirety, so there are no further lawsuits against the Bank.
4	95/Pdt.G/2023/ PN.Mpw	47.772.500.000	Perkara dinyatakan selesai karena Penggugat tidak mengajukan upaya hukum (inkracht) The case was declared closed because the Plaintiff did not file a legal action (inkracht)	Perkara telah dinyatakan selesai karena dicabut oleh Penggugat, sehingga tidak ada lagi tuntutan terhadap Bank. The case has been declared closed because it was withdrawn by the Plaintiff, so there are no more lawsuits against the Bank.

No	Nomor Register Perkara Case Register Number	Nilai Tuntutan (Rp) Lawsuit Value (Rp)	Status Terakhir Last Status	Dampak terhadap Bank Impact on Banks
5	26/Pdt.G/2024/ PN.Mpw	47.772.500.000	Perkara dinyatakan selesai Penggugat tidak mengajukan upaya hukum (inkracht) The case was declared closed because the Plaintiff did not file a legal action (inkracht)	Perkara telah dinyatakan selesai dengan putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, sehingga tidak ada lagi tuntutan terhadap Bank. The case has been declared closed with a decision stating that the lawsuit cannot be accepted, so there are no further lawsuits against the Bank.
6.	518/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Brt	30.000.000.000	Perkara dinyatakan selesai karena Penggugat tidak mengajukan upaya hukum (inkracht) The case was declared closed because the Plaintiff did not file a legal action (inkracht)	Perkara telah dinyatakan selesai dengan putusan menolak gugatan untuk seluruhnya, sehingga tidak ada lagi tuntutan terhadap Bank. The case has been declared closed with a decision to reject the lawsuit in its entirety, so there are no further lawsuits against the Bank.
7.	519/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Brt	30.000.000.000	Perkara dinyatakan selesai Penggugat tidak mengajukan upaya hukum (inkracht) The case was declared closed because the Plaintiff did not file a legal action (inkracht)	Perkara telah dinyatakan selesai dengan putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, sehingga tidak ada lagi tuntutan terhadap Bank. The case has been declared closed with a decision stating that the lawsuit cannot be accepted, so there are no further lawsuits against the Bank.
8.	1301/Pdt.G/2024/ PA.Wsb	25.500.000.000	Perkara dinyatakan selesai Penggugat tidak mengajukan upaya hukum (inkracht) The case was declared closed because the Plaintiff did not file a legal action (inkracht)	Perkara telah dinyatakan selesai karena dicabut oleh Penggugat, sehingga tidak ada lagi tuntutan terhadap Bank. The case has been declared closed because it was withdrawn by the Plaintiff, so there are no more lawsuits against the Bank.
9.	5917/Pdt.G/2022/ PA.Bdg	22.560.350.000	Perkara dinyatakan selesai Penggugat tidak mengajukan upaya hukum (inkracht) The case was declared closed because the Plaintiff did not file a legal action (inkracht)	Perkara telah dinyatakan selesai dengan putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, sehingga tidak ada lagi tuntutan terhadap Bank. The case has been declared closed with a decision stating that the lawsuit cannot be accepted, so there are no further lawsuits against the Bank.
10.	1016/Pdt.G/2024/ PA.JS	21.507.488.738	Perkara telah diputus di tingkat pertama dengan amar putusan <i>Ne bis in idem</i> , namun Penggugat mengajukan upaya hukum tingkat banding, dan masih dalam proses pemeriksaan tingkat banding. The case has been decided at first instance with a verdict of <i>Ne bis in idem</i> , however the Plaintiff has filed an appeal and is still in the appeal examination process.	Terdapat tuntutan materiil dan imateriil, yang jika pada putusan tingkat akhir posisi Bank kalah, maka berdampak pada penghukuman Bank untuk membayar total tuntutan sesuai putusan. There are material and immaterial lawsuits, which if at the final instance decision is not in favor of the Bank's, this will have an impact on the Bank's punishment to pay the total lawsuits according to the decision.

Sanksi Administratif

Administrative Sanction

Hingga berakhirnya tahun buku 2024, baik Bank Muamalat Indonesia, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Komisaris, dan Direksi tidak mendapatkan sanksi administratif dari regulator yang berdampak signifikan kepada kegiatan bisnis dan operasional Bank.

As of the end of the 2024 financial year, Bank Muamalat Indonesia, members of the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, and Board of Directors never received administrative sanctions from from the Banking Authority which has a significant effect on the Bank's operations.



Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Company Data and Information

Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, yang salah satunya diwujudkan melalui penyediaan akses informasi bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan. BMI berkomitmen untuk senantiasa memberikan informasi yang aktual dan bermanfaat dengan memperhatikan ketentuan terkait data perusahaan yang tidak dapat dipublikasikan/rahasia.

Transparansi informasi secara internal dan eksternal diharapkan dapat membantu, menjaga dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan persepsi positif dari para pemangku kepentingan terhadap kebijakan dan kegiatan Bank. Untuk menyediakan informasi terkini bagi seluruh pemangku kepentingan. Bank Muamalat Indonesia menyediakan sarana portal informasi melalui situs website Bank pada alamat www.bankmuamalat.co.id dan media sosial resmi milik Bank Muamalat.

Bank juga menyediakan informasi lebih lanjut bagi Pemegang Saham dan pemangku kepentingan yang dapat diakses melalui:

a. Media Elektronik

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*Information & Communication Technology/ICT*) yang andal sangat dibutuhkan untuk mendukung penyampaian informasi kepada publik baik internal maupun eksternal sehubungan dengan perkembangan teknologi dan arah penyajian informasi yang cepat serta singkat namun jelas.

Akses *database* elektronik menjadi salah satu alternatif yang penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi sehingga penggunaan TI berbasis digital menjadi sebuah keharusan belakangan ini. Oleh karena itu, Teknologi Informasi (TI) menjadi tuntutan mutlak dan penting dalam pengembangan media komunikasi Bank Muamalat Indonesia saat ini dan di masa mendatang.

Bank menyediakan beberapa saluran media elektronik yang dapat diakses yaitu:

Telepon : (021) 80666000
Faksimile : (021) 80666001
E-mail : corporate.affairs@bankmuamalat.co.id
Website : www.bankmuamalat.co.id
Facebook : Bank Muamalat
X : @BankMuamalat
Instagram : @bankmuamalat
Youtube : Bank Muamalat
Linked In : PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Bank Muamalat is committed to actualizing GCG principles, including transparency, which is manifested by providing access to information for the stakeholders. Bank Muamalat strives to provide actual and useful information by considering the provisions regarding company data that cannot be published/confidential.

The manifestation of internal and external transparency principles in the information is expected to assist, maintain and increase the stakeholders' knowledge, understanding, and positive perception toward the Bank's policies and activities. To provide the latest information for all stakeholders, Bank Muamalat Indonesia provides an information portal facility through the Bank's website at www.bankmuamalat.co.id and official social media by Bank Muamalat.

The Bank also provides further information for the shareholders and stakeholders, which can be accessed through the following:

a. Electronic Media

The use of reliable Information & Communication Technology (ICT) is highly required to support information delivery to the public, both internally and externally in connection with technological developments and the direction of presenting information in a quick and brief but clear manner.

Access to electronic databases is an important alternative in meeting the public's needs for information, thus the use of digital-based IT has become a necessity these days. Therefore, Information Technology (IT) is an absolute and important demand in the development of communication media for Bank Muamalat Indonesia today and in the future.

The Bank provides several electronic media channels that can be accessed, namely:

Phone : (021) 80666000
Facsimile : (021) 80666001
E-mail : corporate.affairs@bankmuamalat.co.id
Website : www.bankmuamalat.co.id
Facebook : Bank Muamalat
X : @BankMuamalat
Instagram : @bankmuamalat
YouTube : Bank Muamalat
Linked In : PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

b. Siaran Pers

Bank Muamalat secara aktif mempublikasikan siaran pers melalui berita dan informasi terkini yang tersedia di situs Bank sebagai upaya penyebaran informasi dari setiap aksi korporasi dan kegiatan penting Bank lainnya.

c. Salamuamalat

Bank Muamalat memiliki layanan phone banking 24 jam melalui nomor 1500016 yang dinamakan Salamuamalat. Salamuamalat juga menjangkau nasabah yang berada di luar negeri melalui nomor +6221 8066 8000. Salamuamalat memberikan kemudahan kepada nasabah setiap saat dan di mana pun nasabah berada.

Dengan menghubungi Salamuamalat, nasabah dapat melakukan pengecekan informasi saldo, cek mutasi, pemindahbukuan, transfer antar rekening Bank Muamalat hingga Rp50 juta. Nasabah juga bisa membayar Zakat Infak Sedekah, mendapatkan informasi produk pendanaan, informasi produk pembiayaan, layanan pengaduan dan kehilangan kartu, layanan *virtual account* dan layanan untuk berbicara dengan Salamuamalat officer.

d. Sekretaris Perusahaan

Untuk dapat mengakses informasi mengenai Bank, masyarakat dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan dengan alamat Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 18 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan 12940 di nomor telepon 021-80666000 ext. 117023 dan e-mail corporate.affairs@bankmuamalat.co.id atau investor.relations@bankmuamalat.co.id di samping sarana-sarana yang telah diurai sebelumnya.

Bank Muamalat Indonesia juga senantiasa membagikan informasi mengenai aktivitas bisnis yang dilakukan kepada publik melalui keterbukaan informasi. Berikut adalah keterbukaan informasi yang dirilis Bank sepanjang tahun 2024 .

b. Press Releases

Bank Muamalat actively publishes press releases through the latest news and information available on the Bank's website as the effort to disseminate information on every corporate action and other important Bank activities.

c. Salamuamalat

Bank Muamalat has 24-hour phone banking service through the number 1500016 called Salamuamalat. Salamuamalat also reaches overseas customers via the number +6221 8066 8000. Salamuamalat provides convenience to customers whenever and wherever they are.

By contacting Salamuamalat, the customers may check balance information, check transactions, book transfers, transfer between Bank Muamalat accounts up to Rp50 million. Customers can also pay Zakat Infaq Alms, obtain information on funding products, information on financing products, complaint services and lost cards, virtual account services, and services to talk to Salamuamalat officers.

d. Corporate Secretary

To be able to access information on the Bank, the public can contact the Corporate Secretary at the address Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 18 Kuningan Timur, Setiabudi South Jakarta 12940 at telephone number 021-80666000 ext. 117023 and e-mail corporate.affairs@bankmuamalat.co.id or investor.relations@bankmuamalat.co.id apart from the previously described facilities

Bank Muamalat Indonesia also continues to share information regarding its business activities to the public through information disclosure. The following is information disclosure released by the Bank during 2023.

Aktivitas Activity	Klasifikasi Classification	Media	Tanggal Date
Laporan Pengangkatan Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Report on the Appointment of the Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia	PELAPORAN REPORTING	SPE OJK PM	09 January 2024 January 9, 2024
Laporan Pengangkatan Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Report on the Appointment of the Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia	PELAPORAN REPORTING	MAILING ROOM MRP MRP MAILING ROOM	09 January 2024 January 9, 2024
Laporan Pengangkatan Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Report on the Appointment of the Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia	KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE	WEBSITE BMI BMI WEBSITE	09 January 2024 January 9, 2024
Komposisi Pemegang Saham Setelah Reverse Stock Split Shareholder Composition After Reverse Stock Split	KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE	WEBSITE BMI BMI WEBSITE	25 January 2024 January 25, 2024



Aktivitas Activity	Klasifikasi Classification	Media	Tanggal Date
Penyampaian Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Tahun 2023 Submission of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Annual Report 2023	PELAPORAN REPORTING	SPE OJK PM	30 April 2024 April 30, 2024
Penyampaian Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Tahun 2023 Submission of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Annual Report 2023	PELAPORAN REPORTING	SIPENA	30 April 2024 April 30, 2024
Penyampaian Laporan Keberlanjutan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Tahun 2023 Submission of Sustainability Report of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 2023	PELAPORAN REPORTING	SPE OJK PM	30 April 2024 April 30, 2024
Penyampaian Laporan Keberlanjutan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Tahun 2023 Submission of Sustainability Report of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 2023	PELAPORAN REPORTING	SIPENA	30 April 2024 April 30, 2024
Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Perseroan") Notification of Plan to Hold Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Company")	PELAPORAN REPORTING	SPE OJK PM	13 May 2024 May 13, 2024
Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Perseroan") Notification of Plan to Hold Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Company")	PELAPORAN REPORTING	MAILING ROOM PM PM MAILING ROOM	13 May 2024 May 13, 2024
Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Announcement of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE	MEDIA MASSA MASS MEDIA	20 May 2024 May 20, 2024
Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Announcement of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE	WEBSITE BMI BMI WEBSITE	20 May 2024 May 20, 2024
Pengumuman RUPS - Penyampaian Bukti Publikasi Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Announcement of GMS - Submission of Proof of Publication of Announcement of Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	PELAPORAN REPORTING	SPE OJK PM	20 May 2024 May 20, 2024
Penyampaian Bukti Iklan - Penyampaian Bukti Publikasi Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Submission of Advertisement Proof - Submission of Publication Proof of Announcement of Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	PELAPORAN REPORTING	SPE OJK PM	20 May 2024 May 20, 2024
Penyampaian Bukti Publikasi Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Submission of Proof of Publication of Announcement of Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	PELAPORAN REPORTING	MAILING ROOM PM PM MAILING ROOM	20 May 2024 May 20, 2024
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Summon to the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE	MEDIA MASSA MASS MEDIA	04 June 2024 June 4, 2024
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Summon to the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE	WEBSITE BMI BMI WEBSITE	04 June 2024 June 4, 2024
Penyampaian Bukti Publikasi Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Submission of Proof of Publication of Summon to Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	PELAPORAN REPORTING	SPE OJK PM	04 June 2024 June 4, 2024

Aktivitas Activity	Klasifikasi Classification	Media	Tanggal Date
Penyampaian Bukti Publikasi Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Submission of Proof of Publication of Summon to Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	PELAPORAN REPORTING	SPE OJK PM	04 June 2024 June 4, 2024
Penyampaian Bukti Publikasi Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Submission of Proof of Publication of Summon to Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	PELAPORAN REPORTING	MAILING ROOM MRP MRP MAILING ROOM	04 June 2024 June 4, 2024
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE	MEDIA MASSA MASS MEDIA	01 July 2024 July 1, 2024
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE	WEBSITE BMI BMI WEBSITE	01 July 2024 July 1, 2024
Pembidangan Tugas Anggota Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Division of Duties of Members of the Board of Directors of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	PELAPORAN REPORTING	MAILING ROOM MRP MRP MAILING ROOM	02 July 2024 July 2, 2024
Penyampaian Bukti Publikasi Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Submission of Proof of Publication of Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	PELAPORAN REPORTING	SPE OJK PM	01 July 2024 July 1, 2024
Penyampaian Bukti Publikasi Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Submission of Proof of Publication of Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	PELAPORAN REPORTING	MAILING ROOM MRP MRP MAILING ROOM	01 July 2024 July 1, 2024
Penyampaian Bukti Publikasi Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Submission of Proof of Publication of Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	PELAPORAN REPORTING	SPE OJK PM	02 July 2024 July 2, 2024
Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Submission of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	PELAPORAN REPORTING	SPE OJK PM	26 July 2024 July 26, 2024
Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Submission of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	PELAPORAN REPORTING	MAILING ROOM MRP MRP MAILING ROOM	26 July 2024 July 26, 2024
Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Kuartar 2 - 30 Juni 2024 Financial Statement of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Quarter 2 - June 30, 2024	KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE	MEDIA MASSA MASS MEDIA	31 July 2024 July 31, 2024
Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Kuartar 2 - 30 Juni 2024 Financial Statement of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Quarter 2 - June 30, 2024	KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE	WEBSITE BMI BMI WEBSITE	31 July 2024 July 31, 2024
Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Kuartar 2 - 30 Juni 2024 Financial Statement of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Quarter 2 - June 30, 2024	PELAPORAN REPORTING	SPE OJK PM	01 August 2024 August 1, 2024
Laporan Pengangkatan Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Report on the Appointment of the Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia	PELAPORAN REPORTING	SPE OJK PM	20 August 2024 August 20, 2024
Laporan Pengangkatan Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Report on the Appointment of the Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia	PELAPORAN REPORTING	MAILING ROOM MRP MRP MAILING ROOM	20 August 2024 August 20, 2024



Aktivitas Activity	Klasifikasi Classification	Media	Tanggal Date
Profil Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Profile of Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia	KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE	WEBSITE BMI BMI WEBSITE	20 August 2024 August 20, 2024
KI Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia KI Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia	KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE	WEBSITE BMI BMI WEBSITE	20 August 2024 August 20, 2024
Pengangkatan Komite Pemantau Risiko Appointment of Risk Monitoring Committee	KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE	WEBSITE BMI BMI WEBSITE	21 August 2024 August 21, 2024
Pengangkatan Komite Tata Kelola Perusahaan Appointment of Corporate Governance Committee	KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE	WEBSITE BMI BMI WEBSITE	21 August 2024 August 21, 2024
Pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi Appointment of Remuneration and Nomination Committee	KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE	WEBSITE BMI BMI WEBSITE	10 October 2024 October 10, 2024
Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Perseroan") Notification of Plan to Hold Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Company")	PELAPORAN REPORTING	SPE OJK PM	18 October 2024 October 18, 2024
Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Perseroan") Notification of Plan to Hold Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Company")	PELAPORAN REPORTING	MAILING ROOM PM PM MAILING ROOM	18 October 2024 October 18, 2024
Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Announcement of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE	MEDIA MASSA MASS MEDIA	28 October 2024 October 28, 2024
Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Announcement of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE	WEBSITE BMI BMI WEBSITE	28 October 2024 October 28, 2024
Pengumuman RUPS - Penyampaian Bukti Publikasi Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Announcement of GMS - Submission of Proof of Publication of Announcement of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	PELAPORAN REPORTING	SPE OJK PM	28 October 2024 October 28, 2024
Penyampaian Bukti Iklan - Penyampaian Bukti Publikasi Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Submission of Proof of Advertisement - Submission of Proof of Publication of Announcement of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	PELAPORAN REPORTING	SPE OJK PM	28 October 2024 October 28, 2024
Penyampaian Bukti Publikasi Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Submission of Evidence of Publication of the Announcement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	PELAPORAN REPORTING	MAILING ROOM PM PM MAILING ROOM	28 October 2024 October 28, 2024
Ralat Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Correction of Announcement of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE	MEDIA MASSA MASS MEDIA	04 November 2024 November 4, 2024
Ralat Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Correction of Announcement of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE	WEBSITE BMI BMI WEBSITE	04 November 2024 November 4, 2024
Ralat Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Correction of Announcement of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	PELAPORAN REPORTING	SPE OJK PM	04 November 2024 November 4, 2024

Aktivitas Activity	Klasifikasi Classification	Media	Tanggal Date
Ralat Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Correction of Announcement of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	PELAPORAN REPORTING	SPE OJK PM	04 November 2024 November 4, 2024
Ralat Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Correction of Announcement of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	PELAPORAN REPORTING	MAILING ROOM MRP MRP MAILING ROOM	04 November 2024 November 4, 2024
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Summon to the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE	MEDIA MASSA MASS MEDIA	19 November 2024 November 19, 2024
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Summon to the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE	WEBSITE BMI BMI WEBSITE	19 November 2024 November 19, 2024
Penyampaian Bukti Publikasi Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Submission of Proof of Publication of Summon to Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	PELAPORAN REPORTING	SPE OJK PM	19 November 2024 November 19, 2024
Penyampaian Bukti Publikasi Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Submission of Proof of Publication of Summon to Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	PELAPORAN REPORTING	SPE OJK PM	19 November 2024 November 19, 2024
Penyampaian Bukti Publikasi Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Submission of Proof of Publication of Summon to Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	PELAPORAN REPORTING	MAILING ROOM MRP MRP MAILING ROOM	19 November 2024 November 19, 2024
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Summary of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE	MEDIA MASSA MASS MEDIA	13 December 2024 December 13, 2024
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Summary of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE	WEBSITE BMI BMI WEBSITE	13 December 2024 December 13, 2024
Penyampaian Susunan Pengurus dan Bukti Publikasi Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Submission of the Composition of the Management and Proof of Publication of the Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	PELAPORAN REPORTING	SPE OJK PM	13 December 2024 December 13, 2024
Penyampaian Susunan Pengurus dan Bukti Publikasi Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Submission of the Composition of the Management and Proof of Publication of the Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	PELAPORAN REPORTING	SPE OJK PM	13 December 2024 December 13, 2024
Penyampaian Susunan Pengurus dan Bukti Publikasi Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Submission of the Composition of the Management and Proof of Publication of the Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	PELAPORAN REPORTING	MAILING ROOM MRP MRP MAILING ROOM	13 December 2024 December 13, 2024



Kode Etik Perusahaan

Corporate Code of Conduct

Kode Etik (*Code of Conduct*) Bank Muamalat Indonesia menjadi nilai dasar dan pedoman bagi seluruh insan sekaligus merupakan wujud dari komitmen Bank untuk menjalankan fungsi kepatuhan. Kode Etik tersebut menjadi dasar dalam bersikap dan beretika seluruh Insan Muamalat di setiap kegiatan usahanya.

Penyusunan Kode Etik Bank Muamalat mengacu pada Kode Etik Bankir Indonesia, *Core Values* Bank Muamalat Indonesia dan Ittifaq serta berdasarkan pada best practice penerapan *Good Corporate Governance*. Kode Etik Bank Muamalat mengatur mengenai standar perilaku, sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, dan penegakan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan.

The Code of Conduct of Bank Muamalat Indonesia is the basic value and guideline for all people as well as a manifestation of the Bank's commitment to carry out the compliance function. The Code of Conduct is the basis for the behavior and ethics of all Muamalat personnel in every business activity.

The preparation of the Bank Muamalat Code of Ethics refers to the Indonesian Bankers Code of Ethics, the Core Values of Bank Muamalat Indonesia and Ittifaq and is based on the best practice of implementing Good Corporate Governance. Bank Muamalat Code of Ethics regulates the standards of behavior, value system, business ethics, work ethics, commitment, and enforcement of applicable regulations for members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees.

POKOK-POKOK KODE ETIK BANK

Bank Muamalat Indonesia telah mengatur pokok-pokok Kode Etik di lingkungan Bank yaitu:

1. Kepatuhan terhadap ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memastikan kehalalan sumber, proses, dan hasil dari pekerjaan, yaitu mencakup pengaturan benturan kepentingan, hubungan dengan *stakeholder*, kegiatan politik karyawan.
3. Menunjukkan perilaku disiplin dalam bekerja dan menjalankan ibadah.
4. Menjunjung tinggi etika moral dan sopan santun.
5. Menjaga amanah yang diberikan, termasuk pengaturan perilaku untuk menjaga nama baik Bank, menjaga fasilitas Bank, melayani nasabah dengan baik, dan mencegah tindakan pelanggaran.
6. Menjaga kerahasiaan Informasi nasabah dan Bank.

PRINCIPLED OF THE BANK'S CODE OF CONDUCT

Bank Muamalat regulated the main principles of the Code of Conducts within the Bank, including:

1. Compliance with Islamic teachings as well as applicable laws and regulations.
2. Ensuring halal sources, processes, and results of work, including regulation of conflicts of interest, relationships with the stakeholders, and employees' political activities.
3. Demonstrating discipline behavior in working and practicing worship.
4. Upholding moral ethics and courtesy.
5. Maintaining the delegated mandate, including regulating behavior to maintain the Bank's good reputation, care for Bank facilities, serve customers well, and prevent violations.
6. Maintain the confidentiality of customer and bank information.

SOSIALISASI KODE ETIK DAN UPAYA PENEGAKAN

Bank Muamalat Indonesia melakukan sosialisasi Kode Etik secara berkala, yakni dalam bentuk serangkaian pelatihan, penayangan materi Kode Etik melalui media *Muamalat Human Power* yang dapat diakses oleh seluruh karyawan serta melalui *HC News*. Seluruh karyawan Bank wajib memberikan pernyataan kesanggupan menjalankan Kode

DISSEMINATION OF THE CODE OF CONDUCTS AND ENFORCEMENT EFFORTS

The Bank constantly carries out periodical socialization from year to year through a series of training and display of Code of Conducts material through the Muamalat Human Power media, which can be accessed by all employees, as well as socialization via *HC News*. The entire Bank employees are required to provide an online statement of ability to

Etik secara *online* melalui aplikasi *Muamalat Human Power* sebagai bentuk implementasi *Good Corporate Governance*.

implement the Code of Ethics through the Muamalat Human Power application as a manifestation of Good Corporate Governance implementation.

PERNYATAAN KODE ETIK BERLAKU BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Kode etik yang dimiliki oleh Bank Muamalat berlaku bagi seluruh karyawan serta level organisasi. Khusus untuk karyawan, Bank telah memiliki surat pernyataan kode etik yang menegaskan bahwa karyawan Bank Muamalat telah membaca, mempelajari dan memahami keseluruhan isi Kode Etik Bank Muamalat dan bersedia untuk selalu menaati dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dalam pernyataan tersebut juga terdapat kesediaan untuk dikenakan sanksi apabila dikemudian hari karyawan melakukan pelanggaran atas Kode Etik Bank Muamalat.

SANKSI PELANGGARAN

Pemberian sanksi dilakukan sebagai suatu tindakan korektif, pembinaan dan memberikan arahan kepada karyawan agar dapat memperbaiki diri, mengubah sikap dan tingkah laku serta berbuat sesuatu secara benar sesuai aturan yang berlaku atau meningkatkan motivasi dan kinerja. Bank dapat memberikan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan karyawan terhadap Kode Etik sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi yang Diberikan

Berikut adalah jumlah pelanggaran dan sanksi yang diberikan oleh Bank hingga berakhirnya tahun buku 2024.

STATEMENT OF CODE OF CONDUCTS APPLICABLE TO ALL ORGANIZATION LEVELS

Bank Muamalat's code of conduct applies to all employees. For employees in particular, the Bank has a statement of code of conduct, which confirms that Bank Muamalat employees have read, studied, and understood the entire contents of Bank Muamalat Code of Conduct and are always willing to comply and implement it as well as possible. In the statement, there is also a willingness to be subject to sanctions if the employee violates the Bank Muamalat Code of Conduct in the future.

SANCTIONS FOR VIOLATIONS

Sanctions are imposed as a corrective and coaching measure, as well as providing direction to employees to ensure that they can improve themselves, change attitudes and behavior, and do things correctly according to applicable rules or increase motivation and performance. The Bank may impose sanctions due to violations committed by employees against the Code of Conduct as long as they do not conflict with the applicable laws and regulations.

Total Violations and Sanctions Imposed

The following are total violations and sanctions imposed by the Bank until the end of the 2024 financial year.

No.	Jenis Sanksi Type of Sanction	Jumlah Sanksi Number of Sanctions	Status Karyawan Saat Ini Current Employee Status	
			Aktif Active	Non Aktif Non-Active
1	Surat Teguran Reprimand letter	15	10	5
2	SP1 1 st Warning Letter	19	16	3
3	SP2 2 nd Warning Letter	26	17	9
4	SP3 3 rd Warning Letter	14	10	4
5	Pemutusan Hubungan Kerja Work Termination	22	0	22
Total		96	53	43



Penerapan Kebijakan Anti Korupsi dan Strategi Anti Fraud

Anti-Corruption/Fraud Policy and Its Socialization

Bank Muamalat Indonesia berkomitmen penuh untuk mencegah terjadinya tindakan penyimpangan (fraud) termasuk di dalamnya korupsi (gratifikasi) dengan menerapkan aturan yang ketat. Sebagai bukti komitmen ini pada tanggal 20 Maret 2023 telah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas yang dihadiri dan ditandatangani oleh Jajaran Komisaris, Jajaran Board of Management, Senior Management Team, seluruh karyawan serta Pimpinan Perusahaan Mitra Kerja Bank Muamalat. Dan setiap tahun dilakukan penandatanganan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh karyawan. Sebagai komitmen PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang telah mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Bank (SMAP) pada bulan November 2023, Bank konsisten menerapkan kebijakan yang secara tegas menyatakan bahwa Insan Muamalat tidak diperbolehkan mendorong terjadinya korupsi (gratifikasi) termasuk di dalamnya tindakan untuk memberi dan atau menerima gratifikasi.

Bank mengatur kebijakan mengenai anti fraud yang dituangkan dalam Prosedur Strategi Anti-Fraud. Dan untuk mendukung penerapan kebijakan Anti Korupsi (Gratifikasi), Bank juga memiliki Prosedur Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Prosedur Pengendalian Gratifikasi. Untuk layanan pelaporan (Whistleblowing System) atas adanya indikasi fraud, kejadian penyalahgunaan wewenang/jabatan, pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan internal lainnya.

FUNGSI DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI/ FRAUD

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank Muamalat Indonesia telah menyusun Prosedur Penerapan Anti-Fraud yang secara umum mengatur antara lain tugas dan tanggung jawab Fungsi Anti Fraud, wewenang Fungsi Anti Fraud, pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, sanksi, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Bank Muamalat Indonesia is fully committed to prevent fraud, including corruption (gratification), by implementing strict rules. As proof of this commitment, on 20 March 2023, the signing of the Integrity Pact was attended and signed by the Board of Commissioners, Board of Management, Senior Management Team, all employees and Heads of Bank Muamalat Partner Companies. Subsequently as follow-up, in November 2023, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk succeeded in achieving ISO 37001:2016 certification for its commitment to implementing the Bank Anti-Bribery Management System (SMAP). The Bank implements a policy which explicitly states that Bank Muamalat personnel are not permitted to encourage corruption (gratuity) including actions to give and/or receive gratuity.

The Bank regulates anti-fraud policies as outlined in the Anti-Fraud Implementation Procedures and the Personnel Code of Ethics & Behavior. In order to support the implementation of anti-fraud policies, the Bank also has a reporting service (Whistleblowing System) for indications of fraud, incidents of abuse of authority/position, violations of statutory provisions and other internal regulations.

ANTI-CORRUPTION/FRAUD FUNCTIONS AND PROCEDURES

Referring to the Financial Services Authority Regulation No. 039/POJK.03/2019 regarding the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Commercial Banks and POJK No. 17 of Year 2023 regarding Governance Implementation for Commercial Banks, Bank Muamalat Indonesia has prepared Anti-Fraud Implementation Procedures which generally regulate, among others, the duties and responsibilities of the Anti-Fraud Division, authority of the Anti-Fraud Division, prevention, detection, investigation, reporting, sanctions, monitoring, evaluation and follow-up.

Bank Muamalat Indonesia mematuhi Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 31 Juli 2024 perihal Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan dan sebagai wujud penyempurnaan Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Bank. Untuk itu, melalui upaya pemantauan dan mitigasi risiko fraud, Bank Muamalat Indonesia telah menyusun Strategi Anti Fraud yang berlandaskan pada empat pilar, yakni: (1) Pencegahan, (2) Deteksi, (3) Investigasi Pelaporan dan Sanksi, (4) Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, dengan melibatkan seluruh jajaran karyawan (*line of defense*).

Strategi Anti *Fraud* Bank Muamalat mengatur 4 Pilar, yaitu:

Bank Muamalat Indonesia complies with OJK Regulation No.39/POJK.03/2019 dated 19 December 2019 regarding the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Commercial Banks and as a form of improvement in the Bank's Internal Control System Policy. Therefore, through monitoring and mitigation of fraud risks, Bank Muamalat Indonesia developed an Anti-Fraud Strategy based on four pillars, namely: (1) Prevention, (2) Detection, (3) Investigation, Reporting and Sanctions, (4) Monitoring, Evaluation and Follow-up, involving all levels of employees (*line of defense*).

Bank Muamalat's Anti Fraud Strategy organizes 4 Pillars, namely:

Pilar 1 Pencegahan Pillar 1 Prevention		
Melakukan langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya <i>Fraud</i> , antara lain <i>anti-fraud awareness</i> , identifikasi kerawanan, dan <i>know your employee</i> . Taking measures in order to reduce the potential risk of fraud, including anti-fraud awareness, identification of vulnerabilities, and know your employee.	Anti-fraud Awereness dilakukan dengan cara: 1. Program Employee Awareness Secara konsisten melaksanakan program kampanye/sosialisasi anti- <i>fraud</i> serta <i>e-mail blast</i> melalui <i>employee relations</i> ke seluruh karyawan di kantor kas, kantor cabang pembantu dan kantor cabang. Program kampanye tersebut juga dilaksanakan bekerja sama dengan HC Learning.	Anti-fraud Awereness are carried out by: 1. Employee Awareness Program Consistently implementing anti-fraud campaign/socialization programs and e-mail blasts through employee relations to all employees in cash, sub-branch, and branch offices. The campaign program is also implemented in collaboration with HC Learning.
	2. Program Customer Awareness Menyampaikan informasi anti- <i>fraud</i> di media elektronik Bank: ATM, <i>mobile banking</i> , <i>internet banking</i> , dan juga melalui media sosial.	2. Customer Awareness Program Conveying anti-fraud information on the Bank's electronic media: ATMs, mobile banking, internet banking, and also through social media
	3. Pelaksanaan Training Mengikutsertakan karyawan dalam <i>training/workshop</i> eksternal.	3. Training Implementation Engaging employees in external training/workshops.
	4. Sosialisasi Anti-<i>fraud</i> Sosialisasi anti- <i>fraud</i> dilakukan minimal satu kali dalam satu semester di seluruh seluruh area serta cabang se-Indonesia dan disampaikan oleh Branch Manager atau Branch Operation Service Manager.	4. Anti-fraud Socialization Anti-fraud socialization is conducted at least once a semester in all areas and branches across Indonesia and further communicated by the branch manager or branch operation service manager.
	Identifikasi Kerawanan Mengacu pada pengalaman kasus-kasus <i>fraud</i> yang telah terjadi, aktivitas yang memiliki tingkat kerawanan <i>fraud</i> yang tinggi antara lain bidang operasional, bidang pembiayaan, dan bidang teknologi informasi. Hasil identifikasi kerawanan telah tertuang dalam rekomendasi perbaikan masing-masing kasus dan telah disampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.	Identification of Vulnerability Referring to the past fraud cases, activities that have a high level of fraud vulnerability include operational sector, financing sector, and information technology sector. The results of the identification of vulnerabilities have been stated in the recommendations for improvement in each case and have been submitted to related parties for follow-up
	Know Your Employee Dalam hal proses seleksi atau rekrutmen calon karyawan, divisi terkait atau kantor cabang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk yang terkait dengan <i>screening</i> .	Know Your Employee In terms of the selection or recruitment process for prospective employees in related divisions or branch offices, it is carried out in accordance with applicable procedures, including those related to screening



Pilar 2 Deteksi Pillar 2 Detection		
Melakukan langkah-langkah dalam mengidentifikasi dan menemukan <i>fraud</i> dalam kegiatan usaha bank, antara lain kebijakan dan mekanisme <i>whistleblowing</i>, <i>surprise audit</i> dan <i>surveillance system</i>. Taking steps to identify and find fraud in bank business activities, including policies and mechanisms for whistleblowing, surprise audits, and surveillance systems	Kebijakan dan Mekanisme <i>Whistleblowing</i> Kebijakan <i>whistleblowing</i> telah tercantum dalam ketentuan internal, yakni terkait perlindungan kepada <i>whistleblower</i>, pengaduan <i>fraud</i> dan sistem pelaporan dan mekanisme tindak lanjut laporan dengan mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku di mana Bank menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporan yang disampaikan dengan format bebas.	Whistleblowing Policy and Mechanism The whistleblowing policy has been stated in the internal regulations, which are related to the protection of whistleblowers, fraud complaints, reporting systems and report follow-up mechanisms with reference to the prevailing laws and regulations where the Bank guarantees the confidentiality of the whistleblower's identity and the report he/she submits in a free format
	Surprise Audit Pemeriksaan mendadak untuk meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka pencegahan <i>fraud</i> di Bank Muamalat Indonesia.	Surprise Audit Unannounced audits to increase employee vigilance in carrying out their duties and responsibilities in order to prevent fraud at Bank Muamalat Indonesia
	Surveillance System Pemeriksaan secara diam-diam untuk meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka pencegahan <i>fraud</i> di Bank Muamalat Indonesia.	Surveillance System Secret inspection to increase employee vigilance in carrying out their duties and responsibilities in order to prevent fraud at Bank Muamalat Indonesia
Pilar 3 Investigasi, Pelaporan dan Sanksi Pillar 3 Investigation, Reporting, and Sanctions		
Melakukan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan dan peneraan sanksi atas <i>fraud</i> dalam kegiatan usaha Bank. Taking steps in order to gather information (investigation), a reporting system and impose sanctions for fraud in the Bank's business activities.	Investigasi Investigasi dilakukan dengan tujuan: - Mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan <i>fraud</i> sehingga (jika diperlukan) dapat digunakan untuk melakukan tuntutan hukum ke pengadilan. - Mengetahui bagaimana <i>fraud</i> dapat terjadi. - Mengetahui dampak atas <i>fraud</i>, pihak yang terlibat dan kelemahan dari sistem/proses yang menyebabkan terjadinya <i>fraud</i> sehingga dapat ditemukan langkah perbaikan yang efektif.	Investigation Investigations are carried out with the following goals: - Collecting evidence related to events that can reasonably be suspected of being an act of fraud so that (if needed) can be used to bring legal proceedings to court. - Determine how fraud can occur. - Determine the impact of fraud, the parties involved and the weaknesses of the systems/processes that lead to fraud so that effective corrective measures can be formulated.
	Pelaporan Sistem pelaporan mencakup pelaporan secara internal kepada pihak Manajemen Bank maupun kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.	Reporting The reporting system includes internal reporting to the Bank Management as well as to the Financial Services Authority and Bank Indonesia.
	Sanksi Hasil investigasi atas suatu kejadian <i>fraud</i> disampaikan pada rapat Komite Disiplin. Komite Disiplin merupakan pihak yang berwenang untuk memutuskan peneraan sanksi. Apabila pelaku <i>fraud</i> berada pada level Pejabat t Eksekutif keatas, maka Komite Disiplin akan merekomendasikan sanksi untuk kemudian diputuskan oleh Board of Management. Peneraan jenis dan kadar berat ringannya sanksi kepada pelaku mengacu kepada ketentuan yang berlaku.	Sanction The results of an investigation into fraud are presented at the Disciplinary Committee meeting. The Disciplinary Committee is the party authorized to decide on the imposition of sanctions. If the fraud committer is at the Executive Officer level and above, the Committee will recommend sanctions but leave the decision to the Board of Management. The type and severity of sanctions are imposed according to the applicable provisions.

Pilar 4 Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
Pillar 4 Monitoring, Evaluation, and Follow-up

Melakukan langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi <i>fraud</i> , serta mekanisme tindak lanjut. Taking steps to monitor and evaluate fraud, as well as follow-up mechanisms	Pemantauan Melakukan pemantauan terhadap tindakan perbaikan dalam upaya menghindari berulangnya kasus <i>fraud</i> yang sama dan memastikan bahwa rekomendasi perbaikan telah dilaksanakan secara memadai oleh unit kerja terkait.	Monitoring Monitor corrective measures in an effort to avoid recurring cases of the same fraud and ensure that recommendations for improvements have been implemented adequately by the relevant work unit.
	Evaluasi Mengevaluasi akar penyebab dari setiap kejadian <i>fraud</i> untuk menentukan langkah perbaikan (<i>corrective action</i>) yang perlu dilakukan, mencakup evaluasi terhadap kecukupan kontrol (sistem pengendalian) dan pelaksanaan pedoman dan prosedur kerja, proses pengelolaan risiko dan proses tata kelola di unit kerja terkait tempat terjadinya <i>fraud</i> .	Evaluation Evaluating the root causes of each fraud incident to determine corrective action that needs to be taken, including evaluation of the adequacy of controls (control systems) and implementation of work guidelines and procedures, risk management processes and governance processes in work units related to where the fraud occurred.
	Tindak Lanjut Memperbaiki penyebab terjadinya <i>fraud</i> dengan memperkuat sistem pengendalian internal, proses pengelolaan risiko dan proses tata kelola yang lebih baik.	Follow-up Rectify the causes of fraud by strengthening internal control systems, risk management processes and better governance processes.

Di samping perannya untuk menerapkan strategi pengendalian Fraud, Divisi Anti Fraud juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang mencakup:

1. Menyusun dan melakukan kajian ulang secara berkala atas Prosedur Pelaksanaan Anti-Fraud.
2. Memberikan sosialisasi, training, ataupun kampanye dan pembinaan kepada seluruh jenjang organisasi dalam rangka antisipasi dan pencegahan terjadinya Fraud.
3. Mengkaji efektivitas Bank dalam mencegah, mendeteksi, menginvestigasi dan memperbaiki dampak Fraud yang terjadi.
4. Menyelenggarakan rapat rutin terkait tindak lanjut penanganan Fraud dan membuat laporan periodik kepada Direktur Supervisi.
5. Berkoordinasi dengan instansi dan aparatur Negara terkait untuk menindaklanjuti kasus Fraud, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal.
6. Berkoordinasi dengan unit kerja yang terkait dalam pelaporan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan guna menyampaikan Laporan Penerapan Strategi Anti-Fraud setiap semester yang dilakukan pada bulan Januari dan Juli setiap tahunnya.
7. Melapor kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kejadian Fraud yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui hal tersebut.
8. Berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi.
9. Berkewajiban menyampaikan laporan hasil pemeriksaan investigatif kepada Direktur Supervisi dan pihak terkait lainnya.
10. Berkewajiban menyerahkan seluruh dokumen dan data termasuk keterangan dari pihak-pihak terkait kepada Komite Disiplin untuk selanjutnya dieskalasi ke Direksi untuk pengambilan Keputusan dan tindak lanjut penyelesaiannya.

Aside from its role to implement Fraud control strategies, the Anti-Fraud Division also has the duties and responsibilities which include the following:

1. Develop and conduct regular reviews of Anti-Fraud Implementation Procedures.
2. Provide outreach, training, or campaigns and guidance to all levels of the organization in order to anticipate and prevent fraud.
3. Review the Bank's effectiveness in preventing, detecting, investigating and correcting the impact of fraud that occurs.
4. Hold regular meetings regarding follow-up on fraud handling and make periodic reports to the Supervisory Director.
5. Coordinate with relevant state agencies and apparatus to follow up on fraud cases, whether carried out by internal or external parties.
6. Coordinate with related work units in reporting to Bank Indonesia and/or the Financial Services Authority to submit Anti-Fraud Strategy Implementation Reports every semester which are carried out in January and July each year.
7. Report to the Financial Services Authority any Fraud incident which is expected to have significant negative impact on the Bank, no later than 3 (three) working days after the Bank becomes aware of this matter.
8. Obligated to maintain the confidentiality of information.
9. Obligated to submit reports on the results of investigative examinations to the Supervisory Director and other related parties.
10. Obligated to submit all documents and data including information from related parties to the Disciplinary Committee for further escalation to the Board of Directors for decision-making and follow-up to completion.



Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Perusahaan

Transparency of the Company's Financial and Non-Financial Conditions

Bank Muamalat Indonesia telah memenuhi kewajiban transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan nonkeuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui penyampaian dan publikasi informasi, baik melalui media cetak maupun situs web Bank yang mencakup:

Bank Muamalat Indonesia has fulfilled the obligation of transparency and publication of financial and non-financial conditions in accordance with applicable laws and regulations through the delivery and publication of information, both through print media and the Bank's website, which includes:

Jenis Publikasi Type of Publication	Media Publikasi Publication Media
Laporan Keuangan Bulanan kepada regulator Monthly Financial Statement to regulators	Situs web Bank Bank Website
Laporan Keuangan Triwulan kepada regulator Quarterly Financial Statement to regulators	Situs web dan Surat kabar atau media elektronik lain (opsional) Website and Newspaper or other electronic media (optional)
Laporan Keuangan Tengah Tahun dan Tahunan kepada regulator Mid-Year and Annual Financial Statements to regulators	Situs web dan Surat kabar atau media elektronik lain Website and Newspaper or other electronic media (optional)
Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia yang disusun dan disajikan sesuai ketentuan dan disampaikan kepada regulator, <i>rating agency</i> , lembaga pengembangan perbankan, lembaga/institusi riset dan majalah keuangan Bank Muamalat Indonesia's Annual Report is prepared and presented in accordance with the provisions and submitted to regulators, rating agencies, banking development institutions, research institutions and financial magazines.	Situs web Bank Bank Website
Informasi Tata Kelola Perusahaan, di antaranya adalah Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan, Visi, Misi, Nilai Perusahaan, Komposisi dan Profil Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi, serta ketentuan internal terkait tata kelola antara lain Piagam Komite-komite Corporate Governance Information, including the Annual Report on Corporate Governance, Vision, Mission, Company Values, Composition and Profile of the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners and Board of Directors, as well as internal provisions related to governance, including the Charter of the Committees	Situs web Bank Bank Website
Informasi Produk dan Layanan Bank, termasuk jaringan kantor Bank Product and Service Information, including office network	Situs web Bank Bank Website
Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan, Kebijakan Keamanan Informasi dan tips bagi Nasabah dalam menggunakan layanan perbankan sebagai bagian dari pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen Information on Complaint Submission Procedures, Information Security Policies and tips for Customers in using banking services as part of the implementation of consumer protection provisions	Situs web Bank Bank Website
Laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan Publication of risk exposure and capitalization reports	Situs web Bank Bank Website
Laporan publikasi informasi atau fakta material Publication report of material information or facts	Media Cetak dan Situs Web Bank Print Media and Bank Website
Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat Other information aimed at supporting information disclosure, financial education and services to the public.	Situs web Bank Bank Website

Pembelian Kembali Saham dan Obligasi Bank Muamalat Indonesia

Buy Back of Bank Muamalat Indonesia Shares and Bonds

Selama tahun 2024, Bank tidak melaksanakan aksi korporasi berupa *buyback* saham maupun *buyback* obligasi yang telah beredar.

During the year 2024, the Bank did not carry out corporate action in the form of share buybacks or outstanding bond buybacks.

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Buy Back of Bank Muamalat Indonesia Shares and Bonds

Bank Muamalat tidak menoleransi keterlibatan Bank dan seluruh insan Bank Muamalat Indonesia tanpa terkecuali dalam kegiatan politik, termasuk memberikan dana untuk kepentingan politik. Kebijakan ini bertujuan menjaga independensi dan profesionalisme Bank dan pekerja.

Bank Muamalat does not tolerate the involvement of the Bank and all Bank Muamalat Indonesia personnel, without exception, in political activities, including providing funds for political purposes. This policy aims to maintain the independency and professionalism of the Bank and its employees.

Merujuk ketentuan Pasal 123 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank senantiasa memperkenankan Insan Bank Muamalat Indonesia terlibat dalam kegiatan sosial dan lingkungan karena Bank meyakini bahwa kegiatan sosial dan lingkungan memberi dampak positif kepada khalayak yang lebih luas untuk jangka panjang serta mendukung visi misi Bank dalam penerapan keuangan berkelanjutan. Bank terus berupaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sosial dan lingkungan yang diwujudkan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang secara detail dijelaskan pada Bab Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Laporan Tahunan ini atau pada Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Report*).

Referring to the provisions of Article 123 of the Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 regarding the Governance Implementation for Commercial Banks, the Bank always allows Bank Muamalat Indonesia Personnel to be involved in social and environmental activities because the Bank believes that social and environmental activities have positive impact on a wider audience for long run and supports the Bank's vision and mission in implementing sustainable finance. The Bank continues to strive to support the implementation of social and environmental activities realized through the Social and Environmental Responsibility program which is explained in detail in the Social and Environmental Responsibility Chapter in this Annual Report or in the Sustainability Report.

Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)

Legal Lending Limit (LLL)

Sepanjang tahun 2024, Bank Muamalat Indonesia tidak melanggar dan/atau melampaui Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) baik kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait dengan Bank.

Throughout 2024, Bank Muamalat Indonesia did not violate and/ or exceed the Legal Lending Limit (LLL) for related parties and unrelated parties to the Bank.



Kebijakan Perlindungan Nasabah

Customers' Protection Policy

Bagi Bank Muamalat Indonesia, nasabah merupakan salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran penting bagi peningkatan kinerja dan keberlanjutan usaha Bank. Oleh karena itu, Bank berkomitmen dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan prima dan perlindungan bagi para nasabah yang diwujudkan dengan adanya layanan pengaduan nasabah melalui email, website Bank Muamalat, SalaMuamalat, serta media sosial Bank, yang terdiri dari Facebook, Twitter dan Instagram.

Nasabah dapat langsung menghubungi dan melaporkan bila mendapatkan kendala dalam proses perbankan/transaksi keuangan di Bank Muamalat Indonesia. Bank juga senantiasa berupaya secara maksimal dalam melindungi kepentingan seluruh nasabah dan memberikan yang terbaik, sebagai bentuk pemenuhan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Informasi lebih rinci terkait dengan mekanisme prosedur dan pelaksanaan penyelesaian pengaduan nasabah dijelaskan dalam Bab Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Laporan Tahunan ini atau pada Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Report*).

PERLINDUNGAN HAK KREDITUR

Dalam rangka perlindungan hak-hak kreditur, Bank Muamalat Indonesia melakukan keterbukaan informasi secara jujur dan transparan serta persamaan perlakuan (*equal treatment*) kepada seluruh kreditur tanpa adanya diskriminasi. Melalui keterbukaan informasi, seluruh kreditur, pemangku kepentingan, maupun mitra usaha memperoleh informasi yang relevan sesuai kebutuhannya sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan yang objektif atas dasar pertimbangan yang adil, wajar dan akurat.

For Bank Muamalat Indonesia, customers are one of the stakeholders who have an important role in improving the performance and sustainability of the Bank's business. Therefore, the Bank is committed and continues to strive to provide excellent services and protection for customers, which is realized by providing customer complaint services through the Bank Muamalat website, SalaMuamalat, as well as the Bank's social media, such as Facebook, X and Instagram.

Customers can immediately contact and report if they encounter problems in the banking/financial transaction process at Bank Muamalat Indonesia. The Bank also always strive with maximum efforts to protect the interests of all customers and provide the best, as a form of compliance with Law No. 27 of Year 2022 concerning Protection of Personal Data and Financial Services Authority Regulation Number 22 of 2023 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector.

More detailed information regarding the procedures and implementation mechanisms for resolving customer complaints is explained in the Social and Environmental Responsibility Chapter of this Annual Report or in the Sustainability Report.

PROTECTION OF CREDITORS' RIGHTS

In order to protect creditors' rights, Bank Muamalat Indonesia provides honest and transparent information disclosure as well as equal treatment to all creditors without any discrimination. Through information disclosure, all creditors, stakeholders and business partners obtain relevant information according to their needs so that each party can make objective decisions based on fair, reasonable and accurate considerations.

Hal tersebut juga sejalan dengan implementasi GCG. Melalui kebijakan tersebut, Bank berharap hak-hak kreditur dapat terpenuhi sekaligus mampu menjaga kepercayaan kreditur terhadap Bank.

Bank menjamin hak-hak kreditur dilaksanakan dengan baik, yang dituangkan dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai bagian dari pelaksanaan dari hak-hak kreditur, Bank menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dengan tepat waktu dan berupaya untuk menghindari keterlambatan maupun kelalaian yang berpotensi menimbulkan kerugian kedua belah pihak.

This is also in line with the implementation of GCG. Through this policy, the Bank hopes that creditors' rights can be fulfilled while being able to maintain creditors' trust in the Bank.

The bank guarantees that creditors' rights are implemented properly, which is stated in the agreement agreed by both parties. As part of the implementation of creditors' rights, the Bank carries out its obligations as agreed in a timely manner and strives to avoid delays or negligence that have the potential to cause losses to both parties.

Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System

Pedoman Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) merupakan mekanisme pengendalian internal yang didesain untuk menjaga transparansi dan kepatuhan karyawan serta manajemen Bank Muamalat Indonesia. WBS memastikan adanya sarana komunikasi yang dipercaya oleh seluruh pihak untuk melaporkan adanya indikasi atau kejadian penyalahgunaan wewenang/jabatan atau pelanggaran terhadap aturan kedisiplinan, kode etik atau peraturan internal lainnya, *fraud* atau Tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Penerapan WBS bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Bank serta dalam rangka mencegah terjadinya tindak penyimpangan/pembiaran (*fraud*) yang dapat menimbulkan kerugian material ataupun immaterial bagi Bank di kemudian hari.

The Violation Reporting Guidelines or Whistleblowing System (WBS) is an internal control mechanism designed to keep transparency and compliance of employees and management of Bank Muamalat Indonesia. WBS ensures that there is a communication facility that is trusted by all parties to report indications or incidents of abuse of authority/position or violations of disciplinary rules, codes of ethics or other internal regulations, fraud or money laundering crimes (TPPU) or terrorist financing crimes (TPPT).

The implementation of WBS aims to create a transparent and accountable environment to support the creation of Good Corporate Governance (GCG) within the Bank and to prevent acts of deviation/omission (fraud) which can cause material or immaterial losses for the Bank in the future.

MEKANISME PELAPORAN

Sejalan dengan pilar ke 2 Strategi Anti *Fraud* yaitu deteksi, Bank Muamalat telah menyediakan sarana penerimaan laporan yang dilaksanakan melalui mekanisme *Whistleblowing System* (WBS) Bank Muamalat.

Untuk mendorong partisipasi karyawan dan masyarakat agar berani bertindak dalam mencegah terjadinya *Fraud* dengan melaporkannya kepada pihak yang dapat menanganinya (unit kerja Anti *Fraud*) maka Bank telah menyediakan sarannya yang mudah diakses, antara lain melalui :

REPORTING MECHANISM

In line with the 2nd pillar of the Anti-Fraud Strategy, namely detection, Bank Muamalat has provided a means of receiving reports, which are implemented through the Bank Muamalat Whistleblowing System (WBS) mechanism.

To encourage employee and community participation to dare to act in preventing fraud by reporting it to the party that can handle it (Anti-Fraud work unit), the Bank has provided easily accessible facilities, including through:



Contact Center WBS

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Muamalat Tower Lantai 9
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18
Jakarta 12940
UP. Anti Fraud
e-mail: antifraud@bankmuamalat.co.id
Telpon/SMS/WA : 0811-1310-6000

Perlindungan bagi Pelapor

Bank juga akan memberikan bantuan perlindungan hukum kepada pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukuman atau tindakan yang tidak menyenangkan dari pihak manapun. Perlindungan juga diberikan kepada karyawan yang melakukan penyelidikan dan bagi yang memberikan informasi terkait dengan penyelidikan pelanggaran. Apabila terlapor terbukti melakukan pelanggaran, maka sanksi yang diberikan merujuk kepada ketentuan internal yang berlaku, maupun sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Pengelola Pengaduan

Whistleblowing System dikelola oleh Unit Kerja Anti Fraud dan difungsikan sebagai turunan dari Strategi *Anti-Fraud* (SAF) yang mencakup: Perlindungan kepada *Whistleblower*, Sistem Pelaporan dan Mekanisme Tindak Lanjut Laporan *Whistleblower*, Pengaduan Indikasi *Fraud* serta *Contact Center* WBS.

JENIS SANKSI BAGI PELANGGAR

Apabila terlapor terbukti melakukan pelanggaran, maka sanksi yang diberikan mengacu pada ketentuan yang berlaku di Bank, maupun sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pelaku yang terbukti, Bank menerapkan sanksi tegas dengan mengacu pada *Ittifaq* (Perjanjian Kerjasama).

WBS Contact Center

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Muamalat Tower 9th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18
Jakarta 12940
Attn. Anti Fraud
e-mail: antifraud@bankmuamalat.co.id
Phone/SMS/WA : 0811-1310-6000

Protection for Whistleblowers

The Bank will also provide legal protection assistance to the reporter from all forms of threats, intimidation, punishment or unpleasant actions from any party. Protection is also provided to employees who conduct investigations and to those who provide information related to violations investigations. If the reported party is proven to have committed a violation, the sanctions given refer to the applicable internal provisions, as well as in accordance with the applicable statutory provisions.

Complaints Management

The Whistleblowing System is managed by the Anti-Fraud Division and functions as a derivative of the Anti-Fraud Strategy (SAF) which includes: Protection for Whistleblowers, Reporting System and Follow-up Mechanism for Whistleblower Reports, Fraud Indication Complaints and WBS Contact Center.

TYPES OF SANCTION FOR VIOLATORS

If the reported party is proven to have committed a violation, the sanctions given refer to the provisions in force at the Bank, as well as in accordance with applicable laws. For proven perpetrators, the Bank applies strict sanctions by referring to the *Ittifaq* (Cooperation Agreement).

Kebijakan Pencegahan *Insider Trading* Insider Trading Prevention Policy

Kebijakan GCG Bank Muamalat mengatur bahwa Bank senantiasa menyediakan informasi yang cukup, akurat, dipercaya dan tepat waktu kepada segenap pemangku kepentingan dengan mengedepankan prinsip *equal/treatment*. Jajaran Bank dilarang untuk membeli atau menjual saham (*common stock*) atau surat berharga Bank lainnya pada saat yang bersangkutan bertanggung jawab atas informasi penting yang tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik yang dapat mempengaruhi nilai harga saham dan surat berharga Bank. Sebagai informasi bahwa Bank Muamalat Indonesia merupakan perusahaan terbuka, namun tidak memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, sehingga potensi terjadinya *insider trading* sangat rendah.

Bank Muamalat's GCG policy stipulates that the Bank always provides sufficient, accurate, reliable and timely information to all stakeholders by prioritizing the principle of equal/treatment. Bank officials are prohibited from buying or selling shares (*common stock*) or other Bank securities when they are responsible for important information that is not intended for public consumption which may affect the price value of the Bank's shares and securities. For your information, Bank Muamalat Indonesia is a public company, but does not trade its shares on the Indonesian Stock Exchange, so the potential for insider trading to occur is very low.

Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya Non-Halal Income and Its Use

Berikut adalah rincian pendapatan non halal (kebajikan) Bank sepanjang 2024 dan penggunaannya.

The following are details of the Bank's non-halal income throughout 2023 and its use.

disajikan dalam jutaan Rupiah)
(expressed in millions of Rupiah)

No.	Sumber Dana Kebajikan Source of Benevolent Fund	Nilai Pendapatan Dana Kebajikan Benevolent Fund Income Value
1.	Infaq	481.109
2.	Denda Fine	2.540.575
3.	Penerimaan Non Halal Non-Halal Income	2.237.206
4.	Lainnya Other	454.260
Total Penerimaan Total Income		5.715.150



CASH MANAGEMENT SYSTEM MADINA
Khusus Nasabah Korporasi/Perusahaan/Non Individu
**BAYAR TAGIHAN VA MUAMALAT
MELALUI MADINA**

Bank Muamalat
Pertama Murni Syariah

MADINA

BPKH

#AyoHijrah

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menyajikan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk Laporan Keberlanjutan pada buku terpisah. Laporan tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu mengacu Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Silakan merujuk pada Laporan Keberlanjutan 2024 Bank Muamalat untuk informasi lebih lengkap. Adapun yang disajikan pada halaman ini hanya “Ikhtisar Keberlanjutan”.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk presents information on social and environmental responsibility in the form of a Sustainability Report in a separate book. The report, in accordance with the Circular Letter of the Financial Services Authority (OJK) No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies, which refers to OJK Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies.

Please refer to the Bank Muamalat 2024 Sustainability Report for more detailed information. What is presented on this page is only “Sustainability Overview”.



Ikhtisar Keberlanjutan

Sustainability Performance Highlights



Aspek Ekonomi

Economic Aspect

Total Aset
Total Assets

Rp60,02 triliun
trillion

Total Pendapatan dan Pengelolaan Dana
Total Income and Fund Management

Rp2,13 triliun
trillion

Total Pembayaran Pajak
Total Tax Payment

Rp282,6 miliar
billion

Total Realisasi Pengadaan Barang dan
Jasa dari Pemasok Lokal
Total Realization of Procurement of Goods
and Services from Local Suppliers

Rp260 miliar
billion



Aspek Lingkungan

Environmental Aspect

Total Penggunaan Energi
Total Energy Consumption

21.562 GJ | GJ

Emisi yang Dihasilkan
Energy Produced

4.791,22 Ton CO₂eq
Ton CO₂eq

**Penggunaan Air
dari PDAM**
Water Consumption
from Local Utility

22.721 m³ | m³

**Penggunaan
Kertas**
Paper Consumption

4.690 rim
rims

**Biaya Pemeliharaan
Lingkungan**
Environmental
Preservation Expense

Rp460,6 miliar
billion



Aspek Sosial

Social Aspect

Total Karyawan Perempuan
Total Female Employees

993 Orang
Persons

Rata-rata Jam Pelatihan Per Karyawan
Average Training Hours Per Employee

111 Jam
Hours

Penerima Manfaat Program CSR
CSR Program Beneficiaries

23.620 Orang
Persons

Laporan Keuangan 2024

2024 Financial Statements



Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
Beserta Laporan Auditor Independen

The Financial Statement
As of December 31, 2024
And For The Year Then Ended
With Independent Auditor's Report

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk

**Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
Dan Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
Beserta
Laporan Auditor Independen**

***The Financial Statement
As of December 31, 2024
And For The Year
Then Ended
With
Independent Auditors' Report***

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS

Halaman/ Page

1. DAFTAR ISI		1. TABLE OF CONTENTS
2. SURAT PERNYATAAN DIREKSI		2. DIRECTOR'S STATEMENTS LETTER
3. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		3. INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
4. LAPORAN KEUANGAN - Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang terdiri dari:		4. FINANCIAL STATEMENT - As of December 31, 2024 and for the year then ended, are as follow:
- Laporan Posisi Keuangan	i - iv	- Statements of Financial Position
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	v	- Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
- Laporan Perubahan Ekuitas	vi	- Statements of Changes in Equity
- Laporan Arus Kas	vii	- Statements of Cash Flows
- Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	viii	- Statements of Reconciliation of Income and Revenue Sharing
- Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	ix	- Statements of Sources and Distribution of Zakat Funds
- Laporan Sumber Dana dan Penggunaan Dana Kebajikan	x	- Statements of Sources and Uses of Qordhul Hasan Funds
- Catatan atas Laporan Keuangan	1 - 158	- Notes to The Financial Statements



Bank Muamalat

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini/ *We the undersigned:*

Nama/ *Name*

Alamat kantor/ *Office address*

Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/

Domicile as stated in ID card

Nomor telepon/ *Phone number*

Jabatan/ *Position*

: Imam Teguh Saptono

: Muamalat Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18 Jakarta

: Komplek BBD Blok B.1/6 RT/RW 004/003 Kelurahan

: Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan

: +62 (21) 80666000

: Direktur Utama / *President Director*

Nama/ *Name*

Alamat kantor/ *Office address*

Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/

Domicile as stated in ID card

Nomor telepon/ *Phone number*

Jabatan/ *Position*

: Karno

: Muamalat Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18 Jakarta

: Jalan Palbatu V No.6 RT.009/004 Kelurahan Menteng Dalam

: Kecamatan Tebet Jakarta Selatan

: +62 (21) 80666000

: Direktur Kepatuhan / *Compliance Director*

menyatakan bahwa:

state that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank);
2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar; dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Bank.

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank);*
2. *The Bank's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information contained in the Bank's financial statements has been fully and correctly disclosed;*
b. *The Bank's financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;*
4. *We are responsible for the Bank's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 27 Maret 2025 / March 27, 2025

Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors* ✱

Imam Teguh Saptono
Direktur Utama / *President Director*

Karno
Direktur Kepatuhan / *Compliance Director*

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Muamalat Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12946, Indonesia

Telp: +62 (21) 80 666 000, Fax: +62 (21) 80 666 001

info@bankmuamalat.co.id

www.bankmuamalat.co.id



Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali
Registered Public Accountants
License No.: 42/KM.1/2013

Menara Kumpan 11th Floor
Jl. HR. Rarasa Said Blok X-7 Kav. 5
Jakarta 12940 Indonesia
Phone : (62-21) 2168.3701 - 03
E-mail : dbstda@kapdbstda.co.id
Website : www.kap-dbstda.com



An independent member of BKR International,
with offices throughout the world

Nomor / Number : 00001/2.0936/AU.4/07/0396-4/1/III/2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi material dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk pada tanggal 31 Desember 2024, dan kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat serta sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami telah melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2024, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows, reconciliation of income and revenue sharing, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and a summary of material accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk as of December 31, 2024, and their financial performance, cash flows, reconciliation of income and revenue sharing, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Penekanan Suatu Hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 50 atas laporan keuangan terlampir yang menjelaskan tentang Bank sedang menjalankan Program Perbaikan dan Penguatan/ *Turnaround Plan Program* sejak tahun 2021 ("TAP 1.0"). Program Perbaikan dan Penguatan Bank selalu ditinjau kembali relevansinya terkait dengan kesesuaian antara TAP 1.0 dengan kondisi bisnis dan kinerja keuangan Bank. Untuk menjaga *going concern* Bank, maka diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan juga melakukan pembaharuan program perbaikan dan penguatan dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan melalui pengajuan TAP 2.0 dengan harapan TAP 2.0 memiliki waktu yang lebih memadai untuk memperbaiki fundamental bisnis, kinerja keuangan dan melakukan transformasi retail secara keseluruhan. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal Lainnya

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Emphasis of a Point

We draw attention to Note 50 of the attached financial statements which explains that the Bank is running a Turnaround Plan Program since 2021 ("TAP 1.0"). The Bank's Turnaround Program is always reviewed for its relevance in relation to the suitability between TAP 1.0 and the Bank's business conditions and financial performance. To maintain the Bank's going concern, various efforts are needed to improve performance and also to renew the turnaround program by conducting evaluations and improvements through the submission of TAP 2.0 that the TAP 2.0 adjustments have more adequate time to improve business fundamentals, financial performance and carry out overall retail transformation. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Other Matter

Management is responsible for other information. Other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statement does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information contains material inconsistencies with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Tanggung jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk memberikan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, tetapi bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatement can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

Tanggung jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Bank.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi atas kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Bank untuk menyatakan opini atas laporan keuangan. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan Bank. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's Internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Bank to express an opinion on the financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of audit of the Bank's financial statement. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI

Lain Usaha / License Firm No. 42/KM.1/2013



Doli Diapary Siregar, CPA

*Nomor Registrasi Akuntan Publik /
Public Accountant Registration Number
AP.0396*



Jakarta, 27 Maret 2025 / March 27, 2025

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31 2024	31 Desember / December 31 2023	
ASET	2023			ASSET
KAS	2.a, 3	781.262.980	720.209.073	CASH
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	2.d, 4	2.812.899.226	5.010.479.824	CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA
GIRO PADA BANK LAIN	2.e, 5	698.239.396	1.463.838.902	CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS
Pihak ketiga		--	--	Third Parties
Cadangan Kerugian penurunan nilai		--	--	Allowance for impairment losses
Neto		698.239.396	1.463.838.902	Net
PENEMPATAN PADA BANK LAIN	2.f, 6	14.469.632	3.760.782	PLACEMENTS WITH OTHER BANKS
Pihak ketiga		--	--	Third Parties
Cadangan Kerugian penurunan nilai		--	--	Allowance for impairment losses
Neto		14.469.632	3.760.782	Net
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA	2.g, 7	31.127.147.656	30.524.748.886	INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES
Pihak ketiga		--	--	Third Parties
Cadangan Kerugian penurunan nilai		--	--	Allowance for impairment losses
Neto		31.127.147.656	30.524.748.886	Net
PIUTANG	2.h, 8			RECEIVABLES
Piutang <i>murabahah</i> - setelah dikurangi margin ditangguhkan sebesar Rp 1.104.441.551 tahun 2024 dan Rp 1.434.937.761 tahun 2023		4.513.273.477	5.843.977.869	<i>Murabahah receivables - net of deferred margin income amounting to Rp 1,104,441,551 in 2024 and Rp 1,434,937,761 in 2023</i>
Pihak ketiga		6.514.259	7.636.329	Third parties
Pihak berelasi		4.519.787.736	5.851.614.198	Related parties
Jumlah		(143.857.930)	(226.045.419)	Total
Cadangan Kerugian penurunan nilai		4.375.929.806	5.625.568.779	Allowance for impairment losses
Bersih				Net
Piutang <i>Istishna</i> - setelah dikurangi margin ditangguhkan sebesar Rp 653.839 tahun 2024 dan Rp 858.244 tahun 2023		936.303	1.241.639	<i>Istishna receivables - net of deferred margin income amounting to Rp 653,839 in 2024 and Rp 858,244 in 2022,</i>
Pihak ketiga		(9.374)	(12.420)	Third parties
Cadangan Kerugian penurunan nilai		926.929	1.229.219	Allowance for impairment losses
Bersih				Net
Piutang <i>Ijarah</i>		1.035.059	1.069.847	<i>Ijarah receivables</i>
Pihak ketiga		(1.034.273)	(1.048.119)	Third parties
Cadangan Kerugian penurunan nilai		786	21.728	Allowance for impairment losses
Bersih				Net
JUMLAH PIUTANG		4.521.759.098	5.853.925.684	TOTAL RECEIVABLES
Cadangan Kerugian penurunan nilai		(144.901.577)	(227.105.958)	Allowance for impairment losses
Bersih		4.376.857.521	5.626.819.726	Net
PINJAMAN QARDH	2.i, 9			FUNDS OF QARDH
Pihak ketiga		328.383.207	633.255.814	Third parties
Pihak berelasi		128.760	348.607	Related parties
Jumlah		328.511.967	633.604.421	Total
Cadangan Kerugian penurunan nilai		(7.954.966)	(62.110.112)	Allowance for impairment losses
Bersih		320.557.001	571.494.309	Net

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements
are an integral part of financial statements

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31 2024	31 Desember / December 31 2023	
PEMBIAYAAN MUDHARABAH	2.j, 10			MUDHARABAH FINANCING
Pihak ketiga		379.943.724	593.853.169	Third parties
Pihak berelasi		--	--	Related parties
Jumlah		379.943.724	593.853.169	Total
Cadangan Kerugian penurunan nilai		(3.940.955)	(8.117.780)	Allowance for impairment losses
Bersih		376.002.769	585.735.389	Net
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH	2.j, 11			MUSYARAKAH FINANCING
Pihak ketiga		11.512.663.515	15.370.264.074	Third parties
Pihak berelasi		14.649.264	11.256.269	Related parties
Jumlah		11.527.312.779	15.381.520.343	Total
Cadangan Kerugian penurunan nilai		(146.423.375)	(225.318.307)	Allowance for impairment losses
Bersih		11.380.889.404	15.156.202.036	Net
PENYERTAAN SAHAM	2.m, 12			INVESTMENT IN SHARES
Cadangan Kerugian penurunan nilai		407.711.237	407.711.237	Allowance for impairment losses
Bersih		(85.242.400)	(85.242.400)	Net
		322.468.837	322.468.837	
TAGIHAN AKSEPTASI	2.k, 13.a			ACCEPTANCES RECEIVABLE
Pihak ketiga		164.057.223	153.615.400	Third parties
Cadangan Kerugian penurunan nilai		(74.485.805)	(71.869.517)	Allowance for impairment losses
Jumlah		89.571.418	81.745.883	Total
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH	2.n, 14			ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH
Pihak ketiga		8.853.341	4.401.099	Third parties
Pihak berelasi		346.328	--	Related parties
Akumulasi penyusutan		(3.000.875)	(2.496.015)	Accumulated depreciation
Jumlah		6.198.794	1.905.084	Total
Cadangan Kerugian penurunan nilai		--	--	Allowance for impairment losses
Nilai buku - neto		6.198.794	1.905.084	Book value - net
ASET TETAP	2.p, 15			PREMISES AND EQUIPMENT
setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.388.196.903 tahun 2024 dan Rp1.345.451.127 tahun 2023		3.366.550.410	2.791.497.162	net of accumulated depreciation of Rp1,388,196,903 in 2024 and Rp1,345,451,127 in 2023
ASET PAJAK TANGGUHAN - NETO	2.ae, 23.d	140.940.759	138.192.371	DEFERRED TAX ASSETS - NET
ASET LAIN-LAIN - NETO	16	4.208.820.873	3.953.960.548	OTHER ASSETS - NET
JUMLAH ASET		60.022.876.676	66.953.058.812	TOTAL ASSETS

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements
are an integral part of financial statements

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31 2024	31 Desember / December 31 2023	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND STOCKHOLDERS' EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS SEGERA	2.u, 17	298.501.662	164.382.213	LIABILITIES DUE IMMEDIATELY
BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN	18	50.454.915	82.574.510	UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING
SIMPANAN	2.v, 19			DEPOSITS
Giro <i>wadiah</i>				<i>Wadiah demand deposits</i>
Pihak ketiga		3.232.383.291	3.935.171.308	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi		38.359.301	29.371.748	<i>Related parties</i>
Jumlah Giro <i>wadiah</i>		3.270.742.592	3.964.543.056	<i>Total Wadiah demand deposits</i>
Tabungan <i>wadiah</i>				<i>Wadiah saving deposits</i>
Pihak ketiga		7.411.058.614	7.042.955.324	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi		18.027.361	14.750.304	<i>Related parties</i>
Jumlah Tabungan <i>wadiah</i>		7.429.085.975	7.057.705.628	<i>Total Wadiah saving deposits</i>
Jumlah Simpanan		10.699.828.567	11.022.248.684	<i>Total Deposits</i>
LIABILITAS KEPADA BANK INDONESIA	2.z, 21	1.409.965.320	2.169.678.250	LIABILITIES TO BANK INDONESIA
SIMPANAN DARI BANK LAIN	2.w, 20	27.662.402	46.293.395	DEPOSITS FROM OTHER BANKS
LIABILITAS AKSEPTASI	2.k, 13.e	31.246.806	8.184.473	ACCEPTANCES PAYABLE
PINJAMAN YANG DITERIMA	22	500.000.000	1.000.000.000	FUND BORROWINGS
UTANG PAJAK	23	33.113.310	20.090.991	TAXES PAYABLE
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	2.ah, 24	856.483	853.478	ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
ESTIMASI LIABILITAS IMBALAN KERJA	2.ad, 25	144.706.550	127.431.279	ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYMENT BENEFIT
LIABILITAS LAIN-LAIN	26	293.010.152	406.501.759	OTHER LIABILITIES
JUMLAH LIABILITAS		13.489.346.167	15.048.239.032	TOTAL LIABILITIES
DANA SYIRKAH TEMPORER				TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Bukan bank	2x, 27			Non-banks
Giro <i>mudharabah</i>				<i>Mudharabah demand deposits</i>
Pihak ketiga		2.385.441.026	2.127.075.777	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi		3.387.572	3.961.233	<i>Related parties</i>
Jumlah giro <i>mudharabah</i>		2.388.828.598	2.131.037.010	<i>Total mudharabah demand deposits</i>
Tabungan <i>mudharabah</i>				<i>Mudharabah savings deposits</i>
Pihak ketiga		9.329.536.460	9.571.696.547	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi		10.887.952	12.318.121	<i>Related parties</i>
Jumlah tabungan <i>mudharabah</i>		9.340.424.412	9.584.014.668	<i>Total mudharabah savings deposits</i>
Deposito <i>mudharabah</i>				<i>Mudharabah time deposits</i>
Pihak ketiga		12.202.130.917	15.637.717.185	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi		7.077.837.944	9.184.172.522	<i>Related parties</i>
Jumlah deposito		19.279.968.861	24.821.889.707	<i>Total mudharabah time deposits</i>
Jumlah dana <i>syirkah temporer</i> dari bukan bank		31.009.221.871	36.536.941.385	<i>Total temporary syirkah funds from non-banks</i>
Bank				Banks
Giro <i>mudharabah</i>		283.484.976	165.866.424	<i>Mudharabah demand deposits</i>
Tabungan <i>mudharabah</i>		761.303.854	747.921.339	<i>Mudharabah savings deposits</i>
Deposito <i>mudharabah</i>		1.408.116.855	1.754.879.725	<i>Mudharabah time deposits</i>
Jumlah dana <i>syirkah temporer</i> dari bank		2.452.905.685	2.668.667.488	<i>Total temporary syirkah funds from banks</i>
Surat Berharga Yang Diterbitkan				Securities Issued
Sukuk <i>mudharabah</i>		4.697.824.621	4.657.824.621	<i>Mudharabah sukuk</i>
Sukuk <i>mudharabah</i> subordinasi		2.000.000.000	2.000.000.000	<i>Subordinated mudharabah sukuk</i>
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> antar Bank (SIMA)		625.000.000	475.000.000	<i>Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)</i>
Sertifikat Berdasarkan Prinsip Syariah (SIPA)		530.000.000	350.000.000	<i>Sharia Based Certificate (SIPA)</i>
Jumlah Surat Berharga yang diterbitkan		7.852.824.621	7.482.824.621	<i>Total of Securities Issued</i>
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER		41.314.952.177	46.688.433.494	TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements
are an integral part of financial statements

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31 2024	31 Desember / December 31 2023	
EKUITAS				STOCKHOLDERS' EQUITY
Modal saham - nilai nominal				Capital Stock - par value of
Rp 300 per saham seri A,				Rp 300 for series A shares,
Rp 150 per saham seri B,				Rp 150 for series B shares
Rp 45 per saham seri C tahun 2024 dan 2023				Rp 45 for series C shares in 2024 and 2023
Modal dasar - 551.099.450 saham				Authorized - 551,099,450 series
seri A, 28.231.134.433 saham seri B dan				A shares, 28,231,134,433 series B shares
26.666.666.666 saham seri C tahun 2024 dan 2023				and 26,666,666,666 series C shares in 2024 and 2023
Modal ditempatkan dan disetor penuh				Issued and fully paid -
551.099.450 saham seri A,				551,099,450 series A shares,
6.254.035.440 saham seri B dan				6,254,035,440 series B shares and
26.540.026.071 saham seri C tahun 2024 dan 2023	1.c, 28	2.297.736.324	2.297.736.324	26,540,026,071 series C shares in 2024 and 2023
Tambahan modal disetor - bersih	29	1.571.133.406	1.571.133.406	Additional paid-in capital-net
Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali program				Gain (loss) from remeasurement
imbangan pasti - setelah pajak	25	70.079.987	86.345.476	of defined benefit plan - net of tax
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi dari				Unrealized gain (loss) from changes
perubahan harga pasar efek tersedia				in fair value of available
untuk dijual (AFS)	7	--	--	for sale securities (AFS)
Surplus revaluasi atas aset tetap -				Revaluation surplus on premises
setelah pajak	15	552.841.853	558.557.131	and equipment - net of tax
Saldo laba	30	726.786.762	702.613.949	Retained earnings
Jumlah Ekuitas		5.218.578.332	5.216.386.286	Total Stockholders' Equity
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		60.022.876.676	66.953.058.812	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND STOCKHOLDERS' EQUITY

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements
are an integral part of financial statements

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31 2024	31 Desember / December 31 2023	
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB	31			REVENUE FROM FUND MANAGEMENT AS MUDHARIB
Pendapatan dari penjualan		339.433.703	403.461.018	Income from sales
Pendapatan dari bagi hasil		957.112.352	877.808.952	Income from revenue sharing
Pendapatan dari <i>ijarah</i> - bersih		346.893	142.674	Income from revenue from Ijarah - net
Pendapatan usaha utama lainnya		837.015.179	871.974.916	Other main operating income
Jumlah pendapatan bank sebagai <i>mudharib</i>		2.133.908.127	2.153.387.560	Total revenue from fund management as mudharib
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER	32	(1.953.820.646)	(1.948.548.274)	THIRD PARTIES' SHARE ON RETURNS OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
HAK BAGI HASIL MILIK BANK		180.087.481	204.839.286	BANK'S SHARE IN REVENUE SHARING
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	33	855.413.977	904.545.750	OTHER OPERATING INCOME
BEBAN OPERASIONAL				OPERATING EXPENSES
Umum dan administrasi	35	(479.078.972)	(475.703.758)	General and administrative
Karyawan	34	(666.332.314)	(634.958.440)	Employee
Bonus giro <i>wadiah</i>		(6.105.655)	(12.089.509)	Bonus on wadiah demand deposits
Lain-lain	37	(115.677.509)	(85.531.410)	Others
Jumlah beban usaha		(1.267.194.450)	(1.208.283.117)	Total other operating expenses
(BEBAN)/ PEMBALIKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF	36	213.134.456	94.154.488	(PROVISION)/ REVERSAL FOR IMPAIRMENT LOSSES ON EARNING AND NON-EARNING ASSETS
KEUNTUNGAN SELISIH KURS		47.603.548	22.818.601	GAIN ON FOREIGN EXCHANGES
LABA USAHA		29.045.012	18.075.008	INCOME FROM OPERATIONS
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL				NON-OPERATING INCOME (EXPENSE)
Pendapatan Non Operasional	38	48.938.892	39.386.680	Non-Operating Revenue
Beban Non Operasional	39	(57.569.159)	(43.355.658)	Non-Operating Expense
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL- NETO		(8.630.267)	(3.968.978)	NON-OPERATING (EXPENSE) - NET
LABA SEBELUM PAJAK		20.414.745	14.106.030	INCOME BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	23			INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Pajak Kini		(117.896)	(415.282)	Current Tax
Pajak Tangguhan		(1.839.314)	(396.496)	Deferred Tax
		(1.957.210)	(811.778)	
LABA BERSIH		18.457.535	13.294.252	NET INCOME
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHERS COMPREHENSIVE INCOME
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi				Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	25	(20.853.192)	5.999.592	Remeasurement on defined benefit plan
Pajak penghasilan terkait		4.587.703	(1.319.910)	Related income tax
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will be reclassified to profit or loss
Kenaikan nilai aset keuangan atas efek-efek yang tersedia dijual yang belum direalisasi	7	-	1.877.631	Unrealized gain in value of available-for-sale mutual fund
Pajak penghasilan terkait		-	(413.079)	Related income tax
Jumlah laba komprehensif lain bersih setelah pajak		(16.265.489)	6.144.234	Total other comprehensive income net of tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		2.192.046	19.438.486	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR (dalam nilai penuh)	40	0,55	0,40	BASIC EARNINGS PER SHARE (In full amount)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements
are an integral part of financial statements

Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan diterbitkan penuh/ Issued and Fully paid capital	Tambah modal disetor/ Additional paid-in capital	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income					Jumlah Ekuitas/ Total equity
			Pengukuran kembali program setelah pajak bersih/ Remeasurement of defined benefit plan - net of tax	Surplus atas aset tetap - setelah pajak bersih/ Surplus revaluation on premises and equipment - net of tax	Revaluasi efek tersedia untuk dijual setelah pajak bersih/ AFS investment revaluation - net of tax	Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Saldo laba / Retained earnings Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	
Saldo per 31 Desember 2022	2.297.736.324	1.571.133.406	81.665.794	564.272.409	(1.464.552)	--	688.606.193	5.201.949.574
Laba belum direalisasi atas surat berharga yang tersedia untuk dijual	--	--	--	--	1.464.552	--	--	1.464.552
Pemindahan penyusutan aset tetap	--	--	--	(5.715.278)	--	--	5.715.278	--
Pembayaran Dividen	--	--	--	--	--	--	(5.001.774)	(5.001.774)
Pengukuran kembali program imbalan pasti	--	--	4.679.682	--	--	--	--	4.679.682
Laba bersih tahun berjalan	--	--	--	--	--	--	13.294.252	13.294.252
Saldo per 31 Desember 2023	2.297.736.324	1.571.133.406	86.345.476	558.557.131	--	--	702.613.949	5.216.386.286
Laba belum direalisasi atas surat berharga yang tersedia untuk dijual	--	--	--	--	--	--	--	--
Pemindahan penyusutan aset tetap	--	--	--	(5.715.278)	--	--	5.715.278	--
Pembayaran Dividen	--	--	--	--	--	--	--	--
Pengukuran kembali program imbalan pasti	--	--	(16.265.489)	--	--	--	--	(16.265.489)
Laba bersih tahun berjalan	--	--	--	--	--	--	18.457.535	18.457.535
Saldo per 31 Desember 2024	2.297.736.324	1.571.133.406	70.079.987	552.841.853	--	--	726.786.762	5.218.578.332

Unrealized gain on marketable securities of available for sale

Depreciation transfer for premises and equipment

Dividend Payout

Remeasurement of defined benefit plan

Net income for the year

Balance as of December 31, 2023

Unrealized gain on marketable securities of available for sale

Depreciation transfer for premises and equipment

Dividend Payout

Remeasurement of defined benefit plan

Net income for the year

Balance as of December 31, 2024

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of financial statements

	Catatan/ Notes	31 Desember / Desember 31 2024	31 Desember / December 31 2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib		2.073.359.565	2.106.051.177	Revenue receipt from fund management as mudharib
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer		(1.921.701.051)	(1.905.685.309)	Payment of temporary syirkah funds
Penerimaan pendapatan operasional lainnya		846.705.372	912.325.529	Receipt from other operating revenue
Penerimaan kembali piutang dan pembiayaan yang telah dihapusbukukan		16.272.963	10.770.587	Receipt from receivables and and financing already written-off
Pembayaran beban kepegawaian		(717.903.602)	(684.188.101)	Payments for employee expenses
Pembayaran beban operasional lainnya		(524.252.046)	(494.379.954)	Payments for other operating expenses
Pembayaran pajak penghasilan		(15.227.663)	(28.488.711)	Payments of income taxes
Penerimaan pendapatan non operasional		57.647.497	39.386.680	Receipts from non operating income
Pembayaran beban non operasional		(57.569.160)	(43.355.658)	Payments for non operating expenses
Arus kas dari operasi sebelum perubahan aktiva dari kewajiban operasi		(242.668.125)	(87.563.760)	Cash flows from operating activities before changes in operating assets and liabilities
Penurunan (kenaikan) aktiva operasi :				Decrease (increase) in operating assets:
Penempatan Bank Lain		(10.708.850)	39.394.666	Placements with Bank Indonesia & other banks
Piutang		1.249.962.205	758.667.864	Receivables
Pinjaman Qardh		250.937.307	261.754.308	Fund of Qardh
Pembiayaan Mudharabah		209.732.620	(28.691.496)	Mudharabah financing
Pembiayaan Musyarakah		3.775.312.632	(4.740.088.087)	Musyarakah financing
Aktiva yang diperoleh untuk Ijarah - bersih		(4.293.710)	(1.035.179)	Assets acquired for Ijarah - net
Aktiva lain-lain		(323.877.939)	27.789.946	Other assets
Kenaikan (penurunan) kewajiban operasi :				Increase (decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera		133.427.189	47.986.434	liabilities due immediately
Simpanan		(322.420.118)	1.795.119.032	Deposits
Simpanan dari bank lain		(18.630.993)	(13.099.130)	Deposits from other banks
Utang pajak		12.904.423	(1.473.583)	Taxes payable
Liabilitas lain-lain		(807.152.979)	(1.780.394.328)	Other liabilities
Kenaikan Dana Syirkah Temporer		(5.743.481.317)	133.738.302	Increase of Temporary Syirkah Funds
Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Operasi		(1.840.957.655)	(3.587.895.011)	Net Cash Provide (Used) in Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan investasi pada surat berharga		637.277.000	(3.608.820.200)	Acquisition of securities
Hasil penjualan investasi pada surat berharga		(730.669.000)	2.502.468.000	Proceeds from sale of securities
Hasil penjualan aset tetap		776.947	3.611.540	Proceeds from sale of premises and equipment
Pembelian aset tetap		(28.008.345)	(58.182.143)	Acquisition of premises and equipment
Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Investasi		(120.623.398)	(1.160.922.803)	Net Cash Provide (Used) in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pencairan sertifikat investasi mudharabah		330.000.000	825.000.000	Proceed from interbank mudharabah investment
Penerimaan/(Pembayaran) Liabilitas Pada Bank Indonesia		(759.712.930)	2.169.678.250	Receipt/(Paments) from Bank Indonesia Liabilities
Penerimaan pinjaman diterima		500.000.000	1.000.000.000	Receipt from fund borrowing
Pembayaran pinjaman diterima		(1.000.000.000)	(500.000.000)	Payment of fund borrowing
Pembayaran utang dividen		(123.363)	(5.331.525)	Payments of dividend liabilities
Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Pendanaan		(929.836.293)	3.489.346.725	Net Cash Provided (Used) by Financing Activities
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(2.891.417.346)	(1.259.471.089)	NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		7.198.288.581	8.457.759.670	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		4.306.871.234	7.198.288.581	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun				Cash and Cash Equivalents at end of year
terdiri dari:				consist of:
Kas	3	781.262.980	720.209.073	Cash
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	4	2.812.899.226	5.010.479.824	Current Accounts and Placements with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	5	698.239.396	1.463.838.902	Demand deposits with other banks
Penempatan pada Bank Lain	6	14.469.632	3.760.782	Placements with other banks
Jumlah		4.306.871.234	7.198.288.581	Total

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of the consolidated financial statements

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31 2024	31 Desember / December 31 2023	
PENDAPATAN USAHA UTAMA (AKRUAL)		2.120.958.515	2.165.742.827	MAIN OPERATING INCOME (ACCRUAL)
PENGURANG				DEDUCTION
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima dari:				Income during the year in which cash or cash equivalents have not been received from:
Piutang <i>murabahah</i>		11.268.256	(14.281.342)	Murabahah receivables
Piutang <i>istishna</i>		(796)	(332)	Istishna receivables
Piutang <i>ijarah</i>		2.072	11.989	Ijarah receivables
Piutang salam		(7.362.765)	7.362.765	Salam receivables
Pembiayaan <i>mudharabah</i>		(75.491)	5.815.774	Mudharabah financing
Pembiayaan <i>musyarakah</i>		(4.384.615)	47.901.501	Musyarakah financing
Pendapatan Surat Berharga				Income from Marketable Securities
Bank Indonesia		(859.653)	939.514	Bank Indonesia
Surat berharga		42.242.070	17.298.956	Marketable securities
Jumlah		40.829.078	65.048.825	
PENAMBAH				ADDITION
Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan dari:				Income from previous year in which cash have been received in current year from:
Piutang <i>murabahah</i>		(14.281.342)	(25.076.811)	Murabahah receivables
Piutang <i>istishna</i>		(332)	(1.093)	Istishna receivables
Piutang <i>ijarah</i>		11.989	(153)	Ijarah receivables
Piutang salam		7.362.765	-	Salam receivables
Pembiayaan <i>mudharabah</i>		5.815.774	(2.018.521)	Mudharabah financing
Pembiayaan <i>musyarakah</i>		47.901.501	55.052.220	Musyarakah financing
Pendapatan Surat Berharga				Income from Marketable Securities
Bank Indonesia		939.514	(43.340)	Bank Indonesia
Surat berharga		17.298.956	11.817.635	Income from Sukuk
Jumlah		65.048.825	39.729.937	Total
Laba operasi yang tersedia untuk bagi hasil		2.145.178.262	2.140.423.939	Available operating income for profit sharing
PENDAPATAN TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL				AVAILABLE INCOME FOR PROFIT SHARING
Bagi hasil yang menjadi hak Bank Syariah		241.812.531	259.246.340	Profit sharing attributable to Sharia Bank
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana Dirinci atas:	31	1.903.365.731	1.881.177.599	Profit sharing attributable to depositors The details are as follow:
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan		1.852.910.816	1.798.603.089	Distributed profit sharing attributable to depositors
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	18	50.454.915	82.574.510	Undistributed revenue sharing attributable to depositors

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements
are an integral part of the consolidated financial statements

	Catatan / Notes	31 Desember / December 31 2024	31 Desember / December 31 2023	
Sumber Dana Zakat				Sources of Zakat Funds
Internal Bank		332.356	664.527	Internal Bank
Eksternal Bank		4.307.378	5.106.833	External Bank
		4.639.734	5.771.360	
Sumber Dana Wakaf				Sources of Waqf Funds
Internal Bank		1.250	171.060	Internal Bank
Eksternal Bank		453.952	168.457	External Bank
		455.202	339.517	
Penyaluran Dana Zakat				Distribution of Zakat Funds
Baitul Maal Muamalat (BMM)		723.821	1.693.245	Baitul Maal Muamalat (BMM)
BAZNAS		3.915.913	4.481.474	BAZNAS
		4.639.734	6.174.719	
Penyaluran Dana Wakaf				Distribution of Zakat Funds
Baitul Maal Muamalat (BMM)		451.883	333.836	Baitul Maal Muamalat (BMM)
Wakaf Saham ITB		3.319	5.681	ITB Shares waqf
		455.202	339.517	
Surplus/ (Defisit)		-	(403.359)	Surplus/ (Deficit)
Saldo Dana Zakat dan Wakaf pada Awal Tahun		--	403.359	Zakat and Waqf Funds at Beginning of the Year
Saldo Dana Zakat dan Wakaf pada Akhir Tahun		--	-	of Zakat and Waqf Funds at End of the Year

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of financial statements

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31, 2024	31 Desember / December 31, 2023	
Sumber Dana Kebajikan				Sources of Qardhul Hasan Funds
Infaq		483.109	2.352.610	Infaq
Denda		2.540.575	1.019.500	Penalty
Pendapatan non-halal	5b	2.237.206	1.357.334	Non-halal income
Lainnya		454.260	169.894	Others
		5.715.150	4.899.338	
Penggunaan Dana Kebajikan				Uses of Qardhul Hasan Funds
Sumbangan		5.756.784	4.729.444	Donation
Surplus/ (Defisit)		(41.634)	169.894	Surplus/ (Deficit)
Dana Kebajikan pada				Qardhul Hasan Funds
Awal Tahun	2a	171.036	1.142	at Beginning of the Year
Dana Kebajikan pada				Qardhul Hasan Funds
Akhir Tahun	2a	129.402	171.036	at End of the Year

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of financial statements

1. UMUM

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank") didirikan berdasarkan akta No. 1 tanggal 1 November 1991 dari Notaris Yudo Paripurno, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2.2413.HT.01.01.Th.92 tanggal 21 Maret 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1919A Tahun 1992, tambahan Berita Negara No. 34 tanggal 28 April 1992.

Bank telah mengalami perubahan nama yang semula PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk menjadi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sesuai dengan akta No. 104 tanggal 12 November 2008 dari notaris Arry Supratno, S.H., notaris di Jakarta. Akta pernyataan keputusan rapat itu telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No.AHU-98507.AH.01.02.Th.08 tanggal 22 Desember 2008 dan telah dicatat dalam tata usaha pengawasan Bank Indonesia sejak 1 September 2009.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., No. 6 tanggal 13 November 2023 notaris di Jakarta mengenai kenaikan Modal Dasar menjadi Rp5.600.000.000.115 (dalam angka penuh) dan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor menjadi Rp2.297.736.324.240 (dalam angka penuh) sebagai akibat dari *Reverse Stock Split*. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0071588.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 20 November 2023.

Kantor pusat Bank berlokasi di Muamalat Tower, Jln. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 Bank memiliki jaringan unit kerja dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Kantor Cabang	80	80
Kantor Cabang Pembantu	154	155
Kantor Kas	--	--

Branch Offices
Sub-Branch Offices
Cash Offices

1. GENERAL

a. Bank's Establishment and General Information

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (the "Bank") was established based on notarial deed No.1 dated November 1, 1991 of Yudo Paripurno, S.H., notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice in his Decree No.C2.2413.HT.01.01.Th.92 dated March 21, 1992 and was published in State Gazette No.1919A, Supplement No. 34, dated April 28, 1992.

The Bank changed its name from PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk to PT Bank Muamalat Indonesia Tbk based on notarial deed No. 104 dated November 12, 2008 of Arry Supratno, S.H., notary in Jakarta. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No.AHU-98507.AH.01.02.Th.08 dated December 22, 2008 and has been recorded in the administration of Bank Indonesia Supervisory since September 1, 2009.

The Bank's articles of association have been amended several times, the latest was based on the deed No. 51 dated November 13, 2023 of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, concerning the increase of the Company's Authorized Capital to become Rp5,600,000,000,115 (in full amount) and Issued Capital and Paid-up Capital to Rp2,297,736,324,240 (in full amount) as a result of the Reverse Stock Split. The latest amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decree No.AHU-0071588.AH.01.02.Tahun 2023 dated November 20, 2023.

The Bank's head office is located at Muamalat Tower, Jln. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta.

As of December 31, 2024 and December 31, 2023, the Bank has business unit network with details as follows:

1. UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum (lanjutan)

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Bank yang terakhir, maksud dan tujuan kegiatan Bank adalah menyelenggarakan usaha perbankan dengan prinsip Syariah.

Bank telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.131/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No.430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan izin kepada Bank untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah. Sesuai Surat Keputusan Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1994, status Bank meningkat menjadi bank devisa.

Pemegang saham mayoritas Bank adalah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia.

Bank mendirikan Yayasan Baitul Maal Muamalat yang pendiriannya diaktakan dalam akta Notaris Atrino Leswara, S.H., No. 76 tanggal 22 Desember 2000. Salah satu unit usaha yayasan tersebut adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah disahkan sebagai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tanggal 7 November 2001. Tujuan pendirian Baitul Maal Muamalat ini adalah untuk mendorong terwujudnya manajemen zakat, *infaq* dan *shadaqah* yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial. Bank menyalurkan penerimaan zakat dan dana kebajikan (*Qardhul Hasan*) kepada Lembaga Amil Zakat tersebut, sehingga Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* dan dana *qardhul hasan*.

1. GENERAL (Continued)

a. Bank's Establishment and General Information (continued)

In accordance with article 3 of the Bank's latest articles of association, the scope of its activities is to engage in banking activities based on Islamic Sharia principles.

The Bank has obtained a license to operate as a commercial bank based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.430/KMK.013/1992 concerning the Granting of the Company's Business Permit in Jakarta on April 24, 1992, as amended by the Decree of the Minister of Finance No. 131/KMK.017/1995 concerning Amendment to Decree of the Minister of Finance No.430/KMK.013/1992 concerning the Granting of the Company's Business Permit dated March 30, 1995 which in its decision gave permission to the Bank to be able to conduct business as a commercial bank based on sharia principles. In accordance with the Decree of Bank Indonesia No.27/76/KEP/DIR dated October 27, 1994, the status of the Bank was upgraded to foreign exchange bank.

The majority shareholder of the Bank is Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia.

*The Bank established Baitul Maal Muamalat Foundation based on notarial deed No. 76 dated December 22, 2000 of Atrino Leswara, S.H. One of the business units under this foundation is the Zakat Management Board (Lembaga Amil Zakat), which was approved to operate as a National Zakat Management Board (Badan Amil Zakat Nasional) on November 7, 2001. The objective of the establishment of Baitul Maal Muamalat is to accelerate the effective management of zakat, infaq, and shadaqah. The zakat and charity funds (*Qardhul Hasan* funds) received by the Bank are channeled to the Zakat Management Board, therefore, the Bank is not directly involved in the management of zakat, infaq, shadaqah and *qardhul hasan* funds.*

1. UMUM (Lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2024 ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 24 tanggal 18 Desember 2024, Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2023 ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 22 tanggal 9 Desember 2022, Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Rincian Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama (Independen)	Sapto Amal Damandari*
Komisaris (Independen)	Sartono
Komisaris (Independen)	--
Komisaris	Andre Mirza Hartawan

*) Telah lulus *Fit and Proper Test* dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24 Maret 2025

Susunan Dewan Direksi pada tanggal 31 Desember 2024 ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 24 tanggal 18 Desember 2024, Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Susunan Dewan Direksi pada tanggal 31 Desember 2023 ditetapkan berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 22 tanggal 9 Desember 2022, Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Rincian Susunan Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024
Dewan Direksi	
Direktur Utama	Imam Teguh Saptono*
Direktur Kepatuhan	Karno
Direktur	--
Direktur	--
Direktur	--

*) Telah lulus *Fit and Proper Test* dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24 Maret 2025

1. GENERAL (Continued)

b. Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees

The composition of the Bank's Board of Commissioners as of December 31, 2024 was determined based on Resolution of the Bank's Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 24 dated December 18, 2024, of Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. The composition of the Bank's Board of Commissioners as of December 31, 2023 was determined based on Resolution of the Bank's Annual General Meeting of Shareholders No. 22 dated December 9, 2022, of Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Details of the Composition of the Board of Commissioners are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	Board of Commissioners
--	--	President Commissioner (Independent)
Sartono	Sartono	Commissioner (Independent)
Amin Said Husni	Amin Said Husni	Commissioner (Independent)
Andre Mirza Hartawan	Andre Mirza Hartawan	Commissioner

*) Passed the *Fit and Proper Test* from the Financial Services Authority on March 24, 2025.

The composition of the Bank's Board of Directors as of December 31, 2024 was determined based on Resolution of the Bank's Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 24 dated December 18, 2024, of Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. The composition of the Bank's Board of Directors as of December 31, 2023 was determined based on Deed of Resolution of the Bank's Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 22 dated December 9, 2022, of Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Details of the Composition of the Board of Directors are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	Board of Directors
Indra Falatehan	Indra Falatehan	President Director
Karno	Karno	Compliance Director
Hery Syafril	Hery Syafril	Director
Suhendar	Suhendar	Director
Wahyu Avianto	Wahyu Avianto	Director

*) Passed the *Fit and Proper Test* from the Financial Services Authority on March 24, 2025

1. UMUM (Lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Susunan Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No.51 tanggal 30 Agustus 2021, Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Rincian Susunan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2024
Dewan Pengawas Syariah	
Ketua	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si.
Anggota	Hj. Siti Haniatunnisa LLB., M.H.
Anggota	Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2024 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No.035/B/DIR-KPTS/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 dan pada tanggal 31 Desember 2023 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No.003/B/DIR-KPTS/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2024
Ketua	Sartono
Anggota	Saiful Anwar
Anggota	Karim Anggar Prianto
Anggota	--

Kepala Divisi Internal Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Tegar Sangga Barkah sesuai Surat Keputusan No.0336/HSE/KEP/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023.

1. GENERAL (Continued)

b. Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board as of December 31, 2024 and 2023 was determined based on Deed of Resolution of the Bank's Extraordinary General Meeting of Shareholders No.51 dated August 30, 2021, of Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Details of the Composition of the Sharia Supervisory Board are as follows:

	31 Desember / December 31, 2023	Sharia Supervisory Board
Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si.		Chairman
Hj. Siti Haniatunnisa LLB., M.H.		Member
Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.		Member

The composition of the Bank's Audit Committee as of December 31, 2024 based on Decision Letter No.035/B/DIR-KPTS/VIII/2024 dated August 16, 2024 and for December 31, 2023 based on Decision Letter No.003/B/DIR-KPTS/I/2024 dated January 5, 2024 is as follows:

	31 Desember / December 31, 2023	
--		Chairman
Sartono		Member
Dwi Sasongko		Member
Karim Anggar Prianto		Member

The Bank's Head of Internal Audit Division as of December 31, 2024 and December 31, 2023 is Tegar Sangga Barkah, in accordance with the Decision Letter of No.0336/HSE/KEP/VIII/2023 dated August 26, 2023.

1. UMUM (Lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Hayunaji sesuai Surat Keputusan Direksi No. 218/HCE/PKWTT/IX/2018 tanggal 6 September 2018.

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 dijelaskan pada catatan 34.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, Bank masing-masing memiliki 3.703 orang karyawan (2.413 karyawan tetap, 95 karyawan kontrak dan 1.195 tenaga kerja borongan) dan 3.851 orang karyawan (2.487 karyawan tetap, 110 karyawan kontrak dan 1.254 tenaga kerja borongan).

c. Penawaran Umum Saham dan Sukuk Subordinasi *Mudharabah*

Penawaran Umum Saham

Pada tahun 1993, Bank melakukan Penawaran Umum saham sejumlah 2.489.090 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (dalam nilai penuh) per saham. Bank telah mendapatkan surat pernyataan efektif sebagai perusahaan publik melalui surat ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dengan No.S-1860/PM/1993 tanggal 28 Oktober 1993.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank yang tercantum dalam akta Notaris Yudo Paripurno, S.H., No. 45, tanggal 22 September 1998, para pemegang saham telah menyetujui untuk menerbitkan saham baru Seri B sebanyak 172.504.936 saham dengan harga penawaran Rp1.025 (dalam nilai penuh) per saham, melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Rights Issue*). Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak memesan Efek Terlebih Dahulu ini telah dinyatakan efektif oleh Ketua BAPEPAM dengan suratnya No.S-1265/PM/98 pada tanggal 19 September 1998.

1. GENERAL (Continued)

b. Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

The Bank's Corporate Secretary as of December 31, 2024 and December 31, 2023 is Hayunaji based on the Bank's Director Decision Letter No.218/HCE/PKWTT/IX/2018 dated September 6, 2018.

Salaries and other compensation paid to the Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board and Audit Committee for the years ended December 31, 2024 and 2023 are described in note 34.

As of December 31, 2024 and December 31, 2023, the Bank has 3,703 employees (2,413 permanent employees, 95 contract employees and 1,195 temporary workers) and 3,851 employees (2,487 permanent employees, 110 contract employees and 1,254 temporary workers), respectively.

c. Bank's Public Offering of Shares and Subordinated *Mudharabah* Sukuk

Bank's Public Offering of Shares

In 1993, the Bank conducted an initial public offering of 2,489,090 shares with a par value of Rp1,000 (in full amount) per share. The Bank obtained the notice of effectivity for the initial public offering from the chairman of the Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM) under his letter No.S-1860/PM/1993 dated October 28, 1993.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders as stated in notarial deed No. 45 of Yudo Paripurno, S.H., dated September 22, 1998, the shareholders approved the issuance of 172,504,936 B Series shares at an offering price of Rp1,025 (in full amount) per share through Rights Issue I with preemptive rights. The Bank obtained the notice of effectivity for the rights issue from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM) under his letter No.S-1265/PM/98 dated September 19, 1998.

1. UMUM (Lanjutan)

c. Penawaran Umum Saham dan Sukuk Subordinasi *Mudharabah* (lanjutan)

Penawaran Umum Saham (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tercantum dalam akta Notaris Yudo Paripurno, S.H., No. 28 tanggal 29 Oktober 2002, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT) II saham Seri C sebanyak-banyaknya 276.975.502 saham, senilai Rp138.487.781 melalui proses Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Rights Issue*) II.

Jumlah saham Seri C yang terjual melalui PUT II ini sebesar 208.727.863 lembar saham dengan harga saham Rp500 (dalam nilai penuh).

Sehubungan dengan peningkatan modal disetor tersebut, anggaran dasar pasal 4 telah diubah seperti dinyatakan dalam akta Notaris Yudo Paripurno, S.H., No. 19 tanggal 21 Mei 2003. Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu telah dinyatakan efektif oleh Ketua BAPEPAM dengan suratnya No. S-24668/PM/2002 tanggal 15 November 2002.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tercantum dalam akta notaris Arry Supratno, S.H., No. 237 tanggal 28 April 2005, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh melalui Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas Saham Seri C dengan nilai nominal Rp500 (dalam Rupiah penuh) per lembar saham dan dengan harga penawaran Rp800 (dalam nilai penuh) per lembar saham serta dengan jumlah sebanyak banyaknya 498.743.597 lembar saham. Sehubungan dengan penambahan Saham Seri C ini, pemegang saham menyetujui perubahan ayat 4 dari anggaran dasar Bank yang berkaitan dengan peningkatan jumlah modal dasar dari Rp1.000.000.000 menjadi Rp2.000.000.000 yang kemudian diperbaiki menjadi Rp1.950.000.000 berdasarkan akta notaris Arry Supratno S.H., No.150 tanggal 27 September 2005. Penawaran Umum Terbatas III dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu telah dinyatakan efektif oleh Ketua BAPEPAM dengan suratnya No.S-863/PM/2005 tanggal 26 April 2005.

1. GENERAL (Continued)

c. Bank's Public Offering of Shares and Subordinated *Mudharabah* Sukuk (continued)

Bank's Public Offering of Shares (continued)

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders as stated in notarial deed No. 28 of Yudo Paripurno, S.H., dated October 29, 2002, the shareholders approved the increase of issued and paid-in capital through the issuance of up to a maximum of 276,975,502 C Series shares amounting to Rp138,487,781 through Limited Public Offering with pre-emptive rights (Rights Issue) II.

The shareholders exercised their rights to acquire additional 208,727,863 C Series shares with par value of Rp500 (in full amount) per share during the Rights Issue II.

As a result of the increase in the paid-in capital, article 4 of the articles of association was amended, as stated in notarial deed No. 19 dated May 21, 2003 of Yudo Paripurno, S.H. The Bank obtained the notice of effectivity for the Limited Public Offering with pre-emptive rights (Rights Issue) II from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM) under his letter No. S-24668/PM/2002 dated November 15, 2002.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders as stated in notarial deed No. 237 dated April 28, 2005 of Arry Supratno, S.H., the shareholders approved the increase of issued and paid-in capital through the issuance of C Series shares through Limited Public Offering III with pre-emptive rights (Rights Issue III) up to a maximum of 498,743,597 shares with par value of Rp500 (in full amount) per share and offering price of Rp800 (in full amount) per share. Consequently, the shareholders agreed to amend article 4 of the Bank's articles of Association, concerning authorized share capital from Rp1,000,000,000 to Rp2,000,000,000, which was subsequently revised to Rp1,950,000,000 under notarial deed No.150 dated September 27, 2005 of Arry Supratno, S.H. Limited Public Offering (Right Issue) III with pre-emptive rights has been declared effective by the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM) under his letter No.S-863/PM/2005 dated April 26, 2005.

1. UMUM (Lanjutan)

c. Penawaran Umum Saham dan Sukuk Subordinasi Mudharabah (lanjutan)

Penawaran Umum Saham (lanjutan)

Jumlah Saham Seri C yang terjual melalui PUT III tersebut berjumlah 446.194.051 lembar saham dengan rincian 97.093.489 lembar saham kepada pemegang saham lama dan 349.100.562 lembar saham kepada pembeli siaga. Penambahan modal yang diperoleh melalui PUT III tersebut berjumlah Rp223.097.025 serta tambahan modal disetor sejumlah Rp133.858.215.

Melalui Surat Bapepam-LK No. S-5807/BL/2010 tanggal 28 September 2010, Bank telah memperoleh pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Terbatas IV dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 820.251.749 saham. Setiap pemegang saham yang memiliki saham biasa Seri C mendapatkan 1 (satu) hak untuk membeli 1 (satu) saham biasa Seri C dengan nilai nominal Rp500 per saham (dalam nilai penuh) dengan harga pelaksanaan Rp1.161 per saham (dalam nilai penuh). Penambahan modal yang diperoleh dari PUT IV tersebut berjumlah Rp673.093.004 serta tambahan modal disetor saham berjumlah Rp383.216.603.

Pada tanggal 7 November 2013, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No.S-358/D.04/2013 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT V) Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 2.815.917.885 saham. Setiap pemegang saham yang memiliki 4 (empat) saham biasa seri B mendapatkan 1 (satu) hak untuk membeli 1 (satu) saham biasa seri B dengan nilai nominal Rp100 per saham (dalam nilai penuh) dengan harga pelaksanaan Rp480 per saham (dalam nilai penuh). Penambah modal yang diperoleh dari PUT V tersebut berjumlah Rp281.591.788 serta tambahan modal disetorkan berjumlah Rp1.065.194.096.

1. GENERAL (Continued)

c. Bank's Public Offering of Shares and Subordinated Mudharabah Sukuk (continued)

Bank's Public Offering of Shares (continued)

The total amount of C Series shares issued in Rights Issue III was 446,194,051 shares, of which 97,093,489 shares were purchased by existing shareholders and 349,100,562 shares were purchased by standby buyers. The total additional share capital gained from Rights Issue III amounted to Rp223,097,025 and additional paid-in capital amounted to Rp133,858,215.

Under Letter No. S-5807/BL/2010 dated September 28, 2010 of Bapepam-LK, the Bank obtained the notice of effectivity for the Limited Offering of 820,251,749 shares with pre-emptive rights, through Rights Issue IV. Every holder of C series shares shall receive 1 (one) right to purchase 1 (one) new C Series share with par value of Rp500 per share (in full amount) at the exercise price of Rp1,161 per share (in full amount). Additional share capital gained from Rights Issue IV amounted to Rp673,093,004 and additional paid in capital amounted to Rp383,216,603.

On November 7, 2013, the Bank obtained the notice of effectivity from the Board of Commissioner of Financial Services Authority in their letter No. S-358/D.04/2013 for its Limited Public Offering (Rights Issue V) of 2,815,917,885 shares with pre-emptive rights to shareholders. Every holder of 4 (four) B series shares shall receive 1 (one) right to purchase 1 (one) new B series share with par value of Rp100 per share (in full amount) at the exercise price of Rp480 per share (in full amount). Additional share capital gained from Rights Issue V amounted to Rp281,591,788 and additional paid in capital amounted to Rp1,065,194,096.

1. UMUM (Lanjutan)

c. Penawaran Umum Saham dan Sukuk Subordinasi *Mudharabah* (lanjutan)

Penawaran Umum Saham (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tercantum dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, No. 51 tanggal 30 Agustus 2021, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh melalui Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas Saham Seri C dengan nilai nominal Rp30 (dalam Rupiah penuh) per lembar saham serta dengan jumlah sebanyak banyaknya 40.000.000.000 lembar saham. Sehubungan dengan penambahan Saham Seri C ini, pemegang saham menyetujui perubahan ayat 4 dari anggaran dasar Bank yang berkaitan dengan peningkatan jumlah modal dasar menjadi Rp5.600.000.000.

Pada tanggal 16 Desember 2021, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No.S-237/D.04/2021 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT VI) Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak banyaknya 39.810.039.107 (dalam nilai penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp30. Pencatatan atas penambahan modal yang diperoleh dari PUT VI tersebut berjumlah Rp1.194.301.173.

Sukuk Subordinasi *Mudharabah* Jangka Panjang Yang Diterbitkan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Muamalat Indonesia Tahun 2022

Pada Maret 2022, Bank telah menerbitkan sukuk subordinasi *mudharabah* jangka panjang tanpa melalui penawaran umum dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000.000. Pembayaran pendapatan bagi hasil pertama kali dilakukan pada tanggal 15 Juni 2022, sedangkan pembayaran pendapatan bagi hasil terakhir akan dilakukan pada tanggal 15 Maret 2032. Pokok sukuk akan jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 15 Maret 2032.

1. GENERAL (Continued)

c. Bank's Public Offering of Shares and Subordinated *Mudharabah* Sukuk (continued)

Bank's Public Offering of Shares (continued)

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders as stated in notarial deed No. 51 dated August 30, 2021 of Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, the shareholders approved the increase of issued and paid-in capital through the issuance of C Series shares through Limited Public Offering VI (Rights Issue VI) with pre-emptive rights up to a maximum of 40,000,000,000 shares with par value of Rp30 (in full amount) per share. Consequently, the shareholders agreed to amend article 4 of the Bank's articles of Association, concerning authorized share capital to Rp5,600,000,000.

On December 16, 2021, the Bank obtained the notice of effectivity from the Board of Commissioner of Financial Services Authority in their letter No.S-237/D.04/2021 for its Limited Public Offering (Rights Issue VI) of 39,810,039,107 (in full amount) shares with par value of Rp30. Additional share capital gained from Rights Issue VI amounted to Rp1,194,301,173.

Long Term Subordinated *Mudharabah* Sukuk Without Public Offering of Bank Muamalat 2022

In March 2022, the Bank issued long term subordinated *mudharabah* sukuk without public offering with total par value of Rp2,000,000,000. The initial profit-sharing payment was made on June 15, 2022, and the last profit sharing will be paid on March 15, 2032. Sukuk principal will mature and be repaid on March 15, 2032.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.

Berdasarkan PSAK No. 401 (Revisi 2016), laporan keuangan bank syariah terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- (i) Laporan posisi keuangan;
- (ii) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
- (iii) Laporan perubahan ekuitas;
- (iv) Laporan arus kas;
- (v) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
- (vi) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
- (vii) Laporan sumber dana dan penggunaan dana kebajikan; dan
- (viii) Catatan atas laporan keuangan.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai dengan prinsip syariah.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan penempatan pada Bank lain yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal laporan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan Bank yang menggunakan dasar akrual dan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.

Laporan sumber dan penyaluran zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana dan penyaluran dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Financial Statements Presentation

Statement of Compliance

The financial statements have been prepared on a historical cost basis, except for some accounts that were assessed using another measurement basis as explained in the accounting policies of the account. The financial statements have been prepared on accrual basis, except for statement of cash flows and statement of reconciliation of income and revenue sharing.

Based on SFAS No. 401 (Revised 2016), sharia banks' financial statements consist of the following components:

- (i) Statement of financial position;*
- (ii) Statement of profit or loss and other comprehensive income;*
- (iii) Statement of changes in equity;*
- (iv) Statement of cash flows;*
- (v) Statement of reconciliation of income and revenue sharing;*
- (vi) Statement of sources and distribution of zakat funds;*
- (vii) Statement of sources and uses of qardhul hasan funds; and*
- (viii) Notes to the financial statements.*

Statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows are the financial statements reflecting the commercial bank activities based on sharia principles.

The statement of cash flows was prepared based on the direct method with cash flows classified into cash flows from operating, investing and financing activities. For the purpose of cash flows statement, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and placements with other banks with maturity within 3 (three) months since the date of the report which are not pledged as collateral and not restricted.

The statement of reconciliation of income and revenue sharing shows reconciliation between the Bank's income which is prepared under accrual basis and revenue sharing to fund owner which is prepared under cash basis.

Statement of sources and distribution of zakat represents a statement showing the sources and the uses of zakat funds in a certain period and the undistributed funds on specific dates.

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu dan saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* dan dana kebajikan. Penyaluran dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* dan dana kebajikan dikelola oleh Yayasan Baitul Maal Muamalat.

Mata uang penyajian dan fungsional yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan kecuali, bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam ribuan Rupiah.

Pembukuan Bank, diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Bank beroperasi. Transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu kurs *Reuters* pada pukul 16:00 WIB (Waktu Indonesia Barat). Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laba rugi tahun yang bersangkutan.

Transaksi valuta asing pada bank Syariah (di luar jual beli bank *notes*) hanya dapat dilakukan untuk kepentingan nasabah dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif. Bank melakukan transaksi lindung nilai syariah baik transaksi lindung nilai syariah sederhana (*'Aqd al Tahawwuth al-Basith*) yaitu transaksi lindung nilai dengan skema *forward agreement* yang diikuti dengan transaksi *spot* pada saat jatuh tempo, serta transaksi Lindung Nilai Kompleks (*'Aqd al Tahawwuth al-Murakkab*) yaitu transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi *spot* dan *forward agreement* yang diikuti dengan transaksi *spot* pada saat jatuh tempo.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**a. Basis of Financial Statements Presentation
(continued)**

Statement of Compliance (continued)

Statement of sources and uses of qardhul hasan funds represents a statement indicating the sources and uses of qardhul hasan funds for a period of time and qardhul hasan funds balance on specific dates.

The Bank is not directly involved in the management of zakat, infaq and shadaqah funds, and qardhul hasan funds. The distribution of zakat, infaq and shadaqah funds, and qardhul hasan funds is managed by Yayasan Baitul Maal Muamalat.

The presentation and functional currency used in the preparation of financial statements is the Indonesian Rupiah (IDR). The figures presented in the financial statements, unless otherwise stated, are rounded in thousands of Rupiah.

The books of accounts of the Bank are maintained in Indonesian Rupiah, the currency of the primary economic environment in which the Bank operates. Transactions during the year involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Indonesia Rupiah using exchange rate set by Bank Indonesia (Central Bank), that is Reuters rate at 16:00 WIB (Western Indonesia Time). The resulting gains or losses are credited or charged to current operations.

The Sharia Bank is not allowed to enter into foreign currency transactions for speculative purposes except for foreign currency transactions for its customers. The Bank conducts both simple sharia hedging transaction ('Aqd al Tahawwuth al-Basith*), which is hedging transaction with a forward agreement scheme followed by spot transaction at maturity, and Complex Hedging transaction (*'Aqd al Tahawwuth al -Murakkab*), which is a hedging transaction with a scheme in the form of a series of spot transactions and forward agreement followed by spot transactions when they are due.*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)

Lindung nilai syariah hanya meliputi lindung nilai tukar atas risiko nilai tukar dengan menggunakan mekanisme yang sesuai ketentuan syariah. Item yang di lindung nilai (*hedge item*) atas nilai tukar dapat berupa aset atau liabilitas yang diakui, komitmen pasti yang belum diakui, prakiraan transaksi yang kemungkinan besar akan terjadi, atau investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri.

b. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK No. 224 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

- (1) langsung atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (ii) memiliki kepentingan dalam Bank yang memberikan pengaruh signifikan atas Bank; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank;
- (2) suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;
- (3) suatu pihak adalah ventura bersama dimana Bank sebagai *venturer*;
- (4) suatu pihak adalah anggota dari personil dari manajemen kunci Bank;
- (5) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
- (6) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk pihak yang memiliki hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, yaitu individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); dan
- (7) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

a. Basis of Financial Statements Presentation (continued)

Statement of Compliance (continued)

Sharia hedges only cover exchange rate hedges against exchange rate risks using a mechanism that complies with sharia principles. Hedge items can be in the form of assets or liabilities that are recognized, certain commitments that have not yet been recognized, forecasts of transactions that are likely to occur, or net investment in foreign business activities.

b. Transactions with Related Parties

Bank entered into transactions with parties which are defined as related parties in accordance with SFAS No.224 regarding "Related Party Disclosure".

A party is considered as a related party of the Bank if:

- (1) a party directly or indirectly through one or more intermediaries, (i) controls, or is controlled by, or under common control with the Bank; (ii) has substantial importance in the Bank that gives significant influence to the Bank; or (iii) has joint control over the Bank;*
- (2) a party is a member of the same group as the Bank;*
- (3) a party is a joint venture in which the Bank acts as a venturer;*
- (4) a party is a member of the key management personnel of the Bank;*
- (5) a party is a close family member of an individual as described in point (1) or (4);*
- (6) a party is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by or have significant voting rights in several entities, directly or indirectly, which are individuals described in point (4) or (5); and*
- (7) a party is a post-employment benefit plan program for the employee benefit of either the Bank or its related party.*

The transaction is carried out based on terms agreed by both parties, whereby such requirements may differ from other transactions undertaken with non-related parties.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

b. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan Bank telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.42/POJK.04/2020 tentang "Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan" per 1 Juli 2020, pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 41 atas laporan keuangan.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif

Aset produktif terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang *murabahah*, piutang *ijarah*, piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, aset yang diperoleh untuk *ijarah*, serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko pembiayaan seperti bank garansi dan *letter of credit* (LC) yang tidak dapat dibatalkan dan *standby letter of credit*.

Aset non-produktif adalah aset Bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk rekening antar kantor, agunan yang diambil alih dan *suspense accounts*.

Aset produktif atas piutang *Murabahah* mengacu pada PSAK No. 402 (Revisi 2016) "Akuntansi *Murabahah*", piutang *Istishna* mengacu pada PSAK No. 404 (Revisi 2016) "Akuntansi *Istishna*", Piutang *Ijarah* mengacu pada PSAK No.407 (Amandemen 2022) "Akuntansi *Ijarah*", Pembiayaan *Mudharabah* mengacu pada PSAK No.405 : "Akuntansi *Mudharabah*", Pembiayaan *Musyarakah* mengacu pada PSAK No. 406 : "Akuntansi *Musyarakah*" dan Investasi pada surat berharga mengacu pada PSAK 410 (Revisi 2020) "Akuntansi Sukuk", PSAK 411 "Akuntansi Wa'd" dan aset produktif atas giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro dan penempatan pada bank lain dan investasi pada surat berharga mengacu pada PAPS I 2013.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. Transactions with Related Parties (continued)

Transactions with related parties are conducted under terms and conditions that are similar to third party transactions. These transactions are in accordance with the regulation of Financial Services Authority (FSA) No.42/POJK.04/2020 regarding "Transactions with Affiliates and Certain Conflict of Interests" per July 1, 2020 when the transactions are conducted.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the details are presented in Note 41 to the financial statements.

c. Allowance for Impairment Losses on Earning and Non-Earning Assets

Earning assets consist of current accounts and placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS) and Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS), Securities purchased under agreement to resell, current accounts with other banks, placements with other banks, investments in marketable securities, murabahah receivables, ijarah receivables, istishna receivables, funds of qardh, mudharabah financing, musyarakah financing, assets acquired for ijarah, and commitments and contingencies which carry financing risk, such as bank guarantees, irrevocable letter of credit and standby letter of credit.

Non-earning assets are the Bank's assets other than the earning assets which have potential loss, consisting of inter-office accounts, foreclosed assets and suspense accounts.

Earning assets for Murabahah receivables are in accordance with SFAS No. 402 (Revised 2016) "Accounting for Murabahah", Istishna receivables are in accordance with SFAS No. 404 (Revised 2016) "Accounting for Istishna", Ijarah receivables are in accordance with SFAS No. 407 (Amendment 2022) "Accounting for Ijarah", Mudharabah financing are in accordance with SFAS No. 405 "Accounting for Mudharabah", Musyarakah financing are in accordance with SFAS No.406 "Accounting for Musyarakah" and Investment in securities are in accordance with SFAS No.410 (Revised 2020) "Accounting for Sukuk", SFAS No.411 "Accounting for Wa'd" and earning assets for current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts and placements with other banks and investment in marketable securities are in accordance with Guidelines for Islamic Banking Accounting in Indonesia 2013.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif (lanjutan)

Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- (1) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- (2) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau margin;
- (3) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- (4) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- (5) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- (6) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
 - a. memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
 - b. kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Allowance for Impairment Losses on Earning and Non-Earning Assets (continued)

The Bank assesses whether there is any objective evidence that a financial asset is impaired on each date of statement of financial position.

Financial assets are impaired when an objective evidence indicates that a loss event has occurred after the initial recognition of the asset and that the loss event has an impact on the future cash flows of the financial asset that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine objective evidence of impairment are as follows:

- (1) significant financial difficulty of the issuer or obligor;*
- (2) any breach of contract, such as a default or delinquency in margin or principal payments;*
- (3) the lender, for economic or legal reasons relating to the debtor's financial difficulty, grants the debtor a concession that the lender would not otherwise consider;*
- (4) it becomes probable that the debtor will enter into bankruptcy or other financial reorganization;*
- (5) the disappearance of an active market of financial assets due to financial difficulties; or*
- (6) observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease cannot yet be identified individually in the portfolio, including:*
 - a. adverse changes in the payment status of debtors in the portfolio; and*
 - b. national or local economic conditions that correlate with breach of contract of the assets in the portfolio.*

The estimated period between the occurrence of an event and loss identification is determined by the management for each identified portfolio. In general, the period varies from 3 (three) months to 12 (twelve) months, in exceptional cases, longer periods are necessary.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif (lanjutan)

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko pembiayaan yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti objektif penurunan nilai;
2. Piutang *murabahah* yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, Bank melakukan penilaian secara individual untuk piutang *murabahah* dengan plafond lebih besar atau sama dengan Rp25.000.000 dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti objektif penurunan nilai;
2. Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;
3. Piutang *murabahah* yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko piutang yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi piutang berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu (*probability of default*).

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Allowance for Impairment Losses on Earning and Non-Earning Assets (continued)

The Bank first determines whether there is an objective evidence of impairment on financial assets that are individually significant, and individually or collectively on financial assets that are not individually significant.

If the Bank determines that there is no objective evidence of impairment for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar financing risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Financial assets that are individually assessed for impairment, and for which an impairment loss is or continues to be recognized, are excluded in the collective assessment of impairment.

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criteria exists:

1. *Murabahah receivables which individually have significant value with objective evidence of impairment;*
2. *Restructured murabahah receivables which individually have significant value.*

Based on the above criteria, the Bank performs individual assessment for murabahah receivables with limit greater than or equal to Rp25,000,000 with collectibility classification of substandard, doubtful and loss as of December 31, 2024 and 2023.

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criteria exists:

1. *Murabahah receivables which individually have significant value but there is no objective evidence of impairment;*
2. *Murabahah receivables which individually have non significant value;*
3. *Restructured murabahah receivables which individually have non significant value.*

The calculation of allowance for impairment losses on financial assets which are evaluated collectively is grouped based on similar receivable risk characteristics and by taking into account the receivable segmentation on the basis of historical loss experience (probability of default).

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif (lanjutan)

Bank menggunakan metode *net flow rate* dan *migration analysis* yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang diberikan secara kolektif. Bank menggunakan data historis minimal 3 (tiga) tahun dalam menghitung *Probability of Default* (PD) dan *Loss of Given Default* (LGD).

Bank menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1. Piutang dan pembiayaan bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan pembiayaan hanya bersumber dari agunan;
2. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal pengikatan agunan.

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan tingkat margin efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang diberikan yang telah dihapusbukukan, pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain margin.

Terhadap aset produktif atas piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, aset yang diperoleh untuk *ijarah*, serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko pembiayaan seperti bank garansi dan *Letter of Credit* (LC), Bank menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.2/POJK.03/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2022, sebelumnya Bank menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah".

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Allowance for Impairment Losses on Earning and Non-Earning Assets (continued)

The Bank uses *net flow rate* method and *migration analysis* which is a statistical analysis method to assess allowance for impairment losses on collective receivables. The Bank uses at least 3 (three) years historical data to compute the *Probability of Default* (PD) and *Loss of Given Default* (LGD).

The Bank uses the fair value of collateral as the basis for future cash flow if one of the following conditions is met:

1. Claim and account receivables are *collateral dependent*, i.e. if the source of loans repayment is only from the collateral;
2. Takeover of collateral is most likely to occur and be supported by legally binding collateral agreement.

Impairment losses on financial assets carried at amortized cost are measured as the difference between the carrying amount of the financial assets and present value of estimated future cash flows discounted at the financial assets original effective margin rate.

Losses are recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income and reflected in an allowance for impairment losses account against financial assets carried at amortized cost.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off loans from previous years are recorded as operating income other than margin income.

Against earning assets for *istishna* receivables, funds of *qardh*, *mudharabah* financing, *musyarakah* financing, assets acquired for *ijarah*, and commitments and contingencies which carry financing risk, such as bank guarantees and *Letter of Credit* (LC), the Bank implements Regulation of the Financial Services Authority No.2/POJK.03/2022 dated January 31, 2022 regarding "Asset Quality Ratings for Sharia Bank and Sharia Business Unit" which became effective on January 1, 2022, previously the Bank implemented Regulation of the Financial Services Authority No.16/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 regarding "Asset Quality Ratings for Sharia Bank and Sharia Business Unit".

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif (lanjutan)

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) adalah sebagai berikut:

- 1) Cadangan umum, sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar, diluar giro dan penempatan pada Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah dan aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai.
- 2) Cadangan khusus, sekurang-kurangnya sebesar:
 - a) 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
 - b) 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;
 - c) 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - d) 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Kewajiban untuk membentuk penyisihan kerugian aset produktif untuk akad *Ijarah* maupun *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah terhadap piutang *Ijarah* atas kewajiban pokok sewa yang tertunggak. Selain itu wajib dibentuk penyusutan/amortisasi atas aset *Ijarah* maupun *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.

Khusus untuk kualitas surat berharga dan penempatan pada bank ditetapkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu lancar, kurang lancar, dan macet. Sedangkan untuk kualitas penyertaan modal kualitasnya ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Cadangan penyisihan penghapusan untuk komitmen dan kontinjensi yang dibentuk disajikan sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan pada akun "Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi".

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Allowance for Impairment Losses on Earning and Non-Earning Assets (continued)

The minimum allowance to be provided in compliance with Financial Services Authority Regulation is as follows:

- 1) General reserves shall be no less than 1% of total earning assets classified as current, excluding current accounts and placements with Bank Indonesia, and securities issued by the government based on sharia principles and part of earning assets guaranteed with cash collateral.
- 2) Special reserves, shall be at least:
 - a) 5% of earning assets classified as Special Mention after deducting the collateral value;
 - b) 15% of earning assets classified as Substandard after deducting the collateral value;
 - c) 50% of earning assets classified as Doubtful after deducting the collateral value; and
 - d) 100% of earning assets classified as Loss after deducting the collateral value.

The criteria for assessment of the value of collateral that can be deducted in the calculation of allowance for impairment losses are based on Financial Services Authority Regulations.

It is required to establish allowance for impairment losses for *Ijarah* and *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* contracts against *Ijarah* receivable on the principal obligation for overdue lease. Furthermore, it is required to depreciate/amortize the assets of *Ijarah* and *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.

For marketable securities and placements with other banks, the quality rating is classified into 3 (three) classifications: current, substandard, and loss. Quality rating of equity investment is determined into 4 (four) classifications: current, substandard, doubtful and loss.

The allowance for impairment losses on commitments and contingencies is presented as a liability in the statement of financial position under "Estimated Losses on Commitments and Contingencies".

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif (lanjutan)

Apabila manajemen berpendapat bahwa suatu aset produktif sudah tidak dapat ditagih kembali, maka aset tersebut harus dihapusbukukan dengan cara saldo aset produktif dikurangkan dari penyisihan kerugian. Penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penambahan penyisihan kerugian tahun berjalan.

Aset non-produktif adalah aset Bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk rekening antar kantor, agunan yang diambil alih dan *suspense accounts*.

AYDA adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan atau di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank (catatan 2.r).

Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen atau penilai internal Bank.

AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian, ditetapkan memiliki kualitas:

- Lancar, apabila dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
- Kurang lancar, apabila dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
- Diragukan, apabila dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau
- Macet, apabila dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.

Rekening Antar Kantor adalah akun tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

Suspense account adalah akun yang digunakan untuk menampung transaksi yang tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumen pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat diklasifikasikan dalam akun yang seharusnya.

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian rekening antar kantor dan *suspense account*.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Allowance for Impairment Losses on Earning and Non-Earning Assets (continued)

If management believes that certain earning assets are not recoverable then those assets should be written off by deducting the balance of earning assets from their respective allowances. Recoveries of earning assets that have been written off are recorded as additional allowance for impairment losses in the current year.

Non-earning assets are the Bank's assets other than the earning assets which have potential loss, consisting of inter-office accounts, foreclosed assets and suspense accounts.

Foreclosed asset is an asset acquired through auction or over the counter based on voluntary submission by collateral owner or based on the power of attorney to sell over the counter from collateral owner in the event of customer's failure in meeting their liabilities to the Bank (note 2.r).

The Bank is required to use the lowest price if there are several values proposed by the independent or internal appraiser.

The quality of foreclosed assets in settlement process is determined as follows:

- Current, if acquired within 1 (one) year;*
- Substandard, if acquired ranging within more than 1 (one) year until 3 (three) years.*
- Doubtful, if acquired ranging within more than 3 (three) years until 5 (three) years.*
- Loss, if acquired in more than 5 (five) years.*

Inter-office account is the claims arising from inter-office transactions that are unsettled after a certain period of time.

Suspense account is an account containing unidentified transactions or transactions which are unable to be classified to the proper account due to the lack of adequate supporting documents.

The Bank is required to settle its inter-office account and suspense account.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif (lanjutan)

Kualitas rekening antar kantor dan *suspense account* ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Lancar, apabila tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.
- 2) Macet, apabila tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

d. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari giro *wadiah* pada Bank Indonesia dan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

FASBIS dan SBIS merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip masing-masing adalah *wadiah* dan *jualah*. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar saldo penempatan.

e. Giro pada Bank Lain

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bonus yang diterima Bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana kebajikan (*qardhul hasan*). Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tersebut sebelum disalurkan dicatat sebagai liabilitas Bank

f. Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana Bank pada bank lainnya yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah berupa deposito berjangka *mudharabah* dan/atau bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Allowance for Impairment Losses on Earning and Non-Earning Assets (continued)

The quality of inter-office account and suspense account is determined as follows:

- 1) Current, if the transaction has been recorded in the Bank's book up to 180 (one hundred and eighty) days.
- 2) Loss, if the transaction has been recorded in the Bank's book over 180 (one hundred and eighty) days.

d. Current Accounts and Placements with Bank Indonesia

Current accounts and placements with Bank Indonesia consist of *wadiah* current accounts with Bank Indonesia and placements of funds with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah/FASBIS) and Bank Indonesia Sharia Certificates (Sertifikat Bank Indonesia Syariah/SBIS).

FASBIS and SBIS are certificates issued by Bank Indonesia as a proof of short term fund deposits under *wadiah* and *jualah* principles, respectively. Current accounts and placements with Bank Indonesia are stated at their outstanding balances of placements.

e. Current Accounts with Other Banks

Current accounts with other banks are stated at their outstanding balances net of allowance for impairment losses. Bonuses received by the Bank from commercial banks based on sharia principles are recognized as other operating income. Proceeds of interest on current accounts from non-sharia banks are not recognized as the Bank's income but are recorded as part of the *qardhul hasan* fund. The proceeds of interest on current accounts from non-sharia banks will be recorded as the Bank's liabilities before distributed to the fund.

f. Placement with Other Banks

Placements with other banks represent placements in the form of *Mudharabah* time deposits and/ or other forms of placement based on sharia principles.

Placements with other banks are stated at their outstanding balance net of allowance for impairment losses.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

f. Penempatan Pada Bank Lain (lanjutan)

Investasi *wakalah* merupakan perjanjian investasi berbasis *wakalah* dimana Bank akan mendapatkan tingkat keuntungan berupa laba diantisipasi. Dana yang diberikan Bank kemudian diinvestasikan pada produk yang halal. Hasil diberikan kepada Bank sebesar laba aktual jika hasil investasi berupa laba aktual lebih kecil dari laba diantisipasi. Jika hasil investasi berupa laba aktual lebih besar dari laba diantisipasi maka yang diterima Bank adalah sebesar laba diantisipasi dan selisihnya akan menjadi pendapatan Bank.

g. Investasi pada Surat Berharga

Surat berharga syariah adalah surat bukti penanaman dalam surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah, antara lain obligasi syariah (*sukuk*), *sukuk trust certificate* (STC) dan sertifikat reksadana syariah.

Pada saat pengakuan awal, entitas menentukan klasifikasi investasi pada *sukuk* sebagai diukur pada biaya perolehan atau diukur pada nilai wajar.

Investasi pada surat berharga, kecuali Reksadana, diklasifikasikan berdasarkan model usaha yang ditentukan oleh Bank berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK No.410 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi *Sukuk*" sebagai berikut:

- 1) Diukur pada biaya perolehan. Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika: (a) investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual; dan (b) biaya perolehan *sukuk* termasuk biaya transaksi; (c) selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu *sukuk*; (d) rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai penurunan nilai di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Placement with Other Banks (continued)

Wakalah investment is placed fund based on wakalah that the Bank will receive return in the form of anticipated profit. Funds given by the Bank will be invested in sharia products. Return distributed to the Bank is based on actual profit if the return from investment was lower than the anticipated profit. If return from investment were higher than the anticipated profit, the investee will receive an amount based on anticipated profit whilst the difference will be recognized as income of the Bank.

g. Investments in Marketable Securities

Sharia marketable securities are proof of investments under sharia principles commonly traded in sharia money market and/or sharia stock exchange, such as sharia bonds (sukuk), sukuk trust certificate (STC) and sharia mutual funds certificates.

At initial recognition, the entity determines the classification of investments in sukuk as measured at cost or measured at fair value.

Investment in securities, except for mutual fund, is classified by business model which is determined by the Bank based on SFAS No. 410 (revised 2020) regarding "Accounting for Sukuk" as follows:

- 1) *Measured at acquisition cost. Investments are classified as measured at cost if: (a) the investment is held within a business model with the primary objective of obtaining contractual cash flows; and (b) the cost of sukuk includes transaction costs; (c) the difference between its acquisition cost and the nominal value is amortized using straight line method over the sukuk time period; (d) an impairment loss is recognized if the recoverable amount is less than the carrying amount and is presented as impairment in the statements of profit or loss and other comprehensive income.*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

g. Investasi pada Surat Berharga (lanjutan)

2) Diukur pada nilai wajar

2.a. Investasi diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI), jika:

2.a.1. investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk;

2.a.2. persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya;

2.a.3. biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi;

2.a.4 selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk, dan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;

2.a.5. Keuntungan dan kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya; dan

2.a.6. Rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai penurunan nilai di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

g. Investments in Marketable Securities (continued)

2) Measured at fair value

2.a. Investments are measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI), if:

2.a.1. the investment is held within a business model with the primary objective of obtaining contractual cash flows and selling sukuk;

2.a.2. contractual terms specify a specific date of principal and/or result payments;

2.a.3. the cost of sukuk includes transaction costs;

2.a.4. the difference between its acquisition cost and the nominal value is amortized using straight line method over the sukuk time period, and is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income;

2.a.5. Gain and loss from changes in fair value is recognized in other comprehensive income net of unamortized balance of acquisition cost and nominal value and the balance of accumulated fair value of profit or loss recognized in the previous other comprehensive income; and

2.a.6 An impairment loss is recognized if the recoverable amount is less than the carrying amount and is presented as impairment in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

g. Investasi pada Surat Berharga (lanjutan)

2) Diukur pada nilai wajar (lanjutan)

- 2.b. Investasi diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), jika:
- 2.b.1. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh keuntungan penjualan;
 - 2.b.2. Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi;
 - 2.b.3. Selisih nilai antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
 - 2.b.4. Perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; dan
 - 2.b.5. Rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai penurunan nilai di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Investasi dalam unit penyertaan reksadana syariah dinyatakan sebesar nilai pasar sesuai nilai aset bersih dari reksadana pada tanggal laporan posisi keuangan.

Wesel ekspor merupakan transaksi yang timbul karena adanya pembayaran dimuka kepada pihak lain sehubungan dengan transaksi ekspor impor nasabah. Wesel ekspor dinyatakan sebesar saldonya.

h. Piutang

Piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah* dan *istishna* serta tagihan pokok sewa yang tertunggak atas transaksi dengan akad *ijarah*.

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Bank, dimana Bank membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**g. Investments in Marketable Securities
(continued)**

2) Measured at fair value (continued)

- 2.b. Investments are measured at fair value through profit or loss (FVTPL), if:
- 2.b.1. The investment is held within a business model with the primary objective of gaining sales profit;
 - 2.b.2. The cost of sukuk excludes transaction costs;
 - 2.b.3. The difference between its fair value and carrying value is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income;
 - 2.b.4. The changes of fair value are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income; and
 - 2.b.5. An impairment loss is recognized if the recoverable amount is less than the carrying amount and is presented as impairment in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Investments in sharia mutual funds are stated at market value based on net asset value of mutual funds on the date of the statement of financial position.

Export bills are transactions that occur due to advance payments to other parties in connection with export and import transactions of customers. Export bills are stated at their outstanding balance.

h. Receivables

Receivables represent claims arising from the sale and purchase transactions based on *murabahah* and *istishna* contract as well as overdue principal lease claims of transactions under *ijarah* contract.

Murabahah is a sale and purchase contract between the customer and the Bank, whereby the Bank finances the consumption, investment and working capital needs of the customer, sold at a principal price plus a certain margin that is mutually informed and agreed. Repayment on this financing is made in installments within a specified period.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

h. Piutang (lanjutan)

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah/dikurangkan dengan pendapatan dan/atau biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan pendapatan dan/atau biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Istishna adalah akad penjualan antara *al-mustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang diisyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Margin *istishna* yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang *istishna*.

Piutang *ijarah* (porsi pokok sewa) merupakan akrual piutang sewa atas porsi pokok yang belum direalisasikan oleh nasabah dan piutang pendapatan *ijarah* merupakan akrual piutang sewa atas bagian keuntungan (*ujroh*) transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik* dari angsuran nasabah pada bulan berikutnya yang diakui secara proporsional.

Piutang pendapatan *ijarah* diakui pada saat jatuh tempo sebesar sewa porsi *ujroh* dan piutang *ijarah* sebesar sewa porsi pokok yang belum diterima dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu sebesar saldo piutang.

i. Pinjaman *Qardh*

Pinjaman *qardh* adalah penyaluran dana dengan akad *qardh*.

Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

h. Receivables (continued)

Murabahah receivables are initially measured at fair value plus/minus directly attributable transaction cost and/or income that are additional income and/or cost to obtain the respected financial assets, and after the initial recognition *murabahah* receivables are measured at amortized cost using the effective margin method less any allowance for impairment losses.

Istishna is a sale and purchase contract between *al-mustashni* (buyer) and *al-shani* (manufacturer also acting as the seller). Based on the contract, the buyer orders the manufacturer to produce or to supply *al-mashnu* (goods ordered) according to the specifications required by the buyer and to sell them at agreed price.

Istishna receivables are stated at the amount billed to final customer less allowance for impairment losses. Deferred *istishna* margin is presented as a contra account of *istishna* receivables.

Ijarah receivables are based on unrealized accrual rent income from principal portion and *Ijarah* receivable represents portion of accrual rent income (*ujroh*) from the following month's installment of *ijarah muntahiyah bittamlik* which is recognized proportionally.

Ijarah income receivables are recognized at maturity in the amount of *ujroh* portion of rent and *ijarah* receivables are recognized at accrued principal portion of rent and presented at the net realizable value, which is equal to the balance of the receivables.

i. Funds of *Qardh*

Funds of *qardh* represent a distribution of funds under *qardh* agreement.

Qardh agreement is a borrowing agreement with the condition that the borrower should repay the financing at a specified period of time.

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

i. Pinjaman *Qardh* (lanjutan)

Pinjaman *qardh* meliputi pembiayaan dengan akad *hawalah*. Akad *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang (nasabah) kepada pihak lain (Bank) yang wajib menanggung atau membayar. Atas transaksi ini Bank mendapatkan imbalan (*ujroh*) dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan/*ujroh* pada saat terjadinya. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pinjaman *qardh* dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil penilaian oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

j. Pembiayaan

Mudharabah merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan *nisbah* (*pre-determined ratio*) yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil penilaian oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Musarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil penilaian oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

i. Funds of *Qardh* (continued)

Funds of qardh include hawalah financing agreement. Hawalah is transfer of debts from debtors (customer) to another party (Bank) which is obligated to assume the liability or to pay. The Bank will obtain a fee (ujroh) from this transaction, which is recognized as income when received.

Funds of Qardh are recognized at the same amount of funds lent when incurred. Any excess amount paid by the borrower in repaying a qardh is recognized as revenue/ujroh when incurred. On the date of the statement of financial position, fund of qardh is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

j. Financing

Mudharabah financing is a joint financing made between the Bank as the owner of the funds (shahibul maal) and the customer as a business executor (mudharib) during a certain period. The profit sharing from the project or the business is determined in accordance with the mutually agreed nisbah (pre-determined ratio). On the date of the statement of financial position, mudharabah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

Musarakah is a partnership contract among funds owners to contribute funds and conduct a business on a joint venture basis in a partnership with the profit sharing based on a predetermined ratio, while the losses are borne proportionally based on the capital contribution. On the date of the statement of financial position, Musarakah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review on the financing quality.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

k. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan transaksi *Letter of Credit* (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diaksepsi oleh bank pengaksep (*accepting bank*).

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar nilai *Letter of Credit* (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

l. Surat-surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali dan Surat-surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Transaksi Repo dengan Bank Indonesia menggunakan akad *Rahn* dan *Qardh* serta *Al Ba'i Al Wa'd*. Surat-surat berharga yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali pada pengakuan awal disajikan sebagai surat berharga Repo dengan mereverse surat berharga, dan menyajikan kewajiban Repo pada liabilitas sejumlah nilai yang disepakati atau harga pasar sebagai kewajiban sebesar harga beli kembali surat berharga tersebut. Surat berharga yang dijual dicatat sebagai surat berharga repo dalam laporan keuangan. Dengan mekanisme repo ini secara substansi risiko dan manfaat surat-surat berharga tetap berada pada pihak penjual.

Transaksi *Reverse Repo* dengan Bank Indonesia menggunakan akad yang sama dengan transaksi Repo. Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali pada pengakuan awalnya disajikan sebagai tagihan *Reverse Repo* sejumlah nilai transaksi yang disepakati atau harga pasar.

Transaksi Repo antar bank menggunakan akad *Al Ba'i* disertai dengan *Wa'd* dimana surat-surat berharga dijual secara *Al Ba'i Al Haqiqi* atau jual beli putus sebesar harga beli kembali yang disepakati atau harga pasar dan disertai dengan janji membeli kembali (*Al Wa'd*), disajikan dengan mereverse surat berharga dan mencatat janji membeli kembali (*Al Wa'd*) pada *off balance sheet* sejumlah nilai transaksi Repo. Secara substansi risiko dan manfaat surat-surat berharga beralih ke pihak pembeli. Begitu juga halnya dengan transaksi *Reverse Repo* antar bank menggunakan mekanisme yang sama dengan transaksi Repo.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

k. Acceptance Receivables and Payables

Acceptance receivables and payables represent Letters of Credit and Domestic Letters of Credit transactions that have been accepted by the accepting bank.

Acceptance receivables and payables are stated at value of Letters of Credit and Domestic Letters of Credit. Acceptance receivables are stated net of allowance for impairment losses.

Acceptance receivables are classified as amortized costs. Acceptances payables are classified as financial liabilities at amortized cost.

l. Securities purchased/sold under resale/repurchase agreements

Repo transactions with Bank Indonesia use Rahn and Qardh contracts, as well as Al Ba'i Al Wa'd. Marketable securities sold under repurchase agreement at initial recognition are presented as Repo securities by reversing securities, and presenting Repo liabilities to an agreed amount of liability or market price as liabilities at the purchase price of the securities. Marketable securities sold are recorded as repo securities in the financial statements. With this repo mechanism the risks and benefits of securities substantially remain with the seller.

Reverse Repo Transactions with Bank Indonesia use the same contract as Repo transactions. Marketable securities purchased with a promise to resell on initial recognition are presented as Reverse Repo bills at an agreed transaction value or market price.

Repo transactions between banks use the Al Ba'i contract accompanied with Wa'd where securities are sold in Al Ba'i Al Haqiqi transaction or an outright sale and purchase and accompanied with a repurchase agreement (Al Wa'd) at the agreed repurchase price or market price, presented by reversing the securities and recording the repurchase agreement (Al Wa'd) on the off balance sheet. Substantially, the risks and benefits of securities are transferred to the buyer. Reverse Repo transactions between banks use the same mechanism as Repo transactions.

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

m. Penyertaan Saham

Penyertaan saham terutama merupakan penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang tidak melalui pasar modal untuk tujuan investasi jangka panjang.

Investasi Bank pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Bank mempunyai pengaruh signifikan atau kepemilikan saham lebih dari 20% hak suara. Pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat tersebut ditambah atau dikurangkan untuk mengakui bagian Bank atas laba rugi entitas asosiasi setelah tanggal perolehan. Bagian Bank atas laba rugi entitas asosiasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penerimaan distribusi dari entitas anak mengurangi nilai tercatat investasi.

Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal oleh Bank dalam perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan OJK yang berlaku.

Dividen kas yang diterima atas penyertaan saham diakui sebagai pendapatan.

n. Aset yang Diperoleh untuk Ijarah

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* merupakan aset yang menjadi objek transaksi sewa (*ijarah*) dan dicatat di laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Objek sewa dalam transaksi *ijarah* disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis, sedangkan objek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* disusutkan sesuai masa sewa.

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

m. Investment in Shares

Investment in shares of stocks represents investment of funds in the form of shares of non public companies engaged in financing activities for long-term investment purposes.

The Bank's investments in its associates are measured using the equity method. An associate is an entity in which the Bank has significant influence or share ownership of more than 20% of the voting rights. The initial recognition of investments in associates are recognized at cost and the carrying amount is added or subtracted to recognize the Bank's portion of profit or loss of associates after the acquisition date. The Bank's portion of profit or loss of associates are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Receipt of distributions from subsidiaries reduce the carrying amount of the investment.

Temporary equity participation is capital participation by the Bank in a debtor company to overcome the consequences of financing failure as referred to in applicable FSA regulations.

Cash dividends received from investment in shares of stocks are recognized as income.

n. Assets Acquired for Ijarah

Assets acquired for ijarah represent object of leased assets and are recorded in the statement of financial position at the acquisition cost, net of accumulated depreciation.

Leased object in ijarah transaction is depreciated based on the depreciation policy for similar assets, while leased object in ijarah muntahiyah bittamlik transaction is depreciated based on lease term.

Ijarah muntahiyah bittamlik is a lease transaction between the lessor and lessee to obtain fee from the object leased with the option of transferring the title through purchase or grant at a certain time in accordance with the lease agreement.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

n. Aset yang Diperoleh untuk Ijarah (lanjutan)

Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan cara:

- (i) hibah;
- (ii) penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa;
- (iii) penjualan pada akhir sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan
- (iv) penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

o. Pinjaman yang diterima

Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman diterima diakui sebesar biaya perolehan.

p. Aset Tetap

Bank menerapkan PSAK No.216 (Revisi 2015), "Aset Tetap" dan ISAK No. 25, "Hak atas Tanah".

ISAK 25 menetapkan bahwa biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi.

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Efektif sejak tanggal 1 November 2014, Bank merubah kebijakan akuntansinya dari metode harga perolehan menjadi metode revaluasi. Bank melakukan penilaian kembali atas seluruh aset tetap yang dimiliki Bank dengan menggunakan jasa dari penilai independen eksternal yang telah terdaftar di OJK.

Metodologi penilaian yang digunakan Bank dalam metode revaluasi yaitu pendekatan data pasar (*market data approach*).

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

n. Assets Acquired for Ijarah (continued)

The transfer of title of the leased object to the lessee in *ijarah muntahiyah bittamlik* can be conducted through:

- (i) a grant;
- (ii) sale prior to the end of agreement for an amount equivalent to the remaining lease installments;
- (iii) sale prior to the end of the agreement at a specified amount as agreed at the inception of the agreement; and
- (iv) installment sales at a specific price as agreed in the agreement.

o. Fund borrowings

Fund borrowings are funds received from other party with payment based on borrowings agreement.

Fund borrowings are recognized at cost.

p. Premises and Equipment

The Bank adopts SFAS No.216 (Revised 2015), "Premises and Equipment" and IFAS No. 25, "Land Rights".

IFAS 25 prescribes that the legal costs of land rights in the form of Rights on Land for Commercial Use ("Hak Guna Usaha" or "HGU"), Rights on Land for Building (Hak Guna Bangunan or "HGB") and Rights to Use ("Hak Pakai" or "HP") when the land was initially acquired are recognized as part of the cost of the land under the "Premises and Equipment" account and are not amortized.

Premises and equipment are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management.

Effective November 1, 2014, the Bank changed its accounting policy from cost method to revaluation method. The Bank revalued all of its existing premises and equipment using the services of external independent appraisal which is registered at FSA.

Valuation method used is Market Data Approach.

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

p. Aset Tetap (lanjutan)

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi aset tetap dikreditkan pada "surplus revaluasi atas aset tetap" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lainnya. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "surplus revaluasi atas aset tetap" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif; penurunan lainnya dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penyajian revaluasi aset tetap dilakukan melalui akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset dan nettanya disajikan kembali sebesar jumlah revaluasi aset. Nilai akumulasi depresiasi dan harga perolehan dinaikkan secara proporsional sehingga nilai bersih aset sama dengan nilai revaluasi.

Setiap periode pelaporan, selisih antara penyusutan berdasarkan nilai revaluasi aset yang diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan penyusutan harga perolehan awal aset di *transfer* dari "surplus revaluasi atas aset tetap" ke dalam "saldo laba".

Revaluasi aset tetap dilakukan setiap tiga tahun atau memiliki keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan, dan jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelas yang sama direvaluasi.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran aset non moneter atau kombinasi aset moneter dan non moneter diukur pada nilai wajar, kecuali:

- (i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau
- (ii) nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

p. Premises and Equipment (continued)

Increases in the carrying amount arising from revaluation of premises and equipment are credited to "revaluation surplus on premises and equipment" as part of other comprehensive income. Decreases that offset previous increases of the same asset are debited against "revaluation surplus on premises and equipment" as part of other comprehensive income; all other decreases are charged to statement of profit or loss and other comprehensive income.

Presentation of revaluation of premises and equipment through accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying value of premises and equipment, and the net is restated at the amount of revaluation of premises and equipment. The value of accumulated depreciation and acquisition price is increased proportionally so that the net value of premises and equipment is equal to the revaluation value.

In each reporting period, the difference between depreciation based on the revalued carrying amount of the asset charged to statement of profit or loss and other comprehensive income and depreciation based on the asset's original cost is transferred from "revaluation surplus on premises and equipment" to "retained earnings".

The revaluation of premises and equipment is carried out every three year or has periodic regularity to ensure that the carrying amount is not different in material respect from the amount determined at fair value at the end of the reporting period, and in the event that premises and equipment is revaluated, all premises and equipment in the same class are revaluated.

Premises and equipment acquired in exchange for a non-monetary asset or for a combination of monetary and non-monetary assets are measured at fair values, unless:

- (i) the exchange transaction lacks commercial substance, or*
- (ii) the fair value of neither the assets received nor the assets given up can be measured reliably.*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)

p. Aset Tetap (lanjutan)

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis sebagai berikut:

	Tahun/ Years
Bangunan	20
Kendaraan bermotor	5
Inventaris kantor	5
Komputer	5
Perbaikan sarana dan prasarana	5

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan dianalisa setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Konstruksi dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset, jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

p. Premises and Equipment (continued)

Depreciation of premises and equipment starts when it is available for its intended use and is computed using the straight line method based on the estimated economic useful lives of the assets as follows:

Tarif Penyusutan/ Depreciation Rate	
5%	<i>Buildings</i>
20%	<i>Vehicles</i>
20%	<i>Office equipments</i>
20%	<i>Computers</i>
20%	<i>Leasehold improvement</i>

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at the end of each year, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Land is stated at its amortized cost and is not depreciated.

Constructions in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Premises and Equipment" account when the construction is completed.

The costs of maintenance and repairs are charged to statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or repair an item of premises and equipment are recognized as cost of assets if and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation and any impairment loss are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in statement of profit or loss and other comprehensive income.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

q. Aset Sewa Pembiayaan

Aset sewa pembiayaan disajikan di laporan posisi keuangan tergabung dalam aset tetap. Penyusutan aset sewa pembiayaan sesuai dengan tarif penyusutan aset tetap.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo liabilitas. *Rental* kontingen dibebankan pada periode terjadinya.

Aset sewa pembiayaan dan aset hak guna sewa disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa

Bank telah menerapkan PSAK No.116 "Sewa" sejak tanggal 1 Januari 2020.

PSAK No.116 menerapkan persyaratan baru atau amandemen sehubungan dengan akuntansi sewa. Standar ini memperkenalkan perubahan signifikan untuk akuntansi *lessee* dengan menghapus perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan, serta mensyaratkan pengakuan aset hak guna dan pengakuan liabilitas sewa pada saat dimulainya sewa untuk seluruh sewa, kecuali:

- Sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli;
- Sewa atas aset dengan nilai rendah.

Berbeda dengan akuntansi *lessee*, persyaratan untuk akuntansi *lessor* sebagian besar tidak berubah. Dampak dari adopsi PSAK No.116 pada laporan keuangan dijelaskan di bawah ini.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

q. Assets under Finance Lease

Assets under finance lease are presented in the statement of financial position as premises and equipment. The depreciation of assets under finance lease are adjusted to the rate of depreciation of premises and equipment.

Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease obligation so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rentals are recognized as expenses in the periods in which they are incurred.

Assets under finance leases and right of use assets are depreciated over their expected useful lives on the same basis as owned assets or, whenever shorter, the term of the relevant lease and its useful lives.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately to profit or loss.

Right of Use Assets and Lease Liabilities

The Bank has applied SFAS No.116 "Lease" since January 1, 2020.

SFAS No.116 introduces new or amended requirements with respect to lease accounting. This standard introduces significant changes to lessee accounting by removing the distinction between operating and financing lease, and requiring the recognition of a right-of-use asset and a lease liability at commencement for all leases, except for:

- Leases with a term of less or equal to 12 months and there is no call option;*
- Leases of low value assets.*

In contrast to lessee accounting, the requirements for lessor accounting have remained largely unchanged. The impact of the adoption of SFAS No.116 on the financial statements is described below.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

q. Aset Sewa Pembiayaan (lanjutan)

Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa (lanjutan)

Tanggal penerapan awal PSAK No.116 untuk Bank adalah 1 Januari 2020. Bank telah menerapkan PSAK No.116 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi dengan mengakui dampak kumulatif dari awal penerapan PSAK No. 116.

a. Dampak definisi baru dari sewa

Perubahan utama dari definisi sewa berkaitan dengan konsep pengendalian. PSAK No.116 menentukan apakah kontrak mengandung sewa atas dasar jika terdapat aset identifikasi dan *lessee* memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Hal tersebut merupakan perbedaan penentuan kontrak merupakan, atau mengandung sewa berdasarkan PSAK No. 116 yaitu dengan konsep risiko dan manfaat.

b. Dampak pada akuntansi *lessee*

Bank menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Bank mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Bank mengakui liabilitas sewa sebesar jumlah pembayaran sewa yang masih harus dibayar hingga akhir masa sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Sedangkan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima. Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan estimasi masa manfaat aset.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

q. Assets under Finance Lease (continued)

Right of Use Assets and Lease Liabilities (continued)

The date of initial application of SFAS No.116 for the Bank is January 1, 2020. The Bank has applied SFAS No.116 using the modified retrospective approach by recognizing the cumulative impact of the initial application of SFAS No.116.

a. Impact of the new definition of a lease

The major change in definition of a lease mainly relates to the concept of control. SFAS No.116 determines whether a contract contains a lease on the basis of whether identified asset and lessee has the right to control the use of an asset for a period of time in exchange for consideration. This is in contrast to the focus on 'risks and rewards' in SFAS No.116.

b. Impact on lessee accounting

The Bank applies a single recognition and measurement approach to all leases, except for short-term leases and low-value asset leases. The Bank recognized a lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets that represent the right to use the underlying asset.

The Bank recognized lease liabilities at the amount of lease payments accrued to the end of the lease term which is discounted using the incremental borrowing rate. While, the right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs paid, restoration costs and lease payments on or before the start date of the lease, less lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated using the straight-line method over the shorter period between the lease term and the estimated useful life of the asset.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

q. Aset Sewa Pembiayaan (lanjutan)

Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa (lanjutan)

b. Dampak pada akuntansi lessee (lanjutan)

Jika kepemilikan aset sewa dialihkan ke Bank pada akhir masa sewa atau pembayaran sewa mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan estimasi masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna diuji penurunan nilainya sesuai dengan PSAK No.236 Penurunan Nilai Aset.

Pada tanggal dimulainya sewa, Bank mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan yang akan dibayarkan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dalam jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga eksekusi opsi pembelian yang wajar jika dipastikan akan dilakukan oleh Bank dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Bank mengeksekusi opsi penghentian sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya sewa, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

q. Assets under Finance Lease (continued)

Right of Use Assets and Lease Liabilities (continued)

b. Impact on lessee accounting (continued)

If the ownership of lease asset is transferred to the Bank at the end of the lease term or the lease payments reflect the exercise of the purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the assets. Right-of-use assets are tested for impairment in accordance with SFAS No.236 Asset Impairment.

On the initial lease date, the Bank recognized lease liabilities measured at the present value of future lease payments that will be paid over the lease term. Lease payments include fixed payments (including substantially fixed payments), less lease incentive receivables, variable lease payments that depends on index or interest rate, and the expected amount to be paid in a residual value guarantee. Lease payments also include the reasonable exercise price for the purchase option if it is determined to be made by the Bank and the payment of a penalty to terminate the lease, if the lease term reflects the Bank exercising the lease termination option. Variable lease payments that do not depend on an index or interest rate are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Bank uses the lessee incremental borrowing rate at the inception date of the lease since the interest rate implicit in the lease cannot be determined. After the inception date of the lease, the amount of the lease liability is increased to reflect the interest increase and less lease payments made. Furthermore, the lease liabilities carrying amount is remeasured if there are modifications, changes in term of the lease, lease payments, or the valuation of the option to purchase the underlying asset.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

q. Aset Sewa Pembiayaan (lanjutan)

Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa (lanjutan)

b. Dampak pada akuntansi lessee (lanjutan)

Sewa jangka pendek (dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan) dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengakuan yang ditentukan oleh PSAK No.116 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi pada PSAK No. 116. Bank akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Beban ini dicatat pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi.

Penerapan pencatatan PSAK No.116 berlaku untuk seluruh sewa (kecuali sebagaimana yang disebutkan sebelumnya), yaitu sebagai berikut:

- Menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari aset tetap dan liabilitas sewa disajikan sebagai bagian dari liabilitas lain-lain dalam laporan posisi keuangan, yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan;
- Mencatat penyusutan aset hak - guna dan bunga atas liabilitas sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif; dan
- Memisahkan jumlah total pembayaran ke bagian pokok (disajikan dalam kegiatan pendanaan) dan bunga (disajikan dalam kegiatan operasional) dalam laporan arus kas.

r. Agunan yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan disajikan dalam akun aset lain-lain dan diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah nilai wajar aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan.

Nilai Agunan yang diambil alih, baik melalui lelang maupun penyerahan secara sukarela dicatat pada nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjualnya yaitu maksimum sebesar kewajiban nasabah. Bank tidak dapat mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset.

Agunan akan diambil alih ketika tidak ada lagi sumber pengembalian yang bisa diharapkan dari nasabah. Indikasi atas tidak adanya sumber pengembalian adalah buruknya kondisi keuangan nasabah selama beberapa periode dan terdapat tunggakan angsuran lebih dari 1 (satu) tahun dan termasuk dalam kolektibilitas macet.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

q. Assets under Finance Lease (continued)

Right of Use Assets and Lease Liabilities (continued)

b. Impact on lessee accounting (continued)

Short-term leases (with term of less or equal to 12 months) and leases of low-value assets, and elements of those leases, partially or entirely not applying the recognition principles stipulated in SFAS No.116 will be treated the same as operating leases in SFAS No. 116. The Bank will recognize these lease payments on a straight-line basis during the lease period in the statement of profit or loss and other comprehensive income. This expense is recorded under general and administrative expenses in profit or loss.

The recording implementation of SFAS No.116 is applied for all leases (except as stated earlier), as follows:

- Presenting right-of-use assets as part of fixed assets and lease liabilities presented as part of other liabilities in the statement of financial position, measured at the present value of the future lease payments;
- Recording depreciation of right-of-use assets and interest on lease liabilities in the statement of profit or loss and other comprehensive income; and
- Separating the total amount of cash paid into a principal portion (within financing activities) and interest (within operating activities) in the statement of cash flows.

r. Foreclosed Assets

Foreclosed assets in settlement of financing facilities are included as part of other assets and are recognized at their net realizable values. Net realizable value is the fair value of an asset after deducting estimated settlement expenses.

The value of a foreclosed assets whether acquired from auction or from voluntary conveyance is recorded at fair value less selling price, which is a maximum amount of customer liabilities. The Bank cannot recognize gain at asset acquisition.

Foreclosed assets will be acquired when there are no more sources of return that could be expected from the customer. Indication of no source of return is the poor financial condition of customers during several periods and arrears of installments for more than 1 (one) year and categorized as loss.

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

r. Agunan yang Diambil Alih (lanjutan)

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Cadangan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih dibentuk atas penurunan nilai yang terjadi disajikan sebagai pengurangan dari akun agunan yang diambil alih.

Beban perbaikan (*reconditioning cost*) yang timbul setelah pengambilalihan agunan dikapitalisasi dalam akun agunan yang diambil alih tersebut.

Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

s. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka disajikan dalam akun aset lain-lain dan diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

t. Aset Tak Berwujud

Aset takberwujud adalah aset yang tidak mempunyai wujud fisik yang dibeli oleh Bank dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 5 (lima) tahun.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode amortisasi ditelaah kembali setiap akhir periode.

u. Liabilitas Segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada pemberi amanat.

v. Simpanan

Simpanan merupakan titipan pihak lain berdasarkan prinsip *wadiah yad-adhdhamanah* dalam bentuk giro *wadiah*, tabungan *wadiah* dan deposito *wakalah*.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

r. Foreclosed Assets (continued)

Management evaluates the value of foreclosed assets regularly. An allowance for impairment losses on foreclosed asset is provided based on the decline in value of foreclosed asset.

Reconditioning costs arising after foreclosure are capitalized in the accounts of the foreclosed collaterals.

The difference between the value of the foreclosed assets and the proceeds from sale of such assets is recorded as gain or loss at the time of sale.

s. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are included as part of other assets and are amortized over their useful life using the straight line method.

t. Intangible Assets

Intangible assets are assets that have no physical form which was acquired by the Bank and stated at cost less accumulated amortization.

Amortization is recognized in profit or loss and other comprehensive income using the straight line method based on its estimated useful lives of 5 (five) years.

The estimated useful lives, residual values and amortization method are reviewed at the end of each period.

u. Liabilities Due Immediately

Liabilities due immediately represent obligation to third parties, based on contract or order by those having authority, that should be settled immediately. Liabilities due immediately are stated at the amount of the Bank's liabilities to the trustee.

v. Deposits

Deposits represent third party funds placed based on *wadiah yad-adhdhamanah* principle in the form of *wadiah demand deposits*, *wadiah saving deposits* and *wakalah deposit*.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

v. Simpanan (lanjutan)

Giro *wadiah* digunakan sebagai instrumen pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro, serta dapat mendapatkan bonus sesuai kebijakan Bank. Giro *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di Bank.

Tabungan *wadiah* merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik sesuai dengan kondisi tertentu yang disepakati. Tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar nilai simpanan pemegang tabungan di Bank.

w. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas Bank kepada bank lain dalam bentuk giro *wadiah*. Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada bank lain.

Giro *wadiah* digunakan sebagai instrumen pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro, serta mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan Bank. Giro *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di Bank.

Giro *wadiah* dapat menerima bonus sesuai kebijakan Bank.

x. Dana *Syirkah* Temporer

Dana *syirkah* temporer merupakan investasi dengan akad *mudharabah mutlaqah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib* / Bank) dalam pengelolaan investasinya dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang disepakati. Dana *syirkah* temporer terdiri dari tabungan *mudharabah*, deposito berjangka *mudharabah*, sertifikat investasi *mudharabah* antar bank dan sukuk *mudharabah* subordinasi.

Tabungan *mudharabah* merupakan investasi yang hanya bisa ditarik sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di Bank.

Deposito berjangka *mudharabah* merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka *mudharabah* dengan Bank. Deposito berjangka *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

v. Deposits (continued)

Wadiah demand deposits are used as payment instruments and available for withdrawal at any time using cheque and demand deposit slips, and may earn bonus based on the Bank's policy. Wadiah demand deposits are stated at the amount entrusted by depositors.

Wadiah savings deposits represent third party funds that can be withdrawn under certain condition. Wadiah savings deposits are stated at the amounts deposited by the holder.

w. Deposits from Other Banks

Deposits from other banks represent liabilities to other banks in the form of wadiah demand deposits. Deposits from other banks are stated at the amount payable to the other banks.

Wadiah demand deposits are used as payment instruments and available for withdrawal at any time using cheque and demand deposit slips, and receive bonuses according to the Bank's policies. Wadiah demand deposits are stated at the amount entrusted by depositors.

Wadiah demand deposits may receive bonus based on the Bank's policy.

x. Temporary *Syirkah* Funds

Temporary syirkah funds represent investments under mudharabah mutlaqah contract in which the owners (shahibul maal) entrust the funds to the fund manager (mudharib/ Bank) in managing the investment, and will receive profit share based on the agreed predetermined ratio (nisbah). Temporary syirkah funds consist of mudharabah saving deposits, mudharabah time deposits, mudharabah interbank investment certificates and subordinated mudharabah sukuk.

Mudharabah saving deposits represent third party funds that can be withdrawn under certain conditions. Mudharabah saving deposits are stated at the amount deposited by depositors.

Mudharabah time deposits represent third party funds that can be withdrawn at specific maturity dates based on the agreement between depositors and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at nominal values set forth in the agreement between the holder of time deposit and the Bank.

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

x. Dana *Syirkah* Temporer (lanjutan)

Sukuk *mudharabah* subordinasi merupakan surat berharga jangka panjang yang diterbitkan berdasarkan akad *mudharabah*. Sukuk *mudharabah* dikelompokkan dalam dana *syirkah* temporer karena bersifat investasi. Sukuk *mudharabah* subordinasi disajikan sebesar nilai nominal. Biaya-biaya yang timbul dari penerbitan sukuk *mudharabah* diamortisasi selama masa periode sukuk.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak mempunyai liabilitas, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi Bank. Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non investasi.

Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada Bank untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer berdasarkan konsep bagi hasil.

y. Biaya Emisi/ Biaya Transaksi

Biaya transaksi penerbitan sukuk *mudharabah* dicatat secara terpisah dan disajikan dalam aset sebagai beban tangguhan, yang diamortisasi selama umur sukuk dengan metode garis lurus.

z. Liabilitas Kepada Bank Indonesia

Transaksi PaSBI dilakukan dengan menggunakan akad *wakalah bi al-ististmar* di mana hasil pengelolaan (*ististmar*) diperhitungkan pada tanggal pengembalian dana (*settlement second leg*) sesuai dengan jangka waktu dan tingkat imbalan yang disepakati.

Jangka waktu Transaksi PaSBI OPT Syariah paling singkat 1 (satu) minggu dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal setlemen sampai dengan tanggal jatuh waktu.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

x. Temporary *Syirkah* Funds (continued)

Subordinated mudharabah sukuk represents long-term bonds issued under a Mudharabah contract. Mudharabah sukuk are classified as temporary syirkah fund due to its nature as investment. Subordinated mudharabah sukuk are stated at their nominal value. The issuance costs for mudharabah sukuk are amortized based on the term of sharia bonds.

Temporary syirkah funds cannot be classified as liability because the Bank has no obligation to return the fund to the owner when loss incurred, unless there is negligence or default by the Bank. Temporary syirkah funds cannot be classified as equity since they have maturity and the owner of the funds do not have ownership rights as common shareholders, such as voting rights and right of the profit derived from current assets and non-investment assets.

Temporary syirkah fund is an element of statement of financial position where it is in line with sharia principles, which entitles the Bank to manage and invest funds, including to manage as one portfolio with other type of funds.

The owners of temporary syirkah funds earn profit in accordance with the agreement and receive loss based on the amount of funds from each party. The return of temporary syirkah funds are based on revenue sharing concept.

y. Issuance Cost/ Transaction Cost

Issuance cost of subordinated mudharabah sukuk are recognized separately and stated in assets as a deferred expense, that is amortized using the straight line method which is the term of the bonds.

z. Liabilities To Bank Indonesia

PaSBI transactions are carried out using a wakalah bi al-ististmar contract where management results (ististmar) are calculated on the date of refund (second leg settlement) in accordance with the agreed time period and rate of return.

The period for a Sharia PaSBI OPT Transaction is a minimum of 1 (one) week and a maximum of 12 (twelve) months expressed in calendar days, which is calculated from 1 (one) calendar day after the settlement date until the maturity date.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

aa. Pendapatan Pengelolaan oleh Bank sebagai Mudharib

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudharib* terdiri dari pendapatan dari transaksi penjualan dari transaksi *murabahah* dan *istishna*, pendapatan bagi hasil dari *mudharabah* dan *musyarakah*, pendapatan sewa dari *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* dan pendapatan usaha utama lainnya.

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif). Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*. Pada saat menghitung margin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Bank melakukan penghentian amortisasi keuntungan ditangguhkan pada saat pembiayaan diklasifikasikan sebagai *non-performing*. Pendapatan Bank dari transaksi usaha yang diklasifikasikan sebagai *non-performing* dicatat sebagai margin dalam penyelesaian pada laporan komitmen dan kontinjensi.

Pendapatan *istishna* diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad dinyatakan selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli.

Pendapatan *ijarah* diakui selama masa akad secara merata.

Pendapatan usaha *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan *mudharib* dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.

Pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha *musyarakah*, sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

aa. Revenue from Fund Management by the Bank as Mudharib

Revenue from fund management as *mudharib* consists of revenue from sales in *murabahah* and *istishna* transaction, income from profit sharing of *mudharabah* and *musyarakah* financing, income from *ijarah* and *ijarah muntahiyah bittamlik* and other main operating income.

Income from *murabahah* receivables uses the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the *murabahah* receivables. When calculating the effective margin, the Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

The Bank terminates the amortization of deferred income when the financing are classified as *non-performing*. The Bank's income from business transactions that are classified as *non-performing* is recorded as margin of *non-performing* receivables in the statement of commitments and contingencies.

Revenue from *istishna* is recognized using percentage of completion or contract completion method. The contract is defined as completed if the process of production is completed and the goods are delivered to the customer.

Revenue from *ijarah* is recognized equally during period of the contract.

Revenue from *mudharabah* is recognized during the period of profit sharing in accordance with the agreed revenue sharing ratio. Loss incurred due to negligence of *mudharib* is charged to *mudharib* and will not reduce the *mudharabah* investment.

Revenue from *musyarakah* distributed to an active partner is recognized in accordance with the agreement on *musyarakah* revenue, whereas revenue distributed to passive partner is recognized as the right of the passive partner in revenue sharing and liability.

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

**aa. Pendapatan Pengelolaan oleh Bank sebagai
Mudharib (lanjutan)**

Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pinjaman *qardh*, pendapatan dari penempatan pada Bank Indonesia, pendapatan dari giro dan penempatan pada bank syariah lain, pendapatan bagi hasil surat berharga syariah, pendapatan *fee* wesel ekspor, dan pendapatan *fee* akseptasi.

**ab. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana
Syirkah Temporer**

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip *mudharabah mutlaqah* atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang telah diterima (*cash basis*).

Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan dari aset produktif lainnya yang akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank, dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan. Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut dibagihasilkan ke nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Bagi hasil sukuk *mudharabah* subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, dihitung berdasarkan perkalian antara *nisbah* pemegang sukuk dengan pendapatan yang diterima Bank dalam triwulan terakhir sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan triwulanan Bank yang belum diaudit yang dipublikasikan oleh Bank.

Pembayaran pendapatan bagi hasil kepada masing-masing pemegang sukuk akan dilakukan secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah pokok sukuk *mudharabah* yang belum dibayar kembali.

Pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari transaksi Bank berbasis imbalan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**aa. Revenue from Fund Management by the Bank as
Mudharib (continued)**

Other operating revenue consists of income derived from funds of *qardh*, placement with Bank Indonesia, current account and placements with other sharia banks, revenue sharing from sharia securities, export bill fee, and acceptance fee revenue.

**ab. Third Parties' Share on Returns of Temporary
Syirkah Funds**

The share of third parties on the return of temporary *syirkah* funds represents portion of income derived by the Bank from managing funds under *mudharabah mutlaqah* principles. The profit sharing is distributed on the cash basis.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets for distribution to fund owners and the Bank are computed proportionally based on the allocation of funds from owners and the Bank used in financing facilities and other earning assets distributed. The total available margin income and profit sharing are distributed to customers and depositors as *shahibul maal* and to the Bank as *mudharib* in accordance with a predetermined ratio.

Subordinated *Mudharabah* sukuk is paid every 3 (three) months, and calculated based on multiplication between the sukuk holder's ratios and revenue received by the Bank in the last quarter as contained in the unaudited quarterly financial statements of the Bank Publication.

The payment of revenue sharing to the respective sukuk holders will be proportionated in accordance with the portion of ownership compared to the unpaid principal amount of the *Mudharabah* sukuk.

Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets distributed using the Bank's funds entirely become the right of the Bank including income from the Bank's fee-based transactions.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

ac. Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan

Pendapatan imbalan jasa perbankan pada umumnya diakui pada saat kas diterima.

ad. Imbalan Kerja

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK No.219 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang menghapuskan mekanisme koridor dan pengungkapan atas informasi liabilitas kontinjensi untuk menyederhanakan klasifikasi dan pengungkapan.

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek dan tunjangan hari raya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun iuran pasti

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank. Iuran dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut dan pembayarannya dikurangkan dari utang iuran. Iuran terhutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Program imbalan pasti

Imbalan pasca kerja diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang memenuhi syarat. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan persyaratan minimum Undang-undang Tenaga Kerja No.13/2003.

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri atas:

- (i) Keuntungan dan kerugian aktuarial.
- (ii) Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).
- (iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

ac. Fee Based Income from Banking Services

Fee based income from banking services is generally recognized when cash is received.

ad. Employee Benefits

Effective January 1, 2015, the Bank implements SFAS No.219 (Revised 2013), "Employee Benefits", which removes the corridor mechanism and the contingent liabilities disclosures to simplify the classifications and disclosures.

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as salaries, social security contributions, short-term leaves and allowance of feast day are recognized during the period when services are rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Defined contribution plan

Contribution payable to the pension fund is equivalent to a certain percentage of salaries for eligible employees under the Bank's defined contribution plan. The contribution is accrued and recognized as expense when services have been rendered by eligible employees and actual payments are deducted from the contribution payable. Contribution payable is measured using undiscounted amounts.

Defined benefit plan

The post-employment benefits are recognized as expense when services have been rendered by eligible employees. The benefits are determined based on the Bank regulations and the minimum requirements of Labor Law No.13/2003.

The post-employment benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using the *Projected Unit Credit Method*.

Remeasurement of net defined benefit liabilities (assets), which is recognized as other comprehensive income, consist of:

- (i) Actuarial gain and losses.
- (ii) Return on plan assets, excluding an amount that is included in net interest on liabilities (assets).
- (iii) The effect of the asset ceiling, excluding any amount that is included in the net interest of liabilities (assets).

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

ad. Imbalan Kerja (lanjutan)

Program imbalan pasti (lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

ae. Perpajakan

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK No212 (revisi 2013) "Pajak Penghasilan". Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan perubahan yang besar terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Perubahan terhadap liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding oleh Bank, pada saat telah ada keputusan atas banding dan atau keberatan tersebut.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

ad. Employee Benefits (continued)

Defined benefit plan (continued)

Remeasurement of net defined benefit liabilities (assets), which is recognized as other comprehensive income is not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

Past service costs are recognized as expense at the earlier date between the amendments or occurrence of curtailment program, and when the costs of restructuring or severance is recognized, therefore, unvested past service cost can no longer be deferred and recognized over the future vesting period.

ae. Taxation

Effective January 1, 2015, the Bank adopts SFAS No.212 (Revised 2013), "Income Taxes". The adoption of the SFAS has no significant impact on the financial reporting and disclosures in the financial statements.

Current tax expense is provided based on the taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to the extent that it is probable for temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to be utilized in deducting future taxable profit.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and is reduced when it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to compensate part or all of the benefit of the deferred tax assets.

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against by the Bank, when the result of such appeal or objection is determined.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

ae. Perpajakan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/ atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan ke laba komprehensif lainnya dan dilaporkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

af. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik Bank dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

ag. Informasi Segmen Operasi

Informasi segmen operasi diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana Bank terlibat dalam lingkungan ekonomi dimana Bank beroperasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c) dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

ae. Taxation (continued)

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at statement of financial position reporting date. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognized as "Income Tax Benefit (Expense)" and included in the net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged to other comprehensive income and reported to equity.

Assets and liabilities on deferred tax and current tax are offset if there is a legal enforceable right to offset.

af. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Bank by the weighted average number of shares outstanding during the year.

ag. Operating Segment Information

Operating Segment information is disclosed to enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the Bank is involved in and the economic environment where the Bank operates.

An operating segment is a component of an entity:

- a) that engages in business activities from which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);*
- b) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and*
- c) for which discrete financial information is available.*

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

ag. Informasi Segmen Operasi (lanjutan)

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

ah. Penggunaan Pertimbangan dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan

Penyusunan laporan keuangan Bank mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian yang melekat dalam melakukan estimasi, dapat menyebabkan jumlah sesungguhnya yang dilaporkan pada periode yang akan datang berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Bank sebagai berikut:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuannya untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Nilai wajar instrumen keuangan

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

Level 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

ag. Operating Segment Information (continued)

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of their performance is more specifically focused on the category of each product.

ah. Use of Significant Accounting Judgment and Estimates

The preparation of the Bank's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Due to inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods might be based on amounts which differ from those estimates.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the Bank's financial statements as follows:

Going concern

The Bank's management has made an assessment of its ability to continue as a going concern and is satisfied that the Bank has the resources to continue its business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on the going concern basis.

Fair value of financial instruments

All assets and liabilities in which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant to the overall fair value measurement:

Level 1: quoted prices (without adjustments) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

ah. Penggunaan Pertimbangan dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

Level 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.

Level 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Kontinjensi

Bank sedang terlibat dalam proses hukum. Perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum Bank didasarkan pada analisis hasil yang potensial.

Manajemen tidak berkeyakinan bahwa hasil dari hal ini akan mempengaruhi hasil usaha. Besar kemungkinan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruh oleh perubahan dalam estimasi atau efektivitas dari strategi yang terkait dengan hal tersebut.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Bank berdasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul diluar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

ah. Use of Significant Accounting Judgment and Estimates (continued)

Fair value of financial instruments (continued)

Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.

Level 3: inputs that are not observable for the assets and liabilities.

Contingency

The Bank is currently involved in legal proceedings. The estimate of the probable cost for the resolution of claims has been developed in consultation with the aid of the external legal counsel handling the Bank's defense in this matter and is based upon an analysis of potential results.

Management does not believe that the outcome of this matter will affect the results of operations. It is probable, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates or in the effectiveness of the strategies relating to these proceedings.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimating uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year/period are disclosed below. The Bank based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared.

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

**ah. Penggunaan Pertimbangan dan Estimasi
Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)**

**Cadangan kerugian penurunan nilai dari
piutang, pinjaman *qardh* dan pembiayaan**

Manajemen Bank menelaah portofolio piutang, pinjaman *qardh* dan pembiayaan setiap periode untuk menilai penurunan nilai dengan memperbaharui cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk selama periode yang diperlukan berdasarkan analisis berkelanjutan dan pemantauan terhadap rekening individual oleh petugas.

Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi mengenai sejumlah faktor dan hasil aktual yang dapat berbeda, yang mengakibatkan perubahan terhadap jumlah cadangan kerugian di masa yang akan datang.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul diluar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

**Penurunan nilai investasi pada surat
berharga**

Manajemen Bank menentukan bahwa surat berharga memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Umur ekonomis aset tetap

Manajemen Bank memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut. Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**ah. Use of Significant Accounting Judgment and
Estimates (continued)**

**Allowance for impairment losses on receivables,
funds of *qardh* and financing**

The Bank's management reviews its receivables, funds of *qardh* and financing portfolio to assess impairment in each period by updating the required allowance for impairment losses made during the period based on the continuing analysis and monitoring of individual accounts by the officers.

Such estimates are based on assumptions of several factors and actual results may differ, resulting in future changes in the amount of allowance for losses.

Existing circumstances and assumptions with regard to future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**Impairment of investment in marketable
securities**

The Bank's management determines that the impairment of marketable securities are based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost.

Useful lives of premises and equipment

The Bank's management estimates the useful lives of premises and equipment based on the period over which the assets are expected to be available for use. The estimated useful lives of premises and equipment are reviewed periodically and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical and technical wear and tear, or commercial and legal obsolescence, or other limits on the use of the assets. In addition, estimate of the useful lives of premises and equipment is based on collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

ah. Penggunaan Pertimbangan dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

Umur ekonomis aset tetap (lanjutan)

Tetap dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas. Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan dari taksiran masa manfaat dari aset tetap akan meningkatkan beban usaha.

Revaluasi pada aset tetap

Bank mengukur aset tetap berdasarkan nilai revaluasi dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan dilaporkan dalam ekuitas. Pada tahun 2022, Bank menggunakan jasa penilai independen untuk menentukan nilai wajar aset tetap pada tanggal 31 Desember 2022. Lihat Catatan 15 untuk nilai tercatat aset tetap.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Manajemen Bank mengevaluasi penurunan nilai aset non-keuangan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset non-keuangan tidak dapat dipulihkan kembali.

Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a) performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- b) perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- c) industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

ah. Use of Significant Accounting Judgment and Estimates (continued)

Useful lives of premises and equipment (continued)

It is possible, however, that future results of operations be materially affected by changes in estimates brought about by changes in the aforementioned factors. The amounts and timing of recorded expenses for any period are affected by changes of those factors and circumstances during recording. A reduction in the estimated useful lives of premises and equipment increases the recorded operating expenses.

Revaluation of premises and equipment

The Bank measures the premises and equipment at revalued amounts with changes in fair value being recognized in other comprehensive income and reported in the equity. In 2022, the Bank engaged independent appraisal to determine the fair value of premises and equipment as of December 31, 2022. Refer to Note 15 for the carrying values of premises and equipment.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from deductible temporary difference. Management's judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with strategic future tax planning.

Impairment of non-financial assets

The Bank's management assesses impairment of non-financial assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of non-financial asset may not be recoverable.

The factors that the Bank considers important which may lead to impairment assessment are the following:

- a) significant under-performance related to historical expectation or projected future operating results;
- b) significant changes in the manner of use of the assets or the overall business strategy; and
- c) significant negative industry or economic trends.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)

ah. Penggunaan Pertimbangan dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya pelepasan dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Estimasi liabilitas imbalan kerja

Estimasi liabilitas imbalan kerja ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuaria. Perhitungan aktuaria menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain.

Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

ai. Transaksi dan Saldo Mata Uang Asing

Bank menyelenggarakan catatan akuntansi-nya dalam Rupiah. Transaksi yang melibatkan mata uang asing dicatat pada nilai tukar pada saat terjadinya transaksi.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs *Reuters* pada pukul 16:00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

ah. Use of Significant Accounting Judgment and Estimates (continued)

Impairment of non-financial assets (continued)

The Bank recognizes an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher amount between fair value less costs of disposal using the asset (or cash generating unit) value in use. Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if not possible, for the cash-generating unit to which the asset belongs.

Estimated liabilities for employee benefits

Estimated liabilities for employee benefits are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves assumptions such as discount rate, expected rate of returns on investments, future salary increase, mortality rate, resignation rate and others.

Due to the long-term nature of this plan, such estimates are subject to significant uncertainty.

ai. Transaction and Balance in Foreign Currency

The Bank maintains its accounting records in Indonesian Rupiah. Transactions in foreign currencies are recorded at the exchange rates in effect on the date of the transactions.

On the date of the statement of financial position, all monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the Reuters spot rates at 16:00 WIB (Western Indonesian Time) issued by Bank Indonesia.

The resulting gains or losses from the translation of monetary assets and liabilities in foreign currencies are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL **(Lanjutan)**

ai. Transaksi dan Saldo Mata Uang Asing **(lanjutan)**

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kurs mata uang asing yang digunakan untuk penjabaran mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut (dalam nilai penuh):

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
1 Dinar Kuwait	52.238	50.111
1 Euro	16.758	17.038
1 Dolar Amerika Serikat	16.095	15.397
1 Dolar Australia	10.013	10.521
1 Dolar Singapura	11.844	11.676
1 Ringgit Malaysia	3.597	3.355
1 Riyal Arab Saudi	4.284	4.106
10 Yen Jepang	1.030	1.089

aj. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan baru, perubahan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2024:

- Amendemen PSAK 116: "Sewa" tentang liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik;
- Amendemen PSAK 201: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas lancar atau tidak lancar;
- Amendemen PSAK 201: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan; dan
- Revisi PSAK 401: "Penyajian Laporan Keuangan Syariah" tentang penghilangan penyajian laporan perubahan aset kelolaan sebagai salah satu komponen laporan keuangan.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi dan tidak memiliki dampak terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Beberapa standar akuntansi baru dan interpretasi dari standar akuntansi telah diterbitkan dan belum berlaku efektif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan belum diterapkan pada penyusunan laporan keuangan ini.

PSAK dibawah ini akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025 dan penerapan dini diperbolehkan:

- Amendemen PSAK 221: "Pengaruh perubahan Kurs Valuta Asing" tentang kekurangan ketertukaran.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES **(Continued)**

ai. Transaction and Balance in Foreign Currency **(continued)**

As of December 31, 2024 and 2023, the exchange rates used in translating foreign currency amounts into Rupiah are as follows (in full amount):

December/ December 31, 2023	
50.111	1 Kuwait Dinar
17.038	1 Euro
15.397	1 United States Dollar
10.521	1 Australian Dollar
11.676	1 Singapore Dollar
3.355	1 Malaysian Ringgit
4.106	1 Saudi Arabian Riyal
1.089	10 Japanese Yen

aj. Changes in accounting policies and disclosures

The following are new financial accounting standards, amendments and interpretations of financial accounting standards which become effective starting January 1, 2024:

- Amendment to SFAS 116: "Lease" regarding lease liabilities in sale and leaseback transactions;
- Amendment to SFAS 201: "Presentation of Financial Statements" regarding classification of liabilities as current or non-current;
- Amendment to SFAS 201: "Presentation of Financial Statements" regarding long term liabilities with the covenant; and
- Revision of SFAS 401: "Presentation of Sharia Financial Statements" regarding the elimination of presentation of reports on changes in assets under management as a component of financial reports

Implementation of these standards does not change the accounting policies and has no effect on the amounts reported in the current period or the previous year.

Certain new accounting standards and interpretations have been issued that are not yet effective for the year ended December 31, 2024 and have not been applied in preparing these financial statements.

The following SFAS will become effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2025 and early adoption is permitted :

- Amendment to SFAS 221: "Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" regarding the lack of convertibility.

3. KAS

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember / December 31, 2024	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Setara dengan/ Equivalent to Rupiah
Rupiah		708.517.153
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat	3.539.114	56.962.040
Riyal Arab Saudi	3.565.906	15.276.341
Dolar Singapura	37.054	438.892
Ringgit Malaysia	19.054	68.554
	<u>72.745.827</u>	
Jumlah		781.262.980

Saldo kas termasuk uang yang ada pada mesin ATM (Automated Teller Machines) pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sejumlah Rp68.870.800 dan Rp60.075.350.

3. CASH

This account consists of:

	31 Desember / December 31, 2023		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Setara dengan/ Equivalent to Rupiah	
		678.435.358	Rupiah
			Foreign Currencies
			United States Dollar
	2.551.340	39.282.982	
	571.966	2.348.418	Saudi Arabian Riyal
	4.788	55.909	Singapore Dollar
	25.753	86.406	Malaysian Ringgit
	<u>41.773.715</u>		
		720.209.073	Total

Cash including cash in ATMs (Automated Teller Machines) as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp68,870,800 and Rp60,075,350.

4. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA

a. Berdasarkan jenis dan mata uang:

	31 Desember / December 31, 2024
Pihak ketiga	
Rupiah	
Giro pada Bank Indonesia	1.214.575.846
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	1.275.000.000
Giro BI FAST	288.276.856
Transaksi Kliring Esok Hari (TOM)	877.316
	<u>2.778.730.018</u>
Mata uang asing	
Dolar Amerika Serikat	
Giro pada Bank Indonesia (2024: USD2.122.970 dan 2023: USD1.777.225)	34.169.208
Deposito Berjangka BI (2024: Nihil dan 2023: USD10.000.000)	--
	<u>34.169.208</u>
Jumlah	2.812.899.226

4. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA

a. By type and currencies:

	31 Desember / December 31, 2023	
		Third Party
		Rupiah
		Current accounts with Bank Indonesia
	2.214.114.365	Bank Indonesia Sharia Deposit Facility (FASBIS)
	2.330.000.000	BI Fast Current accounts
	284.092.784	Tomorrow Clearing Transaction (TOM)
	<u>938.742</u>	
	<u>4.829.145.891</u>	
		Foreign currency
		United States Dollar
		Current Account with Bank Indonesia (2024 : USD2,122,970 and 2023 : USD1,777,225)
	27.363.933	BI Term Deposit (2024:Nil and 2023 : USD10,000,000)
	153.970.000	
	<u>181.333.933</u>	
	5.010.479.824	Total

4. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA (Lanjutan)

4. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA (Continued)

b. Berdasarkan jangka waktu:

b. By time period:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Pihak Ketiga Rupiah			Third parties Rupiah
≤ 1 bulan	2.778.730.018	4.829.145.891	≤ 1 month
	2.778.730.018	4.829.145.891	
Mata uang asing Dolar Amerika Serikat			Foreign currency United States Dollar
≤ 1 bulan			≤ 1 month
(2024: USD2.122.970 dan 2023: USD11.777.225)	34.169.208	181.333.933	(2024 : USD2,122,970 and 2023 : USD11,777,225)
Jumlah	2.812.899.226	5.010.479.824	Total

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

c. By remaining period to maturity:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Pihak Ketiga Rupiah			Third parties Rupiah
≤ 1 bulan	2.778.730.018	4.829.145.891	≤ 1 month
	2.778.730.018	4.829.145.891	
Mata uang asing Dolar Amerika Serikat			Foreign currency United States Dollar
≤ 1 bulan			≤ 1 month
(2024: USD2.122.970 dan 2023: USD11.777.225)	34.169.208	181.333.933	(2024 : USD2,122,970 and 2023 : USD11,777,225)
Jumlah	2.812.899.226	5.010.479.824	Total

d. Rata-rata tingkat bonus tahunan dan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) adalah sebagai berikut:

d. The annual average bonus rate and Minimum Statutory Reserves (GWM) ratio are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	5,25%	5,25%	Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS)
Rasio rata-rata GWM (tidak diaudit) :			Average Minimum Statutory Reserves Ratio (unaudited):
Rupiah	2,69%	7,50%	Rupiah
Mata uang asing	1,14%	1,18%	Foreign currencies

Rasio GWM pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 22/10/PADG/2020 tanggal 30 April 2020 tentang "Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Syariah" yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 yang mana mewajibkan setiap Bank untuk memelihara GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan sebesar 3,5% dan 1% dari dana pihak ketiga (DPK) dalam Rupiah dan valuta asing.

The Minimum Statutory Reserves ratio as of December 31, 2024 and 2023 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 22/10/PADG/2020 dated April 30, 2020 concerning "Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units", which came into force on May 1, 2020, and regulates that each Bank is required to maintain a Minimum Statutory Reserves in Rupiah and foreign exchange, the amount of which is set at 3.5% and 1% of third party funds (DPK) in Rupiah and foreign exchange.

4. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA (Lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.22/4/PADG/2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia No. 22/4/PBI/2020 Tentang Insentif Bagi Bank Yang Memberikan Penyediaan Dana Untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona, besaran insentif kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah yang wajib dipenuhi secara harian ditetapkan sebesar 0,5%.

Selain ketentuan di atas, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/07/PADG/2021 yang berlaku sejak 1 Mei 2021, terdapat perubahan perhitungan GWM dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menjadi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). Bank harus memelihara tambahan GWM jika RIM Bank kurang dari batas bawah 84% atau melebihi batas atas target BI sebesar 94%.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari OJK.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank telah memenuhi Giro Wajib Minimum sesuai dengan ketentuan OJK.

4. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA (Continued)

Based on regulation of Members of the Board of Governors No.22/4/PADG/2020 Regarding the Implementation of Bank Indonesia Regulation No.22/4/PBI/2020 Regarding Incentives for Banks Providing Funds for Certain Economic Activities to Support the Handling of the Economic Impacts of the Corona Virus Outbreak, the amount of allowance incentives for the fulfillment of Statutory Reserves in Rupiah which must be fulfilled daily is set at 0.5%.

In addition, based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No.23/07/PADG/2021 which has been effective since May 1, 2021, there are changes in the calculation of the Minimum Statutory Reserves from Financing to Deposit Ratios (FDR) to the Macroprudential Intermediation Ratio (Rasio Intermediasi Makroprudensial/RIM). Banks must pay additional Minimum Statutory Reserves if the Bank's Macroprudential Intermediation Ratio is less than the lower limit of 84% or exceeds the upper limit of the BI target of 94%.

The balance of current accounts with Bank Indonesia is maintained to meet the Minimum Statutory Reserves Requirement of the Financial Services Authority.

As of December 31, 2024 and 2023, the Bank has complied with the Minimum Statutory Reserves Requirement under the regulation of the Financial Services Authority.

5. GIRO PADA BANK LAIN

a. Berdasarkan mata uang:

	31 Desember / December 31, 2024	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ <i>Notional amount in Foreign currencies</i> (Dalam nilai penuh/ <i>In full amount</i>)	Ekuivalen/ <i>Equivalent to</i> Rupiah
Pihak ketiga		
Rupiah		30.993.641
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat	36.036.181	580.002.332
Dolar Singapura	198.589	2.352.202
Ringgit Malaysia	12.783.396	45.992.868
Euro	2.158.381	36.170.404
Riyal Arab Saudi	458.181	1.962.848
Dinar Kuwait	10.000	522.387
Yen Jepang	2.355.765	242.714
		<u>667.245.755</u>
Jumlah		698.239.396
Cadangan kerugian penurunan nilai		--
Bersih		698.239.396

5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS

a. By currencies:

	31 Desember / December 31, 2023	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ <i>Notional amount in Foreign currencies</i> (Dalam nilai penuh/ <i>In full amount</i>)	Ekuivalen/ <i>Equivalent to</i> Rupiah
Third parties		
Rupiah		77.951.246
Foreign currencies		
United States Dollar	85.702.457	1.319.560.728
Singapore Dollar	389.247	4.544.977
Malaysian Ringgit	16.738.457	56.160.872
Euro	148.386	2.528.244
Saudi Arabian Riyal	444.875	1.826.600
Kuwaiti Dinar	10.000	501.107
Japanese Yen	7.027.256	765.128
		<u>1.385.887.656</u>
Total		1.463.838.902
Allowance for impairment losses		--
Net		1.463.838.902

5. GIRO PADA BANK LAIN
(Lanjutan)

5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS
(Continued)

b. Berdasarkan jenis dan bank:

b. By type and bank:

	31 Desember / December 31, 2024		
	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent to Rupiah	
Pihak ketiga			Third Parties
Rupiah			Rupiah
Bank Syariah			Sharia Bank
PT BPD Jatim - UUS		982.565	PT BPD Jatim - SBU
PT BPD Sulselbar - UUS		45.513	PT BPD Sulselbar - SBU
PT BPD Jateng - UUS		2.500.000	PT BPD Jateng - SBU
PT Bank Syariah Indonesia		4.070.315	PT Bank Syariah Indonesia
PT Bank Aceh Syariah		--	PT Bank Aceh Syariah
Bank Umum Konvensional			Conventional Bank
PT Bank Central Asia Tbk		13.938	PT Bank Central Asia Tbk
PT BPD Papua		8.259	PT BPD Papua
PT BPD Sumbar		3.261.054	PT BPD Sumbar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		9.269.742	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		9.260.253	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Standard Chartered Bank Indonesia		580.245	Standard Chartered Bank Indonesia
PT BPD Bengkulu		101.167	PT BPD Bengkulu
PT BPD Lampung		744.551	PT BPD Lampung
Lain-lain (di bawah Rp10.000)		156.039	Others (below Rp10,000)
		<u>30.993.641</u>	
Mata uang asing			Foreign currencies
Bank Syariah			Sharia Bank
Malayan Banking Berhad	126.563	455.357	Malayan Banking Berhad
Bank Islam Malaysia Berhad	152.206	547.617	Bank Islam Malaysia Berhad
Bank Muamalat Malaysia Berhad	17.954	64.596	Bank Muamalat Malaysia Berhad
Giro pada UUS	505.427	8.134.852	Current accounts with SBU
		<u>9.202.422</u>	
Bank Umum Konvensional			Conventional Bank
Citibank NA, cabang New York	33.264.762	535.396.338	Citibank NA, New York Branch
PT Bank BRI, cabang New York	106.620	1.716.049	PT Bank BRI, New York Branch
PT Bank Central Asia Tbk	245.588	3.952.735	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.556.794	25.056.592	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Standard Chartered Bank Indonesia	2.158.381	36.170.404	Standard Chartered Bank Indonesia
The Development Bank of Singapore Limited	198.589	2.352.202	The Development Bank of Singapore Limited
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad	12.483.936	44.915.455	Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
The National Commercial Bank	205.207	879.107	The National Commercial Bank
Al-Rajhi Banking & Investment (SAR)	252.974	1.083.741	Al-Rajhi Banking & Investment (SAR)
Bank Boubyan, Kuwait	10.000	522.387	Boubyan Bank, Kuwait
Citibank NA, Cabang Indonesia	91	1.458	Citibank NA, Indonesia Branch
Al-Rajhi Banking & Investment (MYR)	2.736	9.843	Al-Rajhi Banking & Investment (MYR)
PT Bank Negara Indonesia Tokyo (Persero) Tbk	2.355.765	242.714	PT Bank Negara Indonesia Tokyo (Persero) Tbk
PT Kookmin Bank	356.900	5.744.308	PT Kookmin Bank
		<u>658.043.333</u>	
Jumlah		698.239.396	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai		--	Allowance for impairment losses
Bersih		698.239.396	Net

**5. GIRO PADA BANK LAIN
(Lanjutan)**

**5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS
(Continued)**

b. Berdasarkan jenis dan bank:

b. By type and bank:

	31 Desember / December 31, 2023		
	Jumlah nosional Mata uang asing/ Notional amount in Foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)		
		Ekuivalen/ Equivalent to Rupiah	
Pihak ketiga			Third Parties
Rupiah			Rupiah
Bank Syariah			Sharia Bank
PT BPD Jatim - UUS		2.423.137	PT BPD Jatim - SBU
PT BPD Sulselbar - UUS		2.083.630	PT BPD Sulselbar - SBU
PT BPD Jateng - UUS		197.265	PT BPD Jateng - SBU
PT Bank Syariah Indonesia		4.072.740	PT Bank Syariah Indonesia
PT Bank Aceh Syariah		3.002.880	PT Bank Aceh Syariah
Bank Umum Konvensional			Conventional Bank
PT Bank Central Asia Tbk		51.177.629	PT Bank Central Asia Tbk
PT BPD Papua		8.949	PT BPD Papua
PT BPD Sumbang		11.620	PT BPD Sumbang
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		11.135.807	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		356.077	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Standard Chartered Bank Indonesia		1.416.687	Standard Chartered Bank Indonesia
PT BPD Bengkulu		101.070	PT BPD Bengkulu
PT BPD Lampung		1.758.385	PT BPD Lampung
Lain-lain (di bawah Rp10.000)		205.370	Others (below Rp10,000)
		<u>77.951.246</u>	
Mata uang asing			Foreign currencies
Bank Syariah			Sharia Bank
Malayan Banking Berhad	2.229.862	7.481.634	Malayan Banking Berhad
Bank Islam Malaysia Berhad	144.925	486.253	Bank Islam Malaysia Berhad
Bank Muamalat Malaysia Berhad	18.075	60.644	Bank Muamalat Malaysia Berhad
Giro pada UUS	1.057.261	16.278.655	Current accounts with SBU
		<u>24.307.186</u>	
Bank Umum Konvensional			Conventional Bank
Citibank NA, cabang New York	81.488.250	1.254.674.592	Citibank NA, New York Branch
PT Bank BRI, cabang New York	107.460	1.654.562	PT Bank BRI, New York Agency
PT Bank Central Asia Tbk	808.464	12.447.924	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.152.088	33.135.691	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Standard Chartered Bank Indonesia	148.386	2.528.244	Standard Chartered Bank Indonesia
The Development Bank of Singapore Limited	389.247	4.544.977	The Development Bank of Singapore Limited
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad	14.342.210	48.120.982	Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
The National Commercial Bank	234.147	961.378	The National Commercial Bank
Al-Rajhi Banking & Investment (SAR)	210.728	865.222	Al-Rajhi Banking & Investment (SAR)
Bank Boubyan, Kuwait	10.000	501.107	Boubyan Bank, Kuwait
Citibank NA, Cabang Indonesia	91	1.395	Citibank NA, Indonesia Branch
Al-Rajhi Banking & Investment (MYR)	3.386	11.360	Al-Rajhi Banking & Investment (MYR)
PT Bank Negara Indonesia Tokyo (Persero) Tbk	7.027.256	765.128	PT Bank Negara Indonesia Tokyo (Persero) Tbk
PT Kookmin Bank	88.843	1.367.908	PT Kookmin Bank
		<u>1.361.580.470</u>	
Jumlah		1.463.838.902	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai		--	Allowance for impairment losses
Bersih		1.463.838.902	Net

5. GIRO PADA BANK LAIN
(Lanjutan)

b. Berdasarkan jenis dan bank: (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 tingkat pengembalian (bonus dan bunga) rata-rata dari giro pada bank lain adalah sebesar 0,02% dan 0,07%.

Bank melakukan penilaian terhadap giro pada bank lain secara individual dengan mempertimbangkan adanya bukti objektif penurunan nilai.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 seluruh giro pada bank lain diklasifikasikan "Lancar".

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Pendapatan jasa giro yang diterima dari giro pada bank umum konvensional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.237.205 dan Rp1.357.334 yang dijadikan dana kebajikan yang disalurkan melalui Baitul Maal Muamalat.

Tidak terdapat giro pada bank lain yang dijadikan jaminan pada 31 Desember 2024 dan 2023.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS
(Continued)

b. By type and bank: (continued)

As of December 31, 2024 and 2023, the average return (bonus and interest) of current accounts with other banks is 0.02% and 0.07%.

The Bank assessed current accounts with other banks individually for impairment based on whether an objective evidence of impairment exists.

As of December 31, 2024 and 2023, all current accounts with other banks are classified as "Current".

Management believes that no allowance for impairment losses is necessary as of December 31, 2024 and 2023.

Interest income received from current accounts with conventional banks for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp2,237,205 and Rp1,357,334, respectively, which is treated as qardhul hasan funds, which are distributed through Baitul Maal Muamalat.

No current accounts with other banks is used as collateral as of December 31, 2024 and 2023.

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

a. Berdasarkan jenis:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Pihak ketiga		
Rupiah		
Deposito berjangka <i>mudharabah</i>		
BPRS Wakalumi	1.451.232	1.451.232
	1.451.232	1.451.232
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat		
Deposito Jaminan		
Citibank N.A New York		
(2024: USD250.000;		
2023: USD150.000)	4.023.750	2.309.550
Investasi wakalah		
BIMB Malaysia		
(2024: MYR2.500.000;		
2023: Nihil)	8.994.650	--
	13.018.400	2.309.550
Jumlah	14.469.632	3.760.782
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	--
Bersih	14.469.632	3.760.782

6. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS

a. By type:

Third Parties
Rupiah
<i>Mudharabah Time Deposits</i>
<i>BPRS Wakalumi</i>
Foreign Currencies
United States Dollar
<i>Pledged Deposit</i>
<i>Citibank N.A New York</i>
<i>(2024: USD250,000;</i>
<i>2023: USD150,000)</i>
<i>Wakalah investment</i>
<i>BIMB Malaysia</i>
<i>(2024: MYR2,500,000;</i>
<i>2023: Nil)</i>
Total
<i>Allowance for impairment losses</i>
Net

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (Lanjutan)

b. Berdasarkan jangka waktu:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Pihak ketiga Rupiah		
≥ 1 - ≤ 3 bulan	--	--
> 3 - ≤ 12 bulan	1.451.232	1.451.232
	<u>1.451.232</u>	<u>1.451.232</u>
Mata uang asing Dolar Amerika Serikat		
≥ 1 - ≤ 3 bulan	8.994.650	--
> 3 - ≤ 12 bulan	4.023.750	2.309.550
	<u>13.018.400</u>	<u>2.309.550</u>
Jumlah	14.469.632	3.760.782
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	--
Bersih	14.469.632	3.760.782

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Pihak Ketiga Rupiah		
≤ 1 bulan	1.451.232	1.451.232
> 3 - ≤ 12 bulan	--	--
	<u>1.451.232</u>	<u>1.451.232</u>
Mata uang asing Dolar Amerika Serikat		
≤ 1 - ≤ 3 bulan	8.994.650	--
> 3 - ≤ 12 bulan	4.023.750	2.309.550
	<u>13.018.400</u>	<u>2.309.550</u>
Jumlah	14.469.632	3.760.782
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	--
Bersih	14.469.632	3.760.782

d. Berdasarkan kolektibilitas:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Pihak ketiga		
Lancar	14.469.632	3.760.782
Macet	--	--
Jumlah	14.469.632	3.760.782
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	--
Bersih	14.469.632	3.760.782

6. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS (Continued)

b. By maturity:

Third parties Rupiah
≥ 1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 12 months
Foreign currency United States Dollar
≥ 1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 12 months
Total
Allowance for impairment losses
Net

c. By remaining period to maturity

Third parties Rupiah
≤ 1 month
> 3 - ≤ 12 months
Foreign currencies United States Dollar
≤ 1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 12 months
Total
Allowance for impairment losses
Net

d. By collectibility:

Third parties
Current
Loss
Total
Allowance for impairment losses
Net

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (Lanjutan)

- e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Saldo awal tahun	--	418.830
Pembalikan selama tahun berjalan (Catatan 36)	--	(418.830)
Saldo akhir tahun	--	--

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak ada penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai agunan.

Rata-rata tingkat imbal hasil adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Deposito berjangka <i>mudharabah</i> IDR	6,02%	7,34%
Deposito berjangka <i>mudharabah</i> USD	11,13%	3,43%

6. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS (Continued)

- e. Changes in allowance for impairment losses on placements with other banks are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	
Balance at the beginning of the year	418.830	
Reversal during the year (Note 36)	(418.830)	
Balance at the end of the year	--	

Management believes that no allowance for impairment losses is necessary as of December 31, 2024 and 2023.

As of December 31, 2024 and 2023, there are no placements with other banks used as collateral.

The annual average return ratio is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	
IDR Mudharabah time deposit	7,34%	
USD Mudharabah time deposit	3,43%	

7. INVESTASI PADA SURAT BERTAGIH

- a. Berdasarkan tujuan, mata uang dan jenis:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Pihak Ketiga Rupiah		
Sukuk Pemerintah	114.712.551	143.376.121
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya Pihak Ketiga Rupiah		
Sukuk Pemerintah	--	--
Diukur pada biaya perolehan Pihak ketiga Rupiah		
Sukuk korporasi	21.072.477.765	21.110.908.564
Sukuk pemerintah	9.417.610.105	8.782.902.547
	30.490.087.870	29.893.811.111
Mata uang asing Dolar Amerika Serikat		
Sukuk pemerintah	522.347.235	487.561.654
	522.347.235	487.561.654
Jumlah	31.127.147.656	30.524.748.886
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	--
Bersih	31.127.147.656	30.524.748.886

7. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES

- a. By purpose, currency and type:

Fair value through profit or loss Third Parties Rupiah
Government Sukuk
Fair value through other comprehensive income Third Parties Rupiah
Government Sukuk
Measured at acquisition cost Third parties Rupiah
Corporate sukuk
Government sukuk
Foreign currency United States Dollar
Government sukuk
Total
Allowance for impairment losses
Net

**7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA
(Lanjutan)**

b. Berdasarkan kolektibilitas

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai surat berharga secara individual dengan adanya bukti objektif penurunan nilai.

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

Klasifikasi jangka waktu surat berharga berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Pihak ketiga		
Rupiah		
≤ 2 tahun	1.895.598.967	1.215.389.761
≥ 2 - ≤ 5 tahun	178.911.940	237.889.730
> 5 tahun	29.052.636.749	29.071.469.395
Jumlah	31.127.147.656	30.524.748.886
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	--
Bersih	31.127.147.656	30.524.748.886

d. Berdasarkan jenis dan penerbit

1) Sukuk Pemerintah

Sukuk Pemerintah merupakan sukuk yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam rangka pengelolaan portofolio surat utang negara.

b. By collectibility

The Bank assessed the marketable securities individually for impairment based on whether an objective evidence of impairment exists.

c. By remaining period to maturity

The classification of marketable securities by the remaining period to maturity is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Third parties		
Rupiah		
≤ 2 years	1.895.598.967	1.215.389.761
≥ 2 - ≤ 5 years	178.911.940	237.889.730
> 5 years	29.052.636.749	29.071.469.395
Total	31.127.147.656	30.524.748.886
Allowance for impairment losses	--	--
Net	31.127.147.656	30.524.748.886

d. By type and issuer

1) Government Sukuk

Government Sukuk represents sukuk issued by the Republic of Indonesia in connection with the management of Government bonds portfolio.

Seri/ Series	Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun/ Average annual revenue sharing rate	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember / December 31, 2023
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Measured at Fair value through profit or loss Rupiah				
Seri SR 014	5,47	10 September 2023/ September 10, 2023	--	538.493
Seri SR 015	5,10	10 September 2024/ September 10, 2024	--	2.074.884
Seri SR 016	5,10	10 September 2024/ September 10, 2024	10.767.848	391.876
Seri SR 017	5,10	10 September 2025/ September 10, 2025	4.184.064	1.411.132
Seri SR 018	6,25	10 Maret 2028/ March 10, 2028	1.935.178	1.382.909
Seri SR 019	6,10	10 September 2026/ September 10, 2026	3.427.474	--
Seri SR 020	6,40	10 Maret 2027/ March 10, 2027	2.940.475	--
Seri SR 021	6,35	10 September 2027/ September 10, 2027	690.962	--
SPNS14022024	6,45	14 Februari 2024/ February 14, 2024	--	99.238.000
SPNS20012025	6,66	20 Januari 2025/ January 20, 2025	27.317.318	--
PBS 003	6,00	15 Januari 2027/ January 15, 2027	9.780.000	--
PBS 004	6,10	15 Februari 2037/ February 15, 2037	7.251.349	279.561
PBS012	8,88	15 November 2031/ November 15, 2031	--	3.284.337
PBS017	6,13	15 Oktober 2025/ October 15, 2025	--	5.465.429
PBS 029	6,38	15 Maret 2034/ March 15, 2034	16.110.260	13.661.940
PBS030	5,88	15 Juli 2028/ July 15, 2028	14.553.600	--
PBS032	4,88	15 Juni 2047/ June 15, 2047	9.658.300	--
PBS033	6,75	15 Juni 2037/ June 15, 2037	868.608	--
PBS034	6,50	15 Juni 2039/ June 15, 2039	287.765	4.855.950
PBS036	5,38	15 Agustus 2025/ August 15, 2025	4.939.350	9.795.400
PBS037	5,38	15 Maret 2036/ March 15, 2036	--	996.210
			114.712.551	143.376.121

**7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA
(Lanjutan)**

**7. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES
(Continued)**

d. Berdasarkan jenis dan penerbit (lanjutan)

d. By type and issuer (continue)

1) Sukuk Pemerintah (lanjutan)

1) Government Sukuk (continue)

Sukuk Pemerintah merupakan sukuk yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam rangka pengelolaan portofolio surat utang negara.

Government Sukuk represents sukuk issued by the Republic of Indonesia in connection with the management of Government bonds portfolio.

Seri / Series	Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun/ Average annual revenue sharing rate	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	31 Desember/ December 31,	31 Desember / December 31,
			2024	2023
Diukur pada biaya perolehan / Measured at acquisition cost				
Rupiah				
Seri IFR 006	10,25%	15 Maret 2030/ March 15, 2030	333.627.526	340.127.934
Seri IFR 007	10,25%	15 Januari 2030/ January 15, 2030	19.017.612	19.478.075
Seri IFR 0010	10,00%	15 Februari 2036/ February 15, 2036	397.777.084	403.378.550
Seri PBS 003	6,00%	15 Januari 2027/ January 15, 2027	19.763.990	19.647.888
Seri PBS 004	6,10%	15 Februari 2037/ February 15, 2037	1.248.468.527	1.244.990.165
Seri PBS 005	6,75%	15 April 2043/ April 15, 2043	258.195.665	255.575.661
Seri PBS 012	8,88%	15 November 2031/ November 15, 2031	1.093.319.880	1.110.537.764
Seri PBS 021	8,50%	15 November 2026/ November 15, 2026	92.400.256	93.247.069
Seri PBS 022	8,62%	15 April 2034/ April 15, 2034	170.504.936	172.163.531
Seri PBS 025	8,38%	15 Mei 2033/ May 15, 2033	625.555.263	631.849.512
Seri PBS 029	6,38%	15 Maret 2034/ March 15, 2034	641.392.583	638.929.989
Seri PBS 033	6,75%	15 Juni 2047/ June 15, 2047	161.535.986	161.214.709
Seri PBS 034	6,50%	15 Juni 2047/ June 15, 2047	675.415.679	672.824.116
Seri PBS 037	6,50%	15 Juni 2047/ June 15, 2047	2.097.109.118	2.095.104.584
Seri SR 016	4,95%	10 Maret 2025/ March 10, 2025	5.000.000	5.000.000
Seri SR 017	5,90%	10 September 2025/ September 10, 2025	500.000	500.000
SIPA03092723	5,90%	2 Oktober 2023/ October 2, 2023	--	200.000.000
SUKBI011124364	6,16%	1 Oktober 2023/ October 1, 2023	--	48.780.000
SUKBI020224182	6,32%	2 Februari 2024/ February 2, 2024	--	50.000.000
SUKBI020824273	6,16%	2 Agustus 2024/ August 2, 2024	--	50.000.000
SUKBI020824364	6,42%	3 Mei 2024/ May 3, 2024	--	39.682.000
SUKBI030124091	6,16%	4 Oktober 2023/ October 4, 2023	--	50.000.000
SUKBI030524273	6,40%	4 Oktober 2023/ October 4, 2023	--	34.246.000
SUKBI050124182	6,31%	5 Januari 2024/ January 5, 2024	--	50.000.000
SUKBI050424273	6,40%	5 April 2024/ April 5, 2024	--	38.759.000
SUKBI050724364	6,41%	5 Juli 2024/ July 5, 2024	--	41.666.000
SUKBI130924364	6,40%	6 Oktober 2023/ October 6, 2023	--	123.456.000
SUKBI140624273	6,39%	6 Oktober 2023/ October 6, 2023	--	65.359.000
SUKBI150224092	6,16%	6 Desember 2023/ December 6, 2023	--	26.385.000
SUKBI150324182	6,30%	8 November 2023/ November 8, 2023	--	100.000.000
SUKBI020525273	7,18%	2 Mei 2025/ May 2, 2025	150.000.000	--
SUKBI010825364	7,24%	1 Agustus 2025/ August 1, 2025	200.000.000	--
SUKBI060625273	7,11%	6 Juni 2025/ June 6, 2025	10.000.000	--
SUKBI030125364	6,89%	3 Januari 2025/ January 3, 2025	23.419.000	--
SUKBI070325273	7,33%	7 Maret 2025/ March 7, 2025	60.000.000	--
SUKBI310125364	6,82%	31 Januari 2025/ January 31, 2025	19.607.000	--
SUKBI070325182	7,02%	7 Maret 2025/ March 7, 2025	10.000.000	--
SUKBI080925367	7,15%	8 September 2025/ September 8, 2025	10.000.000	--
SUKBI070325364	6,86%	7 Maret 2025/ March 7, 2025	40.000.000	--
SUKBI030125273	6,83%	3 Januari 2025/ January 3, 2025	25.000.000	--
SUKBI040425364	6,92%	4 April 2025/ April 4, 2025	50.000.000	--
SUKBI310125182	7,09%	31 Januari 2025/ January 31, 2025	50.000.000	--
SUKBI310125273	7,32%	31 Januari 2025/ January 31, 2025	30.000.000	--
SUKBI020525364	7,47%	2 Mei 2025/ May 2, 2025	100.000.000	--
SUKBI030125182	7,32%	3 Januari 2025/ January 3, 2025	50.000.000	--
SUKBI060625364	7,38%	6 Juni 2025/ June 6, 2025	300.000.000	--
SUKBI040425273	7,43%	4 April 2025/ April 4, 2025	150.000.000	--
SUKBI040725364	7,52%	4 Juli 2025/ July 4, 2025	300.000.000	--
			9.417.610.105	8.782.902.547
Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar				
Seri INDOIS 25	4,33%	28 Mei 2025/ May 28, 2025	125.885.388	123.163.472
Seri INDOIS 27	4,15%	29 Maret 2027/ March 29, 2027	127.628.092	123.332.302
Seri INDOIS 31	2,55%	9 Juni 2031/ June 9, 2031	252.738.755	241.065.880
SUVBJ545111224	4,81%	6 Januari 2025/ January 6, 2025	16.095.000	--
			522.347.235	487.561.654

**7. INVESTASI PADA SURAT BERTAHAGA
(Lanjutan)**

d. Berdasarkan jenis dan penerbit (lanjutan)

2) Sukuk Korporasi

<i>Seri/ Series</i>	<i>Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun/ Average annual revenue sharing rate</i>	<i>Tanggal jatuh tempo/ Maturity date</i>	<i>Peringkat/ Rating</i>	<i>31 Desember/ December 31, 2024</i>	<i>31 Desember/ December 31, 2023</i>
<i>Diukur pada biaya perolehan/ Measured at acquisition cost</i>					
Sukuk PT PPA	1,00%	15 November 2041/ November 15, 2041	idAA	13.051.069.000	13.051.069.000
Sukuk <i>Trust Certificate</i> Efek Beragun Syariah (EBAS) PT SMF	--	29 Juni 2038/ June 29, 2038	--	8.000.000.000	8.000.000.000
Sukuk Samporna Agro Tbk Tahun 2021	7,00%	30 Oktober 2041/ October 30, 2041	idAAA(sy)	21.408.765	29.839.564
	8,63%	17 Maret 2024/ March 17, 2024	idA-(sy)	--	30.000.000
<i>Surat Bertahaga Repo/ Marketable Repo Securities</i>				--	--
Jumlah / Total				31.127.147.656	30.524.748.886

e) Mutasi perubahan cadangan kerugian penurunan nilai investasi pada surat berharga adalah sebagai berikut:

	<i>31 Desember/ December 31, 2024</i>	<i>31 Desember/ December 31, 2023</i>	
Saldo awal	--	--	<i>Beginning balance</i>
Pembalikan dalam tahun berjalan (Catatan 36)	--	--	<i>Reversal during the year (Note 36)</i>
Penghapusbukuan	--	--	<i>Write off</i>
Saldo akhir	--	--	<i>Ending balance</i>

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Management believes that no allowance for impairment losses is necessary as of December 31, 2024 and 2023.

f) Mutasi perubahan laba yang belum direalisasi atas pemilikan investasi pada surat berharga tersedia untuk dijual - bersih:

	<i>31 Desember/ December 31, 2024</i>	<i>31 Desember/ December 31, 2023</i>	
Saldo Awal	--	(1.464.552)	<i>Beginning balance</i>
Perubahan nilai investasi pada surat berharga - neto	--	1.464.552	<i>Change in value of investments in securities - net</i>
Saldo Akhir	--	--	<i>Ending balance</i>

f) Changes in unrealized gain on increase in value of investments in securities available for sale - net:

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (Lanjutan)

g) Informasi penting lainnya:

Pada tanggal 9 September 2021, Bank telah melakukan perjanjian untuk melakukan aksi korporasi dalam rangka memperkuat permodalan dan mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan yang dituangkan dalam *Master Restructuring Agreement* ("MRA"). Bank melakukan transaksi pengelolaan aset/*asset sale* dengan PT Perusahaan Pengelola Aset ("PPA") dan penguatan struktur permodalan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji ("BPKH"). MRA tersebut dilanjutkan dengan transaksi penyelesaian aset berkualitas rendah dengan aset produktif (*asset sale*) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021. Transaksi tersebut terdiri dari:

1. Penjualan Piutang dan Pembiayaan;
2. Pembelian Sukuk yang diterbitkan oleh PPA; dan
3. Penerbitan Sukuk oleh Bank Muamalat.

Bank melakukan penjualan terhadap sekumpulan tagihan Piutang & Pembiayaan yang telah diverifikasi dan memenuhi kriteria pemilihan untuk dijual oleh Bank sebagai Kreditur Awal kepada PT AMC Indonesia Sukses ("AMC") selaku pembeli yang tertuang dalam Perjanjian Pengalihan Portofolio tertanggal 15 November 2021. Nilai Penjualan Piutang dan Pembiayaan yang dialihkan kepada AMC adalah sebesar Rp10.000.000.000, dengan harga sebesar nilai pokok kumpulan tagihan portofolio pada tanggal *cut off* final 15 November 2021.

Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kepada pembeli, risiko atas kumpulan tagihan portofolio telah beralih dari Bank kepada pembeli termasuk segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul dari kumpulan tagihan portofolio tersebut.

Pada tanggal 15 November 2021, Bank melakukan pembelian surat berharga dari Cinda International Asset Management Limited berdomisili di Hongkong dengan nilai perolehan sebesar Rp13.051.069.000. Surat berharga yang dibeli tersebut merupakan sukuk yang diterbitkan oleh PT PPA dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pada tanggal 15 November 2021, Bank menerbitkan Sertifikat *Sukuk Mudharabah* sebesar Rp2.440.856.000 kepada PT PPA (lihat catatan 27). *Sukuk Mudharabah* yang diterbitkan oleh Bank tidak melalui penawaran umum (*public offering*) tetapi dilakukan dengan mekanisme penawaran terbatas (*private placement*).

7. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES (Continued)

g) Other significant information is as follows:

On September 9, 2021, the Bank entered into an agreement to take corporate actions in order to strengthen capital and support the Company's business growth as outlined in the *Master Restructuring Agreement* ("MRA"). The Bank conducted asset management transactions/ *asset sale* with PT Perusahaan Pengelola Aset ("PPA") and strengthening the capital structure by the Badan Pengelola Keuangan Haji ("BPKH"). The MRA was followed by a settlement transaction of low quality assets with earning assets (*asset sale*) which was carried out on November 15, 2021. The transaction consists of:

1. Sales of Receivables and Financing;
2. Purchase of Sukuk securities issued by PPA; and
3. Issuance of Sukuk securities by Bank Muamalat.

The Bank sold certain Receivables & Financing receivables which represent the claims of verified portfolio that meet the eligibility criteria for sale and transfer by the Bank as Original Creditor to PT AMC Indonesia Sukses ("AMC") as the buyer as stated in the *Portfolio Transfer Agreement* dated November 15, 2021. Sales value of receivables and financing transferred to AMC is amounting to Rp10,000,000,000 at the face value of the claims of portfolio on the final cut off date November 15, 2021.

Upon the sale and transfer to the buyer, the risk of claims of portfolio is transferred from the Bank to the buyer including any profits and losses that will arise from the claims of portfolio.

On November 15, 2021, the Bank purchased marketable securities from Cinda International Asset Management Limited, domiciled in Hongkong at cost amounting to Rp13,051,069,000. The securities purchased, which were issued by PT PPA, are sukuk with a period of 20 (twenty) years.

On November 15, 2021, the Bank issued Certificate of *Mudharabah Sukuk* amounting to Rp2,440,856,000 to PT PPA (see note 27). The *Mudharabah Sukuk* was not issued through public offering. It was issued through private placement.

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (Lanjutan)

g) Informasi penting lainnya: (lanjutan)

Pada tanggal 29 Juni 2018, Bank telah melakukan perjanjian pengalihan portofolio atas piutang *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pinjaman *qardh*, Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan aktiva lainnya atas margin piutang *murabahah* serta pendapatan yang akan diterima bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* ("kumpulan tagihan portofolio") yang dimilikinya. Dalam rangka penyehatan Bank, selanjutnya atas kumpulan tagihan portofolio yang telah diverifikasi dan memenuhi kriteria pemilihan untuk dijual dan dialihkan oleh Bank sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan ke Tameer Sukuk SPC Limited selaku pembeli yang tertuang dalam Perjanjian Pengalihan Portofolio tertanggal 29 Juni 2018.

Nilai pokok kumpulan tagihan portofolio yang dijual dan dialihkan tersebut yang merupakan kumpulan tagihan portofolio yang telah diverifikasi dan memenuhi kriteria pemilihan untuk dijual dan dialihkan dalam mata uang US Dolar sebesar USD423.639.060 (dalam angka penuh) atau senilai Rp6.000.000.000 (1 Dolar AS = Rp14.163) dengan harga sebesar nilai pokok kumpulan tagihan portofolio pada tanggal *cut off* final (29 Juni 2018).

Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kepada pembeli, risiko atas kumpulan tagihan portofolio telah beralih dari Bank kepada pembeli termasuk segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul dari kumpulan tagihan portofolio tersebut.

Pada tanggal 29 Juni 2018, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menerbitkan Sertifikat *Sukuk Mudharabah* sebesar Rp1.600.000.000 kepada Mawthiq SPC Limited (lihat catatan 27). *Sukuk Mudharabah* yang diterbitkan oleh Bank tidak melalui penawaran umum (*public offering*) tetapi dilakukan dengan mekanisme penawaran terbatas (*private placement*).

Pada tanggal 29 Juni 2018, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk melakukan pembelian Sukuk Trust Certificate yang diterbitkan oleh Najah Sukuk SPC limited berdomisili di Uni Emirat Arab dalam mata uang US Dollar sebesar USD564.852.079 (dalam angka penuh) senilai Rp8.000.000.000 (1 Dolar AS = Rp14.163). Surat berharga tersebut dengan nama Najah Sukuk 2018-001 Trust Certificate. Portofolio dari Najah Sukuk 2018-001 Trust Certificate terdiri dari Surat Berharga Negara Indonesia dan lainnya dengan jangka waktu rata-rata 20 (dua puluh) tahun.

Seluruh investasi pada surat berharga pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dikelompokkan lancar.

7. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES (Continued)

g) Other significant information is as follows: (continued)

On June 29, 2018, the Bank entered into a portfolio transfer agreement for *murabahah* receivables, *mudharabah* financing, *musyarakah* financing, funds of *qardh*, foreclosed assets and other assets on the *murabahah* receivable margin and the revenue to be received for *mudharabah* and *musyarakah* ("claims of portfolio") held. Subsequently, for the purpose of Bank restructuring, the claims of verified portfolio meeting the eligibility criteria for sale and transfer by the Bank as the Original Creditor have been sold and transferred to Tameer Sukuk SPC Limited as the buyer as stipulated in the Portfolio Transfer Agreement dated June 29, 2018.

The principal amount of the claims of portfolio sold and transferred, which represent the claims of verified portfolio that meet the eligibility criteria for sale and transfer, is USD423,639,060 (in full amount) or equivalent to Rp6,000,000,000 (1 US Dollar = Rp14,163) at the face value of the claims of portfolio on the final cut off date (June 29, 2018).

Upon the sale and transfer to the buyer, the risk of claims of portfolio is transferred from the Bank to the buyer including any profits and losses that will arise from the claims of portfolio.

On June 29, 2018, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk issued Certificate of *Mudharabah Sukuk* amounting to Rp1,600,000,000 to Mawthiq SPC Limited (see note 27). The *Mudharabah Sukuk* was not issued through public offering. It was issued through private placement.

On June 29, 2018, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk purchased Sukuk Trust Certificate issued by Najah Sukuk SPC limited, domiciled in the United Arab Emirates amounting to USD564,852,079 (in full amount) or equivalent to Rp8,000,000,000 (1 US Dollar = Rp14,163). The securities are under the name Najah Sukuk 2018-001 Trust Certificate. The securities are in the form of sukuk consisting of Government Securities and others with an average period of 20 (twenty) years.

All investments in securities as of December 31, 2024 and 2023 are classified as current.

8. PIUTANG

a. Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Murabahah Rupiah		
Lancar	2.851.313.907	3.790.096.209
Dalam perhatian khusus	1.182.357.392	1.428.615.852
Kurang lancar	4.877.900	6.215.869
Diragukan	4.214.007	4.467.493
Macet	247.998.659	249.155.416
	<u>4.290.761.865</u>	<u>5.478.550.839</u>
Mata uang asing		
Lancar	--	--
Dalam perhatian khusus	229.025.871	373.063.359
	<u>229.025.871</u>	<u>373.063.359</u>
Jumlah	4.519.787.736	5.851.614.198
Cadangan kerugian penurunan nilai	(143.857.930)	(226.045.419)
Bersih - Murabahah	<u>4.375.929.806</u>	<u>5.625.568.779</u>
Istishna Rupiah		
Lancar	936.303	1.241.639
Mata uang asing		
Lancar	--	--
Jumlah	<u>936.303</u>	<u>1.241.639</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(9.374)	(12.420)
Bersih - Istishna	<u>926.929</u>	<u>1.229.219</u>
Piutang Ijarah Rupiah		
Dalam perhatian khusus	--	--
Kurang lancar	--	--
Macet	1.035.059	1.069.847
Mata uang asing		
Macet	--	--
Jumlah	<u>1.035.059</u>	<u>1.069.847</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.034.273)	(1.048.119)
Bersih - Ijarah	<u>786</u>	<u>21.728</u>
Jumlah	<u>4.521.759.098</u>	<u>5.853.925.684</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(144.901.577)	(227.105.958)
Bersih	<u>4.376.857.521</u>	<u>5.626.819.726</u>

8. RECEIVABLES

a. By type, currencies and collectibility:

Murabahah Rupiah	
Current	
Special Mention	
Substandard	
Doubtful	
Loss	
Foreign currency	
Current	
Special Mention	
Total	
Allowance for impairment losses	
Net - Murabahah	
Istishna Rupiah	
Current	
Foreign currency	
Current	
Total	
Allowance for impairment losses	
Net - Istishna	
Ijarah Receivables Rupiah	
Special Mention	
Substandard	
Loss	
Foreign currency	
Loss	
Total	
Allowance for impairment losses	
Net - Ijarah	
Total	
Allowance for impairment losses	
Net	

8. PIUTANG (Lanjutan)

8. RECEIVABLES (Continued)

b. Berdasarkan sektor ekonomi:

b. By economic sector:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Pihak ketiga		
Industri	542.714.626	1.154.850.729
Sosial/masyarakat	770.834.077	984.781.495
Perdagangan	442.252.119	696.698.454
Pengangkutan	294.009.928	315.652.673
Listrik, gas dan air	333.218.476	325.706.943
Pertanian	98.066.882	201.426.713
Konstruksi	290.947.983	293.808.526
Jasa usaha	97.709.809	139.446.189
Pertambangan	35.909.416	35.876.828
Lainnya	1.609.581.523	1.698.040.805
	<u>4.515.244.839</u>	<u>5.846.289.355</u>
Pihak berelasi (Catatan 41)		
Lainnya	6.514.259	7.636.329
	<u>6.514.259</u>	<u>7.636.329</u>
Jumlah	4.521.759.098	5.853.925.684
Cadangan kerugian penurunan nilai	(144.901.577)	(227.105.958)
Bersih	4.376.857.521	5.626.819.726

Third parties
Manufacturing
Social/public
Trading
Transportation
Electricity, gas and water
Agriculture
Construction
Business services
Mining
Others

Related parties (Note 41)
Others

Total
Allowance for impairment
losses

Net

c. Berdasarkan jangka waktu:

c. By maturity:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Pihak ketiga		
Rupiah		
≤ 1 tahun	849.152.893	1.473.349.746
≥ 1 - ≤ 2 tahun	697.213.280	396.854.025
> 2 - ≤ 5 tahun	1.054.631.919	1.041.556.260
> 5 tahun	1.914.246.747	2.934.529.324
	<u>4.515.244.839</u>	<u>5.846.289.355</u>
Pihak berelasi (Catatan 41)		
≤ 1 tahun	469.734	418.174
≥ 1 - ≤ 2 tahun	473.710	891.921
> 2 - ≤ 5 tahun	2.959.431	2.798.970
> 5 tahun	2.611.384	3.527.264
	<u>6.514.259</u>	<u>7.636.329</u>
Jumlah	4.521.759.098	5.853.925.684
Cadangan kerugian penurunan nilai	(144.901.577)	(227.105.958)
Bersih	4.376.857.521	5.626.819.726

Third parties
Rupiah
≤ 1 year
≥ 1 - ≤ 2 years
> 2 - ≤ 5 years
> 5 years

Related parties (Note 41)
≤ 1 year
≥ 1 - ≤ 2 years
> 2 - ≤ 5 years
> 5 years

Total
Allowance for impairment
losses

Net

8. PIUTANG (Lanjutan)

8. RECEIVABLES (Continued)

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

d. By remaining period to maturity:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
≤ 1 tahun	1.749.619.881	2.097.725.535	≤ 1 year
≥ 1 - ≤ 2 tahun	725.898.199	520.566.456	≥ 1 - ≤ 2 years
> 2 - ≤ 5 tahun	946.860.163	1.457.685.861	> 2 - ≤ 5 years
> 5 tahun	1.092.866.596	1.770.311.503	> 5 years
	<u>4.515.244.839</u>	<u>5.846.289.355</u>	
Pihak berelasi (Catatan 41)			Related parties (Note 41)
Rupiah			Rupiah
≤ 1 tahun	752.754	467.487	≤ 1 year
≥ 1 - ≤ 2 tahun	883.406	1.286.291	≥ 1 - ≤ 2 years
> 2 - ≤ 5 tahun	2.699.411	2.958.090	> 2 - ≤ 5 years
> 5 tahun	2.178.688	2.924.461	> 5 years
	<u>6.514.259</u>	<u>7.636.329</u>	
Jumlah	4.521.759.098	5.853.925.684	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(144.901.577)</u>	<u>(227.105.958)</u>	Allowance for impairment losses
Bersih	4.376.857.521	5.626.819.726	Net

e. Berdasarkan keterkaitan:

e. By relationship:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Pihak ketiga	4.515.244.839	5.846.289.355	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 41)			Related parties (Note 41)
Karyawan Kunci	<u>6.514.259</u>	<u>7.636.329</u>	Key Employees
	<u>6.514.259</u>	<u>7.636.329</u>	
Jumlah	4.521.759.098	5.853.925.684	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(144.901.577)</u>	<u>(227.105.958)</u>	Allowance for impairment losses
Bersih	4.376.857.521	5.626.819.726	Net

f. Tingkat margin rata-rata per tahun:

f. Average profit margin rates per annum:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Rupiah	15,35%	11,04%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	12,00%	7,22%	United States Dollar

8. PIUTANG (Lanjutan)

g. Rincian piutang bermasalah menurut sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Pengangkutan	199.576.777	198.220.517
Industri	17.887.507	17.887.507
Sosial/masyarakat	4.610.848	5.880.555
Pertanian	474.996	7.204.368
Perdagangan	1.932.559	902.672
Jasa Usaha	160.720	--
Konstruksi	533.477	
Pertambangan	1.854.366	1.767.778
Lainnya	31.093.410	27.987.580
Jumlah	258.124.660	259.850.977
Cadangan kerugian penurunan nilai	(82.490.372)	(175.500.216)
Bersih	175.634.288	84.350.761

h. Informasi penting lainnya:

Pada tanggal 15 November 2021, Bank telah melakukan transaksi penyelesaian aset berkualitas rendah dengan aset produktif (*asset sale*). Transaksi *asset sale* telah dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021 salah satunya berupa penjualan piutang dan pembiayaan. Dalam rangka penyehatan Bank, selanjutnya atas kumpulan tagihan portofolio yang telah diverifikasi dan memenuhi kriteria pemilihan untuk dijual dan dialihkan oleh Bank sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan ke PT AMC Indonesia Sukses selaku pembeli yang tertuang dalam Perjanjian Pengalihan Portofolio tertanggal 15 November 2021.

Nilai pokok piutang *murabahah* yang dijual dan dialihkan tersebut adalah sebesar Rp3.884.897.030 yang terdiri dari 1.500 nasabah dengan harga sebesar nilai pokok piutang *murabahah* pada tanggal *cut off* final (15 November 2021). Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan piutang *murabahah* tersebut, risiko telah beralih dari Bank kepada pembeli termasuk segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul.

Pada tanggal 29 Juni 2018, Bank telah melakukan perjanjian pengalihan portofolio atas piutang *murabahah* (lihat catatan 7). Selanjutnya atas piutang *murabahah* dan margin *murabahah* yang telah memenuhi kriteria pemilihan dijual dan dialihkan oleh Bank, sebagai Kreditur Awal, ke Tameer Sukuk SPC Limited selaku pembeli yang tertuang dalam Perjanjian Pengalihan Portofolio tertanggal 29 Juni 2018.

8. RECEIVABLES (Continued)

g. Non-performing receivables by economic sector are as follows:

Transportation
Manufacturing
Social/public
Agriculture
Trading
Business Services
Construction
Mining
Others
Total
Allowance for impairment losses
Net

h. Other significant information is as follows:

On November 15, 2021, the Bank entered into a settlement transaction for low quality assets with earning assets (*asset sale*). The *asset sale* transactions were carried out on November 15, 2021, and one of which was in the form of sale of receivables and financing. In the context of restructuring the Bank, the collection of portfolio claims that have been verified and meeting the eligibility criteria to be sold and transferred by the Bank as the Original Creditor were then sold and transferred to PT AMC Indonesia Sukses as the buyer as stated in the Portfolio Transfer Agreement dated November 15, 2021.

The principal amount of the *murabahah* receivables sold and transferred is Rp3,884,897,030, consisting of 1,500 debtors at a price equal to the principal amount of the *murabahah* receivables on the final cut off date (November 15, 2021). Upon the sale and transfer of such *murabahah* receivables, the risk is transferred from the Bank to the buyer, including any profits and losses that will arise.

On June 29, 2018, the Bank entered into a portfolio transfer agreement on *murabahah* receivables (see note 7). Subsequently, the *murabahah* receivables and *murabahah* margin meeting the eligibility criteria are sold and transferred by the Bank, as the Original Creditor, to Tameer Sukuk SPC Limited as the buyer as stated in the Portfolio Transfer Agreement dated June 29, 2018.

8. PIUTANG (Lanjutan)

h. Informasi penting lainnya: (lanjutan)

Nilai pokok piutang *murabahah* dan margin *murabahah* yang dijual dan dialihkan tersebut adalah sebesar Rp1.550.228.145 yang terdiri dari 2.997 nasabah dengan harga sebesar nilai pokok piutang *murabahah* pada tanggal *cut off* final (29 Juni 2018). Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan piutang *murabahah* tersebut, risiko telah beralih dari Bank kepada pembeli termasuk segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul.

Jumlah piutang yang direstrukturisasi Bank sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp100.468.914 dan Rp93.800.669. Skema restrukturisasi umumnya dilakukan dengan perpanjangan masa pelunasan piutang dan penjadwalan kembali pembayaran yang tertunggak.

Piutang sindikasi merupakan piutang yang diberikan kepada debitur dibawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Jumlah piutang sindikasi yang diberikan Bank adalah sebesar Rp171.084.936 dan Rp172.991.053. masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Keikutsertaan Bank sebagai pimpinan sindikasi sebesar 63,33% pada tanggal 31 Desember 2024 dan sebesar 0,80% sampai dengan 63,33% pada tanggal 31 Desember 2023.

Dalam laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) per tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 kepada OJK, Bank tidak memiliki debitur, baik pihak terkait maupun pihak tidak terkait yang tidak memenuhi atau melampaui ketentuan BMPD.

Piutang dijamin agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (catatan 27) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

Tabel *Non-Performing Financing (NPF)* bruto dan neto atas jumlah piutang adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024
NPF - bruto	258.124.660
Persentase NPF - bruto	5,71%
NPF - neto	175.634.288
Persentase NPF - neto	3,91%

8. RECEIVABLES (Continued)

h. Other significant information is as follows: (continued)

The principal amount of the *murabahah* receivables and *murabahah* margin sold and transferred is Rp1,550,228,145, consisting of 2,997 debtors at a price equal to the principal amount of the *murabahah* receivables on the final cut off date (June 29, 2018). Upon the sale and transfer of such *murabahah* receivables, the risk is transferred from the Bank to the buyer, including any profits and losses that will arise.

Receivables that have been restructured by the Bank as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp100.468.914 and Rp93.800.669, respectively. Restructuring scheme generally involves extension of the receivables maturity date and rescheduling of overdue payment.

Syndicated receivables represent financing provided to debtors under syndication agreements with other banks. The total amount of syndicated receivables provided by the Bank amounted to Rp171,084,936 and Rp172,991,053 as of December 31, 2024 and December 31, 2023, respectively. The Bank's participation as a leader in the syndicated receivables is 63.33% as of December 31, 2024 and 0.80% to 63.33% as of December 31, 2023.

In its report on Legal Lending Limit (LLL) to FSA as of December 31, 2024 and 2023, the Bank indicated that there is no debtor, either related party or third party, who did not comply with or who has exceeded the LLL.

Receivables are guaranteed with registered mortgages or power of attorney to mortgage and sell, *mudharabah* time deposits (note 27) or other collaterals generally accepted by the Bank.

The table of total gross and net Non-Performing Financing (NPF) on receivables is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	
NPF - bruto	259.850.977	NPF - gross
Persentase NPF - bruto	4,44%	Percentage of NPF - gross
NPF - neto	84.350.761	NPF - net
Persentase NPF - neto	1,44%	Percentage of NPF - net

8. PIUTANG (Lanjutan)

h. Informasi penting lainnya: (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024
Saldo awal tahun	227.105.958
Penyisihan (pembalikan) tahun berjalan (Catatan 36)	(92.999.437)
Penerimaan piutang yang telah dihapusbukukan	9.921.244
Selisih kurs penjabaran	873.812
Saldo akhir tahun	144.901.577

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang tersebut.

8. RECEIVABLES (Continued)

h. Other significant information is as follows: (continued)

Changes in allowance for impairment losses on receivables are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	
	312.061.843	Balance at the beginning of the year
	(91.808.252)	Provision (reversal) during the year (Note 36)
	6.593.377	Recovery of written-off receivables
	258.990	Exchange rate differences
227.105.958		Balance at the end of the year

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover losses that might arise from uncollectible receivables.

9. PINJAMAN QARDH

a. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas:

	31 Desember/ December 31, 2024
Rupiah	
Lancar	193.887.139
Dalam perhatian khusus	51.638.176
Kurang lancar	1.585.555
Diragukan	809.696
Macet	80.591.401
	328.511.967
Mata uang asing	
Lancar	--
Jumlah	328.511.967
Cadangan kerugian penurunan nilai	(7.954.966)
Bersih	320.557.001

9. FUNDS OF QARDH

a. By type and collectibility:

	31 Desember/ December 31, 2023	
	336.070.847	Rupiah
	59.751.975	Current
	1.657.219	Special Mention
	900.971	Substandard
	79.236.174	Doubtful
	477.617.186	Loss
		Foreign Currency
	155.987.235	Current
633.604.421		Total
(62.110.112)		Allowance for impairment losses
571.494.309		Net

9. PINJAMAN QARDH (Lanjutan)

9. FUNDS OF QARDH (Continued)

b. Berdasarkan sektor ekonomi:

b. By economic sector:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Pihak ketiga			Third parties
Jasa usaha	10.606.076	43.553.727	Business services
Perdagangan	120.576.295	259.084.149	Trading
Industri	3.612.960	53.769.861	Manufacturing
Sosial/masyarakat	--	2.851.110	Social/public
Lainnya	193.587.876	273.996.967	Others
	<u>328.383.207</u>	<u>633.255.814</u>	
Pihak berelasi (Catatan 41)			Related parties (Note 41)
Lainnya	128.760	348.607	Others
	<u>128.760</u>	<u>348.607</u>	
Jumlah	328.511.967	633.604.421	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(7.954.966)	(62.110.112)	Allowance for impairment losses
Bersih	320.557.001	571.494.309	Net

c. Berdasarkan jangka waktu:

c. By maturity:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Pihak ketiga Rupiah			Third parties Rupiah
≤ 1 tahun	82.101.380	257.859.041	≤ 1 year
≥ 1 - ≤ 2 tahun	32.106.164	59.845.298	≥ 1 - ≤ 2 years
> 2 - ≤ 5 tahun	167.433.909	268.141.207	> 2 - ≤ 5 years
> 5 tahun	46.741.754	47.410.268	> 5 years
	<u>328.383.207</u>	<u>633.255.814</u>	
Pihak berelasi (Catatan 41)			Related parties (Note 41)
≤ 1 tahun	--	--	≤ 1 year
≥ 2 - ≤ 5 tahun	--	9.117	≥ 2 - ≤ 5 years
> 5 tahun	128.760	339.490	> 5 year
	<u>128.760</u>	<u>348.607</u>	
Jumlah	328.511.967	633.604.421	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(7.954.966)	(62.110.112)	Allowance for impairment losses
Bersih	320.557.001	571.494.309	Net

9. PINJAMAN QARDH (Lanjutan)

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

	31 Desember/ December 31, 2024
Pihak ketiga Rupiah	
≤ 1 tahun	187.208.117
≥ 1 - ≤ 2 tahun	94.346.960
> 2 - ≤ 5 tahun	46.828.130
> 5 tahun	--
	328.383.207
Pihak berelasi (Catatan 41)	
≤ 1 tahun	5.805
≥ 1 - ≤ 2 tahun	66.052
> 2 - ≤ 5 tahun	56.903
	128.760
Jumlah	328.511.967
Cadangan kerugian penurunan nilai	(7.954.966)
Bersih	320.557.001

e. Berdasarkan keterkaitan:

	31 Desember/ December 31, 2024
Pihak ketiga	328.383.207
Pihak berelasi (Catatan 41)	
Karyawan kunci	128.760
Jumlah	328.511.967
Cadangan kerugian penurunan nilai	(7.954.966)
Bersih	320.557.001

f. Rincian pinjaman *qardh* bermasalah menurut sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024
Perdagangan	77.447.500
Lainnya	5.539.153
Jumlah	82.986.653
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.678.675)
Bersih	78.307.978

9. FUNDS OF QARDH (Continued)

d. By remaining period to maturity:

	31 Desember/ December 31, 2023	
Third parties Rupiah		
≤ 1 year	349.666.655	
≥ 1 - ≤ 2 years	97.044.292	
> 2 - ≤ 5 years	182.275.005	
> 5 years	4.269.862	
	633.255.814	
Related parties (Note 41)		
≤ 1 Year	32.504	
≥ 1 - ≤ 2 years	9.995	
> 2 - ≤ 5 years	306.108	
	348.607	
Total	633.604.421	
Allowance for impairment losses	(62.110.112)	
Net	571.494.309	

e. By relationship:

	31 Desember/ December 31, 2023	
Third parties	633.255.814	
Related parties (Note 41)		
Key employees	348.607	
Total	633.604.421	
Allowance for impairment losses	(62.110.112)	
Net	571.494.309	

f. Non-performing funds of *qardh* by economic sector are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	
Trading	77.447.500	
Others	4.308.549	
Total	81.756.049	
Allowance for impairment losses	(56.803.250)	
Net	24.952.799	

9. PINJAMAN *QARDH* (Lanjutan)

g. Informasi penting lainnya:

Tabel *Non-Performing Financing* (NPF) bruto dan neto atas jumlah pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024
NPF - bruto	82.986.653
Persentase NPF - bruto	25,26%
NPF - netto	78.307.978
Persentase NPF - netto	23,84%

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024
Saldo awal tahun	62.110.112
Penyisihan tahun berjalan (Catatan 36)	(54.234.839)
Penerimaan pinjaman yang telah dihapusbukukan	43.000
Selisih Kurs Penjabaran	36.693
Saldo akhir tahun	7.954.966

Pada tanggal 15 November 2021, Bank telah melakukan transaksi penyelesaian aset berkualitas rendah dengan aset produktif (*asset sale*). Transaksi *asset sale* telah dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021 salah satunya berupa penjualan pinjaman *qardh*. Dalam rangka penyehatan Bank, selanjutnya atas kumpulan tagihan portofolio yang telah diverifikasi dan memenuhi kriteria pemilihan untuk dijual dan dialihkan oleh Bank sebagai Kreditor Awal, telah dijual dan dialihkan ke PT AMC Indonesia Sukses selaku pembeli yang tertuang dalam Perjanjian Pengalihan Portofolio tertanggal 15 November 2021.

Nilai pokok pinjaman *qardh* yang dijual dan dialihkan tersebut adalah sebesar Rp354.979.768 yang terdiri dari 12 nasabah dengan harga sebesar nilai pokok pinjaman *qardh* pada tanggal *cut off final* (15 November 2021). Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan pinjaman *qardh* tersebut, risiko telah beralih dari Bank kepada pembeli termasuk segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul.

9. FUNDS OF *QARDH* (Continued)

g. Others significant information is as follows:

The table of total gross and net Non-Performing Financing (NPF) on funds of *qardh* is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	
NPF - bruto	81.756.049	NPF - gross
Persentase NPF - bruto	12,90%	Percentage of NPF - gross
NPF - netto	24.952.799	NPF - net
Persentase NPF - netto	3,94%	Percentage of NPF - net

Changes in allowance for impairment losses on funds of *qardh* are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	
Saldo awal tahun	31.729.654	Balance at the beginning of the year
Penyisihan tahun berjalan (Catatan 36)	30.300.008	Provision during the year (Note 36)
Penerimaan pinjaman yang telah dihapusbukukan	106.870	Recovery of written-off
Selisih Kurs Penjabaran	(26.420)	Exchange rate differences
Saldo akhir tahun	62.110.112	Balance at the end of the year

On November 15, 2021, the Bank entered into a settlement transaction for low quality assets with earning assets (*asset sale*). The *asset sale* transactions were carried out on November 15, 2021, and one of which was in the form of sale of funds of *qardh*. In the context of restructuring the Bank, the collection of portfolio claims that have been verified and meeting the eligibility criteria to be sold and transferred by the Bank as the Original Creditor were then sold and transferred to PT AMC Indonesia Sukses as the buyer as stated in the Portfolio Transfer Agreement dated November 15, 2021.

The principal amount of the funds of *qardh* sold and transferred is Rp354,979,768 consisting of 12 debtors at a price equal to the principal amount of funds of *qardh* on the final cut off date (November 15, 2021). Upon the sale and transfer of the funds of *qardh*, the risk is transferred from the Bank to the buyer, including any profits and losses that will arise.

9. PINJAMAN QARDH (Lanjutan)

g. Informasi penting lainnya: (lanjutan)

Pada tanggal 29 Juni 2018, Bank telah melakukan perjanjian pengalihan portofolio atas pinjaman *qardh* (lihat catatan 7). Selanjutnya atas pinjaman *qardh* yang telah memenuhi kriteria pemilihan dijual dan dialihkan oleh Bank, sebagai Kreditur Awal, ke Tameer Sukuk SPC Limited selaku pembeli yang tertuang dalam Perjanjian Pengalihan Portofolio tertanggal 29 Juni 2018.

Nilai pokok pinjaman *qardh* yang dijual dan dialihkan tersebut adalah sebesar Rp74.234.774 yang terdiri dari 719 nasabah dengan harga sebesar nilai pokok pinjaman *qardh* pada tanggal *cut off* final (29 Juni 2018). Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan pinjaman *qardh* tersebut, risiko telah beralih dari Bank kepada pembeli termasuk segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul.

Dalam laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 kepada Bank Indonesia, Bank tidak memiliki debitur, baik pihak terkait maupun pihak tidak terkait yang tidak memenuhi atau melampaui ketentuan BMPD.

Jumlah pinjaman *qardh* yang direstrukturisasi Bank sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing Nihil. Skema restrukturisasi umumnya dilakukan dengan perpanjangan masa pelunasan pinjaman dan penjadwalan kembali pembayaran yang tertunggak.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pinjaman *qardh* tersebut.

9. FUNDS OF QARDH (Continued)

g. Other significant information is as follows: (continued)

On June 29, 2018, the Bank entered into a portfolio transfer agreement on funds of *qardh* (see note 7). Subsequently, funds of *qardh* meeting the eligibility criteria are sold and transferred by the Bank, as the Original Creditor, to Tameer Sukuk SPC Limited as the buyer as stated in the Portfolio Transfer Agreement dated June 29, 2018.

The principal amount of the funds of *qardh* sold and transferred is Rp74,234,774 consisting of 719 debtors at a price equal to the principal amount of funds of *qardh* on the final cut off date (June 29, 2018). Upon the sale and transfer of the funds of *qardh*, the risk is transferred from the Bank to the buyer, including any profits and losses that will arise.

In its report on Legal Lending Limit (LLL) to Bank Indonesia as of December 31, 2024 and 2023, the Bank indicated that there is no debtor, either related party or third party, who did not comply with or who has exceeded the LLL.

Funds of *Qardh* that have been restructured by the Bank as of December 31, 2024 and 2023, amounted to Nil. Restructuring scheme generally involves extension of the funds maturity date and rescheduling of overdue payment.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover losses that might arise from uncollectible funds of *qardh*.

10. PEMBIAYAAN MUDHARABAH

a. Berdasarkan jenis kolektibilitas dan mata uang:

	31 Desember/ December 31, 2024
Rupiah	
Lancar	377.611.936
Dalam perhatian khusus	--
Kurang Lancar	--
Macet	2.331.788
Jumlah	379.943.724
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.940.955)
Bersih	376.002.769

10. MUDHARABAH FINANCING

a. By collectibility and currencies:

	31 Desember/ December 31, 2023	
		Rupiah
	591.521.381	Current
	--	Special mention
	153.994	Substandard
	2.177.794	Loss
	593.853.169	Total
	(8.117.780)	Allowance for impairment losses
	585.735.389	Net

10. PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Lanjutan)

10. MUDHARABAH FINANCING (Continued)

b. Berdasarkan sektor ekonomi:

b. By economic sector:

	31 Desember/ December 31, 2024
Pihak ketiga	
Jasa usaha	370.509.689
Sosial/masyarakat	6.600.351
Lainnya	2.833.684
Jumlah	379.943.724
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.940.955)
Bersih	376.002.769

	31 Desember/ December 31, 2023
	588.406.199
	1.251.706
	4.195.264
Jumlah	593.853.169
	(8.117.780)
585.735.389	

Third parties
Business services
Social/public
Others
Total
Allowance for impairment losses
Net

c. Berdasarkan jangka waktu:

c. By maturity:

	31 Desember/ December 31, 2024
Pihak ketiga	
Rupiah	
≤ 1 tahun	20.554.272
≥ 1 - ≤ 2 tahun	44.313.176
> 2 - ≤ 5 tahun	213.186.297
> 5 tahun	101.889.979
Jumlah	379.943.724
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.940.955)
Bersih	376.002.769

	31 Desember/ December 31, 2023
	84.522.250
	149.200.735
	216.181.731
	143.948.453
Jumlah	593.853.169
	(8.117.780)
585.735.389	

Third parties
Rupiah
≤ 1 year
≥ 1 - ≤ 2 years
> 2 - ≤ 5 years
> 5 years
Total
Allowance for impairment losses
Net

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

d. By remaining period to maturity:

	31 Desember/ December 31, 2024
Pihak ketiga	
≤ 1 tahun	71.892.201
≥ 1 - ≤ 2 tahun	109.518.548
> 2 - ≤ 5 tahun	114.943.076
> 5 tahun	83.589.899
Jumlah	379.943.724
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.940.955)
Bersih	376.002.769

	31 Desember/ December 31, 2023
	275.580.521
	23.799.155
	181.970.206
	112.503.287
Jumlah	593.853.169
	(8.117.780)
585.735.389	

Third parties
≤ 1 year
≥ 1 - ≤ 2 years
> 2 - ≤ 5 years
> 5 years
Total
Allowance for impairment losses
Net

e. Berdasarkan keterkaitan:

e. By relationship:

	31 Desember/ December 31, 2024
Pihak ketiga	379.943.724
Pihak berelasi (Catatan 41)	--
Jumlah	379.943.724
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.940.955)
Bersih	376.002.769

	31 Desember/ December 31, 2023
	593.853.169
	--
Jumlah	593.853.169
	(8.117.780)
585.735.389	

Third parties
Related parties (Note 41)
Total
Allowance for impairment losses
Net

10. PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Lanjutan)

- f. Rincian pembiayaan *mudharabah* bermasalah menurut sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024
Jasa usaha	2.331.788
Sosial/Masyarakat	--
Jumlah	2.331.788
Cadangan kerugian penurunan nilai	(160.946)
Bersih	2.170.842

- g. Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun:

	31 Desember/ December 31, 2024
Rupiah	11,19%

- h. Informasi penting lainnya:

Jumlah pembiayaan yang telah direstrukturisasi Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Nihil.

Pembiayaan sindikasi merupakan pembiayaan yang diberikan kepada debitur dibawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank bank lain. Tidak terdapat pembiayaan *mudharabah* sindikasi kepada debitur masing masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Pada tanggal 15 November 2021, Bank telah melakukan transaksi penyelesaian aset berkualitas rendah dengan aset produktif (*asset sale*). Transaksi *asset sale* telah dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021 salah satunya berupa penjualan pembiayaan *mudharabah*. Dalam rangka penyehatan Bank, selanjutnya atas kumpulan tagihan portofolio yang telah diverifikasi dan memenuhi kriteria pemilihan untuk dijual dan dialihkan oleh Bank sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan ke PT AMC Indonesia Sukses selaku pembeli yang tertuang dalam Perjanjian Pengalihan Portofolio tertanggal 15 November 2021.

10. MUDHARABAH FINANCING (Continued)

- f. Non-performing *mudharabah* financing by economic sector is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	
	2.177.795	Business services
	153.994	Social/public
Total	2.331.789	Total
	(2.200.894)	Allowance for impairment losses
Net	130.895	Net

- g. Average revenue sharing rates per annum:

	31 Desember/ December 31, 2023	
	9,95%	Rupiah

- h. Other significant information is as follows:

Financing that has been restructured by the Bank as of December 31, 2024 and 2023, is amounting to nil.

Syndicated financing represents financing provided to debtors under syndication agreements with other banks. There was no syndicated *mudharabah* financing to debtors as of December 31, 2024 and December 31, 2023.

On November 15, 2021, the Bank entered into a settlement transaction for low quality assets with earning assets (*asset sale*). The *asset sale* transactions were carried out on November 15, 2021, and one of which was in the form of sale of *mudharabah* financing. In the context of restructuring the Bank, the collection of portfolio claims that have been verified and meeting the eligibility criteria to be sold and transferred by the Bank as the Original Creditor were then sold and transferred to PT AMC Indonesia Sukses as the buyer as stated in the Portfolio Transfer Agreement dated November 15, 2021.

10. PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Lanjutan)

10. MUDHARABAH FINANCING (Continued)

h. Informasi penting lainnya: (lanjutan)

h. Other significant information is as follows: (continued)

Nilai pokok pembiayaan *mudharabah* yang dijual dan dialihkan tersebut adalah sebesar Rp10.392.436 yang terdiri dari 9 nasabah dengan harga sebesar nilai pokok pembiayaan *mudharabah* pada tanggal *cut off* final (15 November 2021). Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan pembiayaan *mudharabah* tersebut, risiko telah beralih dari Bank kepada pembeli termasuk segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul.

The principal amount of the *mudharabah* financing sold and transferred is Rp10,392,436, consisting of 9 debtors at a price equal to the principal amount of *mudharabah* financing on the final cut off date (November 15, 2021). Upon the sale and transfer of such *mudharabah* financing, the risk is transferred from the Bank to the buyer, including any profits and losses that will arise.

Pada tanggal 29 Juni 2018, Bank telah melakukan perjanjian pengalihan portofolio atas pembiayaan *mudharabah* dan pendapatan yang akan diterima bagi hasil *mudharabah* (lihat catatan 7). Selanjutnya atas pembiayaan *mudharabah* yang telah memenuhi kriteria pemilihan untuk dijual dan dialihkan oleh Bank, sebagai Kreditur Awal ke Tameer Sukuk SPC Limited selaku pembeli yang tertuang dalam Perjanjian Pengalihan Portofolio tertanggal 29 Juni 2018.

On June 29, 2018, the Bank entered into a portfolio transfer agreement on *mudharabah* financing and revenue to be received for *mudharabah* revenue sharing (see note 7). Subsequently, the *mudharabah* financing meeting the eligibility criteria is sold and transferred by the Bank, as the Original Creditor, to Tameer Sukuk SPC Limited as the buyer as stated in the Portfolio Transfer Agreement dated June 29, 2018.

Nilai pokok pembiayaan *mudharabah* yang dijual dan dialihkan tersebut adalah sebesar Rp184.556.210 yang terdiri dari 121 nasabah dengan harga sebesar nilai pokok pembiayaan *mudharabah* pada tanggal *cut off* final (29 Juni 2018). Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan pembiayaan *mudharabah* tersebut, risiko telah beralih dari Bank kepada pembeli termasuk segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul.

The principal amount of the *mudharabah* financing sold and transferred is Rp184,556,210, consisting of 121 debtors at a price equal to the principal amount of *mudharabah* financing on the final cut off date (June 29, 2018). Upon the sale and transfer of such *mudharabah* financing, the risk is transferred from the Bank to the buyer, including any profits and losses that will arise.

Dalam laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) per tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 kepada OJK/Bank Indonesia, Bank tidak memiliki debitur baik pihak terkait maupun pihak tidak terkait, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang tidak memenuhi atau melampaui ketentuan BMPD.

In its report on Legal Lending Limit (LLL) to the Financial Services Authority/ Bank Indonesia as of December 31, 2024 and 2023, the Bank indicated that there is no debtor, either related party or not related party, who did not comply with or who has exceeded the Legal Lending Limit (LLL).

Tabel *Non-Performing Financing* (NPF) bruto dan neto atas jumlah pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

The table of total gross and net *Non-Performing Financing* (NPF) on *mudharabah* financing is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
NPF - bruto	2.331.788	2.331.789	NPF - gross
Persentase NPF - bruto	0,61%	0,39%	Percentage of NPF - gross
NPF - neto	2.170.842	130.895	NPF - net
Persentase NPF - neto	0,57%	0,02%	Percentage of NPF - net

10. PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Lanjutan)

10. MUDHARABAH FINANCING (Continued)

h. Informasi penting lainnya: (lanjutan)

h. Other significant information is as follows: (continued)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

Changes in allowance for impairment losses on *mudharabah* financing are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024
Saldo awal tahun	8.117.780
Penyisihan (pembalikan) tahun berjalan (Catatan 36)	(4.540.768)
Penerimaan pinjaman yang telah dihapusbukukan	363.943
Saldo akhir tahun	3.940.955

	31 Desember/ December 31, 2023	
	7.015.074	Balance at the beginning of the year
	978.448	Provision (reversal) during the year (Note 36)
	124.258	Recovery of written-off loans
Saldo akhir tahun	8.117.780	Balance at the end of the year

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan tersebut.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that might arise from uncollectible financing.

11. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

11. MUSYARAKAH FINANCING

a. Berdasarkan jenis kolektibilitas dan mata uang:

a. By collectibility and currencies:

	31 Desember/ December 31, 2024
Rupiah	
Lancar	7.779.542.688
Dalam perhatian khusus	1.303.454.411
Kurang lancar	1.917.926
Diragukan	3.452.444
Macet	212.237.439
	<u>9.300.604.908</u>
Mata uang asing	
Lancar	2.051.664.976
Dalam perhatian khusus	175.042.895
	<u>2.226.707.871</u>
Jumlah	11.527.312.779
Cadangan kerugian penurunan nilai	(146.423.375)
Bersih	11.380.889.404

	31 Desember/ December 31, 2023
	10.882.106.604
	1.623.779.851
	3.832.943
	8.902.547
	104.937.638
	<u>12.623.559.583</u>
	2.697.696.700
	60.264.060
	<u>2.757.960.760</u>
Jumlah	15.381.520.343
	(225.318.307)
Bersih	15.156.202.036

Rupiah
Current
Special mention
Substandard
Doubtful
Loss
Foreign currencies
Current
Special mention
Total
Allowance for impairment losses
Net

11. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Lanjutan)

11. MUSYARAKAH FINANCING (Continued)

b. Berdasarkan sektor ekonomi:

b. By economic sector:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Pihak ketiga			Third parties
Pengangkutan	1.782.245.219	2.923.317.944	Transportation
Jasa usaha	921.169.201	2.349.804.493	Business services
Industri	1.850.925.406	1.861.686.132	Manufacturing
Perdagangan	837.500.362	1.513.086.979	Trading
Sosial/masyarakat	1.053.941.815	1.302.175.194	Social/public
Listrik, gas dan air	1.645.231.259	1.758.781.959	Electricity, gas and water
Pertambangan	1.177.254.157	1.311.160.545	Mining
Konstruksi	554.936.499	668.809.596	Construction
Pertanian	148.990.480	231.026.319	Agriculture
Lainnya	1.540.469.117	1.450.414.913	Others
	<u>11.512.663.515</u>	<u>15.370.264.074</u>	
Pihak berelasi (Catatan 41)			Related parties (Note 41)
Lainnya	14.649.264	11.256.269	Others
	<u>14.649.264</u>	<u>11.256.269</u>	
Jumlah	11.527.312.779	15.381.520.343	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(146.423.375)	(225.318.307)	Allowance for impairment losses
Bersih	11.380.889.404	15.156.202.036	Net

c. Berdasarkan jangka waktu:

c. By maturity:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Pihak ketiga Rupiah			Third parties Rupiah
≤ 1 tahun	1.895.985.608	2.965.051.534	≤ 1 year
≥ 1 - ≤ 2 tahun	526.972.274	497.914.904	≥ 1 - ≤ 2 years
> 2 - ≤ 5 tahun	3.105.364.701	4.435.392.546	> 2 - ≤ 5 years
> 5 tahun	5.984.340.932	7.471.905.090	> 5 years
	<u>11.512.663.515</u>	<u>15.370.264.074</u>	
Pihak berelasi (Catatan 41)			Related parties (Note 41)
≤ 1 tahun	10.000		≤ 1 year
≥ 1 - ≤ 2 tahun	102.958		≥ 1 - ≤ 2 years
≥ 2 - ≤ 5 tahun	1.981.579	3.070.634	≥ 2 - ≤ 5 years
> 5 tahun	12.554.727	8.185.635	> 5 years
	<u>14.649.264</u>	<u>11.256.269</u>	
Jumlah	11.527.312.779	15.381.520.343	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(146.423.375)	(225.318.307)	Allowance for impairment losses
Bersih	11.380.889.404	15.156.202.036	Net

11. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Lanjutan)

11. MUSYARAKAH FINANCING (Continued)

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

d. By remaining period to maturity:

	31 Desember/ December 31, 2024
Pihak ketiga	
≤ 1 tahun	3.143.516.382
≥ 1 - ≤ 2 tahun	1.906.481.640
> 2 - ≤ 5 tahun	2.737.039.005
> 5 tahun	3.725.626.488
	<u>11.512.663.515</u>
Pihak berelasi (Catatan 41)	
≤ 1 tahun	60.383
≥ 1 - ≤ 2 tahun	708.465
> 2 - ≤ 5 tahun	3.055.362
> 5 tahun	10.825.054
	<u>14.649.264</u>
Jumlah	11.527.312.779
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(146.423.375)</u>
Bersih	11.380.889.404

31 Desember/ December 31, 2023
3.951.247.252
1.281.917.694
6.349.698.716
3.787.400.412
<u>15.370.264.074</u>

Third parties
≤ 1 year
≥ 1 - ≤ 2 years
> 2 - ≤ 5 years
> 5 years

Related parties (Note 41)
≤ 1 year
≥ 1 - ≤ 2 years
> 2 - ≤ 5 years
> 5 years

Total
Allowance for impairment
losses
Net

e. Berdasarkan keterkaitan:

e. By relationship:

	31 Desember/ December 31, 2024
Pihak ketiga	11.512.663.515
Pihak berelasi (Catatan 41)	
Karyawan kunci	14.649.264
	<u>14.649.264</u>
Jumlah	11.527.312.779
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(146.423.375)</u>
Bersih	11.380.889.404

31 Desember/ December 31, 2023
15.370.264.074
11.256.269
<u>11.256.269</u>

Third parties
Related parties (Note 41)
Key employees

Total
Allowance for impairment
losses
Net

f. Rincian pembiayaan *musyarakah* bermasalah menurut sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

f. Non-performing *musyarakah* financing by economic sector is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024
Listrik, Gas, dan Air	73.539.088
Pertambangan	37.875.631
Industri	41.853.027
Sosial/masyarakat	6.355.484
Pengangkutan	--
Jasa usaha	18.025.698
Pertanian	--
Perdagangan	253.856
Konstruksi	59.032
Lainnya	39.645.993
Jumlah	217.607.809
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(15.622.279)</u>
Bersih	201.985.530

31 Desember/ December 31, 2023
--
--
41.853.027
4.906.118
--
18.850.022
9.031.259
4.926.634
6.725.891
31.081.648
<u>117.374.599</u>

Electricity, Gas and Water
Mining
Manufacturing
Social/public
Transportation
Business services
Agriculture
Trading
Construction
Others
Total
Allowance for impairment
losses
Net

11. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Lanjutan)

g. Tingkat margin rata-rata per tahun:

	31 Desember/ December 31, 2024
Rupiah	11,48%
Dolar Amerika Serikat	10,43%

h. Informasi penting lainnya:

Pembiayaan sindikasi merupakan piutang yang diberikan kepada debitur di bawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Jumlah pembiayaan sindikasi yang diberikan Bank adalah sebesar Rp3.991.057.910 dan Rp4.043.794.951 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Keikutsertaan Bank sebagai pimpinan sindikasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar 3,00% sampai dengan 68,34%, sedangkan sebagai anggota sindikasi berkisar 0,08% sampai dengan 83,33% pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Jumlah pembiayaan *musyarakah* yang telah direstrukturisasi Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp124.407 dan Rp111.801.489 Skema restrukturisasi umumnya dilakukan dengan perpanjangan masa pelunasan pembiayaan dan penjadwalan kembali pembayaran yang tertunggak.

Pada tanggal 15 November 2021, Bank telah melakukan transaksi penyelesaian aset berkualitas rendah dengan aset produktif (*asset sale*). Transaksi *asset sale* telah dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021 salah satunya berupa penjualan pembiayaan *musyarakah*. Dalam rangka penyehatan Bank, selanjutnya atas kumpulan tagihan portofolio yang telah diverifikasi dan memenuhi kriteria pemilihan untuk dijual dan dialihkan oleh Bank sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan ke PT AMC Indonesia Sukses selaku pembeli yang tertuang dalam Perjanjian Pengalihan Portofolio tertanggal 15 November 2021.

Nilai pokok pembiayaan *musyarakah* yang dijual dan dialihkan tersebut adalah sebesar Rp5.749.730.766 yang terdiri dari 1.936 nasabah dengan harga sebesar nilai pokok pembiayaan *musyarakah* pada tanggal *cut off* final (15 November 2021). Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan pembiayaan *musyarakah* tersebut, risiko telah beralih dari Bank kepada pembeli termasuk segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul.

11. MUSYARAKAH FINANCING (Continued)

g. Average profit margin rates per annum:

	31 Desember/ December 31, 2023	
	11,75%	Rupiah
	7,67%	United States Dollar

h. Other significant information is as follows:

Syndicated financing represents financing provided to debtors under syndication agreements with other banks. As of December 31, 2024 and 2023, total syndicated financing amounted to Rp3,991,057,910 and Rp4,043,794,951, respectively. The Bank's participation as leader in the syndicated financing as of December 31, 2024 and 2023 is ranging from 3.00% to 68.34%. The Bank's participation as member in the syndicated financing is ranging from 0.08% to 83.33% as of December 31, 2024 and 2023.

Musyarakah Financing that has been restructured by the Bank as of December 31, 2024 and 2023 is amounting to Rp124,407 and Rp111,801,489, respectively. Restructuring scheme generally involves extension of the financing maturity date and rescheduling of overdue payment.

On November 15, 2021, the Bank entered into a settlement transaction for low quality assets with earning assets (asset sale). The asset sale transactions were carried out on November 15, 2021, and one of which was in the form of sale of musyarakah financing. In the context of restructuring the Bank, the collection of portfolio claims that have been verified and meeting the eligibility criteria to be sold and transferred by the Bank as the Original Creditor were then sold and transferred to PT AMC Indonesia Sukses as the buyer as stated in the Portfolio Transfer Agreement dated November 15, 2021.

The principal amount of the musyarakah financing sold and transferred is Rp5,749,730,766, consisting of 1,936 debtors at a principal amount of musyarakah financing at the final cut off date (November 15, 2021). Upon the sale and transfer of such musyarakah financing, the risk is transferred from the Bank to the buyer, including any profits and losses that will arise.

11. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Lanjutan)

11. MUSYARAKAH FINANCING (Continued)

h. Informasi penting lainnya: (lanjutan)

h. Other significant information is as follows: (continued)

Pada tanggal 29 Juni 2018, Bank telah melakukan perjanjian pengalihan portofolio atas pembiayaan *musyarakah* dan pendapatan yang akan diterima bagi hasil *musyarakah* (lihat catatan 7). Selanjutnya atas pembiayaan *musyarakah* yang telah memenuhi kriteria pemilihan untuk dijual dan dialihkan oleh Bank, sebagai Kreditur Awal ke Tameer Sukuk SPC Limited selaku pembeli yang tertuang dalam Perjanjian Pengalihan Portofolio tertanggal 29 Juni 2018.

On June 29, 2018, the Bank entered into a portfolio transfer agreement on *musyarakah* financing and revenue to be received for *musyarakah* revenue sharing (see note 7). Subsequently, *musyarakah* financing meeting the eligibility criteria is sold and transferred by the Bank, as the Original Creditor, to Tameer Sukuk SPC Limited as the buyer as stated in the Portfolio Transfer Agreement dated June 29, 2018.

Nilai pokok pembiayaan *musyarakah* yang dijual dan dialihkan tersebut adalah sebesar Rp2.242.643.282 yang terdiri dari 1.877 nasabah dengan harga sebesar nilai pokok pembiayaan *musyarakah* pada tanggal *cut off* final (29 Juni 2018). Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan pembiayaan *musyarakah* tersebut, risiko telah beralih dari Bank kepada pembeli termasuk segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul.

The principal amount of the *musyarakah* financing sold and transferred is Rp2,242,643,282, consisting of 1,877 debtors at the principal amount of *musyarakah* financing at the final cut off date (June 29, 2018). Upon the sale and transfer of such *musyarakah* financing, the risk is transferred from the Bank to the buyer, including any profits and losses that will arise.

Dalam laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 kepada Bank Indonesia, Bank tidak memiliki debitur baik pihak terkait maupun pihak tidak terkait, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang tidak memenuhi atau melampaui ketentuan BMPD.

In its report on Legal Lending Limit (LLL) to Bank Indonesia as of December 31, 2024 and 2023, the Bank indicated that there is no debtor, either related party or not related party, who did not comply with or who has exceeded the Legal Lending Limit (LLL).

Tabel *Non-Performing Financing* (NPF) bruto dan neto atas jumlah pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

The table of total gross and net *Non-Performing Financing* (NPF) on *musyarakah* financing is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024
NPF - bruto	217.607.809
Persentase NPF - bruto	1,89%
NPF - neto	201.985.530
Persentase NPF - neto	1,75%

	31 Desember/ December 31, 2023	
	117.374.599	NPF - gross
	0,76%	Percentage of NPF - gross
	37.832.295	NPF - net
	0,25%	Percentage of NPF - net

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

Changes in allowance for impairment losses on *musyarakah* financing are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024
Saldo awal tahun	225.318.307
Penyisihan (pembalikan) tahun berjalan (Catatan 36)	(86.216.235)
Penerimaan pinjaman yang telah dihapusbukukan	5.962.403
Selisih kurs penjabaran	1.358.900
Saldo akhir tahun	146.423.375

	31 Desember/ December 31, 2023	
	278.732.187	Balance at the beginning of the year
	(57.538.155)	Provision (reversal) during the year (Note 36)
	4.537.535	Recovery of written-off loans
	(413.260)	Exchange rate differences
Balance at the end of the year	225.318.307	

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan tersebut.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that might arise from uncollectible financing.

12. PENYERTAAN SAHAM

	Tempat kedudukan/ <i>Domicile</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Pihak berelasi (Catatan 41)					Related parties (Note 41)
Penyertaan Modal Sementara					<i>Temporary Equity Participation</i>
PT Al Ijarah Indonesia Finance	Jakarta	47,86%	401.616.000	401.616.000	PT Al Ijarah Indonesia Finance
Tersedia untuk dijual					Available for sale
PT Syarikat Takaful Indonesia	Jakarta	5,91%	6.095.237	6.095.237	PT Syarikat Takaful Indonesia
Jumlah			407.711.237	407.711.237	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai			(85.242.400)	(85.242.400)	Allowance for impairment losses
Bersih			322.468.837	322.468.837	Net

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai Penyertaan Saham adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment losses of Investments In Shares are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Saldo awal tahun	85.242.400	60.242.400	Balance at the beginning of the year
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 36)	--	25.000.000	Provision during the year (Note 36)
Saldo akhir tahun	85.242.400	85.242.400	Balance at the end of the year

Berdasarkan Akta Perjanjian Penyertaan Modal Sementara No.47 tanggal 30 Desember 2019 dihadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., PT Al Ijarah Indonesia Finance telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang menghasilkan keputusan bahwa berlaku efektif pengalihan saham oleh para kreditur yang akan dijadikan sebagai Penyertaan Modal Sementara. Penyertaan saham sementara pada PT Al Ijarah Indonesia Finance sejak 31 Desember 2019 dengan total persentase kepemilikan saham Perseroan pada PT Al Ijarah Indonesia Finance setelah dilakukan penyertaan sementara sebesar 47,86%. Penyertaan modal sementara dilakukan untuk memperbaiki kinerja keuangan dari PT Al Ijarah Indonesia Finance.

Based on the Deed of Temporary Equity Participation Agreement No.47 dated December 30, 2019 of Notary Aulia Taufani, S.H., PT Al Ijarah Indonesia Finance has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) which resulted in a decision that an effective transfer of shares by creditors would be used as Temporary Equity Participation. Temporary equity participation in PT Al Ijarah Indonesia Finance since December 31, 2019 with a total percentage of the Company's share ownership in PT Al Ijarah Indonesia Finance after a temporary participation is 47.86%. Temporary equity participation is carried out to improve the financial performance of PT Al Ijarah Indonesia Finance.

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir No. 49 tanggal 30 Desember 2019 dihadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., bahwa penyertaan Bank atas saham seri A yang semula senilai Rp35.000.000 dengan persentase kepemilikan sebesar 33,33% menjadi sebesar 3,88%. Penurunan nilai kepemilikan dikarenakan Perseroan harus memperkuat struktur permodalan yang ditetapkan regulator dengan demikian diperlukan penambahan modal yang berdampak kepemilikan Bank di ALIF terdilusi. Setelah perubahan tersebut, Bank mencatat kepemilikan dengan metode *cost/* Biaya dan telah mencadangkan keseluruhan dikarenakan terdapat penurunan nilai secara permanen atas investasi penyertaan tersebut.

Based on the latest Amendment to the Articles of Association No. 49 dated December 30, 2019 of Notary Aulia Taufani, S.H., the Bank's investment in Series A shares which was originally valued at Rp35,000,000 with an ownership percentage of 33.33% becomes 3.88%. The decrease in the value of ownership is due to the Company having to strengthen the capital structure set by the regulator, thus it is necessary to increase capital which resulted in diluted ownership of the Bank in Al Ijarah. After the change, the Bank records its ownership using the cost method and has provided a full allowance due to a permanent decline in the value of the investment.

12. PENYERTAAN SAHAM (Lanjutan)

Pada tanggal 24 Oktober 2023 PT Al Ijarah Indonesia Finance telah menghentikan kegiatan usaha berdasarkan salinan keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-20/D.06/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah PT Al Ijarah Indonesia Finance dimana ALIF wajib menghentikan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan Syariah dan dilarang menggunakan kata *finance*.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang mungkin timbul.

12. INVESTMENTS IN SHARES (Continued)

As of October 24, 2023 PT Al Ijarah Indonesia Finance has stopped business activities based on a copy of the decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number: KEP-20/D.06/2023 concerning Revocation of the Business License of the Sharia Financing Company PT Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF) where ALIF is obliged to stop business activities as Sharia financing companies and are prohibited from using the word *finance*.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that might arise.

13. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI

13. ACCEPTANCE RECEIVABLE AND PAYABLE

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

a. By type and currency

31 Desember / December 31, 2024		
Jumlah nosional mata uang asing/ <i>Notional amount in foreign currencies</i> (Dalam nilai penuh/ <i>In full amount</i>)		Setara dengan/ <i>Equivalent to</i> Rupiah
Pihak ketiga		Third parties
Rupiah		Rupiah
Impor L/C dan Surat Kredit		Import L/C and Domestic
Berdokumen Dalam Negeri		Letters of Credit
(SKBDN)		Spot and Forward
Spot dan Forward		
	54.880.767	
	453.037	
	<u>55.333.804</u>	
Mata uang asing		Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat		US Dollar
Impor L/C dan Surat Kredit		Import L/C and Domestic
Berdokumen Dalam Negeri		Letters of Credit
(SKBDN)		United States Dollar
Dollar Amerika Serikat	6.755.105	Euro
Euro	--	
	<u>108.723.419</u>	
Jumlah	164.057.223	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(74.485.805)	Allowance for impairment losses
Bersih	89.571.418	Net

**13. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI
(Lanjutan)**

**13. ACCEPTANCE RECEIVABLE AND PAYABLE
(Continued)**

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

a. By type and currency (continue)

	31 Desember / December 31, 2023		
	Jumlah nosional mata uang asing / Notional amount in foreign currencies (Dalam nilai penuh / In full amount)	Setara dengan / Equivalent to Rupiah	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
Impor L/C dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		42.696.067	Import L/C and Domestic Letters of Credit
Spot dan Forward		3.337.115	Spot and Forward
		<u>46.033.182</u>	
Mata uang asing			Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat			US Dollar
Impor L/C dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)			Import L/C and Domestic Letters of Credit
Dolar Amerika Serikat	6.585.073	101.390.369	United States Dollar
Euro	363.407	6.191.849	Euro
		<u>107.582.218</u>	
Jumlah		153.615.400	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai		(71.869.517)	Allowance for impairment losses
Bersih		81.745.883	Net

b. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

b. By remaining period to maturity:

	31 Desember / December 31, 2024	31 Desember / December 31, 2023	
Pihak ketiga			Third parties
≤ 1 bulan	105.910.943	111.491.635	≤ 1 month
> 1 - ≤ 3 bulan	3.531.705	40.737.891	> 1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 6 bulan	54.407.113	1.169.185	> 3 - ≤ 6 months
> 12 bulan	207.462	216.689	> 12 months
Jumlah	164.057.223	153.615.400	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(74.485.805)	(71.869.517)	Allowance for impairment losses
Bersih	89.571.418	81.745.883	Net

c. Berdasarkan kolektibilitas:

c. By collectibility:

	31 Desember / December 31, 2024	31 Desember / December 31, 2023	
Lancar	58.391.854	49.195.359	Current
Macet	105.665.369	104.420.041	Loss
Jumlah	164.057.223	153.615.400	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(74.485.805)	(71.869.517)	Allowance for impairment losses
Bersih	89.571.418	81.745.883	Net

13. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI
(Lanjutan)

d. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024
Saldo awal tahun	71.869.517
Penyisihan (pembalikan) tahun berjalan (Catatan 36)	(454.636)
Selisih Kurs	3.070.924
Saldo akhir tahun	74.485.805

e. Jumlah liabilitas akseptasi adalah sebesar jumlah akseptasi kepada nasabah (sebelum dikurangi cadangan kerugian).

13. ACCEPTANCE RECEIVABLE AND PAYABLE
(Continued)

d. Changes in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	
	73.060.862	Balance at the beginning of the year
	(441.212)	Provision (reversal) during the year (Note 36)
	(750.133)	Exchange rate differences
Saldo akhir tahun	71.869.517	Balance at the end of the year

e. Acceptance payables represents the same amount as acceptance receivables from customers (before allowance for impairment losses).

	31 Desember / December 31, 2024	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Setara dengan/ Equivalent to Rupiah
Pihak ketiga		
Rupiah		
Impor L/C dan Surat Kredit		
Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		27.450.182
Spot dan Forward		738.574
		<u>28.188.756</u>
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat		
Impor L/C dan Surat Kredit		
Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		
Dolar Amerika Serikat	190.000	3.058.050
Euro	--	--
		<u>3.058.050</u>
Jumlah		31.246.806

Third parties
Rupiah
Import L/C and Domestic
Letters of Credit
Spot and Forward

Foreign currencies
US Dollar
Import L/C and Domestic
Letters of Credit
United States Dollar
Euro

Total

	31 Desember/ December 31, 2023	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Setara dengan/ Equivalent to Rupiah
Pihak ketiga		
Rupiah		
Impor L/C dan Surat Kredit		
Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		1.130.408
Spot dan Forward		554.773
		<u>1.685.181</u>
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat		
Impor L/C dan Surat Kredit		
Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		
Dolar Amerika Serikat	19.968	307.443
Euro	363.407	6.191.849
		<u>6.499.292</u>
Jumlah		8.184.473

Third parties
Rupiah
Import L/C and Domestic
Letters of Credit
Spot and Forward

Foreign currencies
US Dollar
Import L/C and Domestic
Letters of Credit
United States Dollar
Euro

Total

13. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (Lanjutan)

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai tagihan akseptasi secara individual dengan adanya bukti objektif penurunan nilai.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tagihan akseptasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah memadai.

13. ACCEPTANCE RECEIVABLE AND PAYABLE (Continued)

The Bank assessed acceptance receivable individually for impairment based on whether an objective evidence of impairment exists.

Management believes that allowance for impairment losses of acceptance receivables as of December 31, 2024 and 2023 is adequate.

14. ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH

Akun ini merupakan objek sewa dari transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik* dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa dengan hibah.

14. ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH

This account represents lease objects of an *ijarah muntahiyah bittamlik* transaction which includes an option to transfer the title of ownership over the assets through a grant.

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Multijasa	9.199.669	4.401.099	Multiservices
Jumlah	9.199.669	4.401.099	Total
Akumulasi penyusutan	(3.000.875)	(2.496.015)	Accumulated depreciation
Bersih	6.198.794	1.905.084	Net

Penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebesar Rp1.564.993 dan Rp789.247 untuk posisi 31 Desember 2024 dan 2023.

Depreciation charged to the statements of profit or loss and other comprehensive income is amounting to Rp1,564,993 and Rp789,247 as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.2/POJK.03/2022 tanggal 31 Januari 2022, kewajiban membentuk cadangan umum penyisihan aset produktif tidak berlaku bagi aset produktif dalam bentuk pembiayaan *ijarah* atau pembiayaan *ijarah muntahiyah bittamlik* dan pembentukan cadangan khusus *ijarah*.

Based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.2/POJK.03/2022 dated January 31, 2022, the obligation to provide allowance for impairment losses on earning assets do not apply to earning assets under *ijarah* or *ijarah muntahiyah bittamlik* financing and the provision of *ijarah* special allowance.

Perubahan akumulasi penyusutan aset yang diperoleh untuk *ijarah* adalah sebagai berikut:

The changes in accumulated depreciation of assets acquired for *ijarah* are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Saldo awal tahun	2.496.015	2.306.482	Balance at the beginning of the year
Penyusutan tahun berjalan	1.564.993	789.247	Depreciation during the year
Pelunasan	(1.060.133)	(599.714)	Repayment
Saldo akhir tahun	3.000.875	2.496.015	Balance at the end of the year

15. ASET TETAP

Aset tetap terdiri dari:

15. PREMISES AND EQUIPMENT

Premises and equipment consist of:

31 Desember 2024 / December 31, 2024							
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Surplus revaluasi/ <i>Revaluation Surplus</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Nilai Wajar:							<i>Fair Value :</i>
Pemilikan langsung							<i>Direct acquisitions</i>
Tanah	2.010.345.834	--	--	--	625.396.903	2.635.742.737	<i>Land rights</i>
Bangunan	767.567.398	16.505.541	--	(2.382.737)	--	781.690.202	<i>Buildings</i>
Kendaraan bermotor	19.967.201	1.073.380	--	(14.491.280)	--	6.549.301	<i>Vehicles</i>
Inventaris kantor	420.034.399	7.603.251	--	(5.561.527)	--	422.076.123	<i>Office equipments</i>
Komputer	749.762.128	3.939.244	--	(2.768.333)	--	750.933.039	<i>Computers</i>
Perbaikan sarana dan prasarana	168.961.108	400.900	--	(11.606.097)	--	157.755.911	<i>Leasehold improvement</i>
	4.136.638.068	29.522.316	--	(36.809.974)	625.396.903	4.754.747.313	
Aset sewa pembiayaan kendaraan bermotor	310.221	--	--	(310.221)	--	--	<i>Vehicles under finance lease</i>
	4.136.948.289	29.522.316	--	(37.120.195)	625.396.903	4.754.747.313	
Akumulasi Penyusutan							<i>Accumulated Depreciation</i>
Bangunan	85.910.095	38.917.725	--	(2.376.862)	--	122.450.958	<i>Buildings</i>
Kendaraan bermotor	4.743.344	3.143.458	--	(4.730.238)	--	3.156.564	<i>Vehicles</i>
Inventaris kantor	403.721.877	6.537.492	--	(5.546.003)	--	404.713.366	<i>Office equipments</i>
Komputer	694.501.827	19.864.115	--	(2.559.720)	--	711.806.222	<i>Computers</i>
Perbaikan sarana dan prasarana	156.316.262	1.349.067	--	(11.595.536)	--	146.069.793	<i>Leasehold improvement</i>
	1.345.193.405	69.811.857	--	(26.808.359)	--	1.388.196.903	
Aset sewa pembiayaan kendaraan bermotor	257.722	7.500	--	(265.222)	--	--	<i>Vehicles under finance lease</i>
	1.345.451.127	69.819.357	--	(27.073.581)	--	1.388.196.903	
Nilai buku	2.791.497.162					3.366.550.410	Book value
31 Desember 2023 / December 31, 2023							
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Surplus revaluasi/ <i>Revaluation Surplus</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Nilai Wajar:							<i>Fair Value :</i>
Pemilikan langsung							<i>Direct acquisitions</i>
Tanah	1.895.621.154	--	--	(17.955.830)	132.680.510	2.010.345.834	<i>Land rights</i>
Bangunan	1.104.297.490	947.337	--	(337.677.429)	--	767.567.398	<i>Buildings</i>
Kendaraan bermotor	52.906.160	5.173.000	--	(38.111.959)	--	19.967.201	<i>Vehicles</i>
Inventaris kantor	431.447.252	2.665.950	--	(14.078.803)	--	420.034.399	<i>Office equipments</i>
Komputer	753.385.108	30.269.043	--	(33.892.023)	--	749.762.128	<i>Computers</i>
Perbaikan sarana dan prasarana	187.948.093	17.521.813	--	(36.508.798)	--	168.961.108	<i>Leasehold improvement</i>
	4.425.605.257	56.577.143	--	(478.224.842)	132.680.510	4.136.638.068	
Aset sewa pembiayaan kendaraan bermotor	19.297.566	1.605.000	--	(20.592.345)	--	310.221	<i>Vehicles under finance lease</i>
	4.444.902.823	58.182.143	--	(498.817.187)	132.680.510	4.136.948.289	
Akumulasi Penyusutan							<i>Accumulated Depreciation</i>
Bangunan	399.579.222	37.381.297	--	(351.050.424)	--	85.910.095	<i>Buildings</i>
Kendaraan bermotor	32.930.663	3.659.192	--	(31.846.511)	--	4.743.344	<i>Vehicles</i>
Inventaris kantor	409.337.245	5.568.160	--	(11.183.528)	--	403.721.877	<i>Office equipments</i>
Komputer	700.217.466	26.251.757	--	(31.967.396)	--	694.501.827	<i>Computers</i>
Perbaikan sarana dan prasarana	174.408.937	1.289.309	--	(19.381.984)	--	156.316.262	<i>Leasehold improvement</i>
	1.716.473.533	74.149.715	--	(445.429.843)	--	1.345.193.405	
Aset sewa pembiayaan kendaraan bermotor	19.297.567	212.833	--	(19.252.678)	--	257.722	<i>Vehicles under finance lease</i>
	1.735.771.100	74.362.548	--	(464.682.521)	--	1.345.451.127	
Nilai buku	2.709.131.723					2.791.497.162	Book value

15. ASET TETAP (Lanjutan)

Aset tetap terdiri dari:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 penjualan aset tetap Bank adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Harga jual	776.947	3.611.540
Jumlah tercatat - neto	(360.582)	(1.837.918)
Laba penjualan aset tetap (Catatan 38)	416.365	1.773.622

Pada tahun 2022, Bank melakukan revaluasi aset tetap dengan bertujuan akuntansi. Atas hasil revaluasi aset tersebut, Bank mengalami penurunan nilai atas penilaian aset tetap secara bersih senilai Rp17.766.174.

Penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah masing-masing sebesar Rp69.819.357 dan Rp74.362.548 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Catatan 35).

Pada tanggal 31 Desember 2024, aset tetap kecuali tanah telah diasuransikan kepada Asuransi Zurich dan Asuransi Takaful Umum terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp841.440.133. Pada tanggal 31 Desember 2023, aset tetap kecuali tanah telah diasuransikan kepada Asuransi Zurich dan Asuransi Takaful Umum terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp863.464.880.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Tidak terdapat aset tetap milik Bank yang dijadikan sebagai jaminan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Pada 31 Desember 2024 dan 2023 tidak ada komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap dan aset tetap yang mengalami penurunan nilai. Selain itu, tidak terdapat aset tetap dalam pembangunan serta tidak terdapat dalam aset yang tidak dipakai untuk sementara.

15. PREMISES AND EQUIPMENT (Continued)

Premises and equipment consist of:

As of December 31, 2024 and 2023, the sales of premises and equipment are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
	776.947	3.611.540	Selling price
	(360.582)	(1.837.918)	Net carrying value
Gain on sales of premises and equipment (Note 38)	416.365	1.773.622	

In 2022, the Bank revaluated its premises and equipment for accounting purposes. Based on the results of the revaluation, the Bank experienced an impairment of premises and equipment on a net basis of Rp17,766,174.

Depreciation charged to the statements of profit or loss and other comprehensive income is amounting to Rp69,819,357 and Rp74,362,548 for the years ended December 31, 2024 and 2023, respectively (Note 35).

As of December 31, 2024, premises and equipment, except land, were insured with Zurich Insurance, and Takaful General Insurance against losses from fire and other risks with coverage of Rp841.440.133. As of December 31, 2023, premises and equipment, except land, were insured with Zurich Insurance, and Takaful General Insurance against losses from fire and other risks with coverage of Rp863,464,880.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses of the premises and equipment insured.

There are no premises and equipment owned by the Bank that are pledged as collateral as of December 31, 2024 and 2023.

As of December 31, 2024 and 2023, there is no contractual commitment in acquisition of premises and equipment and impaired premises and equipment. Furthermore, no assets are under construction and no assets are temporarily unused or idle.

16. ASET LAIN-LAIN - NETO

Aset lain-lain terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2024
Pendapatan yang masih akan diterima	3.061.867.740
Tagihan <i>Trade</i> - Salam	--
Aset terbengkalai - bersih	243.442.840
Biaya dibayar dimuka	331.801.264
Uang muka operasi	202.793.489
Aset <i>ijarah</i> gedung - bersih	130.470.819
Tagihan kepada pihak ketiga - bersih	38.917.397
Tagihan ATM	21.184.526
Uang muka pajak	48.736.695
Agunan yang diambil alih - bersih	49.128.620
Kelebihan pembayaran pajak (Catatan 23.c)	14.084.695
Persediaan alat tulis kantor	12.283.160
Aset hak guna - bersih	6.755.502
Tagihan <i>Usance Payable At Usance (UPAU)</i>	140.000
Setoran jaminan	4.291.671
Investasi pada DPLK Muamalat	9.906.092
Lainnya	33.016.363
Jumlah	4.208.820.873

Uang muka operasi merupakan uang muka yang digunakan untuk renovasi gedung, operasional Bank, dan program aplikasi yang belum terselesaikan sampai 31 Desember 2024 dan 2023.

Piutang *Salam* merupakan tagihan Bank kepada pemasok yang harus diselesaikan dalam bentuk penyerahan barang, bukan penerimaan dalam bentuk uang tunai. Piutang *Salam* timbul dari penyerahan uang kepada pemasok senilai barang yang dipesan.

Tagihan ATM merupakan tagihan kepada bank lain sehubungan dengan transaksi antar bank anggota ATM Bersama berupa transfer dan penarikan tunai.

Tagihan *Usance Payable at Usance (UPAU)* merupakan tagihan kepada debitur atas transaksi dengan pihak ketiga, dimana Bank membayarkan terlebih dahulu L/C kepada pihak ketiga setelah tanggal *invoice date* dan saat jatuh tempo debitur baru melunasinya kepada Bank. Atas transaksi ini Bank memperoleh *fee*.

Lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp33.016.363 dimana sebesar Rp25.993.940 merupakan penempatan dana pada PT Rintis Sejahtera guna menunjang kegiatan operasional Bank.

Manajemen Bank telah melakukan reklasifikasi aset dengan melakukan verifikasi dari masing-masing AYDA berdasarkan manfaat ekonomi masa depan suatu aset tersebut berdasarkan penggunaannya.

16. OTHER ASSETS – NET

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2023	
	2.079.809.978	<i>Accrued income</i>
	588.940.878	<i>Trade Receivable - Salam</i>
	375.496.400	<i>Abandoned assets - net</i>
	333.601.027	<i>Prepaid expenses</i>
	214.853.878	<i>Advances</i>
	--	<i>Building Ijarah Asset - net</i>
	128.531.399	<i>Receivables from third parties - net</i>
	56.287.880	<i>ATM receivables</i>
	71.512.147	<i>Prepaid Tax</i>
	49.128.620	<i>Foreclosed assets - net</i>
	14.084.695	<i>Estimated claims for tax refund (Note 23.c)</i>
	11.945.325	<i>Office supplies</i>
	10.604.943	<i>Right of use assets - net</i>
	6.154.390	<i>Usance Payable At Usance (UPAU) receivable</i>
	4.204.119	<i>Security deposits</i>
	2.940.458	<i>Investment in DPLK Muamalat</i>
	5.864.411	<i>Others</i>
Jumlah	3.953.960.548	Total

Advance of operational funds represents term of payment for building renovation, operational activity of the Bank, and application program in progress as of December 31, 2024 and 2023.

Salam Receivables are the Bank's claims to suppliers which must be settled in the form of delivery of goods, not receipts in the form of cash. Salam receivables arise from the transfer of money to the supplier for the value of the goods ordered.

ATM receivables represent receivables from other banks related to inter-bank transactions using ATM Bersama, such as transfer and withdrawal.

Usance Payable at Usance (UPAU) receivable represents a transaction with third parties where Bank pays in advance the amount of L/C to the third parties after the invoice date, and the applicant will make the payment settlement at the end of the usance term. Bank will receive fees from this transaction.

Others for the period ending December 31, 2024 amounting to Rp33,016,363, of which Rp25,993,940 is a placement of funds in PT Rintis Sejahtera to support the Bank's operational activities.

The Bank's management has made reclassification of assets by verifying each of the foreclosed assets based on the future economic benefits of an assets based on its use.

16. ASET LAIN-LAIN - NETO (Lanjutan)

16. OTHER ASSETS – NET (Continued)

Mutasi agunan yang diambil alih adalah sebagai berikut:

The changes in foreclosed assets are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Saldo awal tahun	49.128.620	54.285.502	Balance at the beginning of the year
Penambahan tahun berjalan	--	--	Depreciation during the year
Penyelesaian:			Settlement:
Recovery	--	--	Recovery
Reklasifikasi:			Reclassification:
Aset Tetap	--	--	Premises and Equipment
Saldo akhir tahun	49.128.620	54.285.502	Balance at the end of the year
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	(5.156.882)	Allowance for impairment losses
Bersih	49.128.620	49.128.620	Net

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai aset terbengkalai adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment losses of abandoned assets are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Saldo awal tahun	66.264.070	86.166.147	Balance at the beginning of the year
Pembentukan (Pembalikan) selama tahun berjalan (Catatan 36)	--	(19.902.077)	Provision (Reversal) during the year (Note 36)
Saldo akhir tahun	66.264.070	66.264.070	Balance at the end of the year

Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah cadangan yang tersedia cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian penurunan atas nilai agunan yang diambil alih.

The Bank's management believes that the allowance provided for impairment in value of the foreclosed assets is adequate.

Aset hak guna per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Right of use assets as of December 31, 2024 and 2023, are as follows:

31 Desember 2024/ December 31, 2024				
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga Perolehan				At cost
Komputer	23.018.729	731.602	23.750.331	Computers
	23.018.729	731.602	23.750.331	
Akumulasi Penyusutan				Accumulated depreciation
Komputer	12.413.786	4.581.043	16.994.829	Computers
	12.413.786	4.581.043	16.994.829	
Nilai buku	10.604.943		6.755.502	Book Value
31 Desember 2023/ December 31, 2023				
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga Perolehan				At cost
Komputer	11.925.877	11.524.044	23.018.729	Computers
	11.925.877	11.524.044	23.018.729	
Akumulasi Penyusutan				Accumulated depreciation
Komputer	7.831.610	4.582.176	12.413.786	Computers
	7.831.610	4.582.176	12.413.786	
Nilai buku	4.094.267		10.604.943	Book Value

17. LIABILITAS SEGERA

Liabilitas segera kepada pihak ketiga terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2024
Titipan ATM Bersama	42.171.116
Titipan kewajiban BI-Fast	2.609.254
Titipan dana nasabah	235.437.820
Titipan <i>remittance</i>	12.956.386
Titipan setoran elektronik <i>banking</i>	3.180.287
Titipan premi asuransi tabungan	135.707
Titipan ZIS	29.692
Titipan lainnya	1.981.400
Jumlah	298.501.662

Titipan dana nasabah merupakan titipan atas transaksi pengiriman uang melalui lembaga keuangan bank lain.

Titipan ATM Bersama merupakan liabilitas yang timbul karena nasabah Bank melakukan transaksi ATM dengan menggunakan jaringan ATM Prima dan jaringan ATM Bersama.

Sebagian besar saldo pada titipan lainnya merupakan titipan dana pelaksanaan Penambahan Modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dari pemegang saham yang akan melaksanakan HMETD-nya.

17. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY

Liabilities due immediately to third parties consist of:

	31 Desember/ December 31, 2023	
91.042.010		<i>ATM Bersama funds</i>
35.241.388		<i>BI-Fast liability funds</i>
21.396.771		<i>Customers funds</i>
9.273.729		<i>Remittance funds</i>
5.696.043		<i>Electronic banking deposit funds</i>
314.738		<i>Insurance saving premium funds</i>
28.938		<i>ZIS funds</i>
1.388.596		<i>Other funds</i>
164.382.213		Total

Customer funds represent funds generated through remittances from other financial institutions.

The ATM Bersama funds represent liabilities arising from the Bank's customers using ATM Prima and ATM Bersama network.

The balance in other deposits mostly consist of funds deposited for the implementation of Capital Increase through Pre-emptive Rights from shareholders who will exercise their Pre-emptive Rights.

18. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN

Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada *shahibul maal* atas keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana nasabah.

	31 Desember/ December 31, 2024
Deposito <i>mudharabah</i> berjangka	19.555.646
Pinjaman yang diterima	21.091.699
Tabungan <i>mudharabah</i>	676.762
Lain-lain	9.130.808
Jumlah	50.454.915

18. UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING

This account represents undistributed share of customers (shahibul maal) on income generated by the Bank from managing customers funds.

	31 Desember/ December 31, 2023	
54.022.357		<i>Mudharabah time deposits</i>
15.095.460		<i>Fund borrowings</i>
685.308		<i>Mudharabah saving deposits</i>
12.771.385		<i>Others</i>
82.574.510		Total

19. SIMPANAN

	31 Desember/ December 31, 2024
Giro wadiah Pihak ketiga Rupiah	2.075.677.543
Mata uang asing	
Dolar Amerika Serikat (2024: USD71.551.837 2023: USD116.773.122)	1.151.595.512
Dolar Singapura (2024: SIN39.394 2023: SIN46.083)	466.600
Riyal Arab Saudi (2024: SAR1.083.948 2023: Nihil)	4.643.636
	<u>3.232.383.291</u>
Pihak berelasi (Catatan 41) Rupiah	32.999.013
Mata uang asing	
Dolar Amerika Serikat (2024: USD330.103 2023: USD320.144)	5.343.152
Riyal Arab Saudi (2024: SAR4.000 2023: Nihil)	17.136
	<u>38.359.301</u>
	3.270.742.592
Tabungan wadiah Pihak ketiga Rupiah	7.110.520.917
Mata uang asing	
Dolar Amerika Serikat (2024: USD18.615.232 2023: USD16.738.001)	299.632.616
Dolar Singapura (2024: SIN76.413 2023: SIN127.603)	905.081
	<u>7.411.058.614</u>
Pihak berelasi (Catatan 41) Rupiah	18.027.361
	<u>7.429.085.975</u>
Jumlah	10.699.828.567

Giro *wadiah* merupakan simpanan *wadiah yad-dhamanah* dimana nasabah dapat memperoleh bonus berdasarkan kebijakan Bank.

Bonus per tahun untuk simpanan wadiah rupiah adalah berkisar antara 0,00% sampai dengan 0,02% per posisi 31 Desember 2024 dan antara 0,00% sampai dengan 0,02% posisi 31 Desember 2023. Bank tidak memberikan bonus untuk simpanan wadiah dalam mata uang asing.

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan Haji Arafah dalam mata uang Rupiah dan tidak mendapatkan bonus.

Tidak terdapat Giro dan Tabungan *wadiah* yang diblokir yang dijadikan sebagai agunan pembiayaan yang diberikan pada 31 Desember 2024 dan 2023.

19. DEPOSITS

	31 Desember/ December 31, 2023
Wadiah demand deposits Third parties Rupiah	2.141.631.492
Foreign currencies	
United States Dollar (2024 : USD71,551,837 2023 : USD116,773,122)	1.793.002.262
Singapore Dollar (2024: SIN39,394 2023: SIN46,083)	537.554
Saudi Arabian Riyal (2024: SAR 1,083,948 2023 : Nil)	--
	<u>3.935.171.308</u>
Related parties (Note 41) Rupiah	24.442.495
Foreign currency	
United States Dollar (2024 : USD330,103 2023 : USD320,144)	4.929.253
Saudi Arabian Riyal (2024: SAR4,000 2023 : Nil)	--
	<u>29.371.748</u>
	3.964.543.056
Wadiah savings Third parties Rupiah	6.784.038.693
Foreign currencies	
United States Dollar (2024 : USD18,615,232 2023 : USD16,738,001)	257.426.686
Singapore Dollar (2024 : SIN76,413 2023 : SIN127,603)	1.489.945
	<u>7.042.955.324</u>
Related parties (Note 41) Rupiah	14.750.304
	<u>7.057.705.628</u>
Total	11.022.248.684

Wadiah demand deposits represent yad-dhamanah wadiah demand deposits, in which costumers are entitled to receive bonuses in accordance with the Bank's policy.

The annual bonus rates range from 0.00% to 0.02% as of December 31, 2024 and 0.00% to 0.02% as of December 31, 2023 for Rupiah wadiah demand deposits. Wadiah demand deposits in foreign currency are not entitled to bonus.

Wadiah savings represent Arafah Hajj savings in Rupiah and are not entitled to bonus.

No Wadiah demand deposits or Wadiah savings are blocked and pledged as collateral for loans extended as of December 31, 2024 and 2023.

20. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2024
Giro wadiah	
Pihak ketiga	
Rupiah	26.739.213
Mata uang asing	
Dolar Amerika Serikat	72.121
Tabungan wadiah	
Pihak ketiga	
Rupiah	851.068
Jumlah	27.662.402

Tidak terdapat Simpanan dari Bank lain yang diblokir yang dijadikan sebagai agunan pembiayaan yang diberikan pada 31 Desember 2024 dan 2023.

20. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

This account consists of:

31 Desember/ December 31, 2023	
	Wadiah Demand Deposits
	Third parties
	Rupiah
	Foreign currencies
	United States Dollar
	Wadiah savings
	Third parties
	Rupiah
46.293.395	Total

No deposits from other banks is blocked and pledged as collateral for loans extended as of December 31, 2024 and 2023.

21. LIABILITAS KEPADA BANK INDONESIA

Liabilitas kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut

21. LIABILITIES TO BANK INDONESIA

Liabilities to Bank Indonesia as of December 31, 2024 and 2023 is are follows:

31 Desember 2024 / December 31, 2024

Nama Pihak Penjual / Counterparty	Jenis Efek / Type of Security	Nilai Nominal / Nominal Amount	Tarif / Rate (%)	Tanggal Mulai / Value Date	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date	Nilai Jual / Selling Price
Bank Indonesia	IFR 006	299.000.000	6,25	30/12/2024	06/01/2025	320.776.170
Bank Indonesia	IFR 010	335.000.000	6,25	30/12/2024	06/01/2025	391.779.150
Bank Indonesia	PBS 012	500.000.000	6,25	30/12/2024	06/01/2025	516.600.000
Bank Indonesia	PBS 012	175.000.000	6,25	30/12/2024	06/01/2025	180.810.000
Jumlah / Total		1.309.000.000				1.409.965.320

31 Desember 2023 / December 31, 2023

Nama Pihak Penjual / Counterparty	Jenis Efek / Type of Security	Nilai Nominal / Nominal Amount	Tarif / Rate (%)	Tanggal Mulai / Value Date	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date	Nilai Jual / Selling Price
Bank Indonesia	IFR 006	299.000.000	6,25	27/12/2023	03/01/2024	330.771.740
Bank Indonesia	IFR 010	335.000.000	6,25	27/12/2023	03/01/2024	398.110.650
Bank Indonesia	PBS 025	366.000.000	6,25	27/12/2023	03/01/2024	378.337.860
Bank Indonesia	PBS 012	500.000.000	6,85	28/12/2023	28/03/2024	531.760.000
Bank Indonesia	PBS 012	400.000.000	6,25	29/12/2023	05/01/2024	426.328.000
Bank Indonesia	PBS 025	100.000.000	6,25	29/12/2023	05/01/2024	104.370.000
Jumlah / Total		2.000.000.000				2.169.678.250

**21. LIABILITAS KEPADA BANK INDONESIA
(Lanjutan)**

Transaksi PaSBI adalah transaksi penyediaan dana kepada Peserta OPT Syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan Bank telah melakukan pembayaran sebesar Rp1.409.965.320.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, semua surat-surat berharga yang dijaminkan pada 31 Desember 2024 dan 2023 diklasifikasikan lancar.

22. PINJAMAN YANG DITERIMA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2024
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	500.000.000
Jumlah	500.000.000

Berdasarkan akad perjanjian *uncommitted facility line* pembiayaan *mudharabah muqayadah* antara Bank dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) No.31 tanggal 30 Oktober 2024, dan berdasarkan surat pernyataan pencairan *Uncommitted Facility Line batch* ke 1 No.044/B/GLM-SRT/X/2024 Bank telah menerima fasilitas pembiayaan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp500.000.000 berjangka waktu 1 (satu) tahun dan porsi nisbah yang disepakati adalah masing-masing sebesar 51,00% untuk Bank dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar 49,00%.

Berdasarkan akad perjanjian *uncommitted facility line* pembiayaan *mudharabah muqayadah* antara Bank dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) No.22 tanggal 26 Juli 2023, dan berdasarkan surat pernyataan pencairan *Uncommitted Facility Line batch* ke 1 No.338/S/GLM/VII/2023 Bank telah menerima fasilitas pembiayaan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp350.000.000 berjangka waktu 1 (satu) tahun dan porsi nisbah yang disepakati adalah masing-masing sebesar 51,00% untuk Bank dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar 49,00%. Bank telah melakukan pelunasan pinjaman tersebut pada tanggal 1 November 2024.

**21. LIABILITIES TO BANK INDONESIA
(Continued)**

PaSBI transactions are transactions providing funds to Sharia OPT Participants for liquidity management with collateral in the form of securities that comply with sharia principles.

Until the date of the issuance of the financial statements, the Bank has paid Rp1,409,965,320.

Under the applicable Bank Indonesia regulations, all securities guaranteed as of December 31, 2024 and 2023 are classified as "Current".

22. FUND BORROWINGS

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2023	
	1.000.000.000	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
	1.000.000.000	Total

Based on the uncommitted facility line for Mudharabah Muqayadah financing agreement between the Bank and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) No.22 dated July 26, 2023, and based on Uncommitted Facility Line batch 1 statement letter No.338/S/GLM/VII/2023 the Bank obtained financing facility from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) amounting to Rp350,000,000, with a period of 1 (one) year and the agreed nisbah portion for the Bank and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) is 51.00% and 49.00%, respectively.

Based on the uncommitted facility line for Mudharabah Muqayadah financing agreement between the Bank and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) No.22 dated July 26, 2023, and based on Uncommitted Facility Line batch 1 statement letter No.338/S/GLM/VII/2023 the Bank obtained financing facility from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) amounting to Rp350,000,000, with a period of 1 (one) year and the agreed nisbah portion for the Bank and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) is 51.00% and 49.00%, respectively. The Bank paid off this borrowing on November 1, 2024.

22. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

Berdasarkan akad perjanjian *uncommitted facility line* pembiayaan *mudharabah muqayadah* antara Bank dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) No.22 tanggal 26 Juli 2023, dan berdasarkan surat pernyataan pencairan *Uncommitted Facility Line batch* ke 1 No.338/S/GLM/VII/2023 Bank telah menerima fasilitas pembiayaan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp150.000.000 berjangka waktu 1 (satu) tahun dan porsi nisbah yang disepakati adalah masing-masing sebesar 51,00% untuk Bank dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar 49,00%. Bank telah melakukan pelunasan pinjaman tersebut pada tanggal 31 Juli 2024.

Berdasarkan akad perjanjian *uncommitted facility line* pembiayaan *mudharabah muqayadah* antara Bank dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) No.22 tanggal 26 Juli 2023, dan berdasarkan surat penegasan pencairan *Uncommitted Facility Line batch* ke 2 No.S-1689/DIR/SMF/VIII/2023 Bank telah menerima fasilitas pembiayaan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp500.000.000 berjangka waktu 1 (satu) tahun dan porsi nisbah yang disepakati adalah masing-masing sebesar 51,00% untuk Bank dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar 49,00%. Bank telah melakukan pelunasan pinjaman tersebut pada tanggal 30 Agustus 2024.

Seluruh fasilitas pinjaman yang diterima Bank dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dijamin dengan fidusia tagihan. Bank telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah disepakati dalam akad perjanjian pembiayaan *mudharabah* tersebut diatas.

22. FUND BORROWINGS (Continued)

Based on the *uncommitted facility line* for *Mudharabah Muqayadah* financing agreement between the Bank and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) No.22 dated July 26, 2023, and based on *Uncommitted Facility Line batch 1* statement letter No.338/S/GLM/VII/2023 the Bank obtained financing facility from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) amounting to Rp150,000,000, with a period of 1 (one) year and the agreed nisbah portion for the Bank and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) is 51.00% and 49.00%, respectively. The Bank paid off this borrowing on July 31, 2024.

Based on the *uncommitted facility line* for *Mudharabah Muqayadah* financing agreement between the Bank and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) No.22 dated July 26, 2023, and based on *Uncommitted Facility Line batch 2* affirmation letter No.S-1689/DIR/SMF/VIII/2023 the Bank obtained financing facility from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) amounting to Rp500,000,000, with a period of 1 (one) year and the agreed nisbah portion for the Bank and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) is 51.00% and 49.00%, respectively. The Bank paid off this borrowing on August 30, 2024.

All fund borrowings received from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) are guaranteed with fiduciary collateral. The Bank has complied with all agreed covenants stipulated in the above stated *mudharabah* financing agreements

23. UTANG PAJAK

a. Utang Pajak

	31 Desember/ December 31, 2024
Pajak penghasilan:	
Pasal 4 (2)	13.010.696
Pasal 21	57.499
Pasal 23	349.351
Pasal 26	24.121
Pasal 29	117.896
Pajak Kini - KL	8.604.456
Pajak Pertambahan Nilai	10.949.291
Jumlah	33.113.310

23. TAX PAYABLES

a. Tax Payable

	31 Desember/ December 31, 2023	
		Income tax:
		Article 4 (2)
		Article 21
		Article 23
		Article 26
		Article 29
		Current Tax - KL
		Value Added Tax
	20.090.991	Total

23. UTANG PAJAK (Lanjutan)

23. TAX PAYABLES (Continued)

b. Beban pajak penghasilan badan

b. Corporate income tax expense

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
(Beban) manfaat pajak:			Tax (expense) benefit:
Kini	(117.896)	(415.282)	Current
Tangguhan	(1.839.314)	(396.496)	Deferred
Jumlah	(1.957.210)	(811.778)	Total

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before income tax as stated in the statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	20.414.745	14.106.030	Income before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan temporer			Temporary differences
Penyusutan aset tetap	(14.297.522)	(14.153.366)	Depreciation of premises and equipment
Bonus	(1.033.510)	(2.614.424)	Bonuses
Imbalan pasca kerja karyawan	(3.577.921)	7.965.361	Provision for post employment benefit
Beban Pesangon	14.444.957	6.587.909	Severance payment
Cadangan Tantiem Direksi, Komisaris dan DPS	(4.750.000)	--	Allowance for Executive Bonus for Directors, Commissioners and Sharia Supervisory Board
Lainnya	853.478	412.266	Others
Jumlah perbedaan temporer	(8.360.518)	(1.802.254)	Total temporary differences
Perbedaan permanen			Permanent differences
Hadiah dan sumbangan	125.312	146.089	Rewards and donations
Pemeliharaan dan perbaikan	141.774	--	Maintenance and repairs
Kenikmatan karyawan dan Direksi	900.334	1.348	Employees and Directors benefits
Lain-lain	(12.685.755)	(10.563.569)	Others
Jumlah perbedaan permanen	(11.518.335)	(10.416.132)	Total permanent differences
Penghasilan fiskal			Taxable income
kena pajak	535.891	1.887.644	
Beban pajak penghasilan-kini	117.896	415.282	Corporate Income tax expense - current
Dikurangi pembayaran pajak dimuka Pajak Penghasilan Pasal 25	--	(14.499.976)	Less prepaid income tax for Income Tax Article 25
Utang (Kelebihan) Pajak Kini	117.896	(14.084.694)	Current Tax Payables (Prepaid)

23. UTANG PAJAK (Lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan badan (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain - Kuala Lumpur	--	--
Penyesuaian fiskal	--	--
Penghasilan fiskal kena pajak	--	--
Beban pajak penghasilan-kini Cabang Kuala Lumpur	--	--

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020, serta menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dan berlaku sejak tanggal 19 Juni 2020. Aturan tersebut menetapkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020, 2021, 2022 dan 2023, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah dihitung menggunakan tarif pajak 22% serta akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan.

Beban pajak kini cabang Kuala Lumpur merupakan pajak badan Bank untuk cabang Kuala Lumpur pada periode 31 Desember 2024.

c. Kelebihan pembayaran pajak

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Tahun 2023	14.084.695	14.084.695
Jumlah (Catatan 16)	14.084.695	14.084.695

Kelebihan pembayaran pajak tahun 2023 dilaporkan dalam SPT PPh Badan tahun 2023. Sampai dengan tanggal laporan masih dalam proses pemeriksaan pajak.

23. TAX PAYABLES (Continued)

b. Corporate income tax expense (continued)

<i>Income before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income - Kuala Lumpur Fiscal adjustment</i>	
Taxable income	
<i>Corporate Income tax expense - current Kuala Lumpur Branch</i>	

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020 which has become Law No.2 of 2020, and stipulated Government Regulation No. 30 of 2020 concerning Reduction of Income Tax Rate for Domestic Public Companies Taxpayers, which became effective June 19, 2020. The regulation has stipulated the reduction in the income tax rates for domestic corporate taxpayers and business establishments from 25% to 22% for Fiscal Years 2020, 2021, 2022 and 2023 and a further reduction of the tax rate by 3% for domestic taxpayers who meet certain requirements.

The income tax calculation for the years ended December 31, 2024 and 2023 has been calculated using 22% tax rate, and shall be the basis in filling the Annual Corporate Income Tax Return.

Current tax expense of Kuala Lumpur branch is the Bank's corporate tax for the Kuala Lumpur branch as of December 31, 2024.

c. Corporate estimated claim for tax refund

Year 2023
Total (Note 16)

The 2023 tax overpayment is reported in the 2023 Corporate Income Tax Return. As of the reporting date, the tax audit process is still ongoing.

23. UTANG PAJAK (Lanjutan)

23. TAX PAYABLES (Continued)

d. Aset pajak tangguhan

d. Deferred tax assets

	31 Desember / December 31, 2023	Mutasi di laporan laba rugi/ Changes in the statements of income	Penyesuaian pajak tangguhan/ Deferred tax adjustment	31 Desember / December 31, 2024	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					Deferred tax assets (liabilities)
Imbalan pasca kerja karyawan	28.034.882	(787.143)	4.587.702	31.835.441	Provisions for post employment benefit
Bonus Karyawan	(2.765.248)	(227.372)	--	(2.992.620)	Employee bonuses
Penyusutan aset tetap	27.345.013	(3.145.455)	--	24.199.558	Premises and equipment depreciations
Beban Pesangon	3.094.054	3.177.891	--	6.271.945	Severance payment
Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan	74.097.540	187.765	--	74.285.305	Allowance for impairment losses other than financing
Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi dari surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laporan keuangan	9.592	--	--	9.592	Unrealized gain (loss) from securities measured at fair value through financial statement
Surplus revaluasi aset tetap	10.798.402	--	--	10.798.402	Revaluation Surplus on Premises and equipment
Penyesuaian setelah penyajian kembali	(2.421.864)	--	--	(2.421.864)	Adjustment after restatement
Cadangan Tantiem Direksi, Kom dan DPS	--	(1.045.000)	--	(1.045.000)	Allowance for Executive Bonus for Directors, Commissioners and Sharia Supervisory Board
Aset pajak tangguhan - bersih	138.192.371	(1.839.314)	4.587.702	140.940.759	Deferred tax assets - Net

	31 Desember / December 31, 2022	Mutasi di laporan laba rugi/ Changes in the statements of income	Penyesuaian pajak tangguhan/ Deferred tax adjustment	31 Desember / December 31, 2023	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					Deferred tax assets (liabilities)
Imbalan pasca kerja karyawan	27.602.413	1.752.379	(1.319.910)	28.034.882	Provisions for post employment benefit
Bonus Karyawan	(2.190.075)	(575.173)	--	(2.765.248)	Employee bonuses
Penyusutan aset tetap	30.458.753	(3.113.740)	--	27.345.013	Premises and equipment depreciations
Beban Pesangon	(3.604.361)	1.449.340	5.249.075	3.094.054	Severance payment
Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan	74.006.842	90.698	--	74.097.540	Allowance for impairment losses other than financing
Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi dari surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laporan keuangan	9.592	--	--	9.592	Unrealized gain (loss) from securities measured at fair value through financial statement
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari surat berharga yang tersedia untuk dijual	6.305.382	--	(6.305.382)	--	Unrealized gain (loss) in value of available-for-sale marketable securities
Surplus revaluasi aset tetap	10.798.402	--	--	10.798.402	Revaluation Surplus on Premises and equipment
Penyesuaian setelah penyajian kembali	(3.478.171)	--	1.056.307	(2.421.864)	Adjustment after restatement
Aset pajak tangguhan - bersih	139.908.777	(396.496)	(1.319.910)	138.192.371	Deferred tax assets - Net

e. Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi dengan tarif pajak efektif yang berlaku adalah sebagai berikut:

e. Reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to income before tax is as follows:

	31 Desember / December 31, 2024	31 Desember / December 31, 2023	
Laba sebelum pajak Bank menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	20.414.745	14.106.030	Bank's Income before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income
Beban pajak berdasarkan tarif pajak yang berlaku	117.896	415.282	Tax expense at effective tax rates
Pengaruh pajak atas penghasilan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			Tax effect of non deductible expenses - net:
Imbalan pasca kerja	787.143	(1.752.379)	Post Employment benefit
Kenikmatan karyawan dan Direksi	227.372	575.173	Employees and Directors benefits
Penyusutan	3.145.455	3.113.740	Depreciation
Lain-lain	(2.320.656)	(1.540.038)	Others
Jumlah	1.839.314	396.496	Total
Penyesuaian pajak tangguhan	--	--	Deferred tax adjustment
Jumlah beban (manfaat) pajak	1.957.210	811.778	Total tax expenses (benefits)

24. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

24. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. Estimasi kerugian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko pembiayaan:

a. Estimated loss on commitments and contingencies by its credit risk are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024
Rupiah	
Bank garansi	314.090
Penerbitan SKBDN dan L/C yang tidak dapat dibatalkan Lancar	85.167
Mata uang asing	
Bank garansi	416.815
Penerbitan SKBDN dan L/C yang tidak dapat dibatalkan Lancar	40.411
Jumlah	856.483

	31 Desember/ December 31, 2023
Rupiah	
Bank guarantees	488.207
Irrevocable domestic letters of credit and L/C issued Current	--
Foreign currencies	
Bank guarantees	365.271
Irrevocable domestic letters of credit and L/C issued Current	--
Total	853.478

b. Komitmen dan kontinjensi berdasarkan kolektibilitas sebagai berikut:

b. Commitments and contingencies by collectibility are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024
Rupiah	
Bank garansi	
Lancar	32.254.301
	32.254.301
Penerbitan SKBDN dan L/C yang tidak dapat dibatalkan Lancar	19.011.184
	51.265.485
Mata uang asing	
Bank garansi	
Lancar	3.961.250
Penerbitan SKBDN dan L/C yang tidak dapat dibatalkan Lancar	6.988.865
	6.988.865
	10.950.115
Jumlah	62.215.600
Cadangan kerugian penurunan nilai	(856.483)
Bersih	61.359.117

	31 Desember/ December 31, 2023
Rupiah	
Bank guarantees	
Current	46.511.225
	46.511.225
Irrevocable domestic letters of credit and L/C issued Current	2.589.074
	49.100.299
Foreign currencies	
Bank guarantees	
Current	2.309.550
Irrevocable domestic letters of credit and L/C issued Current	52.578.291
	52.578.291
	54.887.841
Total	103.988.140
Allowance for impairment losses	(853.478)
Net	103.134.662

24. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (Lanjutan)

c. Ikhtisar perubahan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024
Saldo awal tahun	853.478
Penyisihan (Pembalikan) selama tahun berjalan (Catatan 36)	3.005
Selisih kurs penjabaran	--
Saldo akhir tahun	856.483

Manajemen berpendapat bahwa jumlah estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah memadai.

24. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (Continued)

c. The changes in estimated losses on commitments and contingencies are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	
	854.210	Balance at the beginning of the year
		Provision (Reversal) during the year (Note 36)
	(732)	Exchange rate
	--	
Balance at the end of the year	853.478	

Management believes that estimated losses on commitments and contingencies as of December 31, 2024 and 2023 is adequate.

25. ESTIMASI LIABILITAS IMBALAN KERJA

Bank telah mencatat estimasi liabilitas dan beban imbalan kerja (*employment benefit*) masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 menurut Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 berdasarkan perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria V. Agus Basuki dan PT Lastika Dipa, aktuaris independen, berdasarkan laporannya masing-masing pada tanggal 3 Februari 2025 dan 31 Januari 2024.

Perhitungan aktuaris tersebut menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024
Tingkat diskonto per tahun	6,33% - 6,81%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	3,00%
Tabel mortalita	TMI-IV 2019
Usia pensiun	55 tahun/ <i>years old</i>

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja:

	31 Desember/ December 31, 2024
Saldo pada awal tahun (Keuntungan)/kerugian aktuaria	110.699.329 (20.853.192)
Saldo pada akhir tahun	89.846.137
Pajak - pajak terkait	(19.766.150)
Saldo pada akhir tahun - bersih	70.079.987

25. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYMENT BENEFITS

The Bank has recorded estimated liabilities and expenses for employment benefits for the years ended December 31, 2024 and, 2023, in compliance with Labor Law No. 13/2003, based on actuarial calculation performed by Actuarial Consulting Firm V. Agus Basuki and PT Lastika Dipa, an independent actuary, as stipulated in their reports dated February 3, 2025 and January 31, 2024, respectively.

The actuarial calculations used the "Projected Unit Credit" method with underlying assumptions as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	
	6,33% - 6,81%	Annual discount rate
	3,00%	Annual salary increase rate
	TMI-IV 2019	Mortality table
	55 tahun/ <i>years old</i>	Retirement age

Remeasurement of employee benefit liabilities:

	31 Desember/ December 31, 2023	
	104.699.736	Balance at the beginning of the year
	5.999.592	Actuarial (gain)/loss
	110.699.328	Balance at the end of the year
	(24.353.852)	Related Tax
Balance at the end of the year-net	86.345.476	

25. ESTIMASI LIABILITAS IMBALAN KERJA
(Lanjutan)

Beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024
Biaya jasa kini	11.621.040
Biaya bunga	4.939.694
Jumlah (Catatan 34)	16.560.734

Mutasi atas nilai kini kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024
Saldo pada awal tahun	127.431.279
Biaya bunga	4.939.694
Biaya jasa kini	11.621.040
Kerugian (keuntungan) aktuarial	20.853.192
Pembayaran imbalan kerja tahun berjalan	(20.138.655)
Biaya jasa lalu karena perubahan program	--
Saldo pada akhir tahun	144.706.550

Rincian nilai kini liabilitas imbalan kerja selama tahun berjalan dan 5 (lima) tahun sebelumnya:

	2024	2023	2022	2021	2020
Nilai kini kewajiban imbalan	144.706.550	127.431.279	125.465.511	153.743.250	162.441.725

Imbalan Pasca Kerja

Bank menyelenggarakan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut sebanyak 2.558 dan 2.597 karyawan masing-masing untuk 31 Desember 2024 dan 2023.

Program Pensiun Iuran Pasti

Bank menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap yang memiliki masa kerja minimum 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi karyawan tetap dan berusia di bawah 55 (lima puluh lima) tahun. Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.S-438/LK/1997 tanggal 19 Desember 1997. Pendiri DPLK Muamalat adalah Bank.

25. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

Expenses recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	
	13.188.394	Current service cost
	6.504.615	Interest cost
Total (Note 34)	19.693.009	Total (Note 34)

Changes in present value of estimated liabilities for employment benefits are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	
	125.465.511	Balance at the beginning of the year
	6.504.615	Interest cost
	13.188.394	Current service cost
	(5.999.592)	Actuarial Loss (Gain)
	(11.167.392)	Current year benefit payments
	(560.257)	Past service costs due to program changes
Balance at the end of the year	127.431.279	Balance at the end of the year

Details of present value of employment benefit liabilities during the year and previous 5 (five) years:

Post-employment Benefit

The Bank established defined post-employment benefits for its employees in accordance with Labor Law No. 13/2003. The number of employees entitled to the benefits is 2,558 and 2,597 employees as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

Defined Contribution Pension Plan

The Bank established a defined contribution pension plan covering all of its permanent employees under 55 (fifty five) years of age with working period of at least 1 (one) year. The pension fund is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat, the deed of establishment of which was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in his decree No. S-438/LK/1997 dated December 19, 1997. DPLK Muamalat was established by the Bank.

**25. ESTIMASI LIABILITAS IMBALAN KERJA
 (Lanjutan)**

Program Pensiun Iuran Pasti (lanjutan)

Bank mengikutsertakan karyawannya dalam program DPLK dengan iuran DPLK 10% dari gaji pokok, dimana Bank mensubsidi sebesar 5% dan sisanya sebesar 5% lagi menjadi beban karyawan. Iuran dana pensiun yang disetor pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp20.202.674 dan Rp21.409.517. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 jumlah akumulasi dana pensiun yang merupakan kontribusi Bank masing-masing sebesar Rp9.986.773 dan Rp9.583.905.

Seluruh karyawan tetap Bank adalah peserta Program Pensiun Iuran Pasti.

25. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

Defined Contribution Pension Plan (continued)

The Bank has registered its employees into a pension fund with a contribution of 10% of the basic salary, of which the Bank subsidizes 5% whilst the remaining 5% is paid by the employee. The contribution to the pension fund as of December 31, 2024 and 2023 is amounting to Rp20,202,674 and Rp21,409,517, respectively. as of December 31, 2024 and 2023 the Bank's contribution to the total accumulated pension fund is amounting to Rp9,986,773 and Rp9,583,905, respectively.

All permanent employees of the Bank are members of the defined contribution pension plan.

26. LIABILITAS LAIN-LAIN

	31 Desember/ December 31, 2024
Titipan operasional pembiayaan	194.969.547
Biaya yang masih harus dibayar	43.628.575
Utang dividen	19.682.541
Titipan <i>unclaim</i>	10.070.904
Liabilitas hak guna usaha	7.810.659
Setoran jaminan	361.819
Lainnya	16.486.107
Jumlah	293.010.152

Titipan operasional pembiayaan merupakan kewajiban Bank kepada pihak lain yang harus segera dipenuhi sesuai dengan kesepakatan terkait dengan *collection*, proses pembiayaan, biaya notaris, asuransi atas jaminan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses penyitaan agunan.

Biaya masih harus dibayar merupakan cadangan berkaitan dengan operasional Bank seperti beban listrik, air dan telepon, zakat perusahaan, jasa konsultan dan cadangan untuk personalia seperti cadangan bonus, kinerja, promosi, pelatihan dan biaya seragam untuk karyawan.

Utang dividen merupakan dividen kepada para pemegang saham yang belum terealisasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Titipan *unclaim* merupakan kewajiban Bank yang akan dibayarkan ke nasabah terkait dengan proses pembiayaan seperti biaya notaris, asuransi atas jaminan, dan biaya lainnya yang telah berumur lebih dari 1 (satu) tahun (365 hari).

26. OTHER LIABILITIES

	31 Desember/ December 31, 2023	
	310.206.999	<i>Operational financing funds</i>
	26.134.469	<i>Accrued expenses</i>
	19.805.905	<i>Dividends payable</i>
	13.271.308	<i>Unclaimed funds</i>
	12.621.886	<i>Obligation under capital lease</i>
	415.029	<i>Security deposits</i>
	24.046.163	<i>Others</i>
Jumlah	406.501.759	Total

Operational financing funds represents Bank's obligation to third party to be immediately fulfilled as agreed which is related to *collection*, financing process, cost of notary, insurance of collateral, and other costs incurred due to confiscation of collateral.

Accrued Expense represents reserve related to the Bank's operational activities, such as electricity, water, and telephone expenses, corporate zakat, consulting service, and reserve for personnel, such as rewards, performance bonuses, promotion, training and uniform for staff.

Dividends payables represents dividends from previous years which have not been claimed by the shareholders as of December 31, 2024 and 2023.

Unclaimed funds represents the Bank's obligation that will be paid to costumers related to financing process, such as cost of notary, insurance for collateral, and other costs exceeding the period of 1 (one) year (365 days).

27. DANA SYIRKAH TEMPORER

(i) Giro *Mudharabah*

	31 Desember/ December 31, 2024
Giro <i>mudharabah</i>	
Rupiah	
Bukan Bank	
Pihak ketiga	2.385.441.026
Pihak berelasi (Catatan 41)	3.387.572
	2.388.828.598
Bank	
Pihak ketiga	283.484.976
Jumlah	2.672.313.574

Giro *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Nisbah dan tingkat bagi hasil untuk giro *mudharabah* adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024	Tingkat Bagi Hasil/ Profit Sharing Rate
	Nisbah	
Giro <i>mudharabah</i>	32,00%	0,82%

(ii) Tabungan *Mudharabah*

a. Berdasarkan jenis produk:

	31 Desember/ December 31, 2024
Bukan Bank	
Tabungan Hijrah Prima	8.251.074.453
Tabungan Hijrah Bisnis	874.633.288
Tabungan Hijrah Rencana	151.346.462
Tabungan Hijrah Haji	48.084.875
Tabungan Hijrah Sempel	15.285.334
	9.340.424.412
Bank	
Tabungan Hijrah Prima	283.359.390
Tabungan Hijrah Bisnis	477.944.464
	761.303.854
Jumlah	10.101.728.266

27. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

(i) *Mudharabah Demand Deposits*

	31 Desember/ December 31, 2023	
<i>Mudharabah demand deposits</i>		
Rupiah		
Non Bank		
Third parties	2.127.075.777	
Related parties (Note 41)	3.961.233	
	2.131.037.010	
Bank		
Third parties	165.866.424	
Total	2.296.903.434	

Mudharabah demand deposits represents deposits from third parties which are entitled to receive a share in profit derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined nisbah.

The rates of nisbah and profit sharing for mudharabah demand deposits are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	Tingkat Bagi Hasil/ Profit Sharing Rate
	Nisbah	
Giro <i>mudharabah</i>	32,00%	0,73%

(ii) *Mudharabah Saving Deposits*

a. By type:

	31 Desember/ December 31, 2023	
Non Bank		
Hijrah Prima savings	8.634.699.794	
Hijrah Bisnis savings	696.810.796	
Hijrah Rencana savings	188.545.873	
Hijrah Haji savings	51.518.697	
Hijrah Sempel savings	12.439.508	
	9.584.014.668	
Bank		
Hijrah Prima savings	306.799.176	
Hijrah Bisnis savings	441.122.163	
	747.921.339	
Total	10.331.936.007	

27. DANA SYIRKAH TEMPORER (Lanjutan)

(ii) Tabungan *Mudharabah*

b. Berdasarkan keterkaitan:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Bukan Bank		
Pihak ketiga	9.329.536.460	9.571.696.547
Pihak berelasi (Catatan 41)	10.887.952	12.318.121
	<u>9.340.424.412</u>	<u>9.584.014.668</u>
Bank		
Pihak ketiga	761.303.854	747.921.339
Jumlah	10.101.728.266	10.331.936.007

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

27. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (Continued)

(ii) *Mudharabah Saving Deposits*

b. By relationship:

Non Bank
Third parties
Related parties (Note 41)
Bank
Third parties
Total

Mudharabah savings deposits are entitled to receive a share in profit derived by Bank from the use of funds received based on predetermined ratio.

	31 Desember/ December 31, 2024		31 Desember/ December 31, 2023		
	Nisbah	Tingkat Bagi Hasil/ Profit Sharing Rate	Nisbah	Tingkat Bagi Hasil/ Profit Sharing Rate	
Tabungan Hijrah Haji	1 : 99	0,05%	1 : 99	0,05%	<i>Hijrah Haji savings</i>
Tabungan Hijrah Simpel	2 : 98	0,10%	2 : 98	0,10%	<i>Hijrah Simpel savings</i>
Tabungan Hijrah Bisnis	15 : 85	0,19%	15 : 85	0,07%	<i>Hijrah Bisnis savings</i>
Tabungan Hijrah Prima	10 : 90	0,24%	10 : 90	0,25%	<i>Hijrah Prima savings</i>
Tabungan Hijrah Rencana	30 : 70	1,14%	30 : 70	1,15%	<i>Hijrah Rencana savings</i>

(iii) Deposito Berjangka *Mudharabah*

a. Berdasarkan keterkaitan:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Bukan Bank Rupiah		
Pihak ketiga	11.686.058.777	14.534.898.803
Pihak berelasi (Catatan 41)	5.352.105.615	7.543.517.947
	<u>17.038.164.392</u>	<u>22.078.416.750</u>
Mata uang asing		
Pihak ketiga	516.072.140	1.102.818.382
Pihak berelasi (Catatan 41)	1.725.732.329	1.640.654.575
	<u>2.241.804.469</u>	<u>2.743.472.957</u>
	<u>19.279.968.861</u>	<u>24.821.889.707</u>
Bank Rupiah		
Pihak ketiga	1.247.166.855	1.215.984.725
Mata uang asing		
Pihak ketiga	160.950.000	538.895.000
	<u>1.408.116.855</u>	<u>1.754.879.725</u>
Jumlah	20.688.085.716	26.576.769.432

Non Bank Rupiah
Third parties
Related parties (Note 41)
Foreign currencies
Third parties
Related parties (Note 41)
Bank Rupiah
Third parties
Foreign currencies
Third parties
Total

27. DANA SYIRKAH TEMPORER (Lanjutan)

27. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (Continued)

(iii) Deposito Berjangka *Mudharabah* (lanjutan)

(iii) *Mudharabah Time Deposits* (continued)

b. Berdasarkan jangka waktu:

b. *By period:*

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Rupiah		
1 bulan	10.622.433.845	14.611.978.638
3 bulan	3.348.005.844	3.889.124.867
4 bulan	25.200.000	50.350.000
6 bulan	2.205.812.378	2.381.071.175
12 bulan	2.083.879.180	2.361.876.795
	<u>18.285.331.247</u>	<u>23.294.401.475</u>
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat		
1 bulan	2.219.667.208	3.139.770.338
3 bulan	81.903.428	46.538.949
6 bulan	73.919.110	71.404.438
12 bulan	27.264.723	24.654.232
	<u>2.402.754.469</u>	<u>3.282.367.957</u>
Jumlah	20.688.085.716	26.576.769.432

Rupiah
1 month
3 months
4 months
6 months
12 months

Foreign currencies
US Dollar
1 month
3 months
6 months
12 months

Total

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

c. *By remaining period to maturity:*

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Rupiah		
≤ 1 bulan	12.143.484.280	16.715.264.895
> 1 - ≤ 3 bulan	3.459.800.728	3.782.692.236
> 3 - ≤ 6 bulan	1.601.088.633	1.621.276.652
> 6 - 12 bulan	1.080.957.606	1.175.167.692
	<u>18.285.331.247</u>	<u>23.294.401.475</u>
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat		
≤ 1 bulan	2.275.643.196	3.054.151.086
> 1 - ≤ 3 bulan	48.433.132	154.999.806
> 3 - ≤ 6 bulan	59.933.124	54.982.615
> 6 - 12 bulan	18.745.017	18.234.450
	<u>2.402.754.469</u>	<u>3.282.367.957</u>
Jumlah	20.688.085.716	26.576.769.432

Rupiah
≤ 1 month
> 1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 6 months
> 6 - 12 months

Foreign currencies
US Dollar
≤ 1 month
> 1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 6 months
> 6 - 12 months

Total

Deposito berjangka *mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Mudharabah time deposits are entitled to receive a share in profit derived by the Bank from the use of funds received based on predetermined ratio.

27. DANA SYIRKAH TEMPORER (Lanjutan)

(iv) *Sukuk Mudharabah*

	31 Desember/ December 31, 2024
Pihak ketiga	
<i>Sukuk Mudharabah BMI</i>	2.440.856.000
<i>Sukuk Mudharabah Trust Certificate</i>	1.600.000.000
Beban Bagi Hasil Sukuk	656.968.621
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah Antar Bank (SIMA)</i>	625.000.000
Sertifikat Berdasarkan Prinsip Syariah (SIPA)	530.000.000
Pihak berelasi (Catatan 41)	
<i>Sukuk Mudharabah Subordinasi</i>	2.000.000.000
Jumlah	7.852.824.621

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi

Pada Maret 2022, Bank telah menerbitkan sukuk subordinasi *mudharabah* jangka panjang tanpa melalui penawaran umum dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000.000. Pembayaran pendapatan bagi hasil pertama kali dilakukan pada tanggal 15 Juni 2022, sedangkan pembayaran pendapatan bagi hasil terakhir akan dilakukan pada tanggal 15 Maret 2032. Pokok sukuk akan jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 15 Maret 2032.

Sukuk *Mudharabah* BMI

Sukuk *Mudharabah* BMI merupakan surat berharga yang diterbitkan Bank dalam bentuk *Sukuk Mudharabah* dengan jumlah pokok sebesar Rp2.440.856.000 kepada PT PPA. Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan oleh Bank tidak melalui penawaran umum (*public offering*) tetapi dilakukan dengan mekanisme penawaran terbatas (*private placement*).

Berdasarkan akta Perjanjian Penerbitan Sukuk *Mudharabah* yang tercantum dalam akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, No.20 tanggal 15 November 2021, Bank menerbitkan Sukuk *Mudharabah* dengan jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerbitan sejumlah Rp2.440.856.000 dengan Nisbah pemegang sukuk sebesar 50,72%.

Pada akhir periode penerbitan Sukuk *Mudharabah*, saldo kewajiban Bank atas Sukuk tersebut akan menjadi pokok Sukuk *Mudharabah*. Hingga pada akhir periode, saldo kewajiban Bank Muamalat atas Sukuk *Mudharabah* BMI sebesar Rp13.051.069.000 kepada PT PPA.

27. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (Continued)

(iv) *Mudharabah Sukuk*

	31 Desember/ December 31, 2023	
		Third parties
	2.440.856.000	<i>BMI Mudharabah Sukuk Trust Certificate</i>
	1.600.000.000	<i>Mudharabah Sukuk Sukuk Profit Sharing</i>
	616.968.621	
		<i>Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)</i>
	475.000.000	
	350.000.000	<i>Sharia Based Certificate (SIPA)</i>
		Related parties (Note 41)
	2.000.000.000	<i>Subordinated Mudharabah Sukuk</i>
	7.482.824.621	Total

Subordinated *Mudharabah* Sukuk

In March 2022, the Bank issued long term subordinated *mudharabah* sukuk without public offering with total par value of Rp2,000,000,000. The initial profit-sharing payment was made on June 15, 2022, and the last profit sharing will be paid on March 15, 2032. Sukuk principal will mature and be repaid on March 15, 2032.

BMI *Mudharabah* Sukuk

It represents securities issued by the Bank in the form of *Mudharabah Sukuk* with total principal amount of Rp2,440,856,000 to PT PPA. The *Mudharabah Sukuk* was not issued through public offering, instead it was issued through private placement.

Based on the *Mudharabah Sukuk Issuance Agreement* listed in the Notarial Deed of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, No. 20 dated November 15, 2021, the Bank issued *Mudharabah Sukuk* for a period of 20 years from the date of issue amounting to Rp2,440,856,000 with a sukuk holder ratio of 50.72%.

At the end of each issuance period of the *Mudharabah Sukuk*, the total of Bank investment plan will become the principal of the *Mudharabah Sukuk*. Ultimately, at the end, the total investment plan will amount to Rp13,051,069,000 on the account of PT PPA.

27. DANA SYIRKAH TEMPORER (Lanjutan)

(iv) *Sukuk Mudharabah* (lanjutan)

Sukuk Mudharabah Trust Certificate:

Merupakan surat berharga yang diterbitkan Bank dalam bentuk Sukuk *Mudharabah* dengan jumlah pokok sebesar Rp1.600.000.000 kepada Mawthiq SPC Limited. Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan oleh Bank tidak melalui penawaran umum (*public offering*) tetapi dilakukan dengan mekanisme penawaran terbatas (*private placement*). Sukuk ini terdiri dari tiga tahap penerbitan dengan jangka waktu total 20 (dua puluh) tahun.

Adapun tiga tahap penerbitan Sukuk *Mudharabah* adalah:

1. Tahap ke-1: terhitung sejak tanggal 29 Juni 2018 hingga 29 Juni 2028.
2. Tahap ke-2: terhitung sejak tanggal 29 Juni 2028 hingga 29 Juni 2033.
3. Tahap ke-3: terhitung sejak tanggal 29 Juni 2033 hingga 29 Juni 2038.

Pada setiap akhir periode penerbitan Sukuk *Mudharabah*, saldo kewajiban Bank Muamalat atas Sukuk tersebut akan menjadi pokok Sukuk *Mudharabah* periode selanjutnya. Hingga pada akhir Tahap ke-3, saldo kewajiban Bank Muamalat atas Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp8.000.000.000 kepada Mawthiq SPC Limited.

Jumlah kewajiban Bank Muamalat kepada Mawthiq SPC Limited atas Sukuk *Mudharabah* pada setiap tahap, adalah sebagai berikut:

	Akhir Periode/ End of Period			
	Tahap/ Phase 1	Tahap/ Phase 2	Tahap/ Phase 3	
Pokok Sukuk <i>Mudharabah</i>	1.600.000.000	4.262.643.256	5.978.098.409	<i>Sukuk Initial Amount</i>
Kewajiban bagi hasil Sukuk	1.265.356.314	1.441.734.977	2.021.901.591	<i>Sukuk profit sharing</i>
<i>Commitment fee</i>	1.397.286.942	273.720.176	--	<i>Commitment fee</i>
Jumlah Kewajiban	4.262.643.256	5.978.098.409	8.000.000.000	<i>Total Liabilities</i>

(vi) Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank (SIMA)

(iv) *Mudharabah Sukuk* (continued)

Trust Certificate Mudharabah Sukuk:

It represents securities issued by the Bank in the form of *Mudharabah Sukuk* with total principal amount of Rp1,600,000,000 to Mawthiq SPC Limited. The *Mudharabah Sukuk* was not issued through public offering, instead it was issued through private placement. This *Sukuk* has a period of 20 (twenty) years with three-phases period of issuance.

The three phases of issuance of *Mudharabah Sukuk* are:

1. Phase I: from June 29, 2018 until June 29, 2028.
2. Phase II: from June 29, 2028 until June 29, 2033.
3. Phase III: from June 29, 2033 until June 29, 2038.

At the end of each period, the total of Bank investment plan will become the principal amount of the next phase. Ultimately, at the end of phase III, the total investment plan will amount to Rp8,000,000,000 on the account of Mawthiq SPC Limited.

The total liabilities of Bank to Mawthiq SPC Limited for *Mudharabah Sukuk* in each phase are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024		31 Desember/ December 31, 2023		
	Tingkat bagi hasil/ Revenue sharing rate	Jumlah/ Total	Tingkat bagi hasil/ Revenue sharing rate	Jumlah/ Total	
Bank Sumselbabel	6,15%	50.000.000	6,45%	100.000.000	<i>Bank Sumselbabel</i>
Bank Aceh Syariah	6,25%	200.000.000	--	--	<i>Bank Aceh Syariah</i>
BCA Syariah	6,35%	75.000.000	--	--	<i>BCA Syariah</i>
Bank Amar	--	--	6,45%	35.000.000	<i>Bank Amar</i>
Bank Sulselbar UUS	6,45%	50.000.000	6,45%	40.000.000	<i>Bank Sulselbar SBU</i>
Bank Sulselbar UUS	6,15%	50.000.000	6,31%	100.000.000	<i>Bank Sulselbar SBU</i>
Bank Jatim UUS	6,20%	100.000.000	6,30%	100.000.000	<i>Bank Jatim SBU</i>
BTPN Syariah	6,25%	100.000.000	6,26%	100.000.000	<i>BTPN Syariah</i>
Jumlah		625.000.000		475.000.000	<i>Total</i>

27. DANA SYIRKAH TEMPORER (Lanjutan)

(vii) Sertifikat Berdasarkan Prinsip Syariah (SiPA)

SiPA adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah sebagai pernyataan penerimaan pengelolaan dana di PUAS dengan akad *wakalah bi al-istitsmar*.

27. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (Continued)

(vii) Sharia Based Certificate (SiPA)

SiPA is a certificate issued by Sharia Bank or Sharia Business Unit as a statement of receipt of fund management in PUAS based on *wakalah bi al-istitsmar*.

	31 Desember/ December 31, 2024		31 Desember/ December 31, 2023		
	Tingkat bagi hasil/ Revenue sharing rate	Jumlah/ Total	Tingkat bagi hasil/ Revenue sharing rate	Jumlah/ Total	
Bank NTB Syariah	6,30%	300.000.000	6,30%	100.000.000	Bank NTB Syariah
BPD Kalbar UUS	6,45%	180.000.000	--	--	BPD Kalbar SBU
Panin Syariah	6,20%	50.000.000	--	--	Panin Syariah
Bank Jabar Banten Syariah	--	--	6,15%	200.000.000	Bank Jabar Banten Syariah
BPD Kaltimtara UUS	--	--	6,25%	50.000.000	BPD Kaltimtara SBU
Jumlah		530.000.000		350.000.000	Total

28. MODAL SAHAM

Pada tahun 2023, Bank melakukan *Reverse Stock Split*, sehingga terdapat perubahan jumlah lembar saham dan nilai nominal saham. *Reverse Stock Split* dilakukan dengan rasio 3:2 (tiga saham digabung menjadi dua saham).

Pada tahun 2024, kepemilikan saham BPKH mengalami perubahan +0,04% dari sebelumnya 82,65% menjadi 82,69%. Perubahan kepemilikan saham terjadi pada saham Seri A setelah dilakukannya pengalihan saham-saham jemaah haji tahun 1992-1994 ("Saham Haji") yang tidak diketahui keberadaannya sejumlah 12.507.733 lembar saham seri A dari rekening *escrow* kepada BPKH, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom pada tanggal 3 Desember 2024.

Komposisi pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

28. SHARE CAPITAL

In 2023, the Bank will carry out a *Reverse Stock Split*, so that there will be changes in the number of shares and nominal value of shares. *Reverse Stock Split* is carried out with a ratio of 3:2 (three shares are combined into two shares).

In 2024, BPKH's share ownership changed by +0.04% from 82.65% to 82.69%. Changes in share ownership occurred in Series A shares after the transfer of shares of the 1992-1994 Hajj pilgrims ("Hajj Shares") whose whereabouts were unknown, amounting to 12,507,733 Series A shares from the escrow account to BPKH, which was carried out by the Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom on December 3, 2024.

The composition of shareholders as of December 31, 2024 and 2023 is as follows:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024			
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal disetor/ Total paid-up capital	Name of shareholders
Saham Seri A				A Series Shares
Nilai nominal Rp300 (dalam nilai penuh)				Nominal value of Rp300 (in full amount)
Badan Pengelola Keuangan Haji	167.446.463	0,46%	50.233.939	Badan Pengelola Keuangan Haji
Koperasi Perkayuan Apkindo MPI	88.757.653	0,27%	26.627.296	Koperasi Perkayuan Apkindo MPI
Masyarakat (masing-masing kepemilikan dibawah 0,20%)	294.895.334	0,92%	88.468.600	Public (each below 0.20%)
Jumlah Saham Seri A	551.099.450	1,65%	165.329.835	Total A Series Shares

28. MODAL SAHAM (Lanjutan)

28. SHARE CAPITAL (Continued)

31 Desember 2024/ December 31, 2024				
Nama pemegang saham	Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>	Jumlah modal disetor/ <i>Total paid-up capital</i>	Name of shareholders
Saham Seri B				B Series Shares
Nilai nominal Rp150 (dalam nilai penuh)				Nominal value of Rp150 (in full amount)
Badan Pengelola Keuangan Haji	5.184.211.944	15,55%	777.631.792	Badan Pengelola Keuangan Haji
Islamic Development Bank	680.513.489	2,04%	102.077.023	Islamic Development Bank
Reza Rhenaldi Syaiful	113.510.473	0,34%	17.026.571	Reza Rhenaldi Syaiful
Dewi Monita	113.500.000	0,34%	17.025.000	Dewi Monita
Andre Mirza Hartawan, MBA, Ir.	113.000.000	0,34%	16.950.000	Andre Mirza Hartawan, MBA, Ir.
Masyarakat (masing-masing kepemilikan dibawah 0,20%)	49.299.534	0,15%	7.394.930	Public (each below 0.20%)
Jumlah Saham Seri B	6.254.035.440	18,76%	938.105.316	Total B Series Shares
Saham Seri C				C Series Shares
Nilai nominal Rp45 (dalam nilai penuh)				Nominal value of Rp45 (in full amount)
Badan Pengelola Keuangan Haji	22.222.222.223	66,64%	1.000.000.000	Badan Pengelola Keuangan Haji
Andre Mirza Hartawan, MBA, Ir.	1.618.033.333	4,85%	72.811.500	Andre Mirza Hartawan, MBA, Ir.
Apliani	826.844.008	2,48%	37.207.980	Apliani
Reza Rhenaldi Syaiful	615.371.734	1,85%	27.691.728	Reza Rhenaldi Syaiful
Dewi Monita	614.650.000	1,84%	27.659.250	Dewi Monita
Andre Latidjah	311.121.535	0,93%	18.671.469	Andre Latidjah
Syaiful Amir	113.373.295	0,34%	5.101.798	Syaiful Amir
Siti Farida Syaiful	108.000.000	0,32%	4.860.000	Siti Farida Syaiful
Masyarakat (masing-masing kepemilikan dibawah 0,20%)	110.409.942	0,34%	297.448	Public (each below 0.20%)
Jumlah Saham Seri C	26.540.026.071	79,59%	1.194.301.173	Total C Series Shares
Jumlah	33.345.160.961	100,00%	2.297.736.324	Total
31 Desember 2023/ December 31, 2023				
Nama pemegang saham	Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>	Jumlah modal disetor/ <i>Total paid-up capital</i>	Name of shareholders
Saham Seri A				A Series Shares
Nilai nominal Rp300 (dalam nilai penuh)				Nominal value of Rp300 (in full amount)
Badan Pengelola Keuangan Haji	154.938.730	0,46%	46.481.619	Badan Pengelola Keuangan Haji
Koperasi Perkayuan Apkindo MPI	88.757.653	0,27%	26.627.296	Koperasi Perkayuan Apkindo MPI
Masyarakat (masing-masing kepemilikan dibawah 0,20%)	307.403.067	0,92%	92.220.920	Public (each below 0.20%)
Jumlah Saham Seri A	551.099.450	1,65%	165.329.835	Total A Series Shares
Saham Seri B				B Series Shares
Nilai nominal Rp150 (dalam nilai penuh)				Nominal value of Rp150 (in full amount)
Badan Pengelola Keuangan Haji	5.184.211.944	15,55%	777.631.792	Badan Pengelola Keuangan Haji
Islamic Development Bank	680.513.489	2,04%	102.077.023	Islamic Development Bank
Reza Rhenaldi Syaiful	113.510.473	0,34%	17.026.571	Reza Rhenaldi Syaiful
Dewi Monita	113.500.000	0,34%	17.025.000	Dewi Monita
Andre Mirza Hartawan, MBA, Ir.	113.000.000	0,34%	16.950.000	Andre Mirza Hartawan, MBA, Ir.
Masyarakat (masing-masing kepemilikan dibawah 0,20%)	49.299.534	0,15%	7.394.930	Public (each below 0.20%)
Jumlah Saham Seri B	6.254.035.440	18,76%	938.105.316	Total B Series Shares

28. MODAL SAHAM (Lanjutan)

28. SHARE CAPITAL (Continued)

Nama pemegang saham	31 Desember 2023/ December 31, 2023			Name of shareholders
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal disetor/ Total paid-up capital	
Saham Seri C				C Series Shares
Nilai nominal Rp45 (dalam nilai penuh)				Nominal value of Rp45 (in full amount)
Badan Pengelola Keuangan Haji	22.222.222.223	66,64%	1.000.000.000	Badan Pengelola Keuangan Haji
Andre Mirza Hartawan, MBA, Ir.	1.618.033.333	4,85%	72.811.500	Andre Mirza Hartawan, MBA, Ir.
Apliani	826.844.008	2,48%	37.207.980	Apliani
Reza Rhenaldi Syaiful	615.371.734	1,85%	27.691.728	Reza Rhenaldi Syaiful
Dewi Monita	614.650.000	1,84%	27.659.250	Dewi Monita
Andre Latidjah	311.121.535	0,93%	18.671.469	Andre Latidjah
Syaiful Amir	113.373.295	0,34%	5.101.798	Syaiful Amir
Siti Farida Syaiful	108.000.000	0,32%	4.860.000	Siti Farida Syaiful
Masyarakat (masing-masing kepemilikan dibawah 0,20%)	110.409.942	0,34%	297.448	Public (each below 0.20%)
Jumlah Saham Seri C	26.540.026.071	79,59%	1.194.301.173	Total C Series Shares
Jumlah	33.345.160.961	100,00%	2.297.736.324	Total

Saham Bank terdiri dari saham Seri A, B dan C dengan hak suara dan hak dividen yang sama. Saham seri A adalah saham pendiri yang hanya dapat dimiliki atau dipindahkan haknya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia yang didirikan menurut perundang-undangan Indonesia dan para pengurus nya mayoritas mutlak adalah warga negara Indonesia. Saham Seri B dan C adalah saham biasa yang dikeluarkan kemudian yang dapat dimiliki baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing.

The Bank's shares consist of A, B and C Series shares, which have the same voting and dividend rights. A series shares are founder shares which can only be owned or transferred to Indonesian citizens, or a corporation established under Indonesian laws and regulations, wherein the members of management should all be Indonesian citizens. B and C series shares can be owned by either Indonesian or foreign citizens or an Indonesian or foreign corporation.

Sesuai dengan Akta Hibah No. 37, 38 dan 39 tanggal 21 Juni 2021, Akta Hibah No. 22, 23 dan 24 tanggal 15 November 2021 serta Addendum Akta Hibah No.27 tanggal 16 November 2021 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah menerima pengalihan saham melalui hibah dari para pemegang saham pengendali (PSP) Bank Muamalat, yakni Islamic Development Bank (IsDB), Boubyan Bank, Atwill Holdings Limited, National Bank of Kuwait, IDF Investment Foundation dan BMF Holdings Limited sebanyak 7.903.112.181 saham atau setara dengan 77,42%. Dengan demikian, total kepemilikan saham BPKH di Bank Muamalat per tanggal 16 November 2021 naik menjadi 78,45%.

In accordance with the Deeds of Grant No. 37, 38 and 39 dated June 21, 2021, Deeds of Grant No. 22, 23 and 24 dated November 15, 2021 and Addendum to the Deed of Grant No. 27 dated November 16, 2021 of Notary Ashoya Ratam, Bachelor of Law, Master of Notary, Notary in South Jakarta Administrative City, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) has received a share transfer through a grant from the controlling shareholders (PSP) of Bank Muamalat, namely Islamic Development Bank (IsDB), Boubyan Bank, Atwill Holdings Limited, National Bank of Kuwait, IDF Investment Foundation and BMF Holdings Limited with total amount of 7,903,112,181 shares or equivalent to 77.42%. Thus, the total share ownership of BPKH in Bank Muamalat as of November 16, 2021 increased to 78.45%.

- Boubyan Bank K.S.C.P telah menghibahkan sejumlah 2.245.694.513 (dua miliar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga belas) saham seri B kepada BPKH.
- National Bank of Kuwait S.A.K.P telah menghibahkan sejumlah 862.755.656 (delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam) saham seri B kepada BPKH.

- Boubyan Bank K.S.C.P has granted a total of 2,245,694,513 (two billion two hundred forty five million six hundred ninety four thousand five hundred and thirteen) B Series shares to BPKH.
- National Bank of Kuwait S.A.K.P has granted a total of 862,755,656 (eight hundred sixty two million seven hundred fifty five thousand six hundred and fifty six) B Series shares to BPKH.

28. MODAL SAHAM (Lanjutan)

- c. Atwill Holdings Limited telah menghibahkan sejumlah 1.828.090.034 (satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu tiga puluh empat) saham Seri B kepada BPKH.
- d. BMF Holdings Limited telah menghibahkan sejumlah 289.985.977 (dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) Saham Seri B kepada BPKH.
- e. IDF Investment Foundation telah menghibahkan sejumlah 355.461.941 (tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh satu) Saham Seri B kepada BPKH.
- f. IsDB telah menghibahkan sejumlah 2.321.124.060 (dua miliar tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu enam puluh) Saham, yaitu setara dengan 22,74%, yang terdiri dari 132.458.095 Saham Seri A dan 2.188.665.965 Saham Seri B kepada BPKH.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 13 November 2023, para pemegang saham telah memutuskan:

- a. Persetujuan Penggabungan Nilai Nominal Saham (*Reverse Stock Split* (RSS));
- b. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2024, para pemegang saham telah memutuskan:

- a. Persetujuan Laporan Tahunan Bank Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2023 serta Pengesahan Laporan Keuangan Bank Untuk Tahun Buku 2023;
- b. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Bank Tahun Buku 2023;
- c. Menyetujui penunjukan langsung Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (KAP DBSD&A) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024;
- d. Menyetujui pengakhiran masa tugas Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan anggota Direksi perseroan periode 2019 - 2024.

28. SHARE CAPITAL (Continued)

- c. Atwill Holdings Limited has granted a total of 1,828,090,034 (one billion eight hundred twenty eight million ninety thousand and thirty four) B Series shares to BPKH.
- d. BMF Holdings Limited has granted a total of 289,985,977 (two hundred eighty nine million nine hundred eighty five thousand nine hundred and seventy seven) B Series Shares to BPKH.
- e. IDF Investment Foundation has granted a total of 355,461,941 (three hundred fifty five million four hundred sixty one thousand nine hundred and forty one) B Series shares to BPKH.
- f. IsDB has granted a total of 2,321,124,060 (two billion three hundred twenty one million one hundred twenty four thousand and sixty) shares, which is equivalent to 22.74% shares, consisting of 132,458,095 A Series Shares and 2,188,665,965 B Series Shares to BPKH.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on November 13, 2023, the shareholders have decided :

- a. Approval of the Merger of Nominal Value of Shares (*Reverse Stock Split* (RSS));
- b. Approval of Amendments to the Company's Articles of Association.

Based on the Annual General Meeting of Shareholders held on June 27, 2024, the shareholders have decided:

- a. Approval of the Bank's 2023 Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board for Financial Year 2023 and Ratification of the Bank's Financial Statements for Financial Year 2023;
- b. Approval of the Use of Net Profit for Financial Year 2023;
- c. To grant the direct appointment of the Public Accounting Firm Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (KAP DBSD&A) to audit the Bank's financial statements for Financial year 2024;
- d. To grant the termination of the Bank's Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners and members of Board of Directors for the period 2019 - 2024.

28. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 11 Mei 2023, para pemegang saham telah memutuskan:

- Persetujuan Laporan Tahunan Bank Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan Bank Untuk Tahun Buku 2022;
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Bank Tahun Buku 2022;
- Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.

Pemegang saham mayoritas Bank adalah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, terdapat Dewan Komisaris yang menjadi pemegang saham Bank, yaitu Bapak Andre Mirza Hartawan, MBA, Ir.

28. SHARE CAPITAL (Continued)

Based on the Annual General Meeting of Shareholders held on May 11, 2023, the shareholders have decided:

- Approval of the Bank's 2022 Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board for Fiscal Year 2022 and Ratification of the Bank's Financial Statements for Fiscal Year 2022;
- Approval of the Use of Net Profit for Fiscal Year 2022;
- Granting of authority to the Board of Commissioners to appoint public accounting firm to audit the financial statements for fiscal year 2023.

As of December 31, 2024 and 2023 the majority shareholder of the Bank is Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia.

As of December 31, 2024 and 2023, one member of the Board of Commissioner is a shareholder of the Bank, namely Mr. Andre Mirza Hartawan, MBA, Ir.

29. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Tambahan modal disetor terdiri dari :

	31 Desember/ December 31, 2024
Jumlah yang diterima dari:	
Penawaran Umum Terbatas V, 2013	1.070.048.797
Penawaran Umum Terbatas IV, 2010	383.216.603
Penawaran Umum Terbatas III, 2005	133.858.215
Penawaran Umum Terbatas II, 2002	662.290
Penawaran Umum Perdana 1993	143.553
Biaya emisi saham yang berasal dari:	
Penawaran Umum Terbatas VI, 2022	(7.791.851)
Penawaran Umum Terbatas V, 2013	(4.854.701)
Penawaran Umum Terbatas IV, 2010	(1.983.700)
Penawaran Umum Terbatas III, 2005	(493.727)
Penawaran Umum Terbatas II, 2002	(1.672.073)
Jumlah	1.571.133.406

29. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Additional paid in capital consists of :

31 Desember/ December 31, 2023	Proceeds from issuance of:
1.070.048.797	Limited Public Offering V, 2013
383.216.603	Limited Public Offering IV, 2010
133.858.215	Limited Public Offering III, 2005
662.290	Limited Public Offering II, 2002
143.553	Initial Public Offering 1993
	Share issuance cost from:
(7.791.851)	Limited Public Offering VI, 2022
(4.854.701)	Limited Public Offering V, 2013
(1.983.700)	Limited Public Offering IV, 2010
(493.727)	Limited Public Offering III, 2005
(1.672.073)	Limited Public Offering II, 2002
1.571.133.406	Total

30. PENGGUNAAN LABA NETO

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2024, para pemegang saham telah memutuskan untuk melakukan penyisihan seluruh laba netto tahun 2023 sebesar Rp13.294.252 ke akun cadangan umum tahun 2023.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 11 Mei 2023, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebesar 18,8% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 atau sebesar Rp5.001.774.

30. APPROPRIATION OF NET INCOME

Based on the Annual General Meeting of Shareholders held on June 27, 2024, the shareholders have decided to establish provision for all net income in 2023 amounting to Rp 13,294,252 to the 2023 general reserve account.

Based on the Annual General Meeting of Shareholders held on May 11, 2023, the shareholders approve the distribution of 18.8% of the Bank's net profit for the 2022 Fiscal Year or equal to Rp5,001,774 as dividends to the Shareholders.

31. PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB

31. REVENUE FROM FUND MANAGEMENT BY BANK AS MUDHARIB

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Rupiah		
Pendapatan dari bagi hasil		
<i>Musyarakah</i>	767.529.652	746.769.654
<i>Mudharabah</i>	40.107.316	62.669.495
Jumlah	807.636.968	809.439.149
Pendapatan dari penjualan		
<i>Murabahah</i>	330.805.815	388.608.232
<i>Istishna</i>	133.892	110.334
Jumlah	330.939.707	388.718.566
Pendapatan dari <i>ijarah</i> -neto	346.893	142.674
Pendapatan usaha utama lainnya		
Pendapatan piutang <i>salam</i>	2.669.457	20.104.731
Pendapatan bonus FASBIS	31.006.791	44.401.511
Pendapatan bagi hasil surat berharga - reksadana	--	521.794
Pendapatan bagi hasil surat berharga	230.691.130	201.198.573
Pendapatan <i>fee</i> wesel ekspor	962.956	493.089
Pendapatan bagi hasil penempatan pada bank lain	1.536.127	4.118.649
Pendapatan bonus Giro Bank	63.272	58.327
Keuntungan penjualan surat berharga	5.453.507	8.743.983
Jumlah	272.383.240	279.640.657
Mata uang asing		
Pendapatan dari bagi hasil		
<i>Musyarakah</i>	149.475.384	68.369.803
<i>Mudharabah</i>	--	--
Jumlah	149.475.384	68.369.803
Pendapatan dari penjualan		
<i>Murabahah</i>	8.493.996	14.742.452
<i>Istishna</i>	--	--
Jumlah	8.493.996	14.742.452
	1.569.276.188	1.561.053.301

Rupiah	
Income from revenue sharing	
<i>Musyarakah</i>	
<i>Mudharabah</i>	
Total	
Income from sales	
<i>Murabahah</i>	
<i>Istishna</i>	
Total	
Income from <i>ijarah</i>-net	
Other main operating income	
<i>Salam receivable income</i>	
<i>Bonus from FASBIS</i>	
<i>Income from revenue sharing - mutual fund</i>	
<i>Income from revenue sharing from marketable securities</i>	
<i>Export bill fee</i>	
<i>Income from revenue sharing from placements with other banks</i>	
<i>Income from CA Placement</i>	
<i>Gain on sale from marketable securities</i>	
Total	
Foreign currencies	
Income from revenue sharing	
<i>Musyarakah</i>	
<i>Mudharabah</i>	
Total	
Income from sales	
<i>Murabahah</i>	
<i>Istishna</i>	
Total	

**31. PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK
SEBAGAI MUDHARIB (Lanjutan)**

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Pendapatan usaha utama lainnya		
Pendapatan bagi hasil surat berharga	551.370.492	547.407.842
Keuntungan penjualan surat berharga	--	41.448.861
Keuntungan MTM surat berharga FVTPL	4.668.265	2.003.622
Pendapatan bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah	--	--
Pendapatan Bonus Giro Bank	70.424	511.499
Pendapatan term deposit BI	8.522.758	962.435
Jumlah	564.631.939	592.334.259
Jumlah	2.133.908.127	2.153.387.560

**31. REVENUE FROM FUND MANAGEMENT BY BANK AS
MUDHARIB (Continued)**

Other main operating income
Income from revenue sharing from marketable securities
Gain on sale from marketable securities
MTM Gain on FVTPL marketable securities
Bonus from Bank Indonesia Sharia Certificate
Income from CA placement
Income from Term Deposit in BI
Total

**32. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA
SYIRKAH TEMPORER**

Akun ini merupakan distribusi *bonus*, *margin* dan bagi
hasil untuk nasabah:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Deposito berjangka <i>mudharabah</i>	1.166.516.059	1.150.782.111
Tabungan <i>mudharabah</i>	152.442.235	152.185.089
Sukuk <i>mudharabah</i> dan MTN subordinasi	394.498.584	489.388.424
Giro <i>mudharabah</i>	54.771.133	42.375.366
Beban bagi hasil pinjaman yang diterima	185.592.635	113.817.284
Jumlah	1.953.820.646	1.948.548.274

**32. THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN OF TEMPORARY
SYIRKAH FUNDS**

This account represents distribution of *bonus*, *margin* and
profit sharing to the customers:

<i>Mudharabah time deposits</i>
<i>Mudharabah saving deposits</i>
<i>Subordinated mudharabah Sukuk and MTN</i>
<i>Mudharabah demand deposit</i>
<i>Fund borrowing profit sharing</i>
Total

33. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Jasa administrasi	597.570.192	690.538.795
Jasa layanan	209.493.337	146.570.618
Jasa transaksi ATM	32.870.427	37.273.003
Jasa transaksi L/C	2.079.972	13.807.421
Lainnya	13.400.049	16.355.913
Jumlah	855.413.977	904.545.750

33. OTHER OPERATING INCOME

<i>Administration fees</i>
<i>Service fee</i>
<i>ATM transaction income</i>
<i>L/C transaction income</i>
<i>Others</i>
Total

33. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA
(Lanjutan)

Jasa administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp597.570.192 dan Rp690.538.795 dimana masing-masing sebesar Rp511.701.959 dan Rp563.836.435 merupakan penerimaan pembayaran atas debitur yang masuk dalam program pengalihan dan penjualan portofolio.

33. OTHER OPERATING INCOME
(Continued)

Administration fees for the years ended December 31, 2024 and 2023 is amounting to Rp597,570,192 and Rp690,538,795, respectively, of which Rp511,701,959 and Rp563,836,435, respectively, represents receipt of payment for debtors included in the portfolio transfer and sale program.

34. BEBAN KARYAWAN

	31 Desember/ December 31, 2024
Gaji, upah, tunjangan dan kesejahteraan karyawan tetap	601.268.111
Pendidikan dan pelatihan	48.503.469
Beban imbalan kerja (Catatan 25)	16.560.734
Jumlah	666.332.314

Rincian gaji dan tunjangan atas kelompok Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif adalah sebagai berikut:

34. EMPLOYEE EXPENSES

	31 Desember/ December 31, 2023	
	574.316.057	Salaries, wages, allowance and benefits for permanent employees
	40.949.374	Education and training
	19.693.009	Employee benefit expense (Note 25)
Jumlah	634.958.440	Total

The details of salaries and allowance of the Board of Directors, Board of Commissioners, Audit Committee, Sharia Supervisory Board and Executive Officers are as follows :

31 Desember/ December 31, 2024					
	Jumlah Pegawai/ Number of employee	Gaji/ Salaries	Tunjangan/ Allowance	Jumlah/ Total	
Dewan Komisaris/ Komite Audit	5	2.830.688	2.411.298	5.241.986	Board of Commissioners/Audit Committee Board of Directors Sharia Supervisory Board Executive officers
Direksi	3	5.212.733	7.688.042	12.900.775	
Dewan Pengawas Syariah	3	630.000	172.703	802.703	
Pejabat Eksekutif	115	32.477.593	47.376.345	79.853.938	
Jumlah	126	41.151.014	57.648.388	98.799.402	Total
31 Desember/ December 31, 2023					
	Jumlah Pegawai/ Number of employee	Gaji/ Salaries	Tunjangan/ Allowance	Jumlah/ Total	
Dewan Komisaris/ Komite Audit	5	4.760.000	4.393.996	9.153.996	Board of Commissioners/Audit Committee Board of Directors Sharia Supervisory Board Executive officers
Direksi	5	8.297.274	12.252.446	20.549.720	
Dewan Pengawas Syariah	3	840.000	241.255	1.081.255	
Pejabat Eksekutif	121	43.649.564	55.995.557	99.645.121	
Jumlah	134	57.546.838	72.883.254	130.430.092	Total

35. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	31 Desember/ December 31, 2024
Asuransi penjaminan pihak ketiga (Catatan 44)	78.406.158
Gaji, upah, tunjangan karyawan <i>outsourcing</i>	83.994.167
Penyusutan aset tetap (Catatan 15)	69.819.357
Sewa	56.290.545
Perbaikan dan pemeliharaan	55.929.262
Listrik, air dan telekomunikasi	54.607.557
Beban kantor	30.356.227
Promosi	14.887.725
Transportasi	10.778.774
Biaya ATM	9.261.638
Penyusutan aset hak guna (Catatan 16)	4.581.043
Perjalanan dinas	2.558.798
Perlengkapan kantor	3.205.632
Asuransi aset tetap	2.192.398
Penyusutan aset ijarah gedung	2.209.691
Jumlah	479.078.972

35. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	31 Desember/ December 31, 2023
<i>Insurance for third parties fund guarantee (Note 44)</i>	90.223.044
<i>Salaries, wages and benefits for outsourced employees</i>	78.020.714
<i>Depreciation of premises and equipment (Note 15)</i>	74.362.548
<i>Rent</i>	60.583.015
<i>Repair and maintenance</i>	56.196.626
<i>Electricity, water and telecommunication</i>	41.860.914
<i>Office expenses</i>	24.736.568
<i>Promotion</i>	16.398.829
<i>Transportation</i>	10.157.151
<i>ATM expenses</i>	8.668.221
<i>Depreciation of right of use assets (Note 16)</i>	4.582.176
<i>Business trip</i>	3.887.106
<i>Office supplies</i>	3.548.761
<i>Insurance for premises and equipment</i>	2.478.085
<i>Building Ijarah Asset Depreciation</i>	--
Total	475.703.758

36. BEBAN (PEMBALIKAN) CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2024
Penempatan pada Bank lain	--
Piutang	(92.999.437)
Pembiayaan <i>Musarakah</i>	(86.216.235)
Pinjaman <i>Qardh</i>	(54.234.839)
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	(4.540.768)
Tagihan akseptasi	(454.636)
Aset terbengkalai	--
Aset lain-lain	25.308.454
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	3.005
Penyertaan Modal Sementara	--
	(213.134.456)
Aset Non Produktif	
Agunan pembiayaan yang diambil alih	--
	--
Jumlah	(213.134.456)

36. PROVISION FOR (REVERSAL OF) IMPAIRMENT LOSSES OF EARNING AND NON EARNING ASSETS

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2023
<i>Placement with other Banks</i>	(418.830)
<i>Receivables</i>	(91.808.252)
<i>Musarakah financing</i>	(57.538.155)
<i>Funds of qardh</i>	30.300.008
<i>Mudharabah financing</i>	978.448
<i>Acceptance receivables</i>	(441.212)
<i>Abandoned assets</i>	(19.902.077)
<i>Other assets</i>	14.519.432
<i>Estimated losses on commitments and contingencies</i>	(732)
<i>Temporary equity participation</i>	25.000.000
	(99.311.370)
Non - Earning Assets	
<i>Foreclosed assets</i>	5.156.882
	5.156.882
Total	(94.154.488)

37. BEBAN OPERASIONAL LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2024
Beban <i>fee collection</i> , dana tabungan giro dan deposito <i>mudharabah</i>	58.612.066
Jasa konsultan	30.717.241
Keperluan umum dan kegiatan kantor	11.813.961
Beban premi asuransi	12.650.577
Iuran keanggotaan	1.123.962
Lain-lain	759.702
Jumlah	115.677.509

37. OTHER OPERATING EXPENSES

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2023	
	42.323.275	Collection fee, saving deposit, demand deposits and <i>mudharabah</i> time deposits fee
	26.703.222	Consultant fees
	9.710.873	General expenses for office activities
	4.984.758	Insurance premiums
	1.315.434	Membership fees
	493.848	Others
Total	85.531.410	

38. PENDAPATAN NON OPERASIONAL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2024
Pendapatan <i>fee</i> DPLK	10.484.365
Pendapatan non usaha	38.038.162
Keuntungan penjualan aset tetap (Catatan 15)	416.365
Jumlah	48.938.892

38. NON OPERATING INCOME

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2023	
	15.713.666	Fee from DPLK
	21.899.392	Non operating income
	1.773.622	Gain on sale of premises and equipment (Note 15)
Total	39.386.680	

39. BEBAN NON OPERASIONAL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2024
Beban pungutan wajib OJK	43.031.603
Beban pajak	10.157.498
Beban penghapusan inventaris	856.602
Sumbangan dan hadiah	428.873
Lain-lain	3.094.583
Jumlah	57.569.159

39. NON OPERATING EXPENSES

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2023	
	27.613.613	FSA mandatory levy expense
	9.330.312	Tax expense
	1.153.848	Loss on sale of equipments
	573.554	Donation and gifts
	4.684.331	Others
Total	43.355.658	

40. LABA PER SAHAM

a. Laba per Saham Dasar

Berikut ini data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar:

	31 Desember/ December 31, 2024
Laba bersih	
Laba bersih untuk perhitungan laba per saham dasar	18.457.535
Jumlah saham	
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba per saham dasar (dalam nilai penuh)	33.345.160.961
Laba Per Saham	0,55

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 13 November 2023, para pemegang saham telah memutuskan melakukan *Reverse Stock Split*, sehingga terdapat perubahan jumlah lembar saham dan nilai nominal saham. *Reverse Stock Split* dilakukan dengan rasio 3:2 (tiga saham digabung menjadi dua saham).

b. Laba per Saham Dilusian

Tidak terdapat laba per saham dilusian karena Bank tidak memiliki efek berpotensi saham dilusian.

41. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Pihak-pihak berelasi terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan kunci, pemegang saham, komisaris PT Syarikat Takaful Indonesia, Pengurus utama Baitul Maal Muamalat dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat, PT Al Ijarah Indonesia Finance berdasarkan PSAK No. 224 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

40. EARNINGS PER SHARE

a. Basic Earnings per Share

The following data is used to compute the basic earnings per share:

	31 Desember/ December 31, 2023	
		Net income
	13.294.252	Net income for computation of basic earnings per share
		Number of shares
	33.345.160.961	Weighted average number of outstanding ordinary shares for computing basic earnings per share (in full amount)
	0,40	Earnings Per Share

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on November 13, 2023, the shareholders have decided the Bank will carry out a *Reverse Stock Split*, so that there will be changes in the number of shares and nominal value of shares. *Reverse Stock Split* is carried out with a ratio of 3:2 (three shares are combined into two shares).

b. Diluted Earnings per Share

There are no diluted earnings per share since there are no potential diluted shares.

41. INFORMATION ON TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Related parties consist of Board of Commissioners, Board of Directors and key employees, Shareholders, Commissioner of PT Syarikat Takaful Indonesia, management of Baitul Maal Muamalat and Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat, PT Al Ijarah Indonesia Finance based on SFAS No. 224 (Revised 2010), "Related Party Disclosures".

41. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

41. INFORMATION ON TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi berelasi

a. Type of relationships and transactions of related parties

Pihak Berelasi / Related Parties	Sifat dari hubungan / Nature of relationship
Badan Pengelola Keuangan Haji	Entitas Induk/ Parent entity
PT Al Ijarah Indonesia Finance	Entitas asosiasi/ Associate
PT Syarikat Tafakul Indonesia	Entitas asosiasi/ Associate

Sifat dari transaksi / Nature of Transaction
Giro wadiah, deposito mudharabah dan sukuk Mudharabah subordinasi/ Wadiah demand deposit, mudharabah time deposits and Subordinated mudharabah sukuk
Piutang murabahah, pembiayaan mudharabah dan musyarakah, penyertaan saham/ Murabahah receivables, mudharabah and musyarakah financing, investment in shares
Giro mudharabah, deposito mudharabah, penyertaan saham/ Mudharabah demand deposit, mudharabah time deposit, investment in shares

b. Transaksi pihak-pihak berelasi

b. Transaction with related parties

Pihak Berelasi / Related Parties	Sifat dari hubungan / Nature of relationship
Direksi, Karyawan kunci/ Directors, Key Employees	Hubungan pengendalian kegiatan Bank / Significant influence on Bank's activities
Komisaris, Dewan pengawas syariah/ Commissioners, Sharia supervisory board	Hubungan pengendalian kegiatan Bank/ Significant influence on Bank's activities
Baitul Maal Muamalat	Hubungan pengendalian melalui karyawan kunci/ Significant influence through key employees

Sifat dari transaksi / Nature of Transaction
Piutang murabahah, pinjaman qardh, pembiayaan musyarakah, giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah / Murabahah receivables, funds of qardh, musyarakah financing, wadiah demand deposits, mudharabah saving deposit, and mudharabah time deposits
Giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah/ Wadiah demand deposit, mudharabah saving deposit, and mudharabah time deposits
Giro wadiah dan deposito mudharabah / Wadiah demand deposit and mudharabah time deposits

41. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

41. INFORMATION ON TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

Dalam kegiatan perbankan, Bank melakukan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

For banking activities, the Bank has performed the following significant transactions with related parties:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Aset		
Piutang <i>murabahah</i> (Catatan 8)		
Karyawan kunci	6.514.259	7.636.329
	<u>6.514.259</u>	<u>7.636.329</u>
Pinjaman <i>qardh</i> (Catatan 9)		
Karyawan kunci	128.760	348.607
Pembiayaan <i>musyarakah</i> (Catatan 11)	--	
Karyawan kunci	14.649.264	11.256.269
	<u>14.649.264</u>	<u>11.256.269</u>
Aset <i>Ijarah</i>		
Karyawan kunci	--	14.563
Penyertaan Saham (Catatan 12)	--	
PT Al Ijarah Indonesia Finance	401.616.000	401.616.000
PT Syarikat Takaful Indonesia	6.095.237	6.095.237
	<u>407.711.237</u>	<u>407.711.237</u>
Investasi pada DPLK Muamalat (Catatan 16)	9.906.092	2.940.458
Jumlah aset dari pihak berelasi	<u>438.909.612</u>	<u>431.943.978</u>
Jumlah aset	<u>60.022.876.676</u>	<u>66.953.058.812</u>
Persentase jumlah aset dari pihak berelasi terhadap jumlah aset	<u>0,73%</u>	<u>0,64%</u>
Liabilitas		
Giro wadiah (Catatan 19)		
Asuransi Takaful/Baitul Maal Muamalat/Dana Pensiun Lembaga Keuangan	23.669.060	15.095.763
Entitas asosiasi	13.900.247	684.189
Entitas induk	715.957	13.591.759
Komisaris	--	--
Karyawan kunci	74.037	37
	<u>38.359.301</u>	<u>29.371.748</u>
Tabungan wadiah		
Asuransi Takaful/Baitul Maal Muamalat/Dana Pensiun Lembaga Keuangan	14.667.476	11.585.427
Karyawan kunci	3.359.885	3.164.877
	<u>18.027.361</u>	<u>14.750.304</u>
Jumlah	<u>56.386.662</u>	<u>44.122.052</u>

Assets
<i>Murabahah receivables (Note 8)</i>
<i>Key Employees</i>
<i>Funds of qardh (Note 9)</i>
<i>Key employees</i>
<i>Musyarakah financing (Note 11)</i>
<i>Key employees</i>
<i>Ijarah Asset</i>
<i>Key employees</i>
<i>Investments in shares (Note 12)</i>
<i>PT Al Ijarah Indonesia Finance</i>
<i>PT Syarikat Takaful Indonesia</i>
<i>Investment in DPLK Muamalat (Note 16)</i>
<i>Total assets from related parties</i>
Total assets
Percentage of total assets from related parties to total assets
Liabilities
Wadiah demand deposits (Note 19)
<i>Asuransi Takaful/ Baitul Maal Muamalat/Dana Pensiun Lembaga Keuangan</i>
<i>Associates</i>
<i>Parent entities</i>
<i>Commissioners</i>
<i>Key employees</i>
Wadiah saving deposits
<i>Asuransi Takaful/ Baitul Maal Muamalat/Dana Pensiun Lembaga Keuangan</i>
<i>Key employees</i>
Total

41. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

41. INFORMATION ON TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Dana syirkah temporer (Catatan 27)			Temporary syirkah fund (Note 27)
Surat Berharga yang Diterbitkan Entitas induk	<u>2.000.000.000</u> 2.000.000.000	<u>2.000.000.000</u> 2.000.000.000	Securities Issued
Deposito <i>mudharabah</i>			Mudharabah time deposits
Entitas induk	6.983.486.535	8.765.255.013	Parent entities
Karyawan kunci	8.838.348	9.266.407	Key employees
Entitas asosiasi	--	10.500.000	Associates
Dewan Pengawas Syariah	--	1.503.550	Sharia Supervisory Board
PT Syarikat Takaful/Baitul Maal Muamalat/Dana Pensiun Lembaga Keuangan/Muamalat Institute	<u>85.513.061</u> 7.077.837.944	<u>397.647.552</u> 9.184.172.522	PT Syarikat Takaful/Baitul Maal Muamalat/ Dana Pensiun Lembaga Keuangan/ Muamalat Institute
Tabungan <i>mudharabah</i>			Mudharabah saving deposits
Asuransi Takaful/Baitul Maal Muamalat/Dana Pensiun			Asuransi Takaful/Baitul Maal Muamalat/Dana Pensiun
Lembaga keuangan	2.809.754	1.375.806	Lembaga keuangan
Karyawan kunci	<u>8.078.198</u> 10.887.952	<u>10.942.315</u> 12.318.121	Key employees
Giro <i>mudharabah</i>			Mudharabah demand deposits
Asuransi Takaful/Baitul Maal Muamalat/Dana Pensiun			Asuransi Takaful/Baitul Maal Muamalat/Dana Pensiun
Lembaga keuangan	<u>3.387.572</u> 9.092.113.468	<u>3.961.233</u> 11.200.451.876	Lembaga keuangan
Estimasi liabilitas imbalan kerja (Catatan 25)			Estimated liabilities for employee benefit (Note 25)
Karyawan kunci	<u>34.280.784</u>	<u>31.429.258</u>	Key employees
Jumlah liabilitas dan dana <i>syirkah</i> temporer dari pihak berelasi	<u>9.126.394.252</u>	<u>11.231.881.134</u>	Total liabilities and temporary syirkah fund from related parties
Jumlah liabilitas dan dana <i>syirkah</i> temporer	<u>54.804.298.345</u>	<u>61.736.672.526</u>	Total liabilities and temporary syirkah fund
Persentase jumlah liabilitas dan dana syirkah temporer pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas dan dana syirkah temporer	16,70%	18,28%	Percentage of total liabilities and temporary syirkah fund from related parties to total liabilities and temporary syirkah fund

42. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Berikut adalah komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024
KOMITMEN	
Liabilitas komitmen	
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	327.981.573
Fasilitas L/C yang masih berjalan	4.041.084
Penerbitan SKBDN	8.516.688
Jumlah liabilitas komitmen	340.539.345
KONTINJENSI	
Tagihan kontinjensi	
Piutang dan pembiayaan hapus buku	1.528.212.865
Margin dalam penyelesaian	--
Jumlah tagihan kontinjensi	1.528.212.865
Liabilitas kontinjensi bank garansi	(35.432.760)
Tagihan kontinjensi - neto	1.492.780.105

Selain liabilitas komitmen dan kontinjensi di atas tidak terdapat liabilitas komitmen dan kontinjensi lainnya.

42. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

The commitments and contingencies as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

31 Desember/ December 31, 2023	COMMITMENTS
	Commitment liabilities
239.900.358	Unused financing facilities
52.578.291	Outstanding irrevocable letters of credit
2.589.074	Issuance of Domestic Letters of Credit
295.067.723	Total commitment liabilities
	CONTINGENCIES
	Contingency receivables
1.535.674.167	Written-off receivables and financing
35.485.280	Margin on non-performing receivables
1.571.159.447	Total contingency receivables
(48.820.775)	Contingency liabilities on bank guarantees
1.522.338.672	Contingency Receivables- net

Other than the above commitment and contingency liabilities, there were no other commitment and contingency liabilities.

43. INFORMASI SEGMENT

a. Segmen Geografis

Berikut ini adalah informasi wilayah geografis (tidak diaudit):

	31 Desember/ December 31, 2024					
	Jabodetabek/ Jabodetabek	Jawa/ Java	Sumatera/ Sumatra	Kalimantan/ Borneo	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total
ASET						
Kas	186.434.921	262.074.309	145.398.788	43.628.984	143.725.978	781.262.980
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.812.314.226	585.000	--	--	--	2.812.899.226
Giro pada bank lain - neto	635.321.474	2.548.916	13.384.122	--	46.984.884	698.239.396
Penempatan pada bank lain - neto	5.474.982	--	--	--	8.994.650	14.469.632
Investasi pada surat berharga - neto	31.127.147.656	--	--	--	--	31.127.147.656
Piutang - neto	1.364.426.752	1.516.994.349	414.727.105	168.509.577	912.199.738	4.376.857.521
Pinjaman qardh - neto	43.216.730	144.257.005	30.973.129	10.394.283	91.715.854	320.557.001
Pembayaran mudharabah - bersih	203.559.753	167.624.340	4.777.003		41.673	376.002.769
Pembayaran musyarakah - bersih	4.734.714.301	3.211.557.874	577.383.487	952.726.123	1.904.507.619	11.380.889.404
Penyertaan saham - neto	322.468.837	--	--	--	--	322.468.837
Tagihan akseptasi - neto	35.870.776	53.455.067	--	--	245.575	89.571.418
Aset yang diperoleh untuk ijarah - neto	1.100.665	3.869.070	204.496	296.783	727.780	6.198.794
Aset tetap - neto	2.183.291.661	571.517.168	320.808.801	91.871.185	199.061.595	3.366.550.410
Aset pajak tangguhan - neto	140.940.759	--	--	--	--	140.940.759
Aset lain-lain - neto	1.388.406.246	809.131.636	33.840.130	1.850.180.119	127.262.742	4.208.820.873
Jumlah aset	45.184.689.739	6.743.614.734	1.541.497.061	3.117.607.054	3.435.468.088	60.022.876.676

43. SEGMENT INFORMATION

a. Geographical Segment

The geographical segment information is as follows (unaudited):

ASSETS
Cash
Current accounts and placements with Bank Indonesia
Current accounts with other banks - net
Placements with other banks - net
Investment in marketable securities - net
Receivables - net
Funds of Qardh - net
Mudharabah Financing - net
Musyarakah Financing - net
Investments in shares - net
Acceptance receivables - net
Assets acquired for ijarah - net
Premises and equipment - net
Deferred tax assets - net
Other assets - net
Total assets

43. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

43. SEGMENT INFORMATION (Continued)

a. Segmen Geografis (lanjutan)

a. Geographical Segment (continued)

	31 Desember / December 31, 2024					
	Jabodetabek/ <i>Jabodetabek</i>	Jawa/ <i>Java</i>	Sumatera/ <i>Sumatra</i>	Kalimantan/ <i>Borneo</i>	Lainnya/ <i>Others</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
LIABILITAS						
Liabilitas segera	292.051.580	3.530.896	1.362.178	654.858	902.150	298.501.662
Simpanan	3.541.970.423	3.032.190.986	1.131.087.937	645.585.778	2.348.993.443	10.699.828.567
Simpanan dari bank lain	6.635.969	15.001.260	3.213.542	488.684	2.322.947	27.662.402
Bagi hasil yang belum dibagikan	34.026.121	9.024.510	3.258.594	1.502.556	2.643.134	50.454.915
Liabilitas kepada Bank Indonesia	1.409.965.320	--	--	--	--	1.409.965.320
Liabilitas akseptasi	576.776	30.508.232	--	--	161.798	31.246.806
Utang pajak	13.994.890	3.295.967	1.354.102	702.602	13.765.749	33.113.310
Pinjaman yang diterima	500.000.000	--	--	--	--	500.000.000
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	327.315	60.612	195.530	168.305	104.721	856.483
Estimasi liabilitas imbalan kerja	144.706.550	--	--	--	--	144.706.550
Liabilitas lain-lain	230.414.760	32.812.568	15.147.931	3.013.347	11.621.546	293.010.152
Jumlah liabilitas	6.174.669.704	3.126.425.031	1.155.619.814	652.116.130	2.380.515.488	13.489.346.167
DANA SYIRKAH TEMPORER						
Bukan bank						
Giro <i>mudharabah</i>	967.492.325	779.924.182	256.274.313	143.866.631	241.271.147	2.388.828.598
Tabungan <i>mudharabah</i>	2.967.490.979	3.056.273.830	1.200.674.712	745.166.664	1.370.818.227	9.340.424.412
Deposito <i>mudharabah</i>	12.324.318.828	3.427.891.578	1.577.738.368	645.152.909	1.304.867.178	19.279.968.861
Bank						
Giro <i>mudharabah</i>	91.311.493	135.562.832	32.159.682	5.483.252	18.967.717	283.484.976
Tabungan <i>mudharabah</i>	59.314.348	545.181.847	87.827.100	4.783.658	64.196.901	761.303.854
Deposito <i>mudharabah</i>	59.079.200	990.604.774	77.700.000	84.782.881	195.950.000	1.408.116.855
Surat Berharga Yang Diterbitkan						
<i>Sukuk mudharabah</i>	4.697.824.621	--	--	--	--	4.697.824.621
<i>Sukuk mudharabah subordinasi</i>	2.000.000.000	--	--	--	--	2.000.000.000
Sertifikat investasi mudharabah antar bank (SIMA)	625.000.000	--	--	--	--	625.000.000
SiPA	530.000.000	--	--	--	--	530.000.000
Jumlah dana syirkah temporer	24.321.831.794	8.935.439.043	3.232.374.175	1.629.235.995	3.196.071.170	41.314.952.177
PENDAPATAN SEGMENT						
Pendapatan dari penjualan	166.908.752	89.964.234	30.824.189	15.134.074	36.602.454	339.433.703
Pendapatan bagi hasil	687.371.214	194.317.874	32.378.523	20.659.587	22.385.154	957.112.352
Pendapatan <i>ijarah</i> - neto	114.221	172.786	20.272	9.955	29.659	346.893
Pendapatan usaha utama lainnya	834.674.135	821.893	--	--	1.519.151	837.015.179
Pendapatan operasional lainnya	766.508.281	47.290.145	24.402.040	9.335.051	55.482.008	903.017.525
Pendapatan non operasional	47.802.652	486.364	249.211	106.507	294.158	48.938.892
Jumlah pendapatan segmen	2.503.379.255	333.053.296	87.874.235	45.245.174	116.312.584	3.085.864.544
BEBAN SEGMENT						
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	1.448.182.295	253.256.123	91.719.564	48.778.655	111.884.009	1.953.820.646
Beban operasional	941.811.682	(40.234.837)	53.194.781	22.264.943	77.023.425	1.054.059.994
Beban non operasional	914.271.898	(356.334.144)	(160.383.936)	(91.321.386)	(248.663.273)	57.569.159
Beban pajak	1.957.210	--	--	--	--	1.957.210
Jumlah beban segmen	3.306.223.085	(143.312.858)	(15.469.591)	(20.277.788)	(59.755.839)	3.067.407.009
LABA (RUGI) BERSIH	(802.843.830)	476.366.154	103.343.826	65.522.962	176.068.423	18.457.535

	31 Desember / December 31, 2023					
	Jabodetabek/ <i>Jabodetabek</i>	Jawa/ <i>Java</i>	Sumatera/ <i>Sumatra</i>	Kalimantan/ <i>Borneo</i>	Lainnya/ <i>Others</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
ASET						
Kas	198.390.952	240.466.119	135.529.545	42.203.993	103.618.464	720.209.073
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	5.010.446.074	33.750	--	--	--	5.010.479.824
Giro pada bank lain - neto	1.386.930.271	2.634.225	16.017.984	--	58.256.422	1.463.838.902
Penempatan pada bank lain - neto	3.760.782	--	--	--	--	3.760.782
Investasi pada surat berharga - neto	30.524.748.886	--	--	--	--	30.524.748.886
Piutang - neto	3.194.624.472	1.230.692.711	387.739.799	154.344.345	659.418.399	5.626.819.726
Pinjaman <i>qardh</i> - neto	204.409.854	96.318.225	39.935.793	13.977.988	216.852.449	571.494.309
Pembayaran <i>mudharabah</i> - bersih	399.361.832	178.727.599	5.808.145	--	1.837.813	585.735.389
Pembiayaan <i>musyarakah</i> - bersih	11.415.906.015	2.569.947.132	357.429.304	232.389.416	580.530.169	15.156.202.036
Penyertaan saham - neto	322.468.837	--	--	--	--	322.468.837
Tagihan akseptasi - neto	49.607.354	29.018.102	--	--	3.120.427	81.745.883
Aset yang diperoleh untuk <i>ijarah</i> - neto	758.309	892.929	191.714	--	62.132	1.905.084
Aset tetap - neto	2.109.582.924	414.319.006	120.474.011	40.709.643	106.411.578	2.791.497.162
Aset pajak tangguhan - neto	138.192.371	--	--	--	--	138.192.371
Aset lain-lain - neto	3.391.802.861	384.382.648	104.698.861	23.450.844	49.625.334	3.953.960.548
Jumlah aset	58.350.991.794	5.147.432.446	1.167.825.156	507.076.229	1.779.733.187	66.953.058.812

LIABILITIES	
Liabilities due immediately	
Deposits	
Deposits from other banks	
Undistributed revenue sharing	
Liabilities to central bank	
Acceptance payables	
Tax payables	
Fund borrowings	
Estimated losses on commitments and contingencies	
Estimated liabilities for employment benefit	
Other liabilities	
Total liabilities	
TEMPORARY SYIRKAH FUNDS	
Non Bank	
Mudharabah demand deposits	
Mudharabah savings deposits	
Mudharabah time deposits	
Bank	
Mudharabah demand deposits	
Mudharabah savings deposits	
Mudharabah time deposits	
Securities Issued	
Mudharabah sukuk	
Subordinated mudharabah sukuk	
Certificate of interbank mudharabah investment (SIMA)	
Shariah based Certificate (SiPA)	
Total temporary syirkah funds	
SEGMENT INCOME	
Income from sales	
Income from revenue sharing	
Income from <i>ijarah</i> - net	
Other main operating income	
Other operating income	
Non operating income	
Total segment income	
SEGMENT EXPENSES	
Third parties' share on return of temporary syirkah funds	
Operating expenses	
Non operating expenses	
Tax expenses	
Total segment expenses	
NET INCOME (LOSS)	

43. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

43. SEGMENT INFORMATION (Continued)

a. Segmen Geografis (lanjutan)

a. Geographical Segment (continued)

	31 Desember / December 31, 2023					
	Jabodetabek/ Jabodetabek	Jawa/ Java	Sumatera/ Sumatra	Kalimantan/ Borneo	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total
LIABILITAS						LIABILITIES
Liabilitas segera	158.040.185	2.303.696	1.204.531	711.816	2.121.985	164.382.213
Simpanan	3.297.838.347	3.249.234.123	1.008.016.846	602.339.278	2.864.820.090	11.022.248.684
Simpanan dari bank lain	14.794.875	26.774.289	1.376.187	308.606	3.039.438	46.293.395
Bagi hasil yang belum dibagikan	62.251.331	10.197.265	3.341.329	1.643.265	5.141.320	82.574.510
Liabilitas kepada Bank Indonesia	2.169.678.250	--	--	--	--	2.169.678.250
Liabilitas akseptasi	1.529.851	6.191.849	--	--	462.773	8.184.473
Utang pajak	12.539.361	4.117.092	1.158.584	576.893	1.699.061	20.090.991
Pinjaman yang diterima	1.000.000.000	--	--	--	--	1.000.000.000
Estimasi kerugian komitmen	324.309	60.613	195.530	168.305	104.721	853.478
Estimasi liabilitas imbalan kerja	127.431.279	--	--	--	--	127.431.279
Liabilitas lain-lain	296.591.727	71.745.240	16.429.027	7.038.312	14.697.453	406.501.759
Jumlah liabilitas	7.141.019.515	3.370.624.167	1.031.722.034	612.786.475	2.892.086.841	15.048.239.032
DANA SYIRKAH TEMPORER						TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Bukan bank						Non Bank
Giro mudharabah	1.003.175.043	594.826.491	223.977.733	43.093.134	265.964.609	2.131.037.010
Tabungan mudharabah	2.980.057.498	3.177.807.865	1.323.993.181	762.385.948	1.339.770.176	9.584.014.668
Deposito mudharabah	17.257.648.453	3.602.871.621	1.480.008.898	675.588.889	1.805.771.846	24.821.889.707
Bank						Bank
Giro mudharabah	21.204.867	70.887.265	24.795.458	21.979.418	26.999.416	165.866.424
Tabungan mudharabah	42.127.477	534.496.595	107.913.974	9.036.287	54.347.006	747.921.339
Deposito mudharabah	156.279.200	770.280.345	93.625.180	91.850.000	642.845.000	1.754.879.725
Surat Berharga Yang Diterbitkan						Securities Issued
Sukuk mudharabah	4.657.824.621	--	--	--	--	4.657.824.621
Sukuk mudharabah subordinasi	2.000.000.000	--	--	--	--	2.000.000.000
Sertifikat investasi mudharabah	475.000.000	--	--	--	--	475.000.000
antar bank (SIPA)	350.000.000	--	--	--	--	350.000.000
Jumlah dana syirkah temporer	28.943.317.159	8.751.170.182	3.254.314.424	1.603.933.676	4.135.698.053	46.688.433.494
PENDAPATAN SEGMENT						SEGMENT INCOME
Pendapatan dari penjualan	190.307.858	101.292.806	32.878.106	18.513.730	60.468.518	403.461.018
Pendapatan bagi hasil	568.073.952	233.332.728	38.497.018	19.528.554	18.376.700	877.808.952
Pendapatan ijarah - neto	59.166	53.213	279	--	30.016	142.674
Pendapatan usaha utama						
lainnya	867.060.313	474.141	27.044	--	4.413.418	871.974.916
Pendapatan operasional lainnya	873.382.429	51.798.660	27.847.504	9.731.804	58.758.442	1.021.518.839
Pendapatan non operasional	37.868.326	430.706	449.581	243.257	394.810	39.886.680
Jumlah pendapatan segmen	2.536.752.044	387.382.254	99.699.532	48.017.345	142.441.904	3.214.293.079
BEBAN SEGMENT						SEGMENT EXPENSES
Hak pihak ketiga atas bagi hasil						Third parties' share on return of temporary
dana syirkah temporer	1.494.257.729	241.309.005	82.127.661	49.121.820	81.732.059	1.948.548.274
Beban operasional	1.018.090.641	62.765.233	20.610.379	23.521.458	83.295.406	1.208.283.117
Beban non operasional	877.533.934	(316.325.392)	(146.332.182)	(90.325.362)	(281.195.340)	43.355.658
Beban pajak	811.778	--	--	--	--	811.778
Jumlah beban segmen	3.390.694.082	(12.251.154)	(43.594.142)	(17.682.084)	(116.167.875)	3.200.998.827
LABA (RUGI) BERSIH	(853.942.038)	399.633.408	143.293.674	65.699.429	258.609.779	13.294.252

b. Segmen Operasi

b. Operating Segment

Berikut ini adalah informasi segmen operasi: (tidak diaudit)

The operating segment information is as follows: (unaudited)

Untuk kepentingan manajemen, Bank mengelompokkan ke dalam 4 (empat) segmen operasional berdasarkan produk sebagai berikut:

For management purposes, Bank organizes 4 (four) operating segments based on products, as follows:

- Segmen Konsumer
- Segmen SME
- Segmen Korporasi
- Segmen Lainnya

- Consumer Segment
- SME Segment
- Corporate Segment
- Others Segment

	31 Desember / December 31, 2024				
	Konsumer/ Consumer	SME/ SME	Korporasi/ Corporate	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total
ASET					ASSETS
Piutang dan Pembiayaan	3.245.315.064	2.370.700.592	11.141.511.912	--	16.757.527.568
CKPN	(40.953.756)	(31.517.586)	(230.749.531)	--	(303.220.873)
Non piutang dan Non pembiayaan	--	--	--	43.568.569.981	43.568.569.981
Jumlah Aset	3.204.361.308	2.339.183.006	10.910.762.381	43.568.569.981	60.022.876.676
LIABILITAS					LIABILITIES
Pendanaan	33.122.520.895	--	11.068.781.610	--	44.191.302.505
Non pendanaan	--	--	31.246.806	15.800.327.365	15.831.574.171
Jumlah Liabilitas	33.122.520.895	--	11.100.028.416	15.800.327.365	60.022.876.676

43. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

43. SEGMENT INFORMATION (Continued)

a. Segmen Geografis (lanjutan)

a. Geographical Segment (continued)

31 Desember / December 31, 2024						
	Konsumer/ Consumer	SME/ SME	Korporasi/ Corporate	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total	
PENDAPATAN						INCOME
Pendapatan pengelolaan dana	388.704.435	230.981.968	849.208.776	665.012.948	2.133.908.127	Revenue from fund management
Pendapatan usaha lainnya	377.702.409	82.115.949	375.595.007	20.000.612	855.413.977	Other operating income
Jumlah pendapatan segmen	766.406.844	313.097.917	1.224.803.783	685.013.560	2.989.322.104	Total segment income
BEBAN						EXPENSE
Hak pihak ketiga atas bagi hasil (Beban)/ Pendapatan CKPN	(751.524.184)	--	(806.797.618)	(395.498.843)	(1.953.820.645)	Third parties' share on return
Beban Usaha Lainnya	33.307.096	29.476.011	150.351.349	--	213.134.456	Allowance for Impairment losses
	(864.725.976)	(70.442.172)	(266.118.726)	(18.304.029)	(1.219.590.903)	Other operating expenses
	(1.582.943.064)				(2.960.277.092)	
Jumlah beban segmen	(1.582.943.064)	(40.966.161)	(922.564.995)	(413.802.872)	(2.960.277.092)	Total segment expense
Pendapatan (beban) non operasional-neto	--	--	--	(8.630.267)	(8.630.267)	Non operating income (expense) - net
Laba sebelum pajak penghasilan	(816.536.220)	272.131.756	302.238.788	262.580.421	20.414.745	Income before tax
Beban pajak	--	--	--	(1.957.210)	(1.957.210)	Tax expenses
Laba Neto	(816.536.220)	272.131.756	302.238.788	260.623.211	18.457.535	Net Income

31 Desember / December 31, 2023						
	Konsumer/ Consumer	SME/ SME	Korporasi/ Corporate	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total	
ASET						ASSETS
Piutang dan Pembiayaan CKPN	3.360.535.386	2.973.996.207	16.128.372.024	--	22.462.903.617	Receivable and financing
Non piutang dan Non pembiayaan	(28.921.589)	(56.602.500)	(437.128.068)	--	(522.652.157)	Allowance for Impairment losses
	--	--	--	45.012.807.352	45.012.807.352	Non receivable and non financing
Jumlah Aset	3.331.613.797	2.917.393.707	15.691.243.956	45.012.807.352	66.953.058.812	Total Assets
LIABILITAS						LIABILITIES
Pendanaan	32.575.542.368	--	17.698.608.584	--	50.274.150.952	Funding
Non pendanaan	--	--	8.184.473	16.670.723.387	16.678.907.860	Non funding
Jumlah Liabilitas	32.575.542.368	--	17.706.793.057	16.670.723.387	66.953.058.812	Total Liabilities
PENDAPATAN						INCOME
Pendapatan pengelolaan dana	388.712.031	263.982.407	825.854.940	674.838.181	2.153.387.559	Revenue from fund management
Pendapatan usaha lainnya	337.291.177	65.996.284	461.347.743	39.910.546	904.545.750	Other operating income
Jumlah pendapatan segmen	726.003.208	329.978.691	1.287.202.683	714.748.727	3.057.933.309	Total segment income
BEBAN						EXPENSE
Hak pihak ketiga atas bagi hasil (Beban)/ Pendapatan CKPN	(690.856.938)	--	(947.160.494)	(310.530.842)	(1.948.548.274)	Third parties' share on return
Beban Usaha Lainnya	14.713.776	13.021.352	66.419.361	--	94.154.489	Allowance for Impairment losses
	(724.579.718)	(159.772.579)	(280.220.201)	(20.892.018)	(1.185.464.516)	Other operating expenses
	(1.400.722.880)				(3.039.858.301)	
Jumlah beban segmen	(1.400.722.880)	(146.751.227)	(1.160.961.334)	(331.422.860)	(3.039.858.301)	Total segment expense
Pendapatan (beban) non operasional-neto	--	--	--	(3.968.978)	(3.968.978)	Non operating income (expense) - net
Laba sebelum pajak penghasilan	(674.719.672)	183.227.464	126.241.349	379.356.889	14.106.030	Income before tax
Beban pajak	--	--	--	(811.778)	(811.778)	Tax expenses
Laba Neto	(674.719.672)	183.227.464	126.241.349	378.545.111	13.294.252	Net Income

Bank tidak menyajikan informasi segmen berdasarkan segmen usaha, karena Bank menjalankan usaha sebagai bank umum syariah dan tidak memiliki kegiatan usaha diluar sektor perbankan.

The Bank does not present business segment information other than banking segment, since the Bank engages mainly in sharia banking activities and has no other significant activities other than banking.

44. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tanggal 22 September 2004, efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan LPS No. 2 tanggal 25 November 2010, simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan simpanan dari bank lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008, tentang "Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan", maka pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 (dalam nilai penuh) untuk per nasabah per bank. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

Beban penjaminan dana pihak ketiga yang dijamin kepada Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) adalah Rp78.406.158 dan Rp90.223.044 masing masing pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Catatan 35).

45. MANAJEMEN RISIKO

Bank dalam menjalankan usahanya senantiasa dihadapkan pada berbagai risiko. Seiring dengan berkembangnya bisnis Bank, risiko yang dihadapi Bank menjadi semakin kompleks. Bank dituntut untuk mampu menerapkan manajemen risiko yang handal agar dapat beradaptasi dengan kompleksitas kegiatan usaha tersebut. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan harus dapat mendukung Bank untuk lebih berhati-hati seiring dengan perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang sangat pesat.

Penerapan manajemen risiko di Bank berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Ruang lingkup manajemen risiko di Bank meliputi:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, termasuk Dewan Pengawas Syariah sebagai bagian dari tata kelola risiko;

44. GOVERNMENT GUARANTEES ON OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS

Pursuant to Law No. 24, dated September 22, 2004, effective September 22, 2005, as amended with Regulation of the Government of the Republic of Indonesia in Lieu of Law No. 3 dated October 13, 2008, the Government established the Indonesia Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjaminan Simpanan/LPS) to guarantee certain liabilities of commercial banks based on the prevailing guarantee programs, in which the guaranteed amount may change if they meet certain specified criteria.

Based on LPS Regulation No. 2 dated November 25, 2010, the deposits guaranteed shall include demand deposits, time deposits, certificates of deposits, savings deposits and deposits from other banks.

Pursuant to Regulation of the Government of the Republic of Indonesia No. 66 of 2008, dated October 13, 2008, regarding "the Amount of Public Savings Guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation", as of December 31, 2024 and 2023, the amount of savings guaranteed by LPS is amounting to Rp2,000,000,000 (in full amount) for each customer, each bank. As of December 31, 2024 and 2023, the Bank is a participant of the government guarantee program.

Insurance premium related to third party funds paid to the Deposit Insurance Institution (LPS) is amounted to Rp78,406,158 and Rp90,223,044 for the years ended December 31, 2024 and 2023, respectively (Note 35).

45. RISK MANAGEMENT

The Bank's business is constantly exposed to various risks. At the course of the development of the Bank's business, risks encountered by the Bank become increasingly complex. Bank is required to implement a reliable risk management in order to adapt to the complexity of the business. The principles of risk management practices should be implemented to support the Bank to be more prudent in the rapid development of business activities and banking operations.

Bank's risk management implementation is based on the Regulation of the Financial Services Authority (FSA) about Implementation of risk management in Sharia Bank & Sharia Business Unit.

Scope of risk management of the Bank covers:

1. *Active supervisory of Board of Commissioners and Board of Directors, including Sharia Supervisory Boards as part of risk governance;*

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

- Ruang lingkup manajemen risiko di Bank meliputi: (Lanjutan)
2. Kecukupan kebijakan, pedoman dan penetapan *limit* risiko;
 3. Kecukupan proses manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; kecukupan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas, serta kecukupan sistem informasi manajemen risiko; dan
 4. Kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup pengendalian internal oleh unit internal audit.

Penerapan manajemen risiko tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya kesadaran risiko pada seluruh lapisan manajemen dan karyawan Bank. Kampanye sadar risiko dimulai dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang berperan aktif menjadi motor penggerak bagi kualitas penerapan manajemen risiko Bank. Peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam manajemen risiko dilakukan antara lain melalui Komite Pemantau Risiko (komite *level*/ Dewan Komisaris) dan Komite Manajemen Risiko (komite *level*/ Direksi). Komite-komite tersebut secara rutin melaksanakan rapat untuk membahas mengenai profil risiko dan manajemen risiko yang harus dilakukan oleh Bank.

Pelaksanaan manajemen risiko melibatkan seluruh unsur dalam organisasi mulai dari Manajemen hingga karyawan pelaksana. Seluruh unsur tersebut berperan aktif dalam konteks "tiga lini pertahanan" manajemen risiko seperti di bawah ini:

1. Lini pertahanan pertama. Garis pertahanan pertama berisi unit kerja pengambil dan pemilik risiko yang melaksanakan fungsi bisnis dan unit kerja pendukung. Unit kerja tersebut dalam melaksanakan aktivitas hariannya berhadapan langsung dengan berbagai jenis dan kemungkinan risiko yang dihadapi Bank. Seluruh fungsi pada garis pertahanan pertama bertanggung jawab dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang melekat pada setiap produk, kegiatan, proses dan sistem yang dijalankan;
2. Lini pertahanan kedua. Garis pertahanan kedua terdiri dari unit kerja manajemen risiko, kepatuhan dan hukum. Unit kerja manajemen risiko bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan strategi manajemen risiko, pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan dari kerangka pengelolaan risiko dan memberikan masukan serta arahan kepada unit kerja bisnis dan unit kerja pendukung mengenai proses pengelolaan risiko, pengukuran risiko dan sistem pelaporan bank; dan
3. Lini pertahanan ketiga. Pada garis ketiga pertahanan berisi unit internal audit. Internal audit berfungsi sebagai unit independen yang bertugas melakukan *risk-based* audit yang memberikan nilai tambah kepada lini pertahanan pertama dan lini pertahanan kedua, untuk memastikan bahwa seluruh elemen Bank telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik termasuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan manajemen Bank Muamalat dan regulasi yang berlaku.

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

Scope of risk management of the Bank covers: (Continued)

2. *Adequacy of policy, procedure and determination of risk limit;*
3. *Adequacy of risk management process that includes identification, measurement, monitoring and control of risk; adequacy of human resources in both quantity and quality, as well as adequacy of risk management information system; and*
4. *Adequacy of risk control system that includes internal control by the internal audit unit.*

Risk management implementation cannot be carried out without the risk awareness at every level of Management and employees of the Bank. Risk awareness campaign is initiated by the Board of Commissioners and the Board of Directors who participate actively in driving employees engagement in implementing the Bank's quality risk management. The active role of the Boards of Commissioners and Directors is conducted through the Risk Oversight Committee (committee at the level of the Board of Commissioners) and the Risk Management Committee (committee at the level of the Board of Directors). These Committees regularly hold meetings to discuss the Bank's risk profile and risk management.

The implementation of risk management engages every element at every level of the organization, starting from the Management to executive employees. All elements are active in the context of the "three lines of defense" of risk management, as follows:

1. *First line of defense. The first line of defense includes the business units and supporting units as risk taker or risk owner, which in daily activities, deal directly with various types and possible risk faced by the Bank. All functions in the first line of defense are responsible for identifying and mitigating the risk inherent in each product, activity, process, and system;*
2. *Second line of defense. In the second line of defense, there are risk management, compliance and legal units. The risk management work unit is responsible for the development and implementation of risk management strategies, the maintenance and continuous development of risk management framework, and to provide input and direction to business units and supporting units regarding the Bank's processes for risk management, risk measurement and reporting systems; and*
3. *Third line of defense. In the third line of defense there is the internal audit unit, which functions as an independent unit that performs risk-based audit activities and provides added value to the first and second lines of defense, in order to ensure that all elements at the Bank have carried out their functions and responsibilities properly, including ensuring the compliance with Bank Muamalat's management policy and applicable regulation.*

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Ketiga lini pertahanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk terciptanya penerapan manajemen risiko yang berkualitas, berjalan dengan efektif dan optimal. Ketiga lini melakukan koordinasi secara rutin untuk memastikan manajemen risiko diterapkan pada seluruh jajaran di internal Bank.

1. Tata Kelola Manajemen Risiko

Tata kelola manajemen risiko dilaksanakan dalam bentuk peran aktif Direksi (fungsinya dilaksanakan oleh Direksi), Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Direksi dan Dewan Komisaris beserta komite yang dibentuk pada level Direksi dan Dewan Komisaris, serta DPS telah menjalankan peran aktif dalam memperkuat tata kelola manajemen risiko dalam rapat berkala yang membahas perkembangan kinerja Bank, termasuk pengelolaan risiko yang dihadapi Bank

2. Sistem Pengendalian Risiko

Untuk memperkuat sistem pengendalian risiko, Bank meningkatkan peran dan efektivitas Satuan Kerja Internal Audit (SKAI) yang dilaksanakan fungsinya oleh unit Internal Audit untuk memberikan nilai tambah bagi proses bisnis dan operasional Bank.

Untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan serta memberikan nilai tambah secara jangka panjang kepada pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya, Bank menerapkan pendekatan yang menyeluruh terhadap sepuluh jenis risiko sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

a. Risiko Kredit (Pembiayaan)

Risiko kredit dalam pembiayaan terkait dengan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai akad atau perjanjian yang telah ditetapkan antara Bank dan nasabah.

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

Those lines of defense are an integral and inseparable part for quality improvement of risk management, working effectively and optimally. The three lines coordinate regularly to ensure that risk management is applied to all levels within the Bank.

1. Risk Management Governance

The risk management governance implemented in the form of the active role of the Board of Directors (its functions are carried out by the Board of Management / BOM), the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board (SSB). The Board of Directors and Board of Commissioners along with committees formed at the level of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as SSB have played an active role in strengthening risk management governance in periodic meetings that discuss the development of the Bank's performance, including risk management faced by the Bank.

2. Risk Control System

To strengthen the risk control system, the Bank increases the role and effectiveness of the Internal Audit Working Unit which is carried out by the Internal Audit unit to provide added value to the Bank's business and operational processes.

To ensure sustainable business growth, as well as provide added value to stockholder and shareholders, the Bank implements risk management that consists of ten types of risks as referred to in the Regulation of Financial Services Authority No. 65/POJK.03/2016, dated December 28, 2016 concerning the Implementation of risk management in Sharia Commercial Bank and Sharia Business Units.

a. Credit (Financing) Risk

Credit risk may arise related to the ability of the debtor to repay the funds borrowed in accordance to the contract that has been agreed by the Bank and debtor.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

a. Risiko Kredit (Pembiayaan) (lanjutan)

Dalam melakukan pengelolaan risiko kredit Bank telah melakukan beberapa perbaikan, baik dalam hal percepatan penyelesaian *bad bank*, penjagaan kualitas *good bank* dan pertumbuhan *new bank*. Beberapa di antara perbaikan yang telah dilakukan oleh Bank meliputi:

1. Pengelolaan *Bad Bank*

- a. Melakukan perbaikan kerangka manajemen risiko kredit antara lain:
 - 1) Mengelola *bad bank* oleh *Financing Business Risk Directorate* yang independen dari unit bisnis *good bank*, yaitu oleh unit *Special Asset Management* dan *Retail Collection Management*;
 - 2) Penetapan limit kewenangan memutuskan pembiayaan *bad bank* dilakukan terpisah dari *good bank* dan dikaji secara berkala;
 - 3) Penyusunan dan implementasi ketentuan pembiayaan bermasalah.
- b. Melakukan perbaikan proses manajemen risiko antara lain:
 - 1) Melakukan *cash collection* dan *asset sale* oleh unit *Special Asset Management* dan *Retail Collection Management*;
 - 2) *Collection* dan *recovery* melalui, antara lain:
 - a) Eksekusi jaminan melalui lelang oleh balai lelang swasta;
 - b) Melakukan perbaikan database agunan;
 - c) Mengimplementasikan *collection scoring* untuk mengelompokkan nasabah *bad bank Retail* dengan kriteria berisiko tinggi dan rendah.

2. Pengelolaan *Good Bank* dan *New Bank*

- a. Melakukan perbaikan kerangka manajemen risiko kredit antara lain melalui:
 - 1) Pengelolaan *good bank* dan *new bank* oleh masing-masing unit kerja bisnis sesuai segmentasi, dengan pemenuhan prinsip *four eye* oleh unit *financing risk* yang independen dari unit bisnis;
 - 2) Penyusunan dan implementasi ketentuan pembiayaan yang mengatur antara lain proses pembiayaan secara *end-to-end*, ketentuan agunan, dan limit kewenangan Komite Pembiayaan, untuk segmen *Enterprise Banking* dan segmen *Islamic Business & SME Banking*, serta *Retail Banking*;

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Credit (Financing) Risk (continued)

In managing credit risk (financing) the Bank has sought several improvements, both in terms of accelerating the settlement of bad banks, safeguarding the quality of good banks and the growth of new banks. Some of the improvements that have been made by the Bank include:

1. Bad Bank Management

- a. Improving the credit risk management framework, among others:
 - 1) Managing bad banks by the Financing Business Risk Directorate which is independent of the good bank business unit, namely by the Special Asset Management and Retail Collection Management units;
 - 2) The determination of the limit of authority to terminate bad bank financing is carried out separately from good banks and is reviewed periodically;
 - 3) Conducting and implementing the non-performing financing policy.
- b. Improving risk management processes, among others:
 - 1) Cash collection and asset sale by Special Asset Management and Retail Collection Management units;
 - 2) Collection and recovery through, among others:
 - a) Executing collateral through auction by private auction houses;
 - b) Collateral database enhancement;
 - c) Implementing collection scoring to group bad retail bank customers with high and low risk criteria.

2. Management of Good Bank and New Bank

- a. Improving the credit risk management framework by, among others:
 - 1) Managing good banks and new banks by each business work unit according to segmentation, with the fulfillment of the four-eye principle by financing risk units that are independent of business units;
 - 2) Preparing and implementing financing provisions that govern the end-to-end financing process, collateral provisions, and limits of authority of the Financing Committee, for the Enterprise Banking segment and the Islamic Business & SME Banking segment, as well as Retail Banking;

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Kredit (Pembiayaan) (lanjutan)

a. Credit (Financing) Risk (continued)

2. Pengelolaan *Good Bank* dan *New Bank* (lanjutan)

2. Management of *Good Bank* and *New Bank* (continued)

- a. Melakukan perbaikan kerangka manajemen risiko kredit antara lain melalui:(lanjutan)
 - 3) Pengesahan atas *Target Market* dan *Financing Allocation Limit* (FAL) untuk tahun 2025, serta *Target Market* dan *Risk Assessment Criteria* untuk segmen *Enterprise Banking*, IBS & SME serta *Retail Banking*.
- b. Melakukan perbaikan proses manajemen risiko kredit antara lain dengan:
 - 1) Melakukan optimalisasi pembiayaan di tahun 2025 dengan proyek *Consumer Financing Business Acceleration Project*, sebagai berikut:
 - a) Proyek dilaksanakan untuk menyempurnakan fitur produk dan RAC, proses bisnis serta sumber daya manusia, channel dan organisasi yang mendukung pembiayaan Consumer;
 - b) Dilakukan pengembangan pembiayaan KPR yang lebih inklusif bekerja sama dengan developer perumahan skala kecil-menengah untuk mengejar target pertumbuhan bisnis KPR.
 - 2) Meningkatkan pertumbuhan portofolio Retail di segmen Islamic Banking & SME dengan fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan dari organisasi Muhammadiyah dengan RAC yang disempurnakan;
 - 3) Mengimplementasikan pelatihan terkait risiko kredit untuk meningkatkan kompetensi karyawan, diantaranya dengan:
 - a) *Consumer Financing Forum - Finish Strong 2024*;
 - b) *Training Solusi Emas Hijrah*;
 - c) *Refreshment* produk *Consumer Financing*;
 - d) *Sales Foundation Training*;
 - e) *SPRINT* (Sosialisasi Produk Retail dan Tematik).
- c. Melakukan perbaikan sistem pengendalian risiko kredit dalam bentuk kaji ulang atas ketentuan produk dan program pembiayaan yang dikembangkan oleh unit bisnis.

- a. *Improving the credit risk management framework by, among others: (continued)*
 - 3) *Ratifying Target Market and Financing Allocation Limit (FAL) for 2025, and also the Target Market and Risk Assessment Criteria of Enterprise Banking, IBS & SME, and Retail Banking segments for 2025.*
- b. *Improving the credit risk management process by, among others:*
 - 1) *Optimizing financing in 2025 with Consumer Financing Business Acceleration Project, as follows:*
 - a) *Projects are implemented to improve product and RAC features, business processes and human resources, channels and organizations that support consumer financing;*
 - b) *More inclusive mortgage financing is being developed in collaboration with small to medium-scale housing developers to achieve mortgage business growth targets.*
 - 2) *Increasing the growth of the Retail portfolio in the Islamic Banking & SME segment with a focus on the education and health sectors of Muhammadiyah organizations with enhanced RAC;*
 - 3) *Implementing training related to credit risk to improve employee competence, including:*
 - a) *Consumer Financing Forum - Finish Strong 2024;*
 - b) *Solusi Emas Hijrah Training;*
 - c) *Refreshment of Consumer Financing product;*
 - d) *Sales Foundation Training;*
 - e) *SPRINT (Sosialisasi Produk Retail dan Tematik/Retail and Thematic Product Socialization).*
- c. *Improving the credit risk control system in the form of a review of product provisions and financing programs developed by business units.*

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Kredit (Pembiayaan) (lanjutan)

a. Credit (Financing) Risk (continued)

(i) Kualitas aset keuangan

(i) Financial assets quality

Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko pembiayaan (diluar cadangan kerugian penurunan nilai) (tidak diaudit):

The table below shows financial assets quality per classification of assets for all financial assets exposed to financing risk (gross of allowance for impairment losses) (unaudited):

31 Desember 2024 / December 31, 2024						
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past-due but not impaired</i>		Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
	Tingkat tinggi/ <i>High grade</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>				
ASET						
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.812.899.226	--	--	--	--	2.812.899.226
Giro dan penempatan pada bank lain	712.709.028	--	--	--	--	712.709.028
Investasi pada surat berharga	31.127.147.656	--	--	--	--	31.127.147.656
Piutang <i>murabahah</i>	2.302.336.140	1.411.383.264	558.069.673	247.998.659	4.519.787.736	
Piutang <i>istishna</i>	936.303	--	--	--	936.303	
Piutang <i>ijarah</i>	--	964	--	1.034.095	1.035.059	
Pinjaman <i>qardh</i>	179.668.103	51.638.176	16.614.287	80.591.401	328.511.967	
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	376.726.554	--	885.382	2.331.788	379.943.724	
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	7.479.712.917	1.478.497.306	2.356.865.117	212.237.439	11.527.312.779	
Penyertaan saham	--	6.095.237	401.616.000	--	407.711.237	
Tagihan akseptasi	--	58.391.854	105.665.369	--	164.057.223	
Aset lain-lain *)	267.433.627	200.275.287	--	--	467.708.914	
Jumlah	45.259.569.554	3.206.282.088	3.439.715.828	544.193.382	52.449.760.852	
						Total

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima, setoran jaminan dan tagihan lain-lain.

*) Other assets consist of income receivables, security deposits and other receivables.

31 Desember 2023 / December 31, 2023						
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past-due but not impaired</i>		Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
	Tingkat tinggi/ <i>High grade</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>				
ASET						
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	5.010.479.824	--	--	--	--	5.010.479.824
Giro dan penempatan pada bank lain	1.467.599.684	--	--	--	--	1.467.599.684
Investasi pada surat berharga	30.524.748.886	--	--	--	--	30.524.748.886
Piutang <i>murabahah</i>	2.810.694.971	1.801.679.211	990.084.600	249.155.416	5.851.614.198	
Piutang <i>istishna</i>	1.241.639	--	--	--	1.241.639	
Piutang <i>ijarah</i>	--	--	--	1.069.847	1.069.847	
Pinjaman <i>qardh</i>	431.085.079	59.751.975	63.531.193	79.236.174	633.604.421	
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	590.635.481	--	1.039.893	2.177.795	593.853.169	
Pembiayaan <i>musarakah</i>	10.446.073.021	1.684.043.912	3.146.465.772	104.937.638	15.381.520.343	
Penyertaan saham	--	6.095.237	401.616.000	--	407.711.237	
Tagihan akseptasi	--	49.195.359	104.420.041	--	153.615.400	
Aset lain-lain *)	253.206.247	137.976.581	--	--	391.182.828	
Jumlah	51.535.764.832	3.738.742.275	4.707.157.499	436.576.870	60.418.241.476	

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima, setoran jaminan dan tagihan lain-lain.

*) Other assets consist of income receivables, security deposits and other receivables.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Kredit (Pembiayaan) (lanjutan)

Kualitas pembiayaan didefinisikan sebagai berikut:

Tingkat tinggi

- (a) Pembiayaan, piutang dan pinjaman yaitu pembiayaan, piutang dan pinjaman kepada debitur dengan riwayat pembayaran yang sangat baik dan tidak pernah menunggak sepanjang jangka waktu pembiayaan; debitur dengan riwayat tidak pernah direstrukturisasi, debitur dengan tingkat stabilitas dan keragaman yang tinggi; memiliki akses setiap saat untuk memperoleh pendanaan dalam jumlah besar dari pasar terbuka; memiliki kemampuan membayar yang kuat dan rasio-rasio neraca yang konservatif.
- (b) Giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro dan penempatan pada bank lain yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah, institusi Pemerintah Daerah, bank yang terdaftar di bursa serta transaksi dengan bank yang memiliki reputasi baik dengan tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.
- (c) Investasi pada surat berharga yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, efek-efek dan obligasi yang termasuk dalam *investment grade* dengan *rating* minimal idBBB (Pefindo), BBB+ (S&P), Baa1 (Moody's) atau BBB+ (Fitch).
- (d) Tagihan akseptasi yaitu tagihan kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo, dan memiliki kapasitas finansial yang kuat dalam hal pembayaran kembali seluruh kewajibannya secara tepat waktu.
- (e) Aset lain-lain yaitu piutang kepada Pemerintah (termasuk Bank Indonesia) atau Pemerintah Daerah seperti piutang pendapatan yang masih akan diterima.

Tingkat standar

- (a) Giro dan penempatan pada bank lain yaitu giro atau penempatan pada bank yang tidak terdaftar di bursa.
- (b) Penyertaan saham yaitu penyertaan pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa dan memiliki tingkat kinerja keseluruhan yang baik.
- (c) Investasi pada surat berharga yaitu surat berharga yang termasuk dalam *non-investment grade* dengan *rating* minimal idBB (Pefindo), BBB- (S&P), Baa3 (Moody's) atau BBB- (Fitch).

a. Credit (Financing) Risk (continued)

Financing quality is defined as follows:

High grade

- (a) *Financing, receivables, and funds are financing, receivables and funds to borrowers with very satisfactory track record of financing repayment and whose accounts did not turn as due during the term of the financing; borrowers whose accounts has never been restructured; borrowers with high degree of stability and diversity; has access to raise substantial amounts of funds through public market at any time; very strong debt service capacity and has conservative balance sheet ratios.*
- (b) *Current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts and placements with other banks are current accounts or placements with the Sovereign, local government institutions, banks listed in the stock exchange and transaction with reputable banks with low probability of insolvency.*
- (c) *Investments in marketable securities are securities issued by Government and investment grade securities and bonds with a rating of at least idBBB (Pefindo), BBB+ (S&P), Baa1 (Moody's) or BBB+ (Fitch).*
- (d) *Acceptances receivable are receivables from third parties that have not yet matured and has a strong financial capacity in terms of repayment of all obligations in time.*
- (e) *Other assets are receivables from Sovereign (including Bank Indonesia) or local government such as income receivables.*

Standard grade

- (a) *Current accounts and placements with other banks represent current accounts or placements with non-listed banks.*
- (b) *Investment in shares are investment in companies that are listed on the Stock Exchange and has good performance as a whole.*
- (c) *Investments in marketable securities represent non-investment grade securities with a rating of at least idBB (Pefindo), BBB-(S&P), Baa3 (Moody's) or BBB- (Fitch).*

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

a. Risiko Kredit (Pembiayaan) (lanjutan)

Tingkat standar (lanjutan)

- (d) Pembiayaan, piutang dan pinjaman yaitu pembiayaan, piutang dan pinjaman kepada debitur dengan riwayat pembayaran yang baik; debitur dengan riwayat pernah direstrukturisasi, akses terbatas untuk memperoleh pendanaan dalam jumlah besar dari pasar terbuka, tingkat pendapatan dan kinerja keseluruhan tidak stabil, memiliki kemampuan membayar yang cukup.
- (e) Penyertaan saham yaitu penyertaan pada perusahaan yang tidak terdaftar pada Bursa dan memiliki tingkat kinerja keseluruhan yang baik.
- (f) Tagihan akseptasi yaitu tagihan kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo, dan memiliki kapasitas finansial yang memadai.
- (g) Aset lain-lain yaitu aset keuangan lainnya selain piutang pendapatan yang masih akan diterima kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah seperti tagihan rupa-rupa kepada pihak ketiga lainnya.

Berdasarkan PSAK 107, aset keuangan yang telah jatuh tempo ditentukan ketika debitur gagal melakukan pembayaran sesuai jadwal. Tabel di bawah menunjukkan *aging analysis* terhadap pembiayaan, piutang dan pinjaman yang diberikan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai:

31 Desember / December 31, 2024				
	≤ 30 hari / days	31 - 60 hari/ days	61 - 90 hari/ days	Jumlah/ Total
Piutang <i>murabahah</i>	776.486	15.802.836	541.490.354	558.069.676
Piutang <i>istishna</i>				--
Piutang <i>ijarah</i>				--
Pinjaman <i>qardh</i>	41.703	6.046.295	10.526.288	16.614.286
Pembiayaan <i>mudharabah</i>			885.382	885.382
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	45.846.147	151.342.080	2.159.676.890	2.356.865.117
Jumlah	46.664.336	173.191.211	2.712.578.914	2.932.434.461

Murabahah receivables
Istishna receivables
Ijarah receivables
Funds of qardh
Mudharabah financing
Musyarakah financing
Total

31 Desember / December 31, 2023				
	≤ 30 hari / days	31 - 60 hari/ days	61 - 90 hari/ days	Jumlah/ Total
Piutang <i>murabahah</i>	15.393.252	6.427.978	968.263.370	990.084.600
Piutang <i>istishna</i>	--	--	--	--
Piutang <i>ijarah</i>	--	--	--	--
Pinjaman <i>qardh</i>	46.553	--	63.484.640	63.531.193
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	--	--	1.039.893	1.039.893
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	69.947.618	36.887.099	3.039.631.055	3.146.465.772
Jumlah	85.387.423	43.315.077	4.072.418.958	4.201.121.458

Murabahah receivables
Istishna receivables
Ijarah receivables
Funds of qardh
Mudharabah financing
Musyarakah financing
Total

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Credit (Financing) Risk (continued)

Standard grade (continued)

- (d) Financing, receivables and loans represent financing, receivables and loans to debtors with an average track record of financing repayment; debtors whose accounts have been restructured, having limited access to raise substantial amounts of funds through public market, having volatility of earnings and overall performance, having adequate debt service capacity.
- (e) Investments in shares represent investments in companies that are not listed in the Stock Exchange and that have good performance as a whole.
- (f) Acceptance receivables are receivables from third parties that have not yet matured and have adequate financial capacity.
- (g) Other assets are financial assets other than income receivables from Sovereign or local government such as other receivables to third parties.

In accordance with SFAS 107, financial asset is due when the repayment is default. The table below shows aging analysis of financing, receivables and loans that are past-due but not impaired:

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Kredit (Pembiayaan) (lanjutan)

a. Credit (Financing) Risk (continued)

Tingkat standar (lanjutan)

Standard grade (continued)

(ii) Analisa konsentrasi risiko

(ii) Risk concentration analysis

(a) Sektor geografis

(a) Geographical sectors

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur pembiayaan yang dikategorikan berdasarkan wilayah geografis pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Pengelompokan wilayah geografis berdasarkan tempat beroperasinya bisnis Bank yang sekaligus menggambarkan potensial bisnis wilayah masing-masing :

The following table shows the details of financing exposures categorized by geographic area as of December 31, 2024 and 2023. Geographic grouping is based on the Bank's business operations which also illustrates the business potential of each region:

31 Desember / December 31, 2024						
	Jabodetabek/ Jabodetabek	Jawa/ Java	Sumatera/ Sumatra	Kalimantan/ Borneo	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total
ASET						
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.812.314.226	585.000				2.812.899.226
Giro dan penempatan pada bank lain	640.796.456	2.548.916	13.384.122		55.979.534	712.709.028
Investasi pada surat berharga	31.127.147.656					31.127.147.656
Piutang murabahah	2.366.716.792	1.122.054.357	373.563.528	130.317.047	527.136.012	4.519.787.736
Piutang istishna		514.486			421.817	936.303
Piutang ijarah	179.058	595.262	61.287		199.452	1.035.059
Piutang qardh	112.632.518	127.226.411	27.683.417	10.667.335	50.302.286	328.511.967
Pembiayaan mudharabah	217.833.146	157.243.228	4.825.256		42.094	379.943.724
Pembiayaan musyarakah	9.546.391.519	1.247.303.493	315.860.152	210.389.838	207.367.777	11.527.312.779
Penyertaan saham	407.711.237					407.711.237
Tagihan akseptasi	110.356.581	53.455.067			245.575	164.057.223
Aset lain-lain *)	462.610.785	3.869.070	204.496	296.783	727.780	467.708.914
Jumlah	47.804.689.974	2.715.395.290	735.582.258	351.671.003	842.422.327	52.449.760.852
Cadangan kerugian penurunan nilai						(462.949.078)
Bersih						51.986.811.774
Rekening Administratif						
LIABILITAS						
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	290.700.798	16.953.650	2.095.332	--	18.231.793	327.981.573
SKBDN yang diterbitkan	--	8.516.688	--	--	--	8.516.688
Fasilitas L/C yang masih berjalan	--	4.041.084	--	--	--	4.041.084
Bank garansi yang diterbitkan	16.329.991	10.809.304	4.350.000	352.365	3.591.100	35.432.760
Jumlah	307.030.789	40.320.726	6.445.332	352.365	21.822.893	375.972.105
31 Desember / December 31, 2023						
	Jabodetabek/ Jabodetabek	Jawa/ Java	Sumatera/ Sumatra	Kalimantan/ Borneo	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total
ASET						
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	5.010.446.074	33.750	--	--	--	5.010.479.824
Giro dan penempatan pada bank lain	1.390.693.478	2.634.225	16.017.984	--	58.253.997	1.467.599.684
Investasi pada surat berharga	30.524.748.886	--	--	--	--	30.524.748.886
Piutang murabahah	3.385.329.365	1.243.760.625	392.736.361	159.319.377	670.468.470	5.851.614.198
Piutang istishna		796.513	--	--	445.126	1.241.639
Piutang ijarah	213.843	595.262	61.287	--	199.455	1.069.847
Piutang qardh	207.127.185	151.555.692	41.007.349	14.205.739	219.708.456	633.604.421
Pembiayaan mudharabah	404.472.084	182.344.575	5.866.814	--	1.169.696	593.853.169
Pembiayaan musyarakah	11.588.374.036	2.602.871.562	365.684.650	236.414.422	588.175.673	15.381.520.343
Penyertaan saham	407.711.237	--	--	--	--	407.711.237
Tagihan akseptasi	121.022.235	29.472.738	--	--	3.120.427	153.615.400
Aset lain-lain *)	390.036.053	892.929	191.714	--	62.132	391.182.828
Jumlah	53.430.174.476	4.214.957.871	821.566.159	409.939.538	1.541.603.432	60.418.241.476
Cadangan kerugian penurunan nilai						(679.764.074)
Bersih						59.738.477.402
Rekening Administratif						
LIABILITAS						
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	239.900.358	--	--	--	--	239.900.358
SKBDN yang diterbitkan	2.589.074	--	--	--	--	2.589.074
Fasilitas L/C yang masih berjalan	52.578.291	--	--	--	--	52.578.291
Bank garansi yang diterbitkan	8.642.607	30.058.836	4.700.000	350.000	5.069.332	48.820.775
Jumlah	303.710.330	30.058.836	4.700.000	350.000	5.069.332	343.888.498

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Kredit (Pembiayaan) (lanjutan)

a. Credit (Financing) Risk (continued)

(ii) Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

(ii) Risk concentration analysis (continued)

(b) Sektor industri

(b) Industrial sectors

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur pembiayaan pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

The following table provides the details of the financing exposure at the carrying amounts categorized by industrial sector as of December 31, 2024 and 2023:

31 Desember / December 31, 2024					
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank dan lembaga keuangan lainnya/ Banks and other financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals	Jumlah/ Total
ASET					
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.812.899.226	--	--	--	2.812.899.226
Giro dan penempatan pada bank lain	--	712.709.028	--	--	712.709.028
Investasi pada surat berharga	10.054.669.891	--	21.072.477.765	--	31.127.147.656
Piutang murabahah	98.161.501	3.958.770	2.513.622.330	1.904.045.135	4.519.787.736
Piutang istishna	--	--	--	936.303	936.303
Piutang ijarah	--	--	--	1.035.059	1.035.059
Piutang qardh	--	--	124.957.187	203.554.780	328.511.967
Pembiayaan mudharabah	--	40.625.473	339.318.251	--	379.943.724
Pembiayaan musyarakah	3.184.377.970	4.089.963	6.826.237.313	1.512.607.533	11.527.312.779
Penyertaan saham	--	--	407.711.237	--	407.711.237
Tagihan akseptasi	--	--	164.057.223	--	164.057.223
Aset lain-lain *)	--	--	467.708.914	--	467.708.914
Jumlah	16.150.108.588	761.383.234	31.916.090.220	3.622.178.810	52.449.760.852
Cadangan kerugian penurunan nilai					(462.949.078)
Bersih					51.986.811.774
Rekening Administratif					
LIABILITAS					
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	--	--	327.981.573	--	327.981.573
Penerbitan SKBDN	--	--	8.516.688	--	8.516.688
Fasilitas L/C yang masih berjalan	--	--	4.041.084	--	4.041.084
Bank garansi yang diterbitkan	--	--	35.432.760	--	35.432.760
Jumlah	--	--	375.972.105	--	375.972.105

ASSETS	
Current accounts and placements with Bank Indonesia	
Current accounts and placements with other banks	
Investments in marketable securities	
Murabahah receivable	
Istishna receivable	
Ijarah receivable	
Funds of qardh	
Mudharabah financing	
Musyarakah financing	
Investment in shares	
Acceptance receivables	
Other assets*)	
Total	
Allowance for impairment losses	
Net	
Administrative Accounts	
LIABILITIES	
Unused financing facility	
Domestic Letters of Credit issued	
Outstanding L/C	
Bank guarantees issued	
Total	

31 Desember / December 31, 2023					
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank dan lembaga keuangan lainnya/ Banks and other financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals	Jumlah/ Total
ASET					
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	5.010.479.824	--	--	--	5.010.479.824
Giro dan penempatan pada bank lain	--	1.467.599.684	--	--	1.467.599.684
Investasi pada surat berharga	9.213.840.322	8.200.000.000	13.110.908.564	--	30.524.748.886
Piutang murabahah	98.991.501	6.232.061	3.698.001.542	2.048.389.094	5.851.614.198
Piutang istishna	--	--	--	1.241.639	1.241.639
Piutang ijarah	--	--	--	1.069.847	1.069.847
Piutang qardh	--	--	349.411.705	284.192.716	633.604.421
Pembiayaan mudharabah	--	34.626.019	559.227.150	--	593.853.169
Pembiayaan musyarakah	3.524.805.418	4.295.630	10.324.064.445	1.528.354.850	15.381.520.343
Penyertaan saham	--	--	407.711.237	--	407.711.237
Tagihan akseptasi	--	--	153.615.400	--	153.615.400
Aset lain-lain *)	--	--	391.182.828	--	391.182.828
Jumlah	17.848.117.065	9.712.753.394	28.994.122.871	3.863.248.146	60.418.241.476
Cadangan kerugian penurunan nilai					(679.764.074)
Bersih					59.738.477.402
Rekening Administratif					
LIABILITAS					
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	--	--	239.900.358	--	239.900.358
Penerbitan SKBDN	--	--	2.589.074	--	2.589.074
Fasilitas L/C yang masih berjalan	--	--	52.578.291	--	52.578.291
Bank garansi yang diterbitkan	--	--	48.820.775	--	48.820.775
Jumlah	--	--	343.888.498	--	343.888.498

ASSETS	
Current accounts and placements with Bank Indonesia	
Current accounts and placements with other banks	
Investments in marketable securities	
Murabahah receivable	
Istishna receivable	
Ijarah receivable	
Funds of qardh	
Mudharabah financing	
Musyarakah financing	
Investment in shares	
Acceptance receivables	
Other assets*)	
Total	
Allowance for impairment losses	
Net	
Administrative Accounts	
LIABILITIES	
Unused financing facility	
Domestic Letters of Credit issued	
Outstanding L/C	
Bank guarantees issued	
Total	

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Kredit (Pembiayaan) (lanjutan)

a. Credit (Financing) Risk (continued)

(iii) Penurunan nilai aset keuangan:

(iii) Impairment of financial assets:

(a) Giro dan penempatan pada Bank Indonesia

(a) Current accounts and placements with Bank Indonesia

Per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

As of December 31, 2024 and 2023, these financial assets are not individually or collectively impaired.

(b) Giro dan penempatan pada bank lain

(b) Current accounts and placements with other banks

Per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

As of December 31, 2024 and 2023, these financial assets are not individually or collectively impaired.

(c) Investasi pada surat berharga

(c) Investment in securities

Seluruh investasi pada surat berharga pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dikelompokkan lancar.

All investment in securities as of December 31, 2024 and 2023 are classified as current.

(d) Pembiayaan, piutang dan pinjaman

(d) Financing, receivables and loans

Per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, rincian pembiayaan, piutang dan pinjaman yang tidak mengalami penurunan nilai dan yang mengalami penurunan nilai adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2024 and 2023, the breakdown of not impaired and impaired financing, receivables and funds are as follow:

31 Desember / December 31, 2024						
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai / <i>Neither past due nor impaired</i>		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past-due but not impaired</i>		Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
	Tingkat tinggi/ <i>High grade</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>				
Jasa-Jasa Dunia Usaha	753.792.251	54.424.946	571.259.372	20.518.206	1.399.994.775	<i>Business services</i>
Perdagangan, Restoran, dan Hotel	92.282.503	939.098.253	289.354.584	79.593.436	1.400.328.776	<i>Trading, restaurants and hotels</i>
Industri Pengolahan	1.192.974.758	608.871.873	535.665.826	59.740.534	2.397.252.991	<i>Manufacturing</i>
Konstruksi	354.635.456	241.260.004	249.795.455	193.567	845.884.482	<i>Construction</i>
Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi	1.519.091.121	254.842.055	102.745.193	199.576.777	2.076.255.146	<i>Transport, cargo storage and communication</i>
Jasa-Jasa Sosial/Masyarakat	1.641.260.171	89.793.090	89.730.721	10.592.261	1.831.376.243	<i>Social/public services</i>
Pertambangan	529.382.019	153.136.658	490.914.899	39.729.998	1.213.163.574	<i>Mining</i>
Listrik, Gas, dan Air	1.146.949.390	372.576.765	385.384.493	73.539.088	1.978.449.736	<i>Water, gas and electricity</i>
Pertanian, Kehutanan dan Sarana Pertanian	216.492.820	76.715	30.012.832	474.996	247.057.363	<i>Agriculture, forestry and agricultural facilities</i>
Lain-Lain	2.892.519.528	227.439.351	187.571.084	60.234.519	3.367.764.482	<i>Others</i>
Jumlah	10.339.380.017	2.941.519.710	2.932.434.459	544.193.382	16.757.527.568	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai					(303.220.787)	Allowance for impairment losses
Bersih					16.454.306.781	Net

Business services

Trading, restaurants and hotels

Manufacturing

Construction

Transport, cargo storage and communication

Social/public services

Mining

Water, gas and electricity

Agriculture, forestry and agricultural facilities

Others

Total

Allowance for impairment losses

Net

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Kredit (Pembiayaan) (lanjutan)

a. Credit (Financing) Risk (continued)

(iii) Penurunan nilai aset keuangan: (lanjutan)

(iii) Impairment of financial assets: (continued)

(d) Pembiayaan, piutang dan pinjaman
(lanjutan)

(d) Financing, receivables and loans (ontinued)

31 Desember / December 31, 2023						
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai / <i>Neither past due nor impaired</i>		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past-due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Tingkat tinggi/ <i>High grade</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>				
Jasa-Jasa Dunia Usaha	1.738.027.958	793.961.417	569.164.189	20.057.044	3.121.210.608	<i>Business services</i>
Perdagangan, Restoran, dan Hotel	932.587.841	355.028.637	1.098.314.011	82.939.094	2.468.869.583	<i>Trading, restaurants and hotels</i>
Industri Pengolahan	1.416.271.474	1.348.392.237	245.902.478	59.740.534	3.070.306.723	<i>Manufacturing</i>
Konstruksi	468.734.956	6.579.857	487.154.762	148.546	962.618.121	<i>Construction</i>
Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi	2.633.886.574	213.664.178	193.199.349	198.220.517	3.238.970.618	<i>Transport, cargo storage and communication</i>
Jasa-Jasa Sosial/Masyarakat	2.074.494.552	66.809.215	139.158.447	10.597.291	2.291.059.505	<i>Social/public services</i>
Pertambangan	664.702.774	131.484.397	550.850.201	--	1.347.037.372	<i>Mining</i>
Listrik, Gas, dan Air	1.158.738.110	391.721.941	534.028.852	--	2.084.488.903	<i>Water, gas and electricity</i>
Pertanian, Kehutanan dan Sarana Pertanian	316.900.717	418.924	98.897.763	16.235.626	432.453.030	<i>Agriculture, forestry and agricultural facilities</i>
Lain-Lain	2.875.385.234	237.414.295	284.451.406	48.638.218	3.445.889.153	<i>Others</i>
Jumlah	14.279.730.190	3.545.475.098	4.201.121.458	436.576.870	22.462.903.616	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai					(522.652.157)	Allowance for impairment losses
Bersih					21.940.251.459	Net

(iv) Analisa eksposur maksimum terhadap risiko pembiayaan setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko pembiayaan lainnya.

(iv) Analysis of maximum exposure to financing risk is made after considering the effect of collateral and other financing enhancements.

Nilai tercatat dari aset keuangan Bank selain pembiayaan yang diberikan menggambarkan eksposur maksimum atas risiko pembiayaan.

The carrying value of the Bank's financial assets other than financing best represents the maximum exposure to financing risk.

Untuk pembiayaan yang diberikan, Bank menggunakan agunan untuk meminimalkan risiko pembiayaan.

With regard to financing, the Bank uses collateral to minimize financing risk.

Berdasarkan klasifikasi, pembiayaan Bank dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu:

Financing are classified into two major categories, namely:

1. *Secured financing;*
2. *Partially secured financing.*

1. *Secured financing;*
2. *Partially secured financing.*

Secured financing, Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminakan sesuai skema pembiayaan. Jenis dari agunan terdiri dari:

Secured financing, the Bank determines the type and value of collateral in accordance with the financing scheme. The types of collateral are as follows:

- a. *Physical collateral*, berupa tanah dan bangunan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan properti;
- b. *Financial collateral*, berupa simpanan (tabungan, giro, deposito), surat berharga, dan emas.

- a. *Physical collateral*, such as land and buildings, proof of vehicle ownership, and property;
- b. *Financial collateral*, such as time deposit (savings, demand deposit, time deposit), securities, and gold.

Apabila terjadi *default* (gagal bayar), Bank akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban *counterparty*.

In the event of a default, Bank will use the collateral as the last resort in recovering its investment.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

a. Risiko Kredit (Pembiayaan) (lanjutan)

- (iv) Analisa eksposur maksimum terhadap risiko pembiayaan setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko pembiayaan lainnya (lanjutan)

Partially secured financing terdiri dari pembiayaan untuk golongan berpenghasilan tetap, pembiayaan untuk para pensiunan dan pembiayaan konsumen lainnya. Dalam pembayaran kewajibannya, *partially secured financing* umumnya dilakukan melalui pemotongan penghasilan secara otomatis. Dengan demikian, tingkat risiko dari *partially secured financing* tidak sebesar nilai tercatat pembiayaannya.

Mitigasi risiko pembiayaan untuk *partially secured financing* terdiri dari surat keputusan pengangkatan pegawai dan surat keterangan pensiun.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar terdiri dari risiko nilai tukar dan risiko *benchmark* suku bunga (*on reporting* maupun *off reporting*), akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

Tujuan utama Bank mengelola risiko pasar adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan modalan Bank.

Sebagai bank devisa, Bank memiliki aset dan liabilitas dalam valuta asing, sehingga nilai dari aset dan liabilitas tersebut selalu terkait dengan perubahan kurs valuta asing terhadap Rupiah. Bank menghadapi risiko nilai tukar, apabila terjadi fluktuasi atas nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah.

Aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank dalam mengelola dan meningkatkan kualitas profil risiko pasar adalah:

1. Melakukan perbaikan kerangka manajemen risiko pasar, antara lain:
 - a. Transaksi yang mengandung risiko pasar dilakukan oleh unit bisnis *Global Market*
 - b. SKMR melaksanakan fungsi sebagai *middle office* dalam transaksi pasar
2. Melakukan perbaikan proses manajemen risiko antara lain:
 - a. Memastikan fungsi *middle office* telah memenuhi kaidah *four eyes principles* dengan adanya fungsi *maker* dan *checker* dalam aktivitas *treasury* dan *mark to market*;
 - b. Melakukan pengembangan *end to end treasury system* yang baru;

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Credit (Financing) Risk (continued)

- (iv) Analysis of maximum exposure to financing risk is made after considering the effect of collateral and other financing enhancements (continued)

Partially secured financing are financing for fixed income employees, financing for retirees, and financing for other consumers. In their payment obligations, *partially secured financing* are generally made through automatic payroll deduction. Hence, maximum exposure to financing risk is lower than the carrying value.

Financing risk mitigation for *partially secured financing* consists of employee recruitment letter and certificate of retirement.

b. Market Risk

Market risk includes exchange rate risk, interest rate risk *benchmark* (on and off reporting), as the result of overall changes in market conditions.

The Bank's main objective in managing market risk is to minimize the possibility of negative impact due to changes in market conditions on the Bank's assets and capital.

As a foreign exchange bank, the Bank has assets and liabilities in foreign currencies, which are vulnerable to foreign exchange rate changes. The Bank may face exchange rate risk, if there is a fluctuation of foreign exchange rate against Rupiah.

Risk management activities carried out by the Bank in managing and improving the quality of market risk profiles include:

1. Improving the market risk management framework, among others:
 - a. Transactions containing market risk are carried out by the *Global Market* business unit;
 - b. Risk Management Working Unit performs the function of a *middle office* in market transactions.
2. Improving the risk management process by, among others:
 - a. Ensuring that the *middle office* function has met the *four eyes principles* with the *maker* and *checker* functions in *treasury* and *mark to market* activities;
 - b. Developing a new *end to end treasury system*;

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

Aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank dalam mengelola dan meningkatkan kualitas profil risiko pasar adalah: (lanjutan)

2. Melakukan perbaikan proses manajemen risiko antara lain: (lanjutan)
 - c. Memantau rasio Posisi Devisa Neto (PDN) agar tidak melanggar ketentuan regulator dan disampaikan secara harian kepada Direksi;
 - d. Melakukan *stress test* risiko pasar setiap semester yang terakhir dilakukan dengan data per Oktober 2024;
 - e. Melakukan penyesuaian atas status dealer sesuai kondisi dan kebutuhan.
3. Melakukan perbaikan sistem pengendalian risiko, antara lain:
 - a. Memantau transaksi *foreign exchange, money market, dan fixed income*, terutama terkait dengan penetapan batas nominal transaksi dan batas kerugian transaksi;
 - b. Memantau pergerakan kurs yang dapat diterima Bank (*rate tolerance*);
 - c. Menetapkan besaran *risk factor* yang telah disetujui oleh *Board of Management*.

c. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Dalam mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank adalah:

1. Melakukan perbaikan kerangka manajemen risiko likuiditas, antara lain :
 - a. Memantau kecukupan likuiditas yang dilaksanakan oleh unit *Global Market*;
 - b. Melaksanakan strategi pemenuhan likuiditas;
 - c. SKMR melaksanakan fungsi sebagai *middle office* dalam transaksi likuiditas.
2. Melakukan perbaikan proses manajemen risiko likuiditas, antara lain:
 - a. Melakukan pemantauan likuiditas secara harian melalui pemantauan *cash flow* Bank dan rasio-rasio kunci untuk pemantauan risiko likuiditas (*Liquidity Key Risk Indicator*), termasuk kajian atas konsentrasi 50 deposan inti;

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Market Risk (continued)

Risk management activities carried out by the Bank in managing and improving the quality of market risk profiles include: (continued)

2. *Improving the risk management process by, among others: (continued)*
 - c. *Monitoring the Net Open Position (NOP) ratio so as not to violate regulatory regulations and submitted daily to the Board of Management;*
 - d. *Conducting a stress test of market risk every semester, last carried out with data as of October 2024;*
 - e. *Making adjustments to the dealer status according to conditions and needs.*
3. *Improving the risk control system by, among others:*
 - a. *Monitoring foreign exchange, money market, and fixed income transactions, especially related to setting transaction nominal limits and transaction loss limits;*
 - b. *Monitoring the Bank's acceptable exchange rate movements (rate tolerance);*
 - c. *Determining the amount of risk factor that has been approved by the Board of Management.*

c. Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk due to the Bank's inability to fulfill its obligations as they mature from cash flow and/or high-quality liquid assets without affecting the Bank's operations and financial condition.

To anticipate the liquidity risk, the Bank undertakes the following risk management actions:

1. *Improving the liquidity risk management framework by, among others:*
 - a. *Monitoring liquidity adequacy implemented by Global Market unit;*
 - b. *Implementing liquidity strategies;*
 - c. *Risk Management Working Unit performing the function of a middle office in liquidity transactions.*
2. *Improving the liquidity risk management process by, among others:*
 - a. *Monitoring liquidity daily through monitoring the Bank's cash flow and key ratios for monitoring liquidity risk (Liquidity Key Risk Indicator), including a review of the concentration of 50 core depositors;*

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Dalam mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank adalah: (lanjutan)

2. Melakukan perbaikan proses manajemen risiko likuiditas, antara lain: (lanjutan)
 - b. Memantau pemenuhan ketentuan regulator yang berkaitan dengan likuiditas, seperti Giro Wajib Minimum (GWM), Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), dan lain-lain;
 - c. Meningkatkan likuiditas Bank, antara lain dengan:
 1. Mengoptimalkan funding di segmen Retail melalui:
 - a) Meningkatkan jumlah end user maupun dana kelolaan sebagai Bank Penyalur Gaji (BPG) untuk ASN;
 - b) Meluncurkan program Umrah Hemat Bareng Muamalat (UMAT) untuk meningkatkan jumlah transaksi terkait ibadah umroh;
 - c) Meluncurkan beberapa promosi guna menunjang optimalisasi funding.
 2. Memperkuat layanan meningkatkan aktivasi transaksi nasabah, antara lain melalui:
 - a) Penambahan fitur versi terbaru Muamalat DIN (MDIN), antara lain:
 - Pembayaran tiket maskapai penerbangan Super Air Jet;
 - Penambahan wilayah baru untuk pembayaran tagihan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 - Pembayaran internet XL Home;
 - Pembayaran iuran lingkungan perumahan Sinarmas Land;
 - Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) melalui fitur Hijrah Tour.
 - b) Implementasi layanan tarik tunai setor menggunakan QRIS di merchant dan ATM.
 3. Meningkatkan transaksi *cash management* melalui program:
 - a) MADINA Activation Program (MAP);
 - b) Virtual Account Intensity Program (VIP);
 - c) MADINA Class Training
3. Melakukan perbaikan sistem pengendalian risiko likuiditas melalui kajian atas risiko likuiditas Bank melalui antara lain perhitungan *stress test* likuiditas, *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) dan kajian atas ambang batas (threshold) profil risiko likuiditas.

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Liquidity Risk (continued)

To anticipate the liquidity risk, the Bank undertakes the following risk management actions: (continued)

2. Improving the liquidity risk management process by, among others: (continued)
 - b. Monitoring compliance with regulatory regulation related to liquidity, such as reserve requirements, macroprudential liquidity buffers, macroprudential intermediation ratios and others;
 - c. Increasing the Bank's liquidity by, among others :
 1. Optimizing funding in the Retail segment by:
 - a) Increasing the amount of end user and balance as one of salary payment banks for state civil employees;
 - b) Launching Umrah Hemat Bareng Muamalat (UMAT) program to increase transaction related to umroh pilgrimage;
 - c) Launching several promotions to support funding optimization.
 2. Strengthening services to increase customer transaction activation by, among others :
 - a) Adding new feature on Muamalat DIN (MDIN) newest version, such as:
 - Super Air Jet airplane ticket payment;
 - New region on Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)'s bill payment;
 - XL Home internet payment;
 - Sinarmas Land environment management fee payment;
 - Umroh package payment from Umroh Pilgrimage Organizer through Hijrah Tour features.
 - b) Implementing cash withdrawal services using QRIS at merchants and ATMs.
 3. Increasing cash management transactions through:
 - a) MADINA Activation Program (MAP);
 - b) Virtual Account Intensity Program (VIP);
 - c) MADINA Class Training.
3. Improving the liquidity risk control system through an assessment of the Bank's liquidity risk through, among others, the calculation of liquidity stress tests, Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR) and studies of the threshold of the liquidity risk profile.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*), sebagai berikut:

The tables below present information about the mapping of financial assets and liabilities within a certain time scale (*maturity buckets*) based on their remaining maturity, as follows:

31 Desember / December 31, 2024						
	Sampai dengan 1 bulan/ <i>Up to 1 month</i>	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ <i>More than 1 month up to 3 months</i>	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ <i>More than 3 months up to 1 year</i>	Lebih dari 1 tahun/ <i>More than 1 year</i>	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ <i>Others without maturity</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
ASET						ASSETS
Kas					781.262.980	781.262.980
Giro dan penempatan pada						
Bank Indonesia	1.275.000.000	--	--	--	1.537.899.226	2.812.899.226
Giro dan penempatan pada						
bank lain	10.445.882	4.023.750	--	698.239.396	--	712.709.028
Investasi pada surat						
berharga	260.455.931	125.767.848	1.405.508.802	29.335.415.075	--	31.127.147.656
Piutang <i>murabahah</i>	285.626.951	152.348.400	675.337.743	3.406.474.642	--	4.519.787.736
Piutang <i>istishna</i>	--	--	--	936.303	--	936.303
Piutang <i>ijarah</i>	1.035.059	--	--	--	--	1.035.059
Piutang <i>qardh</i>	78.253.750	12.368.731	22.487.395	215.402.091	--	328.511.967
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	2.219.889	23.609.080	13.730.147	340.384.608	--	379.943.724
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	356.755.183	480.580.975	1.347.180.301	9.342.796.320	--	11.527.312.779
Penyertaan saham	--	--	--	--	407.711.237	407.711.237
Tagihan akseptasi	105.910.943	3.531.705	54.407.113	207.462	--	164.057.223
Aset lain-lain *)	990.685	21.649	1.642.184	3.544.276	461.510.120	467.708.914
Cadangan kerugian penurunan						
nilai aset produktif	(255.916.343)	(7.302.717)	(29.520.731)	(170.209.287)	--	(462.949.078)
Jumlah aset	2.120.777.930	794.949.421	3.490.772.954	43.173.190.886	3.188.383.563	52.768.074.754
LIABILITAS						LIABILITIES
Liabilitas segera	298.501.662	--	--	--	--	298.501.662
Simpanan	10.699.828.567	--	--	--	--	10.699.828.567
Simpanan dari bank lain	27.662.402	--	--	--	--	27.662.402
Bagi hasil yang belum dibagikan	50.454.915	--	--	--	--	50.454.915
Liabilitas Kepada Bank Indonesia	1.409.965.320	--	--	--	--	1.409.965.320
Liabilitas akseptasi	738.574	1.767.396	28.740.836	--	--	31.246.806
Pinjaman yang diterima	--	--	500.000.000	--	--	500.000.000
Liabilitas lain-lain	295.902.412	--	--	--	148.048.674	443.951.086
Jumlah liabilitas	12.783.053.852	1.767.396	528.740.836	--	148.048.674	13.461.610.758
DANA SYIRKAH TEMPORER						TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Giro <i>mudharabah</i>	2.672.313.574	--	--	--	--	2.672.313.574
Tabungan <i>mudharabah</i>	10.101.728.266	--	--	--	--	10.101.728.266
Deposito <i>mudharabah</i>	14.897.194.096	3.153.419.640	2.637.471.980	--	--	20.688.085.716
Surat Berharga Yang Diterbitkan	1.155.000.000	--	--	6.697.824.621	--	7.852.824.621
Jumlah dana syirkah temporer	28.826.235.936	3.153.419.640	2.637.471.980	6.697.824.621	--	41.314.952.177
Jumlah Liabilitas dan dana syirkah temporer	41.609.289.788	3.155.187.036	3.166.212.816	6.697.824.621	148.048.674	54.776.562.935
Perbedaan Jatuh Tempo	(39.488.511.858)	(2.360.237.615)	324.560.138	36.475.366.265	3.040.334.889	(2.008.488.181)

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima, setoran jaminan dan tagihan lain-lain.

**) Liabilitas lain-lain terdiri atas setoran jaminan yang diterima.

*) Other assets consist of income receivables, security deposits and other receivables.

**) Other liabilities consist of security deposits received.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*), sebagai berikut: (lanjutan)

31 Desember / December 31, 2023						
	Sampai dengan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan	Lebih dari	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/	Jumlah/
	1 bulan/	3 bulan/	1 tahun/	1 tahun/		
	Up to 1 month	More than 1 month up to 3 months	More than 3 months up to 1 year	More than 1 year	Others without maturity	Total
ASET						
Kas					720.209.073	720.209.073
Giro dan penempatan pada Bank						
Indonesia	2.483.970.000	--	--	--	2.526.509.824	5.010.479.824
Giro dan penempatan pada bank lain	3.563.518	--	--	1.464.036.166	--	1.467.599.684
Investasi pada surat berharga	300.000.000	306.161.493	444.022.884	29.474.564.509	--	30.524.748.886
Piutang murabahah	398.494.665	239.068.155	979.256.170	4.234.795.208	--	5.851.614.198
Piutang istishna	--	--	--	1.241.639	--	1.241.639
Piutang ijarah	1.069.847	--	--	--	--	1.069.847
Piutang qardh	121.369.114	66.191.509	93.845.459	352.198.339	--	633.604.421
Pembiayaan mudharabah	3.429.669	1.597.329	125.413.015	463.413.156	--	593.853.169
Pembiayaan musyarakah	355.567.478	1.366.986.772	1.237.445.657	12.421.520.436	--	15.381.520.343
Penyertaan saham	--	--	--	--	407.711.237	407.711.237
Tagihan akseptasi	111.491.635	40.737.891	1.169.185	216.689	--	153.615.400
Aset lain-lain *)	1.026.437	252.158.492	229.686	1.696.716	136.071.497	391.182.828
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	(527.849.622)	(106.693.199)	(14.443.419)	(9.227.789)	(21.550.045)	(679.764.074)
Jumlah aset	3.252.132.741	2.166.208.442	2.866.938.637	48.404.455.069	3.768.951.586	60.458.686.475
LIABILITAS						
Liabilitas segera	164.382.213	--	--	--	--	164.382.213
Simpanan	11.022.248.684	--	--	--	--	11.022.248.684
Simpanan dari bank lain	46.293.395	--	--	--	--	46.293.395
Bagi hasil yang belum dibagikan	82.574.510	--	--	--	--	82.574.510
Liabilitas kepada Bank Indonesia	2.169.678.250	--	--	--	--	2.169.678.250
Liabilitas akseptasi	1.685.181	6.499.292	--	--	--	8.184.473
Pinjaman yang diterima	--	--	1.000.000.000	--	--	1.000.000.000
Liabilitas lain-lain	427.966.061	--	--	--	126.911.446	554.877.507
Jumlah liabilitas	13.914.828.294	6.499.292	1.000.000.000	--	126.911.446	15.048.239.032
DANA SYIRKAH TEMPORER						
Giro mudharabah	2.296.903.434	--	--	--	--	2.296.903.434
Tabungan mudharabah	10.331.936.007	--	--	--	--	10.331.936.007
Deposito mudharabah	19.190.438.135	4.321.542.042	3.064.789.255	--	--	26.576.769.432
Surat Berharga Yang Diterbitkan	825.000.000	--	--	6.657.824.621	--	7.482.824.621
Jumlah dana syirkah	32.644.277.576	4.321.542.042	3.064.789.255	6.657.824.621	--	46.688.433.494
Jumlah Liabilitas dan dana syirkah temporer	46.559.105.870	4.328.041.334	4.064.789.255	6.657.824.621	126.911.446	61.736.672.526
Perbedaan Jatuh Tempo	(43.306.973.129)	(2.161.832.892)	(1.197.850.618)	41.746.630.448	3.642.040.140	(1.277.986.051)

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima, setoran jaminan dan tagihan lain-lain.

**) Liabilitas lain-lain terdiri atas setoran jaminan yang diterima.

c. Liquidity Risk (continued)

The tables below present information about the mapping of financial assets and liabilities within a certain time scale (*maturity buckets*) based on their remaining maturity, as follows: (continued)

*) Other assets consist of income receivables, security deposits and other receivables.

**) Other liabilities consist of security deposits received.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Bank secara berkelanjutan melakukan pengendalian dan perbaikan terhadap profil risiko operasional, dengan cara:

1. Melakukan perbaikan kerangka manajemen risiko operasional antara lain:
 - a. Mengembangkan dan memelihara kerangka kerja, kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko operasional secara berkala;
 - b. Mengembangkan operational risk tools untuk menggantikan aplikasi yang lama terkait dengan *Loss Event Database*, *Key Risk Indicator* dan *Risk Control Self-Assessment* yang digunakan oleh Bank sebagai alat bantu untuk melakukan pemantauan risiko;
 - c. Implementasi *risk appetite* dan *risk tolerance* sebagai penetapan limit atas kerugian risiko operasional;
 - d. Mengoptimalkan peran *Operational Risk Awareness* (ORION) dalam melakukan identifikasi potensi risiko di masing-masing *Risk Taking Unit* serta melaporkan kejadian risiko operasional yang telah terjadi secara berkala;
 - e. Melaksanakan program budaya risiko secara berkala kepada seluruh karyawan.
2. Melakukan perbaikan proses manajemen risiko operasional antara lain terkait:

a. Sumber Daya Manusia

- 1) Melaksanakan strategi anti fraud melalui antara lain:
 - a) Menerapkan ISO 37001 terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dimana Bank telah menerima sertifikat tersebut;
 - b) Melakukan sosialisasi implementasi ISO 37001:2016 terkait SMAP di beberapa cabang secara *offline* dan *online*;
 - c) Mengimplementasikan *Fraud Detection System* (FDS) untuk mendeteksi transaksi mencurigakan;
 - d) Melakukan *surprise visit* ke cabang yang berisiko *fraud* tinggi.

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Operational Risk

Operational risk is a risk caused by insufficiency or malfunction of internal processes, human error, system failure, or the presence of external problems that affect the Bank's operations.

The Bank continuously controls and improves operational risk profile, by means of:

1. *Improving the operational risk management framework by, among others;*
 - a. *Developing and maintaining operational risk management frameworks, policies and procedures on a regular basis;*
 - b. *Developing operational risk tools to replace old applications related to the Loss Event Database, Key Risk Indicator and Risk Control Self-Assessment which are used by the Bank as tools to monitor risk;*
 - c. *Implementing risk appetite and risk tolerance as a limit for operational risk losses;*
 - d. *Optimizing the role of Operational Risk Champion (ORION) to identify potential operational risk in each Risk Taking Unit and periodically report operational risk event that occurred;*
 - e. *Implementing risk culture program periodically for all employees.*
2. *Improving operational risk management processes, among others, related to:*

a. Human Resources

- 1) *Implementing anti-fraud strategies by, among others:*
 - a) *Implementing ISO 37001 related to the Anti-Bribery Management System (ABMS) where the Bank has received the certificate;*
 - b) *Socializing the implementation of ISO 37001:2016 related to SMAP in several branches offline and online;*
 - c) *Implementing a Fraud Detection System (FDS) to detect suspicious transactions;*
 - d) *Doing surprise visit to a branch that is at high risk of fraud.*

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

d. Risiko Operasional (lanjutan)

Bank secara berkelanjutan melakukan pengendalian dan perbaikan terhadap profil risiko operasional, dengan cara: (lanjutan)

2. Melakukan perbaikan proses manajemen risiko operasional antara lain terkait: (lanjutan)

a. Sumber Daya Manusia (lanjutan)

- 2) Meningkatkan kompetensi karyawan atas produk/aktivitas serta pelayanan di Bank diantaranya dengan:
 - a) Sertifikasi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR);
 - b) Program Muamalat *Internal Certification for Frontliners*;
 - c) Program pelatihan mengenai sosialisasi atas produk/aktivitas baru maupun refreshment atas produk/aktivitas yang sudah ada.

b. Proses Internal

- 1) Mengimplementasikan ISO 27001 terkait Sistem Keamanan Manajemen Informasi;
- 2) Melakukan perbaikan kelengkapan dokumentasi pembiayaan melalui pemantauan pemenuhan dokumen pembiayaan;

c. Infrastruktur dan Teknologi

- 1) Penguatan sistem keamanan TI diantaranya dengan:
 - a) Pemasangan *firewall* di kantor pusat dan beberapa kantor cabang;
 - b) Penggunaan sistem pendeteksi dan pencegahan gangguan atau *Intrusion Detection and Prevention System* (IDPS);
 - c) Penggunaan *Endpoint Detection and Response* (EDR).
- 2) Perbaikan stabilitas sistem di antaranya dengan:
 - a) Mengimplementasikan *system monitoring network*;
 - b) Preventif *maintenance* menggunakan vendor untuk pemeliharaan infrastruktur *Data Center* (DC).
- 3) Penguatan infrastruktur TI guna mengganti infrastruktur yang sudah *end of support* di antaranya dengan:
 - a) Implementasi aplikasi Proswitch;
 - b) Pengadaan server Hyper-V, server VMWare dan Oracle Linux.

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Operational Risk (continued)

The Bank continuously controls and improves operational risk profile, by means of: (continued)

2. *Improving operational risk management processes, among others, related to: (Continued)*

a. Human Resources (continued)

- 2) *Improving employee competence on products/activities and services at the Bank including:*
 - a) *Payment System Certification and Rupiah Currency Management (SPPUR);*
 - b) *Muamalat Internal Certification for Frontliners Program;*
 - c) *Training programs on socialization of new products/activities as well as refreshment of existing products/activities.*

b. Internal Process

- 1) *Implementing ISO 27001 related to Information Management Security System;*
- 2) *Improving the completeness of financing documentation by monitoring the fulfillment of TBO/ER financing documents;*

c. Infrastructure and Technology

- 1) *Strengthening the IT security system including:*
 - a) *Installation of firewalls at the head office and several branch offices;*
 - b) *Use of an Intrusion Detection and Prevention System (IDPS);*
 - c) *Use of Endpoint Detection and Response (EDR).*
- 2) *Improving system stability by, among others :*
 - a) *Implementing a network monitoring system;*
 - b) *Implementing preventive maintenance that uses vendors to maintain Data Center (DC) infrastructure.*
- 3) *Strengthening IT infrastructure to replace infrastructure that has been end-of-support, including:*
 - a) *Proswitch application implementation;*
 - b) *Procurement of Hyper-V servers, VMWare servers and Oracle Linux.*

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

d. Risiko Operasional (lanjutan)

Bank secara berkelanjutan melakukan pengendalian dan perbaikan terhadap profil risiko operasional, dengan cara: (lanjutan)

2. Melakukan perbaikan proses manajemen risiko operasional antara lain terkait: (lanjutan)

d. Kejadian Eksternal

- 1) Melakukan perbaikan risiko keamanan dan ketahanan siber untuk mengantisipasi serangan siber, antara lain dengan:
 - a) Implementasi *risk appetite* dan *risk tolerance* atas risiko siber;
 - b) Pengadaan email security filtering atas malicious dan email phishing;
 - c) Review dan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan pengamanan siber.
- 2) Melakukan perbaikan proses *Business Continuity Management* (BCM) antara lain dengan:
 - a) Pelaksanaan simulasi BCP potensi Gempa Bumi dan Megatrast dengan metode *call tree*, *evacuation test*, *application test* dan *telecommunication*;
 - b) Penyusunan prosedur Kebocoran Data.
3. Melakukan perbaikan sistem pengendalian risiko operasional melalui kajian risiko operasional dan memberikan rekomendasi atas kecukupan pengendalian internal oleh SKMR.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Bank secara berkelanjutan melakukan pengendalian dan perbaikan terhadap profil risiko hukum, dengan cara:

1. Melakukan perbaikan kerangka manajemen risiko hukum, antara lain:
 - a. Mengelola risiko hukum Bank dilakukan dan dikoordinasikan oleh unit *Corporate Legal*;
 - b. Melakukan pengelolaan mitra notaris Bank, antara lain :
 - 1) Menyediakan kemitraan notaris untuk kebutuhan transaksi pembiayaan dan melakukan penginian daftar notaris berdasarkan hasil pemantauan kemitraan notaris apabila terjadi kondisi tertentu;
 - 2) Menyampaikan informasi kepada unit kerja terkait atas komitmen dan integritas notaris mitra dalam memenuhi kewajibannya;
 - 3) Unit operasional pembiayaan memantau kinerja notaris yang telah diberikan order pengikatan pembiayaan.

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Operational Risk (continued)

The Bank continuously controls and improves operational risk profile, by means of: (continued)

2. *Improving operational risk management processes, among others, related to: (Continued)*

d. External Events

- 1) *Improving cyber security and resilience to anticipate cyber attacks by, among others:*
 - a) *Implementing risk appetite and risk tolerance for cyber risk;*
 - b) *Procuring email security filtering for malicious and phishing emails;*
 - c) *Conducting regular review and monitoring of the implementation of cyber security.*
- 2) *Improving the Business Continuity Management (BCM) process by, among others:*
 - a) *Implementing the BCP Earthquake and Megatrast simulation using call tree, evacuation test, application test, and telecommunication method;*
 - b) *Formulating Data Breach procedures.*
3. *Improving the operational risk control system through operational risk assessment and providing recommendations on the adequacy of internal control by Risk Management Working Unit.*

e. Legal Risk

Legal risk is the risk due to lawsuits and/or weaknesses of juridical aspects.

The Bank continuously controls and improves its legal risk profile, by actions such as:

1. *Improving the legal risk management framework by, among others:*
 - a. *Managing the Bank's legal risk, which is carried out and coordinated by the Corporate Legal unit;*
 - b. *Managing the Bank's notary partners by, among others:*
 - 1) *Providing notary partnerships for financing transaction needs and updating notary lists based on the results of monitoring the notary partnerships in the event of certain conditions;*
 - 2) *Conveying information to related work units on the commitment and integrity of partner notaries in fulfilling their obligations;*
 - 3) *Monitoring the performance of notaries who have been given financing binding orders, conducted by the Financing operational unit.*

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

e. Risiko Hukum (lanjutan)

Bank secara berkelanjutan melakukan pengendalian dan perbaikan terhadap profil risiko hukum, dengan cara: (lanjutan)

1. Melakukan perbaikan kerangka manajemen risiko hukum, antara lain: (lanjutan)
 - c. Mengesahkan Petunjuk Teknis Reviu Perjanjian, *Memorandum of Understanding* dan *Non-Disclosure Agreement*, dan Prosedur Pengajuan dan Penunjukan Advokat Rekanan.
2. Melakukan perbaikan proses manajemen risiko hukum antara lain:
 - a. Memberikan tinjauan risiko hukum atas perjanjian kerja sama dengan pihak lain, ketentuan internal, opini legal, dan dokumen lainnya untuk memitigasi adanya potensi hukum bagi Bank;
 - b. Melaporkan secara berkala kepada Direksi mengenai kasus hukum yang terjadi sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin untuk penyelesaiannya;
 - c. Membentuk pencadangan atas kasus-kasus yang telah memperoleh keputusan pada tingkat pengadilan dan Mahkamah Agung dengan persentase yang berjenjang;
 - d. Apabila dibutuhkan, unit *Corporate Legal* melakukan pendampingan atas proses litigasi yang dihadapi unit kerja di Bank.
3. Melakukan perbaikan sistem pengendalian risiko hukum melalui kajian atas advokat calon rekanan Bank yang diberikan oleh SKMR.

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Dalam memitigasi risiko reputasi, Bank telah melakukan:

1. Melakukan pengelolaan risiko reputasi yang dikoordinasikan oleh unit *Corporate Affair*, *Marketing Communication*, dan *Operation Services*.
2. Melakukan perbaikan proses manajemen risiko reputasi antara lain:
 - a. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal dengan :
 - 1) Melaksanakan *lunch meeting* bersama dengan beberapa media;
 - 2) Berpartisipasi sebagai sponsor dalam beberapa ajang;
 - 3) Melakukan kolaborasi dengan Baitul Maal Muamalat dalam publikasi kegiatan tertentu;
 - 4) Menerbitkan publikasi positif untuk membangun dan menyebarkan isu positif

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

e. Legal Risk (continued)

The Bank continuously controls and improves its legal risk profile, by actions such as: (continued)

1. *Improving the legal risk management framework by, among others: (continued)*
 - c. *Ratifying the Technical Guidelines for the Review of Agreements, Memorandum of Understanding and Non-Disclosure Agreements, and Procedures for Submission and Appointment of Associate Advocates.*
2. *Improving the legal risk management process by, among others:*
 - a. *Providing legal risk reviews of cooperation agreements with other parties, internal provisions, legal opinions, and other documents to mitigate the legal potential for the Bank;*
 - b. *Reporting periodically to the Board of Management regarding legal cases that occur so that action can be taken as early as possible for resolution;*
 - c. *Establishing reserves for cases that have obtained decisions at the court and Supreme Court levels with tiered percentages;*
 - d. *If needed, the Corporate Legal unit aids with the litigation process faced by the work unit at the Bank.*
3. *Improving the legal risk control system through a review of prospective Bank partner advocates provided by Risk Management Working Unit*

f. Reputation Risk

Reputation risk is a risk due to the decline in the stakeholders trust resulting from negative perception of the Bank.

In order to mitigate reputation risk, the Bank has taken the following actions:

1. *Managing reputation risk coordinated by the Corporate Affairs, Marketing Communication, and Operation Services units.*
2. *Improving reputation risk management process by, among others:*
 - a. *Coordinating with external parties by:*
 - 1) *Conducting lunch meetings with several media;*
 - 2) *Participating as a sponsor in several events;*
 - 3) *Collaborating with Baitul Maal Muamalat in the publication of certain activities;*
 - 4) *Publishing positive publications to build and spread positive issues of the Bank.*

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

f. Risiko Reputasi (lanjutan)

Dalam memitigasi risiko reputasi, Bank telah melakukan: (lanjutan)

- b. Melaksanakan upaya dalam rangka menurunkan jumlah pengaduan, antara lain:
 - 1) Melakukan *corrective maintenance* terhadap mesin ATM yang dilaporkan memiliki kendala transaksi menggunakan kartu ATM;
 - 2) Mengatasi isu pengaduan dengan modus pembukaan rekening fiktif melalui M-DIN, yaitu dengan meningkatkan keamanan layanan serta fitur biometric pada M-DIN dan mewajibkan nasabah menggunakan M-DIN versi terbaru yang sudah dilengkapi fitur keamanan yang lebih baik;
 - 3) Melaksanakan edukasi kepada nasabah untuk memitigasi maraknya modus penipuan.
- c. Melaksanakan inisiasi peningkatan kualitas layanan kepada nasabah, antara lain dengan:
 - 1) Mengembangkan fitur layanan digital secara kontinu guna memenuhi seluruh kebutuhan transaksi dan non transaksi, fitur tambahannya meliputi microsite daftar Indihome dan qurban;
 - 2) Menyelenggarakan *Improvement Training - Service Skill* bagi *frontliners* dan supervisor layanan;
 - 3) Menyelenggarakan *Branch Mentoring* guna membangun motivasi dalam memberikan layanan prima;
 - 4) Melaksanakan program *mystery shopper branch visit* dan survey kepuasan nasabah (*Customer Satisfaction Index (CSI)*) dan *Net Promoter Score (NPS)*.
3. Melakukan perbaikan sistem pengendalian risiko reputasi melalui proses kaji ulang terhadap ketentuan internal terkait layanan kepada nasabah.

g. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Bank menetapkan strategi jangka pendek dan jangka panjang dalam bentuk rencana strategis dan rencana bisnis.

Dalam memitigasi risiko strategi, Bank telah melakukan:

1. Melakukan perbaikan kerangka manajemen risiko strategik antara lain:
 - a. Mengelola risiko strategik yang dilaksanakan oleh unit *Strategy & Transformation*;

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

f. Reputation Risk (continued)

In order to mitigate reputation risk, the Bank has taken the following actions: (continued)

- b. Carrying out efforts in order to reduce the number of complaints, including:
 - 1) Carrying out *corrective maintenance* on ATM machines that are reported to have transaction problems using ATM cards;
 - 2) Overcoming the issue of complaints with the fictitious account opening mode through M-DIN, namely by improving the security of services and biometric features in M-DIN and requiring customers to use the latest M-DIN version which is equipped with better security features;
 - 3) Carrying out education to customers to mitigate the rampant fraud mode.
- c. Carrying out initiation to improve service quality to customers, among others by:
 - 1) Developing continuous digital service features to meet all transaction and non-transaction needs, additional features include microsites for Indihome and qurbani listings;
 - 2) Organizing *Improvement Training - Service Skills* for frontliners and service supervisors;
 - 3) Organizing *Branch Mentoring* to build motivation in providing excellent service;
 - 4) Carrying out *mystery shopper branch visit* programs and customer satisfaction surveys (*Customer Satisfaction Index (CSI)*) and *Net Promoter Score (NPS)*.
3. Improving the reputation risk control system through a review process of internal provisions related to services to customers.

g. Strategic Risk

Strategic risk is a risk due to inaccuracy in decision making of strategic decision and failure in anticipating business environment changes. The Bank established short-period and long-period strategy in the form of strategic plan and business plan.

In order to mitigate strategic risk, the Bank has taken the following actions:

1. Improving the strategic risk management framework by, among others:
 - a. Managing strategic risk implemented by the *Strategy & Transformation* unit;

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

g. Risiko Strategik (Lanjutan)

Dalam memitigasi risiko strategi, Bank telah melakukan: (lanjutan)

1. Melakukan perbaikan kerangka manajemen risiko strategik antara lain: (lanjutan)
 - b. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu, 11 Desember 2024 dengan mata acara RUPSLB sebagai berikut :
 - 1) Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
 - 2) Pengesahan Asuransi Purna Jabatan untuk Pengurus Lama dan Pengurus Baru;
 - 3) Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan
 - 4) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Melakukan perbaikan proses manajemen risiko strategik antara lain:
 - a. Menetapkan fokus strategi pencapaian bisnis sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2024 sebagai berikut:
 - 1) Penghimpunan dana murah;
 - 2) Optimalisasi fee based income;
 - 3) Pertumbuhan pembiayaan yang sehat;
 - 4) Percepatan collection dan recovery;
 - 5) Efisiensi.
 - b. Menyempurnakan action plan perbaikan atas strategi Bank, antara lain :
 - 1) Memenuhi *governance structure* sesuai ketentuan melalui pelaksanaan RUPSLB dan komitmen PSP;
 - 2) Melakukan penyempurnaan atau penyesuaian program penyehatan Bank melalui *Turn Around Plan* (TAP) 2.0;
 - 3) Melakukan perbaikan proses, kebijakan, sistem, dan prosedur pembiayaan, serta pemenuhan pencadangan;
 - 4) Perbaikan infrastruktur TI, khususnya infrastruktur atau server yang sudah end of support.
 - c. Menjalin sinergi bisnis dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP);
 - d. Menyusun Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (RPTI) 2025 dan Rencana Penyelenggaraan Produk Bank (RPPB) 2025;
 - e. Melaksanakan optimalisasi percepatan proyek pembiayaan *Consumer Acceleration Project*;
 - f. Memantau terciptanya efisiensi biaya dan pertumbuhan bisnis yang lebih profitable dan sustainable dalam laporan *Turn Around Plan* yang disampaikan kepada Direksi secara berkala.

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

g. Strategic Risk (Continued)

In order to mitigate strategic risk, the Bank has taken the following actions: (continued)

1. *Improving the strategic risk management framework by, among others: (continued)*
 - b. Holding an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on Wednesday, December 11, 2024 with the following agenda of the EGMS:*
 - 1) Changes in the Composition of the Company's Management;*
 - 2) Ratification of Retirement Insurance for Old Managers and New Administrators;*
 - 3) Approval of the Company's Recovery Action Plan;*
 - 4) Amendment to the Company's Articles of Association.*
2. *Improving the strategic risk management process by, among others:*
 - a. Establishing the focus of the business achievement strategy according to the Bank's Business Plan (BBP) in 2024 as follows:*
 - 1) Raising low-cost funds;*
 - 2) Optimization of fee-based income;*
 - 3) Healthy financing growth;*
 - 4) Acceleration of collection and recovery;*
 - 5) Efficiency.*
 - b. Perfecting the action plan to improve the Bank's strategy by, among others:*
 - 1) Complying with the governance structure in accordance with the provisions through the implementation of the EGMS and controlling shareholder commitments;*
 - 2) Enhancing the Bank's restructuring program through the Turn Around Plan (TAP) 2.0;*
 - 3) Improving the financing processes, policies, systems, and procedures, as well as the fulfillment of reserves;*
 - 4) Improving IT infrastructure, especially infrastructure or servers that are already end of support.*
 - c. Establishing business synergy with controlling shareholder;*
 - d. Conducting the 2025 Information Technology Development Plan and the 2025 Bank Product Implementation Plan;*
 - e. Optimizing the acceleration of Consumer Financing through the Consumer Financing Business Acceleration Project;*
 - f. Monitoring the creation of cost efficiency and more profitable and sustainable business growth in the Turn Around Plan report submitted to the Board of Directors regularly.*

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

g. Risiko Strategik (Lanjutan)

Dalam memitigasi risiko strategi, Bank telah melakukan: (lanjutan)

3. Melakukan perbaikan sistem pengendalian risiko strategik melalui kaji ulang laporan keuangan, laporan tahunan, dan penerapan manajemen risiko pada Rencana Bisnis Bank (RBB).

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan muncul ketika Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Bank senantiasa berupaya maksimal agar segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan baik (*comply with regulation*) dan secara terus menerus melakukan langkah-langkah perbaikan dalam kualitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola yang baik serta memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasional Bank.

Dalam memitigasi risiko kepatuhan, Bank telah melakukan:

1. Melakukan perbaikan kerangka manajemen risiko kepatuhan antara lain:
 - a. Pengelolaan risiko kepatuhan dikoordinasikan oleh unit *Compliance* dan melibatkan unit kerja terkait lainnya;
 - b. Membentuk beberapa komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - c. Mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, dan ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki Bank dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syariah yang berlaku, salah satunya dengan melaksanakan rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS).
2. Melakukan perbaikan proses manajemen risiko kepatuhan antara lain:
 - a. Melakukan penguatan atas penerapan Program APU dan PPT yang efektif dan efisien mengacu pada Kebijakan Penerapan APU dan PPT yang paling kurang mencakup 5 (lima) pilar, yaitu :
 - 1) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
 - 2) Kebijakan dan prosedur;
 - 3) Pengendalian internal;
 - 4) Sistem informasi manajemen;
 - 5) Sumber daya manusia dan pelatihan.

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

g. Strategic Risk (Continued)

In order to mitigate strategic risk, the Bank has taken the following actions: (continued)

3. *Improving the strategic risk control system by reviewing financial statements, annual reports, and implementing risk management in the Bank's Business Plan (RBB).*

h. Compliance Risk

Compliance risk arises when the Bank does not comply with or fails to enforce the rules of the Financial Services Authority and/or Bank Indonesia, as well as other applicable laws and regulations.

The Bank constantly strives to comply with applicable rules and regulations and continuously improves the quality of risk management, internal control system and the implementation of good governance. The Bank also maintains prudential banking principles and sharia principles in Bank's operational activities.

In order to mitigate compliance risk, the Bank has taken the following actions:

1. *Improving the compliance risk management framework by, among others:*
 - a. *Compliance risk management is coordinated by the Compliance unit and involves other related work units;*
 - b. *Establishing several committees that assist the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners;*
 - c. *Evaluating the effectiveness, adequacy, and conformity of policies, and provisions, systems and procedures owned by the Bank with applicable laws and regulations of sharia, one of which is by conducting meetings of the Sharia Supervisory Board (SSB).*
2. *Improving the compliance risk management process by, among others:*
 - a. *Strengthening the effective and efficient implementation of AML and CFT Programs referring to the AML and CFT Implementation Policy which at least covers 5 (five) pillars, namely:*
 - 1) *Active supervision of the Board of Commissioners and Board of Directors;*
 - 2) *Policies and procedures;*
 - 3) *Internal control;*
 - 4) *Management information systems;*
 - 5) *Human resources and training.*

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

h. Risiko Kepatuhan (lanjutan)

Dalam memitigasi risiko kepatuhan, Bank telah melakukan: (lanjutan)

2. Melakukan perbaikan proses manajemen risiko kepatuhan antara lain: (lanjutan)
 - b. Melakukan kampanye budaya kepatuhan antara lain melalui sharing informasi regulasi dan fatwa, memberikan opini terhadap penerapan regulasi dan aspek syariah, reminder kepada unit kerja terkait mengenai pemenuhan regulasi serta melakukan pelatihan dan *sharing knowledge*;
 - c. Mengelola, memantau, dan menatausahakan database peraturan OJK, BI, dan Fatwa DSN-MUI;
 - d. Memantau aspek prudential banking dengan membuat *dashboard* rasio *prudential banking* dan menyampaikannya kepada Direksi;
 - e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari sisi kepatuhan;
 - f. Menyampaikan laporan-laporan secara periodik kepada regulator dan pihak terkait lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. Mengimplementasikan laporan *reminder tools* yang dimiliki Bank dalam upaya melakukan reminder rutin bulanan kepada seluruh unit kerja yang memiliki kewajiban pelaporan menyampaikan laporan secara akurat dan tepat waktu;
 - h. Melakukan supervisi dan pendampingan kepada unit kerja dan/atau unit bisnis dalam melakukan penerbitan produk, program, operasional, sosialisasi dan/atau pendekatan terhadap nasabah dan calon nasabah serta melakukan pelatihan/ *sharing* kepada karyawan baru maupun kepada pihak internal bank;
 - i. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas setiap proses bisnis Bank agar sesuai dengan regulasi yang berlaku serta aspek syariah;
 - j. Melakukan *Compliance Assurance* dan *Anti Money Laundering (AML) testing*;
 - k. Mengembangkan *compliance checklist* untuk memastikan kesiapan operasional terhadap perizinan produk/aktivitas dan jaringan kantor.
3. Melakukan perbaikan sistem pengendalian risiko kepatuhan melalui kajian secara independen atas rasio regulatori dan ketentuan regulator yang baru diterapkan.

i. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil (*rate of return risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

h. Compliance Risk (continued)

In order to mitigate compliance risk, the Bank has taken the following actions: (continued)

2. *Improving the compliance risk management process by, among others: (continued)*
 - b. *Conducting compliance culture campaigns by, among others, sharing regulatory information and fatwas, providing opinions on the implementation of regulations and sharia aspects, reminders to related work units regarding regulatory compliance and conducting training and knowledge sharing;*
 - c. *Managing, monitoring, and administering the database of the regulations of FSA, BI, and Fatwa of DSN-MUI;*
 - d. *Monitoring prudential banking aspects by creating prudential banking ratio dashboards and submitting them to the Board of Directors;*
 - e. *Improving the quality of human resources in terms of compliance;*
 - f. *Submitting periodic reports to regulators and other related parties in accordance with applicable regulations;*
 - g. *Implementing the Bank's report reminder tools in an effort to provide monthly routine reminders to all work units that have reporting obligations to submit reports accurately and on time;*
 - h. *Supervising and assisting work units and/or business units in issuing products, programs, operations, socialization and/or approaches to customers and prospective customers as well as conducting training/sharing to new employees and to internal bank parties;*
 - i. *Improving business processes of the Bank to comply with applicable regulations and sharia aspects;*
 - j. *Conducting Compliance Assurance and Anti Money Laundering (AML) testing;*
 - k. *Developing a compliance checklist to ensure operational readiness for product/activity licensing and office networks.*
3. *Improving the compliance risk control system through an independent review of the regulatory ratio and newly implemented regulatory regulations.*

i. Rate of Return Risk

Rate of return risk is the risk due to changes in the rate of return paid by the Bank to customers, due to changes in the rate of return received by the Bank from the allocation of funds, which can affect the behavior of third party fund customers.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

i. Risiko Imbal Hasil (lanjutan)

Dalam memitigasi risiko imbal hasil, Bank telah melakukan:

1. Melakukan perbaikan kerangka manajemen risiko imbal hasil antara lain:
 - a. Kegiatan pengelolaan risiko imbal hasil sejalan dengan kegiatan pengelolaan risiko likuiditas, yaitu oleh unit *Global Market* dan koordinasi dengan unit kerja lainnya;
 - b. Pelaksanaan kerangka manajemen risiko dilakukan antara lain dengan:
 - 1) Menetapkan nisbah bagi hasil dan *pricing* atas aktivitas pendanaan dan pembiayaan dengan merujuk pada usulan *funds transfer pricing* (FTP) yang disetujui dalam rapat ALCO;
 - 2) Mengontrol dan mengevaluasi *cost of funds* dan NIM secara berkala.
2. Melakukan perbaikan proses manajemen risiko imbal hasil antara lain:
 - a. Menjaga *margin income* untuk menjaga tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah;
 - b. Menurunkan konsentrasi pada nasabah besar dengan *pricing* yang mahal untuk mengoptimalkan profitabilitas sesuai dengan *bankwide strategy*;
 - c. Melakukan evaluasi pada implementasi *income smoothing*, baik di segmen *Enterprise Banking* maupun di *Retail Banking*, oleh Dewan Pengawas Syariah.
3. Melakukan perbaikan sistem pengendalian risiko imbal hasil melalui antara lain:
 - a. Mengevaluasi tingkat *cost of funds* secara berkala;
 - b. Kaji ulang atas parameter dan ambang batas risiko likuiditas yang dipantau dalam *Liquidity Key Risk Indicator* (LKRI).

j. Risiko Investasi

Risiko investasi (*investment risk*) adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.

Dalam melakukan pengelolaan risiko investasi dalam pembiayaan beberapa hal yang telah dilakukan Bank adalah:

1. Melakukan perbaikan kerangka manajemen risiko investasi antara lain:
 - a. Pengelolaan *good bank* dan *new bank* oleh beberapa unit kerja terkait;
 - b. Pengelolaan portofolio *bad bank* dilakukan oleh unit *Special Asset Management* dan *Retail Collection Management*.

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

i. Rate of Return Risk (continued)

In order to mitigate rate of return risk, the Bank has taken the following actions:

1. Improving the management framework of rate of return risk by, among others:
 - a. Making sure that the activities of management of rate of return risk are in line with liquidity risk management activities, namely by Global Market units and coordination with other work units;
 - b. Implementing the risk management framework by, among others:
 - 1) Determining profit sharing ratios and pricing for funding and financing activities by referring to funds transfer pricing (FTP) approved in ALCO meetings;
 - 2) Controlling and evaluating the cost of funds and NIM periodically.
2. Improving the management process of rate of return risk by, among others:
 - a. Maintaining margin income to maintain the level of return paid by the Bank to customers;
 - b. Reducing concentration on large customers with expensive pricing to optimize profitability in accordance with the bankwide strategy;
 - c. Evaluating income smoothing implementation both in Enterprise Banking and Retail Banking segments, by Sharia Supervisory Board.
3. Improving the control system of rate of return risk by, among others:
 - a. Evaluating the level of cost of funds periodically;
 - b. Reviewing the liquidity risk parameter and threshold as monitored in LKRI.

j. Investment Risk

Investment risk is a risk due to losses that the Bank bears due to its customer's losses in the term of financing that is based on profit and loss sharing.

In managing investment risk in financing activity, the Bank has taken actions as follows:

1. Improving the investment risk management framework by, among others:
 - a. Management of good banks and new banks by several related work units;
 - b. Bad bank portfolio management is carried out by the Special Asset Management and Retail Collection Management units.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

j. Risiko Investasi (lanjutan)

Dalam melakukan pengelolaan risiko investasi dalam pembiayaan beberapa hal yang telah dilakukan Bank adalah: (lanjutan)

2. Melakukan perbaikan proses manajemen risiko investasi antara lain :
 - a. Melakukan pemantauan dan perbaikan pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan dan memperbaiki kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil secara terus menerus;
 - b. Melakukan kajian atas kinerja pembiayaan.
3. Melakukan perbaikan sistem pengendalian risiko investasi melalui parameter nasabah *watchlist* yang dikaji berkala dan bersifat dinamis termasuk yang diberikan dengan akad bagi hasil dan melakukan kajian produk dan program pembiayaan oleh unit SKMR.

46. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal tersebut.

	31 Desember / December 31, 2024	
	Nilai Tercatat/ <i>Carrying value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>
ASET		
Kas	781.262.980	781.262.980
Giro dan penempatan pada		
Bank Indonesia	2.812.899.226	2.812.899.226
Giro pada bank lain	698.239.396	698.239.396
Penempatan pada Bank lain	14.469.632	14.469.632
Investasi pada surat berharga	31.127.147.656	31.127.147.656
Piutang	4.521.759.098	4.521.759.098
Piutang <i>qardh</i>	328.511.967	328.511.967
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	379.943.724	379.943.724
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	11.527.312.779	11.527.312.779
Penyertaan saham	407.711.237	407.711.237
Tagihan akseptasi	164.057.223	164.057.223
Piutang Salam	--	--
Aset pajak tangguhan	140.940.759	140.940.759
Aset lain-lain	7.118.620.999	7.118.620.999
Jumlah aset	60.022.876.676	60.022.876.676

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

j. Investment Risk (continued)

In managing investment risk in financing activity, the Bank has taken actions as follows: (continued)

2. Improving the investment risk management process by, among others:
 - a. Monitoring and improving financing based on financing contracts and improving the quality of profit-sharing based financing continuously;
 - b. Conducting a review of financing performance.
3. Improving the investment risk control system through regularly reviewed and dynamic watchlist customer parameters, including those provided with profit sharing contracts and conducting product studies and financing programs by the Risk Management Working Unit.

46. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The table below presents a comparison between the carrying value and fair value of financial assets and liabilities. The fair value is disclosed based on relevant available information as of December 31, 2024 and 2023 and it is not updated to reflect changes in market condition occurring after that date.

ASSETS
Cash
Current accounts and placements
with Bank Indonesia
Current accounts with other banks
Placement with other banks
Investments in marketable securities
Receivable
Funds of <i>qardh</i>
Mudharabah financing
Musyarakah financing
Investment in share
Acceptance receivables
Salam Receivables
Deferred tax assets
Other assets
Total assets

**46. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN
(Lanjutan)**

**46. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES
(Continued)**

31 Desember / December 31, 2024		
	Nilai Tercatat/ <i>Carrying value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>
LIABILITAS DAN DANA		
SYIRKAH TEMPORER		
Liabilitas segera	298.501.662	298.501.662
Simpanan	10.699.828.567	10.699.828.567
Simpanan dari bank lain	27.662.402	27.662.402
Bagi hasil yang belum dibagikan	50.454.915	50.454.915
Liabilitas kepada Bank Indonesia	1.409.965.320	1.409.965.320
Liabilitas akseptasi	31.246.806	31.246.806
Pinjaman yang diterima	500.000.000	500.000.000
Dana syirkah temporer	41.314.952.177	41.314.952.177
Total liabilitas dan dana syirkah temporer	54.332.611.849	54.332.611.849

LIABILITIES AND TEMPORARY SYIRKAH FUNDS	
<i>Liabilities due immediately</i>	
<i>Deposits</i>	
<i>Deposits from other banks</i>	
<i>Undistributed revenue sharing</i>	
<i>Liabilities to Bank Indonesia</i>	
<i>Acceptance payables</i>	
<i>Fund borrowings</i>	
<i>Temporary syirkah funds</i>	
Total liabilities and temporary syirkah funds	

31 Desember 2023/ December 31, 2023		
	Nilai Tercatat/ <i>Carrying value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>
ASET		
Kas	720.209.073	720.209.073
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	5.010.479.824	5.010.479.824
Giro pada bank lain	1.463.838.902	1.463.838.902
Penempatan pada Bank lain	3.760.782	3.760.782
Investasi pada surat berharga	30.524.748.886	30.524.748.886
Piutang	5.853.925.684	5.853.925.684
Piutang <i>qardh</i>	633.604.421	633.604.421
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	593.853.169	593.853.169
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	15.381.520.343	15.381.520.343
Penyertaan saham	407.711.237	407.711.237
Tagihan akseptasi	153.615.400	153.615.400
Piutang Salam	253.206.247	253.206.247
Aset pajak tangguhan	138.192.371	138.192.371
Aset lain-lain	3.954.368.605	3.954.368.605
Jumlah aset	65.093.034.944	65.093.034.944

ASSETS	
<i>Cash</i>	
<i>Current accounts and placements with Bank Indonesia</i>	
<i>Current accounts with other banks</i>	
<i>Placement with other banks</i>	
<i>Investments in marketable securities</i>	
<i>Receivable</i>	
<i>Funds of qardh</i>	
<i>Mudharabah financing</i>	
<i>Musyarakah financing</i>	
<i>Investment in shares</i>	
<i>Acceptance receivables</i>	
<i>Salam Receivables</i>	
<i>Deferred tax assets</i>	
<i>Other assets</i>	
Total assets	

LIABILITAS DAN DANA SYIRKAH TEMPORER		
Liabilitas segera	164.382.213	164.382.213
Simpanan	11.022.248.684	11.022.248.684
Simpanan dari bank lain	46.293.395	46.293.395
Bagi hasil yang belum dibagikan	82.574.510	82.574.510
Liabilitas akseptasi	8.184.473	8.184.473
Pinjaman yang diterima	1.000.000.000	1.000.000.000
Dana syirkah temporer	46.688.433.494	46.688.433.494
Total liabilitas dan dana syirkah temporer	59.012.116.769	59.012.116.769

LIABILITIES AND TEMPORARY SYIRKAH FUNDS	
<i>Liabilities due immediately</i>	
<i>Deposits</i>	
<i>Deposits from other banks</i>	
<i>Undistributed revenue sharing</i>	
<i>Acceptance payables</i>	
<i>Fund borrowings</i>	
<i>Temporary syirkah funds</i>	
Total liabilities and temporary syirkah funds	

47. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang kewajiban penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah, yang mencabut peraturan sebelumnya; dan berdasarkan Surat Edaran OJK No.12/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015. Rasio KPMM tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
MODAL INTI		
Modal disetor	2.297.736.324	2.297.736.324
Komponen Modal Lainnya	1.509.457.132	2.503.853.928
Jumlah modal inti	<u>3.807.193.456</u>	<u>4.801.590.252</u>
MODAL PELENGKAP		
Pinjaman subordinasi	2.000.000.000	2.000.000.000
Cadangan umum penyisihankerugian aset produktif (maksimum 1,25% dari ATMR)	132.632.937	188.883.020
Jumlah modal pelengkap	<u>2.132.632.937</u>	<u>2.188.883.020</u>
Total Modal	<u>5.939.826.393</u>	<u>6.990.473.272</u>
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)		
ATMR Risiko Kredit	18.330.614.640	21.268.481.150
ATMR Risiko Pasar	90.487.000	72.431.880
ATMR Risiko Operasional	2.432.870.625	2.420.899.375
Total Aset Tertimbang Menurut Risiko	<u>20.853.972.265</u>	<u>23.761.812.405</u>
RASIO KPMM		
Rasio CET 1	18,26%	20,21%
Rasio Tier 1	18,26%	20,21%
Rasio Tier 2	10,23%	9,21%
Total Rasio	<u>28,48%</u>	<u>29,42%</u>
Rasio KPMM yang diwajibkan	10,00 - 11,00%	10,00 - 11,00%

47. CAPITAL ADEQUACY RATIO

As of December 31, 2024 and 2023, the Minimum Required Capital Adequacy Ratio (CAR) is calculated based on Regulation of Financial Services Authority (OJK) No.21/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 regarding Sharia Bank Minimum Required Capital, which revokes the previous regulation; and based on the FSA circular Letter No. 12/SEOJK.03/2015 dated April 27, 2015. The CARs are as follows:

CORE CAPITAL
Paid-in capital
Other Equity Component
Total core capital
SUPPLEMENTARY CAPITAL
Subordinated financing
General reserve of allowance for impairment losses of earning assets (maximum at 1.25% of RWA)
Total supplementary capital
Total Capital
Risk Weighted assets (RWA)
RWA For Financing Risk
RWA For Market Risk
RWA For Operational Risk
Total Risk Weighted Assets
Capital Adequacy Ratio
CET 1 ratio
Tier 1 Ratio
Tier 2 Ratio
Total Ratio
Required CAR

48. AKTIVITAS JASA KUSTODIAN

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memberikan jasa kustodian dan memperoleh izin berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-50/PM.02/2024 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian atas Nama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Tanggal 22 Oktober 2024. Bank Muamalat menyediakan jasa jasa kustodian sebagai berikut;

Bank Muamalat menyediakan jasa jasa kustodian sebagai berikut:

1. Jasa penitipan efek
2. Jasa penyelesaian transaksi
3. Jasa aksi korporasi
4. Jasa fungsi administrasi dan pelaporan

48. CUSTODIAL SERVICE ACTIVITIES

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk provides custodian services and obtains a license based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-50/PM.02/2024 concerning the Approval of a Commercial Bank as a Custodian on Behalf of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated October 22, 2024. Bank Muamalat provides the following custodian services;

Bank Muamalat provides the following custodian services:

1. Securities custody services
2. Transaction settlement services
3. Corporate Action services
4. Administration dan reporting function services

48. AKTIVITAS JASA KUSTODIAN (Lanjutan)

Aset yang tercatat dalam aktivitas jasa kustodian tidak termasuk dalam laporan keuangan ini. Jumlah komisi yang diterima dari pemberian jasa ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah nihil.

48. CUSTODIAL SERVICE ACTIVITIES (Continued)

Assets recorded in custodial service activities are not included in these financial statements. The amount of commission received from providing these services during the years ended December 31, 2024 is Nil, respectively.

49. POSISI DEvisa NETO

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul karena adanya selisih posisi valuta asing yang dimiliki Bank yang tercermin dalam Posisi Devisa Neto (PDN) baik secara individual maupun secara keseluruhan. Termasuk dalam posisi valuta asing tersebut yaitu posisi *trading book* yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan transaksi valuta asing dalam jangka pendek maupun posisi *banking book* dalam rangka pengendalian PDN.

49. NET OPEN POSITION

Exchange rate risk is the risk due to the differences of foreign exchange positions held by the Bank which is reflected in the Net Open Position (NOP) either individually or as a whole. Included in the foreign exchange position is the position of the trading book which is carried out either to gain foreign exchange transaction income in the short-term period or banking book positions in order to control NOP.

Berikut adalah PDN Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

The Bank's NOP as of December 31, 2024 and 2023 is as follows:

31 Desember2024 / December 31, 2024				
Aset/	Liabilitas/	Posisi Devisa		
		Neto/ Net Open		
Mata uang	Assets	Liabilities	Position	Currencies
Laporan Posisi Keuangan*)				Statement of Financial Position*)
Dolar Amerika Serikat	3.695.203.408	3.916.822.565	221.619.157	United States Dollar
Euro	36.808.438	--	36.808.438	Euro
Ringgit Malaysia	79.762.039	1.239.108	78.522.931	Malaysian Ringgit
Dolar Singapura	2.480.184	1.371.794	1.108.390	Singapore Dollar
Riyal Arab Saudi	16.433.853	4.660.772	11.773.081	Saudi Arabian Riyal
Yen Jepang	242.841	--	242.841	Japanese Yen
Dinar Kuwait	522.387	--	522.387	Kuwaiti Dinar
Jumlah	3.831.453.150	3.924.094.239	350.597.225	Total

31 Desember2024 / December 31, 2024				
Aset/	Liabilitas/	Posisi Devisa		
		Neto/ Net Open		
Mata uang	Assets	Liabilities	Position	Currencies
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif*)				Statement of Financial Position and Administrative Accounts*)
Dolar Amerika Serikat	3.976.515.209	4.006.565.774	(30.050.565)	United States Dollar
Euro	36.808.444	23.210.003	13.598.441	Euro
Ringgit Malaysia	115.740.639	105.985.297	9.755.342	Malaysian Ringgit
Dolar Singapura	2.480.184	1.371.794	1.108.390	Singapore Dollar
Riyal Arab Saudi	16.433.853	4.660.772	11.773.081	Saudi Arabian Riyal
Yen Jepang	242.841	--	242.841	Japanese Yen
Dinar Kuwait	522.387	--	522.387	Kuwaiti Dinar
Jumlah	4.148.743.557	4.141.793.640	6.949.917	Total
Modal (Catatan 47)			5.956.966.175	Capital (Note 47)
Rasio PDN (Laporan Posisi Keuangan)			5,89%	NOP Ratio (Statement of Financial Position)
Rasio PDN (Keseluruhan)			1.13%	NOP Ratio (Overall)

49. POSISI DEvisa NETO

Mata uang	31 Desember 2023/ December 31, 2023		
	Aset/ <i>Assets</i>	Liabilitas/ <i>Liabilities</i>	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position
Laporan Posisi Keuangan*)			
Dolar Amerika Serikat	4.952.503.253	5.167.461.754	214.958.501
Euro	13.425.410	6.191.173	7.234.237
Ringgit Malaysia	83.174.518	1.513.631	81.660.887
Dolar Singapura	4.076.602	1.915.312	2.161.290
Riyal Arab Saudi	3.416.874		3.416.874
Yen Jepang	757.623		757.623
Dinar Kuwait	501.952		501.952
Jumlah	5.057.856.232	5.177.081.870	310.691.364
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif*)			
Dolar Amerika Serikat	5.280.163.183	5.278.284.903	1.878.280
Euro	13.425.410	11.302.054	2.123.356
Ringgit Malaysia	108.151.190	102.615.637	5.535.553
Dolar Singapura	4.076.602	1.915.312	2.161.290
Riyal Arab Saudi	3.416.874		3.416.874
Yen Jepang	757.623		757.623
Dinar Kuwait	501.952		501.952
Jumlah	5.410.492.834	5.394.117.906	16.374.928
Modal (Catatan 47)			6.990.473.272
Rasio PDN (Laporan Posisi Keuangan)			4,45%
Rasio PDN (Keseluruhan)			0,23%

*) Merupakan penjumlahan absolut dari selisih aset dan liabilitas.

49. NET OPEN POSITION

Currencies	
Statement of Financial Position*)	
United States Dollar	
Euro	
Malaysian Ringgit	
Singapore Dollar	
Saudi Arabian Riyal	
Japanese Yen	
Kuwaiti Dinar	
Total	
Statement of Financial Position and Administrative Accounts*)	
United States Dollar	
Euro	
Malaysian Ringgit	
Singapore Dollar	
Saudi Arabian Riyal	
Japanese Yen	
Kuwaiti Dinar	
Total	
Capital (Note 47)	
NOP Ratio (Statement of Financial Position)	
NOP Ratio (Overall)	

*) Total absolute differences between Assets and Liabilities.

50. INFORMASI PENTING LAINNYA

Bank sedang menjalankan Program Perbaikan dan Penguatan/ *Turnaround Plan* Program sejak tahun 2021 ("TAP 1.0"). Program Perbaikan dan Penguatan Bank selalu ditinjau kembali relevansinya terkait dengan kesesuaian antara TAP 1.0 dengan kondisi bisnis dan kinerja keuangan Bank. Sampai dengan semester 3 (tiga) tahun 2024, Bank masih harus mengejar ketinggalan kinerja bisnisnya terhadap target TAP 1.0. Pertumbuhan dan model bisnis sejak tahun 2023 hingga saat ini telah menunjukkan pertumbuhan bisnis, namun untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah masih perlu ditingkatkan terkait dengan kinerjanya dan profitabilitas bank agar tetap terus positif.

Diproyeksikan profitabilitas Bank semakin dinamis yang disebabkan kemampuan dalam menciptakan *income generating* dari *Good Bank* yang dimilikinya belum optimal, sementara itu, kewajiban pembebanan dari komitmen terhadap TAP 1.0 sudah semakin besar terkait dengan akrual aset sale 1, aset sale 2, dan beban aktiva non-produktif (lihat catatan 7,8,9,10,11,12, 16 dan 27). Untuk menjaga *going concern* Bank, maka diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan juga melakukan pembaharuan program penyehatan dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan melalui pengajuan TAP 2.0 dengan harapan penyesuaian TAP 2.0 memiliki waktu yang lebih memadai untuk memperbaiki fundamental bisnis, kinerja keuangan dan melakukan transformasi retail secara keseluruhan dengan melakukan evaluasi dan langkah-langkah sebagai berikut:

50. SIGNIFICANT OTHERS INFORMATION

The Bank has been running the Turnaround Plan Program since 2021 ("TAP 1.0"). The Bank's Turnaround Plan Program is always reviewed for its relevance in relation to the suitability between TAP 1.0 and the Bank's business conditions and financial performance. Until semester 3 (three) of 2024, the Bank still has to catch up on its business performance against the TAP 1.0 target. The growth and business model since 2023 until now have shown business growth, but for the resolution of problematic financing, it still needs to be improved in relation to its performance and the bank's profitability so that it remains positive.

The Bank's profitability is projected to be increasingly dynamic due to the ability to create income generating from its Good Bank which is not yet optimal, meanwhile, the burden of obligations from commitments to TAP 1.0 has become larger related to the accrual of sale assets 1, sale assets 2, and non-productive asset expenses (see notes 7,8,9,10,11,12, 16 and 27). To maintain the Bank's going concern, various efforts are needed to improve performance and also to renew the health program by conducting evaluations and improvements through the submission of TAP 2.0 with the hope that the adjustment of TAP 2.0 has more adequate time to improve business fundamentals, financial performance and carry out overall retail transformation by conducting evaluations and steps as follows:

50. INFORMASI PENTING LAINNYA (Lanjutan)

1. Penguatan permodalan dengan mencari calon investor yang akan melakukan proses untuk penambahan modal;
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah terutama pembiayaan yang berkualitas rendah termasuk penyempurnaan fungsi organisasi yang memperhatikan kaidah-kaidah manajemen risiko;
3. Perbaikan Tata Kelola dan Manajemen Risiko yang bertujuan untuk memaksimalkan mitigasi risiko *path credit risk* dan *operational risk*;
4. Penguatan dan stabilitas likuiditas dengan melakukan perbaikan-perbaikan yang memiliki dampak terhadap terciptanya kondisi likuiditas yang *sustainable*;
5. Perbaikan rentabilitas untuk memastikan *sustainability* dari bisnis Bank dapat memberikan hasil investasi optimal dengan menitikberatkan pada beberapa strategi utama yang akan ditunjang dengan perbaikan infrastruktur serta digitalisasi;
6. Proyeksi Keuangan dalam kurun waktu dimasa yang akan datang menggambarkan proyeksi kinerja Bank yang terdiri dari proyeksi total aset, *financing*, *funding*, *profit & loss* serta jadwal kewajiban pembentukan pencadangan atau beban.

Bank telah mendapatkan dukungan dari *shareholder* dan *stakeholder* untuk melakukan penyesuaian TAP 1.0 dengan melakukan pembaharuan program perbaikan dan penguatan yang telah disempurnakan melalui TAP 2.0. Saat ini pengajuan TAP 2.0 sudah diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perbankan untuk meminta persetujuan atas rencana Bank tersebut. Sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan pengajuan TAP 2.0 masih dalam proses di OJK Perbankan.

51. PERJANJIAN PENTING

Bank menandatangani beberapa perjanjian penting seperti yang tersebut dibawah:

- a. Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Implementasi dan Pemeliharaan Aplikasi BI-SNAP untuk Bank Muamalat antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT Fan Integrasi Teknologi dengan nilai kontrak sebesar Rp1.483.515. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 23 Juni 2023 dan akan berakhir 24 Mei 2028.
- b. Addendum Pertama Perjanjian Kerja Sama Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin ATM Merek Wincor Nixdorf antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan PT Diebold Nixdorf Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp2.266.821. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 15 Juni 2023 dan akan berakhir 31 Desember 2024.
- c. Addendum Kedua Perjanjian Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin ATM Merek Wincor Nixdorf antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT Intikom Berlian Mustika dengan nilai kontrak sebesar Rp1.965.366. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 15 Juni 2023 dan akan berakhir 31 Desember 2024.

50. SIGNIFICANT OTHERS INFORMATION (Continued)

1. *Strengthening capital by seeking potential investors who will carry out the process of increasing capital;*
2. *Resolution of non-performing financing, especially low-quality financing, including improving organizational functions that pay attention to risk management principles;*
3. *Improving the Governance and Risk Management, which is aimed at maximizing mitigation of path credit risk and operational risk;*
4. *Strengthening and stabilizing liquidity by making improvements that have an impact on creating sustainable liquidity conditions;*
5. *Improving the profitability to ensure the sustainability of the Bank's business can provide optimal investment returns by emphasizing several main strategies that will be supported by infrastructure improvements and digitalization;*
6. *Financial projections for the future period describe the Bank's performance projections, consisting of projections of total assets, financing, funding, profit & loss, as well as a schedule of obligations for the formation of reserves or expenses.*

The Bank has received support from shareholders and stakeholders to adjust TAP 1.0 by updating the improvement and strengthening turnaround plan program in TAP 2.0. Currently, the TAP 2.0 application has been submitted to the Financial Services Authority (OJK) - Banking Sector to request approval for the Bank's plan. As of the date of the financial statement, the TAP 2.0 application is still in process of the Financial Services Authority - Banking Sector.

51. SIGNIFICANT AGREEMENTS

The Bank has signed several important agreements as described below:

- a. *Agreement regarding Procurement of Implementation and Maintenance of BI-SNAP application for Bank Muamalat between PT Bank Muamalat Indonesia Tbk with PT Fan Integrasi Teknologi, with the value of Rp1,483,515. This agreement came into effect on June 23, 2023 and will expire on May 24, 2028.*
- b. *First Addendum to Agreement regarding Maintenance and Repair of Wincor Nixdorf ATM machine between PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT Diebold Nixdorf Indonesia, with the value of Rp2,266,821. This agreement came into effect on June 15, 2023 and expired on December 31, 2024.*
- c. *Second Addendum to Agreement regarding Maintenance and Repair of Wincor Nixdorf ATM machine between PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT Intikom Berlian Mustika, with the value of Rp1,965,366. This agreement came into effect on June 15, 2023 and expired on December 31, 2024.*

51. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

Bank menandatangani beberapa perjanjian penting seperti yang tersebut dibawah: (lanjutan)

- d. Perjanjian Pemeliharaan Perangkat Keras IBM dan HP Production Bank Muamalat antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT iLogo Infralogy dengan nilai kontrak sebesar Rp1.980.000. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 14 Maret 2024 dan akan berakhir 31 Januari 2025.
- e. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Layanan Asuransi Syariah Kesehatan Bagi Karyawan Bank Muamalat dan Anggota keluarganya Antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk dengan nilai kontrak sebesar Rp51.219.894. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 31 Mei 2024 dan akan berakhir 31 Mei 2025.
- f. Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Implementasi dan Pemeliharaan Aplikasi OBS *Settlement and Trading System* (OSTS) untuk Bank Muamalat antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan PT OBS Solusi Teknologi Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp3.730.000. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 11 Mei 2023 dan akan berakhir 4 Juni 2025.
- g. Perjanjian Pengadaan Implementasi dan Pemeliharaan Aplikasi ProSwitching Bank Muamalat antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT Metalogic Infomitra dengan nilai kontrak sebesar Rp5.315.315. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 13 Juni 2024 dan akan berakhir 30 Juni 2028.
- h. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Lisensi *Annual Technical Support* (ATS) pada aplikasi *My Oracle Support* (MOS) *flexcube* Bank Muamalat antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT Midas Daya Teknologi dengan nilai kontrak sebesar Rp3.310.000. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 13 April 2023 dan akan berakhir 31 Desember 2024.
- i. Addendum IV Perjanjian Kerjasama *Maintenance Aplikasi Switching Way4 Production* Bank Muamalat antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT Matajari Mitra Solusi dengan nilai kontrak sebesar Rp3.990.000. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 12 April 2023 dan akan berakhir 31 Desember 2024.
- j. Addendum Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengelola Keuangan Haji Dengan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan nilai kontrak sebesar Rp10.000.000.000. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 28 Februari 2023 dan akan berakhir 31 Desember 2024.
- k. Surat perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa dan Sewa Kantor Untuk Ruang Perkantoran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Muamalat Tower dengan nilai kontrak sebesar Rp6.759.051. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 1 April 2024 dan akan berakhir 31 Januari 2028.

51. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

The Bank has signed several important agreements as described below: (continued)

- d. Agreement regarding maintenance of IBM and HP production hardware between PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT iLogo Infralogy, with the value of Rp1,980,000. This agreement came into effect on March 14, 2024 and will expire on January 31, 2025.
- e. Agreement regarding Sharia Health Insurance Facility for employees of Bank Muamalat and their family members between PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk, with the value of Rp51,219,894. This agreement came into effect on May 31, 2024 and will expire on May 31, 2025.
- f. Agreement regarding Procurement of Implementation and Maintenance of OBS *Settlement and Trading System* (OSTS) application for Bank Muamalat, between PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT OBS Solusi Teknologi Indonesia, with the value of Rp3,730,000. This agreement came into effect on May 11, 2023 and will expire on June 4, 2025.
- g. Agreement regarding Procurement of Implementation and Maintenance of ProSwitching application for Bank Muamalat between PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT Metalogic Infomitra, with the value of Rp5,315,315. This agreement came into effect on June 13, 2024 and will expire on June 30, 2028.
- h. Agreement regarding Procurement of Annual Technical Support (ATS) License on the application of My Oracle Support (MOS) of flexcube in Bank Muamalat, between PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT Midas Daya Teknologi, with the value of Rp3,310,000. This agreement came into effect on April 13, 2024 and will expire on December 31, 2024.
- i. Fourth Addendum to agreement regarding Maintenance of Switching Way4 Production application in Bank Muamalat, between PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT Matajari Mitra Solusi, with the value of Rp3,990,000. This agreement came into effect on April 12, 2023 and expired on December 31, 2024.
- j. Addendum to agreement between Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) and Recipient Bank for Hajj Pilgrimage Organizing Fees, with the value of Rp10,000,000,000. This agreement came into effect on February 28, 2023 and expired on December 31, 2024.
- k. Letter of agreement regarding Procurement of Office Rent and Services for Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Office Space at Muamalat Tower, with the value of Rp6,759,051. This agreement came into effect on April 1, 2024 and will expire on January 31, 2028.

51. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

Bank menandatangani beberapa perjanjian penting seperti yang tersebut dibawah: (lanjutan)

- l. Addendum VI perjanjian kerjasama penyediaan tenaga kerja driver dan pelayanan kebersihan antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT Maksima Cakrawala Insani dengan nilai kontrak sebesar Rp2.888.940. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024 dan akan berakhir 31 Desember 2024.
- m. Perjanjian kerjasama penyediaan dan pengelolaan tenaga kerja keamanan, driver dan pelayanan kebersihan antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT Maksima Cakrawala Insani dengan nilai kontrak sebesar Rp1.484.010. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 6 Desember 2024 dan akan berakhir 31 Desember 2026.
- n. Addendum VII perjanjian kerjasama penyediaan tenaga kerja cleaning services antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT ISS Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp1.148.400. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024 dan akan berakhir 31 Desember 2024.
- o. Perjanjian kerjasama sewa kendaraan antara PT Pusaka Prima Transport (Blue Bird) dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan nilai kontrak sebesar Rp1.025.440. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2023 dan akan berakhir 31 Desember 2025.
- p. Perjanjian kerjasama dengan PT Karlin Mastrindo tentang Pengadaan *Seat Management* Perangkat *Desktop* dan *Notebook* dengan nilai kontrak sebesar Rp13.550.400. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 23 November 2022 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2031.
- q. Perjanjian Kerjasama dengan PT Data Citra Solusindo tentang Pemeliharaan Perangkat Pendukung Data Center (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC) *Core Banking* Bank Muamalat dengan nilai sebesar Rp1.918.080. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 2 Agustus 2024 dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2026.
- r. Addendum I Perjanjian Kerjasama dengan PT Citra Sentosa Solusindo tentang Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat Utama *Storage* untuk *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC) *Core Banking* Bank Muamalat dengan nilai sebesar Rp2.595.000. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 6 September 2024 dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2026
- s. Perjanjian Kerjasama dengan PT Nomina Teknograsi Indodata tentang Pengadaan dan Pemeliharaan *Server VMware* untuk Pemenuhan Gap DC-DRC dengan nilai sebesar Rp1.324.640. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 26 September 2022 dan akan berakhir pada tanggal 30 September 2025.

51. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

The Bank has signed several important agreements as described below: (continued)

- l. *Sixth Addendum to agreement regarding Procurement of driver and cleaning service, between PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT Maksima Cakrawala Insani, with the value of Rp2,888,940. This agreement came into effect on January 1, 2024 and expired on December 31, 2024.*
- m. *Agreement regarding Procurement and management of security, driver and cleaning service, between PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT Maksima Cakrawala Insani, with the value of Rp1,484,010. This agreement came into effect on December 6, 2024 and will expire on December 31, 2026.*
- n. *Seventh Addendum to agreement regarding Procurement of cleaning service between PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT ISS Indonesia, with the value of Rp1,148,400. This agreement came into effect on January 1, 2024 and expired on December 31, 2024.*
- o. *Agreement regarding vehicle rent between PT Pusaka Prima Transport (Blue Bird) and PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, with the value of Rp1,025,440. This agreement came into effect on January 2, 2023 and will expire on December 31, 2025.*
- p. *Agreement with PT Karlin Mastrindo regarding the Procurement of Seat Management of Desktop and Notebook, with a value of Rp13,550,400. This agreement came into effect on November 23, 2022 and will expire on December 31, 2031.*
- q. *Agreement with PT Data Citra Solusindo regarding the Maintenance of Backup Storage Devices for Data Center (DC) and Disaster Recovery Center (DRC) of Core Banking of Bank Muamalat with a value of Rp1,918,080. This agreement came into effect on August 2, 2024, and will expire on April 30, 2026.*
- r. *First Addendum to Agreement with PT Citra Sentosa Solusindo regarding the Procurement and Maintenance of Primary Storage Devices for Data Center (DC) and Disaster Recovery Center (DRC) of Core Banking of Bank Muamalat with a value of Rp2,595,000. This agreement came into effect on September 6, 2022, and will expire on June 30, 2026.*
- s. *Agreement with PT Nomina Teknograsi Indodata regarding the Procurement and Maintenance of VMware Server for Fulfillment of DC-DRC Gap, with a value of Rp1,324,640. This agreement came into effect on September 26, 2022, and will expire on September 30, 2025.*

51. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

Bank menandatangani beberapa perjanjian penting seperti yang tersebut dibawah: (lanjutan)

- t. Perjanjian Layanan *payroll* Bank Muamalat bagi Karyawan Nasabah dengan NPCI Provinsi Papua, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.000.000. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 1 November 2022 dan akan berakhir pada tanggal 1 November 2027.
- u. Perjanjian Kerjasama dengan PT Simian Solutions tentang Jasa Implementasi Aplikasi *Medallion Sales*, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.650.000. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 22 Desember 2020 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- v. Addendum I Perjanjian Pengadaan Implementasi dan Pemeliharaan *Endpoint Detection and Response* (EDR) *CrowdStrike* antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT Defender Nusa Semesta dengan nilai sebesar Rp2.687.088. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 4 Juni 2024 dan akan berakhir pada tanggal 23 Maret 2025.
- w. Addendum I Perjanjian Kerjasama dengan PT Sinergy Informasi Pratama tentang Pemeliharaan Firewall Fortinet Bank Muamalat dengan nilai sebesar Rp2.060.038. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 15 Mei 2024 dan akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2025.
- x. Perjanjian Pengadaan dan Pemeliharaan Server dan Lisensi untuk Sistem Bank Kustodian antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT Nagitec dengan nilai kontrak sebesar Rp1.200.000. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 7 Agustus 2024 dan akan berakhir pada tanggal 7 Agustus 2027
- y. Addendum II Perjanjian Kerjasama dengan PT Defender Nusa Semesta tentang Perjanjian Pengadaan dan Pengelolaan Layanan Sistem Keamanan *Security Operation Center* (SOC) dan *Security Device Management* (SDM) pada Sistem Bank Muamalat dengan nilai kontrak sebesar Rp3.286.433. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 7 November 2024 dan akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2026.
- z. Perjanjian Pengadaan dan Pemeliharaan *Network Attached Storage* (NAS) untuk Bank Muamalat antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT Nagitec dengan nilai kontrak sebesar Rp1.775.000. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 8 November 2024 dan akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2028.

51. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

The Bank has signed several important agreements as described below: (continued)

- t. Bank Muamalat Payroll Service Agreement for Customer Employees with NPCI Papua Province, with a value of Rp1,000,000. This agreement came into effect on November 1, 2022 and will expire on November 1, 2027.
- u. Agreement with PT Simian Solutions regarding *Medallion Sales Application Implementation Services*, with a value of Rp2,650,000. This agreement came into effect on December 22, 2020 and will expire on December 31, 2026.
- v. First Addendum to Agreement regarding the Procurement and Maintenance of *Endpoint Detection and Response* (EDR) *CrowdStrike* between PT Bank Muamalat Tbk and PT Defender Nusa Semesta with a value of Rp2,687,088. This agreement came into effect on June 4, 2024, and will expire on March 23, 2025.
- w. First Addendum to Agreement with PT Sinergy Informasi Pratama regarding the maintenance of Fortinet Firewall of Bank Muamalat with a value of Rp2,060,038. This agreement came into effect on May 15, 2024, and will expire on February 28, 2025.
- x. Agreement regarding Procurement and Maintenance of Server and License of Custodian Bank System, between PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT Nagitec, with the value of Rp1,200,000. This agreement came into effect on August 7, 2024, and will expire on August 7, 2027.
- y. Second Addendum to Agreement with PT Defender Nusa Semesta regarding the Procurement and Maintenance of Bank Muamalat Security Operation Center (SOC) and Security Device Management (SDM) application systems with a value of Rp3,286,433. This agreement came into effect on November 7, 2024, and will expire on October 31, 2026.
- z. Agreement regarding Procurement and Maintenance of Network Attached Storage (NAS) for Bank Muamalat, between PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT Nagitec, with the value of Rp1,775,000. This agreement came into effect on November 8, 2024, and will expire on January 31, 2028.

52. INFORMASI TAMBAHAN

- Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 Bank memiliki rasio aset produktif yang diklasifikasikan *non-performing* bruto terhadap total aset produktif masing masing sebesar 2,17% dan 1,75%.
- Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 Bank memiliki piutang, pinjaman dan pembiayaan yang *non-performing* (NPF) bruto terhadap total piutang, pinjaman dan pembiayaan masing masing sebesar 3,35% dan 2,06%.
- Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 Bank memiliki piutang, pinjaman dan pembiayaan yang *non-performing* (NPF) neto terhadap total piutang, pinjaman dan pembiayaan masing masing sebesar 2,74% dan 0,66%.
- Rasio piutang dan pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga masing masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar 40,07% dan 47,14%.

53. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan surat No.088/R/PRD-SRT/II/2025 tanggal 19 Februari 2025 dan No.001/R/SSB-SRT/II/2024 tanggal 22 Februari 2024, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta opini syariah dari DPS.

54. PERKEMBANGAN KONDISI EKONOMI DI INDONESIA

Pada awal tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengumumkan berlakunya "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Virus Corona". Wabah virus corona menjadi pandemi global yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia dan dunia, antara lain ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal.

Resolusi dari dampak ekonomi Indonesia ini, banyak tergantung dari kebijakan fiskal dan moneter yang akan ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia dan otoritas, yang merupakan suatu tindakan yang berada diluar kendali Bank. Oleh karena itu, tidaklah mungkin untuk menentukan dampak masa depan kondisi ekonomi terhadap likuiditas dan pendapatan Bank dan realisasi dari aset, termasuk pengaruh dari nasabah, kreditur, pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

52. ADDITIONAL INFORMATION

- As of December 31, 2024 and 2023, the Bank's non-performing earning assets (gross) to total earning assets ratios are 2.17% and 1.75%, respectively.
- As of December 31, 2024 and 2023, the Bank's non-performing financing (NPF) gross to total receivables, funds and financing ratios are 3.35% and 2.06%, respectively.
- As of December 31, 2024 and 2023, the Bank's non-performing financing (NPF) net to total receivables, funds and financing ratios are 2.74% and 0.66%, respectively.
- The ratios of receivables and financing to total deposits as of December 31, 2024 and 2023 are 40.07% and 47.14%, respectively.

53. OPINION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Based on letters No.088/R/PRD-SRT/II/2025 dated February 19, 2025 and No.001/R/SSB-SRT/II/2024 dated February 22, 2024, for the years ended December 31, 2024 and December 31, 2023, respectively, the Sharia Supervisory Board expresses an opinion that the operations and products of PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk have complied with fatwa and sharia regulations issued by the National Sharia Board of Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) and sharia opinion of DPS.

54. INDONESIA'S ECONOMIC CONDITION

In early 2020, National Agency for Disaster Management of the Republic of Indonesia announced the enactment of "Status of the Certain Disaster Emergency Conditions Due to Corona Virus Pandemic". The corona pandemic, that become global pandemic, had impacted domestic economy, which was characterized by weakening of the rupiah exchange rate and decline in the prices of securities on the capital market.

The resolution of the economic impact in Indonesia in large degree is dependent on any fiscal and monetary measures that may be taken by the Government of the Republic of Indonesia and the authority, an action that is beyond the Bank's control. Therefore, it is not possible to determine the impact of future economics condition to the Bank liquidity and earnings, asset realization, effect from customers, debtors, shareholders, and other stakeholders.

**54. PERKEMBANGAN KONDISI EKONOMI DI INDONESIA
(Lanjutan)**

Pengaruh dari ketidakpastian yang ada pada aset dan liabilitas yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada saat ini tidak dapat diperkirakan jumlahnya. Pengaruh tersebut akan dilaporkan dalam laporan keuangan pada saat diketahui dan dapat diperkirakan jumlahnya.

54. INDONESIA'S ECONOMIC CONDITION (Continued)

The effects of this uncertainty on the assets and liabilities reported in the statement of financial position cannot be presently determined. Such effects will be reported in the financial statements when they are known and can be estimated.

55. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

1. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.001/B/DIR-KPTS/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025, bahwa telah terjadi perubahan susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

2 Januari 2025 / January 2, 2025

Ketua	Sapto Amal Damandari	Chairman
Anggota	Sartono	Member
Anggota	Karim Anggar Prianto	Member
Anggota	Saiful Anwar	Member

2. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.015/B/DIR-KPTS/II/2025 Tanggal 27 Februari 2025, bahwa telah terjadi perubahan susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

27 Februari 2025 / February 27, 2025

Ketua	Sapto Amal Damandari	Chairman
Anggota	Sartono	Member
Anggota	Saiful Anwar	Member
Anggota	Teguh Wahyudi	Member

3. Berdasarkan Surat Ketetapan Divisi *Human Capital Development* No.0002/HSE/TAP/REORG/I/2025 Tanggal 31 Januari 2025, bahwa telah terjadi perubahan Kepala Internal Audit, yaitu menjadi Bapak Riva Yan Abdillah.

- 1. Based on the Decision Letter of the Board of Directors No.001/B/DIR-KPTS/I/2025 dated January 2, 2025, there has been a change in the composition of the Audit Committee:*

- 2. Based on the Decision Letter of the Board of Directors No.015/B/DIR-KPTS/II/2025 dated February 27, 2025, there has been a change in the composition of the Audit Committee:*

- 3. Based on the Decision Letter of the Human Capital Development Division No.0002/HSE/TAP/REORG/I/2025 dated January 2, 2025, there has been a change in the Head of Internal Audit, now held by Mr. Riva Yan Abdillah.*

56. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 27 Maret 2025.

56. COMPLETION OF FINANCIAL STATEMENTS

The Bank's management is responsible for the preparation of the financial statements that were completed and authorized for issue by the Board of Directors on March 27, 2025.

Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page is intentionally left blank.

LAMPIRAN

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

ATTACHMENT

Financial Services Authority Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2020 concerning Transparency and Publication of Reports for Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units

Keterangan	Halaman Page	Description
PERIODE TAHUNAN		ANNUAL PERIOD
1. Ruang Lingkup		1. Scope
a. Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan BUS tahunan meliputi:	√	a. Annual report of published financial statements and information on financial performance of Sharia Commercial Banks (BUS) covers:
1) informasi umum;	√	1) general information;
2) informasi kinerja keuangan;	√	2) information on financial performance;
3) eksposur risiko dan permodalan;	√	3) risk exposure and capital;
4) tata kelola;	√	4) governance;
5) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	√	5) audited financial statements; and
6) informasi terkait dengan kelompok usaha BUS.	√	6) related information on BUS business group.
b. Uraian masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:		b. Description of the respective scope of discussions are as follow:
1) Informasi Umum		1) General Information
Informasi umum dalam laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan BUS paling sedikit meliputi:		General information in the annual report of published financial statements and information on financial performance of BUS cover at the very least:
a) Ikhtisar Data Keuangan Penting		a) Financial Highlights
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) Tahun Buku atau sejak BUS melakukan kegiatan usaha, bagi BUS yang melakukan kegiatan usaha kurang dari 2 (dua) tahun. Ikhtisar data keuangan penting paling sedikit meliputi:		The Financial Highlights section presents financial information in a comparative format for 2 (two) financial years, or since the BUS began its business for BUS that has been in business for less than 2 (two) years. At the very least, financial highlights covers:
(1) net pendapatan setelah distribusi bagi hasil, imbalan, dan bonus;	8	(1) net revenues after distribution of profit sharing, fees and bonuses;
(2) laba/rugi operasional;	8	(2) operating profit/loss;
(3) laba/rugi sebelum pajak;	8	(3) profit/loss before taxes;
(4) laba/rugi bersih;	9	(4) net profit/loss;
(5) total laba/rugi komprehensif;	9	(5) total comprehensive profit/loss;
(6) laba bersih per saham;	9	(6) net income per share;
(7) jumlah aset;	8	(7) total assets;
(8) jumlah liabilitas;	8	(8) total liabilities;
(9) jumlah ekuitas;	8	(9) total equity;
(10) aset produktif;	9	(10) earning assets;
(11) dana pihak ketiga;	8	(11) third party funds;
(12) pembiayaan yang diterima;	-	(12) borrowings;
(13) rasio keuangan, paling sedikit meliputi:		(13) financial ratios, at least of:
i. rasio KPMM;	9	i. CAR;
ii. rasio ROA;	9	ii. ROA;

Keterangan	Halaman Page	Description
iii. rasio ROE;	9	iii. ROE;
iv. rasio BOPO;	9	iv. BOPO;
v. rasio CIR;	9	v. CIR;
vi. persentase pelanggaran dan pelampauan BMPD;	9	vi. percentage of LLL violation and exceedance;
vii. GWM;	9	vii. mandatory minimum reserves;
viii. rasio PDN;	9	viii. net open position;
ix. rasio NPF gross dan net; dan	9	ix. NPF gross and NPF net; and
x. rasio laba/rugi terhadap pendapatan; dan	9	x. profit/loss to revenue ratio; and
(14) informasi lain yang relevan	-	(14) other relevant information.
b) Profil BUS		
Profil BUS paling sedikit meliputi:	66	The profile of BUS covers at least:
(1) nama BUS termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada Tahun Buku;	66; 71	(1) the name of BUS, including if there has been a change of name, the reason for the change, and effective date of name in the Fiscal Year;
(2) informasi mengenai kantor pusat BUS yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai BUS meliputi:	71	(2) information on the head office of BUS where the general public may obtain information about the BUS, covering:
i. alamat;	67	i. address;
ii. nomor telepon;	67	ii. telephone number;
iii. nomor faksimile;	67	iii. fax number;
iv. alamat surat elektronik; dan	67	iv. e-mail address; and
v. alamat situs web;	67	v. web site address;
(3) riwayat singkat BUS;	68-70	(3) brief profile of BUS;
(4) visi dan misi BUS;	74-77	(4) vision and mission of BUS;
(5) kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada Tahun Buku, serta jenis produk dan aktivitas;	78-94	(5) line(s) of business according to the latest articles of association, business activities performed in the Fiscal Year, and types of products and activities;
(6) struktur organisasi BUS, paling sedikit sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah direksi yang disertai dengan nama dan jabatan;	110-113	(6) organization structure of BUS, at the very least to 1 (one) level below the Directors, with name and position;
(7) susunan dan komposisi pemegang saham, yaitu nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham, termasuk:		(7) shareholding structure and composition, that is, names of shareholders and percentage of share-ownership, including:
i. pemegang saham yang memiliki paling sedikit 5% (lima persen) saham BUS;	141	i. shareholders with a minimum of 5% (five percent) of shares of the BUS;
ii. anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang memiliki saham BUS;	158-159	ii. members of the board of directors and board of commissioners that hold shares of the BUS;
iii. kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham BUS (jika ada); dan	141	iii. public shareholders, that is, shareholders that each held less than 5% (five percent) of shares of the BUS (if any); and

Keterangan	Halaman Page	Description
iv. informasi mengenai pemegang saham pengendali BUS sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	142	iv. information on the controlling shareholder(s) of the BUS, up to the individual ultimate shareholders, presented in a schematic diagram or chart;
(8) profil Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, paling sedikit meliputi:	126-130	(8) profiles of the Board of Directors, Board of Commissioners, and the DPS (Sharia Supervisory Board), covering at least:
i. susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, serta jabatan dan ringkasan riwayat hidup.	113-131	i. structure of the Board of Directors, Board of Commissioners and DPS, as well as position and curriculum vitae.
Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/ atau anggota DPS yang terjadi setelah Tahun Buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, susunan yang dicantumkan yaitu susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan/ atau DPS sebelum dan setelah perubahan;	-	In the event of changes in the membership composition of the Board of Directors, Board of Commissioners and/ or DPS occurring subsequent to the end of the Fiscal Year and up to the deadline for submission of the annual report of published financial statements and information on financial performance, membership composition of the Board of Directors, Board of Commissioners and DPS shall be presented both prior and after the change;
ii. foto terbaru;	113-131	ii. latest photograph;
iii. usia;	113-131	iii. age;
iv. kewarganegaraan;	113-131	iv. citizenship;
v. riwayat pendidikan;	113-131	v. education;
vi. riwayat jabatan, meliputi informasi:		vi. work history, with information on:
(i) nomor dan tanggal akta pengesahan, persetujuan, dan/atau pencatatan dari instansi yang berwenang atas penunjukan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS;	113-131	(i) number and date of deed of ratification, letter of approval and/or record from the relevant authority regarding the appointment as member of the Board of Directors, Board of Commissioners or DPS;
(ii) rangkap jabatan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS (jika ada); dan	113-131	(ii) concurrent position(s) of members of the Board of Directors, Board of Commissioners and DPS (if any); and
(iii) pengalaman dan periode kerja, baik di dalam maupun di luar BUS;	113-131	(iii) prior work experience and period of service, in or outside the BUS;
vii. pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS selama Tahun Buku (jika ada); dan	113-131	vii. education and/or training attended by members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and DPS during the Fiscal Year (if any); and
viii. hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali (jika ada) dan nama anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali tersebut;	113-131	viii. financial, management and share ownership relations, and/or family relationship with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or controlling shareholders (if any) and names of the members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or the controlling shareholder;

Keterangan	Halaman Page	Description
(9) profil singkat pejabat eksekutif, yang meliputi susunan, jabatan, dan ringkasan riwayat hidup;	132-136	(9) brief profiles of executive officers, with structure, position and summary curriculum vitae;
(10) jumlah pegawai dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia pegawai dalam Tahun Buku;	137-138	(10) number of employees and employee grouping by education and age in the Fiscal Year;
(11) nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang.	150-152	(11) names and address of supporting professionals/institutions.
Dalam hal terdapat lembaga dan/atau profesi penunjang yang memberikan jasa secara berkala kepada BUS, misalnya kantor akuntan publik dan notaris, diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, komisi (fee), dan periode penugasan; dan	150	In the event of supporting professionals/institutions that provide regular services to the BUS, such as a public accountant firm or notary, should be disclosed information on services provided, commission (fee) paid, and period of assignment; and
(12) penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima BUS, baik yang berskala nasional maupun internasional dalam Tahun Buku terakhir (jika ada), yang meliputi:	13-16	(12) award and/or certification received by the BUS, at the national and international level, in the last Fiscal Year (if any), that covers:
i. nama penghargaan dan/atau sertifikasi;	13-16	i. name of award and/or certification;
ii. badan atau lembaga yang memberikan penghargaan dan/atau sertifikasi; dan	13-16	ii. organization/institution that issued the award and/or certification; and
iii. masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (jika ada).	13-16	iii. validity period of award and/or certification (if any).
c) Laporan Direksi	46	c) Report of the Board of Directors
Laporan Direksi paling sedikit meliputi uraian singkat mengenai kinerja BUS yang terdiri atas:		The report of the Board of Directors should at least present brief information on the performance of the BUS, comprising of:
(1) strategi dan kebijakan yang ditetapkan;	46-48	(1) strategy and policies taken;
(2) perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan;	49-50	(2) comparison between achievements and targets;
(3) kendala yang dihadapi BUS;	45-46	(3) constraints faced by the BUS;
(4) gambaran tentang prospek usaha;	51-53	(4) overview of business prospects;
(5) penerapan tata kelola BUS;	54	(5) implementation of governance at the BUS;
(6) perubahan komposisi anggota direksi dan alasan perubahannya (jika ada);	58; 131	(6) changes in membership composition of the Board of Directors and the reason for such changes (if any);
(7) aktivitas utama;	78-94	(7) primary activities;
(8) teknologi informasi;	54-55	(8) information technology;
(9) penyaluran pembiayaan kepada nasabah UMKM;	51	(9) financing to customers in the MSME segment;
(10) persentase imbalan penghimpunan dan penyaluran dana;	-	(10) percentage of fees in funding and financing;
(11) perkembangan perekonomian dan target pasar;	44-46	(11) economic development and market target;
(12) jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri;	95-109	(12) business partners and networks, domestic and/or overseas;
(13) jumlah, jenis, dan lokasi jaringan kantor BUS;	95-109	(13) number, type and location of branch offices of BUS;
(14) kepemilikan direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha BUS;	141-142	(14) ownership by the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders in the business group of BUS;
(15) perubahan penting yang terjadi pada BUS dan kelompok usaha BUS dalam tahun yang bersangkutan;	-	(15) significant changes occurring at the BUS and business group of BUS in the current year;

Keterangan	Halaman Page	Description
(16) hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang; dan	51-52	(16) prediction of significant future issues; and
(17) sumber daya manusia, meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.	136-138	(17) information on human resources, covering number, education level, training and competence development programs attended.
d) Laporan Dewan Komisaris	34	d) Report of the Board of Commissioners
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit meliputi:		The report of the Board of Commissioners should at least covers:
(1) penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan BUS;	36-38	(1) assessment of the performance of the Board of Directors in the management of the BUS;
(2) hasil pengawasan terhadap implementasi strategi BUS;	38-40	(2) supervision on the implementation of strategies of the BUS;
(3) tanggapan atas prospek usaha BUS yang disusun oleh direksi;	41	(3) opinion on the business prospects of BUS as prepared by the Board of Directors;
(4) tanggapan atas penerapan tata kelola BUS;	41-42	(4) opinion on the implementation of governance at the BUS;
(5) perubahan komposisi anggota dewan komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan	43; 131	(5) changes in the membership composition of the Board of Commissioners and the reason for such changes (if any); and
(6) frekuensi dan mekanisme pemberian nasihat kepada anggota Direksi.	36	(6) frequency and mechanism for advising the members of the Board of Directors.
2) Informasi Kinerja Keuangan		2) Information on Financial Performance
Informasi kinerja keuangan meliputi analisis dan pembahasan manajemen yang memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lain dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam Tahun Buku, yang paling sedikit meliputi:	153-175	Information on financial performance includes a management discussion and analysis presenting an analysis and discussion of financial statements accounts and other important information with an emphasis on material changes that occurred during the Fiscal Year, which at least includes:
a) tinjauan kinerja per segmen usaha antara lain segmen konsumen, segmen ritel, atau segmen korporasi paling sedikit mengenai:	153-175	a) review of performance by business segments, such as consumer, retail or corporate segments, at least covering:
(1) pendapatan; dan	153-175	(1) revenues; and
(2) profitabilitas;	153-175	(2) profitability;
b) tinjauan kinerja keuangan yang mencakup perbandingan kinerja keuangan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, penjelasan mengenai penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, yang paling sedikit meliputi:		b) review of financial performance, comparing current year financial performance with those in the preceding year, as well as explanation for changes in the accounts and the impact of such changes, covering at least:
(1) penyaluran dana (investasi dan pembiayaan) dan total aset;	176-177	(1) fund disbursement (investment and financing) and total assets;
(2) dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain;	179	(2) third party funds and other sources of funding;
(3) ekuitas;	179-175	(3) equity;
(4) pendapatan, beban, laba/rugi, penghasilan komprehensif lain, dan total laba/rugi komprehensif; dan	180-182	(4) revenues, expenses, profit/loss, other comprehensive income, and total comprehensive profit/loss; and
(5) arus kas;	196-197	(5) cash flows;
c) analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan;	183-185	c) analysis of earning asset quality and financial ratios;
d) struktur permodalan;	191	d) capital structure;
e) informasi atau fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan publik (jika ada);	192	e) material information or fact subsequent to the date of public accountant report (if any);

Keterangan	Halaman Page	Description
f) aspek pemasaran produk dan aktivitas BUS, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	195-197	f) marketing aspects of products and activities of the BUS, containing at least information on marketing strategy and market share;
g) uraian mengenai dividen selama 2 (dua) Tahun Buku terakhir (jika ada), paling sedikit:		g) description of dividend distribution during the last 2 (two) Fiscal Years (if any), disclosing at least:
(1) kebijakan dividen;	197-198	(1) dividend policy;
(2) tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen nonkas;	197-198	(2) date of payment of cash dividend and/or date of distribution of non-cash dividend;
(3) jumlah dividen per saham, baik berupa kas maupun nonkas;	197-198	(3) earning per share, cash or non-cash;
(4) jumlah pembayaran dividen per tahun;	197-198	(4) amount of dividend payment in the year;
(5) perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap BUS dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	203-212	(5) changes in laws and regulations with significant impact to the BUS and the impact thereof to the financial statements (if any); and
(6) perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);	213	(6) changes in accounting policies, reason for such changes, and the impact thereof to the financial statements (if any);
h) laporan distribusi bagi hasil;	188	h) report of distribution of profit sharing;
i) laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf; dan	188	i) report of sources and utilization of zakat and wakaf funds; and
j) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.	188-189	j) report of sources and utilization of social donation funds.
3) Eksposur Risiko dan Permodalan	285-296	3) Risk exposure and capital
Ruang lingkup eksposur risiko dan permodalan mengacu pada Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	285-296	The scope of discussions on risk exposure and capital shall refers to the Attachment to this OJK Circular Letter.
4) Tata Kelola	330	4) Governance
a) Informasi tata kelola	330-639	a) Information on governance
Dalam hal BUS mengungkapkan informasi tata kelola sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, ruang lingkup informasi tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.	330-639	In the event that BUS discloses information on governance as an inseparable part of the annual report of published financial statements and information on financial performance, the scope of governance information is in accordance with the provisions of laws and regulations regarding the implementation of good corporate governance for sharia commercial banks and sharia business units as well as regulations of the Financial Services Authority concerning the implementation of governance in providing remuneration for sharia commercial banks and sharia business units.
b) Laporan Keberlanjutan	Buku Terpisah Separate Book	b) Sustainability Report
(1) Laporan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.	√	(1) The sustainability report should conform with relevant regulations from OJK on the implementation of sustainable finance for financial services institutions, issuers, and public companies.

Keterangan	Halaman Page	Description
Dalam hal BUS menyusun laporan keberlanjutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, ruang lingkup laporan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.		In the event that BUS prepares the sustainability report as an inseparable part of the annual report of published financial statements and information on financial performance, the scope of such sustainability report should conform with relevant regulations from OJK on the implementation of sustainable finance for financial services institutions, issuers, and public companies.
(2) Laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan BUS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:	Buku Terpisah Separate Book	(2) Social and environmental responsibility report of the BUS in accordance with laws and regulations on social and environmental responsibility for limited liability companies. Information on social and environmental responsibility covers management policies, types of programs, and costs expended, among other things in aspects of:
(a) lingkungan hidup;	-	(a) environment;
(b) praktik ketenagakerjaan;	-	(b) labor practices;
(c) praktik kegiatan institusi yang sehat;	-	(c) sound institutional practices;
(d) konsumen; dan	-	(d) consumer; and
(e) pengembangan masyarakat.	-	(e) community development.
Dalam hal BUS menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan pada laporan tersendiri seperti laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau laporan keberlanjutan (sustainability report), BUS dikecualikan untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan.	√	In the event that BUS presents information on social and environmental responsibility in a separate report such as in a social and environmental responsibility report or a sustainability report, the BUS is exempted from disclosing information regarding social and environmental responsibility in the annual report of published financial statements and information on financial performance.
5) Laporan Keuangan yang Telah Diaudit	Lampiran Attachment	5) Audited Financial Statements
Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi:	Lampiran Attachment	The financial statements that have been audited by a public accountant and public accountant firm registered with the OJK, which covers:
a) laporan posisi keuangan;	√	a) statement of financial position;
b) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;	√	b) statement of profit or loss and other comprehensive income;
c) laporan perubahan ekuitas;	√	c) statement of changes in equity;
d) laporan arus kas; dan	√	d) statement of cash flows; and
e) catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontinjensi.	√	e) notes to the financial statements, including information on commitments and contingencies.
6) Informasi Terkait dengan Kelompok Usaha BUS		6) Information related to the business group of BUS
Bagi BUS yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, menambahkan laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan dengan:	163-166	For BUS that is part of a business group and/or that have a Subsidiary Entity, the following information should be included in the annual report of published financial statements and information on financial performance:

Keterangan	Halaman Page	Description
a) struktur kelompok usaha BUS yang meliputi:		a) structure of BUS business group, covering:
(1) struktur kelompok usaha BUS, yang antara lain terdiri dari BUS, Entitas Anak, perusahaan terelasi, Entitas Induk sampai dengan <i>ultimate shareholder</i> ;	145-149	(1) structure of BUS business group, comprising the BUS, Subsidiary Entity, Related Entity, Parent Entity, and up to the ultimate shareholder;
(2) struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha BUS; dan	-	(2) management relationship among companies in the BUS business group; and
(3) pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain (<i>shareholders acting in concert</i>).	-	(3) shareholders acting in concert
Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan BUS, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian;	-	Shareholders acting in concert refer to individual or institutional shareholders with a common objective of controlling the BUS, with or without a formal agreement;
b) transaksi antara BUS dengan pihak berelasi dalam kelompok usaha BUS, dengan memperhatikan hal sebagai berikut:	199-201	b) transactions between the BUS and related parties in the BUS business group, with consideration of the followings:
(1) informasi transaksi dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan BUS maupun yang dilakukan oleh setiap entitas di dalam kelompok usaha BUS di bidang keuangan;	199-201	(1) information on transactions with related parties, whether conducted by BUS or by any entity in the BUS business group in the financial sector;
(2) pihak berelasi adalah pihak-pihak sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan;	199-201	(2) related parties are parties defined as such in relevant financial accounting standards;
(3) jenis transaksi dengan pihak berelasi, antara lain:	199-201	(3) types of transaction with related parties, including:
(a) kepemilikan silang (<i>cross shareholding</i>);	√	(a) cross shareholding;
(b) transaksi dari suatu kelompok usaha yang bertindak untuk kepentingan kelompok usaha lain;	√	(b) transactions by a business group performed in the interest of another business group;
(c) pengelolaan likuiditas jangka pendek dalam kelompok usaha;	√	(c) short-term liquidity management in the business group;
(d) penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh entitas lain dalam satu kelompok usaha;	√	(d) funding provided to, or received by, another entity in a business group;
(e) eksposur kepada pemegang saham mayoritas antara lain dalam bentuk pinjaman, komitmen, dan kontinjensi; dan	√	(e) exposure to a majority shareholder in the form of, among others, loans, commitments and contingencies; and
(f) pembelian, penjualan, dan/atau penyewaan aset dengan entitas lain dalam suatu kelompok usaha, termasuk yang dilakukan dengan <i>repurchase agreement (repo)</i> ;	√	(f) transactions for the purchase, sale and/or rental of assets with another entity in the business group, including transactions with repurchase agreement (repo);

Keterangan	Halaman Page	Description
c) transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan oleh setiap entitas dalam kelompok usaha BUS di bidang keuangan;	199-201	c) transactions with related parties conducted by each entity in the BUS business group in the financial sector;
d) penyediaan dana, komitmen, atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan BUS kepada nasabah dan/atau pihak yang telah memperoleh penyaluran dana dari BUS;	199-201	d) the provision of funding, commitments or equivalent facilities from an entity in the BUS business group to the customers and/or parties that already received financing from the BUS;
e) adanya larangan, batasan, dan/atau hambatan signifikan lain untuk melakukan transfer dana atau untuk pemenuhan modal yang dipersyaratkan oleh otoritas (<i>regulatory capital</i>) antara BUS dengan entitas lain dalam satu kelompok usaha; dan	-	e) existence of a prohibition, restriction, and/or other significant constraint to transfer funds or to fulfil the required regulatory capital between BUS and other entities in a business group; and
f) nama dan alamat Entitas Anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana BUS memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi BUS tersebut (jika ada).	145-149	f) name and address of Subsidiary Entity, associated entities and joint venture entities where the BUS have a common control with the entity, along with the percentage of share-ownership, line of business, total assets and operational status of the BUS (if any).
c. BUS yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik menambahkan ruang lingkup informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.	√	c. The BUS that is an Issuer and/or a Public Company should include in addition the scope of information in accordance with the provisions of OJK Regulation regarding the annual report of issuer or public company.

Referensi SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

SEOJK Reference No. 16/SEOJK.04/2021: Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Description
I. Ketentuan Umum		I. General Provision
1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	√	1. In this Financial Services Authority Circular Letter what is meant by:
a. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau perusahaan publik.	√	a. The Annual Report is a report on the Board of Directors and Board of Commissioners accountability in managing and supervising issuers or public companies within a period of 1 (one) fiscal year to the general meeting of shareholders prepared based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation concerning the Annual Report of issuers or public companies
b. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.	√	b. Issuers are parties who make public offerings
c. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	√	c. A Public Company is a company whose shares are owned by at least 300 (three hundred) shareholders and has a paid-up capital of at least Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah) or a number of shareholders and paid-up capital as determined by the Financial Services Authority
d. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.	√	d. A Public Company is an Issuer that has made a public offering of equity securities or a Publically-listed Company
e. Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.	√	e. A Sustainability Report is a report published to the public that contains the economic, financial, social, and environmental performance of a financial service institution, Issuer, and Public Company in running a sustainable business
f. Direksi:	√	f. Board of Directors:
1) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan	√	1) For an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the Board of Directors as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and
2) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengelolaan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut.	√	2) For an Issuer or a Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that carries out the management of the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.

Keterangan		Halaman Page	Description	
g.	Dewan Komisaris:	√	g.	Board of Commissioners:
1)	bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan	√	1)	For an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, the Board of Commissioners as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and
2)	bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut.	√	2)	For the Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that supervises the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.
h.	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS:	√	h.	General Meeting of Shareholders hereinafter abbreviated as GMS:
1)	bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan	√	1)	For an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the GMS as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company; and
2)	bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut.	√	2)	For an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that has authority that is not given to any other body that carries out management and supervisory functions, within the limits specified in the legislation and/or articles of association governing the legal entity.
2.	Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.	√	2.	The Annual Report of Issuers or Public Companies is an important source of information for investors or shareholders as one of the basic considerations in making investment decisions and a means of supervision of Issuers or Public Companies.
3.	Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.	√	3.	Along with the development of the capital market and the increasing need for information disclosure by investors or shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to present quality, accurate, and accountable information through the Annual Reports of Issuers or Public Companies.
4.	Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.	√	4.	Annual Reports that are prepared regularly and informatively can provide convenience for investors or shareholders and stakeholders in obtaining the required information.
5	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.	√	5	This Financial Services Authority Circular is a guideline for Issuers or Public Companies that must be applied in preparing Annual Reports and Sustainability Reports.

Keterangan	Halaman Page	Description
II. Bentuk Laporan Tahunan		II. Format of Annual Report
1. Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.	✓	1. Annual Report should be presented in the printed format and in electronic document copy..
2. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.	✓	2. The printed version of the Annual Report should be printed on light-colored paper of fine quality, in A4 size, bound and can be reproduced in good quality.
3. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami.	✓	3. The Annual Report may present information in the form of pictures, graphs, tables, and/or diagrams by including clear titles and/or descriptions, so that they are easy to read and understand.
4. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format pdf.	✓	4. The Annual Report presented in electronic document format is the Annual Report converted into pdf format.
III. Isi Laporan Tahunan		III. Content Of Annual Report
1. Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai:		1. Annual Report should contain at least the following information:
a. Ikhtisar data keuangan penting;	✓	a. Summary of key financial information;
b. Informasi saham (jika ada);	✓	b. Stock information (if any);
c. Laporan Direksi;	✓	c. The Board of Directors report;
d. Laporan Dewan Komisaris;	✓	d. The Board of Commissioners report;
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik;	✓	e. Profile of Issuer or Public Company;
f. Analisis dan pembahasan manajemen;	✓	f. Management discussion and analysis;
g. Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	✓	g. Corporate governance applied by the Issuer or Public Company;
h. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;	Buku terpisah Separate book	h. Corporate social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company;
i. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	✓	i. Audited annual report; and
j. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan;	✓	j. Statement that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the Annual Report;
2. Uraian Isi Laporan Tahunan		2. Description of Content of Annual Report
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	8	a. Summary of Key Financial Information Summary of Key Financial Information contains financial information presented in comparison with previous 3 (three) fiscal years or since commencement of business if the Issuers or the Public Company commencing the business less than 3 (three) years, at least contain:
1) pendapatan/penjualan;	8	1) income/sales;
2) laba bruto;	8	2) gross profit;
3) laba (rugi);	8	3) profit (loss);
4) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	8	4) total profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non-controlling interest;
5) total laba (rugi) komprehensif;	9	5) total comprehensive profit (loss);
6) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	9	6) total comprehensive profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non controlling interest;
7) laba (rugi) per saham;	9	7) earning (loss) per share;
8) jumlah aset;	8	8) total assets;
9) jumlah liabilitas;	8	9) total liabilities;
10) jumlah ekuitas;	8	10) total equities;

Keterangan		Halaman Page	Description	
11)	rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	9	11)	profit (loss) to total assets ratio;
12)	rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	9	12)	profit (loss) to equities ratio;
13)	rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/ penjualan;	9	13)	profit (loss) to income ratio;
14)	rasio lancar;	9	14)	current ratio;
15)	rasio liabilitas terhadap ekuitas;	9	15)	liabilities to equities ratio;
16)	rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	9	16)	liabilities to total assets ratio; and
17)	informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industri;	9	17)	other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and type of industry;
b.	Informasi Saham Informasi Saham (jika ada) paling sedikit memuat:	11	b.	Stock Information Stock Information (if any) at least contains:
1)	saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	-	1)	shares issued for each three-month period in the last 2 (two) fiscal years (if any), at least covering:
a)	jumlah saham yang beredar;		a)	number of outstanding shares;
b)	kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	-	b)	market capitalization based on the price at the Stock Exchange where the shares listed on;
c)	harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan	-	c)	highest share price, lowest share price, closing share price at the Stock Exchange where the shares listed on; and
d)	volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	-	d)	share volume at the Stock Exchange where the shares listed on;
	Informasi pada huruf a) diungkap oleh Emiten yang merupakan Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek;	-		Information in point a) should be disclosed by the Issuer, the public company whose shares is listed or not listed in the Stock Exchange;
	Informasi pada huruf b), c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika Emiten merupakan Perusahaan Terbuka dan sahamnya tercatat di Bursa Efek;	-		Information in point b), point c), and point d) only be disclosed if the Issuer is a public company whose shares is listed in the Stock Exchange;
2)	dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	12	2)	in the event of corporate actions, including stock split, reverse stock, dividend, bonus share, and change in par value of shares, then the share price referred to in point 1), should be added with explanation on:
a)	tanggal pelaksanaan aksi korporasi;	12	a)	date of corporate action;
b)	rasio pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham	12	b)	stock split ratio, reverse stock, dividend, bonus shares, and change in par value of shares;
c)	jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan	12	c)	number of outstanding shares prior to and after corporate action; and
d)	jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan	12	d)	The number of convertible securities exercised (if any); and
e)	harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;	12	e)	share price prior to and after corporate action;

Keterangan		Halaman Page	Description
3)	dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>), dan/atau penghapusan pencatatan saham (<i>delisting</i>) dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau penghapusan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut; dan	-	3) in the event that the company's shares were suspended and/or delisted from trading during the year under review, then the Issuers or Public Company should provide explanation on the reason for the suspension and/or delisting; and
4)	dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau penghapusan pencatatan saham (<i>delisting</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 3) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau penghapusan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut;	-	4) in the event that the suspension and/or delisting as referred to in point 3) was still in effect until the date of the Annual Report, then the Issuer or the Public Company should also explain the corporate actions taken by the company in resolving the suspension and/or delisting;
c.	Laporan Direksi Laporan Direksi paling sedikit memuat:	42	c. The Board of Directors Report The Board of Directors Report should at least contain the following items:
1)	uraian singkat mengenai kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit meliputi:	45	1) the performance of the Issuer or Public Company, at least covering:
a)	strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	46-48	a) strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company;
b)	peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	49	b) Role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;
c)	proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	49	c) Process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy;
d)	perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan	49-50	d) comparison between achievement of results and targets; and
e)	kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;	45-46	e) challenges faced by the Issuer or Public Company;
2)	gambaran tentang prospek usaha;	51-53	2) description on business prospects;
3)	penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; dan	54	3) implementation of good corporate governance by Issuer or Public Company; and
4)	perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada);	58; 131	4) changes in the composition of the Board of Directors and the reason behind (if any);
d.	Laporan Dewan Komisaris Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat:	34	d. The Board of Commissioners Report The Board of Commissioners Report should at least contain the following items:
1)	Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik;	36-38	1) Assessment on the performance of the Board of Directors in managing the Issuer or the Public Company;
2)	Pengawasan terhadap implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	38-40	2) Supervision on the implementation of the strategy of the Issuer or Public Company;
3)	Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi;	41	3) View on the business prospects of the Issuer or Public Company as established by the Board of Directors;

Keterangan		Halaman Page	Description	
4)	Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	41-42	4)	View on the implementation of the corporate governance by the Issuer or Public Company;
5)	Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan	43; 131	5)	Changes in the composition of the Board of Commissioners and the reason behind (if any); and
e.	Profil Emiten atau Perusahaan Publik Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat:	66	e.	Profile of the Issuer or Public Company Profile of the Issuer or Public Company should cover at least:
1)	Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	66; 71	1)	Name of Issuer or Public Company, including change of name, reason of change, and the effective date of the change of name during the year under review;
2)	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	67	2)	access to Issuer or Public Company, including branch office or representative office, where public can have access of information of the Issuer or Public Company, which include:
a)	Alamat;	67	a)	Address;
b)	Nomor telepon;	67	b)	Telephone number;
c)	Nomor faksimile;	67	c)	Facsimile number;
d)	Alamat surat elektronik; dan	67	d)	E-mail address; and
e)	Alamat Situs Web;	67	e)	Website address;
3)	Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	68-70	3)	Brief history of the Issuer or Public Company;
4)	Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik;	74-77	4)	Vision and mission of the Issuer or Public Company;
5)	Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	78-94	5)	Line of business according to the latest Articles of Association, and types of products and/or services produced;
6)	Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik;	95-109	6)	Operational area of the Issuer or Public Company
7)	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan;	110-113	7)	Structure of organization of the Issuer or Public Company in chart form, at least 1 (one) level below the Board of Directors, with the names and titles;
8)	daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan	153	8)	List of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;
9)	Profil Direksi, paling sedikit memuat:	126-130	9)	The Board of Directors profiles include:
a)	Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;	126-130	a)	Name and short description of duties and functions;
b)	Foto terbaru;	126-130	b)	Latest photograph;
c)	Usia;	126-130	c)	Age;
d)	Kewarganegaraan;	126-130	d)	Citizenship;
e)	Riwayat pendidikan;	126-130	e)	Education;
f)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	126-130	f)	history position, covering information on:

Keterangan		Halaman Page	Description
(1)	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	126-130	(1) Legal basis for appointment as member of the Board of Directors to the said Issuer or Public Company;
(2)	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	126-130	(2) Dual position, as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or member of committee, and other position (if any); and
(3)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	126-130	(3) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
g)	hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi;	126-130; 458	g) Affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, majority and controlling shareholders, either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and
h)	Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	58; 131	h) Changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed;
10)	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	120-125	10) The Board of Commissioners profiles, at least include:
a)	Nama;	120-125	a) Name;
b)	Foto terbaru;	120-125	b) Latest photograph;
c)	Usia;	120-125	c) Age;
d)	Kewarganegaraan;	120-125	d) Citizenship;
e)	Riwayat pendidikan;	120-125	e) Education;
f)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:		f) History position, covering information on:
(1)	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	120-125	(1) Legal basis for the appointment as member of the Board of Commissioners who is not Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company;
(2)	Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	120-125	(2) Legal bases for the first appointment as member of the Board of Commissioners who also Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company;
(3)	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	120-125	(3) Dual position; as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of committee and other position (if any); and

Keterangan		Halaman Page	Description
(4)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	120-125	(4) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
g)	Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafilias	120-125; 457	g) Affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties; In the event that a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter;
h)	Pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada);	434-435	h) Statement of independence of Independent Commissioner in the event that the Independent Commissioner has been appointed more than 2 (two) periods (if any);
i)	Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	39; 131	i) Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed;
11)	Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	-	11) In the event that there were changes in the composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors occurring between the period after year-end until the date the Annual Report submitted, then the last and the previous composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors shall be stated in the Annual Report;
12)	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku;	136-138	12) Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year; Disclosure of information can be presented in tabular form.
13)	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari:	140	13) Names of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, including:
a)	Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;	141	a) Shareholders having 5% (five percent) or more shares of Issuer or Public Company;
b)	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan	158-159	b) Commissioners and Directors who own shares of the Issuers or Public Company; and
c)	Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham emiten atau perusahaan publik;	141	c) Groups of public shareholders, or groups of shareholders, each with less than 5% (five percent) ownership shares of the Issuers or Public Company;

Keterangan		Halaman Page	Description
14)	Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	141-142	14) The percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
15)	Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	142	15) Number of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, based on:
a)	Kepemilikan institusi lokal;	142	a) Ownership of local institutions;
b)	Kepemilikan institusi asing;	142	b) Ownership of foreign institutions;
c)	Kepemilikan individu lokal; dan	142	c) Ownership of local individual; and
d)	Kepemilikan individu asing;	142	d) Ownership of foreign individual;
16)	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	142	16) Information on major shareholders and controlling shareholders the Issuers of Public Company, directly or indirectly, and also individual shareholder, presented in the form of scheme or diagram;
17)	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (jika ada);	145-149	17) Name of subsidiaries, associated companies, joint venture controlled by Issuers or Public Company, with entity, percentage of stock ownership, line of business, total assets and operating status of the Issuers of Public Company (if any);
	Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut;		For subsidiaries, include the addresses of the said subsidiaries;
18)	Kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan (jika ada);	143	18) Chronology of share listing, number of shares, par value, and bid price from the beginning of listing up to the end of the financial year, and name of Stock Exchange where the Issuers of Public Company shares are listed;
19)	Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbalance hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada);	144	19) Other securities listing information other than the securities as referred to in number 18), which have not yet matured in the fiscal year, at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any);
20)	Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/ aliansinya meliputi:	150	20) Information on the use of a Public Accountant (AP) and a Public Accounting firm (KAP) services and their networks/associations/alliances include:
a)	nama dan alamat;	150	a) name and address;
b)	periode penugasan;	150	b) period of assignment;
c)	informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan;	150	c) informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan;

Keterangan		Halaman Page	Description
d)	biaya jasa (<i>fee</i>) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan	150	d) Audit and/or non-audit fees for each assignment given during the fiscal year; and
e)	dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/ aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan	150	e) In the event that AP and KAP and their network/association/ alliance, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed; and
21)	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP;	151-152	21) Name and address of capital market supporting institutions and/or professionals other than AP and KAP
f.	Analisis dan Pembahasan Manajemen Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:	154	f. Management Discussion and Analysis Management Analysis and Discussion Annual should contain discussion and analysis on financial statements and other material information emphasizing material changes that occurred during the year under review, at least including:
1)	Tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	162	1) Operational review per business segment, according to the type of industry of the Issuer or Public Company including:
a)	Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;	153-175	a) Production, including process, capacity, and growth;
b)	Pendapatan/penjualan; dan	153-175	b) Income/sales; and
c)	Profitabilitas;	153-175	c) Profitability;
2)	Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	176	2) comprehensive financial performance analysis which includes a comparison between the financial performance of the last 2 (two) fiscal years, and explanation on the causes and effects of such changes, among others concerning:
a)	Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	176-177	a) Current assets, non-current assets, and total assets;
b)	Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;	177-179	b) Short term liabilities, long term liabilities, total liabilities;
c)	Ekuitas;	179-175	c) Equities;
d)	Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan	180-182	d) Sales/operating revenues, expenses and profit (loss), other comprehensive revenues, and total comprehensive profit (loss); and
e)	Arus kas	182-183	e) Cash flows
3)	Kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	189-190	3) The capacity to pay debts by including the computation of relevant ratios;
4)	Tingkat kolektibilitas piutang emiten atau perusahaan publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	190	4) Accounts receivable collectability of the Issuer or Public Company, including the computation of the relevant ratios;
5)	Struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure</i>) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	191	5) Capital structure and management policies concerning capital structure, including the basis for determining the said policy;

Keterangan		Halaman Page	Description	
6)	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi:	191	6)	discussion on material ties for the investment of capital goods, including the explanation on at least:
a)	Tujuan dari ikatan tersebut;	-	a)	The purpose of such ties;
b)	Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut;	-	b)	Source of funds expected to fulfill the said ties;
c)	Mata uang yang menjadi denominasi; dan	-	c)	Currency of denomination; and
d)	Langkah yang direncanakan emiten atau perusahaan publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	-	d)	Steps taken by the Issuer of Public Company to protect the position of a related foreign currency against risks;
7)	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	205-206	7)	Discussion on investment of capital goods which was realized in the last fiscal year, at least include:
a)	Jenis investasi barang modal;	191-192	a)	Type of investment of capital goods;
b)	Tujuan investasi barang modal; dan	191-192	b)	Objective of the investment of capital goods; and
c)	Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	191-192	c)	Value of the investment of capital goods;
8)	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	192	8)	Material Information and facts that occurring after the date of the accountant's report (if any);
9)	Prospek usaha dari emiten atau perusahaan publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	192-193	9)	Information on the prospects of the Issuer or the Company in connection with industry, economy in general, accompanied with supporting quantitative data if there is a reliable data source;
10)	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	193-194	10)	Comparison between target/projection at beginning of year and result (realization), concerning:
a)	Pendapatan/penjualan;	194	a)	Income/sales;
b)	Laba (rugi);	194	b)	Profit (loss);
c)	Struktur modal (<i>capital structure</i>);	194	c)	Capital structure; or
d)	Kebijakan dividen; atau	194	d)	Dividend policy; or
e)	Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	194	e)	Others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;
11)	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	194-195	11)	Target/projection at most for the next one year of the Issuer or Public Company, concerning:
a)	Pendapatan/penjualan;	195	a)	Income/sales;
b)	Laba (rugi);	195	b)	Profit (loss);
c)	Struktur modal (<i>capital structure</i>);	195	c)	Capital structure; or
d)	Kebijakan dividen; atau	195	d)	Dividend policy;
e)	Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	195	e)	Or others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;
12)	Aspek pemasaran atas barang dan/ atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	195-197	12)	Marketing aspects of the company's products and/or services the Issuer or Public Company, among others marketing strategy and market share;

Keterangan		Halaman Page	Description
13)	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit:	197-198	13) Description regarding the dividend policy during the last 2 (two) fiscal years, at least:
a)	Kebijakan dividen;	197	a) Dividend policy;
b)	Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;	198	b) The date of the payment of cash dividend and/or date of distribution of non-cash dividend;
c)	Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan	198	c) Amount of cash per share (cash and/or non cash); and
d)	Jumlah dividen per tahun yang dibayar;	198	d) Amount of dividend per year paid;
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	198	Disclosure of information can be presented in tabular form. In the event that the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.
14)	Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan:	203	14) Use of proceeds from Public Offerings, under the condition of:
a)	Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan	203	a) during the year under review, on which the Issuer has the obligation to report the realization of the use of proceeds, then the realization of the cumulative use of proceeds until the year end should be disclosed; and
b)	Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	-	b) In the event that there were changes in the use of proceeds as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority on the Report of the Utilization of Proceeds from Public Offering, then Issuer should explain the said changes;
15)	Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi Afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:	199	15) Material information (if any), among others concerning investment, expansion, divestment, acquisition, debt/capital restructuring, transactions with related parties and transactions with conflict of interest that occurred during the year under review, among others include:
a)	Tanggal, nilai, dan objek transaksi;	199	a) Transaction date, value, and object;
b)	Nama pihak yang melakukan transaksi;	199-201	b) Name of transacting parties;
c)	Sifat hubungan Afiliasi (jika ada);	199-201	c) Nature of related parties (if any);
d)	Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan	202	d) Description of the fairness of the transaction; and
e)	Pemenuhan ketentuan terkait;	202	e) Compliance with related rules and regulations;
f)	dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:	202	f) In the event that there is an affiliation relationship, apart from disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information:

Keterangan	Halaman Page	Description
1) Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>arms-length principle</i>); dan	202	1) A statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle; and
2) Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>arms-length principle</i>);	202	2) The role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle;
g) Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.	203	g) For affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out to generate operating income, and run regularly, repeatedly, and/or continuously;
h) Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut;	-	h) For disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added;
i) Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	-	i) In the event that there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, then this shall be disclosed;
16) Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	203-212	16) Changes in regulation which have a significant effect on the Issuer or Public Company and impacts on the company (if any); and
17) Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);	213	17) Changes in the accounting policy, rationale and impact on the financial statement (if any);

Keterangan		Halaman Page	Description	
g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik		330	g. Corporate Governance of the Issuer or Public Company	
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:			Corporate Governance of the Issuer or Public Company contains at least:	
1)	RUPS, paling sedikit memuat:	369	1)	GMS, at least contains:
a)	Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:		a)	Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior to the fiscal year include:
1)	keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan	373-390	1)	Resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year realized in the fiscal year; and
2)	keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan;	391-395	2)	Resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that have not been realized and the reasons for not realizing them;
b)	dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	372	b)	In the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;
2)	Direksi, mencakup antara lain:	436	2)	The Board of Directors, covering:
a)	Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;	437-442; 447-449	a)	The tasks and responsibilities of each member of the Board of Directors;
b)	Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Direksi;	442	b)	Statement that the Board of Directors has already have board manual or charter;
c)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk tingkat kehadiran dalam RUPS;	484-497; 497-501	c)	Policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS;
d)	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:		d)	Training and/or competency development of members of the Board of Directors:
(1)	kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan	453; 451-452	(1)	Policies for training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and
(2)	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada);	453	(2)	Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any);

Keterangan	Halaman Page	Description
e) penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:	455	e) The Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the Board of Directors' duties for the fiscal year shall at least contain:
(1) prosedur penilaian kinerja; dan	455	(1) Performance appraisal procedures; and
(2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	453	(2) The criteria used are performance achievements during the fiscal year, are competence and attendance at meetings; and
f) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	-	f) In the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.
3) Dewan Komisaris, mencakup antara lain:	414	3) The Board of Commissioners, among others include:
a) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;	415-418	a) Duties and responsibilities of the Board of Commissioners;
b) Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Dewan Komisaris;	418-419	b) Statement that the Board of Commissioner has already have the board manual or charter;
c) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk tingkat kehadiran dalam RUPS;;	482-484; 497-501	c) Policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings including attendance at the GMS;
d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	429	d) Training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:
(1) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan	429; 426	(1) Policy on competency training and/or development of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and
(2) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada);	429	(2) Competency training and/or development attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any);
e) penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit memuat:	463; 467	e) The assessment on the performance of the Board of Directors and Board of Commissioners and the implementation, at least covering:
(1) Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;	463; 467	(1) procedure for the implementation of performance assessment;

Keterangan		Halaman Page	Description
(2)	Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	464-466; 468-470	(2) Criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings; and
(3)	Pihak yang melakukan penilaian;	466; 470	(3) Assessor;
f)	penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:	430	f) Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the fiscal year includes:
(1)	prosedur penilaian kinerja; dan	430	(1) Performance appraisal procedures; and
(2)	kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat;	430	(2) The criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings;
4)	Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	473	4) The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:
a)	prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan	473	a) Nomination procedure, including a brief description of the policies and process for nomination of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and
b)	prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:		b) Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others:
(1)	prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;	-	(1) Procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;
(2)	struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan	475	(2) The remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/ bonus and others; and
(3)	besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	475	(3) The amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners
5)	Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	26-30; 397	5) Sharia Supervisory Board, for Issuer or Public Company that conduct business based on sharia law, as stipulated in the articles of association, at least containing:
a)	nama;	114-119; 402	a) name;
b)	dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah;	114-119; 402	b) Legal basis for the appointment of the sharia supervisory board;
c)	periode penugasan dewan pengawas syariah;	114-119; 402	c) Period of assignment of the sharia supervisory board;

Keterangan		Halaman Page	Description
d)	tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; dan	398-340	d) duty and responsibility of Sharia Supervisory Board; and
e)	frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	406-412	e) frequency and procedure in providing advice and suggestion, as well as the compliance of Sharia Principles by the Issuer or Public Company in the Capital Market;
6)	Komite Audit, mencakup antara lain:	504	6) Audit Committee, among others covering:
a)	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	508-511	a) Name and position in the committee;
b)	Usia;	508-511	b) Age;
c)	Kewarganegaraan;	508-511	c) Citizenship;
d)	Riwayat pendidikan;	508-511	d) Education background;
e)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	508-511	e) History of position; including:
(1)	Dasar hukum untuk pengangkatan sebagai anggota komite;	508-511	(1) Legal basis for appointment as committee member;
(2)	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	508-511	(2) Dual position, as member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any); and
(3)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	508-511	(3) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
f)	Periode dan masa jabatan anggota Komite Audit;	508-511	f) Period and terms of office of the member of Audit Committee;
g)	Pernyataan independensi Komite Audit;	511	g) statement of independence of the Audit Committee;
h)	Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	514	h) Training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);
i)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut;	512-514	i) Policies and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members in those meetings; and
j)	Pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Komite Audit;	515	j) the activities of the Audit Committee in the year under review, in accordance with the Audit Committee Charter;
7)	Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	516	7) The nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least containing:
a)	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	520-523	a) Name and position in committee membership;
b)	Usia;	520-523	b) Age;
c)	Kewarganegaraan;	520-523	c) Nationality;
d)	Riwayat pendidikan;	520-523	d) Educational history;
e)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	520-523	e) Position history, including information on:
(1)	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	520-523	(1) Legal basis for appointment as committee member;

Keterangan		Halaman Page	Description
(2)	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	520-523	(2) Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and
(3)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	520-523	(3) Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;
f)	Periode dan masa jabatan anggota komite;	519	f) Period and term of office of the committee members;
g)	Pernyataan independensi komite;	523-24	g) Statement of committee independence;
h)	Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	525	h) Training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);
i)	Uraian tugas dan tanggung jawab;	518-519	i) Description of duties and responsibilities;
j)	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite;	516	j) A statement that it has a guideline or charter;
k)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;	524-525	k) Policies and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting;
l)	uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan	526	l) Brief description of the implementation of activities in the fiscal year; and
m)	dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:	-	m) In the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:
(1)	alasan tidak dibentuknya komite; dan	-	(1) Reasons for not forming the committee; and
(2)	pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;	-	(2) The party carrying out the nomination and remuneration function;
8)	Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	527; 541-547; 548-591	8) Other committees owned by Issuers or Public Companies in order to support the functions and tasks of the Board of Directors (if any) and / or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, the least contains:
a)	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	531-536	a) Name and position in the Committee;
b)	Usia;	531-536	b) Age;
c)	Kewarganegaraan;	531-536	c) Citizenship;
d)	Riwayat pendidikan;	531-536	d) Education background;
e)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	531-536	e) History of position, including:
(1)	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	531-536	(1) Legal basis for the appointment as member of the committee;

Keterangan		Halaman Page	Description
(2)	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	531-536	(2) Dual position, as member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any); and
(3)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	531-536	(3) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
f)	Periode dan masa jabatan anggota komite;	531	f) Period and terms of office of the member of Audit Committee;
g)	Pernyataan independensi komite;	536-537	g) Statement of committee independence;
h)	Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	539-540	h) Training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any); and
i)	Uraian tugas dan tanggung jawab;	530	i) Description of duties and responsibilities;
j)	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite;	528-529	j) A statement that the committee has had guidelines or charters;
k)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;	538-539	k) Policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at the meeting; and
l)	uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan	540	l) A brief description of the committee's activities for the fiscal year;
9)	Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain:	592	9) Corporate Secretary, including:
a)	nama;	592-593	a) name;
b)	domisili;	592-593	b) domicile;
c)	riwayat jabatan, meliputi informasi:	592-593	c) history of position, including:
(1)	dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan	592-593	(1) legal basis for the appointment as Corporate Secretary; and
(2)	pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	592-593	(2) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
d)	riwayat pendidikan;	592-593	d) education background;
e)	pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; dan	596	e) education and/or training during the year under review; and
f)	uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku;	594-595	f) brief description on the implementation of duties of the Corporate Secretary in the year under review;
10)	Unit Audit Internal, mencakup antara lain:	597	10) Internal Audit Unit, among others including:
a)	Nama kepala Unit Audit Internal;	600-601	a) Name of Head of Internal Audit Unit;
b)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	600-601	b) History of position, including:

Keterangan		Halaman Page	Description
(1)	Dasar hukum penunjukan sebagai Kepala Audit Internal; dan	600-601	(1) Legal basis for the appointment as Head of Internal Audit Unit; and
(2)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	600-601	(2) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
c)	Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);	; 599	c) Qualification or certification as internal auditor (if any);
d)	Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku;		d) Education and/or training during the year under review;
e)	Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal;	598	e) Structure and position of Internal Audit Unit;
f)	Uraian tugas dan tanggung jawab;	601	f) Description of duties and responsibilities;
g)	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Unit Audit Internal; dan	597	g) Statement that the Internal Audit Unit has already have Internal Audit Unit charter; and
h)	Uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku;	602	h) Brief description on the implementation of duty of Internal Audit Unit during the year under review;
11)	Uraian mengenai sistem pengendalian internal (<i>internal control</i>) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	603	11) Description on internal control system adopted by the Issuer or Public Company, at least covering:
a)	Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan	606-607	a) Financial and operational control, and compliance to the other prevailing rules; and
b)	Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal;	607-608	b) Review on the effectiveness of internal control systems;
c)	Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal;	608	c) Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;
12)	Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	246	12) Risk management system implemented by the company, at least includes:
a)	Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	246-262	a) General description about the company's risk management system the Issuer or Public Company;
b)	Jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan	266-326	b) Types of risk and the management; and
c)	Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	263-265	c) Review the effectiveness of the risk management system applied by the Issuer or Public Company;
d)	Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;	265	d) Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;

Keterangan		Halaman Page	Description
13)	Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi:	619	13) Legal cases that have a material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least contain:
a)	Pokok perkara/gugatan;	619-620	a) Substance of the case/claim;
b)	Status penyelesaian perkara/gugatan; dan	619-620	b) Status of settlement of case/claim; and
c)	Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;	619-620	c) Potential impacts on the condition of the Issuer or Public Company;
14)	Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	620	14) information about administrative sanctions imposed to Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, by the Capital Market Authority and other authorities during the last fiscal year (if any);
15)	Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	627	15) information about codes of conduct of the Issuer or Public Company, includes:
a)	Pokok-pokok kode etik;	627	a) Key points of the code of conduct;
b)	Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan	627-628	b) Socialization of the code of conduct and enforcement; and
c)	Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	628	c) Statement that the code of conduct is applicable for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees of the Issuer of Public Company;
16)	Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program/MSOP</i>) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock ownership program/ESOP</i>); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program/MSOP</i>) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock ownership program/ESOP</i>), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat:	198	16) A brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or program employee stock ownership (ESOP);
a)	jumlah saham dan/atau opsi;	-	a) Number of shares and/or options;
b)	jangka waktu pelaksanaan;	-	b) Implementation period;
c)	persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	-	c) Requirements for eligible employees and/or management; and
d)	harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan;	-	d) Exercise price or determination of exercise price;
17)	Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai:		17) A brief description of the information disclosure policy regarding:

Keterangan		Halaman Page	Description
a)	Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan	459	a) Share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and
b)	Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud;	459	b) Implementation of the policy;
18)	Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi:	636	18) Description of whistleblowing system at the Issuer or Public Company (if any), among others include:
a)	Cara penyampaian laporan pelanggaran;	636-637	a) Mechanism for violation reporting;
b)	Perlindungan bagi pelapor;	637	b) Protection for the whistleblower;
c)	Penanganan pengaduan;	637	c) Handling of violation reports;
d)	Pihak yang mengelola pengaduan; dan	637	d) Unit responsible for handling of violation report; and
e)	Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi:	637	e) Results from violation report handling, at least includes:
(1)	Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan	-	(1) Number of complaints received and processed during the fiscal year; and
(2)	Tindak lanjut pengaduan;	-	(2) Follow up of complaints;
19)	Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	629	19) A description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing:
a)	program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i> , suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan	629-532	a) Programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in Issuers or Public Companies; and
b)	pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	-	b) Anti-corruption training/ socialization to employees of Issuers or Public Companies;
20)	Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	348-365	20) Implementation of the Guidelines of Corporate Governance for Public Companies for Issuer issuing Equity-based Securities or Public Company, including:
a)	pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau	348-365	a) statement regarding recommendation that have been implemented; and/or
b)	penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada);	-	b) description of recommendation that have not been implemented, along with the reason and alternatives of implementation (if any);
h.	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik	668-671	h. Social and Environmental Responsibility of the Issuer or Public Company

Keterangan		Halaman Page	Description
1)	Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	Buku Terpisah Separate Book	1) The information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, at least includes:
a)	penjelasan strategi keberlanjutan;	-	a) Explanation of the sustainability strategy;
b)	ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup);	-	b) Overview of sustainability aspects (economic, social, and environmental);
c)	profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	-	c) Brief profile of the Issuer or Public Company;
d)	penjelasan Direksi;	-	d) Explanation of the Board of Directors;
e)	tata kelola keberlanjutan;	-	e) Sustainability governance;
f)	kinerja keberlanjutan;	-	f) Sustainability performance;
g)	verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada;	-	g) Written verification from an independent party, if any;
h)	lembar umpan balik (<i>feedback</i>) untuk pembaca, jika ada; dan	-	h) Feedback sheet for readers, if any; and
i)	anggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya;	-	i) The response of the Issuer or Public Company to the previous year's report feedback;
2)	Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	√	2) The Sustainability Report as referred to in number 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as contained in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;
3)	Informasi Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) pada angka 1) dapat:	√	3) Information on the Sustainability Report in number 1) can:
a)	diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau	√	a) Disclosed in other relevant sections outside the Social and Environmental Responsibility section, such as the Directors' explanation regarding the Sustainability Report disclosed in the section related to the Directors' Report; and/or

Keterangan		Halaman Page	Description
b)	merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik;	√	b) Refers to other sections outside the Social and Environmental Responsibility section by still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as the profile of the Issuer or Public Company;
4)	Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan;	√	4) The Sustainability Report as referred to in number 1) is an inseparable part of the Annual Report but can be presented separately from the Annual Report;
5)	Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus:	√	5) In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report must:
a)	memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan	√	a) Contains all the information as referred to in number 1); and
b)	disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	√	b) Prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;
6)	Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan	√	6) In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, then the Social and Environmental Responsibility section contains information that information on Social and Environmental Responsibility has been disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report; and
7)	Penyampaian Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.	√	7) Submission of the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report must be submitted together with the Annual Report.

Keterangan		Halaman Page	Description	
i	Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit	672	i	Audited Annual Financial Statement
	Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan berkala Perusahaan Efek dalam hal Emiten merupakan Perusahaan Efek; dan	672		Financial Statements included in Annual Report should be prepared in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia and audited by an Accountant. The said financial statement should be included with statement of responsibility for financial report as stipulated in the legislations in the Capital Markets sector governing the responsibility of the Board of Directors on the financial report or the legislations in the Capital Markets sector governing the periodic reports of securities company in the event the Issuer is a Securities Company; and
j	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan	62-63	j	Letter of Statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the Responsibility for Annual Reporting
	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	62-63		Letter of statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting should be prepared according to the format of letter of statement of member of Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting as attached in the Attachment, which is an integral part of this Circulation Letter of the Financial Services Authority.

2024

Laporan Tahunan
Annual Report

Menavigasi Perubahan dalam Jalan Hijrah

Navigating Change within 'Hijrah' Path

 **Bank Muamalat**
Pertama Murni Syariah

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Muamalat Tower
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12940
T: (+62 21) 8066 6000
F: (+62 21) 8066 6001

www.bankmuamalat.co.id